

# PERUBAHAN

# RKPD DIY

Rencana Kerja Pemerintah Daerah

# TAHUN 2025



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH**

ꦧꦢꦤ꧀ꦥꦺꦫꦺꦤꦕꦤꦤ꧀ꦥꦼꦩꦧꦁꦤ꧀ꦫꦶꦱꦺꦠ꧀ꦏꦺꦴꦲꦲꦶꦠꦶꦩꦺꦮꦪꦺꦴꦏꦂꦠꦏꦺꦴꦲꦲꦶꦠꦶꦩꦺꦮꦪꦺꦴꦏꦂꦠꦏꦺꦴꦲꦲꦶꦠꦶꦩꦺꦮꦪꦺꦴꦏꦂꦠꦏꦺꦴꦲꦲꦶꦠꦶꦩꦺꦮꦪꦺꦴꦏꦂꦠ

**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

ꦠꦺꦫꦏꦺꦴꦲꦲꦶꦠꦶꦩꦺꦮꦪꦺꦴꦏꦂꦠ



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 20 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan guna mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap rencana kerja pemerintah daerah tahun 2025 terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, serta penyesuaian anggaran ke dalam perubahan rencana kerja pemerintah daerah Tahun 2025;
  - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 perlu menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 paling lambat minggu ketiga bulan Mei;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah adalah Perubahan terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
3. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan Renja PD adalah perubahan terdapat dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
4. Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat P-KUA adalah perubahan terhadap dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat P-PPAS adalah perubahan terhadap program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.

6. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
7. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
9. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.

#### Pasal 2

- (1) Perubahan RKPD Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
  - Bab I : Pendahuluan.
  - Bab II : Evaluasi Triwulan I Tahun Berkenaan.
  - Bab III : Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah.
  - Bab IV : Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah.
  - Bab V : Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah.
  - Bab VI : Penutup.
- (2) Rincian Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 3

- (1) Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat perubahan terhadap:
  - a. rancangan kerangka ekonomi Daerah;
  - b. rancangan keuangan Daerah; dan
  - c. rencana kerja dan pendanaan.
- (2) Pelaksanaan Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Akhir Perubahan Renja PD Tahun 2025.

#### Pasal 4

Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi dasar penyusunan Rancangan P-KUA dan Rancangan P-PPAS anggaran pendapatan dan belanja daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2025.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 28 Mei 2025

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 28 Mei 2025

SEKRETARIS DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

BENY SUHARSONO

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2025 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. Kepala Biro Hukum,



Hary Setiawan, S.H., M.H.



**PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
TAHUN 2025**

---

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB I    PENDAHULUAN .....	I-1
I.1    Latar Belakang .....	I-1
I.2    Tujuan .....	I-3
I.3    Dasar Pertimbangan Perubahan .....	I-3
I.4    Dasar Hukum Penyusunan.....	I-3
I.5    Sistematika Dokumen Perubahan RKPD .....	I-8
BAB II    EVALUASI HASIL TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN .....	II-1
II.1    Evaluasi Realisasi Capaian Tema Pembangunan Daerah Tahun 2025 s.d Triwulan I Tahun 2025 .....	II-1
II.2    Evaluasi Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama (Indikator Tujuan dan Sasaran) Pemerintah Daerah DIY s.d Triwulan I Tahun 2025 .....	II-3
II.2.a Evaluasi Realisasi Capaian Indikator Kinerja Tujuan Pemerintah Daerah DIY s.d Triwulan I Tahun 2025 .....	II-3
II.2.a.1 Terwujudnya kualitas hidup-kehidupan-penghidupan masyarakat, diukur dengan indikator: .....	II-4
II.2.a.2 Mengecilnya Ketimpangan Wilayah – Indeks Williamson.....	II-7
II.2.a.3 Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik – Indeks Reformasi Birokrasi.....	II-8
II.2.a.4 Terwujudnya lingkungan hidup yang lebih baik – Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) .....	II-11
II.2.a.5 Kesimpulan Terhadap Hasil Evaluasi Capaian Indikator Tujuan...II- 14	
II.2.b Capaian Indikator Kinerja Sasaran Pemda DIY Tahun 2025 .....	II-14
II.2.b.1 Semakin kecilnya tingkat kemiskinan - Angka Kemiskinan .....	II-15
II.2.b.2 Penghidupan ekonomi yang layak .....	II-18
II.2.b.3 Kualitas SDM Yogyakarta yang dapat diandalkan .....	II-23
II.2.b.4 Meningkatnya kapasitas ekonomi pada kawasan belum maju – Kontribusi PDRB Kawasan Belum Maju terhadap Keseluruhan PDRB DIY .....	II-30
II.2.b.5 Meningkatnya <i>Good Governance</i> .....	II-31

II.2.b.6	Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang – Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang.....	II-36
II.2.b.7	Menurunnya risiko bencana – Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) DIY .....	II-37
II.2.b.8	Kesimpulan Terhadap Hasil Evaluasi Capaian Indikator Sasaran	II-39
II.3	Capaian Indikator Kinerja Daerah s.d. Triwulan I Tahun 2025 ..	II-39
II.4	Evaluasi Hasil Pelaksanaan Program Pemerintah Daerah DIY ...	II-57
II.5	Evaluasi Hasil Pelaksanaan Program/Sub Kegiatan RKPD DIY sampai dengan Triwulan I, 2025.....	II-61
II.5.1	ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA OUTPUT DAN OUTCOME PERANGKAT DAERAH.....	II-71
II.5.2	Kesimpulan Kinerja Perangkat Daerah.....	II-111
II.6	Kinerja Urusan Pemerintahan .....	II-114
II.7	Permasalahan Pembangunan Daerah Provinsi DIY .....	II-552
II.7.1	Kemiskinan .....	II-552
<b>BAB III</b>	<b>KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH.....</b>	<b>III-1</b>
III.1	Kerangka Perubahan Ekonomi Daerah.....	III-1
III.1.1	Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi.....	III-2
III.1.2	Proyeksi Inflasi.....	III-3
III.1.3	Proyeksi Tingkat Pengangguran Terbuka .....	III-3
III.1.4	Proyeksi Kemiskinan .....	III-3
III.1.5	Proyeksi Ketimpangan Antar Wilayah (Indeks Williamson)....	III-3
III.1.6	Proyeksi Ketimpangan Pendapatan (Indeks Gini).....	III-4
III.1.7	Proyeksi Indeks Pembangunan Manusia .....	III-4
III.2	Kerangka Perubahan Keuangan Daerah.....	III-4
III.2.1	Proyeksi Perubahan Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan .....	III-5
III.2.2	Kebijakan Perubahan Pendapatan Daerah.....	III-12
III.2.3	Kebijakan Perubahan Belanja Daerah .....	III-18
III.2.4	Kebijakan Perubahan Pembiayaan Daerah.....	III-23
<b>BAB IV</b>	<b>SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH .....</b>	<b>IV-1</b>
IV.1	Penyesuaian Sasaran Pembangunan Daerah .....	IV-1
IV.2	Prioritas Pembangunan Daerah.....	IV-2
IV.3	Penyelarasan Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Nasional.....	IV-3
<b>BAB V</b>	<b>RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH.....</b>	<b>V-1</b>

V.1	Target Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD).....	V-1
V.2	Rencana Program, Kegiatan, Dan Sub Kegiatan Dalam Perubahan RKPD Tahun 2025.....	V-11
BAB VI	PENUTUP.....	VI-1

## DAFTAR TABEL

Tabel II-1	Capaian Tema Pembangunan diukur dari Realisasi Indikator Sasaran RPJMD DIY 2022-2027 sampai dengan Triwulan I, 2025 .....	II-2
Tabel II-2	Capaian Indikator Kinerja Tujuan Pemda DIY Tahun 2025 .....	II-3
Tabel II-3	Target dan Realisasi Indikator Tujuan Angka <i>Inclusive Growth Index</i> (IGI) Tahun 2025 serta Capaian Tahun 2024 .....	II-5
Tabel II-4	Target dan Realisasi Indikator Tujuan Indeks Kebahagiaan Tahun 2021 serta Capaian 2025, Triwulan I .....	II-6
Tabel II-5	Target dan Realisasi Indikator Tujuan Indeks Williamson Tahun 2024 serta Capaian Tahun 2025 Triwulan I .....	II-8
Tabel II-6	Target dan Realisasi Indikator Tujuan Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2023 serta Capaian Tahun 2024 .....	II-9
Tabel II-7	Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah DIY .....	II-9
Tabel II-8	Kategori Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi .....	II-10
Tabel II-9	Kategori Nilai IKLH secara Nasional .....	II-11
Tabel II-10	Target dan Realisasi IKLH DIY 2022 - 2024 .....	II-12
Tabel II-11	Target dan Realisasi Indikator Tujuan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2024 serta Capaian Tahun 2023 .....	II-12
Tabel II-12	Target dan Realisasi Komponen IKLH DIY Tahun 2024 .....	II-12
Tabel II-13	Capaian Kinerja Sasaran Pemda TW I Tahun 2025 .....	II-14
Tabel II-14	Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2020 - 2024 (%) .....	II-17
Tabel II-15	Target dan Capaian Indikator Sasaran Angka Kemiskinan Tahun 2025 serta Tahun 2024 .....	II-17
<b>Tabel II-16</b>	<b>Target dan Realisasi Indikator Sasaran Angka Pertumbuhan Ekonomi/PDRB Tahun 2025 serta Tahun 2024 .....</b>	<b>II-18</b>
Tabel II-17	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Tahun 2023-2024 (y-o-y) Triwulan IV .....	II-19
Tabel II-18	Target dan Realisasi Kinerja Indikator Sasaran Pendapatan per Kapita Tahun 2025 serta Tahun 2024 .....	II-20
Tabel II-19	Target dan Capaian Indikator Program Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tahun 2025 serta Tahun 2024 .....	II-20
Tabel II-20	Target dan Realisasi Kinerja Indikator Sasaran Inflasi di DIY Tahun 2024-2025 .....	II-23
Tabel II-21	Target dan Realisasi Indikator Sasaran Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2025 serta Tahun 2024 .....	II-24
Tabel II-22	IPM DIY dan Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2020-2024 .....	II-26
Tabel II-23	IPM Kabupaten/ Kota di DIY menurut Komponen Tahun 2024 ..	II-27

Tabel II-24	Target dan Realisasi Indikator Sasaran Indeks Pembangunan Kebudayaan Tahun 2025 serta Tahun 2024 .....	II-28
Tabel II-25	Perkembangan Nilai IPK Tahun 2019-2023 .....	II-29
Tabel II-26	Target dan Realisasi Indikator Sasaran Kontribusi PDRB Kawasan Belum Maju terhadap Keseluruhan PDRB DIY Tahun 2025 serta Tahun 2024.....	II-31
Tabel II-27	PDRB ADHK Kab/Kota di DIY Tahun 2024 .....	II-31
Tabel II-28	Target dan Realisasi Indikator Sasaran Opini BPK Tahun 2025 serta Tahun 2024.....	II-32
Tabel II-29	Target dan Realisasi Indikator Sasaran Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP) Tahun 2024 serta Tahun 2023 .....	II-33
Tabel II-30	Rincian hasil evaluasi, nilai per komponen dalam Penilaian AKIP Tahun 2023-2024 .....	II-33
Tabel II-31	Target dan Realisasi Indikator Sasaran Indeks Demokrasi Indonesia Tahun 2024 serta Tahun 2023 .....	II-35
Tabel II-32	Capaian Indeks Demokrasi Indonesia DIY.....	II-35
Tabel II-33	Target dan Realisasi Indikator Sasaran Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Tahun 2025 serta Tahun 2024 .....	II-37
Tabel II-34	Target dan Realisasi Indikator Kinerja Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) DIY Tahun 2024 serta Tahun 2023.....	II-38
Tabel II-35	Capaian Indikator Kinerja Program Pembangunan Daerah DIY s.d. Triwulan I Tahun 2025 .....	II-57
Tabel II-36	Rekapitulasi Capaian Kinerja s.d Triwulan I 2025 .....	II-63
Tabel II-37	Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2025 Sampai dengan Triwulan I.....	II-114
Tabel III-1	Perbandingan Proyeksi Indikator Ekonomi Makro dalam RKPD 2025 dan Perubahan RKPD 2025.....	III-2
Tabel III-2	Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun 2023-2025 .....	III-9
Tabel IV-1	Sasaran Pembangunan Tahun 2025 .....	IV-2
Tabel IV-2	Penyelarasan Prioritas Daerah dengan Tema dan Sasaran Pembangunan Daerah .....	IV-3
Tabel IV-3	Interkoneksi Prioritas Daerah dengan Asta Cita / Prioritas Nasional Tahun 2025.....	IV-4
Tabel IV-4	Dukungan Program Perangkat Daerah terhadap Asta Cita / Prioritas Nasional Tahun 2025 .....	IV-5
Tabel IV-5	Dukungan Program Daerah terhadap Program Strategis Nasional dalam Perubahan RKPD Tahun 2025.....	IV-8
Tabel IV-6	Penyelarasan Kinerja Tahun 2025 (Indikator Sasaran Pembangunan) Terhadap RPJPD DIY Tahun 2025-2045 dan RPJMN Tahun 2025-2029.....	IV-15

Tabel IV-7	Penyelarasan Kinerja Tahun 2025 (Indikator Utama Pembangunan) Terhadap RPJPD DIY Tahun 2025-2045 dan RPJMN Tahun 2025-2029.....	IV-16
Tabel IV-8	Penyelarasan Arah Kebijakan RPJMN Tahun 2025-2029 dalam RPJMD DIY Tahun 2022-2027 .....	IV-20
Tabel V-1	Target Indikator Kinerja Utama (IKU).....	V-1
Tabel V-2	Target Indikator Kinerja Daerah (IKD) .....	V-1
Tabel V-3	Dukungan Prioritas Daerah terhadap Program .....	V-12
Tabel V-4	Tabel Rekapitulasi Jumlah Program, Kegiatan, dan Subkegiatan serta Pagu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025.....	V-17
Tabel V-5	Rencana Program dan Kegiatan pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2025.....	V-23

## DAFTAR GAMBAR

Gambar II-1 Perkembangan <i>Inclusive Growth Index</i> (IGI) Tahun 2020-2024.....	II-5
Gambar II-2 Indeks Kebahagiaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014, 2017, dan 2021 .....	II-6
Gambar II-3 Indeks Williamson DIY Tahun 2020-2025 .....	II-8
Gambar II-4 Persentase Penduduk Miskin Menurut Wilayah, Maret 2019 s.d. September 2024 .....	II-16
Gambar II-5 Grafik Persentase Kemiskinan 2013 dan 2024 DIY dan Nasional ....	II-17
Gambar II-6 Pendapatan per Kapita DIY Tahun 2020-2024 (Juta Rupiah).....	II-19
Gambar II-7 Perkembangan TPT DIY dan Nasional tahun 2020 – 2024 (%)... ..	II-21
Gambar II-8 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) DIY dan Indonesia, 2020-2024 .....	II-24
Gambar II-9 Perkembangan Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH) DIY Tahun 2020-2024.....	II-25
Gambar II-10 Perkembangan HLS dan RLS DIY Tahun 2020-2024.....	II-25
Gambar II-11 Pengeluaran Riil per Kapita yang Disesuaikan DIY (Ribu Rupiah) 2020-2024.....	II-26
Gambar II-12 Perkembangan Nilai AKIP Pemda DIY Tahun 2011-2024.....	II-33

# **BAB I      PENDAHULUAN**

## **I.1 Latar Belakang**

Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) DIY Tahun 2025 disusun dengan mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DIY Tahun 2022-2027 dan menjadi tahun pelaksanaan ketiga dari dokumen perencanaan jangka menengah tersebut. Perubahan RKPD DIY Tahun 2025 masuk ke dalam tahun awal tahapan lima tahun pertama dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) DIY Tahun 2025 - 2045. Penekanan pada tahun pertama ini terletak pada pengembangan sektor unggulan daerah yang kreatif dan inovatif. Pemikiran-pemikiran baru didorong untuk mencetuskan solusi, ide, gagasan, cara, ataupun produk sebagai solusi permasalahan serta mampu memproses atau melakukan sesuatu untuk memberikan nilai tambah dengan cara baru ataupun berbeda. Harapannya, pembangunan daerah akan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif sehingga peningkatan kesejahteraan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat.

Pada struktur dan tatanan pembangunan tahunan, dokumen perencanaan daerah termuat dalam RKPD yang memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. RKPD memuat panduan operasional untuk menjalankan program dan kegiatan pembangunan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah melalui pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan tahunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Sebagai bentuk tanggung jawab, pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berkewajiban untuk melaksanakan perencanaan pembangunan untuk setiap tahapan pembangunan.

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta, maka perencanaan tingkat operasional pelaksanaan pembangunan ini dilakukan untuk memberikan arah terhadap kegiatan pembangunan yang hendak dilaksanakan serta memberikan kepastian operasionalisasi dan keterkaitan terhadap peran masing-masing misi yang telah ditetapkan. Perencanaan pembangunan Tahun 2025 telah disusun pada Tahun 2024 melalui Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 dan telah menjadi pedoman di dalam menyusun dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah DIY Nomor 11 Tahun 2024.

Pada tataran Nasional, adanya pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2025-2029 yang disusul dengan pelantikan Kepala Daerah serentak se-Indonesia, perlu adanya sinergi program Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden dan program-program strategis Kepala Daerah terpilih ke dalam perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025. Sejalan dengan hal tersebut, Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Dalam Surat Edaran tersebut, mengamanatkan Pemerintah Daerah DIY mengambil langkah-langkah percepatan perubahan RKPD Tahun 2025 serta menyinergikan Asta Cita ke dalam Perubahan RKPD Tahun 2025.

Seiring dengan perkembangan yang terjadi hingga pelaksanaan tahun 2025, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta memandang perlu melakukan Perubahan RKPD Tahun 2025. Perubahan tersebut selaras dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Pasal 343 ayat (1) menyatakan bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya selama tahun menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Perubahan RKPD Tahun 2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah akan menjadi dasar dari penyusunan penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (P-KUA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS) Tahun 2025. Selanjutnya, dokumen P-KUA dan P-PPAS tersebut akan disepakati dengan Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Daerah Istimewa Yogyakarta dalam bentuk Nota Kesepakatan dan menjadi acuan dalam Penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2025

## **I.2 Tujuan**

Tujuan Perubahan terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Memberikan gambaran atas perubahan asumsi-asumsi kebijakan umum APBD Tahun Anggaran 2025 ;
2. Menyesuaikan perubahan prediksi penerimaan Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah Tahun 2025;
3. Menyesuaikan penetapan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA);
4. Melakukan perubahan kebijakan belanja terkait dinamika permasalahan yang timbul di masyarakat yang perlu mendapat penanganan secara cepat dengan memperhatikan prioritas nasional, regional dan daerah.

## **I.3 Dasar Pertimbangan Perubahan**

Dasar pertimbangan dilakukannya Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025, meliputi:

1. Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan RKPD Tahun 2025 sampai dengan triwulan pertama Tahun 2025 dari masing-masing sub kegiatan;
2. Terjadinya perubahan asumsi makro ekonomi yang telah disepakati pada Penyusunan APBD Tahun 2025 terhadap kemampuan fiskal daerah;
3. Kebutuhan untuk melakukan penyesuaian sasaran dan hasil yang harus dicapai;
4. Terjadinya perubahan kebijakan pada tingkat pusat yang berkaitan dengan keuangan daerah maupun kebijakan teknis lainnya;
5. Kebutuhan melakukan penyesuaian terhadap proyeksi belanja yang menjadi prioritas sesuai aspirasi masyarakat dan permasalahan aktual yang berkembang.

## **I.4 Dasar Hukum Penyusunan**

Penyusunan Perubahan RKPD DIY Tahun 2025 didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1955 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
  3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
  10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
  12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Tahun 2008 Nomor 52);
  13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
  14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2024 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 206;
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan

- dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
  21. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 264);
  22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5.3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
  23. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
  24. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
  25. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 13);
  26. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan sebagaimana diubah terakhir dengan Perdas No. 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 12);
  27. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan, Pelantikan, Kedudukan, Tugas Dan

- Wewenang Gubernur Dan Wakil Gubernur (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Perdas Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan, Pelantikan, Kedudukan, Tugas, dan Wewenang Gubernur Dan Wakil Gubernur (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 10);
28. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 1);
  29. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Ruang Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 5);
  30. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 4);
  31. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 8)
  32. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7);
  33. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2027 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 2);
  34. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 – 2043 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 10);
  35. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 86 Tahun 2020 tentang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 86);
  36. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2021 tentang Grand Desain Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta 2022-2042 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 131);

37. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 13);
38. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 33).

## **I.5 Sistematika Dokumen Perubahan RKPD**

Sistematika dokumen Perubahan RKPD Tahun 2025 disajikan, sebagai berikut:

### **Bab I Pendahuluan**

Bab ini memuat latar belakang, tujuan, dasar pertimbangan perubahan, dasar hukum penyusunan serta sistematika penyusunan dokumen perubahan RKPD.

### **Bab II Evaluasi Hasil Triwulan I Tahun Berkenaan**

Bab ini berisi tentang hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD Tahun 2025 sampai dengan triwulan I Tahun 2025.

### **Bab III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah**

Bab ini mencakup tentang perubahan asumsi makro ekonomi serta proyeksi perubahan kerangka keuangan daerah tahun 2025.

### **Bab IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah**

Bab ini berisi mengenai penyesuaian sasaran, tema dan prioritas pembangunan daerah.

### **Bab V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah**

Bab ini berisi rencana program prioritas daerah dalam Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2025 termasuk di dalamnya termasuk kegiatan dan sub kegiatan serta pagu anggaran Tahun 2025.

### **Bab VI Penutup**

Pada bab ini berisi kesimpulan dari penyusunan dokumen Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2025 di Daerah Istimewa Yogyakarta.

## **BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN**

Bab ini akan mendeskripsikan bagaimana hasil pembangunan sesuai tema RKPD DIY Tahun 2025 menjadi dasar terjadinya perubahan rencana sesuai peraturan perundang-undangan. Lingkup evaluasi yang dilakukan meliputi kinerja indikator tujuan dan sasaran Daerah, Program Pemda, Sasaran OPD, Program dan kegiatan/subkegiatan, kinerja urusan pemerintahan, sesuai dengan RKPD Tahun 2025. Dokumen Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) DIY Tahun 2025 merupakan pelaksanaan tahun ke-3 dari RPJMD DIY Tahun 2022-2027. Dokumen RPJMD DIY tersebut telah berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2005-2025. Merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017 pasal 343 ayat (1) bahwa Perubahan dokumen RKPD DIY Tahun 2025 dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan yang dapat menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan berdasarkan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017, pasal 349 dan 353 penyusunan rancangan akhir Perubahan RKPD DIY Tahun 2025 memuat evaluasi hasil Triwulan I (Triwulan Satu) tahun berkenaan.

### **II.1 Evaluasi Realisasi Capaian Tema Pembangunan Daerah Tahun 2025 s.d Triwulan I Tahun 2025**

RKPD DIY Tahun 2025 memiliki tema **“Pengembangan Sektor Unggulan yang Kreatif dan Inovatif menuju Pertumbuhan Ekonomi Inklusif.”** Tema ini disusun dengan mempedomani tujuan dan sasaran pembangunan dalam Dokumen RPJMD DIY Tahun 2022-2027 yang dalam perumusannya mengacu pada visi, misi, dan sasaran pokok tahap keempat Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025, dan memperhatikan dokumen rencana kerja pemerintah (RKP) Tahun 2025, serta isu-isu strategis yang aktual.

Berdasarkan tema tersebut, disusun 6 prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Penurunan tingkat kemiskinan
2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak
3. Peningkatan kualitas SDM Yogyakarta
4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)

5. Penguatan *good-governance* pada berbagai tingkatan
6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tentram.

Dalam rangka mengukur capaian dari tema pembangunan RKPDIY Tahun 2025 dapat disajikan dengan penyandingan antara tema dan prioritas daerah DIY 2025 dan sasaran RPJMD DIY 2022-2027 beserta capaian sampai dengan triwulan I, 2025 sebagai berikut.

**Tabel II-1 Capaian Tema Pembangunan diukur dari Realisasi Indikator Sasaran RPJMD DIY 2022-2027 sampai dengan Triwulan I, 2025**

No.	Tema Pembangunan	Prioritas Daerah	Sasaran	Indikator/ Satuan	Target	Realisasi
1.	"Pemerataan aksesibilitas layanan publik yang berkualitas dan Aktivitas Ekonomi berbasis Sektor Unggulan"	Penurunan tingkat kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem	1.1.1) Semakin kecilnya tingkat kemiskinan	Angka Kemiskinan (%)	9,66	10,40
				Angka Pertumbuhan Ekonomi/ PDRB (%)	5,3 - 5,8	5,03
2.		Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	1.1.2) Penghidupan ekonomi yang layak	Pendapatan per Kapita (juta Rupiah)	31,51	33,14
				Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,26 - 3,56	3,48
				Inflasi (%)	2,00 - 4,00	1,56
3.		Peningkatan Kualitas SDM Yogyakarta	1.1.3) Kualitas SDM Yogyakarta yang dapat diandalkan	Indeks Pembangunan Manusia (Indeks)	81,68	81,62
				Indeks Pembangunan Kebudayaan (Indeks)	74,98	67,90
4.		Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	2.1.1) Meningkatnya kapasitas ekonomi pada kawasan belum maju	Kontribusi PDRB Kawasan Belum Maju terhadap Keseluruhan PDRB DIY (%)	40,13	40,10
5.	Penguatan <i>Good-governance</i> pada berbagai tingkatan		3.1.1) Meningkatnya <i>Good Governance</i>	Opini BPK (Indeks)	WTP	WTP
				SAKIP	AA	AA (92,65)
				Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) (Indeks)	Tinggi (87,31-90,57)	Tinggi (83,88)

No.	Tema Pembangunan	Prioritas Daerah	Sasaran	Indikator/ Satuan	Target	Realisasi
6.		Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tentram	4.1.1) Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang (%)	83,74	82,83
			4.1.2) Menurunnya risiko bencana	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) DIY (Indeks)	108,70	102,83

Capaian-capaian terhadap tema pembangunan DIY tahun 2025 **“Pengembangan Sektor Unggulan yang Kreatif dan Inovatif menuju Pertumbuhan Ekonomi Inklusif,”** selanjutnya dideskripsikan pada ulasan evaluasi realisasi Indikator Tujuan, Sasaran, Program Pemda, Hasil Pelaksanaan Program/Sub Kegiatan RKPD DIY, dan kinerja urusan pemerintahan sampai dengan Triwulan I, 2025 pada bab ini.

## II.2 Evaluasi Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama (Indikator Tujuan dan Sasaran) Pemerintah Daerah DIY s.d Triwulan I Tahun 2025

### II.2.a Evaluasi Realisasi Capaian Indikator Kinerja Tujuan Pemerintah Daerah DIY s.d Triwulan I Tahun 2025

Berdasarkan dokumen RPJMD DIY Tahun 2022-2027 dan RKPD DIY Tahun 2025, tolok ukur dalam keberhasilan pembangunan Pembangunan Daerah DIY pada tahun 2025, diukur menggunakan 4 tujuan yang didukung 7 sasaran dengan 5 indikator tujuan. Kinerja pada Tahun 2025, capaiannya dapat disajikan dalam tabel berikut.

**Tabel II-2 Capaian Indikator Kinerja Tujuan Pemda DIY Tahun 2025**

Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Satuan	Target RPJMD Tahun 2025	Realisasi s.d. TW I Tahun 2025	% Realisasi	Keterangan
Tujuan 1. Terwujudnya kualitas hidup-kehidupan-penghidupan masyarakat	IGI ( <i>Inclusive Growth Index</i> )/Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI)	indeks	6,52	5,90*	91,90	BPS
	Indeks Kebahagiaan	indeks	73,98	71,70	96,92	BPS
Tujuan 2. Mengecilnya Ketimpangan Wilayah	Indeks Williamson	Indeks	0,438	0,4805	90,29	BPS

Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Satuan	Target RPJMD Tahun 2025	Realisasi s.d. TW I Tahun 2025	% Realisasi	Keterangan
Tujuan 3. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	A	A- (89,90)	100	Biro Organisasi
Tujuan 4. Terwujudnya lingkungan hidup yang lebih baik	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	Sedang	Sedang	100	DLHK

Sumber: Laporan Kinerja Pemda DIY TW I 2025, 2025

Uraian pencapaian dari masing-masing indikator tujuan Pemda DIY sebagaimana tersebut di atas, diinformasikan sebagai berikut.

### **II.2.a.1 Terwujudnya kualitas hidup-kehidupan-penghidupan masyarakat, diukur dengan indikator:**

#### **II.2.a.1.1 Angka *Inclusive Growth Index*/IGI (Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif)**

*Inclusive Growth Index (IGI)* digunakan untuk mengukur kualitas pertumbuhan ekonomi suatu wilayah melalui aspek pertumbuhan ekonomi, ketimpangan dan kemiskinan, serta akses dan kesempatan. *Inclusive Growth Index (IGI)* tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi secara agregat namun juga memperhatikan bagaimana manfaat pertumbuhan tersebut didistribusikan kepada berbagai kelompok masyarakat. Menurut *Asian Development Bank (ADB)*, *World Economic Forum (WEF)* dan *United Nation Development Programme (UNDP)*, *Inclusive Growth Index (IGI)* ditopang melalui tiga pilar utama, yaitu: (1) pilar pertumbuhan dan perkembangan ekonomi yang tinggi, efisien, dan berkelanjutan; 2) pilar inklusi sosial (pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan); serta 3) pilar jaring pengaman sosial (perluasan akses dan kesempatan). Pertumbuhan ekonomi inklusif menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi harus dapat meningkatkan kesempatan bagi masyarakat untuk menikmati dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan secara luas dan merata.

Nilai *Inclusive Growth Index (IGI)* berada pada rentang 1-10. Nilai indeks pada rentang 1-3 mengindikasikan kurang memuaskan, nilai indeks dengan rentang 4-7 memuaskan, dan nilai indeks pada rentang 8-10 sangat memuaskan. Capaian angka IGI DIY selama periode 2020-2024 dapat dilihat pada grafik berikut.



Ket.: Angka tahun 2020-2022 (BPS); Angka tahun 2023-2024 adalah proyeksi  
 Sumber: BPS DIY, 2025 (data diolah)

**Gambar II-1 Perkembangan Inclusive Growth Index (IGI) Tahun 2020-2024**

Nilai IGI pada rentang 2020-2024 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020 nilai IGI DIY sebesar 5,78, namun mengalami peningkatan selama 2 tahun berturut-turut, tahun 2021 dan 2022 sebesar 6,12 dan 6,24. Namun pada tahun 2023 mengalami penurunan menjadi sebesar 6,01, dan di tahun 2024 kembali mengalami penurunan menjadi 5,90. Tren penurunan nilai IGI mulai tahun 2022-2024 diikuti dengan menurunnya angka pertumbuhan ekonomi di tahun yang sama, walaupun pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan namun aspek-aspek seperti angka kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka dan inflasi cenderung menurun/membaik, sedangkan pendapatan per kapita dan indeks pembangunan manusia mengalami peningkatan. Hal tersebut menunjukkan bahwa upaya pemerintah dalam meningkatkan inklusivitas pembangunan di DIY melalui aspek tersebut sudah berjalan sesuai rencana dalam upaya mencapai target yang telah ditetapkan.

**Tabel II-3 Target dan Realisasi Indikator Tujuan Angka Inclusive Growth Index (IGI) Tahun 2025 serta Capaian Tahun 2024**

Indikator Tujuan	Satuan	Realisasi 2024	2025		
			Target	Realisasi	%Realisasi
Inclusive Growth Index (IGI)	Angka indeks	5,90	6,52	5,90*	91,90

Sumber: LKPJ Gub DIY Tahun 2024, 2025

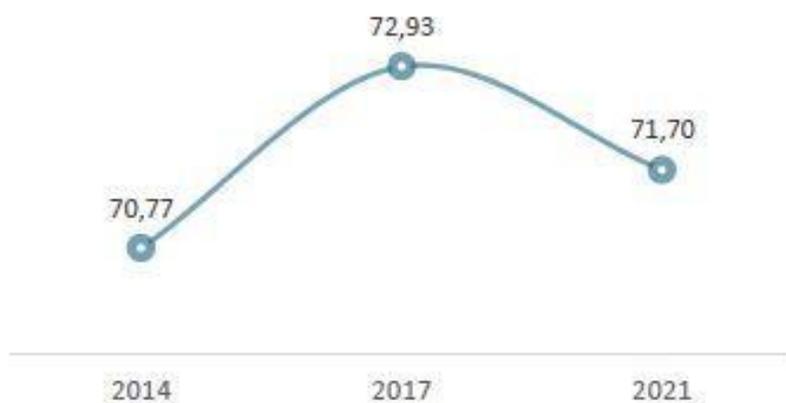
Ket.: \*) Realisasi tahun 2025 belum rilis sehingga menggunakan realisasi tahun 2024 yang merupakan angka proyeksi

Realisasi capaian IGI tahun 2025 triwulan I adalah sebesar 5,90 dari target sebesar 6,52 dengan tingkat capaian sebesar 91.90%. Realisasi tersebut masih merupakan angka proyeksi tahun 2024 karena data final belum tersedia. Ketercapaian nilai IGI didorong oleh kinerja pada aspek terkait pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan. Nilai rasio gini DIY berdasarkan rilis BPS pada September tahun 2024 sebesar 0,428 masih lebih tinggi apabila dibandingkan dengan rerata nasional sebesar 0,381. Selain itu tingkat kemiskinan DIY berdasarkan rilis BPS pada September tahun 2024 sebesar 10,40% juga masih di atas rerata nasional sebesar 8,57%. Namun demikian, capaian nilai rasio gini dan

kemiskinan tahun 2024 tersebut sudah menurun apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2023 sebesar 0,449 dan 11,04%. Tren penurunan rasio gini dan pengurangan kemiskinan di DIY didorong oleh berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah DIY diantaranya kebijakan pengendalian inflasi, pertumbuhan ekonomi yang cenderung naik, serta berbagai kebijakan dan program penanganan kemiskinan dan pemerataan pendapatan.

### II.2.a.1.2 Indeks Kebahagiaan (*Index of Happiness*)

Indeks kebahagiaan adalah angka yang menggambarkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kehidupan sehari-hari. Indeks ini merupakan hasil survei komprehensif yang menilai kebahagiaan, kesejahteraan, dan aspek keberlanjutan. Indeks kebahagiaan diukur berdasarkan beberapa indikator, seperti kesehatan, pendidikan, pekerjaan, pendapatan, keharmonisan keluarga, ketersediaan waktu luang, hubungan sosial, kondisi lingkungan, dan tingkat kriminalitas atau keamanan. Badan Pusat Statistik (BPS) telah melakukan survei pengukuran tingkat kebahagiaan beberapa kali, yaitu tahun 2014, 2017, dan terakhir pada tahun 2021.



Sumber: BPS DIY, 2025

**Gambar II-2** Indeks Kebahagiaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014, 2017, dan 2021

**Tabel II-4** Target dan Realisasi Indikator Tujuan Indeks Kebahagiaan Tahun 2021 serta Capaian 2025, Triwulan I

Indikator Tujuan	Satuan	Realisasi 2021	2025		
			Target	Realisasi	% Realisasi
Indeks Kebahagiaan	Angka indeks	71,70*	73,98	71,70*	96,92

Ket.: \*) angka rilis terakhir BPS tahun 2021

Sumber: BPS DIY, 2025

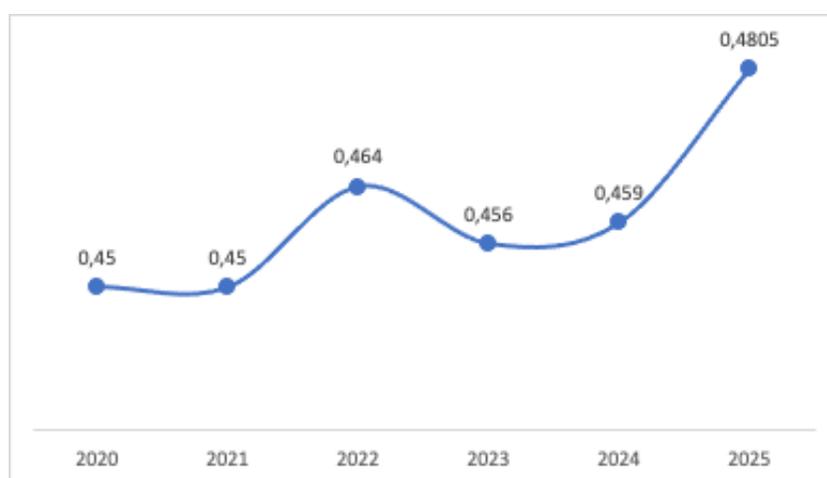
Indeks Kebahagiaan tahun 2025 triwulan I tidak dirilis, maka angka realisasi menggunakan data terakhir Indeks Kebahagiaan tahun 2021 sebesar 71,70. Data tersebut menunjukkan bahwa realisasi di bawah target sebesar 73,98 dengan persentase realisasi sebesar 96,92%.

Meskipun belum mencapai target, angka ini mencerminkan adanya peningkatan kualitas hidup masyarakat DIY secara keseluruhan di mana DIY memiliki capaian Indeks Kebahagiaan pada tahun 2021 lebih tinggi dari rata-rata nasional (71,49) berada di peringkat ke-23 dari 34 provinsi (BPS, 2021).

Indeks kebahagiaan DIY berdasarkan hasil Survei Pengukuran Tingkat Kebahagiaan (SPTK), ada tiga dimensi yang diukur yakni kepuasan hidup (*life satisfaction*), perasaan (*affect*), dan makna hidup (*eudaimonia*). Jika dibandingkan antara Indeks Kebahagiaan tahun 2017 terhadap Indeks Kebahagiaan tahun 2021 terjadi penurunan dimensi Perasaan (*Affect*) akibat tekanan ekonomi, kesehatan, dan keterbatasan sosial. Meskipun dimensi Kepuasan Hidup masih cukup baik, ketidakpuasan dalam aspek pendidikan, pekerjaan, pendapatan, dan kondisi tempat tinggal menunjukkan tantangan dalam kesejahteraan pribadi masyarakat. Pemerintah DIY terus berupaya untuk meningkatkan pembangunan dalam aspek keamanan, peningkatan program kesejahteraan sosial, serta pembangunan infrastruktur secara merata sampai ke wilayah perdesaan, meningkatkan partisipasi pendidikan serta program-program untuk peningkatan pendapatan serta pengelolaan lingkungan yang lebih baik agar Indeks Kebahagiaan DIY semakin baik pada masa mendatang.

### II.2.a.2 Mengecilnya Ketimpangan Wilayah – Indeks Williamson

Kepemilikan sumber daya yang berbeda maupun kondisi geografis yang bervariasi antar wilayah menyebabkan kesenjangan secara umum. Salah satu pendekatan yang digunakan untuk mengukur tingkat kesenjangan ekonomi antar-wilayah kabupaten/kota di DIY, yaitu Indeks Williamson (dihitung dengan menggunakan PDRB per kapita yang berkaitan dengan jumlah penduduk per daerah). Indeks Williamson merupakan koefisien persebaran (*coefficient of variation*) dari rata-rata nilai sebaran dihitung berdasarkan estimasi dari nilai-nilai PDRB dan penduduk daerah yang berada pada lingkup wilayah yang dikaji dan dianalisis. Pada gambar berikut ini menunjukkan perkembangan nilai Indeks Williamson di DIY dari tahun ke tahun.



Sumber: BPS Provinsi DIY, 2024

### Gambar II-3 Indeks Williamson DIY Tahun 2020-2025

Berdasarkan gambar di atas, nampak bahwa kesenjangan ekonomi antar wilayah di DIY masih berada di atas 0,400. Artinya, kesenjangan ekonomi antar wilayah di DIY dapat dikategorikan dalam ketimpangan sedang. Ketimpangan meningkat pada periode 2020 sampai 2022 yaitu dari Indeks Williamson 0,450 (2020) menjadi 0,464 (2022). Setelah itu, ketimpangan mengalami penurunan menjadi 0,456 di tahun 2023 dan kembali meningkat pada tahun 2024 menjadi 0,459. Capaian indikator kinerja Indeks Williamson pada tahun 2024 sebesar 0,459, jika dibandingkan dengan target pada RPJMD 2022 – 2027 sebesar 0,441 akan diperoleh persentase capaian sebesar 95,90%. Peningkatan kesenjangan pembangunan ekonomi disebabkan oleh penurunan tingkat pertumbuhan Kabupaten Kulon Progo di tahun 2024 dibandingkan dengan tingkat pertumbuhannya di tahun sebelumnya. Kabupaten Kulon Progo merupakan wilayah yang menghasilkan PDRB ADHK terkecil.

**Tabel II-5 Target dan Realisasi Indikator Tujuan Indeks Williamson Tahun 2024 serta Capaian Tahun 2025 Triwulan I**

Indikator Tujuan	Satuan	Realisasi 2024	2025		
			Target	Realisasi	% Realisasi
Indeks Williamson	Angka indeks	0,459	0,438	0,4805	90,29

Sumber: Bapperida DIY, 2025 (data diolah)

### II.2.a.3 Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik – Indeks Reformasi Birokrasi

Indikator Indeks Reformasi Birokrasi merupakan indikator indeks yang diterbitkan oleh Kementerian PAN dan RB RI atas Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah. Indeks Reformasi Birokrasi mencerminkan kualitas perbaikan tata kelola pemerintahan yang semakin memenuhi karakteristik organisasi yang berbasis kinerja, bersih bebas dari KKN, akuntabel, dan profesional dalam melayani publik serta memberikan dampak nyata pada pencapaian program pembangunan.

Target dan capaian indikator tujuan berupa Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah DIY yang diperoleh dari hasil evaluasi Kementerian PAN dan RB RI tersaji dalam tabel di bawah:

**Tabel II-6 Target dan Realisasi Indikator Tujuan Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2023 serta Capaian Tahun 2024**

Indikator Tujuan	Satuan	Realisasi 2024	2025		
			Target	Realisasi	% Realisasi
Indeks Reformasi Birokrasi	Angka indeks	A- 89,90	A	A- (89,90)*	100

*Ket. :\*) Capaian tahun 2025 menggunakan capaian tahun 2024*

*Sumber: Kementerian PAN dan RB RI, 2024*

Data realisasi Indikator Tujuan Indeks Reformasi Birokrasi menggunakan hasil evaluasi terhadap Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah DIY Tahun 2024 dengan kategori A (A- dengan catatan) dengan nilai 89,90 atau Capaian Tahun 2024 adalah sebesar 100% yang dipublikasi oleh Kementerian PAN dan RB RI melalui surat Nomor B/556/RB.06/2024 tanggal 28 April 2025. Capaian tersebut telah memenuhi target tujuan RPJMD Tahun 2024, menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah DIY telah berupaya dan berkomitmen untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik serta memberikan dampak nyata pada pencapaian program pembangunan.

Evaluasi Reformasi Birokrasi di Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi dan Keputusan Menteri PAN dan RB RI Nomor 182 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2024. Hasil Evaluasi tiap Komponen, Sub Komponen dan Indikator Penilaian Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah DIY Tahun 2024 dapat dijabarkan sebagai berikut:

**Tabel II-7 Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah DIY**

No	Penilaian	Bobot	2024
1	RB General	100	80,54
2	RB Tematik	20	9,36
3	Indeks RB	120	89,90
<b>Indeks RB</b>			<b>A-</b>

*Sumber : Kementerian PAN dan RB RI, 2025*

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sejak 2024 dilaksanakan melalui *double track* berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020 – 2024, yaitu RB General dan RB Tematik berdampak pada metode Evaluasi dan Kategori/Klasifikasi Hasil Indeks Reformasi Birokrasi, yang dimaksudkan agar Pelaksanaan Reformasi Birokrasi mampu menciptakan hasil/dampak yang dapat dirasakan secara nyata, cepat, dan tepat menyentuh isu/permasalahan faktual. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri PAN dan RB RI

Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

**Tabel II-8 Kategori Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi**

No	Kategori	Nilai/ Angka	Predikat	Interpretasi
1	AA	> 100	Sangat Memuaskan	Memenuhi kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing serta mampu mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan melalui percepatan transformasi digital, dan pembangunan budaya BerAKHLAK
2	A	>80 - 100	Memuaskan	Memenuhi kriteria (100%) sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing melalui percepatan transformasi digital, dan pembangunan budaya BerAKHLAK, namun belum optimal dalam mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan
	A-		Memuaskan dengan Catatan	Memenuhi sebagian besar kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing karena sebagian kecil pelaksanaan percepatan transformasi digital dan pembangunan budaya BerAKHLAK belum optimal, serta belum sepenuhnya mampu mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan
3	BB	>70 - 80	Sangat Baik	Memenuhi sebagian kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing karena sebagian pelaksanaan percepatan transformasi digital, dan pembangunan budaya BerAKHLAK belum optimal, serta belum sepenuhnya mampu mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan
4	B	> 60 - 70	Baik	Memenuhi sebagian kecil (<60%) kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing karena sebagian besar pelaksanaan percepatan transformasi digital, dan pembangunan budaya BerAKHLAK belum optimal, serta belum sepenuhnya mampu mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan.
5	CC	> 50 -60	Cukup	Penerapan RB dilaksanakan melalui sebagian kecil percepatan transformasi digital dan pembangunan budaya BerAKHLAK sehingga belum mampu memenuhi kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing

No	Kategori	Nilai/ Angka	Predikat	Interpretasi
6	C	>30 - 50	Kurang	RB dilaksanakan sebatas formalitas, belum optimal menerapkan percepatan transformasi digital dan pembangunan budaya BerAKHLAK, sehingga belum mampu memenuhi kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing
7	D	0 -30	Sangat Kurang	RB dilaksanakan sebatas inisiatif awal, belum diformalkan dan belum menerapkan percepatan transformasi digital dan pembangunan budaya BerAKHLAK

Sumber : Kementerian PAN dan RB RI, 2025

Upaya yang telah dilakukan dalam mendorong pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Pemerintah Daerah Daerah Isitimewa Yogyakarta, antara lain:

- a. Meningkatkan kualitas koordinasi dan kolaborasi dengan *stakeholder* terkait serta merumuskan langkah-langkah inovatif sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi baik *general* maupun tematik.
- b. Meningkatkan efektivitas pembangunan Zona Integritas melalui upaya pembinaan dan kualitas layanan.

#### II.2.a.4 Terwujudnya lingkungan hidup yang lebih baik – Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) menjadi indikator yang sangat penting untuk mengukur pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan. Penggunaan IKLH dalam kebijakan pembangunan sangatlah penting sebagai instrumen yang dapat memotret kinerja lingkungan hidup dalam berbagai aspek untuk mengevaluasi kebijakan pembangunan yang telah dijalankan. Dengan mempertimbangkan nilai IKLH, pemerintah dan pemangku kepentingan dapat mengevaluasi dampak dari kebijakan pembangunan terhadap lingkungan hidup dan mendorong pembangunan yang lebih berkelanjutan. Formulasi IKLH sesuai dengan surat edaran Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan No. S.318/PPKLH/SET/REN.O/12/2020 tertanggal 4 Desember 2020 Perihal Metode Perhitungan IKLH 2020-2024 adalah sebagai berikut:

$$\text{IKLH} = 0,428 \text{ IKU} + 0,34 \text{ IKA} + 0,133 \text{ IKL} + 0,099 \text{ IKAL}$$

**Tabel II-9 Kategori Nilai IKLH secara Nasional**

No	Kategori	Angka Rentang
1	Sangat baik	$90 \leq \text{IKLH} \leq 100$
2	Baik	$70 \leq \text{IKLH} < 90$
3	Sedang/Cukup Baik	$50 \leq \text{IKLH} < 70$

No	Kategori	Angka Rentang
4	Kurang	$25 \leq \text{IKLH} < 50$
5	Sangat kurang	$0 \leq \text{IKLH} < 25$

Sumber: Kemen LHK RI, 2025

Pada tahun 2024, IKLH DIY ditargetkan pada range Sedang/Cukup Baik. Realisasi nilai IKLH pada tahun 2024 adalah sebesar 68,44 sehingga masuk ke dalam rentang angka  $50 \leq \text{IKLH} < 70$  atau kategori Sedang/Cukup Baik. Dengan demikian target Sasaran Pemda DIY pada tahun 2024 untuk indikator IKLH tercapai.

**Tabel II-10 Target dan Realisasi IKLH DIY 2022 - 2024**

Indikator Sasaran Pemda DIY	Satuan	2022		2023		2024	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
IKLH	Angka Indeks	66,15	59,92	62,96	66,29	63,29	68,44

Sumber: Kemen LHK RI, 2025

Selama periode RPJMD DIY 2022–2027, terdapat tren peningkatan signifikan dalam capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) di DIY. Pada tahun 2022, capaian IKLH tercatat sebesar 59,92 dan meningkat menjadi 66,29 pada tahun 2023. Tren ini berlanjut pada tahun 2024, dengan capaian mencapai 68,44. Dengan tren pertumbuhan rata-rata sekitar 4,26% per tahun dari 2022 ke 2024, target IKLH sebesar 70,91 pada tahun 2027 diharapkan tercapai, meskipun membutuhkan upaya konsisten dalam pengelolaan lingkungan. Proyeksi menunjukkan bahwa DIY berada pada jalur yang positif dalam upaya meningkatkan kualitas lingkungan, didukung oleh kebijakan strategis dan implementasi program berkelanjutan. Capaian IKLH DIY Tahun 2024 adalah sebagai berikut.

**Tabel II-11 Target dan Realisasi Indikator Tujuan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2024 serta Capaian Tahun 2023**

Indikator Tujuan	Satuan	Realisasi 2023	2024		
			Target	Realisasi	% Realisasi*
Indek Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka Indeks	66,29	63,29	68,44	108,14

Sumber: Kemen LHK RI, 2025

Adapun target dan realisasi per komponen IKLH DIY Tahun 2024 adalah sebagaimana tabel berikut.

**Tabel II-12 Target dan Realisasi Komponen IKLH DIY Tahun 2024**

No	Komponen	Target	Realisasi	Kategori
1.	Indeks Kualitas Air (IKA)	37,75	42,94	Kurang
2.	Indeks Kualitas Udara (IKU)	87,16	90,44	Sangat Baik

No	Komponen	Target	Realisasi	Kategori
3.	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	51,44	51,13	Sedang
4.	Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	63,71	84,13	Baik
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	<b>63,29</b>	<b>68,44</b>	<b>Sedang</b>

Sumber: Kemen LHK RI, 2025

IKLH mengukur tingkat kualitas lingkungan hidup suatu daerah, sedangkan Indeks Respon Lingkungan Hidup (IRLH) memotret sejauh mana pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan yang lain dalam merespon tantangan lingkungan melalui kebijakan, program, dan tindakan nyata. Dalam proses penentuan Indeks Respon Lingkungan Hidup Daerah (IRLH), berbagai upaya pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang dilakukan di suatu daerah di kategorisasi dalam beberapa Indeks Respon Program. IRLH DIY tahun 2023 berdasar <https://ppkl.menlhk.go.id/iklh> yang terdiri dari 5 (lima) komponen indeks yaitu: a) Indeks Respon Program Langit Biru: 86%; b) Indeks Respon Program Pantai Lestari: 75%; c) Indeks Respon Program Kali Bersih: 83%; d) Indeks Respon Program Indonesia Hijau: 90%; e) Indeks Respon Program Gambut Lestari: N/A (DIY tidak memiliki lahan gambut).

Berdasarkan rapor IRLH tersebut di atas, secara umum DIY menunjukkan respons yang baik dalam pengelolaan lingkungan hidup, terutama pada sektor Program Indonesia Hijau (90%) dan Program Pantai Lestari (75%).

1. Penguatan Program Pantai Lestari (75%)
  - a. Meningkatkan upaya pencegahan pencemaran pesisir dan laju abrasi, seperti yang terjadi di sepanjang Pantai Selatan Bantul
  - b. Memperkuat regulasi zonasi wilayah pesisir untuk mengurangi eksploitasi, misalnya melalui penyusunan Rencana Zonasi Kawasan Konservasi Wilayah Pesisir DIY
  - c. Mengedukasi wisatawan dan masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan pantai
2. Peningkatan Program Kali Bersih (83%)
  - a. Memperketat pengelolaan limbah domestik dan industri kecil di sepanjang sungai melalui pengawasan izin berusaha
  - b. Mendorong sistem pemantauan kualitas air berbasis komunitas
  - c. Meningkatkan infrastruktur pengelolaan air limbah, misalnya dengan pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL dan IPAL Komunal)
3. Optimalisasi Program Langit Biru (86%)
  - a. Memasyarakatkan penggunaan transportasi umum (Bus Trans Jogja dan Commuter Line Yogyakarta) serta transportasi ramah lingkungan, seperti bus listrik dan sepeda.

- b. Mengembangkan kebijakan insentif bagi industri yang menerapkan teknologi rendah emisi.
4. Keberlanjutan Program Indonesia Hijau (90%)
- a. Mengembangkan sistem pemantauan tutupan vegetasi berbasis teknologi (GIS, remote sensing).
  - b. Meningkatkan keterlibatan komunitas lokal dalam kegiatan penanaman vegetasi.

### II.2.a.5 Kesimpulan Terhadap Hasil Evaluasi Capaian Indikator Tujuan

Merujuk pada hasil pengukuran terhadap indikator-indikator tujuan tersebut, sampai dengan Triwulan I, 2025 belum terdapat capaian final untuk target tahun 2025. Hasil pengukuran indikator tujuan dapat diperbarui setelah tahun anggaran 2025 berakhir dan atau segera setelah terbitnya pembaruan hasil pengukuran pada tahun 2025. Sampai dengan triwulan I 2025, indikator tujuan yang belum tercapai 100% yaitu IGI (*Inclusive Growth Index*), Indeks Kebahagiaan dan Indeks Williamson.

### II.2.b Capaian Indikator Kinerja Sasaran Pemda DIY Tahun 2025

Berikut ini adalah gambaran umum kinerja capaian sasaran Pemerintah Daerah DIY sampai dengan Triwulan I tahun 2025 yang sesuai dengan Laporan Kinerja Pemda DIY Triwulan I 2025.

**Tabel II-13 Capaian Kinerja Sasaran Pemda TW I Tahun 2025**

Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target RPJMD Tahun 2025	Realisasi s.d. TW I Tahun 2025	% Realisasi
Tujuan 1. Terwujudnya kualitas hidup-kehidupan-penghidupan masyarakat					
1.1 Semakin kecilnya tingkat kemiskinan.	Angka Kemiskinan	%	9,66	10,40	92,34
1.2. Penghidupan ekonomi yang layak.	Angka Pertumbuhan Ekonomi/PDRB	%	5,3 - 5,8	5,03*	99,02
	Pendapatan per Kapita	Juta Rupiah	31,51	33,14	105,17
	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,26 - 3,56	3,18	100
	Inflasi	%	2,00 - 4,00	1,56	161,00
1.3. Kualitas SDM Yogyakarta yang dapat diandalkan.	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	81,68	81,62	99,93
	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Indeks	74,98	67,90	90,56
Tujuan 2. Mengecilnya Ketimpangan Wilayah					

Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target RPJMD Tahun 2025	Realisasi s.d. TW I Tahun 2025	% Realisasi
2.1. Meningkatkan kapasitas ekonomi pada kawasan belum maju.	Kontribusi PDRB Kawasan Belum Maju terhadap Keseluruhan PDRB DIY	%	40,13	40,10	99,93
Tujuan 3. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik					
3.1. Meningkatkan <i>Good Governance</i> .	Opini BPK	Indeks	WTP	WTP	100
	SAKIP	Indeks	AA	AA (92,65)	100
	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	Indeks	Tinggi (87,31 - 90,57)	Tinggi 83,88**	96,07
Tujuan 4. Terwujudnya lingkungan hidup yang lebih baik					
4.1. Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang.	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	%	83,74	82,83	98,91
4.2. Menurunnya risiko bencana.	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) DIY	Indeks	108,70	102,83	105,40

Sumber: *Bapperida DIY dan BPS DIY, 2025*

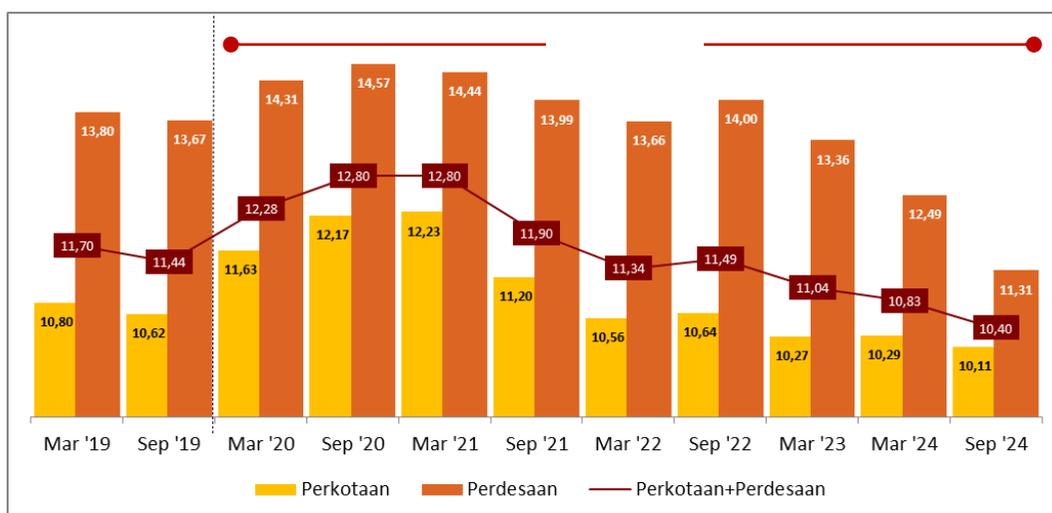
Ket.: \*) Angka capaian tahun 2024; \*\*) Angka capaian tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas, hingga triwulan I tahun 2025 dari 13 indikator kinerja sasaran Pemda terdapat 7 indikator kinerja sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan atau capaian masih di bawah 100%, sementara 6 indikator kinerja sasaran yang telah memenuhi target diantaranya: Pendapatan per Kapita, Tingkat Pengangguran Terbuka, Inflasi, Opini BPK, SAKIP, dan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) DIY.

### II.2.b.1 Semakin kecilnya tingkat kemiskinan - Angka Kemiskinan

Kemiskinan merupakan permasalahan kesejahteraan yang bersifat kompleks dan multidimensional. Oleh karena itu, percepatan penanggulangan kemiskinan menjadi salah satu isu strategis dalam pembangunan daerah di DIY. Selama lima tahun terakhir, tingkat kemiskinan di DIY tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata nasional.

Berdasarkan data yang tersedia, tren kemiskinan di DIY pada periode Maret 2019 hingga September 2024 menunjukkan kecenderungan penurunan baik dari sisi jumlah maupun persentase penduduk miskin. Namun, terdapat beberapa periode di mana tingkat kemiskinan mengalami fluktuasi. Peningkatan angka kemiskinan terjadi pada September 2020 dan Maret 2021, diikuti oleh tren penurunan pada September 2021 dan Maret 2022. Namun, angka kemiskinan kembali mengalami kenaikan pada September 2022 sebelum kembali menunjukkan penurunan secara bertahap sejak Maret 2023 hingga September 2024.

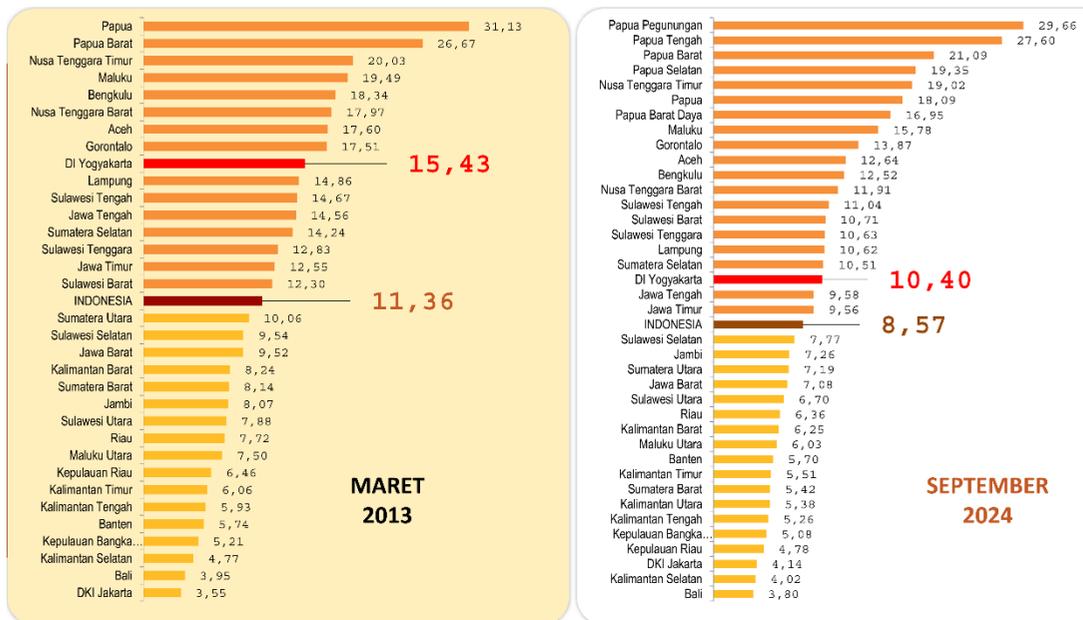


Sumber: BPS Provinsi DIY, 2025

**Gambar II-4 Persentase Penduduk Miskin Menurut Wilayah, Maret 2019 s.d. September 2024**

Tingkat kemiskinan di DIY apabila dilihat dari karakter wilayah perkotaan dan perdesaan hasil pendataan 2019 sampai dengan 2024 menunjukkan adanya ketimpangan. Data tahun 2019 menunjukkan persentase penduduk miskin di perdesaan lebih tinggi dari penduduk perkotaan. Hal ini terus terjadi sampai dengan tahun 2024. Pada September 2024, persentase penduduk miskin di perdesaan sebanyak 11,31 persen. Angka ini menunjukkan secara rata-rata terdapat sekitar 11 hingga 12 penduduk miskin diantara 100 orang penduduk yang ada di perdesaan. Sementara itu, pada waktu yang sama, persentase penduduk miskin di perkotaan lebih kecil dibanding perdesaan yaitu sebesar 10,11 persen.

Dalam upaya memahami dinamika kemiskinan di DIY, penting untuk melihat perkembangan capaian penurunannya dalam konteks nasional. Untuk melihat progres penurunan tingkat kemiskinan DIY dibandingkan dengan kemiskinan nasional dapat dilihat dari perbandingan antar waktu. Menurut data per September 2024 posisi DIY pada 10,40 persen masih berada di atas nasional (8,57%) akan tetapi jika dilihat dari trend 2013 sampai dengan 2024, selama 11 tahun terakhir persentase kemiskinan DIY sudah mengalami penurunan yang signifikan dengan rata-rata penurunan 0,46 persen per tahun. Angka ini lebih baik dari rata-rata penurunan kemiskinan nasional sebesar 0,25 persen per tahun sehingga gap kemiskinan DIY dengan kemiskinan nasional semakin mengecil.



Sumber: BPS DIY tahun 2013 dan 2024, 2025 (data diolah)

**Gambar II-5 Grafik Persentase Kemiskinan 2013 dan 2024 DIY dan Nasional**

**Tabel II-14 Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2020 – 2024 (%)**

Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
Kulon Progo	18,01	18,38	16,39	15,64	15,62
Bantul	13,5	14,04	12,27	11,95	11,66
Gunungkidul	17,07	17,69	15,86	15,60	15,18
Sleman	8,12	8,64	7,74	7,52	7,46
Kota Yogyakarta	7,27	7,69	6,62	6,49	6,26

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2025

**Tabel II-15 Target dan Capaian Indikator Sasaran Angka Kemiskinan Tahun 2025 serta Tahun 2024**

Indikator Kinerja Sasaran Pemda	Satuan	Capaian 2024	2025		
			Target	Realisasi	% Realisasi
Angka Kemiskinan	%	10,40	9,66	10,40*	92,34

Sumber: BPS DIY, 2025

Ket.: \*) Angka capaian tahun 2024

Target Penurunan Kemiskinan tahun 2025 belum tercapai terlihat dari target tahun 2025 sebesar 9,66% sedangkan capaiannya masih di angka 10,40% dengan persentase realisasi 92,34%. Angka capaian tersebut masih menggunakan capaian tahun 2024. Target penurunan kemiskinan DIY tahun 2024 belum tercapai, beberapa faktor yang mempengaruhi kemiskinan diantaranya seperti kenaikan harga bahan pokok, biaya hidup yang tinggi, ketimpangan distribusi kemiskinan di beberapa wilayah, dan kondisi geografis wilayah yang beragam dan rawan bencana terutama di beberapa wilayah seperti Gunungkidul dan Kulon Progo. Pemda DIY telah melaksanakan berbagai program untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Pemda juga telah mendorong penyediaan dan peningkatan sarana prasarana untuk mendukung aksesibilitas

layanan social kemasyarakatan, pemberdayaan social-ekonomi baik perorangan maupun kelompok, memperluas perlindungan social terutama dalam hal kebutuhan dasar masyarakat terbawah seperti program jaminan sosial lanjut usia, bantuan beasiswa, serta mempermudah akses modal bagi usaha kecil dan mikro guna mengurangi dampak fluktuasi ekonomi. Meskipun efektivitas program masih perlu ditingkatkan, Pemda DIY terus berkomitmen memperkuat strategi penanggulangan kemiskinan dengan peningkatan sinergi dengan kabupaten/kota dan dunia usaha agar lebih tepat sasaran dan memberikan dampak signifikan bagi kesejahteraan masyarakat.

## II.2.b.2 Penghidupan ekonomi yang layak

### I.1.1.1 Angka Pertumbuhan Ekonomi/ PDRB

Perekonomian DIY pada triwulan IV-2024 tumbuh sebesar 5,03% year-on-year (y-on-y) lebih rendah dibandingkan dengan triwulan IV-2023. Pertumbuhan ini didukung oleh peningkatan di hampir semua kategori lapangan usaha, kecuali Pengadaan Air. Dari sisi pengeluaran, komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) tumbuh sebesar 8,97%, diikuti oleh pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga (PKLNPR) sebesar 7,96%, dan Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PKP) sebesar 5,05%. Capaian indikator Sasaran Angka pertumbuhan ekonomi/PDRB tahun 2025 masih menggunakan capaian tahun 2024 menurut BPS DIY sebesar 5,03 atau tercapai sebesar 99,02% dari target pertumbuhan ekonomi tahun 2025 sebesar 5,3-5,8.

**Tabel II-16 Target dan Realisasi Indikator Sasaran Angka Pertumbuhan Ekonomi/PDRB Tahun 2025 serta Tahun 2024**

Indikator Kinerja Sasaran Pemda	Satuan	Capaian 2024	2025		
			Target	Realisasi	% Realisasi
Angka Pertumbuhan Ekonomi/ PDRB	%	5,03	5,3-5,8	5,03*	99,02

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2025

Ket.: \*) Angka capaian tahun 2024

Angka pertumbuhan ekonomi DIY tahun 2024 berdasarkan kontribusi lapangan usaha yang memberikan kontribusi tertinggi adalah Industri Pengolahan dengan kontribusi sebesar 11,72%, diikuti oleh Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 10,21%, dan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 10,00%. Konstruksi juga menunjukkan pertumbuhan signifikan sebesar 10,99% pada triwulan IV-2024 dibandingkan triwulan II-2024, didukung oleh proyek-proyek strategis nasional seperti pembangunan jalan tol dan infrastruktur lainnya. Kontribusi terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi kumulatif triwulan IV-2024 berasal dari komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PKRT) dengan andil sebesar 2,48%, diikuti oleh PMTB sebesar 2,45%.

Meskipun menunjukkan pertumbuhan positif, perekonomian DIY masih menghadapi tantangan seperti melemahnya daya beli masyarakat yang berdampak pada penurunan konsumsi rumah tangga. Namun, peningkatan penggunaan gas kota dan meningkatnya jumlah wisatawan ke DIY juga memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Laju pertumbuhan ekonomi kabupaten kota bila dibandingkan dengan Triwulan IV tahun 2023, pada tahun 2024 cukup bervariasi. Laju pertumbuhan ekonomi tertinggi ada di kabupaten Bantul dengan capaian sebesar 5,65 dan Kota Yogyakarta sebesar 5,15.

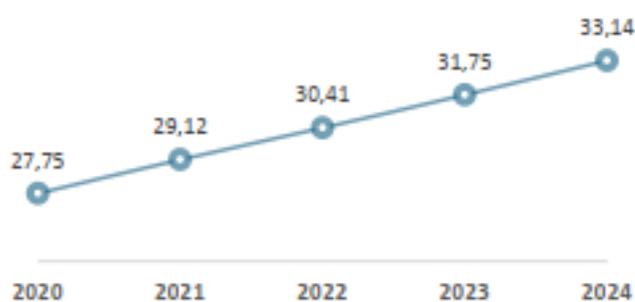
**Tabel II-17 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Tahun 2023-2024 (y-o-y) Triwulan IV**

Kabupaten/Kota	2023	2024
Kulon Progo	4,96	4,34
Bantul	5,55	5,65
Gunungkidul	6,42	4,95
Sleman	4,23	5,07
Yogyakarta	4,24	5,15

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2025

### I.1.1.2 Pendapatan per Kapita

Salah satu ukuran keberhasilan pembangunan adalah peningkatan kesejahteraan ekonomi. Salah satu indikator kesejahteraan ekonomi adalah pendapatan per kapita. Proses pembangunan khususnya di bidang ekonomi diharapkan dapat meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat. Dalam penghitungannya, pendekatan ukuran pendapatan per kapita adalah Produk Domestik Bruto Regional per kapita. Pada gambar berikut ini menunjukkan perkembangan pendapatan per kapita di DIY dari tahun ke tahun.



Sumber: BPS DIY, 2025 (data diolah)

**Gambar II-6 Pendapatan per Kapita DIY Tahun 2020-2024 (Juta Rupiah)**

Berdasarkan gambar di atas, pendapatan per kapita mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini didorong oleh pertumbuhan ekonomi positif sejak tahun 2020. Capaian indikator pendapatan per kapita pada tahun 2024 sebesar Rp33,14 juta, jika dibandingkan dengan target pada RPJMD 2022 – 2027 sebesar Rp30,23 juta akan diperoleh persentase capaian sebesar 109,63%. Ketercapaian tersebut didukung oleh pertumbuhan ekonomi

positif di tahun 2024 yang dibarengi dengan turunnya pertumbuhan penduduk di tahun tersebut dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara, tahun 2025 realisasi masih menggunakan tahun 2024 yaitu Rp33,14 juta, jika dibandingkan dengan target tahun 2025 sebesar Rp31,51 juta diperoleh persentase capaian 105,17%.

**Tabel II-18 Target dan Realisasi Kinerja Indikator Sasaran Pendapatan per Kapita Tahun 2025 serta Tahun 2024**

Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi 2024	2025		
			Target	Realisasi	% Realisasi
Pendapatan per Kapita	Juta Rupiah	33,14	31,51	33,14*	105,17

Sumber: BPS DIY, 2025 (data diolah)

Ket.: \*) Realisasi tahun 2025 menggunakan tahun 2024

### I.1.1.3 Tingkat Pengangguran Terbuka

Salah satu indikator keberhasilan pembangunan suatu daerah adalah dengan melihat angka tingkat pengangguran terbuka (TPT). Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja, semakin tinggi angkanya menunjukkan semakin banyak jumlah tenaga kerja yang tidak bekerja atau menganggur. TPT DIY hasil Sakernas Agustus 2024 sebesar 3,48 persen. Hal ini berarti bahwa dari 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar 3 orang penganggur. Selama lima tahun terakhir, TPT DIY menunjukkan angka dengan kecenderungan terus menurun seiring dengan membaiknya kondisi perekonomian pasca pandemi Covid-19. Namun demikian, TPT DIY pada Agustus 2024 masih lebih tinggi dibandingkan TPT sebelum pandemi Covid-19.

TPT DIY pada Februari 2025 sebesar 3,18 persen, turun sebesar 0,3 persen poin dibandingkan Agustus 2024 (3,48 persen). Dibandingkan dengan target tahun 2025 sebesar 3,26-3,56 telah mencapai 100%.

**Tabel II-19 Target dan Capaian Indikator Program Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tahun 2025 serta Tahun 2024**

Indikator Kinerja Program Pemda	Satuan	Capaian 2024	2025		
			Target	Realisasi	% Realisasi
Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,48	3,26 - 3,56	3,18	100

Sumber: BPS DIY, 2025

Pertumbuhan angkatan kerja yang tidak diimbangi dengan perluasan kesempatan kerja akan berdampak pada tingginya TPT, dimana komponen angkatan kerja terdiri dari penduduk yang bekerja dan pengangguran. Data Sakernas Agustus 2024 BPS menunjukkan bahwa jumlah angkatan kerja 2.261.436 orang, jumlah kesempatan Kerja 2.139.710 Orang, sementara jumlah pengangguran 78,667 orang turun 3.317 orang dibandingkan pada tahun 2023 yang sebesar 81.984 Orang. TPT DIY pada Agustus 2020 tercatat sebesar 4,57% dan

terus mengalami penurunan hingga tahun 2024 tercatat sebesar 3,48%. Dibandingkan dengan TPT nasional, TPT DIY selama lima tahun juga berada di bawah angka TPT nasional. Kondisi ini tentu berkaitan dengan tumbuhnya perekonomian DIY khususnya beberapa sektor yang penyerapan tenaga kerjanya cukup signifikan.



Sumber: BPS Provinsi DIY, 2025

**Gambar II-7 Perkembangan TPT DIY dan Nasional tahun 2020 – 2024 (%)**

Berdasarkan data Sakernas per Agustus 2024, penurunan TPT DIY disebabkan oleh melandainya TPT di perkotaan dan perdesaan. TPT di perkotaan mengalami penurunan dari 4,19% pada Agustus 2023 menjadi 3,97% pada Agustus 2024. Senada dengan perkotaan, TPT di perdesaan pada Agustus 2024 sebesar 2,04%, menurun dibandingkan Agustus 2023 sebesar 2,33%. Penurunan TPT pada Agustus 2024 disebabkan oleh melandainya TPT di perkotaan dan perdesaan yang mencerminkan banyak lowongan kerja yang terisi sejalan dengan membaiknya optimisme pelaku usaha pasca pemilu pada awal 2024. Penurunan TPT pada Agustus 2024 disebabkan oleh melandainya TPT di perkotaan dan perdesaan yang mencerminkan banyak lowongan kerja yang terisi sejalan dengan membaiknya optimisme pelaku usaha pasca pemilu pada awal 2024.

Berdasarkan tingkat pendidikan yang ditamatkan pada Agustus 2024, TPT untuk jenjang Sekolah Menengah Umum (SMU) paling tinggi diantara tingkat pendidikan lainnya sebesar 5,03 persen. Walaupun demikian kecenderungannya menurun dari tahun ke tahun. TPT tertinggi kedua yaitu pada jenjang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebesar 4,56 persen diikuti perguruan tinggi (Diploma IV/S1/S2/S3) sebesar 4,50 persen. Sementara TPT paling rendah adalah pada jenjang Sekolah Dasar (SD) ke bawah sebesar 1,13 persen. Hal ini dipicu masih adanya permasalahan titik temu antara minat dan penawaran tenaga kerja terutama pada tingkat pendidikan SMA, SMK, maupun perguruan tinggi, sementara untuk pendidikan rendah cenderung menerima berbagai pekerjaan.

Penurunan angka TPT merupakan salah satu keberhasilan pembangunan namun tetap diperlukan langkah-langkah kebijakan untuk meminimalisir angka TPT di masa yang akan

datang. Peningkatan kualitas angkatan kerja melalui berbagai macam pelatihan vokasi, pemagangan, serta sertifikasi kompetensi diharapkan mampu memenuhi kebutuhan/kesempatan kerja yang mulai tumbuh. Diperlukan pula upaya penciptaan kesempatan kerja melalui memperkuat pertumbuhan lapangan pekerjaan di sektor utama antara lain sektor pariwisata, industri, pertanian dan jasa. Selain itu keterpaduan antar sektor dan terjaganya kondusifitas iklim ketenagakerjaan di DIY diharapkan akan meningkatkan terciptanya perluasan kesempatan kerja yang lebih baik.

Selanjutnya, berdasarkan TPT Februari di D.I. Yogyakarta selama tiga tahun terakhir menunjukkan angka dengan kecenderungan terus menurun. TPT Februari 2023 sebesar 3,58 persen, kemudian TPT pada Februari 2024 sebesar 3,24 persen, turun sebesar 0,34 persen poin. TPT D.I. Yogyakarta kembali mengalami penurunan 0,06 persen poin dengan TPT Februari 2025 sebesar 3,18 persen. Kondisi ini menunjukkan kegiatan perekonomian di D.I. Yogyakarta sudah normal kembali pasca pandemi Covid-19. Hal ini terlihat dari TPT Februari 2025 sudah lebih baik jika dibandingkan kondisi Februari 2020 (sebelum pandemi) yang mencapai 3,38 persen.

Keadaan TPT di D.I. Yogyakarta selama lima tahun terakhir mengalami fluktuasi kisaran 3,18-4,57 persen, dan selalu berada di bawah TPT nasional yang berada pada kisaran 4,76-7,07 persen. Kondisi TPT D.I. Yogyakarta selaras dengan kondisi TPT nasional, pada awal pandemi Covid-19 terjadi kenaikan yang tinggi kemudian secara perlahan terus mengalami penurunan. TPT nasional pada Februari 2020 sebesar 4,94 persen, kemudian terjadinya pandemi Covid-19 mengakibatkan TPT nasional mengalami kenaikan hingga mencapai 6,26 persen. Angka tersebut secara perlahan turun menjadi 5,83 persen pada Februari 2022, kemudian kembali turun 0,39 persen poin menjadi 5,45 persen pada Februari 2023, 4,82 persen pada Februari 2024, dan pada Februari 2025 sebesar 4,76 persen.

#### **1.1.1.4 Inflasi**

DIY menutup Tahun 2024 dengan inflasi kumulatif untuk keseluruhan tahun 2024 mencapai 1,28% (yoy). Perlu diketahui, inflasi DIY pada tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan capaian inflasi pada tahun 2023 sebesar 3,17%. Capaian realisasi inflasi DIY di tahun 2024 tidak terlepas dari peran aktif seluruh pihak melalui sinergi dan kolaborasi berbagai program kegiatan, termasuk juga dukungan terhadap GNPIP. Beberapa hal yang mendorong terkendalinya inflasi pada tahun 2024, antara lain: pasokan komoditas pangan sepanjang 2024 yang relatif terjaga, permintaan yang relatif terkendali, pengelolaan ekspektasi inflasi yang lebih solid antar instansi, masifnya *social movement* dalam rangka pengendalian harga, relatif terjaganya harga BBM non-subsidi sepanjang 2024, serta *base year effect* dari realisasi inflasi kelompok pangan tahun 2023. Menurut komoditasnya, inflasi pada periode laporan terutama dipicu oleh tekanan harga Cabai Merah, dan Telur

Ayam. Inflasi tertahan oleh penurunan harga beberapa komoditas seperti Daging Ayam Ras, Nangka Muda, Kentang, dan Angkutan Udara.

Inflasi rendah disebabkan beberapa faktor diantaranya: 1) penurunan daya beli: turunnya jumlah pengunjung pasar rakyat dan adanya PHK di Kab Sleman; 2) diversifikasi alternatif moda transportasi seiring operasional tol Jogja-Solo menahan inflasi angkutan udara; 3) relatif terjaganya harga BBM non-subsidi sepanjang 2024; 4) *base year effect* dari realisasi inflasi kelompok pangan tahun 2023; serta 5) pasokan komoditas pangan yang relatif terjaga.

Selanjutnya, inflasi DIY sampai dengan bulan Mei tahun 2025 cenderung naik menjadi 1,56% dari target tahun 2025 sebesar 2% - 4%, sehingga diperoleh persentase capaian 161%. Naiknya inflasi tersebut dipengaruhi adanya kenaikan harga pada sebagian indeks kelompok pengeluaran. Komoditas yang dominan memberikan andil terhadap naiknya inflasi tahun 2025, yaitu emas perhiasan, kopi bubuk, kelapa, sigaret kretek mesin, beras, bahan bakar rumah tangga, kontrak rumah, minyak goreng, sigaret kretek tangan, dan sepeda motor.

**Tabel II-20 Target dan Realisasi Kinerja Indikator Sasaran Inflasi di DIY Tahun 2024-2025**

Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi 2024	Tahun 2025		
			Target	Realisasi	% Realisasi
Inflasi	Persen	1,28	2,00-4,00	1,56	161,00

Sumber: BPS, 2025, diolah

## II.2.b.3 Kualitas SDM Yogyakarta yang dapat diandalkan

### I.1.1.5 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator untuk melihat kualitas sumber daya manusia (SDM). IPM dapat digunakan untuk mengkaji perkembangan pembangunan manusia dalam suatu wilayah maupun perbandingan antar wilayah sehingga berguna untuk melihat perkembangan capaian pembangunan dalam jangka panjang. IPM mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup serta menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan kehidupan yang layak (*decent standard of living*). Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Pengukuran dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya

pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan hidup layak.

Angka IPM DIY mengalami tren yang meningkat dari tahun 2020 hingga tahun 2024. Angka IPM DIY pada tahun 2020 mencapai angka 79,95. Sejak tahun 2021, status pembangunan manusia DIY sudah berada pada level “sangat tinggi” dengan angka 80,22. Selama 2020–2024, IPM DIY rata-rata meningkat sebesar 0,52 persen per tahun, dari 79,95 pada tahun 2020 menjadi 81,62 pada tahun 2024. Peningkatan IPM DIY 2024 terjadi pada semua dimensi, baik umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak.



Sumber: BPS Provinsi DIY, 2025

**Gambar II-8 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) DIY dan Indonesia, 2020-2024**

Perkembangan IPM di DIY menggambarkan kualitas pembangunan manusia yang semakin baik. Level IPM DIY selama periode 2017-2020 selalu berada dalam kategori IPM tinggi ( $70 \leq \text{IPM} < 80$ ), sedangkan mulai tahun 2021 meningkat menjadi kategori sangat tinggi ( $\text{IPM} > 80$ ).

Dibandingkan dengan IPM nasional, perkembangan IPM DIY dari tahun 2020 – 2024 selalu berada di atas IPM nasional. Pada tahun 2020 IPM nasional 72,81 sedangkan IPM DIY telah mencapai 79,95. Pada tahun 2024 IPM Nasional menunjukkan angka 75,02, sementara DIY telah mencapai 81,62. Hal ini menunjukkan bahwa capaian pembangunan manusia DIY lebih berkualitas dibandingkan dengan capaian rata-rata nasional.

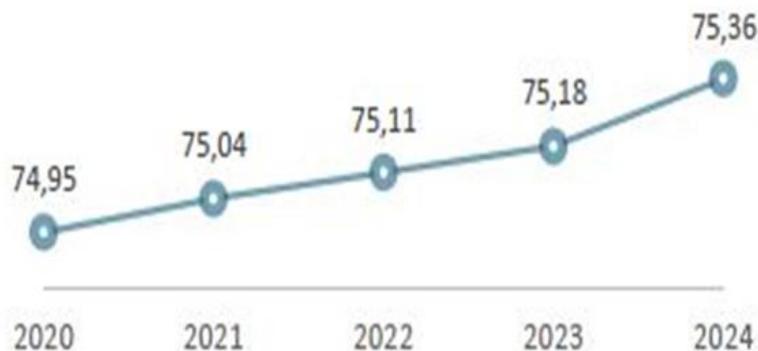
**Tabel II-21 Target dan Realisasi Indikator Sasaran Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2025 serta Tahun 2024**

Indikator Kinerja Sasaran Pemda	Satuan	Capaian 2024	Tahun 2025		
			Target	Realisasi	% Realisasi
Indeks Pembangunan Manusia	Angka Indeks	81,62	81,68	81,62*	99,63

Sumber: BPS DIY, 2025

Ket.: \*) Angka capaian menggunakan tahun 2024

Tingginya IPM DIY didorong oleh semua indikator penyusun yang memiliki capaian cukup tinggi. Pertumbuhan IPM DIY 2024 mengalami percepatan dari tahun sebelumnya, yakni tumbuh sebesar 0,65% dibanding tahun sebelumnya. Pertumbuhan IPM DIY didukung oleh peningkatan seluruh dimensi pembentuk IPM, terutama standar hidup layak. Dimensi standar hidup layak yang diukur berdasarkan rata-rata pengeluaran riil per kapita per tahun (yang disesuaikan) meningkat sebesar 2,93%. Rata-rata pengeluaran riil per kapita masyarakat DIY mengalami kenaikan sebanyak 437 ribu rupiah dibandingkan tahun sebelumnya.



Sumber: BPS DIY, 2025

**Gambar II-9 Perkembangan Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH) DIY Tahun 2020-2024**

Secara rinci pendekatan 3 dimensi dasar dalam pengukuran IPM sebagai berikut:

Pertama, dimensi umur panjang dan hidup sehat, yang diukur dengan Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH), menunjukkan bahwa kualitas kesehatan mengalami peningkatan. Bayi yang lahir pada tahun 2024 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 75,36 tahun meningkat 0,18 tahun dibanding mereka yang lahir pada tahun sebelumnya. Selama periode 2020 hingga 2024, UHH di DIY telah meningkat sebesar 0,41 tahun atau rata-rata tumbuh sebesar 0,14 persen per tahun.

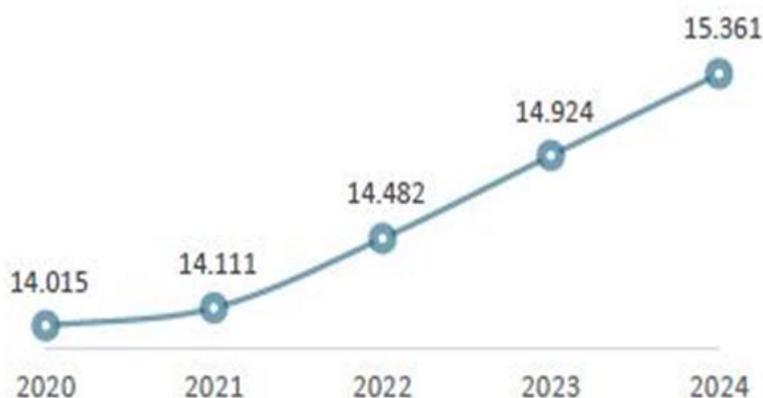


Sumber: BPS DIY, 2025

**Gambar II-10 Perkembangan HLS dan RLS DIY Tahun 2020-2024**

Kedua, dimensi pengetahuan pada IPM dibentuk oleh dua indikator, yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk usia 7 tahun ke atas dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) penduduk

usia 25 tahun ke atas. Kedua indikator ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2020 hingga 2024, HLS di DIY secara rata-rata meningkat sebesar 0,18 persen per tahun, sementara RLS meningkat 0,95 persen per tahun. HLS 2024 meningkat 0,04 tahun (0,26 persen) dibandingkan tahun 2023, mengalami percepatan dibandingkan rata-rata pertumbuhan 2020-2023 (0,15 persen). Sementara itu, RLS 2024 meningkat 0,09 tahun (0,92 persen) dibandingkan tahun 2023, melambat dibandingkan rata-rata pertumbuhan 2020-2023 (0,97 persen).



Sumber: BPS DIY, 2025

**Gambar II-11 Pengeluaran Riil per Kapita yang Disesuaikan DIY (Ribu Rupiah) 2020-2024**

Dimensi ketiga yang mewakili pembangunan manusia adalah standar hidup layak yang direpresentasikan dengan pengeluaran riil per kapita per tahun (atas dasar harga konstan 2012) yang disesuaikan. Pada tahun 2024, pengeluaran riil per kapita per tahun yang disesuaikan masyarakat DIY mencapai Rp15,36 juta per tahun. Capaian ini meningkat sebesar 437 ribu rupiah (2,93 persen) dibandingkan tahun sebelumnya, lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan 2020-2023 yang sebesar 2,12 persen per tahun.

**Tabel II-22 IPM DIY dan Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2020-2024**

Kabupaten/Kota	IPM				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten Bantul	80,36	80,63	81,04	81,74	82,05
Kabupaten Sleman	83,92	84,08	84,40	84,86	85,71
Kabupaten Gunungkidul	70,18	70,37	71,18	71,46	72,14
Kabupaten Kulon Progo	74,48	74,73	75,48	75,82	76,18
Kota Yogyakarta	86,93	87,50	88,00	88,61	89,10
<b>DIY</b>	<b>79,95</b>	<b>80,22</b>	<b>80,66</b>	<b>81,09</b>	<b>81,62</b>

Sumber: BPS DIY, 2025

Selama kurun waktu lima tahun terakhir, capaian IPM kabupaten/kota di DIY sangat bervariasi. Hal ini menunjukkan bahwa pola pembangunan antarwilayah di DIY masih timpang. Level IPM tertinggi dicapai Kota Yogyakarta dan diikuti oleh Sleman serta Bantul. Ketiga daerah tersebut memiliki IPM di atas DIY dan sudah berada pada kategori “sangat

tinggi” (IPM>80). IPM Kabupaten Kulon Progo dan Gunungkidul berada dalam kategori “tinggi” (IPM antara 70-80). IPM Gunungkidul tercatat paling rendah namun terus menunjukkan peningkatan. Mulai tahun 2020 capaian IPM Gunungkidul telah meningkat pada kategori “Tinggi”.

Pembangunan manusia tingkat kabupaten/kota selama tahun 2020–2024 menunjukkan pencapaian yang sangat baik karena kabupaten/kota di DIY sudah berstatus “sangat tinggi” dan “tinggi”, serta terus mengalami peningkatan Indeks. Pada tahun 2024, tiga kabupaten/kota, yaitu Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Bantul, menjadi daerah dengan status capaian pembangunan manusia yang “sangat tinggi”. IPM Kota Yogyakarta mencapai 89,10 dan tercatat paling tinggi di antara kabupaten/kota lain di DIY. Capaian IPM tertinggi berikutnya dimiliki Kabupaten Sleman dan Bantul dengan Indeks masing-masing sebesar 85,71 dan 82,05. Sementara itu, IPM Kulon Progo dan Gunungkidul tercatat masing-masing sebesar 76,18 dan 72,14 dengan status capaian pembangunan manusia yang “tinggi”. Adapun pertumbuhan IPM tertinggi tahun 2024 terjadi di Kabupaten Sleman.

**Tabel II-23 IPM Kabupaten/ Kota di DIY menurut Komponen Tahun 2024**

Komponen	UHH (Tahun)	HLS (Tahun)	RLS (Tahun)	Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan (Ribu rupiah)
Kabupaten Kulon Progo	75,49	14,49	9,20	10.990
Kabupaten Bantul	74,80	15,63	9,81	16.851
Kabupaten Gunungkidul	74,91	13,40	7,35	10.630
Kabupaten Sleman	75,48	16,79	11,33	17.586
Kota Yogyakarta	75,73	17,66	12,12	20.603
<b>DIY</b>	<b>75,36</b>	<b>15,70</b>	<b>9,92</b>	<b>15.361</b>

Sumber: BPS DIY, 2025

Perkembangan indikator penyusun IPM menurut kabupaten/kota di DIY cukup bervariasi. Pada tahun 2024, dimensi umur yang panjang dan sehat (indikator UHH) tertinggi di Kota Yogyakarta (75,73 tahun) dan terendah di Bantul (74,80 tahun). Pada dimensi pengetahuan, capaian Gunungkidul, Kulon Progo dan Bantul masih cukup tertinggal dibanding Sleman dan Kota Yogyakarta. Pada indikator HLS penduduk usia 7 tahun ke atas Gunungkidul sebesar 13,40 tahun, Kulon Progo sebesar 14,49 tahun, dan Bantul sebesar 15,63 tahun. Ketiga kabupaten tersebut berada di bawah rata-rata HLS DIY yang sebesar 15,70 tahun. HLS Sleman (16,79 tahun) dan Kota Yogyakarta (17,66 tahun) tercapai di atas rata-rata DIY sekaligus tertinggi. Begitu juga, rata-rata lama sekolah (RLS) penduduk usia 25 tahun ke atas terendah sebesar 7,35 tahun berada di Gunungkidul. Capaian RLS Kabupaten Kulon Progo (9,20 tahun) dan Kabupaten Bantul (9,81 tahun) juga tergolong rendah di bawah rata-rata DIY yang sebesar 9,92 tahun. RLS tertinggi di Kota Yogyakarta hingga mencapai 12,12 tahun. Sementara, capaian komponen pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan terendah sebesar Rp10.630 ribu per tahun di Gunungkidul.

### I.1.1.6 Indeks Pembangunan Kebudayaan

Kemajuan peradaban sangat terkait dengan aset kebudayaan yang dimiliki masyarakat dan bagaimana upaya untuk memelihara dan mengembangkannya. DIY telah menunjukkan upaya tersebut dengan komitmen untuk menjadikan kebudayaan sebagai payung dan arus utama dalam pembangunan di segala bidang. Untuk mengukur tingkat keberhasilan sasaran Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan di DIY indikator yang digunakan adalah Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK). IPK adalah instrumen yang mengukur capaian pembangunan kebudayaan di tingkat nasional dan daerah, yang disusun Kemendikbud bersama dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dan Badan Pusat Statistik (BPS) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) meluncurkan Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) pada 10 Oktober 2019 dalam rangkaian kegiatan Pekan Kebudayaan Nasional (PKN).

IPK merupakan salah satu instrumen untuk memberikan gambaran kemajuan pembangunan kebudayaan yang dapat digunakan sebagai basis formulasi kebijakan bidang kebudayaan, serta menjadi acuan dalam koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan pemajuan kebudayaan. Penyusunan Indeks tersebut melibatkan berbagai pemangku kebijakan dan data sehingga IPK merupakan alat ukur komprehensif yang bersifat multisektoral. Ada tujuh dimensi dalam IPK yang terdiri dari Ekonomi Budaya, Pendidikan, Ketahanan Sosial Budaya, Warisan Budaya, Ekspresi Budaya, Budaya Literasi dan Gender. Karena bersifat lintas sektor maka faktor-faktor yang mempengaruhi angka IPK juga bersifat lintas sektor.

**Tabel II-24 Target dan Realisasi Indikator Sasaran Indeks Pembangunan Kebudayaan Tahun 2025 serta Tahun 2024**

Indikator Kinerja Sasaran Pemda	Satuan	Capaian 2024	2025		
			Target	Realisasi	% Realisasi
Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Angka Indeks	67,90*	74,98	67,90**	90,56

Sumber: Disbud DIY, 2025

Ket.: \*) Angka capaian satu tahun sebelumnya (2023); \*\*) Angka capaian dua tahun sebelumnya (2023)

Jika dilihat dari target tahun 2025, capaian kinerja IPK pada tahun 2025 (menggunakan capaian tahun 2023) adalah sebesar 90,56%, dengan demikian indikator kinerja sasaran ini tidak tercapai. Namun demikian, capaian IPK DIY ini merupakan peringkat kedua tertinggi di tingkat nasional. Penurunan IPK ini secara umum terjadi di seluruh wilayah Indonesia terutama sejak adanya pandemi Covid-19.

Guna melihat pengaruh pandemi Covid-19 dalam capaian IPK, dapat diamati dari analisis komparasi perkembangan nilai IPK baik DIY maupun Nasional dalam 3 periode yaitu, Pra

Pandemi Covid (2018-2019), Pandemi Covid (2020 – 2021), dan Pasca Pandemi Covid (2022-2023) pada 7 dimensi penyusun nilai IPK.

**Tabel II-25 Perkembangan Nilai IPK Tahun 2019-2023**

No	Nama Dimensi	2019	2020	2021	2022	2023	2023 Terhadap Pra Pandemi (2019)	2023 terhadap Pasca Pandemi (2021)
1	Ekonomi Budaya	71,51	64,79	56,79	67,32	59,1	-12,41	2,31
2	Pendidikan	78,17	79,99	80,68	80,88	80,09	1,92	-0,59
3	Ketahanan Sosial Budaya	85,2	85,04	76,5	77,9	78,78	-6,42	2,28
4	Warisan Budaya	68,61	61,11	56,57	58,2	63,29	-5,32	6,72
5	Ekspresi Budaya	62,31	57,15	41,11	45,06	50,63	-11,68	9,52
6	Budaya Literasi	78,04	80,34	56,2	57,72	60,51	-17,53	4,31
7	Gender	59,39	64,53	64,61	64,05	65,53	6,14	0,92
8	<b>IPK DIY</b>	<b>73,98</b>	<b>71,74</b>	<b>64,22</b>	<b>66,52</b>	<b>67,9</b>	<b>-6,08</b>	<b>3,68</b>
	NASIONAL	55,91	54,65	51,90	55,13	57,13	1,22	5,23

Sumber: Kemendikbudristek RI, 2025

Capaian Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) DIY Tahun 2023 adalah sebesar 67,9. Angka tersebut di atas rata-rata nasional dan merupakan angka IPK kedua tertinggi di Indonesia. Namun demikian, capaian tersebut belum dapat memenuhi target RPJMD Tahun 2024 yaitu sebesar 74,78. Hal ini dikarenakan beberapa dimensi penting IPK yaitu Ekspresi Budaya, Ekonomi Budaya dan Budaya Literasi mengalami penurunan yang signifikan selama pandemi tahun 2020 sampai dengan 2021.

Terdapat beberapa keterbatasan yang terkait dengan penentuan prioritas perencanaan dan pemenuhan kebutuhan nasional dalam mengantisipasi pandemi. Hal ini berdampak terhadap target capaian IPK yang telah ditetapkan sebelum terjadinya pandemi, atas dasar kecenderungan angka Indeks pada situasi normal.

Berbagai upaya untuk memulihkan ekosistem kebudayaan pasca pandemi telah dilaksanakan, diantaranya adalah dengan pelaksanaan event kebudayaan secara hibrid pada tahun 2021 dan mulai dilaksanakan secara normal pada tahun 2022. Pada tahun 2024 semua aktivitas kebudayaan baik oleh pemerintah maupun masyarakat telah dilaksanakan secara normal. Namun demikian, intervensi kegiatan melalui event yang dilaksanakan oleh pemerintah belum cukup kuat untuk mengembalikan ekosistem kebudayaan sebagaimana sebelum adanya Pandemi Covid 2019. Ekosistem budaya yang terkait dengan dimensi ekspresi budaya, ekonomi budaya dan budaya literasi belum dapat pulih secara signifikan pasca pandemi, terlihat dari kenaikannya yang masih relatif kecil dibandingkan dengan penurunan saat pandemi. Meskipun demikian kenaikan secara signifikan justru sekaligus

ditunjukkan oleh dimensi ekspresi budaya pada masa pasca pandemi. Dengan konteks seperti ini diharapkan peningkatan signifikan pada dimensi ekspresi budaya dapat sekaligus menjadi mendorong kenaikan dimensi-dimensi budaya lain secara simultan.

#### **II.2.b.4 Meningkatkan kapasitas ekonomi pada kawasan belum maju – Kontribusi PDRB Kawasan Belum Maju terhadap Keseluruhan PDRB DIY**

Salah satu permasalahan pembangunan adalah ketimpangan yang berakibat pada perbedaan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat. Upaya penurunan ketimpangan menjadi bagian dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs). Di DIY, ketimpangan pendapatan dan ketimpangan antar wilayah masih menjadi isu strategis dalam RPJMD DIY 2022-2027.

Ketimpangan antar wilayah di DIY terjadi akibat terkonsentrasinya aktivitas perekonomian di wilayah utara DIY yaitu Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman. Struktur ekonomi tiap kabupaten/kota yang mencerminkan kesenjangan kemampuan daya saing ekonomi dan kapasitas pertumbuhan ekonomi lokal antar kabupaten dan kota menyebabkan terjadinya ketimpangan tersebut. Upaya pengurangan ketimpangan antar wilayah dilakukan dengan intervensi pemerataan pembangunan. Sebagaimana amanat RPJMD DIY 2022-2027, pemerataan pembangunan diarahkan dengan menempatkan kawasan selatan sebagai subjek prioritas didukung oleh reformasi kalurahan dan pemanfaatan teknologi informasi. Mengembangkan pusat-pusat kegiatan ekonomi baru pada wilayah yang relatif tertinggal secara terpadu lintas sektor dengan didukung kemitraan investasi, CSR, atau bentuk kerjasama lain menjadi upaya pemerataan pembangunan lainnya.

Pertumbuhan ekonomi tingkat wilayah di tahun 2024 menunjukkan perkembangan yang positif. Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta di tahun 2024 tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan tiga wilayah lainnya. Perkembangan kinerja-kinerja ekonomi tersebut menunjukkan bahwa gabungan kontribusi PDRB ADHK dari Kulon Progo, Gunungkidul, dan Bantul masih di bawah gabungan kontribusi Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta. Pada tahun 2024, PDRB ADHK Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman menyumbang lebih dari 59% dari total PDRB DIY. Adapun PDRB ADHK tiga wilayah yang belum maju yaitu Bantul, Kulon Progo dan Gunungkidul dengan luas wilayah 80% dari luas wilayah DIY menyumbang sekitar 40,10% dari keseluruhan output DIY pada tahun 2024.

**Tabel II-26 Target dan Realisasi Indikator Sasaran Kontribusi PDRB Kawasan Belum Maju terhadap Keseluruhan PDRB DIY Tahun 2025 serta Tahun 2024**

Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi 2024	2025		
			Target	Realisasi	% Realisasi
Kontribusi PDRB Kawasan Belum Maju terhadap Keseluruhan PDRB DIY	%	40,10	40,13	40,10*	99,93

Sumber: BPS DIY, 2025 (data diolah)

Ket.: \*) Angka capaian menggunakan tahun 2024

Adapun kontribusi PDRB ADHK menurut wilayah pada tahun 2024 disajikan pada tabel berikut:

**Tabel II-27 PDRB ADHK Kab/Kota di DIY Tahun 2024**

Kab/Kota	PDRB ADHK (miliarRp) Tahun 2023	PDRB ADHK (miliarRp) Tahun 2024	Pangsa PDRB ADHK terhadap DIY Tahun 2024 (%)
Kulon Progo	9.951,95	10.426,23	8,38
Bantul	21.867,77	22.964,66	18,46
Gunungkidul	15.749,22	16.506,42	13,27
Sleman	39.508,68	41.559,54	33,4
Yogyakarta	31.378,8	32.964,35	26,49

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2025 (diolah)

## II.2.b.5 Meningkatnya *Good Governance*

### I.1.1.7 Opini BPK

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Pelaksanaan pemeriksaan BPK dilakukan berdasarkan undang-undang tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pemeriksaan BPK mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Pemeriksaan Keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan. Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat opini.

Opini adalah pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Terdapat 4 (empat) jenis opini yang diberikan oleh BPK atas pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah, yaitu Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau *unqualified opinion*, opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau *qualified opinion*, opini Tidak Wajar atau *adversed opinion*, dan Pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*) atau Tidak Memberikan

Pendapat (TMP). Opini WTP merupakan opini terbaik yang dapat diberikan oleh BPK atas laporan keuangan pemerintah.

**Tabel II-28 Target dan Realisasi Indikator Sasaran Opini BPK Tahun 2025 serta Tahun 2024**

Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi 2024	Tahun 2025		
			Target	Realisasi	% Realisasi
Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP*	100

Sumber: BPKA DIY, 2025 (data diolah)  
Ket. :\* ) Angka capaian menggunakan tahun 2024

Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta hingga tahun 2024 berhasil memperoleh opini WTP sebanyak 14 kali berturut-turut. Pencapaian opini WTP bukan sekedar prestasi, melainkan merupakan cerminan bahwa pengelolaan keuangan pemerintah daerah sudah dikelola secara tertib, ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab. Di dalam RPJMD DIY tahun 2022-2027, opini BPK merupakan salah satu sasaran/ indikator kinerja dengan target yaitu tercapainya opini WTP.

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mempertahankan opini WTP antara lain:

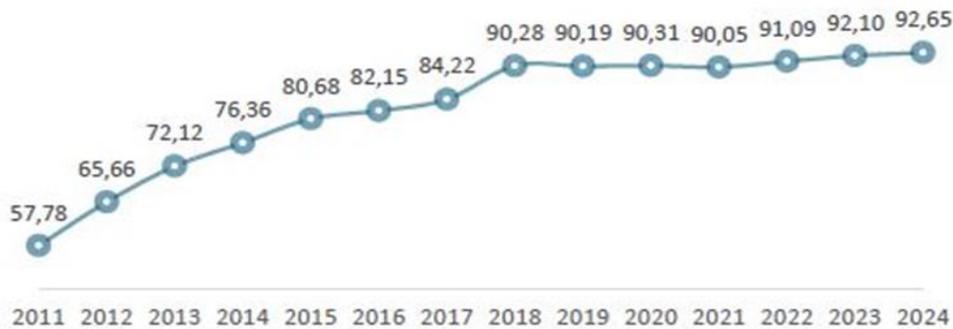
- a. Peningkatan kapasitas dan komitmen sumber daya manusia untuk memberikan kinerja terbaik mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan sebagai satu sistem pengelolaan keuangan daerah yang saling mendukung untuk mencapai kinerja keuangan Pemerintah terbaik.
- b. Peningkatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam melakukan review pada setiap proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan.
- c. Peningkatan infrastruktur yang mendukung implementasi pengelolaan keuangan daerah baik dari sisi penyempurnaan regulasi maupun berupa fisik sarana prasarana.

#### **I.1.1.8 SAKIP**

Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai *good governance* melalui reformasi birokrasi, dilakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah yang efektif dan efisien. Akuntabilitas sebagai salah satu pengungkit reformasi birokrasi memiliki peran yang sangat strategis. Akuntabilitas dapat digunakan sebagai tools untuk mempercepat reformasi birokrasi karena di dalam sistem akuntabilitas, definisi kinerja harus jelas termasuk didalamnya ukuran kinerja. Kinerja yang jelas dapat digunakan sebagai acuan dalam menyusun bisnis proses yang kemudian dapat disusun struktur organisasi dan manajemen SDM. Pada area penguatan akuntabilitas, kondisi yang diharapkan adalah akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang semakin meningkat ditandai antara lain dengan perencanaan pembangunan yang semakin responsif sesuai kebutuhan masyarakat, transparan, partisipatif, tepat waktu dan akuntabel; penggunaan anggaran semakin akuntabel dan

transparan; serta perumusan kebijakan publik semakin responsif sesuai kebutuhan, transparan, dan partisipatif.

Hasil Evaluasi AKIP Pemda DIY pada tahun 2024 telah disampaikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (KemenPAN dan RB RI Nomor B/272/AA.05/2024), dengan nilai sebesar 92,65 atau Predikat AA. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja “Sangat Memuaskan”, yaitu telah terwujud *Good Governance*. Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan diseluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif dan efisien (reform). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai level individu.



Sumber: Bapperida DIY, 2025 diolah

**Gambar II-12 Perkembangan Nilai AKIP Pemda DIY Tahun 2011-2024**

**Tabel II-29 Target dan Realisasi Indikator Sasaran Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP) Tahun 2024 serta Tahun 2023**

Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi 2023	Tahun 2024		
			Target	Realisasi	% Realisasi
Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)	Predikat	AA (92,10)	AA	AA (92,65)	100

Sumber: LHE AKIP Tahun 2024; KemenPAN RB RI, 2025 (data diolah)

Rincian hasil evaluasi tersebut seperti pada tabel berikut.

**Tabel II-30 Rincian hasil evaluasi, nilai per komponen dalam Penilaian AKIP Tahun 2023-2024**

Komponen yang Dinilai	Bobot	Nilai	
		2023	2024
a. Perencanaan Kinerja	30	28,17	28,32
b. Pengukuran Kinerja	30	26,75	26,91
c. Pelaporan Kinerja	15	14,04	14,14
d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	23,14	23,28
<b>Nilai Hasil Evaluasi</b>	<b>100</b>	<b>92,10</b>	<b>92,65</b>
<b>Tingkat Akuntabilitas Kinerja</b>		<b>AA</b>	<b>AA</b>

Sumber: KemenPAN RB RI, 2024

Berdasarkan Hasil Evaluasi AKIP Pemda DIY dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2024, masuk dalam predikat AA, yang berarti sepanjang periode RPJMD 2017-2022 dari tahun pertama (tahun 2018) sampai tahun kelima (tahun 2022) telah melebihi target (A) kemudian periode RPD 2023-2026 (tahun 2023), telah mencapai target (AA). Selanjutnya pada tahun pertama pelaksanaan RPJMD 2022-2027 (Tahun 2024), realisasi juga telah sesuai target yang ditetapkan yaitu pada predikat AA. Dari Hasil Nilai terakhir Evaluasi AKIP yang dikeluarkan KemenPAN dan RB RI pada tahun 2024, Pemda DIY memperoleh nilai 92,65 (AA). Jika dibandingkan dengan hasil evaluasi AKIP pada Tahun 2023, dari total semua komponen yang dinilai, terdapat kenaikan sebesar 0,55 poin. Kenaikan tersebut pada semua komponen, yaitu: Perencanaan Kinerja dengan kenaikan sebesar 0,15 poin; Pengukuran Kinerja dengan kenaikan sebesar 0,16 poin; Pelaporan Kinerja sebesar 0,1 poin; serta komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sebesar 0,14 poin.

Evaluasi akuntabilitas kinerja Pemda DIY tahun 2024 tersebut berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021. Pada komponen Perencanaan Kinerja, Pemda DIY telah menyusun dokumen perencanaan kinerja yang mencakup RPJMD yang telah dijabarkan dalam Renstra dan Perjanjian Kinerja pada tingkat Perangkat daerah dengan kualitas yang baik dan telah menjawab isu/permasalahan strategis daerah dan masing-masing urusan perangkat daerah yang sesuai mandatnya. Selain itu, perencanaan kinerja perangkat daerah telah menjadi acuan dalam perencanaan kinerja pegawai yang dituangkan dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP). Pada komponen Pengukuran Kinerja, Pemda DIY dan unit kerjanya telah melakukan pengukuran secara berkala atas realisasi kinerja dan rencana aksinya kepada seluruh Perangkat Daerah. Selanjutnya untuk mendukung pelaksanaan pengukuran kinerja tersebut telah disusun pedoman pengukuran dan pengumpulan data kinerja. Pengukuran kinerja di Pemda DIY telah memanfaatkan aplikasi “Sungguh” yang mengintegrasikan perencanaan kinerja, perencanaan anggaran, pemantauan capaian kinerja fisik dan keuangan serta pengelolaan kinerja pegawai. Kemudian, dari komponen Pelaporan Kinerja, Pemda DIY telah menyusun laporan akuntabilitas kinerja, baik pada tingkat Pemda maupun tingkat Perangkat Daerah. Laporan kinerja tersebut telah menyajikan informasi dan analisis sesuai ketentuan. Selanjutnya, dari komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal, inspektorat DIY telah melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP di seluruh Perangkat Daerah. Untuk mendukung pelaksanaan evaluasi tersebut telah disusun pedoman evaluasi tentang petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Pemerintah daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah disesuaikan dengan PermenPANRB Nomor 88 Tahun 2021.

#### **I.1.1.9 Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)**

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) adalah indikator komposit yang digunakan untuk mengetahui tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Indeks ini disusun berdasarkan

pelaksanaan dan perkembangan sejumlah aspek demokrasi. Pada perhitungan IDI tahun 2023 digunakan metode baru dimana terdapat tiga aspek demokrasi yang dijadikan sebagai dasar penyusunan, yaitu Aspek Kebebasan, Aspek Kesetaraan dan Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi.

**Tabel II-31 Target dan Realisasi Indikator Sasaran Indeks Demokrasi Indonesia Tahun 2024 serta Tahun 2023**

Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi 2023	2024		
			Target	Realisasi	% Realisasi
Indeks Demokrasi Indonesia	Angka Indeks	83,88	Tinggi (87,31 – 90,57)	Tinggi 83,88*	96,07

Sumber: BPS DIY, 2025 (data diolah)

Ket: \*Angka capaian tahun 2023

Data capaian Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) saat ini baru tersedia sampai dengan tahun 2023 dengan capaian 83,88. Angka tersebut menunjukkan adanya penurunan 1,74 poin dibandingkan dengan angka IDI pada tahun 2022 yakni 85,62. Pada tahun 2023, DIY berada pada peringkat 3 (empat) nasional, turun 2 peringkat dibanding tahun 2022. Tingkat Demokrasi di Daerah Istimewa Yogyakarta secara umum masuk pada kategori TINGGI. Adapun hasil capaian dari masing-masing aspek dan indikator adalah sebagai berikut:

**Tabel II-32 Capaian Indeks Demokrasi Indonesia DIY**

No	Indikator	2021	2022	2023	Kategori
	<b>ASPEK KEBEBASAN</b>	<b>74,31</b>	<b>87,35</b>	<b>77,76</b>	<b>SEDANG</b>
1	Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, dan berpendapat oleh aparat negara	79	93,02	79,24	
2	Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, dan berpendapat antar masyarakat	30	100	82,7	
3	Terjaminnya kebebasan berkeyakinan	88,33	88,36	65,4	
4	Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, berpendapat, dan berkeyakinan dalam setiap kebijakan	100	100	100	
5	Terjaminnya hak memilih dan dipilih dalam pemilu untuk seluruh kelompok masyarakat	70,39	70,39	70,39	
6	Pemenuhan hak-hak pekerja	59,83	76,06	71,03	
7	Pers yang bebas dalam menjalankan tugas dan fungsinya	77,75	78,86	74,56	
	<b>ASPEK KESETARAAN</b>	<b>87,29</b>	<b>88,76</b>	<b>89,21</b>	<b>TINGGI</b>
8	Kesetaraan Gender	100	100	100	
9	Partisipasi masyarakat dalam mempengaruhi kebijakan publik melalui lembaga perwakilan	100	100	100	
10	Anti monopoli sumber daya ekonomi	73,17	75	76,5	
11	Akses masyarakat pada Jaminan sosial dan perlindungan bagi warga miskin	91,09	93,07	91,73	
12	Kesetaraan Kesempatan Kerja Antar Wilayah	95,44	95,94	96,31	
13	Akses masyarakat terhadap informasi publik	74,39	78	81,37	
14	Kesetaraan dalam pelayanan dasar	84,03	85,56	85,04	

No	Indikator	2021	2022	2023	Kategori
	<b>ASPEK KAPASITAS LEMBAGA DEMOKRASI</b>	<b>80,74</b>	<b>80,17</b>	<b>83,51</b>	<b>TINGGI</b>
15	Kinerja Lembaga Legislatif	55,56	30,77	50	
16	Kinerja Lembaga Yudikatif	86,94	86,79	87,25	
17	Netralitas Penyelenggara Pemilu	75,00	75	75	
18	Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait kebijakan pejabat pemerintah	66,67	100	100	
19	Jaminan pemerintah/pemerintah daerah terhadap pelestarian lingkungan dan ruang hidup masyarakat	65,66	65,96	66,29	
20	Transparansi Anggaran dalam Bentuk Penyediaan Informasi APBN/D oleh Pemerintah	100	85,71	100	
21	Kinerja Birokrasi dalam pelayanan publik	91,60	92,2	92	
22	Pendidikan Politik pada kader partai politik	94,00	100	94	
	<b>NILAI IDI KOMPOSIT</b>	<b>81,21</b>	<b>85,62</b>	<b>83,88</b>	<b>TINGGI</b>

Sumber: BPS DIY, 2025

### II.2.b.6 Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang - Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang

Sasaran Terwujudnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang merupakan upaya untuk mendukung terwujudnya dukungan terhadap tujuan pemerintah daerah yaitu terwujudnya lingkungan hidup yang lebih baik. Dalam upaya untuk merealisasikan terwujudnya sasaran tersebut, sesuai dengan RPJMD DIY 2022-2027 maka diambil langkah strategi yaitu meningkatkan pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang. Adapun arah kebijakan yang dilakukan melalui (a) mempercepat penyusunan dan penetapan rencana tata ruang; (b) meningkatkan pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang untuk memitigasi perubahan tata ruang yang tidak sesuai dengan peruntukannya; (c) meningkatkan pengendalian dan pengawasan pemanfaatan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Kalurahan.

Pada Tahun 2024 kinerja indikator Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang didukung oleh aspek Persentase kesesuaian perwujudan pola ruang dan struktur ruang yang dapat dirinci antara lain:

- a. Perwujudan kesesuaian pola ruang dilakukan melalui perwujudan terhadap kawasan peruntukan/ zona lindung dan kawasan peruntukan/ zona budi daya dibanding dengan keseluruhan luas kawasan;
- b. Perwujudan kesesuaian struktur ruang dilakukan melalui (1) evaluasi kesesuaian program, lokasi dan waktu indikasi program utama berdasarkan hasil persandingan; (2) Penempatan lokasi sistem jaringan prasarana berdasarkan dokumen hasil penilaian KKPR Kewilayahan ke dalam peta rencana struktur ruang; (3) penghitungan tingkat perwujudan jaringan prasarana berdasarkan persentase progres tahapan pembangunan jaringan prasarana.

**Tabel II-33 Target dan Realisasi Indikator Sasaran Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Tahun 2025 serta Tahun 2024**

Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian 2024	2025		
			Target	Realisasi	% Realisasi
Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	%	82,83	83,74	82,83*	98,91

Sumber: Dinas PTR DIY, 2025

Ket.: \*) Angka capaian menggunakan tahun 2024

Sebagaimana data di atas bahwa target persentase kesesuaian pemanfaatan ruang sebesar 83,74 dan realisasi tahun 2025 sebesar 82,83 (98,91%). Angka capaian tersebut menggunakan tahun 2024. Perhitungan tersebut didapatkan dari dua indikator, yaitu (a) keterwujudan pola ruang; dan (b) Kesesuaian struktur ruang.

Tingkat perwujudan rencana pola ruang pada RTRW DIY di tahun 2024 terbagi menjadi 2 (dua) yaitu tingkat perwujudan kawasan lindung dan tingkat perwujudan kawasan budi daya sesuai dengan Petunjuk Teknis Nomor 4/JUKNIS-700 PR.01.01/XI/2023 tentang Penilaian Perwujudan Rencana Tata Ruang. Dalam mencari tingkat perwujudan kawasan lindung perlu diketahui luas kawasan lindung pada rencana pola ruang dan luas kegiatan yang tidak mendukung fungsi lindung. Berikut ini merupakan rumus dalam menghitung tingkat perwujudan kawasan lindung. Dapat diidentifikasi bahwa tingkat perwujudan kawasan lindung sebesar 99,01%. Kawasan lindung yang paling tinggi tingkat perwujudannya adalah badan air, kawasan cagar budaya, dan kawasan pencadangan konservasi di laut sebesar 100%. Sedangkan kawasan lindung yang paling rendah tingkat perwujudannya adalah kawasan lindung geologi sebesar 91,40%. Selanjutnya untuk tingkat perwujudan kawasan budi daya sebesar 84,65%. Kawasan budidaya yang paling tinggi tingkat perwujudannya adalah kawasan perikanan sebesar 100%. Sedangkan kawasan budi daya yang paling rendah tingkat perwujudannya adalah kawasan peruntukkan industri sebesar 1,73%. Selanjutnya untuk penilaian keterwujudan pola ruang didapatkan dari kumulatif persentase kawasan lindung (bobot 60%) ditambah dengan persentase kawasan budidaya (bobot 40%), sehingga didapatkan hasil persentase sebesar 93,26%.

### **II.2.b.7 Menurunnya risiko bencana – Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) DIY**

Penyelenggaraan penanggulangan bencana merujuk pada serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi dampak bencana, melindungi masyarakat, dan memulihkan kondisi pasca-bencana. Penanggulangan bencana melibatkan upaya yang sistematis mulai dari tahap pencegahan, kesiapsiagaan, penanggulangan, hingga pemulihan. Oleh karena itu, Penanggulangan Bencana bagian dari Sub Urusan Trantib Linmas yang merupakan 1 dari 6 urusan wajib pelayanan dasar oleh Pemerintah Daerah.

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana bertujuan menghadirkan ketangguhan daerah, mengelola, dan meminimalisir risiko bencana. Ukuran atau indikator yang disepakati untuk menilai kemajuan dari pencapaian tujuan itu adalah Indeks Risiko Bencana. Indeks Risiko Bencana (atau dikenal dengan IRBI = Indeks Risiko Bencana Indonesia) dihitung berdasar rumus dasar Risiko= (ancaman x kerentanan)/kapasitas.

Pada perhitungan IRBI selama ini yang dikoordinasi oleh BNPB, faktor/variabel ancaman dan kerentanan dianggap konstan, yang dinilai dinamis adalah faktor/variabel kapasitas. Penilaian IKD untuk Kabupaten/Kota se-DIY ini merupakan upaya kita bersama untuk menilai kinerja penyelenggaraan penanggulangan bencana di seluruh DIY, yang secara agregat nantinya akan kita nilai seberapa laju kinerja pengurangan risiko bencana di DIY dari tahun ke tahun. Hal ini sekaligus sebagai wujud dari akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pengkajian risiko bencana adalah proses untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengevaluasi potensi risiko bencana yang dapat terjadi di suatu kawasan. Proses ini bertujuan untuk memahami kemungkinan terjadinya bencana, potensi dampaknya, serta bagaimana risiko tersebut dapat dikelola atau dikurangi. Pengkajian risiko bencana merupakan langkah penting dalam perencanaan mitigasi bencana dan kesiapsiagaan, yang membantu pemerintah dan masyarakat untuk lebih siap dalam menghadapi bencana.

**Tabel II-34 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) DIY Tahun 2024 serta Tahun 2023**

Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian 2023	Tahun 2024		
			Target	Realisasi	% Realisasi
Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) DIY	Angka Indeks	108,15	108,70	102,83	105,40

Sumber: Penyampaian Hasil IKD dan IRBI tahun 2024 (Surat BNPB Nomor: B-06.14/BNPB/D-I/SS.01.03/01/2025)

Indeks risiko bencana (IRBI) dihitung berdasar rumus dasar risiko = (ancaman x kerentanan) / kapasitas. Faktor/variabel kapasitas dalam IRBI didapat dari nilai IKD yang terdiri dari 7 prioritas dan 71 indikator. Indeks Risiko Bencana DIY tahun 2024 adalah 102,83, angka tersebut merupakan rata-rata nilai IRBI Kabupaten/Kota se-DIY. Mengacu pada cascade RPJMD 2022-2027, target IRBI DIY adalah dengan kategori sedang dan target penurunan Indeks Risiko Bencana 1,5% - 2% per tahun. Tercatat ada 9 ancaman bencana prioritas dari total 14 ancaman bencana yang ada di DIY yaitu: 1) Gempa Bumi, 2) Cuaca ekstrim, 3) Erupsi Merapi, 4) Tanah Longsor, 5) Banjir, 6) Kebakaran Hutan dan Lahan, 7) Kekeringan, 8) Tsunami, 9) Gelombang ekstrim dan abrasi. Kerentanan Bencana di DIY meningkat seiring pertumbuhan penduduk dan pemanfaatan lahan. Kapasitas dalam menghadapi bencana di DIY belum merata dan belum semua aspek kapasitas terpenuhi. Efektifitas dan pencegahan mitigasi bencana dan kolaborasi multi-aktor (*Penta Helix*) masih

belum optimal. Jika melihat lebih detail, nilai IRBI untuk Kabupaten/Kota se-DIY adalah sebagai berikut: 1) Kabupaten Kulon Progo 159,65; 2) Kabupaten Bantul 129,50; 3) Kabupaten Gunungkidul 94,43; 4) Kabupaten Sleman 73,35; dan 5) Kota Yogyakarta 64,22.

### II.2.b.8 Kesimpulan Terhadap Hasil Evaluasi Capaian Indikator Sasaran

Merujuk pada hasil pengukuran terhadap indikator-indikator sasaran tersebut, sampai dengan Triwulan I, 2025 dari 13 indikator kinerja sasaran, terdapat 6 indikator kinerja sasaran yang telah memenuhi target diantaranya: Pendapatan per Kapita, Tingkat Pengangguran Terbuka, Inflasi, Opini BPK, SAKIP, dan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) DIY. Sementara terdapat 7 indikator yang belum mencapai 100% antara lain Angka Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia, Indeks Pembangunan Kebudayaan, Kontribusi PDRB Kawasan Belum Maju terhadap Keseluruhan PDRB DIY, Indeks Demokrasi Indonesia (IDI), dan Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang. Capaian indikator kinerja sasaran final akan diperoleh pada akhir tahun anggaran atau awal tahun anggaran berikutnya.

## II.3 Capaian Indikator Kinerja Daerah s.d. Triwulan I Tahun 2025

Indikator Kinerja Daerah merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja pembangunan di daerah. Indikator Kinerja Daerah dibagi menjadi beberapa aspek, yaitu Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Daya Saing Daerah, dan Aspek Pelayanan umum. Indikator Kinerja Daerah pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut beserta dengan realisasi sampai dengan Triwulan I tahun 2025.

Tabel 2- 175 Capaian Indikator Kinerja Daerah DIY s.d. Triwulan I Tahun 2025

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Baseline	Target		Realisasi	
		2023	2024	2025	2025 (TW I)	%
	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT					
	Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi					
1	Angka Pertumbuhan Ekonomi/PDRB	5,07	5,1-5,6	5,3-5,8	5,03	99,02
2	Inflasi (%)	3,17	2-4	3,1-3,8	1,56	156,25
3	Pendapatan Per Kapita (Rp juta)	31,75	30,23	31,51	33,14	105,17
4	Indeks Williamson	0,456	0,441	0,438	0,4805	90,29
5	Angka Kemiskinan	11,04	10,16	10,00 – 10,50	10,40	97,69
6	Kontribusi PDRB kawasan belum maju terhadap keseluruhan PDRB DIY	42,2	40,09	40,13	40,10	99,93

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Baseline	Target		Realisasi	
		2023	2024	2025	2025 (TW I)	%
7	Indeks Gini	0,449	0,419	0,443 - 0,447	0,428	103,13
8	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Industri Pengolahan dan Akomodasi Makan Minum (%)	5,38	3,1	3,4	4,06	119,41
9	Rata-rata Pertumbuhan Ekonomi pada Kabupaten/Kota yang belum maju (Bantul, Gunungkidul, Kulon Progo)	5,28	5,57	5,76	4,87	84,55
Fokus Kesejahteraan Sosial						
1	Tingkat Pengangguran Terbuka	3,69	3,45-3,8	3,12-3,51	3,48	100,86
2	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	81,09	81,38 - 81,56	81,68	81,62	99,93
3	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	100
4	Indeks Pertumbuhan Inklusif/IGI (Inclusive Growth Index)	6,24	6,42	6,52	5,90	91,90
5	Indeks Kebahagiaan	71,7	73,41	73,98	71,70	96,92
6	Indeks Pembangunan Kebudayaan	66,52*	74,78	74,98	67,90	90,56
7	Indeks Reformasi Birokrasi	A (88,15)	A (83,18)	A (83,78)	A (88,15)	105,22
8	SAKIP	AA (92,10)	AA (92,45)	AA (92,8)	AA (92,65)	99,84
9	Harapan Lama Sekolah	15,66	15,74	15,76	15,70	99,62
10	Angka Harapan Hidup	75,18	75,18	75,21	75,36	100,20
11	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86,67	87,76	88,77	87,03	98,04
12	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	76,87	77,37	77,67	78,46	101,02
13	Indeks Kebebasan	87,35	74,76	74,91	77,76	103,80
14	Indeks Kesetaraan	88,76	87,74	87,89	89,21	101,50
15	Total Fertility Rate	1,81	1,8-2,2	1,8-2,2	1,83	100
16	Persentase sekolah jenjang pendidikan menengah dengan nilai asesmen literasi memenuhi	55,29	76,39	77,38	95,30	123,16

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Baseline	Target		Realisasi	
		2023	2024	2025	2025 (TW I)	%
	kompetensi minimum					
17	Persentase sekolah jenjang pendidikan menengah dengan nilai asesmen numerasi memenuhi kompetensi minimum	63,4	59,52	60,52	94,78	156,61
18	Prevalensi Stunting	18	14	12,9	17,4	65,12
ASPEK DAYA SAING DAERAH						
1	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	Tinggi (83,88)	Tinggi (81,66)	Tinggi (87,31 - 90,57)	Tinggi (83,88)	96,07
2	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Sedang (66,29)	Sedang (63,71)	Sedang (64,19)	Sedang (68,44)	106,62
3	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	84,87	82,62	83,74	82,83	98,91
4	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) DIY	108,15	113,11	108,7	102,83	105,40
5	Crime rate (Risiko Penduduk Terkena Kejahatan)	133,76	124,7	120,5	72,86	139,54
6	Indeks Kematangan SPBE	4,94	3,12	4,3	4,53	142,90
7	Persentase Desa Mandiri	65,31	62,24	69,9	90,56	126,56
8	Rasio Kewirausahaan (%)	3,23	3,7	3,8	4,18	110
9	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	0,67	0,7	0,75	0,70	93,33
10	Persentase Penduduk yang mendapatkan layanan dasar layak	96,28	98,203	98,802	96,83	98,00
11	Budaya benda dan tak benda yang diapresiasi oleh pihak luar Pemda DIY (regional, nasional, internasional)	363	349	355	399	112,39
12	Persentase Penyediaan infrastruktur pendukung pengembangan ekonomi	64,05	67,03	76,7	74,04	96,53
13	Penurunan emisi GRK (ribu CO2eq)	212	2.639	2.641	3269,42	123,79

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Baseline	Target		Realisasi	
		2023	2024	2025	2025 (TW I)	%
14	Perwujudan pola ruang (%)	84,87	93,22	94,48	93,26	98,71
15	Capaian Fasilitas Pengelolaan dan Pemanfaatan Bidang Tanah Kasultanan, Kadipaten, dan Tanah Desa (%)	21,89	24,23	27,51	29,70	107,96
ASPEK PELAYANAN UMUM						
Urusan Pendidikan						
1	Rata-rata Lama Sekolah	9,83	9,66	9,68	9,92	102,48
2	Capaian Proporsi peserta didik dengan kategori kemampuan literasi minimal cakap jenjang SMA	21,45%	50,71%	50,73%	94,31	185,91
3	Capaian Proporsi peserta didik dengan kategori kemampuan numerasi minimal cakap jenjang SMA	12,40%	30,84%	30,86%	90,59	293,55
4	Capaian Proporsi peserta didik dengan kategori kemampuan literasi minimal cakap jenjang SMK	41,47%	51,94%	51,96%	82,73	159,22
5	Capaian Proporsi peserta didik dengan kategori kemampuan numerasi minimal cakap jenjang SMK	22,00%	30,37%	30,39%	77,21	254,06
6	Angka Partisipasi Sekolah (APS) penduduk usia 16-18 tahun	91.17%	89,98%	90,00%	90,36	100,40
7	Capaian Proporsi peserta didik dengan kemampuan literasi Mahir jenjang SMA	71.77%	21,94%	21,96%	80,48	366,49
8	Capaian Proporsi peserta didik dengan kemampuan numerasi Mahir jenjang SMA	75,66%	18,96%	18,98%	81,32	428,45
9	Capaian Proporsi peserta didik dengan kemampuan literasi Mahir jenjang SMK	38.81%	14,05%	14,07%	52,35	372,07

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Baseline	Target		Realisasi	
		2023	2024	2025	2025 (TW I)	%
10	Capaian Proporsi peserta didik dengan kemampuan numerasi Mahir jenjang SMK	51.14%	11,07%	11,09%	57,69	520,20
11	Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	64.89%	36,52%	36,57%	91,40	249,93
12	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Usia 4-18 tahun disabilitas	75,34%	51,33%	51,35%	75,34	146,72
	<b>Urusan Kesehatan</b>					
1	Indeks Keluarga Sehat	0,35	0,36	0,39	0.396	98,46
2	Prevalensi Berat Badan Kurang (Berat Badan Kurang dan Sangat Kurang) Pada Balita	11,9	11,7	11,5	10,76	106,43
	<b>Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>					
1	Persentase warga negara yang menempati hunian dengan akses air minum layak	95,49%	95,90%	96,32%	96,41	100,09
2	Persentase Warga Negara yang menempati hunian dengan akses sanitasi layak	97,69%	97,09%	97,41%	98,11	100,72
3	Persentase penyediaan infrastruktur sumber daya air	73,43%	85,94%	90,63%	101,56	112,06
4	Persentase Pembangunan Jaringan Jalan	99,17%	98,66%	98,77%	99,929	100,53
5	Peningkatan persentase pembinaan kinerja jasa konstruksi	83,87%	86,07%	90,72%	90,2	99,43
6	Prosentase pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman serta urusan bidang energi dan sumber daya mineral di DIY	100%	100%	100%	97,69	97,69

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Baseline	Target		Realisasi	
		2023	2024	2025	2025 (TW I)	%
7	Persentase kinerja penyelenggaraan penataan ruang	58,90%	73,28%	81,92%	7,11	8,68
	Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman					
1	Persentase rumah tangga yang menempati tempat tinggal layak huni	95,67%	95,83%	95,98%	95,97	99,99
	Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, Serta Perlindungan Masyarakat					
1	Persentase kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas	65%	70%	75%	87,13	116,17
2	Persentase terwujudnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta	60%	70%	80%	70	87,5
3	Kontribusi capaian 5 prioritas dalam IKD terhadap Ketahanan Daerah DIY	97,30%	101,4	101,3	101,4	100,1
4	Rerata capaian skor 5 Prioritas dalam Indeks Ketahanan Daerah (IKD) DIY	0,65%	0,71	0,76	0,76	100
	Urusan Sosial					
1	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, jaminan sosial, serta Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dan masyarakat sasaran yang meningkat kemampuan dan partisipasinya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial serta mampu mewujudkan nilai-	25,97%	28,18%	28,32%	7,47	26,38

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Baseline	Target		Realisasi	
		2023	2024	2025	2025 (TW I)	%
	nilai keperintisan kejuangan dan kesetiakawanan sosial					
2	Persentase PPKS yang memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, jaminan sosial, dan meningkat keberfungsian sosialnya serta PSKS yang meningkatkan kemampuan dan partisipasinya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	57,50%	21,22%	21,51%	10,15	47,19
3	Persentase masyarakat sasaran yang mampu mewujudkan nilai-nilai keperintisan kejuangan dan kesetiakawanan sosial	n/a	26,20%	26,26%	0	0
4	Persentase daerah rawan bencana yang siap menghadapi kejadian bencana bersama dengan Taruna Siaga Bencana (Tagana) dan Tenaga Pelopor Perdamaian (TPP)	n/a	61,03%	61,03%	2,91	4,77
	Urusan Tenaga Kerja					
1	Persentase lulusan pelatihan yang ditempatkan	n/a	75%	75%	13	17,33
2	Persentase penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja	n/a	67,50%	70%	7,38	10,54
3	Jumlah Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, Struktur Skala Upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	2.615 Perusahaan	2.629 Perusahaan	2.639 Perusahaan	2630	99,66
4	Jumlah Perusahaan yang menerapkan Norma Kerja dan Norma K3	2.730 Perusahaan	2.748 Perusahaan	2.768 Perusahaan	2755	99,53

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Baseline	Target		Realisasi	
		2023	2024	2025	2025 (TW I)	%
5	Persentase perusahaan dengan kategori produktivitas baik	n/a	65%	70%	0	0
6	Tingkat produktivitas DIY	Rp 55,44 juta/tenaga kerja	Rp 54,09 juta/tenaga kerja	Rp 56,37 juta/tenaga kerja	57,08	101,26
<b>Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>						
1	Rasio kekerasan terhadap perempuan dan anak di Masyarakat	n/a	0,63	0,63	0,53	118,86
2	Persentase Keterwakilan perempuan dalam politik (DPRD, Bupati/walikota dan Bamuska)	18,24%	18,5%	19%	19	100
3	Persentase korban kekerasan perempuan dan anak yang mendapatkan layanan komprehensif di UPTD dan P2TPA se-DIY	80%	95,00%	95,50%	100	104,71
4	MUKP (Median Usia Kawin Pertama Perempuan)	n/a	22,9 tahun	23 tahun	23	100
<b>Urusan Pangan</b>						
1	Skor Pola Pangan Harapan (PPH), berdasarkan standar Angka Kecukupan Gizi (AKG) 2.100 kkal/kapita/hari (skor)	96,24	96,3	96,4	95,66	99,23
2	Persentase daerah rentan rawan pangan (%)	3,85%	5,13%	3,85%	0,00	200
3	Indeks Ketahanan Pangan (skor)	83,17	82,08	82,41	84,15	102,11
4	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (%)	10,08	13,08	9,06	9,05	99,89
<b>Urusan Pertanahan</b>						

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Baseline	Target		Realisasi	
		2023	2024	2025	2025 (TW I)	%
1	Persentase kinerja penyelenggaraan penataan ruang dan penataan agraria di daerah	52,24%	59,90%	68,33%	11,03	16,14
2	Persentase Penyelenggaraan Penataan Agraria di daerah sesuai ketentuan	53,39%	46,53%	54,74%	4,27	7,80
<b>Urusan Lingkungan Hidup</b>						
1	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Provinsi	27,78%	25%	25,34%	7,53	29,72
2	Nilai indeks pencemaran sungai lintas kab/kota	6,52	6,11	6,03	5,69	112,73
<b>Urusan Administrasi Kependudukan dan catatan Sipil</b>						
1	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan	95,90%	93,96%	94,00%	97,01	103,24
<b>Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>						
1	Lembaga kemasyarakatan dan lembaga ekonomi yang mampu mendorong pelaksanaan pembangunan desa/kelurahan	4 lembaga	4 Lembaga	4 Lembaga	3	75
2	Persentase rumusan bahan kebijakan kapasitas sumber daya masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	n/a	n/a
3	Terpenuhinya kebijakan dan keberdayaan masyarakat desa yang berkualitas	100%	100%	100%	100	100
<b>Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</b>						
1	Rata-rata jumlah anak per-keluarga	n/a	1,14	1,14	0,67	58,77

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Baseline	Target		Realisasi	
		2023	2024	2025	2025 (TW I)	%
2	Jumlah Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)	3 lembaga	4 lembaga	5 lembaga	6	120
Urusan Perhubungan						
1	Persentase Capaian Mobilitas Berkelanjutan di Wilayah DIY	40,30%	48,34%	60,24%	28,81	47,83
2	Persentase Capaian Jalan Berkeselamatan Berbasis Angkutan Umum	41,63%	48,44%	59,19%	29,48	49,81
3	Persentase Capaian Pengelolaan Sektor Transportasi di Kawasan Strategis Dalam Mendukung Pelestarian Lingkungan	39,11%	48,25%	61,29%	28,13	45,90
Urusan Komunikasi dan Informatika						
1	Persentase Jumlah Badan Publik Pemda DIY Kategori Informatif	38.46%	29.73%	35.14%	40,54	115,37
2	Indeks Kematangan Manajemen SPBE	4,64	1,92	1,97	4,83	245,18
3	Predikat pelaksanaan pemerintahan berbasis elektronik di DIY	Baik	Baik	Baik	Memuaskan	156,78
Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah						
1	Jumlah koperasi modern	11	7	9	0	0
2	Jumlah UMKM yang berkembang usahanya (pada tahun n)	n/a	1.500	1.550	335	21,61
3	Jumlah wirausaha Baru / Pemula	1.645	6.115	8.365	6379	76,26
4	Jumlah UMKM yang berkembang usahanya (aspek SDM dan produksi)	n/a	130	130	15	11,54
5	Jumlah omset Koperasi dan UMKM (Triliun rupiah)	17,93	18025	18175	5904	32,48

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Baseline	Target		Realisasi	
		2023	2024	2025	2025 (TW I)	%
6	Rasio Wirausaha baru terhadap Total Angkatan Kerja (%)	4,07	3,95	4,15	n/a	n/a
	Urusan Penanaman Modal					
1	Nilai Realisasi Investasi di DIY	Rp 5,69 Triliun	Rp 3,02 Triliun	Rp 3,22 Triliun	0,3	9,32
2	Nilai Predikat Pelayanan Prima	A	A	A	A	100
	Urusan Kepemudaan dan Olahraga					
1	Jumlah capaian medali pada kejuaraan multievent	27 medali	22 medali	24 medali	0	0
2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Pemuda	64,89	65,61	65,63	66,15	100,79
3	Persentase pemuda bekerja	59,33%	63,34%	64,84%	72,17	111,30
4	Peringkat yang diraih dalam Pra-POPNAS dan POPNAS	peringkat 5 besar (pra popnas)	peringkat 4 besar (pra popnas)	peringkat 8 besar (Popnas)	0	0
5	Peringkat yang diraih dalam PEPARPENAS	peringkat 9 besar	peringkat 6 besar	Peringkat 6 besar	0	0
	Urusan Statistik					
1	Persentase data statistik sektoral menuju prinsip satu data pembangunan daerah	68,44%	70%	75%	76,2	101,6
	Urusan Persandian					
1	Skor Kematangan Keamanan Informasi (Indeks KAMI) Pemda DIY	632	630	631	643	101,90
	Urusan Kebudayaan					
1	Jumlah sumber daya kebudayaan pendukung keistimewaan yang terkelola	n/a	432	434	432	99,54
2	Jumlah sarana prasarana pendukung keistimewaan yang terkelola	n/a	280	282	280	99,29

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Baseline	Target		Realisasi	
		2023	2024	2025	2025 (TW I)	%
3	Jumlah agenda budaya pendukung keistimewaan yang dikelola	n/a	248	250	248	99,20
4	Meningkatnya kinerja pengembangan nilai sejarah, warisan budaya dan museum	5,20%	4,85%	6,09%	0	0
5	Peningkatan jumlah penyelenggaraan event budaya tingkat provinsi, nasional, internasional	100 event	15 event	16 event	0	0
6	Peningkatan jumlah kegiatan pengembangan seni budaya dan tradisi di DIY	375 lembaga	385 lembaga	395 lembaga	0	0
<b>Urusan Perpustakaan</b>						
1	Persentase pemanfaatan koleksi pustaka dan arsip	n/a	22%	23%	44,14	191,30
2	Persentase ketermanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	57,86%	50%	51%	59,23	116,14
<b>Urusan Kearsipan</b>						
1	Tingkat Ketersediaan Arsip	84,33%	51%	51,25%	70,01	136,60
<b>Urusan Kelautan dan Perikanan</b>						
1	Nilai Subsektor Perikanan dalam PDRB DIY (ADHK) (juta rupiah)	349.603	368.122	371.350	371.350	100
2	Nilai produksi perikanan budidaya dan tangkap (juta rupiah)	2.709.243	2.293.318	2.305.813	869.767	37,72
3	Peningkatan pendapatan pembudidaya ikan kelompok miskin (juta rupiah/tahun)	n/a	36 juta rupiah/tahun	36 juta rupiah/tahun	n/a	n/a
4	Nilai produksi perikanan budidaya kelompok miskin (dalam juta rupiah/tahun)	n/a	180 juta rupiah/tahun	180 juta rupiah/tahun	0	0

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Baseline	Target		Realisasi	
		2023	2024	2025	2025 (TW I)	%
5	Nilai Akhir Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi (skor)	n/a	40,5	46,39	0	0
6	Luas kawasan konservasi yang ditetapkan (Ha)	695,89	5670,87	5822,92	0	0
Urusan Pariwisata						
1	Lama Tinggal Wisatawan wisman / 12 bulan)	2,18 hari	2,48 hari	2,52 hari	1,93	76,59
2	Lama Tinggal Wisatawan wisnus / 12 bulan	1,35 hari	1,52 hari	1,57 hari	1,41	89,81
4	Rata-rata Spending money wisatawan mancanegara (\$)	(\$) 672	(\$) 550	(\$) 600	0	0
5	Rata-rata spending money wisatawan nusantara (rupiah)	Rp2.226.938	Rp2.400.000	Rp2.500.000	0	0
7	Total Yield (Jumlah wisatawan x Belanja/per hari) - Satuan (Rp.)	n/a	17,2 T	20 T	0	0
Urusan Pertanian						
1	Rata-rata persentase peningkatan produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan (%)	1,21%	0,21%	0,21%	20,035	9.540,47
2	Nilai sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan dalam PDRB (ADHK) (juta rupiah)	8.179.176 juta rupiah	8.180.687. juta rupiah	8.242.042 juta rupiah	8.207.475 juta rupiah	99,58
3	Persentase kontribusi sektor pertanian terhadap kesesuaian tata ruang (%)	0,017	2,01%	3,99%	3,96	99,25
4	Peningkatan persentase kontribusi sektor pertanian terhadap kesesuaian tata ruang (%)	0,003	1,98%	1,98%	2,42	161,33

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Baseline	Target		Realisasi	
		2023	2024	2025	2025 (TW I)	%
Urusan Kehutanan						
1	Persentase luas lahan kritis yang direhabilitasi di DIY	7,01%	3,15%	4,61%	4,55	101,56
2	Peningkatan jumlah produksi sektor kehutanan	5%	5%	5%	5	100
3	Ketercapaian kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta keterwujudan pengelolaan hutan lestari	84,75%	85,91%	92,76%	77,2	100
Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral						
1	Persentase rumah tangga berakses listrik	99,99%	99,99%	99,99%	99,99	100
2	Persentase perusahaan kawasan peruntukan pertambangan sesuai dengan pola ruang	9,17%	9,23%	9,28%	9,23	99,46
3	Pengendalian Rerata Penurunan Air Muka Tanah	< 20%	< 20%	< 20%	< 20%	100
Urusan Perdagangan						
1	Kontribusi Perdagangan Terhadap PDRB DIY	8,17%	8,39%	8,44%	0	0
2	Laju pertumbuhan Perdagangan dalam PDRB	4,29%	5,32%	5,38%	0	0
Urusan Perindustrian						
1	Kontribusi Industri Pengolahan Terhadap PDRB DIY	11,82%	12,15%	12,20%	0	0
2	Laju pertumbuhan Industri Pengolahan dalam PDRB	4,29%	2,50%	3,00%	0	0
Urusan Transmigrasi						
1	Persentase transmigrasi yang bertahan pada masa adaptasi	100%	90%	90%	100	111,11

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Baseline	Target		Realisasi	
		2023	2024	2025	2025 (TW I)	%
	Sekretariat Dewan					
1	Persentase Agenda DPRD yang terselesaikan tepat waktu	137,09%	96%	96%	25%	26,04
2	Kepuasan pelayanan kepada DPRD	91,38%	83%	84%	89,18%	105,95
	Sekretariat Daerah					
1	Persentase rumusan kebijakan menjadi kebijakan yang ditindaklanjuti dalam mendukung Program Pemda Pengembangan Sektor Unggulan	100%	100%	100%	n/a	n/a
2	Persentase rumusan kebijakan menjadi kebijakan yang ditindaklanjuti dalam mendukung pencapaian sasaran Pemda Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan	100%	100%	100%	n/a	n/a
3	Persentase bahan kebijakan yang mendukung program pemda	n/a	40%	60%	0	0
4	Persentase hasil kajian, koordinasi, monitoring dan evaluasi bidang bina mental, kesehatan dan sumber daya manusia yang menjadi naskah bahan kebijakan	n/a	67,50%	80%	20%	25,00
5	Persentase rumusan bahan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah dan kerja sama dalam negeri, pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren, serta penataan administrasi batas	100%	100%	100%	26	26,00

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Baseline	Target		Realisasi	
		2023	2024	2025	2025 (TW I)	%
	daerah dan toponimi					
6	Persentase Responsivitas Dinamika Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	100%	100
7	Persentase layanan hukum yang berkualitas	100%	100%	100%	100%	100
8	Rerata Capaian Produk Hukum serta Bantuan dan Layanan Hukum yang Berkualitas	100%	100%	100%	28,13	28,13
9	Persentase perangkat daerah yang telah melaksanakan Reformasi Birokrasi kategori "sangat baik" (A)	100%	94,60%	94,60%	0	0
10	Persentase perangkat daerah dengan tingkat kematangan tinggi	94,60%	80%	86,67%	0	0
11	Persentase capaian pelaksanaan urusan keistimewaan	90,04	89,1	89,2	90,95	101,96
12	Persentase lembaga pengampu keistimewaan dengan capaian kinerja yang berkualitas baik	100	90,1	90,2	99,53	110,34
13	Persentase rumusan kebijakan menjadi kebijakan dalam mendukung program Pemda (bidang infrastruktur)	30%	30%	60%	50	83,33
14	Persentase rumusan kebijakan yang mendukung program Pemda (bidang infrastruktur) dan Persentase kualitas Pengadaan Barang Jasa	30,76%	38,69%	62,37%	44,62	69,89
15	Persentase kualitas pengadaan barang dan jasa dan persentase IKM	33,02%	64,76%	69,49%	39,23	56,45

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Baseline	Target		Realisasi	
		2023	2024	2025	2025 (TW I)	%
16	Nilai rerata kuesioner layanan keprotokolan, kerumahtangan, kepuasan masyarakat terhadap Informasi Pemerintah Daerah, dan nilai reformasi birokrasi	91,07	86,56	86,88	93,66	106,52
17	Nilai rerata kuesioner layanan keprotokolan, kerumahtangan, kepuasan masyarakat terhadap Informasi Pemerintah Daerah, dan nilai reformasi birokrasi	91,07	86,56	86,88	93,66	106,52
<b>Perencanaan Pembangunan</b>						
1	Persentase ketercapaian tujuan perangkat daerah DIY dengan kriteria tinggi dan sangat tinggi	n/a	85,71%	87,50%	98,11%	112,13
2	Persentase ketercapaian sasaran perangkat daerah DIY dengan kriteria tinggi dan sangat tinggi	98,17%	88,10%	88,89%	99,21%	111,61
<b>Keuangan</b>						
1	Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan	100%	100%	100%	25%	25,00
2	Optimalisasi Barang Milik Daerah	Rp16.108.924.464*	Rp9.378.609.475	Rp9.703.109.475	Rp3.766.868.533	38,82
3	Pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel	100%	100%	100%	100%	100
<b>Kepegawaian</b>						
1	Indeks Profesionalitas ASN (Skor)	83,19	59,09	63,09	0	0

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Baseline	Target		Realisasi	
		2023	2024	2025	2025 (TW I)	%
2	Persentase kualitas pengelolaan manajemen ASN	81,71%	68,75%	70,73%	0	0
Pendidikan dan Pelatihan						
1	Persentase Aparatur Sipil Negara yang mengikuti pelatihan dengan predikat minimal memuaskan	N/A	91%	91,50%	0	0
2	Persentase ASN yang telah mendapatkan pelatihan minimal 20 JPL dalam 1 tahun	80%	15%	16%	10,43%	65,19
Penelitian dan Pengembangan						
1	Persentase hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah	81,74%	70%	75%	81,37%	108,49
Penghubung Daerah						
1	Persentase layanan penghubung yang berkualitas dalam menunjang koordinasi Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat dan pemangku kepentingan lain	92,90%	87,50%	88%	88,80%	100,91
2	Nilai rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Kualitas Layanan Penghubung	92,29 angka indeks	87,5 angka indeks	88 angka indeks	91,88 angka indeks	104,41
Inspektorat Daerah						
1	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan	95,19%	91,50%	92%	90,88%	102,69
2	Indeks Penilaian integritas	77,33	72,5	73	74,6	102,19
3	Nilai Kapabilitas APIP	level 3	level 3	level 3	level 3 (3,47)	115,67

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Baseline	Target		Realisasi	
		2023	2024	2025	2025 (TW I)	%
Kesatuan Bangsa dan Politik						
1	Capaian Aspek Kebebasan dalam IDI (Indeks Demokrasi Indonesia) DIY		74,33	74,34	77,76	104,6
2	Rerata capaian skor 5 indikator dalam Aspek Kebebasan IDI	79,55	73,56	73,57	79,55	108,13

Sumber: Bapperida DIY, 2025

Berdasarkan tabel di atas, indikator kinerja pada ketiga aspek tersebut dari total 183 indikator, 94 indikator telah tercapai sesuai atau melebihi target yang ditetapkan, 89 indikator belum memenuhi target, dan 5 indikator dengan keterangan n/a. Selanjutnya, beberapa capaian indikator juga masih menggunakan capaian tahun 2024 dan beberapa lainnya capaian final dihitung di akhir tahun 2025 sehingga persentase capaian masih cenderung rendah.

## II.4 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Program Pemerintah Daerah DIY

Program Pemerintah Daerah DIY (Program Pemda DIY) merupakan kekhususan yang menjadi pembeda antara *cascading* kinerja Pemda DIY jika dibandingkan dengan *cascading* Pemda lain secara umum. Program Pemda merupakan program antara yang menjadi indikator kinerja yang menghubungkan antara indikator kinerja daerah (Gubernur) dengan Indikator Eselon II. Program Pemda ini secara pertanggungjawaban kinerja menjadi tanggung jawab Sekretaris Daerah beserta para Asisten. Secara umum tingkat ketercapaian target Program Pemda ditunjukkan pada tabel berikut.

**Tabel II-35 Capaian Indikator Kinerja Program Pembangunan Daerah DIY s.d. Triwulan I Tahun 2025**

No	Program Pemda	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD	Realisasi s.d. TW I	% Realisasi	Keterangan
1	Program Pemerataan Kesejahteraan	Indeks Gini	Indeks	0,415	0,428	103,13	Data bersumber dari BPS, sesuai dengan Laporan Kinerja Pemda DIY TW I 2025

No	Program Pemda	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD	Realisasi s.d. TW I	% Realisasi	Keterangan
		Persentase Desa Mandiri	%	69,90	90,56	129,56	Data bersumber dari Biro Bermas, sesuai dengan LKPJ Gub DIY tahun 2024 karena TW I 2025 data capaian belum rilis
2	Program Pengembangan Sektor Unggulan	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Industri Pengolahan, dan Akomodasi Makan Minum	%	3,4	4,06	119,41	Data bersumber dari BPS, sesuai dengan Laporan Kinerja Pemda DIY TW I 2025
3	Program Pengembangan Kewirausahaan	Rasio Kewirausahaan	%	3,8	4,18	110,00	Data bersumber dari Diskop UKM, sesuai dengan Laporan Kinerja Pemda DIY TW I 2025
4	Program Stabilitas Lingkungan Sosial Ekonomi Masyarakat	<i>Crime Rate</i> (Risiko Penduduk Terkena Kejahatan)	Indeks	120,50	72,86	139,54	Data bersumber dari POLDA, sesuai dengan Laporan Kinerja Pemda DIY TW I 2025
5	Program Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	Harapan Lama Sekolah	Indeks	15,76	15,70	99,62	Data bersumber dari BPS, sesuai dengan Laporan Kinerja Pemda DIY TW I 2025
		Persentase Sekolah Jenjang Pendidikan Menengah dengan Nilai Asesmen Literasi Memenuhi Kompetensi Minimum	%	77,38	95,30	123,16	Data bersumber dari Disdikpora, sesuai dengan Laporan Kinerja Pemda DIY TW I 2025
		Persentase Sekolah Jenjang Pendidikan Menengah dengan Nilai Asesmen Numerasi Memenuhi	%	60,52	94,78	156,61	Data bersumber dari Disdikpora, sesuai dengan Laporan Kinerja Pemda DIY TW I 2025

No	Program Pemda	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD	Realisasi s.d. TW I	% Realisasi	Keterangan
		Kompetensi Minimum					
6	Program Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	Indeks	75,21	75,36	100,20	Data bersumber dari BPS, sesuai dengan Laporan Kinerja Pemda DIY TW I 2025
		Prevalensi <i>Stunting</i>	%	12,90	17,4	65,12	Data bersumber dari Dinkes, sesuai dengan Laporan Kinerja Pemda DIY TW I 2025
		Persentase Penduduk yang Mendapatkan Layanan Dasar Layak	%	98,802	96,83	98,00	Data bersumber dari DPUPESDM, sesuai dengan Laporan Kinerja Pemda DIY TW I 2025
7	Program Peningkatan Kualitas Sosial Masyarakat	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	77,37	78,46	101,02	Data bersumber dari BPS, sesuai dengan Laporan Kinerja Pemda DIY TW I 2025
		<i>Total Fertility Rate (TFR)</i>	Indeks	1,8 - 2,2	1,83	100	Data bersumber dari BKKBN, sesuai dengan Laporan Kinerja Pemda DIY TW I 2025
8	Program Pelestarian Budaya Benda dan Tak Benda	Budaya Benda dan Tak Benda yang Diapresiasi oleh Pihak Luar Pemda DIY (Regional, Nasional, Internasional)	Jumlah	355	399	112,39	Data bersumber dari Disbud, sesuai dengan Laporan Kinerja Pemda DIY TW I 2025
9	Program Pengembangan Pusat Pertumbuhan dan Pemerataan Infrastruktur	Persentase Penyediaan Infrastruktur Pendukung Pengembangan Ekonomi	%	76,70	74,04	96,53	Data bersumber dari DPUPESDM dan Bapperida, sesuai dengan Laporan Kinerja Pemda DIY TW I 2025

No	Program Pemda	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD	Realisasi s.d. TW I	% Realisasi	Keterangan
		Rata-Rata Pertumbuhan Ekonomi pada Kabupaten/ Kota yang Belum Maju (Bantul, Gunungkidul, Kulon Progo)	%	5,76	4,87	84,55	Data bersumber dari BPS, sesuai dengan Laporan Kinerja Pemda DIY TW I 2025
10	Program Sinergitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	88,77	87,03	98,04	Data bersumber dari Biro Organisasi, sesuai dengan Laporan Kinerja Pemda DIY TW I 2025
		Indeks Kematangan SPBE	Indeks	3,17	4,53	142,90	Data bersumber dari Diskominfo, sesuai dengan Laporan Kinerja Pemda DIY TW I 2025
11	Program Peningkatan Kualitas Demokrasi	Indeks Kebebasan	Indeks	74,91	77,76	103,80	Data bersumber dari BPS, sesuai dengan Laporan Kinerja Pemda DIY TW I 2025
		Indeks Kesetaraan	Indeks	87,89	89,21	101,50	Data bersumber dari BPS, sesuai dengan Laporan Kinerja Pemda DIY TW I 2025
12	Program Tata Kelola Lingkungan Hidup	Penurunan Emisi GRK	Ribu Ton CO2eq	2.641	3.269,42	123,79	Data bersumber dari Bapperida, sesuai dengan Laporan Kinerja Pemda DIY TW I 2025
13	Program Keterpaduan Perwujudan Pola Ruang	Perwujudan Pola Ruang	%	94,48	93,26	98,71	Data bersumber dari DPTR, sesuai dengan Laporan Kinerja Pemda DIY TW I 2025
		Capaian Fasilitasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Bidang Tanah Kasultanan, Kadipaten,	%	27,51	29,70	107,96	Data bersumber dari DPTR, sesuai dengan Laporan Kinerja Pemda DIY TW I 2025

No	Program Pemda	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD	Realisasi s.d. TW I	% Realisasi	Keterangan
		dan Tanah Desa					
14	Program Peningkatan Ketahanan Daerah	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Indeks	0,75	0,70	93,33	Data bersumber dari BPBD, sesuai dengan Laporan Kinerja Pemda DIY TW I 2025

Sumber: Laporan Kinerja Pemda DIY TW I 2025, 2025

Berdasarkan tabel di atas, capaian kinerja indikator Program Pemda tahun 2025 (bulan Maret) dari 24 indikator kinerja, terdapat 7 indikator kinerja yang tidak memenuhi target atau realisasi di bawah 100%. Sementara, 17 indikator kinerja capaiannya telah sesuai target atau bahkan kinerja capaiannya telah melebihi 100%. Karena sifat datanya, sebagian besar capaian final indikator kinerja program akan diperoleh pada akhir tahun 2025.

Merujuk pada hasil pengukuran terhadap indikator-indikator Program Pemda DIY sampai dengan Triwulan I, 2025 beberapa indikator belum tercapai sesuai target antara lain :

1. Harapan Lama Sekolah
2. Persentase Penduduk yang Mendapatkan Layanan Dasar Layak
3. Persentase Penyediaan Infrastruktur Pendukung Pengembangan Ekonomi
4. Rata-Rata Pertumbuhan Ekonomi pada Kabupaten/ Kota yang Belum Maju (Bantul, Gunungkidul, Kulon Progo)
5. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
6. Perwujudan Pola Ruang
7. Indeks Ketahanan Daerah (IKD)

## **II.5 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Program/Sub Kegiatan RKPD DIY sampai dengan Triwulan I, 2025**

Kinerja pelaksanaan program/kegiatan Pemerintah Daerah DIY yang didukung dengan APBD sesuai Peraturan Gubernur DIY Nomor 112 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 telah tersampaikan pada Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Catatan Atas Pelaksanaan APBD Status Triwulan I Tahun Anggaran 2025). Berdasarkan hasil evaluasi tahun Catatan Atas Pelaksanaan APBD Status Triwulan I Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Daerah DIY memiliki 348 program dan 2.382 sub kegiatan dengan pagu Rp5.237.363.379.523,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp800.154.567.876,00 atau dengan persentase capaian 15,28%, dan realisasi kinerja fisik 22,67%. Berdasarkan uraian tersebut, terjadi deviasi kinerja fisik sebesar -0,27% dan deviasi kinerja keuangan sebesar

5,99%. Secara umum, deviasi disebabkan oleh keterlambatan pelaksanaan kegiatan, perubahan jadwal, serta kegiatan yang diusulkan untuk rasionalisasi sesuai Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Selanjutnya, pada aspek kualitas kinerja kegiatan instansi yang diukur dengan nilai self-assessment Penilaian Kinerja Kegiatan Instansi (PKKI) diperoleh rerata skor seluruh OPD sebesar 82,89 dengan kategori Baik. Sehingga secara umum kinerja perangkat daerah Pemda DIY dapat dikatakan baik.

**Tabel II-36 Rekapitulasi Capaian Kinerja s.d Triwulan I 2025**

No	OPD	Pagu	Jumlah		Target s/d Bulan			Realisasi s/d Bulan		
			Program	DPA	Keuangan		Fisik	Keuangan		Fisik
					(RP)	(%)	(%)	(RP)	(%)	(%)
1	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	26.345.086.750	3	45	5.811.307.081	22,06	23,8	4.177.286.509	15,86	23,8
2	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	30.017.234.794	7	38	14.976.404.022	49,89	49,9	13.670.538.997	45,54	48,81
3	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	20.622.803.924	4	27	5.772.241.261	27,99	28,03	3.630.058.646	17,6	28,03
4	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	26.429.477.000	3	32	5.278.934.818	19,97	20,67	4.017.396.968	15,2	20,67
5	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET	1.000.042.377.438	4	60	153.926.858.645	15,39	15,8	46.393.310.043	4,64	15,8
6	BADAN PENGHUBUNG DAERAH	12.412.792.702	3	25	3.097.520.292	24,95	24,97	2.144.088.526	17,27	24,97
7	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH	22.566.502.674	5	41	6.146.467.622	27,24	31,41	3.294.246.288	14,6	31,41
8	BALAI KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN YOGYAKARTA	6.363.946.725	2	20	1.068.763.892	16,79	21,73	998.138.837	15,68	21,73
9	BALAI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA	2.162.688.400	3	17	545.729.953	25,23	27,68	473.811.517	21,91	27,68
10	BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DAN KALIBRASI	9.724.398.200	2	10	1.555.971.220	16	23,24	1.364.116.633	14,03	23,24
11	BALAI LATIHAN KERJA DAN PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS	4.618.624.150	4	21	626.296.258	13,56	16,91	477.162.954	10,33	16,53
12	BALAI LATIHAN PENDIDIKAN TEKNIK	6.465.603.490	2	16	1.054.707.450	16,31	16,35	1.000.677.628	15,48	16,35
13	BALAI LAYANAN PERPUSTAKAAN	2.394.142.000	3	20	484.796.300	20,25	21,6	422.612.594	17,65	21,6
14	BALAI PELATIHAN KESEHATAN	5.698.986.300	2	6	587.291.550	10,31	10,31	550.144.753	9,65	10,31

No	OPD	Pagu	Jumlah		Target s/d Bulan			Realisasi s/d Bulan		
			Program	DPA	Keuangan		Fisik	Keuangan		Fisik
					(RP)	(%)	(%)	(RP)	(%)	(%)
15	BALAI PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA	4.521.948.000	2	23	1.292.640.400	28,59	29,97	1.272.531.157	28,14	29,97
16	BALAI PEMUDA DAN OLAH RAGA	81.352.071.500	4	26	24.977.440.300	30,7	27,32	39.043.089.152	47,99	67,86
17	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN BANTUL	37.768.778.720	2	30	1.248.006.571	3,3	5,62	1.173.949.877	3,11	5,62
18	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL	21.277.472.050	2	28	2.757.584.500	12,96	16,12	2.628.731.632	12,35	16,12
19	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN KULON PROGO	17.067.263.100	2	29	1.772.248.797	10,38	12,44	1.571.730.241	9,21	12,44
20	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN SLEMAN	20.941.093.600	2	30	2.872.129.809	13,72	17,33	2.749.007.750	13,13	17,33
21	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KOTA YOGYAKARTA	19.888.711.809	2	30	3.018.127.356	15,18	15,2	2.874.712.732	14,45	15,2
22	BALAI PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAN PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	20.848.901.431	3	18	1.427.647.550	6,85	7,27	1.309.843.980	6,28	7,21
23	BALAI PENGELOLAAN TERMINAL DAN PERPARKIRAN	4.217.214.550	2	18	893.086.450	21,18	51,22	749.294.865	17,77	51,22
24	BALAI PENGEMBANGAN PERBENIHAN DAN PENGAWASAN MUTU BENIH TANAMAN PERTANIAN	6.796.721.014	4	23	1.386.776.685	20,4	21,77	1.073.444.456	15,79	21,75
25	BALAI PENGEMBANGAN PERBIBITAN TERNAK DAN DIAGNOSTIK KEHEWANAN	7.460.219.400	4	19	911.666.262	12,22	13,3	872.856.340	11,7	13,3
26	BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERIKANAN BUDIDAYA	11.796.073.900	2	21	1.437.098.551	12,18	22,83	1.356.070.754	11,5	22,83

No	OPD	Pagu	Jumlah		Target s/d Bulan			Realisasi s/d Bulan		
			Program	DPA	Keuangan		Fisik	Keuangan		Fisik
					(RP)	(%)	(%)	(RP)	(%)	(%)
27	BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA	2.178.717.200	3	16	592.182.400	27,18	28,87	456.876.522	20,97	28,87
28	BALAI PENYELENGGARA JAMINAN KESEHATAN SOSIAL	51.031.414.000	2	15	8.331.044.380	16,33	20,49	8.122.766.437	15,92	20,49
29	BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL REMAJA	3.280.243.500	2	21	1.080.399.500	32,94	35,21	1.037.692.927	31,63	35,53
30	BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL WANITA	1.720.862.500	2	26	551.646.900	32,06	32,05	545.555.027	31,7	32,05
31	BALAI REHABILITASI SOSIAL BINA KARYA DAN LARAS	5.854.474.692	2	39	1.437.197.300	24,55	26,45	1.415.558.005	24,18	26,45
32	BALAI REHABILITASI SOSIAL DAN PENGASUHAN ANAK	2.858.814.100	2	27	860.059.600	30,08	30,08	836.983.041	29,28	30,08
33	BALAI REHABILITASI TERPADU PENYANDANG DISABILITAS	3.574.288.450	2	26	920.872.500	25,76	26,33	905.376.485	25,33	26,33
34	BALAI TEKNOLOGI KOMUNIKASI PENDIDIKAN	7.599.243.100	2	21	1.301.383.150	17,13	17,3	1.284.431.605	16,9	17,3
35	BIRO HUKUM	4.455.238.072	4	34	775.891.430	17,42	34,52	728.294.667	16,35	34,52
36	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	8.657.539.300	3	26	2.852.707.800	32,95	32,97	2.509.820.402	28,99	32,97
37	BIRO ORGANISASI	1.783.272.350	2	23	324.800.450	18,21	20,47	171.763.145	9,63	20,47
38	BIRO PENGADAAN BARANG/JASA	2.317.714.000	3	22	362.509.950	15,64	25,18	328.767.369	14,19	24,72
39	BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN	2.851.885.900	3	22	323.523.450	11,34	14,94	253.079.500	8,87	14,94

No	OPD	Pagu	Jumlah		Target s/d Bulan			Realisasi s/d Bulan		
			Program	DPA	Keuangan		Fisik	Keuangan		Fisik
					(RP)	(%)	(%)	(RP)	(%)	(%)
40	BIRO PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	1.650.491.750	3	24	129.854.750	7,87	14,53	125.852.601	7,63	14,53
41	BIRO TATA PEMERINTAHAN	2.339.969.700	4	23	999.061.750	42,7	42,92	639.265.225	27,32	42,92
42	BIRO UMUM DAN PROTOKOL	16.404.745.860	2	31	3.646.416.514	22,23	22,9	2.969.950.484	18,1	22,9
43	DINAS KEBUDAYAAN	320.898.658.689	2	45	52.159.804.210	16,25	16,29	44.954.298.892	14,01	16,02
44	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	34.144.922.870	8	44	7.240.415.715	21,21	22,67	5.153.056.007	15,09	22,67
45	DINAS KESEHATAN	53.226.943.222	6	57	11.431.444.196	21,48	21,95	7.888.523.067	14,82	21,95
46	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	46.964.769.549	5	28	9.484.073.657	20,19	22,53	6.859.358.101	14,61	22,53
47	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	48.363.098.139	10	39	8.895.130.269	18,39	19,95	3.260.516.785	6,74	19,16
48	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	70.311.342.402	12	56	16.278.959.737	23,15	26,05	12.535.172.016	17,83	26,01
49	DINAS PARIWISATA	30.202.481.669	7	44	6.322.234.324	20,93	21,77	3.768.281.636	12,48	20,94
50	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	351.723.436.523	14	65	44.544.506.420	12,66	14,9	21.287.238.148	6,05	10,36
51	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	17.752.217.310	8	32	5.412.698.561	30,49	30,82	4.028.961.799	22,7	30,82
52	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK	21.675.976.304	11	66	5.276.109.434	24,34	24,54	3.403.953.873	15,7	24,54

No	OPD	Pagu	Jumlah		Target s/d Bulan			Realisasi s/d Bulan		
			Program	DPA	Keuangan		Fisik	Keuangan		Fisik
					(RP)	(%)	(%)	(RP)	(%)	(%)
53	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	13.165.059.615	7	36	3.687.758.466	28,01	31,25	2.375.115.026	18,04	31,25
54	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	1.499.887.410.462	6	64	405.968.699.360	27,07	27,09	357.932.701.392	23,86	27,11
55	DINAS PERHUBUNGAN	135.733.649.689	3	43	23.270.362.630	17,14	25,1	18.772.534.357	13,83	25,1
56	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	35.542.311.331	11	40	8.713.057.367	24,51	25,03	6.960.375.195	19,58	25,03
57	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	24.180.680.143	5	44	6.605.400.894	27,32	27,39	5.095.088.117	21,07	27,37
58	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG	28.326.785.874	6	37	4.390.256.364	15,5	18,85	3.480.374.905	12,29	18,85
59	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	61.141.718.262	12	50	17.272.734.022	28,25	28,48	12.077.613.059	19,75	28,45
60	DINAS SOSIAL	95.201.015.100	9	73	25.849.142.292	27,15	27,18	20.894.715.152	21,95	27,18
61	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	39.915.775.848	8	49	10.192.120.954	25,53	25,99	8.537.927.438	21,39	25,85
62	INSPEKTORAT	28.284.119.874	3	40	7.854.488.504	27,77	32,44	5.516.637.479	19,5	32,4
63	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN BANTUL	4.408.461.400	2	19	1.141.234.379	25,89	28,49	969.790.258	22	28,49
64	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN GUNUNG KIDUL	2.289.888.700	2	20	529.869.300	23,14	23,32	480.442.152	20,98	23,32
65	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN KULONPROGO	2.547.806.450	2	21	837.064.416	32,85	33,53	747.238.245	29,33	33,5

No	OPD	Pagu	Jumlah		Target s/d Bulan			Realisasi s/d Bulan		
			Program	DPA	Keuangan		Fisik	Keuangan		Fisik
					(RP)	(%)	(%)	(RP)	(%)	(%)
66	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN SLEMAN	4.477.452.800	2	19	940.386.174	21	21,36	889.298.212	19,86	21,36
67	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KOTA YOGYAKARTA	2.316.503.700	2	19	446.379.000	19,27	20,34	412.912.294	17,82	20,34
68	MUSEUM NEGERI SONOBUDOYO	14.157.111.500	3	20	1.179.353.895	8,33	8,33	1.132.277.622	8	9,74
69	PANIRADYA KAISTIMEWAN	28.410.114.093	2	32	5.809.393.055	20,45	20,68	4.374.039.909	15,4	21,36
70	PELABUHAN PERIKANAN PANTAI	2.682.413.100	2	20	621.494.800	23,17	24,01	610.426.577	22,76	24,01
71	RUMAH SAKIT JIWA GRHASIA	118.425.970.841	3	29	26.706.047.652	22,55	29,91	15.919.380.030	13,44	28,81
72	RUMAH SAKIT PARU RESPIRA	45.546.304.584	2	7	10.903.102.440	23,94	25,71	8.491.749.819	18,64	25,71
73	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	30.665.888.036	4	28	7.215.161.513	23,53	24,86	5.564.107.813	18,14	24,47
74	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 CANGKRINGAN	2.217.622.000	2	2	210.037.800	9,47	9,47	206.010.608	9,29	9,47
75	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 GEDANGSARI	942.090.000	2	2	71.653.733	7,61	8,7	71.290.190	7,57	8,7
76	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 GODEAN	2.234.610.000	2	2	146.474.600	6,55	6,58	141.461.007	6,33	6,58
77	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 KALASAN	2.468.699.000	2	2	399.832.200	16,2	17,22	375.584.610	15,21	17,22
78	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 NANGGULAN	1.811.360.000	2	2	205.601.766	11,35	11,34	191.157.632	10,55	11,34
79	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 PANDAK	2.433.374.900	2	2	150.358.000	6,18	9,26	154.257.806	6,34	9,26

No	OPD	Pagu	Jumlah		Target s/d Bulan			Realisasi s/d Bulan		
			Program	DPA	Keuangan		Fisik	Keuangan		Fisik
					(RP)	(%)	(%)	(RP)	(%)	(%)
80	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 PUNDONG	1.748.285.000	2	2	210.496.000	12,04	12,03	148.697.609	8,51	12,03
81	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 SAPTOSARI	2.357.559.000	2	2	111.317.080	4,72	4,85	110.935.300	4,71	4,85
82	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 SEWON	5.119.150.000	2	2	350.974.775	6,86	7,24	351.029.000	6,86	7,24
83	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 SEYEGAN	3.429.100.000	2	2	286.925.000	8,37	8,43	273.732.644	7,98	8,09
84	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 WONOSARI	2.832.939.250	2	2	284.017.377	10,03	10,03	264.122.753	9,32	10,03
85	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 DEPOK	5.308.362.000	2	2	410.457.393	7,73	8,14	337.074.213	6,35	8,14
86	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 GODEAN	1.889.964.000	2	2	175.984.290	9,31	10,02	199.957.849	10,58	10,02
87	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 KASIHAN	983.061.950	2	2	138.500.100	14,09	14,09	14.555.000	1,48	13,84
88	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 PENGASIH	3.976.675.000	2	2	416.471.008	10,47	10,46	396.464.838	9,97	10,46
89	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 WONOSARI	3.310.184.000	2	2	254.054.160	7,67	7,72	281.102.841	8,49	10,45
90	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 YOGYAKARTA	5.026.189.000	2	2	351.167.822	6,99	6,99	326.505.267	6,5	6,99
91	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 3 WONOSARI	2.609.665.000	2	2	128.713.500	4,93	4,93	149.228.929	5,72	5,72

No	OPD	Pagu	Jumlah		Target s/d Bulan			Realisasi s/d Bulan		
			Program	DPA	Keuangan		Fisik	Keuangan		Fisik
					(RP)	(%)	(%)	(RP)	(%)	(%)
92	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 3 YOGYAKARTA	4.089.941.000	2	2	486.854.200	11,9	15,1	406.913.753	9,95	14,65
93	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 4 YOGYAKARTA	4.050.735.000	2	2	384.640.949	9,5	9,54	374.120.377	9,24	9,47
94	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 5 YOGYAKARTA	2.840.549.263	2	2	373.780.673	13,16	13,16	343.064.597	12,08	13,16
95	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 6 YOGYAKARTA	3.906.700.000	2	2	643.996.600	16,48	16,53	580.674.002	14,86	16,53
96	SEKRETARIAT DAERAH	63.310.393.487	1	10	20.038.267.289	31,65	34,09	14.487.153.392	22,88	33,98
97	SEKRETARIAT DPRD	326.833.476.699	2	55	79.528.387.505	24,33	26,38	23.393.790.427	7,16	26,36
98	TAMAN BUDAYA YOGYAKARTA	20.702.357.800	3	18	1.383.880.005	6,68	6,7	580.690.586	2,8	6,51
<b>Jumlah</b>		<b>5.237.363.379.523</b>	<b>348</b>	<b>2382</b>	<b>1.113.739.023.244</b>	<b>21,27</b>	<b>22,4</b>	<b>800.154.567.876</b>	<b>15,28</b>	<b>22,67</b>

## **II.5.1 ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA OUTPUT DAN OUTCOME PERANGKAT DAERAH**

### **1. BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DIY**

Badan Kepegawaian Daerah DIY, sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 untuk capaian indikator kinerja Tujuan “Indeks Profesionalitas ASN”, yang penilaiannya dilakukan oleh BKN, belum ada realisasi di triwulan I. Demikian juga pada Indikator kinerja sasaran, dari total 2 (dua) indikator yang dimiliki, kedua indikator tersebut, realisasi ada di triwulan IV. Selanjutnya pada indikator kinerja sasaran yang berjumlah 9 (sembilan) indikator, terdapat 1 (satu) indikator yang belum mencapai target yaitu “Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah”, sedangkan 8 (delapan) indikator kinerja program lainnya, realisasi ada di triwulan IV. Kemudian, pada Sub Kegiatan, dari total 45 sub kegiatan, realisasi fisik sudah sesuai target yang ditetapkan, namun terdapat deviasi keuangan dikarenakan faktor eksternal adanya kebijakan efisiensi anggaran, belanja makan dan minum rapat menyesuaikan dengan pelaksanaan kegiatan.

### **2. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DIY**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, untuk indikator kinerja tujuan “Terwujudnya Kebebasan dalam Kehidupan Demokrasi di DIY yang berkualitas” telah mencapai target. Selanjutnya pada indikator kinerja sasaran sampai dengan triwulan I 2025, dari 2 (dua) indikator, realisasi seluruhnya sudah sesuai target. Kemudian untuk indikator kinerja program, dari 7 (tujuh) program yang ada, terdapat 2 (dua) indikator yang belum memenuhi target kinerja Triwulan I, antara lain Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan dan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi karena seluruh kegiatan pada program tersebut bukan termasuk ke dalam kegiatan prioritas, sehingga dilakukan pergeseran anggaran kas dari triwulan I, untuk pelaksanaan kegiatan mulai triwulan II. Sementara itu, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi disebabkan oleh data kinerja yang bersifat tahunan sehingga akan tercapai pada Triwulan IV tahun 2025. Untuk Sub Kegiatan, dari total 38 subkegiatan, terdapat 3 (tiga) subkegiatan yang tidak mencapai target fisik yang telah ditentukan karena terdapat aktivitas yang belum dapat direalisasikan. Selain itu, terdapat beberapa aktivitas yang tidak dapat dilaksanakan karena terdampak kebijakan rasionalisasi/pemotongan anggaran. Realisasi fisik hampir memenuhi target, dengan deviasi yang hanya berada pada angka 1,09%. Kinerja keuangan memiliki deviasi sebesar 4,35%

dari target kinerja keuangan sebesar 49,89% dan telah terealisasi sebesar 45,54%. Deviasi keuangan terbesar terjadi pada sub kegiatan Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya karena seluruh aktivitas belum dapat dilaksanakan, sehubungan dengan kegiatan tidak termasuk dalam daftar kegiatan prioritas Triwulan I. Selain itu, terdapat beberapa aktivitas yang tidak dapat dilaksanakan karena terdampak kebijakan *rasionalisasi/pemotongan* anggaran.

### 3. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DIY

Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 untuk capaian indikator kinerja Tujuan yang dimiliki, yaitu “Kontribusi capaian 5 prioritas dalam IKD terhadap Ketahanan Daerah DIY”, realisasi sudah mencapai target yang ditetapkan pada triwulan I. Selanjutnya untuk indikator kinerja sasaran, dari total 2 (dua) indikator sasaran, semua tercapai sesuai target di triwulan I. Kemudian pada Sub kegiatan, dari total 27 Sub Kegiatan, realisasi fisik sesuai target pada triwulan I, sedangkan realisasi keuangan terdapat deviasi yang disebabkan karena menyesuaikan kebutuhan, seperti pada gaji dan tunjangan pegawai.

### 4. BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DIY

Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, untuk indikator kinerja tujuan “Persentase Aparatur Sipil Negara yang mengikuti pelatihan dengan predikat minimal memuaskan” belum mencapai target yang ditetapkan karena pada TW I belum ada penyelenggaraan diklat yang telah selesai, sehingga belum dapat diperoleh presentase untuk indikator Persentase Aparatur Sipil Negara yang mengikuti pelatihan dengan predikat minimal memuaskan. Selanjutnya pada indikator kinerja sasaran sampai dengan triwulan I 2025, terdapat 2 (dua) sasaran kinerja. Terdapat 1 (satu) indikator kinerja sasaran yang pada triwulan I belum mencapai target karena beban pekerjaan yang tinggi dari ASN mempersempit peluang untuk mengikuti pelatihan/bimtek, kurangnya motivasi ASN dalam mengikuti pelatihan karena belum tersedianya kompensasi yang dapat diterima secara langsung dan beberapa kebutuhan pelatihan belum tersedia sesuai kebutuhan. Kemudian untuk indikator kinerja Program, terdapat total 3 (tiga) indikator, untuk indikator Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah belum mencapai target karena belum ada pelatihan yang selesai. Untuk pelaksanaan sub kegiatan, dari 32 sub kegiatan pada triwulan I terdapat 2 (dua) sub kegiatan yang ditargetkan selesai 100% dan secara fisik telah sesuai target. Secara kinerja fisik, realisasi fisik telah mencapai target sehingga tidak

terdapat deviasi. Untuk kinerja keuangan, masih menunjukkan adanya deviasi antara target dengan realisasi keuangan yang relatif kecil yaitu sebesar 5,81%. Beberapa deviasi disebabkan oleh sifat sub kegiatan yang merupakan persediaan/menyesuaikan kebutuhan, efisiensi, serta beberapa permasalahan terkait standar satuan harga.

#### 5. BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DIY

Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY sampai dengan triwulan I Tahun 2025, untuk indikator kinerja tujuan “Pengelolaan keuangan, pendapatan, dan aset daerah yang transparan dan akuntabel “ telah sesuai dengan target yang ditetapkan. Selanjutnya pada indikator kinerja sasaran sampai dengan triwulan I 2025, dari total 3 (tiga) indikator, seluruhnya telah sesuai dengan target yang ditetapkan. Kemudian untuk indikator kinerja program, dari total 4 (empat) indikator seluruhnya sudah sesuai target pada triwulan I. Untuk Sub Kegiatan, dari total 73 Sub Kegiatan, secara fisik seluruhnya telah terlaksana 100%. Namun, secara keuangan terjadi deviasi yang disebabkan antara lain terdapat sub kegiatan yang bersifat persediaan, adanya selisih harga antara SHS dengan harga pasar, serta adanya efisiensi belanja.

#### 6. BADAN PENGHUBUNG DAERAH DIY

Badan Penghubung Daerah DIY sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, realisasi indikator kinerja Tujuan yang dimiliki, yaitu “Persentase Layanan penghubung yang berkualitas dalam menunjang koordinasi Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat dan pemangku kepentingan lain”, telah tercapai sesuai target pada Triwulan I. Selanjutnya dari total 2 (dua) indikator sasaran yang dimiliki, 1 (satu) indikator telah mencapai target pada triwulan I, sedangkan 1 (satu) indikator lainnya “Kategori Reformasi Birokrasi Badan Penghubung Daerah DIY”, realisasi belum mencapai target, karena masih menggunakan capaian tahun 2024. Kemudian untuk indikator kinerja Program, dari total 3 (tiga) indikator yang dimiliki, terdapat 2 (dua) indikator telah mencapai target pada triwulan I, sedangkan 1 (satu) indikator, yaitu “Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah” belum mencapai target. Kemudian, dari total 25 Sub Kegiatan, untuk Kinerja Fisik Sub Kegiatan sampai triwulan I, realisasi sudah sesuai dengan target. Sedangkan untuk kinerja keuangan terdapat deviasi yang sebagian besar disebabkan karena adanya rasionalisasi, anggaran berkurang pada DPA pergeseran, efisiensi, serta pembayaran menyesuaikan kebutuhan.

#### 7. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH DIY

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) DIY sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, untuk kinerja tujuan OPD terdapat 1 (satu) indikator yaitu Persentase ketercapaian tujuan perangkat daerah DIY dengan kriteria tinggi dan sangat tinggi, dengan capaian kinerja masih menggunakan tahun sebelumnya. Kinerja tujuan BAPPERIDA DIY baru dapat dihitung pada akhir Triwulan IV dikarenakan kinerja tujuan Bapperida DIY diperoleh dari kinerja tujuan seluruh OPD akhir tahun 2025. Sampai dengan Triwulan I yang sudah dilaksanakan yaitu melakukan pendampingan, monitoring dan evaluasi di masing-masing OPD mitra bidang sektoral. Hal yang sama terjadi pada kinerja sasaran, capaian dua indikator kinerja sasaran semuanya juga masih menggunakan realisasi tahun sebelumnya (capaian realisasi baru dapat dihitung pada akhir tahun 2025). Pada kinerja program dengan jumlah 12 indikator kinerja program yang telah dilaksanakan, hanya terdapat 1 (satu) indikator kinerja program yang dapat dilakukan perhitungan pada triwulan I yaitu Indikator kinerja program “Persentase keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan (RPJMD, RENSTRA, RKPD) - Bidang Sarana dan Prasarana”, dengan capaian sebesar 96,30% atau melebihi dari target sebesar 92% atau tercapai sebesar 104,67% terhadap target. Sedangkan 11 (sebelas) Indikator kinerja program yang lain, baru dapat dihitung pada akhir Triwulan IV. Selanjutnya pada kinerja sub kegiatan dengan total sejumlah 41 sub kegiatan tercermin pada progres Kinerja fisik, sampai dengan triwulan I tahun 2025 realisasi fisik sudah memenuhi dari target fisik yang ditetapkan sebesar 31,41%. Sedangkan progres Kinerja keuangan masih mengalami deviasi sebesar 12,64%, dari target sebesar 27,24% terealisasi baru sebesar 14,60% dan terdapat deviasi keuangan lebih dari 10% pada 5 sub kegiatan. Deviasi keuangan terbesar terjadi pada sub kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga. Penyebab deviasi keuangan tersebut dikarenakan adanya sisa belanja atau efisiensi dari penyesuaian harga pasar, karena kegiatan sudah selesai dilaksanakan.

#### 8. BALAI KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN YOGYAKARTA DIY

Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Yogyakarta sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, untuk capaian indikator kinerja Program, dari total dua indikator, semua Indikator sudah sesuai target pada TW I tahun 2025. Sedangkan capaian kinerja sub kegiatan, dari total sebanyak 20 sub kegiatan strategis menunjukkan hasil Baik, di tunjukkan dengan dengan tidak adanya deviasi fisik dari target. Sedangkan pada kinerja keuangan masih terdapat deviasi

keuangan sebesar 1,11% yang disebabkan adanya selisih harga di pasaran yang lebih rendah dibandingkan SHBJ.

#### 9. BALAI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA DIY

Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja DIY sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 memiliki kinerja sebagai berikut: Untuk indikator Kinerja Program, dari 4 (empat) indikator program, terdapat 2 (dua) indikator yang belum mencapai target yang ditetapkan yaitu: “Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah” dan “Persentase peningkatan produktivitas tenaga kerja dikawasan Selatan”. Hal tersebut karena realisasi baru dapat dihitung di Triwulan IV Tahun 2025. Sedangkan untuk indikator “Persentase SDM K3 yang dilatih yang tersertifikasi” dan “Persentase jumlah pemohon yang terlayani pengujian lingkungan kerja dan pemeriksaan kesehatan kerja” telah sesuai target pada Triwulan I Tahun 2025. Hal tersebut didorong faktor SDM K3 yang dilatih yang tersertifikasi dan jumlah pemohon pelayanan pengujian lingkungan kerja dan pemeriksaan kesehatan kerja telah memenuhi target pelayanan. Selanjutnya untuk kinerja pelaksanaan Sub Kegiatan, dari total 17 Sub Kegiatan, tidak terdapat sub kegiatan yang capaian fisiknya mengalami deviasi. Namun terdapat 4 (empat) Sub Kegiatan yang realisasi keuangan mengalami deviasi, hal tersebut dikarenakan efisiensi belanja pelaksanaan sub kegiatan.

#### 10. BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DAN KALIBRASI DIY

Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi DIY sampai dengan triwulan I Tahun 2025, untuk indikator kinerja Program sampai dengan triwulan I 2025, dari total 2 (dua) indikator, seluruh indikator realisasi sudah sesuai target Triwulan I 2025. Selanjutnya untuk Sub Kegiatan, dari total 10 Sub Kegiatan, capaian fisiknya sesuai target pada triwulan I. Realisasi keuangan terdapat deviasi dikarenakan belanja yang menyesuaikan dengan kebutuhan, negosiasi harga pada saat proses pengadaan.

#### 11. BALAI LATIHAN KERJA DAN PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS DIY

Balai Latihan Kerja dan Pengembangan Produktivitas DIY sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 memiliki kinerja sebagai berikut: Untuk indikator Kinerja Program, dari 5 (lima) indikator program, terdapat 3 (tiga) indikator yang belum mencapai target yang ditetapkan yaitu: “Persentase peserta pelatihan yang terampil” indikator “Persentase penumbuhan calon wirausaha baru” dan “Persentase capaian implementasi inovasi layanan public”. Hal

tersebut karena realisasi baru dapat dihitung di Triwulan IV Tahun 2025 dan kendala teknis penatausahaan keuangan. Sedangkan untuk indikator “Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah” dan “Persentase tenaga kerja yang produktivitasnya diatas standar” telah sesuai target pada Triwulan I Tahun 2025. Selanjutnya untuk kinerja pelaksanaan Sub Kegiatan, dari total 21 Sub Kegiatan, terdapat 2 (dua) sub kegiatan yang capaian fisik dan keuangannya mengalami deviasi. Hal tersebut terjadi karena kendala teknis pelaksanaan sub kegiatan.

## 12. BALAI LATIHAN PENDIDIKAN TEKNIK DIY

Balai Latihan Pendidikan Teknik DIY sampai dengan triwulan I Tahun 2025, untuk indikator kinerja program dari 2 indikator belum ada yang tercapai. Pada indikator Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sampai dengan Triwulan I capaiannya di angka 86,65 dari target Triwulan I sebesar 86,71 atau dengan presentase capaian 99,93% dikarenakan beberapa sub kegiatan terdapat deviasi keuangan. Pada indikator Jumlah penerima sertifikat keahlian Teknik belum terdapat capaian pada triwulan I dikarenakan uji kompetensi direncanakan mulai diselenggarakan pada triwulan III setelah siswa SMK menyelesaikan semua mata pelajaran (tamat SMK) atau setelah siswa menyelesaikan mata pelajaran pada semester 5 SMK. Untuk Sub Kegiatan, dari total 16 Sub Kegiatan, Seluruh kegiatan dapat mencapai target fisik. Namun masih terdapat deviasi keuangan disebabkan beberapa belanja yang menyesuaikan dengan kebutuhan, terdapat selisih harga di pasaran yang lebih rendah dibandingkan SHBJ, dan adanya efisiensi anggaran.

## 13. BALAI LAYANAN PERPUSTAKAAN DIY

Balai Layanan Perpustakaan DIY sampai dengan triwulan I Tahun 2025, pada indikator kinerja Program, dari total 3 (tiga) indikator, terdapat 2 (dua) indikator belum memenuhi target pada triwulan I karena realisasi dihitung di akhir tahun, yaitu “Peningkatan Anggota Sepatu Jolifa (Sistem Perpustakaan Terpadu Jogja *Library for All*)” dan “Jumlah Koleksi dan Naskah Kuno yang dirawat dan dilestarikan”. Untuk Sub Kegiatan, dari total 20 Sub Kegiatan, secara fisik realisasi sudah memenuhi target triwulan I, sementara kinerja keuangan terdapat deviasi karena belanja yang menyesuaikan dengan kebutuhan, terdapat selisih harga di pasaran yang lebih rendah dibandingkan SHBJ serta adanya efisiensi anggaran untuk biaya perjalanan dinas dan makanan dan minuman rapat.

#### 14. BALAI PELATIHAN KESEHATAN DIY

Balai Pelatihan Kesehatan DIY sampai dengan triwulan I Tahun 2025, untuk indikator kinerja Program sampai dengan triwulan I 2025, dari total 2 (dua) indikator, 1 (satu) indikator belum mencapai target triwulan yang ditetapkan yaitu indikator Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. Untuk Sub Kegiatan, dari total 6 Sub Kegiatan, capaian fisiknya sesuai target pada triwulan. Realisasi keuangan terdapat deviasi dikarenakan terdapat selisih harga di pasaran yang lebih rendah dibandingkan SHBJ, pembayaran listrik yang dibayarkan di triwulan I sesuai dengan kebutuhan dan penghematan daya serta adanya kendala teknis terkait gerakan efisiensi awal tahun 2025 ini.

#### 15. BALAI PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA DIY

Balai Pelayanan Sosial Tresna Werdha sampai dengan triwulan I Tahun 2025, untuk indikator kinerja Program, dari total 2 (dua) indikator, semua tercapai sesuai dengan target triwulan I. Untuk Sub Kegiatan, dari total 23 Sub Kegiatan, capaian fisiknya sesuai target pada triwulan I. Realisasi keuangan terdapat deviasi karena belanja yang menyesuaikan dengan kebutuhan dan terdapat selisih harga di pasaran yang lebih rendah dibandingkan SHBJ.

#### 16. BALAI PEMUDA DAN OLAH RAGA DIY

Balai Pemuda dan Olahraga DIY sampai dengan triwulan I Tahun 2025, untuk indikator kinerja program dari 4 (empat) indikator telah tercapai 1 (satu) indikator yaitu Persentase Fasilitas Organisasi Kepramukaan. Sedangkan 2 (dua) indikator yaitu Persentase kelompok usaha pemuda di kantong kemiskinan yang memiliki rintisan usaha dan Jumlah atlet yang mengikuti pembinaan intensif Pra POPNAS/POPNAS tidak memiliki target pada triwulan I, kemudian untuk 1 (satu) indikator lainnya yaitu indikator Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tidak tercapai karena hambatan dalam pelaksanaan sub kegiatan di Program Penunjang. Untuk Sub Kegiatan, dari total 26 Sub Kegiatan, Seluruh kegiatan dapat mencapai target fisik dan beberapa capaiannya melebihi target karena kegiatan yang pelaksanaannya mendahului dari yang sudah ditargetkan. Deviasi keuangan disebabkan terbitnya Instruksi Presiden Republik Indonesia (INPRES) Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan mengikuti SE Nomor B/900.1.12/510/SET Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2025. Penyebab lainnya adalah pertukaran pengurus penerima hibah dan teknis pencairan untuk DAU.

#### 17. BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN BANTUL DIY

Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Bantul DIY sampai dengan triwulan I Tahun 2025, untuk indikator kinerja Program, dari total 2 (dua) indikator, ada 1 (satu) Indikator sudah sesuai target pada TW I, sementara masih terdapat 1 (satu) indikator yang belum mencapai target yaitu Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah karena target merupakan target tahunan dan realisasi ada di triwulan IV 2025. Untuk Sub Kegiatan, dari total 30 Sub Kegiatan, capaian fisiknya sudah sesuai target pada triwulan I. sedangkan untuk realisasi keuangan terdapat deviasi karena terdapat selisih harga di pasaran yang lebih rendah dibandingkan DPA dan belanja tagihan listrik yang menyesuaikan dengan kebutuhan (fluktuatif).

#### 18. BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL DIY

Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Gunungkidul DIY sampai dengan triwulan I Tahun 2025, untuk indikator kinerja Program, dari total 2 (dua) indikator, ada 1 (satu) Indikator sudah sesuai target pada TW I, sementara masih terdapat 1 (satu) indikator yang belum mencapai target yaitu Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah karena target merupakan target tahunan dan realisasi ada di triwulan IV 2025. Untuk Sub Kegiatan, dari total 28 Sub Kegiatan, capaian fisiknya sudah sesuai target pada triwulan I. realisasi keuangan terdapat deviasi karena belanja terdapat selisih harga di pasaran yang lebih rendah dibandingkan SHBJ.

#### 19. BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN KULON PROGO DIY

Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Kulon Progo DIY sampai dengan triwulan I Tahun 2025, untuk indikator kinerja Program, dari total 2 (dua) indikator, ada 1 (satu) Indikator sudah sesuai target pada TW I, sementara masih terdapat 1 (satu) indikator yang belum mencapai target yaitu Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah karena target merupakan target tahunan dan realisasi ada di triwulan IV 2025. Untuk Sub Kegiatan, dari total 29 Sub Kegiatan, capaian fisiknya sudah sesuai target pada triwulan I. Sedangkan untuk realisasi keuangan terdapat deviasi karena belanja yang menyesuaikan dengan kebutuhan, dan terdapat selisih harga di pasaran yang lebih rendah dibandingkan harga di DPA.

## 20. BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN SLEMAN DIY

Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Sleman DIY sampai dengan triwulan I Tahun 2025, untuk indikator kinerja Program, dari total 2 (dua) indikator, semua tercapai sesuai dengan target triwulan berkenaan. Untuk Sub Kegiatan, dari total 30 Sub Kegiatan, capaian fisiknya sesuai target pada triwulan I. Sedangkan untuk realisasi keuangan terdapat deviasi karena terdapat selisih harga di pasaran yang lebih rendah dibandingkan SHBJ.

## 21. BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KOTA YOGYAKARTA DIY

Balai Pendidikan Menengah Kota Yogyakarta DIY sampai dengan triwulan I Tahun 2025, untuk indikator kinerja Program, dari total 2 (dua) indikator, semua tercapai sesuai dengan target triwulan berkenaan. Untuk Sub Kegiatan, dari total 28 Sub Kegiatan, capaian fisiknya sesuai target pada triwulan I. Realisasi keuangan terdapat deviasi karena belanja yang menyesuaikan dengan kebutuhan dan terdapat selisih harga di pasaran yang lebih rendah dibandingkan SHBJ.

## 22. BALAI PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAN PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI DIY

Balai Pengelolaan Air Limbah dan Pengembangan Jasa Konstruksi DIY sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 untuk capaian indikator kinerja Program, dari total 4 (empat) indikator, ada 3 (tiga) Indikator sudah sesuai target pada TW I, sementara masih terdapat 1 (satu) indikator yang belum mencapai target karena realisasi ada di triwulan IV 2025. Sedangkan capaian kinerja sub kegiatan, sebanyak 14 sub kegiatan utama telah menunjukkan hasil baik, tetapi masih terdapat deviasi fisik sebesar 0,17%. Hal ini disebabkan karena terdapat 1 (satu) sub kegiatan yang termasuk dalam usulan rasionalisasi yang merujuk pada Surat Edaran No. B/900.1.12/510/SET TAHUN 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam APBD TA 2025 tindak lanjut atas Inpres RI No. 1 tahun 2025. Sedangkan kinerja keuangan sub kegiatan masih terdapat deviasi keuangan sebesar 0,57%, yang disebabkan oleh belanja yang menyesuaikan dengan kebutuhan, selisih harga di pasaran yang lebih rendah dibandingkan SHBJ, serta termasuk dalam usulan rasionalisasi.

## 23. BALAI PENGELOLAAN TERMINAL DAN PERPARKIRAN DIY

Balai Pengelolaan Terminal dan Perparkiran Dinas Perhubungan DIY sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 memiliki sejumlah dua program dan indikator kinerja program sebanyak tiga indikator dengan persentase capaian 100%.

Balai Pengelolaan Terminal dan Perparkiran Dinas Perhubungan DIY melaksanakan total sebanyak 18 sub kegiatan utama yang telah menunjukkan hasil baik, dengan tidak ada deviasi fisik dan tidak ada deviasi keuangan di atas 10%. Deviasi keuangan sebesar 3,41% terjadi karena selisih harga di pasaran dan harga di aplikasi Mbiz yang lebih rendah dibandingkan dengan SHBJ, selain itu adanya selisih dari pembayaran tagihan telepon, air, dan listrik yang dibayarkan sesuai dengan tagihan. Pada triwulan I tahun 2025 terdapat satu sub kegiatan yang ditargetkan selesai dan telah terealisasi 100% yaitu sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat.

#### 24. BALAI PENGEMBANGAN PERBENIHAN DAN PENGAWASAN MUTU BENIH TANAMAN PERTANIAN DIY

Balai Pengembangan Perbenihan dan Pengawasan Mutu Benih Tanaman Pertanian DIY sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 memiliki kinerja sebagai berikut: Untuk indikator Kinerja Program, dari 4 (empat) indikator program, terdapat hanya 1 (satu) indikator yang belum mencapai target yang ditetapkan yaitu: "Persentase peningkatan prasarana pertanian yang dibangun dan digunakan". Hal tersebut karena Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Berdasarkan Kepmenkeu RI No 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025, Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pangan Pertanian termasuk dana yang dicadangkan sehingga kegiatan yang didanai melalui DAK Fisik Bidang Pangan Pertanian untuk Provinsi DIY ditiadakan. Sedangkan untuk 3 (tiga) indikator lain yaitu "Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah" indikator "Persentase benih tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan bersertifikat yang terdistribusi" dan "Luas areal pertanian di satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten" telah mencapai target pada Triwulan I Tahun 2025. Selanjutnya untuk kinerja pelaksanaan Sub Kegiatan, dari total 23 (dua puluh tiga) Sub Kegiatan, terdapat 1 (satu) sub kegiatan yang capaian fisiknya mengalami deviasi. Hal tersebut terjadi karena terdapat kendala teknis dalam pelaksanaan kegiatan. Selanjutnya terdapat 5 (lima) Sub Kegiatan yang realisasi keuangan mengalami deviasi, hal tersebut dikarenakan kebijakan efisiensi anggaran serta efisiensi belanja pelaksanaan sub kegiatan.

#### 25. BALAI PENGEMBANGAN PERBIBITAN TERNAK DAN DIAGNOSTIK KEHEWANAN DIY

Balai Pengembangan Perbibitan Ternak dan Diagnostik Kehewan DIY sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 memiliki kinerja sebagai berikut: Untuk

indikator Kinerja Program, dari 4 (empat) indikator program, hanya terdapat 1 (satu) indikator yang belum mencapai target yang ditetapkan yaitu: “Persentase peningkatan Lumbung Mataraman tahap kemandirian”. Hal tersebut karena terdapat kendala teknis pelaksanaan kegiatan. Sedangkan untuk 3 (tiga) indikator lain yaitu “Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah” indikator “Persentase benih dan bibit ternak bersertifikat yang terdistribusi” dan “Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular (Peternakan)” telah melebihi target pada Triwulan I Tahun 2025. Selanjutnya untuk kinerja pelaksanaan Sub Kegiatan, dari total 19 Sub Kegiatan, tidak terdapat sub kegiatan yang capaian fisiknya mengalami deviasi. Namun terdapat 3 (tiga) Sub Kegiatan yang realisasi keuangan mengalami deviasi, hal tersebut dikarenakan efisiensi belanja pelaksanaan sub kegiatan.

#### 26. BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERIKANAN BUDIDAYA DIY

Balai Pengembangan Teknologi Perikanan Budidaya DIY sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 memiliki kinerja sebagai berikut: Untuk indikator Kinerja Program, dari 2 (dua) indikator program yaitu: “Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah” belum mencapai target yang ditetapkan. Untuk indikator “Persentase benih perikanan budidaya bersertifikat yang terdistribusi” belum sesuai target pada Triwulan I Tahun 2025, karena realisasi baru dapat dihitung di Triwulan IV Tahun 2025. Sedangkan untuk kinerja pelaksanaan Sub Kegiatan, dari total 21 Sub Kegiatan, tidak terdapat sub kegiatan yang capaian fisiknya mengalami deviasi. Namun terdapat 12 (sebelas) Sub Kegiatan yang realisasi keuangan mengalami deviasi, hal tersebut dikarenakan efisiensi belanja pelaksanaan sub kegiatan.

#### 27. BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA DIY

Balai Pengembangan Teknologi Tepat Guna DIY sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 memiliki kinerja sebagai berikut: Untuk indikator Kinerja Program, dari 3 (tiga) indikator program, terdapat hanya 1 (satu) indikator yang belum mencapai target yang ditetapkan yaitu: “Persentase capaian implementasi inovasi layanan publik”. Hal tersebut karena realisasi baru bisa dihitung di Triwulan IV Tahun 2025. Sedangkan untuk 2 (dua) indikator lain yaitu “Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah” dan “Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) BPTTG” telah mencapai target pada Triwulan I Tahun 2025. Ketercapaian didukung oleh faktor penyebaran informasi layanan BPTTG melalui media sosial, iklim industri di DIY yang didominasi oleh IKM terutama industri makanan dan kerajinan. Selanjutnya

untuk kinerja pelaksanaan Sub Kegiatan, dari total 16 Sub Kegiatan, tidak terdapat sub kegiatan yang capaian fisiknya mengalami deviasi. Selanjutnya terdapat 2 (dua) Sub Kegiatan yang realisasi keuangan mengalami deviasi, hal tersebut dikarenakan kebijakan efisiensi anggaran serta efisiensi belanja pelaksanaan sub kegiatan.

#### 28. BALAI PENYELENGGARA JAMINAN KESEHATAN SOSIAL DIY

Balai Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial DIY sampai dengan triwulan I Tahun 2025, untuk indikator kinerja Program sampai dengan triwulan I 2025, dari total 2 (dua) indikator, seluruh indikator realisasi sudah sesuai target Triwulan I 2025, yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat. Untuk Program Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat sesuai pemenuhan kebutuhan pembayaran klaim yang diajukan oleh mitra dan faskes. Untuk Sub Kegiatan, dari total 15 Sub Kegiatan, capaian fisiknya sesuai target pada triwulan. Sedangkan realisasi keuangan terdapat deviasi dikarenakan belanja pembayaran klaim jaminan Kesehatan semesta (Jamkesta) sesuai dengan yang diajukan oleh mitra dan faskes, adanya efisiensi sisa pembayaran kontribusi iuran BPJS, belanja menyesuaikan dengan kebutuhan, dan selisih harga di pasaran yang lebih rendah dibandingkan SHBJ.

#### 29. BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL REMAJA DIY

Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja DIY sampai dengan triwulan I Tahun 2025, untuk indikator kinerja Program, dari total 2 (dua) indikator, semua tercapai sesuai dengan target triwulan berkenaan. Untuk Sub Kegiatan, dari total 21 Sub Kegiatan, capaian fisiknya sesuai target pada triwulan I. Sedangkan untuk realisasi keuangan terdapat deviasi karena terdapat perbedaan harga pasar dan SHBJ pada beberapa sub kegiatan yang memiliki efisiensi sisa belanja.

#### 30. BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL WANITA DIY

Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita DIY sampai dengan triwulan I Tahun 2025, untuk indikator kinerja Program, dari total 2 (dua) indikator, untuk indikator Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tercapai sesuai dengan target triwulan I. Namun untuk indikator Persentase Anak bermasalah sosial, Penyandang Disabilitas, Gelandangan, Pengemis, Lanjut Usia Terlantar, Wanita Bermasalah Sosial dan PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan meningkat/dapat berfungsi sosial berdasarkan capaian tahun 2024 belum tercapai. Untuk capaian tahun 2025

akan dihitung pada akhir triwulan IV 2025. Selanjutnya untuk Sub Kegiatan, dari total 26 Sub Kegiatan, capaian fisiknya sesuai target pada triwulan I. Sedangkan realisasi keuangan terdapat deviasi disebabkan adanya efisiensi belanja pengadaan barang dan jasa, seperti negosiasi pembelian dimana harga di pasaran lebih rendah dibandingkan SHBJ, serta pembelian barang disesuaikan dengan kebutuhan.

#### 31. BALAI REHABILITASI SOSIAL BINA KARYA DAN LARAS DIY

Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras DIY sampai dengan triwulan I Tahun 2025, untuk indikator kinerja Program, dari total 2 (dua) indikator, semua tercapai sesuai dengan target triwulan berkenaan. Untuk Sub Kegiatan, dari total 39 Sub Kegiatan, capaian fisiknya sesuai target pada triwulan I. Realisasi keuangan terdapat deviasi karena adanya efisiensi belanja yang menyesuaikan dengan kebutuhan, sisa belanja karena adanya selisih harga di pasaran yang lebih rendah dibandingkan SHBJ serta adanya rasionalisasi anggaran.

#### 32. BALAI REHABILITASI SOSIAL DAN PENGASUHAN ANAK DIY

Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak DIY sampai dengan triwulan I Tahun 2025, untuk indikator kinerja Program, dari total 2 (dua) indikator, semua tercapai sesuai dengan target triwulan berkenaan. Untuk Sub Kegiatan, dari total 27 Sub Kegiatan, capaian fisiknya sesuai target pada triwulan I. Sedangkan realisasi keuangan terdapat deviasi karena adanya belanja yang menyesuaikan dengan kebutuhan, menyesuaikan dengan harga pasar, harga di e-katalog dan toko daring.

#### 33. BALAI REHABILITASI TERPADU PENYANDANG DISABILITAS DIY

Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas DIY sampai dengan triwulan I Tahun 2025, untuk indikator kinerja program dari 2 (dua) indikator telah tercapai 1 (satu) indikator yaitu Nilai PKKI Program Penunjang Urusan. Sedangkan 1 (satu) indikator lainnya yaitu Persentase Anak bermasalah sosial, Penyandang Disabilitas, Gelandangan, Pengemis, Lanjut Usia Terlantar, Wanita Bermasalah Sosial dan PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan meningkat/dapat berfungsi sosial belum dapat dihitung ketercapaiannya karena ketercapaian baru dapat dihitung pada triwulan IV 2025. Untuk Sub Kegiatan, dari total 26 Sub Kegiatan, Seluruh kegiatan dapat mencapai target fisik. Sedangkan untuk kinerja keuangan terdapat deviasi keuangan disebabkan adanya efisiensi belanja pengadaan barang dan jasa, seperti

karena perbedaan harga antara SHBJ dengan harga pasaran, penyesuaian kebutuhan listrik dan layanan sampah.

#### 34. BALAI TEKNOLOGI KOMUNIKASI PENDIDIKAN DIY

Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan DIY sampai dengan triwulan I Tahun 2025, untuk indikator kinerja program dari 2 (dua) indikator telah tercapai 1 (satu) indikator yaitu Nilai PKKI Program Penunjang Urusan. Sedangkan 1 (satu) indikator lainnya yaitu Persentase guru jenjang Pendidikan menengah dan khusus pengguna media pembelajaran Jogja Belajar tidak tercapai sesuai target karena masih kesulitan membagi waktu guru antara mengikuti Bimtek dan mengajar di sekolah. Untuk Sub Kegiatan, dari total 21 Sub Kegiatan, Seluruh kegiatan dapat mencapai target fisik. Deviasi keuangan disebabkan belanja yang menyesuaikan dengan kebutuhan, terdapat selisih harga di pasaran yang lebih rendah dibandingkan SHBJ.

#### 35. BIRO HUKUM DIY

Biro Hukum Sekretariat Daerah DIY sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, untuk indikator kinerja tujuan yang dimiliki, yaitu “Persentase layanan hukum yang berkualitas”, realisasinya telah sesuai target. Demikian juga untuk indikator sasaran yang berjumlah 2 (dua) indikator semuanya sudah sesuai target. Kemudian dari 4 (empat) indikator kinerja Program yang dimiliki, 1 (satu) indikator belum mencapai target, yaitu pada indikator Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. Selanjutnya, pada Sub Kegiatan, dari total 34 Sub Kegiatan, tidak ada deviasi fisik. Namun, terdapat deviasi keuangan yang relatif kecil, disebabkan adanya sisa pengadaan.

#### 36. BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT DIY

Biro Kesejahteraan Rakyat Setda DIY sampai dengan triwulan I Tahun 2025, untuk indikator kinerja tujuan “Persentase bahan kebijakan yang mendukung program pemda “ belum dapat dihitung ketercapaiannya karena ketercapaian baru dapat dihitung pada triwulan IV 2025. Selanjutnya pada indikator kinerja Sasaran sampai dengan triwulan I 2025, dari total 2 (dua) indikator, belum ada yang mencapai target disebabkan ketercapaian baru dapat dihitung pada triwulan IV 2025 karena proses pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan selama 1 (satu) tahun berjalan. Kemudian untuk indikator kinerja Program, dari total 5 (lima) indikator, juga belum mencapai target karena realisasi ada di triwulan IV 2025. Untuk Sub Kegiatan, dari total 26 Sub Kegiatan, Seluruh kegiatan dapat mencapai target fisik 100%, ada 5 subkegiatan yang memiliki deviasi

keuangan >10% karena penawaran lebih rendah dari pagu anggaran dan juga belanja yang menyesuaikan kebutuhan.

### 37. BIRO ORGANISASI DIY

Biro Organisasi Setda DIY sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, capaian pada indikator Tujuan “Persentase Perangkat Daerah dengan tingkat kematangan tinggi”, belum ada realisasi di triwulan I, realisasi ada pada akhir tahun. Demikian juga pada indikator kinerja Sasaran, dari total 2 (dua) indikator kinerja sasaran yang ada, sampai dengan triwulan I juga belum ada capaian, karena realisasi juga akan dihitung pada akhir tahun. Selanjutnya untuk indikator kinerja Program, yang berjumlah 2 (dua) indikator, 1 (satu) indikator belum mencapai target, yaitu “Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah” sedangkan 1 (satu) indikator lainnya, yaitu “Kematangan Perangkat Daerah”, realisasi ada pada akhir tahun. Untuk Sub Kegiatan dari total 23 Sub Kegiatan, realisasi fisik seluruh sub kegiatan telah memenuhi target, sedangkan kinerja keuangan terdapat deviasi karena menyesuaikan kebutuhan, terdapat rapat yang dilaksanakan secara online.

### 38. BIRO PENGADAAN BARANG/JASA DIY

Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sampai dengan Triwulan I 2025 memiliki indikator kinerja tujuan, yaitu Tercapainya Kualitas Pengadaan Barang/Jasa Melalui Optimalisasi Penerapan Tata Kelola Pengadaan ini realisasi capaian yang diperoleh adalah sebesar 64,36 dari target 96,50, atau sebesar 66,69% dari target. Sedangkan pada indikator sasaran, terdapat 2 (dua) sasaran yang masing-masing capaian realisasi sampai dengan triwulan I tahun 2025 ini yaitu Indikator pertama Persentase Kualitas Pengadaan Barang/Jasa dan Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terealisasi 39,23 dari target 69,49 atau sebesar 66,69% dari target. Indikator sasaran kedua Kategori Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah realisasi 93,48 (capaian tahun 2024) dari target 92,61 atau sebesar 100,94% dari target. Selanjutnya, pada kinerja program sampai dengan triwulan I tahun 2025 dilaksanakan melalui tiga indikator program. Indikator program pertama yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terealisasi sebesar 86,86 dari target 80,70 (107,63%). Pada indikator program kedua, Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terealisasi sebesar 85,66 dari target 85,57 atau mencapai 100,10% dari target. Indikator ketiga, Persentase Kualitas Pengadaan Barang/Jasa baru terealisasi sebesar 33,93% dari target 68,24% atau hanya mencapai sebesar 49,73% dari target. Hal ini disebabkan karena sebagian besar paket pengadaan barang/jasa masih dalam tahapan

pelaksanaan sehingga progres pengadaan barang/jasa Pemda DIY belum maksimal dikarenakan proses penyelesaiannya pada sistem belum dapat dilakukan. Selanjutnya, secara umum kinerja sub kegiatan tercermin pada progres fisik dan keuangan sampai dengan TW I tahun 2025, masih menunjukkan adanya deviasi fisik sebesar 0,46% dengan 6 (enam) sub kegiatan yang tidak mencapai target fisik 100%. Deviasi fisik tersebut disebabkan oleh adanya kegiatan yang belum dapat dilaksanakan, serta adanya kegiatan yang masuk pada efisiensi sebagai tindak lanjut Inpres Nomor 1 Tahun 2025. Sedangkan pada kinerja keuangan, terdapat deviasi sebesar 1,45% dengan 3 (tiga) sub kegiatan yang memiliki deviasi di atas 10%. Deviasi keuangan terjadi karena masih dalam proses pertanggungjawaban (SPJ) keuangan. Selanjutnya untuk sub kegiatan yang ditargetkan selesai 100% baik fisik maupun keuangan terdapat 1 (satu) sub kegiatan dengan realisasi fisik dan keuangan 100%. Pada kegiatan yang bersumber dari Dana Keistimewaan terdapat 1 (satu) sub kegiatan, tidak terdapat dengan deviasi fisik tapi masih ada deviasi keuangan sebesar 0,30%.

#### 39. BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN DIY

Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Setda DIY sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 memiliki indikator kinerja tujuan Persentase rumusan kebijakan yang mendukung program Pemda (bidang infrastruktur) terealisasi sebesar 50% dari target 60% atau secara persentase baru mencapai 83,33% dari target. Sedangkan pada indikator sasaran, terdapat 2 (dua) sasaran yang masing-masing capaian realisasi sampai dengan triwulan I tahun 2025 ini yaitu Indikator pertama Persentase rumusan kebijakan yang mendukung program Pemda (bidang infrastruktur) terealisasi sebesar 50% dari target 60% atau secara persentase baru mencapai 83,33% dari target. Sedangkan indikator sasaran kedua Kategori Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah realisasi 93,48 (capaian tahun 2024) dari target 93,48 atau sebesar 100% dari target. (Capaian indikator tujuan dan kinerja sasaran masih menggunakan realisasi kumulatif dari tahun sebelumnya karena kinerja tujuan dan sasaran baru dapat dihitung di akhir Triwulan IV Tahun 2025). Selanjutnya, pada kinerja Program sampai dengan triwulan I tahun 2025 dilaksanakan melalui tiga indikator program. Indikator program pertama yaitu Persentase penyediaan rumusan kebijakan pendukung Program Pemda terealisasi sebesar 66,67% dari target 50% (133,34%). Pada indikator program kedua, Persentase penyediaan rumusan kebijakan pendukung Program Pemda (Program Dais) terealisasi sebesar 25% dari target 50% atau

baru mencapai 50% dari target. Indikator ketiga, Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah baru terealisasi sebesar 85,94 dari target 95,80 atau baru mencapai sebesar 89,70% dari target. (Target nilai PKKI yang tercantum merupakan target akhir tahun 2025 sedangkan realisasi merupakan nilai yang diambil dari nilai rata-rata PKKI program Penunjang TW I tahun 2025). Secara umum sebanyak 22 sub kegiatan progres realisasi fisik telah memenuhi target, tidak terdapat deviasi sama sekali yang berarti target ketercapaian fisik sebesar 14,94% telah tercapai sepenuhnya. Pada kinerja keuangan masih terdapat deviasi sebesar 2,47%, dari target sebesar 11,34% baru terealisasi sebesar 8,87%. Deviasi keuangan terbesar terjadi pada sub kegiatan Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Tata Ruang yaitu deviasi 7,63% dikarenakan adanya surat edaran untuk menunda kegiatan pada bulan Januari dan Februari sehingga kegiatan baru dapat dilakukan pada bulan Maret. Kegiatan yang ditunda pelaksanaannya antara lain: perjalanan dinas luar daerah, pelaksanaan FGD dan rapat koordinasi, dan pelaksanaan publikasi. Terdapat satu sub kegiatan yang ditargetkan selesai pada triwulan I 2025 telah terealisasi 100%. Capaian kinerja fisik sampai dengan Triwulan I telah sesuai target, sedangkan untuk kinerja keuangan memiliki deviasi sebesar 2,47%, dari target sebesar 11,34% hanya terealisasi sebesar 8,87%.

#### 40. BIRO PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM DIY

Biro Perekonomian dan SDA DIY sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 memiliki kinerja sebagai berikut: Untuk indikator Kinerja Tujuan “Persentase rumusan kebijakan menjadi kebijakan yang ditindaklanjuti dalam mendukung pencapaian sasaran Pemda Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan” belum mencapai target yang ditetapkan karena ketercapaian baru dapat dihitung pada triwulan IV 2025. Selanjutnya pada indikator Kinerja Sasaran sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, dari total 2 (dua) indikator, seluruhnya belum memenuhi target disebabkan ketercapaian baru dapat dihitung pada Triwulan IV tahun 2025 karena capaian kerjanya bersifat *outcome* dan proses pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan selama 1 (satu) tahun berjalan. Kemudian untuk indikator Kinerja Program, dari total 3 (tiga) indikator, kesemua indikator belum mencapai target karena realisasi ada di Triwulan IV Tahun 2025. Capaian kerjanya bersifat *outcome* dan proses pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan selama 1 (satu) tahun berjalan. Untuk kinerja pelaksanaan Sub Kegiatan, dari total 24 (dua puluh empat) Sub Kegiatan, tidak terdapat sub kegiatan yang capaian fisiknya tidak sesuai target pada Triwulan I Tahun 2025. Namun masih terdapat 1 (satu) Sub Kegiatan

yang realisasi keuangan terdapat deviasi, hal tersebut karena efisiensi pelaksanaan kegiatan.

#### 41. BIRO TATA PEMERINTAHAN DIY

Biro Tata Pemerintahan Setda DIY sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, capaian pada indikator tujuan “Persentase Responsivitas Dinamika Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah” dapat mencapai target. Begitu juga dari 2 (dua) indikator sasaran yang dimiliki, realisasi kedua indikator tersebut dapat tercapai sesuai target yang telah ditetapkan pada triwulan I. Adapun untuk capaian Program, dari total 6 (enam) indikator program yang dimiliki, terdapat 2 indikator yang belum mencapai target yaitu Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; serta Persentase garis batas daerah provinsi dan kabupaten/kota yang tersinkronisasi (%), hal ini karena proses sinkronisasi garis batas daerah memerlukan proses yang cukup panjang hingga tercapai kesepakatan antara pihak DIY, Provinsi Jawa Tengah, Kab./Kota maupun Desa/Kalurahan yang berbatasan. Kemudian dari total subkegiatan yang berjumlah 23 Sub kegiatan, realisasi fisik telah sesuai target, namun terdapat deviasi keuangan yang relatif besar karena belanja yang menyesuaikan dengan kebutuhan, terdapat selisih harga di pasaran yang lebih rendah, serta adanya kebijakan efisiensi yang diatur oleh Inpres RI No 1 Tahun 2025.

#### 42. BIRO UMUM DAN PROTOKOL DIY

Biro Umum dan Protokol Setda DIY sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, pada indikator tujuan yang dimiliki yaitu “Nilai rerata kuesioner layanan keprotokolan, kerumahtanggan dan nilai reformasi birokrasi” capaian telah mencapai target triwulan I. Demikian juga dari 1 (satu) indikator kinerja sasaran yang dimiliki, realisasinya sudah mencapai target triwulan I. Selanjutnya untuk indikator kinerja Program, dari 2 (dua) indikator yang dimiliki, terdapat 1 (satu) indikator yang belum mencapai target yaitu Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Kemudian untuk capaian sub kegiatan, dari total 32 sub kegiatan, terdapat 1 sub kegiatan yang mengalami deviasi fisik dikarenakan faktor eksternal berupa kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan. Demikian juga untuk kinerja keuangan terdapat deviasi keuangan disebabkan karena belanja yang menyesuaikan dengan kebutuhan serta terdapat selisih harga di pasaran yang lebih rendah.

#### 43. DINAS KEBUDAYAAN DIY

Dinas Kebudayaan DIY sampai dengan triwulan I Tahun 2025, terdapat 3 (tiga) indikator kinerja Tujuan yang diampu yaitu “Jumlah sumber daya kebudayaan pendukung keistimewaan yang terkelola”, “Jumlah sarana prasarana pendukung keistimewaan yang terkelola”, dan “Jumlah agenda budaya pendukung keistimewaan yang terkelola”. Seluruh indikator tersebut realisasi menggunakan tahun 2024 dan belum memenuhi target karena adanya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 Tanggal 22 Januari 2025 Tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025, sehingga pelaksanaan kegiatan mundur. Selanjutnya pada indikator kinerja Sasaran sampai dengan triwulan I 2025, dari total 4 (empat) indikator, terdapat 1 (satu) indikator realisasi merupakan tahun 2024 pada “Kategori Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah” dan 3 (tiga) indikator lainnya yaitu “Meningkatnya kinerja pengembangan nilai sejarah, warisan budaya dan museum”, “Peningkatan jumlah penyelenggaraan event budaya tingkat provinsi, nasional, internasional”, serta “Peningkatan jumlah kegiatan pengembangan seni budaya dan tradisi di DIY”, belum memiliki realisasi karena adanya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 Tanggal 22 Januari 2025 Tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025, sehingga pelaksanaan kegiatan mundur. Kemudian untuk indikator kinerja Program, dari total 6 (enam) indikator, terdapat 1 (satu) indikator belum memenuhi target pada triwulan I, yaitu “Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah” dan 5 (lima) indikator lainnya sama seperti indikator kinerja Sasaran, belum dilaksanakan karena adanya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 Tanggal 22 Januari 2025 Tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025, sehingga pelaksanaan kegiatan mundur. Untuk Sub Kegiatan, dari total 45 Sub Kegiatan, secara fisik realisasi tidak sesuai target triwulan I, sementara kinerja keuangan terdapat deviasi pada 7 (tujuh) Sub Kegiatan disebabkan oleh sistem penatausahaan keuangan pada aplikasi SIPD yang baru efektif pada pertengahan bulan berjalan, sehingga ada kelambatan pada proses pencairan anggaran.

#### 44. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DIY

Dinas Kelautan dan Perikanan DIY sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 memiliki kinerja sebagai berikut: Untuk indikator Kinerja Tujuan yang

pertama “Meningkatnya Aktivitas Perekonomian Sektor Perikanan yang Berkelanjutan (juta rupiah)”, yang kedua “Terwujudnya pengelolaan kawasan konservasi perairan secara berkelanjutan (skor)” dan yang ketiga “Meningkatnya aktivitas perekonomian perikanan budidaya di lokasi prioritas penanggulangan kemiskinan (juta rupiah/tahun)” belum mencapai target yang ditetapkan karena ketercapaian baru dapat dihitung pada triwulan IV 2025. Selanjutnya pada indikator Kinerja Sasaran sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, dari total 4 (empat) indikator, 2 (dua) indikator realisasi sudah sesuai target, namun masih terdapat 2 (dua) indikator yang belum memenuhi target disebabkan ketercapaian baru dapat dihitung pada Triwulan IV tahun 2025. Kemudian untuk indikator Kinerja Program, dari total 14 (empat belas) indikator, terdapat 2 (tiga) Indikator sudah sesuai target pada Triwulan I Tahun 2025, sementara masih terdapat 12 indikator yang belum mencapai target karena realisasi baru dapat dihitung di Triwulan IV Tahun 2025. Untuk kinerja pelaksanaan Sub Kegiatan, dari total 44 Sub Kegiatan, tidak terdapat sub kegiatan yang capaian fisiknya tidak sesuai target pada Triwulan I Tahun 2025. Namun terdapat 4 (empat) Sub Kegiatan yang realisasi keuangan mengalami deviasi, hal tersebut dikarenakan efisiensi dalam pelaksanaan sub kegiatan dan sub kegiatan yang bersifat persediaan.

#### 45. DINAS KESEHATAN DIY

Dinas Kesehatan DIY sampai dengan triwulan I Tahun 2025, untuk indikator kinerja tujuan “Prevalensi Berat Badan Kurang (Berat Badan Kurang dan Sangat Kurang) Pada Balita “ telah mencapai target yang ditetapkan. Hal ini karena didukung oleh kegiatan Pemberian makanan tambahan pada akhir tahun 2024 memberikan dampak pada penurunan prevalensi underweight dan Pemantauan disertai konseling PMBA tentang MP-ASI yang bergizi sesuai standar. Selanjutnya pada indikator kinerja Sasaran sampai dengan triwulan I 2025, dari total 2 (dua) indikator, semua indikator kinerja sasaran masih menggunakan capaian tahun sebelumnya disebabkan ketercapaian baru dapat dihitung pada triwulan IV 2025. Kemudian untuk indikator kinerja Program, dari total 18 indikator, ada 13 Indikator sudah sesuai target pada TW I, sementara masih terdapat 5 (lima) indikator yang belum mencapai target karena masih akan berjalan dalam pengumpulan/input data hingga triwulan IV 2025 dan tidak dilakukan karena dampak rasionalisasi dan efisiensi sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden Republik Indonesia (INPRES) Nomor 1 Tahun 2025. Untuk Sub Kegiatan, dari total 57 Sub Kegiatan Seluruh kegiatan dapat mencapai target fisik 100%, sedangkan realisasi keuangan terdapat deviasi dikarenakan terbitnya Instruksi Presiden Republik Indonesia (INPRES)

Nomor 1 Tahun 2025, selisih harga penawaran dan juga belanja yang menyesuaikan kebutuhan.

#### 46. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DIY

Dinas Komunikasi dan Informatika DIY sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, realisasi indikator kinerja Tujuan yang dimiliki, yaitu “Predikat pelaksanaan pemerintahan berbasis elektronik di DIY melalui asesmen mandiri” telah tercapai sesuai target pada Triwulan I. Selanjutnya dari total 3 (tiga) indikator kinerja sasaran yang dimiliki, realisasi sudah mencapai target di triwulan I. Kemudian dari total 6 (enam) indikator kinerja program yang ada, realisasi semua indikator kinerja telah mencapai target pada triwulan I, meskipun ada yang merupakan data sementara karena capaian di Triwulan IV. Dari total 28 sub Kegiatan yang dimiliki, sampai dengan triwulan I, realisasi fisik telah sesuai target, sedangkan realisasi keuangan terdapat sedikit deviasi karena menyesuaikan kebutuhan dan dilakukan efisiensi.

#### 47. DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH DIY

Dinas Koperasi dan UKM DIY sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 memiliki kinerja sebagai berikut: Untuk indikator Kinerja Tujuan “Jumlah omset Koperasi dan UMKM (Triliun rupiah)” telah mencapai target yang ditetapkan. Ketercapaian tersebut di dukung oleh perbaikan tata kelola Koperasi sehingga meningkat kepercayaan masyarakat terhadap Koperasi yang berdampak pada penambahan jumlah anggota koperasi, penambahan jumlah anggota Koperasi selaras dengan peningkatan omset Koperasi. Selanjutnya pada indikator Kinerja Sasaran sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, dari total 5 (lima) indikator, 3 (tiga) indikator realisasi sudah sesuai target, namun masih terdapat 2 (dua) indikator yang belum memenuhi target disebabkan ketercapaian baru dapat dihitung pada Triwulan IV tahun 2025 karena proses pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan selama 1 (satu) tahun berjalan. Kemudian untuk indikator Kinerja Program, dari total 13 (lima belas) indikator, terdapat 11 (sebelas) Indikator sudah sesuai target pada Triwulan I Tahun 2025. Faktor pendorong ketercapaian dikarenakan adanya kolaborasi dengan Lembaga/Instansi terkait dalam pelaksanaan kegiatan sehingga ada beberapa kegiatan pendukung ketercapaian program yang tidak ada pendanaan bisa dilakukan melalui kolaborasi tersebut. Sementara masih terdapat 2 (dua) indikator yang belum mencapai target karena realisasi baru bisa dihitung di Triwulan IV Tahun 2025. Untuk kinerja pelaksanaan Sub Kegiatan, dari total 35 (tiga puluh lima) Sub Kegiatan, terdapat 6 (enam) sub kegiatan yang capaian fisiknya tidak sesuai target pada Triwulan I Tahun 2025.

Salah satu faktor karena terbitnya Instruksi Presiden Republik Indonesia (INPRES) Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Selain hal tersebut terdapat pula kendala teknis seperti kekurangan kelengkapan dokumen, serangan website dan kendala teknis lainnya. Selain itu, juga terdapat 6 (enam) Sub Kegiatan yang realisasi keuangan terdapat deviasi, hal tersebut juga dikarenakan terbitnya Instruksi Presiden Republik Indonesia (INPRES) Nomor 1 Tahun 2025, efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan dan kendala teknis lain.

#### 48. DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN DIY

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY (DLHK DIY) sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 bahwa berdasarkan kinerja tujuan terdapat satu indikator dan sudah mencapai target yaitu Ketercapaian Kinerja Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Keterwujudan Pengelolaan Hutan Lestari dari target 77,20% tercapai 77,20%. Pada kinerja sasaran, dari lima indikator kinerja sasaran seluruhnya dapat tercapai terhadap target. Pada kinerja program dari sebanyak 19 indikator program, 17 diantaranya tercapai. Terdapat 1 (satu) indikator program yang belum dapat diukur capaiannya pada triwulan I, yaitu Penambahan luas tutupan vegetasi di Satuan Ruang Strategis (ha), serta 1 (satu) indikator program yang tidak tercapai yaitu Peningkatan kemampuan pelayanan pengujian kualitas lingkungan (parameter) dari target 4.300 parameter tercapai sebanyak 4.261 parameter atau sebesar 99,09% terhadap target. Hal ini disebabkan karena terdapat beberapa pergeseran jadwal sampling dari pelanggan yang semula diagendakan awal tahun menjadi pertengahan/akhir tahun. Sampai dengan Triwulan I 2025, terdapat 2 (dua) sub kegiatan yang mencapai target fisik 100% yaitu subkegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dari 3 (tiga) subkegiatan yang ditargetkan selesai 100% di Triwulan I. Sedangkan 1 (satu) subkegiatan lainnya yaitu Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor capaian fisiknya masih 95,05%. Secara umum progres fisik antara realisasi fisik dengan target, masih terdapat deviasi meski relatif sangat kecil yang berada pada angka 0,04%. Kinerja pada progres keuangan masih terdapat deviasi keuangan sebesar 9,48% dari target sebesar 23,16% terealisasi sebesar 17,83%. Terdapat deviasi keuangan lebih dari 10% pada 3 sub kegiatan. Deviasi keuangan terbesar terjadi pada sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yaitu deviasi 14,84% karena belanja disesuaikan dengan kebutuhan.

#### 49. DINAS PARIWISATA DIY

Dinas Pariwisata DIY sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 memiliki kinerja sebagai berikut: Untuk indikator Kinerja Tujuan “Total Yield (Jumlah wisatawan x Belanja/per hari) belum mencapai target yang ditetapkan karena ketercapaian baru dapat dihitung pada triwulan IV 2025. Selanjutnya pada indikator Kinerja Sasaran sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, dari total 5 (lima) indikator, 3 (tiga) indikator realisasi belum sesuai target yang ditetapkan, disebabkan ketercapaian baru dapat dihitung pada Triwulan IV tahun 2025. Terdapat 2 (dua) indikator yang capaiannya sudah melebihi target yang telah ditetapkan. Kemudian untuk indikator Kinerja Program, dari total 9 (sembilan) indikator, terdapat 6 (enam) Indikator sudah sesuai target pada Triwulan I Tahun 2025. Namun masih terdapat 3 (tiga) indikator yang belum mencapai target. Hal tersebut terjadi karena ketercapaian baru dapat dihitung pada Triwulan IV tahun 2025 serta kebijakan nasional dan situasi global yang mempengaruhi ketercapaiannya. Untuk kinerja pelaksanaan Sub Kegiatan, dari total 44 Sub Kegiatan, terdapat 1 (satu) sub kegiatan yang capaian fisiknya tidak sesuai target pada Triwulan I Tahun 2025 karena terbitnya Instruksi Presiden Republik Indonesia (INPRES) Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Selanjutnya terdapat 6 (enam) Sub Kegiatan yang realisasi keuangan terdapat deviasi, hal tersebut juga dikarenakan terbitnya Instruksi Presiden Republik Indonesia (INPRES) Nomor 1 Tahun 2025 serta efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan.

#### 50. DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL DIY

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY sampai dengan triwulan I Tahun 2025, untuk indikator kinerja tujuan “Prosentase pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman serta urusan bidang energi dan sumber daya mineral di DIY” belum mencapai target yang ditetapkan karena ketercapaian baru dapat dihitung pada triwulan IV 2025. Selanjutnya pada indikator kinerja Sasaran sampai dengan triwulan I 2025, dari total 10 indikator, terdapat tujuh indikator dengan realisasi sudah sesuai target, tetapi masih terdapat tiga indikator yang belum memenuhi target. Hal ini disebabkan ketercapaian baru dapat dihitung pada triwulan IV 2025 karena proses pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan selama 1 (satu) tahun berjalan. Kemudian untuk indikator kinerja Program, dari total 27 indikator, ada 16

Indikator sudah sesuai target pada TW I, sementara masih terdapat 11 indikator yang belum mencapai target karena realisasi ada di triwulan IV 2025.

Pada kinerja sub kegiatan dengan total sejumlah 65 sub kegiatan tercermin pada progres kinerja fisik sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 menunjukkan bahwa masih terdapat deviasi sebesar 4,54%. Terjadinya deviasi fisik tersebut karena adanya tindak lanjut atas terbitnya Instruksi Presiden Republik Indonesia (INPRES) Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Sedangkan secara umum kinerja sub kegiatan pada progres kinerja keuangan juga masih memiliki deviasi sebesar 6,61%. Hal ini disebabkan karena masih adanya empat sub kegiatan dengan deviasi keuangan lebih dari 10%. Deviasi keuangan terbesar yaitu 19,81 % pada sub kegiatan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Candi Prambanan-Candi Ijo yang berdampak pada pekerjaan Pembangunan Jalan dan Jembatan Ruas Jalan Prambanan-Gayamharjo Segmen B4-B5. Sub kegiatan tersebut menggunakan anggaran dana keistimewaan diundur pelaksanaannya dikarenakan menunggu pergeseran DPA dana keistimewaan (dampak INPRES Nomor 1 Tahun 2025).

#### 51. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DIY

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Kalurahan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil DIY sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, realisasi indikator kinerja Tujuan yang dimiliki, yaitu “Terpenuhinya kebijakan dan keberdayaan masyarakat desa yang berkualitas” sudah sesuai target, meskipun masih data sementara, karena capaian ada di triwulan IV. Demikian juga dari total 3 (tiga) indikator kinerja Sasaran yang ada, realisasi sudah mencapai target triwulan I. Selanjutnya, dari total 9 (Sembilan) indikator kinerja Program yang dimiliki, terdapat 7 (tujuh) indikator kinerja sudah mencapai target triwulan I, ada 1 (satu) indikator belum mencapai target, yaitu “Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah”, serta 1 (satu) indikator yang belum ditargetkan pada triwulan I, realisasi baru ada di triwulan IV. Kemudian, dari total 32 Sub Kegiatan yang dimiliki, realisasi fisik sudah sesuai target triwulan I, sedangkan realisasi keuangan terdapat deviasi karena beberapa faktor eksternal seperti gaji dan tunjangan yang menyesuaikan jumlah ASN, penyesuaian harga pasar, efisiensi belanja perjalanan dinas, menyesuaikan kebutuhan, seperti Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.

## 52. DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DIY

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Dan Pengendalian Penduduk DIY sampai dengan triwulan I Tahun 2025, terdapat 2 (dua) indikator kinerja Tujuan yang diampu yaitu “Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Masyarakat” dan “Rata-rata Jumlah Anak per-Keluarga”. Kedua indikator kinerja tersebut capaian telah melebihi target meskipun pada indikator “Rata-rata Jumlah Anak per-Keluarga” capaian masih menggunakan capaian tahun 2024 karena capaian diukur di akhir tahun 2025. Selanjutnya pada indikator kinerja Sasaran sampai dengan triwulan I 2025, dari total 5 (lima) indikator, realisasi seluruh indikator sudah sesuai target. Kemudian untuk indikator kinerja Program, dari total 10 indikator, terdapat 1 (satu) indikator belum memenuhi target pada triwulan I, yaitu “Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah”, yang merupakan indikator pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi. Untuk Sub Kegiatan, dari total 66 Sub Kegiatan, secara fisik realisasi sudah memenuhi target triwulan I, sementara kinerja keuangan terdapat deviasi karena adanya kebijakan refocusing anggaran sesuai Instruksi Presiden nomor 1 Tahun 2025.

## 53. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DIY

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DIY sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 memiliki kinerja sebagai berikut: Untuk indikator Kinerja Tujuan “Nilai Realisasi Investasi di DIY” sudah mencapai target yang ditetapkan. Selanjutnya pada indikator Kinerja Sasaran sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, dari total 3 (tiga) indikator, semuanya sudah sesuai target. Hal tersebut di dorong oleh faktor-faktor masih adanya pembangunan Proyek Strategis Nasional yaitu Jalan Tol Jogja-Solo dan Jogja-Bawen; komitmen pimpinan dan staf dalam memberikan layanan perizinan, diwujudkan dengan fasilitas layanan yang memadai; pengawasan terhadap pelaku usaha dalam rangka identifikasi masalah dan pendampingan pengisian LKPM sebagai dasar nilai realisasi investasi; adanya inovasi *integrated call center* yang memperkuat layanan perizinan kepada masyarakat; dan Penerapan *AGILE Government* dan sistem merit terhadap pencapaian kinerja instansi. Kemudian untuk indikator Kinerja Program, dari total 7 (tujuh) indikator, terdapat 5 (lima) Indikator sudah sesuai target pada Triwulan I Tahun 2025, sementara masih terdapat 2 (dua) indikator yang belum mencapai target karena realisasi baru dapat dihitung di Triwulan IV Tahun 2025 dan hambatan teknis pelaksanaan kegiatan. Untuk kinerja pelaksanaan Sub Kegiatan, dari total 36 (tiga puluh enam) Sub Kegiatan, tidak terdapat sub

kegiatan yang capaian fisiknya tidak sesuai target pada Triwulan I Tahun 2025. Terdapat 3 (tiga) Sub Kegiatan yang realisasi keuangan mengalami deviasi, hal tersebut juga dikarenakan terbitnya Instruksi Presiden Republik Indonesia (INPRES) Nomor 1 Tahun 2025 serta kendala teknis penatausahaan keuangan.

#### 54. DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA DIY

Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY sampai dengan triwulan I Tahun 2025, dari 8 (delapan) indikator tujuan, sebanyak 6 (enam) indikator telah mencapai target. Ada 2 (dua) indikator menggunakan capaian tahun 2024 yaitu Indikator Rata-Rata Lama Sekolah dan Indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Pemuda karena data capaian tahun 2025 baru akan dirilis oleh BPS pada akhir tahun 2025. Terdapat 2 (dua) indikator yang belum memiliki target pada triwulan 1 yaitu Peringkat yang diraih dalam Pra-POPNAS dan POPNAS serta Indikator Peringkat yang diraih dalam PEPARPENAS karena kompetisi POPNAS dan PEPARPENAS akan diselenggarakan di triwulan III. Selanjutnya pada indikator kinerja Sasaran sampai dengan triwulan I 2025, dari total 10 indikator, 9 (sembilan) indikator realisasi sudah sesuai target, baik menggunakan capaian 2024 atau sudah dengan capaian triwulan I. Masih terdapat 1 (satu) indikator yang belum memenuhi target yaitu Indikator Jumlah capaian medali di bidang olahraga pada kejuaraan multi event (emas, perak, perunggu) belum memiliki target pada triwulan I karena kompetisi akan diselenggarakan pada triwulan IV (target akhir 24 medali). Kemudian untuk indikator kinerja Program, dari total 10 indikator, ada 7 (tujuh) indikator sudah sesuai target pada TW I, sementara masih terdapat 3 (tiga) indikator yang belum mencapai target karena realisasi ada di triwulan IV 2025. Untuk Sub Kegiatan, dari total 64 Sub Kegiatan, terdapat 1 (satu) sub kegiatan yang capaian fisiknya tidak sesuai target pada triwulan I karena penyaluran UKT belum dapat dilaksanakan. Demikian juga realisasi keuangan terdapat deviasi juga dikarenakan penyaluran UKT dan belanja menyesuaikan kebutuhan.

#### 55. DINAS PERHUBUNGAN DIY

Dinas Perhubungan DIY sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 memiliki Kinerja tujuan Terwujudnya Mobilitas Berkelanjutan di Wilayah DIY dengan indikator Persentase Capaian Mobilitas Berkelanjutan di Wilayah DIY dihitung dari Rerata Persentase Terwujudnya Jalan Berkeselamatan Berbasis Angkutan Umum serta Persentase Capaian Pengelolaan Sektor Transportasi di Kawasan Strategis Dalam Mendukung Pelestarian Lingkungan telah terealisasi melebihi target sebesar 101,06%. Indikator tujuan tersebut didukung melalui tiga

sasaran yaitu; Terwujudnya Jalan Berkeselamatan Berbasis Angkutan Umum, Pengelolaan Sektor Transportasi di Kawasan Strategis Dalam Mendukung Pelestarian Lingkungan serta Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah. Sampai dengan triwulan I capaian kinerja sasaran, semuanya telah tercapai. Sedangkan pada kinerja program dicapai melalui 14 indikator kinerja program, sampai dengan triwulan I tahun 2025 semua indikator tersebut telah sesuai dengan target. Capaian realisasi Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, serta Program seluruhnya telah tercapai dengan persentase capaian 100%. Untuk kinerja sub kegiatan dari total sebanyak 43 sub kegiatan sampai triwulan I tahun 2025, hanya terdapat satu sub kegiatan yang ditargetkan selesai dan telah terealisasi 100% yaitu sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya. Secara umum tidak terdapat deviasi fisik, sedangkan terkait dengan deviasi keuangan, masih terdapat tiga sub kegiatan dengan deviasi keuangan di atas 10% yaitu sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, serta Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas.

#### 56. DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DIY

Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 memiliki kinerja sebagai berikut: Untuk indikator Kinerja Tujuan “Kontribusi Industri Pengolahan Terhadap PDRB DIY” dan “Kontribusi Perdagangan Terhadap PDRB DIY” belum mencapai target yang ditetapkan karena ketercapaian baru dapat dihitung pada triwulan IV 2025. Selanjutnya pada indikator Kinerja Sasaran sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, dari total 3 (tiga) indikator semuanya belum memenuhi target disebabkan ketercapaian baru dapat dihitung pada Triwulan IV tahun 2025 karena proses pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan selama 1 (satu) tahun berjalan. Kemudian untuk indikator Kinerja Program, dari total 14 (empat belas) indikator, semua indikator belum mencapai target karena realisasi ada di Triwulan IV Tahun 2025. Untuk kinerja pelaksanaan Sub Kegiatan, dari total 41 Sub Kegiatan, tidak terdapat sub kegiatan yang capaian fisiknya tidak sesuai target pada Triwulan I Tahun 2025. Namun terdapat 6 (enam) Sub Kegiatan yang realisasi keuangan terdapat deviasi, hal tersebut juga dikarenakan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan.

#### 57. DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH DIY

Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah DIY sampai dengan triwulan I Tahun 2025, pada indikator kinerja Tujuan “Persentase pemanfaatan koleksi pustaka

dan arsip”, realisasi sudah melebihi target namun angka realisasi tersebut merupakan angka tahun 2024, karena realisasi tahun 2025 dihitung pada akhir tahun. Selanjutnya pada indikator kinerja Sasaran sampai dengan triwulan I 2025, dari total 3 (tiga) indikator, seluruh realisasi indikator merupakan realisasi tahun 2024 karena realisasi dihitung di akhir tahun atau awal tahun 2026. Kemudian untuk indikator kinerja Program, dari total 5 (lima) indikator, terdapat 2 (dua) indikator belum memenuhi target pada triwulan I, yaitu “Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah” serta “Jumlah Arsip dan Bahan Pustaka Kraton dan Kadipaten yang dilindungi dan dikonservasi”. Untuk Sub Kegiatan, dari total 44 Sub Kegiatan, secara fisik realisasi tidak sesuai target triwulan I karena adanya efisiensi anggaran yang menyebabkan beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan, sementara kinerja keuangan terdapat deviasi karena efisiensi anggaran sesuai Surat Edaran No B/900.1.12/510/SET Tahun 2025 Tentang Efisiensi Belanja Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2025.

#### 58. DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG DIY

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, capaian indikator tujuan “Persentase kinerja penyelenggaraan penataan ruang dan penataan agraria di daerah” ini sementara masih menggunakan capaian Triwulan IV Tahun 2024 dan sedang berproses seiring dengan penyesuaian kebijakan nasional terkait dengan Instruksi Presiden nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Selanjutnya pada indikator kinerja Sasaran sampai dengan triwulan I 2025, dari total tiga indikator, terdapat dua indikator dengan realisasi sudah sesuai target, tetapi masih terdapat satu indikator yang belum memenuhi target. Hal ini disebabkan ketercapaian baru dapat dihitung pada triwulan IV 2025 karena perhitungan capaian dilakukan pada setiap akhir tahun. Selanjutnya pada tahun 2025 ini Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY mengampu enam Program, 15 Kegiatan dan didukung dengan 37 Sub Kegiatan. Kemudian untuk indikator kinerja Program, dari total sembilan indikator, ada enam Indikator sudah sesuai target pada TW I, dan masih terdapat tiga indikator yang belum mencapai target karena realisasi ada di triwulan IV 2025. Untuk kinerja sub kegiatan dengan total sejumlah 37 sub kegiatan tercermin pada progres kinerja fisik sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 menunjukkan bahwa kinerja fisik terealisasi sebesar 18,85% sudah sesuai dengan yang ditargetkan, sehingga tidak terdapat deviasi. Sedangkan pada kinerja keuangan sub kegiatan terealisasi sebesar 12,29% dari target sebesar

15,50% sehingga masih terdapat deviasi sebesar 3,21% pada tujuh sub kegiatan. Deviasi keuangan tersebut disebabkan efisiensi, belanja menyesuaikan dengan kebutuhan, harga pasar yang lebih rendah dari SHBJ, dan masih dalam proses administrasi keuangan. Belanja yang menyesuaikan dengan kebutuhan seperti pembelian buku cek bank, pengiriman barang, tagihan telpon, air, listrik, pemeliharaan peralatan dan mesin, tenaga ahli, narasumber dan perjalanan dinas dan hasil penyesuaian terhadap Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

#### 59. DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DIY

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 memiliki kinerja sebagai berikut: Untuk indikator Kinerja Tujuan yang pertama “Nilai sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan dalam PDRB (ADHK) (juta rupiah)” belum mencapai target yang ditetapkan karena ketercapaian baru dapat dihitung pada triwulan IV 2025. Nilai PDRB Tahun 2025 baru akan dirilis dibulan Februari n+1 oleh BPS. Untuk indikator kinerja tujuan yang ke-dua: “Peningkatan persentase kontribusi sektor pertanian terhadap kesesuaian tata ruang (%)” sudah melebihi target yang di tetapkan. Untuk indikator kinerja tujuan yang ke-tiga: “Indeks Ketahanan Pangan (skor)” sudah melebihi target yang di tetapkan. Selanjutnya untuk indikator kinerja tujuan yang ke-empat: “Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan” juga sudah melebihi target yang di tetapkan. Selanjutnya pada indikator Kinerja Sasaran sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, dari total 5 (lima) indikator, 4 (empat) indikator realisasi sudah sesuai target, namun masih terdapat 1 (satu) indikator yang belum memenuhi target disebabkan ketercapaian baru dapat dihitung pada Triwulan IV tahun 2025 karena proses pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan selama 1 (satu) tahun berjalan. Kemudian untuk indikator Kinerja Program, dari total 15 (lima belas) indikator, terdapat 3 (tiga) Indikator sudah sesuai target pada Triwulan I Tahun 2025, sementara masih terdapat 12 (dua belas) indikator yang belum mencapai target karena realisasi ada di Triwulan IV Tahun 2025. Untuk kinerja pelaksanaan Sub Kegiatan, dari total 50 (lima puluh) Sub Kegiatan, terdapat 1 (satu) sub kegiatan yang capaian fisiknya tidak sesuai target pada Triwulan I Tahun 2025 karena terkait kendala pada DPA pergeseran. Demikian juga terdapat 4 (empat) Sub Kegiatan yang realisasi keuangan mengalami deviasi, hal tersebut salah satunya dikarenakan terbitnya Instruksi Presiden Republik

Indonesia (INPRES) Nomor 1 Tahun 2025 serta adanya kendala teknis pelaksanaan kegiatan.

#### 60. DINAS SOSIAL DIY

Dinas Sosial DIY sampai dengan triwulan I Tahun 2025, untuk indikator kinerja tujuan “Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, jaminan sosial, serta Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dan masyarakat sasaran yang meningkat kemampuan dan partisipasinya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial serta mampu mewujudkan nilai-nilai keperintisan kejuangan dan kesetiakawanan sosial “ telah mencapai target triwulan I yang ditetapkan. Selanjutnya pada indikator kinerja Sasaran sampai dengan triwulan I 2025, dari total 4 (empat) indikator, 2 (dua) indikator realisasi sudah sesuai target, namun masih terdapat 2 (dua) indikator yang belum memenuhi target disebabkan ketercapaian baru dapat dihitung pada triwulan IV 2025 karena proses pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan selama 1 (satu) tahun berjalan. Kemudian untuk indikator kinerja Program, dari total 9 (Sembilan) indikator, ada 5 (lima) Indikator sudah sesuai target pada TW I, sementara masih terdapat 4 (empat) indikator yang belum mencapai target karena realisasi ada di triwulan IV 2025. Untuk Sub Kegiatan, dari total 73 Sub Kegiatan, terdapat 1 sub kegiatan yang capaian fisiknya tidak sesuai target pada triwulan I karena terbitnya Instruksi Presiden Republik Indonesia (INPRES) Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan mengikuti SE Nomor B/900.1.12/510/SET Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Demikian juga realisasi keuangan terdapat deviasi juga dikarenakan terbitnya Instruksi Presiden Republik Indonesia (INPRES) Nomor 1 Tahun 2025, sisa pengadaan dan belanja menyesuaikan kebutuhan.

#### 61. DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DIY

Dinas Tenaga Kerja DIY sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 memiliki kinerja sebagai berikut: Untuk indikator Kinerja Tujuan “Tingkat produktivitas DIY(juta rupiah/tenaga kerja)” telah mencapai target yang ditetapkan. Selanjutnya pada indikator Kinerja Sasaran sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, dari total 7 (tujuh) indikator, 6 (enam) indikator realisasi sudah sesuai target, namun masih terdapat 1 (satu) indikator yang belum memenuhi target. Hal tersebut terjadi salah satunya disebabkan

dikarenakan terbitnya Instruksi Presiden Republik Indonesia (INPRES) Nomor 1 Tahun 2025 terkait efisiensi anggaran. Kemudian untuk indikator Kinerja Program, dari total 14 indikator, terdapat 6 (enam) Indikator sudah sesuai target pada Triwulan I Tahun 2025, sementara masih terdapat 7 (tujuh) indikator yang belum mencapai target karena realisasi ada di Triwulan IV Tahun 2025. Untuk kinerja pelaksanaan Sub Kegiatan, dari total 49 Sub Kegiatan, terdapat 2 (dua) sub kegiatan yang capaian fisiknya tidak sesuai target pada Triwulan I Tahun 2025. Hal tersebut terjadi karena terbitnya Instruksi Presiden Republik Indonesia (INPRES) Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Namun demikian terdapat 4 (empat) Sub Kegiatan yang realisasi keuangan terdapat deviasi, hal tersebut juga dikarenakan efisiensi belanja pelaksanaan sub kegiatan.

## 62. INSPEKTORAT DIY

Inspektorat DIY sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, untuk indikator kinerja tujuan “Indeks Penilaian Integritas” bersifat tahunan sehingga realisasi Triwulan I merupakan realisasi tahun 2024. Selanjutnya pada indikator kinerja sasaran sampai dengan triwulan I 2025, dari total 3 (tiga) sasaran kinerja, terdapat 1 (satu) sasaran kinerja telah melampaui target TW I, yaitu Meningkatnya kualitas hasil pengawasan internal dengan indikator persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan, dengan capaian 90,88 dari target TW I 88,50. Adapun dua sasaran lainnya, penghitungannya bersifat tahunan. Kemudian untuk indikator kinerja Program, Inspektorat DIY memiliki 3 (tiga) program dengan 3 (tiga) indikator. Terdapat satu indikator, yaitu nilai PKKI program penunjang yang belum mencapai target karena terkait dengan pergeseran aliran kas, juga terkait dengan kelengkapan pelaporan seperti inovasi. Untuk kinerja pelaksanaan sub kegiatan, dari total 45 sub kegiatan, terdapat 3 (tiga) sub kegiatan dengan deviasi fisik cukup besar. Hal ini terkait dengan proses pergeseran aliran kas sehingga beberapa tahap pelaksanaan sub kegiatan terdampak. Secara keseluruhan, realisasi fisik hampir memenuhi target, dengan deviasi yang hanya berada pada angka 0,04%. Kinerja keuangan memiliki deviasi sebesar 8,27% (target keuangan sebesar 27,77% hanya terealisasi sebesar 19,50%). Deviasi ini diantaranya disebabkan oleh penundaan pelaksanaan sub kegiatan, sifatnya menyesuaikan kebutuhan. Terdapat deviasi keuangan lebih dari 10% pada 5 (lima) sub kegiatan, hal ini disebabkan pergeseran angkas sub kegiatan masih dalam proses, merupakan penjangaan serta addendum pengadaan barang/jasa masih dalam proses.

#### 63. KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN BANTUL DIY

Kantor Pelayanan Pajak Daerah (KPPD) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) di Kabupaten Bantul sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, indikator kinerja program telah mencapai target yang ditetapkan. Sebanyak 17 sub kegiatan penunjang dan 2 sub kegiatan utama telah menunjukkan hasil baik, dengan tidak ada deviasi fisik. Namun, terdapat deviasi keuangan sebesar 3,89% yang disebabkan oleh efisiensi belanja perjalanan dinas, harga pasar yang lebih rendah dari SHBJ, dan belanja yang belum dapat direalisasikan karena kendala dari pihak penyedia. Selanjutnya, terdapat tiga sub kegiatan yang mengalami deviasi keuangan  $\geq 10\%$ , karena karena harga pasar lebih rendah dari SHBJ dan adanya perubahan aliran kas.

#### 64. KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN GUNUNG KIDUL DIY

Kantor Pelayanan Pajak Daerah (KPPD) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) di Kabupaten Gunungkidul Bantul sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, indikator kinerja program sebanyak 2 (dua) program telah mencapai target yang ditetapkan. Untuk Sub Kegiatan, sebanyak 20 sub kegiatan telah menunjukkan hasil baik dan tidak ada deviasi fisik. Namun, secara keuangan terjadi deviasi sebesar 2,16% disebabkan adanya efisiensi belanja dan perbedaan antara harga pasar dengan SHBJ dimana terdapat 3 sub kegiatan yang mengalami deviasi keuangan  $\geq 10\%$ .

#### 65. KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN KULONPROGO DIY

Kantor Pelayanan Pajak Daerah (KPPD) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) di Kabupaten Kulon Progo sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, indikator kinerja program sebanyak 2 (dua) program telah mencapai target yang ditetapkan. Untuk Sub Kegiatan, sebanyak 21 sub kegiatan telah menunjukkan hasil baik. Namun, terdapat sub kegiatan yang mengalami deviasi fisik, yaitu Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (3,00%) serta Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (1,00%). Penyebab deviasi fisik tersebut adalah adanya efisiensi pada salah satu komponen belanja. Secara keseluruhan terdapat deviasi keuangan sebesar 3,52% yang disebabkan oleh efisiensi belanja dan terdapat selisih harga di pasaran yang lebih rendah dibandingkan SHBJ dimana terdapat 2 sub kegiatan yang mengalami deviasi keuangan  $\geq 10\%$ .

#### 66. KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN SLEMAN DIY

Kantor Pelayanan Pajak Daerah (KPPD) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) di Kabupaten Sleman sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 memiliki 2 (dua) indikator kinerja Program yang semuanya sudah mencapai target triwulan I. Sedangkan jumlah Sub Kegiatan yang dimiliki Sebanyak 19 sub kegiatan telah menunjukkan hasil baik dan tidak ada deviasi fisik. Namun, secara keseluruhan masih terjadi deviasi keuangan yang relatif kecil. Penyebab deviasi keuangan tersebut karena adanya efisiensi.

#### 67. KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KOTA YOGYAKARTA DIY

Kantor Pelayanan Pajak Daerah (KPPD) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) di Kota Yogyakarta sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 memiliki 2 (dua) indikator kinerja Program yang semuanya sudah mencapai target triwulan I. Sedangkan jumlah Sub Kegiatan yang dimiliki sebanyak 19 sub kegiatan menunjukkan hasil baik dan tidak mengalami deviasi fisik. Namun, secara keseluruhan masih terjadi deviasi keuangan yang relatif kecil. Penyebab deviasi keuangan tersebut karena adanya selisih harga antara harga pasar yang lebih rendah dibandingkan standar harga.

#### 68. MUSEUM NEGERI SONOBUDOYO DIY

Museum Negeri Sonobudoyo DIY sampai dengan triwulan I Tahun 2025, pada indikator kinerja Program, dari total 3 (tiga) indikator, seluruh indikator telah memenuhi target. Untuk Sub Kegiatan, dari total 20 Sub Kegiatan, secara fisik realisasi sudah sesuai target triwulan I, sementara kinerja keuangan terdapat deviasi karena belanja yang menyesuaikan dengan kebutuhan, terdapat selisih harga di pasaran yang lebih rendah dibandingkan SHBJ, serta negosiasi harga dari pengadaan barang dan jasa.

#### 69. PANIRADYA KAISTIMEWAN DIY

Paniradya Kaistimewan sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, untuk indikator kinerja tujuan "Persentase capaian pelaksanaan urusan keistimewaan". Realisasi indikator tujuan tersebut telah melebihi target karena menggunakan angka realisasi tahun 2024 yaitu sebesar 90,95% atau sebesar 101,96% dari target tahun 2025 sebesar 89,20%. Selanjutnya Paniradya Kaistimewan memiliki 2 (dua) indikator Sasaran. Perhitungan realisasi dilakukan pada triwulan IV tahun 2025 sehingga realisasi pada triwulan I 2025 menggunakan angka realisasi tahun 2024 sehingga seluruh indikator sasaran telah melebihi target. Kemudian untuk indikator kinerja

Program, dari total 2 (dua) indikator, terdapat 1 (satu) indikator yang tidak mencapai target karena aktivitas OPD yang semakin banyak sehingga rentang kendali pun semakin panjang dan terdapat deviasi keuangan pada beberapa sub kegiatan karena realisasi disesuaikan dengan kebutuhan. Untuk Sub Kegiatan, terdapat 1 (satu) sub kegiatan yang realisasi fisiknya tidak 100% namun secara total realisasi fisik melebihi target sampai dengan bulan Maret yaitu 21,36% dari target sebesar 20,68%. Hal ini karena pada Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan terdapat pekerjaan Penyusunan Kajian Perumusan Arah Kebijakan Keistimewaan dan Kajian Indikator Perencanaan Program dan Kegiatan Urusan Keistimewaan yang target fisiknya pada bulan April, namun diselesaikan pada triwulan I (Bulan Maret) karena mengingat kontrak kerja berakhir ketika libur lebaran. Kinerja keuangan memiliki deviasi sebesar 5,05%, dari target sebesar 20,45%, terealisasi sebesar 15,4%. Deviasi keuangan terjadi karena beberapa aktivitas tidak dilaksanakan sebagai dampak dari kebijakan efisiensi.

#### 70. PELABUHAN PERIKANAN PANTAI DIY

Pelabuhan Perikanan Pantai Sadeng DIY sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 memiliki kinerja sebagai berikut: Untuk indikator Kinerja Program, dari 2 (dua) indikator program yaitu: “Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah” belum mencapai target yang ditetapkan. Untuk indikator “Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Penggunaan Jasa/Fasilitas Pelabuhan (skor)” belum sesuai target pada Triwulan I Tahun 2025, karena realisasi baru dapat dihitung di Triwulan IV Tahun 2025. Untuk kinerja pelaksanaan Sub Kegiatan, dari total 20 Sub Kegiatan, tidak terdapat sub kegiatan yang capaian fisiknya mengalami deviasi. Namun terdapat 11 Sub Kegiatan yang realisasi keuangan mengalami deviasi, hal tersebut dikarenakan efisiensi belanja pelaksanaan sub kegiatan.

#### 71. RUMAH SAKIT JIWA GRHASIA DIY

Rumah Sakit Jiwa Grhasia DIY sampai dengan triwulan I Tahun 2025, untuk indikator kinerja Sasaran, dari total 2 (dua) indikator, 1 (satu) indikator kinerja sasaran belum mencapai target triwulan I yaitu indikator Persentase ODGJ berat ditangani dan tidak ditelantarkan. Faktor penghambat ketidaktercapaian indikator tersebut adalah adanya kebijakan rujukan berjenjang BPJS sehingga hanya pasien dengan diagnose gangguan jiwa berat yang bisa di rawat inap di RS Jiwa Grhasia yang merupakan rumah sakit jiwa kelas A, serta terjadi penurunan jumlah pasien rawat inap sehubungan saat ini sudah terdapat beberapa rumah sakit non kekhususan jiwa yang juga

menyediakan layanan rawat inap bagi pasien jiwa. Kemudian untuk indikator kinerja Program, dari total 3 (tiga) indikator, ada 2 (dua) Indikator sudah sesuai target pada TW I, sementara masih terdapat 1 (satu) indikator yang belum mencapai target. Untuk Sub Kegiatan, dari total 29 Sub Kegiatan terdapat deviasi antara target dengan realisasi fisik sebesar 1,10%. Deviasi fisik terjadi karena proses pengadaan masih sampai pada tahap evaluasi sebagai akibat terdapat calon penyedia yang mengajukan penawaran dibawah 80% sehingga BLP menetapkan kebijakan untuk melakukan revaluasi kewajaran harga penawaran yang mengakibatkan penetapan penyedia melebihi dari jadwal yang telah ditetapkan. Selain hal tersebut untuk pembangunan gedung Psikiatri Terpadu perlu dilakukan kajian terhadap HPS oleh Inspektorat sehingga membutuhkan tambahan waktu untuk dapat dilakukan pemaketan ke BLP, selanjutnya untuk realisasi keuangan terdapat deviasi dikarenakan belanja menyesuaikan dengan kebutuhan, pembayaran uang muka untuk jasa konstruksi pembangunan gedung Psikiatri Terpadu, Instalasi Farmasi dan Instalasi Rehabilitasi Medik belum dapat dilaksanakan dan adanya pergeseran anggaran.

#### 72. RUMAH SAKIT PARU RESPIRA DIY

Rumah Sakit Paru Respira DIY sampai dengan triwulan I Tahun 2025, untuk indikator kinerja Program, dari total 2 (dua) indikator, ada 1 (satu) indikator sudah sesuai target pada TW I, sementara masih terdapat 1 (satu) indikator yang belum mencapai target yaitu Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah karena target merupakan target tahunan dan realisasi ada di triwulan IV 2025. Untuk Sub Kegiatan, dari total 7 (tujuh) Sub Kegiatan, capaian fisiknya sudah sesuai target pada triwulan I. realisasi keuangan terdapat deviasi karena efisiensi belanja, adanya beberapa belanja yang belum dapat dibayarkan karena terkendala aplikasi coretax dari pihak penyedia dan pembayaran uang muka Pengadaan Jasa Konsultansi Penyusunan Dokumen AMDAL dan Andalalin tidak dilakukan karena belum ada kepastian anggaran DAU Pemda DIY.

#### 73. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DIY

Satuan Polisi Pamong Praja DIY sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, untuk indikator kinerja tujuan “Persentase terwujudnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta” belum mencapai target. Selanjutnya pada indikator kinerja Sasaran sampai dengan triwulan I 2025, dari 2 (dua) sasaran kinerja, seluruh indikator Sasaran telah mencapai target yang ditetapkan. Kemudian untuk indikator kinerja Program,

dari total 4 (empat) indikator, terdapat 3 (tiga) indikator sudah sesuai target pada TW I, sementara masih terdapat 1 (satu) indikator yang belum mencapai target, antara lain disebabkan pemahaman dari masyarakat/wisatawan yang kurang dalam melihat situasi dan kondisi dari Pantai Selatan yang memiliki rip current/palung sehingga banyak terjadi laka laut, serta belum adanya sistem informasi yang memadai dalam mengakomodir pelaporan dari setiap kelompok Jagawarga. Untuk Sub Kegiatan, dari total 49 Sub Kegiatan, terdapat 2 (dua) sub kegiatan yang tidak mencapai target fisik 100% yang disebabkan karena adanya penyesuaian aliran kas dan beberapa item yang terdampak Inpres No. 1 Tahun 2025. Demikian juga, terdapat deviasi keuangan sebesar 5,4% disebabkan oleh adanya penyesuaian aliran kas dan beberapa item yang terdampak Inpres No. 1 Tahun 2025.

#### 74. SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 CANGKRINGAN DIY

Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Cangkringan sampai dengan triwulan I Tahun 2025, untuk Sub Kegiatan, dari total 2 (dua) Sub Kegiatan, secara fisik sudah sesuai target, sementara kinerja keuangan terdapat deviasi karena adanya negosiasi harga dan fluktuasi tagihan listrik.

#### 75. SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 GEDANGSARI DIY

Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Gedangsari sampai dengan triwulan I Tahun 2025, untuk Sub Kegiatan, dari total 2 (dua) Sub Kegiatan, secara fisik realisasi sudah sesuai target triwulan I, sementara kinerja keuangan terdapat deviasi yang disebabkan adanya sisa anggaran dari pembayaran belanja.

#### 76. SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 GODEAN DIY

Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Godean sampai dengan triwulan I Tahun 2025, untuk Sub Kegiatan, dari total 2 (dua) Sub Kegiatan, secara fisik realisasi sudah sesuai target triwulan I, sementara kinerja keuangan terdapat deviasi karena adanya sisa dari pembayaran listrik hingga bulan Maret 2025 dan sisa penawaran jasa keamanan dan kebersihan.

#### 77. SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 KALASAN DIY

Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Kalasan sampai dengan triwulan I Tahun 2025, untuk Sub Kegiatan, dari total 2 (dua) Sub Kegiatan, secara fisik sudah sesuai target, sementara kinerja keuangan terdapat deviasi karena terdapat efisiensi anggaran sisa belanja dari listrik, surat kabar, telepon, perjalanan

dinas, serta hasil negosiasi belanja BLUD seperti penyediaan bahan keramik, bahan edotel, ATK, buku cek, bahan kulit, dan bahan tekstil.

#### 78. SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 NANGGULAN DIY

Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Nanggulan sampai dengan triwulan I Tahun 2025, untuk Sub Kegiatan, dari total 2 (dua) Sub Kegiatan, secara fisik realisasi sudah sesuai target triwulan I, sementara kinerja keuangan terdapat deviasi karena menyesuaikan kebutuhan.

#### 79. SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 PANDAK DIY

Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Pandak sampai dengan triwulan I Tahun 2025, untuk Sub Kegiatan, dari total 2 (dua) Sub Kegiatan, secara fisik sudah sesuai target, sementara kinerja keuangan pelaksanaan telah melebihi target triwulan I.

#### 80. SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 PUNDONG DIY

Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Pundong sampai dengan triwulan I Tahun 2025, untuk Sub Kegiatan, dari total 2 (dua) Sub Kegiatan, secara fisik sudah sesuai target, sementara kinerja keuangan terdapat deviasi karena adanya penyesuaian termin pembayaran pada triwulan I jasa keamanan dan kebersihan.

#### 81. SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 SAPTOSARI DIY

Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Saptosari sampai dengan triwulan I Tahun 2025, untuk Sub Kegiatan, dari total 2 (dua) Sub Kegiatan, secara fisik sudah sesuai target, sementara kinerja keuangan terdapat deviasi yang disebabkan oleh belanja yang menyesuaikan dengan kebutuhan sehingga ada selisih harga pasaran yang lebih rendah dibandingkan dengan SHBJ.

#### 82. SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 SEWON DIY

Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Sewon DIY sampai dengan triwulan I Tahun 2025, untuk Sub Kegiatan, dari total 2 (dua) Sub Kegiatan, capaian fisik dan keuangannya sudah sesuai target pada triwulan I.

#### 83. SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 SEYEGAN DIY

Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Seyegan sampai dengan triwulan I Tahun 2025, untuk Sub Kegiatan, dari total 2 (dua) Sub Kegiatan, secara fisik

dan keuangan terdapat deviasi karena berkurangnya tagihan rutin untuk belanja listrik akibat tidak adanya praktek di jurusan disebabkan masa ujian.

84. SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 WONOSARI DIY

Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Wonosari sampai dengan triwulan I Tahun 2025, untuk Sub Kegiatan, dari total 2 (dua) Sub Kegiatan, secara fisik realisasi sudah sesuai target triwulan I, sementara kinerja keuangan terdapat deviasi karena adanya efisiensi Belanja.

85. SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 DEPOK DIY

Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Depok sampai dengan triwulan I Tahun 2025, untuk Sub Kegiatan, dari total 2 (dua) Sub Kegiatan, secara fisik sudah sesuai target, sementara kinerja keuangan terdapat deviasi karena menyesuaikan dengan tagihan belanja listrik, telepon, sampah; serta perjalanan dinas yang menyesuaikan kebutuhan untuk koordinasi administrasi sekolah.

86. SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 GODEAN DIY

Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Godean sampai dengan triwulan I Tahun 2025, untuk Sub Kegiatan, dari total 2 (dua) Sub Kegiatan, secara fisik realisasi sudah sesuai target triwulan I, sementara kinerja keuangan terdapat deviasi yang disebabkan oleh honor UKK yang direncanakan di April dimajukan di bulan Maret, sehingga terdapat deviasi negatif pada sub kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik.

87. SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 KASIHAN DIY

Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Kasihan sampai dengan triwulan I Tahun 2025, untuk Sub Kegiatan, dari total 2 (dua) Sub Kegiatan, secara fisik dan keuangan terdapat deviasi karena adanya kendala pada pembayaran pajak Belanja Jasa Kebersihan dan Keamanan Termin I dan Belanja Honorarium Pengelola Dapodik.

88. SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 PENGASIH DIY

Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Pengasih sampai dengan triwulan I Tahun 2025, untuk Sub Kegiatan, dari total 2 (dua) Sub Kegiatan, secara fisik sudah sesuai target, sementara kinerja keuangan terdapat deviasi karena adanya efisiensi dari sisa belanja listrik dan Belanja Jasa Keamanan.

#### 89. SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 WONOSARI DIY

Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Wonosari sampai dengan triwulan I Tahun 2025, untuk Sub Kegiatan, dari total 2 (dua) Sub Kegiatan, secara fisik sudah melebihi target karena Pelaksanaan Gelar Kreativitas dan Persiapan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) dilaksanakan lebih awal dari yang direncanakan, sementara kinerja keuangan terdapat deviasi karena Pembuatan produk BLUD menggunakan bahan yang masih disediakan dari anggaran BOS.

#### 90. SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 YOGYAKARTA DIY

Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Yogyakarta sampai dengan triwulan I Tahun 2025, untuk Sub Kegiatan, dari total 2 (dua) Sub Kegiatan, secara fisik sudah sesuai target, sementara kinerja keuangan terdapat deviasi yang disebabkan oleh efisiensi belanja.

#### 91. SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 3 WONOSARI DIY

Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Wonosari DIY sampai dengan triwulan I Tahun 2025, untuk Sub Kegiatan, dari total 2 (dua) Sub Kegiatan, capaian fisiknya sudah sesuai target pada triwulan I. realisasi keuangan terdapat deviasi negatif karena adanya pembayaran THR di bulan April (Belanja Jasa Tenaga Keamanan dan Belanja Jasa Tenaga Kebersihan), direalisasikan di bulan Maret karena disesuaikan dengan aturan pencairan THR sebelum hari raya.

#### 92. SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 3 YOGYAKARTA DIY

Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Yogyakarta sampai dengan triwulan I Tahun 2025, untuk Sub Kegiatan, dari total 2 (dua) Sub Kegiatan, secara fisik belum memenuhi target karena jadwal pelaksanaan kegiatan Ujian Sekolah yang mundur dari rencana, menyesuaikan Jadwal UKK (Sesuai Surat dari Dirjen Pendidikan Vokasi Nomor 0035/D2/DV.00.01/2025 tertanggal 2 Januari 2025 Perihal Penyampaian Pedoman Uji Kompetensi Keahlian SMK Tahun 2025), sementara kinerja keuangan terdapat deviasi yang disebabkan adanya sisa belanja yang sesuai kebutuhan dan penundaan belanja bahan Unit Layanan teknik mesin dan teknik otomotif.

#### 93. SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 4 YOGYAKARTA DIY

Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 4 Yogyakarta sampai dengan triwulan I Tahun 2025, untuk Sub Kegiatan, dari total 2 (dua) Sub Kegiatan, secara fisik

belum memenuhi target karena Surat Edaran Bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI, menteri Agama RI, Menteri Dalam Negeri RI No. 4 Tahun 2025, No. 9 Tahun 2025, No. 400.6/1432.A/SJ tentang Pembelajaran di bulan Ramadan tahun 1446 Hijriah/2025 Masehi dimana terdapat perbedaan dengan Kalender Pendidikan yang semula siswa libur Ramadhan tanggal 3,4,5 Maret 2025 menjadi tanggal 27, 28 Februari 2025 sehingga kegiatan kemah bakti yang semula akan dilaksanakan tgl 26-28 Februari menjadi mundur di bulan Mei 2025. Sementara kinerja keuangan terdapat deviasi karena adanya kegiatan belanja sewa peralatan kantor atau sewa panggung yang semula akan digunakan pada kegiatan tersebut.

#### 94. SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 5 YOGYAKARTA DIY

Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 5 Yogyakarta DIY sampai dengan triwulan I Tahun 2025, untuk Sub Kegiatan, dari total 2 (dua) Sub Kegiatan, capaian fisiknya sudah sesuai target pada triwulan I. realisasi keuangan terdapat deviasi karena sisa belanja dari belanja Cetak dan Cover dan belanja Keamanan dan Kebersihan sekolah, serta belanja yang menyesuaikan kebutuhan.

#### 95. SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 6 YOGYAKARTA DIY

Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 6 Yogyakarta DIY sampai dengan triwulan I Tahun 2025, untuk Sub Kegiatan, dari total 2 (dua) Sub Kegiatan, capaian fisiknya sudah sesuai target pada triwulan I. realisasi keuangan terdapat deviasi karena belanja yang bersifat fluktuatif, terdapat selisih standar harga dan menyesuaikan kebutuhan.

#### 96. SEKRETARIAT DAERAH DIY

Sekretariat Daerah DIY sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, dari 10 Sub Kegiatan yang ada, realisasi fisik dan keuangan terdapat deviasi. Hal ini disebabkan karena Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; serta Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah menyesuaikan kebutuhan.

#### 97. SEKRETARIAT DPRD DIY

Sekretariat DPRD DIY sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, untuk indikator kinerja tujuan “Kepuasan pelayanan kepada DPRD” dari target 84 terealisasi sebesar 89,18 atau melebihi target. Selanjutnya pada indikator kinerja sasaran sampai dengan triwulan I 2025, dari total 2 (dua) indikator, seluruhnya telah sesuai dengan target yang ditetapkan. Kemudian untuk indikator kinerja

Program, terdapat 1 (satu) indikator yang belum mencapai target dari 2 (dua) indikator yaitu “Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah”, realisasi kurang dari target karena merupakan target absolut yang akan dinilai di akhir tahun anggaran atau triwulan IV, selain itu belum ada subkegiatan yang selesai 100% di Triwulan I sehingga kegiatan masih berjalan. Untuk capaian sub kegiatan, terdapat deviasi fisik sebesar 0,02 untuk 5 sub kegiatan dan deviasi keuangan sebesar 17,17% untuk 15 sub kegiatan. Deviasi fisik terbesar terjadi pada sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD karena pelaksanaan perjalanan dinas menyesuaikan kebutuhan dan adanya rasionalisasi 50% perjalanan dinas. Sedangkan deviasi keuangan terbesar terjadi pada sub kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur, antara lain karena adanya selisih harga tiket dan hotel dalam perjalanan dinas.

#### 98. TAMAN BUDAYA YOGYAKARTA DIY

Taman Budaya Yogyakarta DIY sampai dengan triwulan I Tahun 2025, pada indikator kinerja Program, dari total 2 (dua) indikator, pada indikator “Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah” realisasi belum memenuhi target karena terdapat kegiatan yang masih berlangsung sampai dengan triwulan IV, sementara realisasi indikator “Indeks Kepuasan Masyarakat Taman Budaya Yogyakarta” belum mencapai target karena survey kepuasan konsumen belum dilakukan pada triwulan I. Untuk Sub Kegiatan, dari total 18 Sub Kegiatan, secara fisik terdapat deviasi dikarenakan terdapat sub kegiatan yang belum dapat terlaksana sesuai target, sementara kinerja keuangan juga terdapat deviasi karena terdapat kendala dalam proses NPD (terkait kebijakan Efisiensi Anggaran) yang berdampak pada proses penyelesaian SPJ, terdapat selisih harga di pasaran yang lebih rendah dibandingkan SHBJ, serta kendala teknis terkait dengan pencairan DAK Non Fisik.

### II.5.2 Kesimpulan Kinerja Perangkat Daerah

Berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi sampai dengan Triwulan I, 2025 dapat disampaikan catatan pelaksanaan sebagai berikut:

1. **Terkait pelaksanaan program/kegiatan dan lintas sektor sampai dengan triwulan I**, disampaikan sebagai berikut:
  - a. Koordinasi Lintas Sektor dan Kebijakan  
Beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mengalami kendala penggunaan SIPD dalam penatausahaan dan akuntansi pengelolaan keuangan, dan deviasi keuangan yang disebabkan *refocusing* APBD. Aspek

input keuangan tersebut dapat menyebabkan tujuan/sasaran/program Pemerintah Daerah tidak dapat tercapai. Dalam rangka mencapai kinerja tujuan/sasaran/program Pemerintah Daerah, OPD telah melakukan koordinasi lintas sektor untuk mendukung capaian target kinerja tujuan/sasaran/program Pemerintah Daerah dengan sumber daya yang efektif dan efisien dari masing-masing OPD.

b. Program Pengentasan Kemiskinan

Dalam rangka pengentasan kemiskinan, Perangkat Daerah telah melakukan koordinasi Lintas Sektor dengan melakukan akselerasi pemanfaatan data Regsosek dan penyusunan strategi yang matang untuk program pengentasan kemiskinan.

c. Indeks Demokrasi Indonesia

Dalam rangka meningkatkan Indeks Demokrasi Indonesia, Perangkat Daerah telah melakukan koordinasi Lintas Sektor dengan stakeholder terkait untuk memotret masalah dan tindak lanjutnya.

d. Keamanan Teknologi Informasi

Dalam rangka meningkatkan Keamanan Teknologi Informasi, Perangkat Daerah telah melakukan koordinasi Lintas Sektor antara lain dengan peningkatan sosialisasi terkait keamanan data dan optimalisasi pengelolaan aset TIK kepada seluruh ASN agar tidak melakukan aktivitas yang dapat membahayakan jaringan dan sistem informasi Pemerintah Daerah.

e. Pengelolaan Sampah dan Lingkungan

Desentralisasi persampahan di DIY memberi dampak/eksternalitas bagi unit layanan publik seperti Balai Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial yang menyebabkan tidak terkelolanya/teranglutnya sampah dengan baik. Terkait dengan hal tersebut, dilakukan antisipasi dan ditindaklanjuti dengan koordinasi dengan dinas kabupaten/kota yang membidangi pengelolaan sampah serta mengupayakan pengurangan, pemilahan dan daur ulang sampah sesuai jenisnya.

f. Inovasi dan Pengembangan

Pemerintah Daerah telah mendorong OPD untuk melakukan inovasi sebagai bagian dari unjuk kinerja Perangkat Daerah. Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan jangkauan dan kualitas pelayanan pada masyarakat, perbaikan tata kelola pemerintahan, serta pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan yang diampunya. Hal ini telah ditindaklanjuti melalui partisipasi kompetisi inovasi pelayanan publik seperti IGA maupun KIPP.

- g. **Retribusi dan Pendapatan Daerah**  
Pemerintah Daerah berupaya untuk mengoptimalkan retribusi dan pendapatan daerah sebagai salah satu sumber pendanaan pembangunan di daerah, upaya tersebut dilakukan dengan optimalisasi asset yang dikelola perangkat daerah serta optimalisasi penerimaan retribusi dan layanan kepada masyarakat oleh OPD teknis terkait.
- h. **Kinerja Pembangunan Infrastruktur/Rehabilitasi Jalan**  
Perangkat Daerah yang membidangi infrastruktur berupaya untuk meningkatkan kinerja pembangunan Infrastruktur dan rehabilitasi jalan. Hal tersebut dilakukan selain sebagai upaya merespon keluhan masyarakat namun juga memberikan manfaat berganda terhadap pembangunan di sektor lainnya.
- i. **Pengelolaan BLUD**  
Pemerintah Daerah telah melakukan evaluasi tata kelola BLUD agar dapat lebih berfungsi optimal. Hal tersebut dilakukan dengan upaya peningkatan koordinasi dan pembinaan manajemen tata kelola BLUD. Sebagai contoh pembinaan yang dilakukan oleh Balai Dikmen Kabupaten/Kota dan Dinas Dikpora terhadap SMK BLUD untuk membuat *business plan* yang matang dan melakukan evaluasi kompetensi siswa secara berkala. Sehingga kinerja SMK BLUD tersebut lebih optimal.
- j. **Pertanian dan Ketahanan Pangan**  
Perangkat Daerah berupaya untuk mempertahankan ketahanan dan kecukupan pangan dengan langkah-langkah strategis baik teknis maupun lintas sector antara lain dengan 1) Peningkatan produksi dan efisiensi rantai pasok pangan, penyediaan pupuk dan sarana produksi serta bibit yang berkualitas. 2) Antisipasi dampak perubahan iklim dengan penguatan produksi pangan melalui pemanfaatan infrastruktur pengairan. 3) Menguatkan data rantai pasok serta memperkuat sinergi dan koordinasi antar lembaga dalam pengendalian harga dan penanggulangan inflasi.
- k. **Ketenagakerjaan, Industri, dan Pariwisata**  
Pemerintah Daerah melalui Kerjasama antar perangkat daerah telah melakukan berbagai upaya dalam rangka meningkatkan lama tinggal dan total belanja per kapita wisatawan. Selain itu juga untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja pada sektor dominan seperti penyediaan akomodasi makan minum, perdagangan dan jasa. Selanjutnya juga dilakukan update data tenaga kerja berdasarkan Sakernas yang digunakan dalam pertimbangan kebijakan, melakukan peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM agar sesuai dengan standar pasar serta optimalisasi pembinaan pelaku ekonomi kreatif.

## **II.6 Kinerja Urusan Pemerintahan**

Sesuai dengan amanat dalam Permendagri 86 Tahun 2017, kinerja urusan pemerintahan secara detail dilaporkan sesuai dengan format formulir E.19 tentang Evaluasi Hasil Perubahan RKPD Tahun Berkenaan, kami sampaikan sebagai berikut (terlampir ).

**Tabel II-37 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2025 Sampai dengan Triwulan I**

**EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUNGAN PROVINSI  
RENJA PERANGKAT DAERAH BIRO ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERIODE PELAKSANAAN : 2025**

Indikator dan target kinerja SKPD yang mengacu pada sasaran RKPD:

Target Realisasi

1. Persentase perangkat daerah yang telah melaksanakan Reformasi Birokrasi kategori "sangat baik" (A) 94.6

2. Kategori RB Perangkat Daerah 2 0

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
						K	Rp		K	Rp	K	Rp			K	Rp			K	Rp	K	Rp	K	Rp
						6	7		8	9	10	11			12	13			14 = 13/8x100	15 = 7 + 13	16 = 15 / 6 x 100%	17		
1	Terwujudnya kelembagaan istimewa yang Agile	4.01.02	<b>PROGRAM PENATAAN ORGANISASI</b>	Persentase Jumlah Unit Pelayanan Publik minimal Kategori B	%	0	1.618.290.500	50	127.019.417	323.658.100							25	127.019.417		7,85	BIRO ORGANISASI			
				Nilai rerata Reformasi Birokrasi Organisasi Perangkat Daerah	%	0		93,42									46,71				BIRO ORGANISASI			
		4.01.02.1.02	<b>Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja</b>	<b>Terlaksananya Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja</b>	%	100	1.618.290.500	100	127.019.417	323.658.100							50	127.019.417	50,00	7,85	BIRO ORGANISASI			
		4.01.02.1.02.01	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Dokumen	7	422.025.000	2	37.937.501	84.405.000							2	37.937.501	28,57	8,99	BIRO ORGANISASI			
		4.01.02.1.02.02	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Dokumen	5	71.893.500	1	16.556.216	14.378.700							1	16.556.216	20,00	23,03	BIRO ORGANISASI			
		4.01.02.1.02.04	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan	Dokumen	15	411.065.000			82.213.000											BIRO ORGANISASI			
		4.01.02.1.02.05	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Dokumen	20	713.307.000	3	72.525.700	142.661.400							3	72.525.700	15,00	10,17	BIRO ORGANISASI			
		4.01.10	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN</b>	<b>Kematangan Perangkat Daerah</b>	nilai	0	250.640.884.000	42	1.966.534.036	57.994.087.000							42	1.966.534.036		0,78	BIRO ORGANISASI			
		4.01.10.5.01	<b>Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Urusan Keistimewaan</b>	<b>Terlaksananya penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan urusan keistimewaan</b>	%	100	244.190.884.000	100	914.777.564	56.594.087.000							50	914.777.564	50,00	0,37	BIRO ORGANISASI			
		4.01.10.5.01.01	Perumusan Kebijakan Kelembagaan Perangkat Daerah	Jumlah Kebijakan Kelembagaan Perangkat Daerah yang Dirumuskan	Dokumen	96	3.734.945.000	6	439.289.362	800.000.000							6	439.289.362	6,25	11,76	BIRO ORGANISASI			
		4.01.10.5.01.04	Pembinaan Kelembagaan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Kelembagaan Pemerintah Kabupaten/Kota	Dokumen	26	1.400.000.000	6	65.612.093	250.000.000							6	65.612.093	23,08	4,69	BIRO ORGANISASI			
		4.01.10.5.01.05	Pelaksanaan Kelembagaan Asli	5 Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota	5	232.692.340.000			54.294.087.000											BIRO ORGANISASI			

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab											
										I	II	III	IV																		
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11	12	13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
		4.01.10.5.01.06	Perumusan Kebijakan Analisis Jabatan dan Pengembangan Kinerja Jabatan	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Analisis Jabatan dan Pengembangan Kinerja Jabatan	Dokumen	15	2.113.599.000	4	274.918.649	400.000.000																4	274.918.649	26,67	13,01	BIRO ORGANISASI	
		4.01.10.5.01.08	Perencanaan dan Pengendalian Urusan Kelembagaan	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Urusan Kelembagaan	Dokumen	24	4.250.000.000	5	134.957.460	850.000.000																	5	134.957.460	20,83	3,18	BIRO ORGANISASI
		<b>4.01.10.5.02</b>	<b>Peningkatan Budaya Pemerintahan</b>	<b>Tercapainya peningkatan implementasi budaya pemerintahan</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>5.750.000.000</b>	<b>100</b>	<b>1.051.756.472</b>	<b>1.200.000.000</b>																<b>50</b>	<b>1.051.756.472</b>	<b>50,00</b>	<b>18,29</b>	<b>BIRO ORGANISASI</b>	
		4.01.10.5.02.01	Implementasi Budaya Pemerintahan DIY	Jumlah Perangkat Daerah dengan Tingkat Implementasi Budaya Pemerintahan Berkategori Baik	Dokumen	5	5.750.000.000	3	1.051.756.472	1.200.000.000																	3	1.051.756.472	60,00	18,29	BIRO ORGANISASI
		<b>4.01.10.5.07</b>	<b>Sarana dan Prasarana Keistimewaan</b>	<b>Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana lembaga pelaksana urusan keistimewaan</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>700.000.000</b>			<b>200.000.000</b>																					<b>BIRO ORGANISASI</b>
		4.01.10.5.07.01	Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Pelaksana Urusan Kelembagaan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Pelaksana Urusan Keistimewaan yang Disediakan	Unit	18	700.000.000			200.000.000																					BIRO ORGANISASI
<b>2</b>	<b>Meningkatnya Tatakelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah</b>	<b>4.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>%</b>	<b>0</b>	<b>5.148.743.500</b>	<b>92,2</b>	<b>350.344.533</b>	<b>941.248.700</b>	<b>79,04</b>															<b>85,62</b>	<b>350.344.533</b>		<b>6,80</b>	<b>BIRO ORGANISASI</b>	
		<b>0.00.01.1.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Terlaksananya perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>58.560.000</b>	<b>100</b>	<b>7.049.700</b>	<b>11.712.000</b>																<b>50</b>	<b>7.049.700</b>	<b>50,00</b>	<b>12,04</b>	<b>BIRO ORGANISASI</b>	
		0.00.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	20	28.575.000	4	1.162.600	5.715.000																	4	1.162.600	20,00	4,07	BIRO ORGANISASI
		0.00.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	10	12.340.000	4	2.368.100	2.468.000																	4	2.368.100	40,00	19,19	BIRO ORGANISASI
		0.00.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	15	17.645.000	3	3.519.000	3.529.000																	3	3.519.000	20,00	19,94	BIRO ORGANISASI
		<b>0.00.01.1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Terlaksananya administrasi keuangan daerah</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>204.025.500</b>	<b>100</b>	<b>36.331.400</b>	<b>40.805.100</b>																<b>50</b>	<b>36.331.400</b>	<b>50,00</b>	<b>17,81</b>	<b>BIRO ORGANISASI</b>	

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
									I		II		III		IV									
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		0.00.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	5	170.100.000	12	29.559.000		34.020.000									12	29.559.000	240,00	17,38	BIRO ORGANISASI
		0.00.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	19.435.000	1	3.874.600		3.887.000									1	3.874.600	100,00	19,94	BIRO ORGANISASI
		0.00.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	undefined	20	14.490.500	18	2.897.800		2.898.100									18	2.897.800	90,00	20,00	BIRO ORGANISASI
		<b>0.00.01.1.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Terlaksananya administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>56.735.000</b>	<b>100</b>	<b>11.319.750</b>		<b>11.347.000</b>									<b>50</b>	<b>11.319.750</b>	<b>50,00</b>	<b>19,95</b>	<b>BIRO ORGANISASI</b>
		0.00.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	56.735.000	2	11.319.750		11.347.000									2	11.319.750	200,00	19,95	BIRO ORGANISASI
		<b>0.00.01.1.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>1.680.000.000</b>				<b>407.500.000</b>													<b>BIRO ORGANISASI</b>
		0.00.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	4	30.000.000				7.500.000													BIRO ORGANISASI
		0.00.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	66	1.650.000.000				400.000.000													BIRO ORGANISASI
		<b>0.00.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>1.308.829.000</b>	<b>100</b>	<b>174.436.283</b>		<b>261.765.800</b>									<b>50</b>	<b>174.436.283</b>	<b>50,00</b>	<b>13,33</b>	<b>BIRO ORGANISASI</b>
		0.00.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5	3.330.000	1	1.680.400		666.000									1	1.680.400	20,00	50,46	BIRO ORGANISASI
		0.00.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5	32.396.500	4	5.498.400		6.479.300									4	5.498.400	80,00	16,97	BIRO ORGANISASI
		0.00.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5	19.329.500	2	1.889.600		3.865.900									2	1.889.600	40,00	9,78	BIRO ORGANISASI
		0.00.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5	26.883.000	1	3.309.250		5.376.600									1	3.309.250	20,00	12,31	BIRO ORGANISASI

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
									I		II		III		IV								14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		0.00.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	0	0		0																			BIRO ORGANISASI	
		0.00.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	20	1.219.390.000	12	160.558.633		243.878.000														12	160.558.633	60,00	13,17	BIRO ORGANISASI
		0.00.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	5	7.500.000	1	1.500.000		1.500.000														1	1.500.000	20,00	20,00	BIRO ORGANISASI
		<b>0.00.01.1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>1.100.000.000</b>				<b>60.000.000</b>																		<b>BIRO ORGANISASI</b>
		0.00.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	2	620.000.000				0																		BIRO ORGANISASI
		0.00.01.1.07.04	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	Unit	4	240.000.000				60.000.000																		BIRO ORGANISASI
		0.00.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	2	240.000.000				0																		BIRO ORGANISASI
		<b>0.00.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>70.000.000</b>				<b>14.000.000</b>																		<b>BIRO ORGANISASI</b>
		0.00.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	5	2.500.000				500.000																		BIRO ORGANISASI
		0.00.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	67.500.000				13.500.000																		BIRO ORGANISASI
		0.00.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	0	0				0																		BIRO ORGANISASI
		<b>0.00.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Terlaksananya pemeliharaan barang penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>670.594.000</b>	<b>100</b>	<b>121.207.400</b>		<b>134.118.800</b>														<b>50</b>	<b>121.207.400</b>	<b>50,00</b>	<b>18,07</b>	<b>BIRO ORGANISASI</b>

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab										
									I		II		III		IV																
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
		0.00.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	1	158.004.000	1	28.360.800		31.600.800																1	28.360.800	100,00	17,95	BIRO ORGANISASI
		0.00.01.1.09.010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	8	92.088.000	25	20.040.000		18.417.600																25	20.040.000	312,50	21,76	BIRO ORGANISASI
		0.00.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	7	420.502.000	7	72.806.600		84.100.400																7	72.806.600	100,00	17,31	BIRO ORGANISASI
Rata-rata capaian kinerja (%)																															
Predikat Kinerja																															
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:						1) Adanya Undang-Undang Nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan bentuk pengakuan dan penghormatan negara kepada pemerintah daerah yang bersifat istimewa. Dengan adanya tambahan kewenangan DIY dalam hal urusan keistimewaan tersebut Biro Organisasi SETDA DIY diberikan Kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah dalam hal penataan kelembagaan, penataan ketatalaksanaan dan pelaksanaan analisis jabatan sebagai kerangka dasar dalam penataan sumber daya aparatur merupakan suatu peluang besar bagi Biro Organisasi untuk dapat memberikan kontribusi dan peran yang lebih besar dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi. 2) Adanya Permendagri Nomor 8 Tahun 2017 Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan upaya untuk meningkatkan efektifitas kelembagaan Pemerintah Daerah DIY yang Istimewa dengan memperhatikan bentuk dan susunan Pemerintahan Asli. 3) Adanya Kerjasama, komitmen dan dukungan dari para pemangku kepentingan (stakeholders) dan OPD lainnya dalam bidang kelembagaan organisasi. 4) Adanya koordinasi di pemerintah pusat dalam penyusunan kebijakan sehingga pemda DIY memiliki pedoman yang lebih jelas dalam menata kelembagaan. 5) Adanya Peraturan Gubernur DIY Nomor 79 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sehingga ada pedoman yang jelas dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. 6) Adanya percepatan Reformasi Birokrasi																									
Faktor penghambat pencapaian kinerja:						1. Belum optimalnya penyusunan kelembagaan Pemerintah Daerah DIY yang Istimewa dengan memperhatikan bentuk dan susunan Pemerintahan Asli. 2. Data dan informasi yang tersedia (kelembagaan Perangkat Daerah, ketatalaksanaan dan SDM aparatur) belum sepenuhnya bisa digunakan dan dimanfaatkan sebagai bahan perumusan kebijakan khususnya untuk proses implementasi kebijakan kelembagaan Perangkat Daerah, ketatalaksanaan dan SDM aparatur. 3. Perubahan kebijakan implementasi reformasi birokrasi yang memberikan dampak kepada masyarakat yang berkontribusi pada target pembangunan. 4. Belum Optimalnya implementasi one agency one inovatoin menuju budaya inovatif. 5. Adanya Inpres Nomer 1 Tahun 2025 dalam rangka efisiensi belanja pada pelaksanaan anggaran yang tertuang dalam APBD Tahun Anggaran 2025.																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):						1. Dinamika implementasi kebijakan penyederhanaan birokrasi; 2. Efisiensi dan efektifitas proses bisnis dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan; 3. Budaya kerja, etos kerja, kualifikasi, kompetensi, dan kinerja ASN berkelas dunia; 4. Akuntabilitas kinerja yang semakin tinggi; 5. Industrialisasi 4.0 yang menuntut kecepatan, ketepatan dan kualitas tinggi dalam pelayanan publik; 6. Adaptasi kebiasaan baru birokrasi pemerintah pasca efisiensi anggaran.																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																															

**EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUNGAN PROVINSI  
RENJA PERANGKAT DAERAH BIRO UMUM DAN PROTOKOL PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERIODE PELAKSANAAN : 2025**

Indikator dan target kinerja SKPD yang mengacu pada sasaran RKPD:

Target Realisasi

1 Kategori Reformasi Birokrasi Biro Umum dan Protocol Setda DIY

2 2

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
								I		II		III		IV													
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Perangkat Daerah	1.03.13	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	Persentase pelayanan sarana dan prasarana Komplek Kepatihan sebagai bagian dari satuan ruang sumbu filosofis dalam mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan di Perangkat Daerah	%	100			200.000.000	22,5	45.000.000							22,5	45.000.000	22,50	11,25	45.000.000	11,25			BIRO UMUM DAN PROTOKOL	
		1.03.13.5.02	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Terlaksananya Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	%	100		200.000.000		45.000.000									45.000.000	22,50		45.000.000			BIRO UMUM DAN PROTOKOL		
		1.03.13.5.02.0001	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis					200.000.000		45.000.000									45.000.000	22,50		45.000.000			BIRO UMUM DAN PROTOKOL		
Rata-rata capaian kinerja (%)																											
Predikat Kinerja																			SR	SR					SR	ST	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:					dukungan lintas sektor dalam penyelenggaraan acara/kegiatan pimpinan maupun dalam penerimaan kunjungan tamu Pemda																						
Faktor penghambat pencapaian kinerja:					keterbatasan SDM pelayanan pimpinan dan tamu baik petugas protokol maupun rumah tangga pada saat terdapat kegiatan/acara yang padat sehingga pelayanan kepada pimpinan kurang maksimal																						
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):					koordinasi persiapan acara dan memaksimalkan petugas protokol dan rumah tangga dalam pelayanan acara/kegiatan pimpinan																						
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																											

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
								I		II		III		IV													
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	89			16.204.745.860	84,86	2.036.518.859						84,86	2.036.518.859	12,57	42,43	2.036.518.859	47,67			BIRO UMUM DAN PROTOKOL		
		4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100			12.117.000		4.840.113							4.840.113	39,94		4.840.113				BIRO UMUM DAN PROTOKOL		
		4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						4.993.000		3.885.113							3.885.113	77,81		3.885.113				BIRO UMUM DAN PROTOKOL		
		4.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						5.549.000		955.000							955.000	17,21		955.000				BIRO UMUM DAN PROTOKOL		
		4.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						1.575.000																BIRO UMUM DAN PROTOKOL		
		4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100			10.920.500		608.350							608.350	5,57		608.350				BIRO UMUM DAN PROTOKOL		
		4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						9.015.000																BIRO UMUM DAN PROTOKOL		
Rata-rata capaian kinerja (%)									16.404.745.860		2.081.518.859							2.081.518.859	12,69		2.081.518.859	4,91	inf				
Predikat Kinerja																		SR	SR					SR	ST		
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:					dukungan lintas sektor dalam penyelenggaraan acara/kegiatan pimpinan maupun dalam penerimaan kunjungan tamu Pemda																						
Faktor penghambat pencapaian kinerja:					keterbatasan SDM pelayanan pimpinan dan tamu baik petugas protokol maupun rumah tangga pada saat terdapat kegiatan/acara yang padat sehingga pelayanan kepada pimpinan kurang maksimal																						
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):					koordinasi persiapan acara dan memaksimalkan petugas protokol dan rumah tangga dalam pelayanan acara/kegiatan pimpinan																						
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																											

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
					K	Rp	K	Rp		K	Rp	I	II						III	IV					
1	2	3	4	5	6		7		8	9				10	11	12	13	14 = 13/8x100	15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%	17			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		4.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						555.500								408.500	73,54			408.500			BIRO UMUM DAN PROTOKOL	
		4.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD						1.350.000								199.850	14,80			199.850			BIRO UMUM DAN PROTOKOL	
		<b>4.01.01.1.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>%</b>	<b>100</b>			<b>70.597.000</b>																<b>BIRO UMUM DAN PROTOKOL</b>
		4.01.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD						10.500.000																BIRO UMUM DAN PROTOKOL
		4.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						60.097.000																BIRO UMUM DAN PROTOKOL
		<b>4.01.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>%</b>	<b>100</b>			<b>1.426.172.420</b>								<b>248.018.926</b>	<b>17,39</b>			<b>248.018.926</b>				<b>BIRO UMUM DAN PROTOKOL</b>
		4.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						120.222.000								120.222.000	100,00			120.222.000				BIRO UMUM DAN PROTOKOL
Rata-rata capaian kinerja (%)									16.404.745.860								2.081.518.859	12,69			2.081.518.859	4,91	inf		
Predikat Kinerja																	SR	SR						SR	ST
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:					dukungan lintas sektor dalam penyelenggaraan acara/kegiatan pimpinan maupun dalam penerimaan kunjungan tamu Pemda																				
Faktor penghambat pencapaian kinerja:					keterbatasan SDM pelayanan pimpinan dan tamu baik petugas protokol maupun rumah tangga pada saat terdapat kegiatan/acara yang padat sehingga pelayanan kepada pimpinan kurang maksimal																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):					koordinasi persiapan acara dan memaksimalkan petugas protokol dan rumah tangga dalam pelayanan acara/kegiatan pimpinan																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																									

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
					K	Rp			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						K	Rp	K
1	2	3	4	5	6		7	8	9				10	11	12	13		14 = 13/8x100	15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%	17		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					189.388.900		52.240.470							52.240.470	27,58		52.240.470			BIRO UMUM DAN PROTOKOL	
		4.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					181.891.270		8.252.416							8.252.416	4,54		8.252.416			BIRO UMUM DAN PROTOKOL	
		4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					144.591.250		1.461.950							1.461.950	1,01		1.461.950			BIRO UMUM DAN PROTOKOL	
		4.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan					47.004.000		5.700.000							5.700.000	12,13		5.700.000			BIRO UMUM DAN PROTOKOL	
		4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					573.786.000		46.589.599							46.589.599	8,12		46.589.599			BIRO UMUM DAN PROTOKOL	
		4.01.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					169.289.000		13.552.491							13.552.491	8,01		13.552.491			BIRO UMUM DAN PROTOKOL	
		<b>4.01.01.1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>%</b>	<b>100</b>		<b>169.210.000</b>		<b>15.207.000</b>							<b>15.207.000</b>	<b>8,99</b>		<b>15.207.000</b>			<b>BIRO UMUM DAN PROTOKOL</b>	
		4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					112.830.000		15.207.000							15.207.000	13,48		15.207.000			BIRO UMUM DAN PROTOKOL	
Rata-rata capaian kinerja (%)								16.404.745.860		2.081.518.859							2.081.518.859	12,69		2.081.518.859	4,91	inf		
Predikat Kinerja																	SR	SR				SR	ST	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:					dukungan lintas sektor dalam penyelenggaraan acara/kegiatan pimpinan maupun dalam penerimaan kunjungan tamu Pemda																			
Faktor penghambat pencapaian kinerja:					keterbatasan SDM pelayanan pimpinan dan tamu baik petugas protokol maupun rumah tangga pada saat terdapat kegiatan/acara yang padat sehingga pelayanan kepada pimpinan kurang maksimal																			
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):					koordinasi persiapan acara dan memaksimalkan petugas protokol dan rumah tangga dalam pelayanan acara/kegiatan pimpinan																			
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																								

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
								I		II		III		IV													
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		4.01.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				56.380.000																				BIRO UMUM DAN PROTOKOL
		<b>4.01.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	%	100				<b>6.102.706.000</b>		<b>741.777.628</b>								<b>741.777.628</b>	<b>12,15</b>		<b>741.777.628</b>			<b>BIRO UMUM DAN PROTOKOL</b>	
		4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				7.950.000			654.378										654.378	8,23		654.378			BIRO UMUM DAN PROTOKOL	
		4.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				3.253.828.000			485.928.250										485.928.250	14,93		485.928.250			BIRO UMUM DAN PROTOKOL	
		4.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				124.369.000			19.465.000										19.465.000	15,65		19.465.000			BIRO UMUM DAN PROTOKOL	
		4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				2.716.559.000			235.730.000										235.730.000	8,68		235.730.000			BIRO UMUM DAN PROTOKOL	
		<b>4.01.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	%	100				<b>3.344.889.090</b>		<b>348.177.842</b>								<b>348.177.842</b>	<b>10,41</b>		<b>348.177.842</b>			<b>BIRO UMUM DAN PROTOKOL</b>	
Rata-rata capaian kinerja (%)								16.404.745.860		2.081.518.859										2.081.518.859	12,69		2.081.518.859	4,91	inf		
Predikat Kinerja																				SR	SR				SR	ST	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:					dukungan lintas sektor dalam penyelenggaraan acara/kegiatan pimpinan maupun dalam penerimaan kunjungan tamu Pemda																						
Faktor penghambat pencapaian kinerja:					keterbatasan SDM pelayanan pimpinan dan tamu baik petugas protokol maupun rumah tangga pada saat terdapat kegiatan/acara yang padat sehingga pelayanan kepada pimpinan kurang maksimal																						
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):					koordinasi persiapan acara dan memaksimalkan petugas protokol dan rumah tangga dalam pelayanan acara/kegiatan pimpinan																						
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																											

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					K	Rp			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						K	Rp
1	2	3	4	5	6		7	8	9				10	11	12	13	14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					554.866.000		56.156.252						56.156.252	10,12		56.156.252			BIRO UMUM DAN PROTOKOL	
		4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					1.314.843.090		200.017.136						200.017.136	15,21		200.017.136			BIRO UMUM DAN PROTOKOL	
		4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					260.880.000		21.066.666						21.066.666	8,08		21.066.666			BIRO UMUM DAN PROTOKOL	
		4.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					1.085.800.000		63.937.788						63.937.788	5,89		63.937.788			BIRO UMUM DAN PROTOKOL	
		4.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					128.500.000		7.000.000						7.000.000	5,45		7.000.000			BIRO UMUM DAN PROTOKOL	
		<b>4.01.01.1.13</b>	<b>Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan</b>	<b>Terlaksananya Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan</b>	<b>%</b>	<b>100</b>		<b>33.086.000</b>		<b>17.726.000</b>						<b>17.726.000</b>	<b>53,58</b>		<b>17.726.000</b>			<b>BIRO UMUM DAN PROTOKOL</b>	
		4.01.01.1.13.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan					33.086.000		17.726.000						17.726.000	53,58		17.726.000			BIRO UMUM DAN PROTOKOL	
Rata-rata capaian kinerja (%)								16.404.745.860		2.081.518.859						2.081.518.859	12,69		2.081.518.859	4,91	inf		
Predikat Kinerja																SR	SR				SR	ST	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:					dukungan lintas sektor dalam penyelenggaraan acara/kegiatan pimpinan maupun dalam penerimaan kunjungan tamu Pemda																		
Faktor penghambat pencapaian kinerja:					keterbatasan SDM pelayanan pimpinan dan tamu baik petugas protokol maupun rumah tangga pada saat terdapat kegiatan/acara yang padat sehingga pelayanan kepada pimpinan kurang maksimal																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):					koordinasi persiapan acara dan memaksimalkan petugas protokol dan rumah tangga dalam pelayanan acara/kegiatan pimpinan																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																							



EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUNGAN PROVINSI
RENJA PERANGKAT DAERAH BIRO HUKUM PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERIODE PELAKSANAAN : 2025

Indikator dan target kinerja SKPD yang mengacu pada sasaran RKPd:

Target Realisasi

- 1 Rerata Capaian Produk Hukum serta Bantuan dan Layanan Hukum yang Berkualitas 100 28.13
2 Kategori Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah 2 2

Table with columns: No, Sasaran, Kode, Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan, Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan, Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah), Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024), Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi, Realisasi Kinerja Pada Triwulan (I-IV), Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025), Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%), Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah), Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%), Perangkat Daerah Penanggung Jawab.

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab														
								I	II	III	IV																			
1	2	3	4	5	6		7	8		9		10 11		12	13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17							
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
		2.10.11.5.03.01	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan	Jumlah sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan keistimewaan urusan pertanahan	Unit	1	380.000.000																	BIRO HUKUM						
		4.01.05	<b>PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM</b>	Persentase capaian produk hukum daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta bantuan dan layanan hukum (Bagian Perundang - undangan dan Dokumentasi Hukum)	%	100	17.612.912.980	100	2.513.350.863	3.550.000.000	32,28										32,28			66,14	2.513.350.863	66,14	14,27	BIRO HUKUM		
				Persentase capaian produk hukum daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta bantuan dan layanan hukum (Bagian Pembinaan dan Pengawasan PH Kab/Kota)	%	100		100			32,38											32,38			66,19		66,19		BIRO HUKUM	
				Persentase capaian produk hukum daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta bantuan dan layanan hukum (Bagian Bantuan dan Layanan Hukum)	%	100		100			32,38												32,38			66,19		66,19		BIRO HUKUM
		4.01.05.1.01	Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	Terlaksananya fasilitasi penyusunan produk hukum pengaturan, fasilitasi penyusunan produk hukum penetapan, pendokumentasian produk hukum dan naskah hukum lainnya, dan Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum kabupaten/ Kota	%	100	7.211.996.500		1.003.577.900	1.450.000.000															1.003.577.900		13,92	BIRO HUKUM		
Rata-rata capaian kinerja (%)							31.755.924.112		3.973.565.709	6.955.719.360																3.973.565.709	180,53	12,51		
Predikat Kinerja																												ST	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																														
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																														
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																														
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																														

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab																
								I	II	III	IV																					
1	2	3	4	5	6		7	8		9		10	11	12	13	14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17										
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp										
		4.01.05.1.01.01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun	Dokumen	158	449.196.000	128	106.595.000		90.000.000														128	106.595.000	81,01	23,73	BIRO HUKUM			
		4.01.05.1.01.02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun	Dokumen	315	146.386.000	428	34.075.000		30.000.000														428	34.075.000	135,87	23,28	BIRO HUKUM			
		4.01.05.1.01.03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya	Dokumen	15	5.379.663.700	570	726.938.100		1.080.000.000														570	726.938.100	3.800,00	13,51	BIRO HUKUM			
		4.01.05.1.01.04	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi	Dokumen	570	1.236.750.800	70	135.969.800		250.000.000														70	135.969.800	12,28	10,99	BIRO HUKUM			
		<b>4.01.05.1.02</b>	<b>Fasilitasi Bantuan Hukum</b>	<b>Terlaksananya Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum dan Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>10.400.916.480</b>		<b>1.509.772.963</b>		<b>2.100.000.000</b>															<b>1.509.772.963</b>		<b>14,52</b>	<b>BIRO HUKUM</b>			
		4.01.05.1.02.01	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan	Kasus	5	1.983.430.900	1	218.836.000		400.000.000														1	218.836.000	20,00	11,03	BIRO HUKUM			
		4.01.05.1.02.02	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan	Kasus	500	8.417.485.580	187	1.290.936.963		1.700.000.000														187	1.290.936.963	37,40	15,34	BIRO HUKUM			
		<b>4.01.10</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN</b>	<b>Persentase capaian produk hukum daerah tindak lanjut urusan keistimewaan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Bagian Pembinaan dan Pengawasan Kab/Kota)</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>4.950.000.000</b>	<b>100</b>	<b>645.275.947</b>		<b>1.000.000.000</b>	<b>25</b>													<b>25</b>			<b>62,5</b>	<b>645.275.947</b>	<b>62,50</b>	<b>13,04</b>	<b>BIRO HUKUM</b>
				<b>Persentase capaian produk hukum daerah tindak lanjut urusan keistimewaan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Bagian Perundang-undangan dan Dokumentasi Hukum)</b>	<b>%</b>	<b>100</b>		<b>100</b>				<b>25</b>														<b>25</b>			<b>62,5</b>		<b>62,50</b>	<b>BIRO HUKUM</b>
Rata-rata capaian kinerja (%)							31.755.924.112		3.973.565.709		6.955.719.360																3.973.565.709	180,53	12,51			
Predikat Kinerja																																
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																																
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																																
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																																
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																																

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab														
								I	II	III	IV																			
1	2	3	4	5	6		7	8		9		10	11	12	13	14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17								
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								
		4.01.10.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Urusan Keistimewaan	Terlaksananya Pengawasan Rancangan Produk Hukum dan Produk Hukum Kabupaten/Kota Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan dan Penyusunan Rancangan Produk Hukum Daerah Tindak Lanjut Pelaksanaan Keistimewaan dan Penyusunan Rancangan Produk Hukum Daerah Tindak Lanjut Pelaksanaan Keistimewaan	%	100	4.950.000.000	645.275.947	1.000.000.000													645.275.947	13,04	BIRO HUKUM						
		4.01.10.5.01.07	Pengawasan Rancangan Produk Hukum dan Produk Hukum Kabupaten/Kota Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan	Jumlah Dokumen Rancangan Produk Hukum dan Produk Hukum Kabupaten/Kota Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan yang Diawasi	Dokumen	110	2.950.000.000	26	234.253.000	600.000.000											26	234.253.000	23,64	7,94	BIRO HUKUM					
		4.01.10.5.01.09	Penyusunan Rancangan Produk Hukum Daerah Tindak Lanjut Pelaksanaan Keistimewaan	Jumlah Dokumen Rancangan Produk Hukum Daerah Tindak Lanjut Pelaksanaan Keistimewaan yang Disusun	Dokumen	75	2.000.000.000	16	411.022.947	400.000.000											16	411.022.947	21,33	20,55	BIRO HUKUM					
2	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Perangkat Daerah	0.00.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai PKKI	3	6.383.204.900	87,2	646.389.143	1.877.535.000	72,4										72,4				159,6	646.389.143	5.320,00	10,13	BIRO HUKUM	
		0.00.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100	93.050.400	3.842.500	18.535.000																	3.842.500		4,13	BIRO HUKUM	
Rata-rata capaian kinerja (%)							31.755.924.112		3.973.565.709	6.955.719.360																3.973.565.709	180,53	12,51		
Predikat Kinerja																														
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																														
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																														
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																														
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																														

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab											
									I		II		III		IV					14 = 13/8x100			15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%								
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17					
		0.00.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	30	25.173.800	5	2.302.500		5.035.000																	5	2.302.500	16,67	9,15	BIRO HUKUM	
		0.00.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	20	40.637.000	1			8.000.000																	1			5,00		BIRO HUKUM
		0.00.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	15	27.239.600	3	1.540.000		5.500.000																	3	1.540.000	20,00	5,65	BIRO HUKUM	
		<b>0.00.01.1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Terlaksananya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>245.780.300</b>		<b>33.838.000</b>		<b>49.500.000</b>																		<b>33.838.000</b>		<b>13,77</b>	<b>BIRO HUKUM</b>	
		0.00.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	60	198.680.000	12	32.380.000		40.000.000																	12	32.380.000	20,00	16,30	BIRO HUKUM	
		0.00.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dokumen	5	12.187.600	1	710.000		2.500.000																	1	710.000	20,00	5,83	BIRO HUKUM	
		0.00.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Dokumen	70	34.912.700	14	748.000		7.000.000																	14	748.000	20,00	2,14	BIRO HUKUM	
		Rata-rata capaian kinerja (%)				31.755.924.112		3.973.565.709		6.955.719.360																3.973.565.709		180,53	12,51				
		Predikat Kinerja														SR		SR										ST		SR			
		Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																															
		Faktor penghambat pencapaian kinerja:																															
		Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																															
		Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																															

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab									
								I	II	III	IV														
1	2	3	4	5	6		7	8	9		10	11	12	13	14 = 13/8x100	15 = 7 + 13	16 = 15 / 6 x 100%	17							
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
		0.00.01.1.03	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD</b>	%	100	64.320.000		12.820.000		13.000.000									12.820.000		19,93	<b>BIRO HUKUM</b>		
		0.00.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	20	64.320.000	4	12.820.000		13.000.000									4	12.820.000	20,00	19,93	BIRO HUKUM	
		0.00.01.1.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai, serta Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi</b>	%	100	229.761.400		6.300.000		58.000.000										6.300.000		2,74	<b>BIRO HUKUM</b>	
		0.00.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	5	40.261.400	1	6.300.000		8.000.000										1	6.300.000	20,00	15,65	BIRO HUKUM
		0.00.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	5	189.500.000				50.000.000													BIRO HUKUM	
		0.00.01.1.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</b>	%	100	2.170.248.100		353.413.267		439.000.000											353.413.267		16,28	<b>BIRO HUKUM</b>
Rata-rata capaian kinerja (%)							31.755.924.112		3.973.565.709		6.955.719.360										3.973.565.709	180,53	12,51		
Predikat Kinerja																							ST	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																									
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																									

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
												I	II	III	IV		14 = 13/8x100	15 = 7 + 13	16 = 15 / 6 x 100%	K	Rp	K		Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		0.00.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5	32.130.200	1	2.744.500		6.500.000											1	2.744.500	20,00	8,54	BIRO HUKUM		
		0.00.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	10	355.762.500	2	64.383.600		70.000.000											2	64.383.600	20,00	18,10	BIRO HUKUM		
		0.00.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5	39.716.000	1	4.785.000		8.000.000											1	4.785.000	20,00	12,05	BIRO HUKUM		
		0.00.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5	246.539.000	1	32.765.900		50.000.000											1	32.765.900	20,00	13,29	BIRO HUKUM		
		0.00.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Paket	10	21.738.400	2	5.040.000		4.500.000											2	5.040.000	20,00	23,18	BIRO HUKUM		
		0.00.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	5	1.474.362.000	1	243.694.267		300.000.000											1	243.694.267	20,00	16,53	BIRO HUKUM		
		<b>0.00.01.1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Terlaksananya Pengadaan Mebel, Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>1.469.113.900</b>		<b>87.804.000</b>		<b>836.000.000</b>												<b>87.804.000</b>		<b>5,98</b>	<b>BIRO HUKUM</b>		
		0.00.01.1.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	1	700.000.000				700.000.000																BIRO HUKUM	
		0.00.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	4	137.000.000				9.000.000																BIRO HUKUM	
		0.00.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	35	547.896.900	34	81.904.000		110.000.000											34	81.904.000	97,14	14,95	BIRO HUKUM		
		0.00.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau	Unit	10	84.217.000	1	5.900.000		17.000.000											1	5.900.000	10,00	7,01	BIRO HUKUM		
Rata-rata capaian kinerja (%)							31.755.924.112		3.973.565.709		6.955.719.360												3.973.565.709	180,53	12,51			
Predikat Kinerja																												
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																												
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																												

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab									
								I	II	III	IV														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13/8x100	15 = 7 + 13	16 = 15 / 6 x 100%	17									
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
			atau Bangunan Lainnya	Bangunan Lainnya yang Disediakan																					
		<b>0.00.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat , Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik , Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>232.720.000</b>		<b>4.316.572</b>	<b>53.500.000</b>										<b>4.316.572</b>	<b>1,85</b>	<b>BIRO HUKUM</b>			
		0.00.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	5	17.120.000	1	1.020.000	3.500.000										1	1.020.000	20,00	5,96	BIRO HUKUM	
		0.00.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	5	25.600.000	1	3.296.572	5.000.000										1	3.296.572	20,00	12,88	BIRO HUKUM	
		0.00.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	4	190.000.000			45.000.000														BIRO HUKUM	
		<b>0.00.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pemeliharaan Mebel, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>1.878.210.800</b>		<b>144.054.804</b>	<b>410.000.000</b>											<b>144.054.804</b>	<b>7,67</b>	<b>BIRO HUKUM</b>		
		0.00.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	5	198.707.900	1	32.183.302	40.000.000										1	32.183.302	20,00	16,20	BIRO HUKUM	
		0.00.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	30	475.692.700	6	88.311.502	95.000.000										6	88.311.502	20,00	18,56	BIRO HUKUM	
Rata-rata capaian kinerja (%)							31.755.924.112		3.973.565.709	6.955.719.360											3.973.565.709	180,53	12,51		
Predikat Kinerja																									SR SR
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																									
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																									

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab									
								I	II	III	IV														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13/8x100	15 = 7 + 13	16 = 15 / 6 x 100%	17									
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
			Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya																					
		0.00.01.1.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	12	130.000.000																BIRO HUKUM		
		0.00.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	35	223.410.200	38	23.560.000												38	23.560.000	108,57	10,55	BIRO HUKUM
		0.00.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	12	850.400.000	0,5													0,5		4,17		BIRO HUKUM
Rata-rata capaian kinerja (%)																									
Predikat Kinerja																								ST	SR
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																									
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																									

**EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUNGAN PROVINSI  
RENJA PERANGKAT DAERAH BIRO TATA PEMERINTAHAN PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERIODE PELAKSANAAN : 2025**

Indikator dan target kinerja SKPD yang mengacu pada sasaran RKPd:

1. Persentase rumusan bahan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah dan kerja sama dalam negeri, pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren, serta penataan administrasi batas daerah dan toponimi Target Realisasi  
100 26
2. Kategori Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah 2 2

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp		K	Rp	
						6		7			8		9		10	11		12	13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%
1	Meningkatnya tertib tata kelola penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah, dan kerja sama dalam negeri serta Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/ Kemantren	2.10.11	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN	Persentase garis batas daerah provinsi dan kabupaten/kota yang tersinkronisasi	%	100	1.314.140.000	35,7	161.645.628	300.000.000	42,86						42,86			39,28	161.645.628	39,28	12,30	BIRO TATA PEMERINTAHAN	
		2.10.11.5.01	Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Terlaksananya pengelolaan tanah kasultanan, tanah kadipaten yang meliputi aspek penatausahaan, aspek pemeliharaan dokumen, aspek pengawasan	dokumen	19	1.314.140.000		161.645.628	300.000.000											161.645.628		12,30	BIRO TATA PEMERINTAHAN	
		2.10.11.5.01.01	Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Jumlah Dokumen Penatausahaan Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten Dalam Rangka Pengembangan Kebudayaan, Kepentingan Sosial, Dan Kesejahteraan Masyarakat	dokumen	19	1.314.140.000	5	161.645.628	300.000.000									5	161.645.628	26,32	12,30	BIRO TATA PEMERINTAHAN		
		2.10.11.5.03	Sarana dan Prasarana Keistimewaan	Terlaksananya Pengelolaan Tanah	%	100												nan						BIRO TATA PEMERINTAHAN	
Rata-rata capaian kinerja (%)							48.299.155.423		5.077.024.168	6.968.335.445							47.482.663		0,68		5.124.506.831	38,80	10,61		
Predikat Kinerja																		SR		SR			SR	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																									
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																									

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)	Target Kinerja Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
								I	II	III	IV			14 = 13x100		15 = 7 + 13			16 = 15 / 6 x 100%					
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10	11	12	13		14	15		16		17	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				<b>Kasultanan dan Kadipaten</b>																				
		2.10.11.5.03.01	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan	Tersedianya sarana pendukung pelaksanaan kegiatan urusan keistimewaan berupa: - Laptop	unit	1	0				0												BIRO TATA PEMERINTAHAN	
				Tersedianya sarana pendukung pelaksanaan kegiatan urusan keistimewaan berupa: - Software arc gis	unit	1																	BIRO TATA PEMERINTAHAN	
				Tersedianya sarana pendukung pelaksanaan kegiatan urusan keistimewaan berupa: - Printer	unit	1																	BIRO TATA PEMERINTAHAN	
		<b>2.22.08</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN</b>	<b>Presentase rumusan bahan kebijakan urusan kebudayaan</b>	%	<b>100</b>	<b>2.035.029.000</b>	<b>300</b>	<b>907.539.236</b>	<b>500.000.000</b>								<b>150</b>	<b>907.539.236</b>	<b>150,00</b>	<b>44,60</b>	<b>BIRO TATA PEMERINTAHAN</b>		
		<b>2.22.08.5.01</b>	<b>Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman</b>	<b>Terlaksananya kegiatan sejarah, bahasa, sastra dan permuseuman</b>	undefined	<b>100</b>	<b>1.800.000.000</b>		<b>907.539.236</b>	<b>500.000.000</b>									<b>907.539.236</b>		<b>50,42</b>	<b>BIRO TATA PEMERINTAHAN</b>		
		2.22.08.5.01.01	Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan	dokumen	6	1.800.000.000	3	907.539.236	500.000.000								3	907.539.236	50,00	50,42	BIRO TATA PEMERINTAHAN		
		<b>2.22.08.5.06</b>	<b>Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan</b>	<b>Tersedianya Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan</b>	%	<b>100</b>	<b>235.029.000</b>											<b>nan</b>					<b>BIRO TATA PEMERINTAHAN</b>	
Rata-rata capaian kinerja (%)							48.299.155.423		5.077.024.168	6.968.335.445								47.482.663	0,68		5.124.506.831	38,80	10,61	
Predikat Kinerja																			SR	SR			SR	SR
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																								
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																								

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)	Target Kinerja Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
								I	II	III	IV			13		16 = 15 / 6 x 100%								
								K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13/8x100	15 = 7 + 13	16 = 15 / 6 x 100%	17								
		2.22.08.5.06.03	Pengadaan Sarana Publikasi dan Penanda Keistimewaan	Jumlah Sarana Publikasi dan Penanda Keistimewaan	0	235.029.000	0											BIRO TATA PEMERINTAHAN						
		<b>4.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH</b>	<b>Persentase rumusan bahan kebijakan pemerintahan umum dan penataan wilayah</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>22.531.553.050</b>	<b>191,67</b>	<b>557.584.486</b>	<b>1.222.750.000</b>	<b>28,57</b>	<b>44.968.001</b>					<b>28,57</b>	<b>44.968.001</b>	<b>3,68</b>	<b>110,12</b>	<b>602.552.487</b>	<b>110,12</b>	<b>2,67</b>	<b>BIRO TATA PEMERINTAHAN</b>
		<b>4.01.03.1.01</b>	<b>Pelaksanaan Tugas Pemerintahan</b>	<b>Terlaksananya tugas pemerintahan</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>19.590.799.900</b>		<b>277.206.916</b>	<b>592.000.000</b>											<b>277.206.916</b>		<b>1,41</b>	<b>BIRO TATA PEMERINTAHAN</b>
		4.01.03.1.01.02	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	dokumen	17	17.948.800.000	5	230.087.716	192.000.000										5	230.087.716	29,41	1,28	BIRO TATA PEMERINTAHAN
		4.01.03.1.01.03	Fasilitasi Penataan Wilayah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah	dokumen	19	1.641.999.900	1	47.119.200	400.000.000										1	47.119.200	5,26	2,87	BIRO TATA PEMERINTAHAN
		<b>4.01.03.1.02</b>	<b>Pelaksanaan Otonomi Daerah</b>	<b>Terlaksananya Pelaksanaan Otonomi Daerah</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>1.450.053.750</b>		<b>83.984.010</b>	<b>330.750.000</b>		<b>44.968.001</b>					<b>44.968.001</b>	<b>13,60</b>		<b>128.952.011</b>		<b>8,89</b>	<b>BIRO TATA PEMERINTAHAN</b>	
		4.01.03.1.02.03	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	laporan	14	1.450.053.750	2	83.984.010	330.750.000		44.968.001					44.968.001	13,60	2	128.952.011	14,29	8,89	BIRO TATA PEMERINTAHAN	
		<b>4.01.03.1.03</b>	<b>Fasilitasi Kerja Sama Daerah</b>	<b>Terlaksananya fasilitasi kerjasama daerah</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>1.490.699.400</b>		<b>196.393.560</b>	<b>300.000.000</b>											<b>196.393.560</b>		<b>13,17</b>	<b>BIRO TATA PEMERINTAHAN</b>
		4.01.03.1.03.01	Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah	Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi	dokumen	0	1.490.699.400	2	196.393.560	300.000.000										2	196.393.560		13,17	BIRO TATA PEMERINTAHAN
		<b>4.01.03.</b>	<b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH</b>	<b>Persentase rumusan bahan kebijakan penyelenggaraan otonomi daerah</b>	<b>%</b>	<b>100</b>		<b>146,15</b>			<b>33,34</b>						<b>33,34</b>	<b>nan</b>	<b>89,745</b>		<b>89,75</b>			<b>BIRO TATA PEMERINTAHAN</b>
Rata-rata capaian kinerja (%)						48.299.155.423	5.077.024.168	6.968.335.445	47.482.663								47.482.663	0,68		5.124.506.831	38,80	10,61		
Predikat Kinerja																	SR	SR				SR	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																								
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																								

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
										I	II	III	IV			14 = 13/8x100				15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%				
1	2	3	4	5		6		7		8	9				10	11	12	13		14 = 13/8x100	15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				Persentase naskah kerjasama dalam negeri yang terealisasi	%	100		325			15						15			170		170,00			BIRO TATA PEMERINTAHAN	
2	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Perangkat Daerah	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Angka	88		95,42			87,51						87,51		nan	182,93		207,88			BIRO TATA PEMERINTAHAN	
Rata-rata capaian kinerja (%)																										
Predikat Kinerja																	SR	SR					SR	SR		
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																										
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																										
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																										
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																										

**EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUNGAN PROVINSI  
RENJA PERANGKAT DAERAH BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERIODE PELAKSANAAN : 2025**

Indikator dan target kinerja SKPD yang mengacu pada sasaran RKPd:

Target Realisasi

- 1. Persentase Kualitas Pengelolaan Manajemen ASN 70.73    0
- 2. Kategori RB Perangkat Daerah 2

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
						K	Rp		K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6		7		8		9	10	11	12	13	14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
1	Meningkatnya Kualitas Manajemen ASN	4.01.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase pegawai yang meningkat pemahamannya tentang keistimewaan DIY	%	85	5.800.739.000	90,73	970.047.497	1.136.464.000											45,365	970.047.497	53,37	16,72	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
		4.01.10.5.02	Peningkatan Budaya Pemerintahan	Tercapainya peningkatan implementasi budaya pemerintahan	%	100	5.800.739.000	25	970.047.497	1.136.464.000											12,5	970.047.497	12,50	16,72	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
		4.01.10.5.02.01	Implementasi Budaya Pemerintahan DIY	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan DIY	Dokumen	8	1.790.700.000	2	310.331.896	310.000.000											2	310.331.896	25,00	17,33	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
		4.01.10.5.02.03	Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan	Jumlah PNS yang Ikut Diklat Keistimewaan	Orang	3.013	4.010.039.000	630	659.715.601	826.464.000											630	659.715.601	20,91	16,45	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
		5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Pemenuhan ASN sesuai Formasi	%	66,48	76.745.275.785	79,47	2.802.496.982	17.067.801.978											39,735	2.802.496.982	59,77	3,65	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
				Persentase Pemenuhan Pemutakhiran Data ASN	%	96,9		97,27														48,635		50,19	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
				Persentase Pemenuhan Kompetensi ASN	%	70		79,66														39,83		56,90	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
				Persentase Keterisian Jabatan	%	89,8		87,89														43,945		48,94	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
				Persentase Kompetensi ASN yang Terpetakan	%	35,28		29,15														14,575		41,31	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
Rata-rata capaian kinerja (%)							382.267.795.953		80.133.985.324	42.079.699.160											80.133.985.324	98,14	20,96			
Predikat Kinerja																								ST	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																										
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																										
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																										
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																										

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6		7		8		9	10	11	12	13	14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17		
																							DAERAH	
				Persentase Penilaian Capaian Kinerja ASN	%	95		94,8										47,4		49,89			BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
				Persentase Penyelesaian SK Kenaikan Pangkat dan Pemberhentian PNS	%	90		95,65										47,825		53,14			BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
				Nilai Survei Kepuasan dari Pelayanan Kepegawaian	%	87,46		88,81										44,405		50,77			BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
		5.03.02.1.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Terlaksananya Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	%	100	23.125.487.700	25	1.170.263.722	5.317.430.000								12,5	1.170.263.722	12,50	5,06		BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
		5.03.02.1.01.02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Dokumen	2	581.254.600	2	3.257.669	142.000.000								2	3.257.669	100,00	0,56		BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
		5.03.02.1.01.03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Dokumen	2	15.945.618.000	2	1.039.220.648	3.700.000.000								2	1.039.220.648	100,00	6,52		BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
		5.03.02.1.01.06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Dokumen	500	2.174.962.000	619	67.179.725	463.430.000								619	67.179.725	123,80	3,09		BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
		5.03.02.1.01.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	7	2.692.672.000	1	27.591.516	612.000.000								1	27.591.516	14,29	1,02		BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
		5.03.02.1.01.11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	Dokumen	7	1.730.981.100	2	33.014.164	400.000.000								2	33.014.164	28,57	1,91		BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
		5.03.02.1.02	Mutasi dan Promosi ASN	Terlaksananya Mutasi dan Promosi ASN	%	100	6.871.410.390	100	362.019.959	1.496.184.900								50	362.019.959	50,00	5,27		BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
		5.03.02.1.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan	Dokumen	220	1.213.262.700	248	21.749.066	260.100.000								248	21.749.066	112,73	1,79		BADAN KEPEGAWAIAN	
Rata-rata capaian kinerja (%)						382.267.795.953		80.133.985.324		42.079.699.160						80.133.985.324		98,14		20,96				
Predikat Kinerja														SR		SR				ST		SR		
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																								
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																								

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						K	Rp	K	Rp		K	Rp	I	II			III	IV	K	Rp		K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5		6		7		8		9	10	11	12	13	14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah																				DAERAH	
		5.03.02.1.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Laporan	2	1.847.673.590	2	82.430.052	403.764.900										2	82.430.052	100,00	4,46	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
		5.03.02.1.02.03	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	Dokumen	1	3.810.474.100	1	257.840.841	832.320.000										1	257.840.841	100,00	6,77	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
		<b>5.03.02.1.03</b>	<b>Pengembangan Kompetensi ASN</b>	<b>Terlaksananya Pengembangan Kompetensi ASN</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>41.837.972.162</b>	<b>25</b>	<b>1.068.235.155</b>	<b>9.108.724.022</b>										<b>12,5</b>	<b>1.068.235.155</b>	<b>12,50</b>	<b>2,55</b>	<b>BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH</b>	
		5.03.02.1.03.02	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	Dokumen	6	5.575.188.000	6	372.526.549	1.174.656.500										6	372.526.549	100,00	6,68	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
		5.03.02.1.03.03	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Dokumen	1	1.165.697.650	1	28.820.400	240.566.150										1	28.820.400	100,00	2,47	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
		5.03.02.1.03.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola	Dokumen	1	21.729.469.145	1	543.374.930	4.730.777.293										1	543.374.930	100,00	2,50	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
		5.03.02.1.03.05	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Dokumen	1	12.060.698.867	1	111.820.609	2.658.342.079										1	111.820.609	100,00	0,93	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
		5.03.02.1.03.10	Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	Orang	30	742.752.000	28	4.970.183	174.332.000										28	4.970.183	93,33	0,67	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
		5.03.02.1.03.13	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Fungsional ASN yang Dibina	Orang	115	564.166.500	216	6.722.484	130.050.000										216	6.722.484	187,83	1,19	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
		<b>5.03.02.1.04</b>	<b>Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</b>	<b>Terlaksananya Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>4.910.405.533</b>	<b>0</b>	<b>201.978.146</b>	<b>1.145.463.056</b>											<b>201.978.146</b>		<b>4,11</b>	<b>BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH</b>	
		5.03.02.1.04.02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Dokumen	4	285.016.884	4	16.463.397	57.594.366										4	16.463.397	100,00	5,78	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
Rata-rata capaian kinerja (%)							382.267.795.953		80.133.985.324	42.079.699.160											80.133.985.324	98,14	20,96		
Predikat Kinerja																								ST	SR
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																									
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																									

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Daerah Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5		6		7		8		9	10	11	12	13	14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17		
		5.03.02.1.04.04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	Orang	20	3.675.400.149	14	118.156.809	888.368.690										14	118.156.809	70,00	3,21	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
		5.03.02.1.04.05	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	Orang	480	122.943.500	519	16.677.407	25.500.000										519	16.677.407	108,13	13,57	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
		5.03.02.1.04.07	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	Orang	250	765.603.000	450	44.682.138	160.000.000										450	44.682.138	180,00	5,84	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
		5.03.02.1.04.08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Laporan	1	61.442.000	1	5.998.395	14.000.000										1	5.998.395	100,00	9,76	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
2	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Perangkat Daerah	5.03.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	%	<b>87,5</b>	<b>299.721.781.168</b>	<b>92,11</b>	<b>76.361.440.845</b>	<b>23.875.433.182</b>										<b>46,055</b>	<b>76.361.440.845</b>	<b>52,63</b>	<b>25,48</b>	<b>BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH</b>	
		0.00.01.1.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	%	<b>100</b>	<b>773.043.300</b>	<b>25</b>	<b>20.572.705</b>	<b>166.000.000</b>										<b>12,5</b>	<b>20.572.705</b>	<b>12,50</b>	<b>2,66</b>	<b>BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH</b>	
		0.00.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5	561.330.600	5	12.589.687	120.000.000										5	12.589.687	100,00	2,24	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
		0.00.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	2	35.905.200	4	2.341.361	8.000.000										4	2.341.361	200,00	6,52	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
		0.00.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	3	175.807.500	3	5.641.657	38.000.000										3	5.641.657	100,00	3,21	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
		0.00.01.1.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	%	<b>0</b>	<b>76.182.077.968</b>	<b>100</b>	<b>14.503.668.279</b>	<b>15.354.633.182</b>										<b>50</b>	<b>14.503.668.279</b>		<b>19,04</b>	<b>BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH</b>	
Rata-rata capaian kinerja (%)							382.267.795.953		80.133.985.324	42.079.699.160											80.133.985.324	98,14	20,96		
Predikat Kinerja																							ST	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																									
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																									

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp		K	Rp
1	2	3	4	5		6		7		8	9	10	11	12	13	14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17	
		0.00.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	97	75.797.351.568	90	14.476.717.285	15.277.633.182								90	14.476.717.285	92,78	19,10	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
		0.00.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	265.884.500	12	14.307.346	53.000.000								12	14.307.346	100,00	5,38	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
		0.00.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	23.428.000	1	2.130.805	5.000.000								1	2.130.805	100,00	9,10	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
		0.00.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	14	95.413.900	18	10.512.843	19.000.000								18	10.512.843	128,57	11,02	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
		<b>0.00.01.1.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>114.480.000</b>	<b>0</b>	<b>325.850</b>	<b>25.000.000</b>									<b>325.850</b>		<b>0,28</b>	<b>BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH</b>	
		0.00.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	2	114.480.000	2	325.850	25.000.000								2	325.850	100,00	0,28	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
		<b>0.00.01.1.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>130.500.000</b>	<b>100</b>		<b>30.000.000</b>								<b>50</b>		<b>50,00</b>		<b>BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH</b>	
		0.00.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	13	130.500.000			30.000.000												BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
		<b>0.00.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>6.572.287.100</b>	<b>25</b>	<b>175.595.497</b>	<b>1.599.500.000</b>								<b>12,5</b>	<b>175.595.497</b>	<b>12,50</b>	<b>2,67</b>	<b>BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH</b>	
		0.00.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	162.181.700	1	17.784.039	35.000.000								1	17.784.039	100,00	10,97	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
Rata-rata capaian kinerja (%)							382.267.795.953		80.133.985.324	42.079.699.160									80.133.985.324	98,14	20,96		
Predikat Kinerja																						ST	SR
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																							
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																							

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Daerah Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp
						6		7			8		9	10			11	12	13	14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%	
		0.00.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	538.925.800	5	19.280.088	125.500.000							5	19.280.088	500,00	3,58	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH				
		0.00.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	332.501.900	6	14.482.970	133.000.000							6	14.482.970	600,00	4,36	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH				
		0.00.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	416.462.000	2	28.698.264	87.000.000							2	28.698.264	100,00	6,89	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH				
		0.00.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	4	36.343.200	4	1.920.000	7.000.000							4	1.920.000	100,00	5,28	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH				
		0.00.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	2	5.085.872.500	12	93.430.136	1.212.000.000							12	93.430.136	600,00	1,84	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH				
		<b>0.00.01.1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>81.179.738.000</b>	<b>25</b>	<b>59.956.973.540</b>	<b>4.525.300.000</b>							<b>12,5</b>	<b>59.956.973.540</b>	<b>12,50</b>	<b>73,86</b>	<b>BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH</b>				
		0.00.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	0	1.477.600.000			1.477.600.000											BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH				
		0.00.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	2	2.481.700.000			1.811.700.000											BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH				
		0.00.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	10	1.030.560.600			836.000.000											BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH				
		0.00.01.1.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	75.300.000.000	1	59.956.973.540	0							1	59.956.973.540		79,62	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH				
		0.00.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	539.877.400			300.000.000											BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH				
Rata-rata capaian kinerja (%)							382.267.795.953		80.133.985.324	42.079.699.160								80.133.985.324	98,14	20,96					
Predikat Kinerja																					ST	SR			
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																									
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																									

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp		K	Rp	K
1	2	3	4	5		6		7		8		9	10	11	12	13	14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17	
		0.00.01.1.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	350.000.000			100.000.000													BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
		<b>0.00.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>131.774.491.900</b>	<b>0</b>	<b>1.364.124.674</b>	<b>1.582.000.000</b>										<b>1.364.124.674</b>		<b>1,04</b>	<b>BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH</b>	
		0.00.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	127.518.000	1	14.268.723	27.000.000									1	14.268.723	100,00	11,19	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
		0.00.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	3	2.388.418.700	12	223.065.951	475.000.000									12	223.065.951	400,00	9,34	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
		0.00.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	2	129.258.555.200	12	1.126.790.000	1.080.000.000									12	1.126.790.000	600,00	0,87	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
		<b>0.00.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>2.995.162.900</b>	<b>25</b>	<b>340.180.300</b>	<b>593.000.000</b>									<b>12,5</b>	<b>340.180.300</b>	<b>12,50</b>	<b>11,36</b>	<b>BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH</b>	
		0.00.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	1	66.005.400	1	13.788.000	13.000.000									1	13.788.000	100,00	20,89	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
		0.00.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	11	934.989.900	11	166.862.300	180.000.000									11	166.862.300	100,00	17,85	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
		0.00.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	300	1.299.989.600	227	119.530.000	300.000.000									227	119.530.000	75,67	9,19	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
		0.00.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	Unit	1	694.178.000	1	40.000.000	100.000.000									1	40.000.000	100,00	5,76	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
Rata-rata capaian kinerja (%)							382.267.795.953		80.133.985.324	42.079.699.160										80.133.985.324	98,14	20,96		
Predikat Kinerja																						ST	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																								
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																								

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I	II	III	IV			K	Rp	K	Rp		K
1	2	3	4	5	6		7		8		9	10	11	12	13	14 = 13/8x100	15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17	
			Bangunan Lainnya	Dipelihara/Direhabilitasi																		
Rata-rata capaian kinerja (%)																						
Predikat Kinerja																						
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																						
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																						
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																						
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																						

**EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUNGAN PROVINSI  
RENJA PERANGKAT DAERAH BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERIODE PELAKSANAAN : 2025**

Indikator dan target kinerja SKPD yang mengacu pada sasaran RKPD:

Target Realisasi

1. Rerata capaian skor 5 indikator dalam Aspek Kebebasan IDI

73.57 79.55

2. Kategori RB Perangkat Daerah

84 91.36

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Panggung Jawab		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
1	Meningkatnya kualitas kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, berpendapat, dan berkeyakinan, serta hak memilih dan dipilih dalam pemilu	0.00.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Angka	96,98	68.041.481.906	93,32	8.852.796.984	13.365.844.700	87,1	1.644.506.863					87,1	1.644.506.863	12,30	180,42	10.497.303.847	186,04	15,43	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
		0.00.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan penyusunan DPA SKPD, Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100	509.633.000	100	67.550.477	101.007.000	35,06					35,06			67,53	67.550.477	67,53	13,25	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
		0.00.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	25	146.422.000	5	20.397.437	29.020.000	2					2			7	20.397.437	28,00	13,93	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
		0.00.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	10	202.522.000	4	24.648.225	40.139.000	1					1			5	24.648.225	50,00	12,17	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
		0.00.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	15	160.689.000	3	22.504.815	31.848.000	3					3			6	22.504.815	40,00	14,01	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
		0.00.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	Laporan	100	45.094.958.319	100	6.723.800.885	8.937.593.000	25,74	1.644.506.863				25,74	1.644.506.863	18,40	125,74	8.368.307.748	125,74	18,56	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
Rata-rata capaian kinerja (%)							183.983.328.706		28.172.881.272	38.338.605.700		12.929.400.303					12.929.400.303	33,72		41.102.281.575	56,97	22,34			
Predikat Kinerja																SR	SR					R	SR		
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:					- Adanya kolaborasi dan sinergi, baik di internal Badan Kesbangpol maupun mitra kerja lintas sektor sehingga penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dapat terlaksana secara optimal - Optimalisasi peran Tim/posko pemantauan dalam rangka menjaga stabilitas dan kondusivitas wilayah DIY, utamanya pada momen cuti bersama Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri 1446 H.																				
Faktor penghambat pencapaian kinerja:					- Munculnya berbagai isu nasional yang turut berdampak pada situasi dan kondisi di wilayah DIY - Dinamika kebijakan dan perkembangan politik nasional yang turut mempengaruhi kondisi sosial budaya masyarakat DIY. Penguatan kolaborasi dengan berbagai lini perlu dilaksanakan dalam rangka menjamin stabilitas dan kondusivitas wilayah DIY.																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):					Penguatan koordinasi dan kolaborasi antara Badan Kesbangpol DIY dengan berbagai pemangku kepentingan guna mengoptimalkan capaian kinerja Badan Kesbangpol serta untuk menjamin trantibumlinmas wilayah DIY.																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																									

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	I	II		III	IV	K	Rp		K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17	
				<i>Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</i>		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		0.00.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	52	44.514.116.319	46	6.631.363.136	8.822.473.000	47	1.644.506.863								47	1.644.506.863	18,64	93	8.275.869.999	178,85	18,59	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
		0.00.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	60	245.061.000	12	46.680.000	48.570.000	3									3			15	46.680.000	25,00	19,05	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
		0.00.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	5	122.102.000	1	15.015.645	24.200.000												1	15.015.645	20,00	12,30	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
		0.00.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	90	213.679.000	18	30.742.104	42.350.000	3									3			21	30.742.104	23,33	14,39	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
		<b>0.00.01.1.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</b>	%	<b>100</b>	<b>57.000.000</b>	<b>100</b>	<b>12.013.000</b>	<b>11.400.000</b>	<b>29,26</b>									<b>29,26</b>			<b>64,63</b>	<b>12.013.000</b>	<b>64,63</b>	<b>21,08</b>	<b>BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>	
		0.00.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	5	57.000.000	2	12.013.000	11.400.000												2	12.013.000	40,00	21,08	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
		<b>0.00.01.1.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Terlaksananya Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi</b>	%	<b>100</b>	<b>600.000.000</b>			<b>140.000.000</b>																	<b>BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>	
		0.00.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	8	600.000.000			140.000.000																	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
		<b>0.00.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, penyediaan peralatan rumah tangga, penyediaan barang cetakan dan penggandaan, penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, penyediaan komponen instalasi</b>	%	<b>100</b>	<b>3.749.415.400</b>	<b>100</b>	<b>440.398.122</b>	<b>768.019.000</b>	<b>36,44</b>										<b>36,44</b>			<b>68,22</b>	<b>440.398.122</b>	<b>68,22</b>	<b>11,75</b>	<b>BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>
Rata-rata capaian kinerja (%)							183.983.328.706		28.172.881.272	38.338.605.700		12.929.400.303									12.929.400.303	33,72		41.102.281.575	56,97	22,34		
Predikat Kinerja																					SR	SR				R	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:						- Adanya kolaborasi dan sinergi, baik di internal Badan Kesbangpol maupun mitra kerja lintas sektor sehingga penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dapat terlaksana secara optimal - Optimalisasi peran Tim/posko pemantauan dalam rangka menjaga stabilitas dan kondusivitas wilayah DIY, utamanya pada momen cuti bersama Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri 1446 H.																						
Faktor penghambat pencapaian kinerja:						- Munculnya berbagai isu nasional yang turut berdampak pada situasi dan kondisi di wilayah DIY - Dinamika kebijakan dan perkembangan politik nasional yang turut mempengaruhi kondisi sosial budaya masyarakat DIY. Penguatan kolaborasi dengan berbagai lini perlu dilaksanakan dalam rangka menjamin stabilitas dan kondusivitas wilayah DIY.																						
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):						Penguatan koordinasi dan kolaborasi antara Badan Kesbangpol DIY dengan berbagai pemangku kepentingan guna mengoptimalkan capaian kinerja Badan Kesbangpol serta untuk menjamin trantibumlinmas wilayah DIY.																						
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																												

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
					K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp		K	Rp	K
1	2	3	4	5	6		7		8	9		10	11	12	13	14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				<i>listrik/penerangan bangunan kantor dan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>																			
		0.00.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	60	155.675.900	6	7.783.377	30.854.000								6	7.783.377	10,00	5,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
		0.00.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	160	323.493.100	4	50.341.235	64.115.000	3					3		7	50.341.235	4,38	15,56	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
		0.00.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	51	271.860.000	1	29.834.691	55.274.000	1					1		2	29.834.691	3,92	10,97	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
		0.00.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	25	208.814.400	8	29.210.531	41.959.000	1					1		9	29.210.531	36,00	13,99	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
		0.00.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	5	9.123.000			1.808.000													BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		0.00.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	60	2.575.449.000	12	323.228.288	529.009.000	3					3		15	323.228.288	25,00	12,55	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
		0.00.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	5	205.000.000			45.000.000													BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		<b>0.00.01.1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>7.666.647.200</b>	<b>100</b>	<b>115.050.000</b>	<b>1.376.854.000</b>	<b>100</b>					<b>100</b>		<b>100</b>	<b>115.050.000</b>	<b>100,00</b>	<b>1,50</b>	<b>BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>	
		0.00.01.1.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	4	1.954.580.000			488.645.000													BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		0.00.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	16	1.876.300.000			469.075.000													BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Rata-rata capaian kinerja (%)						183.983.328.706		28.172.881.272	38.338.605.700	12.929.400.303					12.929.400.303	33,72		41.102.281.575	56,97	22,34			
Predikat Kinerja															SR	SR					R	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:					- Adanya kolaborasi dan sinergi, baik di internal Badan Kesbangpol maupun mitra kerja lintas sektor sehingga penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dapat terlaksana secara optimal - Optimalisasi peran Tim/posko pemantauan dalam rangka menjaga stabilitas dan kondusivitas wilayah DIY, utamanya pada momen cuti bersama Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri 1446 H.																		
Faktor penghambat pencapaian kinerja:					- Munculnya berbagai isu nasional yang turut berdampak pada situasi dan kondisi di wilayah DIY - Dinamika kebijakan dan perkembangan politik nasional yang turut mempengaruhi kondisi sosial budaya masyarakat DIY. Penguatan kolaborasi dengan berbagai lini perlu dilaksanakan dalam rangka menjamin stabilitas dan kondusivitas wilayah DIY.																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):					Penguatan koordinasi dan kolaborasi antara Badan Kesbangpol DIY dengan berbagai pemangku kepentingan guna mengoptimalkan capaian kinerja Badan Kesbangpol serta untuk menjamin trantibumlinmas wilayah DIY.																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																							

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab								
						K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp				
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		0.00.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	20	315.259.300			62.199.000																				BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
		0.00.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	54	934.841.700	4	71.050.000	136.500.000	3									3					7	71.050.000	12,96	7,60	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
		0.00.01.1.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	8	997.000.000			199.000.000																				BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
		0.00.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	30	1.588.666.200	4	44.000.000	21.435.000															4	44.000.000	13,33	2,77	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
		<b>0.00.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Terlaksanakannya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</b>	%	<b>100</b>	<b>6.345.915.200</b>	<b>100</b>	<b>1.082.232.213</b>	<b>1.283.596.000</b>	<b>51,69</b>									<b>51,69</b>					<b>75,845</b>	<b>1.082.232.213</b>	<b>75,85</b>	<b>17,05</b>	<b>BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>		
		0.00.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	15	1.417.358.800	12	163.435.067	288.175.000	3										3				15	163.435.067	100,00	11,53	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
		0.00.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	8	200.781.000	3	66.997.646	47.589.000															3	66.997.646	37,50	33,37	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
		0.00.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	14	4.727.775.400	12	851.799.500	947.832.000	3														15	851.799.500	107,14	18,02	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
		<b>0.00.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Terlaksananya Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya; Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</b>	%	<b>100</b>	<b>4.017.912.787</b>	<b>100</b>	<b>411.752.287</b>	<b>747.375.700</b>	<b>22,68</b>										<b>22,68</b>				<b>61,34</b>	<b>411.752.287</b>	<b>61,34</b>	<b>10,25</b>	<b>BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>		
		0.00.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	1	181.988.100	1	62.601.500	36.069.000															1	62.601.500	100,00	34,40	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
Rata-rata capaian kinerja (%)							183.983.328.706		28.172.881.272	38.338.605.700											12.929.400.303					33,72	41.102.281.575	56,97	22,34		
Predikat Kinerja																															
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:						- Adanya kolaborasi dan sinergi, baik di internal Badan Kesbangpol maupun mitra kerja lintas sektor sehingga penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dapat terlaksana secara optimal - Optimalisasi peran Tim/posko pemantauan dalam rangka menjaga stabilitas dan kondusivitas wilayah DIY, utamanya pada momen cuti bersama Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri 1446 H.																									
Faktor penghambat pencapaian kinerja:						- Munculnya berbagai isu nasional yang turut berdampak pada situasi dan kondisi di wilayah DIY - Dinamika kebijakan dan perkembangan politik nasional yang turut mempengaruhi kondisi sosial budaya masyarakat DIY. Penguatan kolaborasi dengan berbagai lini perlu dilaksanakan dalam rangka menjamin stabilitas dan kondusivitas wilayah DIY.																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):						Penguatan koordinasi dan kolaborasi antara Badan Kesbangpol DIY dengan berbagai pemangku kepentingan guna mengoptimalkan capaian kinerja Badan Kesbangpol serta untuk menjamin trantibumlinmas wilayah DIY.																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																															

Table with 17 main columns: No, Sasaran, Kode, Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan, Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan, Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah), Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024), Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi, Realisasi Kinerja Pada Triwulan (I-IV), Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025), Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%), Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah), Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%), and Perangkat Daerah Penanggung Jawab. The table contains multiple rows of detailed data, including program information like 'PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN'.

Summary rows for Rata-rata capaian kinerja (%), Predikat Kinerja, Faktor pendorong keberhasilan kinerja, Faktor penghambat pencapaian kinerja, and Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya. Includes text like '- Adanya kolaborasi dan sinergi, baik di internal Badan Kesbangpol maupun mitra kerja lintas sektor...'.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6		7		8	9		10	11	12	13	14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			<b>dan Karakter Kebangsaan</b>																					
		8.01.02.1.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	Dokumen	4	58.429.000			13.850.000													BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
		8.01.02.1.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Orang	80	15.600.000.000			3.850.000.000													BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
		8.01.02.1.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Orang	600	796.824.000	50	16.929.772	188.875.000							50	16.929.772	8,33	2,12			BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
		8.01.02.1.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Laporan	15	572.113.800	2	83.959.600	81.070.000	1	8.446.175				1	8.446.175	10,42	3	92.405.775	20,00	16,15	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
		8.01.02.1.01.07	Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila	Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila	Orang	0	135.260.000	38	43.866.590	0							38	43.866.590		32,43			BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
		8.01.02.1.01.08	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	Dokumen	0	400.282.000	1		0							1						BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
		8.01.02.1.01.09	Pelaksanaan tugas Paskibraka	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas Paskibraka	Dokumen	0	390.605.600	1	315.674.750	0							1	315.674.750					80,82	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Rata-rata capaian kinerja (%)						183.983.328.706		28.172.881.272	38.338.605.700		12.929.400.303					12.929.400.303	33,72		41.102.281.575	56,97	22,34			
Predikat Kinerja																SR	SR					R	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:					- Adanya kolaborasi dan sinergi, baik di internal Badan Kesbangpol maupun mitra kerja lintas sektor sehingga penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dapat terlaksana secara optimal - Optimalisasi peran Tim/posko pemantauan dalam rangka menjaga stabilitas dan kondusivitas wilayah DIY, utamanya pada momen cuti bersama Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri 1446 H.																			
Faktor penghambat pencapaian kinerja:					- Munculnya berbagai isu nasional yang turut berdampak pada situasi dan kondisi di wilayah DIY - Dinamika kebijakan dan perkembangan politik nasional yang turut mempengaruhi kondisi sosial budaya masyarakat DIY. Penguatan kolaborasi dengan berbagai lini perlu dilaksanakan dalam rangka menjamin stabilitas dan kondusivitas wilayah DIY.																			
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):					Penguatan koordinasi dan kolaborasi antara Badan Kesbangpol DIY dengan berbagai pemangku kepentingan guna mengoptimalkan capaian kinerja Badan Kesbangpol serta untuk menjamin trantibumlinmas wilayah DIY.																			
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																								

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab								
						K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp				
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17	
		8.01.02.1.01.12	Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka	Orang	0	1.952.854.400	38	1.668.810.195	0										38	1.668.810.195			85,45	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			
		8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Skor Terjaminnya hak memilih dan dipilih dalam pemilu untuk seluruh kelompok masyarakat dalam aspek Kebebasan IDI	Angka	70,44	55.297.803.000	70,39	11.677.490.985	12.557.305.000	70,39	10.836.189.366								70,39	10.836.189.366	86,29	140,78	22.513.680.351	199,86	40,71	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
		8.01.03.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	%	100	55.297.803.000	100	11.677.490.985	12.557.305.000	61,93	10.836.189.366								61,93	10.836.189.366	86,29	80,965	22.513.680.351	80,97	40,71	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
		8.01.03.1.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Orang	16.950	52.418.591.000	1.550	11.042.245.393	12.039.210.000	50	10.836.189.366								50	10.836.189.366	90,01	1.600	21.878.434.759	9,44	41,74	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
		8.01.03.1.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Laporan	10	2.879.212.000	3	635.245.592	518.095.000													3	635.245.592	30,00	22,06	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
Rata-rata capaian kinerja (%)							183.983.328.706		28.172.881.272	38.338.605.700		12.929.400.303									12.929.400.303	33,72		41.102.281.575	56,97	22,34		
Predikat Kinerja																					SR	SR			R	SR		
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:						- Adanya kolaborasi dan sinergi, baik di internal Badan Kesbangpol maupun mitra kerja lintas sektor sehingga penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dapat terlaksana secara optimal - Optimalisasi peran Tim/posko pemantauan dalam rangka menjaga stabilitas dan kondusivitas wilayah DIY, utamanya pada momen cuti bersama Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri 1446 H.																						
Faktor penghambat pencapaian kinerja:						- Munculnya berbagai isu nasional yang turut berdampak pada situasi dan kondisi di wilayah DIY - Dinamika kebijakan dan perkembangan politik nasional yang turut mempengaruhi kondisi sosial budaya masyarakat DIY. Penguatan kolaborasi dengan berbagai lini perlu dilaksanakan dalam rangka menjamin stabilitas dan kondusivitas wilayah DIY.																						
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):						Penguatan koordinasi dan kolaborasi antara Badan Kesbangpol DIY dengan berbagai pemangku kepentingan guna mengoptimalkan capaian kinerja Badan Kesbangpol serta untuk menjamin trantibumlinmas wilayah DIY.																						
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																												

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	I	II	III	IV		K	Rp	K	Rp		K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13/8x100	15 = 7 + 13	16 = 15 / 6 x 100%	17									
			Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																					
		8.01.04	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN</b>	<b>Skor Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, berpendapat dan berkeyakinan dalam setiap kebijakan dalam Aspek Kebebasan IDI</b>	Angka	100	2.494.615.000	100	215.408.402	494.446.000	100					100					200	215.408.402	200,00	8,63	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		8.01.04.1.01	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</b>	<b>Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</b>	%	100	2.494.615.000	100	215.408.402	494.446.000	19,18					19,18					59,59	215.408.402	59,59	8,63	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		8.01.04.1.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	Dokumen	5	576.887.600	1	32.010.085	114.350.000											1	32.010.085	20,00	5,55	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		8.01.04.1.01.03	Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Orang	1.200	1.145.316.200	150	96.447.314	226.996.000											150	96.447.314	12,50	8,42	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		8.01.04.1.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Laporan	5	772.411.200	1	86.951.003	153.100.000											1	86.951.003	20,00	11,26	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		8.01.05	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN</b>	<b>Skor Terjaminnya kebebasan berkeyakinan dalam Aspek Kebebasan IDI</b>	Angka	88,38	7.039.948.400	65,4	726.693.938	1.395.310.000	65,4	323.010				65,4	323.010	0,02	130,8	727.016.948	148,00	10,33	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
Rata-rata capaian kinerja (%)							183.983.328.706		28.172.881.272	38.338.605.700						12.929.400.303					41.102.281.575	56,97	22,34		
Predikat Kinerja																SR	SR						R	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:						- Adanya kolaborasi dan sinergi, baik di internal Badan Kesbangpol maupun mitra kerja lintas sektor sehingga penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dapat terlaksana secara optimal - Optimalisasi peran Tim/posko pemantauan dalam rangka menjaga stabilitas dan kondusivitas wilayah DIY, utamanya pada momen cuti bersama Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri 1446 H.																			
Faktor penghambat pencapaian kinerja:						- Munculnya berbagai isu nasional yang turut berdampak pada situasi dan kondisi di wilayah DIY - Dinamika kebijakan dan perkembangan politik nasional yang turut mempengaruhi kondisi sosial budaya masyarakat DIY. Penguatan kolaborasi dengan berbagai lini perlu dilaksanakan dalam rangka menjamin stabilitas dan kondusivitas wilayah DIY.																			
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):						Penguatan koordinasi dan kolaborasi antara Badan Kesbangpol DIY dengan berbagai pemangku kepentingan guna mengoptimalkan capaian kinerja Badan Kesbangpol serta untuk menjamin trantibumlinmas wilayah DIY.																			
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																									

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab													
						K	Rp		K	Rp	K	Rp				K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
			<b>EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA</b>																												
		8.01.05.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	%	100	7.039.948.400	100	726.693.938	1.395.310.000	15,66	323.010							15,66	323.010	0,02	57,83	727.016.948	57,83	10,33	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					
		8.01.05.1.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan yang Disusun	Dokumen	5	438.951.800	1	49.126.475	87.010.000												1	49.126.475	20,00	11,19	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					
		8.01.05.1.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Orang	7.500	4.254.820.900	300	105.018.100	843.300.000		323.010										0,04	300	105.341.110	4,00	2,48	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				
		8.01.05.1.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Laporan	20	2.346.175.700	4	572.549.363	465.000.000												4	572.549.363	20,00	24,40	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					
		8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Skor Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat dan berpendapat oleh aparat negara dalam Aspek Kebebasan IDI	Angka	0	13.894.425.300	79,24	2.417.703.050	2.761.905.000	79,24	439.934.889							79,24	439.934.889	15,93	158,48	2.857.637.939		20,57	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					
		8.01.06.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan	%	100	13.894.425.300	100	2.417.703.050	2.761.905.000	30,86	439.934.889							30,86	439.934.889	15,93	65,43	2.857.637.939	65,43	20,57	BADAN KESATUAN BANGSA					
Rata-rata capaian kinerja (%)						183.983.328.706		28.172.881.272		38.338.605.700		12.929.400.303																			
Predikat Kinerja																															
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:					- Adanya kolaborasi dan sinergi, baik di internal Badan Kesbangpol maupun mitra kerja lintas sektor sehingga penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dapat terlaksana secara optimal - Optimalisasi peran Tim/posko pemantauan dalam rangka menjaga stabilitas dan kondusivitas wilayah DIY, utamanya pada momen cuti bersama Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri 1446 H.																										
Faktor penghambat pencapaian kinerja:					- Munculnya berbagai isu nasional yang turut berdampak pada situasi dan kondisi di wilayah DIY - Dinamika kebijakan dan perkembangan politik nasional yang turut mempengaruhi kondisi sosial budaya masyarakat DIY. Penguatan kolaborasi dengan berbagai lini perlu dilaksanakan dalam rangka menjamin stabilitas dan kondusivitas wilayah DIY.																										
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):					Penguatan koordinasi dan kolaborasi antara Badan Kesbangpol DIY dengan berbagai pemangku kepentingan guna mengoptimalkan capaian kinerja Badan Kesbangpol serta untuk menjamin trantibumlinmas wilayah DIY.																										
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																															

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13/8x100	15 = 7 + 13	16 = 15 / 6 x 100%	17				
			<b>Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</b>	<b>Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</b>																<b>DAN POLITIK</b>
		8.01.06.1.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan AntarNegara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	Dokumen	4	208.550.000	1	8.322.400	49.430.000	2.047.197	2.047.197	4,14	1	10.369.597	25,00	4,97	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
		8.01.06.1.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Laporan	50	13.685.875.300	11	741.016.650	2.712.475.000	61.499.749	61.499.749	2,27	11	802.516.399	22,00	5,86	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
		8.01.06.1.01.06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Dokumen	5	0	1	1.668.364.000	0	1	376.387.943	1	2	2.044.751.943	40,00		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
				Kategori RB Perangkat Daerah (BB)	undefined	0												BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
<b>2</b>	<b>Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah</b>																			
Rata-rata capaian kinerja (%)																				
Predikat Kinerja														SR	SR			R	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:					- Adanya kolaborasi dan sinergi, baik di internal Badan Kesbangpol maupun mitra kerja lintas sektor sehingga penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dapat terlaksana secara optimal - Optimalisasi peran Tim/posko pemantauan dalam rangka menjaga stabilitas dan kondusivitas wilayah DIY, utamanya pada momen cuti bersama Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri 1446 H.															
Faktor penghambat pencapaian kinerja:					- Munculnya berbagai isu nasional yang turut berdampak pada situasi dan kondisi di wilayah DIY - Dinamika kebijakan dan perkembangan politik nasional yang turut mempengaruhi kondisi sosial budaya masyarakat DIY. Penguatan kolaborasi dengan berbagai lini perlu dilaksanakan dalam rangka menjamin stabilitas dan kondusivitas wilayah DIY.															
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):					Penguatan koordinasi dan kolaborasi antara Badan Kesbangpol DIY dengan berbagai pemangku kepentingan guna mengoptimalkan capaian kinerja Badan Kesbangpol serta untuk menjamin trantibumilmas wilayah DIY.															
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																				

**EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUNGAN PROVINSI  
RENJA PERANGKAT DAERAH BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERIODE PELAKSANAAN : 2025**

Indikator dan target kinerja SKPD yang mengacu pada sasaran RKPD:

Target Realisasi

1. Rerata capaian skor 5 Prioritas dalam Indeks Ketahanan Daerah (IKD) DIY

0.76 0.71

2. Kategori RB Perangkat Daerah

87.26 87.26

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K Rp		K Rp		K	Rp		K	Rp
1	Meningkatnya kapasitas penyelenggaraan penanggulangan bencana	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Angka	87,22	99.733.690.492	86,92	12.418.396.251	17.060.030.462	86,92	3.201.133.236							86,92	3.201.133.236	18,76	173,84	15.619.529.487	199,31	15,66	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
		0.00.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	%	100	839.610.225	100	10.718.550	166.282.750	100	8.396.000							100	8.396.000	5,05	100	19.114.550	100,00	2,28	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
		0.00.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	6	296.117.700	5	6.943.500	58.793.900	5	1.405.000							5	1.405.000	2,39	10	8.348.500	166,67	2,82	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
		0.00.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	4	202.975.000	4	1.825.050	40.000.000	1	4.540.000							1	4.540.000	11,35	5	6.365.050	125,00	3,14	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
		0.00.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	3	340.517.525	3	1.950.000	67.488.850	3	2.451.000							3	2.451.000	3,63	6	4.401.000	200,00	1,29	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
		0.00.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan BPBD DIY	Bulan	12	79.660.476.882	12	10.607.521.827	12.791.031.437	3	2.717.327.409							3	2.717.327.409	21,24	15	13.324.849.236	125,00	16,73	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
		0.00.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	110	64.235.524.440	110	10.542.241.827	12.698.424.450	110	2.710.534.909							110	2.710.534.909	21,35	220	13.252.776.736	200,00	20,63	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
		0.00.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	367.066.564	12	34.520.000	77.919.402	3	2.340.500							3	2.340.500	3,00	15	36.860.500	125,00	10,04	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
		0.00.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	15.046.962.463	1	1.500.000	12.491.435	1	725.000							1	725.000	5,80	2	2.225.000	200,00	0,01	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
Rata-rata capaian kinerja (%)							148.445.548.016		15.571.673.441	25.108.721.775		3.627.808.646							3.627.808.646	14,45		19.199.482.087	128,19	12,93			
Predikat Kinerja																			SR	SR				ST	SR		
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:						1. Koordinasi antar sekretariat dengan bidang dan sub bidang berjalan baik 2. Ketersediaan anggaran sesuai dengan DPPA dengan nomor DPA/A.1/1.05.0.00.0.00.04.0000/001/2025 Tanggal : 31 Desember 2024																					
Faktor penghambat pencapaian kinerja:						1. Dalam dokumen perencanaan belum mencantumkan sub kegiatan dan tolak ukur kinerja yang dapat mengakomodir aktivitas yang dilaksanakan terkait pengelolaan peralatan penanggulangan bencana, baik dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah; 2. Adanya Deviasi keuangan berupa Efisiensi Anggaran dikarenakan anggaran direalisasikan sesuai kebutuhan; 3. Adanya peraturan perundangan yang perlu dilaksanakan penerapannya; 4. Keterbatasan lahan parkir BPBD DIY mengakibatkan, tidak semua kendaraan penanggulangan bencana dapat tersimpan sebagaimana mestinya, terutama kendaraan berukuran besar berupa kendaraan roda enam yang saat ini berjumlah 11 unit; 5. Sampai saat ini peralatan penanggulangan bencana yang ada memerlukan dukungan pemeliharaan yang besar serta membutuhkan biaya operasional, terutama pada saat dukungan respon kejadian/bencana 6.Keterbatasan gudang penyimpanan BPBD DIY mengakibatkan, tidak semua peralatan penanggulangan bencana dapat tersimpan sebagaimana mestinya.																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):						1. Menyusun tolak ukur kinerja dari sub kegiatan; 2. Meminimalisir deviasi keuangan yang diakibatkan oleh efisiensi Anggaran; 3. Melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dalam pemenuhan data dukung Rencana Aksi Pembinaan dan Pengawasan Sub-Urusan Bencana; 4. Melakukan koordinasi untuk memperoleh dukungan anggaran untuk pemeliharaan dan penempatan barang/peralatan penanggulangan bencana.																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																											

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										I		II		III		IV				13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13			16 = 15 / 6 x 100%		
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		0.00.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	10.923.415	12	29.260.000		2.196.150	3	3.727.000									3	3.727.000	169,71	15	32.987.000	125,00	301,98	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		<b>0.00.01.1.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Terlaksananya Administrasi BMD di BPBD DIY</b>	<b>Tahun</b>	<b>1</b>	<b>138.000.000</b>	<b>1</b>	<b>19.781.550</b>		<b>27.500.000</b>	<b>1</b>	<b>4.512.496</b>								<b>1</b>	<b>4.512.496</b>	<b>16,41</b>	<b>2</b>	<b>24.294.046</b>	<b>200,00</b>	<b>17,60</b>	<b>BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH</b>	
		0.00.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	138.000.000	1	19.781.550		27.500.000	1	4.512.496									1	4.512.496	16,41	2	24.294.046	200,00	17,60	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		<b>0.00.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Tersedianya Administrasi Umum BPBD DIY</b>	<b>Tahun</b>	<b>1</b>	<b>2.311.299.500</b>	<b>1</b>	<b>103.107.214</b>		<b>549.882.200</b>	<b>1</b>	<b>30.197.126</b>									<b>1</b>	<b>30.197.126</b>	<b>5,49</b>	<b>2</b>	<b>133.304.340</b>	<b>200,00</b>	<b>5,77</b>	<b>BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH</b>
		0.00.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dokumen	12	2.311.299.500	12	103.107.214		509.649.000		16.750.059										3,29	12	119.857.273	100,00	5,19	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
		1.05.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	0	0		2.490.200		2.490.200	1	2.490.200									1	2.490.200	100,00	1	2.490.200			BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		1.05.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	4	0		19.872.000		6.729.600	4	6.729.600									4	6.729.600	33,86	4	6.729.600	100,00		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		1.05.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	paket	0	0		17.871.000		4.227.267	1	4.227.267									1	4.227.267	23,65	1	4.227.267			BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		<b>0.00.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di BPBD DIY</b>	<b>Tahun</b>	<b>1</b>	<b>9.346.057.080</b>	<b>1</b>	<b>1.483.418.186</b>		<b>1.884.125.360</b>	<b>1</b>	<b>357.782.305</b>									<b>1</b>	<b>357.782.305</b>	<b>18,99</b>	<b>2</b>	<b>1.841.200.491</b>	<b>200,00</b>	<b>19,70</b>	<b>BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH</b>
		0.00.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	4.254.041.710	1	502.176.986		864.680.570		141.980.105										16,42	1	644.157.091	100,00	15,14	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
		0.00.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	5.092.015.370	12	981.241.200		1.019.444.790	2	215.802.200									2	215.802.200	21,17	14	1.197.043.400	116,67	23,51	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		<b>0.00.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah</b>	<b>Terlaksananya Pemeliharaan BMD di BPBD</b>	<b>Tahun</b>	<b>1</b>	<b>7.438.246.805</b>	<b>1</b>	<b>193.848.924</b>		<b>1.641.208.715</b>	<b>1</b>	<b>82.917.900</b>									<b>1</b>	<b>82.917.900</b>	<b>5,05</b>	<b>2</b>	<b>276.766.824</b>	<b>200,00</b>	<b>3,72</b>	<b>BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH</b>
Rata-rata capaian kinerja (%)							148.445.548.016		15.571.673.441		25.108.721.775		3.627.808.646										3.627.808.646	14,45		19.199.482.087	128,19	12,93	
Predikat Kinerja																							SR	SR			ST	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:				1. Koordinasi antar sekretariat dengan bidang dan sub bidang berjalan baik 2. Ketersediaan anggaran sesuai dengan DPPA dengan nomor DPA/A.1/1.05.0.00.0.00.04.0000/001/2025 Tanggal : 31 Desember 2024																									
Faktor penghambat pencapaian kinerja:				1. Dalam dokumen perencanaan belum mencantumkan sub kegiatan dan tolok ukur kinerja yang dapat mengakomodir aktivitas yang dilaksanakan terkait pengelolaan peralatan penanggulangan bencana, baik dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah; 2. Adanya Deviasi keuangan berupa Efisiensi Anggaran dikarenakan anggaran direalisasikan sesuai kebutuhan; 3. Adanya peraturan perundangan yang perlu dilaksanakan penerapannya; 4. Keterbatasan lahan parkir BPBD DIY mengakibatkan, tidak semua kendaraan penanggulangan bencana dapat tersimpan sebagaimana mestinya, terutama kendaraan berukuran besar berupa kendaraan roda enam yang saat ini berjumlah 11 unit; 5.. Sampai saat ini peralatan penanggulangan bencana yang ada memerlukan dukungan pemeliharaan yang besar serta membutuhkan biaya operasional, terutama pada saat dukungan respon kejadian/bencana 6.Keterbatasan gudang penyimpanan BPBD DIY mengakibatkan, tidak semua peralatan penanggulangan bencana dapat tersimpan sebagaimana mestinya.																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):				1. Menyusun tolok ukur kinerja dari sub kegiatan; 2. Meminimalisir deviasi keuangan yang diakibatkan oleh efisiensi Anggaran; 3. Melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dalam pemenuhan data dukung Rencana Aksi Pembinaan danPengawasan Sub-Urusan Bencana;4. Melakukan koordinasi untuk memperoleh dukungan anggaran untuk pemeliharaan dan penempatan barang/peralatanpenanggulangan bencana.																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																													

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp		K	Rp	K
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10	11	12	13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17		
			<b>Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>DIY</b>																						<b>BENCANA DAERAH</b>
		0.00.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	2	2.381.017.700	2	14.944.300	500.000.000	1	15.972.900					1	15.972.900	3,19	3	30.917.200	150,00	1,30		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
		0.00.01.1.09.011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4	2.043.376.950	6	14.987.000	497.365.200										6	14.987.000	150,00	0,73		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
		0.00.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	0	692.823.555	45	91.098.300	137.314.115	3	38.057.200					3	38.057.200	27,72	48	129.155.500		18,64		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
		0.00.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	70	2.321.028.600	23	72.819.324	506.529.400		28.887.800					28.887.800	5,70	23	101.707.124	32,86	4,38		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		
		<b>1.05.03</b>	<b>PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA</b>	<b>Skor Sistem Informasi, Diklat dan Logistik dalam IKD DIY</b>	<b>Indeks</b>	<b>0,88</b>	<b>43.691.640.724</b>	<b>0,86</b>	<b>2.680.038.440</b>	<b>7.093.691.313</b>	<b>0,86</b>	<b>408.324.410</b>					<b>0,86</b>	<b>408.324.410</b>	<b>5,76</b>	<b>1,72</b>	<b>3.088.362.850</b>	<b>195,45</b>	<b>7,07</b>		<b>BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH</b>	
				<b>Skor Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana dalam IKD DIY</b>	<b>Indeks</b>	<b>0,8</b>		<b>0,62</b>			<b>0,62</b>						<b>0,62</b>			<b>1,24</b>		<b>155,00</b>			<b>BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH</b>	
				<b>Skor Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana dalam IKD DIY</b>	<b>Indeks</b>	<b>0,85</b>		<b>0,61</b>			<b>0,61</b>						<b>0,61</b>			<b>1,22</b>		<b>143,53</b>			<b>BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH</b>	
				<b>Skor Sistem Pemulihan Bencana dalam IKD DIY</b>	<b>Indeks</b>	<b>0,88</b>		<b>0,66</b>			<b>0,66</b>						<b>0,66</b>			<b>1,32</b>		<b>150,00</b>			<b>BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH</b>	
		<b>1.05.03.1.01</b>	<b>Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi</b>	<b>Terlaksananya pelayanan informasi rawan bencana Provinsi</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>1.539.761.400</b>	<b>100</b>	<b>144.585.024</b>	<b>300.000.000</b>	<b>100</b>	<b>44.209.114</b>					<b>100</b>	<b>44.209.114</b>	<b>14,74</b>	<b>100</b>	<b>188.794.138</b>	<b>100,00</b>	<b>12,26</b>		<b>BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH</b>	
		1.05.03.1.01.01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	Dokumen	2	1.539.761.400	2	144.585.024	300.000.000		44.209.114					44.209.114	14,74	2	188.794.138	100,00	12,26		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		
		<b>1.05.03.1.02</b>	<b>Pelayanan Pencegahan dan</b>	<b>Terlaksananya Pelayanan Pencegahan dan</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>27.882.020.823</b>	<b>100</b>	<b>1.014.711.401</b>	<b>3.876.867.406</b>	<b>100</b>	<b>199.606.308</b>					<b>100</b>	<b>199.606.308</b>	<b>5,15</b>	<b>100</b>	<b>1.214.317.709</b>	<b>100,00</b>	<b>4,36</b>		<b>BADAN PENANGGULANGAN</b>	
Rata-rata capaian kinerja (%)							148.445.548.016		15.571.673.441	25.108.721.775		3.627.808.646					3.627.808.646	14,45		19.199.482.087	128,19	12,93				
Predikat Kinerja																	SR	SR					ST	SR		
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:							1. Koordinasi antar sekretariat dengan bidang dan sub bidang berjalan baik 2. Ketersediaan anggaran sesuai dengan DPPA dengan nomor DPA/A.1/1.05.0.00.0.00.04.0000/001/2025 Tanggal : 31 Desember 2024																			
Faktor penghambat pencapaian kinerja:							1. Dalam dokumen perencanaan belum mencantumkan sub kegiatan dan tolok ukur kinerja yang dapat mengakomodir aktivitas yang dilaksanakan terkait pengelolaan peralatan penanggulangan bencana, baik dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah; 2. Adanya Deviasi keuangan berupa Efisiensi Anggaran dikarenakan anggaran direalisasikan sesuai kebutuhan; 3. Adanya peraturan perundangan yang perlu dilaksanakan penerapannya; 4. Keterbatasan lahan parkir BPBD DIY mengakibatkan, tidak semua kendaraan penanggulangan bencana dapat tersimpan sebagaimana mestinya, terutama kendaraan berukuran besar berupa kendaraan roda enam yang saat ini berjumlah 11 unit; 5.. Sampai saat ini peralatan penanggulangan bencana yang ada memerlukan dukungan pemeliharaan yang besar serta membutuhkan biaya operasional, terutama pada saat dukungan respon kejadian/bencana 6.Keterbatasan gudang penyimpanan BPBD DIY mengakibatkan, tidak semua peralatan penanggulangan bencana dapat tersimpan sebagaimana mestinya.																			
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):							1. Menyusun tolok ukur kinerja dari sub kegiatan; 2. Meminimalisir deviasi keuangan yang diakibatkan oleh efisiensi Anggaran; 3. Melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dalam pemenuhan data dukung Rencana Aksi Pembinaan danPengawasan Sub-Urusan Bencana;4. Melakukan koordinasi untuk memperoleh dukungan anggaran untuk pemeliharaan dan penempatan barang/peralatanpenanggulangan bencana.																			
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																										

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab													
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp		K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5	6		7		8		9				10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
			<b>Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</b>	<b>Kesiapsiagaan Bencana</b>																											<b>BENCANA DAERAH</b>		
		1.05.03.1.02.03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Dokumen	1	8.270.750.200	1	361.207.610	1.760.000.000		17.490.072																			BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		
		1.05.03.1.02.04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah keluarga yang berada di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang memperoleh peralatan perlindungan diri dan kesiapsiagaan terhadap bencana: 25	Unit	5	12.967.648.300	5	501.313.700	800.135.000	5	136.268.236																			BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		
		1.05.03.1.02.08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	Jumlah Personil TRC Tingkat Provinsi yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya Dalam Melaksanakan Penanganan Awal Darurat Bencana	Orang	32	6.643.622.323	32	152.190.091	1.316.732.406		45.848.000																			BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		
		<b>1.05.03.1.03</b>	<b>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b>	<b>Terlaksananya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>10.505.997.801</b>	<b>100</b>	<b>1.401.964.672</b>	<b>2.101.823.907</b>		<b>139.350.335</b>																			<b>BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH</b>		
		1.05.03.1.03.02	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Darurat Bencana	Laporan	12	1.245.359.201	13	83.003.700	246.823.907		38.733.450																			BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		
		1.05.03.1.03.04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Orang	5.000	9.260.638.600	2.500	1.318.960.972	1.855.000.000	200	100.616.885																			BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		
		<b>1.05.03.1.04</b>	<b>Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana</b>	<b>Terlaksananya Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>3.763.860.700</b>	<b>100</b>	<b>118.777.343</b>	<b>815.000.000</b>	<b>100</b>	<b>25.158.653</b>																			<b>BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH</b>		
		1.05.03.1.04.07	Penanganan Pasca Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun	Dokumen	2	3.763.860.700	2	118.777.343	815.000.000		25.158.653																			BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		
		<b>1.05.04</b>	<b>PROGRAM PENCEGAHAN,</b>	<b>Rerata Persentase Capaian SPM Bidang Pemadam</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>2.619.767.000</b>	<b>96,09</b>	<b>22.500.000</b>	<b>605.000.000</b>	<b>98</b>	<b>18.351.000</b>																			<b>BADAN PENANGGULANGAN</b>		
Rata-rata capaian kinerja (%)							148.445.548.016		15.571.673.441	25.108.721.775		3.627.808.646																					
Predikat Kinerja																																	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:						1. Koordinasi antar sekretariat dengan bidang dan sub bidang berjalan baik 2. Ketersediaan anggaran sesuai dengan DPPA dengan nomor DPA/A.1/1.05.0.00.0.00.04.0000/001/2025 Tanggal : 31 Desember 2024																											
Faktor penghambat pencapaian kinerja:						1. Dalam dokumen perencanaan belum mencantumkan sub kegiatan dan tolok ukur kinerja yang dapat mengakomodir aktivitas yang dilaksanakan terkait pengelolaan peralatan penanggulangan bencana, baik dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah; 2. Adanya Deviasi keuangan berupa Efisiensi Anggaran dikarenakan anggaran direalisasikan sesuai kebutuhan; 3. Adanya peraturan perundangan yang perlu dilaksanakan penerapannya; 4. Keterbatasan lahan parkir BPBD DIY mengakibatkan, tidak semua kendaraan penanggulangan bencana dapat tersimpan sebagaimana mestinya, terutama kendaraan berukuran besar berupa kendaraan roda enam yang saat ini berjumlah 11 unit; 5.. Sampai saat ini peralatan penanggulangan bencana yang ada memerlukan dukungan pemeliharaan yang besar serta membutuhkan biaya operasional, terutama pada saat dukungan respon kejadian/bencana 6.Keterbatasan gudang penyimpanan BPBD DIY mengakibatkan, tidak semua peralatan penanggulangan bencana dapat tersimpan sebagaimana mestinya.																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):						1. Menyusun tolok ukur kinerja dari sub kegiatan; 2. Meminimalisir deviasi keuangan yang diakibatkan oleh efisiensi Anggaran; 3. Melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dalam pemenuhan data dukung Rencana Aksi Pembinaan danPengawasan Sub-Urusan Bencana;4. Melakukan koordinasi untuk memperoleh dukungan anggaran untuk pemeliharaan dan penempatan barang/peralatanpenanggulangan bencana.																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																																	

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp		K	Rp				
1	2	3	4	5	6		7		8		9				10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17	
			<b>PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN</b>	Kebakaran Kabupaten/ Kota		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	BENCANA DAERAH
		1.05.04.1.02	<b>Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran</b>	<b>Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran</b>	%	100	2.619.767.000	100	22.500.000	605.000.000	100	18.351.000									100	18.351.000	3,03	100	40.851.000	100,00	1,56		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
		1.05.04.1.02.01	Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Laporan	1	2.619.767.000	1	22.500.000	605.000.000	1	18.351.000									1	18.351.000	3,03	2	40.851.000	200,00	1,56		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
		2.22.08	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN</b>	<b>Skor Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana dalam IKD DIY</b>	Angka	0,9	2.400.449.800	0,8	450.738.750	350.000.000	0,8										0,8				1,6	450.738.750	177,78	18,78		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		2.22.08.5.09	<b>Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya</b>	<b>Terlaksananya Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya di BPBD DIY</b>	%	100	2.400.449.800	100	450.738.750	350.000.000	100											100			100	450.738.750	100,00	18,78		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		2.22.08.5.09.21	Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	Jumlah Dokumen Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	Dokumen	2	2.400.449.800	3	450.738.750	350.000.000	0													3	450.738.750	150,00	18,78		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
2	<b>Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di BPBD DIY</b>																													
Rata-rata capaian kinerja (%)																														
Predikat Kinerja																						SR	SR							
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:						1. Koordinasi antar sekretariat dengan bidang dan sub bidang berjalan baik 2. Ketersediaan anggaran sesuai dengan DPPA dengan nomor DPA/A.1/1.05.0.00.0.00.04.0000/001/2025 Tanggal : 31 Desember 2024																								
Faktor penghambat pencapaian kinerja:						1. Dalam dokumen perencanaan belum mencantumkan sub kegiatan dan tolok ukur kinerja yang dapat mengakomodir aktivitas yang dilaksanakan terkait pengelolaan peralatan penanggulangan bencana, baik dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah; 2. Adanya Deviasi keuangan berupa Efisiensi Anggaran dikarenakan anggaran direalisasikan sesuai kebutuhan; 3. Adanya peraturan perundangan yang perlu dilaksanakan penerapannya; 4. Keterbatasan lahan parkir BPBD DIY mengakibatkan, tidak semua kendaraan penanggulangan bencana dapat tersimpan sebagaimana mestinya, terutama pada saat dukungan berupa kendaraan roda enam yang saat ini berjumlah 11 unit; 5.. Sampai saat ini peralatan penanggulangan bencana yang ada memerlukan dukungan pemeliharaan yang besar serta membutuhkan biaya operasional, terutama pada saat dukungan respon kejadian/bencana 6.Keterbatasan gudang penyimpanan BPBD DIY mengakibatkan, tidak semua peralatan penanggulangan bencana dapat tersimpan sebagaimana mestinya.																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):						1. Menyusun tolok ukur kinerja dari sub kegiatan; 2. Meminimalisir deviasi keuangan yang diakibatkan oleh efisiensi Anggaran; 3. Melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dalam pemenuhan data dukung Rencana Aksi Pembinaan danPengawasan Sub-Urusan Bencana;4. Melakukan koordinasi untuk memperoleh dukungan anggaran untuk pemeliharaan dan penempatan barang/peralatanpenanggulangan bencana.																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																														

**EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUNGAN PROVINSI  
RENJA PERANGKAT DAERAH BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERIODE PELAKSANAAN : 2025**

Indikator dan target kinerja SKPD yang mengacu pada sasaran RKPD:

Target Realisasi

- 1. Persentase Aparatur Sipil Negara yang telah mendapatkan pelatihan minimal 20 jam pelajaran dalam 1 tahun      16    10.43
- 2. Kategori RB Perangkat Daerah      89      2

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I	II	III	IV			K	Rp	K	Rp		K	Rp
1	Meningkatnya penyelenggaraan pelatihan berbasis smart learning	4.01.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase kepuasan peserta atas layanan kediklatan minimal tinggi	%	89	10.800.846.000	90	611.043.190	86	2.484.600.000									45	611.043.190	50,56	5,66	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		4.01.10.5.02	Peningkatan Budaya Pemerintahan	Tercapainya peningkatan implementasi budaya pemerintahan	%	100	10.800.846.000	100	611.043.190		2.484.600.000									50	611.043.190	50,00	5,66	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		4.01.10.5.02.03	Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan	Jumlah PNS yang Ikut Diklat Keistimewaan	Orang	1.560	10.800.846.000	120	611.043.190		2.484.600.000									120	611.043.190	7,69	5,66	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase capaian pengembangan sumber daya manusia melalui pelatihan	%	100	50.160.044.336	99,95	3.121.281.258		9.806.677.356									49,975	3.121.281.258	49,98	6,22	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		5.04.02.1.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	Terlaksananya Pengembangan Kompetensi Teknis	%	100	10.855.500.000	100	209.020.748		2.271.000.000									50	209.020.748	50,00	1,93	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		5.04.02.1.01.02	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Dalam Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	Dokumen	23	1.399.500.000	5	52.026.300		327.000.000									5	52.026.300	21,74	3,72	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Rata-rata capaian kinerja (%)							219.508.931.187		18.041.395.531		65.855.252.356										18.041.395.531	29,11	8,22	
Predikat Kinerja																								
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																								
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																								

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I	II	III	IV		13	14 = 13/8x100	15 = 7 + 13	16 = 15 / 6 x 100%					
1	2	3	4	5		6		7		8		9				13	14 = 13/8x100	15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		5.04.02.1.01.03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	Orang	2.460	9.456.000.000	60	156.994.448		1.944.000.000														BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		<b>5.04.02.1.02</b>	<b>Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional</b>	<b>Terlaksananya Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>39.304.544.336</b>	<b>99,95</b>	<b>2.912.260.510</b>		<b>7.535.677.356</b>														<b>BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>
		5.04.02.1.02.01	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pembembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, dan Pengembangan Kompetensi,	Dokumen	53	3.328.400.000	6	215.847.001		732.000.000														BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		5.04.02.1.02.04	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pembembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pembembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	Laporan	5	776.333.651	1	91.588.798		162.821.900														BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		5.04.02.1.02.05	Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga	Dokumen	70	1.313.914.685	7	60.242.512		282.855.456														BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		5.04.02.1.02.07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan	Orang	2.370	33.885.896.000	995	2.544.582.199		6.358.000.000														BADAN PENDIDIKAN
Rata-rata capaian kinerja (%)							219.508.931.187		18.041.395.531		65.855.252.356														
Predikat Kinerja																									
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																									
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																									

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I	II			III	IV	K	Rp		K	Rp	K
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13/8x100	15 = 7 + 13	16 = 15 / 6 x 100%	17							
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
			Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan															DAN PELATIHAN				
2	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Perangkat Daerah	5.04.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	skor	91	158.548.040.851	92,08	14.309.071.083	53.563.975.000	85,81					85,81		177,89	14.309.071.083	195,48	9,03	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
		0.00.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah; Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD; Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100	540.471.500	100	71.206.300	110.975.000								50	71.206.300	50,00	13,17	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
		0.00.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	25	225.671.500	5	29.339.800	46.475.000								5	29.339.800	20,00	13,00	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
		0.00.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	20	132.500.000	4	17.681.300	27.000.000								4	17.681.300	20,00	13,34	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
		0.00.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	15	182.300.000	3	24.185.200	37.500.000								3	24.185.200	20,00	13,27	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
		0.00.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN; Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD; Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD; Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	%	100	58.557.005.499	100	10.615.538.341	11.555.000.000								50	10.615.538.341	50,00	18,13	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
Rata-rata capaian kinerja (%)							219.508.931.187		18.041.395.531	65.855.252.356									18.041.395.531	29,11	8,22		
Predikat Kinerja																						SR	SR
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																							
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																							

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12	13	14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		0.00.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	5.876	58.272.805.499	76	10.558.372.091		11.500.000.000										76	10.558.372.091	1,29	18,12	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
		0.00.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	60	162.900.000	12	37.113.500		31.000.000										12	37.113.500	20,00	22,78	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
		0.00.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	5	34.300.000	1	4.526.050		7.000.000										1	4.526.050	20,00	13,20	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
		0.00.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	90	87.000.000	18	15.526.700		17.000.000										18	15.526.700	20,00	17,85	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
		<b>0.00.01.1.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>90.400.000</b>	<b>100</b>	<b>13.289.000</b>		<b>18.000.000</b>										<b>50</b>	<b>13.289.000</b>	<b>50,00</b>	<b>14,70</b>	<b>BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>	
		0.00.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	20	90.400.000	2	13.289.000		18.000.000										2	13.289.000	10,00	14,70	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
		<b>0.00.01.1.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi; Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>1.115.000.000</b>				<b>255.000.000</b>														<b>BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>	
		0.00.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	100	420.000.000				85.000.000														BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
		0.00.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	86	695.000.000				170.000.000														BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
Rata-rata capaian kinerja (%)							219.508.931.187		18.041.395.531		65.855.252.356															
Predikat Kinerja																										
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																										
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																										
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																										
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																										

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I	II			III	IV	13	14 = 13/8x100		15 = 7 + 13	16 = 15 / 6 x 100%		
1	2	3	4	5	6		7		8		9				13	14 = 13/8x100	15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		<b>0.00.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; Penyediaan Peralatan Rumah Tangga; Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan; Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>5.534.125.400</b>	<b>100</b>	<b>220.962.445</b>		<b>1.268.000.000</b>								<b>50</b>	<b>220.962.445</b>	<b>50,00</b>	<b>3,99</b>	<b>BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>	
		0.00.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5	239.626.200	1	11.596.500		50.000.000								1	11.596.500	20,00	4,84	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
		0.00.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5	194.562.500	4	14.436.200		42.000.000								4	14.436.200	80,00	7,42	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
		0.00.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5	100.172.500	2	53.618.045		20.000.000								2	53.618.045	40,00	53,53	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
		0.00.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	9	187.482.200	1	13.542.600		40.000.000								1	13.542.600	11,11	7,22	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
		0.00.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	120	4.533.782.000	51	69.161.100		1.050.000.000								51	69.161.100	42,50	1,53	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
		0.00.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	4	278.500.000	1	58.608.000		66.000.000								1	58.608.000	25,00	21,04	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
		<b>0.00.01.1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan; Pengadaan Mebel; Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>73.554.000.000</b>	<b>100</b>	<b>215.920.000</b>		<b>36.400.000.000</b>								<b>50</b>	<b>215.920.000</b>	<b>50,00</b>	<b>0,29</b>	<b>BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>	
		0.00.01.1.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	1	380.000.000				380.000.000												BADAN PENDIDIKAN	
Rata-rata capaian kinerja (%)							219.508.931.187		18.041.395.531		65.855.252.356									18.041.395.531	29,11	8,22		
Predikat Kinerja																							SR	SR
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																								
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																								

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I	II	III	IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
1	2	3	4	5	6		7		8		9				13	14 = 13/8x100	15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Kendaraan Dinas Jabatan	yang Disediakan																			DAN PELATIHAN	
		0.00.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	7	2.040.000.000			920.000.000													BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
		0.00.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	3	325.000.000	1	79.900.000	0								1	79.900.000	33,33	24,58		BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
		0.00.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	40	410.000.000	11	136.020.000	100.000.000								11	136.020.000	27,50	33,18		BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
		0.00.01.1.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	70.399.000.000			35.000.000.000													BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
		<b>0.00.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat; Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik; Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>11.366.612.372</b>	<b>100</b>	<b>2.386.794.602</b>	<b>2.166.000.000</b>								<b>50</b>	<b>2.386.794.602</b>	<b>50,00</b>	<b>21,00</b>		<b>BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>	
		0.00.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	60	26.820.000	12	2.820.000	6.000.000								12	2.820.000	20,00	10,51		BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
		0.00.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	60	3.517.533.472	12	417.089.913	710.000.000								12	417.089.913	20,00	11,86		BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
		0.00.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	60	7.822.258.900	12	1.966.884.689	1.450.000.000								12	1.966.884.689	20,00	25,14		BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
		<b>0.00.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan, Penyediaan Jasa</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>7.790.426.080</b>	<b>100</b>	<b>785.360.395</b>	<b>1.791.000.000</b>								<b>50</b>	<b>785.360.395</b>	<b>50,00</b>	<b>10,08</b>		<b>BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>	
Rata-rata capaian kinerja (%)							219.508.931.187		18.041.395.531	65.855.252.356														
Predikat Kinerja																								SR SR
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																								
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																								

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I	II						III	IV	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13/8x100	15 = 7 + 13	16 = 15 / 6 x 100%	17					
				<b>Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan; Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya; Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya; Pemeliharaan Mebel</b>																	
		0.00.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	5	118.193.400	1	23.727.000		24.000.000						1	23.727.000	20,00	20,07	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		0.00.01.1.09.010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	674	876.884.000	93	68.876.500		175.000.000						93	68.876.500	13,80	7,85	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		0.00.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	60	796.806.600	12	177.247.750		156.000.000						12	177.247.750	20,00	22,24	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		0.00.01.1.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	1.200	48.000.000				12.000.000										BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		0.00.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	5	5.950.542.080	1	515.509.145		1.424.000.000						1	515.509.145	20,00	8,66	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Rata-rata capaian kinerja (%)																					
Predikat Kinerja																					
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																					
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																					

**EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUNGAN PROVINSI  
RENJA PERANGKAT DAERAH BADAN PENGHUBUNG DAERAH PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERIODE PELAKSANAAN : 2025**

Indikator dan target kinerja SKPD yang mengacu pada sasaran RKPD:

Target Realisasi

1 nilai rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Kualitas Layanan Penghubung

88 91.88

2 Kategori Reformasi Birokrasi Badan Penghubung Daerah DIY

88.55 88.43

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
						K	Rp		K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10	11	12	13		14 = 13/8x100	15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17		
1	Meningkatnya kualitas layanan Penghubung	2.22.08	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN</b>	Persentase layanan pelestarian seni budaya daerah	%	100	25.897.892.689	100	4.108.079.863	5.330.357.090	100	330.134.385					100	330.134.385	6,19	100	4.438.214.248	100,00	17,14	BADAN PENGHUBUNG DAERAH	
		2.22.08.5.06	Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Jenis	3	1.596.200.000	3	239.228.250	250.000.000	1	198.559.435					1	198.559.435	79,42	4	437.787.685	133,33	27,43	BADAN PENGHUBUNG DAERAH	
		2.22.08.5.06.01	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya	Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya	Jenis	3	1.596.200.000	12	239.228.250	250.000.000	0	198.559.435						198.559.435	79,42	12	437.787.685	400,00	27,43	BADAN PENGHUBUNG DAERAH	
		2.22.08.5.08	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	Terlaksananya Dukungan Pengembangan Industri Kreatif	%	100	4.618.385.000	100	794.644.700	1.150.000.000										50	794.644.700	50,00	17,21	BADAN PENGHUBUNG DAERAH	
		2.22.08.5.08.03	Pengembangan Industri Kreatif	Jumlah Industri Kreatif yang Dikembangkan	Unit	292	4.618.385.000	1	794.644.700	1.150.000.000										1	794.644.700	0,34	17,21	BADAN PENGHUBUNG DAERAH	
		2.22.08.5.09	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Terlaksananya dukungan penyelenggaraan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	%	100	19.683.307.689	100	3.074.206.913	3.930.357.090	5,29	131.574.950					5,29	131.574.950	3,35	52,645	3.205.781.863	52,65	16,29	BADAN PENGHUBUNG DAERAH	
		2.22.08.5.09.12	Gelar Seni Budaya Daerah	Jumlah Laporan Gelar Seni Budaya Daerah	Laporan	41	19.683.307.689	33	3.074.206.913	3.930.357.090		131.574.950						131.574.950	3,35	33	3.205.781.863	80,49	16,29	BADAN PENGHUBUNG DAERAH	
		5.07.02	<b>PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG</b>	Persentase layanan yang diberikan Banhubda DIY	%	100	2.621.707.900	100	173.882.828	398.985.600	100	44.475.314					100	44.475.314	11,15	100	218.358.142	100,00	8,33	BADAN PENGHUBUNG DAERAH	
		5.07.02.1.01	Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Terlaksananya peningkatan kualitas pelayanan publik bagi aparatur dan masyarakat, dan fasilitasi pameran produk unggulan dan pelestarian seni budaya	%	100	2.621.707.900	100	173.882.828	398.985.600	100	44.475.314					100	44.475.314	11,15	100	218.358.142	100,00	8,33	BADAN PENGHUBUNG DAERAH	
		5.07.02.1.01.01	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat yang Ditingkatkan	Laporan	25	1.309.173.900	5	96.854.828	113.985.600	5	29.389.314					5	29.389.314	25,78	10	126.244.142	40,00	9,64	BADAN PENGHUBUNG DAERAH	
Rata-rata capaian kinerja (%)							80.395.306.024		11.295.072.195	16.565.342.690		2.143.204.326						2.143.204.326	12,94		13.438.276.521	57,32	16,72		
Predikat Kinerja																		SR	SR				R	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:						Koordinasi Banhubda DIY baik intern maupun dengan pemangku kepentingan dijaga dengan baik mulai dari persiapan, pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan.																			
Faktor penghambat pencapaian kinerja:						Kendaraan listrik yang dimiliki tidak dalam kondisi optimal dan faktor cuaca dalam pelaksanaan kegiatan																			
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):						Menjaga komunikasi dan koordinasi Banhubda DIY dengan pemangku kepentingan terkait.																			
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):						Menjaga komunikasi dan koordinasi Banhubda DIY dengan pemangku kepentingan terkait.																			

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						K	Rp	K	Rp		K	Rp	II	III				IV	K		Rp	K	Rp	K	Rp
						9	10	11	12		13	14 = 13/8x100	15 = 7 + 13	16 = 15 / 6 x 100%											
		5.07.02.1.01.04	Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Laporan	10	1.312.534.000	2	77.028.000	285.000.000		15.086.000					15.086.000	5,29	2	92.114.000	20,00	7,02	BADAN PENGHUBUNG DAERAH		
2	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintah di Perangkat Daerah	0.00.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	91	51.875.705.435	90,85	7.013.109.504	10.836.000.000	90,85	1.768.594.627					90,85	1.768.594.627	16,32	90,85	8.781.704.131	99,84	16,93	BADAN PENGHUBUNG DAERAH	
		0.00.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100	234.700.000	100	6.773.000	52.000.000	18,69	1.301.441					18,69	1.301.441	2,50	59,345	8.074.441	59,35	3,44	BADAN PENGHUBUNG DAERAH	
		0.00.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	25	159.880.000	3	1.883.000	35.000.000	1	650.541					1	650.541	1,86	4	2.533.541	16,00	1,58	BADAN PENGHUBUNG DAERAH	
		0.00.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	10	17.300.000	2	1.150.000	3.750.000	2						2			4	1.150.000	40,00	6,65	BADAN PENGHUBUNG DAERAH	
		0.00.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	10	15.000.000	2	1.475.000	3.750.000										2	1.475.000	20,00	9,83	BADAN PENGHUBUNG DAERAH	
		0.00.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	15	42.520.000	1	2.265.000	9.500.000		650.900						650.900	6,85	1	2.915.900	6,67	6,86	BADAN PENGHUBUNG DAERAH	
		0.00.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	%	100	33.593.619.235	100	5.516.206.478	6.897.000.000	23,01	1.396.757.390					23,01	1.396.757.390	20,25	61,505	6.912.963.868	61,51	20,58	BADAN PENGHUBUNG DAERAH	
		0.00.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	60	33.134.429.435	50	5.474.441.978	6.800.000.000	40	1.393.457.390					40	1.393.457.390	20,49	90	6.867.899.368	150,00	20,73	BADAN PENGHUBUNG DAERAH	
		0.00.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	60	337.000.000	11	39.730.000	70.000.000	3	2.640.000					3	2.640.000	3,77	14	42.370.000	23,33	12,57	BADAN PENGHUBUNG	
Rata-rata capaian kinerja (%)							80.395.306.024		11.295.072.195	16.565.342.690		2.143.204.326					2.143.204.326	12,94		13.438.276.521	57,32	16,72			
Predikat Kinerja																	SR	SR				R	SR		
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:						Koordinasi Banhubda DIY baik intern maupun dengan pemangku kepentingan dijaga dengan baik mulai dari persiapan, pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan.																			
Faktor penghambat pencapaian kinerja:						Kendaraan listrik yang dimiliki tidak dalam kondisi optimal dan faktor cuaca dalam pelaksanaan kegiatan																			
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):						Menjaga komunikasi dan koordinasi Banhubda DIY dengan pemangku kepentingan terkait.																			
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):						Menjaga komunikasi dan koordinasi Banhubda DIY dengan pemangku kepentingan terkait.																			

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
					K	Rp	K	Rp		K	Rp	I		II		III				IV		K	Rp			K	Rp	K	Rp	
												K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp									K
				Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																								DAERAH		
		0.00.01.1.02.05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	5	9.009.800	1	738.500		2.000.000	1	220.000															BADAN PENGHUBUNG DAERAH	
		0.00.01.1.02.07		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	60	113.180.000	12	1.296.000		25.000.000	3	440.000															BADAN PENGHUBUNG DAERAH	
		<b>0.00.01.1.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>91.600.000</b>	<b>100</b>	<b>6.756.000</b>	<b>20.000.000</b>	<b>25</b>	<b>3.311.600</b>																<b>BADAN PENGHUBUNG DAERAH</b>		
		0.00.01.1.03.06		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	60	91.600.000	12	6.756.000		20.000.000	3	3.311.600															BADAN PENGHUBUNG DAERAH	
		<b>0.00.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>2.405.515.400</b>	<b>100</b>	<b>126.813.846</b>	<b>537.000.000</b>	<b>24,45</b>	<b>16.614.900</b>																<b>BADAN PENGHUBUNG DAERAH</b>		
		0.00.01.1.06.01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5	120.000.000	1	11.011.579		25.000.000																	BADAN PENGHUBUNG DAERAH	
		0.00.01.1.06.02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5	321.228.000	3	33.801.732		80.000.000		9.952.000															BADAN PENGHUBUNG DAERAH	
		0.00.01.1.06.05		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5	121.000.000	1	13.025.907		25.000.000		1.470.000															BADAN PENGHUBUNG DAERAH	
		0.00.01.1.06.06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	10	33.734.400	2	2.205.100		7.000.000		1.500.000															BADAN PENGHUBUNG DAERAH	
		0.00.01.1.06.09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	10	1.809.553.000	2	66.769.528		400.000.000		3.692.900															BADAN PENGHUBUNG DAERAH	
Rata-rata capaian kinerja (%)							80.395.306.024		11.295.072.195		16.565.342.690		2.143.204.326																	
Predikat Kinerja																														
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:					Koordinasi Banhubda DIY baik intern maupun dengan pemangku kepentingan dijaga dengan baik mulai dari persiapan, pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan.																									
Faktor penghambat pencapaian kinerja:					Kendaraan listrik yang dimiliki tidak dalam kondisi optimal dan faktor cuaca dalam pelaksanaan kegiatan																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):					Menjaga komunikasi dan koordinasi Banhubda DIY dengan pemangku kepentingan terkait.																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):					Menjaga komunikasi dan koordinasi Banhubda DIY dengan pemangku kepentingan terkait.																									

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
						6		7			8		9		10		11		12		13			14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%	
						K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp
		<b>0.00.01.1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dan Pengadaan Mebeler</b>	<b>Unit</b>	<b>0</b>	<b>3.450.000.000</b>	<b>5</b>	<b>48.575.000</b>	<b>800.000.000</b>	<b>100</b>	<b>8.400.000</b>					<b>100</b>	<b>8.400.000</b>	<b>1,05</b>	<b>105</b>	<b>56.975.000</b>		<b>1,65</b>	<b>BADAN PENGHUBUNG DAERAH</b>					
		0.00.01.1.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	1	1.100.000.000			0														BADAN PENGHUBUNG DAERAH					
		0.00.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	3	1.750.000.000			600.000.000														BADAN PENGHUBUNG DAERAH					
		0.00.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	7	600.000.000			200.000.000														BADAN PENGHUBUNG DAERAH					
		5.07.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	5	48.575.000	0		8.400.000						8.400.000			5	56.975.000			BADAN PENGHUBUNG DAERAH				
		<b>0.00.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>6.561.726.400</b>	<b>100</b>	<b>1.039.564.694</b>	<b>1.330.000.000</b>	<b>16,46</b>	<b>236.745.899</b>					<b>16,46</b>	<b>236.745.899</b>	<b>17,80</b>	<b>58,23</b>	<b>1.276.310.593</b>	<b>58,23</b>	<b>19,45</b>	<b>BADAN PENGHUBUNG DAERAH</b>					
		0.00.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	60	141.970.000	12	9.293.906	30.000.000		1.308.600						1.308.600	4,36	12	10.602.506	20,00	7,47	BADAN PENGHUBUNG DAERAH					
		0.00.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	15	2.159.800.000	12	228.942.867	450.000.000		88.411.164						88.411.164	19,65	12	317.354.031	80,00	14,69	BADAN PENGHUBUNG DAERAH					
		0.00.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	10	4.259.956.400	12	801.327.921	850.000.000		147.026.135						147.026.135	17,30	12	948.354.056	120,00	22,26	BADAN PENGHUBUNG DAERAH					
		<b>0.00.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dan</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>5.538.544.400</b>	<b>100</b>	<b>268.420.486</b>	<b>1.200.000.000</b>	<b>30,47</b>	<b>105.463.397</b>					<b>30,47</b>	<b>105.463.397</b>	<b>8,79</b>	<b>65,235</b>	<b>373.883.883</b>	<b>65,24</b>	<b>6,75</b>	<b>BADAN PENGHUBUNG DAERAH</b>					
Rata-rata capaian kinerja (%)							80.395.306.024		11.295.072.195	16.565.342.690		2.143.204.326						2.143.204.326	12,94		13.438.276.521	57,32	16,72						
Predikat Kinerja																		SR	SR				R	SR					
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:						Koordinasi Banhubda DIY baik intern maupun dengan pemangku kepentingan dijaga dengan baik mulai dari persiapan, pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan.																							
Faktor penghambat pencapaian kinerja:						Kendaraan listrik yang dimiliki tidak dalam kondisi optimal dan faktor cuaca dalam pelaksanaan kegiatan																							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):						Menjaga komunikasi dan koordinasi Banhubda DIY dengan pemangku kepentingan terkait.																							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):						Menjaga komunikasi dan koordinasi Banhubda DIY dengan pemangku kepentingan terkait.																							

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
					K	Rp	K	Rp		K	Rp	I		II		III							IV		
												K	Rp	K	Rp	K	Rp						K	Rp	K
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13/8x100	15 = 7 + 13	16 = 15 / 6 x 100%	17									
				<b>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</b>																					
		0.00.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	2	675.000.000		150.000.000																BADAN PENGHUBUNG DAERAH
		0.00.01.1.09.010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	10	232.310.400	20	4.000.000	50.000.000	1.000.000						1.000.000	2,00	20	5.000.000	200,00	2,15		BADAN PENGHUBUNG DAERAH	
		0.00.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	17	2.430.408.500	12	264.420.486	500.000.000	104.463.397						104.463.397	20,89	12	368.883.883	70,59	15,18		BADAN PENGHUBUNG DAERAH	
		0.00.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	2.200.825.500		500.000.000																BADAN PENGHUBUNG DAERAH
Rata-rata capaian kinerja (%)																									
Predikat Kinerja																	SR	SR						R	SR
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:					Koordinasi Banhubda DIY baik intern maupun dengan pemangku kepentingan dijaga dengan baik mulai dari persiapan, pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan.																				
Faktor penghambat pencapaian kinerja:					Kendaraan listrik yang dimiliki tidak dalam kondisi optimal dan faktor cuaca dalam pelaksanaan kegiatan																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):					Menjaga komunikasi dan koordinasi Banhubda DIY dengan pemangku kepentingan terkait.																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):					Menjaga komunikasi dan koordinasi Banhubda DIY dengan pemangku kepentingan terkait.																				

**EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUNGAN PROVINSI  
RENJA PERANGKAT DAERAH BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERIODE PELAKSANAAN : 2025**

Indikator dan target kinerja SKPD yang mengacu pada sasaran RKPD:

- |   |                                                            |            |            |           |    |
|---|------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|----|
| 1 | Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah | Target     | 100        | Realisasi | 25 |
| 2 | Optimalisasi Barang Milik Daerah                           | 9703109475 | 3766868533 |           |    |
| 3 | Kategori RB Perangkat Daerah                               | 2          | 2          |           |    |

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%) 14 = 13/8x100	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%) 16 = 15 / 6 x 100%	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					K	Rp			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp			K	Rp
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Bidang Anggaran Belanja, Bidang Pengelola Kas Daerah, Bidang Akuntansi, Bidang Bina Administrasi Keuangan Daerah)	%	0	4.195.968.880.170	100	966.918.897.209	447.890.410.389	25	138.150.967					25	138.150.967	0,03	62,5	967.057.048.176	23,05	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET	
				Pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Bidang Anggaran Belanja )	%	0		71,25			25						25			48,125			BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET	
				Pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Bidang BAKD)	%	0		100			25						25			62,5			BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET	
				Pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Bidang Pengelola Kas Daerah)	%	0		100			25						25			62,5			BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET	
				Pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Bidang Akuntansi)	%	0		100			25						25			62,5			BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET	
		5.02.02.1.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan KUA PPAS Murni & Perubahan; Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD; Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD; Koordinasi dan Penyusunan Perda tentang APBD Murni & Perubahan dan Perkada tentang Penjabaran APBD Murni & Perubahan; serta Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	%	100	19.336.622.200	100	746.597.874	4.480.000.000	25	23.705.913					25	23.705.913	0,53	62,5	770.303.787	62,50	3,98	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
				Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan KUA PPAS Murni & Perubahan; Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD; Koordinasi, Penyusunan	%	0																	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET	
Rata-rata capaian kinerja (%)							5.196.444.926.616		1.070.832.665.424	705.837.894.519		5.602.009.532					5.602.009.532	0,79		1.076.434.674.956	28,35	20,71		
Predikat Kinerja																	SR	SR				SR	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:					1. Adanya koordinasi dan kolaborasi dengan OPD DIY, Pemerintah Kabupaten/Kota dan stakeholder terkait 2. Adanya komitmen dan kerjasama pimpinan untuk saling berkolaborasi dalam mewujudkan layanan internal pemerintah dan layanan publik secara terpadu, bersinergi dan berkelanjutan																			
Faktor penghambat pencapaian kinerja:					1. Dinamika perubahan kebijakan/peraturan di tingkat Pusat terkait pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah 2. Aplikasi SIPD selain belum memiliki fitur yang dibutuhkan secara lengkap, juga sering mengalami masalah koneksi																			
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):					Melanjutkan sinergitas lintas sektor dan lintas kewenangan																			
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																								

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
					6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
				dan Verifikasi DPA- SKPD; Koordinasi dan Penyusunan Perda tentang APBD Murni & Perubahan dan Perkada tentang Penjabaran APBD Murni & Perubahan; serta Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran																										
				Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan KUA PPAS Murni & Perubahan; Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD; Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD; Koordinasi dan Penyusunan Perda tentang APBD Murni & Perubahan dan Perkada tentang Penjabaran APBD Murni & Perubahan; serta Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	%	0																				BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET				
		5.02.02.1.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Dokumen	10	2.378.726.000	2	28.470.595	550.000.000											2	28.470.595	20,00	1,20	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET					
		5.02.02.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Dokumen	10	2.377.226.000	2	30.099.955	550.000.000											2	30.099.955	20,00	1,27	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET					
		5.02.02.1.01.03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	30	0			0																BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET				
		5.02.02.1.01.04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	30	0			0																BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET				
		5.02.02.1.01.05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	150	3.289.815.600		295.085.000	730.000.000	30	6.991.224				30	6.991.224	0,96	30	302.076.224	20,00	9,18			BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET					
		5.02.02.1.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Dokumen	10	5.122.515.500	2	331.061.957	1.200.000.000		12.449.218				12.449.218	1,04	2	343.511.175	20,00	6,71				BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET					
		5.02.02.1.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan	Dokumen	10	5.542.782.000	2	59.705.367	1.300.000.000	1	4.265.471				1	4.265.471	0,33	3	63.970.838	30,00	1,15			BADAN PENGELOLA					
Rata-rata capaian kinerja (%)							5.196.444.926.616		1.070.832.665.424	705.837.894.519		5.602.009.532				5.602.009.532	0,79		1.076.434.674.956	28,35	20,71									
Predikat Kinerja																SR	SR													
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:					1. Adanya koordinasi dan kolaborasi dengan OPD DIY, Pemerintah Kabupaten/Kota dan stakeholder terkait 2. Adanya komitmen dan kerjasama pimpinan untuk saling berkolaborasi dalam mewujudkan layanan internal pemerintah dan layanan publik secara terpadu, bersinergi dan berkelanjutan																									
Faktor penghambat pencapaian kinerja:					1. Dinamika perubahan kebijakan/peraturan di tingkat Pusat terkait pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah 2. Aplikasi SIPD selain belum memiliki fitur yang dibutuhkan secara lengkap, juga sering mengalami masalah koneksi																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):					Melanjutkan sinergitas lintas sektor dan lintas kewenangan																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
						K	Rp		K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp
			Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD															KEUANGAN DAN ASET						
		5.02.02.1.01.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Dokumen	10	625.557.100	2	2.175.000	150.000.000							2	2.175.000	20,00	0,35	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET				
		<b>5.02.02.1.02</b>	<b>Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Terlaksananya evaluasi APBD, APBD P dan Pertanggungjawaban APBD kabupaten/kota serta Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintah Daerah</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>3.297.195.700</b>		<b>18.074.000</b>	<b>760.000.000</b>	<b>55,85</b>	<b>704.300</b>					<b>55,85</b>	<b>704.300</b>	<b>0,09</b>	<b>27,925</b>	<b>18.778.300</b>	<b>27,93</b>	<b>0,57</b>	<b>BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET</b>	
		5.02.02.1.02.02	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota	Laporan	25	1.083.660.600	5	5.000.000	250.000.000							5	5.000.000	20,00	0,46	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET				
		5.02.02.1.02.03	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Laporan	25	1.083.660.600	5	5.000.000	250.000.000							5	5.000.000	20,00	0,46	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET				
		5.02.02.1.02.04	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Laporan	25	1.083.660.600	5	5.000.000	250.000.000							5	5.000.000	20,00	0,46	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET				
		5.02.02.1.02.12	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Dokumen	10	46.213.900		3.074.000	10.000.000	1	704.300					1	704.300	7,04	1	3.778.300	10,00	8,18	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET	
Rata-rata capaian kinerja (%)							5.196.444.926.616		1.070.832.665.424	705.837.894.519		5.602.009.532					5.602.009.532	0,79		1.076.434.674.956	28,35	20,71			
Predikat Kinerja																	SR	SR				SR	SR		
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:						1. Adanya koordinasi dan kolaborasi dengan OPD DIY, Pemerintah Kabupaten/Kota dan stakeholder terkait 2. Adanya komitmen dan kerjasama pimpinan untuk saling berkolaborasi dalam mewujudkan layanan internal pemerintah dan layanan publik secara terpadu, bersinergi dan berkelanjutan																			
Faktor penghambat pencapaian kinerja:						1. Dinamika perubahan kebijakan/peraturan di tingkat Pusat terkait pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah 2. Aplikasi SIPD selain belum memiliki fitur yang dibutuhkan secara lengkap, juga sering mengalami masalah koneksi																			
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):						Melanjutkan sinergitas lintas sektor dan lintas kewenangan																			
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																									

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab								
					6		7			8		9				13		16 = 15 / 6 x 100%										
					K		Rp			K		Rp				K		Rp			K		Rp		K		Rp	
					K		Rp			K		Rp				K		Rp			K		Rp		K		Rp	
		5.02.02.1.03	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) serta Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	%	100	2.161.970.500	0	53.492.000	490.000.000	25	4.607.994					25	4.607.994	0,94	12,5	58.099.994	12,50	2,69	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET				
		5.02.02.1.03.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Laporan	10	1.139.310.000	1	20.610.000	250.000.000	1	1.500.000					1	1.500.000	0,60	2	22.110.000	20,00	1,94	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET				
		5.02.02.1.03.09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Dokumen	40.000	1.022.660.500		32.882.000	240.000.000	1.100	3.107.994					1.100	3.107.994	1,29	1.100	35.989.994	2,75	3,52	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET				
		5.02.02.1.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Laporan, Penyusunan Raperda dan RaPerkada Pertanggungjawaban APBD; Konsolidasi LK SKPD, BLUD dan LK Pemda; Penyusunan Tndaklanjut terhadap LHP BPK;Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelesaian TPTGR;Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah;Penyusunan Sisdur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemda; Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD	%	100	5.508.358.700		164.054.850	1.224.000.000		7.862.760						7.862.760	0,64		171.917.610		3,12	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET				
		5.02.02.1.04.03	Koordinasi Penyusunan Laporan	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan,	Laporan	60	183.857.800	12	7.323.700	40.000.000	1						1			13	7.323.700	21,67	3,98	BADAN PENGELOLA				
Rata-rata capaian kinerja (%)							5.196.444.926.616		1.070.832.665.424	705.837.894.519		5.602.009.532						5.602.009.532	0,79		1.076.434.674.956	28,35	20,71					
Predikat Kinerja																		SR	SR				SR	SR				
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:						1. Adanya koordinasi dan kolaborasi dengan OPD DIY, Pemerintah Kabupaten/Kota dan stakeholder terkait 2. Adanya komitmen dan kerjasama pimpinan untuk saling berkolaborasi dalam mewujudkan layanan internal pemerintah dan layanan publik secara terpadu, bersinergi dan berkelanjutan																						
Faktor penghambat pencapaian kinerja:						1. Dinamika perubahan kebijakan/peraturan di tingkat Pusat terkait pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah 2. Aplikasi SIPD selain belum memiliki fitur yang dibutuhkan secara lengkap, juga sering mengalami masalah koneksi																						
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):						Melanjutkan sinergitas lintas sektor dan lintas kewenangan																						
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																												

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
					6	7	7	8		8	9	10	11			12	13	14 = 13/8x100	15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%	17			
					K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	
			Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Triwulanan dan Semesteran																KEUANGAN DAN ASET					
		5.02.02.1.04.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Laporan	10	227.484.400	2	20.563.000	50.000.000	1	7.212.760					1	7.212.760	14,43	3	27.775.760	30,00	12,21	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET	
		5.02.02.1.04.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Dokumen	10	3.540.453.600	1	45.932.250	800.000.000										1	45.932.250	10,00	1,30	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET	
		5.02.02.1.04.06	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Dokumen	5	54.051.600		3.469.900	12.000.000													6,42	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET	
		5.02.02.1.04.07	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Dokumen	5	54.778.400	1	4.753.000	12.000.000										1	4.753.000	20,00	8,68	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET	
		5.02.02.1.04.09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Dokumen	4	41.000.000	1		10.000.000										1			25,00		BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
		5.02.02.1.04.10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Dokumen	5	749.777.200	1	53.306.000	150.000.000										1	53.306.000	20,00	7,11	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET	
		5.02.02.1.04.11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	Orang	600	426.704.100	120	6.711.000	100.000.000											120	6.711.000	20,00	1,57	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
		5.02.02.1.04.12	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi	Jumlah BLUD Provinsi yang Dibina	Lembaga	8	230.251.600	11	21.996.000	50.000.000	27	650.000					27	650.000	1,30	38	22.646.000	475,00	9,84	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET	
Rata-rata capaian kinerja (%)							5.196.444.926.616		1.070.832.665.424	705.837.894.519									5.602.009.532	0,79		1.076.434.674.956	28,35	20,71	
Predikat Kinerja																				SR	SR				
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:					1. Adanya koordinasi dan kolaborasi dengan OPD DIY, Pemerintah Kabupaten/Kota dan stakeholder terkait 2. Adanya komitmen dan kerjasama pimpinan untuk saling berkolaborasi dalam mewujudkan layanan internal pemerintah dan layanan publik secara terpadu, bersinergi dan berkelanjutan																				
Faktor penghambat pencapaian kinerja:					1. Dinamika perubahan kebijakan/peraturan di tingkat Pusat terkait pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah 2. Aplikasi SIPD selain belum memiliki fitur yang dibutuhkan secara lengkap, juga sering mengalami masalah koneksi																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):					Melanjutkan sinergitas lintas sektor dan lintas kewenangan																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																									

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
					6	7	8	9		10	11	12	13		14 = 13/8x100	15 = 7 + 13	16 = 15 / 6 x 100%	17						
					K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	
		5.02.02.1.05	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Terlaksananya Analisis Investasi Pemerintah Daerah; Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan; Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak; serta Pengelolaan Dana bagi Hasil Provinsi	%	100	4.165.664.733.070	965.936.678.485	440.936.410.389	30	101.270.000					30	101.270.000	0,02	15	966.037.948.485	15,00	23,19	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET	
		5.02.02.1.05.02	Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Laporan	49	9.342.477.600	6	717.668.450	2.000.000.000		1.270.000					1.270.000	0,06	6	718.938.450	12,24	7,70	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET	
		5.02.02.1.05.08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Laporan	5	1.180.768.293.600	5	94.839.603.526	15.000.000.000	1	100.000.000				1	100.000.000	0,67	6	94.939.603.526	120,00	8,04	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET	
		5.02.02.1.05.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Laporan	5	106.021.177.076	1	20.000.000	20.000.000.000									1	20.000.000	20,00	0,02	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET	
		5.02.02.1.05.10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Laporan	5	2.869.532.784.794	1	870.359.406.509	403.936.410.389	1					1			2	870.359.406.509	40,00	30,33	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET	
		5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase kontribusi Pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah (Pendapatan Pemda/BPKA sebagai SKPKD)	%	0	68.140.990.557	60,05	6.128.784.143	14.423.736.310	13,13	680.921.755				13,13	680.921.755	4,72	36,59	6.809.705.898		9,99	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET	
				Persentase kontribusi Pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah (KPPD DIY di Kota Yogyakarta)	%	0		9,6			1,37					1,37			5,485				BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET	
				Persentase kontribusi Pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah (KPPD DIY di Kabupaten Bantul)	%	0		12,11			1,78					1,78			6,945				BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET	
				Persentase kontribusi Pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah ((KPPD DIY di Kabupaten Gunung Kidul)	%	0		4,27			0,58					0,58			2,425				BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET	
				Persentase kontribusi Pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah (KPPD DIY di Kabupaten Kulonprogo)	%	0		3,75			0,53					0,53			2,14				BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET	
				Persentase kontribusi Pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah (KPPD DIY di Kabupaten Sleman )	%	0		21,93			3,11					3,11			12,52				BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET	
Rata-rata capaian kinerja (%)							5.196.444.926.616	1.070.832.665.424	705.837.894.519			5.602.009.532					5.602.009.532	0,79		1.076.434.674.956	28,35	20,71		
Predikat Kinerja																	SR	SR				SR	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:					1. Adanya koordinasi dan kolaborasi dengan OPD DIY, Pemerintah Kabupaten/Kota dan stakeholder terkait 2. Adanya komitmen dan kerjasama pimpinan untuk saling berkolaborasi dalam mewujudkan layanan internal pemerintah dan layanan publik secara terpadu, bersinergi dan berkelanjutan																			
Faktor penghambat pencapaian kinerja:					1. Dinamika perubahan kebijakan/peraturan di tingkat Pusat terkait pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah 2. Aplikasi SIPD selain belum memiliki fitur yang dibutuhkan secara lengkap, juga sering mengalami masalah koneksi																			
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):					Melanjutkan sinergitas lintas sektor dan lintas kewenangan																			
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																								

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
					6	7	8	9		10	11	12	13		14 = 13/8x100	15 = 7 + 13	16 = 15 / 6 x 100%	17						
					K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	
		5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Terlaksananya Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah, Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah, Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah, Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pendaftaran Obyek Pajak Daerah, Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah serta Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah.	%	100	68.140.990.557	0	6.128.784.143	14.423.736.310	22,97	680.921.755					22	680.921.755	4,72	11	6.809.705.898	11,00	9,99	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
		5.02.04.1.01.01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Dokumen	5	20.880.986.000		2.984.688.450	4.150.000.000	1	21.500.000					1	21.500.000	0,52	1	3.006.188.450	20,00	14,40	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
		5.02.04.1.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pengembangan Pajak daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Laporan	5		0	13.588.550	0	1						1			2	13.588.550	40,00		BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
				Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah	Dokumen	5																		BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
		5.02.04.1.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Laporan	5	3.118.209.400	1	56.555.000	675.000.000	1						1			2	56.555.000	40,00	1,81	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
		5.02.04.1.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan	300	12.785.347.353	48	946.453.704	2.734.740.720	15	59.376.528					15	59.376.528	2,17	63	1.005.830.232	21,00	7,87	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
		5.02.04.1.01.08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	Laporan	300	30.586.141.689	15	2.094.638.489	6.679.215.347	15	597.270.227					15	597.270.227	8,94	30	2.691.908.716	10,00	8,80	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
		5.02.04.1.01.13	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	4	319.951.875	1	31.860.000	78.750.000	1	2.775.000					1	2.775.000	3,52	2	34.635.000	50,00	10,83	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
		5.02.04.1.01.14	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Laporan	10	450.354.240	2	999.950	106.030.243	1						1			3	999.950	30,00	0,22	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
Rata-rata capaian kinerja (%)						5.196.444.926.616		1.070.832.665.424	705.837.894.519	5.602.009.532							5.602.009.532	0,79		1.076.434.674.956	28,35	20,71		
Predikat Kinerja																	SR	SR					SR	SR
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:					1. Adanya koordinasi dan kolaborasi dengan OPD DIY, Pemerintah Kabupaten/Kota dan stakeholder terkait 2. Adanya komitmen dan kerjasama pimpinan untuk saling berkolaborasi dalam mewujudkan layanan internal pemerintah dan layanan publik secara terpadu, bersinergi dan berkelanjutan																			
Faktor penghambat pencapaian kinerja:					1. Dinamika perubahan kebijakan/peraturan di tingkat Pusat terkait pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah 2. Aplikasi SIPD selain belum memiliki fitur yang dibutuhkan secara lengkap, juga sering mengalami masalah koneksi																			
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):					Melanjutkan sinergitas lintas sektor dan lintas kewenangan																			
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																								

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab																
					0	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%											
																						9		10		11		12		13		K	Rp	K	Rp	K	Rp
																						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
2	Optimalisasi aset Pemda DIY	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Pengelolaan Barang Milik Daerah yang sesuai prosedur	%	0	31.617.409.040	100	2.148.376.867	7.450.000.000	13	217.985.408					13	217.985.408	2,93	56,5	2.366.362.275	7,48	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET														
		5.02.03.1.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Penyusunan Standar Harga, Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah, Penatausahaan Barang Milik Daerah, Pengamanan Barang Milik Daerah, Penilaian Barang Milik Daerah serta Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	%	100	31.617.409.040		2.148.376.867	7.450.000.000	13	217.985.408					13	217.985.408	2,93	6,5	2.366.362.275	6,50	7,48	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET													
		5.02.03.1.01.01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	Dokumen	5	3.415.699.000	1	299.139.500	750.000.000	1	4.304.000					1	4.304.000	0,57	2	303.443.500	40,00	8,88	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET													
		5.02.03.1.01.03	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dokumen	5	869.622.200	1	53.468.450	200.000.000	1	384.000					1	384.000	0,19	2	53.852.450	40,00	6,19	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET													
		5.02.03.1.01.05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Laporan	10	3.454.885.100	2	275.531.430	800.000.000	1	17.802.000					1	17.802.000	2,23	3	293.333.430	30,00	8,49	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET													
		5.02.03.1.01.07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Laporan	15	18.621.752.240		982.772.637	4.500.000.000	1	56.407.008					1	56.407.008	1,25	1	1.039.179.645	6,67	5,58	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET													
		5.02.03.1.01.08	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	Laporan	10	2.308.477.000	2	209.057.900	500.000.000	1	4.071.500					1	4.071.500	0,81	3	213.129.400	30,00	9,23	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET													
		5.02.03.1.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Dokumen	15	2.946.973.500	3	328.406.950	700.000.000	1	135.016.900					1	135.016.900	19,29	4	463.423.850	26,67	15,73	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET													
3	Meningkatnya tatakelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Perangkat Daerah	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	nilai	0	900.717.646.849	91,11	95.636.607.205	236.073.747.820	83,98	4.564.951.402					83,98	4.564.951.402	1,93	175,09	100.201.558.607	11,12	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET														
Rata-rata capaian kinerja (%)							5.196.444.926.616		1.070.832.665.424	705.837.894.519							5.602.009.532	0,79		1.076.434.674.956	28,35	20,71															
Predikat Kinerja																		SR	SR				SR	SR													
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:					1. Adanya koordinasi dan kolaborasi dengan OPD DIY, Pemerintah Kabupaten/Kota dan stakeholder terkait 2. Adanya komitmen dan kerjasama pimpinan untuk saling berkolaborasi dalam mewujudkan layanan internal pemerintah dan layanan publik secara terpadu, bersinergi dan berkelanjutan																																
Faktor penghambat pencapaian kinerja:					1. Dinamika perubahan kebijakan/peraturan di tingkat Pusat terkait pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah 2. Aplikasi SIPD selain belum memiliki fitur yang dibutuhkan secara lengkap, juga sering mengalami masalah koneksi																																
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):					Melanjutkan sinergitas lintas sektor dan lintas kewenangan																																
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																																					

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13/8x100	15 = 7 + 13	16 = 15 / 6 x 100%	17										
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
				Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (KPPD DIY di Kota Yogyakarta)	Nilai	0	85,9			83					83				168,9					BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET		
				Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (KPPD DIY di Kabupaten Bantul)	Nilai	0	85,9			83					83				168,9					BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET		
				Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (KPPD DIY di Kabupaten Gunung Kidul)	Nilai	0	85,9			83					83				168,9					BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET		
				Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (KPPD DIY di Kabupaten Kulonprogo)	Nilai	0	85,9			83					83				168,9					BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET		
				Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (KPPD DIY di Kabupaten Sleman)	Nilai	0	85,9			83					83				168,9					BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET		
		0.00.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD, serta Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	6	648.325.300	1	9.094.672	140.000.000	3	2.299.000			3	2.299.000	1,64	2	11.393.672	33,33	1,76			BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET		
		0.00.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	32	204.373.700	6	3.998.000	45.000.000	1	1.850.000			1	1.850.000	4,11	7	5.848.000	21,88	2,86			BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET		
		0.00.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	10	274.738.700		3.936.972	60.000.000	1	195.000			1	195.000	0,33	1	4.131.972	10,00	1,50			BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET		
		0.00.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	60	169.212.900	12	1.159.700	35.000.000	3	254.000			3	254.000	0,73	15	1.413.700	25,00	0,84			BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET		
		0.00.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN; Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD; Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD serta Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	%	100	496.101.001.903		80.633.294.712	99.476.671.001	24	3.262.568.107			24	3.262.568.107	3,28	12	83.895.862.819	12,00	16,91			BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET		
Rata-rata capaian kinerja (%)							5.196.444.926.616		1.070.832.665.424	705.837.894.519		5.602.009.532				5.602.009.532	0,79		1.076.434.674.956	28,35	20,71					
Predikat Kinerja																SR	SR				SR	SR				
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:					1. Adanya koordinasi dan kolaborasi dengan OPD DIY, Pemerintah Kabupaten/Kota dan stakeholder terkait 2. Adanya komitmen dan kerjasama pimpinan untuk saling berkolaborasi dalam mewujudkan layanan internal pemerintah dan layanan publik secara terpadu, bersinergi dan berkelanjutan																					
Faktor penghambat pencapaian kinerja:					1. Dinamika perubahan kebijakan/peraturan di tingkat Pusat terkait pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah 2. Aplikasi SIPD selain belum memiliki fitur yang dibutuhkan secara lengkap, juga sering mengalami masalah koneksi																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):					Melanjutkan sinergitas lintas sektor dan lintas kewenangan																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																										

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					6	7	8	9		10	11	12	13	14 = 13/8x100	15 = 7 + 13	16 = 15 / 6 x 100%	17										
					K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
				<b>Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</b>																							
		0.00.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	240	494.602.043.009	240	80.619.841.262	99.175.668.291	240	3.255.113.817					240	3.255.113.817	3,28	480	83.874.955.079	200,00	16,96	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET			
		0.00.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	360	1.319.708.894	72	5.840.000	265.002.710	13	6.433.290					13	6.433.290	2,43	85	12.273.290	23,61	0,93	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET			
		0.00.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	5	102.250.000	1	4.617.700	20.500.000	1	1.021.000					1	1.021.000	4,98	2	5.638.700	40,00	5,51	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET			
		0.00.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	10	77.000.000		2.995.750	15.500.000	1						1			1	2.995.750	10,00	3,89	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET			
		<b>0.00.01.1.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>2.946.720.000</b>		<b>5.700.000</b>	<b>700.000.000</b>	<b>4</b>	<b>14.573.214</b>					<b>4</b>	<b>14.573.214</b>	<b>2,08</b>	<b>2</b>	<b>20.273.214</b>	<b>2,00</b>	<b>0,69</b>	<b>BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET</b>			
		0.00.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	360	2.946.720.000	72	5.700.000	700.000.000	13	14.573.214					13	14.573.214	2,08	85	20.273.214	23,61	0,69	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET			
		<b>0.00.01.1.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi, dan Pelaksanaan Kinerja SKPD</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>75.544.900</b>		<b>7.596.250</b>	<b>17.500.000</b>	<b>25</b>	<b>1.725.000</b>					<b>25</b>	<b>1.725.000</b>	<b>9,86</b>	<b>12,5</b>	<b>9.321.250</b>	<b>12,50</b>	<b>12,34</b>	<b>BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET</b>			
		0.00.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	60	75.544.900	12	7.596.250	17.500.000	3	1.725.000					3	1.725.000	9,86	15	9.321.250	25,00	12,34	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET			
		<b>0.00.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; Penyediaan Peralatan Rumah Tangga; Penyediaan Bahan Logistik Kantor; Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan; Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD; Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD; serta</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>74.977.332.014</b>		<b>988.608.781</b>	<b>17.177.091.732</b>	<b>29,91</b>	<b>141.633.793</b>					<b>29,91</b>	<b>141.633.793</b>	<b>0,82</b>	<b>14,955</b>	<b>1.130.242.574</b>	<b>14,96</b>	<b>1,51</b>	<b>BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET</b>			
Rata-rata capaian kinerja (%)							5.196.444.926.616		1.070.832.665.424	705.837.894.519							5.602.009.532		0,79		1.076.434.674.956	28,35	20,71				
Predikat Kinerja																		SR					SR	SR			
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:					1. Adanya koordinasi dan kolaborasi dengan OPD DIY, Pemerintah Kabupaten/Kota dan stakeholder terkait 2. Adanya komitmen dan kerjasama pimpinan untuk saling berkolaborasi dalam mewujudkan layanan internal pemerintah dan layanan publik secara terpadu, bersinergi dan berkelanjutan																						
Faktor penghambat pencapaian kinerja:					1. Dinamika perubahan kebijakan/peraturan di tingkat Pusat terkait pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah 2. Aplikasi SIPD selain belum memiliki fitur yang dibutuhkan secara lengkap, juga sering mengalami masalah koneksi																						
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):					Melanjutkan sinergitas lintas sektor dan lintas kewenangan																						
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																											

*Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara*

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
					6	7	7	8		9	10	11	12			13	14 = 13/8x100	15 = 7 + 13	16 = 15 / 6 x 100%		17				
					K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	
				<b>Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</b>																					
		0.00.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	30	843.846.548	6	70.029.122	176.664.800	1	20.331.275					1	20.331.275	11,51	7	90.360.397	23,33	10,71	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET	
		0.00.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	158	2.612.541.641	12	194.023.705	540.998.399	3	63.024.572					3	63.024.572	11,65	15	257.048.277	9,49	9,84	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET	
		0.00.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	180	1.431.551.579	9	54.343.586	289.332.936	9	22.980.036					9	22.980.036	7,94	18	77.323.622	10,00	5,40	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET	
		0.00.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	98	312.145.249	4	22.937.000	66.644.886	4	6.011.000					4	6.011.000	9,02	8	28.948.000	8,16	9,27	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET	
		0.00.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	80	1.478.738.640	8	76.782.950	313.336.181	2	7.117.950					2	7.117.950	2,27	10	83.900.900	12,50	5,67	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET	
		0.00.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	85	280.936.957	8	10.216.700	59.114.530	1	2.594.000					1	2.594.000	4,39	9	12.810.700	10,59	4,56	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET	
		0.00.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	360	5.417.571.400	72	491.679.618	1.231.000.000	1	17.562.960					1	17.562.960	1,43	73	509.242.578	20,28	9,40	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET	
		0.00.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	22.100	32.000.000.000	12	68.596.100	7.500.000.000	1	2.012.000					1	2.012.000	0,03	13	70.608.100	0,06	0,22	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET	
		0.00.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	4	30.600.000.000			7.000.000.000														BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET	
		<b>0.00.01.1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya; Pengadaan Kendaraan dinas operasional atau lapangan; Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Pengadaan Mebel; Pengadaan Gedung Kantor Atau Bangunan</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>250.789.914.222</b>		<b>615.160.146</b>	<b>103.454.829.402</b>	<b>100</b>	<b>30.902.400</b>					<b>100</b>	<b>30.902.400</b>	<b>0,03</b>	<b>50</b>	<b>646.062.546</b>	<b>50,00</b>	<b>0,26</b>	<b>BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET</b>	
Rata-rata capaian kinerja (%)							5.196.444.926.616		1.070.832.665.424	705.837.894.519							5.602.009.532	0,79		1.076.434.674.956	28,35	20,71			
Predikat Kinerja																		SR	SR				SR	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:					1. Adanya koordinasi dan kolaborasi dengan OPD DIY, Pemerintah Kabupaten/Kota dan stakeholder terkait 2. Adanya komitmen dan kerjasama pimpinan untuk saling berkolaborasi dalam mewujudkan layanan internal pemerintah dan layanan publik secara terpadu, bersinergi dan berkelanjutan																				
Faktor penghambat pencapaian kinerja:					1. Dinamika perubahan kebijakan/peraturan di tingkat Pusat terkait pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah 2. Aplikasi SIPD selain belum memiliki fitur yang dibutuhkan secara lengkap, juga sering mengalami masalah koneksi																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):					Melanjutkan sinergitas lintas sektor dan lintas kewenangan																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																									

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
					6	7			8	9	10	11		12	13		14 = 13/8x100	15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%	17				
					K	Rp			K	Rp	K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp
				<b>Lainnya; Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya</b>																					
		0.00.01.1.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	undefined	0	0		0											BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET					
		0.00.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	7	2.580.000.000		930.000.000											BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET					
		0.00.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	105	28.543.550.000		6.337.500.000											BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET					
		0.00.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	681	11.267.857.022	53	465.460.146	1.648.169.402	1	30.902.400			1	30.902.400	1,87	54	496.362.546	7,93	4,41	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET			
		0.00.01.1.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	10	203.742.473.000	1	149.700.000	93.612.160.000								1	149.700.000	10,00	0,07	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET			
		0.00.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	397	4.656.034.200		927.000.000	0											BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET				
		<b>0.00.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat; Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik; Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor serta Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>53.143.686.711</b>		<b>9.639.869.503</b>	<b>10.601.359.277</b>	<b>22,84</b>	<b>957.890.408</b>			<b>22,84</b>	<b>957.890.408</b>	<b>9,04</b>	<b>11,42</b>	<b>10.597.759.911</b>	<b>11,42</b>	<b>19,94</b>	<b>BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET</b>			
		0.00.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	30	300.128.351	5	11.191.230	65.142.100	1	2.150.000			1	2.150.000	3,30	6	13.341.230	20,00	4,45	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET			
		0.00.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	360	22.438.193.883	72	3.744.612.768	4.437.754.290	1	470.855.529			1	470.855.529	10,61	73	4.215.468.297	20,28	18,79	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET			
		0.00.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	al	30	2.963.887.946	33	367.184.327	595.851.600	1	18.664.924			1	18.664.924	3,13	34	385.849.251	113,33	13,02	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET			
Rata-rata capaian kinerja (%)							5.196.444.926.616		1.070.832.665.424	705.837.894.519		5.602.009.532				5.602.009.532	0,79		1.076.434.674.956	28,35	20,71				
Predikat Kinerja																SR	SR				SR	SR			
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:					1. Adanya koordinasi dan kolaborasi dengan OPD DIY, Pemerintah Kabupaten/Kota dan stakeholder terkait 2. Adanya komitmen dan kerjasama pimpinan untuk saling berkolaborasi dalam mewujudkan layanan internal pemerintah dan layanan publik secara terpadu, bersinergi dan berkelanjutan																				
Faktor penghambat pencapaian kinerja:					1. Dinamika perubahan kebijakan/peraturan di tingkat Pusat terkait pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah 2. Aplikasi SIPD selain belum memiliki fitur yang dibutuhkan secara lengkap, juga sering mengalami masalah koneksi																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*:					Melanjutkan sinergitas lintas sektor dan lintas kewenangan																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*:																									

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					6	7	8	9		10	11	12	13		14 = 13/8x100	15 = 7 + 13	16 = 15 / 6 x 100%	17							
					K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp		
		0.00.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	60	27.441.476.531	60	5.516.881.178	5.502.611.287	1	466.219.955					1	466.219.955	8,47	61	5.983.101.133	101,67	21,80	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET	
		<b>0.00.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan; Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Operasional Dinas atau Lapangan; Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya; Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya serta Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan Lainnya</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>22.035.121.799</b>		<b>3.737.283.141</b>	<b>4.506.296.408</b>	<b>20,82</b>	<b>153.359.480</b>					<b>20,82</b>	<b>153.359.480</b>	<b>3,40</b>	<b>10,41</b>	<b>3.890.642.621</b>	<b>10,41</b>	<b>17,66</b>	<b>BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET</b>	
		0.00.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	1	50.500.000	1	4.546.500	12.000.000	1	800.000					1	800.000	6,67	2	5.346.500	200,00	10,59	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET	
		0.00.01.1.09.010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	491	4.025.644.334	267	774.086.115	846.877.110	1	41.654.900					1	41.654.900	4,92	268	815.741.015	54,58	20,26	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET	
		0.00.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	62	5.286.995.333	51	973.773.922	1.053.876.410	1	99.073.480					1	99.073.480	9,40	52	1.072.847.402	83,87	20,29	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET	
		0.00.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	109	7.504.449.632	263	1.276.396.441	1.511.542.888	1	11.831.100					1	11.831.100	0,78	264	1.288.227.541	242,20	17,17	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET	
		0.00.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	25	5.167.532.500	15	708.480.163	1.082.000.000	0									15	708.480.163	60,00	13,71	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET	
Rata-rata capaian kinerja (%)									1.070.832.665.424	705.837.894.519		5.602.009.532						5.602.009.532	0,79		1.076.434.674.956	28,35	20,71		
Predikat Kinerja																		SR	SR				SR	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:					1. Adanya koordinasi dan kolaborasi dengan OPD DIY, Pemerintah Kabupaten/Kota dan stakeholder terkait 2. Adanya komitmen dan kerjasama pimpinan untuk saling berkolaborasi dalam mewujudkan layanan internal pemerintah dan layanan publik secara terpadu, bersinergi dan berkelanjutan																				
Faktor penghambat pencapaian kinerja:					1. Dinamika perubahan kebijakan/peraturan di tingkat Pusat terkait pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah 2. Aplikasi SIPD selain belum memiliki fitur yang dibutuhkan secara lengkap, juga sering mengalami masalah koneksi																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):					Melanjutkan sinergitas lintas sektor dan lintas kewenangan																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																									

WIYOS SANTOSO, S.E, M.Acc  
NIP. 196802151994031005

NI MADE DWIPANTI INDRAYANTI, S.T., M.T.  
NIP. 197010181998032007

**EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUNGAN PROVINSI  
RENJA PERANGKAT DAERAH DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERIODE PELAKSANAAN : 2025**

Indikator dan target kinerja SKPD yang mengacu pada sasaran RKPD:

Target Realisasi

- 1 Persentase Jumlah Badan Publik Pemda DIY Kategori Informatif 35.14 40.54
- 2 Indeks Kematangan Manajemen SPBE (Assesmen Mandiri) 1.97 4.82
- 3 Kategori RB Perangkat Daerah 94.96 99.48

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					K Rp		K Rp		K Rp		K Rp		K Rp				K Rp		K Rp			K Rp			
					8	9	10	11	12	13	14 = 13/8x100	15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%											
1	Meningkatnya Keterbukaan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Keluhan Masyarakat Atas Pelayanan Pemda yang terespon tepat waktu	persen	88	32.445.098.800	86,24	2.887.211.008	6.883.000.000	86,15	76.005.303					86,15	76.005.303	1,10	86,195	2.963.216.311	97,95	9,13	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		2.16.02.1.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Terlaksananya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah daerah Provinsi	%	100	32.445.098.800		2.887.211.008	6.883.000.000		76.005.303						76.005.303	1,10		2.963.216.311		9,13	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		2.16.02.1.01.02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Dokumen	1	3.237.121.600	1	368.909.669	695.000.000										1	368.909.669	100,00	11,40	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		2.16.02.1.01.04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Dokumen	1	3.500.000.000			850.000.000														DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		2.16.02.1.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Dokumen	1	5.031.906.000	1	1.002.851.853	783.000.000		76.005.303						76.005.303	9,71	1	1.078.857.156	100,00	21,44	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		2.16.02.1.01.06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	Dokumen	1	2.839.000.000			680.000.000														DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		2.16.02.1.01.08	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Dokumen	1	7.561.208.000	1	812.706.486	1.600.000.000										1	812.706.486	100,00	10,75	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		2.16.02.1.01.10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	Dokumen	3.180	3.745.000.000			895.000.000														DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
Rata-rata capaian kinerja (%)							414.509.442.741		46.996.183.177	101.069.705.201		433.127.527						433.127.527	0,43		47.429.310.704	148,39	11,44		
Predikat Kinerja																		SR	SR				ST	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:						1. Adanya koordinasi dan kolaborasi dengan OPD DIY 2. Adanya komitmen dan kerjasama pimpinan untuk saling berkolaborasi dalam mewujudkan layanan internal pemerintah dan layanan publik secara terpadu, bersinergi dan berkelanjutan 3. Adanya Perpres No 95 Tahun 2018 tentang SPBE, PermenPAN No 5 Tahun 2020 tentang Manajemen Risiko SPBE dan PermenPANRB No 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE 4. Adanya Pergub Nomor 67 tentang Sistem Pemerintahan Perbasis Elektronik 5. Adanya Pergub nomor 22 tahun 2023 tentang Arsitektur dan Peta Rencana SPBE 6. Adanya Pergub nomor 23 Tahun 2023 tentang Satu data Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta 7. Komitmen pimpinan dalam melakukan review DIK Pemda DIY 8. Adanya Perda nomor 4 tahun 2021 tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik																			
Faktor penghambat pencapaian kinerja:						1. Banyaknya ancaman pada keamanan informasi di Pemda DIY 2. Belum memiliki satpras pengamanan yang belum memadai 3. Banyak aplikasi OPD yang dibangun belum menggunakan Konsep Secure System Development Life Cycle (SDLC) dalam meningkatkan kualitas software dalam aspek keamanannya 4. Belum adanya lembaga audit eksternal SPBE tersertifikasi 5. Pengelolaan aset TIK yang belum optimal																			
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):						1. Penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi Dikecualikan (DIK) Pemda DIY Tahun 2025 2. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Resiko SPBE Tahun 2025 3. Melakukan Audit aplikasi SPBE, Audit keamanan informasi SPBE dan Audit infrastruktur SPBE																			
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																									

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab													
					6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100			15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%										
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp									
		2.16.02.1.01.11	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Dokumen	1	6.530.863.200	1	702.743.000	1.380.000.000											1	702.743.000	100,00	10,76	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA											
2	Meningkatnya Kematangan Manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Indeks Penerapan Manajemen SPBE assesmen mandiri	indeks	2	33.905.333.050	5	48.319.547	9.151.694.000	5										5						10	48.319.547	500,00	0,14	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					
				Indeks Penerapan Audit TIK assesmen mandiri	indeks	1,38		4,33			4,33											8,66						627,54		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						
		2.16.03.1.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Terlaksananya Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	%	100	13.660.000.000		23.510.938	3.325.000.000																		23.510.938		0,17	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					
		2.16.03.1.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Unit	269	13.660.000.000	269	23.510.938	3.325.000.000												269	23.510.938	100,00	0,17	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA										
		2.16.03.1.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Terlaksananya Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	%	100	20.245.333.050		24.808.609	5.826.694.000																		24.808.609		0,12	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					
		2.16.03.1.02.01	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Dokumen	1	319.340.000			76.500.000																					DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					
		2.16.03.1.02.03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	Unit	1	3.034.553.050			704.754.000																					DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					
		2.16.03.1.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Unit	3	14.289.920.000			4.432.000.000																					DINAS KOMUNIKASI					
Rata-rata capaian kinerja (%)							414.509.442.741		46.996.183.177	101.069.705.201												433.127.527						433.127.527	0,43		47.429.310.704	148,39	11,44			
Predikat Kinerja																																				
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:						1. Adanya koordinasi dan kolaborasi dengan OPD DIY 2. Adanya komitmen dan kerjasama pimpinan untuk saling berkolaborasi dalam mewujudkan layanan internal pemerintah dan layanan publik secara terpadu, bersinergi dan berkelanjutan 3. Adanya Perpres No 95 Tahun 2018 tentang SPBE, PermenPAN No 5 Tahun 2020 tentang Manajemen Risiko SPBE dan PermenPANRB No 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE 4. Adanya Pergub Nomor 67 tentang Sistem Pemerintahan Perbas Elektronik 5. Adanya Pergub nomor 22 tahun 2023 tentang Arsitektur dan Peta Rencana SPBE 6. Adanya Pergub nomor 23 Tahun 2023 tentang Satu data Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta 7. Komitmen pimpinan dalam melakukan riview DIK Pemda DIY 8. Adaya Perda nomor 4 tahun 2021 tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik																														
Faktor penghambat pencapaian kinerja:						1. Banyaknya ancaman pada keamanan informasi di Pemda DIY 2. Belum memiliki satpras pengamanan yang belum memadai 3. Banyak aplikasi OPD yang dibangun belum menggunakan Konsep Secure System Development Life Cycle (SDLC) dalam meningkatkan kualitas software dalam aspek keamanannya 4. Belum adanya lembaga audit eksternal SPBE tersertifikasi 5. Pengelolaan aset TIK yang belum optimal																														
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):						1. Penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi Dikecualikan (DIK) Pemda DIY Tahun 2025 2. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Resiko SPBE Tahun 2025 3. Melakukan Audit aplikasi SPBE, Audit keamanan informasi SPBE dan Audit infrastruktur SPBE																														
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																																				

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	I	II	III	IV	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10	11	12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
			Pemerintahan Berbasis Elektronik	yang Dikembangkan																				DAN INFORMATIKA	
		2.16.03.1.02.08	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Layanan Publik Yang Terhubung Dengan Sistem Peghubung Layanan Pemerintah Daerah	Layanan	1	715.880.000			172.800.000														DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		2.16.03.1.02.12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	Dokumen	1	1.885.640.000	1	24.808.609	440.640.000								1	24.808.609	100,00	1,32		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
		<b>2.21.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>	<b>Skor Kematangan Keamanan Informasi (Indeks KAMI) Pemda DIY</b>	<b>skor</b>	<b>633</b>	<b>33.011.302.800</b>	<b>643</b>	<b>24.797.460</b>	<b>9.039.880.000</b>	<b>643</b>	<b>224.775</b>					<b>643</b>	<b>224.775</b>	<b>0,00</b>	<b>1.286</b>	<b>25.022.235</b>	<b>203,16</b>	<b>0,08</b>	<b>DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>	
		<b>2.21.02.1.01</b>	<b>Penyelenggaraan untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi</b>	<b>Terselenggaranya Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>17.864.982.800</b>		<b>24.797.460</b>	<b>5.517.880.000</b>		<b>224.775</b>					<b>224.775</b>	<b>0,00</b>		<b>25.022.235</b>		<b>0,14</b>	<b>DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>		
		2.21.02.1.01.03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Laporan	1	17.864.982.800	1	24.797.460	5.517.880.000	0	224.775					224.775	0,00	1	25.022.235	100,00	0,14	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
		<b>2.21.02.1.02</b>	<b>Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi</b>	<b>Terlaksananya Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>15.146.320.000</b>			<b>3.522.000.000</b>														<b>DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>	
		2.21.02.1.02.01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	Perangkat Daerah	37	15.146.320.000			3.522.000.000														DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		<b>2.22.08</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN</b>	<b>Indeks Teknologi dan Komunikasi assesment mandiri</b>	<b>indeks</b>	<b>2,55</b>	<b>209.815.800.000</b>	<b>5</b>	<b>33.441.040.372</b>	<b>47.650.000.000</b>	<b>5</b>	<b>26.505.000</b>					<b>5</b>	<b>26.505.000</b>	<b>0,06</b>	<b>10</b>	<b>33.467.545.372</b>	<b>392,16</b>	<b>15,95</b>	<b>DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>	
Rata-rata capaian kinerja (%)							414.509.442.741		46.996.183.177	101.069.705.201		433.127.527					433.127.527	0,43		47.429.310.704	148,39	11,44			
Predikat Kinerja																	SR	SR					ST	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:					1. Adanya koordinasi dan kolaborasi dengan OPD DIY 2. Adanya komitmen dan kerjasama pimpinan untuk saling berkolaborasi dalam mewujudkan layanan internal pemerintah dan layanan publik secara terpadu, bersinergi dan berkelanjutan 3. Adanya Perpres No 95 Tahun 2018 tentang SPBE, PermenPAN No 5 Tahun 2020 tentang Manajemen Risiko SPBE dan PermenPANRB No 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE 4. Adanya Pergub Nomor 67 tentang Sistem Pemerintahan Perbas Elektronik 5. Adanya Pergub nomor 22 tahun 2023 tentang Arsitektur dan Peta Rencana SPBE 6. Adanya Pergub nomor 23 Tahun 2023 tentang Satu data Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta 7. Komitmen pimpinan dalam melakukan review DIK Pemda DIY 8. Adaya Perda nomor 4 tahun 2021 tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik																				
Faktor penghambat pencapaian kinerja:					1. Banyaknya ancaman pada keamanan informasi di Pemda DIY 2. Belum memiliki satpras pengamanan yang belum memadai 3. Banyak aplikasi OPD yang dibangun belum menggunakan Konsep Secure System Development Life Cycle (SDLC) dalam meningkatkan kualitas software dalam aspek keamanannya 4. Belum adanya lembaga audit eksternal SPBE tersertifikasi 5. Pengelolaan aset TIK yang belum optimal																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):					1. Penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi Dikecualikan (DIK) Pemda DIY Tahun 2025 2. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Resiko SPBE Tahun 2025 3. Melakukan Audit aplikasi SPBE, Audit keamanan informasi SPBE dan Audit infrastruktur SPBE																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																									

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K	Rp	K	Rp		K	Rp	I	II		III	IV	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13/8x100	15 = 7 + 13	16 = 15 / 6 x 100%	17					
		2.22.08.5.06	Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Terlaksananya Sarana dan Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	%	100	209.815.800.000	33.441.040.372	47.650.000.000	26.505.000			26.505.000	0,06	33.467.545.372	15,95					DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		2.22.08.5.06.02	Pembangunan Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital	Jumlah Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital yang Dibangun	Objek	1	209.815.800.000	33.441.040.372	47.650.000.000	26.505.000			26.505.000	0,06	33.467.545.372	15,95					DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
3	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	nilai	84,5	105.331.908.091	91,99	10.594.814.790	28.345.131.201	87,2	330.392.449	87,2	330.392.449	1,17	179,19	10.925.207.239	212,06	10,37		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		0.00.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksanakannya penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah, koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	%	100	336.000.000	28.133.673	76.000.000								28.133.673		8,37		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		0.00.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	120.000.000	9	19.186.818	25.000.000	2		2		11	19.186.818	366,67	15,99		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		0.00.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	4	128.000.000			30.000.000	1		1		1			25,00		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		0.00.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	3	88.000.000	3	8.946.855	21.000.000	0				3	8.946.855	100,00	10,17		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		0.00.01.1.01.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya penyediaan gaji dan tunjangan ASN, pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD, koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD serta koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	%	100	73.633.832.861	9.205.368.164	14.522.186.201	302.479.351				302.479.351	2,08		9.507.847.515		12,91		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Rata-rata capaian kinerja (%)							414.509.442.741	46.996.183.177	101.069.705.201	433.127.527				433.127.527	0,43		47.429.310.704	148,39	11,44		
Predikat Kinerja														SR	SR				ST	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:						1. Adanya koordinasi dan kolaborasi dengan OPD DIY 2. Adanya komitmen dan kerjasama pimpinan untuk saling berkolaborasi dalam mewujudkan layanan internal pemerintah dan layanan publik secara terpadu, bersinergi dan berkelanjutan 3. Adanya Perpres No 95 Tahun 2018 tentang SPBE, PermenPAN No 5 Tahun 2020 tentang Manajemen Risiko SPBE dan PermenPANRB No 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE 4. Adanya Pergub Nomor 67 tentang Sistem Pemerintahan Perbasis Elektronik 5. Adanya Pergub nomor 22 tahun 2023 tentang Arsitektur dan Peta Rencana SPBE 6. Adanya Pergub nomor 23 Tahun 2023 tentang Satu data Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta 7. Komitmen pimpinan dalam melakukan riview DIK Pemda DIY 8. Adaya Perda nomor 4 tahun 2021 tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik															
Faktor penghambat pencapaian kinerja:						1. Banyaknya ancaman pada keamanan informasi di Pemda DIY 2. Belum memiliki satpras pengamanan yang belum memadai 3. Banyak aplikasi OPD yang dibangun belum menggunakan Konsep Secure System Development Life Cycle (SDLC) dalam meningkatkan kualitas software dalam aspek keamanannya 4. Belum adanya lembaga audit eksternal SPBE tersertifikasi 5. Pengelolaan aset TIK yang belum optimal															
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):						1. Penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi Dikecualikan (DIK) Pemda DIY Tahun 2025 2. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Resiko SPBE Tahun 2025 3. Melakukan Audit aplikasi SPBE, Audit keamanan informasi SPBE dan Audit infrastruktur SPBE															
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																					

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100			15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp
		0.00.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	75	73.179.676.238	75	9.162.889.817	14.413.613.000	76	302.179.351					76	302.179.351	2,10	151	9.465.069.168	201,33	12,93	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			
		0.00.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	undefined	1	181.556.023			60.316.201														DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			
		0.00.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	1	85.692.100	12	29.456.430	7.000.000	0										12	29.456.430	1.200,00	34,37	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
		0.00.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	65.263.000	1	4.373.694	13.990.000	0	300.000						300.000	2,14	1	4.673.694	100,00	7,16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			
		0.00.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	19	121.645.500	18	8.648.223	27.267.000	1						1				19	8.648.223	100,00	7,11	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
		<b>0.00.01.1.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>70.000.000</b>			<b>17.000.000</b>															<b>DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>		
		0.00.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya penatausahaan BMD sesuai dengan ketentuan yang berlaku	undefined	1	70.000.000			17.000.000															DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
		<b>0.00.01.1.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>270.000.000</b>			<b>65.000.000</b>															<b>DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>		
		0.00.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan terkait teknologi informasi	undefined	75	270.000.000			65.000.000															DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
		<b>0.00.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, penyediaan peralatan</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>2.091.503.750</b>		<b>191.651.574</b>	<b>434.603.000</b>		<b>2.794.500</b>						<b>2.794.500</b>	<b>0,64</b>		<b>194.446.074</b>		<b>9,30</b>	<b>DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>			
Rata-rata capaian kinerja (%)							414.509.442.741		46.996.183.177	101.069.705.201		433.127.527						433.127.527	0,43		47.429.310.704	148,39	11,44				
Predikat Kinerja																		SR	SR				ST	SR			
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:					1. Adanya koordinasi dan kolaborasi dengan OPD DIY 2. Adanya komitmen dan kerjasama pimpinan untuk saling berkolaborasi dalam mewujudkan layanan internal pemerintah dan layanan publik secara terpadu, bersinergi dan berkelanjutan 3. Adanya Perpres No 95 Tahun 2018 tentang SPBE, PermenPAN No 5 Tahun 2020 tentang Manajemen Risiko SPBE dan PermenPANRB No 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE 4. Adanya Pergub Nomor 67 tentang Sistem Pemerintahan Perbasis Elektronik 5. Adanya Pergub nomor 22 tahun 2023 tentang Arsitektur dan Peta Rencana SPBE 6. Adanya Pergub nomor 23 Tahun 2023 tentang Satu data Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta 7. Komitmen pimpinan dalam melakukan review DIK Pemda DIY 8. Adanya Perda nomor 4 tahun 2021 tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik																						
Faktor penghambat pencapaian kinerja:					1. Banyaknya ancaman pada keamanan informasi di Pemda DIY 2. Belum memiliki satpras pengamanan yang belum memadai 3. Banyak aplikasi OPD yang dibangun belum menggunakan Konsep Secure System Development Life Cycle (SDLC) dalam meningkatkan kualitas software dalam aspek keamanannya 4. Belum adanya lembaga audit eksternal SPBE tersertifikasi 5. Pengelolaan aset TIK yang belum optimal																						
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):					1. Penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi Dikecualikan (DIK) Pemda DIY Tahun 2025 2. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Resiko SPBE Tahun 2025 3. Melakukan Audit aplikasi SPBE, Audit keamanan informasi SPBE dan Audit infrastruktur SPBE																						
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																											

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	I	II	III	IV	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10	11	12	13	14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17	
				<i>dan perlengkapan kantor, penyediaan peralatan tangga, penyediaan barang cetakan dan penggandaan serta penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD</i>																				
		0.00.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	42.354.750	1	6.897.000	8.346.000	0								1	6.897.000	100,00	16,28	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		0.00.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	192.683.000	4	23.407.163	39.744.000	0								4	23.407.163	400,00	12,15	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		0.00.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	3	116.301.000	2	13.492.577	24.166.000	0								2	13.492.577	66,67	11,60	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		0.00.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	3	162.445.000	3	17.842.780	33.762.000	0	396.900					396.900	1,18	3	18.239.680	100,00	11,23	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		0.00.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	1.577.720.000	12	130.012.054	328.585.000	0	2.397.600					2.397.600	0,73	12	132.409.654	1.200,00	8,39	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		<b>0.00.01.1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Terlaksananya pengadaan peralatan dan mesin lainnya serta pengadaan sarana , prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya dan pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>15.503.040.378</b>		<b>38.827.202</b>	<b>11.612.966.821</b>										<b>38.827.202</b>		<b>0,25</b>	<b>DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>	
		0.00.01.1.07.01	Pengadaan Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	0	1.300.000.000			650.000.000													DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		0.00.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	3	2.955.000.000			985.000.000													DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
Rata-rata capaian kinerja (%)							414.509.442.741		46.996.183.177	101.069.705.201		433.127.527					433.127.527	0,43		47.429.310.704	148,39	11,44		
Predikat Kinerja																	SR	SR					ST	SR
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:						1. Adanya koordinasi dan kolaborasi dengan OPD DIY 2. Adanya komitmen dan kerjasama pimpinan untuk saling berkolaborasi dalam mewujudkan layanan internal pemerintah dan layanan publik secara terpadu, bersinergi dan berkelanjutan 3. Adanya Perpres No 95 Tahun 2018 tentang SPBE, PermenPAN No 5 Tahun 2020 tentang Manajemen Risiko SPBE dan PermenPANRB No 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE 4. Adanya Pergub Nomor 67 tentang Sistem Pemerintahan Perbasis Elektronik 5. Adanya Pergub nomor 22 tahun 2023 tentang Arsitektur dan Peta Rencana SPBE 6. Adanya Pergub nomor 23 Tahun 2023 tentang Satu data Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta 7. Komitmen pimpinan dalam melakukan riview DIK Pemda DIY 8. Adaya Perda nomor 4 tahun 2021 tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik																		
Faktor penghambat pencapaian kinerja:						1. Banyaknya ancaman pada keamanan informasi di Pemda DIY 2. Belum memiliki satpras pengamanan yang belum memadai 3. Banyak aplikasi OPD yang dibangun belum menggunakan Konsep Secure System Development Life Cycle (SDLC) dalam meningkatkan kualitas software dalam aspek keamanannya 4. Belum adanya lembaga audit eksternal SPBE tersertifikasi 5. Pengelolaan aset TIK yang belum optimal																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):						1. Penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi Dikecualikan (DIK) Pemda DIY Tahun 2025 2. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Resiko SPBE Tahun 2025 3. Melakukan Audit aplikasi SPBE, Audit keamanan informasi SPBE dan Audit infrastruktur SPBE																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																								

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	I	II	III	IV	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13/8x100	15 = 7 + 13	16 = 15 / 6 x 100%	17								
		0.00.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	1	1.010.000.000	3	38.827.202		250.000.000									3	38.827.202	300,00	3,84	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		0.00.01.1.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	undefined	1	9.699.000.000				9.600.000.000													DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		0.00.01.1.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	539.040.378				127.966.821													DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		<b>0.00.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat, penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik serta penyediaan jasa pelayanan umum kantor</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>11.427.479.802</b>		<b>835.082.577</b>		<b>1.210.637.179</b>		<b>19.784.838</b>				<b>19.784.838</b>	<b>1,63</b>		<b>854.867.415</b>		<b>7,48</b>	<b>DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>	
		0.00.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	33.808.000				8.452.000													DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		0.00.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	8.093.310.600	12	234.165.217		554.894.000	0	19.484.838				19.484.838	3,51	12	253.650.055	1.200,00	3,13	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		0.00.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	2	3.300.361.202	12	600.917.360		647.291.179	1	300.000				1	300.000	0,05	13	601.217.360	650,00	18,22	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		<b>0.00.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya, penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan, dan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>2.000.051.300</b>		<b>295.751.600</b>		<b>406.738.000</b>		<b>5.333.760</b>				<b>5.333.760</b>	<b>1,31</b>		<b>301.085.360</b>		<b>15,05</b>	<b>DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>	
		0.00.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	1	120.869.300	1	21.856.000		25.000.000	1	1.403.300				1	1.403.300	5,61	2	23.259.300	200,00	19,24	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Rata-rata capaian kinerja (%)							414.509.442.741		46.996.183.177		101.069.705.201		433.127.527				433.127.527	0,43		47.429.310.704	148,39	11,44		
Predikat Kinerja																	SR	SR				ST	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:						1. Adanya koordinasi dan kolaborasi dengan OPD DIY 2. Adanya komitmen dan kerjasama pimpinan untuk saling berkolaborasi dalam mewujudkan layanan internal pemerintah dan layanan publik secara terpadu, bersinergi dan berkelanjutan 3. Adanya Perpres No 95 Tahun 2018 tentang SPBE, PermenPAN No 5 Tahun 2020 tentang Manajemen Risiko SPBE dan PermenPANRB No 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE 4. Adanya Pergub Nomor 67 tentang Sistem Pemerintahan Perbasis Elektronik 5. Adanya Pergub nomor 22 tahun 2023 tentang Arsitektur dan Peta Rencana SPBE 6. Adanya Pergub nomor 23 Tahun 2023 tentang Satu data Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta 7. Komitmen pimpinan dalam melakukan review DIK Pemda DIY 8. Adanya Perda nomor 4 tahun 2021 tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik																		
Faktor penghambat pencapaian kinerja:						1. Banyaknya ancaman pada keamanan informasi di Pemda DIY 2. Belum memiliki satpras pengamanan yang belum memadai 3. Banyak aplikasi OPD yang dibangun belum menggunakan Konsep Secure System Development Life Cycle (SDLC) dalam meningkatkan kualitas software dalam aspek keamanannya 4. Belum adanya lembaga audit eksternal SPBE tersertifikasi 5. Pengelolaan aset TIK yang belum optimal																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):						1. Penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi Dikecualikan (DIK) Pemda DIY Tahun 2025 2. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Resiko SPBE Tahun 2025 3. Melakukan Audit aplikasi SPBE, Audit keamanan informasi SPBE dan Audit infrastruktur SPBE																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																								

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17							
			Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																				
		0.00.01.1.09.010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	276.127.000	1	39.919.700	55.966.000	0												
		0.00.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	16	720.908.000	16	119.074.900	142.759.000	1	3.930.460											
		0.00.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	882.147.000	1	114.901.000	183.013.000	0												
Rata-rata capaian kinerja (%)							414.509.442.741		46.996.183.177	101.069.705.201		433.127.527											
Predikat Kinerja															SR	SR							
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:					1. Adanya koordinasi dan kolaborasi dengan OPD DIY 2. Adanya komitmen dan kerjasama pimpinan untuk saling berkolaborasi dalam mewujudkan layanan internal pemerintah dan layanan publik secara terpadu, bersinergi dan berkelanjutan 3. Adanya Perpres No 95 Tahun 2018 tentang SPBE, PermenPAN No 5 Tahun 2020 tentang Manajemen Risiko SPBE dan PermenPANRB No 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE 4. Adanya Pergub Nomor 67 tentang Sistem Pemerintahan Perbasis Elektronik 5. Adanya Pergub nomor 22 tahun 2023 tentang Arsitektur dan Peta Rencana SPBE 6. Adanya Pergub nomor 23 Tahun 2023 tentang Satu data Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta 7. Komitmen pimpinan dalam melakukan riview DIK Pemda DIY 8. Adaya Perda nomor 4 tahun 2021 tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik																		
Faktor penghambat pencapaian kinerja:					1. Banyaknya ancaman pada keamanan informasi di Pemda DIY 2. Belum memiliki satpras pengamanan yang belum memadai 3. Banyak aplikasi OPD yang dibangun belum menggunakan Konsep Secure System Development Life Cycle (SDLC) dalam meningkatkan kualitas software dalam aspek keamanannya 4. Belum adanya lembaga audit eksternal SPBE tersertifikasi 5. Pengelolaan aset TIK yang belum optimal																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):					1. Penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi Dikecualikan (DIK) Pemda DIY Tahun 2025 2. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Resiko SPBE Tahun 2025 3. Melakukan Audit aplikasi SPBE, Audit keamanan informasi SPBE dan Audit infrastruktur SPBE																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																							

Disusun  
Yogyakarta, 2 Mei 2025  
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

Dievaluasi  
Yogyakarta, 2 Mei 2025  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah

HARI EDI TRI WAHYU NUGROHO, S.I.P., M.Si.  
NIP. 197410171999031002

NI MADE DWIPANTI INDRAYANTI, S.T., M.T.  
NIP. 197010181998032007

**EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUNGAN PROVINSI  
RENJA PERANGKAT DAERAH DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERIODE PELAKSANAAN : 2025**

Indikator dan target kinerja SKPD yang mengacu pada sasaran RKPD:

	Target	Realisasi
1 Lembaga kemasyarakatan dan lembaga ekonomi yang mampu mendorong pelaksanaan pembangunan desa/kelurahan	4	3
2 Persentase kepemilikan dokumen kependudukan	94	97.01
3 Kategori Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	2	2

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
								I	II	III	IV												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13/8x100	15 = 7 + 13	16 = 15 / 6 x 100%	17							
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	Meningkatnya kualitas bahan rumusan kebijakan, kapasitas Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Ekonomi desa/kelurahan, serta Pemberdayaan Masyarakat	2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase rumusan bahan kebijakan pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren	%	0		41.777.750	5						5							DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
		2.13.04.1.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa																				
Rata-rata capaian kinerja (%)																						nan	
Predikat Kinerja																							SR SR
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:								- Koordinasi dan komunikasi serta komunikasi yang terjalin baik dengan Stake holder terkait. - SDM yang tanggap dan mampu beradaptasi dengan cepat - Sarana dan prasarana, dan media komunikasi dan informasi yang mendukung															
Faktor penghambat pencapaian kinerja:								- Penyesuaian dengan regulasi keuangan yang baru - Belum ada juknis Epdeskel dari pusat															
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):								- Koordinasi dan komunikasi serta komunikasi yang terjalin baik dengan Stake holder terkait. - Persiapan sembari menunggu juknis Epdeskel dari pusat															
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																							

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab																											
								I	II	III	IV																																
1	2	3	4	5	6		7		8		9				10				11				12				13				14 = 13/8x100				15 = 7 + 13				16 = 15 / 6 x 100%				17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
		2.13.04.1.01.0002	Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa					41.777.750																												DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							
		4.01.04	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pembinaan dan Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan	Lembaga	0		3.808.460.550	3																										DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL								
				Implementasi kelurahan model Gotong Royong Segoro Amarto	Kelurahan	0	0		6																										DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL								
		4.01.04.1.02	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar																																								
Rata-rata capaian kinerja (%)								17.752.216.917																											nan								
Predikat Kinerja																																			SR	SR							
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:					- Koordinasi dan komunikasi serta komunikasi yang terjalin baik dengan Stake holder terkait. - SDM yang tanggap dan mampu beradaptasi dengan cepat - Sarana dan prasarana, dan media komunikasi dan informasi yang mendukung																																						
Faktor penghambat pencapaian kinerja:					- Penyesuaian dengan regulasi keuangan yang baru - Belum ada juknis Epdeskel dari pusat																																						
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):					- Koordinasi dan komunikasi serta komunikasi yang terjalin baik dengan Stake holder terkait. - Persiapan sembari menunggu juknis Epdeskel dari pusat																																						
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																																											

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab										
										I	II	III	IV			14 = 13/8x100		15 = 7 + 13			16 = 15 / 6 x 100%									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		4.01.04.1.02.0003	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial						162.864.000																				DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
		<b>4.01.04.1.03</b>	<b>Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar</b>																											
		4.01.04.1.03.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja						3.645.596.550																				DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
		<b>4.01.10</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN</b>	<b>Persentase Pemerintah Kalurahan yang</b>	<b>%</b>	<b>0</b>			<b>2.770.336.680</b>	<b>1,28</b>											<b>1,28</b>						<b>0,64</b>		<b>DINAS PEMBERDAYAAN</b>	
Rata-rata capaian kinerja (%)									17.752.216.917																					nan
Predikat Kinerja																						SR	SR					SR	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:						- Koordinasi dan komunikasi serta komunikasi yang terjalin baik dengan Stake holder terkait. - SDM yang tanggap dan mampu beradaptasi dengan cepat - Sarana dan prasarana, dan media komunikasi dan informasi yang mendukung																								
Faktor penghambat pencapaian kinerja:						- Penyesuaian dengan regulasi keuangan yang baru - Belum ada juknis Epdeskel dari pusat																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):						- Koordinasi dan komunikasi serta komunikasi yang terjalin baik dengan Stake holder terkait. - Persiapan sembari menunggu juknis Epdeskel dari pusat																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																														

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
								I	II	III	IV												
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10		11		12		13	14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			<b>KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN</b>	melaksanakan Reformasi Birokrasi dengan kategori baik																			<b>MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>
		<b>4.01.10.5.01</b>	<b>Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Urusan Keistimewaan</b>																				
		4.01.10.5.01.0010	Pembinaan Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan				2.770.336.680																DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
<b>2</b>	<b>Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan</b>	<b>2.12.02</b>	<b>PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK</b>	<b>Persentase tercapainya fasilitasi dokumen peristiwa kependudukan (KTPel dan KIA)</b>	<b>%</b>	<b>0</b>		<b>56.534.800</b>	<b>94,3</b>							<b>94,3</b>						<b>47,15</b>	<b>DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>
Rata-rata capaian kinerja (%)								17.752.216.917															nan
Predikat Kinerja																SR	SR						SR SR
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:					- Koordinasi dan komunikasi serta komunikasi yang terjalin baik dengan Stake holder terkait. - SDM yang tanggap dan mampu beradaptasi dengan cepat - Sarana dan prasarana, dan media komunikasi dan informasi yang mendukung																		
Faktor penghambat pencapaian kinerja:					- Penyesuaian dengan regulasi keuangan yang baru - Belum ada juknis Epdeskel dari pusat																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):					- Koordinasi dan komunikasi serta komunikasi yang terjalin baik dengan Stake holder terkait. - Persiapan sembari menunggu juknis Epdeskel dari pusat																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																							

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab								
								I	II	III	IV													
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10	11	12	13	14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		<b>2.12.02.1.01</b>	<b>Pelayanan Pendaftaran Kependudukan</b>																					
		2.12.02.1.01.0002	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi					24.800.800																DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		<b>2.12.02.1.02</b>	<b>Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan</b>																					
		2.12.02.1.02.0001	Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk					11.520.000																DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		2.12.02.1.02.0002	Sosialisasi Terkait Pendaftaran Penduduk					20.214.000																DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Rata-rata capaian kinerja (%)								17.752.216.917																nan
Predikat Kinerja																								SR SR
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:					- Koordinasi dan komunikasi serta komunikasi yang terjalin baik dengan Stake holder terkait. - SDM yang tanggap dan mampu beradaptasi dengan cepat - Sarana dan prasarana, dan media komunikasi dan informasi yang mendukung																			
Faktor penghambat pencapaian kinerja:					- Penyesuaian dengan regulasi keuangan yang baru - Belum ada juknis Epdeskel dari pusat																			
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):					- Koordinasi dan komunikasi serta komunikasi yang terjalin baik dengan Stake holder terkait. - Persiapan sembari menunggu juknis Epdeskel dari pusat																			
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																								

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
										I	II	III	IV													
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12	13		14 = 13/8x100	15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		2.12.03	<b>PROGRAM PENCATATAN SIPIL</b>	Persentase tercapainya fasilitasi dokumen peristiwa penting (Akta kelahiran bagi anak dan akta kematian) bagi masyarakat DIY		0				61.315.700	99,72							99,72					49,86			DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		2.12.03.1.01	<b>Pelayanan Pencatatan Sipil</b>																							
		2.12.03.1.01.0004	Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota							36.455.700																DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		2.12.03.1.03	<b>Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil</b>																							
		2.12.03.1.03.0001	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil							24.860.000																DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Rata-rata capaian kinerja (%)										17.752.216.917																nan
Predikat Kinerja																										SR SR
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:						- Koordinasi dan komunikasi serta komunikasi yang terjalin baik dengan Stake holder terkait. - SDM yang tanggap dan mampu beradaptasi dengan cepat - Sarana dan prasarana, dan media komunikasi dan informasi yang mendukung																				
Faktor penghambat pencapaian kinerja:						- Penyesuaian dengan regulasi keuangan yang baru - Belum ada juknis Epdeskel dari pusat																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):						- Koordinasi dan komunikasi serta komunikasi yang terjalin baik dengan Stake holder terkait. - Persiapan sembari menunggu juknis Epdeskel dari pusat																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																										

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
												I	II	III	IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12	13	14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		2.12.04	<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>	Persentase akumulasi instansi/Lembaga yang memanfaatkan data kependudukan		%	0				64.385.900	76						76						DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIIL	
		2.12.04.1.02	<b>Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi</b>																						
		2.12.04.1.02.0001	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan							60.025.500														DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIIL	
		2.12.04.1.02.0005	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan							4.360.400														DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIIL	
Rata-rata capaian kinerja (%)											17.752.216.917													nan	
Predikat Kinerja																		SR	SR					SR	SR
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:						- Koordinasi dan komunikasi serta komunikasi yang terjalin baik dengan Stake holder terkait. - SDM yang tanggap dan mampu beradaptasi dengan cepat - Sarana dan prasarana, dan media komunikasi dan informasi yang mendukung																			
Faktor penghambat pencapaian kinerja:						- Penyesuaian dengan regulasi keuangan yang baru - Belum ada juknis Epdeskel dari pusat																			
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):						- Koordinasi dan komunikasi serta komunikasi yang terjalin baik dengan Stake holder terkait. - Persiapan sembari menunggu juknis Epdeskel dari pusat																			
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																									

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
												I	II	III	IV													
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase tersusunnya profil kependudukan sesuai standar	%	0				50.094.500																		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIIL
		2.12.05.1.01	Penyediaan Profil Kependudukan																									
		2.12.05.1.01.0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta Kebutuhan yang lain							50.094.500																		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIIL
3	Meningkatnya Tatakelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah	2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI program penunjang rusan Pemerintah Daerah	nilai	0				10.899.311.037	85,95										85,95							DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIIL
		2.13.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan																									
Rata-rata capaian kinerja (%)										17.752.216.917																		nan
Predikat Kinerja																												SR SR
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:						- Koordinasi dan komunikasi serta komunikasi yang terjalin baik dengan Stake holder terkait. - SDM yang tanggap dan mampu beradaptasi dengan cepat - Sarana dan prasarana, dan media komunikasi dan informasi yang mendukung																						
Faktor penghambat pencapaian kinerja:						- Penyesuaian dengan regulasi keuangan yang baru - Belum ada juknis Epdeskel dari pusat																						
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):						- Koordinasi dan komunikasi serta komunikasi yang terjalin baik dengan Stake holder terkait. - Persiapan sembari menunggu juknis Epdeskel dari pusat																						
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																												

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						K	Rp		K	Rp	K	Rp						K
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13/8x100	15 = 7 + 13	16 = 15 / 6 x 100%	17		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			<b>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>															
		2.13.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				18.040.000										DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
		2.13.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				8.428.000										DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
		<b>2.13.01.1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>															
		2.13.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				8.231.795.148										DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
Rata-rata capaian kinerja (%)							17.752.216.917										nan	
Predikat Kinerja													SR	SR			SR	SR
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:					- Koordinasi dan komunikasi serta komunikasi yang terjalin baik dengan Stake holder terkait. - SDM yang tanggap dan mampu beradaptasi dengan cepat - Sarana dan prasarana, dan media komunikasi dan informasi yang mendukung													
Faktor penghambat pencapaian kinerja:					- Penyesuaian dengan regulasi keuangan yang baru - Belum ada juknis Epdeskel dari pusat													
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):					- Koordinasi dan komunikasi serta komunikasi yang terjalin baik dengan Stake holder terkait. - Persiapan sembari menunggu juknis Epdeskel dari pusat													
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																		

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab								
								I	II	III	IV													
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10	11	12	13	14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		2.13.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				10.465.000																DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
		2.13.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				9.561.400																DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
		<b>2.13.01.1.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>																					
		2.13.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				15.354.600																DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
		<b>2.13.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>																					
Rata-rata capaian kinerja (%)							17.752.216.917																nan	
Predikat Kinerja																							SR SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:					- Koordinasi dan komunikasi serta komunikasi yang terjalin baik dengan Stake holder terkait. - SDM yang tanggap dan mampu beradaptasi dengan cepat - Sarana dan prasarana, dan media komunikasi dan informasi yang mendukung																			
Faktor penghambat pencapaian kinerja:					- Penyesuaian dengan regulasi keuangan yang baru - Belum ada juknis Epdeskel dari pusat																			
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):					- Koordinasi dan komunikasi serta komunikasi yang terjalin baik dengan Stake holder terkait. - Persiapan sembari menunggu juknis Epdeskel dari pusat																			
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																								

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab											
								I	II	III	IV																
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		2.13.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				7.404.200																				DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		2.13.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				58.994.200																				DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		2.13.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				23.531.000																				DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		2.13.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				5.424.000																				DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Rata-rata capaian kinerja (%)							17.752.216.917																				nan
Predikat Kinerja																											SR SR
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:					- Koordinasi dan komunikasi serta komunikasi yang terjalin baik dengan Stake holder terkait. - SDM yang tanggap dan mampu beradaptasi dengan cepat - Sarana dan prasarana, dan media komunikasi dan informasi yang mendukung																						
Faktor penghambat pencapaian kinerja:					- Penyesuaian dengan regulasi keuangan yang baru - Belum ada juknis Epdeskel dari pusat																						
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):					- Koordinasi dan komunikasi serta komunikasi yang terjalin baik dengan Stake holder terkait. - Persiapan sembari menunggu juknis Epdeskel dari pusat																						
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																											

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab											
								I	II	III	IV																
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		2.13.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				500.591.000																				DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		<b>2.13.01.1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>																								
		2.13.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				615.505.889																				DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		2.13.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				97.330.000																				DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		<b>2.13.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan</b>																								
Rata-rata capaian kinerja (%)							17.752.216.917																				nan
Predikat Kinerja																											SR SR
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:					- Koordinasi dan komunikasi serta komunikasi yang terjalin baik dengan Stake holder terkait. - SDM yang tanggap dan mampu beradaptasi dengan cepat - Sarana dan prasarana, dan media komunikasi dan informasi yang mendukung																						
Faktor penghambat pencapaian kinerja:					- Penyesuaian dengan regulasi keuangan yang baru - Belum ada juknis Epdeskel dari pusat																						
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):					- Koordinasi dan komunikasi serta komunikasi yang terjalin baik dengan Stake holder terkait. - Persiapan sembari menunggu juknis Epdeskel dari pusat																						
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																											

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
								I	II	III	IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10	11	12	13	14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			<b>Pemerintahan Daerah</b>																				
		2.13.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							352.785.400													DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		2.13.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							479.904.000													DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		<b>2.13.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>																				
		2.13.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							36.232.000													DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Rata-rata capaian kinerja (%)										17.752.216.917													nan
Predikat Kinerja																							SR SR
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:					- Koordinasi dan komunikasi serta komunikasi yang terjalin baik dengan Stake holder terkait. - SDM yang tanggap dan mampu beradaptasi dengan cepat - Sarana dan prasarana, dan media komunikasi dan informasi yang mendukung																		
Faktor penghambat pencapaian kinerja:					- Penyesuaian dengan regulasi keuangan yang baru - Belum ada juknis Epdeskel dari pusat																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):					- Koordinasi dan komunikasi serta komunikasi yang terjalin baik dengan Stake holder terkait. - Persiapan sembari menunggu juknis Epdeskel dari pusat																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																							

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab									
								I	II	III	IV														
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10	11	12	13	14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		2.13.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				211.548.400																	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
		2.13.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				16.750.000																	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
		2.13.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				88.570.800																	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
		2.13.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				111.096.000																	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
Rata-rata capaian kinerja (%)							17.752.216.917																	nan	
Predikat Kinerja																								SR SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:					- Koordinasi dan komunikasi serta komunikasi yang terjalin baik dengan Stake holder terkait. - SDM yang tanggap dan mampu beradaptasi dengan cepat - Sarana dan prasarana, dan media komunikasi dan informasi yang mendukung																				
Faktor penghambat pencapaian kinerja:					- Penyesuaian dengan regulasi keuangan yang baru - Belum ada juknis Epdeskel dari pusat																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):					- Koordinasi dan komunikasi serta komunikasi yang terjalin baik dengan Stake holder terkait. - Persiapan sembari menunggu juknis Epdeskel dari pusat																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																									

Disusun  
Yogyakarta, 2 Mei 2025  
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Kalurahan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dievaluasi  
Yogyakarta, 2 Mei 2025  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah

KANGJENG PANGERAN HARYA YUDANEGARA, S.E., M.Si., Ph.D.  
NIP. 198110262002031001

NI MADE DWIPANTI INDRAYANTI, S.T., M.T.  
NIP. 197010181998032007

**EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUNGAN PROVINSI  
RENJA PERANGKAT DAERAH INSPEKTORAT PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERIODE PELAKSANAAN : 2025**

Indikator dan target kinerja SKPD yang mengacu pada sasaran RKPd:

Target Realisasi

- |   |                                                        |    |       |
|---|--------------------------------------------------------|----|-------|
| 1 | Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan | 92 | 90,88 |
| 2 | Nilai Kapabilitas APIP                                 | 3  | 3,47  |
| 3 | Kategori Reformasi Birokrasi Inspektorat DIY           | 2  | 1     |

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp		K	Rp
						9	10		11	12	13	14 = 13/8x100	15 = 7 + 13	16 = 15 / 6 x 100%	17										
1	Meningkatnya kualitas hasil pengawasan internal	6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase pengawasan yang sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) bidang Pemerintahan, Sosial Budaya, Perekonomian serta Sarana dan Prasarana Aparatur	%	0	39.828.946.000	100	5.672.914.958	6.801.135.500	20	809.743.103						20	809.743.103	11,91	60	6.482.658.061	16,28	INSPEKTORAT	
		6.01.02.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah, Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah, Reviu Laporan Kinerja, Reviu Laporan Keuangan, Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota, Kerjasama Pengawasan Internal, Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	%	100	35.025.708.000	100	4.586.584.814	5.882.442.900		702.643.103							702.643.103	11,94	50	5.289.227.917	50,00	15,10	INSPEKTORAT
		6.01.02.1.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	laporan	80	2.449.694.200	16	301.650.600	424.767.000		298.356.377						298.356.377	70,24	16	600.006.977	20,00	24,49	INSPEKTORAT	
		6.01.02.1.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	laporan	870	21.540.988.000	174	2.827.970.000	3.735.695.900											174	2.827.970.000	20,00	13,13	INSPEKTORAT
		6.01.02.1.01.0003	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	laporan	565	5.232.871.700	113	856.665.556	935.018.750		200.684.650						200.684.650	21,46	113	1.057.350.206	20,00	20,21	INSPEKTORAT	
		6.01.02.1.01.04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	laporan	190	2.475.577.000	38	204.681.396	216.164.600		202.702.076						202.702.076	93,77	38	407.383.472	20,00	16,46	INSPEKTORAT	
		6.01.02.1.01.05	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	laporan	105	2.187.474.600	21	370.074.982	544.691.150										21	370.074.982	20,00	16,92	INSPEKTORAT	
		6.01.02.1.01.06	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Kesepakatan	10	962.342.500	1	17.119.400	17.730.000										1	17.119.400	10,00	1,78	INSPEKTORAT	
Rata-rata capaian kinerja (%)							175.171.930.697		24.525.239.718	28.626.849.844		2.618.374.408						2.618.374.408	9,15		27.143.614.126	41,63	15,50		
Predikat Kinerja																		SR	SR				SR	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																									
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																									

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
					6	7	7	8		8	9	10	11			12	13	14 = 13/8x100	15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		
					K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp		K	Rp	K
		6.01.02.1.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Dokumen	10	176.760.000	2	8.422.880	8.375.500	900.000					900.000	10,75	2	9.322.880	20,00	5,27	INSPEKTORAT	
		<b>6.01.02.1.02</b>	<b>Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu</b>	<b>Terlaksananya Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah, Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>4.803.238.000</b>	<b>100</b>	<b>1.086.330.144</b>	<b>918.692.600</b>	<b>107.100.000</b>					<b>107.100.000</b>	<b>11,66</b>	<b>50</b>	<b>1.193.430.144</b>	<b>50,00</b>	<b>24,85</b>	<b>INSPEKTORAT</b>	
		6.01.02.1.02.01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	laporan	20	229.552.400	2	16.821.893	16.818.600								2	16.821.893	10,00	7,33	INSPEKTORAT	
		6.01.02.1.02.02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Laporan	490	4.573.685.600	125	1.069.508.251	901.874.000	107.100.000					107.100.000	11,88	125	1.176.608.251	25,51	25,73	INSPEKTORAT	
<b>2</b>	<b>Terwujudnya Pembinaan dan Pengawasan yang baik dengan mengoptimalkan fungsi quality assurance dan consulting</b>	<b>6.01.03</b>	<b>PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI</b>	<b>Persentase kepatuhan pelaporan gratifikasi, whistle blowing system, dan benturan kepentingan</b>	<b>%</b>	<b>0</b>	<b>6.311.243.100</b>	<b>100</b>	<b>384.461.314</b>	<b>326.955.150</b>	<b>100</b>	<b>14.730.000</b>				<b>100</b>	<b>14.730.000</b>	<b>4,51</b>	<b>100</b>	<b>399.191.314</b>		<b>6,33</b>	<b>INSPEKTORAT</b>
		<b>6.01.03.1.01</b>	<b>Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan</b>	<b>Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan, Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>877.640.500</b>	<b>100</b>	<b>24.200.010</b>	<b>27.272.900</b>								<b>50</b>	<b>24.200.010</b>	<b>50,00</b>	<b>2,76</b>	<b>INSPEKTORAT</b>	
		6.01.03.1.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	rekomendasi	5	253.705.000	1	319.125	325.000								1	319.125	20,00	0,13	INSPEKTORAT	
		6.01.03.1.01.02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	rekomendasi	10	623.935.500	2	23.880.885	26.947.900								2	23.880.885	20,00	3,83	INSPEKTORAT	
		<b>6.01.03.1.02</b>	<b>Pendampingan dan Asistensi</b>	<b>Terlaksananya Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah, Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Pendampingan, Asistensi</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>5.433.602.600</b>	<b>100</b>	<b>360.261.304</b>	<b>299.682.250</b>	<b>14.730.000</b>					<b>14.730.000</b>	<b>4,92</b>	<b>50</b>	<b>374.991.304</b>	<b>50,00</b>	<b>6,90</b>	<b>INSPEKTORAT</b>	
Rata-rata capaian kinerja (%)							175.171.930.697		24.525.239.718	28.626.849.844		2.618.374.408				2.618.374.408	9,15		27.143.614.126	41,63	15,50		
Predikat Kinerja																SR	SR					SR	SR
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																							
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																							

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						K	Rp		K	Rp	K	Rp			K	Rp			K	Rp	K	Rp	
						6			7		8				I	II			III	IV	13	15 = 7 + 13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13/8x100	15 = 7 + 13	16 = 15 / 6 x 100%	17							
				<i>dan Verifikasi Penegakan Integritas</i>																			
		6.01.03.1.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	perangkat daerah	37	40.129.000	37	1.631.475	2.400.000	180.000					180.000	7,50	37	1.811.475	100,00	4,51	INSPEKTORAT	
		6.01.03.1.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	perangkat daerah	37	236.825.900	37	2.527.650	2.400.000								37	2.527.650	100,00	1,07	INSPEKTORAT	
		6.01.03.1.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	kegiatan	4	4.281.939.700	4	354.758.179	292.182.250	14.550.000					14.550.000	4,98	4	369.308.179	100,00	8,62	INSPEKTORAT	
		6.01.03.1.02.04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	perangkat daerah	37	874.708.000	37	1.344.000	2.700.000								37	1.344.000	100,00	0,15	INSPEKTORAT	
3	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Perangkat Daerah	0.00.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Angka	0	129.031.741.597	92,96	18.467.863.446	21.498.759.194	82,07	1.793.901.305				82,07	1.793.901.305	8,34	175,03	20.261.764.751		15,70	INSPEKTORAT
		0.00.01.1.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah, Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, serta Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	%	100	237.811.800	100	6.769.855	6.909.400	3.452.150					3.452.150	49,96	50	10.222.005	50,00	4,30	INSPEKTORAT	
		0.00.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	16	98.847.800	3	5.368.900	3.667.000	2.612.000					2.612.000	71,23	3	7.980.900	18,75	8,07	INSPEKTORAT	
		0.00.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	dokumen	20	77.642.900	4	255.300	1.960.000								4	255.300	20,00	0,33	INSPEKTORAT	
		0.00.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	laporan	10	61.321.100	8	1.145.655	1.282.400	840.150					840.150	65,51	8	1.985.805	80,00	3,24	INSPEKTORAT	
		0.00.01.1.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Terlaksananya Penyediaan gaji dan tunjangan, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/</b>	%	100	92.603.777.437	100	14.834.941.810	17.601.122.994	1.512.401.427					1.512.401.427	8,59	50	16.347.343.237	50,00	17,65	INSPEKTORAT	
Rata-rata capaian kinerja (%)							175.171.930.697		24.525.239.718	28.626.849.844	2.618.374.408					2.618.374.408	9,15		27.143.614.126	41,63	15,50		
Predikat Kinerja																SR	SR				SR	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																							
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																							

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					6	7	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13/8x100	15 = 7 + 13	16 = 15 / 6 x 100%								
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
				<b>Semesteran SKPD, Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</b>																				
		0.00.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	90	92.315.617.637	81	14.791.580.032	17.588.787.594	1.509.669.150					1.509.669.150	8,58	81	16.301.249.182	90,00	17,66	INSPEKTORAT		
		0.00.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	dokumen	60	232.509.000	12	40.319.598	9.318.000	1.715.759					1.715.759	18,41	12	42.035.357	20,00	18,08	INSPEKTORAT		
		0.00.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	laporan	90	55.650.800	18	3.042.180	3.017.400	1.016.518					1.016.518	33,69	18	4.058.698	20,00	7,29	INSPEKTORAT		
		<b>0.00.01.1.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Terlaksananya penatausahaan barang milik daerah pada SKPD</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>152.975.100</b>	<b>100</b>	<b>14.299.500</b>	<b>14.299.400</b>	<b>2.200.000</b>					<b>2.200.000</b>	<b>15,39</b>	<b>50</b>	<b>16.499.500</b>	<b>50,00</b>	<b>10,79</b>	<b>INSPEKTORAT</b>		
		0.00.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	laporan	30	152.975.100	6	14.299.500	14.299.400	2.200.000					2.200.000	15,39	6	16.499.500	20,00	10,79	INSPEKTORAT		
		<b>0.00.01.1.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai; Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>3.167.596.600</b>	<b>100</b>	<b>216.499.632</b>	<b>427.859.200</b>	<b>8.253.084</b>					<b>8.253.084</b>	<b>1,93</b>	<b>50</b>	<b>224.752.716</b>	<b>50,00</b>	<b>7,10</b>	<b>INSPEKTORAT</b>		
		0.00.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	10	296.527.800	2	638.250	650.000								2	638.250	20,00	0,22	INSPEKTORAT		
		0.00.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	orang	60	2.871.068.800	99	215.861.382	427.209.200	8.253.084					8.253.084	1,93	99	224.114.466	165,00	7,81	INSPEKTORAT		
		<b>0.00.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan peralatan rumah tangga, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>4.212.491.800</b>	<b>100</b>	<b>416.150.044</b>	<b>708.576.000</b>	<b>629.820</b>					<b>629.820</b>	<b>0,09</b>	<b>50</b>	<b>416.779.864</b>	<b>50,00</b>	<b>9,89</b>	<b>INSPEKTORAT</b>		
Rata-rata capaian kinerja (%)							175.171.930.697		24.525.239.718	28.626.849.844	2.618.374.408					2.618.374.408	9,15		27.143.614.126	41,63	15,50			
Predikat Kinerja																SR	SR					SR	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																								
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																								

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6	7	7	8	8	9	10	11	12	13	14 = 13/8x100	15 = 7 + 13	16 = 15 / 6 x 100%						
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
				<b>Peraturan Perundang-undangan, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD serta Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</b>																			
		0.00.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	60	147.554.500	1	1.143.966	1.260.000					629.820	49,99	1	1.773.786	1,67	1,20	INSPEKTORAT		
		0.00.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	60	404.969.300	5	13.593.171	13.678.000							5	13.593.171	8,33	3,36	INSPEKTORAT		
		0.00.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	60	391.127.500	3	28.873.764	38.241.000							3	28.873.764	5,00	7,38	INSPEKTORAT		
		0.00.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	paket	60	120.797.500	1	3.994.000	7.548.000							1	3.994.000	1,67	3,31	INSPEKTORAT		
		0.00.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	48	108.059.000	0		0												INSPEKTORAT	
		0.00.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	60	2.527.284.000	12	279.123.543	557.849.000							12	279.123.543	20,00	11,04	INSPEKTORAT		
		0.00.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	dokumen	1	512.700.000	1	89.421.600	90.000.000							1	89.421.600	100,00	17,44	INSPEKTORAT		
		<b>0.00.01.1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Pengadaan Mebel, Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>13.190.238.700</b>	<b>100</b>	<b>376.387.640</b>	<b>14.800.000</b>							<b>50</b>	<b>376.387.640</b>	<b>50,00</b>	<b>2,85</b>	<b>INSPEKTORAT</b>		
		0.00.01.1.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	unit	0	0		0	0												INSPEKTORAT	
Rata-rata capaian kinerja (%)							175.171.930.697		24.525.239.718	28.626.849.844					2.618.374.408	9,15		27.143.614.126	41,63	15,50			
Predikat Kinerja															SR	SR					SR	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																							
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																							

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp			K	Rp
						6	7		8	9	10	11	12	13	14 = 13/8x100	15 = 7 + 13			16 = 15 / 6 x 100%							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13/8x100	15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17								
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
		0.00.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	unit	15	5.822.000.000			0												INSPEKTORAT				
		0.00.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	paket	2	56.300.200			0												INSPEKTORAT				
		0.00.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	563	7.258.691.800	43	376.387.640	14.800.000								43	376.387.640	7,64	5,19	INSPEKTORAT				
		0.00.01.1.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	1	53.246.700			0												INSPEKTORAT				
		<b>0.00.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>8.824.828.300</b>	<b>100</b>	<b>1.440.264.385</b>	<b>1.748.817.600</b>	<b>240.839.224</b>						<b>240.839.224</b>	<b>13,77</b>	<b>50</b>	<b>1.681.103.609</b>	<b>50,00</b>	<b>19,05</b>	<b>INSPEKTORAT</b>			
		0.00.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	60	35.513.000	12	2.432.500	2.440.000	616.500						616.500	25,27	12	3.049.000	20,00	8,59	INSPEKTORAT			
		0.00.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	60	2.395.119.300	12	275.921.885	344.339.600	49.881.519						49.881.519	14,49	12	325.803.404	20,00	13,60	INSPEKTORAT			
		0.00.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	laporan	60	317.800.000			29.160.000	4.800.000						4.800.000	16,46		4.800.000		1,51	INSPEKTORAT			
		0.00.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	60	6.076.396.000	12	1.161.910.000	1.372.878.000	185.541.205						185.541.205	13,51	12	1.347.451.205	20,00	22,18	INSPEKTORAT			
		<b>0.00.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Pemeliharaan Mebel, Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya serta Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>6.642.021.860</b>	<b>100</b>	<b>1.162.550.580</b>	<b>976.374.600</b>	<b>26.125.600</b>						<b>26.125.600</b>	<b>2,68</b>	<b>50</b>	<b>1.188.676.180</b>	<b>50,00</b>	<b>17,90</b>	<b>INSPEKTORAT</b>			
Rata-rata capaian kinerja (%)							175.171.930.697		24.525.239.718	28.626.849.844	2.618.374.408						2.618.374.408	9,15		27.143.614.126	41,63	15,50				
Predikat Kinerja																	SR	SR				SR	SR			
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																										
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																										
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																										
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																										

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
						K	Rp		K	Rp	K	Rp	I		II				III		IV				K	Rp	K	Rp	K	Rp
													K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13/8x100	15 = 7 + 13	16 = 15 / 6 x 100%	17														
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								
		0.00.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	unit	1	182.800.000	1	34.916.500			37.376.000												INSPEKTORAT						
		0.00.01.1.09.010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	1	1.520.000.000	2	242.682.630			186.334.150												INSPEKTORAT						
		0.00.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	22	1.956.761.800	16	386.387.700			355.779.600			16.193.600									INSPEKTORAT						
		0.00.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	70	2.137.665.560	113	304.978.750			254.534.850			9.932.000									INSPEKTORAT						
		0.00.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	1	844.794.500	1	193.585.000			142.350.000												INSPEKTORAT						
Rata-rata capaian kinerja (%)							175.171.930.697		24.525.239.718			28.626.849.844			2.618.374.408															
Predikat Kinerja																														
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																														
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																														
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																														
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																														

Disusun  
Yogyakarta, 2 Mei 2025  
Inspektur

Dievaluasi  
Yogyakarta, 2 Mei 2025  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah

MUHAMMAD SETIADI, S.Pt., M.Acc.  
NIP. 196710041992031005

NI MADE DWIPANTI INDRAYANTI, S.T., M.T.  
NIP. 197010181998032007

**EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUNGAN PROVINSI  
RENJA PERANGKAT DAERAH PANIRADYA KAISTIMEWAN PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERIODE PELAKSANAAN : 2025**

Indikator dan target kinerja SKPD yang mengacu pada sasaran RKPD:

Target Realisasi

1	Persentase lembaga pengampu keistimewaan dengan capaian kinerja yang berkualitas baik	90.2
2	Kategori Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	3
3	Persentase lembaga pengampu keistimewaan dengan capaian kinerja yang berkualitas baik	90.2 99.53
4	Kategori Reformasi Birokrasi Paniradya Kaistimewaan DIY	3 93.99

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab														
								I	II	III	IV																			
1	2	3	4	5	6		7		8		9				10 11		12 13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17					
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	Meningkatnya kapasitas pengelolaan urusan Keistimewaan	001	Program Penyelenggaraan Urusan Keistimewaan dan Ketatalaksanaan	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi	persen	91,67		86															nan	43		46,91		PANIRADYA KAISTIMEWAN		
2	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Perangkat Daerah																													
3	Meningkatnya kapasitas pengelolaan Urusan Keistimewaan	4.01.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi	%	91,67	116.680.445.000	100	20.572.514.030	23.187.444.000	100													100	20.572.514.030	109,09	17,63	PANIRADYA KAISTIMEWAN		
		4.01.10.5.03	Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara	Terlaksananya Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara dan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara	%	100	6.621.498.000	100	1.519.878.471	1.330.380.000															50	1.519.878.471	50,00	22,95	PANIRADYA KAISTIMEWAN	
		4.01.10.5.03.01	Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara	Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara yang Disusun	dokumen	30	4.093.458.000	8	785.901.221	820.380.000															8	785.901.221	26,67	19,20	PANIRADYA KAISTIMEWAN	
Rata-rata capaian kinerja (%)							157.493.551.480		28.759.976.674	31.278.812.463																28.759.976.674	36,71	18,26		
Predikat Kinerja																														
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:					1. Koordinasi dan sinergi yang baik dengan stakeholder terkait 2. Koordinasi dan kerjasama yang baik di internal Paniradya 3. SDM yang berkomitmen tinggi pada tugas 4. Sarana dan prasarana yang memadai																									
Faktor penghambat pencapaian kinerja:					1. Terdapat dinamika kebijakan di Pusat sehingga mempengaruhi pelaksanaan dana keistimewaan tahun 2025 2. Beberapa aktivitas kegiatan ditunda setelah lebaran 3. Alur perencanaan semakin kompleks sebagai contoh adanya keharusan reviu dari inspektorat pada setiap tahapan perencanaan.																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):					1. Mengutamakan program-program prioritas yang bersifat urgent dan wajib sebagai tindaklanjut dari adanya kebijakan efisiensi 2. Meningkatkan pemantauan atas pelaksanaan kegiatan agar dapat selesai sesuai dengan rencana 3. Meningkatkan koordinasi dan sinergi pada tahap perencanaan agar dapat diselesaikann sesuai dengan tata kala																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																														

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					K	Rp			K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp		K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13/8x100	15 = 7 + 13	16 = 15 / 6 x 100%	17					
		4.01.10.5.03.02	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara	laporan	21	2.528.040.000	6	733.977.250	510.000.000						6	733.977.250	28,57	29,03	PANIRADYA KAISTIMEWAN	
		<b>4.01.10.5.04</b>	<b>Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Kebudayaan</b>	<b>Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kebudayaan dan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Keistimewaan Urusan Kebudayaan</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>8.092.214.000</b>	<b>100</b>	<b>1.216.503.500</b>	<b>1.644.135.000</b>						<b>50</b>	<b>1.216.503.500</b>	<b>50,00</b>	<b>15,03</b>	<b>PANIRADYA KAISTIMEWAN</b>	
		4.01.10.5.04.01	Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kebudayaan	dokumen	25	4.509.159.000	5	570.078.400	907.500.000						5	570.078.400	20,00	12,64	PANIRADYA KAISTIMEWAN	
		4.01.10.5.04.02	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	laporan	21	3.583.055.000		646.425.100	736.635.000							646.425.100		18,04	PANIRADYA KAISTIMEWAN	
		<b>4.01.10.5.05</b>	<b>Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Pertanahan dan Tata Ruang</b>	<b>Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan dan Tata Ruang dan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Pertanahan dan Tata Ruang</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>12.620.455.000</b>	<b>100</b>	<b>2.685.926.270</b>	<b>2.480.500.000</b>						<b>50</b>	<b>2.685.926.270</b>	<b>50,00</b>	<b>21,28</b>	<b>PANIRADYA KAISTIMEWAN</b>	
		4.01.10.5.05.01	Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan	dokumen	35	3.663.060.000	9	676.973.123	726.000.000						9	676.973.123	25,71	18,48	PANIRADYA KAISTIMEWAN	
		4.01.10.5.05.02	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Pertanahan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Pertanahan	laporan	27	2.452.040.000	6	431.326.590	484.000.000						6	431.326.590	22,22	17,59	PANIRADYA KAISTIMEWAN	
		4.01.10.5.05.03	Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan	dokumen	33	3.903.315.000	8	568.240.746	786.500.000						8	568.240.746	24,24	14,56	PANIRADYA KAISTIMEWAN	
Rata-rata capaian kinerja (%)							157.493.551.480		28.759.976.674	31.278.812.463						28.759.976.674		36,71	18,26		
Predikat Kinerja														SR	SR				SR	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:						1. Koordinasi dan sinergi yang baik dengan stakeholder terkait 2. Koordinasi dan kerjasama yang baik di internal Paniradya 3. SDM yang berkomitmen tinggi pada tugas 4. Sarana dan prasarana yang memadai															
Faktor penghambat pencapaian kinerja:						1. Terdapat dinamika kebijakan di Pusat sehingga mempengaruhi pelaksanaan dana keistimewaan tahun 2025 2. Beberapa aktivitas kegiatan ditunda setelah lebaran 3. Alur perencanaan semakin kompleks sebagai contoh adanya keharusan reviu dari inspektorat pada setiap tahapan perencanaan.															
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):						1. Mengutamakan program-program prioritas yang bersifat urgent dan wajib sebagai tindaklanjut dari adanya kebijakan efisiensi 2. Meningkatkan pemantauan atas pelaksanaan kegiatan agar dapat selesai sesuai dengan rencana 3. Meningkatkan koordinasi dan sinergi pada tahap perencanaan agar dapat diselesaikan sesuai dengan tata kala															
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																					

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
					K	Rp			K	Rp	K	Rp				K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14 = 13/8x100	15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17						
			Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang	Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang																					
		4.01.10.5.05.04	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Tata Ruang	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Tata Ruang	laporan	26	2.602.040.000	1.009.385.811	484.000.000										1.009.385.811	38,79	PANIRADYA KAISTIMEWAN				
		<b>4.01.10.5.06</b>	<b>Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan</b>	<b>Terlaksananya Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan dan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan se DIY</b>	%	<b>100</b>	<b>27.004.962.000</b>	<b>100</b>	<b>2.662.019.194</b>	<b>5.441.370.000</b>									<b>50</b>	<b>2.662.019.194</b>	<b>50,00</b>	<b>9,86</b>	<b>PANIRADYA KAISTIMEWAN</b>		
		4.01.10.5.06.01	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun	dokumen	74	12.892.977.000	19	1.243.861.954	2.597.870.000									19	1.243.861.954	25,68	9,65	PANIRADYA KAISTIMEWAN		
		4.01.10.5.06.02	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan se-DIY	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan se-DIY	laporan	96	14.111.985.000	1.418.157.240	2.843.500.000											1.418.157.240		10,05	PANIRADYA KAISTIMEWAN		
		<b>4.01.10.5.07</b>	<b>Sarana dan Prasarana Keistimewaan</b>	<b>Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Pelaksana Urusan Keistimewaan</b>	%	<b>100</b>	<b>16.557.814.000</b>	<b>100</b>	<b>3.204.458.678</b>	<b>3.156.769.000</b>										<b>50</b>	<b>3.204.458.678</b>	<b>50,00</b>	<b>19,35</b>	<b>PANIRADYA KAISTIMEWAN</b>	
		4.01.10.5.07.01	Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Pelaksana Urusan Kelembagaan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Pelaksana Urusan Keistimewaan yang Disediakan	unit	26	16.557.814.000	3.204.458.678	3.156.769.000											3.204.458.678		19,35	PANIRADYA KAISTIMEWAN		
		<b>4.01.10.5.08</b>	<b>Peningkatan Pelayanan Parampara Praja</b>	<b>Terlaksananya Penyusunan Rekomendasi Urusan Keistimewaan</b>	%	<b>100</b>	<b>6.350.454.000</b>	<b>100</b>	<b>709.543.000</b>	<b>1.293.490.000</b>										<b>50</b>	<b>709.543.000</b>	<b>50,00</b>	<b>11,17</b>	<b>PANIRADYA KAISTIMEWAN</b>	
		4.01.10.5.08.01	Penyusunan Rekomendasi Urusan Keistimewaan	Jumlah Rekomendasi Urusan Keistimewaan yang Diterbitkan	rekomendasi	57	6.350.454.000	6	709.543.000	1.293.490.000									6	709.543.000	10,53	11,17	PANIRADYA KAISTIMEWAN		
		<b>4.01.10.5.09</b>	<b>Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Keistimewaan</b>	<b>Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan Pelaksana Keistimewaan</b>	%	<b>100</b>	<b>39.433.048.000</b>	<b>100</b>	<b>8.574.184.917</b>	<b>7.840.800.000</b>										<b>50</b>	<b>8.574.184.917</b>	<b>50,00</b>	<b>21,74</b>	<b>PANIRADYA KAISTIMEWAN</b>	
		4.01.10.5.09.01	Pembinaan Kelembagaan Pelaksana Keistimewaan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Kelembagaan Pelaksana Keistimewaan	dokumen	20	39.433.048.000	4	8.574.184.917	7.840.800.000									4	8.574.184.917	20,00	21,74	PANIRADYA KAISTIMEWAN		
Rata-rata capaian kinerja (%)							157.493.551.480		28.759.976.674	31.278.812.463										28.759.976.674	36,71	18,26			
Predikat Kinerja																								SR	SR
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:					1. Koordinasi dan sinergi yang baik dengan stakeholder terkait 2. Koordinasi dan kerjasama yang baik di internal Paniradya 3. SDM yang berkomitmen tinggi pada tugas 4. Sarana dan prasarana yang memadai																				
Faktor penghambat pencapaian kinerja:					1. Terdapat dinamika kebijakan di Pusat sehingga mempengaruhi pelaksanaan dana keistimewaan tahun 2025 2. Beberapa aktivitas kegiatan ditunda setelah lebaran 3. Alur perencanaan semakin kompleks sebagai contoh adanya keharusan revlu dari inspektorat pada setiap tahapan perencanaan.																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):					1. Mengutamakan program-program prioritas yang bersifat urgent dan wajib sebagai tindaklanjut dari adanya kebijakan efisiensi 2. Meningkatkan pemantauan atas pelaksanaan kegiatan agar dapat selesai sesuai dengan rencana 3. Meningkatkan koordinasi dan sinergi pada tahap perencanaan agar dapat diselesaikann sesuai dengan tata kala																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																									

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)				Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp		K	Rp
1	2	3	4	5	6		7		8		9	10 11		12 13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17	
4	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Perangkat Daerah	0.00.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	89,79	40.813.106.480	91,21	8.187.462.644	8.091.368.463	91,21					91,21		91,21	8.187.462.644	101,58	20,06	PANIRADYA KAISTIMEWAN	
		0.00.01.1.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, dan Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	%	100	84.645.800	100	11.920.662	16.854.000							50	11.920.662	50,00	14,08	PANIRADYA KAISTIMEWAN		
		0.00.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	30	37.110.000	6	4.454.650	7.400.000							6	4.454.650	20,00	12,00	PANIRADYA KAISTIMEWAN		
		0.00.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	dokumen	20	30.471.600	4	4.487.400	6.054.000							4	4.487.400	20,00	14,73	PANIRADYA KAISTIMEWAN		
		0.00.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	laporan	79	17.064.200	19	2.978.612	3.400.000							19	2.978.612	24,05	17,46	PANIRADYA KAISTIMEWAN		
		0.00.01.1.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, dan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</b>	%	100	35.715.684.480	100	7.571.523.328	7.049.474.463							50	7.571.523.328	50,00	21,20	PANIRADYA KAISTIMEWAN		
		0.00.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				35.503.240.680		7.529.615.346	7.007.674.463								7.529.615.346		21,21	PANIRADYA KAISTIMEWAN		
		0.00.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	dokumen	5	185.742.000	1	36.596.200	36.420.000							1	36.596.200	20,00	19,70	PANIRADYA KAISTIMEWAN		
Rata-rata capaian kinerja (%)							157.493.551.480		28.759.976.674	31.278.812.463								28.759.976.674	36,71	18,26			
Predikat Kinerja																					SR	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:						1. Koordinasi dan sinergi yang baik dengan stakeholder terkait 2. Koordinasi dan kerjasama yang baik di internal Paniradya 3. SDM yang berkomitmen tinggi pada tugas 4. Sarana dan prasarana yang memadai																	
Faktor penghambat pencapaian kinerja:						1. Terdapat dinamika kebijakan di Pusat sehingga mempengaruhi pelaksanaan dana keistimewaan tahun 2025 2. Beberapa aktivitas kegiatan ditunda setelah lebaran 3. Alur perencanaan semakin kompleks sebagai contoh adanya keharusan reviu dari inspektorat pada setiap tahapan perencanaan.																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):						1. Mengutamakan program-program prioritas yang bersifat urgent dan wajib sebagai tindak lanjut dari adanya kebijakan efisiensi 2. Meningkatkan pemantauan atas pelaksanaan kegiatan agar dapat selesai sesuai dengan rencana 3. Meningkatkan koordinasi dan sinergi pada tahap perencanaan agar dapat diselesaikan sesuai dengan tata kala																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																							

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
					K	Rp			K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6		7	8	9				10	11	12	13	14 = 13/8x100	15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		0.00.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	laporan	5	6.981.800	1	1.010.900	1.380.000									1	1.010.900	20,00	14,48	PANIRADYA KAISTIMEWAN	
		0.00.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	laporan	90	19.720.000	13	4.300.882	4.000.000									13	4.300.882	14,44	21,81	PANIRADYA KAISTIMEWAN	
		<b>0.00.01.1.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Terlaksananya penatausahaan barang milik daerah pada SKPD</b>	%	<b>100</b>	<b>58.140.000</b>	<b>100</b>	<b>11.528.450</b>	<b>11.400.000</b>									<b>50</b>	<b>11.528.450</b>	<b>50,00</b>	<b>19,83</b>	<b>PANIRADYA KAISTIMEWAN</b>	
		0.00.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	laporan	5	58.140.000	1	11.528.450	11.400.000									1	11.528.450	20,00	19,83	PANIRADYA KAISTIMEWAN	
		<b>0.00.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang Undangan, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi, dan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</b>	%	<b>100</b>	<b>1.062.125.200</b>	<b>100</b>	<b>89.018.604</b>	<b>228.940.000</b>									<b>50</b>	<b>89.018.604</b>	<b>50,00</b>	<b>8,38</b>	<b>PANIRADYA KAISTIMEWAN</b>	
		0.00.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	5	17.402.100	1	2.073.556	3.440.000									1	2.073.556	20,00	11,92	PANIRADYA KAISTIMEWAN	
		0.00.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	5	72.266.800	1	9.944.330	14.100.000									1	9.944.330	20,00	13,76	PANIRADYA KAISTIMEWAN	
		0.00.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket	6	56.122.100	1	5.696.118	11.600.000									1	5.696.118	16,67	10,15	PANIRADYA KAISTIMEWAN	
		0.00.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	paket	39	92.526.000	3	14.270.100	18.500.000									3	14.270.100	7,69	15,42	PANIRADYA KAISTIMEWAN	
Rata-rata capaian kinerja (%)							157.493.551.480		28.759.976.674	31.278.812.463										28.759.976.674	36,71	18,26		
Predikat Kinerja																							SR	SR
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:						1. Koordinasi dan sinergi yang baik dengan stakeholder terkait 2. Koordinasi dan kerjasama yang baik di internal Paniradya 3. SDM yang berkomitmen tinggi pada tugas 4. Sarana dan prasarana yang memadai																		
Faktor penghambat pencapaian kinerja:						1. Terdapat dinamika kebijakan di Pusat sehingga mempengaruhi pelaksanaan dana keistimewaan tahun 2025 2. Beberapa aktivitas kegiatan ditunda setelah lebaran 3. Alur perencanaan semakin kompleks sebagai contoh adanya keharusan reviu dari inspektorat pada setiap tahapan perencanaan.																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):						1. Mengutamakan program-program prioritas yang bersifat urgent dan wajib sebagai tindak lanjut dari adanya kebijakan efisiensi 2. Meningkatkan pemantauan atas pelaksanaan kegiatan agar dapat selesai sesuai dengan rencana 3. Meningkatkan koordinasi dan sinergi pada tahap perencanaan agar dapat diselesaikan sesuai dengan tata kala																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																								



No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
								I	II	III	IV										
1	2	3	4	5	6		7	8	9		10	11	12	13	14 = 13/8x100	15 = 7 + 13	16 = 15 / 6 x 100%	17			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
			Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dibayarkan Pajak dan Perizinannya																	
		0.00.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	36	43.095.000	6	6.450.000	8.500.000						6	6.450.000	16,67	14,97	PANIRADYA KAISTIMEWAN	
		002	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	skor	89,79										nan				PANIRADYA KAISTIMEWAN	
Rata-rata capaian kinerja (%)						157.493.551.480		28.759.976.674	31.278.812.463								28.759.976.674	36,71	18,26		
Predikat Kinerja																					SR SR
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:					1. Koordinasi dan sinergi yang baik dengan stakeholder terkait 2. Koordinasi dan kerjasama yang baik di internal Paniradya 3. SDM yang berkomitmen tinggi pada tugas 4. Sarana dan prasarana yang memadai																
Faktor penghambat pencapaian kinerja:					1. Terdapat dinamika kebijakan di Pusat sehingga mempengaruhi pelaksanaan dana keistimewaan tahun 2025 2. Beberapa aktivitas kegiatan ditunda setelah lebaran 3. Alur perencanaan semakin kompleks sebagai contoh adanya keharusan revidi dari inspektorat pada setiap tahapan perencanaan.																
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):					1. Mengutamakan program-program prioritas yang bersifat urgent dan wajib sebagai tindak lanjut dari adanya kebijakan efisiensi 2. Meningkatkan pemantauan atas pelaksanaan kegiatan agar dapat selesai sesuai dengan rencana 3. Meningkatkan koordinasi dan sinergi pada tahap perencanaan agar dapat diselesaikann sesuai dengan tata kala																
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																					

Disusun  
Yogyakarta, 2 Mei 2025  
Paniradya Pati

Dievaluasi  
Yogyakarta, 2 Mei 2025  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah

ARIS EKO NUGROHO, S.P., M.Si.  
NIP. 197211011997031005

NI MADE DWIPANTI INDRAYANTI, S.T., M.T.  
NIP. 197010181998032007

**EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUNGAN PROVINSI  
RENJA PERANGKAT DAERAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERIODE PELAKSANAAN : 2025**

Indikator dan target kinerja SKPD yang mengacu pada sasaran RKPD:

Target Realisasi

1 Kategori RB Perangkat Daerah

85.5 85.07

2 Persentase kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas

75 87.13

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Tahun Lalu (2024)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								I		II		III		IV				14 = 13/8x100		15 = 7 + 13				16 = 15 / 6 x 100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp			K	Rp
1	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Perangkat Daerah	0.00.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	87,67	86.291.496.710	91,81	14.932.452.105	18.141.941.092	84,57							84,57			88,19	14.932.452.105	100,59	17,30	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		0.00.01.1.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	%	100	780.865.000	100	31.595.200	181.000.000											50	31.595.200	50,00	4,05	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		0.00.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	25	294.060.000	9	15.040.000	66.000.000											9	15.040.000	36,00	5,11	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		0.00.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	dokumen	8	371.280.000			88.000.000															SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		0.00.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	laporan	4	115.525.000	3	16.555.200	27.000.000											3	16.555.200	75,00	14,33	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		0.00.01.1.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	%	100	70.794.971.460	100	11.673.787.288	14.161.141.092											50	11.673.787.288	50,00	16,49	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		0.00.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang	97	70.410.275.460	89	11.604.407.288	14.082.055.092											89	11.604.407.288	91,75	16,48	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		0.00.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	dokumen	60	226.800.000	12	45.860.000	45.360.000											12	45.860.000	20,00	20,22	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		0.00.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	laporan	4	62.655.000	1	9.350.000	14.850.000											1	9.350.000	25,00	14,92	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)	Target Kinerja dan Anggaran Daerah Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
								I	II	III	IV				14 = 13/8x100	15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		0.00.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	laporan	90	95.241.000	18	14.170.000	18.876.000							18	14.170.000	20,00	14,88	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		<b>0.00.01.1.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>66.000.000</b>	<b>100</b>	<b>13.700.000</b>	<b>13.200.000</b>							<b>50</b>	<b>13.700.000</b>	<b>50,00</b>	<b>20,76</b>	<b>SATUAN POLISI PAMONG PRAJA</b>
		0.00.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	laporan	5	66.000.000	2	13.700.000	13.200.000							2	13.700.000	40,00	20,76	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		<b>0.00.01.1.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>749.345.000</b>			<b>184.500.000</b>											<b>SATUAN POLISI PAMONG PRAJA</b>
		0.00.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	paket	388	540.000.000			135.000.000											SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		0.00.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	dokumen	8	46.910.000			11.000.000											SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		0.00.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	orang	140	162.435.000			38.500.000											SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		<b>0.00.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>2.138.236.200</b>	<b>100</b>	<b>215.150.360</b>	<b>458.700.000</b>							<b>50</b>	<b>215.150.360</b>	<b>50,00</b>	<b>10,06</b>	<b>SATUAN POLISI PAMONG PRAJA</b>
		0.00.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	40	46.410.000			11.000.000											SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		0.00.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	114	150.676.200	6	11.969.200	29.700.000							6	11.969.200	5,26	7,94	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		0.00.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket	12	69.615.000			16.500.000											SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)	Target Kinerja dan Anggaran Daerah Perangkat Daerah (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					K	Rp		K	Rp	K	Rp	I		II		III			IV		K	Rp	K	Rp		K	Rp
												K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10	11	12	13	14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17				
		0.00.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	paket	52	69.615.000	13	4.029.800																	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
		0.00.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	dokumen	80	46.410.000																			SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
		0.00.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	60	1.361.025.000	12	199.151.360													12	199.151.360	20,00	14,63	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
		0.00.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	dokumen	4	394.485.000																			SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
		<b>0.00.01.1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>3.840.000.000</b>																			<b>SATUAN POLISI PAMONG PRAJA</b>	
		0.00.01.1.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	unit	1	650.000.000																			SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
		0.00.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	unit	5	1.250.000.000																			SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
		0.00.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	paket	12	290.000.000																			SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
		0.00.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	180	575.000.000																			SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
		0.00.01.1.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	2	500.000.000																			SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
		0.00.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	40	575.000.000																			SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
						K Rp			K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp
						1	2		3	4	5	6			7	8	9	10		11	12	13	14 = 13/8x100	15 = 7 + 13	16 = 15 / 6 x 100%
		<b>0.00.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>2.920.428.550</b>	<b>100</b>	<b>2.488.331.904</b>	<b>573.100.000</b>						<b>50</b>	<b>2.488.331.904</b>	<b>50,00</b>	<b>85,20</b>	<b>SATUAN POLISI PAMONG PRAJA</b>					
		0.00.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	4	51.051.000			12.100.000											SATUAN POLISI PAMONG PRAJA				
		0.00.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	16	870.522.550	12	125.363.904	170.500.000						12	125.363.904	75,00	14,40	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA					
		0.00.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	10	1.998.855.000	12	2.362.968.000	390.500.000						12	2.362.968.000	120,00	118,22	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA					
		<b>0.00.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>5.001.650.500</b>	<b>100</b>	<b>509.887.353</b>	<b>1.040.300.000</b>						<b>50</b>	<b>509.887.353</b>	<b>50,00</b>	<b>10,19</b>	<b>SATUAN POLISI PAMONG PRAJA</b>					
		0.00.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	unit	1	267.215.000	1	64.207.500	55.000.000						1	64.207.500	100,00	24,03	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA					
		0.00.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	50	3.221.692.500	57	365.428.700	660.000.000						57	365.428.700	114,00	11,34	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA					
		0.00.01.1.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	unit	24	13.923.000			3.300.000											SATUAN POLISI PAMONG PRAJA				
		0.00.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	99	98.820.000	16	6.000.000	22.000.000						16	6.000.000	16,16	6,07	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA					
		0.00.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	13	1.400.000.000	1	74.251.153	300.000.000						1	74.251.153	7,69	5,30	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA					
<b>2</b>	<b>Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas</b>	<b>1.05.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Persentase gangguan trantibum yang tertangani</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>41.683.747.500</b>	<b>100</b>	<b>565.394.200</b>	<b>8.740.732.000</b>	<b>100</b>					<b>100</b>	<b>565.394.200</b>	<b>100,00</b>	<b>1,36</b>	<b>SATUAN POLISI PAMONG PRAJA</b>					

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab								
								I		II					III			IV		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%	
								K	Rp	K	Rp				K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
				Persentase pelanggaran Perda/Perkada yang tertangani	%	100		100							100			100			100,00		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
				Persentase Satuan Pelindungan Masyarakat yang aktif	%	70		55,47							61,41			61,41			58,44		83,49	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
		1.05.02.1.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	%	100	36.938.074.600	100	27.154.500	7.805.732.000										50	27.154.500	50,00	0,07	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
		1.05.02.1.01.01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	kasus	1.655	26.629.090.000			5.836.732.000														SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
		1.05.02.1.01.02	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	kasus	672	1.160.250.000			275.000.000														SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
		1.05.02.1.01.03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	dokumen	16	46.000.000			11.000.000														SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
		1.05.02.1.01.05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	orang	18.195	8.235.515.600			1.485.000.000														SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
		1.05.02.1.01.06	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	dokumen	37	604.515.000	5	27.154.500	137.500.000										5	27.154.500	13,51	4,49	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab										
					6				7		8			9		10		11			12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%	
					K	Rp			K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		1.05.02.1.01.07	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	unit	20	139.230.000		33.000.000														SATUAN POLISI PAMONG PRAJA							
		1.05.02.1.01.08	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	dokumen	12	69.615.000		16.500.000														SATUAN POLISI PAMONG PRAJA							
		1.05.02.1.01.09	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	laporan	5	53.859.000		11.000.000														SATUAN POLISI PAMONG PRAJA							
		<b>1.05.02.1.02</b>	<b>Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur</b>	<b>Terlaksananya Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>3.817.472.900</b>	<b>100</b>	<b>538.239.700</b>	<b>715.000.000</b>								<b>50</b>	<b>538.239.700</b>	<b>50,00</b>	<b>14,10</b>	<b>SATUAN POLISI PAMONG PRAJA</b>								
		1.05.02.1.02.01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	laporan	208	1.669.184.000	17	198.696.400	275.000.000								17	198.696.400	8,17	11,90	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA								
		1.05.02.1.02.03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sesuai SOP	laporan	532	2.148.288.900	174	339.543.300	440.000.000								174	339.543.300	32,71	15,81	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA								
		<b>1.05.02.1.03</b>	<b>Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi</b>	<b>Terlaksananya Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>928.200.000</b>	<b>100</b>	<b>220.000.000</b>									<b>50</b>		<b>50,00</b>		<b>SATUAN POLISI PAMONG PRAJA</b>								
		1.05.02.1.03.01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda	laporan	24	232.050.000	0	55.000.000														SATUAN POLISI PAMONG PRAJA							
		1.05.02.1.03.02	Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah, Dukungan Pelaksanaan Sidang Ditempat, Penguatan Sekretariat Bersama PPNS	Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda, Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan di Tempat dan Sekretariat PPNS di Satpol PP secara Operasional Sudah Aktif	dokumen	240	696.150.000		165.000.000														SATUAN POLISI PAMONG PRAJA							
		<b>2.10.11</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA</b>	<b>Persentase pelanggaran Perda dan Perda Pemanfaatan Tanah Kasultanan, Tanah</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>590.000.000</b>	<b>100</b>	<b>519.771.250</b>	<b>120.000.000</b>	<b>100</b>							<b>100</b>	<b>519.771.250</b>	<b>100,00</b>	<b>88,10</b>	<b>SATUAN POLISI PAMONG PRAJA</b>								

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
								I	II	III	IV									
								14 = 13x100	15 = 7 + 13	16 = 15 / 6 x 100%										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13x100	15 = 7 + 13	16 = 15 / 6 x 100%	17				
					K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp					
			<b>URUSAN PERTANAHAN</b>	<b>Kadipaten, dan Tanah Desa yang tertangani</b>																
		<b>2.10.11.5.01</b>	<b>Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten</b>	<b>Terlaksananya Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten</b>	%	<b>100</b>	<b>590.000.000</b>	<b>100</b>	<b>519.771.250</b>	<b>120.000.000</b>				<b>50</b>	<b>519.771.250</b>	<b>50,00</b>	<b>88,10</b>	<b>SATUAN POLISI PAMONG PRAJA</b>		
		2.10.11.5.01.01	Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Jumlah Dokumen Penatausahaan Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten Dalam Rangka Pengembangan Kebudayaan, Kepentingan Sosial, Dan Kesejahteraan Masyarakat	dokumen	1	100.000.000			0								SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
		2.10.11.5.01.04	Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa	Jumlah Dokumen Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa	dokumen	4	490.000.000	1	519.771.250	120.000.000				1	519.771.250	25,00	106,08	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
		<b>2.22.08</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN</b>	<b>Persentase Omah Jaga Warga yang aktif</b>	%	<b>100</b>	<b>117.506.115.500</b>	<b>70,09</b>	<b>12.586.046.292</b>	<b>18.500.000.000</b>	<b>80,36</b>			<b>80,36</b>		<b>75,225</b>	<b>12.586.046.292</b>	<b>75,23</b>	<b>10,71</b>	<b>SATUAN POLISI PAMONG PRAJA</b>
				<b>Persentase cakupan petugas Satlinmas Rescue Istimewa</b>	%	<b>100</b>		<b>100</b>		<b>100</b>				<b>100</b>		<b>100</b>		<b>100,00</b>	<b>SATUAN POLISI PAMONG PRAJA</b>	
		<b>2.22.08.5.06</b>	<b>Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan</b>	<b>Tersedianya Sarana dan Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan</b>	%	<b>100</b>	<b>16.500.000.000</b>	<b>100</b>	<b>662.574.600</b>	<b>4.000.000.000</b>				<b>50</b>	<b>662.574.600</b>	<b>50,00</b>	<b>4,02</b>	<b>SATUAN POLISI PAMONG PRAJA</b>		
		2.22.08.5.06.01	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya	Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya	jenis	34	16.500.000.000	44	662.574.600	4.000.000.000				44	662.574.600	129,41	4,02	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
		<b>2.22.08.5.09</b>	<b>Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya</b>	<b>Terlaksananya Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya</b>	%	<b>100</b>	<b>101.006.115.500</b>	<b>100</b>	<b>11.923.471.692</b>	<b>14.500.000.000</b>				<b>50</b>	<b>11.923.471.692</b>	<b>50,00</b>	<b>11,80</b>	<b>SATUAN POLISI PAMONG PRAJA</b>		
		2.22.08.5.09.16	Pembinaan Jagawarga	Jumlah Orang Mengikuti Pembinaan Jagawarga yang Dibina	orang	48.000	62.842.358.500	8.050	3.325.813.834	5.000.000.000				8.050	3.325.813.834	16,77	5,29	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
		2.22.08.5.09.21	Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	Jumlah Dokumen Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	dokumen	48	38.163.757.000	12	8.597.657.858	9.500.000.000				12	8.597.657.858	25,00	22,53	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
								I	II	III	IV										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13/8x100	15 = 7 + 13	16 = 15 / 6 x 100%	17					
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
Rata-rata capaian kinerja (%)						246.071.359.710		28.603.663.847		45.502.673.092									28.603.663.847	32,87	11,62
Predikat Kinerja																				SR	SR
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:					1. Adanya mekanisme kerja yang baik di internal Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Istimewa Yogyakarta. 2. Adanya upaya peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Istimewa Yogyakarta. 3. Adanya upaya peningkatan sarana dan prasarana penunjang ketugasan Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Istimewa Yogyakarta. 4. Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) penegakan Perda / Perkada yang telah disusun oleh Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Istimewa Yogyakarta. 5. Adanya produk - produk peraturan perundang - undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Istimewa Yogyakarta. 6. Terjalinnnya koordinasi yang baik dengan mitra kerja dan instansi lainnya dalam mendukung kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Istimewa Yogyakarta. 7. Dukungan anggaran dalam rangka peningkatan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Istimewa Yogyakarta, baik APBD regular maupun dana keistimewaan.																
Faktor penghambat pencapaian kinerja:					1. Kuantitas personil anggota Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Istimewa Yogyakarta masih kurang, ditambah dengan banyaknya personil yang purna tugas dan tidak adanya penambahan personil. 2. Kualitas sumber daya manusia yang belum memadai, salah satunya anggota Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Istimewa Yogyakarta yang bersertifikasi/ memiliki keahlian khusus seperti intelijen, PPNS, pengadaan barang / jasa dan informasi teknologi. 3. Keterbatasan sarana dan prasarana penunjang ketugasan. 4. Peningkatan angka kejahatan dan kebutuhan masyarakat.																
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):					1. Peningkatan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (gelandangan, pengemis dan anak jalanan, penambangan liar, minuman beralkohol, kejahatan jalanan / klithih, reklame, dll). 2. Peningkatan sistem komunikasi integral untuk seluruh anggota Jaga Warga dan Satlinmas dalam mendukung penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. 3. Peningkatan peran aktif Satlinmas dan Jagawarga dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum pada scope wilayah yang lebih sempit (Kalurahan dan Padukuhan) yang ada di DIY. 4. Pengendalian gejala sosial masyarakat. 5. Peningkatan pemahaman dan kesadaran serta peran aktif masyarakat dalam memelihara ketenteraman dan ketertiban umum melalui kegiatan sosialisasi, baik luring maupun daring. 6. Peningkatan peran aktif Satlinmas Rescue Istimewa dalam melakukan pengamanan di objek wisata. 7. Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Istimewa Yogyakarta.																
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																					

Disusun  
Yogyakarta, 2 Mei 2025  
Kepala

Dievaluasi  
Yogyakarta, 2 Mei 2025  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah

Nama Kepala  
NIP. NIP

NI MADE DWIPANTI INDRAYANTI, S.T., M.T.  
NIP. 197010181998032007

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUNGAN PROVINSI  
RENJA PERANGKAT DAERAH SEKRETARIAT DPRD PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERIODE PELAKSANAAN : 2025

Indikator dan target kinerja SKPD yang mengacu pada sasaran RKPd: Target Realisasi

1. Persentase Agenda DPRD yang terselesaikan tepat waktu	96	25
2. Kategori Reformasi Birokrasi Sekretariat DPRD DIY	0	2

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
					K	Rp			K	Rp	K	Rp						K	Rp	I
1	2	3	4	5	6		7	8		9	10	11	12	13	14 = 13/8x100	15 = 7 + 13	16 = 15 / 6 x 100%	17		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	Terasilabilitasnya Kinerja DPRD	4.01.10	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN</b>	Persentase Bahan Acara Pengawasan Urusan Keistimewaan, selesai sesuai dengan program kerja DPRD DIY	persen	0	95,5								nan	47,75		<b>SEKRETARIAT DPRD</b>		
		4.01.10.5.03	<i>Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara</i>																	
		4.01.11	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN TATA CARA PENGISIAN JABATAN KEDUDUKAN, TUGAS, DAN WEWENANG GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DIY</b>	Ketepatan Waktu Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY	%		4.785.950.000								nan			<b>SEKRETARIAT DPRD</b>		
		4.01.11.5.01	<i>Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY</i>	<i>Terlaksananya Penyelenggaraan Penetapan dan Pengusulan Gubernur dan Wakil Gubernur</i>	%	0	4.785.950.000								nan			<b>SEKRETARIAT DPRD</b>		
		4.01.11.5.01.02	Penyelenggaraan Penetapan dan Pengusulan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Penetapan dan Pengusulan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY	laporan	3	4.785.950.000		0									SEKRETARIAT DPRD		
		4.02.02	<b>PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD</b>	Persentase Bahan Acara yang selesai sesuai dengan program kerja DPRD DIY (Bagian Persidangan)	%	0	428.632.934.100	128,57	50.758.078.189	93.426.268.000	17,16			17,16		72,865	50.758.078.189	11,84	<b>SEKRETARIAT DPRD</b>	
				Persentase Bahan Acara yang selesai sesuai dengan	%	0		128,57			17,16			17,16		72,865			<b>SEKRETARIAT DPRD</b>	
Rata-rata capaian kinerja (%)							1.178.084.388.320		113.084.181.672	20.346.930.279.500							113.084.181.672	85,09	9,60	
Predikat Kinerja														SR	SR				T	SR
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																				
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																				

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab													
								I	II	III	IV				14 = 13/8x100	15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%	17											
1	2	3	4	5	6		7	8		9		10		11		12		13		14		15		16		17				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				program kerja DPRD DIY (Bagian PPHP)																										
				Persentase Bahan Acara yang selesai sesuai dengan program kerja DPRD DIY (bagian Penyusunan Program dan Keuangan)	%	0	128,57							17,16															SEKRETARIAT DPRD	
				Persentase Bahan Acara yang selesai sesuai dengan program kerja DPRD DIY (humas dan Protokol)	%	0	128,57							17,16															SEKRETARIAT DPRD	
				Persentase Bahan Acara yang selesai sesuai dengan program kerja DPRD DIY (Bagian Umum)	%	0	99,06							17,16															SEKRETARIAT DPRD	
		4.02.02.1.01	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Terlaksananya Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah, Pembahasan Rancangan Perda, Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan dan Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik, Penyusunan Tata Tertib DPRD	%	9.700	77.768.311.940	94,96	10.268.550.481																				SEKRETARIAT DPRD	
		4.02.02.1.01.01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	dokumen	50	15.412.525.760	15	1.339.459.467																				SEKRETARIAT DPRD	
		4.02.02.1.01.02	Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda	dokumen	72	39.963.493.460	10	5.197.874.421																				SEKRETARIAT DPRD	
		4.02.02.1.01.03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	dokumen	40	5.711.016.340	2	847.584.620																				SEKRETARIAT DPRD	
		4.02.02.1.01.04	Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	dokumen	790	16.681.276.380	158	2.883.631.973																				SEKRETARIAT DPRD	
Rata-rata capaian kinerja (%)							1.178.084.388.320		113.084.181.672																					
Predikat Kinerja																														
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																														
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																														
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																														
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																														

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					K	Rp			K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6		7	8	9		10	11		12	13	14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17	
		4.02.02.1.01.05	Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	orang	0	0		3.611.924.000														SEKRETARIAT DPRD
		<b>4.02.02.1.02</b>	<b>Pembahasan Kebijakan Anggaran</b>	<b>Terlaksananya Pembahasan KUA dan PPAS, Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS, Pembahasan APBD, Pembahasan Perubahan APBD, Pembahasan Laporan Semester, Pembahasan Pertanggung jawaban APBD</b>	<b>%</b>	<b>9.700</b>	<b>12.275.085.220</b>	<b>95,5</b>	<b>1.538.611.362</b>	<b>2.509.001.000</b>								<b>47,75</b>	<b>1.538.611.362</b>	<b>0,49</b>	<b>12,53</b>	<b>SEKRETARIAT DPRD</b>	
		4.02.02.1.02.01	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	dokumen	10	2.577.996.660	2	388.042.820	521.721.000								2	388.042.820	20,00	15,05	SEKRETARIAT DPRD	
		4.02.02.1.02.02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	dokumen	10	616.328.880	2	52.115.000	125.132.000								2	52.115.000	20,00	8,46	SEKRETARIAT DPRD	
		4.02.02.1.02.03	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	dokumen	5	3.237.574.040	1	239.483.036	675.309.000								1	239.483.036	20,00	7,40	SEKRETARIAT DPRD	
		4.02.02.1.02.04	Pembahasan Perubahan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD	dokumen	5	2.478.108.840	1	421.730.200	503.718.000								1	421.730.200	20,00	17,02	SEKRETARIAT DPRD	
		4.02.02.1.02.05	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	dokumen	5	255.445.080	1	18.280.000	51.988.000								1	18.280.000	20,00	7,16	SEKRETARIAT DPRD	
		4.02.02.1.02.06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	dokumen	5	3.109.631.720	1	418.960.306	631.133.000								1	418.960.306	20,00	13,47	SEKRETARIAT DPRD	
		<b>4.02.02.1.03</b>	<b>Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</b>	<b>Terlaksananya pengawasan urusan pemerintahan dan hukum, pengawasan urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur, Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat, dan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian</b>	<b>%</b>	<b>9.700</b>	<b>5.755.403.040</b>	<b>95,5</b>	<b>2.876.700.415</b>	<b>1.140.756.000</b>								<b>47,75</b>	<b>2.876.700.415</b>	<b>0,49</b>	<b>49,98</b>	<b>SEKRETARIAT DPRD</b>	
Rata-rata capaian kinerja (%)							1.178.084.388.320		113.084.181.672	20.346.930.279.500									113.084.181.672	85,09	9,60		
Predikat Kinerja															SR	SR					T	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																							
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																							

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)				Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp		K
1	2	3	4	5	6				7	8	9 10 11 12				13	14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
		4.02.02.1.03.01	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan dan Hukum	laporan	27	1.896.442.320	6	1.097.338.375	285.189.000							6	1.097.338.375	22,22	57,86	SEKRETARIAT DPRD	
		4.02.02.1.03.02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan dan Infrastruktur	laporan	24	1.286.320.240	5	539.870.040	285.189.000							5	539.870.040	20,83	41,97	SEKRETARIAT DPRD	
		4.02.02.1.03.03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	laporan	24	1.286.320.240	5	631.573.300	285.189.000							5	631.573.300	20,83	49,10	SEKRETARIAT DPRD	
		4.02.02.1.03.04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	laporan	24	1.286.320.240	5	607.918.700	285.189.000							5	607.918.700	20,83	47,26	SEKRETARIAT DPRD	
		<b>4.02.02.1.04</b>	<b>Peningkatan Kapasitas DPRD</b>	<b>Terlaksananya Orientasi DPRD, Pendalaman Tugas DPRD, Publikasi dan Dokumentasi Dewan, Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli, Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi, Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat</b>	<b>%</b>	<b>97</b>	<b>129.991.260.960</b>	<b>95,5</b>	<b>9.593.547.481</b>	<b>26.692.459.000</b>							<b>47,75</b>	<b>9.593.547.481</b>	<b>49,23</b>	<b>7,38</b>	<b>SEKRETARIAT DPRD</b>	
		4.02.02.1.04.01	Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	dokumen	1	800.000.000	1	975.168.390	0							1	975.168.390	100,00	121,90	SEKRETARIAT DPRD	
		4.02.02.1.04.02	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	dokumen	28	18.105.783.040	6	3.113.078.621	3.862.482.000							6	3.113.078.621	21,43	17,19	SEKRETARIAT DPRD	
		4.02.02.1.04.03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	dokumen	77	68.404.536.520	6		14.039.898.000							6		7,79		SEKRETARIAT DPRD	
		4.02.02.1.04.04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	orang	90	8.657.046.220	18	819.303.852	1.728.749.000							18	819.303.852	20,00	9,46	SEKRETARIAT DPRD	
		4.02.02.1.04.05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	orang	35	4.307.288.560	7	640.684.300	855.721.000							7	640.684.300	20,00	14,87	SEKRETARIAT DPRD	
		4.02.02.1.04.06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	dokumen	164	29.716.606.620	36	4.045.312.318	6.205.609.000							36	4.045.312.318	21,95	13,61	SEKRETARIAT DPRD	
Rata-rata capaian kinerja (%)							1.178.084.388.320		113.084.181.672	20.346.930.279.500								113.084.181.672	85,09	9,60		
Predikat Kinerja															SR	SR					T	SR
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																						
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																						
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																						
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																						



No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab																				
								I	II	III	IV																									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17									
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								
	urusan pemerintahan di Sekretariat DPRD DIY		PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Pemerintah Daerah (Bagian umum)																																
				Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Bagian penyusunan Program dan keuangan)	%	0	91,99																							SEKRETARIAT DPRD						
				Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Bagian Persidangan)	%	0	91,99																							SEKRETARIAT DPRD						
				Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Bagian Humas Protokol)	persen	0																								SEKRETARIAT DPRD						
		0.00.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100	662.567.320	100	91.608.400																					50	91.608.400	50,00	13,83	SEKRETARIAT DPRD		
		0.00.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	25	290.763.260	5	45.058.000																					5	45.058.000	20,00	15,50	SEKRETARIAT DPRD		
		0.00.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	dokumen	20	174.562.560	4	23.166.400																					4	23.166.400	20,00	13,27	SEKRETARIAT DPRD		
		0.00.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	laporan	15	197.241.500	5	23.384.000																					5	23.384.000	33,33	11,86	SEKRETARIAT DPRD		
		0.00.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan	%	100	57.709.793.415	100	8.860.245.720																						50	8.860.245.720	50,00	15,35	SEKRETARIAT DPRD	
Rata-rata capaian kinerja (%)							1.178.084.388.320		113.084.181.672																											
Predikat Kinerja																																				
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																																				
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																																				

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					K	Rp			K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp		K	Rp
				<b>Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD</b>																	
		0.00.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	470	56.996.856.835	80	8.718.906.520	11.572.563.000						80	8.718.906.520	17,02	15,30	SEKRETARIAT DPRD	
		0.00.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	dokumen	60	319.126.040	12	56.495.000	63.727.000						12	56.495.000	20,00	17,70	SEKRETARIAT DPRD	
		0.00.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	laporan	5	69.868.400	1	12.711.000	13.952.000						1	12.711.000	20,00	18,19	SEKRETARIAT DPRD	
		0.00.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	laporan	65	323.942.140	13	72.133.200	64.689.000						13	72.133.200	20,00	22,27	SEKRETARIAT DPRD	
		<b>0.00.01.1.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>141.462.160</b>	<b>100</b>	<b>14.905.000</b>	<b>29.404.000</b>						<b>50</b>	<b>14.905.000</b>	<b>50,00</b>	<b>10,54</b>	<b>SEKRETARIAT DPRD</b>	
		0.00.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	laporan	70	141.462.160	14	14.905.000	29.404.000						14	14.905.000	20,00	10,54	SEKRETARIAT DPRD	
		<b>0.00.01.1.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai serta Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>1.991.958.040</b>	<b>100</b>	<b>219.102.500</b>	<b>400.685.000</b>						<b>50</b>	<b>219.102.500</b>	<b>50,00</b>	<b>11,00</b>	<b>SEKRETARIAT DPRD</b>	
		0.00.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	dokumen	80	83.517.520	16	24.713.000	19.374.000						16	24.713.000	20,00	29,59	SEKRETARIAT DPRD	
		0.00.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	orang	110	1.908.440.520	25	194.389.500	381.311.000						25	194.389.500	22,73	10,19	SEKRETARIAT DPRD	
		<b>0.00.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>7.794.133.780</b>	<b>100</b>	<b>1.100.265.860</b>	<b>1.592.568.000</b>						<b>50</b>	<b>1.100.265.860</b>	<b>50,00</b>	<b>14,12</b>	<b>SEKRETARIAT DPRD</b>	
Rata-rata capaian kinerja (%)							1.178.084.388.320		113.084.181.672	20.346.930.279.500							113.084.181.672	85,09	9,60		
Predikat Kinerja																			T	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																					
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*:																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*:																					

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab								
								I	II	III	IV				13	14 = 13/8x100		15 = 7 + 13	16 = 15 / 6 x 100%	17					
1	2	3	4	5	6		7	8		9		10	11		12	13		14	15		16		17		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
				<b>Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, dan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</b>																					
		0.00.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	38	182.276.260	5	36.693.664	36.418.000										5	36.693.664	13,16	20,13	SEKRETARIAT DPRD	
		0.00.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	25	1.087.857.980	6	242.140.059	226.681.000										6	242.140.059	24,00	22,26	SEKRETARIAT DPRD	
		0.00.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket	24	66.520.580	3	188.930.128	10.623.000										3	188.930.128	12,50	284,02	SEKRETARIAT DPRD	
		0.00.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	paket	10	773.953.600	5	97.975.544	153.621.000										5	97.975.544	50,00	12,66	SEKRETARIAT DPRD	
		0.00.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	120	5.683.525.360	36	534.526.465	1.165.225.000										36	534.526.465	30,00	9,40	SEKRETARIAT DPRD	
		<b>0.00.01.1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dan Pengadaan Kendaraan Perorangan dinas Operasional atau Lapangan, Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan dan pengadaan mebel</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>375.833.889.744</b>	<b>100</b>	<b>681.427.672</b>	<b>19.743.697.355.500</b>										<b>50</b>	<b>681.427.672</b>	<b>50,00</b>	<b>0,18</b>	<b>SEKRETARIAT DPRD</b>	
		0.00.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	539	6.174.223.140	37	298.924.000	109.397.800.000										37	298.924.000	6,86	4,84	SEKRETARIAT DPRD	
		0.00.01.1.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	unit	1	369.602.273.604	1	375.703.672	19.634.299.555.500										1	375.703.672	100,00	0,10	SEKRETARIAT DPRD	
Rata-rata capaian kinerja (%)							1.178.084.388.320		113.084.181.672	20.346.930.279.500											113.084.181.672	85,09	9,60		
Predikat Kinerja																							T	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																									
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																									

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
								I	II	III	IV												
1	2	3	4	5	6		7	8		9	10	11	12	13	14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Lainnya	Disediakan																			
		0.00.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	6	57.393.000	1	6.800.000	0													
		<b>0.00.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</b>	%	<b>1</b>	<b>17.337.820.820</b>	<b>100</b>	<b>3.344.391.504</b>	<b>220.497.366.000</b>													
		0.00.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	300	6.264.597.180	60	1.047.022.020	1.248.166.000													
		0.00.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	300	11.073.223.640	48	2.297.369.484	219.249.200.000													
		<b>0.00.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, pemeliharaan mebel, Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</b>	%	<b>1</b>	<b>11.057.501.512</b>		<b>1.292.973.694</b>	<b>29.238.188.000</b>													
		0.00.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	unit	5	2.221.861.740	5	262.627.282	437.819.000													
Rata-rata capaian kinerja (%)							1.178.084.388.320		113.084.181.672	20.346.930.279.500													
Predikat Kinerja																							
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																							
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																							

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
								I	II	III	IV				14 = 13/8x100	15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%	17			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
		0.00.01.1.09.010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	1	64.880.000												SEKRETARIAT DPRD			
		0.00.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	29	3.477.199.580	28	489.801.562								28	489.801.562	96,55	14,09	SEKRETARIAT DPRD	
		0.00.01.1.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	unit	60	4.120.000	14	8.400.000								14	8.400.000	23,33	203,88	SEKRETARIAT DPRD	
		0.00.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	274	1.367.595.680	274	273.441.850								274	273.441.850	100,00	19,99	SEKRETARIAT DPRD	
		0.00.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	1	3.921.844.512	3	258.703.000								3	258.703.000	300,00	6,60	SEKRETARIAT DPRD	
		<b>0.00.01.1.15</b>	<b>Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</b>	<b>Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD, Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD, dan Pelaksanaan Medical Check Up DPRD</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>247.984.011.309</b>	<b>99,88</b>	<b>43.243.364.133</b>								<b>49,94</b>	<b>43.243.364.133</b>	<b>49,94</b>	<b>17,44</b>	<b>SEKRETARIAT DPRD</b>	
		0.00.01.1.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	orang/bulan	55	244.259.381.629	55	42.422.865.113								55	42.422.865.113	100,00	17,37	SEKRETARIAT DPRD	
		0.00.01.1.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	paket	275	2.232.752.460	495	608.559.900								495	608.559.900	180,00	27,26	SEKRETARIAT DPRD	
		0.00.01.1.15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	orang	55	1.491.877.220	0	211.939.120									211.939.120		14,21	SEKRETARIAT DPRD	
		<b>0.00.01.1.16</b>	<b>Layanan Administrasi DPRD</b>	<b>Terlaksananya Fasilitas Fraksi DPRD dan Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>24.152.366.120</b>	<b>100</b>	<b>3.477.819.000</b>								<b>50</b>	<b>3.477.819.000</b>	<b>50,00</b>	<b>14,40</b>	<b>SEKRETARIAT DPRD</b>	
		0.00.01.1.16.02	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	laporan	1.204	14.382.697.300	371	3.003.787.000								371	3.003.787.000	30,81	20,88	SEKRETARIAT DPRD	
		0.00.01.1.16.03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi	laporan	583	9.769.668.820	40	474.032.000								40	474.032.000	6,86	4,85	SEKRETARIAT DPRD	
Rata-rata capaian kinerja (%)							1.178.084.388.320		113.084.181.672									113.084.181.672	85,09	9,60		
Predikat Kinerja																				T	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																						
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																						
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																						
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																						

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								I	II	III	IV							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13/8x100	15 = 7 + 13	16 = 15 / 6 x 100%	17		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			DPRD	DPRD														
Rata-rata capaian kinerja (%)						1.178.084.388.320		113.084.181.672		20.346.930.279.500						113.084.181.672	85,09	9,60
Predikat Kinerja													SR	SR			T	SR
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																		
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																		

Disusun  
Yogyakarta, 2 Mei 2025  
Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Dievaluasi  
Yogyakarta, 2 Mei 2025  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah

YUDI ISMONO, S.Sos., M.Acc.  
NIP. 197107171996031004

NI MADE DWIPANTI INDRAYANTI, S.T., M.T.  
NIP. 197010181998032007

**EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUNGAN PROVINSI  
RENJA PERANGKAT DAERAH BIRO PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERIODE PELAKSANAAN : 2025**

Indikator dan target kinerja SKPD yang mengacu pada sasaran RKPD:

Target Realisasi

- 1. Persentase rumusan kebijakan menjadi kebijakan yang ditindaklanjuti dalam mendukung Program Pemda Pengembangan Sektor Unggulan 100
- 2. Kategori Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah 2

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
								I		II		III		IV													
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	Meningkatnya Kualitas Rumusan Bahan Kebijakan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase rumusan kebijakan yang menjadi kebijakan pengembangan desa mandiri budaya	%	0	100		755.393.500													50					BIRO PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
		2.22.08.5.09	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya																								
		2.22.08.5.09.0001	Pembinaan dan Pengembangan Desa Budaya						755.393.500																		BIRO PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
		4.01.06	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase rumusan kebijakan yang menjadi kebijakan yang ditindaklanjuti dalam perencanaan bidang perekonomian dan sumberdaya alam tahun n+1 dan n+2 (%)	%	0	100		639.350.500	10.798.600								10.798.600	1,69	50	10.798.600					BIRO PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab								
					K	Rp		K	Rp	K	Rp	I	II			III	IV			K	Rp	K	Rp				
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		<b>4.01.06.1.01</b>	<b>Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian</b>																								
		4.01.06.1.01.0001	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro						353.980.100		5.844.700							5.844.700		1,65			5.844.700				BIRO PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
		4.01.06.1.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro						131.605.000		3.435.000							3.435.000		2,61			3.435.000				BIRO PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
		<b>4.01.06.1.02</b>	<b>Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam</b>																								
		4.01.06.1.02.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan						151.507.900		1.518.900							1.518.900		1,00			1.518.900				BIRO PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
		<b>4.01.06.1.03</b>	<b>Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD</b>																								
		4.01.06.1.03.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha						2.257.500																		BIRO PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
<b>2</b>	<b>Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di</b>	<b>4.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>skor</b>	<b>0</b>	<b>90,81</b>		<b>255.747.750</b>		<b>58.422.151</b>							<b>58.422.151</b>		<b>22,84</b>	<b>90,81</b>	<b>58.422.151</b>				<b>BIRO PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM</b>	

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					K	Rp	K	Rp		K	Rp	I		II		III				IV		13				14 = 13/8x100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13/8x100	15 = 7 + 13	16 = 15 / 6 x 100%	17											
	<b>Perangkat Daerah</b>				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		<b>4.01.01.1.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>																								
		4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					5.940.000		4.557.000								4.557.000		76,72				4.557.000			BIRO PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
		4.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD					2.570.000																			BIRO PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
		4.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					3.920.800		2.620.800								2.620.800		66,84				2.620.800			BIRO PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
		<b>4.01.01.1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>																								
		4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					3.780.000																			BIRO PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
		4.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					1.853.000																			BIRO PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
		4.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD					3.422.000		674.000								674.000		19,70				674.000			BIRO PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K	Rp	K	Rp		K	Rp	I	II			III	IV	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13/8x100	15 = 7 + 13	16 = 15 / 6 x 100%	17				
		<b>4.01.01.1.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>																	
		4.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					7.800.000												BIRO PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
		<b>4.01.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>																	
		4.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					4.220.000	1.688.000				1.688.000	40,00		1.688.000			BIRO PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	
		4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					14.329.200	5.974.700				5.974.700	41,70		5.974.700			BIRO PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	
		4.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					6.617.200	2.717.200				2.717.200	41,06		2.717.200			BIRO PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	
		4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					11.720.000	3.145.000				3.145.000	26,83		3.145.000			BIRO PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	
		4.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan					2.868.000	478.000				478.000	16,67		478.000			BIRO PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	
		4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					56.060.000	2.250.000				2.250.000	4,01		2.250.000			BIRO PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	
		<b>4.01.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan</b>																	

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
					K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
			<b>Pemerintahan Daerah</b>																								
		4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						700.000	700.000								700.000	100,00		700.000					BIRO PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	
		4.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						3.900.000	2.866.451								2.866.451	73,50		2.866.451					BIRO PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	
		<b>4.01.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>																								
		4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						29.139.200	8.217.500								8.217.500	28,20		8.217.500					BIRO PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	
		4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						74.386.350	17.407.500								17.407.500	23,40		17.407.500					BIRO PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	
		4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						17.418.000	3.850.000								3.850.000	22,10		3.850.000					BIRO PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	
		4.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						5.104.000	1.276.000								1.276.000	25,00		1.276.000					BIRO PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					K	Rp		K	Rp	K	Rp	I	II			III	IV			K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6		7	8		9		10	11	12	13	14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17	
Rata-rata capaian kinerja (%)									1.650.491.750		69.220.751						69.220.751	4,19		69.220.751		inf	
Predikat Kinerja																SR	SR				SR	ST	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:					- Kerjasama TPID DIY dalam pelaksanaan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) - Komunikasi yang baik dengan Kemenko Bidang Perekonomian terkait koordinasi dan konsultasi dalam Penyusunan Laporan Kinerja TPID dan sebagai narasumber - Data-data program kerja OPD terkait untuk mendukung Penyusunan Laporan Kinerja TPID - Komunikasi yang baik oleh anggota TPID dalam penyusunan Peta Jalan Pengendalian Inflasi 2025-2027 - Gencarnya Operasi Pasar/Pasar Murah/Gerakan Pangan Murah ikut mendukung stabilnya harga dan pasokan di masyarakat - Fasilitasi BI dalam penyelenggaraan Konsinyering. - Terjalannya komunikasi dan koordinasi dengan OPD Pemda DIY maupun Kabupaten/Kota sehingga tersampainya informasi data terkini terkait isu strategis untuk sektor pariwisata - Keterlibatan dan partisipasi aktif Pemerintah Kabupaten dalam proses seleksi calon Desa/ Kalurahan Mandiri Budaya sehingga mendorong terjaminnya keberlanjutan program DMB di desa/kalurahan terpilih. - Adanya amanat pada Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI), yang menyampaikan bahwa pelaksanaan cara mencapai tujuan SNKI di tingkat daerah dilaksanakan oleh TPAKD. Percepatan akses keuangan ini juga didukung oleh implementasi program KUR - Besarnya harapan masyarakat dan pentingnya informasi (pinjaman formal, pinjaman online, investasi online, judi onlino, dan pasar modal) dan kecakapan akan akses keuangan digital di era digital, serta didukung banyaknya masyarakat yang terjerat masalah dalam hal tersebut - Koordinasi dan sinergi antar OPD dan instansi lainnya yang solid, serta adanya kolaborasi kegiatan yang berkelanjutan																		
Faktor penghambat pencapaian kinerja:					- Cuaca hujan yang masih menyebabkan komoditas hortikultura mengalami kenaikan harga - Ketegangan geopolitik negara Timur Tengah dan ketidakpastian global memberikan dinamika pada harga-harga komoditas pangan terutama yang impor - Peningkatan demand khususnya pada komoditas pangan sejalan dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG) - Penurunan produksi akibat alih fungsi lahan - Volatilitas harga aneka cabai dan aneka bawang akibat berakhirnya panen raya komoditas hortikultura dan komoditas bawang putih yang bergantung pada kuota impor. - Terbatasnya anggaran pengembangan website KURjogja, menyebabkan seringnya terjadi serangan pada website. - Kurang lengkapnya data bukti kegiatan yang dikirimkan oleh instansi terkait, menghambat proses penyusunan laporan - Penyesuaian kebijakan terkait penganggaran seperti penghematan, optimalisasi dan efisiensi berpengaruh terhadap timeline pelaksanaan kegiatan.																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):					- Melakukan koordinasi bersama TPID DIY - Bersama BI, mendiskusikan hasil inflasi pada bulan Maret 2025 yang baru Rilis pada April 2025 setelah libur Lebaran - Telah dilakukan pemantauan/evaluasi secara internal setiap bulannya, dan evaluasi triwulan bersama dengan bappeda, biro organisasi, paniradya, inspektorat. - Dilakukan koordinasi lebih lanjut bersama TPAKD dan instansi terkait, serta berkoordinasi kepada pihak ketiga (pemelihara Website) untuk back up data dan mengajukan sharing anggaran kepada OJK DIY - Penyesuaian pelaksanaan kegiatan dengan tetap mempertimbangkan tercapainya target kinerja sesuai dengan timeline yang telah disusun. - Mengoptimalkan koordinasi secara nonformal maupun koordinasi secara daring bersama dengan mitra OPD terkait.																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																							

Disusun  
Yogyakarta, 2 Mei 2025  
Kepala Biro Perekonomian dan SDA

Dievaluasi  
Yogyakarta, 2 Mei 2025  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah

ELING PRISWANTO SE., MM  
NIP. 197602232006041003

NI MADE DWIPANTI INDRAYANTI, S.T., M.T.  
NIP. 197010181998032007

**EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUNGAN PROVINSI  
RENJA PERANGKAT DAERAH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERIODE PELAKSANAAN : 2025**

Indikator dan target kinerja SKPD yang mengacu pada sasaran RKPD:

	Target	Realisasi
1 Nilai produksi perikanan budidaya dan tangkap (juta rupiah)	2305813	869767
2 Luas kawasan konservasi yang ditetapkan (Ha)	5822.92	
3 Kategori reformasi birokrasi OPD	2	2
4 Nilai produksi perikanan budidaya kelompok miskin	180	

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I	II	III	IV			13	14 = 13/8x100	15 = 7 + 13	16 = 15 / 6 x 100%			
1	Meningkatnya nilai produksi perikanan	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase desa maritim dalam tahap mandiri	%	45	170.931.251.258	38,23	7.004.086.028	36.653.547.510							19,115	7.004.086.028	42,48	4,10	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN			
				Persentase rata-rata peningkatan kapasitas pelaku usaha perikanan yang terfasilitasi	%	55		50									25		45,45		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN			
				Persentase peserta yang meningkat pemahaman budaya baharinya	%	100		40									20		20,00		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN			
				Persentase prasarana pelabuhan dibangun yang berfungsi dengan baik	%	100		100									50		50,00		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN			
		2.22.08.5.06	Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan (%)	%	100	47.128.804.000		1.573.365.900	14.000.000.000								1.573.365.900		3,34	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN			
		2.22.08.5.06.01	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya	Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya (unit)	Unit	9	47.128.804.000	4	1.573.365.900	14.000.000.000							4	1.573.365.900	44,44	3,34	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN			
		2.22.08.5.08	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	Terlaksananya Kegiatan Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya (tahun)	undefined	1	123.802.447.258	1	5.430.720.128	22.653.547.510							1	5.430.720.128	100,00	4,39	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN			
		2.22.08.5.08.05	Pengembangan Budaya Bahari	Jumlah Objek Budaya Bahari yang Dikembangkan	Objek	4	123.802.447.258	4	5.430.720.128	22.653.547.510							4	5.430.720.128	100,00	4,39	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN			
		3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi Perikanan Tangkap	ton	7.754	4.303.870.200	7.339	1.943.778.700	700.000.000	1.872					1.872	9.211	1.943.778.700	118,79	45,16	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN			
Rata-rata capaian kinerja (%)							401.082.648.242		52.704.722.981	83.039.095.848						4.589.700		4.589.700	0,01		52.709.312.681	81,18	13,14	
Predikat Kinerja																		SR	SR			T	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																								
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																								

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp		K	Rp		
					9	10	11	12		13	14 = 13/8x100	15 = 7 + 13	16 = 15 / 6 x 100%			17								
				Nilai survei kepuasan masyarakat penggunaan jasa/fasilitas pelabuhan (skor)	skor	83		81,85								81,85		98,61		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN				
		3.25.03.1.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Terfasilitasnya kegiatan pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut sampai dengan 12 mil (kabupaten)	undefined	3	1.300.000.000			350.000.000										DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN				
		3.25.03.1.01.01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Dokumen	1	200.000.000			50.000.000										DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN				
		3.25.03.1.01.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Unit	2	1.100.000.000			300.000.000										DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN				
		3.25.03.1.03	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Terfasilitasnya rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT (rekomendasi)	undefined	10	497.748.200	10	363.958.700	100.000.000						10	363.958.700	100,00	73,12	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN				
		3.25.03.1.03.02	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Rekomendasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap yang Diterbitkan	Rekomendasi	10	497.748.200	11	363.958.700	100.000.000						11	363.958.700	110,00	73,12	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN				
		3.25.03.1.06	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan (lokasi)	undefined	3	2.148.630.000	3	1.541.373.800	175.000.000						3	1.541.373.800	100,00	71,74	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN				
		3.25.03.1.06.02	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	Unit	2	1.798.630.000	2	1.488.483.800	100.000.000						2	1.488.483.800	100,00	82,76	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN				
		3.25.03.1.06.03	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	Layanan	12	350.000.000	12	52.890.000	75.000.000						12	52.890.000	100,00	15,11	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN				
		3.25.03.1.09	Pendaftaran Kapal Perikanan di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Terfasilitasnya kegiatan Pendaftaran Kapal Perikanan di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT (kapal)	undefined	2	357.492.000	2	38.446.200	75.000.000						2	38.446.200	100,00	10,75	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN				
		3.25.03.1.09.02	Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan	Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang	Rekomendasi	2	357.492.000	5	38.446.200	75.000.000						5	38.446.200	250,00	10,75	DINAS KELAUTAN				
Rata-rata capaian kinerja (%)							401.082.648.242		52.704.722.981	83.039.095.848						4.589.700		0,01		52.709.312.681	81,18	13,14		
Predikat Kinerja																								
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																								
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																								

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						K	Rp		K	Rp	K	Rp	I		II				III		IV			K	Rp	K	Rp
													K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13/8x100	15 = 7 + 13	16 = 15 / 6 x 100%	17											
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
			Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Diterbitkan																	DAN PERIKANAN						
		3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi Perikanan Budidaya (ton)	ton	98.200	48.624.885.500	97.494,5	11.607.821.196	10.194.400.000	30.745,3	4.589.700					30.745,3	4.589.700	0,05	128.239,8	11.612.410.896	130,59	23,88	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN			
				Persentase benih perikanan budidaya bersertifikat yang terdistribusi (%)	%	35,42		34,87												17,435		49,22	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN				
				Produksi perikanan budidaya di kelompok miskin (ton)	ton	9		9,9												9,9		110,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN				
		3.25.04.1.01	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Terkelolanya kawasan perikanan budidaya (kabupaten/kota)	undefined	5	1.032.290.100	5	219.551.181	294.400.000		4.589.700					4.589.700	1,56	5	224.140.881	100,00	21,71	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN				
		3.25.04.1.01.02	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan	Rekomendasi	2	1.032.290.100	10	219.551.181	294.400.000		4.589.700					4.589.700	1,56	10	224.140.881	500,00	21,71	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN				
		3.25.04.1.05	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Terkelolanya benih perikanan budidaya (kabupaten/kota)	undefined	5	950.000.000	5	39.992.000	200.000.000									5	39.992.000	100,00	4,21	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN				
		3.25.04.1.05.06	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan yang Teruji Sehat	Rekomendasi	50	950.000.000	25	39.992.000	200.000.000									25	39.992.000	50,00	4,21	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN				
		3.25.04.1.06	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	Terkelolanya kawasan perikanan budidaya (kabupaten/kota)	undefined	5	46.642.595.400	5	11.348.278.015	9.700.000.000									5	11.348.278.015	100,00	24,33	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN				
				Terkelolanya benih perikanan budidaya (kabupaten/kota)	undefined	5		5											5		100,00		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN				
		3.25.04.1.06.01	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak	Unit	7	16.353.758.000	7	5.941.771.078	3.300.000.000									7	5.941.771.078	100,00	36,33	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN				
Rata-rata capaian kinerja (%)							401.082.648.242		52.704.722.981	83.039.095.848		4.589.700					4.589.700	0,01		52.709.312.681	81,18	13,14					
Predikat Kinerja																	SR	SR				T	SR				
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																											
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																											

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab									
						6			7		8		9		10				11		12			13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota																												
		3.25.04.1.06.02	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Unit	60	30.288.837.400	187	5.406.506.937	6.400.000.000																		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN				
		3.25.05	<b>PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>	<b>Persentase Kepatuhan Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (%)</b>	%	82	2.014.426.700	88,31	300.088.075	410.000.000																		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN				
		3.25.05.1.01	<b>Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil</b>	<b>Terawasanya sumberdaya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 Mil</b>	Tahun	1	1.521.850.900	1	245.994.350	300.000.000																		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN				
		3.25.05.1.01.02	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	Dokumen	3	862.851.900	3	88.874.350	200.000.000																		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN				
		3.25.05.1.01.04	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang Terdaftar dan Aktif	Kelompok	33	658.999.000	5	157.120.000	100.000.000																		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN				
		3.25.05.1.02	<b>Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</b>	<b>Terawasanya sumberdaya perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya</b>	Tahun	1	492.575.800	1	54.093.725	110.000.000																		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN				
		3.25.05.1.02.01	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan di Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	Dokumen	20	252.652.500	10	24.279.475	60.000.000																		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN				
Rata-rata capaian kinerja (%)							401.082.648.242		52.704.722.981	83.039.095.848																						
Predikat Kinerja																																
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																																
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																																
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																																
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																																

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						K	Rp	K	Rp		K	Rp	I	II			III	IV	13	14 = 13/8x100		15 = 7 + 13	16 = 15 / 6 x 100%
						K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp		K	Rp
		3.25.05.1.02.03	Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Dokumen	20	239.923.300	10	29.814.250	50.000.000							10	29.814.250	50,00	12,43	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		
		<b>3.25.06</b>	<b>PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN</b>	<b>Tingkat Konsumsi Ikan Masyarakat (kg/kapita/tahun)</b>	<b>kg/kapita/tahun</b>	<b>35</b>	<b>34.192.668.400</b>	<b>35,83</b>	<b>6.987.268.934</b>	<b>6.875.000.000</b>							<b>35,83</b>	<b>6.987.268.934</b>	<b>102,37</b>	<b>20,43</b>	<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>		
		<b>3.25.06.1.01</b>	<b>Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</b>	<b>Terlaksananya kegiatan pembinaan standarisasi tata cara usaha, penerbitan rekomendasi perizinan dan pelaksanaan pendataan pada Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</b>	<b>Tahun</b>	<b>1</b>	<b>836.568.800</b>	<b>1</b>	<b>10.043.999</b>	<b>175.000.000</b>							<b>1</b>	<b>10.043.999</b>	<b>100,00</b>	<b>1,20</b>	<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>		
		3.25.06.1.01.02	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Penunjang Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Rekomendasi	5	507.762.000	2	10.043.999	100.000.000							2	10.043.999	40,00	1,98	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		
		3.25.06.1.01.03	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	Dokumen	1	328.806.800			75.000.000											DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		
		<b>3.25.06.1.02</b>	<b>Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar</b>	<b>Terlaksananya pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan (dokumen)</b>	<b>undefined</b>	<b>3</b>	<b>31.598.450.700</b>	<b>3</b>	<b>6.852.074.935</b>	<b>6.500.000.000</b>							<b>3</b>	<b>6.852.074.935</b>	<b>100,00</b>	<b>21,68</b>	<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>		
		3.25.06.1.02.01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	Unit Usaha	50	14.521.046.000	50	3.424.288.348	3.100.000.000							50	3.424.288.348	100,00	23,58	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		
		3.25.06.1.02.02	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam	Jumlah Unit Usaha yang Diberikan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing	Unit Usaha	50	17.077.404.700	50	3.427.786.587	3.400.000.000							50	3.427.786.587	100,00	20,07	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		
Rata-rata capaian kinerja (%)							401.082.648.242		52.704.722.981	83.039.095.848							4.589.700		0,01	52.709.312.681	81,18	13,14	
Predikat Kinerja																	SR	SR			T	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																							
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																							

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
						K	Rp		K	Rp	K	Rp	I		II				III		IV			13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17													
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
			rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing	serta Pemberdayaan Usaha dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing																									
		3.25.06.1.03	<b>Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</b>	<b>Terfasilitasinya pelaku usaha kelautan dan perikanan</b>	Tahun	1	1.757.648.900	1	125.150.000	200.000.000																	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		
		3.25.06.1.03.02	Pemberian Insentif dan Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Unit Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Diberikan Insentif dan Fasilitas	Unit Usaha	10	1.541.232.100	5	125.150.000	150.000.000																		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
		3.25.06.1.03.03	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Data dan Informasi yang Diintegrasikan ke dalam Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan dan Terkoneksi dari Hulu sampai Hilir	Dokumen	1	216.416.800			50.000.000																		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
2	Meningkatnya status pengelolaan kawasan konservasi perairan	1.03.13	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG</b>	<b>Persentase Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Urusan Kelautan dan Perikanan</b>	%	100	4.750.000.000	42,5	459.268.125	1.250.000.000																		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
		1.03.13.5.02	<b>Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten</b>	<b>Terlaksananya kegiatan pemanfaatan ruang satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten (100%)</b>	%	100	4.750.000.000	100	459.268.125	1.250.000.000																			DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		1.03.13.5.02.02	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan	Dokumen	10	4.350.000.000	3	459.268.125	1.250.000.000																			DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		1.03.13.5.02.18	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Gunungkidul	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Gunungkidul	Dokumen	1	400.000.000			0																		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
		3.25.02	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL</b>	<b>Persentase Kawasan Konservasi yang Ditetapkan dan Dikelola (%)</b>	%	100	939.081.200	63	1.303.460.445	185.000.000																		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
		3.25.02.1.01	<b>Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan</b>	<b>Terkelolanya ruang laut sampai dengan 12 mil diluar</b>	undefined	3	687.947.900	2	1.303.460.445	135.000.000																		DINAS KELAUTAN	
Rata-rata capaian kinerja (%)							401.082.648.242		52.704.722.981	83.039.095.848																			
Predikat Kinerja																													
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																													
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																													
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																													
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																													

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13/8x100	15 = 7 + 13	16 = 15 / 6 x 100%	17								
			<b>12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi</b>	<b>minyak dan gas bumi (lokasi)</b>															<b>DAN PERIKANAN</b>					
		3.25.02.1.01.02	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	Ha	5.822,92	557.947.900	5.675,87	1.303.460.445	75.000.000						5.675,87	1.303.460.445	97,47	233,62	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN				
		3.25.02.1.01.04	Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Memperoleh Informasi Terkait Mitigasi Bencana Melalui Program Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Orang	200	130.000.000			60.000.000										DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN				
		<b>3.25.02.1.02</b>	<b>Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi</b>	<b>Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi (Rekomendasi)</b>	<b>Rekomendasi</b>	<b>1</b>	<b>251.133.300</b>			<b>50.000.000</b>										<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>				
		3.25.02.1.02.03	Pelaksanaan Fasilitasi Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional	Jumlah Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional yang Diterbitkan	Rekomendasi	1	251.133.300			50.000.000										DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN				
<b>3</b>	<b>Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Perangkat Daerah</b>	<b>0.00.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (skor)</b>	<b>skor</b>	<b>89,2</b>	<b>135.326.464.984</b>	<b>90,68</b>	<b>23.098.951.478</b>	<b>26.771.148.338</b>	<b>87,94</b>					<b>87,94</b>			<b>178,62</b>	<b>23.098.951.478</b>	<b>200,25</b>	<b>17,07</b>	<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>	
		<b>0.00.01.1.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Terlaksananya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%)</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>704.000.000</b>	<b>100</b>	<b>43.535.463</b>	<b>153.500.000</b>									<b>50</b>	<b>43.535.463</b>	<b>50,00</b>	<b>6,18</b>	<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>	
		0.00.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	430.000.000	3	25.294.923	95.000.000									3	25.294.923	100,00	5,88	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
		0.00.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	22.000.000	1	2.303.980	5.500.000									1	2.303.980	100,00	10,47	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
		0.00.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Dokumen	1	37.000.000	1	2.388.760	5.500.000									1	2.388.760	100,00	6,46	DINAS KELAUTAN	
Rata-rata capaian kinerja (%)						401.082.648.242		52.704.722.981		83.039.095.848		4.589.700				4.589.700	0,01		52.709.312.681	81,18	13,14			
Predikat Kinerja																SR	SR				T	SR		
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																								
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																								

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab								
						K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp				
																												I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13/8x100	15 = 7 + 13	16 = 15 / 6 x 100%	17															
				Penyusunan Dokumen DPA-SKPD																				DAN PERIKANAN							
		0.00.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	22.000.000	1	2.239.800																1	2.239.800	100,00	10,18	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		
		0.00.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	193.000.000	1	11.308.000																	1	11.308.000	100,00	5,86	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
		<b>0.00.01.1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>94.371.515.923</b>	<b>100</b>	<b>16.910.899.779</b>																	<b>50</b>	<b>16.910.899.779</b>	<b>50,00</b>	<b>17,92</b>	<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>	
		0.00.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	152	93.337.903.723	152	16.765.354.029																	152	16.765.354.029	100,00	17,96	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
		0.00.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	762.820.000	24	110.880.000																	24	110.880.000	200,00	14,54	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
		0.00.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	2	51.754.800	6	8.854.650																	6	8.854.650	300,00	17,11	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
		0.00.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	18	219.037.400	6	25.811.100																	6	25.811.100	33,33	11,78	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
		<b>0.00.01.1.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Terlaksananya Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah (%)</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>388.208.500</b>	<b>100</b>	<b>41.683.821</b>																	<b>50</b>	<b>41.683.821</b>	<b>50,00</b>	<b>10,74</b>	<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>	
		0.00.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	71.510.900																							DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
		0.00.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	1.900.000	1	283.821																	1	283.821	100,00	14,94	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
		0.00.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan	Laporan	1	62.997.600																							DINAS KELAUTAN	
Rata-rata capaian kinerja (%)							401.082.648.242		52.704.722.981									4.589.700								4.589.700	0,01	52.709.312.681	81,18	13,14	
Predikat Kinerja																		SR												T	SR
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																															
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																															
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																															
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																															

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I	II	III	IV	13	14 = 13/8x100	15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
			Barang Milik Daerah pada SKPD	Barang Milik Daerah pada SKPD															DAN PERIKANAN		
		0.00.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	12	251.800.000	24	41.400.000	52.000.000									DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		
		<b>0.00.01.1.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah penunjang urusan pemerintah daerah (%)</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>60.000.000</b>			<b>15.000.000</b>									<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>		
		0.00.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)	Orang	120	60.000.000			15.000.000									DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		
		<b>0.00.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>3.878.529.200</b>	<b>100</b>	<b>422.545.318</b>	<b>793.000.000</b>						<b>50</b>	<b>422.545.318</b>	<b>50,00</b>	<b>10,89</b>	<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>	
		0.00.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	20	318.806.900	21	43.401.383	67.000.000									DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		
		0.00.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	50	502.771.600	21	55.804.304	98.000.000									DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		
		0.00.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	30	476.216.100	37	44.051.195	98.000.000									DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		
		0.00.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	48.030.000	3	4.235.000	10.000.000									DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		
		0.00.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	3	462.018.800	6	63.181.856	98.000.000									DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		
		0.00.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	10	125.708.800	5	7.438.000	27.000.000									DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		
		0.00.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	28	1.758.005.000	40	204.433.580	350.000.000									DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		
		0.00.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem	Dokumen	1	186.972.000			45.000.000									DINAS KELAUTAN		
Rata-rata capaian kinerja (%)							401.082.648.242		52.704.722.981	83.039.095.848					4.589.700		0,01	52.709.312.681	81,18	13,14	
Predikat Kinerja															SR					T	SR
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																					
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																					

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13/8x100	15 = 7 + 13	16 = 15 / 6 x 100%	17											
			Berbasis Elektronik pada SKPD	Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																DAN PERIKANAN							
		<b>0.00.01.1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>1.772.906.900</b>	<b>100</b>	<b>5.841.000</b>	<b>375.000.000</b>								<b>50</b>	<b>5.841.000</b>	<b>50,00</b>	<b>0,33</b>	<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>					
		0.00.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	20	577.906.900			0												DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN					
		0.00.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	25	50.000.000			0												DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN					
		0.00.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	100	275.000.000	3	2.089.000	100.000.000								3	2.089.000	3,00	0,76	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN					
		0.00.01.1.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	15	600.000.000			200.000.000												DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN					
		0.00.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	80	270.000.000	5	3.752.000	75.000.000								5	3.752.000	6,25	1,39	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN					
		<b>0.00.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>24.641.188.681</b>	<b>100</b>	<b>4.633.666.947</b>	<b>4.939.780.357</b>								<b>50</b>	<b>4.633.666.947</b>	<b>50,00</b>	<b>18,80</b>	<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>					
		0.00.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	2	58.128.000	3	9.710.000	12.000.000								3	9.710.000	150,00	16,70	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN					
		0.00.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	36	9.042.359.825	83	1.352.167.267	1.810.000.000								83	1.352.167.267	230,56	14,95	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN					
		0.00.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	36	15.540.700.856	93	3.271.789.680	3.117.780.357								93	3.271.789.680	258,33	21,05	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN					
		<b>0.00.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>9.510.115.780</b>	<b>100</b>	<b>1.040.779.150</b>	<b>1.603.000.000</b>								<b>50</b>	<b>1.040.779.150</b>	<b>50,00</b>	<b>10,94</b>	<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>					
		0.00.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Unit	2	385.828.700	2	72.399.850	77.000.000								2	72.399.850	100,00	18,76	DINAS KELAUTAN					
Rata-rata capaian kinerja (%)							401.082.648.242		52.704.722.981	83.039.095.848						4.589.700		4.589.700		0,01		52.709.312.681	81,18	13,14			
Predikat Kinerja																SR		SR				T	SR				
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																											
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																											

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13/8x100	15 = 7 + 13	16 = 15 / 6 x 100%	17								
			Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya														DAN PERIKANAN						
		0.00.01.1.09.010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	250	490.249.000	33	45.540.000	100.000.000						33	45.540.000	13,20	9,29	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN				
		0.00.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	80	4.180.830.100	26	731.819.500	870.000.000						26	731.819.500	32,50	17,50	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN				
		0.00.01.1.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	100	25.000.000			6.000.000										DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN				
		0.00.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	270	474.390.500	69	78.814.000	100.000.000						69	78.814.000	25,56	16,61	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN				
		0.00.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	undefined	55	3.953.817.480	3	112.205.800	450.000.000						3	112.205.800	5,45	2,84	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN				
<b>4</b>	<b>Meningkatnya nilai produksi perikanan budidaya kelompok miskin</b>																							
Rata-rata capaian kinerja (%)						401.082.648.242		52.704.722.981		83.039.095.848						4.589.700		4.589.700	0,01		52.709.312.681	81,18	13,14	
Predikat Kinerja																								
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																								
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																								

Disusun  
Yogyakarta, 2 Mei 2025  
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan

Dievaluasi  
Yogyakarta, 2 Mei 2025  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah

R. Hery Sulistio Hermawan S.PI., M.T.  
NIP. 197102161999031003

NI MADE DWIPANTI INDRAWANTI, S.T., M.T.  
NIP. 197010181998032007

**EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUNGAN PROVINSI  
RENJA PERANGKAT DAERAH DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERIODE PELAKSANAAN : 2025**

Indikator dan target kinerja SKPD yang mengacu pada sasaran RKPD:	Target	Realisasi
1 Laju pertumbuhan Industri Pengolahan dalam PDRB	3	
2 Produktivitas tenaga kerja industri	0	0
3 Kategori RB Perangkat Daerah	2	
4 Laju pertumbuhan Perdagangan dalam PDRB	5,38	
5 Nilai Ekspor Tahun n	0	0

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I	II	III	IV	K	Rp			K	Rp	K	Rp		
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>		<b>6</b>		<b>7</b>		<b>8</b>		<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14 = 13/8x100</b>	<b>15 = 7 + 13</b>		<b>16 = 15 / 6 x 100%</b>		<b>17</b>	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	Meningkatnya industri pengolahan	1.03.13	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	Jumlah Sentra IKM di Satuan Ruang Strategis yang dibina	Sentra	3	6.500.000.000	1	1.536.884.157		1.500.000.000							1	1.536.884.157	33,33	23,64	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		1.03.13.5.02	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis	Dokumen	9	6.500.000.000	1	1.536.884.157		1.500.000.000							1	1.536.884.157	11,11	23,64	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		1.03.13.5.02.02	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan	Dokumen	4	3.000.000.000				1.000.000.000												DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		1.03.13.5.02.03	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu	Dokumen	3	2.000.000.000	1	1.536.884.157		500.000.000							1	1.536.884.157	33,33	76,84	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		1.03.13.5.02.04	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh	undefined	2	1.500.000.000				0												DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Nilai PDRB Sektor Industri Pengolahan	Rp Triliun	14,84	92.924.702.000	14,87	11.996.421.151		19.500.000.000							14,87	11.996.421.151	100,20	12,91	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
				Nilai Produksi IKM Industri Kreatif	Triliun	0		0															DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		2.22.08.5.06	Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Terlaksananya Penyediaan Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	%	100	19.000.000.000	100	4.144.090.397		6.000.000.000							50	4.144.090.397	50,00	21,81	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		2.22.08.5.06.01	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya	Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya	undefined	7	19.000.000.000	3	4.144.090.397		6.000.000.000							3	4.144.090.397	42,86	21,81	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp		K	Rp		
1	2	3	4	5	6		7		8		9	10	11	12	13	14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		2.22.08.5.08	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	Jumlah IKM yang mendapatkan pembinaan	IKM	31.545	73.924.702.000	6.200	7.852.330.754	13.500.000.000									6.200	7.852.330.754	19,65	10,62	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		2.22.08.5.08.03	Pengembangan Industri Kreatif	Jumlah Industri Kreatif yang Dikembangkan	Unit	31.545	73.924.702.000	6.200	7.852.330.754	13.500.000.000									6.200	7.852.330.754	19,65	10,62	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Jumlah tenaga kerja di sektor Industri	Orang	415.000	24.242.934.750	373.480	23.456.790.941	3.600.000.000									373.480	23.456.790.941	90,00	96,76	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
				Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) BPTTG	%	89,5		85											42,5		47,49			DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		3.31.02.1.01	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Dokumen	3	24.242.934.750	3	23.456.790.941	3.600.000.000									3	23.456.790.941	100,00	96,76	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3.31.02.1.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Dokumen	1	4.050.000.000	1	21.000.000	1.000.000.000									1	21.000.000	100,00	0,52	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3.31.02.1.01.04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Dokumen	1	2.955.957.600	1	719.248.456	600.000.000									1	719.248.456	100,00	24,33	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3.31.02.1.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dokumen	4	17.236.977.150	1	22.716.542.485	2.000.000.000									1	22.716.542.485	25,00	131,79	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Jumlah Perusahaan Industri yang Berizin	Perusahaan	18.043	80.000.000	23.582		20.000.000									23.582		130,70			DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		3.31.03.1.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	Persentase jumlah hasil pemantauan dan Pengawasan dengan Jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	40	80.000.000	37		20.000.000									18,5		46,25			DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp		K
1	2	3	4	5	6		7		8	9				13	14 = 13/8x100	15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17	
		3.31.03.1.01.01	Fasilitasi Pemenuhan komitmen perolehan IUI, IPU, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam Rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah- Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS, bagi: 1) Industri Besar; dan 2) Industri Kecil dan Industri Menengah yang Lokasinya Lintas Kabupaten/Kota, 3) Kawasan Industri, dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri yang Merupakan PMDN yang Berlokasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	Dokumen	4	40.000.000		10.000.000											DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3.31.03.1.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPU, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan Di Bidang Industri dalam Lingkup perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Provinsi	Dokumen	4	40.000.000		10.000.000											DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3.31.04	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL</b>	<b>Jumlah pelaku usaha industri yang terdaftar di SIINAS</b>	Perusahaan	900	704.483.400	2.552	1.000.000	140.000.000							2.552	1.000.000	283,56	0,14	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		3.31.04.1.01	<b>Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPU, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)</b>	<b>Jumlah Perusahaan Industri yang mendapatkan pendampingan pengumpulan data SIINAS</b>	Orang	925	704.483.400	200	1.000.000	140.000.000							200	1.000.000	21,62	0,14	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		3.31.04.1.01.01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Dokumen	1	704.483.400	1	1.000.000	140.000.000							1	1.000.000	100,00	0,14	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		4.01.10	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN</b>	<b>Persentase capaian implementasi inovasi layanan publik</b>	%	100	500.000.000	60	774.098.588	50.000.000							30	774.098.588	30,00	154,82	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp		K
1	2	3	4	5	6		7		8		9	10	11	12	13	14 = 13/8x100	15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		4.01.10.5.02	Peningkatan Budaya Pemerintahan	Tercapainya implementasi budaya pemerintahan	%	100	500.000.000		774.098.588	50.000.000								774.098.588		154,82	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		4.01.10.5.02.01	Implementasi Budaya Pemerintahan DIY	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan DIY	undefined	4	500.000.000	1	774.098.588	50.000.000								1	774.098.588	25,00	154,82	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintah di Perangkat Daerah	0.00.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Skor	85	125.510.975.157	95,47	17.334.219.402	25.480.035.000								95,47	17.334.219.402	112,32	13,81	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		0.00.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	%	100	616.040.400	100	84.896.600	122.000.000								50	84.896.600	50,00	13,78	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		0.00.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4	326.098.000	2	68.270.000	65.000.000								2	68.270.000	50,00	20,94	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		0.00.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	4	125.940.000	2	3.329.100	25.000.000								2	3.329.100	50,00	2,64	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		0.00.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	3	164.002.400	3	13.297.500	32.000.000								3	13.297.500	100,00	8,11	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		0.00.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	92.976.736.407	100	14.569.974.357	18.723.115.000								50	14.569.974.357	50,00	15,67	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		0.00.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	139	91.963.415.407	128	14.508.154.357	18.500.000.000								128	14.508.154.357	92,09	15,78	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		0.00.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	4	464.882.000			113.135.000												DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		0.00.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	354.900.000	11	59.820.000	70.980.000								11	59.820.000	91,67	16,86	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp		K	Rp
1	2	3	4	5	6	7		8		9	10	11	12	13	14 = 13/8x100	15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		0.00.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	107.764.100	1	1.000.000		22.000.000							1	1.000.000	100,00	0,93	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		0.00.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	18	85.774.900	18	1.000.000		17.000.000							18	1.000.000	100,00	1,17	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		<b>0.00.01.1.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Terlaksananya Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>234.115.000</b>	<b>100</b>	<b>58.243.473</b>		<b>47.000.000</b>							<b>50</b>	<b>58.243.473</b>	<b>50,00</b>	<b>24,88</b>	<b>DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN</b>
		0.00.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	13	234.115.000	12	58.243.473		47.000.000							12	58.243.473	92,31	24,88	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		<b>0.00.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>3.005.739.300</b>	<b>100</b>	<b>134.344.104</b>		<b>637.890.000</b>							<b>50</b>	<b>134.344.104</b>	<b>50,00</b>	<b>4,47</b>	<b>DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN</b>
		0.00.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	17	167.678.100	2	1.394.777		33.000.000							2	1.394.777	11,76	0,83	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		0.00.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	271.184.000	2	10.437.973		54.000.000							2	10.437.973	200,00	3,85	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		0.00.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	160.610.400	2	1.350.813		32.000.000							2	1.350.813	200,00	0,84	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		0.00.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4	36.015.000	1	1.475.800		7.203.000							1	1.475.800	25,00	4,10	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		0.00.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	21	517.620.000	2	10.414.248		110.000.000							2	10.414.248	9,52	2,01	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		0.00.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	2	75.868.800	23	2.566.548		17.100.000							23	2.566.548	1.150,00	3,38	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
												I	II	III	IV													
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
												K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		0.00.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	1.220.477.000	2	106.080.945		264.937.000												2	106.080.945	200,00	8,69	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		0.00.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	556.286.000	1	623.000		119.650.000												1	623.000	100,00	0,11	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		<b>0.00.01.1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>12.755.931.300</b>	<b>100</b>	<b>2.039.940</b>		<b>2.872.030.000</b>												<b>50</b>	<b>2.039.940</b>	<b>50,00</b>	<b>0,02</b>	<b>DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN</b>	
		0.00.01.1.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	1	5.000.000.000				1.000.000.000																	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		0.00.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	2	2.700.000.000				600.000.000																	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		0.00.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	7	200.000.000	1	391.941		50.000.000												1	391.941	14,29	0,20	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		0.00.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	13	727.811.300	1	1.000.000		140.000.000												1	1.000.000	7,69	0,14	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		0.00.01.1.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Dokumen	4	2.600.000.000				700.000.000																	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		0.00.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	8	400.000.000	1			100.000.000												1		12,50		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		0.00.01.1.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	18	1.128.120.000	1	647.999		282.030.000												1	647.999	5,56	0,06	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		<b>0.00.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>13.590.556.200</b>	<b>100</b>	<b>2.222.923.361</b>		<b>2.640.000.000</b>												<b>50</b>	<b>2.222.923.361</b>	<b>50,00</b>	<b>16,36</b>	<b>DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN</b>	
		0.00.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	3	6.397.565.000	2	755.642.061		1.200.000.000												2	755.642.061	66,67	11,81	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6		7		8		9	10	11	12	13	14 = 13/8x100	15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		0.00.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	7.192.991.200	2	1.467.281.300	1.440.000.000							2	1.467.281.300	50,00	20,40	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		<b>0.00.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Terlaksanannya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>2.331.856.550</b>	<b>100</b>	<b>261.797.567</b>	<b>438.000.000</b>							<b>50</b>	<b>261.797.567</b>	<b>50,00</b>	<b>11,23</b>	<b>DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN</b>
		0.00.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	1	189.833.400	1	31.973.800	38.000.000							1	31.973.800	100,00	16,84	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		0.00.01.1.09.010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	19	303.940.000	1	200.000	60.000.000							1	200.000	5,26	0,07	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		0.00.01.1.09.011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	8	200.000.000	1	11.714.000	50.000.000							1	11.714.000	12,50	5,86	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		0.00.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	34	873.238.750	18	214.413.767	135.000.000							18	214.413.767	52,94	24,55	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		0.00.01.1.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	3	42.000.000	1	1.000.000	10.000.000							1	1.000.000	33,33	2,38	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		0.00.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	19	225.844.400	2	1.496.000	45.000.000							2	1.496.000	10,53	0,66	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		0.00.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	497.000.000	1	1.000.000	100.000.000							1	1.000.000	50,00	0,20	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
<b>3</b>	<b>Meningkatnya nilai perdagangan dalam negeri dan luar negeri</b>	<b>3.30.02</b>	<b>PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN</b>	<b>Jumlah Perusahaan Ekspor</b>	<b>Perusahaan</b>	<b>635</b>	<b>199.788.700</b>	<b>565</b>	<b>9.621.847</b>	<b>40.000.000</b>							<b>565</b>	<b>9.621.847</b>	<b>88,98</b>	<b>4,82</b>	<b>DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN</b>
		<b>3.30.02.1.04</b>	<b>Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA</b>	<b>Persentase penerbitan SKA yang tepat waktu</b>	<b>%</b>	<b>99</b>	<b>199.788.700</b>	<b>94</b>	<b>9.621.847</b>	<b>40.000.000</b>							<b>47</b>	<b>9.621.847</b>	<b>47,47</b>	<b>4,82</b>	<b>DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN</b>

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
					K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp		K	Rp	
1	2	3	4	5	6		7		8		9	10	11	12	13	14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			<i>dan Angka Pengenal Importir (API)</i>																				
		3.30.02.1.04.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal Dokumen		137.800	199.788.700	1	9.621.847	40.000.000									1	9.621.847	0,00	4,82	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		<b>3.30.04</b>	<b>PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING</b>	<b>Persentase ketersediaan data harga barang kebutuhan pokok dan barang penting</b>	<b>%</b>	<b>90</b>	<b>3.687.883.900</b>	<b>100</b>	<b>1.848.788.356</b>	<b>743.000.000</b>									<b>50</b>	<b>1.848.788.356</b>	<b>55,56</b>	<b>50,13</b>	<b>DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN</b>
				<b>Inflasi Pangan Bergejolak</b>	<b>%</b>	<b>0</b>																	<b>DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN</b>
		<b>3.30.04.1.02</b>	<b>Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan</b>	<b>Jumlah jenis barang yang dipantau</b>	<b>undefined</b>	<b>25</b>	<b>3.687.883.900</b>	<b>25</b>	<b>1.848.788.356</b>	<b>743.000.000</b>									<b>25</b>	<b>1.848.788.356</b>	<b>100,00</b>	<b>50,13</b>	<b>DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN</b>
		3.30.04.1.02.01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	Laporan	5	340.613.300	1	991.250	68.000.000									1	991.250	20,00	0,29	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		3.30.04.1.02.02	Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Laporan	5	3.347.270.600	1	1.847.797.106	675.000.000									1	1.847.797.106	20,00	55,20	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		<b>3.30.05</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR</b>	<b>Persentase pelaku usaha peserta pembinaan yang menjadi eksportir baru</b>	<b>%</b>	<b>20</b>	<b>4.190.212.000</b>	<b>46,2</b>	<b>72.151.740</b>	<b>990.000.000</b>									<b>23,1</b>	<b>72.151.740</b>	<b>115,50</b>	<b>1,72</b>	<b>DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN</b>

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp		K
1	2	3	4	5	6		7		8	9	10	11	12	13	14 = 13/8x100	15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		3.30.05.1.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	Jumlah Pelaku usaha perdagangan yang dibina	%	2.015	4.190.212.000	371	72.151.740	990.000.000							185,5	72.151.740	9,21	1,72	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		3.30.05.1.01.01	Pameran Dagang Internasional/Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	Pelaku Usaha	490	2.800.000.000	20	71.165.690	700.000.000							20	71.165.690	4,08	2,54	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		3.30.05.1.01.03	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	Pelaku Usaha	30	540.000.000	1	986.050	120.000.000							1	986.050	3,33	0,18	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		3.30.05.1.01.05	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Dibina	Pelaku Usaha	1.495	850.212.000			170.000.000											DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Jumlah Barang Jasa yang Tidak Sesuai dengan Standard	%	97,5	1.651.336.300	99,94	171.385.481	330.000.000							49,97	171.385.481	51,25	10,38	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
				Persentase penanganan sengketa konsumen	%	99		100									50		50,51		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
				Persentase Jumlah Barang Jasa yang Tidak Sesuai dengan Standard	%	0															DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		3.30.06.1.01	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan Konsumen yang Ditangani	undefined	125	1.501.334.300	30	171.385.481	300.000.000							30	171.385.481	24,00	11,42	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		3.30.06.1.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen	Jumlah Pengaduan Konsumen yang Ditangani	Pengaduan	125	1.501.334.300	24	171.385.481	300.000.000							24	171.385.481	19,20	11,42	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		3.30.06.1.03	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jenis barang yang dipantau	undefined	25	150.002.000	25		30.000.000							25		100,00		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		3.30.06.1.03.01	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar	Laporan	1	150.002.000	1		30.000.000							1		100,00		DINAS PERINDUSTRIAN

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
					K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6		7		8		9	10	11	12	13	14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17			
			Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen	dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi																		DAN PERDAGANGAN			
		3.30.07	<b>PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI</b>	<b>Jumlah Omzet Usaha Pelaku Perdagangan yang Dibina</b>	<b>Rp Miliar</b>	<b>2,74</b>	<b>6.775.000.000</b>	<b>3,19</b>	<b>191.207.993</b>	<b>1.250.000.000</b>							<b>3,19</b>	<b>191.207.993</b>	<b>116,42</b>	<b>2,82</b>	<b>DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN</b>				
		3.30.07.1.02	<b>Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri</b>	<b>Jumlah UMKM yang difasilitasi pemasaran P3DN</b>	<b>IKM</b>	<b>65</b>	<b>6.775.000.000</b>	<b>50</b>	<b>191.207.993</b>	<b>1.250.000.000</b>							<b>50</b>	<b>191.207.993</b>	<b>76,92</b>	<b>2,82</b>	<b>DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN</b>				
		3.30.07.1.02.01	Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Dihasilkan oleh UMKM melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	UMKM	2.590	6.775.000.000		191.207.993	1.250.000.000											2,82	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN			
Rata-rata capaian kinerja (%)							266.967.316.207		57.392.569.656	53.643.035.000												57.392.569.656	64,48	21,50	
Predikat Kinerja																									
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:					<p>a. Tumbuhnya IKM seiring dengan meningkatnya permintaan produk-produk khas Ramadhan dan persiapan lebaran diantaranya komoditi pangan dan sandang, serta kendaraan bermotor. b. Tumbuhnya permintaan produk ekspor barang industri pengolahan DIY. ekspor barang industri pengolahan. Komoditi utama: Pakaian Jadi bukan rajutan, Perabot penerangan rumah, Barang-barang rajutan dan Barang-barang dari kulit. Terjadi peningkatan permintaan produk ekspor ke Amerika Serikat, Eropa, dan ASEAN. c. Adanya Program-Program Pemerintah Pusat yang mendorong pertumbuhan sektor industri seperti Program Restrukturisasi Mesin dan Peralatan Industri, Program TKDN IK gratis. d. Peningkatan pemanfaatan teknologi produksi yang ditandai dengan meningkatnya Impor barang modal. e. Peningkatan jumlah wisatawan yang berkunjung ke DIY akan meningkatkan pula pendukung sektor pariwisata, seperti hotel, restoran, industri makanan, minuman, dan industri pakaian jadi. f. Banyaknya kegiatan untuk pengendalian inflasi seperti bazaar, pasar murah dan operasi pasar yang berdampak pada peningkatan distribusi barang kebutuhan pokok yang dilakukan berbagai instansi. g. Produk unggulan DIY (Garment, furniture, sarung tangan, dan kerajinan) masih diminati pasar global h. Bertambahnya perjanjian Indonesia dgn negara mitra, sehingga preferensi tarif semakin banyak diantaranya: o Indonesia-chile o Indonesia- Uni Emirat Arab o Indo -Mozambik o Indo-australia o Indo-Hongkong i. Pelaku usaha mampu memenuhi permintaan buyer baik kualitas dan standarisasi produk j. Aturan-aturan perdagangan yg mendukung ekspor dan impor, diantaranya: o Permendag yg mengatur kemudahan impor bahan baku produk ekspor khususnya utk kawasan berikat o Penggunaan CEISA 4.0 sehingga eksportir bisa melakukan ekspor secara online o Diperbolehkannya ekspor secara perorangan (tidak harus badan usaha) k. Penambahan rute penerbangan internasional dari bandara YIA seperti Thailand, Malaysia, Australia, dan India l. Kebijakan macro prudential berupa pengetatan persyaratan modal dari Bank Indonesia untuk sektor prioritas, salah satunya industri dan perdagangan. m. Pelaksanaan program makan Bergizi Gratis (MBG) yang mendorong pertumbuhan sektor industri makanan dan minuman n. Melemahnya harga dolar yang menyebabkan kenaikan harga impor bahan baku</p>																				
Faktor penghambat pencapaian kinerja:					<p>a. Maraknya impor ilegal yang menjadi pesaing dan mematikan industri lokal termasuk di DIY. b. Ketegangan geopolitik Rusia-Ukraina yang masih berlanjut menyebabkan naiknya harga energi dan minyak dunia. Hal ini menyebabkan mahalnya harga bahan baku impor. Imbasnya terhadap para pelaku usaha industri yang menggunakan bahan baku impor kesulitan untuk mendapatkan bahan baku. c. Penerapan standarisasi produk maupun aturan barang masuk yg terlalu ketat dari negara pengimpor seperti diberlakukannya EUDR di negara-negara Eropa. d. Mahalnya harga transportasi pengiriman terutama ke Eropa karena tidak bisa melewati laut merah e. Menurunnya aktivitas MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition) akibat dari efisiensi anggaran pemerintah yang berdampak terhadap penurunan permintaan akan produk-produk yang berkaitan dengan aktivitas tersebut. f. Kelangkaan gas elpiji 3 kg yang digunakan oleh IKM dalam memproduksi membuat produksi menjadi terhambat. g. Ekspor produk kayu ke negara tujuan utama ekspor DIY, terutama di Uni Eropa, terkendala oleh pemberlakuan regulasi anti deforestasi (Europe Union Deforestation Regulation/EUDR) h. Situasi global yang kurang kondusif sehingga pasar ekspor cukup lesu mengakibatkan persaingan kualitas produk inovasi, teknologi, standarisasi, dan lain-lain menjadi lebih berat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. i. Penurunan permintaan ekspor khususnya dari Amerika sebagai negara tujuan utama ekspor DIY disebabkan dampak resesi Amerika dengan menurunnya permintaan barang ekspor seperti pakaian jadi dan tekstil, dimana kedua komoditi tersebut merupakan komoditi yang mendominasi ekspor DIY. j. Penerapan standarisasi produk maupun aturan barang masuk yg terlalu ketat dr neg pengimpor k. Belum adanya pelabuhan muat ekspor di DIY sehingga menghambat perdagangan. Sementara ini pengiriman barang ekspor diantaranya melalui pelabuhan Tanjung Emas. l. Menurunnya daya beli masyarakat baik Indonesia maupun di negara tujuan ekspor m. Melemahnya harga dolar yang menyebabkan volume ekspor barang n. Kelangkaan elpiji 3 kg akibat dari perubahan kebijakan distribusi</p>																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):					<p>1. Penyelenggaraan fasilitasi promosi dan pemasaran 2. Mendorong pelaku usaha industri untuk memiliki akun SIINs agar dapat mengikuti program-program Pemerintah 3. Mendorong penggunaan alat teknologi tepat guna untuk meningkatkan produktivitas industri 4. Mendorong pelaku usaha untuk memenuhi persyaratan agar bisa mengikuti proses pengadaan barang jasa Pemerintah 5. Sosialisasi dan fasilitasi sertifikasi TKDN 6. Peningkatan sektor unggulan sentra IKM coklat dan IKM gula semut melalui kegiatan SRS</p>																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																									

Disusun Yogyakarta, 2 Mei 2025

Dievaluasi Yogyakarta, 2 Mei 2025

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah

Ir. SYAM ARJAYANTI, M.P.A.  
NIP. 196712041993032004

NI MADE DWIPANTI INDRAYANTI, S.T., M.T.  
NIP. 197010181998032007

**EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUNGAN PROVINSI  
RENJA PERANGKAT DAERAH DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERIODE PELAKSANAAN : 2025**

Indikator dan target kinerja SKPD yang mengacu pada sasaran RKPD:	Target	Realisasi
1 Persentase kontribusi sektor pertanian terhadap kesesuaian tata ruang	3.99	3.96
2 Rata-rata persentase peningkatan produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan	0.21	20.035
3 Kategori RB Perangkat Daerah	89.59	97.45
4 Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	96.4	95.66
5 Persentase daerah rentan rawan pangan	3.85	0.000000001

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					6		7		8		I	II	III	IV	13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	Peningkatan sektor pertanian dalam mendukung kesesuaian tata ruang																								
2	Meningkatnya produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan	1.03.13	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	Luas areal pertanian di satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten (ha) (Perkebunan)	ha	0	23.408.030.000	167,5	1.556.674.162	5.590.000.000	243,5									411	1.556.674.162		6,65	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
				Luas areal pertanian di satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten (ha) (BPTP)	Ha	0		167,5												167,5				DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
				Luas areal pertanian di satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten (ha) (bp3mbtp)	Ha	0		89,35			243,5									332,85				DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
		1.03.13.5.02	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Jumlah pemanfaatan ruang satuan ruang strategis untuk usaha pertanian	SRS	4	23.408.030.000	4	1.556.674.162	5.590.000.000										4	1.556.674.162	100,00	6,65	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
				Jumlah kelompok tani yang diberdayakan	kelompok	0																		DINAS PERTANIAN DAN	
Rata-rata capaian kinerja (%)							579.387.247.497		88.057.551.116	112.256.340.858											88.057.551.116	24,16	15,20		
Predikat Kinerja																							SR	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																									
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																									

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					6	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	17				
																							<b>KETAHANAN PANGAN</b>				
		1.03.13.5.02.03	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu	dokumen	20	6.098.030.000	1	294.592.000	1.350.000.000											1	294.592.000	5,00	4,83	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN		
		1.03.13.5.02.04	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh	dokumen	24	5.750.000.000	3	621.491.462	1.450.000.000											3	621.491.462	12,50	10,81	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN		
		1.03.13.5.02.08	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Merapi	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Merapi	dokumen	28	7.460.000.000	3	640.590.700	1.790.000.000											3	640.590.700	10,71	8,59	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN		
		1.03.13.5.02.10	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas-Parangtritis	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas-Parangtritis	dokumen	4	4.100.000.000			1.000.000.000														DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN			
		<b>3.27.02</b>	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>	<b>Persentase sarana pertanian yang digunakan dan kondisinya baik (%) (Tanaman Pangan)</b>	<b>%</b>	<b>0</b>	<b>132.794.683.450</b>	<b>98,61</b>	<b>20.447.998.788</b>	<b>26.780.000.000</b>	<b>98,61</b>										<b>98,61</b>	<b>20.447.998.788</b>		<b>15,40</b>	<b>DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN</b>		
				<b>Persentase sarana pertanian yang digunakan dan kondisinya baik (%) (Peternakan)</b>	<b>%</b>	<b>0</b>		<b>98,61</b>			<b>98,61</b>										<b>98,61</b>			<b>DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN</b>			
				<b>Persentase rata-rata peningkatan produksi tanaman pangan, hortikultura, dan peternakan di lokasi prioritas kemiskinan (%) (Tanaman Pangan)</b>	<b>%</b>	<b>0</b>		<b>100,5</b>													<b>50,25</b>			<b>DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN</b>			
				<b>Persentase rata-rata peningkatan produksi tanaman pangan,</b>	<b>%</b>	<b>0</b>		<b>100,5</b>													<b>50,25</b>			<b>DINAS PERTANIAN DAN</b>			
Rata-rata capaian kinerja (%)							579.387.247.497		88.057.551.116	112.256.340.858												88.057.551.116	24,16	15,20			
Predikat Kinerja																								SR	SR		
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																											
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																											

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13/8x100	15 = 7 + 13	16 = 15 / 6 x 100%	17									
				hortikultura, dan peternakan di lokasi prioritas kemiskinan (%) (Peternakan)																			KETAHANAN PANGAN		
				Persentase benih tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan bersertifikat yang terdistribusi (%)	%	0	3,09						0,3								1,695			DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
				Persentase benih dan bibit ternak bersertifikat yang terdistribusi (%)	%	0	93,69						93,69								93,69			DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
				Persentase rata-rata peningkatan produksi tanaman pangan, hortikultura, dan peternakan di lokasi prioritas kemiskinan (%) (Hortikultura)	%	0	100,5														50,25			DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
				Persentase sarana pertanian yang digunakan dan kondisinya baik (%) (Perkebunan)	%	0	393,93						98,61								246,27			DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
				Persentase sarana pertanian yang digunakan dan kondisinya baik (%) (Hortikultura)	%	0	98,61						98,61								98,61			DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
		3.27.02.1.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Terlaksananya pengawasan peredaran sarana pertanian	kabupaten	4	20.047.075.700	3.388.303.312	4.025.000.000												3.388.303.312	16,90		DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
		3.27.02.1.01.01	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	laporan	10	656.790.000	1	135.295.500	125.000.000											1	135.295.500	10,00	20,60	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
Rata-rata capaian kinerja (%)							579.387.247.497	88.057.551.116	112.256.340.858												88.057.551.116	24,16	15,20		
Predikat Kinerja																								SR SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																									
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																									

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												I	II	III	IV											
												9	10	11	12											
K		Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
		3.27.02.1.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	dokumen	27	19.390.285.700	7	3.253.007.812	3.900.000.000										7	3.253.007.812	25,93	16,78	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN		
		<b>3.27.02.1.02</b>	<b>Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman</b>	<b>Terlaksananya Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman</b>	<b>kabupaten/kota</b>	<b>5</b>	<b>8.835.232.850</b>		<b>111.038.200</b>	<b>1.755.000.000</b>											<b>111.038.200</b>		<b>1,26</b>	<b>DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN</b>		
		3.27.02.1.02.01	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Jumlah Sertifikat Benih	lembar	696	644.010.800	138	111.038.200	130.000.000										138	111.038.200	19,83	17,24	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN		
		3.27.02.1.02.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	laporan	10	2.524.777.350			500.000.000														DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN		
		3.27.02.1.02.03	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	Jumlah Benih/Bibit Tanaman Pangan yang Memenuhi Persyaratan Mutu, Penyediaan dan Peredaran	dokumen	10	5.204.458.500			1.030.000.000														DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN		
		3.27.02.1.02.04	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	laporan	10	461.986.200			95.000.000														DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN		
		<b>3.27.02.1.04</b>	<b>Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi</b>	<b>Terlaksananya sertifikasi dan terdistribusinya bibit ternak yang memiliki Surat Keterangan Layak Bibit/SKLB ke masyarakat</b>	<b>ekor</b>	<b>355</b>	<b>103.912.374.900</b>		<b>16.948.657.276</b>	<b>21.000.000.000</b>											<b>16.948.657.276</b>		<b>16,31</b>	<b>DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN</b>		
				<b>Terlaksananya pembinaan dan fasilitasi pengembangan peternakan</b>	<b>kelompok</b>	<b>942</b>																		<b>DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN</b>		
Rata-rata capaian kinerja (%)							579.387.247.497		88.057.551.116	112.256.340.858											88.057.551.116	24,16	15,20			
Predikat Kinerja																										
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																										
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																										
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																										
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																										

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13/8x100	15 = 7 + 13	16 = 15 / 6 x 100%	17											
		3.27.02.1.04.01	Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	dokumen	5	86.471.402.900	4	16.948.657.276										4	16.948.657.276	80,00	19,60	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN				
		3.27.02.1.04.02	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	laporan	5	17.440.972.000																	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN			
		3.27.03	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</b>	<b>Persentase peningkatan prasarana pertanian yang dibangun dan digunakan (%) (Tanaman Pangan)</b>	%	0	32.039.364.900	16,67	4.996.651.742	2.375.000.000									8,335	4.996.651.742		15,60	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN				
				<b>Persentase peningkatan prasarana pertanian yang dibangun dan digunakan (%) (Perkebunan)</b>	%	0		16,67											8,335					DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN			
				<b>Persentase peningkatan prasarana pertanian yang dibangun dan digunakan (%) (BP3MBTP)</b>	%	0		16,67											8,335					DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN			
		3.27.03.1.01	<b>Penataan Prasarana Pertanian</b>	<b>Terlaksananya Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian</b>	kabupaten	4	32.039.364.900	4	4.996.651.742	2.375.000.000									4	4.996.651.742	100,00	15,60	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN				
		3.27.03.1.01.02	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	dokumen	5	872.418.300			175.000.000														DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN			
Rata-rata capaian kinerja (%)							579.387.247.497		88.057.551.116	112.256.340.858										88.057.551.116	24,16	15,20					
Predikat Kinerja																											
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																											
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																											

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13/8x100	15 = 7 + 13	16 = 15 / 6 x 100%	17									
		3.27.03.1.01.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	dokumen	5	11.118.069.600	1	1.773.631.800		2.200.000.000							1	1.773.631.800	20,00	15,95	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN			
		3.27.03.1.01.10	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi	unit	11	20.048.877.000	10	3.223.019.942		0							10	3.223.019.942	90,91	16,08	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN			
		<b>3.27.04</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER</b>	<b>Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular (%) (Peternakan)</b>	<b>- %</b>	<b>0</b>	<b>6.818.890.700</b>	<b>13,86</b>	<b>1.206.597.700</b>	<b>1.322.000.000</b>	<b>6,44</b>					<b>6,44</b>		<b>20,3</b>	<b>1.206.597.700</b>		<b>17,69</b>	<b>DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN</b>			
				<b>Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular (%) (BPPTDK)</b>	<b>- %</b>	<b>0</b>		<b>13,86</b>			<b>6,44</b>					<b>6,44</b>		<b>20,3</b>				<b>DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN</b>			
		<b>3.27.04.1.01</b>	<b>Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>	<b>Penjaminan Kesehatan Hewan Penutupan Dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular</b>	<b>kabupaten/kota</b>	<b>5</b>	<b>512.920.000</b>	<b>5</b>		<b>80.000.000</b>								<b>5</b>		<b>100,00</b>		<b>DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN</b>			
		3.27.04.1.01.01	Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Wilayah Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	laporan	5	512.920.000			80.000.000												DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN			
		<b>3.27.04.1.02</b>	<b>Pengawasan Pemasukan Dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi</b>	<b>Pengawasan Pemasukan Dan Pengeluaran Hewan Dan Produk Hewan Lintas Daerah</b>	<b>kabupaten/kota</b>	<b>5</b>	<b>3.256.171.000</b>	<b>5</b>		<b>632.500.000</b>								<b>5</b>		<b>100,00</b>		<b>DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN</b>			
Rata-rata capaian kinerja (%)							579.387.247.497		88.057.551.116		112.256.340.858								88.057.551.116	24,16	15,20				
Predikat Kinerja																						SR SR			
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																									
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																									

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17									
		3.27.04.1.02.01	Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	Jumlah Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	laporan	5	301.171.000			52.500.000													DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN		
		3.27.04.1.02.03	Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Provinsi	Jumlah Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Provinsi	laporan	5	2.955.000.000			580.000.000													DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN		
		<b>3.27.04.1.03</b>	<b>Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan</b>	<b>Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner</b>	<b>sampel</b>	<b>96.220</b>	<b>2.984.000.000</b>		<b>1.206.597.700</b>	<b>596.000.000</b>										<b>1.206.597.700</b>	<b>40,44</b>		<b>DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN</b>		
		3.27.04.1.03.03	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	dokumen	5	2.984.000.000	3	1.206.597.700	596.000.000									3	1.206.597.700	60,00	40,44	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN		
		<b>3.27.04.1.05</b>	<b>Kesejahteraan Hewan</b>	<b>Penjaminan Mutu dan Kesejahteraan Hewan</b>	<b>kabupaten/kota</b>	<b>5</b>	<b>65.799.700</b>	<b>5</b>		<b>13.500.000</b>									<b>5</b>		<b>100,00</b>		<b>DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN</b>		
		3.27.04.1.05.01	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Kesejahteraan Hewan dan Nomor Kontrol Veteriner (NKV)	Jumlah Sertifikat Kesejahteraan Hewan dan Nomor Kontrol Veteriner (NKV)	lembar	10	65.799.700	2		13.500.000									2		20,00		DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN		
		<b>3.27.05</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN</b>	<b>Rata-rata persentase rasio serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) yang dapat ditangani terhadap luas serangan OPT dan persentase rasio luas terkena Dampak Perubahan Iklim (DPI) yang dapat ditang</b>	<b>%</b>	<b>0</b>	<b>541.096.630</b>	<b>87,1</b>	<b>41.452.000</b>	<b>75.096.630</b>	<b>83,23</b>								<b>83,23</b>		<b>85,165</b>	<b>41.452.000</b>	<b>7,66</b>	<b>DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN</b>	
		<b>3.27.05.1.01</b>	<b>Pengendalian dan Penanggulangan</b>	<b>Terwujudnya pertanaman aman dari serangan OPT</b>	<b>sub sektor</b>	<b>3</b>	<b>541.096.630</b>	<b>3</b>	<b>41.452.000</b>	<b>75.096.630</b>									<b>3</b>	<b>41.452.000</b>	<b>100,00</b>	<b>7,66</b>	<b>DINAS PERTANIAN</b>		
Rata-rata capaian kinerja (%)							579.387.247.497		88.057.551.116	112.256.340.858											88.057.551.116	24,16	15,20		
Predikat Kinerja																							SR	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																									
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																									

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%							
													K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
			<b>Bencana Pertanian Provinsi</b>	<b>dan DPI untuk komoditas tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan</b>																				<b>DAN KETAHANAN PANGAN</b>
		3.27.05.1.01.01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	hektar	3.425	541.096.630	700	41.452.000	75.096.630									700	41.452.000	20,44	7,66	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
		<b>3.27.07</b>	<b>PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN</b>	<b>Persentase SDM pertanian yg meningkat kapasitasnya (%)</b>	%	<b>0</b>	<b>16.340.431.362</b>	<b>68,61</b>	<b>2.367.564.400</b>	<b>3.281.498.500</b>	<b>66,1</b>							<b>66,1</b>		<b>67,355</b>	<b>2.367.564.400</b>		<b>14,49</b>	<b>DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN</b>
		<b>3.27.07.1.01</b>	<b>Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian</b>	<b>Terlaksananya Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian</b>	<b>kabupaten/kota</b>	<b>5</b>	<b>833.000.700</b>	<b>5</b>		<b>107.688.500</b>									<b>5</b>			<b>100,00</b>	<b>DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN</b>	
		3.27.07.1.01.01	Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN	Jumlah Penyuluh Pertanian ASN yang Telah Mengikuti Pengembangan Kompetensi melalui Pendidikan dan Pelatihan	orang	870	733.000.700			107.688.500														DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
		3.27.07.1.01.02	Kerja Sama Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta	Jumlah Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta yang Telah mengikuti Pengembangan Kompetensi	orang	60	100.000.000			0														DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
		<b>3.27.07.1.02</b>	<b>Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian</b>	<b>Terlaksananya Penerapan Penyuluhan Pertanian</b>	<b>kabupaten/kota</b>	<b>5</b>	<b>15.352.429.662</b>	<b>5</b>	<b>2.367.564.400</b>	<b>3.100.000.000</b>									<b>5</b>	<b>2.367.564.400</b>	<b>100,00</b>	<b>15,42</b>	<b>DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN</b>	
		3.27.07.1.02.01	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	dokumen	5	14.788.921.162	2	2.230.890.400	3.000.000.000									2	2.230.890.400	40,00	15,08	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
		3.27.07.1.02.02	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	kelompok	174	563.508.500	45	136.674.000	100.000.000									45	136.674.000	25,86	24,25	DINAS PERTANIAN DAN	
Rata-rata capaian kinerja (%)							579.387.247.497		88.057.551.116	112.256.340.858											88.057.551.116	24,16	15,20	
Predikat Kinerja																								SR SR
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																								
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*:																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*:																								

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					6	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13/8x100	15 = 7 + 13	16 = 15 / 6 x 100%	17									
																							KETAHANAN PANGAN		
		3.27.07.1.03	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Jumlah kelembagaan ekonomi petani yang meningkat kapasitasnya	unit	10	155.001.000			73.810.000													DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN		
		3.27.07.1.03.02	Pendampingan Manajemen Koorporasi Petani	Jumlah Pendampingan Manajemen Koorporasi Petani	laporan	2	155.001.000			73.810.000													DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN		
3	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Perangkat Daerah	0.00.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Skor	0	301.866.292.355	91,75	48.124.641.865	60.561.857.728	84,16								175,91	48.124.641.865		15,94	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN		
				Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (BP3MBTP)	Nilai	0		93,35			84,16								177,51				DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN		
				Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (BPPTDK)	Nilai	0		93,92			84,16								178,08				DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN		
		0.00.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tercapainya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat	%	100	451.763.700	100	53.842.100	89.537.000									50	53.842.100	50,00	11,92	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN		
		0.00.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	24	180.576.400	3	17.845.000	35.789.000									3	17.845.000	12,50	9,88	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN		
		0.00.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	dokumen	24	113.524.100	4	16.197.800	22.500.000									4	16.197.800	16,67	14,27	DINAS PERTANIAN DAN		
Rata-rata capaian kinerja (%)							579.387.247.497		88.057.551.116	112.256.340.858										88.057.551.116	24,16	15,20			
Predikat Kinerja																							SR SR		
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																									
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																									

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
					6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100			15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	
				Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																				KETAHANAN PANGAN				
		0.00.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	laporan	15	157.663.200	3	19.799.300	31.248.000										3	19.799.300	20,00	12,56	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN				
		<b>0.00.01.1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Tercapainya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>263.490.171.558</b>	<b>100</b>	<b>42.079.931.000</b>	<b>53.179.113.035</b>										<b>50</b>	<b>42.079.931.000</b>	<b>50,00</b>	<b>15,97</b>	<b>DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN</b>				
		0.00.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	386	262.586.531.558	386	41.947.175.000	53.000.017.035										386	41.947.175.000	100,00	15,97	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN				
		0.00.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	dokumen	15	823.086.000	3	122.250.000	163.131.000										3	122.250.000	20,00	14,85	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN				
		0.00.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	laporan	5	80.554.000	1	10.506.000	15.965.000										1	10.506.000	20,00	13,04	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN				
		<b>0.00.01.1.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Tercapainya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>531.873.000</b>	<b>100</b>	<b>87.120.000</b>	<b>105.415.000</b>										<b>50</b>	<b>87.120.000</b>	<b>50,00</b>	<b>16,38</b>	<b>DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN</b>				
		0.00.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	laporan	15	531.873.000	3	87.120.000	105.415.000										3	87.120.000	20,00	16,38	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN				
		<b>0.00.01.1.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Tercapainya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>206.485.000</b>	<b>100</b>	<b>10.260.730</b>	<b>40.924.000</b>										<b>50</b>	<b>10.260.730</b>	<b>50,00</b>	<b>4,97</b>	<b>DINAS PERTANIAN DAN</b>				
Rata-rata capaian kinerja (%)							579.387.247.497		88.057.551.116	112.256.340.858											88.057.551.116	24,16	15,20					
Predikat Kinerja																								SR SR				
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																												
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																												

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					6	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
1	2	3	4	5	6	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	17				
		0.00.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	dokumen	25	206.485.000	1	10.260.730	40.924.000									1	10.260.730	4,00	4,97	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN		
		<b>0.00.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Tercapainya Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>2.299.820.300</b>	<b>100</b>	<b>169.688.539</b>	<b>472.380.000</b>									<b>50</b>	<b>169.688.539</b>	<b>50,00</b>	<b>7,38</b>	<b>DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN</b>		
		0.00.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	15	275.171.100	3	14.455.105	54.537.000									3	14.455.105	20,00	5,25	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN		
		0.00.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	15	617.517.600	3	39.332.179	122.389.000									3	39.332.179	20,00	6,37	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN		
		0.00.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket	10	70.433.500	2	5.879.450	13.959.000									2	5.879.450	20,00	8,35	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN		
		0.00.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	paket	15	457.175.900	3	34.913.025	90.610.000									3	34.913.025	20,00	7,64	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN		
		0.00.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	dokumen	15	80.149.200			15.885.000													DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN		
		0.00.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	15	799.373.000	3	75.108.780	175.000.000									3	75.108.780	20,00	9,40	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN		
Rata-rata capaian kinerja (%)							579.387.247.497		88.057.551.116	112.256.340.858										88.057.551.116	24,16	15,20			
Predikat Kinerja																							SR SR		
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																									
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																									

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6		7		8		9	10	11	12	13	14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17				
		<b>0.00.01.1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Tercapainya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>2.310.985.900</b>	<b>100</b>	<b>6.261.960</b>	<b>175.000.000</b>								<b>50</b>	<b>6.261.960</b>	<b>50,00</b>	<b>0,27</b>	<b>DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN</b>				
		0.00.01.1.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	unit	1	600.000.000			0												DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN				
		0.00.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	unit	1	350.000.000			0												DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN				
		0.00.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	28	150.000.000	3	6.077.700	75.000.000								3	6.077.700	10,71	4,05	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN				
		0.00.01.1.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	1	758.761.000			0												DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN				
		0.00.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	28	452.224.900	1	184.260	100.000.000								1	184.260	3,57	0,04	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN				
		<b>0.00.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Tercapainya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>22.993.531.866</b>	<b>100</b>	<b>4.552.732.873</b>	<b>4.583.925.141</b>								<b>50</b>	<b>4.552.732.873</b>	<b>50,00</b>	<b>19,80</b>	<b>DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN</b>				
		0.00.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	15	14.651.000	2	1.495.000	2.904.000								2	1.495.000	13,33	10,20	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN				
		0.00.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya	laporan	15	6.574.120.475	3	1.171.345.159	1.307.866.000								3	1.171.345.159	20,00	17,82	DINAS PERTANIAN				
Rata-rata capaian kinerja (%)							579.387.247.497		88.057.551.116	112.256.340.858									88.057.551.116	24,16	15,20					
Predikat Kinerja																						SR	SR			
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																										
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																										
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																										
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																										

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13/8x100	15 = 7 + 13	16 = 15 / 6 x 100%	17									
			Daya Air dan Listrik	Air dan Listrik yang Disediakan																		DAN KETAHANAN PANGAN			
		0.00.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	15	16.404.760.391	3	3.379.892.714	3.273.155.141										3	3.379.892.714	20,00	20,60	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
		<b>0.00.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Tercapainya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>9.581.661.031</b>	<b>100</b>	<b>1.164.804.663</b>	<b>1.915.563.552</b>										<b>50</b>	<b>1.164.804.663</b>	<b>50,00</b>	<b>12,16</b>	<b>DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN</b>	
		0.00.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	unit	10	418.625.000	2	65.872.300	82.969.000										2	65.872.300	20,00	15,74	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
		0.00.01.1.09.011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	607	628.340.800	55		107.682.000										55			9,06	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
		0.00.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	1.040	5.883.603.331	219	1.016.686.296	1.174.912.552										219	1.016.686.296	21,06	17,28	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
		0.00.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	427	707.209.000	45	81.511.067	150.000.000										45	81.511.067	10,54	11,53	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
		0.00.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	12	1.943.882.900	5	735.000	400.000.000										5	735.000	41,67	0,04	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
<b>4</b>	<b>Terwujudnya ketahanan</b>	<b>2.09.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN</b>	<b>Tingkat ketersediaan energi, berdasarkan Angka</b>	<b>kkal/kap/hari</b>	<b>0</b>	<b>3.807.592.000</b>	<b>14.940</b>	<b>815.598.300</b>	<b>675.000.000</b>	<b>3.735</b>								<b>3.735</b>	<b>18.675</b>	<b>815.598.300</b>		<b>21,42</b>	<b>DINAS PERTANIAN</b>	
Rata-rata capaian kinerja (%)							579.387.247.497		88.057.551.116	112.256.340.858											88.057.551.116	24,16	15,20		
Predikat Kinerja																				SR	SR		SR	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																									
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																									

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					6	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	17				
	pangan		DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Kecukupan Gizi (AKG) 2.400 kkal/kap/hari																			DAN KETAHANAN PANGAN				
				Tingkat konsumsi energi, berdasarkan Angka Kecukupan Gizi (AKG) 2.100 kkal/kap/hari	kkal/kap/hari	0		8.174																DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN			
		2.09.03.1.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Penyediaan dan penyaluran pangan pokok dan pangan lainnya	tahun	1	2.404.000.000	1	513.179.300	375.000.000											1	513.179.300	100,00	21,35	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN		
		2.09.03.1.01.01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	laporan	30	696.000.000			150.000.000														DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN			
		2.09.03.1.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	laporan	13	1.708.000.000	1	513.179.300	225.000.000											1	513.179.300	7,69	30,05	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN		
		2.09.03.1.04	Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi	Pencapaian target konsumsi golongan pangan umbi-umbian	kg/kapita/tahun	10,6	1.403.592.000	10,5	302.419.000	300.000.000											10,5	302.419.000	99,06	21,55	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN		
		2.09.03.1.04.01	Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	dokumen	5	315.277.100	2	278.928.000	50.000.000											2	278.928.000	40,00	88,47	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN		
		2.09.03.1.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan	laporan	5	1.038.314.900			250.000.000														DINAS PERTANIAN DAN			
Rata-rata capaian kinerja (%)							579.387.247.497		88.057.551.116	112.256.340.858												88.057.551.116	24,16	15,20			
Predikat Kinerja																											
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																											
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																											

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					6	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
1	2	3	4	5	6		7		8		9	10	11	12	13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17		
			Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)																			KETAHANAN PANGAN		
		2.09.03.1.04.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	laporan	1	50.000.000	1	23.491.000	0										1	23.491.000	100,00	46,98	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
		<b>2.09.04</b>	<b>PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN</b>	<b>Persentase Desa Mandiri Pangan dalam tahap Kemandirian (%)</b>	<b>%</b>	<b>0</b>	<b>713.030.000</b>	<b>94,32</b>	<b>16.208.000</b>	<b>113.250.000</b>	<b>94,32</b>									<b>94,32</b>	<b>16.208.000</b>		<b>2,27</b>	<b>DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN</b>	
		<b>2.09.04.1.01</b>	<b>Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi</b>	<b>Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan</b>	<b>dokumen</b>	<b>22</b>	<b>215.750.000</b>	<b>5</b>	<b>16.208.000</b>	<b>50.000.000</b>										<b>5</b>	<b>16.208.000</b>	<b>22,73</b>	<b>7,51</b>	<b>DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN</b>	
		2.09.04.1.01.01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi yang Dimutakhirkan	dokumen	25	215.750.000	5	16.208.000	50.000.000										5	16.208.000	20,00	7,51	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
		<b>2.09.04.1.02</b>	<b>Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi</b>	<b>Penanganan Kerawanan Pangan</b>	<b>kabupaten/kota</b>	<b>5</b>	<b>497.280.000</b>	<b>5</b>		<b>63.250.000</b>										<b>5</b>			<b>100,00</b>	<b>DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN</b>	
		2.09.04.1.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi	dokumen	5	497.280.000			63.250.000														DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
		<b>2.09.05</b>	<b>PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN</b>	<b>Persentase hasil pengujian Pangan Segar Asal Tumbuhan yang memenuhi syarat keamanan pangan (%)</b>	<b>%</b>	<b>0</b>	<b>819.900.000</b>	<b>80,84</b>		<b>170.000.000</b>	<b>80,84</b>									<b>80,84</b>				<b>DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN</b>	
		<b>2.09.05.1.01</b>	<b>Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan</b>	<b>Pengawasan dan penjaminan mutu keamanan pangan segar</b>	<b>kabupaten/kota</b>	<b>5</b>	<b>819.900.000</b>	<b>5</b>		<b>170.000.000</b>										<b>5</b>			<b>100,00</b>	<b>DINAS PERTANIAN DAN</b>	
Rata-rata capaian kinerja (%)							579.387.247.497		88.057.551.116	112.256.340.858											88.057.551.116	24,16	15,20		
Predikat Kinerja																									
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																									
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																									

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp		K	Rp
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
1	2	3	4	5	6		7		8		9	10	11	12	13	14 = 13/8x100	15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17				
			<b>Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota</b>																				<b>KETAHANAN PANGAN</b>		
		2.09.05.1.01.01	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi	Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi Yang Dibina	dokumen	5	223.800.000			50.000.000													DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN		
		2.09.05.1.01.02	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	lembar	25	278.400.000			60.000.000													DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN		
		2.09.05.1.01.04	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	dokumen	5	317.700.000	1		60.000.000								1			20,00		DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN		
		<b>2.22.08</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN</b>	<b>Persentase peningkatan Lumbung Mataraman tahap kemandirian (%) (Ketahanan Pangan)</b>	<b>%</b>	<b>0</b>	<b>60.237.936.100</b>	<b>90,78</b>	<b>8.484.164.159</b>	<b>11.312.638.000</b>	<b>24,6</b>						<b>24,6</b>			<b>57,69</b>	<b>8.484.164.159</b>		<b>14,08</b>	<b>DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN</b>	
				<b>Persentase peningkatan Lumbung Mataraman tahap kemandirian (%) (Tanaman Pangan)</b>	<b>%</b>	<b>0</b>		<b>90,78</b>												<b>45,39</b>			<b>DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN</b>		
				<b>Persentase peningkatan Lumbung Mataraman tahap kemandirian (%) (BPSDMP)</b>	<b>%</b>	<b>0</b>		<b>24,6</b>												<b>12,3</b>			<b>DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN</b>		
				<b>Persentase peningkatan Lumbung Mataraman tahap kemandirian (%) (Hortikultura)</b>	<b>%</b>	<b>0</b>		<b>90,78</b>			<b>24,6</b>						<b>24,6</b>			<b>57,69</b>			<b>DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN</b>		
				<b>Persentase peningkatan Lumbung Mataraman tahap kemandirian (%) (Hortikultura)</b>	<b>%</b>	<b>0</b>		<b>24,6</b>			<b>24,6</b>						<b>24,6</b>			<b>24,6</b>			<b>DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN</b>		
Rata-rata capaian kinerja (%)							579.387.247.497		88.057.551.116	112.256.340.858											88.057.551.116	24,16	15,20		
Predikat Kinerja																							SR	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																									
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																									

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					6	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
1	2	3	4	5	6		7		8		9	10	11	12	13	14 = 13/8x100	15 = 7 + 13	16 = 15 / 6 x 100%	17						
				kemandirian (%) (Peternakan)																			KETAHANAN PANGAN		
				Persentase peningkatan Lumbung Mataraman tahap kemandirian (%) (BPPTDK)	%	0					24,6					24,6			12,3				DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN		
				Persentase peningkatan Lumbung Mataraman tahap kemandirian (%) (BPTP)	%	0					24,6					24,6			12,3				DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN		
		2.22.08.5.06	Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Tersedianya sarana prasarana penunjang keistimewaan	objek	2	7.889.700.000	1	2.978.894.305	1.870.000.000								1	2.978.894.305	50,00	37,76		DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN		
		2.22.08.5.06.01	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya	Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya	unit	1	7.889.700.000	2	2.978.894.305	1.870.000.000								2	2.978.894.305	200,00	37,76		DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN		
		2.22.08.5.08	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	Jumlah pengetahuan dan teknologi tradisional pertanian yang dilestarikan	jenis	5	52.348.236.100	5	5.505.269.854	9.442.638.000								5	5.505.269.854	100,00	10,52		DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN		
		2.22.08.5.08.01	Pengembangan Lumbung Mataraman	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan Lumbung Mataraman	laporan	72	47.797.886.100	24	5.505.269.854	8.013.138.000								24	5.505.269.854	33,33	11,52		DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN		
		2.22.08.5.08.07	Pengembangan Sistem Pertanian Tradisional	Jumlah Dokumen Pengembangan Sistem Pertanian Tradisional	dokumen	18	4.550.350.000			1.429.500.000													DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN		
Rata-rata capaian kinerja (%)							579.387.247.497		88.057.551.116	112.256.340.858									88.057.551.116	24,16	15,20				
Predikat Kinerja																									
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																									
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																									

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan  
NIP. 1999999999999

NI MADE DWIPANTI INDRAYANTI, S.T., M.T.  
NIP. 197010181998032007

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUNGAN PROVINSI
RENJA PERANGKAT DAERAH DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERIODE PELAKSANAAN : 2025

Indikator dan target kinerja SKPD yang mengacu pada sasaran RKPD:

Table with 4 columns: No, Indikator, Target, Realisasi. Lists 10 indicators related to migration, training, and employment.

Main evaluation table with 17 columns: No, Sasaran, Kode, Urusan/Bidang, Indikator Kinerja Program, Target Renstra, Realisasi Capaian, Target Kinerja, Realisasi Kinerja, Realisasi Capaian, Tingkat Capaian, Realisasi Kinerja dan Anggaran, Tingkat Capaian, Perangkat Daerah. Includes detailed data for various indicators and a summary row.

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
					K	Rp	K	Rp		K	Rp	I	II			III	IV	K	Rp		K	Rp	K
1	2	3	4	5	6		7		8	9		10	11	12	13	14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
				<i>Berbasis kompetensi pada Tahun -n</i>																			
				<i>Jumlah tenaga kerja yang tersertifikasi</i>	Orang	760																DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
				<i>Jumlah peserta pemagangan yang mendapatkan pelatihan dan pendampingan ditempat magang</i>	Orang	280	150									150			53,57			DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
				<i>Jumlah peserta yang mendapatkan pelatihan SDM K3</i>	Orang	840																DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
		2.07.03.1.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	Orang	5.600	103.534.973.150	179	21.737.637.981	22.500.000.000		131.868.410				131.868.410	0,59	179	21.869.506.391	3,20	21,12	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
		2.07.03.1.01.03	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan kerja	Paket	4	5.000.000.000	3	11.395.850	1.200.000.000								3	11.395.850	75,00	0,23	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
		<b>2.07.03.1.02</b>	<b>Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja</b>	<b>Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang Terakreditasi sampai dengan tahun n</b>	<b>Lembaga</b>	<b>135</b>	<b>194.728.500</b>	<b>111</b>	<b>9.657.380</b>	<b>39.270.000</b>								<b>111</b>	<b>9.657.380</b>	<b>82,22</b>	<b>4,96</b>	<b>DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI</b>	
		2.07.03.1.02.01	Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang Terakreditasi	Lembaga	135	194.728.500	103	9.657.380	39.270.000								103	9.657.380	76,30	4,96	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
		<b>2.07.03.1.03</b>	<b>Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Menengah</b>	<b>Jumlah Perusahaan Menengah yang Mendapatkan Konsultasi Peningkatan Produktivitas pada Tahun-n</b>	<b>Perusahaan</b>	<b>40</b>	<b>510.300.000</b>			<b>121.000.000</b>												<b>DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI</b>	
		2.07.03.1.03.01	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah	Jumlah perusahaan menengah yang mendapatkan konsultasi peningkatan produktivitas	Perusahaan	40	510.300.000			121.000.000												DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
		<b>2.07.03.1.04</b>	<b>Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi</b>	<b>Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan daya saing Tenaga Kerja di Tingkat daerah</b>	<b>Dokumen</b>	<b>45</b>	<b>524.208.800</b>	<b>10</b>	<b>49.060.300</b>	<b>100.569.000</b>		<b>31.389.000</b>				<b>31.389.000</b>	<b>31,21</b>	<b>10</b>	<b>80.449.300</b>	<b>22,22</b>	<b>15,35</b>	<b>DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI</b>	
		2.07.03.1.04.01	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan daya saing Tenaga Kerja di Tingkat daerah	Dokumen	45	524.208.800	0	49.060.300	100.569.000		31.389.000				31.389.000	31,21		80.449.300		15,35	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
		<b>2.22.08</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN</b>	<b>Persentase jumlah angkatan kerja yang</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>279.629.081.000</b>	<b>100</b>	<b>15.959.123.364</b>	<b>61.820.200.000</b>	<b>50</b>	<b>15.193.400</b>				<b>50</b>	<b>15.193.400</b>	<b>0,02</b>	<b>75</b>	<b>15.974.316.764</b>	<b>75,00</b>	<b>5,71</b>	<b>DINAS TENAGA KERJA DAN</b>
Rata-rata capaian kinerja (%)						654.705.726.892		72.067.479.014	140.762.584.000	181.111.535					SR	SR					ST	SR	
Predikat Kinerja															SR	SR					ST	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:					Tersedianya peraturan-peraturan ketenagakerjaan dan SOP serta sinergi antar bidang dan UPT di Disnakertrans DIY mendorong kelancaran pelaksanaan kegiatan sehingga dapat terlaksana sesuai target dan jadwal yang ditentukan.																		
Faktor penghambat pencapaian kinerja:					Pelaksanaan beberapa kegiatan terpaksa ditunda untuk meniadakan adanya instruksi efisiensi anggaran dari Pemerintah.																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):					Melakukan penyesuaian anggaran dan penjadwalan kembali beberapa kegiatan yang tertunda pelaksanaannya.																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):					Meningkatkan kajian isu-isu strategis ketenagakerjaan agar dapat terakomodir dalam program kerja Disnakertrans serta meningkatkan kerjasama lintas sektor agar capaian kinerja program/kegiatan/sub kegiatan lebih optimal.																		

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
					K	Rp	K	Rp		K	Rp	I	II			III	IV	K	Rp		K	Rp	K
1	2	3	4	5	6		7		8	9		10	11	12	13	14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17	
			KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	terfasilitasi pemahaman budaya kerja																		TRANSMIGRASI	
				Persentase jumlah angkatan kerja yang kompeten	%	80		95,5										47,75		59,69		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
				Persentase perluasan kesempatan kerja yang terfasilitasi	%	100		100										50		50,00		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
				Persentase peningkatan kesejahteraan pekerja melalui sistem pengupahan	%	35		37										18,5		52,86		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
				Persentase peningkatan produktivitas tenaga kerja dikawasan selatan	%	70		100										50		71,43		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
				Persentase penumbuhan calon wirausaha baru	%	75		120			2					2		61		81,33		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
				Jumlah angkatan kerja yang diintervensi melalui pemberdayaan dan pengembangan budaya kerja istimewa	orang	0																DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
		2.22.08.5.09	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Jumlah Dokumen Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	Dokumen	9	279.629.081.000	9	15.959.123.364	61.820.200.000		15.193.400				15.193.400	0,02	9	15.974.316.764	100,00	5,71	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
		2.22.08.5.09.17	Pengembangan Kewirausahaan Desa	Jumlah Laporan Pengembangan Kewirausahaan Desa	Laporan	4	5.601.000.000	1	708.257.333	1.331.000.000		15.193.400				15.193.400	1,14	1	723.450.733	25,00	12,92	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
		2.22.08.5.09.21	Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	Jumlah Dokumen Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	Dokumen	33	55.743.881.000	7	3.787.450.235	6.465.000.000								7	3.787.450.235	21,21	6,79	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
		2.22.08.5.09.22	Revitalisasi Budaya Gotong Royong Untuk Pemberdayaan Ekonomi Desa	Jumlah Laporan Revitalisasi Budaya Gotong Royong Untuk Pemberdayaan Ekonomi Desa	Laporan	8	218.284.200.000	2	11.463.415.796	54.024.200.000								2	11.463.415.796	25,00	5,25	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
		4.01.10.5.02.0001	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase capaian implementasi inovasi layanan publik	%	100	240.000.000	40	81.343.875	100.000.000	3					3		21,5	81.343.875	21,50	33,89	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
Rata-rata capaian kinerja (%)						654.705.726.892		72.067.479.014		140.762.584.000		181.111.535				181.111.535	0,13		72.248.590.549	118,62	11,04		
Predikat Kinerja																SR	SR					ST	SR
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:					Tersedianya peraturan-peraturan ketenagakerjaan dan SOP serta sinergi antar bidang dan UPT di Disnakertrans DIY mendorong kelancaran pelaksanaan kegiatan sehingga dapat terlaksana sesuai target dan jadwal yang ditentukan.																		
Faktor penghambat pencapaian kinerja:					Pelaksanaan beberapa kegiatan terpaksa ditunda untuk menindaklanjuti adanya instruksi efisiensi anggaran dari Pemerintah.																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):					Melakukan penyesuaian anggaran dan penjadwalan kembali beberapa kegiatan yang tertunda pelaksanaannya.																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):					Meningkatkan kajian isu-isu strategis ketenagakerjaan agar dapat terakomodir dalam program kerja Disnakertrans serta meningkatkan kerjasama lintas sektor agar capaian kinerja program/kegiatan/sub kegiatan lebih optimal.																		

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Sub Kegiatan/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						K	Rp		K	Rp	K	Rp						K	Rp	K	Rp
						I	II		III	IV	13							14 = 13/8x100		15 = 7 + 13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13/8x100	15 = 7 + 13	16 = 15 / 6 x 100%	17					
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
		4.01.10.5.02	Peningkatan Budaya Pemerintahan	Tercapainya peningkatan implementasi budaya pemerintahan	%	100	240.000.000	81.343.875	100.000.000						81.343.875	33,89	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI				
		4.01.10.5.02.01	Implementasi Budaya Pemerintahan DIY	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan DIY	Dokumen	4	240.000.000	2	81.343.875	100.000.000					2	81.343.875	50,00	33,89	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI		
3	Meningkatnya Kesempatan Kerja	2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Jumlah kabupaten kota yang dibina dalam penyusunan RTK	Kab/Kota	5	1.101.665.000	5	9.792.600	271.500.000					5	9.792.600	100,00	0,89	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI		
		2.07.02.1.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	Dokumen	1	1.101.665.000	1	9.792.600	271.500.000					1	9.792.600	100,00	0,89	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI		
		2.07.02.1.01.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	Dokumen	5	800.000.000	1	9.792.600	200.000.000					1	9.792.600	20,00	1,22	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI		
		2.07.02.1.01.02	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah SDM Kabupaten/Kota yang Mengikuti Pelatihan Penyusunan RTK Mikro	Orang	80	301.665.000			71.500.000									DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI		
		2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase lembaga penempatan memiliki kinerja baik	%	60	5.727.014.800	46	61.946.944	1.314.380.000	7,14				7,14		26,57	61.946.944	44,28	1,08	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
				Persentase pemberdayaan masyarakat miskin yang terfasilitasi	%	90		100							50		55,56			DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
				Persentase perluasan kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat yang terfasilitasi	%	90		100							50		55,56			DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
				jumlah perluasan kesempatan kerja yang diciptakan	Orang	0														DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
		2.07.04.1.01	Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan Melalui layanan AKAD, AKL dan ULD sampai dengan tahun - n	Orang	8.000	1.663.723.800	6.500	48.741.357	335.875.000					6.500	48.741.357	81,25	2,93	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI		
		2.07.04.1.01.02	Pelayanan Antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan Melalui layanan AKAD, AKL dan ULD	Orang	8.500	902.810.000	25	21.032.185	168.725.000					25	21.032.185	0,29	2,33	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI		
		2.07.04.1.01.03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	Orang	100	295.126.000	25	4.697.312	69.950.000					25	4.697.312	25,00	1,59	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI		
		2.07.04.1.01.04	Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan	Orang	250	348.590.400		7.274.244	72.200.000						7.274.244		2,09	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI		
Rata-rata capaian kinerja (%)							654.705.726.892		72.067.479.014	140.762.584.000			181.111.535	0,13		72.248.590.549	118,62	11,04			
Predikat Kinerja													SR	SR				ST	SR		
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:						Tersedianya peraturan-peraturan ketenagakerjaan dan SOP serta sinergi antar bidang dan UPT di Disnakertrans DIY mendorong kelancaran pelaksanaan kegiatan sehingga dapat terlaksana sesuai target dan jadwal yang ditentukan.															
Faktor penghambat pencapaian kinerja:						Pelaksanaan beberapa kegiatan terpaksa ditunda untuk meniadakan adanya instruksi efisiensi anggaran dari Pemerintah.															
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):						Melakukan penyesuaian anggaran dan penjadwalan kembali beberapa kegiatan yang tertunda pelaksanaannya.															
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):						Meningkatkan kajian isu-isu strategis ketenagakerjaan agar dapat terakomodir dalam program kerja Disnakertrans serta meningkatkan kerjasama lintas sektor agar capaian kinerja program/kegiatan/sub kegiatan lebih optimal.															



No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					K	Rp	K	Rp		K	Rp	I	II			III	IV	13	14 = 13/8x100		15 = 7 + 13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13/8x100	15 = 7 + 13	16 = 15 / 6 x 100%	17					
			(Antar Kerja Antar Daerah) dan AKL (Antar Kerja Lokal)	Penempatan Tenaga Kerja AKAD dan AKL																	
		2.07.04.1.01.05	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja	Orang	6.340	117.197.400	6.315	15.737.616	25.000.000						6.315	15.737.616	99,61	13,43	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
		<b>2.07.04.1.02</b>	<b>Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) lebih dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah LPTKS yang dilakukan pengawasan dan pengendalian sesuai aturan yang berlaku</b>	<b>Lembaga</b>	<b>40</b>	<b>301.665.000</b>			<b>71.500.000</b>										<b>DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI</b>	
		2.07.04.1.02.02	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Jumlah LPTKS yang dilakukan Pengawasan dan Pengendalian sesuai dengan Aturan yang Berlaku	Lembaga	10	301.665.000			71.500.000										DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
		<b>2.07.04.1.03</b>	<b>Pengelolaan Informasi Pasar Kerja</b>	<b>jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online</b>	<b>Dokumen</b>	<b>1</b>	<b>1.561.626.000</b>	<b>1</b>	<b>7.836.665</b>	<b>357.005.000</b>						<b>1</b>	<b>7.836.665</b>	<b>100,00</b>	<b>0,50</b>	<b>DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI</b>	
		2.07.04.1.03.01	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Dokumen	1	204.204.000	1	4.326.399	48.400.000						1	4.326.399	100,00	2,12	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
		2.07.04.1.03.02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja Yang Terdaftar Dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (KarirHub)	Orang	9.000	356.402.000	50	3.510.266	66.605.000						50	3.510.266	0,56	0,98	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
		2.07.04.1.03.03	Job Fair /Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	Orang	180	1.001.020.000			242.000.000										DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
		<b>2.07.04.1.04</b>	<b>Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi</b>	<b>Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan</b>	<b>Orang</b>	<b>100</b>	<b>2.200.000.000</b>	<b>25</b>	<b>5.368.922</b>	<b>550.000.000</b>						<b>25</b>	<b>5.368.922</b>	<b>25,00</b>	<b>0,24</b>	<b>DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI</b>	
		2.07.04.1.04.01	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	Orang	200	1.200.000.000	40	5.368.922	300.000.000						40	5.368.922	20,00	0,45	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
		2.07.04.1.04.04	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	Orang	25	1.000.000.000			250.000.000										DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
Rata-rata capaian kinerja (%)						654.705.726.892		72.067.479.014	140.762.584.000	181.111.535					181.111.535	0,13	72.248.590.549	118,62	11,04		
Predikat Kinerja														SR	SR					ST	SR
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:					Tersedianya peraturan-peraturan ketenagakerjaan dan SOP serta sinergi antar bidang dan UPT di Disnakertrans DIY mendorong kelancaran pelaksanaan kegiatan sehingga dapat terlaksana sesuai target dan jadwal yang ditentukan.																
Faktor penghambat pencapaian kinerja:					Pelaksanaan beberapa kegiatan terpaksa ditunda untuk menindaklanjuti adanya instruksi efisiensi anggaran dari Pemerintah.																
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):					Melakukan penyesuaian anggaran dan penjadwalan kembali beberapa kegiatan yang tertunda pelaksanaannya.																
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):					Meningkatkan kajian isu-isu strategis ketenagakerjaan agar dapat terakomodir dalam program kerja Disnakertrans serta meningkatkan kerjasama lintas sektor agar capaian kinerja program/kegiatan/sub kegiatan lebih optimal.																

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
					K	Rp	K	Rp		K	Rp	I	II			III	IV	K	Rp		K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6		7		8	9		10	11	12	13	14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
		3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase calon transmigrasi yang ditempatkan	%	80	1.344.572.000	125	197.046.100	275.000.000								62,5	197.046.100	78,13	14,65	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI			
				Persentase jumlah transmigran yang difasilitasi perpindahannya di kawasan transmigran	%	0																DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI			
		3.32.03.1.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah transmigran yang ditempatkan	KK	145	1.344.572.000	30	197.046.100	275.000.000								30	197.046.100	20,69	14,65	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI			
		3.32.03.1.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Laporan	1	624.637.000	1	58.138.808	125.000.000								1	58.138.808	100,00	9,31	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI			
		3.32.03.1.01.04	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	Jumlah Transmigran yang Ditempatkan	KK	30	719.935.000	20	138.907.292	150.000.000								20	138.907.292	66,67	19,29	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI			
4	Meningkatnya layanan ketenagakerjaan	2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase jumlah layanan yang terselesaikan	%	99	2.197.254.700	100	313.795.013	410.800.000	77	2.660.725						77	2.660.725	0,65	88,5	316.455.738	89,39	14,40	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
				Jumlah perusahaan yang menerapkan sarana hubungan industrial dan kebijakan pengupahan	Perusahaan	0																	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI		
		2.07.05.1.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Perselisihan yang Dicegah sampai dengan tahun - n	Perkara	1.130	1.297.255.700	210	162.319.421	210.800.000									210	162.319.421	18,58	12,51	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI		
		2.07.05.1.02.01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	Perusahaan	1.130	470.000.000	210	49.956.567	90.000.000									210	49.956.567	18,58	10,63	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI		
Rata-rata capaian kinerja (%)						654.705.726.892		72.067.479.014		140.762.584.000		181.111.535						181.111.535	0,13		72.248.590.549	118,62	11,04		
Predikat Kinerja																		SR	SR				ST	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:					Tersedianya peraturan-peraturan ketenagakerjaan dan SOP serta sinergi antar bidang dan UPT di Disnakertrans DIY mendorong kelancaran pelaksanaan kegiatan sehingga dapat terlaksana sesuai target dan jadwal yang ditentukan.																				
Faktor penghambat pencapaian kinerja:					Pelaksanaan beberapa kegiatan terpaksa ditunda untuk meniadakan adanya instruksi efisiensi anggaran dari Pemerintah.																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):					Melakukan penyesuaian anggaran dan penjadwalan kembali beberapa kegiatan yang tertunda pelaksanaannya.																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):					Meningkatkan kajian isu-isu strategis ketenagakerjaan agar dapat terakomodir dalam program kerja Disnakertrans serta meningkatkan kerjasama lintas sektor agar capaian kinerja program/kegiatan/sub kegiatan lebih optimal.																				

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
					K	Rp	K	Rp		K	Rp	I	II			III	IV	K	Rp		K	Rp	K
1	2	3	4	5	6		7		8	9		10	11	12	13	14 = 13/8x100	15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
			yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi																				
		2.07.05.1.02.02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	Perkara	10	84.225.200	10	9.986.860	17.000.000							10	9.986.860	100,00	11,86	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI		
		2.07.05.1.02.03	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	Asosiasi dan Serikat Pekerja	200	230.000.000	8	49.890.551	0							8	49.890.551	4,00	21,69	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI		
		2.07.05.1.02.04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Provinsi	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	Lembaga	1	320.000.000	1	49.990.746	65.000.000							1	49.990.746	100,00	15,62	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI		
		2.07.05.1.02.05	Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi	Jumlah Perusahaan yang Mendapatkan Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi	Orang	80	193.030.500	6	2.494.697	38.800.000							6	2.494.697	7,50	1,29	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI		
		<b>2.07.05.1.03</b>	<b>Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)</b>	<b>Jumlah Penetapan UMP</b>	<b>SK</b>	<b>5</b>	<b>899.999.000</b>	<b>1</b>	<b>151.475.592</b>	<b>200.000.000</b>							<b>2.660.725</b>	<b>1,33</b>	<b>1</b>	<b>154.136.317</b>	<b>20,00</b>	<b>17,13</b>	<b>DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI</b>
		2.07.05.1.03.01	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)	Jumlah Penetapan UMP	SK	1	450.000.000	4	50.856.869	100.000.000							2.660.725	2,66	4	53.517.594	400,00	11,89	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		2.07.05.1.03.05	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Terdaftar dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Orang	399	449.999.000	300	100.618.723	100.000.000								300	100.618.723	75,19	22,36	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
		<b>2.07.06</b>	<b>PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN</b>	<b>Persentase jumlah pengawasan norma kerja yang terselesaikan</b>	<b>%</b>	<b>80</b>	<b>6.695.569.100</b>	<b>100</b>	<b>634.429.664</b>	<b>1.213.231.000</b>	<b>25,33</b>						<b>25,33</b>		<b>62,665</b>	<b>634.429.664</b>	<b>78,33</b>	<b>9,48</b>	<b>DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI</b>
Rata-rata capaian kinerja (%)						654.705.726.892		72.067.479.014		140.762.584.000		181.111.535					181.111.535	0,13		72.248.590.549	118,62	11,04	
Predikat Kinerja																	SR	SR				ST	SR
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:					Tersedianya peraturan-peraturan ketenagakerjaan dan SOP serta sinergi antar bidang dan UPT di Disnakertrans DIY mendorong kelancaran pelaksanaan kegiatan sehingga dapat terlaksana sesuai target dan jadwal yang ditentukan.																		
Faktor penghambat pencapaian kinerja:					Pelaksanaan beberapa kegiatan terpaksa ditunda untuk menindaklanjuti adanya instruksi efisiensi anggaran dari Pemerintah.																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):					Melakukan penyesuaian anggaran dan penjadwalan kembali beberapa kegiatan yang tertunda pelaksanaannya.																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):					Meningkatkan kajian isu-isu strategis ketenagakerjaan agar dapat terakomodir dalam program kerja Disnakertrans serta meningkatkan kerjasama lintas sektor agar capaian kinerja program/kegiatan/sub kegiatan lebih optimal.																		

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
						K	Rp		K	Rp	K	Rp			K	Rp			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	13	14 = 13/8x100	15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%	17							
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
				Persentase jumlah pengawasan norma K3 yang terselesaikan	%	100		100					26,25						63,125			63,13		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
				Persentase jumlah pemohon yang terlayani pengujian lingkungan kerja dan pemeriksaan kesehatan kerja	%	89,1		100					91,29							95,645			107,35		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
				Jumlah perusahaan yang menerapkan norma kerja dan norma k3	Perusahaan	0																		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
		2.07.06.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Kerja sampai dengan tahun - n	Perusahaan	975	6.695.569.100	634.429.664	1.213.231.000											634.429.664			9,48		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
				Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma K3 sampai dengan tahun - n	Perusahaan	160																			DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
				Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3	Perusahaan	85		145												145			170,59		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		2.07.06.1.01.01	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA)	Perusahaan	1.135	2.031.665.300	1.416	308.053.625	363.027.000									1.416	308.053.625	124,76	15,16		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
		2.07.06.1.01.03	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3	Perusahaan	85	4.663.903.800	145	326.376.039	850.204.000									145	326.376.039	170,59	7,00		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
5	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Perangkat Daerah	0.00.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Skor	91	248.006.359.842	91,46	33.002.249.943	51.396.634.000	87,12								178,58	33.002.249.943	196,24	13,31		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
				Nilai PKKI Program Penunjang (BLKPP)	score	91		88,5			85,1								173,6			190,77		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
				Nilai PKKI Program Penunjang (Balai K3)	score	91		88,5			86,08								174,58			191,85		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
		0.00.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	25	1.318.377.000	6	61.300.120	279.600.000									6	61.300.120	24,00	4,65		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
Rata-rata capaian kinerja (%)							654.705.726.892		72.067.479.014	140.762.584.000				181.111.535					181.111.535	0,13		72.248.590.549	118,62	11,04	
Predikat Kinerja																								SR	SR
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:						Tersedianya peraturan-peraturan ketenagakerjaan dan SOP serta sinergi antar bidang dan UPT di Disnakertrans DIY mendorong kelancaran pelaksanaan kegiatan sehingga dapat terlaksana sesuai target dan jadwal yang ditentukan.																			
Faktor penghambat pencapaian kinerja:						Pelaksanaan beberapa kegiatan terpaksa ditunda untuk menindaklanjuti adanya instruksi efisiensi anggaran dari Pemerintah.																			
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):						Melakukan penyesuaian anggaran dan penjadwalan kembali beberapa kegiatan yang tertunda pelaksanaannya.																			
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):						Meningkatkan kajian isu-isu strategis ketenagakerjaan agar dapat terakomodir dalam program kerja Disnakertrans serta meningkatkan kerjasama lintas sektor agar capaian kinerja program/kegiatan/sub kegiatan lebih optimal.																			

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					K	Rp	K	Rp		K	Rp	I	II						III	IV		
1	2	3	4	5	6		7		8	9		10	11	12	13	14 = 13/8x100	15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		0.00.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	484.707.000	2	27.731.726	91.055.000							2	27.731.726	100,00	5,72	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
		0.00.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	2	263.500.000	0		61.700.000											DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
		0.00.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	2	257.389.000	2	19.105.274	56.265.000							2	19.105.274	100,00	7,42	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
		0.00.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	2	312.781.000	2	14.463.120	70.580.000							2	14.463.120	100,00	4,62	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
		<b>0.00.01.1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>terlaksananya kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah</b>	<b>Dokumen</b>	<b>5</b>	<b>193.280.034.722</b>	<b>1</b>	<b>27.041.449.642</b>	<b>39.753.716.000</b>							<b>1</b>	<b>27.041.449.642</b>	<b>20,00</b>	<b>13,99</b>	<b>DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI</b>	
		0.00.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	12	192.101.595.022	178	26.885.326.154	39.500.000.000							178	26.885.326.154	1.483,33	14,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
		0.00.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	1	964.060.000	18	134.390.070	207.636.000							18	134.390.070	1.800,00	13,94	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
		0.00.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	65.879.900	2	7.207.628	14.080.000							2	7.207.628	200,00	10,94	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
		0.00.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	15	148.499.800	14	14.525.790	32.000.000							14	14.525.790	93,33	9,78	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
		<b>0.00.01.1.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>terlaksananya kegiatan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah</b>	<b>Dokumen</b>	<b>5</b>	<b>400.010.000</b>	<b>1</b>	<b>51.560.312</b>	<b>84.983.000</b>							<b>1</b>	<b>51.560.312</b>	<b>20,00</b>	<b>12,89</b>	<b>DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI</b>	
		0.00.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	155.000.000	1	9.507.312	36.000.000							1	9.507.312	100,00	6,13	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
		0.00.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	6	245.010.000	2	42.053.000	48.983.000							2	42.053.000	33,33	17,16	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
Rata-rata capaian kinerja (%)							654.705.726.892		72.067.479.014	140.762.584.000					181.111.535	0,13		72.248.590.549	118,62	11,04		
Predikat Kinerja															SR	SR					ST	SR
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:					Tersedianya peraturan-peraturan ketenagakerjaan dan SOP serta sinergi antar bidang dan UPT di Disnakertrans DIY mendorong kelancaran pelaksanaan kegiatan sehingga dapat terlaksana sesuai target dan jadwal yang ditentukan.																	
Faktor penghambat pencapaian kinerja:					Pelaksanaan beberapa kegiatan terpaksa ditunda untuk menindaklanjuti adanya instruksi efisiensi anggaran dari Pemerintah.																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):					Melakukan penyesuaian anggaran dan penjadwalan kembali beberapa kegiatan yang tertunda pelaksanaannya.																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):					Meningkatkan kajian isu-isu strategis ketenagakerjaan agar dapat terakomodir dalam program kerja Disnakertrans serta meningkatkan kerjasama lintas sektor agar capaian kinerja program/kegiatan/sub kegiatan lebih optimal.																	

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					K	Rp	K	Rp		K	Rp	I	II			III	IV	K	Rp		K	Rp
1	2	3	4	5	6		7		8	9		10	11	12	13	14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		0.00.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	Dokumen	5	105.757.000	1	10.051.345	20.740.000							1	10.051.345	20,00	9,50	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
		0.00.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	6	105.757.000	6	10.051.345	20.740.000							6	10.051.345	100,00	9,50	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
		0.00.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	terlaksananya kegiatan administrasi umum perangkat daerah	Tahun	5	4.442.813.100	1	424.531.821	944.945.000							1	424.531.821	20,00	9,56	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
		0.00.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	369.652.000	1	42.971.993	99.820.000							1	42.971.993	100,00	11,62	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
		0.00.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	984.692.900	3	91.855.722	206.785.000							3	91.855.722	300,00	9,33	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
		0.00.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	304.860.700	5	32.579.225	62.975.000							5	32.579.225	500,00	10,69	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
		0.00.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	0		0												DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
		0.00.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	359.809.900	2	50.173.245	71.865.000							2	50.173.245	200,00	13,94	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
		0.00.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1	98.541.600	2	3.245.000	21.000.000							2	3.245.000	200,00	3,29	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
		0.00.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	1.647.756.000	4	203.706.636	350.000.000							4	203.706.636	400,00	12,36	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
		0.00.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	2	677.500.000	1		132.500.000							1		50,00		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
		0.00.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Bulan	60	5.378.120.000	12	10.956.500	1.350.000.000							12	10.956.500	20,00	0,20	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
		0.00.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1	1.877.950.000			500.000.000											DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
Rata-rata capaian kinerja (%)						654.705.726.892		72.067.479.014	140.762.584.000	181.111.535					181.111.535	0,13		72.248.590.549	118,62	11,04		
Predikat Kinerja															SR	SR					ST	SR
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:					Tersedianya peraturan-peraturan ketenagakerjaan dan SOP serta sinergi antar bidang dan UPT di Disnakertrans DIY mendorong kelancaran pelaksanaan kegiatan sehingga dapat terlaksana sesuai target dan jadwal yang ditentukan.																	
Faktor penghambat pencapaian kinerja:					Pelaksanaan beberapa kegiatan terpaksa ditunda untuk meniadakan adanya instruksi efisiensi anggaran dari Pemerintah.																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):					Melakukan penyesuaian anggaran dan penjadwalan kembali beberapa kegiatan yang tertunda pelaksanaannya.																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):					Meningkatkan kajian isu-isu strategis ketenagakerjaan agar dapat terakomodir dalam program kerja Disnakertrans serta meningkatkan kerjasama lintas sektor agar capaian kinerja program/kegiatan/sub kegiatan lebih optimal.																	

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab																		
					6				7		8							9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17	
					K	Rp			K	Rp	K	Rp						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		0.00.01.1.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	2	1.400.000.000		350.000.000																		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI								
		0.00.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	5	2.100.170.000	2	10.956.500																		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI								
		<b>0.00.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Bulan</b>	<b>60</b>	<b>26.073.248.620</b>	<b>12</b>	<b>4.362.058.937</b>	<b>5.098.250.000</b>																	<b>DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI</b>								
		0.00.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	3	112.869.000	4	8.944.495	24.000.000																	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI								
		0.00.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	3	6.289.828.420	9	687.714.145	1.221.550.000																	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI								
		0.00.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	3	19.670.551.200	12	3.665.400.297	3.852.700.000																	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI								
		<b>0.00.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Bulan</b>	<b>60</b>	<b>17.007.999.400</b>	<b>12</b>	<b>1.040.341.266</b>	<b>3.864.400.000</b>																	<b>DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI</b>								
		0.00.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	1	197.691.400	1	27.175.999	41.000.000																	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI								
		0.00.01.1.09.010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	2.606.519.800	5	56.738.500	594.400.000																	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI								
		0.00.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	55	4.418.529.400	15	437.551.335	900.000.000																	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI								
		0.00.01.1.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Paket	3	318.791.500	5	1.300.000	65.000.000																	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI								
		0.00.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Paket	3	1.229.967.300	63	139.650.755	264.000.000																	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI								
Rata-rata capaian kinerja (%)							654.705.726.892		72.067.479.014	140.762.584.000																									
Predikat Kinerja																																			
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:					Tersedianya peraturan-peraturan ketenagakerjaan dan SOP serta sinergi antar bidang dan UPT di Disnakertrans DIY mendorong kelancaran pelaksanaan kegiatan sehingga dapat terlaksana sesuai target dan jadwal yang ditentukan.																														
Faktor penghambat pencapaian kinerja:					Pelaksanaan beberapa kegiatan terpaksa ditunda untuk menindaklanjuti adanya instruksi efisiensi anggaran dari Pemerintah.																														
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):					Melakukan penyesuaian anggaran dan penjadwalan kembali beberapa kegiatan yang tertunda pelaksanaannya.																														
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):					Meningkatkan kajian isu-isu strategis ketenagakerjaan agar dapat terakomodir dalam program kerja Disnakertrans serta meningkatkan kerjasama lintas sektor agar capaian kinerja program/kegiatan/sub kegiatan lebih optimal.																														

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					K	Rp	K	Rp		K	Rp	I	II			III	IV	14 = 13/8x100	15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13/8x100	15 = 7 + 13	16 = 15 / 6 x 100%	17								
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
		0.00.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Paket	3	8.236.500.000	3	377.924.677	2.000.000.000							3	377.924.677	100,00	4,59	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI			
Rata-rata capaian kinerja (%)						654.705.726.892		72.067.479.014	140.762.584.000		181.111.535						181.111.535	0,13		72.248.590.549	118,62	11,04		
Predikat Kinerja																	SR	SR				ST	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:					Tersedianya peraturan-peraturan ketenagakerjaan dan SOP serta sinergi antar bidang dan UPT di Disnakertrans DIY mendorong kelancaran pelaksanaan kegiatan sehingga dapat terlaksana sesuai target dan jadwal yang ditentukan.																			
Faktor penghambat pencapaian kinerja:					Pelaksanaan beberapa kegiatan terpaksa ditunda untuk menindaklanjuti adanya instruksi efisiensi anggaran dari Pemerintah.																			
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):					Melakukan penyesuaian anggaran dan penjadwalan kembali beberapa kegiatan yang tertunda pelaksanaannya.																			
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):					Meningkatkan kajian isu-isu strategis ketenagakerjaan agar dapat terakomodir dalam program kerja Disnakertrans serta meningkatkan kerjasama lintas sektor agar capaian kinerja program/kegiatan/sub kegiatan lebih optimal.																			

Disusun  
Yogyakarta, 2 Mei 2025  
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Dievaluasi  
Yogyakarta, 2 Mei 2025  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah

ARIA NUGRAHADI, ST, M.Eng.  
NIP. 197409191999031004

NI MADE DWIPANTI INDRAYANTI, S.T., M.T.  
NIP. 197010181998032007

**EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUNGAN PROVINSI  
RENJA PERANGKAT DAERAH DINAS PARIWISATA PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERIODE PELAKSANAAN : 2025**

Indikator dan target kinerja SKPD yang mengacu pada sasaran RKPD:	Target	Realisasi
1 Lama Tinggal Wisatawan	0	
2 Lama Tinggal Wisatawan mancanegara	2.52	1.93
3 Lama Tinggal Wisatawan Nusantara	1.57	1.41
4 Spending money wisatawan	0	
5 Rata-Rata Spending Money Wisatawan Mancanegara (\$)	600	
6 Rata-rata Spending Money Wisatawan Nusantara (Rp)	2500000	
7 Kategori Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	91.04	

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp			
1	Meningkatnya Rata-Rata Lama Tinggal Wisatawan	1.03.13	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	Jumlah Kawasan Ruang Strategis yang dikembangkan dan dimanfaatkan	Kawasan	0	34.700.000.000	7	1.425.197.594	7.000.000.000	3									14 = 13/8x100	15 = 7 + 13	16 = 15 / 6 x 100%	17			
		1.03.13.5.02	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Jumlah kawasan ruang strategis yang dikembangkan atau dimanfaatkan oleh pariwisata	Kawasan	9	34.700.000.000	3	1.425.197.594	7.000.000.000											10	1.425.197.594	4,11	DINAS PARIWISATA		
				Terlaksananya Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	%	100																	4,11	DINAS PARIWISATA		
		1.03.13.5.02.01	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu	Dokumen	2	700.000.000			0														DINAS PARIWISATA		
		1.03.13.5.02.02	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan	Dokumen	4	2.400.000.000			200.000.000														DINAS PARIWISATA		
		1.03.13.5.02.03	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu	Dokumen	6	4.800.000.000	1	795.885.650	2.000.000.000											1	795.885.650	16,67	16,58	DINAS PARIWISATA	
		1.03.13.5.02.04	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh	Dokumen	10	4.600.000.000	1	598.819.944	800.000.000											1	598.819.944	10,00	13,02	DINAS PARIWISATA	
		1.03.13.5.02.05	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Makam Raja-Raja	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis	Dokumen	3	6.000.000.000			2.000.000.000															DINAS PARIWISATA	
Rata-rata capaian kinerja (%)							384.448.556.569		33.461.673.926	85.618.387.728												33.461.673.926	239,94	8,70		
Predikat Kinerja																								SR	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:				1. Diversifikasi dan Bervariasinya destinasi wisata di DIY menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan untuk mengeksplor destinasi wisata baru di DIY 2. Pengaruh media sosial, dengan viralnya destinasi wisata baru baik destinasi wisata alam, kuliner menyebabkan wisatawan tertarik mengunjungi destinasi wisata baru tersebut 3. Mulai banyaknya event sport tourism di DIY yang bertaraf nasional maupun internasional, selain diharapkan meningkatkan kunjungan wisatawan juga mampu meningkatkan lama tinggal dan spending money wisatawan																						
Faktor penghambat pencapaian kinerja:				1. Dampak dikeluarkannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Negara berefek pada berbagai sektor, termasuk anggaran OPD yang berdampak pada kurang efektifitasnya pelayanan publik, misal di Dispar untuk Edukasi HKI dihilangkan. 2. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara masih belum bisa normal seperti kondisi saat sebelum pandemi. Walaupun sudah mulai menunjukkan angka kunjungan wisatawan yang naik namun tidak berbanding lurus dengan lama tinggalnya. Begitu pula dengan jumlah kunjungan 3. Wisata pendidikan yang bersifat mass tourism walaupun pergerakannya tinggi, khususnya yang berasal dari area Jawa Tengah dan Jawa Timur maupun Jawa Barat kebanyakan tidak menginap, sehingga tidak berdampak terhadap LoS wisnus.																						
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):				1. Berkolaborasi dengan semua elemen pariwisata, termasuk swasta untuk menciptakan event yang tidak hanya menambah jumlah kunjungan wisatawan namun dapat menaikkan lama tinggal dan jumlah belanjanya, misalnya dengan menggelar event sport tourism, event musik bertaraf internasional. Dispar DIY berkontribusi melalui promosi melalui media sosialnya 2. Melaksanakan kegiatan pada Triwulan II tahun 2025 sesuai dengan yang sudah direncanakan pada dokumen penganggaran dinas																						
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																										

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I	II	III	IV	13	14 = 13/8x100			15 = 7 + 13	16 = 15 / 6 x 100%	17		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17								
			Mataram di Imogiri	Kawasan Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri																				
		1.03.13.5.02.06	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Candi Prambanan-Candi Ijo	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Candi Prambanan-Candi Ijo	Dokumen	11	7.800.000.000									DINAS PARIWISATA								
		1.03.13.5.02.08	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Merapi	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis	Dokumen	4	5.700.000.000								30.492.000	0,53	DINAS PARIWISATA							
		1.03.13.5.02.09	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kotagede	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kotagede	Dokumen	2	700.000.000									0	DINAS PARIWISATA							
		1.03.13.5.02.12	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kerto-Pleret	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kerto-Pleret	Dokumen	4	2.000.000.000									300.000.000	DINAS PARIWISATA							
		<b>2.22.08</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN</b>	<b>Jumlah pengunjung di daya tarik wisata budaya dan sejarah (orang)</b>	<b>Orang</b>	<b>0</b>	<b>257.064.112.138</b>	<b>10.555.447</b>	<b>18.147.063.498</b>	<b>58.736.900.000</b>	<b>2.406.661</b>				<b>2.406.661</b>		<b>12.962.108</b>	<b>18.147.063.498</b>	<b>7,06</b>	<b>DINAS PARIWISATA</b>				
		<b>2.22.08.5.04</b>	<b>Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya</b>	<b>Jumlah Objek Warisan Budaya Nasional dan Dunia yang masuk Nominasi</b>	<b>Objek</b>	<b>1</b>	<b>7.958.300.000</b>	<b>1</b>	<b>1.065.230.671</b>	<b>1.600.000.000</b>							<b>1</b>	<b>1.065.230.671</b>	<b>100,00</b>	<b>13,39</b>	<b>DINAS PARIWISATA</b>			
		2.22.08.5.04.03	Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia	Jumlah Objek Warisan Budaya Nasional dan Dunia yang masuk Nominasi	Objek	1	7.958.300.000	1	1.065.230.671	1.600.000.000							1	1.065.230.671	100,00	13,39	DINAS PARIWISATA			
		<b>2.22.08.5.06</b>	<b>Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan</b>	<b>Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya</b>	<b>Unit</b>	<b>1</b>	<b>14.604.320.000</b>	<b>1</b>	<b>2.180.056.948</b>	<b>6.000.000.000</b>							<b>1</b>	<b>2.180.056.948</b>	<b>100,00</b>	<b>14,93</b>	<b>DINAS PARIWISATA</b>			
		2.22.08.5.06.01	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya	Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya	Unit	1	14.604.320.000	2	2.180.056.948	6.000.000.000							2	2.180.056.948	200,00	14,93	DINAS PARIWISATA			
		<b>2.22.08.5.08</b>	<b>Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya</b>	<b>Jumlah pengunjung event/ atraksi wisata dan budaya unggulan DIY dan difasilitasi oleh Pemda DIY</b>	<b>Orang</b>	<b>3.550.000</b>	<b>196.734.992.138</b>	<b>750.000</b>	<b>11.871.145.988</b>	<b>42.136.900.000</b>							<b>750.000</b>	<b>11.871.145.988</b>	<b>21,13</b>	<b>6,03</b>	<b>DINAS PARIWISATA</b>			
				<b>Jumlah usaha bidang pariwisata dan ekonomi kreatif yang diberikan pelayanan mengenai kekayaan intelektual</b>	<b>undefined</b>	<b>3.620</b>															<b>DINAS PARIWISATA</b>			
		2.22.08.5.08.02	Pengembangan Atraksi Wisata Budaya	Jumlah Objek Atraksi Wisata Budaya yang Dikembangkan	Objek	1.064	188.339.195.000	199	11.871.145.988	40.000.000.000							199	11.871.145.988	18,70	6,30	DINAS PARIWISATA			
		2.22.08.5.08.03	Pengembangan Industri Kreatif	Jumlah Industri Kreatif yang Dikembangkan	Unit	2.263	8.395.797.138			2.136.900.000											DINAS PARIWISATA			
Rata-rata capaian kinerja (%)							384.448.556.569		33.461.673.926	85.618.387.728							33.461.673.926	239,94	8,70					
Predikat Kinerja																					SR	SR		
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:						1. Diversifikasi dan Bervariasinya destinasi wisata di DIY menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan untuk mengeksplor destinasi wisata baru di DIY 2. Pengaruh media sosial, dengan viralnya destinasi wisata baru baik destinasi wisata alam, kuliner menyebabkan wisatawan tertarik mengunjungi destinasi wisata baru tersebut 3. Mulai banyaknya event sport tourism di DIY yang bertaraf nasional maupun internasional, selain diharapkan meningkatkan kunjungan wisatawan juga mampu meningkatkan lama tinggal dan spending money wisatawan																		
Faktor penghambat pencapaian kinerja:						1. Dampak dikeluarkannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Negara berefek pada berbagai sektor, termasuk anggaran OPD yang berdampak pada kurang efektifitasnya pelayanan publik, misal di Dispar untuk Edukasi HKI dihilangkan,. 2. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara masih belum bisa normal seperti kondisi saat sebelum pandemi. Walaupun sudah mulai menunjukkan angka kunjungan wisatawan yang naik namun tidak berbanding lurus dengan lama tinggalnya. Begitu pula dengan jumlah kunjungan 3. Wisata pendidikan yang bersifat mass tourism walaupun pergerakannya tinggi, khususnya yang berasal dari area Jawa Tengah dan Jawa Timur maupun Jawa Barat kebanyakan tidak menginap, sehingga tidak berdampak terhadap LoS wisnus.																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):						1. Berkolaborasi dengan semua elemen pariwisata, termasuk swasta untuk menciptakan event yang tidak hanya menambah jumlah kunjungan wisatawan namun dapat menaikkan lama tinggal dan jumlah belanjanya, misalnya dengan menggalakkan event sport tourism, event musik bertaraf internasional. Dispar DIY berkontribusi melalui promosi melalui media sosialnya 2. Melaksanakan kegiatan pada Triwulan II tahun 2025 sesuai dengan yang sudah direncanakan pada dokumen penganggaran dinas																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																								

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100			15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17	
		2.22.08.5.09	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Jumlah Desa /Kampung Wisata yang naik kelas dari klasifikasi berkembang ke maju dan dari klasifikasi maju ke mandiri	Lokasi	31	37.766.500.000	5	3.030.629.891	9.000.000.000														5	3.030.629.891	16,13	8,02	DINAS PARIWISATA	
		2.22.08.5.09.18	Peningkatan Lembaga Wisata Budaya	Jumlah Lembaga Wisata Budaya yang Ditingkatkan	Lembaga	1.517	37.766.500.000	163	3.030.629.891	9.000.000.000														163	3.030.629.891	10,74	8,02	DINAS PARIWISATA	
		3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Jumlah wisatawan yang mengunjungi DTW tahun n (orang)	Orang	0	6.349.999.900	35.698.682	1.534.779.500	1.500.000.000	5.165.070													40.863.752	1.534.779.500		24,17	DINAS PARIWISATA	
				Jumlah usaha jasa pariwisata yang tersertifikasi (UJP)	UJP	0		328			328													656				DINAS PARIWISATA	
		3.26.02.1.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Provinsi Sesuai dengan Tahapan Pengembangan	undefined	4	2.000.000.000	0		500.000.000																		DINAS PARIWISATA	
		3.26.02.1.01.03	Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Provinsi Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Lokasi	4	2.000.000.000			500.000.000																		DINAS PARIWISATA	
		3.26.02.1.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Peserta Masyarakat	undefined	375	800.000.000	50		150.000.000														50			13,33	DINAS PARIWISATA	
		3.26.02.1.02.06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Laporan	375	800.000.000			150.000.000																		DINAS PARIWISATA	
		3.26.02.1.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Dokumen perencanaan pengembangan Daya tarik Wisata Provinsi	Dokumen	9	2.499.999.900	50	1.534.779.500	600.000.000														50	1.534.779.500	555,56	61,39	DINAS PARIWISATA	
		3.26.02.1.03.02	Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Dokumen	21	899.999.900	1	193.473.000	200.000.000														1	193.473.000	4,76	21,50	DINAS PARIWISATA	
		3.26.02.1.03.04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi yang Tersedia dan Terpelihara	Unit	4	1.200.000.000	16	1.341.306.500	300.000.000														16	1.341.306.500	400,00	111,78	DINAS PARIWISATA	
		3.26.02.1.03.05	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi	Dokumen	4	400.000.000			100.000.000																		DINAS PARIWISATA	
Rata-rata capaian kinerja (%)							384.448.556.569		33.461.673.926	85.618.387.728														33.461.673.926	239,94	8,70			
Predikat Kinerja																											SR	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:						1. Diversifikasi dan Bervariasinya destinasi wisata di DIY menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan untuk mengeksplor destinasi wisata baru di DIY 2. Pengaruh media sosial, dengan viralnya destinasi wisata baru baik destinasi wisata alam, kuliner menyebabkan wisatawan tertarik mengunjungi destinasi wisata baru tersebut 3. Mulai banyaknya event sport tourism di DIY yang bertaraf nasional maupun internasional, selain diharapkan meningkatkan kunjungan wisatawan juga mampu meningkatkan lama tinggal dan spending money wisatawan																							
Faktor penghambat pencapaian kinerja:						1. Dampak dikeluarkannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Negara berefek pada berbagai sektor, termasuk anggaran OPD yang berdampak pada kurang efektifitasnya pelayanan publik, misal di Dispar untuk Edukasi HKI dihilangkan. 2. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara masih belum bisa normal seperti kondisi saat sebelum pandemi. Walaupun sudah mulai menunjukkan angka kunjungan wisatawan yang naik namun tidak berbanding lurus dengan lama tinggalnya. Begitu pula dengan jumlah kunjungan 3. Wisata pendidikan yang bersifat mass tourism walaupun pergerakannya tinggi, khususnya yang berasal dari area Jawa Tengah dan Jawa Timur maupun Jawa Barat kebanyakan tidak menginap, sehingga tidak berdampak terhadap LoS wisnus.																							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):						1. Berkolaborasi dengan semua elemen pariwisata, termasuk swasta untuk menciptakan event yang tidak hanya menambah jumlah kunjungan wisatawan namun dapat menaikkan lama tinggal dan jumlah belanjanya, misalnya dengan menggelar event sport tourism, event musik bertaraf internasional. Dispar DIY berkontribusi melalui promosi melalui media sosialnya 2. Melaksanakan kegiatan pada Triwulan II tahun 2025 sesuai dengan yang sudah direncanakan pada dokumen penganggaran dinas																							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																													

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)				Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab									
						2024		2025		I		II		III		IV				15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%											
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp		K	Rp							
				Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi																													
		3.26.02.1.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah UJP yang dipantau dan dibina	Usaha	460	1.050.000.000	20		250.000.000																		DINAS PARIWISATA					
				Jumlah usaha dari UJP yang terfasilitasi sertifikasi standar usaha	Usaha	25		4																				DINAS PARIWISATA					
		3.26.02.1.04.04	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Laporan	54	850.000.000			200.000.000																		DINAS PARIWISATA					
		3.26.02.1.04.05	Fasilitasi Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata	Jumlah Unit Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Memperoleh Standarisasi dan Sertifikasi	Unit Usaha	25	200.000.000			50.000.000																		DINAS PARIWISATA					
2	Meningkatnya Jumlah Belanja Wisatawan	3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah Wisatawan mancanegara tahun ke n	Orang	0	4.219.999.600	238.053	454.837.513	950.000.000	29.012										29.012							267.065	454.837.513		10,78	DINAS PARIWISATA	
				Jumlah Wisatawan nusantara tahun ke n	Orang	0		7.749.260			1.274.585											1.274.585							9.023.845			DINAS PARIWISATA	
		3.26.03.1.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah follower dan subscriber media sosial Dinas Pariwisata DIY dan visitingjogja	undefined	8.000	4.219.999.600	1	454.837.513	950.000.000																		1	454.837.513	0,01	10,78	DINAS PARIWISATA	
				Jumlah Kemitraan Promosi pariwisata	Dokumen	13		20																					20		153,85	DINAS PARIWISATA	
				Jumlah pengunjung TIC	Orang	9		500																					500		5.555,56	DINAS PARIWISATA	
				Jumlah pengunjung pameran yang diikuti dispar	Orang	900		6.000																					6.000		666,67	DINAS PARIWISATA	
				Jumlah transaksi B2B	Milyar	40		6.500																					6.500		16.250,00	DINAS PARIWISATA	
		3.26.03.1.01.01	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Dokumen	20	900.000.000		395.237.513	200.000.000																			395.237.513		43,92	DINAS PARIWISATA	
		3.26.03.1.01.02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik	Laporan	8	1.200.000.000	1	59.600.000	300.000.000																		1	59.600.000	12,50	4,97	DINAS PARIWISATA	
Rata-rata capaian kinerja (%)							384.448.556.569		33.461.673.926	85.618.387.728																			33.461.673.926	239,94	8,70		
Predikat Kinerja																																	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:						1. Diversifikasi dan Bervariasinya destinasi wisata di DIY menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan untuk mengeksplor destinasi wisata baru di DIY 2. Pengaruh media sosial, dengan viralnya destinasi wisata baru baik destinasi wisata alam, kuliner menyebabkan wisatawan tertarik mengunjungi destinasi wisata baru tersebut 3. Mulai banyaknya event sport tourism di DIY yang bertaraf nasional maupun internasional, selain diharapkan meningkatkan kunjungan wisatawan juga mampu meningkatkan lama tinggal dan spending money wisatawan																											
Faktor penghambat pencapaian kinerja:						1. Dampak dikeluarkannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Negara berefek pada berbagai sektor, termasuk anggaran OPD yang berdampak pada kurang efektifitasnya pelayanan publik, misal di Dispar untuk Edukasi HKI dihilangkan. 2. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara masih belum bisa normal seperti kondisi saat sebelum pandemi. Walaupun sudah mulai menunjukkan angka kunjungan wisatawan yang naik namun tidak berbanding lurus dengan lama tinggalnya. Begitu pula dengan jumlah kunjungan 3. Wisata pendidikan yang bersifat mass tourism walaupun pergerakannya tinggi, khususnya yang berasal dari area Jawa Tengah dan Jawa Timur maupun Jawa Barat kebanyakan tidak menginap, sehingga tidak berdampak terhadap LoS wisnus.																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):						1. Berkolaborasi dengan semua elemen pariwisata, termasuk swasta untuk menciptakan event yang tidak hanya menambah jumlah kunjungan wisatawan namun dapat menaikkan lama tinggal dan jumlah belanjanya, misalnya dengan menggalakkan event sport tourism, event musik bertaraf internasional. Dispar DIY berkontribusi melalui promosi melalui media sosialnya 2. Melaksanakan kegiatan pada Triwulan II tahun 2025 sesuai dengan yang sudah direncanakan pada dokumen penganggaran dinas																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																																	



No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab									
					6		7		8		9		10				11		12			13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Negeri	Dalam dan Luar Negeri																										
		3.26.03.1.01.03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri	Dokumen	13	899.999.600			200.000.000														DINAS PARIWISATA						
		3.26.03.1.01.04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Dokumen	13	1.220.000.000			250.000.000														DINAS PARIWISATA						
		<b>3.26.04</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL</b>	<b>Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang tersertifikasi profesi (orang)</b>	<b>Orang</b>	<b>0</b>	<b>6.951.999.800</b>	<b>389</b>	<b>73.639.700</b>	<b>1.809.000.000</b>								<b>389</b>	<b>73.639.700</b>			<b>1,06</b>	<b>DINAS PARIWISATA</b>							
		<b>3.26.04.1.01</b>	<b>Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif</b>	<b>Jumlah Pelaku Usaha Ekraf yang difasilitasi pengembangan usahanya</b>	<b>undefined</b>	<b>400</b>	<b>3.029.999.900</b>			<b>700.000.000</b>														<b>DINAS PARIWISATA</b>						
		3.26.04.1.01.02	Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor maupun Pasar Domestik	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Perluasan Akses Pasar Produk Kreatif Baik Pasar Ekspor dan Pasar	Laporan	17	1.200.000.000			300.000.000														DINAS PARIWISATA						
		3.26.04.1.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Usaha Kreatif Sepanjang Rantai Produksi dengan Menyediakan Akses ke Sumber Permodalan atau Pasokan SDM Produksi dan Pasar	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Usaha Kreatif Sepanjang Rantai Produksi dengan Menyediakan Akses ke Sumber Permodalan atau Pasokan SDM Produksi dan Pasar	Laporan	4	450.000.000			100.000.000														DINAS PARIWISATA						
		3.26.04.1.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula	Laporan	10	1.379.999.900			300.000.000														DINAS PARIWISATA						
		<b>3.26.04.1.02</b>	<b>Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif</b>	<b>Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat BPPKI</b>	<b>%</b>	<b>90</b>	<b>3.921.999.900</b>		<b>73.639.700</b>	<b>1.109.000.000</b>								<b>73.639.700</b>			<b>1,88</b>	<b>DINAS PARIWISATA</b>								
		3.26.04.1.02.01	Pengembangan Riset	Jumlah Pengembangan Riset Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan	Dokumen	12	800.000.000			200.000.000														DINAS PARIWISATA						
		3.26.04.1.02.05	Pengembangan Sistem Pemasaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif	Dokumen	9	900.000.000			300.000.000														DINAS PARIWISATA						
		3.26.04.1.02.07	Fasilitasi Kekayaan Intelektual	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan	Dokumen	4	1.154.000.000			297.000.000														DINAS PARIWISATA						
Rata-rata capaian kinerja (%)							384.448.556.569		33.461.673.926	85.618.387.728										33.461.673.926	239,94	8,70								
Predikat Kinerja																						ST	SR							
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:					1. Diversifikasi dan Bervariasinya destinasi wisata di DIY menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan untuk mengeksplor destinasi wisata baru di DIY 2. Pengaruh media sosial, dengan viralnya destinasi wisata baru baik destinasi wisata alam, kuliner menyebabkan wisatawan tertarik mengunjungi destinasi wisata baru tersebut 3. Mulai banyaknya event sport tourism di DIY yang bertaraf nasional maupun internasional, selain diharapkan meningkatkan kunjungan wisatawan juga mampu meningkatkan lama tinggal dan spending money wisatawan																									
Faktor penghambat pencapaian kinerja:					1. Dampak dikeluarkannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Negara berefek pada berbagai sektor, termasuk anggaran OPD yang berdampak pada kurang efektifitasnya pelayanan publik, misal di Dispar untuk Edukasi HKI dihilangkan. 2. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara masih belum bisa normal seperti kondisi saat sebelum pandemi. Walaupun sudah mulai menunjukkan angka kunjungan wisatawan yang naik namun tidak berbanding lurus dengan lama tinggalnya. Begitu pula dengan jumlah kunjungan 3. Wisata pendidikan yang bersifat mass tourism walaupun pergerakannya tinggi, khususnya yang berasal dari area Jawa Tengah dan Jawa Timur maupun Jawa Barat kebanyakan tidak menginap, sehingga tidak berdampak terhadap LoS wisnus.																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):					1. Berkolaborasi dengan semua elemen pariwisata, termasuk swasta untuk menciptakan event yang tidak hanya menambah jumlah kunjungan wisatawan namun dapat menaikkan lama tinggal dan jumlah belanjanya, misalnya dengan menggalakkan event sport tourism, event musik bertaraf internasional. Dispar DIY berkontribusi melalui promosi melalui media sosialnya 2. Melaksanakan kegiatan pada Triwulan II tahun 2025 sesuai dengan yang sudah direncanakan pada dokumen penganggaran dinas																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																														

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100			15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp
				Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif																							
		3.26.04.1.02.08	Perlindungan Hasil Kreativitas	Jumlah Dokumen Perlindungan Hasil Kreativitas yang Berupa Kekayaan Intelektual Pelaku Ekonomi Kreatif	Dokumen	4	453.000.000			112.000.000														DINAS PARIWISATA			
		3.26.04.1.02.09	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	Dokumen	0	200.000.000			100.000.000														DINAS PARIWISATA			
		3.26.04.1.02.10	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Hasi Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Dokumen	5	414.999.900	2	73.639.700	100.000.000									2	73.639.700	40,00	17,74	DINAS PARIWISATA				
		<b>3.26.05</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF</b>	<b>Jumlah SDM Pariwisata yang tersertifikasi (orang)</b>	<b>Orang</b>	<b>0</b>	<b>16.779.500.000</b>	<b>4.565</b>	<b>1.368.687.000</b>	<b>3.626.000.000</b>									<b>4.565</b>	<b>1.368.687.000</b>			<b>8,16</b>	<b>DINAS PARIWISATA</b>			
		<b>3.26.05.1.01</b>	<b>Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan</b>	<b>Jumlah SDM Pariwisata yang terlatih kompetensi bidang pariwisata</b>	<b>Orang</b>	<b>2.750</b>	<b>12.342.000.000</b>	<b>125</b>	<b>402.000.000</b>	<b>2.626.000.000</b>									<b>125</b>	<b>402.000.000</b>	<b>4,55</b>	<b>3,26</b>	<b>DINAS PARIWISATA</b>				
				<b>Jumlah SDM Pariwisata yang terfasilitasi sertifikasi kompetensi bidang pariwisata</b>	<b>Orang</b>	<b>1.875</b>		<b>325</b>											<b>325</b>				<b>17,33</b>	<b>DINAS PARIWISATA</b>			
		3.26.05.1.01.01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan yang Dikembangkan Kompetensinya	Orang	330	3.214.000.000			656.000.000														DINAS PARIWISATA			
		3.26.05.1.01.02	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Orang	680	2.240.000.000			545.000.000														DINAS PARIWISATA			
		3.26.05.1.01.03	Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang Homestay dan Pemandu Wisata (Tour Guide ) Tingkat Lanjutan	Jumlah Orang yang mengikuti Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang Homestay dan Pemandu Wisata (Tour Guide ) Tingkat Lanjutan	Orang	740	1.985.000.000			375.000.000														DINAS PARIWISATA			
Rata-rata capaian kinerja (%)								384.448.556.569		33.461.673.926										33.461.673.926	239,94	8,70					
Predikat Kinerja																								ST SR			
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:					1. Diversifikasi dan Bervariasinya destinasi wisata di DIY menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan untuk mengeksplor destinasi wisata baru di DIY 2. Pengaruh media sosial, dengan viralnya destinasi wisata baru baik destinasi wisata alam, kuliner menyebabkan wisatawan tertarik mengunjungi destinasi wisata baru tersebut 3. Mulai banyaknya event sport tourism di DIY yang bertaraf nasional maupun internasional, selain diharapkan meningkatkan kunjungan wisatawan juga mampu meningkatkan lama tinggal dan spending money wisatawan																						
Faktor penghambat pencapaian kinerja:					1. Dampak dikeluarkannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Negara berefek pada berbagai sektor; termasuk anggaran OPD yang berdampak pada kurang efektifitasnya pelayanan publik, misal di Dispar untuk Edukasi HKI dihilangkan. 2. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara masih belum bisa normal seperti kondisi saat sebelum pandemi. Walaupun sudah mulai menunjukkan angka kunjungan wisatawan yang naik namun tidak berbanding lurus dengan lama tinggalnya. Begitu pula dengan jumlah kunjungan 3. Wisata pendidikan yang bersifat mass tourism walaupun pergerakannya tinggi, khususnya yang berasal dari area Jawa Tengah dan Jawa Timur maupun Jawa Barat kebanyakan tidak menginap, sehingga tidak berdampak terhadap LoS wisnus.																						
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):					1. Berkolaborasi dengan semua elemen pariwisata, termasuk swasta untuk menciptakan event yang tidak hanya menambah jumlah kunjungan wisatawan namun dapat menaikkan lama tinggal dan jumlah belanjanya, misalnya dengan menggalakkan event sport tourism, event musik bertaraf internasional. Dispar DIY berkontribusi melalui promosi melalui media sosialnya 2. Melaksanakan kegiatan pada Triwulan II tahun 2025 sesuai dengan yang sudah direncanakan pada dokumen penganggaran dinas																						
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																											

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp							K	Rp	K	Rp			
											I	II	III	IV								15 = 7 + 13	16 = 15 / 6 x 100%
1																							
		3.26.05.1.01.04	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Orang	1.875	4.053.000.000	115	402.000.000	800.000.000								115	402.000.000	6,13	9,92	DINAS PARIWISATA	
		3.26.05.1.01.05	Pelatihan Asesor Kompetensi/Workplace Assesor (WPA)	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Asesor Kompetensi/Workplace Assesor (WPA)	Orang	90	450.000.000			150.000.000												DINAS PARIWISATA	
		3.26.05.1.01.10	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	undefined	2	400.000.000			100.000.000												DINAS PARIWISATA	
		<b>3.26.05.1.02</b>	<b>Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif</b>	<b>Jumlah Pelaku Ekraf yang dilatih</b>	<b>Orang</b>	<b>360</b>	<b>4.437.500.000</b>	<b>225</b>	<b>966.687.000</b>	<b>1.000.000.000</b>								<b>225</b>	<b>966.687.000</b>	<b>62,50</b>	<b>21,78</b>	<b>DINAS PARIWISATA</b>	
				<b>Jumlah SDM yang terfasilitasi sertifikasi kompetensi bidang Ekraf</b>	<b>Orang</b>	<b>400</b>																<b>DINAS PARIWISATA</b>	
		3.26.05.1.02.01	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Orang	1.000	2.700.000.000			600.000.000												DINAS PARIWISATA	
		3.26.05.1.02.03	Standarisasi Usaha dan Sertifikasi Profesi di Bidang Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Disertifikasi Kompetensi di Bidang Ekonomi Kreatif	Orang	345	1.737.500.000	225	966.687.000	400.000.000								225	966.687.000	65,22	55,64	DINAS PARIWISATA	
<b>3</b>	<b>Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Perangkat Daerah</b>	<b>0.00.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>nilai</b>	<b>0</b>	<b>58.382.945.131</b>	<b>88,85</b>	<b>10.457.469.121</b>	<b>11.996.487.728</b>								<b>88,85</b>	<b>10.457.469.121</b>		<b>17,91</b>	<b>DINAS PARIWISATA</b>	
		<b>0.00.01.1.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Terlaksananya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>784.000.000</b>	<b>100</b>	<b>26.273.441</b>	<b>168.000.000</b>								<b>50</b>	<b>26.273.441</b>	<b>50,00</b>	<b>3,35</b>	<b>DINAS PARIWISATA</b>	
		0.00.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	20	371.400.000	3	8.706.396	74.000.000								3	8.706.396	15,00	2,34	DINAS PARIWISATA	
		0.00.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	24	138.200.000	3	9.977.866	31.000.000								3	9.977.866	12,50	7,22	DINAS PARIWISATA	
Rata-rata capaian kinerja (%)							384.448.556.569	33.461.673.926	85.618.387.728									33.461.673.926	239,94	8,70			
Predikat Kinerja																						SR	SR
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:							1. Diversifikasi dan Bervariasinya destinasi wisata di DIY menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan untuk mengeksplor destinasi wisata baru di DIY 2. Pengaruh media sosial, dengan viralnya destinasi wisata baru baik destinasi wisata alam, kuliner menyebabkan wisatawan tertarik mengunjungi destinasi wisata baru tersebut 3. Mulai banyaknya event sport tourism di DIY yang bertaraf nasional maupun internasional, selain diharapkan meningkatkan kunjungan wisatawan juga mampu meningkatkan lama tinggal dan spending money wisatawan																
Faktor penghambat pencapaian kinerja:							1. Dampak dikeluarkannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Negara berefek pada berbagai sektor, termasuk anggaran OPD yang berdampak pada kurang efektifitasnya pelayanan publik, misal di Dispar untuk Edukasi HKI dihilangkan. 2. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara masih belum bisa normal seperti kondisi saat sebelum pandemi. Walaupun sudah mulai menunjukkan angka kunjungan wisatawan yang naik namun tidak berbanding lurus dengan lama tinggalnya. Begitu pula dengan jumlah kunjungan 3. Wisata pendidikan yang bersifat mass tourism walaupun pergerakannya tinggi, khususnya yang berasal dari area Jawa Tengah dan Jawa Timur maupun Jawa Barat kebanyakan tidak menginap, sehingga tidak berdampak terhadap LoS wisnus.																
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):							1. Berkolaborasi dengan semua elemen pariwisata, termasuk swasta untuk menciptakan event yang tidak hanya menambah jumlah kunjungan wisatawan namun dapat menaikkan lama tinggal dan jumlah belanjanya, misalnya dengan menggelar event sport tourism, event musik bertaraf internasional. Dispar DIY berkontribusi melalui promosi melalui media sosialnya 2. Melaksanakan kegiatan pada Triwulan II tahun 2025 sesuai dengan yang sudah direncanakan pada dokumen penganggaran dinas																
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																							

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)				Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					6		7				8				9						15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp			
		0.00.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	24	274.400.000	3	7.589.179	63.000.000											3	7.589.179	12,50	2,77	DINAS PARIWISATA		
		<b>0.00.01.1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	%	<b>100</b>	<b>46.969.398.521</b>	<b>100</b>	<b>9.330.441.684</b>	<b>9.256.700.000</b>											<b>50</b>	<b>9.330.441.684</b>	<b>50,00</b>	<b>19,86</b>	<b>DINAS PARIWISATA</b>		
		0.00.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	73	46.682.168.521	74	9.281.499.083	9.200.000.000											74	9.281.499.083	101,37	19,88	DINAS PARIWISATA		
		0.00.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	6	202.600.000	1	37.500.000	40.000.000											1	37.500.000	16,67	18,51	DINAS PARIWISATA		
		0.00.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	6	11.130.000	1	1.500.000	2.200.000											1	1.500.000	16,67	13,48	DINAS PARIWISATA		
		0.00.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	108	73.500.000	18	9.942.601	14.500.000											18	9.942.601	16,67	13,53	DINAS PARIWISATA		
		<b>0.00.01.1.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Terlaksananya Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah</b>	%	<b>100</b>	<b>146.200.000</b>	<b>100</b>	<b>25.349.943</b>	<b>29.400.000</b>											<b>50</b>	<b>25.349.943</b>	<b>50,00</b>	<b>17,34</b>	<b>DINAS PARIWISATA</b>		
		0.00.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	6	60.000.000	1	8.549.943	12.000.000											1	8.549.943	16,67	14,25	DINAS PARIWISATA		
		0.00.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	6	86.200.000	1	16.800.000	17.400.000											1	16.800.000	16,67	19,49	DINAS PARIWISATA		
		<b>0.00.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Terlaksananya kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	%	<b>100</b>	<b>2.391.847.100</b>	<b>100</b>	<b>96.100.909</b>	<b>559.820.000</b>											<b>50</b>	<b>96.100.909</b>	<b>50,00</b>	<b>4,02</b>	<b>DINAS PARIWISATA</b>		
		0.00.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	37	59.992.000	1	2.896.000	12.000.000											1	2.896.000	2,70	4,83	DINAS PARIWISATA		
		0.00.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5	300.355.100	1	3.765.000	60.000.000											1	3.765.000	20,00	1,25	DINAS PARIWISATA		
Rata-rata capaian kinerja (%)								384.448.556.569		33.461.673.926												33.461.673.926	239,94	8,70			
Predikat Kinerja																									ST	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:					1. Diversifikasi dan Bervariasinya destinasi wisata di DIY menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan untuk mengeksplor destinasi wisata baru di DIY 2. Pengaruh media sosial, dengan viralnya destinasi wisata baru baik destinasi wisata alam, kuliner menyebabkan wisatawan tertarik mengunjungi destinasi wisata baru tersebut 3. Mulai banyaknya event sport tourism di DIY yang bertaraf nasional maupun internasional, selain diharapkan meningkatkan kunjungan wisatawan juga mampu meningkatkan lama tinggal dan spending money wisatawan																						
Faktor penghambat pencapaian kinerja:					1. Dampak dikeluarkannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Negara berefek pada berbagai sektor, termasuk anggaran OPD yang berdampak pada kurang efektifitasnya pelayanan publik, misal di Dispar untuk Edukasi HKI dihilangkan,. 2. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara masih belum bisa normal seperti kondisi saat sebelum pandemi. Walaupun sudah mulai menunjukkan angka kunjungan wisatawan yang naik namun tidak berbanding lurus dengan lama tinggalnya. Begitu pula dengan jumlah kunjungan 3. Wisata pendidikan yang bersifat mass tourism walaupun pergerakannya tinggi, khususnya yang berasal dari area Jawa Tengah dan Jawa Timur maupun Jawa Barat kebanyakan tidak menginap, sehingga tidak berdampak terhadap LoS wisnus.																						
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):					1. Berkolaborasi dengan semua elemen pariwisata, termasuk swasta untuk menciptakan event yang tidak hanya menambah jumlah kunjungan wisatawan namun dapat menaikkan lama tinggal dan jumlah belanjanya, misalnya dengan menggalakkan event sport tourism, event musik bertaraf internasional. Dispar DIY berkontribusi melalui promosi melalui media sosialnya 2. Melaksanakan kegiatan pada Triwulan II tahun 2025 sesuai dengan yang sudah direncanakan pada dokumen penganggaran dinas																						
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																											



No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab										
						6		7		8		9		10				11		12			13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		0.00.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	13	2.847.765.410	2	619.080.000	564.412.728								2	619.080.000	15,38	21,74	DINAS PARIWISATA										
		<b>0.00.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Terlaksananya kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>2.412.443.600</b>	<b>100</b>	<b>196.317.315</b>	<b>506.980.000</b>								<b>50</b>	<b>196.317.315</b>	<b>50,00</b>	<b>8,14</b>	<b>DINAS PARIWISATA</b>										
		0.00.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	1	182.499.500	3,2	15.965.000	36.300.000								3,2	15.965.000	320,00	8,75	DINAS PARIWISATA										
		0.00.01.1.09.010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	13	275.250.000	22	20.050.000	60.000.000								22	20.050.000	169,23	7,28	DINAS PARIWISATA										
		0.00.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	12	1.086.752.600	36	115.335.100	214.370.000								36	115.335.100	300,00	10,61	DINAS PARIWISATA										
		0.00.01.1.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	379	56.156.000	40	6.500.000	13.310.000								40	6.500.000	10,55	11,57	DINAS PARIWISATA										
		0.00.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	341	321.785.500	100	18.475.000	73.000.000								100	18.475.000	29,33	5,74	DINAS PARIWISATA										
		0.00.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	490.000.000	3	19.992.215	110.000.000								3	19.992.215	300,00	4,08	DINAS PARIWISATA										
Rata-rata capaian kinerja (%)							384.448.556.569		33.461.673.926	85.618.387.728									33.461.673.926	239,94	8,70											
Predikat Kinerja																						ST	SR									
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:						1. Diversifikasi dan Bervariasinya destinasi wisata di DIY menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan untuk mengeksplor destinasi wisata baru di DIY 2. Pengaruh media sosial, dengan viralnya destinasi wisata baru baik destinasi wisata alam, kuliner menyebabkan wisatawan tertarik mengunjungi destinasi wisata baru tersebut 3. Mulai banyaknya event sport tourism di DIY yang bertaraf nasional maupun internasional, selain diharapkan meningkatkan kunjungan wisatawan juga mampu meningkatkan lama tinggal dan spending money wisatawan																										
Faktor penghambat pencapaian kinerja:						1. Dampak dikeluarkannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Negara berefek pada berbagai sektor, termasuk anggaran OPD yang berdampak pada kurang efektifitasnya pelayanan publik, misal di Dispar untuk Edukasi HKI dihilangkan,. 2. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara masih belum bisa normal seperti kondisi saat sebelum pandemi. Walaupun sudah mulai menunjukkan angka kunjungan wisatawan yang naik namun tidak berbanding lurus dengan lama tinggalnya. Begitu pula dengan jumlah kunjungan 3. Wisata pendidikan yang bersifat mass tourism walaupun pergerakannya tinggi, khususnya yang berasal dari area Jawa Tengah dan Jawa Timur maupun Jawa Barat kebanyakan tidak menginap, sehingga tidak berdampak terhadap LoS wisnus.																										
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):						1. Berkolaborasi dengan semua elemen pariwisata, termasuk swasta untuk menciptakan event yang tidak hanya menambah jumlah kunjungan wisatawan namun dapat menaikkan lama tinggal dan jumlah belanjanya, misalnya dengan menggalakkan event sport tourism, event musik bertaraf internasional. Dispar DIY berkontribusi melalui promosi melalui media sosialnya 2. Melaksanakan kegiatan pada Triwulan II tahun 2025 sesuai dengan yang sudah direncanakan pada dokumen penganggaran dinas																										
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																																

Disusun  
Yogyakarta, 2 Mei 2025  
Kepala Dinas Pariwisata

Dievaluasi  
Yogyakarta, 2 Mei 2025  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah

Drs. IMAM PRATANADI, M.T.  
NIP. 196710311997031001

NI MADE DWIPANTI INDRAYANTI, S.T., M.T.  
NIP. 197010181998032007

**EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUNGAN PROVINSI  
RENJA PERANGKAT DAERAH DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERIODE PELAKSANAAN : 2025**

Indikator dan target kinerja SKPD yang mengacu pada sasaran RKPd:	Target	Realisasi
1 Jumlah koperasi modern	9	
2 Kontribusi koperasi modern terhadap koperasi (%)	0	
3 Jumlah UMKM yang berkembang usahanya( pada tahun n)	1550	335
4 Jumlah UMKM yang berkembang usahanya	0	
5 Kategori RB Perangkat Daerah (1=AA, 2=A, 3=BB, 4=CC)	2	
6 Jumlah wirausaha Baru / Pemula	8365	6379
7 Kontribusi jumlah wirausaha pemula terhadap jumlah usaha kecil (%)	0	
8 Jumlah UMKM yang berkembang usahanya (aspek SDM dan produksi)	130	15

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
					6		7			8				9		10		11		12		13		14 = 13/8x100			15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp		
1	Meningkatnya jumlah koperasi modern	2.17.02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Jumlah Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam pada koperasi yang Memiliki Ijin Usaha Simpan Pinjam terhadap jumlah Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam pada Koperasi Dengan Wilayah kea	Unit	0	112.417.364	16	8.000.000		22.000.000	16								16						32	8.000.000		7,12	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	
				Kontribusi koperasi simpan pinjam dan unit usaha simpan pinjam yang memiliki ijin simpan pinjam terhadap koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi (%)	%	0																								DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	
		2.17.02.1.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	undefined	24	112.417.364	15	8.000.000		22.000.000														15	8.000.000	62,50	7,12	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH		
		2.17.02.1.01.01	Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1(Satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam	Unit Usaha	5	112.417.364	1	8.000.000		22.000.000														1	8.000.000	20,00	7,12	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH		
Rata-rata capaian kinerja (%)							712.268.306.425		181.517.186.376		97.211.387.568									750.158.547					750.158.547	0,77		182.267.344.923	91,48	25,59	
Predikat Kinerja																															
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																															
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																															
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																															
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																															

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						0	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
						6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13/8x100	15 = 7 + 13	16 = 15 / 6 x 100%	17										
		2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya (tata kelola, manajemen resiko, kinerja keuangan, permodalan)	Koperasi	0	276.000.000	26			54.000.000	2						2				28				DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	
				Presentase koperasi yang meningkat kualitasnya (%)	%	0																				DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	
		2.17.03.1.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi dengan Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang Diperiksa dan Diawasi	undefined	13	276.000.000	8			54.000.000											8		61,54		DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	
		2.17.03.1.01.01	Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesenambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesenambungan, dan Pemberian Manfaat ke pada Anggota KUKM dan Masyarakat	Dokumen	3	166.000.000				32.000.000															DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	
		2.17.03.1.01.02	Peningkatan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel	Jumlah Koperasi Yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan dan Tersedianya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel	Unit Usaha	60	110.000.000				22.000.000															DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	
		2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Jumlah KSP/USP yang meningkat hasil pemeriksaan kesehatannya	Koperasi	0	90.300.000	34			18.000.000	5						5				39				DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	
				Presentase KSP/USP yang meningkat kualitasnya	%	0																				DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	
		2.17.04.1.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah	Jumlah koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang dinilai kesehatn kopersinya yang wilayah keanggotaannya	undefined	95	90.300.000	95			18.000.000											95		100,00		DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	
Rata-rata capaian kinerja (%)							712.268.306.425		181.517.186.376		97.211.387.568		750.158.547					750.158.547	0,77			182.267.344.923	91,48	25,59			
Predikat Kinerja																		SR	SR				ST	SR			
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																											
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																											

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I	II	III	IV	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17		17					
			<b>Keanggotaanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>	<i>lintas daerah kab/kota dalam 1 daerah provinsi</i>																							
		2.17.04.1.01.02	Mengukur Tingkat Kesehatan Koperasi	Jumlah Koperasi Hasil Pengukuran Tingkat Kesehatan	Unit Usaha	110	90.300.000			18.000.000														DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH			
		<b>2.17.05</b>	<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN</b>	<b>Persentase peningkatan pemahaman peserta diklat koperasi dan UMKM</b>	%	<b>0</b>	<b>18.137.130.200</b>	<b>100</b>	<b>774.120.640</b>	<b>3.600.000.000</b>								<b>50</b>	<b>774.120.640</b>			<b>4,27</b>	<b>DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH</b>				
				<b>Jumlah koperasi dan UMKM yang meningkat kapasitas SDMnya</b>	<b>KUMKM</b>	<b>0</b>																	<b>DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH</b>				
		<b>2.17.05.1.01</b>	<b>Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>	<b>Jumlah peserta pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yg wilayah lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 daerah provinsi</b>	<b>undefined</b>	<b>725</b>	<b>8.843.125.200</b>	<b>725</b>	<b>774.120.640</b>	<b>1.750.000.000</b>								<b>725</b>	<b>774.120.640</b>	<b>100,00</b>	<b>8,75</b>	<b>DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH</b>					
		2.17.05.1.01.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Orang	630	8.843.125.200	250	774.120.640	1.750.000.000								250	774.120.640	39,68	8,75	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH					
		<b>2.17.05.1.02</b>	<b>Pendidikan dan Latihan UKM bagi UKM yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>	<b>Jumlah peserta pendidikan dan latihan UMKM dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>	<b>undefined</b>	<b>1.100</b>	<b>9.294.005.000</b>			<b>1.850.000.000</b>													<b>DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH</b>				
		2.17.05.1.02.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UKM	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UMKM	Orang	1.150	9.294.005.000			1.850.000.000													DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH				
		<b>2.17.06</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN</b>	<b>Jumlah koperasi yang memenuhi standar amalgamasi (keinginan</b>	<b>Koperasi</b>	<b>0</b>	<b>2.070.000.000</b>	<b>88</b>	<b>244.316.000</b>	<b>455.000.000</b>	<b>88</b>						<b>88</b>	<b>176</b>	<b>244.316.000</b>			<b>11,80</b>	<b>DINAS KOPERASI DAN USAHA</b>				
Rata-rata capaian kinerja (%)							712.268.306.425		181.517.186.376	97.211.387.568						750.158.547		0,77		182.267.344.923	91,48	25,59					
Predikat Kinerja																	SR	SR				ST	SR				
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																											
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																											

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara



No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					6		7			8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100			15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	
			Pantai Selatan	Pantai Selatan																					DAN USAHA KECIL MENENGAH			
		1.03.13.5.02.03	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu	Dokumen	3	4.500.000.000				500.000.000														DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH			
		1.03.13.5.02.04	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh	Dokumen	2	4.250.000.000				0														DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH			
		1.03.13.5.02.05	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri	Dokumen	4	4.250.000.000				250.000.000														DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH			
		1.03.13.5.02.08	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Merapi	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Merapi	Dokumen	5	6.500.000.000	4	959.326.809		500.000.000										4	959.326.809	80,00	14,76	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH			
		1.03.13.5.02.12	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kerto-Pleret	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kerto-Pleret	Dokumen	3	4.500.000.000				500.000.000														DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH			
		<b>2.17.08</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM</b>	<b>Persentase Usaha Mikro Kecil Binaan yang Diberikan Pendampingan SDM, Kelembagaan, Produksi, Keuangan, Pasar dan Digital Marketing</b>	<b>%</b>	<b>0</b>	<b>7.391.330.700</b>	<b>0,46</b>	<b>1.101.500.400</b>		<b>1.552.730.000</b>	<b>0,1</b>									<b>0,28</b>	<b>1.101.500.400</b>		<b>14,90</b>	<b>DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH</b>			
				<b>Jumlah UMKM dibina yang berkembang usahanya</b>	<b>UMKM</b>	<b>0</b>																			<b>DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH</b>			
		<b>2.17.08.1.01</b>	<b>Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah</b>	<b>Jumlah UKM yang berkembang usahanya (aspek SDM, kelembagaan, produksi, keuangan, pasar dan digital marketing)</b>	<b>undefined</b>	<b>1.095</b>	<b>7.391.330.700</b>	<b>850</b>	<b>1.101.500.400</b>		<b>1.552.730.000</b>										<b>850</b>	<b>1.101.500.400</b>	<b>77,63</b>	<b>14,90</b>	<b>DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH</b>			
		2.17.08.1.01.01	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia,	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran,	Unit Usaha	1.270	6.016.574.700	25	867.250.400		1.277.730.000										25	867.250.400	1,97	14,41	DINAS KOPERASI DAN USAHA			
Rata-rata capaian kinerja (%)							712.268.306.425		181.517.186.376		97.211.387.568							750.158.547			0,77		182.267.344.923	91,48	25,59			
Predikat Kinerja																									SR	SR		
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																												
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																												

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara



No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab											
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31											
																																KECIL MENENGAH									
		0.00.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	5	55.999.900	1	1.500.000	11.000.000																							1	1.500.000	20,00	2,68	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH				
		0.00.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	65	85.000.000	13	2.000.000	17.000.000																							13	2.000.000	20,00	2,35	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH				
		<b>0.00.01.1.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>66.000.000</b>	<b>100</b>	<b>13.200.000</b>	<b>13.200.000</b>																							<b>50</b>	<b>13.200.000</b>	<b>50,00</b>	<b>20,00</b>	<b>DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH</b>				
		0.00.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	20	66.000.000	4	13.200.000	13.200.000																							4	13.200.000	20,00	20,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH				
		<b>0.00.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>1.324.542.500</b>	<b>100</b>	<b>138.195.091</b>	<b>277.139.000</b>																							<b>50</b>	<b>138.195.091</b>	<b>50,00</b>	<b>10,43</b>	<b>DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH</b>				
		0.00.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	10	65.992.600	1	2.500.000	13.000.000																							1	2.500.000	10,00	3,79	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH				
		0.00.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	2	120.077.400	2	2.500.000	24.000.000																							2	2.500.000	100,00	2,08	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH				
		0.00.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	68.612.600	1	1.000.000	14.641.000																							1	1.000.000	100,00	1,46	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH				
		0.00.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	109.677.500	5	5.000.000	22.000.000																							5	5.000.000	250,00	4,56	DINAS KOPERASI DAN USAHA				
Rata-rata capaian kinerja (%)							712.268.306.425		181.517.186.376	97.211.387.568																															
Predikat Kinerja																																									
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																																									
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																																									





No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%									
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
				Jumlah Usaha Mikro Kecil Binaan yang Diberikan Pendampingan aspek SDM dan produksi	UMKM	0		24.630								24.630						49.260				DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
				Jumlah Wirausaha Pemula (kumulatif)	Orang	0																			DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	
		2.17.07.1.01	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah wirausaha yang meningkat kapasitas usaha, SDM, dan produk sehingga memiliki kontribusi dalam pertumbuhan ekonomi	undefined	835	19.515.335.000	725	6.201.476.120	4.253.000.000												725	6.201.476.120	86,83	31,78	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
		2.17.07.1.01.01	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Unit Usaha	5	6.018.479.900	5	2.185.362.450	1.253.000.000												5	2.185.362.450	100,00	36,31	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
		2.17.07.1.01.02	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	Orang	180	13.496.855.100	7.514	4.016.113.670	3.000.000.000												7.514	4.016.113.670	4.174,44	29,76	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
		2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Jumlah Pelaku Usaha KUMKM Binaan yang Naik Kelas	Angka	0	581.613.418.921	2.375	160.079.622.951	70.208.657.680	131					131						2.506	160.079.622.951		27,52	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
				Jumlah desa preneur	Angka	0		72			72					72						144				DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
				Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	0		84,1			84,1					84,1						168,2				DINAS KOPERASI DAN USAHA

Rata-rata capaian kinerja (%)						712.268.306.425		181.517.186.376		97.211.387.568		750.158.547				750.158.547		0,77			182.267.344.923		91,48	25,59		
Predikat Kinerja																SR	SR							ST	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																										
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																										
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																										
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																										



No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp		
5	Meningkatnya UMKM yang berkembang usahanya pada kantong-kantong kemiskinan di DIY																										
Rata-rata capaian kinerja (%)						712.268.306.425		181.517.186.376		97.211.387.568		750.158.547						750.158.547		0,77		182.267.344.923		91,48	25,59		
Predikat Kinerja																		SR		SR					ST	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																											
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																											

Disusun  
Yogyakarta, 2 Mei 2025  
Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Dievaluasi  
Yogyakarta, 2 Mei 2025  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah

Ir. SRIE NURKYATSIWI, M.MA  
NIP. 196606121994032007

NI MADE DWIPANTI INDRAYANTI, S.T., M.T.  
NIP. 197010181998032007

**EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUNGAN PROVINSI  
RENJA PERANGKAT DAERAH DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERIODE PELAKSANAAN : 2025**

Indikator dan target kinerja SKPD yang mengacu pada sasaran RKPd:	Target	Realisasi
1 Jumlah koperasi modern	9	
2 Kontribusi koperasi modern terhadap koperasi (%)	0	
3 Jumlah UMKM yang berkembang usahanya( pada tahun n)	1550	335
4 Jumlah UMKM yang berkembang usahanya	0	
5 Kategori RB Perangkat Daerah (1=AA, 2=A, 3=BB, 4=CC)	2	
6 Jumlah wirausaha Baru / Pemula	8365	6379
7 Kontribusi jumlah wirausaha pemula terhadap jumlah usaha kecil (%)	0	
8 Jumlah UMKM yang berkembang usahanya (aspek SDM dan produksi)	130	15

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
					6		7			8				9		10		11		12		13		14 = 13/8x100			15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp		
1	Meningkatnya jumlah koperasi modern	2.17.02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Jumlah Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam pada koperasi yang Memiliki Ijin Usaha Simpan Pinjam terhadap jumlah Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam pada Koperasi Dengan Wilayah kea	Unit	0	112.417.364	16	8.000.000		22.000.000	16								16						32	8.000.000		7,12	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	
				Kontribusi koperasi simpan pinjam dan unit usaha simpan pinjam yang memiliki ijin simpan pinjam terhadap koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi (%)	%	0																								DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	
		2.17.02.1.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	undefined	24	112.417.364	15	8.000.000		22.000.000														15	8.000.000	62,50	7,12	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH		
		2.17.02.1.01.01	Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1(Satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam	Unit Usaha	5	112.417.364	1	8.000.000		22.000.000														1	8.000.000	20,00	7,12	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH		
Rata-rata capaian kinerja (%)							712.268.306.425		181.517.186.376		97.211.387.568										750.158.547					750.158.547	0,77		182.267.344.923	91,48	25,59
Predikat Kinerja																					SR	SR						ST	SR		
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																															
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																															
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																															
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																															

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)				Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						6	7	8	I		II		III		IV		13	14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%								
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17														
		2.17.03	<b>PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI</b>	Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya (tata kelola, manajemen resiko, kinerja keuangan, permodalan)	Koperasi	0	276.000.000	26				54.000.000	2								2					28				DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
				Presentase koperasi yang meningkat kualitasnya (%)	%	0																							DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	
		2.17.03.1.01	<b>Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>	Jumlah Koperasi dengan Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang Diperiksa dan Diawasi	undefined	13	276.000.000	8				54.000.000													8		61,54		DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	
		2.17.03.1.01.01	Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesinambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesinambungan, dan Pemberian Manfaat ke pada Anggota KUKM dan Masyarakat	Dokumen	3	166.000.000					32.000.000																	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	
		2.17.03.1.01.02	Peningkatan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel	Jumlah Koperasi Yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan dan Tersedianya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel	Unit Usaha	60	110.000.000					22.000.000																	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	
		2.17.04	<b>PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI</b>	Jumlah KSP/USP yang meningkat hasil pemeriksaan kesehatannya	Koperasi	0	90.300.000	34				18.000.000	5								5					39			DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	
				Presentase KSP/USP yang meningkat kualitasnya	%	0																							DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	
		2.17.04.1.01	<b>Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah</b>	Jumlah koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang dinilai sehatn kopersinya yang wilayah keanggotaannya	undefined	95	90.300.000	95				18.000.000													95		100,00		DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	
Rata-rata capaian kinerja (%)							712.268.306.425		181.517.186.376		97.211.387.568		750.158.547								750.158.547		0,77		182.267.344.923	91,48	25,59			
Predikat Kinerja																					SR	SR				ST	SR			
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																														
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																														
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																														
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																														





No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
					6		7			8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100			15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp		
			Pantai Selatan	Pantai Selatan																					DAN USAHA KECIL MENENGAH				
		1.03.13.5.02.03	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu	Dokumen	3	4.500.000.000				500.000.000														DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH				
		1.03.13.5.02.04	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh	Dokumen	2	4.250.000.000				0														DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH				
		1.03.13.5.02.05	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri	Dokumen	4	4.250.000.000				250.000.000														DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH				
		1.03.13.5.02.08	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Merapi	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Merapi	Dokumen	5	6.500.000.000	4	959.326.809		500.000.000										4	959.326.809	80,00	14,76	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH				
		1.03.13.5.02.12	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kerto-Pleret	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kerto-Pleret	Dokumen	3	4.500.000.000				500.000.000														DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH				
		<b>2.17.08</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM</b>	<b>Persentase Usaha Mikro Kecil Binaan yang Diberikan Pendampingan SDM, Kelembagaan, Produksi, Keuangan, Pasar dan Digital Marketing</b>	<b>%</b>	<b>0</b>	<b>7.391.330.700</b>	<b>0,46</b>	<b>1.101.500.400</b>	<b>1.552.730.000</b>	<b>0,1</b>									<b>0,1</b>				<b>0,28</b>	<b>1.101.500.400</b>		<b>14,90</b>	<b>DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH</b>	
				<b>Jumlah UMKM dibina yang berkembang usahanya</b>	<b>UMKM</b>	<b>0</b>																			<b>DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH</b>				
		<b>2.17.08.1.01</b>	<b>Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah</b>	<b>Jumlah UKM yang berkembang usahanya (aspek SDM, kelembagaan, produksi, keuangan, pasar dan digital marketing)</b>	<b>undefined</b>	<b>1.095</b>	<b>7.391.330.700</b>	<b>850</b>	<b>1.101.500.400</b>	<b>1.552.730.000</b>														<b>850</b>	<b>1.101.500.400</b>	<b>77,63</b>	<b>14,90</b>	<b>DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH</b>	
		2.17.08.1.01.01	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia,	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran,	Unit Usaha	1.270	6.016.574.700	25	867.250.400		1.277.730.000													25	867.250.400	1,97	14,41	DINAS KOPERASI DAN USAHA	
Rata-rata capaian kinerja (%)							712.268.306.425		181.517.186.376		97.211.387.568										750.158.547				0,77		182.267.344.923	91,48	25,59
Predikat Kinerja																						SR						ST	SR
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																													
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																													
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																													
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																													

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
					6	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp		
																								9	10
			serta Desain dan Teknologi	Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi																KECIL MENENGAH					
		2.17.08.1.01.02	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM	Jumlah Pelaku UMKM yang Memahami Literasi Hukum	Orang	258	1.374.756.000	360	234.250.000	275.000.000								360	234.250.000	139,53	17,04	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH			
3	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Perangkat Daerah	0.00.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Skor	0	53.062.374.240	91,21	11.944.688.906	10.547.999.888								750.158.547	7,11	91,21	12.694.847.453	23,92	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH		
		0.00.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100	403.515.300	100	19.264.170	81.000.000									50	19.264.170	50,00	4,77	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH		
		0.00.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	20	276.406.300	1	6.764.670	55.000.000									1	6.764.670	5,00	2,45	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH		
		0.00.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	20	65.730.000	1	6.499.800	13.000.000									1	6.499.800	5,00	9,89	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH		
		0.00.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	15	61.379.000	1	5.999.700	13.000.000									1	5.999.700	6,67	9,77	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH		
		0.00.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	38.312.200.840	100	7.225.654.891	7.662.240.188									750.158.547	9,79	50	7.975.813.438	50,00	20,82	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
		0.00.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	56	37.824.400.940	53	7.152.794.891	7.564.880.188									750.158.547	9,92	53	7.902.953.438	94,64	20,89	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
		0.00.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	5	346.800.000	1	69.360.000	69.360.000										1	69.360.000	20,00	20,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA	
Rata-rata capaian kinerja (%)							712.268.306.425		181.517.186.376	97.211.387.568								750.158.547	0,77		182.267.344.923	91,48	25,59		
Predikat Kinerja																		SR	SR			ST	SR		
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																									
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																									

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara



No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13/8x100	15 = 7 + 13	16 = 15 / 6 x 100%	17													
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	17		
																											KECIL MENENGAH		
		0.00.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	10	63.942.400	1	1.370.000	13.198.000															1	1.370.000	10,00	2,14	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
		0.00.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	60	733.040.000	30	125.825.091	150.000.000															30	125.825.091	50,00	17,16	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
		0.00.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	8	86.000.000			21.000.000																		DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	
		0.00.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	4	77.200.000			19.300.000																		DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	
		<b>0.00.01.1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>4.520.372.800</b>	<b>100</b>	<b>5.999.000</b>	<b>825.000.000</b>															<b>50</b>	<b>5.999.000</b>	<b>50,00</b>	<b>0,13</b>	<b>DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH</b>
		0.00.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	2	784.145.800	4	1.160.000	75.000.000															4	1.160.000	200,00	0,15	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
		0.00.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	11	3.736.227.000	4	4.839.000	750.000.000															4	4.839.000	36,36	0,13	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
		<b>0.00.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>6.375.252.200</b>		<b>951.510.707</b>	<b>1.278.165.000</b>																<b>951.510.707</b>		<b>14,93</b>	<b>DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH</b>
		0.00.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	10	3.470.000	1	98.000	700.000															1	98.000	10,00	2,82	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
Rata-rata capaian kinerja (%)						712.268.306.425	181.517.186.376	97.211.387.568	750.158.547									750.158.547	0,77			182.267.344.923	91,48	25,59					
Predikat Kinerja																		SR	SR							ST	SR		
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																													
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																													
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																													
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																													

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab										
					6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13/8x100	15 = 7 + 13	16 = 15 / 6 x 100%	17																			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp													
		0.00.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	15	2.744.000.000	7	262.156.707	550.000.000												7	262.156.707	46,67	9,55	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH									
		0.00.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	15	3.627.782.200	7	689.256.000	727.465.000												7	689.256.000	46,67	19,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH									
		<b>0.00.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>2.060.490.600</b>	<b>100</b>	<b>3.590.865.047</b>	<b>411.255.700</b>												<b>50</b>	<b>3.590.865.047</b>	<b>50,00</b>	<b>174,27</b>	<b>DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH</b>									
		0.00.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	1	259.520.500	1	28.535.000	52.194.000												1	28.535.000	100,00	11,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH									
		0.00.01.1.09.010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	6	83.639.000	1	1.984.000	17.000.000												1	1.984.000	16,67	2,37	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH									
		0.00.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	16	864.340.000	17	107.648.100	171.200.000												17	107.648.100	106,25	12,45	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH									
		0.00.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	8	113.682.600	2	2.000.000	23.000.000												2	2.000.000	25,00	1,76	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH									
		0.00.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	739.308.500	1	3.450.697.947	147.861.700												1	3.450.697.947	100,00	466,75	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH									
<b>4</b>	<b>Meningkatnya jumlah wirausaha</b>	<b>2.17.07</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)</b>	<b>Jumlah Wirausaha Pemula (tahun n)</b>	<b>Orang</b>	<b>0</b>	<b>19.515.335.000</b>	<b>563</b>	<b>6.201.476.120</b>	<b>4.253.000.000</b>	<b>70</b>											<b>633</b>	<b>6.201.476.120</b>		<b>31,78</b>	<b>DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH</b>									
Rata-rata capaian kinerja (%)							712.268.306.425		181.517.186.376	97.211.387.568													750.158.547	0,77		182.267.344.923	91,48	25,59							
Predikat Kinerja																													SR	SR				ST	SR
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																																			
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																																			
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																																			
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																																			

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%									
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
				Jumlah Usaha Mikro Kecil Binaan yang Diberikan Pendampingan aspek SDM dan produksi	UMKM	0		24.630							24.630						49.260					DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
				Jumlah Wirausaha Pemula (kumulatif)	Orang	0																			DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	
		2.17.07.1.01	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah wirausaha yang meningkat kapasitas usaha, SDM, dan produk sehingga memiliki kontribusi dalam pertumbuhan ekonomi	undefined	835	19.515.335.000	725	6.201.476.120	4.253.000.000											725	6.201.476.120	86,83	31,78	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	
		2.17.07.1.01.01	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Unit Usaha	5	6.018.479.900	5	2.185.362.450	1.253.000.000											5	2.185.362.450	100,00	36,31	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	
		2.17.07.1.01.02	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	Orang	180	13.496.855.100	7.514	4.016.113.670	3.000.000.000											7.514	4.016.113.670	4.174,44	29,76	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	
		2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Jumlah Pelaku Usaha KUMKM Binaan yang Naik Kelas	Angka	0	581.613.418.921	2.375	160.079.622.951	70.208.657.680	131					131					2.506	160.079.622.951		27,52	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	
				Jumlah desa preneur	Angka	0		72			72					72					144				DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	
				Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	0		84,1			84,1					84,1					168,2				DINAS KOPERASI DAN USAHA	
Rata-rata capaian kinerja (%)							712.268.306.425		181.517.186.376	97.211.387.568					750.158.547					750.158.547	0,77		182.267.344.923	91,48	25,59	
Predikat Kinerja																SR					SR			ST	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																										
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																										
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																										
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																										

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara



No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13/8x100	15 = 7 + 13	16 = 15 / 6 x 100%	17										
5	Meningkatnya UMKM yang berkembang usahanya pada kantong-kantong kemiskinan di DIY																									
Rata-rata capaian kinerja (%)						712.268.306.425		181.517.186.376		97.211.387.568		750.158.547						750.158.547	0,77			182.267.344.923	91,48	25,59		
Predikat Kinerja																		SR	SR					ST	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																										
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																										
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																										
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																										

Disusun  
Yogyakarta, 2 Mei 2025  
Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Dievaluasi  
Yogyakarta, 2 Mei 2025  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah

Ir. SRIE NURKYATSIWI, M.MA  
NIP. 196606121994032007

NI MADE DWIPANTI INDRAYANTI, S.T., M.T.  
NIP. 197010181998032007

**EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUNGAN PROVINSI  
RENJA PERANGKAT DAERAH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERIODE PELAKSANAAN : 2025**

Indikator dan target kinerja SKPD yang mengacu pada sasaran RPKD:

	Target	Realisasi
1 Nilai Realisasi Investasi di DIY	0	0
2 Nilai Predikat Pelayanan Prima	0	
3 Kategori RB Perangkat Daerah	0	
4 Nilai Realisasi Investasi di DIY	3,22	4,1
5 Nilai Predikat Pelayanan Prima	1	1
6 Kategori RB Perangkat Daerah	2	2

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I	II	III	IV			13	14 = 13/8x100	15 = 7 + 13	16 = 15 / 6 x 100%			
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13/8x100	15 = 7 + 13	16 = 15 / 6 x 100%	17							
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	Meningkatkan Nilai Realisasi Investasi di DIY																							
2	Mempertahankan Predikat Pelayanan Prima																							
3	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintah di Perangkat Daerah																							
4	Meningkatkan Nilai Realisasi Investasi di DIY	2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah Proyek Siap Jual (IPRO)	lokus	0	1.444.999.900	1		350.000.000										1				DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
				Jumlah izin Usaha	izin	0		0																DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		2.18.02.1.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	Jumlah Dokumen Peta Potensi	dokumen	8	1.444.999.900	1		350.000.000										1		12,50		DINAS PENANAMAN MODAL DAN
Rata-rata capaian kinerja (%)							85.662.583.174		10.496.907.519		17.392.000.000										10.496.907.519	18,99	12,25	
Predikat Kinerja																								
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																								
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																								

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab								
						6		7		8		9		10				11		12			13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
																								<b>PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</b>						
		2.18.02.1.02.02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Provinsi	dokumen	8	1.444.999.900			350.000.000														DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU						
		<b>2.18.03</b>	<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>	Jumlah Kepeminatan Investasi	kepeminatan	0	3.386.560.500	36	193.330.000	650.000.000	2						2				38	193.330.000		5,71	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU					
				Nilai Rencana Investasi (Rp Trilyun)	trilyun	0		0																DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU						
		<b>2.18.03.1.01</b>	<b>Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi</b>	Jumlah Dokumen Promosi Penanaman Modal	dokumen	10	3.386.560.500	1	193.330.000	650.000.000											1	193.330.000	10,00	5,71	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU					
		2.18.03.1.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi	dokumen	10	3.386.560.500	1	193.330.000	650.000.000											1	193.330.000	10,00	5,71	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU					
		<b>2.18.05</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>	Jumlah Proyek Dilaporkan dalam LKPM	kegiatan usaha	0	4.941.511.000	9.252		985.000.000	12.303						12.303				21.555			DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU						
				Jumlah Proyek yang patuh memberikan	proyek	0		0																DINAS PENANAMAN						
Rata-rata capaian kinerja (%)							85.662.583.174		10.496.907.519	17.392.000.000												10.496.907.519	18,99	12,25						
Predikat Kinerja																														
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																														
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																														
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																														
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100			15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp
				laporan kegiatan penanaman modal (LKPM)																				MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU				
		2.18.05.1.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Terlaksananya Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penanaman Modal	kali	38	4.941.511.000	6		985.000.000											6		15,79	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU				
				Jumlah Kegiatan Usaha/Pelaku Usaha yang dipantau, di bina, dan diawasi	undefined	420																		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU				
		2.18.05.1.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	pelaku usaha	2.000	4.417.758.900			880.000.000														DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU				
		2.18.05.1.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	kegiatan usaha	140	523.752.100			105.000.000														DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU				
		2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Jumlah Diplomasi Kerjasama Luar Negeri yang aktif	mitra	0	10.500.000.000	2	959.540.577	2.500.000.000	2						2				4	959.540.577	9,14	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU				
		2.22.08.5.09	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Jumlah kerjasama	kerjasama	1	10.500.000.000	1	959.540.577	2.500.000.000											1	959.540.577	100,00	9,14	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU			
Rata-rata capaian kinerja (%)							85.662.583.174		10.496.907.519	17.392.000.000												10.496.907.519	18,99	12,25				
Predikat Kinerja																	SR	SR						SR	SR			
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																												
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																												

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab								
						6		7		8		9		10				11		12			13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		2.22.08.5.09.03	Misi Kebudayaan ke Dalam dan Luar Negeri dalam rangka Diplomasi Budaya	Jumlah Laporan Pelaksanaan Misi Kebudayaan ke Dalam dalam rangka Diplomasi Budaya	laporan	4	10.500.000.000	1	959.540.577		2.500.000.000							1	959.540.577	25,00	9,14	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU								
5	Mempertahankan Predikat Pelayanan Prima	2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	skor	0	3.496.371.100	88,03			705.000.000	87,58						87			175,03			DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU						
		2.18.04.1.02	Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Pelaku usaha/Kegiatan usaha yang terlayani	pelaku usaha	9.244	3.496.371.100	610			705.000.000							610			6,60		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU							
		2.18.04.1.02.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Terfasilitasi Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Kewenangan Daerah Provinsi	pelaku usaha	3.015	2.096.550.300				420.000.000												DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU							
		2.18.04.1.02.02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Terfasilitasi Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal Kewenangan Daerah Provinsi	kegiatan usaha	279	310.596.200				65.000.000												DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU							
		2.18.04.1.02.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan	orang	5.950	1.089.224.600				220.000.000												DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN							
Rata-rata capaian kinerja (%)							85.662.583.174		10.496.907.519		17.392.000.000										10.496.907.519	18,99	12,25							
Predikat Kinerja																								SR	SR					
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																														
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																														
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																														
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																														

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100			15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp
			Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Kewenangan Daerah Provinsi																			TERPADU SATU PINTU				
		2.18.06	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>	<b>Persentase Data dan Informasi Perizinan dan Penanaman Modal yang Diolah, Disajikan, dan Dimanfaatkan Sebagai Bahan Informasi Publik dan Perumusan Kebijakan</b>	%	0	1.111.799.100	85		220.000.000	20									20			52,5	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU			
				Jumlah data yang tersaji	jenis	0		0															DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU				
		2.18.06.1.01	<b>Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi</b>	<b>Jenis Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan.</b>	jenis	5	1.111.799.100	5		220.000.000													5	100,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
		2.18.06.1.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	dokumen	5	1.111.799.100	5		220.000.000													5	100,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
6	Meningkatnya tata kelola	0.00.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN</b>	<b>Nilai PKKI Program Penunjang Urusan</b>	skor	0	60.781.341.574	90,93	9.344.036.942	11.982.000.000	86,79									86,79			177,72	9.344.036.942	15,37	DINAS PENANAMAN	
Rata-rata capaian kinerja (%)							85.662.583.174		10.496.907.519	17.392.000.000														10.496.907.519	18,99	12,25	
Predikat Kinerja																					SR	SR			SR	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																											
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																											

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100			15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5																				17			
	penyelenggaraan urusan pemerintah di Perangkat Daerah		PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Pemerintah Daerah																				MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU			
		0.00.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi	dokumen	9	368.432.800	9	24.056.750	84.500.000											9	24.056.750	100,00	6,53	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
		0.00.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	15	257.144.800	3	12.001.750	60.000.000											3	12.001.750	20,00	4,67	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
		0.00.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	dokumen	14	28.393.000	3	5.480.000	6.500.000											3	5.480.000	21,43	19,30	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
		0.00.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	laporan	15	82.895.000	3	6.575.000	18.000.000											3	6.575.000	20,00	7,93	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
		0.00.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Keuangan	dokumen	15	44.454.933.074	3	7.988.630.652	8.961.500.000											3	7.988.630.652	20,00	17,97	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
		0.00.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	65	44.150.533.274	62	7.956.932.652	8.900.000.000											62	7.956.932.652	95,38	18,02	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
Rata-rata capaian kinerja (%)							85.662.583.174		10.496.907.519	17.392.000.000												10.496.907.519	18,99	12,25			
Predikat Kinerja																								SR	SR		
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																											
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																											

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab								
						6		7		8		9		10				11		12			13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		0.00.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	dokumen	5	213.640.000	1	31.535.000		43.000.000							1	31.535.000	20,00	14,76	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU								
		0.00.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	laporan	5	90.759.800	1	163.000		18.500.000							1	163.000	20,00	0,18	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU								
		<b>0.00.01.1.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</b>	<b>laporan</b>	<b>5</b>	<b>80.702.000</b>	<b>1</b>	<b>10.766.000</b>		<b>17.500.000</b>							<b>1</b>	<b>10.766.000</b>	<b>20,00</b>	<b>13,34</b>	<b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</b>								
		0.00.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	laporan	5	80.702.000	1	10.766.000		17.500.000							1	10.766.000	20,00	13,34	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU								
		<b>0.00.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Tersedianya Administrasi umum Perangkat Daerah</b>	<b>paket/dokumen</b>	<b>80</b>	<b>4.597.189.500</b>	<b>8</b>	<b>178.470.877</b>		<b>946.500.000</b>							<b>8</b>	<b>178.470.877</b>	<b>10,00</b>	<b>3,88</b>	<b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</b>								
		0.00.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	5	85.177.600	1	6.051.000		18.000.000							1	6.051.000	20,00	7,10	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU								
		0.00.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	5	448.994.600	1	5.342.000		90.000.000							1	5.342.000	20,00	1,19	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN								
Rata-rata capaian kinerja (%)							85.662.583.174		10.496.907.519		17.392.000.000								10.496.907.519	18,99	12,25									
Predikat Kinerja																														
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																														
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																														
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																														
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																														

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab								
					6		7		8		9		10				11		12			13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5																				17					
																								TERPADU SATU PINTU					
		0.00.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket	5	243.950.400	1	5.337.500	50.000.000														DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU					
		0.00.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	5	55.399.200	1	5.210.000	11.500.000														DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU					
		0.00.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	paket	5	483.484.500	1	20.290.192	97.000.000														DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU					
		0.00.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	dokumen	33	62.383.200	1	220.000	13.000.000														DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU					
		0.00.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	laporan	4	46.000.000			11.000.000														DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU					
		0.00.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	5	2.478.800.000	1	125.819.085	500.000.000														DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU					
		0.00.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	dokumen	4	148.000.000	1	10.201.100	36.000.000														DINAS PENANAMAN MODAL DAN					
Rata-rata capaian kinerja (%)							85.662.583.174		10.496.907.519	17.392.000.000																			
Predikat Kinerja																													
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																													
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																													
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																													
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																													

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab								
						6		7		8		9		10				11		12			13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
																								PELAYANAN TERPADU SATU PINTU						
		0.00.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	dokumen	4	545.000.000			120.000.000														DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU						
		<b>0.00.01.1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah Pengadaan Barang (Unit/Paket)</b>	<b>paket/unit</b>	<b>52</b>	<b>4.245.219.300</b>	<b>7</b>	<b>46.134.998</b>	<b>580.000.000</b>														<b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</b>						
		0.00.01.1.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	unit	1	600.000.000			0														DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU						
		0.00.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	unit	2	800.000.000			400.000.000														DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU						
		0.00.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	paket	4	175.000.000	1	1.000.000	40.000.000											1	1.000.000	25,00	0,57	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU					
		0.00.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	22	358.701.600	1	41.118.749	75.000.000											1	41.118.749	4,55	11,46	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU					
		0.00.01.1.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan	unit	1	2.000.000.000			0														DINAS PENANAMAN						
Rata-rata capaian kinerja (%)							85.662.583.174		10.496.907.519	17.392.000.000												10.496.907.519	18,99	12,25						
Predikat Kinerja																									SR SR					
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																														
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																														
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																														
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab								
						6		7		8		9		10				11		12			13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
			Lainnya	Lainnya yang Disediakan																			MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU							
		0.00.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	21	311.517.700	1	4.016.249	65.000.000											1	4.016.249	4,76	1,29	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU					
		<b>0.00.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan</b>	<b>laporan</b>	<b>15</b>	<b>3.639.432.200</b>	<b>3</b>	<b>702.271.934</b>	<b>738.500.000</b>											<b>3</b>	<b>702.271.934</b>	<b>20,00</b>	<b>19,30</b>	<b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</b>					
		0.00.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	5	64.770.000	1	6.794.920	14.000.000											1	6.794.920	20,00	10,49	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU					
		0.00.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	5	567.400.000	1	117.197.014	114.500.000											1	117.197.014	20,00	20,66	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU					
		0.00.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	5	3.007.262.200	1	578.280.000	610.000.000											1	578.280.000	20,00	19,23	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU					
		<b>0.00.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah barang milik daerah yang terpelihara (unit)</b>	<b>unit</b>	<b>840</b>	<b>3.395.432.700</b>	<b>56</b>	<b>393.705.731</b>	<b>653.500.000</b>											<b>56</b>	<b>393.705.731</b>	<b>6,67</b>	<b>11,60</b>	<b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</b>					
Rata-rata capaian kinerja (%)							85.662.583.174		10.496.907.519	17.392.000.000												10.496.907.519	18,99	12,25						
Predikat Kinerja																														
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																														
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																														
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																														
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																														

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13/8x100	15 = 7 + 13			16 = 15 / 6 x 100%					
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp		K
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13/8x100	15 = 7 + 13	16 = 15 / 6 x 100%	17						
		0.00.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	unit	1	217.132.000	1	33.471.880									1	33.471.880	100,00	15,42	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
		0.00.01.1.09.010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	242	344.381.500	14	19.390.000									14	19.390.000	5,79	5,63	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
		0.00.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	9	811.494.200	7	134.380.400									7	134.380.400	77,78	16,56	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
		0.00.01.1.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	unit	252	73.637.400	1	350.000									1	350.000	0,40	0,48	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
		0.00.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	275	292.537.600	25	28.050.000									25	28.050.000	9,09	9,59	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
		0.00.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	2	1.656.250.000	1	178.063.451									1	178.063.451	50,00	10,75	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
Rata-rata capaian kinerja (%)							85.662.583.174		10.496.907.519										10.496.907.519	18,99	12,25		
Predikat Kinerja																							
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																							
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																							

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13/8x100	15 = 7 + 13			16 = 15 / 6 x 100%				
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13/8x100	15 = 7 + 13	16 = 15 / 6 x 100%	17						
		07	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Skor	0		90,93								nan	90,93				DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
Rata-rata capaian kinerja (%)							85.662.583.174		10.496.907.519		17.392.000.000							10.496.907.519	18,99	12,25		
Predikat Kinerja																						
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																						
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																						
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																						
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																						

Disusun  
Yogyakarta, 2 Mei 2025  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Dievaluasi  
Yogyakarta, 2 Mei 2025  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah

AGUS PRIONO, M.Ec.  
NIP. 196711101993081001

NI MADE DWIPANTI INDRAYANTI, S.T., M.T.  
NIP. 197010181998032007

**EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUNGAN PROVINSI  
RENJA PERANGKAT DAERAH BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERIODE PELAKSANAAN : 2025**

Indikator dan target kinerja SKPD yang mengacu pada sasaran RKPD:

Target Realisasi

1 Persentase rumusan kebijakan menjadi kebijakan dalam mendukung program Pemda (bidang infrastruktur)	60	50
2 Persentase kualitas pengadaan barang dan jasa dan persentase IKM	69.49	
3 Kategori Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	2	2

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
								I		II		III		IV				15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%					
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp		K	Rp	
1	Meningkatnya kualitas rumusan kebijakan bidang infrastruktur daerah yang mendukung program Pemda (bidang infrastruktur)	1.03.13	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG</b>	Persentase penyediaan rumusan kebijakan pendukung Program Pemda	%	0	1.660.422.098	50	181.700.000	389.738.096	50									50	181.700.000		10,94	BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN	
		1.03.13.5.02	<b>Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten</b>	Persentase kebijakan pendukung Program Pemda urusan tata ruang	%	100	1.660.422.098	25	181.700.000	389.738.096										12,5	181.700.000	12,50	10,94	BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN	
		1.03.13.5.02.01	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Strategis Sumbu Filosofis	Dokumen	2	861.321.192			389.738.096														BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN	
		1.03.13.5.02.02	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan	Jumlah dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan	Dokumen	2	799.100.906	1	181.700.000	0										1	181.700.000	50,00	22,74	BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN	
Rata-rata capaian kinerja (%)							86.695.825.984		2.146.254.826	18.331.602.898											2.146.254.826	63,55	2,48		
Predikat Kinerja																							R	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																									
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																									

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab														
						K	Rp		K	Rp	K	Rp			K	Rp			K	Rp	K	Rp	K	Rp								
1	2	3	4	5	6		7		8				9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase penyediaan rumusan kebijakan pendukung Program Pemda	%	0	10.527.871.000	100	1.098.817.940	1.981.230.000																	50	1.098.817.940		10,44	BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN	
		2.22.08.5.04	Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya	Persentase peningkatan Budaya Tak Benda yang dilestarikan	%	0	9.792.871.000		1.098.817.940	1.981.230.000																		1.098.817.940		11,22	BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN	
				Jumlah Budaya Benda dan Tak benda yang dikelola dan dilestarikan	Objek	2		2																			2		100,00	BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN		
		2.22.08.5.04.03	Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia	Jumlah Objek Warisan Budaya Nasional dan Dunia yang masuk Nominasi	Objek	2	9.792.871.000	2	1.098.817.940	1.981.230.000																	2	1.098.817.940	100,00	11,22	BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN	
		2.22.08.5.06	Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Tersedianya sarana prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan	%	100	735.000.000																									BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN
		2.22.08.5.06.01	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya	Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya	Unit	20	735.000.000			0																						BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN
		4.01.08	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Persentase penyediaan rumusan kebijakan pendukung Program Pemda	%	0	10.714.753.198	66,67	254.033.050	2.864.738.096	66,67																66,67	254.033.050		2,37	BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN	
Rata-rata capaian kinerja (%)							86.695.825.984		2.146.254.826	18.331.602.898																	2.146.254.826	63,55	2,48			
Predikat Kinerja																																
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																																
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																																
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																																
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																																

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab										
						K	Rp		K	Rp	K	Rp			K	Rp			K	Rp	K	Rp	K	Rp				
1	2	3	4	5	6		7		8	9				10	11	12	13	14 = 13/8x100	15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%	17						
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
																							PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN					
		4.01.08.1.01	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	persentase kebijakan pendukung Program Pemda yang dievaluasi	%	100	5.669.527.198	36,84	102.597.900	1.514.738.096													18,42	102.597.900	18,42	1,81	BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN	
		4.01.08.1.01.03	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Laporan	19	5.669.527.198	2	102.597.900	1.514.738.096													2	102.597.900	10,53	1,81	BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN	
		4.01.08.1.02	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase bahan rumusan kebijakan pendukung Program Pemda	%	100	5.045.226.000	45,45	151.435.150	1.350.000.000													22,725	151.435.150	22,73	3,00	BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN	
		4.01.08.1.02.03	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Dokumen	11	5.045.226.000	3	151.435.150	1.350.000.000													3	151.435.150	27,27	3,00	BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN	
2	Meningkatnya kualitas Pengadaan Barang Jasa	4.01.07	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Persentase pelayanan Pengadaan Barang Jasa	%	0	5.882.503.228	70,93	253.036.880	1.365.768.800													35,465	253.036.880		4,30	BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN	
				Persentase Kepuasan masyarakat terhadap layanan Pengadaan Barang dan Jasa dengan Kategori baik	%	0		85															42,5				BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN	
Rata-rata capaian kinerja (%)							86.695.825.984		2.146.254.826	18.331.602.898														2.146.254.826	63,55	2,48		
Predikat Kinerja																												
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																												
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																												

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab								
						K	Rp		K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp				
1	2	3	4	5	6		7		8	9		10	11	12	13	14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17					
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
		4.01.07.1.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pengadaan Barang dan Jasa yang berkualitas	%	90	4.427.604.600	86	208.142.930	1.028.610.000									43	208.142.930	47,78	4,70	BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN				
		4.01.07.1.01.02	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan	14	4.427.604.600	2	208.142.930	1.028.610.000									2	208.142.930	14,29	4,70	BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN				
		4.01.07.1.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Presentase penyelenggaraan pengadaan Barang dan Jasa yang dilakukan secara elektronik	%	69,94	565.083.200	62,44	19.858.000	133.100.000									31,22	19.858.000	44,64	3,51	BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN				
		4.01.07.1.02.01	Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Laporan	3	565.083.200	3	19.858.000	133.100.000									3	19.858.000	100,00	3,51	BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN				
		4.01.07.1.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Pemenuhan level kematangan strategis	%	62,5	889.815.428	25	25.035.950	204.058.800									12,5	25.035.950	20,00	2,81	BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN				
		4.01.07.1.03.03	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan	3	889.815.428	3	25.035.950	204.058.800									3	25.035.950	100,00	2,81	BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN				
3	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di	0.00.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	0	57.910.276.460	95,7	358.666.956	11.730.127.906	96,37								96,37				96,035	358.666.956		0,62	BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN
Rata-rata capaian kinerja (%)							86.695.825.984		2.146.254.826	18.331.602.898										2.146.254.826	63,55	2,48					
Predikat Kinerja																											
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																											
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																											

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
						K	Rp		K	Rp	K	Rp			K	Rp			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6		7		8	9				13	14 = 13/8x100	15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%	17						
	perangkat daerah																								
		<b>0.00.01.1.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Terwujudnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>115.925.100</b>	<b>100</b>	<b>10.735.700</b>	<b>25.345.000</b>										<b>PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN</b>					
		0.00.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4	46.753.700	3	4.216.400	10.050.000										3	4.216.400	75,00	9,02	BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN	
		0.00.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	4	22.236.800	4	2.868.600	4.900.000										4	2.868.600	100,00	12,90	BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN	
		0.00.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	3	46.934.600	3	3.650.700	10.395.000										3	3.650.700	100,00	7,78	BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN	
		<b>0.00.01.1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Terwujudnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>52.944.320.460</b>	<b>100</b>	<b>31.936.200</b>	<b>10.585.987.906</b>										<b>50</b>	<b>31.936.200</b>	<b>50,00</b>	<b>0,06</b>	<b>BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN</b>	
		0.00.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Dokumen	60	52.702.384.460			10.534.052.906														BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN	
		0.00.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan	Dokumen	12	168.800.000	12	28.800.000	35.000.000										12	28.800.000	100,00	17,06	BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR	
Rata-rata capaian kinerja (%)							86.695.825.984		2.146.254.826	18.331.602.898											2.146.254.826	63,55	2,48		
Predikat Kinerja																									
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																									
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																									

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6		7		8	9				13	14 = 13/8x100	15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
			Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																	WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN			
		0.00.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	2	28.515.600	2	1.536.200	6.595.000									2	1.536.200	100,00	5,39	BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN	
		0.00.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	18	44.620.400	18	1.600.000	10.340.000									18	1.600.000	100,00	3,59	BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN	
		<b>0.00.01.1.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Terwujudnya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>90.437.000</b>	<b>100</b>	<b>10.950.300</b>	<b>19.020.000</b>									<b>50</b>	<b>10.950.300</b>	<b>50,00</b>	<b>12,11</b>	<b>BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN</b>	
		0.00.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	2	90.437.000	2	10.950.300	19.020.000									2	10.950.300	100,00	12,11	BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN	
		<b>0.00.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Terwujudnya Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>3.374.931.000</b>	<b>100</b>	<b>178.244.978</b>	<b>788.978.000</b>									<b>50</b>	<b>178.244.978</b>	<b>50,00</b>	<b>5,28</b>	<b>BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN</b>	
		0.00.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	44.424.000	1	2.378.000	10.245.000									1	2.378.000	100,00	5,35	BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN	
Rata-rata capaian kinerja (%)							86.695.825.984		2.146.254.826	18.331.602.898										2.146.254.826	63,55	2,48		
Predikat Kinerja																						R	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																								
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																								

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						K	Rp	K	Rp		K	Rp	I	II			III	IV	14 = 13/8x100	15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%	17		
1	2	3	4	5		6		7		8	9				10	11	12	13	14 = 13/8x100	15 = 7 + 13	16 = 15 / 6 x 100%	17			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
		0.00.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	198.633.200	1	9.472.000	45.375.000											1	9.472.000	100,00	4,77	BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN
		0.00.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	18.560.900	1	942.000	4.275.000											1	942.000	100,00	5,08	BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN
		0.00.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	90.014.900	1	7.478.400	20.168.000											1	7.478.400	100,00	8,31	BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN
		0.00.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	2.985.688.000	4	157.974.578	700.000.000											4	157.974.578	100,00	5,29	BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN
		0.00.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	37.610.000			8.915.000															BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN
		<b>0.00.01.1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Terwujudnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>307.650.000</b>	<b>100</b>	<b>16.490.000</b>	<b>73.150.000</b>											<b>50</b>	<b>16.490.000</b>	<b>50,00</b>	<b>5,36</b>	<b>BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN</b>
		0.00.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	10	231.000.000	1	8.790.000	55.000.000											1	8.790.000	10,00	3,81	BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN
Rata-rata capaian kinerja (%)							86.695.825.984		2.146.254.826	18.331.602.898												2.146.254.826	63,55	2,48	
Predikat Kinerja																									
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																									
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																									

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab													
						K	Rp		K	Rp	K	Rp			K	Rp			K	Rp	K	Rp	K	Rp							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
																														PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN	
		0.00.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	5	76.650.000	2	7.700.000	18.150.000																				BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN	
		<b>0.00.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Terwujudnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>212.850.000</b>	<b>100</b>	<b>10.400.000</b>	<b>51.700.000</b>																				<b>BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN</b>	
		0.00.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	30.180.000	1	500.000	7.200.000																				BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN	
		0.00.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	182.670.000	1	9.900.000	44.500.000																				BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN	
		<b>0.00.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Terwujudnya Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>864.162.900</b>	<b>100</b>	<b>99.909.778</b>	<b>185.947.000</b>																				<b>BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN</b>	
		0.00.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	1	158.217.900	1	25.969.541	32.932.000																				BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN	
		0.00.01.1.09.010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	Unit	3	65.657.000	16	6.480.000	14.602.000																				BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR	
Rata-rata capaian kinerja (%)							86.695.825.984		2.146.254.826	18.331.602.898																					
Predikat Kinerja																															
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																															
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																															
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																															
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																															

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp		K	Rp
1	2	3	4	5	6		7		8	9	10	11	12	13	14 = 13/8x100	15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17		
			Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi																WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN		
		0.00.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	6	564.686.000	6	60.955.237	121.418.000							6	60.955.237	100,00	10,79	BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN	
		0.00.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jenis	12	75.602.000	23	6.505.000	16.995.000							23	6.505.000	191,67	8,60	BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN	
Rata-rata capaian kinerja (%)							86.695.825.984		2.146.254.826	18.331.602.898								2.146.254.826	63,55	2,48		
Predikat Kinerja																				R	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																						
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																						
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																						
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																						

Disusun  
Yogyakarta, 2 Mei 2025  
Kepala Biro

Dievaluasi  
Yogyakarta, 2 Mei 2025  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah

0  
NIP. 0

NI MADE DWIPANTI INDRAYANTI, S.T., M.T.  
NIP. 197010181998032007

**EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUNGAN PROVINSI  
RENJA PERANGKAT DAERAH BIRO PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERIODE PELAKSANAAN : 2025**

Indikator dan target kinerja SKPD yang mengacu pada sasaran RKPD:

Target Realisasi

- |   |                                                                                           |       |       |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| 1 | Persentase Kualitas Pengadaan Barang/Jasa dan Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | 69.49 | 39.23 |
| 2 | Kategori Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah                                             | 92.61 | 93.48 |

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
										I		II		III		IV												
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	Meningkatnya Kualitas Pengadaan Barang/Jasa	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	80,8						86,86								86,86			nan	43,43		53,75		BIRO PENGADAAN BARANG/JASA
		2.22.08.5.06	Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan																									
		2.22.08.5.06.0001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya				0				0																	BIRO PENGADAAN BARANG/JASA
Rata-rata capaian kinerja (%)											8.294.000															29,23	nan	
Predikat Kinerja																					SR	SR				SR	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																												
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																												

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
												I		II												III		IV	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
		4.01.07	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Persentase Kualitas Pengadaan Barang/Jasa	%	78,74						33,93								33,93			nan	16,965		21,55		BIRO PENGADAAN BARANG/JASA	
		4.01.07.1.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa																										
		4.01.07.1.01.0002	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa																									BIRO PENGADAAN BARANG/JASA	
		4.01.07.1.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik																										
		4.01.07.1.02.0001	Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik																									BIRO PENGADAAN BARANG/JASA	
		4.01.07.1.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa																										
		4.01.07.1.03.0003	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis																									BIRO PENGADAAN BARANG/JASA	
Rata-rata capaian kinerja (%)											8.294.000																29,23	nan	
Predikat Kinerja																				SR	SR						SR	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																													
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																													
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																													
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																													

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						K	Rp		K	Rp	K	Rp	I		II					III		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13/8x100	15 = 7 + 13	16 = 15 / 6 x 100%	17						
			Pengadaan Barang dan Jasa																			
2	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Angka	86,17		8.294.000	86,23						86,23		86,23		100,07		BIRO PENGADAAN BARANG/JASA	
		4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	0		8.294.000													BIRO PENGADAAN BARANG/JASA	
		4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Angka	0	0	5.678.000													BIRO PENGADAAN BARANG/JASA	
		4.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil	Angka	0	0	2.616.000													BIRO PENGADAAN BARANG/JASA	
Rata-rata capaian kinerja (%)								8.294.000												29,23	nan	
Predikat Kinerja															SR	SR					SR	SR
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																						
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																						
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																						
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																						

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					K	Rp	K	Rp		K	Rp	I		II		III							IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17					
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD																				
		4.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																				BIRO PENGADAAN BARANG/JASA	
		<b>4.01.01.1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>																					
		4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																				BIRO PENGADAAN BARANG/JASA	
		4.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																				BIRO PENGADAAN BARANG/JASA	
		4.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																				BIRO PENGADAAN BARANG/JASA	
Rata-rata capaian kinerja (%)									8.294.000														29,23	nan
Predikat Kinerja																	SR	SR					SR	SR
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																								
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																								

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
					K	Rp	K	Rp		K	Rp	I		II		III					IV			14 = 13/8x100		16 = 15 / 6 x 100%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13/8x100	15 = 7 + 13	16 = 15 / 6 x 100%	17												
		4.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah																									
		4.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																								BIRO PENGADAAN BARANG/JASA	
		4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah																									
		4.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																								BIRO PENGADAAN BARANG/JASA	
		4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																								BIRO PENGADAAN BARANG/JASA	
		4.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																								BIRO PENGADAAN BARANG/JASA	
		4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																								BIRO PENGADAAN BARANG/JASA	
Rata-rata capaian kinerja (%)									8.294.000																		29,23	nan
Predikat Kinerja																											SR	SR
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																												
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																												

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K	Rp	K	Rp		K	Rp	I		II		III					IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17				
		4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		BIRO PENGADAAN BARANG/JASA		
		<b>4.01.01.1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>																				
		4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		BIRO PENGADAAN BARANG/JASA		
		<b>4.01.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>																				
		4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		BIRO PENGADAAN BARANG/JASA		
		<b>4.01.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>																				
		4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak																		BIRO PENGADAAN BARANG/JASA		
Rata-rata capaian kinerja (%)									8.294.000												29,23	nan	
Predikat Kinerja																SR	SR				SR	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																							
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																							

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)				Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab										
						K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13/8x100	15 = 7 + 13	16 = 15 / 6 x 100%	17																			
			Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																																
		4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																													BIRO PENGADAAN BARANG/JASA			
		4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																													BIRO PENGADAAN BARANG/JASA			
		4.01.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																													BIRO PENGADAAN BARANG/JASA			
Rata-rata capaian kinerja (%)							8.294.000																									29,23	nan		
Predikat Kinerja																																	SR	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																																			
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																																			
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																																			
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																																			

Disusun  
Yogyakarta, 2 Mei 2025  
Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa

Dievaluasi  
Yogyakarta, 2 Mei 2025  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah

ROSDIANA PUJI LESTARI, ST, M.Eng.  
NIP. 196905031993032006

NI MADE DWIPANTI INDRAYANTI, S.T., M.T.  
NIP. 197010181998032007

**EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUNGAN PROVINSI  
RENJA PERANGKAT DAERAH DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERIODE PELAKSANAAN : 2025**

Indikator dan target kinerja SKPD yang mengacu pada sasaran RKPD:

	Target	Realisasi
1 Kategori Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah; AA=1 (Skor >100); A=2 (>80 s.d 100); BB=3 (>70-80); B=4 (>60-70); CC=5 (>50-60); C=6 (>30-50)	2	2
2 Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Provinsi	25.34	7.53
3 Nilai indeks pencemaran sungai lintas kab/kota	6.03	5.69
4 Peningkatan jumlah produksi sektor kehutanan	5	5
5 Persentase luas lahan kritis yang direhabilitasi di DIY	4.61	4.55

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I	II	III	IV			K	Rp	K	Rp		K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13/8x100	15 = 7 + 13	16 = 15 / 6 x 100%	17									
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah	0.00.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	95,89	263.623.226.956	91,07	45.076.734.285	52.624.189.198	84,56						84,56			87,815	45.076.734.285	91,58	17,10	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
		0.00.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100	679.018.350	100	247.899.960	134.445.000										50	247.899.960	50,00	36,51	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
		0.00.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4	315.240.900	4	19.765.800	54.000.000										4	19.765.800	100,00	6,27	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
			Perencanaan perangkat daerah	dokumen		0		4												4				DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
		0.00.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	2	27.356.150	2	4.342.950	5.445.000										2	4.342.950	100,00	15,88	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
				Dokumen DPA dan DPPA	dokumen	0		2												2				DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
		0.00.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	22	336.421.300	22	223.791.210	75.000.000										22	223.791.210	100,00	66,52	DINAS LINGKUNGAN	
Rata-rata capaian kinerja (%)							686.548.338.493		59.734.095.301	167.417.014.312											59.734.095.301	799,48	8,70		
Predikat Kinerja																									
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:						1. Intensitas hujan yang stabil mendukung keberhasilan kegiatan penanaman 2. Semakin kuatnya jejaring dan kolaborasi khususnya dalam implementasi Desentralisasi Pengelolaan Sampah di Kabupaten/kota. Semakin banyak stakeholder yang bergabung untuk mendukung kebijakan tersebut, seperti yang terbaru adalah penanaman KKN Tematik Pengelolaan Sampah																			
Faktor penghambat pencapaian kinerja:						1. Tindak Lanjut Inpres No.1 Tahun 2025, Sekretaris Daerah mengeluarkan SE Sekda No. B.900.1.12/510/SET tentang Efisiensi Belanja Daerah TA 2025 sehingga beberapa aktivitas harus ditunda/dieffisiensi. Kegiatan Dana Keistimewaan sampai dengan Februari juga tidak dapat dilaksanakan sesuai ROPK Keuangan karena terdapat penundaan sesuai arahan dari Paniradya Pati Kaistimewaan melalui Surat No.S/100.1.5.1./1673/PANI perihal Rasionalisasi Program Kegiatan dan Subkegiatan Dana Keistimewaan TA 2025																			
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):						1. DLHK DIY melakukan inventarisasi kegiatan dan melakukan efisiensi sesuai dengan instruksi 2. Mengefektifkan anggaran perjalanan dinas untuk kegiatan yang prioritas dan berdampak langsung terhadap ketercapaian target kinerja																			
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																									

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13/8x100	15 = 7 + 13	16 = 15 / 6 x 100%	17								HIDUP DAN KEHUTANAN			
																								DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN			
				Laporan Evaluasi Perangkat Daerah	Laporan	0	22														22			DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN			
				Publikasi	Paket	0	1														1			DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN			
		0.00.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah	%	100	228.695.389.255	100	40.521.620.814	45.869.385.819											50	40.521.620.814	50,00	17,72	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN		
		0.00.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	369	227.945.683.455	369	40.410.071.123	45.719.225.819											369	40.410.071.123	100,00	17,73	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN		
		0.00.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	1	578.356.000	1	91.430.000	114.160.000											1	91.430.000	100,00	15,81	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN		
		0.00.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	2	19.949.800	2	2.324.696	4.000.000											2	2.324.696	100,00	11,65	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN		
		0.00.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	14	151.400.000	14	17.794.995	32.000.000											14	17.794.995	100,00	11,75	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN		
		0.00.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	%	100	440.745.700	100	67.800.000	82.038.000											50	67.800.000	50,00	15,38	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN		
Rata-rata capaian kinerja (%)							686.548.338.493		59.734.095.301	167.417.014.312												59.734.095.301	799,48	8,70			
Predikat Kinerja																								ST	SR		
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:						1. Intensitas hujan yang stabil mendukung keberhasilan kegiatan penanaman 2. Semakin kuatnya jejaring dan kolaborasi khususnya dalam implementasi Desentralisasi Pengelolaan Sampah di Kabupaten/kota. Semakin banyak stakeholder yang bergabung untuk mendukung kebijakan tersebut, seperti yang terbaru adalah pencaanangan KKN Tematik Pengelolaan Sampah																					
Faktor penghambat pencapaian kinerja:						1. Tindak Lanjut Inpres No.1 Tahun 2025, Sekretaris Daerah mengeluarkan SE Sekda No. B.900.1.12/510/SET tentang Efisiensi Belanja Daerah TA 2025 sehingga beberapa aktivitas harus ditunda/dieffisiensi. Kegiatan Dana Keistimewaan sampai dengan Februari juga tidak dapat dilaksanakan sesuai ROPK Keuangan karena terdapat penundaan sesuai arahan dari Paniradya Pati Kaistimewaan melalui Surat No.S/100.1.5.1./1673/PANI perihal Rasionalisasi Program Kegiatan dan Subkegiatan Dana Keistimewaan TA 2025																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):						1. DLHK DIY melakukan inventarisasi kegiatan dan melakukan efisiensi sesuai dengan instruksi 2. Mengefektifkan anggaran perjalanan dinas untuk kegiatan yang prioritas dan berdampak langsung terhadap ketercapaian target kinerja																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																											

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp		
												K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp											
1	2	3	4	5		6		7		8		9				10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
		0.00.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	440.745.700	1	67.800.000		82.038.000											1	67.800.000	100,00	15,38	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN				
		<b>0.00.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>5.630.445.934</b>	<b>100</b>	<b>321.445.219</b>		<b>1.250.660.500</b>											<b>50</b>	<b>321.445.219</b>	<b>50,00</b>	<b>5,71</b>	<b>DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN</b>				
		0.00.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	303.557.200	1	22.520.115		57.432.000											1	22.520.115	100,00	7,42	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN				
		0.00.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	764.527.900	1	49.212.229		152.527.000											1	49.212.229	100,00	6,44	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN				
		0.00.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	774.004.600	1	36.975.071		174.063.000											1	36.975.071	100,00	4,78	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN				
		0.00.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	511.094.400	1	41.751.476		104.863.000											1	41.751.476	100,00	8,17	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN				
		0.00.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1	58.311.700	1	6.204.000		11.749.500											1	6.204.000	100,00	10,64	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN				
		0.00.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	3.218.950.134	1	164.782.328		750.026.000											1	164.782.328	100,00	5,12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN				
		<b>0.00.01.1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>2.549.876.680</b>				<b>320.106.000</b>															<b>DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN</b>				
		0.00.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	21	1.703.313.580				167.660.000															DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN				
Rata-rata capaian kinerja (%)							686.548.338.493		59.734.095.301		167.417.014.312												59.734.095.301	799,48	8,70					
Predikat Kinerja																														
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:						1. Intensitas hujan yang stabil mendukung keberhasilan kegiatan penanaman 2. Semakin kuatnya jejaring dan kolaborasi khususnya dalam implementasi Desentralisasi Pengelolaan Sampah di Kabupaten/kota. Semakin banyak stakeholder yang bergabung untuk mendukung kebijakan tersebut, seperti yang terbaru adalah pencanangan KKN Tematik Pengelolaan Sampah																								
Faktor penghambat pencapaian kinerja:						1. Tindak Lanjut Inpres No.1 Tahun 2025, Sekretaris Daerah mengeluarkan SE Sekda No. B.900.1.12/510/SET tentang Efisiensi Belanja Daerah TA 2025 sehingga beberapa aktivitas harus ditunda/dieffisiensi. Kegiatan Dana Keistimewaan sampai dengan Februari juga tidak dapat dilaksanakan sesuai ROPK Keuangan karena terdapat penundaan sesuai arahan dari Paniradya Pati Kaistimewaan melalui Surat No.S/100.1.5.1./1673/PANI perihal Rasionalisasi Program Kegiatan dan Subkegiatan Dana Keistimewaan TA 2025																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):						1. DLHK DIY melakukan inventarisasi kegiatan dan melakukan efisiensi sesuai dengan instruksi 2. Mengefektifkan anggaran perjalanan dinas untuk kegiatan yang prioritas dan berdampak langsung terhadap ketercapaian target kinerja																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																														

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13/8x100	15 = 7 + 13	16 = 15 / 6 x 100%	17											
		0.00.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	20	846.563.100			152.446.000														DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN			
		<b>0.00.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>15.491.397.810</b>	<b>100</b>	<b>3.074.500.704</b>	<b>2.837.973.999</b>									<b>50</b>	<b>3.074.500.704</b>	<b>50,00</b>	<b>19,85</b>	<b>DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN</b>				
		0.00.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	32.539.000	1	1.934.000	6.320.000									1	1.934.000	100,00	5,94	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN				
		0.00.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	4.657.779.500	1	831.942.288	818.084.200									1	831.942.288	100,00	17,86	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN				
		0.00.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	10.801.079.310	1	2.240.624.416	2.013.569.799									1	2.240.624.416	100,00	20,74	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN				
		<b>0.00.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>10.136.353.227</b>	<b>100</b>	<b>843.467.588</b>	<b>2.129.579.880</b>									<b>50</b>	<b>843.467.588</b>	<b>50,00</b>	<b>8,32</b>	<b>DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN</b>				
		0.00.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	1	105.152.600	1	14.935.000	21.050.000									1	14.935.000	100,00	14,20	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN				
		0.00.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	259	4.845.939.968	99	354.153.379	1.054.426.680									99	354.153.379	38,22	7,31	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN				
		0.00.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	255	1.722.213.580	156	168.144.910	359.103.200									156	168.144.910	61,18	9,76	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN				
Rata-rata capaian kinerja (%)						686.548.338.493		59.734.095.301	167.417.014.312											59.734.095.301	799,48	8,70					
Predikat Kinerja																						ST	SR				
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:					1. Intensitas hujan yang stabil mendukung keberhasilan kegiatan penanaman 2. Semakin kuatnya jejaring dan kolaborasi khususnya dalam implementasi Desentralisasi Pengelolaan Sampah di Kabupaten/kota. Semakin banyak stakeholder yang bergabung untuk mendukung kebijakan tersebut, seperti yang terbaru adalah pencanangan KKN Tematik Pengelolaan Sampah																						
Faktor penghambat pencapaian kinerja:					1. Tindak Lanjut Inpres No.1 Tahun 2025, Sekretaris Daerah mengeluarkan SE Sekda No. B.900.1.12/510/SET tentang Efisiensi Belanja Daerah TA 2025 sehingga beberapa aktivitas harus ditunda/dieffisiensi. Kegiatan Dana Keistimewaan sampai dengan Februari juga tidak dapat dilaksanakan sesuai ROPK Keuangan karena terdapat penundaan sesuai arahan dari Paniradya Pati Kaistimewaan melalui Surat No.S/100.1.5.1./1673/PANI perihal Rasionalisasi Program Kegiatan dan Subkegiatan Dana Keistimewaan TA 2025																						
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):					1. DLHK DIY melakukan inventarisasi kegiatan dan melakukan efisiensi sesuai dengan instruksi 2. Mengefektifkan anggaran perjalanan dinas untuk kegiatan yang prioritas dan berdampak langsung terhadap ketercapaian target kinerja																						
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																											

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
					K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp				K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13/8x100	15 = 7 + 13	16 = 15 / 6 x 100%	17									
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
		0.00.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4	3.463.047.079	2	306.234.299	695.000.000							2	306.234.299	50,00	8,84	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN				
		0.00.02	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	95,69		95,69									nan	47,845	50,00		DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN				
2	Tercapainya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase penyusunan dokumen perencanaan lingkungan hidup	%	0	867.268.400	80	28.298.725								nan	80	28.298.725	3,26	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN				
		2.11.02.1.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	Terlaksananya penyusunan dokumen dalam rangka penetapan RPPLH	%	100	388.279.700	0									nan				DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN				
		2.11.02.1.01.01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Provinsi	Jumlah muatan Hasil Penyusunan dan penetapan RPPLH Provinsi yang Disusun	Dokumen	0	388.279.700	1		0								1			DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN				
		2.11.02.1.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Provinsi yang Disusun	%	100	478.988.700	0	28.298.725								nan	28.298.725		5,91	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN				
		2.11.02.1.02.01	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Provinsi yang Terintegrasi dengan Perencanaan Darat dan Laut yang Disusun	Dokumen	0	30.261.200			0											DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN				
		2.11.02.1.02.02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Provinsi yang Disusun	Dokumen	1	448.727.500	4	28.298.725	0								4	28.298.725	400,00	6,31	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN			
		2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Jumlah sumber pencemar yang ditangani	%	5	16.570.976.180	2,24	1.062.630.316	2.713.548.200	2,24						2,24	2,24	1.062.630.316	44,80	6,41	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN			
Rata-rata capaian kinerja (%)						686.548.338.493		59.734.095.301	167.417.014.312									59.734.095.301	799,48	8,70					
Predikat Kinerja																	SR	SR			ST	SR			
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:					1. Intensitas hujan yang stabil mendukung keberhasilan kegiatan penanaman 2. Semakin kuatnya jejaring dan kolaborasi khususnya dalam implementasi Desentralisasi Pengelolaan Sampah di Kabupaten/kota. Semakin banyak stakeholder yang bergabung untuk mendukung kebijakan tersebut, seperti yang terbaru adalah pencanangan KKN Tematik Pengelolaan Sampah																				
Faktor penghambat pencapaian kinerja:					1. Tindak Lanjut Inpres No.1 Tahun 2025, Sekretaris Daerah mengeluarkan SE Sekda No. B.900.1.12/510/SET tentang Efisiensi Belanja Daerah TA 2025 sehingga beberapa aktivitas harus ditunda/dieffisiensi. Kegiatan Dana Keistimewaan sampai dengan Februari juga tidak dapat dilaksanakan sesuai ROPK Keuangan karena terdapat penundaan sesuai arahan dari Paniradya Pati Kaistimewan melalui Surat No.S/100.1.5.1./1673/PANI perihal Rasionalisasi Program Kegiatan dan Subkegiatan Dana Keistimewaan TA 2025																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):					1. DLHK DIY melakukan inventarisasi kegiatan dan melakukan efisiensi sesuai dengan instruksi 2. Mengefektifkan anggaran perjalanan dinas untuk kegiatan yang prioritas dan berdampak langsung terhadap ketercapaian target kinerja																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																									

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp		
												K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
					Peningkatan kemampuan pelayanan pengujian kualitas lingkungan	Parameter	24.370		18.313																		DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN			
		2.11.03.1.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Terlaksananya Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	%	100	14.168.068.280	0	1.007.917.116	2.237.304.000															1.007.917.116		7,11	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN		
		2.11.03.1.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Dokumen	4	1.206.718.900	3	219.356.580	261.196.000															3	219.356.580	75,00	18,18	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
		2.11.03.1.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang Dilaksanakan	Dokumen	2	625.529.480	3	189.986.050	133.308.000															3	189.986.050	150,00	30,37	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
		2.11.03.1.01.03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	Dokumen	2	12.335.819.900	2	598.574.486	1.842.800.000															2	598.574.486	100,00	4,85	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
		2.11.03.1.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	%	100	2.402.907.900	50	54.713.200	476.244.200																25	54.713.200	25,00	2,28	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
		2.11.03.1.02.03	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	Titik	50	2.402.907.900	50	54.713.200	476.244.200																50	54.713.200	100,00	2,28	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
		2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase fasilitasi rincian teknis penyimpanan limbah B3 dan persetujuan teknis pengumpulan limbah B3 lintas kab/kota dalam satu provinsi	%	100	345.075.500	100	10.860.000	94.853.000	25															62,5	10.860.000	62,50	3,15	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
		2.11.05.1.01	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin	%	100	345.075.500	0	10.860.000	94.853.000																10.860.000		3,15	DINAS LINGKUNGAN	
Rata-rata capaian kinerja (%)							686.548.338.493		59.734.095.301	167.417.014.312																59.734.095.301	799,48	8,70		
Predikat Kinerja																												ST	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:						1. Intensitas hujan yang stabil mendukung keberhasilan kegiatan penanaman 2. Semakin kuatnya jejaring dan kolaborasi khususnya dalam implementasi Desentralisasi Pengelolaan Sampah di Kabupaten/kota. Semakin banyak stakeholder yang bergabung untuk mendukung kebijakan tersebut, seperti yang terbaru adalah penanaman KKN Tematik Pengelolaan Sampah																								
Faktor penghambat pencapaian kinerja:						1. Tindak Lanjut Inpres No.1 Tahun 2025, Sekretaris Daerah mengeluarkan SE Sekda No. B.900.1.12/510/SET tentang Efisiensi Belanja Daerah TA 2025 sehingga beberapa aktivitas harus ditunda/dieffisiensi. Kegiatan Dana Keistimewaan sampai dengan Februari juga tidak dapat dilaksanakan sesuai ROPK Keuangan karena terdapat penundaan sesuai arahan dari Paniradya Pati Kaistimewan melalui Surat No.S/100.1.5.1./1673/PANI perihal Rasionalisasi Program Kegiatan dan Subkegiatan Dana Keistimewaan TA 2025																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):						1. DLHK DIY melakukan inventarisasi kegiatan dan melakukan efisiensi sesuai dengan instruksi 2. Mengefektifkan anggaran perjalanan dinas untuk kegiatan yang prioritas dan berdampak langsung terhadap ketercapaian target kinerja																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):						1. DLHK DIY melakukan inventarisasi kegiatan dan melakukan efisiensi sesuai dengan instruksi 2. Mengefektifkan anggaran perjalanan dinas untuk kegiatan yang prioritas dan berdampak langsung terhadap ketercapaian target kinerja																								

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13/8x100	15 = 7 + 13	16 = 15 / 6 x 100%	17											
			<b>Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>	<b>Pengumpulan Limbah B3 Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi yang Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik</b>																					<b>HIDUP DAN KEHUTANAN</b>		
		2.11.05.1.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen	1	345.075.500	1	10.860.000	94.853.000									1	10.860.000	100,00	3,15		DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN			
		<b>2.11.06</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)</b>	<b>Persentase terawasinya usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Provinsi</b>	<b>%</b>	<b>85</b>	<b>1.716.902.200</b>	<b>75,68</b>	<b>98.272.785</b>	<b>355.100.000</b>	<b>81,62</b>								<b>78,65</b>	<b>98.272.785</b>	<b>92,53</b>	<b>5,72</b>		<b>DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN</b>			
		<b>2.11.06.1.01</b>	<b>Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi</b>	<b>Terlaksananya pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>1.716.902.200</b>	<b>0</b>	<b>98.272.785</b>	<b>355.100.000</b>										<b>98.272.785</b>		<b>5,72</b>		<b>DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN</b>			
		2.11.06.1.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan operasi yang diberikan	Dokumen	1	578.434.000	1	85.156.785	97.500.000									1	85.156.785	100,00	14,72		DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN			
		2.11.06.1.01.02	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah ASN yang Dilakukan Pelatihan peningkatan Kapasitas PPLHD dan diangkat menjadi Fungsional PPLHD	Orang	154	370.425.700	32	13.116.000	88.000.000									32	13.116.000	20,78	3,54		DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN			
		2.11.06.1.01.03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Laporan dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, surat Kelayakan	Laporan	1	768.042.500			169.600.000														DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN			
Rata-rata capaian kinerja (%)							686.548.338.493		59.734.095.301	167.417.014.312										59.734.095.301	799,48	8,70					
Predikat Kinerja																									SR SR ST SR		
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:					1. Intensitas hujan yang stabil mendukung keberhasilan kegiatan penanaman 2. Semakin kuatnya jejaring dan kolaborasi khususnya dalam implementasi Desentralisasi Pengelolaan Sampah di Kabupaten/kota. Semakin banyak stakeholder yang bergabung untuk mendukung kebijakan tersebut, seperti yang terbaru adalah pencaanangan KKN Tematik Pengelolaan Sampah																						
Faktor penghambat pencapaian kinerja:					1. Tindak Lanjut Inpres No.1 Tahun 2025, Sekretaris Daerah mengeluarkan SE Sekda No. B.900.1.12/510/SET tentang Efisiensi Belanja Daerah TA 2025 sehingga beberapa aktivitas harus ditunda/dieffisiensi. Kegiatan Dana Keistimewaan sampai dengan Februari juga tidak dapat dilaksanakan sesuai ROPK Keuangan karena terdapat penundaan sesuai arahan dari Paniradya Pati Kaistimewaan melalui Surat No.S/100.1.5.1./1673/PANI perihal Rasionalisasi Program Kegiatan dan Subkegiatan Dana Keistimewaan TA 2025																						
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):					1. DLHK DIY melakukan inventarisasi kegiatan dan melakukan efisiensi sesuai dengan instruksi 2. Mengefektifkan anggaran perjalanan dinas untuk kegiatan yang prioritas dan berdampak langsung terhadap ketercapaian target kinerja																						
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):					1. DLHK DIY melakukan inventarisasi kegiatan dan melakukan efisiensi sesuai dengan instruksi 2. Mengefektifkan anggaran perjalanan dinas untuk kegiatan yang prioritas dan berdampak langsung terhadap ketercapaian target kinerja																						

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					6	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		13	14 = 13/8x100	15 = 7 + 13	16 = 15 / 6 x 100%		K	Rp		
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								K	Rp
1	2	3	4	5	6	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	17				
				Operasi oleh Pemerintah Daerah Provinsi																							
		2.11.08	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>	Persentase Jumlah Lembaga/Kelompok Masyarakat/Institusi terkait PPLH yang Meningkatkan Kapasitasnya	%	100	764.964.500	34		130.622.500	34										34		34,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN			
		2.11.08.1.01	<i>Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Masyarakatan Tingkat Daerah Provinsi</i>	<i>Terlaksananya pembinaan kelompok masyarakat</i>	<i>Entitas</i>	250	764.964.500	85		130.622.500											85		34,00	<i>DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN</i>			
		2.11.08.1.01.01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Masyarakatan	Jumlah Lembaga/Kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya terkait PPLH	Lembaga	60	764.964.500	45		130.622.500											45		75,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN			
		2.11.09	<b>PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>	Persentase entitas yang diusulkan mendapatkan penghargaan tingkat nasional	%	100	830.234.300	53,78	99.951.735	140.680.000	53,78										53,78		53,78	99.951.735	53,78	12,04	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
		2.11.09.1.01	<i>Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi</i>	<i>Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi</i>	%	100	830.234.300	0	99.951.735	140.680.000													99.951.735		12,04	<i>DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN</i>	
		2.11.09.1.01.01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	Entitas	25	830.234.300	30	99.951.735	140.680.000												30	99.951.735	120,00	12,04	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
		2.11.10	<b>PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	Persentase jumlah aduan yang selesai dilayani (%)	%	100	431.227.800	100		77.000.000	100											100		100,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN		
		2.11.10.1.01	<i>Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang</i>	<i>Terlaksananya pelayanan aduan kasus lingkungan</i>	%	100	431.227.800			77.000.000																<i>DINAS LINGKUNGAN</i>	
Rata-rata capaian kinerja (%)						686.548.338.493		59.734.095.301		167.417.014.312												59.734.095.301	799,48	8,70			
Predikat Kinerja																											
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:						1. Intensitas hujan yang stabil mendukung keberhasilan kegiatan penanaman 2. Semakin kuatnya jejaring dan kolaborasi khususnya dalam implementasi Desentralisasi Pengelolaan Sampah di Kabupaten/kota. Semakin banyak stakeholder yang bergabung untuk mendukung kebijakan tersebut, seperti yang terbaru adalah pencanangan KKN Tematik Pengelolaan Sampah																					
Faktor penghambat pencapaian kinerja:						1. Tindak Lanjut Inpres No.1 Tahun 2025, Sekretaris Daerah mengeluarkan SE Sekda No. B.900.1.12/510/SET tentang Efisiensi Belanja Daerah TA 2025 sehingga beberapa aktivitas harus ditunda/dieffisiensi. Kegiatan Dana Keistimewaan sampai dengan Februari juga tidak dapat dilaksanakan sesuai ROPK Keuangan karena terdapat penundaan sesuai arahan dari Paniradya Pati Kaistimewan melalui Surat No.S/100.1.5.1./1673/PANI perihal Rasionalisasi Program Kegiatan dan Subkegiatan Dana Keistimewaan TA 2025																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):						1. DLHK DIY melakukan inventarisasi kegiatan dan melakukan efisiensi sesuai dengan instruksi 2. Mengefektifkan anggaran perjalanan dinas untuk kegiatan yang prioritas dan berdampak langsung terhadap ketercapaian target kinerja																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):						1. DLHK DIY melakukan inventarisasi kegiatan dan melakukan efisiensi sesuai dengan instruksi 2. Mengefektifkan anggaran perjalanan dinas untuk kegiatan yang prioritas dan berdampak langsung terhadap ketercapaian target kinerja																					

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13/8x100	15 = 7 + 13	16 = 15 / 6 x 100%	17											
			<i>Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi</i>	<i>hidup</i>																				<b>HIDUP DAN KEHUTANAN</b>			
		2.11.10.1.01.01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi	Jumlah Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi yang Ditindaklanjuti/Ditangani	Dokumen	1	431.227.800			77.000.000														DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN			
		<b>2.11.11</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>	<b>Terlaksananya penanganan sampah di TPA Regional</b>	%	<b>100</b>	<b>246.941.415.292</b>	<b>100</b>	<b>6.808.404.873</b>	<b>40.258.716.882</b>	<b>100</b>							<b>100</b>		<b>100</b>	<b>6.808.404.873</b>	<b>100,00</b>	<b>2,76</b>	<b>DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN</b>			
		<b>2.11.11.1.01</b>	<b>Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional</b>	<b>Terlaksananya penanganan sampah di TPA Regional</b>	%	<b>100</b>	<b>246.941.415.292</b>	<b>100</b>	<b>6.808.404.873</b>	<b>40.258.716.882</b>									<b>50</b>	<b>6.808.404.873</b>	<b>50,00</b>	<b>2,76</b>	<b>DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN</b>				
		2.11.11.1.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional yang Disusun dan Ditetapkan	Dokumen	4	213.502.250			66.901.250														DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN			
		2.11.11.1.01.02	Pemrosesan Akhir di TPA/TPST Regional	Jumlah Sampah dan Residu yang Terproses akhir di TPA/TPST Regional	Ton	600	164.792.947.000	0		27.500.000.000														DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN			
		2.11.11.1.01.03	Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional	Jumlah Fasilitasi TPA/TPST Regional yang Beroperasi dan Terpelihara dengan baik	Unit	13	76.645.243.800	10	6.157.273.042	12.000.000.000									10	6.157.273.042	76,92	8,03	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN				
		2.11.11.1.01.06	Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Jumlah Volume Sampah dari Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional yang Ditetapkan	Ton	600	2.270.236.142	350	82.018.429	491.815.632									350	82.018.429	58,33	3,61	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN				
		2.11.11.1.01.07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan sampah di TPA/TPST Regional yang Tersedia	Unit	15	3.019.486.100	7	569.113.402	200.000.000									7	569.113.402	46,67	18,85	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN				
<b>3</b>	<b>Terwujudnya pengelolaan hutan lestari</b>	<b>1.03.13</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG</b>	<b>Penambahan luas tutupan vegetasi di Satuan Ruang Strategis</b>	<b>ha</b>	<b>0</b>		<b>10</b>										<b>nan</b>	<b>10</b>					<b>DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN</b>			
Rata-rata capaian kinerja (%)						686.548.338.493		59.734.095.301	167.417.014.312											59.734.095.301	799,48	8,70					
Predikat Kinerja																		SR	SR			ST	SR				
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:					1. Intensitas hujan yang stabil mendukung keberhasilan kegiatan penanaman 2. Semakin kuatnya jejaring dan kolaborasi khususnya dalam implementasi Desentralisasi Pengelolaan Sampah di Kabupaten/kota. Semakin banyak stakeholder yang bergabung untuk mendukung kebijakan tersebut, seperti yang terbaru adalah penanaman KKN Tematik Pengelolaan Sampah																						
Faktor penghambat pencapaian kinerja:					1. Tindak Lanjut Inpres No.1 Tahun 2025, Sekretaris Daerah mengeluarkan SE Sekda No. B.900.1.12/510/SET tentang Efisiensi Belanja Daerah TA 2025 sehingga beberapa aktivitas harus ditunda/dieffisiensi. Kegiatan Dana Keistimewaan sampai dengan Februari juga tidak dapat dilaksanakan sesuai ROPK Keuangan karena terdapat penundaan sesuai arahan dari Paniradya Pati Kaistimewaan melalui Surat No.S/100.1.5.1./1673/PANI perihal Rasionalisasi Program Kegiatan dan Subkegiatan Dana Keistimewaan TA 2025																						
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):					1. DLHK DIY melakukan inventarisasi kegiatan dan melakukan efisiensi sesuai dengan instruksi 2. Mengefektifkan anggaran perjalanan dinas untuk kegiatan yang prioritas dan berdampak langsung terhadap ketercapaian target kinerja																						
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																											

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
					K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp				K	Rp		K	Rp	K	Rp		
					9	10	11	12	13	14 = 13/8x100	15 = 7 + 13	16 = 15 / 6 x 100%	17												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13/8x100	15 = 7 + 13	16 = 15 / 6 x 100%	17									
		2.10.11	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN</b>	Persentase capaian tahapan produk hukum kekhurusan pengelolaan hutan Yogyakarta	%	0	1.146.995.000	85	117.354.750	500.000.000	85						85			85	117.354.750		10,23	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
		2.10.11.5.01	<i>Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten</i>	<i>Terlaksananya Pengelolaan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten yang meliputi Aspek Penatausahaan, Aspek Pemeliharaan Dokumen, Aspek Pengawasan</i>	%	100	1.146.995.000	0	117.354.750	500.000.000											117.354.750		10,23	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
		2.10.11.5.01.01	Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Jumlah Dokumen Penatausahaan Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten Dalam Rangka Pengembangan Kebudayaan, Kepentingan Sosial, Dan Kesejahteraan Masyarakat	Dokumen	6	1.146.995.000	1	117.354.750	500.000.000										1	117.354.750	16,67	10,23	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
		2.22.08	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN</b>	Rata-rata persentase penerapan jogja hijau di tingkat kalurahan/ kelurahan dan persentase pengelolaan hutan khusus Yogyakarta	%	30	29.146.705.000	0,57	785.282.968	7.943.200.000	0,57						0,57			0,57	785.282.968	1,90	2,69	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
		2.22.08.5.01	<i>Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman</i>	<i>Jumlah objek sejarah, bahasa, sastra dan museum yang dikelola (objek)</i>	%	1	2.146.500.000	1		600.000.000										0,5			50,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
		2.22.08.5.01.03	Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman	Jumlah Permuseuman yang Dibina dan Dikelola	Unit	1	2.146.500.000	1		600.000.000										1			100,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
		2.22.08.5.06	<b>Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan</b>	<b>Terlaksananya penyediaan sarana dan prasarana keistimewaan urusan kebudayaan</b>	%	100	4.370.000.000			3.970.000.000														DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
		2.22.08.5.06.01	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya	Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya	Unit	15	4.370.000.000			3.970.000.000														DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
Rata-rata capaian kinerja (%)							686.548.338.493		59.734.095.301	167.417.014.312											59.734.095.301	799,48	8,70		
Predikat Kinerja																	SR	SR					ST	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:						1. Intensitas hujan yang stabil mendukung keberhasilan kegiatan penanaman 2. Semakin kuatnya jejaring dan kolaborasi khususnya dalam implementasi Desentralisasi Pengelolaan Sampah di Kabupaten/kota. Semakin banyak stakeholder yang bergabung untuk mendukung kebijakan tersebut, seperti yang terbaru adalah pencanangan KKN Tematik Pengelolaan Sampah																			
Faktor penghambat pencapaian kinerja:						1. Tindak Lanjut Inpres No.1 Tahun 2025, Sekretaris Daerah mengeluarkan SE Sekda No. B.900.1.12/510/SET tentang Efisiensi Belanja Daerah TA 2025 sehingga beberapa aktivitas harus ditunda/diefiensi. Kegiatan Dana Keistimewaan sampai dengan Februari juga tidak dapat dilaksanakan sesuai ROPK Keuangan karena terdapat penundaan sesuai arahan dari Paniradya Pati Kaistimewan melalui Surat No.S/100.1.5.1./1673/PANI perihal Rasionalisasi Program Kegiatan dan Subkegiatan Dana Keistimewaan TA 2025																			
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):						1. DLHK DIY melakukan inventarisasi kegiatan dan melakukan efisiensi sesuai dengan instruksi 2. Mengefektifkan anggaran perjalanan dinas untuk kegiatan yang prioritas dan berdampak langsung terhadap ketercapaian target kinerja																			
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																									

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
						K	Rp		K	Rp	I					II			III		IV			
											K	Rp				K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13/8x100	15 = 7 + 13	16 = 15 / 6 x 100%	17								
		2.22.08.5.08	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	Terlaksananya Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	%	100	2.830.955.000	100	642.876.838	173.200.000									50	642.876.838	50,00	22,71	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
		2.22.08.5.08.02	Pengembangan Atraksi Wisata Budaya	Jumlah Objek Atraksi Wisata Budaya yang Dikembangkan	%	2	0			0													DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
		2.22.08.5.08.06	Pengembangan Wana Wisata Budaya Mataram	Jumlah Objek Wana Wisata Budaya Mataram yang Dikembangkan	Objek	2	2.830.955.000	2	642.876.838	173.200.000									2	642.876.838	100,00	22,71	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
		2.22.08.5.09	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Jumlah kalurahan/keluarahan yang menerapkan Jogja Hijau	Desa/Kelurahan	10	19.799.250.000	4	142.406.130	3.200.000.000									4	142.406.130	40,00	0,72	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
		2.22.08.5.09.09	Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat	Jumlah Laporan Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat	Laporan	1	19.799.250.000	1	142.406.130	3.200.000.000									1	142.406.130	100,00	0,72	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
		3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Nilai Efektivitas Pengelolaan Kawasan Hutan	%	82,375	116.311.129.965	81,025	5.002.386.785	60.766.205.432	81,025								81,025	5.002.386.785	98,36	4,30	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
				Peningkatan nilai produksi pemanfaatan hutan di luar kawasan	%	5		8,32			5								5		6,66		133,20	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
				Persentase usaha perbenihan terdaftar yang telah memiliki izin usaha	%	100		85			85								85		85		85,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
				Persentase lahan kritis yang direhabilitasi	%	100		49,02			50,89								50,89		49,955		49,96	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
		3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada	Terlaksananya perencanaan pengelolaan KPH	Dokumen	6	2.133.442.931	3	184.710.376	253.862.500									3	184.710.376	50,00	8,66	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
Rata-rata capaian kinerja (%)							686.548.338.493		59.734.095.301	167.417.014.312										59.734.095.301	799,48	8,70		
Predikat Kinerja																			SR	SR			ST	SR
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:						1. Intensitas hujan yang stabil mendukung keberhasilan kegiatan penanaman 2. Semakin kuatnya jejaring dan kolaborasi khususnya dalam implementasi Desentralisasi Pengelolaan Sampah di Kabupaten/kota. Semakin banyak stakeholder yang bergabung untuk mendukung kebijakan tersebut, seperti yang terbaru adalah penanaman KKN Tematik Pengelolaan Sampah																		
Faktor penghambat pencapaian kinerja:						1. Tindak Lanjut Inpres No.1 Tahun 2025, Sekretaris Daerah mengeluarkan SE Sekda No. B.900.1.12/510/SET tentang Efisiensi Belanja Daerah TA 2025 sehingga beberapa aktivitas harus ditunda/dieffisiensi. Kegiatan Dana Keistimewaan sampai dengan Februari juga tidak dapat dilaksanakan sesuai ROPK Keuangan karena terdapat penundaan sesuai arahan dari Paniradya Pati Kaistimewaan melalui Surat No.S/100.1.5.1./1673/PANI perihal Rasionalisasi Program Kegiatan dan Subkegiatan Dana Keistimewaan TA 2025																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):						1. DLHK DIY melakukan inventarisasi kegiatan dan melakukan efisiensi sesuai dengan instruksi 2. Mengefektifkan anggaran perjalanan dinas untuk kegiatan yang prioritas dan berdampak langsung terhadap ketercapaian target kinerja																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																								

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp		K	Rp
					9	10	11	12	13	14 = 13/8x100	15 = 7 + 13	16 = 15 / 6 x 100%	17									
			<b>Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)</b>																			
		3.28.03.1.02.01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Dokumen	7	2.133.442.931	1	184.710.376	253.862.500												
		<b>3.28.03.1.03</b>	<b>Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung</b>	<b>Pemanfaatan hutan produksi dan hutan lindung yang menjadi kewenangan</b>	<b>Ha</b>	<b>15,581</b>	<b>91.979.840.651</b>	<b>15.581</b>	<b>3.127.404.449</b>	<b>55.671.569.792</b>												
		3.28.03.1.03.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	Dokumen	1	274.850.800	1	3.105.443.866	65.000.000												
		3.28.03.1.03.06	Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Produksi yang Disahkan	Dokumen	43	335.309.600	36	16.936.903	70.000.000												
		3.28.03.1.03.07	Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Lindung yang Disahkan	Dokumen	8	132.906.700	9	5.023.680	25.000.000												
		3.28.03.1.03.08	Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH	Jumlah Laporan Pemanfaatan hutan di KPH	Laporan	1	80.467.550.426			53.178.319.792												
		3.28.03.1.03.09	Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/ atau Jasa Lingkungan	Laporan	1	10.769.223.125			2.333.250.000												
		<b>3.28.03.1.04</b>	<b>Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara</b>	<b>Terlaksananya Rehabilitasi Hutan dan Lahan</b>	<b>Ha</b>	<b>1.279</b>	<b>10.795.120.276</b>	<b>226</b>	<b>621.897.256</b>	<b>2.500.620.000</b>												
		3.28.03.1.04.01	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	Dokumen	3	952.682.200	1	19.931.306	216.500.000												
Rata-rata capaian kinerja (%)							686.548.338.493		59.734.095.301	167.417.014.312												
Predikat Kinerja																						
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:					1. Intensitas hujan yang stabil mendukung keberhasilan kegiatan penanaman 2. Semakin kuatnya jejaring dan kolaborasi khususnya dalam implementasi Desentralisasi Pengelolaan Sampah di Kabupaten/kota. Semakin banyak stakeholder yang bergabung untuk mendukung kebijakan tersebut, seperti yang terbaru adalah penancangan KKN Tematik Pengelolaan Sampah																	
Faktor penghambat pencapaian kinerja:					1. Tindak Lanjut Inpres No.1 Tahun 2025, Sekretaris Daerah mengeluarkan SE Sekda No. B.900.1.12/510/SET tentang Efisiensi Belanja Daerah TA 2025 sehingga beberapa aktivitas harus ditunda/diefisiensi. Kegiatan Dana Keistimewaan sampai dengan Februari juga tidak dapat dilaksanakan sesuai ROPK Keuangan karena terdapat penundaan sesuai arahan dari Paniradya Pati Kaistimewaan melalui Surat No.S/100.1.5.1./1673/PANI perihal Rasionalisasi Program Kegiatan dan Subkegiatan Dana Keistimewaan TA 2025																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):					1. DLHK DIY melakukan inventarisasi kegiatan dan melakukan efisiensi sesuai dengan instruksi 2. Mengefektifkan anggaran perjalanan dinas untuk kegiatan yang prioritas dan berdampak langsung terhadap ketercapaian target kinerja																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):					Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara																	

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab												
						K	Rp	K	Rp		K	Rp	I				II		III		IV			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
													K	Rp			K	Rp	K	Rp	K	Rp													
1	2	3	4	5		6		7		8		9				10				11		12		13		14 = 13/8x100				15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Fasilitasi Forum DAS	dokumen	0		1																									DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
					Dokumen RTnRL 2025	dokumen	0		1																									DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
		3.28.03.1.04.02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	Ha	250	2.368.195.200	200	102.680.000	524.070.000																	200	102.680.000	80,00	4,34			DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN		
				Pembangunan KPR	Unit	0																												DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
		3.28.03.1.04.04	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	Ha	125	2.498.394.000	6	421.945.750	580.000.000																	6	421.945.750	4,80	16,89			DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN		
		3.28.03.1.04.05	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	Jumlah Bangunan Sipil Teknis yang Terbangun	Unit	7	688.000.000	5	77.340.200	158.000.000																	5	77.340.200	71,43	11,24			DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN		
		3.28.03.1.04.06	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	Jumlah Bibit Tanaman Yang Bersertifikat	Batang	400.000	3.095.432.326			735.050.000																								DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
		3.28.03.1.04.09	Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan	Luas Area Mangrove Di Luar Kawasan Hutan yang Direhabilitasi	Ha	4	1.192.416.550			287.000.000																								DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
		<b>3.28.03.1.05</b>	<b>Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi</b>	<b>Terlaksananya perlindungan hutan di hutan lindung dan hutan produksi</b>	<b>%</b>	<b>97</b>	<b>9.736.775.818</b>	<b>92,42</b>	<b>794.689.906</b>	<b>1.971.887.550</b>																	<b>46,21</b>	<b>794.689.906</b>	<b>47,64</b>	<b>8,16</b>			<b>DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN</b>		
		3.28.03.1.05.01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Luas Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	Ha	15.581	7.262.217.818	15.581	445.988.930	1.426.887.550																	15.581	445.988.930	100,00	6,14			DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN		
Rata-rata capaian kinerja (%)							686.548.338.493		59.734.095.301	167.417.014.312																		59.734.095.301	799,48	8,70					
Predikat Kinerja																																			
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:						1. Intensitas hujan yang stabil mendukung keberhasilan kegiatan penanaman 2. Semakin kuatnya jejaring dan kolaborasi khususnya dalam implementasi Desentralisasi Pengelolaan Sampah di Kabupaten/kota. Semakin banyak stakeholder yang bergabung untuk mendukung kebijakan tersebut, seperti yang terbaru adalah pencanangan KKN Tematik Pengelolaan Sampah																													
Faktor penghambat pencapaian kinerja:						1. Tindak Lanjut Inpres No.1 Tahun 2025, Sekretaris Daerah mengeluarkan SE Sekda No. B.900.1.12/510/SET tentang Efisiensi Belanja Daerah TA 2025 sehingga beberapa aktivitas harus ditunda/dieffisiensi. Kegiatan Dana Keistimewaan sampai dengan Februari juga tidak dapat dilaksanakan sesuai ROPK Keuangan karena terdapat penundaan sesuai arahan dari Paniradya Pati Kaistimewaan melalui Surat No.S/100.1.5.1./1673/PANI perihal Rasionalisasi Program Kegiatan dan Subkegiatan Dana Keistimewaan TA 2025																													
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):						1. DLHK DIY melakukan inventarisasi kegiatan dan melakukan efisiensi sesuai dengan instruksi 2. Mengefektifkan anggaran perjalanan dinas untuk kegiatan yang prioritas dan berdampak langsung terhadap ketercapaian target kinerja																													
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):						1. DLHK DIY melakukan inventarisasi kegiatan dan melakukan efisiensi sesuai dengan instruksi 2. Mengefektifkan anggaran perjalanan dinas untuk kegiatan yang prioritas dan berdampak langsung terhadap ketercapaian target kinerja																													

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13/8x100	15 = 7 + 13	16 = 15 / 6 x 100%	17											
		3.28.03.1.05.02	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	Ha	15.581	2.274.769.200	15.581	331.728.076	510.000.000										15.581	331.728.076	100,00	14,58	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN			
		3.28.03.1.05.05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	Laporan	1	199.788.800	1	16.972.900	35.000.000										1	16.972.900	100,00	8,50	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN			
		<b>3.28.03.1.07</b>	<b>Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi &lt;6000 m3/Tahun</b>	<b>Terlaksananya Pendampingan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi</b>	<b>Unit Managemen</b>	<b>28</b>	<b>1.092.007.286</b>	<b>28</b>	<b>74.849.442</b>	<b>244.260.000</b>										<b>28</b>	<b>74.849.442</b>	<b>100,00</b>	<b>6,85</b>	<b>DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN</b>			
		3.28.03.1.07.01	Rencana Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah Unit Managemen yang Melaksanakan Tertib Pelaporan RKOPHH untuk Pemegang PBPHH (Kayu dan HHBK) Skala Usaha Kecil dan Menengah	Unit Managemen	28	290.000.000	18	44.584.794	70.000.000										18	44.584.794	64,29	15,37	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN			
		3.28.03.1.07.02	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi	Dokumen	1	802.007.286	1	30.264.648	174.260.000										1	30.264.648	100,00	3,77	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN			
		<b>3.28.03.1.09</b>	<b>Perbenihan Tanaman Hutan</b>	<b>Terlaksananya fasilitasi sertifikasi Peredaran Benih dan/atau Bibit</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>573.943.003</b>	<b>100</b>	<b>198.835.356</b>	<b>124.005.590</b>										<b>50</b>	<b>198.835.356</b>	<b>50,00</b>	<b>34,64</b>	<b>DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN</b>			
		3.28.03.1.09.02	Sertifikasi Sumber Benih	Jumlah Sertifikat Sumber Benih yang Diterbitkan	Sertifikat	1	113.097.700	1	17.532.270	22.740.000										1	17.532.270	100,00	15,50	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN			
		3.28.03.1.09.03	Sertifikasi Mutu Benih	Jumlah Sertifikat Mutu Benih yang Diterbitkan	Sertifikat	1	62.653.800	1	9.089.638	12.680.000										1	9.089.638	100,00	14,51	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN			
		3.28.03.1.09.04	Sertifikasi Mutu Bibit	Jumlah Sertifikat Mutu Bibit yang Diterbitkan	Sertifikat	1	74.268.400	1	11.993.742	14.750.000										1	11.993.742	100,00	16,15	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN			
Rata-rata capaian kinerja (%)							686.548.338.493		59.734.095.301	167.417.014.312											59.734.095.301	799,48	8,70				
Predikat Kinerja																							ST	SR			
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:						1. Intensitas hujan yang stabil mendukung keberhasilan kegiatan penanaman 2. Semakin kuatnya jejaring dan kolaborasi khususnya dalam implementasi Desentralisasi Pengelolaan Sampah di Kabupaten/kota. Semakin banyak stakeholder yang bergabung untuk mendukung kebijakan tersebut, seperti yang terbaru adalah pencaangan KKN Tematik Pengelolaan Sampah																					
Faktor penghambat pencapaian kinerja:						1. Tindak Lanjut Inpres No.1 Tahun 2025, Sekretaris Daerah mengeluarkan SE Sekda No. B.900.1.12/510/SET tentang Efisiensi Belanja Daerah TA 2025 sehingga beberapa aktivitas harus ditunda/dieffisiensi. Kegiatan Dana Keistimewaan sampai dengan Februari juga tidak dapat dilaksanakan sesuai ROPK Keuangan karena terdapat penundaan sesuai arahan dari Paniradya Pati Kaistimewaan melalui Surat No.S/100.1.5.1./1673/PANI perihal Rasionalisasi Program Kegiatan dan Subkegiatan Dana Keistimewaan TA 2025																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):						1. DLHK DIY melakukan inventarisasi kegiatan dan melakukan efisiensi sesuai dengan instruksi 2. Mengefektifkan anggaran perjalanan dinas untuk kegiatan yang prioritas dan berdampak langsung terhadap ketercapaian target kinerja																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																											

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5	6	Rp	7	Rp	8	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	17				
		3.28.03.1.09.05	Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit	Jumlah Data (Asal Usul, Jenis Mutu) Benih Atau Bibit yang Beredar	Laporan	1	80.485.800	1	15.898.989	20.500.000											1	15.898.989	100,00	19,75	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN		
		3.28.03.1.09.06	Pembangunan Sumber Benih	Luas Sumber Benih yang Dibangun	Ha	5	243.437.303	5	144.320.717	53.335.590											5	144.320.717	100,00	59,28	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN		
		<b>3.28.04</b>	<b>PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA</b>	<b>Nilai efektivitas pengelolaan kawasan konservasi</b>	<b>Indeks</b>	<b>69</b>	<b>5.741.450.400</b>	<b>66</b>	<b>148.794.553</b>	<b>1.344.100.000</b>	<b>66</b>										<b>132</b>	<b>148.794.553</b>	<b>191,30</b>	<b>2,59</b>	<b>DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN</b>		
		<b>3.28.04.1.01</b>	<b>Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi</b>	<b>Luas hutan konservasi yang dikelola</b>	<b>Ha</b>	<b>634,1</b>	<b>3.390.420.900</b>	<b>634,1</b>	<b>119.292.753</b>	<b>812.100.000</b>											<b>634,1</b>	<b>119.292.753</b>	<b>100,00</b>	<b>3,52</b>	<b>DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN</b>		
		3.28.04.1.01.01	Pencegahan, Penanggulangan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan TAHURA	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanggulangan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan TAHURA	Laporan	1	979.928.000			172.600.000															DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN		
		3.28.04.1.01.03	Pengawetan Tumbuhan, Satwa, serta Habitat TAHURA Provinsi	Luas Kawasan Tahura yang Diinventarisasi dan Diverifikasi Dengan Nilai Kehati Tinggi	Ha	6	1.509.696.100	6	105.109.385	359.000.000											6	105.109.385	100,00	6,96	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN		
		3.28.04.1.01.08	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA Provinsi	Jumlah Desa yang Diberdayakan Melalui Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif	Desa	4	900.796.800	5	14.183.368	280.500.000											5	14.183.368	125,00	1,57	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN		
		<b>3.28.04.1.03</b>	<b>Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam</b>	<b>Terlaksananya Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam yang dikelola</b>	<b>Kawasan</b>	<b>3</b>	<b>2.351.029.500</b>	<b>3</b>	<b>29.501.800</b>	<b>532.000.000</b>											<b>3</b>	<b>29.501.800</b>	<b>100,00</b>	<b>1,25</b>	<b>DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN</b>		
		3.28.04.1.03.03	Perencanaan Pemanfaatan Ekosistem Lahan Basah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pemanfaatan Lahan Basah	Dokumen	3	794.725.700	1	29.501.800	170.000.000											1	29.501.800	33,33	3,71	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN		
		3.28.04.1.03.06	Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem	Luas Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem	Ha	10	1.556.303.800			362.000.000															DINAS LINGKUNGAN		
Rata-rata capaian kinerja (%)							686.548.338.493		59.734.095.301	167.417.014.312												59.734.095.301	799,48	8,70			
Predikat Kinerja																											
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:						1. Intensitas hujan yang stabil mendukung keberhasilan kegiatan penanaman 2. Semakin kuatnya jejaring dan kolaborasi khususnya dalam implementasi Desentralisasi Pengelolaan Sampah di Kabupaten/kota. Semakin banyak stakeholder yang bergabung untuk mendukung kebijakan tersebut, seperti yang terbaru adalah penanaman KKN Tematik Pengelolaan Sampah																					
Faktor penghambat pencapaian kinerja:						1. Tindak Lanjut Inpres No.1 Tahun 2025, Sekretaris Daerah mengeluarkan SE Sekda No. B.900.1.12/510/SET tentang Efisiensi Belanja Daerah TA 2025 sehingga beberapa aktivitas harus ditunda/diefisiensi. Kegiatan Dana Keistimewaan sampai dengan Februari juga tidak dapat dilaksanakan sesuai ROPK Keuangan karena terdapat penundaan sesuai arahan dari Paniradya Pati Kaistimewaan melalui Surat No.S/100.1.5.1./1673/PANI perihal Rasionalisasi Program Kegiatan dan Subkegiatan Dana Keistimewaan TA 2025																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):						1. DLHK DIY melakukan inventarisasi kegiatan dan melakukan efisiensi sesuai dengan instruksi 2. Mengefektifkan anggaran perjalanan dinas untuk kegiatan yang prioritas dan berdampak langsung terhadap ketercapaian target kinerja																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																											

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13/8x100	15 = 7 + 13	16 = 15 / 6 x 100%	17											
			Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Penting yang Dikelola																					HIDUP DAN KEHUTANAN		
		3.28.05	<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN</b>	Persentase kelompok tani hutan yang meningkat kapasitasnya (%)	%	23	2.110.767.000	20,58	495.123.526	468.799.100	20,58										20,58	20,58	495.123.526	89,48	23,46	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
		3.28.05.1.01	<b>Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan</b>	<b>Terlaksananya peningkatan kapasitas kelompok tani hutan dan masyarakat</b>	<b>Kelompok</b>	25	2.110.767.000	10	495.123.526	468.799.100											10	495.123.526	40,00	23,46	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN		
		3.28.05.1.01.01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	Orang	57	1.135.193.400	40	44.616.852	260.469.700											40	44.616.852	70,18	3,93	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN		
		3.28.05.1.01.02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	Kelompok	45	975.573.600	10	450.506.674	208.329.400											10	450.506.674	22,22	46,18	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN		
Rata-rata capaian kinerja (%)						686.548.338.493		59.734.095.301	167.417.014.312													59.734.095.301	799,48	8,70			
Predikat Kinerja																		SR	SR					ST	SR		
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:					1. Intensitas hujan yang stabil mendukung keberhasilan kegiatan penanaman 2. Semakin kuatnya jejaring dan kolaborasi khususnya dalam implementasi Desentralisasi Pengelolaan Sampah di Kabupaten/kota. Semakin banyak stakeholder yang bergabung untuk mendukung kebijakan tersebut, seperti yang terbaru adalah pencanangan KKN Tematik Pengelolaan Sampah																						
Faktor penghambat pencapaian kinerja:					1. Tindak Lanjut Inpres No.1 Tahun 2025, Sekretaris Daerah mengeluarkan SE Sekda No. B.900.1.12/510/SET tentang Efisiensi Belanja Daerah TA 2025 sehingga beberapa aktivitas harus ditunda/dieffisiensi. Kegiatan Dana Keistimewaan sampai dengan Februari juga tidak dapat dilaksanakan sesuai ROPK Keuangan karena terdapat penundaan sesuai arahan dari Paniradya Pati Kaistimewaan melalui Surat No.S/100.1.5.1./1673/PANI perihal Rasionalisasi Program Kegiatan dan Subkegiatan Dana Keistimewaan TA 2025																						
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):					1. DLHK DIY melakukan inventarisasi kegiatan dan melakukan efisiensi sesuai dengan instruksi 2. Mengefektifkan anggaran perjalanan dinas untuk kegiatan yang prioritas dan berdampak langsung terhadap ketercapaian target kinerja																						
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																											

Disusun  
Yogyakarta, 2 Mei 2025  
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Dievaluasi  
Yogyakarta, 2 Mei 2025  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah

KUSNO WIBOWO, S.T., M.Si.  
NIP. 197203281998031004

NI MADE DWIPANTI INDRAYANTI, S.T., M.T.  
NIP. 197010181998032007

**EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUNGAN PROVINSI  
RENJA PERANGKAT DAERAH DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERIODE PELAKSANAAN : 2025**

Indikator dan target kinerja SKPD yang mengacu pada sasaran RKPD:	Target	Realisasi
1 Persentase warga negara yang menempati hunian dengan akses air minum layak	96.32	96.41
2 Persentase rumah tangga yang menempati tempat tinggal layak huni	95.98	95.97
3 Persentase rumah tangga berakses listrik	99.99	99.99
4 Persentase pengusaha kawasan peruntukan pertambangan sesuai dengan pola ruang	9.28	9.23
5 Pengendalian Rerata Penurunan Muka Air Tanah	20	20
6 Persentase warga negara yang menempati hunian dengan akses sanitasi layak	97.41	98.11
7 Persentase penyediaan infrastruktur sumber daya air	90.63	101.56
8 Persentase Pembangunan Jaringan Jalan	98.77	99.292
9 Peningkatan persentase pembinaan kinerja jasa konstruksi	90.72	90.2
10 Kategori Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	95.89	95.88

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
					6		7		8		9		10	11	12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13			16 = 15 / 6 x 100%		17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K
1	Penduduk Berakses Air Minum	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Presentase jumlah warga negara yang terlayani air curah regional	%	23,85	155.044.288.230	40,45		58.471.399.424	48,74						48,74			44,595		186,98		DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL		
		1.03.03.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Presentase jumlah rumah tangga yang terlayani air curah regional	%	23,85	155.044.288.230	22,42		58.471.399.424										11,21		47,00		DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL		
				Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	%	100																		DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL		
		1.03.03.1.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM	dokumen	1	200.000.000			0														DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL		
		1.03.03.1.01.03	Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan	Kapasitas Pembangunan SPAM Regional	l/det	475	27.200.000.000			25.300.000.000														DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL		
Rata-rata capaian kinerja (%)							4.748.810.585.848		381.054.036.746	1.101.336.094.958		27.182.938					27.182.938	0,00		381.081.219.684	50,82	8,02				
Predikat Kinerja																	SR	SR				R	SR			
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																										
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																										
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																										
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																										

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6		7		8	9		10	11	12	13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17		
		1.03.03.1.01.05	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Perluasan SPAM Regional	SR	24.972	18.475.000.000			6.400.000.000														DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	
		1.03.03.1.01.07	Fasilitasi Kerja Sama Pengelolaan SPAM Regional Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan fasilitasi kerjasama penyelenggaraan SPAM	Kab/Kota	3	100.000.000			0														DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	
		1.03.03.1.01.09	Operasi dan Pemeliharaan SPAM Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah unit SPAM yang beroperasi dan terpelihara	unit	1	109.039.288.230			26.771.399.424														DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	
		1.03.03.1.01.10	Survei dan Investigasi untuk Pengembangan SPAM Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pengembangan SPAM Lintas Kabupaten/Kota	Dokumen	1	30.000.000			0														DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	
		1.03.03.1.01.11	Penyediaan Lahan untuk Pengembangan SPAM Lintas Kabupaten/Kota	Luas Lahan yang Disediakan untuk Pengembangan SPAM Lintas Kabupaten/Kota	Ha	2,54	0			0														DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	
				Persentase warga negara yang menempati hunian dengan akses sanitasi layak	%	98,05																		DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	
		<b>1.03.04</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL</b>	<b>Presentase terbangunnya sarana prasarana pendukung pengelolaan sampah di TPA Piyungan</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>289.002.000.000</b>	<b>64,6</b>	<b>66.050.000.000</b>											<b>32,3</b>		<b>32,30</b>		<b>DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL</b>	
		<b>1.03.04.1.01</b>	<b>Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional</b>	<b>Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>289.002.000.000</b>	<b>100</b>	<b>66.050.000.000</b>											<b>50</b>		<b>50,00</b>		<b>DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER</b>	
Rata-rata capaian kinerja (%)							4.748.810.585.848		381.054.036.746	1.101.336.094.958						27.182.938			27.182.938	0,00		381.081.219.684	50,82	8,02	
Predikat Kinerja																			SR	SR			R	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																									
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																									

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						K	Rp	K	Rp		K	Rp	I		II		III		IV			13		14 = 13/8x100			15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%
1	2	3	4	5		6		7		8	9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
																												<b>DAYA MINERAL</b>	
		1.03.04.1.01.03	Pembangunan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi	Jumlah Rumah Tangga yang terlayani oleh TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi	Rumah Tangga	183.795	247.960.000.000			60.000.000.000																		DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	
		1.03.04.1.01.04	Rehabilitasi TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi	Jumlah TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi yang Dilakukan Optimalisasi	unit	1	39.825.000.000			5.000.000.000																		DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	
		1.03.04.1.01.06	Penyediaan Sarana Dan Prasarana Persampahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Persampahan yang Disediakan	Unit	1	1.217.000.000			1.050.000.000																		DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	
2	Rumah Tangga yang menempati hunian layak	1.04.02	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</b>	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana	%	100	187.210.500.000	100	334.844.388	61.402.500.000														50	334.844.388	50,00	0,18	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	
				Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah	%	100		100																50		50,00		DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	
		1.04.02.1.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Persentase rumah korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	%	100	7.800.000.000	100		2.150.000.000														50		50,00		DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	
				Data Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	dokumen	8																						DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	
Rata-rata capaian kinerja (%)							4.748.810.585.848		381.054.036.746	1.101.336.094.958										27.182.938				27.182.938	0,00	381.081.219.684	50,82	8,02	
Predikat Kinerja																													
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																													
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																													
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																													
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																													

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6		7		8	9		10	11	12	13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17		
		1.04.02.1.01.01	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi	dokumen	13	3.000.000.000	1		600.000.000										1		7,69		DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	
		1.04.02.1.01.02	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Data Lahan yang Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	dokumen	3	950.000.000			350.000.000														DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	
		1.04.02.1.01.03	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	dokumen	5	750.000.000			0														DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	
		1.04.02.1.01.05	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Provinsi	Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana atau yang Terkena Relokasi Program Provinsi yang Terverifikasi	dokumen	5	1.900.000.000	1		900.000.000										1		20,00		DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	
		1.04.02.1.01.06	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	dokumen	4	1.200.000.000			300.000.000														DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	
		<b>1.04.02.1.03</b>	<b>Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi</b>	<b>Pelaksanaan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi</b>	<b>unit</b>	<b>51</b>	<b>179.410.500.000</b>	<b>6</b>	<b>334.844.388</b>	<b>59.252.500.000</b>									<b>6</b>	<b>334.844.388</b>	<b>11,76</b>	<b>0,19</b>	<b>DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL</b>		
				<b>Pelaksanaan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi</b>	<b>unit</b>	<b>20</b>		<b>3</b>											<b>3</b>		<b>15,00</b>		<b>DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL</b>		
		1.04.02.1.03.01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Provinsi yang Terehabilitasi	unit	20	1.000.000.000			250.000.000														DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI	
Rata-rata capaian kinerja (%)							4.748.810.585.848	381.054.036.746	1.101.336.094.958	27.182.938						27.182.938	0,00		381.081.219.684	50,82	8,02				
Predikat Kinerja																SR	SR				R	SR			
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																									
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																									

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						K	Rp	K	Rp		K	Rp	I		II		III		IV			K		Rp			K	Rp
1	2	3	4	5		6		7		8	9		10	11	12	13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17				
																									SUMBER DAYA MINERAL			
		1.04.02.1.03.04	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Provinsi yang Terbangun	unit	25	3.660.500.000	3	334.844.388	752.500.000											3	334.844.388	12,00	9,15	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL			
		1.04.02.1.03.05	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau yang Terkena Relokasi Program Provinsi yang Terbangun	unit	6	174.750.000.000			58.250.000.000															DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL			
		1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Penanganan RTLH	%	0	140.135.000.000	13,36	16.187.193.467	26.600.000.000	13,36										13,36	16.187.193.467		11,55	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL			
				Cakupan penanganan kawasan kumuh	Ha	0																			DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL			
		1.04.03.1.01	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Tertaksananya Penyusunan Review/Legalisasi Kebijakan	dokumen	2	1.415.000.000			100.000.000															DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL			
				Tertaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	laporan	5		0																	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL			
				Laporan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	dokumen	1																			DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL			
Rata-rata capaian kinerja (%)							4.748.810.585.848		381.054.036.746	1.101.336.094.958											27.182.938	0,00		381.081.219.684	50,82	8,02		
Predikat Kinerja																						SR	SR			R	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																												
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*:																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*:																												

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						K	Rp	K	Rp		K	Rp	I		II		III		IV			13		14 = 13/8x100			15 = 7 + 13	
1	2	3	4	5		6		7		8	9		10		11	12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17		
		1.04.03.1.01.08	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/ Terlegalisasi	dokumen	2	700.000.000			0																DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL		
		1.04.03.1.01.09	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	laporan	5	715.000.000		1	100.000.000													1		20,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL		
		1.04.03.1.02	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Tertaksananya Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan ) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Dokumen	2	138.720.000.000		1	16.187.193.467													1	16.187.193.467	50,00	11,67	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	
				Tertaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	unit	4.794			747														747		15,58	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL		
				Luasan kawasan kumuh kewenangan Pemda DIY yang tertangani	Ha	0																				DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL		
				Peningkatan dan pembangunan Rumah swadaya menuju rumah layak huni	%	58,28																				DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL		
		1.04.03.1.02.01	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan ) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Rencana Tapak (Site Plan ) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	dokumen	2	500.000.000			0																DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL		
Rata-rata capaian kinerja (%)							4.748.810.585.848		381.054.036.746	1.101.336.094.958										27.182.938				27.182.938	0,00	381.081.219.684	50,82	8,02
Predikat Kinerja																										R	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																												
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																												

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
											I		II		III		IV													
											9	10	11	12	13	14 = 13/8x100	15 = 7 + 13										16 = 15 / 6 x 100%		17	
K		Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
		1.04.03.1.02.03	Perbaiki Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diperbaiki	unit	5.243	127.720.000.000	747	16.187.193.467	23.000.000.000																DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL				
		1.04.03.1.02.07	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Luas Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diremajakan/Dipugar	Ha	15	10.500.000.000			3.500.000.000																DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL				
		<b>1.04.05</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)</b>	<b>Penanganan PSU layak di permukiman</b>	<b>lokasi</b>	<b>178</b>	<b>428.732.050.000</b>	<b>550</b>	<b>69.512.670.598</b>	<b>55.605.000.000</b>													<b>550</b>	<b>69.512.670.598</b>	<b>308,99</b>	<b>16,21</b>	<b>DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL</b>			
		<b>1.04.05.1.01</b>	<b>Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman</b>	<b>Penyediaan PSU layak di permukiman</b>	<b>lokasi</b>	<b>2.346</b>	<b>428.732.050.000</b>	<b>178</b>	<b>69.512.670.598</b>	<b>55.605.000.000</b>														<b>178</b>	<b>69.512.670.598</b>	<b>7,59</b>	<b>16,21</b>	<b>DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL</b>		
				<b>Jumlah Lokasi PSU Layak di Permukiman</b>	<b>lokasi</b>	<b>160</b>																					<b>DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL</b>			
		1.04.05.1.01.01	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	dokumen	6	3.302.050.000	2	181.185.604	605.000.000														2	181.185.604	33,33	5,49	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL		
		1.04.05.1.01.02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Permukiman	lokasi	2.346	425.430.000.000	549	69.331.484.994	55.000.000.000														549	69.331.484.994	23,40	16,30	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL		
		<b>2.22.08</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN</b>	<b>Penanganan RTLH dengan gaya arsitektur tradisional jawa dan sarana prasarana pendukung PKP</b>	<b>unit</b>	<b>300</b>	<b>249.454.110.000</b>	<b>377</b>	<b>18.926.386.019</b>	<b>45.705.000.000</b>														<b>377</b>	<b>18.926.386.019</b>	<b>125,67</b>	<b>7,59</b>	<b>DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN</b>		
Rata-rata capaian kinerja (%)							4.748.810.585.848		381.054.036.746	1.101.336.094.958								27.182.938						27.182.938	0,00		381.081.219.684	50,82	8,02	
Predikat Kinerja																														
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																														
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																														
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																														
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																														

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	I	II	III	IV	K	Rp		K	Rp	K	Rp		K
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13/8x100	15 = 7 + 13	16 = 15 / 6 x 100%	17										
			<b>YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN</b>																				<b>DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL</b>			
				Meningkatnya saluran irigasi tersier dalam kondisi baik	%	90,8		87,69					87,69					87,69					87,69	96,57		DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
		2.22.08.5.06	Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Terlaksananya penanganan RTLH dengan gaya arsitektur tradisional jawa dan sarana prasarana pendukung PKP yang terbangun	unit	2.193	179.912.560.000	326	8.945.719.410	31.570.000.000								326	8.945.719.410	14,87	4,97		DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL			
		2.22.08.5.06.01	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya	Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya	unit	2.193	179.912.560.000	326	8.945.719.410	31.570.000.000								326	8.945.719.410	14,87	4,97		DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL			
		2.22.08.5.08	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	Persentase Kumulatif Penambahan Saluran Irigasi Tersier yang ditingkatkan dibanding dengan jumlah panjang saluran irigasi yang di tingkatkan sampai di 2027	%	100	69.541.550.000	59,15	9.980.666.609	14.135.000.000								29,575	9.980.666.609	29,58	14,35		DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL			
				Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	laporan	1																	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL			
		2.22.08.5.08.01	Pengembangan Lumbung Mataraman	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan Lumbung Mataraman	laporan	24	66.757.250.000	3	9.980.666.609	13.475.000.000								3	9.980.666.609	12,50	14,95		DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL			
		2.22.08.5.08.07	Pengembangan Sistem Pertanian Tradisional	Jumlah Dokumen Pengembangan Sistem Pertanian Tradisional	dokumen	6	2.784.300.000	3		660.000.000								3				50,00		DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI		
Rata-rata capaian kinerja (%)							4.748.810.585.848		381.054.036.746	1.101.336.094.958							27.182.938		27.182.938		0,00		381.081.219.684	50,82	8,02	
Predikat Kinerja																		SR	SR				R	SR		
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																										
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																										
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																										
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																										

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K	Rp	K	Rp		K	Rp	I		II		III		IV			K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13/8x100	15 = 7 + 13	16 = 15 / 6 x 100%	17									
																									SUMBER DAYA MINERAL
3	Rumah Tangga Berakses Listrik	3.29.05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	Capaian Pengembangan Potensi Energi Baru Terbarukan	TOE	58.030	9.745.785.000	65.253,42	238.000.715	2.139.500.000	4.867.883						4.867.883	0,23	65.253,42	242.868.598	112,45	2,49	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL		
		3.29.05.1.07	Pengelolaan Aneka Energi Baru Terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi	Penambahan Capaian Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan	unit	5	9.745.785.000	1	238.000.715	2.139.500.000	4.867.883						4.867.883	0,23	1	242.868.598	20,00	2,49	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL		
				Tertaksananya Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsisi	laporan	1																		DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	
				Jumlah penambahan capaian pemanfaatan energi baru terbarukan	TOE	1.000																		DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	
				Bertambahnya jumlah pembangkit Energi Baru Terbarukan yang berfungsi dengan baik	%	21,8																		DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	
		3.29.05.1.04.07	Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	Laporan	6	884.805.000	1		181.500.000									1			16,67		DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	
		3.29.05.1.07.0007	Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT	Pengembangan potensi Energi Terbarukan dan konservasi energi	Unit	2.434	8.860.980.000	1	238.000.715	1.958.000.000	4.867.883						4.867.883	0,25	1	242.868.598	0,04	2,74	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL		
Rata-rata capaian kinerja (%)							4.748.810.585.848		381.054.036.746	1.101.336.094.958	27.182.938						27.182.938	0,00		381.081.219.684	50,82	8,02			
Predikat Kinerja																	SR	SR					R	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																									
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*:																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*:																									

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7		8	9		10	11	12	13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17		
		3.29.06	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Peningkatan jumlah izin sesuai keselamatan ketenagalistrikan	izin	150	11.544.055.950	105	571.240.397	2.537.896.450	25						25			130	571.240.397	86,67	4,95	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL		
				Peningkatan jumlah rumah tangga miskin yang menikmati listrik sesuai keselamatan ketenagalistrikan	Rumah Tangga	16.423		18.611			18.615						18.615			37.226		226,67		DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL		
		3.29.06.1.02	Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Dokumen rekomendasi teknis izin ketenagalistrikan yang diterbitkan	dokumen	15	3.640.618.450	6	338.988.113	742.896.450									6	338.988.113	40,00	9,31	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL			
				Terlaksananya Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	izin	150		105											105		70,00		DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL			
				Peningkatan pelaksanaan usaha ketenagalistrikan yang sesuai ketentuan	%	37,73																		DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL		
		3.29.06.1.02.0001	Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah prosedur dan persyaratan izin operasi yang fasilitas instalasinya dalam daerah provinsi yang ditetapkan	Dokumen	15	673.811.700	3	250.605.234	65.000.000									3	250.605.234	20,00	37,19	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL			
		3.29.06.1.02.03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Laporan	16	2.966.806.750	3	88.382.879	677.896.450									3	88.382.879	18,75	2,98	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL			
		3.29.06.1.06	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak	Penambahan jumlah rumah tangga miskin yang	unit	600	7.903.437.500	143	232.252.284	1.795.000.000									143	232.252.284	23,83	2,94	DINAS PEKERJAAN			
Rata-rata capaian kinerja (%)							4.748.810.585.848		381.054.036.746	1.101.336.094.958							27.182.938		27.182.938	0,00	381.081.219.684	50,82	8,02			
Predikat Kinerja																			SR	SR			R	SR		
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																										
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																										
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																										
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																										

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					K	Rp	K	Rp		K	Rp	I		II		III		IV			13		14 = 13/8x100			15 = 7 + 13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17											
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	menikmati listrik sesuai keselamatan ketenagalistrikan																						UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	
				Jumlah Sarana yang Terbangun dalam Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	unit	600																				DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	
		3.29.06.1.06.06	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah Sarana yang Terbangun dalam Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Unit	2.689	7.903.437.500	25	232.252.284	1.795.000.000									25	232.252.284	0,93	2,94			DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL		
4	Meningkatnya kesesuaian pengusaha pertambangan terhadap pola ruang	3.29.03	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	Peningkatan luas Wilayah Pertambangan yang Diusahakan	Ha	4.031	11.964.096.804	3.966,68	831.419.282	3.650.969.820	3.966,68							3.966,68			7.933,36	831.419.282	196,81	6,95	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL		
		3.29.03.1.01	Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Terlaksananya Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Laporan	12	3.901.182.524	2	162.156.237	911.420.400										2	162.156.237	16,67	4,16		DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL		
				Peningkatan pelaksanaan usaha pertambangan sesuai kaidah pertambangan yang baik	%	40																				DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	
		3.29.03.1.01.03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Laporan	14	3.901.182.524	1	162.156.237	911.420.400										1	162.156.237	7,14	4,16		DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL		
		3.29.03.1.03	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan	Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi	dokumen	0	4.962.914.280		614.651.255	1.229.549.420																DINAS PEKERJAAN	
Rata-rata capaian kinerja (%)						4.748.810.585.848		381.054.036.746		1.101.336.094.958		27.182.938						27.182.938		0,00		381.081.219.684	50,82	8,02			
Predikat Kinerja																		SR	SR				R	SR			
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																											
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																											

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6		7		8	9		10	11	12	13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17		
			Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut																				UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	
				Terlaksananya Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	%	100		100										50		50,00				DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	
		3.29.03.1.03.03	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	dokumen	13	1.846.400.000	3	362.124.673	550.000.000								3	362.124.673	23,08	19,61		DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL		
		3.29.03.1.03.04	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Laporan	20	3.116.514.280	1	252.526.582	679.549.420								1	252.526.582	5,00	8,10		DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL		
		3.29.03.1.04	Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	Terlaksananya Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	dokumen	3	3.100.000.000	5	33.437.123	1.510.000.000								5	33.437.123	166,67	1,08		DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL		
				Dokumen rekomendasi dan informasi izin pertambangan rakyat yang sesuai ketentuan	dokumen	1																	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL		
Rata-rata capaian kinerja (%)							4.748.810.585.848		381.054.036.746	1.101.336.094.958							27.182.938		27.182.938	0,00		381.081.219.684	50,82	8,02	
Predikat Kinerja																		SR	SR				R	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																									
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*:																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*:																									

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						K	Rp	K	Rp		K	Rp	I		II		III		IV			13		14 = 13/8x100			15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%
1	2	3	4	5		6		7		8	9		10		11	12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17			
		3.29.03.1.04.03	Penyusunan dan Perumusan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	dokumen	16	2.500.000.000	5	33.437.123	910.000.000																			
		3.29.03.1.04.05	Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang bersama Pemegang Izin Pertambangan Rakyat (IPR)	Jumlah Laporan Hasil Reklamasi dan Pascatambang Bersama Pemegang Izin Pertambangan Rakyat (IPR)	laporan	1	600.000.000			600.000.000																			
		3.29.03.1.07	Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Terlaksananya Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Laporan	9		1	21.174.667												nan	1	21.174.667	11,11					
				Peningkatan pelaksanaan usaha pertambangan sesuai kaidah pertambangan yang baik	%	40																							
		3.29.03.1.07.03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam	Laporan	11	0	1	21.174.667	0													1	21.174.667	9,09				
				Kategori Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	undefined	0																							
5	Terlaksananya Upaya Konservasi Sumber Daya Air Tanah melalui Pengendalian Rerata Penurunan Muka Air Tanah dalam Kondisi Aman	3.29.02	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	Pengendalian Pengusahaan Air Tanah	%	10	10.812.136.418	10	532.435.354	2.443.850.595	10	9.161.421								10	9.161.421	0,37	10	541.596.775	100,00	5,01	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL		
		3.29.02.1.01	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air	Jumlah Dokumen Terkait Data Zona Konservasi Air	dokumen	6	5.357.250.000	4	280.018.385	1.163.000.000		4.445.000									4.445.000	0,38	4	284.463.385	66,67	5,31	DINAS PEKERJAAN		
Rata-rata capaian kinerja (%)							4.748.810.585.848		381.054.036.746		1.101.336.094.958		27.182.938						27.182.938		0,00		381.081.219.684		50,82		8,02		
Predikat Kinerja																			SR		SR				R		SR		
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																													
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																													
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																													
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																													

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13/8x100	15 = 7 + 13	16 = 15 / 6 x 100%	17											
			Tanah dalam Daerah Provinsi	Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi																						UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	
				Jumlah Zona Konservasi Air Tanah yang ditetapkan Dalam Provinsi	dokumen	3																				DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	
				Jumlah laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	laporan	21		4														4		19,05		DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	
				Review Neraca Air Tanah	dokumen	3																				DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	
				Penetapan Zona Konservasi Air Tanah	dokumen	1																				DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	
				Monitoring dan Evaluasi Fluktuasi Muka Air Tanah	laporan	1																				DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	
				Pemeliharaan AWLR dan Sumur Pantau Air Tanah Dalam	laporan	1																				DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	
				Rekomendasi Teknis Izin Penggunaan Air Tanah	laporan	1																				DINAS PEKERJAAN	
Rata-rata capaian kinerja (%)						4.748.810.585.848		381.054.036.746		1.101.336.094.958		27.182.938						27.182.938		0,00				381.081.219.684	50,82	8,02	
Predikat Kinerja																		SR		SR					R	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																											
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																											

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6		7		8	9		10	11	12	13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17			
																										UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
				<b>Pembinaan kepada Pelaku Pengusahaan air tanah</b>	<b>laporan</b>	<b>1</b>																				DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
		3.29.02.1.01.01	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Jumlah Dokumen Terkait Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	dokumen	7	2.940.000.000	1	233.328.620	0												1	233.328.620	14,29	7,94	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
		3.29.02.1.01.02	Penentuan dan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Jumlah Zona Konservasi Air Tanah yang Ditetapkan dalam Daerah Provinsi	dokumen	3	850.000.000			850.000.000																DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
		3.29.02.1.01.03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	laporan	21	1.567.250.000	3	46.689.765	313.000.000	4.445.000						4.445.000	1,42			3	51.134.765	14,29	3,26	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	
		<b>3.29.02.1.03</b>	<b>Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi</b>	<b>Jumlah Dokumen Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi yang Terkumpul</b>	<b>dokumen</b>	<b>6</b>	<b>5.454.886.418</b>	<b>1</b>	<b>252.416.969</b>	<b>1.280.850.595</b>	<b>4.716.421</b>						<b>4.716.421</b>	<b>0,37</b>			<b>1</b>	<b>257.133.390</b>	<b>16,67</b>	<b>4,71</b>	<b>DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL</b>	
				<b>Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah</b>	<b>Laporan</b>	<b>7</b>		<b>1</b>														<b>1</b>		<b>14,29</b>		<b>DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL</b>
				<b>Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi</b>	<b>Laporan</b>	<b>18</b>		<b>2</b>														<b>2</b>		<b>11,11</b>		<b>DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL</b>
Rata-rata capaian kinerja (%)							4.748.810.585.848		381.054.036.746	1.101.336.094.958	27.182.938						27.182.938	0,00			381.081.219.684	50,82	8,02			
Predikat Kinerja																	SR	SR						R	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																										
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																										
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																										
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																										

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					K	Rp	K	Rp		K	Rp	I		II		III		IV			13		14 = 13/8x100			15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17													
																										SUMBER DAYA MINERAL			
				Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah	laporan	1																				DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL			
				Peningkatan pelaksanaan pengusahaan air tanah yang sesuai ketentuan	%	40,49																				DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL			
		3.29.02.1.03.01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi yang Terkumpul	Dokumen	6	805.184.270	1	103.160.241	167.388.375												1	103.160.241	16,67	12,81	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL			
		3.29.02.1.03.02	Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah	Jumlah Laporan Hasil Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	laporan	6	800.000.000	1	19.994.913	50.000.000												1	19.994.913	16,67	2,50	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL			
		3.29.02.1.03.03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Laporan	16	3.849.702.148	1	129.261.815	1.063.462.220												1	133.978.236	6,25	3,48	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL			
6	Penduduk Beraksas Sanitasi	1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Presentase jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik regional	%	38,05	241.239.379.549	37,86		54.601.443.294	37,86											37,86			99,50	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL			
		1.03.05.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Terlayannya Rumah Tangga melalui optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat	Rumah Tangga	28.535	241.239.379.549	27.035		54.601.443.294												27.035			94,74	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL			
Rata-rata capaian kinerja (%)								4.748.810.585.848		381.054.036.746												27.182.938		0,00		381.081.219.684	50,82	8,02	
Predikat Kinerja																							SR	SR			R	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																													
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																													
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																													
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																													

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						K	Rp	K	Rp		K	Rp	I		II		III		IV			K		Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8	9		10		11	12	13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17	
				<i>Terpeliharanya Unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang beroperasi</i>	<i>unit</i>	2		2																		<i>DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL</i>
				<i>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional</i>	<i>%</i>	100																				<i>DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL</i>
		1.03.05.1.01.04	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional	Jumlah Rumah Tangga yang terlayani melalui optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat	Rumah Tangga	28.535	174.577.199.250			22.950.000.000																DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
		1.03.05.1.01.09	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang Beroperasi dan Terpelihara	unit	2	66.662.180.299	1		31.651.443.294												1		50,00		DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
		<b>1.03.06</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE</b>	<b>Pengurangan luasan genangan</b>	<b>ha</b>	<b>6,86</b>	<b>79.400.000.000</b>	<b>7,92</b>		<b>20.300.000.000</b>	<b>7,92</b>							<b>7,92</b>				<b>15,84</b>		<b>230,90</b>		<b>DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL</b>
		<b>1.03.06.1.01</b>	<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi</b>	<b>Akumulasi Jumlah Luasan genangan yang tertangani</b>	<b>ha</b>	<b>6,86</b>	<b>79.400.000.000</b>	<b>30,12</b>		<b>20.300.000.000</b>	<b>7,92</b>							<b>7,92</b>				<b>38,04</b>		<b>554,52</b>		<b>DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL</b>
		1.03.06.1.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	dokumen	4	1.200.000.000			300.000.000																DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
		1.03.06.1.01.05	Penyediaan Drainase Perkotaan dan Sarana Pendukungnya	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan dan Sarana	unit	8	78.200.000.000			20.000.000.000																DINAS PEKERJAAN UMUM,
Rata-rata capaian kinerja (%)							4.748.810.585.848		381.054.036.746	1.101.336.094.958		27.182.938						27.182.938	0,00			381.081.219.684	50,82	8,02		
Predikat Kinerja																		SR	SR					R	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																										
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																										
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																										
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																										

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					K	Rp	K	Rp		K	Rp	I		II		III		IV			13		14 = 13/8x100			15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17													
				Pendukung Lainnya yang Disediakan																							PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL		
		1.03.06.1.01.06	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Jumlah Sistem Drainase yang Beroperasi dan Terpelihara	Unit	11	0			0																	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL		
7	Penyediaan Infrastruktur Sumber Daya Air	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur sumber daya air untuk kebutuhan pokok sehari-hari	liter/detik	25.403,58	297.385.380.000	25.417,85	21.674.502.807	68.893.630.000	25.423,3								25.423,3				50.841,15	21.674.502.807	200,13	7,29	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL		
				Meningkatnya persentase Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Kewenangan DIY	%	58,05		36,59			36,59								36,59				36,59		63,03		DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL		
		1.03.02.1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Kumulatif penambahan sarana prasarana air baku yg dibangun dan atau dikelola (satuan l/s)	liter/detik	25.403,58	115.631.300.000	101.622,59	3.458.842.918	34.420.000.000	25.423,3								25.423,3				127.045,89	3.458.842.918	500,11	2,99	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL		
				Kumulatif penambahan sarana prasarana air baku yang dibangun dan dikelola	liter/detik	576,01		25.391,58															25.391,58		4.408,18		DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL		
		1.03.02.1.01.01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	dokumen	10	2.150.000.000			450.000.000																	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL		
		1.03.02.1.01.02	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku yang Disusun	dokumen	11	4.150.000.000	4	458.101.942	950.000.000												4	458.101.942	36,36	11,04	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI			
Rata-rata capaian kinerja (%)							4.748.810.585.848		381.054.036.746	1.101.336.094.958									27.182.938				27.182.938	0,00	381.081.219.684	50,82	8,02		
Predikat Kinerja																													
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																													
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																													
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																													
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																													

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						K	Rp	K	Rp		K	Rp	I		II		III		IV			K		Rp			K	
1	2	3	4	5		6		7		8	9		10		11	12	13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17			
																									SUMBER DAYA MINERAL			
		1.03.02.1.01.06	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun	unit	3	20.800.000.000			6.000.000.000															DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL			
		1.03.02.1.01.07	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dibangun	titik	36	19.875.000.000	1		5.500.000.000											1		2,78		DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL			
		1.03.02.1.01.21	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Direhabilitasi	unit	16	27.500.000.000			13.000.000.000															DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL			
		1.03.02.1.01.49	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara	unit	27	23.835.800.000	25	3.000.740.976	4.800.000.000											25	3.000.740.976	92,59	12,59	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL			
		1.03.02.1.01.60	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi	laporan	10	9.521.500.000	2		1.980.000.000											2		20,00		DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL			
		1.03.02.1.01.61	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi	Jumlah Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi yang Dibina dan Diberdayakan	lembaga	3	7.600.000.000	2		1.700.000.000											2		66,67		DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL			
		1.03.02.1.01.62	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Provinsi yang Disusun	dokumen	5	199.000.000	1		40.000.000											1		20,00		DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL			
		<b>1.03.02.1.02</b>	<b>Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah</b>	<b>Persentase luas daerah irigasi dengan indeks kinerja optimum (77.5%) dibandingkan dengan luas</b>	<b>%</b>	<b>58,05</b>	<b>181.754.080.000</b>	<b>21,86</b>	<b>18.215.659.889</b>	<b>34.473.630.000</b>											<b>10,93</b>	<b>18.215.659.889</b>	<b>18,83</b>	<b>10,02</b>	<b>DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI</b>			
Rata-rata capaian kinerja (%)							4.748.810.585.848		381.054.036.746	1.101.336.094.958										27.182.938		27.182.938	0,00		381.081.219.684	50,82	8,02	
Predikat Kinerja																					SR	SR			R	SR		
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																												
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																												

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					K	Rp	K	Rp		K	Rp	I		II		III		IV			13		14 = 13/8x100			15 = 7 + 13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	total daerah irigasi kewenangan DIY																						SUMBER DAYA MINERAL
				Persentase luas daerah irigasi dengan indeks kinerja optimum (> 77,50 %) dibandingkan dengan luas total daerah irigasi kewenangan DIY	%	12,51																				DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
		1.03.02.1.02.01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun	dokumen	10	5.100.000.000			1.000.000.000																DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
		1.03.02.1.02.08	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	km	17,8	46.386.500.000	0,24	796.706.037	9.000.000.000									0,24	796.706.037	1,35	1,72			DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	
		1.03.02.1.02.09	Peningkatan Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Ditingkatkan	bendung	1	5.000.000.000			0																DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
		1.03.02.1.02.14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	km	12,08	37.325.001.000	2,16	5.354.457.498	8.500.000.000									2,16	5.354.457.498	17,88	14,35			DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	
		1.03.02.1.02.15	Rehabilitasi Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi	bendung	2	5.500.000.000			0																DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
		1.03.02.1.02.21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	km	511,77	72.088.759.800	511,77	10.636.165.588	14.710.500.000									511,77	10.636.165.588	100,00	14,75			DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	
		1.03.02.1.02.22	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Beroperasi dan Dipelihara	Bendung	41	10.353.819.200	41	1.428.330.766	1.263.130.000									41	1.428.330.766	100,00	13,80			DINAS PEKERJAAN UMUM,	
Rata-rata capaian kinerja (%)							4.748.810.585.848		381.054.036.746	1.101.336.094.958								27.182.938		27.182.938	0,00			381.081.219.684	50,82	8,02
Predikat Kinerja																			SR	SR					R	SR
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																										
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																										
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																										
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																										

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab								
					K	Rp	K	Rp		K	Rp	I		II		III		IV			K	Rp	14 = 13/8x100			K	Rp	K	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17																	
																														PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL			
		1.03.02.1.02.28	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi	Jumlah Daerah Irigasi yang Mengelola Pengukuran Data Realisasi Alokasi Air	DI	41	0	41	0																	41	100,00		DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL				
				Persentase Pembangunan Jaringan Jalan	%	100																							DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL				
8	Peningkatan Aksesibilitas Jalan	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase kemantapan jalan	%	62,4	707.997.448.119	68,04	84.190.203.060	157.978.762.796	68,04								68,04							68,04	84.190.203.060	109,04	11,89	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL			
		1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Penambahan, peningkatan dan mempertahankan kondisi jalan	%	62,4	707.997.448.119	68,04	84.190.203.060	157.978.762.796	68,04								68,04							68,04	84.190.203.060	109,04	11,89	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL			
				Penambahan, peningkatan dan mempertahankan kondisi jalan	%	68,61																								DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL			
		1.03.10.1.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian	dokumen	312	2.183.153.000	57		536.300.000																57	18,27		DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL				
		1.03.10.1.01.02	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Luas Lahan yang Tersedia untuk Penyelenggaraan Jalan	m2	3.042,83	15.964.150.000			11.576.650.000																			DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL				
Rata-rata capaian kinerja (%)							4.748.810.585.848		381.054.036.746	1.101.336.094.958								27.182.938						SR	SR	0,00		381.081.219.684	50,82	8,02			
Predikat Kinerja																																	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																																	
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																																	

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6		7		8	9		10	11	12	13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17		
		1.03.10.1.01.04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan	dokumen	10	5.969.200.000		679.430.139	1.292.300.000										679.430.139		11,38	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL		
		1.03.10.1.01.06	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Panjang Jalan yang Dilakukan Pelebaran Menuju Standar	km	14	150.101.250.000			28.875.000.000													DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL		
		1.03.10.1.01.08	Rekonstruksi Jalan	Terlaksananya rekonstruksi jalan	km	13	91.050.937.000	0,3	1.894.945.588	24.516.979.000								0,3	1.894.945.588	2,31	2,08	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL			
		1.03.10.1.01.09	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	km	0	232.267.863.000	9,225	53.237.474.874	48.400.000.000								9,225	53.237.474.874		22,92	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL			
		1.03.10.1.01.11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	m	674,585	144.922.613.235	674,58	24.809.516.180	29.683.538.500								674,58	24.809.516.180	100,00	17,12	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL			
		1.03.10.1.01.16	Penggantian Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Penggantian	m	83,3	41.650.000.000			10.500.000.000													DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL		
		1.03.10.1.01.17	Pelebaran Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pelebaran	m	30,8	10.780.000.000			0													DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL		
		1.03.10.1.01.19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	m	6.597,8	13.108.281.884		3.568.836.279	2.597.995.296									3.568.836.279		27,23	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL			
Rata-rata capaian kinerja (%)								4.748.810.585.848		381.054.036.746	1.101.336.094.958						27.182.938	0,00		381.081.219.684	50,82	8,02			
Predikat Kinerja																	SR	SR				R	SR		
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																									
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																									

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6		7		8	9		10	11	12	13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17			
9	Peningkatan kinerja jasa konstruksi	1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase terlayannya rekomendasi analisis perkiraan biaya bangunan dan pendampingan penyelenggaraan bangunan gedung negara	%	100	4.414.713.400	100		1.000.000.000	100					100				100		100,00		DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL		
		1.03.08.1.01	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Provinsi Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	dokumen	216	4.414.713.400	4		1.000.000.000										4		1,85		DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL		
				Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Provinsi	dokumen	1																		DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL		
				Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	dokumen	1																		DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL		
		1.03.08.1.01.01	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	dokumen	4	2.250.000.000			550.000.000														DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL		
		1.03.08.1.01.04	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Provinsi	Jumlah Konsultasi Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Provinsi	dokumen	212	2.164.713.400			450.000.000														DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL		
		1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Peningkatan kinerja tenaga konstruksi dan masyarakat jasa konstruksi	%	100	26.278.833.900	102,35	432.984.880	5.993.437.000	87,58					87,58				94,965	432.984.880	94,97	1,65	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL		
Rata-rata capaian kinerja (%)							4.748.810.585.848		381.054.036.746	1.101.336.094.958						27.182.938				27.182.938	0,00		381.081.219.684	50,82	8,02	
Predikat Kinerja																SR	SR						R	SR		
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																										
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																										
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																										
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																										

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab								
						K	Rp	K	Rp		K	Rp	I		II			III		IV			13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17		
				Laporan hasil uji (LHU) yang diterbitkan	%	100		82,65				83,92								83,92					83,285		83,29	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL		
		1.03.11.1.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Penambahan jumlah tenaga ahli konstruksi yang terlatih	orang	2.725	20.929.833.900	200	432.984.880	4.718.437.000															200	432.984.880	7,34	2,07	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	
				Terpenuhinya layanan pengujian laboratorium konstruksi	LHU	10.384		800																	800		7,70	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL		
		1.03.11.1.01.04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli yang Mengikuti Pelatihan	orang	2.725	0			0																			DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	
		1.03.11.1.01.06	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli yang Tersertifikasi	Orang	610	1.500.000.000			350.000.000																			DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	
		1.03.11.1.01.07	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Jumlah Peserta yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	orang	10.384	19.429.833.900	1.797	432.984.880	4.368.437.000															1.797	432.984.880	17,31	2,23	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	
		1.03.11.1.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	Terselenggaranya Dukungan Manajemen Sistem Informasi Jasa Konstruksi	laporan	5	5.349.000.000	1		1.275.000.000															1		20,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL		
				Jumlah orang terlayani melalui sistem informasi jasa konstruksi	orang	824.220																							DINAS PEKERJAAN UMUM,	
Rata-rata capaian kinerja (%)							4.748.810.585.848		381.054.036.746	1.101.336.094.958										27.182.938				27.182.938	0,00	381.081.219.684	50,82	8,02		
Predikat Kinerja																					SR				SR					
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																														
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																														
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																														
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																														

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6		7		8	9		10	11	12	13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17		
																									PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
		1.03.11.1.02.01	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Sistem Informasi Jasa Konstruksi	laporan	4	400.000.000			100.000.000															DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
		1.03.11.1.02.05	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi	dokumen	5	4.949.000.000			1.175.000.000															DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
		1.03.13	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	Persentase Aksesibilitas Pengembangan Kawasan SRS	%	100	1.578.671.890.017	71,78	119.031.872.363	403.299.676.071	72					72			71,89	119.031.872.363	71,89	7,54		DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	
				penanganan rumah terdampak bencana dan/atau relokasi	%	100		100											50		50,00			DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	
				Meningkatnya ketersediaan air baku	liter/detik	39,51		43,22			48,67					48,67			91,89		232,57			DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	
				Presentase terselenggaranya Bangunan gedung negara strategis provinsi	%	100		8,92			11,84					11,84			10,38		10,38			DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	
		1.03.13.5.02	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Terwujudnya Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	dokumen	103	1.578.671.890.017	0	119.031.872.363	403.299.676.071										119.031.872.363		7,54		DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	
Rata-rata capaian kinerja (%)							4.748.810.585.848		381.054.036.746	1.101.336.094.958	27.182.938					27.182.938	0,00		381.081.219.684	50,82	8,02				
Predikat Kinerja																SR	SR					R	SR		
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																									
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																									

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13/8x100	15 = 7 + 13	16 = 15 / 6 x 100%	17									
																	SUMBER DAYA MINERAL								
				Penyediaan air bersih dari air tanah dalam	titik	30											DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL								
				Penambahan jaringan jalan baru	km	6,23		0,4								0,4	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL								
				Pengadaan tanah untuk penyelenggaraan	m2	124.284,34											DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL								
				Peningkatan jalan	km	10,52											DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL								
				Pembangunan jembatan	meter	12											DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL								
				Pemasangan patok aset tanah JJLS	buah	1.060											DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL								
				Proses tahapan pengadaan tanah	dokumen	1											DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI								
Rata-rata capaian kinerja (%)						4.748.810.585.848		381.054.036.746		1.101.336.094.958		27.182.938				27.182.938	0,00	381.081.219.684	50,82	8,02					
Predikat Kinerja																SR	SR			R	SR				
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																									
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																									

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					K	Rp	K	Rp		K	Rp	I		II		III		IV			13		14 = 13/8x100			15 = 7 + 13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17											
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
																											<b>SUMBER DAYA MINERAL</b>
		1.03.13.5.02.01	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu	dokumen	25	240.185.000.000	3	1.410.644.294	26.900.000.000																	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
		1.03.13.5.02.02	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan	dokumen	23	593.997.447.217	4	13.853.009.988	160.054.783.071																	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
		1.03.13.5.02.03	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu	dokumen	29	320.520.449.800	6	82.898.128.985	29.900.000.000																	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
		1.03.13.5.02.04	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh	dokumen	5	43.369.600.000	1	1.060.989.667	1.200.000.000																	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
		1.03.13.5.02.05	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri	dokumen	2	3.950.000.000			1.200.000.000																	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
		1.03.13.5.02.06	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Candi Prambanan-Candi Ijo	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Candi Prambanan-Candi Ijo	dokumen	5	273.749.393.000	1	19.809.099.429	148.244.893.000																	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
		1.03.13.5.02.07	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kotabaru	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kotabaru	dokumen	1	350.000.000			0																	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
		1.03.13.5.02.08	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Merapi	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis	dokumen	6	63.050.000.000			100.000.000																	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN
Rata-rata capaian kinerja (%)							4.748.810.585.848		381.054.036.746	1.101.336.094.958																	
Predikat Kinerja																											
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																											
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																											

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					K	Rp	K	Rp		K	Rp	I		II		III		IV			13		14 = 13/8x100			15 = 7 + 13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17											
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
																											DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
		1.03.13.5.02.10	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas-Parangtritis	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas-Parangtritis	Dokumen	3	1.300.000.000			600.000.000																	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
		1.03.13.5.02.13	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Kulon Progo	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Kulon Progo	Dokumen	4	38.200.000.000			35.100.000.000																	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
		<b>1.03.13.5.04</b>	<b>Sarana dan Prasarana Keistimewaan Urusan Tata Ruang</b>	<b>Tersedianya Sarana dan Prasarana Keistimewaan Urusan Tata Ruang</b>	<b>dokumen</b>	<b>7</b>																					<b>DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL</b>
		1.03.13.5.04.01	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang	Jumlah Dokumen kegiatan pengadaan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan keistimewaan urusan tata ruang	Dokumen	7	0			0																	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
				Peningkatan persentase pembinaan kinerja jasa konstruksi	%	100																					DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
10	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah	0.00.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	90	319.778.918.461	91,76	48.590.283.416	64.663.029.508	91,76	13.153.634					91,76	13.153.634	0,02	91,76	48.603.437.050	101,96	15,20			DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	
				Nilai PKKI Program Penunjang (Balai PAL PJK)	nilai	0					80						80				80						DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
Rata-rata capaian kinerja (%)							4.748.810.585.848		381.054.036.746	1.101.336.094.958		27.182.938					27.182.938	0,00		381.081.219.684	50,82	8,02					
Predikat Kinerja																	SR	SR									
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																											
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																											

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						K	Rp	K	Rp		K	Rp	I		II		III		IV			13		14 = 13/8x100		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17										
		0.00.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terwujudnya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100	2.809.506.300	100	322.286.021	554.600.000	8,17	7.360.221							8,17	7.360.221	1,33	54,085	329.646.242	54,09	11,73	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
		0.00.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	20	610.925.800	8	37.992.542	121.000.000	1	7.360.221							1	7.360.221	6,08	9	45.352.763	45,00	7,42	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
		0.00.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	20	431.225.000	6	40.840.509	83.600.000											6	40.840.509	30,00	9,47	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	
		0.00.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	20	1.767.355.500	10	243.452.970	350.000.000	2								2		12	243.452.970	60,00	13,77	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	
		0.00.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terwujudnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	216.818.465.331	100	39.558.818.043	43.716.471.933											50	39.558.818.043	50,00	18,25	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	
		0.00.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	433	215.202.227.571	421	39.364.923.837	43.395.404.483											421	39.364.923.837	97,23	18,29	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	
		0.00.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	70	899.224.290	12	100.332.019	178.959.000											12	100.332.019	17,14	11,16	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	
		0.00.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	15	258.825.715	3	20.339.288	51.297.950											3	20.339.288	20,00	7,86	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI	
Rata-rata capaian kinerja (%)							4.748.810.585.848		381.054.036.746	1.101.336.094.958		27.182.938								27.182.938	0,00	381.081.219.684	50,82	8,02		
Predikat Kinerja																				SR	SR			R	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																										
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																										
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																										
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																										

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						K	Rp	K	Rp		K	Rp	I		II		III		IV			K	Rp	K	Rp		K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8	9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17			
																											SUMBER DAYA MINERAL			
		0.00.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	25	458.187.755	24	73.222.899	90.810.500														24	73.222.899	96,00	15,98	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL		
		<b>0.00.01.1.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Terpenuhinya Administrasi BMD pada Perangkat Daerah</b>	<b>%</b>	<b>0</b>	<b>718.140.904</b>	<b>100</b>	<b>98.105.830</b>	<b>141.618.400</b>														<b>50</b>	<b>98.105.830</b>		<b>13,66</b>	<b>DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL</b>		
		0.00.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	5	4.273.570	1	440.828	847.000														1	440.828	20,00	10,32	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL		
		0.00.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	70	713.867.334	12	97.665.002	140.771.400														12	97.665.002	17,14	13,68	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL		
		<b>0.00.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Terwujudnya Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>%</b>	<b>0</b>	<b>7.113.716.600</b>	<b>100</b>	<b>780.220.306</b>	<b>1.410.497.363</b>														<b>50</b>	<b>786.013.719</b>		<b>11,05</b>	<b>DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL</b>		
		0.00.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	15	650.051.922	2	54.163.662	128.837.049														2	59.957.075	13,33	9,22	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL		
		0.00.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	65	1.048.164.472	3	82.531.613	207.740.907														3	82.531.613	4,62	7,87	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL		
		0.00.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	50	338.884.232	4	21.770.310	67.165.164														4	21.770.310	8,00	6,42	DINAS PEKERJAAN UMUM,		
Rata-rata capaian kinerja (%)							4.748.810.585.848		381.054.036.746	1.101.336.094.958															27.182.938	0,00		381.081.219.684	50,82	8,02
Predikat Kinerja																														
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																														
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																														
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																														
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																														

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						K	Rp	K	Rp		K	Rp	I		II		III		IV			13		14 = 13/8x100			15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17			
												K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
																														PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	
		0.00.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	35	652.232.253	4	85.109.447	129.269.140															4	85.109.447	11,43	13,05	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL		
		0.00.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	250	138.251.821	2	2.822.000	27.400.813															2	2.822.000	0,80	2,04	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL		
		0.00.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	2.005	4.286.131.900	286	533.823.274	850.084.290															286	533.823.274	14,26	12,45	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL		
		<b>0.00.01.1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Tersedianya BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>%</b>	<b>0</b>	<b>3.521.352.414</b>	<b>100</b>	<b>8.406.199</b>	<b>801.423.705</b>															<b>50</b>	<b>8.406.199</b>		<b>0,24</b>	<b>DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL</b>		
		0.00.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	unit	5	2.035.000.000	0		500.000.000																			DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL		
		0.00.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	5	234.198.900			47.190.000																			DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL		
		0.00.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	120	1.252.153.514	2	8.406.199	254.233.705															2	8.406.199	1,67	0,67	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL		
Rata-rata capaian kinerja (%)							4.748.810.585.848		381.054.036.746	1.101.336.094.958															27.182.938	0,00		381.081.219.684	50,82	8,02	
Predikat Kinerja																															
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																															
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																															
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																															
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																															

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						K	Rp		K	Rp	K	Rp	I	II	III	IV	K	Rp		K	Rp	K	Rp		K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13/8x100	15 = 7 + 13	16 = 15 / 6 x 100%	17										
		0.00.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	61.884.375.957	100	5.460.969.979	12.469.330.524									50	5.460.969.979	50,00	8,82	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL			
		0.00.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	15	61.051.000	1	7.850.000	12.100.000									1	7.850.000	6,67	12,86	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL			
		0.00.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	15	34.809.433.123	1	1.856.684.260	7.118.843.578									1	1.856.684.260	6,67	5,33	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL			
		0.00.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	75	27.013.891.834	10	3.596.435.719	5.338.386.946									10	3.596.435.719	13,33	13,31	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL			
		0.00.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	26.913.360.955	100	2.361.477.038	5.569.087.583									50	2.361.477.038	50,00	8,77	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL			
		0.00.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	103	8.006.888.870			1.897.775.858													DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL			
		0.00.01.1.09.010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	unit	5	1.200.000.000	2		200.000.000									2		40,00		DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL			
		0.00.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajakya	Unit	119	6.913.146.200	88	1.373.664.418	1.300.000.000									88	1.373.664.418	73,95	19,87	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI			
Rata-rata capaian kinerja (%)							4.748.810.585.848		381.054.036.746	1.101.336.094.958								27.182.938		27.182.938	0,00		381.081.219.684	50,82	8,02	
Predikat Kinerja																				SR	SR			R	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																										
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																										
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																										
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																										

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						K	Rp	K	Rp		K	Rp	I		II		III		IV			K	Rp	K	Rp		K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8	9		10	11	12	13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17						
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
		0.00.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	119	2.140.930.885	276	292.339.000	416.811.725																SUMBER DAYA MINERAL				
		0.00.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	6	8.652.395.000	3	695.473.620	1.754.500.000																DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL				
Rata-rata capaian kinerja (%)							4.748.810.585.848		381.054.036.746	1.101.336.094.958								27.182.938						27.182.938	0,00		381.081.219.684	50,82	8,02	
Predikat Kinerja																														
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																														
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																														
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																														
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																														

Disusun  
Yogyakarta, 2 Mei 2025  
Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral

Dievaluasi  
Yogyakarta, 2 Mei 2025  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah

ANNA RINA HERBRANTI , S.T., M.T.  
NIP. 197106241998032002

NI MADE DWIPANTI INDRAYANTI, S.T., M.T.  
NIP. 197010181998032007

**EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUNGAN PROVINSI  
RENJA PERANGKAT DAERAH DINAS PERHUBUNGAN PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERIODE PELAKSANAAN : 2025**

Indikator dan target kinerja SKPD yang mengacu pada sasaran RKPD:

Target Realisasi

- |   |                                                                                                                   |       |       |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| 1 | 1. Persentase Capaian Jalan Berkeselamatan Berbasis Angkutan Umum                                                 | 59,19 | 29,48 |
| 2 | 2. Persentase Capaian Pengelolaan Sektor Transportasi di Kawasan Strategis Dalam Mendukung Pelestarian Lingkungan | 61,29 | 28,13 |
| 3 | 3. Kategori Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah                                                                  | 2     | 2     |

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I	II	III	IV	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp				
1	2	3	4	5		6		7		8		9				10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
1	1. Terwujudnya Jalan Berkeselamatan Berbasis Angkutan Umum	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	1. Persentase Penyediaan Layanan Angkutan Umum di DIY	%	64,68	883.220.684.875	56,65	81.239.827.846	288.123.337.777	45,2							45,2						50,925	81.239.827.846	78,73	9,20	DINAS PERHUBUNGAN		
				2. Persentase Penyediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan Pada Jalan Provinsi	%	48,06		41,49			39,5							39,5						40,495		84,26		DINAS PERHUBUNGAN		
				3. Persentase Penerapan Teknologi Berbasis ITS	%	66,77		36,39			38,59							38,59						37,49		56,15		DINAS PERHUBUNGAN		
				4. Persentase Pemenuhan SPM Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Tipe B	%	86,49		67,57			3,92							3,92						35,745		41,33		DINAS PERHUBUNGAN		
				5. Persentase Pemenuhan SPM Layanan Tempat Khusus Parkir (TKP)	%	90,35		78,07			4,12							4,12						41,095		45,48		DINAS PERHUBUNGAN		
				6. Persentase Penanganan Lalu Lintas Pada 6 Kawasan	%	100		22,25			24,07							24,07						23,16		23,16		DINAS PERHUBUNGAN		
				7. Persentase Ketertiban LLAJ	%	85,98		74,49			70,43							70,43						72,46		84,28		DINAS PERHUBUNGAN		
				8. Persentase Penanganan Daerah Rawan Kecelakaan	%	70		10			10							10						10		14,29		DINAS PERHUBUNGAN		
		2.15.02.1.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Persentase Dokumen Acuan Dalam Perencanaan Jaringan Jalan di DIY	%	100	5.885.977.800	100	1.086.077.507	1.100.000.000														50	1.086.077.507	50,00	18,45	DINAS PERHUBUNGAN		
		2.15.02.1.01.02	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Dokumen	36	5.885.977.800	7	1.086.077.507	1.100.000.000														7	1.086.077.507	19,44	18,45	DINAS PERHUBUNGAN		
		2.15.02.1.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Penyediaan Perlengkapan Jalan Serta Dipertahankannya Fungsi Prasarana dan	%	100	60.974.982.800	100	8.117.870.700	14.133.869.700														50	8.117.870.700	50,00	13,31	DINAS PERHUBUNGAN		
Rata-rata capaian kinerja (%)							1.256.014.860.976		123.660.547.904	382.994.196.964								7.488.713						0,00		123.668.036.617	23,01	9,85		
Predikat Kinerja																		SR	SR								SR	SR		
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																														
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																														
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																														
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																														

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100			15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp
				<b>Perengkapan Jalan yang Telah Tersedia</b>																							
		2.15.02.1.02.01	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Provinsi	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Provinsi yang Terbangun	Unit	89	455.000.000			50.000.000														DINAS PERHUBUNGAN			
		2.15.02.1.02.02	Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Jumlah Perengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia	Unit	6.289	33.865.850.000	65	6.040.704.968	7.975.250.000										65	6.040.704.968	1,03	17,84	DINAS PERHUBUNGAN			
		2.15.02.1.02.03	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara	Unit	452	2.349.598.800	113	545.663.850	582.399.700										113	545.663.850	25,00	23,22	DINAS PERHUBUNGAN			
		2.15.02.1.02.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan	Jumlah Perengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara	Unit	3.946	24.304.534.000	0	1.531.501.882	5.526.220.000											1.531.501.882		6,30	DINAS PERHUBUNGAN			
		<b>2.15.02.1.03</b>	<b>Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B</b>	<b>Ketersediaan Fasilitas Penyelenggaraan Terminal Tipe B</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>99.423.750.000</b>	<b>100</b>		<b>94.550.000.000</b>										<b>50</b>		<b>50,00</b>		<b>DINAS PERHUBUNGAN</b>			
				<b>Ketersediaan Fasilitas Penyelenggaraan Tempat Khusus Parkir (TKP)</b>	<b>%</b>	<b>100</b>		<b>100</b>												<b>50</b>		<b>50,00</b>		<b>DINAS PERHUBUNGAN</b>			
		2.15.02.1.03.01	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B	Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B	Dokumen	11	2.723.750.000			700.000.000														DINAS PERHUBUNGAN			
		2.15.02.1.03.02	Pembangunan Gedung Terminal	Jumlah Gedung Terminal yang Terbangun	Unit	1	93.000.000.000			93.000.000.000														DINAS PERHUBUNGAN			
		2.15.02.1.03.03	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang dilakukan Pengembangan	Unit	28	2.600.000.000			550.000.000														DINAS PERHUBUNGAN			
		2.15.02.1.03.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Unit	23	1.100.000.000			300.000.000														DINAS PERHUBUNGAN			
		<b>2.15.02.1.05</b>	<b>Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi</b>	<b>Persentase Penerapan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di DIY</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>48.628.344.920</b>	<b>100</b>	<b>420.746.904</b>	<b>12.912.940.409</b>										<b>50</b>	<b>420.746.904</b>	<b>50,00</b>	<b>0,87</b>	<b>DINAS PERHUBUNGAN</b>			
		2.15.02.1.05.01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	Laporan	80	168.000.000	20	50.120.616	42.000.000										20	50.120.616	25,00	29,83	DINAS PERHUBUNGAN			
		2.15.02.1.05.02	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan	Jumlah Perengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang	Unit	1.104	37.571.941.320			10.235.901.109														DINAS PERHUBUNGAN			
Rata-rata capaian kinerja (%)							1.256.014.860.976		123.660.547.904	382.994.196.964										7.488.713	0,00		123.668.036.617	23,01	9,85		
Predikat Kinerja																				SR	SR			SR	SR		
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																											
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																											

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100			15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp
			Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Dilaksanakan Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan																								
		2.15.02.1.05.03	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Dokumen Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Dokumen	24	5.579.903.000	1	46.003.164	1.348.068.000											1	46.003.164	4,17	0,82	DINAS PERHUBUNGAN			
		2.15.02.1.05.04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Laporan	28	4.789.500.600	3	299.469.603	1.145.971.300											3	299.469.603	10,71	6,25	DINAS PERHUBUNGAN			
		2.15.02.1.05.05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	Laporan	53	519.000.000	1	25.153.521	141.000.000											1	25.153.521	1,89	4,85	DINAS PERHUBUNGAN			
		<b>2.15.02.1.06</b>	<b>Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi</b>	<b>Persentase Pelaksanaan Penilaian Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas di Jalan Provinsi</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>145.000.000</b>	<b>100</b>		<b>30.000.000</b>											<b>50</b>		<b>50,00</b>		<b>DINAS PERHUBUNGAN</b>			
		2.15.02.1.06.01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Andalalin yang Ditetapkan	Dokumen	12	145.000.000			30.000.000															DINAS PERHUBUNGAN			
		<b>2.15.02.1.07</b>	<b>Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan</b>	<b>Pelaksanaan Audit Standarisasi Kendaraan dan Pengemudi Untuk Angkutan Umum dan Angkutan Barang</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>1.230.000.000</b>			<b>650.000.000</b>															<b>DINAS PERHUBUNGAN</b>			
		2.15.02.1.07.02	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Laporan	3	770.000.000			540.000.000															DINAS PERHUBUNGAN			
		2.15.02.1.07.04	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi	Laporan	4	460.000.000			110.000.000															DINAS PERHUBUNGAN			
Rata-rata capaian kinerja (%)							1.256.014.860.976		123.660.547.904	382.994.196.964								7.488.713		0,00		123.668.036.617	23,01	9,85				
Predikat Kinerja																												
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																												
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																												

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
						6		7		8			9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13			16 = 15 / 6 x 100%					
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5		6		7		8			9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17				
		2.15.02.1.08	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Ketersediaan Dokumen Operasional Angkutan Umum Dalam Trayek	%	100	616.041.020.196	100	71.493.332.735	131.840.451.979															50	71.493.332.735	50,00	11,61	DINAS PERHUBUNGAN				
		2.15.02.1.08.01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Unit	651	607.607.886.136	95	70.226.492.363	130.120.451.979															95	70.226.492.363	14,59	11,56	DINAS PERHUBUNGAN				
		2.15.02.1.08.02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi	Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan KeTersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	Laporan	234	8.433.134.060	5	1.266.840.372	1.720.000.000															5	1.266.840.372	2,14	15,02	DINAS PERHUBUNGAN				
		2.15.02.1.09	Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Penyediaan Dokumen Acuan Kinerja dan Pengembangan Trayek Angkutan Perkotaan	%	100	50.446.609.159	100	11.000.000	32.831.075.689																50	11.000.000	50,00	0,02	DINAS PERHUBUNGAN			
		2.15.02.1.09.01	Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	Dokumen	15	48.271.754.359			32.287.361.989																				DINAS PERHUBUNGAN			
		2.15.02.1.09.02	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	Dokumen	16	2.174.854.800	1	11.000.000	543.713.700																1	11.000.000	6,25	0,51	DINAS PERHUBUNGAN			
		2.15.02.1.10	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1	Persentase Penyusunan Dokumen Acuan Kinerja dan Pengembangan Trayek Angkutan dalam Kota dalam Provinsi	%	100	445.000.000	100	110.800.000	75.000.000																50	110.800.000	50,00	24,90	DINAS PERHUBUNGAN			
Rata-rata capaian kinerja (%)							1.256.014.860.976		123.660.547.904	382.994.196.964																7.488.713	0,00		123.668.036.617	23,01	9,85		
Predikat Kinerja																																	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																																	
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																																	

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100			15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp
			<i>(satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>																								
		2.15.02.1.10.01	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi	Dokumen	3	300.000.000	1	99.800.000		0									1	99.800.000	33,33	33,27	DINAS PERHUBUNGAN			
		2.15.02.1.10.02	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi	Dokumen	3	145.000.000	1	11.000.000		75.000.000									1	11.000.000	33,33	7,59	DINAS PERHUBUNGAN			
2	2. Pengelolaan Sektor Transportasi di Kawasan Strategis Dalam Mendukung Pelestarian Lingkungan	1.03.13	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG</b>	<b>1. Persentase Terwujudnya Angkutan Umum Ramah Lingkungan di Kawasan Strategis</b>	%	59	240.848.643.285	20,5	22.921.147.884	66.038.160.833	23	7.488.713					23	7.488.713	0,01	21,75	22.928.636.597	36,86	9,52	DINAS PERHUBUNGAN			
				<b>2. Persentase Penyediaan Prasarana LLAJ di Kawasan Strategis</b>	%	54,63		13,89			13,89						13,89			13,89		25,43		DINAS PERHUBUNGAN			
				<b>3. Persentase Penyediaan Moda Angkutan Tradisional di Kawasan Strategis</b>	%	95		33,25			33,85						33,85			33,55		35,32		DINAS PERHUBUNGAN			
				<b>4. Persentase Penyediaan Satuan Ruang Parkir di Tempat Khusus Parkir Pada Kawasan Strategis</b>	%	100		100			25						25			62,5		62,50		DINAS PERHUBUNGAN			
				<b>5. Persentase Pengendalian dan Pengawasan Lalu Lintas Pada Kawasan Strategis</b>	%	74,73		67,62			44,93						44,93			56,275		75,30		DINAS PERHUBUNGAN			
		1.03.13.5.02	<b>Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten</b>	<b>Persentase Jumlah Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten</b>	%	100	240.848.643.285	100	22.921.147.884	66.038.160.833		7.488.713					7.488.713	0,01	50	22.928.636.597	50,00	9,52	DINAS PERHUBUNGAN				
		1.03.13.5.02.01	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu	Dokumen	109	137.156.068.285	18	18.959.392.157	34.314.490.833		7.488.713					7.488.713	0,02	18	18.966.880.870	16,51	13,83	DINAS PERHUBUNGAN				
		1.03.13.5.02.03	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu	Dokumen	24	25.812.200.000	1	966.930.630	6.756.050.000									1	966.930.630	4,17	3,75	DINAS PERHUBUNGAN				
Rata-rata capaian kinerja (%)							1.256.014.860.976		123.660.547.904	382.994.196.964		7.488.713					7.488.713	0,00		123.668.036.617	23,01	9,85					
Predikat Kinerja																	SR	SR				SR	SR				
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																											
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																											

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100			15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13/8x100	15 = 7 + 13	16 = 15 / 6 x 100%	17											
		1.03.13.5.02.04	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh	umlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh	Dokumen	10	10.164.480.000	1	135.231.995		2.910.000.000									1	135.231.995	10,00	1,33	DINAS PERHUBUNGAN			
		1.03.13.5.02.05	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Makam Raja Raja Mataram Imogiri	Dokumen	5	4.103.800.000	1	511.505.788		1.000.000.000									1	511.505.788	20,00	12,46	DINAS PERHUBUNGAN			
		1.03.13.5.02.06	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Candi Prambanan-Candi Ijo	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Candi Prambanan-Candi Ijo	Dokumen	7	4.831.620.000				1.981.620.000														DINAS PERHUBUNGAN		
		1.03.13.5.02.07	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kotabaru	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kota Baru	Dokumen	3	2.500.000.000	1	211.540.970		2.220.000.000									1	211.540.970	33,33	8,46	DINAS PERHUBUNGAN			
		1.03.13.5.02.08	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Merapi	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Merapi	Dokumen	16	16.822.275.000	1	966.961.078		4.295.000.000									1	966.961.078	6,25	5,75	DINAS PERHUBUNGAN			
		1.03.13.5.02.09	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kotagede	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kota Gede	Dokumen	3	1.340.000.000				140.000.000														DINAS PERHUBUNGAN		
		1.03.13.5.02.10	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas-Parangtritis	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Samas - Parangtritis	Dokumen	9	9.000.000.000	1	135.231.995		3.525.000.000									1	135.231.995	11,11	1,50	DINAS PERHUBUNGAN			
		1.03.13.5.02.11	Pemanfaatan Ruang Kawasan Kiskendo-Sermo- Wates	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kiskendo-Sermo-Wates	Dokumen	3	1.200.000.000				0														DINAS PERHUBUNGAN		
		1.03.13.5.02.12	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kerto-Pleret	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kerto-Pleret	Dokumen	7	5.977.200.000	3	334.826.877		1.800.000.000									3	334.826.877	42,86	5,60	DINAS PERHUBUNGAN			
		1.03.13.5.02.13	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Kulon Progo	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Kulon Progo	Dokumen	4	5.200.000.000				1.800.000.000														DINAS PERHUBUNGAN		
		1.03.13.5.02.14	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karaton	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karaton	Dokumen	4	1.720.000.000	2	211.265.970		320.000.000									2	211.265.970	50,00	12,28	DINAS PERHUBUNGAN			
		1.03.13.5.02.15	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sokoliman	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sokoliman	Dokumen	5	3.525.000.000				1.250.000.000														DINAS PERHUBUNGAN		
Rata-rata capaian kinerja (%)							1.256.014.860.976		123.660.547.904		382.994.196.964		7.488.713						7.488.713		0,00		123.668.036.617	23,01	9,85		
Predikat Kinerja																			SR	SR					SR	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																											
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																											

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)				Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		1.03.13.5.02.16	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Puro Pakualaman	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Puro Pakualaman	Dokumen	1	50.000.000					50.000.000																	DINAS PERHUBUNGAN
		1.03.13.5.02.17	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Makam Girindo	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Makam Girigondo	Dokumen	1	3.396.000.000					3.396.000.000																	DINAS PERHUBUNGAN
		1.03.13.5.02.18	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Gunungkidul	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Gunungkidul	Dokumen	2	5.400.000.000	6	277.094.454			0												6	277.094.454	300,00	5,13	DINAS PERHUBUNGAN	
		1.03.13.5.02.19	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Masjid Pathok Nagoro	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Masjid Pathok Nagoro	Dokumen	7	2.650.000.000	1	211.165.970			280.000.000												1	211.165.970	14,29	7,97	DINAS PERHUBUNGAN	
3	3. Meningkatkan Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah	0.00.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai	94,69	131.945.532.816	92,87	19.499.572.174			28.832.698.354	86,35											179,22	19.499.572.174	189,27	14,78	DINAS PERHUBUNGAN	
		0.00.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	0	571.000.000	100	39.753.541			143.500.000												50	39.753.541		6,96	DINAS PERHUBUNGAN	
		0.00.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	16	265.000.000	4	19.951.314			66.000.000												4	19.951.314	25,00	7,53	DINAS PERHUBUNGAN	
		0.00.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	16	82.000.000	4	9.925.365			21.500.000												4	9.925.365	25,00	12,10	DINAS PERHUBUNGAN	
		0.00.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	12	224.000.000	3	9.876.862			56.000.000												3	9.876.862	25,00	4,41	DINAS PERHUBUNGAN	
		0.00.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	0	77.746.491.585	100	13.553.732.187			15.696.489.428												50	13.553.732.187		17,43	DINAS PERHUBUNGAN	
		0.00.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	122	76.852.464.785	112	13.392.603.077			15.477.496.578												112	13.392.603.077	91,80	17,43	DINAS PERHUBUNGAN	
		0.00.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	16	655.885.000	2	128.448.168			163.052.000												2	128.448.168	12,50	19,58	DINAS PERHUBUNGAN	
Rata-rata capaian kinerja (%)							1.256.014.860.976	123.660.547.904	382.994.196.964	7.488.713							7.488.713	0,00					123.668.036.617	23,01	9,85				
Predikat Kinerja																	SR	SR								SR	SR		
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																													
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																													
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																													
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																													

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
						6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100			15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%				
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17			
		0.00.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	12	74.461.475	2	10.884.437		17.765.825													2	10.884.437	16,67	14,62	DINAS PERHUBUNGAN			
		0.00.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	140	163.680.325	17	21.796.505		38.175.025													17	21.796.505	12,14	13,32	DINAS PERHUBUNGAN			
		<b>0.00.01.1.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>%</b>	<b>0</b>	<b>33.992.000</b>	<b>100</b>	<b>4.885.852</b>		<b>7.731.000</b>													<b>50</b>	<b>4.885.852</b>		<b>14,37</b>	<b>DINAS PERHUBUNGAN</b>			
		0.00.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	29	33.992.000	5	4.885.852		7.731.000													5	4.885.852	17,24	14,37	DINAS PERHUBUNGAN			
		<b>0.00.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Penyediaan peralatan rumah tangga dan penunjang pelayanan adminitrasi perkantoran</b>	<b>%</b>	<b>0</b>	<b>6.194.170.340</b>	<b>100</b>	<b>376.425.598</b>		<b>1.354.265.600</b>													<b>50</b>	<b>376.425.598</b>		<b>6,08</b>	<b>DINAS PERHUBUNGAN</b>			
		0.00.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	46	185.755.000	7	22.684.044		42.800.000													7	22.684.044	15,22	12,21	DINAS PERHUBUNGAN			
		0.00.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	236	1.211.967.700	17	96.819.891		237.776.000													17	96.819.891	7,20	7,99	DINAS PERHUBUNGAN			
		0.00.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	60	154.195.200	4	21.171.293		37.734.400													4	21.171.293	6,67	13,73	DINAS PERHUBUNGAN			
		0.00.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	76	588.569.200	10	19.243.299		137.132.800													10	19.243.299	13,16	3,27	DINAS PERHUBUNGAN			
		0.00.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	17	37.582.524	1	1.644.000		8.205.400													1	1.644.000	5,88	4,37	DINAS PERHUBUNGAN			
		0.00.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	0	0		0		0																	DINAS PERHUBUNGAN			
		0.00.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	123	2.346.100.716	2	214.863.071		485.617.000													2	214.863.071	1,63	9,16	DINAS PERHUBUNGAN			
Rata-rata capaian kinerja (%)							1.256.014.860.976		123.660.547.904		382.994.196.964		7.488.713												7.488.713	0,00		123.668.036.617	23,01	9,85	
Predikat Kinerja																															
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																															
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																															
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																															
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																															

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						6	Rp	7	Rp	8	Rp	I		II		III		IV		13	14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%			
												K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K		Rp	K	Rp	K
1	2	3	4	5		6	Rp	7	Rp	8	Rp	9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
		0.00.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	48	400.000.000			100.000.000																		DINAS PERHUBUNGAN
		0.00.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	9	1.270.000.000			305.000.000																		DINAS PERHUBUNGAN
		<b>0.00.01.1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>pengadaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>%</b>	<b>0</b>	<b>3.088.515.000</b>			<b>2.422.000.000</b>																		<b>DINAS PERHUBUNGAN</b>
		0.00.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	2	2.400.000.000			2.400.000.000																		DINAS PERHUBUNGAN
		0.00.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	9	166.000.000			22.000.000																		DINAS PERHUBUNGAN
		0.00.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	19	68.750.000			0																		DINAS PERHUBUNGAN
		0.00.01.1.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	12	453.765.000			0																		DINAS PERHUBUNGAN
		<b>0.00.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dan Penunjang Pelayanan Adminitrasi Perkantoran</b>	<b>%</b>	<b>0</b>	<b>29.539.175.604</b>	<b>100</b>	<b>4.114.196.445</b>	<b>5.930.769.576</b>											<b>50</b>	<b>4.114.196.445</b>		<b>13,93</b>			<b>DINAS PERHUBUNGAN</b>	
		0.00.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	8	39.918.360	1	10.000.000	9.356.000											1	10.000.000	12,50	25,05			DINAS PERHUBUNGAN	
		0.00.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	240	4.528.812.500	25	629.875.925	891.450.000											25	629.875.925	10,42	13,91			DINAS PERHUBUNGAN	
		0.00.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	42	1.152.448.060	1	133.354.910	246.874.620											1	133.354.910	2,38	11,57			DINAS PERHUBUNGAN	
		0.00.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	240	23.817.996.684	24	3.340.965.610	4.783.088.956											24	3.340.965.610	10,00	14,03			DINAS PERHUBUNGAN	
		<b>0.00.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>%</b>	<b>0</b>	<b>14.772.188.287</b>	<b>100</b>	<b>1.410.578.551</b>	<b>3.277.942.750</b>											<b>50</b>	<b>1.410.578.551</b>		<b>9,55</b>			<b>DINAS PERHUBUNGAN</b>	
Rata-rata capaian kinerja (%)							1.256.014.860.976		123.660.547.904	382.994.196.964											7.488.713	0,00		123.668.036.617	23,01	9,85		
Predikat Kinerja																						SR	SR			SR	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																												
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																												

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100			15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13/8x100	15 = 7 + 13	16 = 15 / 6 x 100%	17											
		0.00.01.1.09.010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	32	3.743.220.000	1	50.385.000		935.805.000									1	50.385.000	3,13	1,35	DINAS PERHUBUNGAN			
		0.00.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	338	4.154.547.987	29	482.852.816		813.767.750									29	482.852.816	8,58	11,62	DINAS PERHUBUNGAN			
		0.00.01.1.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	12	59.920.500				13.800.000													DINAS PERHUBUNGAN			
		0.00.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	102	3.191.399.800	7	256.811.376		721.950.000									7	256.811.376	6,86	8,05	DINAS PERHUBUNGAN			
		0.00.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	35	3.623.100.000	1	620.529.359		792.620.000									1	620.529.359	2,86	17,13	DINAS PERHUBUNGAN			
Rata-rata capaian kinerja (%)							1.256.014.860.976		123.660.547.904		382.994.196.964		7.488.713						7.488.713	0,00		123.668.036.617	23,01	9,85			
Predikat Kinerja																			SR	SR				SR	SR		
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																											
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																											

Disusun  
Yogyakarta, 2 Mei 2025  
Kepala Dinas

0  
NIP. 0

Dievaluasi  
Yogyakarta, 2 Mei 2025  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah

NI MADE DWIPANTI INDRAYANTI, S.T., M.T.  
NIP. 197010181998032007

**EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUNGAN PROVINSI  
RENJA PERANGKAT DAERAH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERIODE PELAKSANAAN : 2025**

Indikator dan target kinerja SKPD yang mengacu pada sasaran RKPD:

Target Realisasi

1 Persentase ketercapaian sasaran perangkat daerah DIY dengan kriteria tinggi dan sangat tinggi 88.89 99.21

2 Kategori Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah 2 2

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%								
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	Terwujudnya Integrasi, Sinkronisasi, dan Efektivitas Perencanaan Pembangunan	2.20.02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>	Persentase data statistik sektoral menuju prinsip satu data pembangunan daerah	%	85	5.306.279.700	76,2	231.748.223		3.862.100.000	76,2						76,2			76,2	231.748.223	89,65	4,37	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH	
		2.20.02.1.01	<i>Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi</i>	<i>Terlaksananya Penyusunan Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral dan Terbangunnya Metadata Statistik Sektoral</i>	<i>Dokumen</i>	39	5.306.279.700	8	231.748.223		3.862.100.000										8	231.748.223	20,51	4,37	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH	
		2.20.02.1.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Dokumen	39	5.306.279.700	8	231.748.223		3.862.100.000										8	231.748.223	20,51	4,37	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH	
		5.01.02	<b>PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian pembangunan dengan peraturan perundang-undangan	%	100	18.529.037.135	100	2.226.778.344		3.861.651.000		75.301.265					75.301.265		1,95	50	2.302.079.609	50,00	12,42	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH	
		5.01.02.1.01	<i>Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</i>	<i>Terlaksananya Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)</i>	<i>Dokumen</i>	34	8.295.827.700	5	972.121.843		1.673.215.000		17.363.825					17.363.825		1,04	5	989.485.668	14,71	11,93	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH	
		5.01.02.1.01.0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen	10	563.503.000	2	65.535.009		111.683.000	0	6.463.825					0	6.463.825	5,79	2	71.998.834	20,00	12,78	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH	
Rata-rata capaian kinerja (%)							150.041.696.541		21.289.780.694		34.129.927.935		1.968.963.256					3,92	1.968.963.256	3,92	5,77		23.258.743.950	29,71	15,50	
Predikat Kinerja																		SR	SR					SR	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:						1. Komitmen pemangku kepentingan dalam melakukan koordinasi dengan instansi-instansi yang relevan dan kompeten untuk meningkatkan kualitas pengendalian. 2. Dukungan pemangku kepentingan untuk mengembangkan sistem yang dapat menjadi instrumen pendukung untuk meningkatkan kinerja pengendalian. 3. Peraturan Daerah DIY Nomor 11 Tahun 2024 ttg APBD 2025 4. Pergub DIY No 112 Tahun 2024 tentang Penjabaran APBD 2025 5. Pergub DIY Nomor 86 Tahun 2020 tentang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah 6. Pergub DIY No 74 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Bapperida DIY 7. Aplikasi Jogja plan 8. Aplikasi Sengguh 9. Aplikasi Simmangkis 10. Aplikasi/Sistem Informasi Internal (Sintal) 11. Aplikasi Jogja Dataku 12. Aplikasi Geoportal 13. Aplikasi SIHK 14. SDM yang kompeten, profesional dan koordinatif 15. Sarana dan Prasarana (komputer, laptop, printer, jaringan internet) yang mendukung																				
Faktor penghambat pencapaian kinerja:						1. Serapan anggaran yang masih belum optimal karena faktor eksternal, penyesuaian harga pasar 2. Adanya perubahan kebijakan perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah, yang menyebabkan perlunya dilakukan penyesuaian di daerah 3. Capaian Kinerja Bapperida DIY sangat dipengaruhi oleh capaian kinerja Perangkat Daerah																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):						1. Melakukan koordinasi internal dengan melibatkan semua komponen SDM BAPPERIDA DIY dalam menyusun perencanaan dan penetapan kinerja tahunan; 2.Meningkatkan evaluasi internal Bapperida DIY secara rutin; 3.Koordinasi secara intensif dengan perangkat Daerah; 4.Koordinasi insentif dengan pemerintah pusat terkait kebijakan-kebijakan yang berlaku; 5.Pengembangan sistem informasi menyesuaikan perkembangan kebutuhan/kebijakan yang berlaku																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																										

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp		
1	2	3	4	5	6		7		8		9				13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17				
		5.01.02.1.01.0006	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Dokumen	23	7.732.324.700	4	906.586.834		1.561.532.000	0	10.900.000					0	10.900.000		0,70	4	917.486.834	17,39	11,87	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH	
		<b>5.01.02.1.03</b>	<b>Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Terlaksananya Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah, dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi</b>	<b>Dokumen</b>	<b>135</b>	<b>10.233.209.435</b>	<b>28</b>	<b>1.254.656.501</b>		<b>2.188.436.000</b>		<b>57.937.440</b>						<b>57.937.440</b>		<b>2,65</b>	<b>28</b>	<b>1.312.593.941</b>	<b>20,74</b>	<b>12,83</b>	<b>BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH</b>	
		5.01.02.1.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Dokumen	124	9.898.723.335	25	1.227.906.001		2.110.894.000	2	57.937.440					2	57.937.440		2,74	27	1.285.843.441	21,77	12,99	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH	
		5.01.02.1.03.0004	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi	Dokumen	15	334.486.100	3	26.750.500		77.542.000	0						0				3	26.750.500	20,00	8,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH	
		<b>5.01.03</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>Persentase keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan (RPJMD, RENSTRA, RKPD) - Bidang Pemerintahan</b>	<b>%</b>	<b>94</b>	<b>4.359.356.000</b>	<b>100</b>	<b>619.594.472</b>		<b>849.118.000</b>	<b>100</b>	<b>81.079.290</b>					<b>100</b>	<b>81.079.290</b>		<b>9,55</b>	<b>100</b>	<b>700.673.762</b>	<b>106,38</b>	<b>16,07</b>	<b>BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH</b>	
				<b>Persentase keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan (RPJMD, RENSTRA, RKPD) - Bidang Sosial Budaya</b>	<b>%</b>	<b>94</b>		<b>100</b>				<b>100</b>						<b>100</b>					<b>100</b>			<b>BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH</b>	
				<b>Persentase keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan (RPJMD, RENSTRA, RKPD) - Bidang Perekonomian</b>	<b>%</b>	<b>94</b>		<b>100</b>				<b>100</b>						<b>100</b>					<b>100</b>			<b>BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH</b>	
				<b>Persentase keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan (RPJMD, RENSTRA, RKPD) - Bidang Sarana dan Prasarana</b>	<b>%</b>	<b>94</b>		<b>100</b>				<b>96,3</b>						<b>96,3</b>					<b>98,15</b>			<b>BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH</b>	
Rata-rata capaian kinerja (%)							150.041.696.541		21.289.780.694		34.129.927.935		1.968.963.256					3,92	1.968.963.256		3,92	5,77		23.258.743.950	29,71	15,50	
Predikat Kinerja																			SR	SR					SR	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:						1. Komitmen pemangku kepentingan dalam melakukan koordinasi dengan instansi-instansi yang relevan dan kompeten untuk meningkatkan kualitas pengendalian. 2. Dukungan pemangku kepentingan untuk mengembangkan sistem yang dapat menjadi instrumen pendukung untuk meningkatkan kinerja pengendalian. 3. Peraturan Daerah DIY Nomor 11 Tahun 2024 ttg APBD 2025 4. Pergub DIY No 112 Tahun 2024 tentang Penjabaran APBD 2025 5. Pergub DIY Nomor 86 Tahun 2020 tentang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah 6. Pergub DIY No 74 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Bapperida DIY 7. Aplikasi Jogja plan 8. Aplikasi Sengguh 9. Aplikasi Simmangkis 10. Aplikasi/Sistem Informasi Internal (Sintal) 11. Aplikasi Jogja Dataku 12. Aplikasi Geoportal 13. Aplikasi SIHK 14. SDM yang kompeten, profesional dan koordinatif 15. Sarana dan Prasarana (komputer, laptop, printer, jaringan internet) yang mendukung																					
Faktor penghambat pencapaian kinerja:						1. Serapan anggaran yang masih belum optimal karena faktor eksternal, penyesuaian harga pasar 2. Adanya perubahan kebijakan perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah, yang menyebabkan perlunya dilakukan penyesuaian di daerah 3. Capaian Kinerja Bapperida DIY sangat dipengaruhi oleh capaian kinerja Perangkat Daerah																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):						1. Melakukan koordinasi internal dengan melibatkan semua komponen SDM BAPPERIDA DIY dalam menyusun perencanaan dan penetapan kinerja tahunan; 2.Meningkatkan evaluasi internal Bapperida DIY secara rutin; 3.Koordinasi secara intensif dengan perangkat Daerah; 4.Koordinasi insentif dengan pemerintah pusat terkait kebijakan-kebijakan yang berlaku; 5.Pengembangan sistem informasi menyesuaikan perkembangan kebutuhan/kebijakan yang berlaku																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																											

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp					
1	2	3	4	5		6		7		8		9				10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17	
				Persentase Program Perangkat Daerah yang mendukung Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam dokumen perencanaan - Bidang Sosial Budaya	%	28,97		32,41				32,41									32,41					32,41			111,87		BADAN PERENCANAAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
				Persentase keselarasan antara dokumen Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) dengan dokumen perencanaan pembangunan (RKPD) - Bidang Perekonomian	%	94		100				100									100					100			106,38		BADAN PERENCANAAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
				Persentase keselarasan antara dokumen RAD GRK dengan dokumen perencanaan - Bidang Sarana dan Prasarana	%	100		100				100									100					100			100,00		BADAN PERENCANAAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
		5.01.03.1.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	8	2.826.129.500	2	447.672.350		560.105.000		58.416.270								58.416.270		10,43	2	506.088.620	25,00	17,91			BADAN PERENCANAAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH	
				Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	dokumen	20		5																	5		25,00			BADAN PERENCANAAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH	
		5.01.03.1.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	13	610.510.000	2	94.613.100		121.000.000	0	10.180.270								0	10.180.270		8,41	2	104.793.370	15,38	17,16			BADAN PERENCANAAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
		5.01.03.1.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	24	2.215.619.500	5	353.059.250		439.105.000	0	48.236.000								0	48.236.000		10,99	5	401.295.250	20,83	18,11			BADAN PERENCANAAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
		5.01.03.1.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang	Dokumen	18	610.509.900	3	87.943.300		121.000.000		10.813.020								10.813.020		8,94	3	98.756.320	16,67	16,18			BADAN PERENCANAAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH	
Rata-rata capaian kinerja (%)							150.041.696.541		21.289.780.694		34.129.927.935		1.968.963.256								3,92	1.968.963.256	3,92	5,77		23.258.743.950	29,71	15,50			
Predikat Kinerja																					SR	SR									
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:						1. Komitmen pemangku kepentingan dalam melakukan koordinasi dengan instansi-instansi yang relevan dan kompeten untuk meningkatkan kualitas pengendalian. 2. Dukungan pemangku kepentingan untuk mengembangkan sistem yang dapat menjadi instrumen pendukung untuk meningkatkan kinerja pengendalian. 3. Peraturan Daerah DIY Nomor 11 Tahun 2024 ttg APBD 2025 4. Pergub DIY No 112 Tahun 2024 tentang Penjabaran APBD 2025 5. Pergub DIY Nomor 86 Tahun 2020 tentang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah 6. Pergub DIY No 74 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Bapperida DIY 7. Aplikasi Jogja plan 8. Aplikasi Sengguh 9. Aplikasi Simmangkis 10. Aplikasi/Sistem Informasi Internal (Sintal) 11. Aplikasi Jogja Dataku 12. Aplikasi Geoportal 13. Aplikasi SIHK 14. SDM yang kompeten, profesional dan koordinatif 15. Sarana dan Prasarana (komputer, laptop, printer, jaringan internet) yang mendukung																									
Faktor penghambat pencapaian kinerja:						1. Serapan anggaran yang masih belum optimal karena faktor eksternal, penyesuaian harga pasar 2. Adanya perubahan kebijakan perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah, yang menyebabkan perlunya dilakukan penyesuaian di daerah 3. Capaian Kinerja Bapperida DIY sangat dipengaruhi oleh capaian kinerja Perangkat Daerah																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):						1. Melakukan koordinasi internal dengan melibatkan semua komponen SDM BAPPERIDA DIY dalam menyusun perencanaan dan penetapan kinerja tahunan; 2.Meningkatkan evaluasi internal Bapperida DIY secara rutin; 3.Koordinasi secara intensif dengan perangkat Daerah; 4.Koordinasi insentif dengan pemerintah pusat terkait kebijakan-kebijakan yang berlaku; 5.Pengembangan sistem informasi menyesuaikan perkembangan kebutuhan/kebijakan yang berlaku																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):						1. Melakukan koordinasi internal dengan melibatkan semua komponen SDM BAPPERIDA DIY dalam menyusun perencanaan dan penetapan kinerja tahunan; 2.Meningkatkan evaluasi internal Bapperida DIY secara rutin; 3.Koordinasi secara intensif dengan perangkat Daerah; 4.Koordinasi insentif dengan pemerintah pusat terkait kebijakan-kebijakan yang berlaku; 5.Pengembangan sistem informasi menyesuaikan perkembangan kebutuhan/kebijakan yang berlaku																									

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I	II	III	IV	13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17							
			SDA (Sumber Daya Alam)	Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																			RISET, DAN INOVASI DAERAH				
		5.01.03.1.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	14	610.509.900	3	87.943.300		121.000.000	0	10.813.020					0	10.813.020		8,94	3	98.756.320	21,43	16,18	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH	
		5.01.03.1.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	15	922.716.600	3	83.978.822		168.013.000		11.850.000						11.850.000		7,05	3	95.828.822	20,00	10,39	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH	
		5.01.03.1.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	15	922.716.600	3	83.978.822		168.013.000	0	11.850.000					0	11.850.000		7,05	3	95.828.822	20,00	10,39	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH	
		5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah	%	85	1.709.304.100	81,37	127.249.133		352.304.000	81,37	16.947.007					81,37	16.947.007		4,81	81,37	144.196.140	95,73	8,44	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH	
				Persentase inovasi daerah yang memenuhi kriteria kompetisi inovasi tingkat nasional	%	70		60,26				60,26						60,26				60,26		86,09		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH	
		5.05.02.1.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Terlaksananya penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Laporan	2	29.095.000														nan					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH	
		5.05.02.1.01.02	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Laporan	2	29.095.000				0															BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH	
		5.05.02.1.02	Penelitian dan Pengembangan	Terlaksananya penyusunan Dokumen Hasil Penelitian dan	Dokumen	8	521.974.100	1	31.509.039		116.922.000		2.969.085						2.969.085		2,54	1	34.478.124	12,50	6,61	BADAN PERENCANAAN	
Rata-rata capaian kinerja (%)						150.041.696.541		21.289.780.694		34.129.927.935		1.968.963.256							3,92	1.968.963.256	3,92	5,77		23.258.743.950	29,71	15,50	
Predikat Kinerja																			SR	SR					SR	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:					1. Komitmen pemangku kepentingan dalam melakukan koordinasi dengan instansi-instansi yang relevan dan kompeten untuk meningkatkan kualitas pengendalian. 2. Dukungan pemangku kepentingan untuk mengembangkan sistem yang dapat menjadi instrumen pendukung untuk meningkatkan kinerja pengendalian. 3. Peraturan Daerah DIY Nomor 11 Tahun 2024 ttg APBD 2025 4. Pergub DIY No 112 Tahun 2024 tentang Penjabaran APBD 2025 5. Pergub DIY Nomor 86 Tahun 2020 tentang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah 6. Pergub DIY No 74 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Bapperida DIY 7. Aplikasi Jogja plan 8. Aplikasi Sengguh 9. Aplikasi Simnangkis 10. Aplikasi/Sistem Informasi Internal (Sintal) 11. Aplikasi Jogja Dataku 12. Aplikasi Geoportal 13. Aplikasi SIHK 14. SDM yang kompeten, profesional dan koordinatif 15. Sarana dan Prasarana (komputer, laptop, printer, jaringan internet) yang mendukung																						
Faktor penghambat pencapaian kinerja:					1. Serapan anggaran yang masih belum optimal karena faktor eksternal, penyesuaian harga pasar 2. Adanya perubahan kebijakan perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah, yang menyebabkan perlunya dilakukan penyesuaian di daerah 3. Capaian Kinerja Bapperida DIY sangat dipengaruhi oleh capaian kinerja Perangkat Daerah																						
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):					1. Melakukan koordinasi internal dengan melibatkan semua komponen SDM BAPPERIDA DIY dalam menyusun perencanaan dan penetapan kinerja tahunan; 2.Meningkatkan evaluasi internal Bapperida DIY secara rutin; 3.Koordinasi secara intensif dengan perangkat Daerah; 4.Koordinasi insentif dengan pemerintah pusat terkait kebijakan-kebijakan yang berlaku; 5.Pengembangan sistem informasi menyesuaikan perkembangan kebutuhan/kebijakan yang berlaku																						
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):					1. Melakukan koordinasi internal dengan melibatkan semua komponen SDM BAPPERIDA DIY dalam menyusun perencanaan dan penetapan kinerja tahunan; 2.Meningkatkan evaluasi internal Bapperida DIY secara rutin; 3.Koordinasi secara intensif dengan perangkat Daerah; 4.Koordinasi insentif dengan pemerintah pusat terkait kebijakan-kebijakan yang berlaku; 5.Pengembangan sistem informasi menyesuaikan perkembangan kebutuhan/kebijakan yang berlaku																						

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10	11	12	13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			<i>Bidang Sosial dan Kependudukan</i>	<i>Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial</i>																					<b>PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH</b>	
		5.05.02.1.02.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Dokumen	8	521.974.100	1	31.509.039		116.922.000	0	2.969.085				0	2.969.085	2,54	1	34.478.124	12,50	6,61	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH		
		<b>5.05.02.1.03</b>	<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan</b>	<b>Terlaksananya penyusunan Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah</b>	<b>Dokumen</b>	<b>4</b>													<i>nan</i>					<b>BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH</b>		
		5.05.02.1.03.01	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	undefined	0	0				0													BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH		
		<b>5.05.02.1.04</b>	<b>Pengembangan Inovasi dan Teknologi</b>	<b>Terlaksananya Penyusunan Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan</b>	<b>Laporan</b>	<b>25</b>	<b>1.158.235.000</b>	<b>5</b>	<b>95.740.094</b>		<b>235.382.000</b>		<b>13.977.922</b>					<b>13.977.922</b>	<b>5,94</b>	<b>5</b>	<b>109.718.016</b>	<b>20,00</b>	<b>9,47</b>	<b>BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH</b>		
		5.05.02.1.04.01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Dokumen	20	993.100.000	5	95.740.094		235.382.000	0	13.977.922				0	13.977.922	5,94	5	109.718.016	25,00	11,05	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH		
		5.05.02.1.04.04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Dokumen	5	165.135.000				0													BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH		
<b>2</b>	<b>Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah</b>	<b>5.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>%</b>	<b>96</b>	<b>118.822.719.606</b>	<b>93,05</b>	<b>18.084.410.522</b>	<b>95,16</b>	<b>25.204.754.935</b>	<b>93,05</b>	<b>1.795.635.694</b>					<b>93,05</b>	<b>1.795.635.694</b>	<b>97,78</b>	<b>7,12</b>	<b>93,05</b>	<b>19.880.046.216</b>	<b>96,93</b>	<b>16,73</b>	<b>BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH</b>
		<b>5.01.01.1.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan</b>	<b>Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Dokumen DPA-SKPD dan</b>	<b>Dokumen</b>	<b>150</b>	<b>469.154.100</b>	<b>29</b>	<b>57.027.255</b>		<b>92.984.000</b>		<b>6.486.500</b>					<b>6.486.500</b>	<b>6,98</b>	<b>29</b>	<b>63.513.755</b>	<b>19,33</b>	<b>13,54</b>	<b>BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,</b>		
Rata-rata capaian kinerja (%)							150.041.696.541		21.289.780.694		34.129.927.935		1.968.963.256					3,92	1.968.963.256	3,92	5,77		23.258.743.950	29,71	15,50	
Predikat Kinerja																			SR	SR				SR	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:						1. Komitmen pemangku kepentingan dalam melakukan koordinasi dengan instansi-instansi yang relevan dan kompeten untuk meningkatkan kualitas pengendalian. 2. Dukungan pemangku kepentingan untuk mengembangkan sistem yang dapat menjadi instrumen pendukung untuk meningkatkan kinerja pengendalian. 3. Peraturan Daerah DIY Nomor 11 Tahun 2024 ttg APBD 2025 4. Pergub DIY No 112 Tahun 2024 tentang Penjabaran APBD 2025 5. Pergub DIY Nomor 86 Tahun 2020 tentang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah 6. Pergub DIY No 74 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Bapperida DIY 7. Aplikasi Jogja plan 8. Aplikasi Sengguh 9. Aplikasi Simmangkis 10. Aplikasi/Sistem Informasi Internal (Sintal) 11. Aplikasi Jogja Dataku 12. Aplikasi Geoportal 13. Aplikasi SIHK 14. SDM yang kompeten, profesional dan koordinatif 15. Sarana dan Prasarana (komputer, laptop, printer, jaringan internet) yang mendukung																				
Faktor penghambat pencapaian kinerja:						1. Serapan anggaran yang masih belum optimal karena faktor eksternal, penyesuaian harga pasar 2. Adanya perubahan kebijakan perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah, yang menyebabkan perlunya dilakukan penyesuaian di daerah 3. Capaian Kinerja Bapperida DIY sangat dipengaruhi oleh capaian kinerja Perangkat Daerah																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):						1. Melakukan koordinasi internal dengan melibatkan semua komponen SDM BAPPERIDA DIY dalam menyusun perencanaan dan penetapan kinerja tahunan; 2.Meningkatkan evaluasi internal Bapperida DIY secara rutin; 3.Koordinasi secara intensif dengan perangkat Daerah; 4.Koordinasi insentif dengan pemerintah pusat terkait kebijakan-kebijakan yang berlaku; 5.Pengembangan sistem informasi menyesuaikan perkembangan kebutuhan/kebijakan yang berlaku																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):						1. Melakukan koordinasi internal dengan melibatkan semua komponen SDM BAPPERIDA DIY dalam menyusun perencanaan dan penetapan kinerja tahunan; 2.Meningkatkan evaluasi internal Bapperida DIY secara rutin; 3.Koordinasi secara intensif dengan perangkat Daerah; 4.Koordinasi insentif dengan pemerintah pusat terkait kebijakan-kebijakan yang berlaku; 5.Pengembangan sistem informasi menyesuaikan perkembangan kebutuhan/kebijakan yang berlaku																				

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp					
1	2	3	4	5		6		7		8		9				10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
			<b>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD, Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>																										<b>RISET, DAN INOVASI DAERAH</b>
		5.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	20	157.401.800	3	13.606.700		31.196.000	1	2.383.000							1	2.383.000		7,64	4	15.989.700	20,00	10,16	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH		
		5.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	24	120.184.500	4	14.709.500	4	23.820.000	0								0				4	14.709.500	16,67	12,24	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH		
		5.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	132	191.567.800	22	28.711.055		37.968.000	3	4.103.500							3	4.103.500		10,81	25	32.814.555	18,94	17,13	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH		
		<b>5.01.01.1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Terlaksananya penerimaan gaji dan Tunjangan ASN; Penyusunan Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD; Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</b>	<b>dokumen /laporan /org/bln</b>	<b>715</b>	<b>93.682.968.209</b>	<b>131</b>	<b>16.125.297.980</b>		<b>18.783.232.935</b>		<b>1.572.491.908</b>								<b>1.572.491.908</b>		<b>8,37</b>	<b>131</b>	<b>17.697.789.888</b>	<b>18,32</b>	<b>18,89</b>	<b>BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH</b>		
		5.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	undefined	630	93.007.798.999	115	16.044.471.750		18.649.416.935	115	1.557.625.658							115	1.557.625.658		8,35	230	17.602.097.408	36,51	18,93	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH		
		5.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	10	474.308.210	2	56.571.250		94.006.000	0	2.954.600							0	2.954.600		3,14	2	59.525.850	20,00	12,55	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH		
		5.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil	Dokumen	10	54.800.600	4	8.223.540		10.861.000		2.337.750								2.337.750		21,52	4	10.561.290	40,00	19,27	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,		
Rata-rata capaian kinerja (%)							150.041.696.541		21.289.780.694		34.129.927.935		1.968.963.256							3,92	1.968.963.256	3,92	5,77		23.258.743.950	29,71	15,50			
Predikat Kinerja																					SR	SR					SR	SR		
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:						1. Komitmen pemangku kepentingan dalam melakukan koordinasi dengan instansi-instansi yang relevan dan kompeten untuk meningkatkan kualitas pengendalian. 2. Dukungan pemangku kepentingan untuk mengembangkan sistem yang dapat menjadi instrumen pendukung untuk meningkatkan kinerja pengendalian. 3. Peraturan Daerah DIY Nomor 11 Tahun 2024 ttg APBD 2025 4. Pergub DIY No 112 Tahun 2024 tentang Penjabaran APBD 2025 5. Pergub DIY Nomor 86 Tahun 2020 tentang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah 6. Pergub DIY No 74 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Bapperida DIY 7. Aplikasi Jogja plan 8. Aplikasi Sengguh 9. Aplikasi Simmangkis 10. Aplikasi/Sistem Informasi Internal (Sintal) 11. Aplikasi Jogja Dataku 12. Aplikasi Geoportal 13. Aplikasi SIHK 14. SDM yang kompeten, profesional dan koordinatif 15. Sarana dan Prasarana (komputer, laptop, printer, jaringan internet) yang mendukung																								
Faktor penghambat pencapaian kinerja:						1. Serapan anggaran yang masih belum optimal karena faktor eksternal, penyesuaian harga pasar 2. Adanya perubahan kebijakan perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah, yang menyebabkan perlunya dilakukan penyesuaian di daerah 3. Capaian Kinerja Bapperida DIY sangat dipengaruhi oleh capaian kinerja Perangkat Daerah																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):						1. Melakukan koordinasi internal dengan melibatkan semua komponen SDM BAPPERIDA DIY dalam menyusun perencanaan dan penetapan kinerja tahunan; 2.Meningkatkan evaluasi internal Bapperida DIY secara rutin; 3.Koordinasi secara intensif dengan perangkat Daerah; 4.Koordinasi insentif dengan pemerintah pusat terkait kebijakan-kebijakan yang berlaku; 5.Pengembangan sistem informasi menyesuaikan perkembangan kebutuhan/kebijakan yang berlaku																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):						1. Melakukan koordinasi internal dengan melibatkan semua komponen SDM BAPPERIDA DIY dalam menyusun perencanaan dan penetapan kinerja tahunan; 2.Meningkatkan evaluasi internal Bapperida DIY secara rutin; 3.Koordinasi secara intensif dengan perangkat Daerah; 4.Koordinasi insentif dengan pemerintah pusat terkait kebijakan-kebijakan yang berlaku; 5.Pengembangan sistem informasi menyesuaikan perkembangan kebutuhan/kebijakan yang berlaku																								

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab										
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				K	Rp		K	Rp								
1	2	3	4	5		6		7		8		9				13	14 = 13/8x100	15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17								
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																			RISET, DAN INOVASI DAERAH							
		5.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dokumen	65	146.060.400	13	16.031.440		28.949.000							9.573.900						9.573.900	33,07	13	25.605.340	20,00	17,53	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
		5.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya penyusunan Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	60	122.348.000	6	19.739.600		24.249.000							1.900.000						1.900.000	7,84	6	21.639.600	10,00	17,69	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
		5.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	undefined	60	122.348.000	6	19.739.600	12	24.249.000	0					0	1.900.000						1.900.000	7,84	6	21.639.600	10,00	17,69	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
		5.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya penyusunan Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	dokumen	65	912.538.200	13	56.305.639		184.720.000							1.400.000						1.400.000	0,76	13	57.705.639	20,00	6,32	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
		5.01.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	undefined	65	912.538.200	13	56.305.639		184.720.000	2					2	1.400.000						1.400.000	0,76	15	57.705.639	23,08	6,32	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
		5.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Peralatan Rumah Tangga, Barang Cetak dan Penggandaan, Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan dan Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD dan Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	paket/ dokumen /laporan	139	6.814.051.807	14	530.961.493		1.363.306.000							122.870.274						122.870.274	9,01	14	653.831.767	10,07	9,60	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
		5.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis	10	109.836.900	2	10.901.021		21.769.000	1					1	11.688.829						11.688.829	53,69	3	22.589.850	30,00	20,57	BADAN PERENCANAAN
Rata-rata capaian kinerja (%)							150.041.696.541		21.289.780.694		34.129.927.935						3,92	1.968.963.256	3,92	5,77				23.258.743.950	29,71	15,50				
Predikat Kinerja																	SR	SR												
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:						1. Komitmen pemangku kepentingan dalam melakukan koordinasi dengan instansi-instansi yang relevan dan kompeten untuk meningkatkan kualitas pengendalian. 2. Dukungan pemangku kepentingan untuk mengembangkan sistem yang dapat menjadi instrumen pendukung untuk meningkatkan kinerja pengendalian. 3. Peraturan Daerah DIY Nomor 11 Tahun 2024 ttg APBD 2025 4. Pergub DIY No 112 Tahun 2024 tentang Penjabaran APBD 2025 5. Pergub DIY Nomor 86 Tahun 2020 tentang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah 6. Pergub DIY No 74 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Bapperida DIY 7. Aplikasi Jogja plan 8. Aplikasi Sengguh 9. Aplikasi Simmangki 10. Aplikasi/Sistem Informasi Internal (Sintal) 11. Aplikasi Jogja Dataku 12. Aplikasi Geoportal 13. Aplikasi SIHK 14. SDM yang kompeten, profesional dan koordinatif 15. Sarana dan Prasarana (komputer, laptop, printer, jaringan internet) yang mendukung																								
Faktor penghambat pencapaian kinerja:						1. Serapan anggaran yang masih belum optimal karena faktor eksternal, penyesuaian harga pasar 2. Adanya perubahan kebijakan perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah, yang menyebabkan perlunya dilakukan penyesuaian di daerah 3. Capaian Kinerja Bapperida DIY sangat dipengaruhi oleh capaian kinerja Perangkat Daerah																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):						1. Melakukan koordinasi internal dengan melibatkan semua komponen SDM BAPPERIDA DIY dalam menyusun perencanaan dan penetapan kinerja tahunan; 2.Meningkatkan evaluasi internal Bapperida DIY secara rutin; 3.Koordinasi secara intensif dengan perangkat Daerah; 4.Koordinasi insentif dengan pemerintah pusat terkait kebijakan-kebijakan yang berlaku; 5.Pengembangan sistem informasi menyesuaikan perkembangan kebutuhan/kebijakan yang berlaku																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):						1. Melakukan koordinasi internal dengan melibatkan semua komponen SDM BAPPERIDA DIY dalam menyusun perencanaan dan penetapan kinerja tahunan; 2.Meningkatkan evaluasi internal Bapperida DIY secara rutin; 3.Koordinasi secara intensif dengan perangkat Daerah; 4.Koordinasi insentif dengan pemerintah pusat terkait kebijakan-kebijakan yang berlaku; 5.Pengembangan sistem informasi menyesuaikan perkembangan kebutuhan/kebijakan yang berlaku																								

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp			
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17	
			Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	yang Disediakan																							PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH	
		5.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jenis	15	475.345.100	3	48.414.152		94.211.000	3	52.298.800						3	52.298.800		55,51	6	100.712.952	40,00	21,19	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH	
		5.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jenis	15	308.221.600	3	36.681.477	2	61.088.000	2	24.281.191						2	24.281.191	100,00	39,75	5	60.962.668	33,33	19,78	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH	
		5.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	undefined	20	323.283.700	4	24.529.054	1	64.073.000	1	17.711.662						1	17.711.662	100,00	27,64	5	42.240.716	25,00	13,07	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH	
		5.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jenis	26	90.831.600	5	9.707.000		18.002.000	3	1.900.000						3	1.900.000		10,55	8	11.607.000	30,77	12,78	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH	
		5.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	undefined	30	4.751.823.407	6	325.383.216	2	939.163.000		14.741.042							14.741.042		1,57	6	340.124.258	20,00	7,16	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH	
		5.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	undefined	9	754.709.500	1	75.345.573		165.000.000	0	248.750						0	248.750		0,15	1	75.594.323	11,11	10,02	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH	
		<b>5.01.01.1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Mebel, dan Peralatan dan Mesin Lainnya, dan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</b>	<b>unit/ paket</b>	<b>346</b>	<b>5.475.551.500</b>	<b>12</b>	<b>295.179.000</b>		<b>805.257.000</b>												<b>12</b>	<b>295.179.000</b>	<b>3,47</b>	<b>5,39</b>	<b>BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH</b>	
		0.00.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	8	200.000.000				50.000.000																BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,	
Rata-rata capaian kinerja (%)							150.041.696.541		21.289.780.694		34.129.927.935		1.968.963.256						3,92	1.968.963.256	3,92	5,77		23.258.743.950	29,71	15,50		
Predikat Kinerja																			SR	SR						SR	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:						1. Komitmen pemangku kepentingan dalam melakukan koordinasi dengan instansi-instansi yang relevan dan kompeten untuk meningkatkan kualitas pengendalian. 2. Dukungan pemangku kepentingan untuk mengembangkan sistem yang dapat menjadi instrumen pendukung untuk meningkatkan kinerja pengendalian. 3. Peraturan Daerah DIY Nomor 11 Tahun 2024 ttg APBD 2025 4. Pergub DIY No 112 Tahun 2024 tentang Penjabaran APBD 2025 5. Pergub DIY Nomor 86 Tahun 2020 tentang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah 6. Pergub DIY No 74 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Bapperida DIY 7. Aplikasi Jogja plan 8. Aplikasi Sengguh 9. Aplikasi Simmangkis 10. Aplikasi/Sistem Informasi Internal (Sintal) 11. Aplikasi Jogja Dataku 12. Aplikasi Geoportal 13. Aplikasi SIHK 14. SDM yang kompeten, profesional dan koordinatif 15. Sarana dan Prasarana (komputer, laptop, printer, jaringan internet) yang mendukung																						
Faktor penghambat pencapaian kinerja:						1. Serapan anggaran yang masih belum optimal karena faktor eksternal, penyesuaian harga pasar 2. Adanya perubahan kebijakan perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah, yang menyebabkan perlunya dilakukan penyesuaian di daerah 3. Capaian Kinerja Bapperida DIY sangat dipengaruhi oleh capaian kinerja Perangkat Daerah																						
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):						1. Melakukan koordinasi internal dengan melibatkan semua komponen SDM BAPPERIDA DIY dalam menyusun perencanaan dan penetapan kinerja tahunan; 2.Meningkatkan evaluasi internal Bapperida DIY secara rutin; 3.Koordinasi secara intensif dengan perangkat Daerah; 4.Koordinasi insentif dengan pemerintah pusat terkait kebijakan-kebijakan yang berlaku; 5.Pengembangan sistem informasi menyesuaikan perkembangan kebutuhan/kebijakan yang berlaku																						
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):						1. Melakukan koordinasi internal dengan melibatkan semua komponen SDM BAPPERIDA DIY dalam menyusun perencanaan dan penetapan kinerja tahunan; 2.Meningkatkan evaluasi internal Bapperida DIY secara rutin; 3.Koordinasi secara intensif dengan perangkat Daerah; 4.Koordinasi insentif dengan pemerintah pusat terkait kebijakan-kebijakan yang berlaku; 5.Pengembangan sistem informasi menyesuaikan perkembangan kebutuhan/kebijakan yang berlaku																						

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab														
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						K	Rp	K	Rp										
1	2	3	4	5	6		7		8		9				13	14 = 13/8x100	15 = 7 + 13	16 = 15 / 6 x 100%	17													
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp												
		0.00.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	5	719.470.800			147.000.000	0											RISET, DAN INOVASI DAERAH										
		5.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	175	2.854.793.000	13	226.649.000	1	511.000.000									13	226.649.000	7,43	7,94	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH								
		5.01.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	48	1.701.287.700	1	68.530.000		97.257.000	0								0		1	68.530.000	2,08	4,03	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH						
		<b>5.01.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dan Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.</b>	<b>Laporan</b>	<b>45</b>	<b>3.136.359.060</b>	<b>6</b>	<b>496.471.818</b>	<b>3</b>	<b>621.611.000</b>									<b>54.853.468</b>					<b>54.853.468</b>		<b>8,82</b>	<b>6</b>	<b>551.325.286</b>	<b>13,33</b>	<b>17,58</b>	<b>BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH</b>
		5.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bulan	10	70.370.000	2	8.235.000		13.947.000	0								0		2	8.235.000	20,00	11,70	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH						
		5.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Bulan	10	413.169.900	1	39.230.318		81.888.000	0	6.442.388							0	6.442.388	7,87	1	45.672.706	10,00	11,05	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH					
		5.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Bulan	10	326.788.560	1	51.181.000		64.768.000	0	4.391.296							0	4.391.296	6,78	1	55.572.296	10,00	17,01	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH					
		5.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Bulan	15	2.326.030.600	3	397.825.500	1	461.008.000	0	44.019.784							0	44.019.784	9,55	3	441.845.284	20,00	19,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH					
Rata-rata capaian kinerja (%)							150.041.696.541		21.289.780.694		34.129.927.935		1.968.963.256							3,92	1.968.963.256	3,92	5,77			23.258.743.950	29,71	15,50				
Predikat Kinerja																					SR	SR						SR	SR			
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:						1. Komitmen pemangku kepentingan dalam melakukan koordinasi dengan instansi-instansi yang relevan dan kompeten untuk meningkatkan kualitas pengendalian. 2. Dukungan pemangku kepentingan untuk mengembangkan sistem yang dapat menjadi instrumen pendukung untuk meningkatkan kinerja pengendalian. 3. Peraturan Daerah DIY Nomor 11 Tahun 2024 ttg APBD 2025 4. Pergub DIY No 112 Tahun 2024 tentang Penjabaran APBD 2025 5. Pergub DIY Nomor 86 Tahun 2020 tentang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah 6. Pergub DIY No 74 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Bapperida DIY 7. Aplikasi Jogja Data 8. Aplikasi Sengguh 9. Aplikasi Simanggis 10. Aplikasi/Sistem Informasi Internal (Sintal) 11. Aplikasi Jogja Dataku 12. Aplikasi Geoportal 13. Aplikasi SIHK 14. SDM yang kompeten, profesional dan koordinatif 15. Sarana dan Prasarana (komputer, laptop, printer, jaringan internet) yang mendukung																										
Faktor penghambat pencapaian kinerja:						1. Serapan anggaran yang masih belum optimal karena faktor eksternal, penyesuaian harga pasar 2. Adanya perubahan kebijakan perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah, yang menyebabkan perlunya dilakukan penyesuaian di daerah 3. Capaian Kinerja Bapperida DIY sangat dipengaruhi oleh capaian kinerja Perangkat Daerah																										
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):						1. Melakukan koordinasi internal dengan melibatkan semua komponen SDM BAPPERIDA DIY dalam menyusun perencanaan dan penetapan kinerja tahunan; 2.Meningkatkan evaluasi internal Bapperida DIY secara rutin; 3.Koordinasi secara intensif dengan perangkat Daerah; 4.Koordinasi insentif dengan pemerintah pusat terkait kebijakan-kebijakan yang berlaku; 5.Pengembangan sistem informasi menyesuaikan perkembangan kebutuhan/kebijakan yang berlaku																										
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																																

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5		6		7		8		9				13	14 = 13/8x100	15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17				
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		5.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan dan pembayaran pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, pemeliharaan dan pembayaran pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, pemeliharaan dan pembayaran perizinan Alat Besar, pemeliharaan mebel, pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dan pemeliharaan/rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.	Unit	1.185	8.209.748.730	168	503.427.737	27	3.329.395.000		35.633.544				35.633.544		1,07	168	539.061.281	14,18	6,57	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH		
		5.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	5	210.102.600	1	29.316.500		41.643.000	1	4.500.000				1	4.500.000		10,81	2	33.816.500	40,00	16,10	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH	
		5.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	67	1.621.589.400	9	168.270.148		321.394.000	0	17.508.544				17.508.544		5,45	9	185.778.692	13,43	11,46	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH		
		5.01.01.1.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Unit	5	61.968.000	1	10.150.000		12.282.000	0									1	10.150.000	20,00	16,38	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH	
		5.01.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	298	79.096.400	21	10.990.000		15.677.000	0									21	10.990.000	7,05	13,89	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH	
		5.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	417	394.540.400	102	54.755.400		78.196.000	18	8.875.000				18	8.875.000		11,35	120	63.630.400	28,78	16,13	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH	
Rata-rata capaian kinerja (%)							150.041.696.541		21.289.780.694		34.129.927.935		1.968.963.256				3,92	1.968.963.256	3,92	5,77		23.258.743.950	29,71	15,50		
Predikat Kinerja																		SR	SR					SR	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:						1. Komitmen pemangku kepentingan dalam melakukan koordinasi dengan instansi-instansi yang relevan dan kompeten untuk meningkatkan kualitas pengendalian. 2. Dukungan pemangku kepentingan untuk mengembangkan sistem yang dapat menjadi instrumen pendukung untuk meningkatkan kinerja pengendalian. 3. Peraturan Daerah DIY Nomor 11 Tahun 2024 ttg APBD 2025 4. Pergub DIY No 112 Tahun 2024 tentang Penjabaran APBD 2025 5. Pergub DIY Nomor 86 Tahun 2020 tentang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah 6. Pergub DIY No 74 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Bapperida DIY 7. Aplikasi Jogja plan 8. Aplikasi Sengguh 9. Aplikasi Simnangkis 10. Aplikasi/Sistem Informasi Internal (Sintal) 11. Aplikasi Jogja Dataku 12. Aplikasi Geoportal 13. Aplikasi SIHK 14. SDM yang kompeten, profesional dan koordinatif 15. Sarana dan Prasarana (komputer, laptop, printer, jaringan internet) yang mendukung																				
Faktor penghambat pencapaian kinerja:						1. Serapan anggaran yang masih belum optimal karena faktor eksternal, penyesuaian harga pasar 2. Adanya perubahan kebijakan perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah, yang menyebabkan perlunya dilakukan penyesuaian di daerah 3. Capaian Kinerja Bapperida DIY sangat dipengaruhi oleh capaian kinerja Perangkat Daerah																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):						1. Melakukan koordinasi internal dengan melibatkan semua komponen SDM BAPPERIDA DIY dalam menyusun perencanaan dan penetapan kinerja tahunan; 2.Meningkatkan evaluasi internal Bapperida DIY secara rutin; 3.Koordinasi secara intensif dengan perangkat Daerah; 4.Koordinasi insentif dengan pemerintah pusat terkait kebijakan-kebijakan yang berlaku; 5.Pengembangan sistem informasi menyesuaikan perkembangan kebutuhan/kebijakan yang berlaku																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																										

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp			
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12	13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17				
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
		5.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	10	5.650.551.630	1	208.081.689		2.822.169.000	0								0				1	208.081.689	10,00	3,68	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH	
		5.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	226	191.900.300	33	21.864.000	0	38.034.000		4.750.000								4.750.000		12,49	33	26.614.000	14,60	13,87	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH	
Rata-rata capaian kinerja (%)							150.041.696.541		21.289.780.694		34.129.927.935		1.968.963.256								3,92	1.968.963.256	3,92	5,77		23.258.743.950	29,71	15,50	
Predikat Kinerja																					SR	SR					SR	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:						1. Komitmen pemangku kepentingan dalam melakukan koordinasi dengan instansi-instansi yang relevan dan kompeten untuk meningkatkan kualitas pengendalian. 2. Dukungan pemangku kepentingan untuk mengembangkan sistem yang dapat menjadi instrumen pendukung untuk meningkatkan kinerja pengendalian. 3. Peraturan Daerah DIY Nomor 11 Tahun 2024 ttg APBD 2025 4. Pergub DIY No 112 Tahun 2024 tentang Penjabaran APBD 2025 5. Pergub DIY Nomor 86 Tahun 2020 tentang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah 6. Pergub DIY No 74 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Bapperida DIY 7. Aplikasi Jogja plan 8. Aplikasi Sengguh 9. Aplikasi Simnangkis 10. Aplikasi/Sistem Informasi Internal (Sintal) 11. Aplikasi Jogja Dataku 12. Aplikasi Geoportal 13. Aplikasi SIHK 14. SDM yang kompeten, profesional dan koordinatif 15. Sarana dan Prasarana (komputer, laptop, printer, jaringan internet) yang mendukung																							
Faktor penghambat pencapaian kinerja:						1. Serapan anggaran yang masih belum optimal karena faktor eksternal, penyesuaian harga pasar 2. Adanya perubahan kebijakan perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah, yang menyebabkan perlunya dilakukan penyesuaian di daerah 3. Capaian Kinerja Bapperida DIY sangat dipengaruhi oleh capaian kinerja Perangkat Daerah																							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):						1. Melakukan koordinasi internal dengan melibatkan semua komponen SDM BAPPERIDA DIY dalam menyusun perencanaan dan penetapan kinerja tahunan; 2.Meningkatkan evaluasi internal Bapperida DIY secara rutin; 3.Koordinasi secara intensif dengan perangkat Daerah; 4.Koordinasi insentif dengan pemerintah pusat terkait kebijakan-kebijakan yang berlaku; 5.Pengembangan sistem informasi menyesuaikan perkembangan kebutuhan/kebijakan yang berlaku																							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																													

Disusun  
Yogyakarta, 2 Mei 2025  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah

Dievaluasi  
Yogyakarta, 2 Mei 2025  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah

NI MADE DWIPANTI INDRAYANTI, S.T., M.T.  
NIP. 197010181998032007

NI MADE DWIPANTI INDRAYANTI, S.T., M.T.  
NIP. 197010181998032007

**EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUNGAN PROVINSI  
RENJA PERANGKAT DAERAH DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERIODE PELAKSANAAN : 2025**

Indikator dan target kinerja SKPD yang mengacu pada sasaran RKPD:	Target	Realisasi
1 Persentase kinerja penyelenggaraan penataan ruang	81.92	7.11
2 Persentase Penyelenggaraan Penataan Agraria di daerah sesuai ketentuan	54.74	4.27
3 Kategori Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	91.14	90.64

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
								I		II		III		IV											
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13/8x100	15 = 7 + 13	16 = 15 / 6 x 100%	17									
1	Terwujudnya Penyelenggaraan Penataan Ruang Bernilai Baik	1.03.12	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG</b>	Persentase kinerja penyelenggaraan penataan ruang aspek pengaturan dan pembinaan	%	81,25	14.925.825.000	82,05	27.709.400	4.637.500.000	5,89	2.042.250					5,89	2.042.250		0,04	43,97	29.751.650	54,12	0,20	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
				Persentase kinerja penyelenggaraan penataan ruang aspek pelaksanaan dan pengawasan	%	100		92,06			8,15						8,15				50,105		50,11		DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
		1.03.12.1.01	<b>Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi</b>	<b>Terlaksananya Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Provinsi</b>	undefined	5	1.911.525.000	0		577.500.000															DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
		1.03.12.1.01.03	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Pergub selain RTRW Provinsi	dokumen	0	0	0		0															DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
		1.03.12.1.01.04	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	dokumen	5	1.911.525.000			577.500.000	5						5				5		100,00		DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
		1.03.12.1.02	<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang</b>	<b>Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan tata ruang</b>	dokumen	1	1.918.770.000			880.000.000	3						3				3		300,00		DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
		1.03.12.1.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Provinsi	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	dokumen	0	0			0															DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
		1.03.12.1.02.03	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota	dokumen	0	550.000.000			550.000.000	2						2				2				DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
		1.03.12.1.02.04	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Jumlah Laporan Peningkatan Pemahaman dan Tanggung Jawab Masyarakat	laporan	1	1.368.770.000			330.000.000	1						1				1		100,00		DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
Rata-rata capaian kinerja (%)							441.535.034.555		23.541.861.132	98.957.001.640		2.196.944.527					2.196.944.527		2,22		25.738.805.659	102,79	5,83		
Predikat Kinerja																	SR						ST	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																									
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																									

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab											
						K	Rp	K	Rp		K	Rp	I				II	III	IV	13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%						
1	2	3	4	5		6		7		8		9		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	17
		1.03.12.1.03	<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi</b>	<b>Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang daerah provinsi</b>	<b>dokumen</b>	<b>4</b>	<b>3.327.530.000</b>	<b>2</b>	<b>27.709.400</b>	<b>880.000.000</b>	<b>4</b>	<b>2.042.250</b>							<b>4</b>	<b>2.042.250</b>			<b>0,23</b>	<b>6</b>	<b>29.751.650</b>	<b>150,00</b>	<b>0,89</b>		<b>DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG</b>			
		1.03.12.1.03.0007	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	dokumen	0	0	2	27.709.400	0	1	2.042.250							1	2.042.250				3	29.751.650					DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG		
		1.03.12.1.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	dokumen	3	2.599.330.000			660.000.000	3								3					3			100,00		DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG			
		1.03.12.1.03.02	Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang	dokumen	1	728.200.000			220.000.000	1								1					1			100,00		DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG			
		1.03.12.1.04	<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi</b>	<b>Terlaksananya kesesuaian pemanfaatan ruang pada satuan ruang strategis</b>	<b>dokumen</b>	<b>16</b>	<b>7.768.000.000</b>			<b>2.300.000.000</b>	<b>12</b>								<b>12</b>					<b>12</b>			<b>75,00</b>		<b>DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG</b>			
		1.03.12.1.04.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	dokumen	6	1.500.000.000			400.000.000	4								4					4			66,67		DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG			
		1.03.12.1.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	dokumen	4	2.648.000.000			800.000.000	3								3					3			75,00		DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG			
		1.03.12.1.04.03	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	Jumlah Kasus yang Ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	kasus	0	0			0																			DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG			
		1.03.12.1.04.04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	dokumen	6	3.620.000.000			1.100.000.000	5								5					5			83,33		DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG			
		1.03.13	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG</b>	<b>Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pada satuan ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten</b>	<b>%</b>	<b>89,63</b>	<b>177.288.062.500</b>	<b>70,37</b>	<b>3.524.691.455</b>	<b>40.435.061.000</b>	<b>5,95</b>								<b>5,95</b>					<b>38,16</b>	<b>3.524.691.455</b>	<b>42,58</b>	<b>1,99</b>		<b>DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG</b>			
				<b>Persentase peningkatan kesesuaian pemanfaatan</b>	<b>%</b>	<b>85,31</b>		<b>89,08</b>			<b>7,88</b>								<b>7,88</b>					<b>48,48</b>		<b>56,83</b>		<b>DINAS PERTANAHAN</b>				
Rata-rata capaian kinerja (%)							441.535.034.555		23.541.861.132	98.957.001.640		2.196.944.527							SR	SR					25.738.805.659	102,79	5,83					
Predikat Kinerja																											ST	SR				
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																																
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																																
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																																
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																																

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					K	Rp	K	Rp		K	Rp	I	II			III	IV	K	Rp		K
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13/8x100	15 = 7 + 13	16 = 15 / 6 x 100%	17					
				ruang pada satuan ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten																	DAN TATA RUANG
		1.03.13.5.01	Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan tata ruang Kasultanan dan Kadipaten	8	35.861.924.500	25	2.580.368.713	7.379.764.000	14					14		39	2.580.368.713	487,50	7,20	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
		1.03.13.5.01.0003	Penyusunan Rencana Induk Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	0	2.615.850.500	5	520.551.667	675.998.000								5	520.551.667		19,90	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
				Materi Teknis Rencana Induk SRS Sumbu Filosofi	dokumen	0		1									1				DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
				Harmonisasi Materi Teknis dan Rapergub Rencana Induk SRS Sumbu Filosofi, Karaton, Pura Pakualaman, dan Kotabaru	dokumen	0		1									1				DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
				Penetapan Rapergub Rencana Induk SRS Sumbu Filosofi, Karaton, Pura Pakualaman, dan Kotabaru	dokumen	0		1									1				DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
				Review Materi Teknis Rencana Induk SRS Perbukitan Menoreh	dokumen	0		1									1				DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
				Penetapan Rapergub Rencana Induk SRS Perbukitan Menoreh	dokumen	0		1									1				DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
		1.03.13.5.01.0005	Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Tata Ruang	Pendampingan percepatan penetapan RDTR Kabupaten	0	24.205.224.500	4	1.154.694.816	4.668.766.000								4	1.154.694.816		4,77	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
				Bahan Berita Acara Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Urusan Keistimewaan Tata Ruang Tahap I, II, dan III	dokumen	0		3									3				DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
				Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Urusan Keistimewaan Tata Ruang	dokumen	0		1									1				DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
Rata-rata capaian kinerja (%)						441.535.034.555		23.541.861.132	98.957.001.640						2.196.944.527	2,22	25.738.805.659	102,79	5,83		
Predikat Kinerja															SR	SR				ST	SR
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																					
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																					

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	I	II	III	IV		K	Rp	K	Rp		K
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12	13	14 = 13/8x100	15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17	
				Bahan Berita Acara Penilaian Perubahan Pertama dan Kedua TA 2024, Penilaian Kelayakan Usulan TA 2025, dan Penilaian Kelayakan Usulan TA 2026 Urusan Tata Ruang	dokumen	0		4												4			DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG	
				Perencanaan BKK Kalurahan Kawasan Terpadu TA 2025	kalurahan	0		5												5			DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG	
				Monev BKK Kalurahan Kawasan Terpadu TA 2024	kalurahan	0		7												7			DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG	
				Jumlah Dokumen Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Tata Ruang	dokumen	7		13												13	185,71		DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG	
		1.03.13.5.01.0006	Penyebarluasan Informasi Rencana Tata Ruang	Kajian identifikasi citra kawasan SRS	SRS	0	9.040.849.500	5	905.122.230	2.035.000.000										5	905.122.230	10,01	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG	
				Lomba desain visual signage	kali	0		1												1			DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG	
				Penyebarluasan informasi dokumen perencanaan penataan ruang	konten	0		10												10			DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG	
				Sosialisasi Dokumen Perencanaan Tata Ruang	kali	0		40												40			DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG	
				Penyebarluasan informasi pemanfaatan ruang	paket	0		1												1			DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG	
				Jumlah Laporan Penyebarluasan Informasi Rencana Tata Ruang	laporan	1		3		1						1				4	400,00		DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG	
Rata-rata capaian kinerja (%)							441.535.034.555		23.541.861.132	98.957.001.640							2.196.944.527			2,22		25.738.805.659	102,79	5,83
Predikat Kinerja																							ST	SR
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																								
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																								

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						K	Rp			K	Rp	K	Rp			I	II	III	IV		K	Rp	K	Rp	K
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12	13	14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		<b>1.03.13.5.02</b>	<b>Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten</b>	<b>Terlaksananya BKK Kalurahan Keistimewaan Urusan Tata Ruang di 4 Kabupaten</b>	<i>undefined</i>	<b>4</b>	<b>114.706.161.000</b>	<b>4</b>		<b>27.260.781.000</b>	<b>4</b>						<b>4</b>			<b>8</b>		<b>200,00</b>		<b>DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG</b>	
		1.03.13.5.02.01	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis	dokumen	1	600.000.000			150.000.000	1						1			1		100,00		DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG	
		1.03.13.5.02.03	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu	dokumen	0	100.000.000			100.000.000	1						1			1				DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG	
		1.03.13.5.02.04	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh	dokumen	2	68.148.050.500			15.668.219.500	2						2			2		100,00		DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG	
		1.03.13.5.02.05	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri	dokumen	2	10.828.929.000			2.448.141.000	2						2			2		100,00		DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG	
		1.03.13.5.02.06	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Candi Prambanan-Candi Ijo	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Candi Prambanan - Candi Ijo	dokumen	2	4.461.152.000			1.057.373.000	2						2			2		100,00		DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG	
		1.03.13.5.02.07	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kotabaru	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kotabaru	dokumen	1	100.000.000			100.000.000	1						1			1		100,00		DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG	
		1.03.13.5.02.08	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Merapi	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Gunung Merapi	dokumen	1	300.000.000			100.000.000	1						1			1		100,00		DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG	
		1.03.13.5.02.09	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kotagede	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kotagede	dokumen	1	100.000.000			100.000.000	1						1			1		100,00		DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG	
		1.03.13.5.02.10	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas-Parangtritis	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas-Parangtritis	dokumen	1	5.716.179.000			1.473.346.000	1						1			1		100,00		DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG	
		1.03.13.5.02.11	Pemanfaatan Ruang Kawasan Kiskendo-Sermo- Wates	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kiskendo-Sermo- Wates	dokumen	1	300.000.000			100.000.000	1						1			1		100,00		DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG	
Rata-rata capaian kinerja (%)							441.535.034.555		23.541.861.132	98.957.001.640		2.196.944.527					2.196.944.527		2,22		25.738.805.659	102,79	5,83		
Predikat Kinerja																	SR						ST	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																									
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																									

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II	III	IV	13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13			16 = 15 / 6 x 100%		
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12	13	K	Rp	K	Rp	15	16	17		
		1.03.13.5.02.12	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kerto-Pleret	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kerto-Pleret	dokumen	2	6.714.203.500			1.591.386.500	2						2					2		DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG		
		1.03.13.5.02.13	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Kulon Progo	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Kulon Progo	dokumen	1	300.000.000			100.000.000	1						1					1		DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG		
		1.03.13.5.02.14	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Karaton	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Karaton	dokumen	1	100.000.000			100.000.000	1						1					1		DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG		
		1.03.13.5.02.15	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sokoliman	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sokoliman	dokumen	1	300.000.000			100.000.000	1						1					1		DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG		
		1.03.13.5.02.16	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Puro Pakualaman	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Puro Pakualaman	dokumen	1	100.000.000			100.000.000	1						1					1		DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG		
		1.03.13.5.02.17	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Makam Girindo	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Makam Girigondo	dokumen	1	100.000.000			100.000.000	1						1					1		DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG		
		1.03.13.5.02.18	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Gunungkidul	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Gunungkidul	dokumen	2	16.337.647.000			3.872.315.000	2						2					2		DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG		
		1.03.13.5.02.19	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Masjid Pathok Nagoro	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Pathok Nagoro	dokumen	1	100.000.000			0														DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG		
		<b>1.03.13.5.03</b>	<b>Pengendalian Pemanfaatan Penataan Ruang Satuan Ruang Strategis</b>	<b>Terlaksananya Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang</b>	<b>dokumen</b>	<b>13</b>	<b>25.726.977.000</b>	<b>17</b>	<b>944.322.742</b>	<b>5.494.516.000</b>	<b>13</b>						<b>13</b>				<b>30</b>	<b>944.322.742</b>	<b>230,77</b>	<b>3,67</b>	<b>DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG</b>	
		1.03.13.5.03.0001	Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang	Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	dokumen	0	25.726.977.000	1	944.322.742	5.494.516.000											1	944.322.742		3,67	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG	
				Dokumen Identifikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang pada Satuan Ruang Strategis	dokumen	0		1														1		DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG		
Rata-rata capaian kinerja (%)							441.535.034.555		23.541.861.132	98.957.001.640							2.196.944.527					2,22	25.738.805.659	102,79	5,83	
Predikat Kinerja																		SR						ST	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																										
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																										
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																										
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																										

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp		K
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12	13	14 = 13/8x100	15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17	
				Penilaian Perwujudan SPW 18 SRS	dokumen	0		1												1			DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG	
				Dokumen Penilaian Perwujudan Rencana Tata Ruang Wilayah	dokumen	0		1												1			DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG	
				Dokumen Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	dokumen	0		1												1			DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG	
				Dokumen Audit Tata Ruang	dokumen	0		1												1			DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG	
				Fasilitasi Penertiban Pelanggaran Pemanfaatan Ruang	dokumen	0		1												1			DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG	
				Dokumen Penilaian Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang di DIY dan Pemenuhan Standar Bidang Penataan Ruang	dokumen	0		2												2			DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG	
				Jumlah Dokumen Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang	dokumen	18		9		18						18			27		150,00		DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG	
		1.03.13.5.04	Sarana dan Prasarana Keistimewaan Urusan Tata Ruang	Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang	undefined	1	993.000.000			300.000.000	1					1			1		100,00		DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG	
		1.03.13.5.04.01	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang	Jumlah Dokumen Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang	dokumen	1	993.000.000			300.000.000	1					1			1		100,00		DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG	
2	Terwujudnya Penyelenggaraan Penataan Agraria di Daerah Sesuai Ketentuan	2.10.03	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	Layanan administrasi pertanahan sesuai peraturan perundangan	%	100	348.109.000	100	9.120.700	100.000.000	25,2					25,2			62,6	9.120.700	62,60	2,62	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG	
		2.10.03.1.01	Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah	Terlaksananya pengadaan tanah untuk kepentingan	dokumen	1	348.109.000	1	9.120.700	100.000.000	1					1			2	9.120.700	200,00	2,62	DINAS PERTANAHAN	
Rata-rata capaian kinerja (%)							441.535.034.555		23.541.861.132	98.957.001.640		2.196.944.527					2.196.944.527	2,22		25.738.805.659	102,79	5,83		
Predikat Kinerja																	SR	SR				ST	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																								
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																								

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
											I		II		III		IV									13		14 = 13/8x100	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			<i>untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi</i>	<i>umum sesuai dengan regulasi</i>																								<b>DAN TATA RUANG</b>	
		2.10.03.1.01.0001	Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Jumlah Dokumen Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	dokumen	1	348.109.000	1	9.120.700	100.000.000	1								1						2	9.120.700	200,00	2,62	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
		<b>2.10.06</b>	<b>PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE</b>	<b>Jumlah obyek penanganan reforma agraria yang ditindaklanjuti</b>	<b>obyek</b>	<b>2</b>	<b>362.315.000</b>	<b>2</b>	<b>228.823.000</b>	<b>100.000.000</b>	<b>3</b>								<b>3</b>						<b>5</b>	<b>228.823.000</b>	<b>250,00</b>	<b>63,16</b>	<b>DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG</b>
		<b>2.10.06.1.01</b>	<b>Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>	<b>Terselenggarakannya fasilitasi redistribusi tanah lintas daerah yang ditindaklanjuti</b>	<b>dokumen</b>	<b>0</b>	<b>362.315.000</b>	<b>1</b>	<b>228.823.000</b>	<b>100.000.000</b>	<b>1</b>								<b>1</b>						<b>2</b>	<b>228.823.000</b>		<b>63,16</b>	<b>DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG</b>
		2.10.06.1.01.0002	Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten/Kota	dokumen	0	362.315.000	1	228.823.000	100.000.000	1								1						2	228.823.000		63,16	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
		<b>2.10.11</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN</b>	<b>Persentase kinerja fasilitasi pengelolaanTanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa</b>	<b>%</b>	<b>66,14</b>	<b>190.698.243.768</b>	<b>42,61</b>	<b>9.198.783.249</b>	<b>42.053.779.640</b>	<b>54,26</b>								<b>54,26</b>						<b>48,435</b>	<b>9.198.783.249</b>	<b>73,23</b>	<b>4,82</b>	<b>DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG</b>
				<b>Persentase pemanfaatan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa sesuai dengan ketentuan</b>	<b>%</b>	<b>18,43</b>		<b>16,62</b>			<b>2,32</b>								<b>2,32</b>						<b>9,47</b>		<b>51,38</b>	<b>DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG</b>	
		<b>2.10.11.5.01</b>	<b>Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten</b>	<b>Terlaksananya pengelolaan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten yang meliputi Aspek Penatausahaan, Aspek Pemeliharaan Dokumen, Aspek Pengawasan</b>	<b>dokumen</b>	<b>24</b>	<b>177.166.781.768</b>	<b>29</b>	<b>7.339.534.777</b>	<b>39.391.513.640</b>	<b>23</b>								<b>23</b>						<b>52</b>	<b>7.339.534.777</b>	<b>216,67</b>	<b>4,14</b>	<b>DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG</b>
				<b>Terlaksanaannya BKK Kalurahan Keistimewaan</b>	<b>Kabupaten</b>	<b>4</b>		<b>4</b>			<b>4</b>								<b>4</b>						<b>8</b>		<b>200,00</b>	<b>DINAS PERTANAHAN</b>	
Rata-rata capaian kinerja (%)							441.535.034.555		23.541.861.132	98.957.001.640		2.196.944.527							2.196.944.527	2,22				25.738.805.659	102,79	5,83			
Predikat Kinerja																			SR	SR						ST	SR		
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																													
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																													
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																													
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																													

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
											I		II		III		IV									12		13		14 = 13/8x100
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
				<b>Urusan Pertanahan di 4 Kabupaten</b>																								<b>DAN TATA RUANG</b>		
		2.10.11.5.01.0001	Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Jumlah Dokumen Penatausahaan Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten Dalam Rangka Pengembangan Kebudayaan, Kepentingan Sosial, Dan Kesejahteraan Masyarakat	dokumen	11	8.486.889.000	7	1.358.608.934		1.694.000.000	11								11						18	1.358.608.934	163,64	16,01	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
		2.10.11.5.01.0002	Pemeliharaan Dokumen Pertanahan	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Dokumen Pertanahan	dokumen	1	4.976.900.000	1	593.645.641		990.000.000	1								1						2	593.645.641	200,00	11,93	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
		2.10.11.5.01.0004	Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa	Jumlah Dokumen Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa	dokumen	2	44.246.429.468	2	191.593.000		9.709.033.340	2								2						4	191.593.000	200,00	0,43	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
		2.10.11.5.01.0005	Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Pertanahan	Jumlah Dokumen Rencana Program/Kegiatan Urusan Pertanahan	dokumen	5	94.201.095.300	4	169.762.710		21.265.280.300	4								4						8	169.762.710	160,00	0,18	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
		2.10.11.5.01.0006	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Urusan Pertanahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Urusan Pertanahan	laporan	3	957.187.000	3	250.117.541		165.000.000	3								3						6	250.117.541	200,00	26,13	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
		2.10.11.5.01.0007	Pengembangan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Pertanahan	Jumlah Dokumen Kegiatan Pengembangan dan pemanfaatan Sistem Informasi Pertanahan	dokumen	2	24.298.281.000	3	4.775.806.951		5.568.200.000	2								2						5	4.775.806.951	250,00	19,65	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
		<b>2.10.11.5.02</b>	<b>Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten</b>	<b>Terlaksananya Pemanfaatan Tanah SG dan Tanah PAG yang sesuai dengan regulasi</b>	<b>undefined</b>	<b>9</b>	<b>13.531.462.000</b>	<b>7</b>	<b>1.859.248.472</b>		<b>2.662.266.000</b>	<b>9</b>								<b>9</b>						<b>16</b>	<b>1.859.248.472</b>	<b>177,78</b>	<b>13,74</b>	<b>DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG</b>
				<b>Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan</b>	<b>unit</b>	<b>1</b>						<b>1</b>								<b>1</b>						<b>1</b>		<b>100,00</b>		<b>DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG</b>
		2.10.11.5.02.0001	Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Ijin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten	Jumlah Dokumen Pertimbangan Teknis Ijin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten	dokumen	4	7.940.252.000	3	1.554.310.910		1.471.266.000	4								4						7	1.554.310.910	175,00	19,58	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
				Rekomendasi Kepala DPTR tentang Pemanfaatan Tanah	persen	0		100																		50				DINAS PERTANAHAN
Rata-rata capaian kinerja (%)							441.535.034.555		23.541.861.132		98.957.001.640		2.196.944.527								2.196.944.527		2,22			25.738.805.659	102,79	5,83		
Predikat Kinerja																					SR	SR						ST	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																														
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																														
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																														
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																														

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						K	Rp	K	Rp		K	Rp	I	II			III	IV	K	Rp		K	Rp	K
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12	13	14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
				Kasultanan dan Tanah Kadipaten																				DAN TATA RUANG
				a. Penyebarluasan Informasi Pemanfaatan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa (1. Publikasi surat kabar, 2. Film/Video Pendek, 3. Leaflet)	paket	0		3												3				DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
				Fasilitasi Pembinaan Tertib Administrasi Pertanahan pada BKK Kalurahan	kalurahan	0		10												10				DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
				Sosialisasi Pemanfaatan Tanah Kasultanan, Tanah kadipaten dan Tanah Kalurahan	lokasi	0		60												60				DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
				Rekomendasi Izin Pemanfaatan Tanah Kalurahan	persen	0		100												50				DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
				Publikasi Urusan Keistimewaan Pertanahan	paket	0		1												1				DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
		2.10.11.5.02.0002	Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa	Jumlah Berita Acara Penyelesaian Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa	berita acara	3	4.598.210.000	4	304.937.562	891.000.000	3					3			7	304.937.562	233,33	6,63	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG	
		2.10.11.5.03.01	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Urusan Keistimewaan Urusan Pertanahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Urusan Keistimewaan (Pertanahan)	unit	1	993.000.000	0		300.000.000	1					1			1			100,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG	
3	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah	0.00.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kategori	96,39	57.912.479.287	97,46	10.552.733.328	11.630.661.000	82,96	2.194.902.277				82,96	2.194.902.277	18,87	180,42	12.747.635.605	187,18	22,01	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG	
		0.00.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	dokumen	9	218.143.500	9	15.343.900	43.234.000	9	5.179.860				9	5.179.860	11,98	18	20.523.760	200,00	9,41	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG	
Rata-rata capaian kinerja (%)							441.535.034.555		23.541.861.132	98.957.001.640		2.196.944.527					2.196.944.527	2,22		25.738.805.659	102,79	5,83		
Predikat Kinerja																	SR	SR				ST	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																								
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																								

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
					K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12		13	14 = 13/8x100	15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17	
				<b>dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>																					
		0.00.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	3	121.804.500	3	6.808.300	24.140.000	3	3.537.970						3	3.537.970	14,66	6	10.346.270	200,00	8,49	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
		0.00.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	dokumen	4	6.715.000	4	639.600	1.331.000	4							4			8	639.600	200,00	9,52	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
		0.00.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	laporan	2	89.624.000	2	7.896.000	17.763.000	2	1.641.890						2	1.641.890	9,24	4	9.537.890	200,00	10,64	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
		<b>0.00.01.1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Terlaksananya pelaksanaan penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan daerah, Penyediaan gaji dan tunjangan ASN dan Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SPKD</b>	<b>undefined</b>	<b>21</b>	<b>48.496.685.137</b>	<b>21</b>	<b>9.471.206.363</b>	<b>9.696.143.000</b>	<b>21</b>	<b>1.957.591.258</b>						<b>21</b>	<b>1.957.591.258</b>	<b>20,19</b>	<b>42</b>	<b>11.428.797.621</b>	<b>200,00</b>	<b>23,57</b>	<b>DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG</b>
		0.00.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	71	48.138.462.337	71	9.418.304.363	9.625.144.000		1.951.552.458							1.951.552.458	20,28	71	11.369.856.821	100,00	23,62	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
		0.00.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	dokumen	1	279.297.800	1	46.264.000	55.356.000		3.089.000							3.089.000	5,58	1	49.353.000	100,00	17,67	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
		0.00.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	laporan	1	16.875.500	1	3.042.000	3.345.000	1	2.057.500						1	2.057.500	61,51	2	5.099.500	200,00	30,22	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
		0.00.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	laporan	18	62.049.500	18	3.596.000	12.298.000	18	892.300						18	892.300	7,26	36	4.488.300	200,00	7,23	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
		<b>0.00.01.1.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Terlaksananya penatausahaan barang milik daerah pada SKPD</b>	<b>Laporan</b>	<b>3</b>	<b>124.543.000</b>	<b>2</b>	<b>17.850.000</b>	<b>24.684.000</b>	<b>2</b>	<b>5.340.000</b>						<b>2</b>	<b>5.340.000</b>	<b>21,63</b>	<b>4</b>	<b>23.190.000</b>	<b>133,33</b>	<b>18,62</b>	<b>DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG</b>
Rata-rata capaian kinerja (%)							441.535.034.555		23.541.861.132	98.957.001.640		2.196.944.527							2.196.944.527	2,22		25.738.805.659	102,79	5,83	
Predikat Kinerja																			SR	SR			ST	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																									
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																									

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
		0.00.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	laporan	3	124.543.000	2	17.850.000		24.684.000	2	5.340.000						2	5.340.000		21,63	4	23.190.000	133,33	18,62	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG	
		<b>0.00.01.1.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Terlaksananya administrasi penatausahaan kepegawaian daerah</b>	<b>laporan</b>	<b>2</b>	<b>33.694.000</b>	<b>1</b>	<b>2.642.000</b>		<b>6.679.000</b>	<b>1</b>							<b>1</b>				<b>2</b>	<b>2.642.000</b>	<b>100,00</b>	<b>7,84</b>	<b>DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG</b>	
		0.00.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	dokumen	2	33.694.000	1	2.642.000		6.679.000	1							1				2	2.642.000	100,00	7,84	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG	
		<b>0.00.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Terlaksananya penyediaan peralatan perlengkapan perkantoran, penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD</b>	<b>Laporan</b>	<b>20</b>	<b>1.319.019.200</b>	<b>20</b>	<b>126.886.251</b>		<b>280.395.000</b>	<b>20</b>	<b>10.483.792</b>						<b>20</b>	<b>10.483.792</b>		<b>3,74</b>	<b>40</b>	<b>137.370.043</b>	<b>200,00</b>	<b>10,41</b>	<b>DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG</b>	
		0.00.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	1	96.301.000	1	8.988.000		19.087.000		2.177.444							2.177.444		11,41	1	11.165.444	100,00	11,59	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG	
		0.00.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	3	261.686.200	3	9.385.350		51.865.000		1.447.908							1.447.908		2,79	3	10.833.258	100,00	4,14	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG	
		0.00.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket	1	55.152.300	1	2.545.000		10.931.000	1	1.193.000						1	1.193.000		10,91	2	3.738.000	200,00	6,78	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG	
		0.00.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	paket	2	209.838.500	2	11.150.500		41.589.000	2	1.550.115						2	1.550.115		3,73	4	12.700.615	200,00	6,05	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG	
		0.00.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	dokumen	3	57.211.200	3	1.908.000		11.382.000	3	441.000						3	441.000		3,87	6	2.349.000	200,00	4,11	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG	
		0.00.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	12	456.780.000	12	92.909.401		90.541.000	12	3.674.325						12	3.674.325		4,06	24	96.583.726	200,00	21,14	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG	
Rata-rata capaian kinerja (%)							441.535.034.555		23.541.861.132		98.957.001.640		2.196.944.527							2.196.944.527		2,22		25.738.805.659	102,79	5,83		
Predikat Kinerja																				SR	SR				ST	SR		
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																												
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																												

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						K	Rp	K	Rp		K	Rp	I		II	III		IV	K	Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17	
		0.00.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	dokumen	1	182.050.000			55.000.000	1						1				1						DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
		<b>0.00.01.1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya</b>	<b>undefined</b>	<b>17</b>	<b>682.754.000</b>			<b>179.080.000</b>	<b>16</b>						<b>16</b>				<b>16</b>					<b>94,12</b>	<b>DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG</b>
		0.00.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	17	682.754.000			179.080.000	16						16				16					94,12	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
		<b>0.00.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat, penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor, dan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</b>	<b>laporan</b>	<b>3</b>	<b>3.747.100.200</b>	<b>3</b>	<b>606.540.014</b>	<b>742.657.000</b>	<b>3</b>	<b>140.885.967</b>					<b>3</b>	<b>140.885.967</b>	<b>18,97</b>	<b>6</b>	<b>747.425.981</b>	<b>200,00</b>	<b>19,95</b>			<b>DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG</b>	
		0.00.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	1	74.481.000	1	4.878.000	14.762.000	1	450.000					1	450.000	3,05	2	5.328.000	200,00	7,15			DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG	
		0.00.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	1	1.314.594.000	1	168.581.750	260.546.000	1	39.117.387					1	39.117.387	15,01	2	207.699.137	200,00	15,80			DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG	
		0.00.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	1	2.358.025.200	1	433.080.264	467.349.000	1	101.318.580					1	101.318.580	21,68	2	534.398.844	200,00	22,66			DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG	
		<b>0.00.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Terlaksananya penyediaan jasa pemeliharaan , biaya pemeliharaan , pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan, pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya, dan pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya</b>	<b>Laporan</b>	<b>3</b>	<b>3.290.540.250</b>	<b>3</b>	<b>312.264.800</b>	<b>657.789.000</b>	<b>3</b>	<b>75.421.400</b>					<b>3</b>	<b>75.421.400</b>	<b>11,47</b>	<b>6</b>	<b>387.686.200</b>	<b>200,00</b>	<b>11,78</b>			<b>DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG</b>	
		0.00.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	unit	15	1.591.788.000	15	201.596.800	320.738.000	15	56.807.400					15	56.807.400	17,71	30	258.404.200	200,00	16,23			DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG	
Rata-rata capaian kinerja (%)							441.535.034.555		23.541.861.132	98.957.001.640		2.196.944.527						2.196.944.527	2,22		25.738.805.659	102,79	5,83				
Predikat Kinerja																		SR								ST	SR
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																											
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																											

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						K	Rp	K	Rp		K	Rp	I	II						III	IV	12	13	14 = 13/8x100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13/8x100	15 = 7 + 13	16 = 15 / 6 x 100%	17								
		0.00.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	10	646.550.500	10	64.932.000	128.510.000	10	1.914.000					10	1.914.000	1,49	20	66.846.000	200,00	10,34	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
		0.00.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	1	1.052.201.750	1	45.736.000	208.541.000	1	16.700.000					1	16.700.000	8,01	2	62.436.000	200,00	5,93	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
Rata-rata capaian kinerja (%)							441.535.034.555		23.541.861.132	98.957.001.640		2.196.944.527						2.196.944.527	2,22		25.738.805.659	102,79	5,83	
Predikat Kinerja																		SR	SR			ST	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																								
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																								

Disusun  
Yogyakarta, 2 Mei 2025  
Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana)

Dievaluasi  
Yogyakarta, 2 Mei 2025  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah

ADI BAYU KRISTANTO , S.H., M.Hum.  
NIP. 197207111997031006

NI MADE DWIPANTI INDRAYANTI, S.T., M.T.  
NIP. 197010181998032007

**EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUNGAN PROVINSI  
RENJA PERANGKAT DAERAH BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERIODE PELAKSANAAN : 2025**

Indikator dan target kinerja SKPD yang mengacu pada sasaran RKPd:

Target Realisasi

- 1 Persentase hasil kajian, koordinasi, monitoring dan evaluasi bidang bina mental, bidang pelayanan dasar, dan bidang non pelayanan dasar, yang menjadi naskah bahan kebijakan dan fasilitasi keagamaan 80 20  
2 Kategori RB Perangkat Daerah 88.19 92.07

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					K	Rp	K	Rp		K	Rp	I		II		III							IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13/8x100	15 = 7 + 13	16 = 15 / 6 x 100%	17								
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	Meningkatnya kualitas rumusan bahan kebijakan strategis bidang bina mental, bidang pelayanan dasar, bidang non pelayanan dasar, serta meningkatnya fasilitasi kehidupan beragama	1	Kesejahteraan Rakyat																					
		2	Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan																					
		2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA	Jumlah Laporan Pengembangan dan Implementasi	Laporan	0			4.100.749.000	2	51.132.200						2	51.132.200		1,25	2	51.132.200		BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
Rata-rata capaian kinerja (%)									8.657.539.300		64.174.800							64.174.800		0,74		64.174.800		inf
Predikat Kinerja																	SR	SR					SR	ST
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																								
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																								

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
												I		II											III		IV	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			<b>URUSAN KEBUDAYAAN</b>	Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat																								
		<b>2.22.08.5.09</b>	<b>Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya</b>																									
		2.22.08.5.09.0009	Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat			0				4.100.749.000		51.132.200								51.132.200	1,25		51.132.200					BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
		<b>4.01.04</b>	<b>PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>	Persentase 4 jenis fasilitas keagamaan	Persen	0				<b>4.145.272.750</b>																		BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
				Jumlah rumusan bahan kebijakan kapasitas sumber daya masyarakat yang ditindaklanjuti	Rumusan	0																						BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
				Rumusan kebijakan bidang bina mental, kesehatan, dan sumber daya manusia yang ditindaklanjuti	Dokumen	0						2								2			2					BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
Rata-rata capaian kinerja (%)										8.657.539.300		64.174.800								64.174.800	0,74		64.174.800		inf			
Predikat Kinerja																				SR	SR				SR	ST		
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																												
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																												

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
										I		II		III		IV												
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		<b>4.01.04.1.01</b>	<b>Fasilitas Pembinaan Mental Spiritual</b>																									
		4.01.04.1.01.0001	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual						225.000																			BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
		4.01.04.1.01.0002	Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual						3.407.881.000																			BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
		<b>4.01.04.1.02</b>	<b>Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar</b>																									
		4.01.04.1.02.0001	Fasilitas, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan						161.931.500																			BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
		4.01.04.1.02.0002	Fasilitas, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan						190.321.400																			BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
		<b>4.01.04.1.03</b>	<b>Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar</b>																									
Rata-rata capaian kinerja (%)									8.657.539.300										64.174.800			0,74			64.174.800		inf	
Predikat Kinerja																			SR		SR					SR	ST	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																												
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																												

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
												I	II	III	IV													
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		4.01.04.1.03.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata							384.913.850																		BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
2	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Perangkat Daerah	3	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi																									
		4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PPKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Angka	0				411.517.550	84,4	13.042.600						84,4	13.042.600		3,17	84,4	13.042.600				BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	
		4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																									
		4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							7.459.000		225.000							225.000		3,02		225.000				BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	
		4.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD							1.385.600																	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	
Rata-rata capaian kinerja (%)										8.657.539.300		64.174.800							64.174.800		0,74		64.174.800		inf			
Predikat Kinerja																		SR	SR					SR	ST			
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																												
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																												

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab														
					K	Rp	K	Rp		K	Rp	I		II		III							IV													
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17								
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
		4.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								1.822.000																					BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT				
		<b>4.01.01.1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>																																	
		4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD								8.663.000																					BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT				
		4.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								2.713.000																					BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT				
		4.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD								2.402.000																					BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT				
		<b>4.01.01.1.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>																																	
		4.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD								12.425.000																					BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT				
		<b>4.01.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>																																	
Rata-rata capaian kinerja (%)											8.657.539.300																									
Predikat Kinerja																																				
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																																				
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																																				

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab											
					K	Rp	K	Rp		K	Rp	I		II		III							IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17					
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
		4.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								2.872.000																				BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT		
		4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								12.788.900		2.025.600																		BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT		
		4.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								2.316.000																				BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT		
		4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan								15.090.000		6.935.000																		BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT		
		4.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan								1.764.000		100.000																		BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT		
		4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								165.723.050		1.290.000																		BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT		
		<b>4.01.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>																														
		4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat								5.000.000																				BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT		
		4.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber								3.900.000																				BIRO KESEJAHTERAAN		
Rata-rata capaian kinerja (%)											8.657.539.300		64.174.800																				
Predikat Kinerja																																	SR SR SR ST
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																																	
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																																	

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
						K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6		7		8	9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17	
			Daya Air dan Listrik																								RAKYAT
		<b>4.01.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>																								
		4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						34.592.000		1.700.000								1.700.000		4,91			1.700.000			BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
		4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						96.054.000																		BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
		4.01.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel						2.340.000																		BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
		4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						19.448.000																		BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
		4.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						12.760.000																		BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
Rata-rata capaian kinerja (%)									8.657.539.300		64.174.800								64.174.800		0,74			64.174.800		inf	
Predikat Kinerja																		SR	SR						SR	ST	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																											
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																											

Disusun  
Yogyakarta, 2 Mei 2025  
Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda DIY

Dievaluasi  
Yogyakarta, 2 Mei 2025  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah

FAISHOL MUSLIM , S.I.P, M.Si.  
NIP. 197208121999031003

NI MADE DWIPANTI INDRAYANTI, S.T., M.T.  
NIP. 197010181998032007

**EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUNGAN PROVINSI  
RENJA PERANGKAT DAERAH DINAS KESEHATAN PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERIODE PELAKSANAAN : 2025**

Indikator dan target kinerja SKPD yang mengacu pada sasaran RKPD:

1 Kategori Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah

2 Indeks Keluarga Sehat

Target Realisasi

92.8 97.47

0.39 0.396

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13			16 = 15 / 6 x 100%
1	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di perangkat daerah	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Sekretaris Dinkes)	%	0	92,03			92,03									nan	92,03					DINAS KESEHATAN
				Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Bapel Jamkessos)	%	0	93			86,51										89,755					DINAS KESEHATAN
				Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (BLKK)	%	0	93,2			93,2										93,2					DINAS KESEHATAN
				Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (BAPELKES)	%	0	93,46			93,46										93,46					DINAS KESEHATAN
				Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (RS Respira)	%	0	91,5			91,5										91,5					DINAS KESEHATAN
				Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (RS Grhasia Wakil Direktur Administrasi dan Sumber Daya)	%	0	91,9			91,9										91,9					DINAS KESEHATAN
Rata-rata capaian kinerja (%)							2.355.474.047.196		228.304.847.298	382.777.292.515											228.304.847.298	72,89	9,69		
Predikat Kinerja																		SR	SR				T	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																									
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																									

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
												I	II	III	IV														
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
				Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (RS Grhasia Wakil Direktur Pelayanan)	%	0		91,9			91,9							91,9			91,9							DINAS KESEHATAN	
				Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (RS Grhasia Bagian Program, Keuangan, Data dan Teknologi Informasi)	%	0		91,9			91,9							91,9			91,9							DINAS KESEHATAN	
				Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (RS Grhasia Bagian Umum dan Pengembangan Sumber Daya)	%	0		91,9			91,9							91,9			91,9							DINAS KESEHATAN	
				Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (RS Grhasia Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan )	%	0		91,9			91,9							91,9			91,9							DINAS KESEHATAN	
				Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (RS Grhasia Bidang Pengembangan Mutu dan Pelayanan)	%	0					91,9							91,9			45,95							DINAS KESEHATAN	
				Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (RS Grhasia Bidang Pelayanan Penunjang dan Sarana)	%	0					91,9							91,9			45,95							DINAS KESEHATAN	
Rata-rata capaian kinerja (%)							2.355.474.047.196		228.304.847.298		382.777.292.515													228.304.847.298	72,89	9,69			
Predikat Kinerja																		SR	SR							T	SR		
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																													
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																													
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																													
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																													

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12	13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17				
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
				Jumlah Layanan Pengembangan laboratorium untuk mendukung program rujukan, dan kebutuhan masyarakat	layanan	0		100				12						12									DINAS KESEHATAN		
2	Terwujudnya Keluarga Sehat	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Presentase skrining/ deteksi dini kesehatan jiwa pada usia 15 tahun ke atas (Kesmas)	%	0	1.214.020.696.783	36,61	78.413.004.856	109.402.523.044	20							20							28,305	78.413.004.856		6,46	DINAS KESEHATAN
				Presentase Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR)(Kesmas)	%	0		6,4				6,82						6,82							6,61			DINAS KESEHATAN	
				Presentase Remaja putri anemia (Kesmas)	%	0		20,74				26,45						26,45							23,595			DINAS KESEHATAN	
				Presentase ODGJ yang mendapatkan pelayanan pelayanan secara standar (RSJ Ghrasia)	%	0		91,1				93,4						93,4							92,25			DINAS KESEHATAN	
				Presentase Fasyankes Terakreditasi (Yankes)	%	0		71,64				73,01						73,01							72,325			DINAS KESEHATAN	
				Presentase ODGJ yang mendapatkan pelayanan pelayanan secara standar (Kesmas)	%	0		94,46				25,77						25,77							60,115			DINAS KESEHATAN	
				Persentase Keberhasilan Pengobatan TBC (P2P)	%	0		85,13				85,52						85,52							85,325			DINAS KESEHATAN	
Rata-rata capaian kinerja (%)							2.355.474.047.196		228.304.847.298	382.777.292.515															228.304.847.298	72,89	9,69		
Predikat Kinerja																		SR	SR								T	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																													
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																													
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																													
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																													

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
												I	II	III	IV															
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				Persentase ODHA minum ARV ( ODHA on ARV)(P2P)	%	0		62,91			51							51			56,955								DINAS KESEHATAN	
				Persentase Kab/Kota yang mempertahankan eliminasi Malaria(P2P)	%	0		100			100							100			100								DINAS KESEHATAN	
				Persentase penderita Hipertensi mendapatkan pengobatan secara teratur (P2P)	%	0		78,13			5,01							5,01			41,57								DINAS KESEHATAN	
				Persentase Penderita DM mendapatkan pengobatan secara teratur (P2P)	%	0		84,2			5,17							5,17			44,685								DINAS KESEHATAN	
				Persentase Wanita Usia Subur (WUS) yang melakukan deteksi dini iva test dan sadanis untuk pencegahan kanker servik dan kanker payudara (P2P)	%	0		15,93			15,43							15,43			15,68								DINAS KESEHATAN	
				Presentase Masyarakat miskin mendapat layanan Jaminan Kesehatan (Jamkessos)	%	0		100			100							100			100								DINAS KESEHATAN	
				Persentase Keberhasilan Pengobatan TBC (RS Paru Respira)	%	0		85,8			94,44							94,44			90,12								DINAS KESEHATAN	
				Persentase ODGJ berat ditangani dan tidak diterlantarkan (RS Grhasia)	%	0		0			7,27							7,27			3,635								DINAS KESEHATAN	
Rata-rata capaian kinerja (%)							2.355.474.047.196		228.304.847.298		382.777.292.515														228.304.847.298	72,89	9,69			
Predikat Kinerja																		SR	SR								T	SR		
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																														
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																														
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																														
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																														

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12	13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				Persentase Angka keberhasilan pasien ODGJ yang menyelesaikan tahapan rehabilitasi (RSJ Grhasia)	%	0		0				92,04						92,04				46,02				DINAS KESEHATAN
		1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase penyediaan fasilitas pelayanan, sarana, prasarana, dan alat kesehatan UKP Rujukan, UKM, dan UKM Rujukan	%	100	776.746.613.851	100	27.826.119.906	26.742.174.400											50	27.826.119.906	50,00	3,58	DINAS KESEHATAN	
		1.02.02.1.01.02	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	Unit	1	390.667.498.584			0																DINAS KESEHATAN
		1.02.02.1.01.03	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit Berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Unit	2	182.065.629.800	1	25.036.245.500	3.500.000.000											1	25.036.245.500	50,00	13,75	DINAS KESEHATAN	
		1.02.02.1.01.10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	Unit	1.480	90.613.367.332	12	2.761.364.506	1.306.520.000											12	2.761.364.506	0,81	3,05	DINAS KESEHATAN	
		1.02.02.1.01.11	Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan	Unit	139	4.283.150.000			950.000.000																DINAS KESEHATAN
Rata-rata capaian kinerja (%)							2.355.474.047.196		228.304.847.298	382.777.292.515												228.304.847.298	72,89	9,69		
Predikat Kinerja																		SR	SR					T	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																										
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																										
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																										
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																										

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)				Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp							
1	2	3	4	5	6		7				8				9				10	11	12	13	14 = 13/8x100	15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				Kesehatan yang Disediakan																											
		1.02.02.1.01.12	Pengadaaaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	Unit	5	250.000.000																								DINAS KESEHATAN
		1.02.02.1.01.15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-Alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan	Jumlah Alat-Alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan yang Disediakan dan Dipelihara	Unit	76	19.072.464.000																								DINAS KESEHATAN
		1.02.02.1.01.21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dokumen	26	1.246.712.400	5																	5				19,23		DINAS KESEHATAN
		1.02.02.1.01.22	Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Disediakan	Paket	24	88.274.511.135	1																		1			4,17		DINAS KESEHATAN
		1.02.02.1.01.24	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	Keluarga	814.450	273.280.600	814.300	28.509.900																	814.300	28.509.900	99,98	10,43		DINAS KESEHATAN
		<b>1.02.02.1.02</b>	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi</b>	<b>Persentase RS memenuhi standar kredensialing</b>	%	<b>88,61</b>	<b>436.842.213.932</b>	<b>84,81</b>	<b>50.539.633.650</b>																	<b>42,405</b>	<b>50.539.633.650</b>	<b>47,86</b>	<b>11,57</b>		<b>DINAS KESEHATAN</b>
				<b>Persentase Kab/kota yang melakukan skrining iva tes dan sadanis minimal 10</b>	%	<b>100</b>		<b>60</b>																		<b>30</b>		<b>30,00</b>		<b>DINAS KESEHATAN</b>	
Rata-rata capaian kinerja (%)							2.355.474.047.196		228.304.847.298																		228.304.847.298	72,89	9,69		
Predikat Kinerja																															
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																															
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																															
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																															
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																															

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
					K	Rp	K	Rp		K	Rp	I		II		III				IV		14 = 13/8x100			15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%				
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				<i>persen dari total WUS diwilayahnya</i>																											
				<i>Persentase Kab/kota yang melakukan deteksi dini kesehatan jiwa</i>	%	80		60																	30		37,50		DINAS KESEHATAN		
				<i>Persentase Kab/kota yang melakukan pelayanan sesuai standar pada penderita ODGJ</i>	%	100		100																	50		50,00		DINAS KESEHATAN		
				<i>Jumlah kalurahan/kelurahan yang dilaksanakan pendampingan verifikasi STBM</i>	undefined	252		247																	247		98,02		DINAS KESEHATAN		
				<i>Persentase bayi usia 0-11 bulan mendapat IDL (Imunisasi Dasar Lengkap)</i>	%	98		97,42																		48,71		49,70		DINAS KESEHATAN	
				<i>Persentase bayi 18 - 24 bulan mendapatkan imunisasi booster Campak dan Rubella</i>	%	93,5		92,7																		46,35		49,57		DINAS KESEHATAN	
				<i>Persentase WUS yang mempunyai status imunisasi T2+ (Tetanus yang ke-2 atau lebih)</i>	%	80		77																		38,5		48,13		DINAS KESEHATAN	
				<i>Persentase K6</i>	%	90		60																		30		33,33		DINAS KESEHATAN	
				<i>Persentase KN Lengkap</i>	%	100		70																		35		35,00		DINAS KESEHATAN	
				<i>Persentase Pelayanan Kesehatan Balita</i>	%	88		85																		42,5		48,30		DINAS KESEHATAN	
Rata-rata capaian kinerja (%)							2.355.474.047.196		228.304.847.298		382.777.292.515															228.304.847.298	72,89	9,69			
Predikat Kinerja																															
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																															
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																															
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																															
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																															

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
												I	II	III	IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12	13	14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				<i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dalam Pemenuhan SPM Bidang Kesehatan</i>	%	100		100																	DINAS KESEHATAN	
				<i>Persentase remaja putri konsumsi tablet tambah darah</i>	%	18		12																	DINAS KESEHATAN	
				<i>Persentase lansia mendapat layanan kesehatan</i>	%	60		54																	DINAS KESEHATAN	
				<i>Persentase respon time SKDR PD3I kurang dari 24 jam</i>	%	90		90																	DINAS KESEHATAN	
				<i>Persentase mitra yang melayani jaminan kesehatan semesta</i>	%	100		95																		DINAS KESEHATAN
				<i>Persentase pembayaran klaim jaminan kesehatan penyangga dan disabilitas sesuai ketentuan</i>	%	100		100																		DINAS KESEHATAN
				<i>Persentase Kabupaten/Kota yang melakukan rekonsiliasi data akses layanan jaminan kesehatan</i>	%	100																				DINAS KESEHATAN
				<i>Persentase disabilitas yang memanfaatkan secara optimal hasil layanan jaminan kesehatan khusus</i>	%	95		70																		DINAS KESEHATAN
				<i>Persentase fasyankes mendapatkan</i>	%	100		100																		DINAS KESEHATAN
Rata-rata capaian kinerja (%)							2.355.474.047.196		228.304.847.298		382.777.292.515												228.304.847.298	72,89	9,69	
Predikat Kinerja																		SR	SR						T	SR
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																										
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																										
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																										
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																										

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
												I	II	III	IV														
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
				<i>pembinaan pelayanan kesehatan</i>																									
				<i>Persentase PSC dan jejaringnya mendapatkan pembinaan penyediaan dan pengelolaan SPGDT</i>	%	100		100													50		50,00				DINAS KESEHATAN		
				<i>Persentase penemuan dan pengobatan kasus TBC</i>	%	51		48													24		47,06				DINAS KESEHATAN		
				<i>Persentase Orang dengan HIV (ODHIV) baru ditemukan mendapatkan pengobatan ART</i>	%	72		69													34,5		47,92				DINAS KESEHATAN		
				<i>Persentase Kabupaten Kota yang tidak terjadi KLB Malaria</i>	%	100		100													50		50,00				DINAS KESEHATAN		
				<i>Persentase Kab/ Kota yang melakukan pelayanan hipertensi sesuai standar minimal 50 persen</i>	%	100		60													30		30,00				DINAS KESEHATAN		
				<i>Persentase Kab/ Kota yang melakukan pelayanan DM mendapatkan sesuai standar minimal 50 persen</i>	%	100		60													30		30,00				DINAS KESEHATAN		
		1.02.02.1.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau	Orang	2.280	19.619.431.031	438	664.251.675	798.425.000											438	664.251.675	19,21	3,39		DINAS KESEHATAN			
Rata-rata capaian kinerja (%)							2.355.474.047.196		228.304.847.298	382.777.292.515												228.304.847.298	72,89	9,69					
Predikat Kinerja																													
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																													
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																													
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																													
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																													

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12	13	14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
			Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar																							
		1.02.02.1.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	28.500	1.802.108.100	28.215	272.965.600	270.000.000												28.215	272.965.600	99,00	15,15	DINAS KESEHATAN	
		1.02.02.1.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Dokumen	42	2.677.703.700	6	933.513.600	544.410.000												6	933.513.600	14,29	34,86	DINAS KESEHATAN	
		1.02.02.1.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Dokumen	5	1.796.300.000	1	4.494.000	310.000.000												1	4.494.000	20,00	0,25	DINAS KESEHATAN	
		1.02.02.1.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Dokumen	3	169.901.000	1	4.700.000	35.000.000												1	4.700.000	33,33	2,77	DINAS KESEHATAN	
		1.02.02.1.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	8	16.200.963.200	3	476.098.000	3.700.000.000													3	476.098.000	37,50	2,94	DINAS KESEHATAN
		1.02.02.1.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen	38	662.432.950	1	4.987.500	180.576.500													1	4.987.500	2,63	0,75	DINAS KESEHATAN
		1.02.02.1.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	16	1.099.283.473	4	1.003.939.210	198.220.100													4	1.003.939.210	25,00	91,33	DINAS KESEHATAN
		1.02.02.1.02.09	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen	27	10.168.103.050	1	1.441.865.825	1.457.711.200													1	1.441.865.825	3,70	14,18	DINAS KESEHATAN
Rata-rata capaian kinerja (%)							2.355.474.047.196		228.304.847.298	382.777.292.515													228.304.847.298	72,89	9,69		
Predikat Kinerja																									T	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																											
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																											

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5		6		7		8	9		10	11	12	13	14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		1.02.02.1.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	42	10.985.317.777	8	1.207.050.961	1.788.273.931											8	1.207.050.961	19,05	10,99	DINAS KESEHATAN	
		1.02.02.1.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan masalah kesehatan jiwa (ODMK)	Dokumen	1	920.000.000	1	4.995.200	220.000.000											1	4.995.200	100,00	0,54	DINAS KESEHATAN	
		1.02.02.1.02.16	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	32	346.619.521.437	7	44.208.676.279	66.674.925.028											7	44.208.676.279	21,88	12,75	DINAS KESEHATAN	
		1.02.02.1.02.17	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	1	1.370.647.537	4	80.170.950	277.832.940											4	80.170.950	400,00	5,85	DINAS KESEHATAN	
		1.02.02.1.02.19	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Dokumen	10	2.281.698.500	1	5.000.000	498.516.000											1	5.000.000	10,00	0,22	DINAS KESEHATAN	
		1.02.02.1.02.22	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Dokumen	32	17.770.353.877	1	975.000	5.056.776.945											1	975.000	3,13	0,01	DINAS KESEHATAN	
		1.02.02.1.02.23	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Unit	6	2.698.448.300	1	225.949.850	571.060.000											1	225.949.850	16,67	8,37	DINAS KESEHATAN	
		<b>1.02.02.1.03</b>	<b>Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi</b>	<b>Persentase pengelolaan data, informasi, dan sistem informasi kesehatan</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>36.400.000</b>	<b>100</b>		<b>7.000.000</b>											<b>50</b>		<b>50,00</b>		<b>DINAS KESEHATAN</b>	
Rata-rata capaian kinerja (%)							2.355.474.047.196		228.304.847.298	382.777.292.515												228.304.847.298	72,89	9,69		
Predikat Kinerja																										
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																										
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																										
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																										
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																										

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
											I		II		III		IV									13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		1.02.02.1.03.01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Dokumen	12	36.400.000	3		7.000.000															3		25,00		DINAS KESEHATAN	
		<b>1.02.02.1.04</b>	<b>Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi</b>	<b>Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Mendapatkan Pembinaan Mutu dan Pemenuhan Perijinan</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>395.469.000</b>	<b>100</b>	<b>47.251.300</b>	<b>71.621.000</b>															<b>50</b>	<b>47.251.300</b>	<b>50,00</b>	<b>11,95</b>	<b>DINAS KESEHATAN</b>	
		1.02.02.1.04.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	Unit	50	124.582.000	32	4.980.600	25.000.000															32	4.980.600	64,00	4,00	DINAS KESEHATAN	
		1.02.02.1.04.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	Unit	405	270.887.000	311	42.270.700	46.621.000															311	42.270.700	76,79	15,60	DINAS KESEHATAN	
		<b>1.02.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>	<b>Presentase Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (SDK)</b>	<b>%</b>	<b>0</b>	<b>4.395.557.000</b>	<b>62,97</b>	<b>466.327.457</b>	<b>885.979.000</b>	<b>61,82</b>							<b>61,82</b>							<b>62,395</b>	<b>466.327.457</b>		<b>10,61</b>	<b>DINAS KESEHATAN</b>	
				<b>Persentase SDM yang Meningkatkan Kompetensinya Pasca Pelatihan (Bapelkes)</b>	<b>%</b>	<b>0</b>		<b>90,52</b>			<b>87</b>							<b>87</b>							<b>88,76</b>				<b>DINAS KESEHATAN</b>	
				<b>Persentase SDM yang meningkatkan kompetensinya pasca pelatihan (P2P)</b>	<b>%</b>	<b>0</b>		<b>90,52</b>																	<b>45,26</b>				<b>DINAS KESEHATAN</b>	
Rata-rata capaian kinerja (%)							2.355.474.047.196		228.304.847.298	382.777.292.515																228.304.847.298	72,89	9,69		
Predikat Kinerja																		SR	SR									T	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																														
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																														
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																														
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																														

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		1.02.03.1.01	<b>Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi</b>	<b>Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)</b>	%	88,51	245.000.000	87,53	28.728.395	60.000.000													43,765	28.728.395	49,45	11,73	DINAS KESEHATAN		
		1.02.03.1.01.01	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Orang	28.528	120.000.000	30.010	23.728.395	30.000.000													30.010	23.728.395	105,19	19,77	DINAS KESEHATAN		
		1.02.03.1.01.02	Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Terdistribusi	Orang	54	125.000.000	5	5.000.000	30.000.000													5	5.000.000	9,26	4,00	DINAS KESEHATAN		
		1.02.03.1.02	<b>Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi</b>	<b>Persentase SDM yang meningkat kompetensinya</b>	%	90	4.150.557.000	8.799,48	437.599.062	825.979.000													4.399,74	437.599.062	4.888,60	10,54	DINAS KESEHATAN		
				<b>Persentase kualitas penyelenggaraan pelatihan</b>	%	99,74		99,48															49,74		49,87		DINAS KESEHATAN		
		1.02.03.1.02.01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	Orang	8.306	2.123.396.200	2.503	159.724.400	415.979.000													2.503	159.724.400	30,13	7,52	DINAS KESEHATAN		
		1.02.03.1.02.02	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia KesehatanJumlah Dokumen Hasil	Dokumen	18	2.027.160.800	2	277.874.662	410.000.000													2	277.874.662	11,11	13,71	DINAS KESEHATAN		
Rata-rata capaian kinerja (%)							2.355.474.047.196		228.304.847.298	382.777.292.515														228.304.847.298	72,89	9,69			
Predikat Kinerja																													
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																													
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																													
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																													
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																													

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8	9		10	11	12	13	14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17				
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehata																							
		1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Presentase Peningkatan Keamanan Pelayanan PBF Cabang dan Cabang PAK yang dikendalikan (SDK)	%	0	641.536.600	89,66	23.621.552	149.987.000	17,61									17,61			53,635	23.621.552	3,68	DINAS KESEHATAN	
				Presentase Peningkatan Penerapan Standar Usaha Kecil Obat Tradisional yang dikendalikan dan diawasi (SDK)	%	0		92,59			17,25									17,25			54,92			DINAS KESEHATAN	
		1.02.04.1.01	Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	Terwujudnya peningkatan kepatuhan PBF Cabang dan Cabang PAK yang dikendalikan dan diawasi terhadap ketentuan perizinan	%	100	312.880.600	100	18.860.184	70.223.000												50	18.860.184	50,00	6,03	DINAS KESEHATAN	
		1.02.04.1.01.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjuti Penerbitan Perizinan	Sarana	49	230.716.600	52	18.860.184	50.282.000												52	18.860.184	106,12	8,17	DINAS KESEHATAN	
		1.02.04.1.01.02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK Berbasis Elektronik	Jumlah Data Perizinan Pengakuan PBF Cabang yang Memenuhi Ketentuan Perizinan Berusaha dan Cabang PAK Berbasis Elektronik	Dokumen	4	82.164.000	0		19.941.000																DINAS KESEHATAN	
Rata-rata capaian kinerja (%)							2.355.474.047.196		228.304.847.298	382.777.292.515													228.304.847.298	72,89	9,69		
Predikat Kinerja																					SR	SR				T	SR
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																											
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																											

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		1.02.04.1.02	Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	Meningkatnya kepatuhan Usaha Kecil Obat Tradisional yang dikendalikan dan diawasi terhadap ketentuan perizinan	%	100	328.656.000	100	4.761.368	79.764.000														50	4.761.368	50,00	1,45	DINAS KESEHATAN	
		1.02.04.1.02.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	Jumlah Usaha Kecil Obat Tradisional yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjuti Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	Sarana	37	273.880.000	27	4.761.368	66.470.000														27	4.761.368	72,97	1,74	DINAS KESEHATAN	
		1.02.04.1.02.02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin UKOT Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Data Sarana UKOT yang Sudah Menerapkan Perizinan Berbasis Elektronik	Dokumen	4	54.776.000			13.294.000																			DINAS KESEHATAN
		1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (Kesmas)	%	0	2.433.485.000	100	52.598.500	576.779.500	2,49									2,49				51,245	52.598.500		2,16	DINAS KESEHATAN	
		1.02.05.1.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Persentase kegiatan advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah provinsi	%	100	2.433.485.000	100	52.598.500	576.779.500														50	52.598.500	50,00	2,16	DINAS KESEHATAN	
		1.02.05.1.01.01	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan	Jumlah dokumen hasil advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat	Dokumen	25	2.433.485.000	3	52.598.500	576.779.500														3	52.598.500	12,00	2,16	DINAS KESEHATAN	
Rata-rata capaian kinerja (%)						2.355.474.047.196		228.304.847.298		382.777.292.515														228.304.847.298		72,89		9,69	
Predikat Kinerja																				SR		SR				T		SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																													
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																													
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																													
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																													

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6		7		8	9		10	11	12	13	14 = 13/8x100	15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	dan lintas sektor tingkat daerah provinsi																			
		1.03.13	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang	Peningkatan Layanan RS Jiwa Grhasia dalam Mendukung Kesesuaian Tata Ruang	%	0	0,701			0,95					0,95		nan	0,8255				DINAS KESEHATAN	
		2.22.08	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Presentase Kab/Kota memiliki kegiatan pembinaan pelyanan kesehatan tradisional (Kesmas)	%	0	20										nan	10				DINAS KESEHATAN	
Rata-rata capaian kinerja (%)						2.355.474.047.196		228.304.847.298		382.777.292.515										228.304.847.298	72,89	9,69	
Predikat Kinerja																SR	SR					T	SR
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																							
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																							

Disusun  
Yogyakarta, 2 Mei 2025  
Kepala Dinas Kesehatan

Dievaluasi  
Yogyakarta, 2 Mei 2025  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah

drg.. PEMBAJUN SETYANINGASTUTIE, M.Kes.  
NIP. 196509121993032006

NI MADE DWIPANTI INDRAYANTI, S.T., M.T.  
NIP. 197010181998032007

**EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUNGAN PROVINSI  
RENJA PERANGKAT DAERAH DINAS SOSIAL PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERIODE PELAKSANAAN : 2025**

Indikator dan target kinerja SKPD yang mengacu pada sasaran RKPD:

1	Persentase PPKS yang memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, jaminan sosial, dan meningkat keberfungsian sosialnya serta PSKS yang meningkat kemampuan dan partisipasinya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	21.51	9.97
2	Persentase masyarakat sasaran yang mampu mewujudkan nilai-nilai keberintisan kejuangan dan kesetiakawanan sosial	26.26	0
3	Kategori Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	2	2
4	Persentase daerah rawan bencana yang siap menghadapi kejadian bencana bersama dengan Taruna Siaga Bencana (Tagana) dan Tenaga Pelopor Perdamaian (TPP)	61.03	2.91

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	
												K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp										K
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17	
1	Terpenuhinya kebutuhan dasar, perlindungan dan jaminan sosial serta perubahan perilaku bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) serta terwujudnya peningkatan kemampuan partisipasi dan peran	1.06.02	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) baik perorangan, kelompok, maupun kelembagaan yang memperoleh komunikasi, informasi edukasi dan sosialisasi dalam melakukan pelayanan kepada Pemer	%	0	35.547.950.937	21,41	1.373.529.185	8.151.534.855	15,1									15,1				18,255	1.373.529.185		3,86	DINAS SOSIAL	
		1.06.02.1.02	<i>Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi</i>	<i>Terpenuhinya dukungan penyelenggaraan kesejahteraan sosial kepada PSKS perorangan, kelompok, maupun kelembagaan yang memperoleh komunikasi, informasi edukasi dan sosialisasi dalam melakukan pelayanan kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)</i>	<i>Orang</i>	1.943	35.547.950.937	493	1.373.529.185	8.151.534.855														493	1.373.529.185	25,37	3,86	DINAS SOSIAL	
Rata-rata capaian kinerja (%)							814.091.127.934		260.377.990.534	189.587.357.058															260.377.990.534	49,87	31,98		
Predikat Kinerja																					SR	SR					SR	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																													
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																													
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																													
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																													

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
						K	Rp	K	Rp		K	Rp	I	II	III	IV	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17	
		1.06.02.1.02.01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	Orang	1.800	9.769.494.356	415	408.074.900	1.543.987.830															415	408.074.900	23,06	4,18	DINAS SOSIAL
		1.06.02.1.02.02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi yang Meningkatkan Kapasitasnya	Orang	78	9.410.754.400	78	860.000.135	2.052.983.000															78	860.000.135	100,00	9,14	DINAS SOSIAL
		1.06.02.1.02.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	Lembaga	16	16.367.702.181	3	105.454.150	4.554.564.025															3	105.454.150	18,75	0,64	DINAS SOSIAL
		<b>1.06.04</b>	<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>	<b>(Resos) Persentase Anak bermasalah sosial, Penyandang Disabilitas, Gelandangan, Pengemis, Lanjut Usia Terlantar, Wanita Bermasalah Sosial dan PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan meni</b>	<b>%</b>	<b>0</b>	<b>195.540.151.187</b>	<b>61,38</b>	<b>164.646.585.612</b>	<b>44.144.876.056</b>	<b>9,73</b>									<b>9,73</b>				<b>35,555</b>	<b>164.646.585.612</b>		<b>84,20</b>	<b>DINAS SOSIAL</b>	
				<b>(Linsos) Persentase Anak bermasalah sosial, Penyandang Disabilitas, Gelandangan, Pengemis, Lanjut Usia Terlantar, Wanita Bermasalah Sosial dan PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan meni</b>	<b>%</b>	<b>0</b>		<b>10,3</b>			<b>2,43</b>									<b>2,43</b>				<b>6,365</b>					<b>DINAS SOSIAL</b>
				<b>(BRTPD) Persentase Anak bermasalah sosial, Penyandang Disabilitas, Gelandangan, Pengemis, Lanjut Usia Terlantar, Wanita Bermasalah Sosial dan PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan menin</b>	<b>%</b>	<b>0</b>		<b>22,5</b>																<b>11,25</b>					<b>DINAS SOSIAL</b>
				<b>(BPRSW) Persentase Anak bermasalah sosial,</b>	<b>%</b>	<b>0</b>		<b>0,07</b>			<b>0,05</b>									<b>0,05</b>				<b>0,06</b>					<b>DINAS SOSIAL</b>
Rata-rata capaian kinerja (%)							814.091.127.934		260.377.990.534	189.587.357.058															260.377.990.534	49,87	31,98		
Predikat Kinerja																					SR	SR					SR	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																													
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																													
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																													
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																													

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I	II	III	IV	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp			
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17	
				Penyandang Disabilitas, Gelandangan, Pengemis, Lanjut Usia Terlantar, Wanita Bermasalah Sosial dan PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan menin																								
				(BRSBKL) Persentase Anak bermasalah sosial, Penyandang Disabilitas, Gelandangan, Pengemis, Lanjut Usia Terlantar, Wanita Bermasalah Sosial dan PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan meni	%	0		2,22				1,38								1,38			1,8				DINAS SOSIAL	
				(BPRSR) Persentase Anak bermasalah sosial, Penyandang Disabilitas, Gelandangan, Pengemis, Lanjut Usia Terlantar, Wanita Bermasalah Sosial dan PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan menin	%	0		22,5				6,72								6,72			14,61				DINAS SOSIAL	
				(BRSPA) Persentase Anak bermasalah sosial, Penyandang Disabilitas, Gelandangan, Pengemis, Lanjut Usia Terlantar, Wanita Bermasalah Sosial dan PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan menin	%	0		22,5				2,34								2,34			12,42				DINAS SOSIAL	
				(BPSTW) Persentase Anak bermasalah sosial, Penyandang Disabilitas, Gelandangan, Pengemis, Lanjut Usia Terlantar, Wanita Bermasalah Sosial dan PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan menin	%	0		0,07				0,07								0,07			0,07				DINAS SOSIAL	
Rata-rata capaian kinerja (%)							814.091.127.934		260.377.990.534			189.587.357.058												260.377.990.534	49,87	31,98		
Predikat Kinerja																				SR	SR					SR	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																												
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																												

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I	II	III	IV	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
				(Program) Persentase Anak bermasalah sosial, Penyandang Disabilitas, Gelandangan, Pengemis, Lanjut Usia Terlantar, Wanita Bermasalah Sosial dan PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan meni	%	0		93,51				12,17								12,17				52,84				DINAS SOSIAL
		1.06.04.1.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi Penyandang Disabilitas terlantar melalui Panti Sosial (BRTPD)	Orang	185	59.163.954.210		40.473.198.653		13.280.029.910													40.473.198.653		68,41		DINAS SOSIAL
				Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi Penyandang Disabilitas terlantar melalui Panti Sosial (BRSBKL)	Orang	275		180																180		65,45		DINAS SOSIAL
				Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi Penyandang Disabilitas terlantar melalui lembaga kesejahteraan sosial dan Pengasramaan SLB	Orang	100		70																70		70,00		DINAS SOSIAL
		1.06.04.1.01.01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	560	28.710.212.052	70	38.014.018.097		6.240.412.860													70	38.014.018.097	12,50	132,41	DINAS SOSIAL
		1.06.04.1.01.02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	560	7.315.862.116	70	1.236.161.061		1.617.460.724													70	1.236.161.061	12,50	16,90	DINAS SOSIAL
		1.06.04.1.01.03	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	460	2.517.984.600	50	79.007.261		561.629.500													50	79.007.261	10,87	3,14	DINAS SOSIAL
		1.06.04.1.01.04	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Orang	20	116.639.500	0	248.790		17.188.500														248.790		0,21	DINAS SOSIAL
Rata-rata capaian kinerja (%)							814.091.127.934		260.377.990.534		189.587.357.058													260.377.990.534	49,87	31,98		
Predikat Kinerja																												
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																												
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																												

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						K	Rp	K	Rp		K	Rp	I	II	III	IV		K	Rp	K	Rp		K	Rp
1	2	3	4	5		6		7		8	9		10	11	12	13	14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		1.06.04.1.01.05	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Orang	560	4.366.212.701	70	789.215.384	998.849.313														
		1.06.04.1.01.06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	560	11.653.748.705	50	52.189.038	2.826.553.345														
		1.06.04.1.01.07	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari Hari Kewenangan Provinsi	Orang	460	3.179.169.000			740.313.500														
		1.06.04.1.01.08	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi	Orang	8	16.745.280	2	250.000	3.920.400														
		1.06.04.1.01.09	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	505	730.971.600	50	287.046.200	159.138.000														
		1.06.04.1.01.10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	18	85.243.020	36	6.620.000	21.388.444														
		1.06.04.1.01.11	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	28	29.870.320	1	5.190.000	5.517.600														
		1.06.04.1.01.12	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	Dokumen	1	441.295.316	1	3.252.822	87.657.724														
		<b>1.06.04.1.02</b>	<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti</b>	<b>Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi anak terlantar dan anak bermasalah sosial lainnya melalui Panti Sosial (BRSPA)</b>	<b>Anak</b>	<b>125</b>	<b>28.158.099.960</b>	<b>70</b>	<b>3.225.317.244</b>	<b>6.535.602.295</b>														
				<b>Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi anak terlantar</b>	<b>Anak</b>	<b>343</b>		<b>28</b>																
Rata-rata capaian kinerja (%)							814.091.127.934		260.377.990.534	189.587.357.058														
Predikat Kinerja																								
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																								
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																								

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8	9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
				<i>dan anak bermasalah sosial lainnya melalui lembaga kesejahteraan sosial</i>																							
		1.06.04.1.02.01	Pengasuhan	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Pengasuhan Kewenangan Provinsi	Orang	125	813.028.491	70	150.000	229.304.680																	
		1.06.04.1.02.02	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanaan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	468	9.507.222.412	28	769.125.300	2.133.981.410																	
		1.06.04.1.02.03	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	468	3.049.915.845	70	1.236.161.061	692.077.045																	
		1.06.04.1.02.04	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	125	1.526.482.700	13	79.007.261	320.000.000																	
		1.06.04.1.02.05	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Orang	468	1.362.040.532	28	789.215.384	311.975.510																	
		1.06.04.1.02.06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	463	5.399.299.500	13	52.189.038	1.412.762.000																	
		1.06.04.1.02.07	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari Hari Kewenangan Provinsi	Orang	120	442.110.892			100.957.560																	
		1.06.04.1.02.08	Fasilitasi Pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi	Orang	5	15.616.000	1	100.000	3.630.000																	
		1.06.04.1.02.09	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	458	4.525.801.092	13	287.046.200	973.881.810																	
Rata-rata capaian kinerja (%)							814.091.127.934		260.377.990.534	189.587.357.058																	
Predikat Kinerja																											
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																											
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																											

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I	II	III	IV	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp			
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17	
		1.06.04.1.02.10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	428	216.790.080	5	6.620.000	63.996.900														5	6.620.000	1,17	3,05	DINAS SOSIAL	
		1.06.04.1.02.11	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	358	585.213.776	5	5.190.000	155.101.430														5	5.190.000	1,40	0,89	DINAS SOSIAL	
		1.06.04.1.02.12	Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Pengganti	Jumlah Orang Mendapatkan Pengasuhan Keluarga Pengganti Kewenangan Provinsi	Orang	2	17.164.800	1	100.000	4.114.000														1	100.000	50,00	0,58	DINAS SOSIAL	
		1.06.04.1.02.13	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Dokumen	1	697.413.840	1	413.000	133.819.950														1	413.000	100,00	0,06	DINAS SOSIAL	
		<b>1.06.04.1.03</b>	<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti</b>	<b>Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi lanjut usia terlantar melalui Panti Sosial (BPSTW)</b>	<b>Orang</b>	<b>228</b>	<b>44.370.279.430</b>	<b>200</b>	<b>39.689.341.507</b>	<b>10.170.473.994</b>														<b>200</b>	<b>39.689.341.507</b>	<b>87,72</b>	<b>89,45</b>	<b>DINAS SOSIAL</b>	
				<b>Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi lanjut usia terlantar melalui Panti Sosial dan lembaga kesejahteraan sosial</b>	<b>Orang</b>	<b>3.345</b>		<b>8.000</b>																<b>8.000</b>		<b>239,16</b>		<b>DINAS SOSIAL</b>	
		1.06.04.1.03.01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	3.428	26.500.597.568	8.000	38.014.018.097	5.711.313.740														8.000	38.014.018.097	233,37	143,45	DINAS SOSIAL	
		1.06.04.1.03.02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	328	3.176.487.760	200	1.236.161.061	716.537.800														200	1.236.161.061	60,98	38,92	DINAS SOSIAL	
		1.06.04.1.03.03	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	303	578.543.544	200	79.007.261	169.311.670														200	79.007.261	66,01	13,66	DINAS SOSIAL	
		1.06.04.1.03.04	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai	Orang	50	270.000.000	0	248.790	65.000.000															248.790		0,09	DINAS SOSIAL	
Rata-rata capaian kinerja (%)							814.091.127.934		260.377.990.534	189.587.357.058															260.377.990.534	49,87	31,98		
Predikat Kinerja																											SR	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																													
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																													
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																													
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																													

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I	II	III	IV	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17	
				Kebutuhan Kewenangan Provinsi																									
		1.06.04.1.03.05	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Orang	228	2.346.351.072	200	65.401.201	567.702.960														200	65.401.201	87,72	2,79	DINAS SOSIAL	
		1.06.04.1.03.06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	228	7.608.989.060	615	242.515.097	1.948.015.300														615	242.515.097	269,74	3,19	DINAS SOSIAL	
		1.06.04.1.03.07	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari Hari Kewenangan Provinsi	Orang	228	2.691.939.680			695.677.400																		DINAS SOSIAL	
		1.06.04.1.03.10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	216	112.435.200	30	6.620.000	26.136.000														30	6.620.000	13,89	5,89	DINAS SOSIAL	
		1.06.04.1.03.11	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	2	32.568.960	6	5.190.000	7.477.800														6	5.190.000	300,00	15,94	DINAS SOSIAL	
		1.06.04.1.03.12	Pemulasaraan	Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	Orang	40	762.219.520	12	40.000.000	175.643.600														12	40.000.000	30,00	5,25	DINAS SOSIAL	
		1.06.04.1.03.13	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitas Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Kewenangan Provinsi	Dokumen	13	290.147.066		180.000	87.657.724															180.000		0,06	DINAS SOSIAL	
		<b>1.06.04.1.04</b>	<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti</b>	<b>Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi gelandangan dan pengemis melalui Panti Sosial (BRSBKL)</b>	<b>Orang</b>	<b>50</b>	<b>6.739.179.433</b>		<b>40.622.180.619</b>	<b>1.489.683.635</b>															<b>40.622.180.619</b>		<b>602,78</b>	<b>DINAS SOSIAL</b>	
		1.06.04.1.04.01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	50	2.754.288.960	30	38.014.018.097	604.915.300														30	38.014.018.097	60,00	1.380,18	DINAS SOSIAL	
Rata-rata capaian kinerja (%)							814.091.127.934		260.377.990.534	189.587.357.058															260.377.990.534	49,87	31,98		
Predikat Kinerja																												SR	SR
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																													
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																													
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																													
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																													

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I	II	III	IV	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17	
		1.06.04.1.04.02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	50	756.940.840	30	1.236.161.061	167.427.700														30	1.236.161.061	60,00	163,31	DINAS SOSIAL	
		1.06.04.1.04.03	Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	50	219.867.185	30	235.035.980	48.108.995														30	235.035.980	60,00	106,90	DINAS SOSIAL	
		1.06.04.1.04.04	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan pemenuhan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Orang	50	76.136.800	30	789.215.384	14.520.000														30	789.215.384	60,00	1.036,58	DINAS SOSIAL	
		1.06.04.1.04.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	50	907.301.944	30	242.515.097	205.823.420														30	242.515.097	60,00	26,73	DINAS SOSIAL	
		1.06.04.1.04.06	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari Hari Kewenangan Provinsi	Orang	50	146.180.000			36.300.000																			DINAS SOSIAL
		1.06.04.1.04.07	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	50	1.617.243.704	86	3.946.500	355.113.220														86	3.946.500	172,00	0,24	DINAS SOSIAL	
		1.06.04.1.04.08	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Gelandangan bagi Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Provinsi	Orang	10	9.744.000	1	400.000	2.420.000														1	400.000	10,00	4,11	DINAS SOSIAL	
		1.06.04.1.04.09	Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	50	66.745.600	40	2.985.000	11.858.000														40	2.985.000	80,00	4,47	DINAS SOSIAL	
		1.06.04.1.04.10	Pemulangan ke Daerah Asal	Jumlah Gelandangan dan Pengemis/Keluarga yang Dipulangkan ke Daerah asal Kewenangan Provinsi	Orang	8	81.619.200	1	97.723.500	22.506.000														1	97.723.500	12,50	119,73	DINAS SOSIAL	
		1.06.04.1.04.11	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar	Dokumen	4	103.111.200	1	180.000	20.691.000													1	180.000	25,00	0,17	DINAS SOSIAL		
Rata-rata capaian kinerja (%)							814.091.127.934		260.377.990.534	189.587.357.058															260.377.990.534	49,87	31,98		
Predikat Kinerja																													
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																													
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																													
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																													
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																													

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
												I	II	III	IV														
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti	Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti																									
		1.06.04.1.05	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan sosial atau Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya melalui Panti Sosial (BPRSW)	Orang	70	57.108.638.154	50	40.636.547.589	12.669.086.222																			
				Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan sosial atau Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya melalui Panti Sosial (BPRSR)	Orang	80		40																					
				Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan sosial atau Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya melalui Panti Sosial dan Lembaga Kesejahteraan Sosial.	Orang	157		105																					
		1.06.04.1.05.01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	327	19.357.230.984	105	38.014.018.097	4.188.290.370																			
		1.06.04.1.05.02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	327	4.570.324.506	40	1.236.161.061	938.251.908																			
		1.06.04.1.05.03	Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	227	2.625.774.500	105	235.035.980	540.000.000																			
Rata-rata capaian kinerja (%)							814.091.127.934		260.377.990.534	189.587.357.058																			
Predikat Kinerja																													
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																													
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																													
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																													
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																													

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
						K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp				
1	2	3	4	5		6		7		8	9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17		
		1.06.04.1.05.04	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	undefined	307	4.204.833.104	105	789.215.384	967.433.720														105	789.215.384	34,20	18,77	DINAS SOSIAL	
		1.06.04.1.05.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	307	11.843.159.204	105	242.515.097	2.649.412.370														105	242.515.097	34,20	2,05	DINAS SOSIAL	
		1.06.04.1.05.06	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari Hari Kewenangan Provinsi	Orang	307	4.252.120.218			1.076.405.836																			DINAS SOSIAL
		1.06.04.1.05.07	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	150	7.746.497.676	16	3.946.500	1.746.201.336														16	3.946.500	10,67	0,05	DINAS SOSIAL	
		1.06.04.1.05.08	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak	Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi	Orang	70	11.692.800	2	400.000	2.904.000														2	400.000	2,86	3,42	DINAS SOSIAL	
		1.06.04.1.05.09	Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	230	193.870.282		2.985.000	31.761.532																2.985.000		1,54	DINAS SOSIAL
		1.06.04.1.05.10	Pemulangan ke Daerah Asal	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi yang Dipulangkan ke Daerah Asal	Orang	227	1.847.513.280	105	97.723.500	438.401.150														105	97.723.500	46,26	5,29	DINAS SOSIAL	
		1.06.04.1.05.11	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	undefined	0	455.621.600	1	14.546.970	90.024.000														1	14.546.970		3,19	DINAS SOSIAL	
Rata-rata capaian kinerja (%)							814.091.127.934		260.377.990.534	189.587.357.058															260.377.990.534	49,87	31,98		
Predikat Kinerja																													
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																													
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																													
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																													
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																													

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I	II	III	IV	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp			
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17	
		1.06.05	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>	(Linsos) Persentase anak balita terlantar dan Fakir Miskin yang memperoleh perlindungan sosial dan atau jaminan sosial	%	0	71.281.741.488	0	2.025.425.374	20.072.843.040	0,57									0,57				0,285	2.025.425.374		2,84	DINAS SOSIAL	
				(Jamsos) Persentase anak balita terlantar dan Fakir Miskin yang memperoleh perlindungan sosial dan atau jaminan sosial	%	0		0,29																0,145				DINAS SOSIAL	
				(Program) Persentase anak balita terlantar dan Fakir Miskin yang memperoleh perlindungan sosial dan atau jaminan sosial	%	0		23,07			0,57													11,82				DINAS SOSIAL	
		1.06.05.1.01	<b>Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal</b>	<b>Terlindunginya anak balita terlantar dan anak terlantar dengan memperoleh calon orang tua angkat.</b>	undefined	31	3.140.388.600	21	22.937.050	888.776.000														21	22.937.050	67,74	0,73	DINAS SOSIAL	
		1.06.05.1.01.01	Pengangkatan Anak antar WNI	Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Asuh/Orang Tua Angkat Sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi	Orang	30	3.013.795.600	20	22.571.750	858.013.000														20	22.571.750	66,67	0,75	DINAS SOSIAL	
		1.06.05.1.01.02	Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Tunggal sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi	Orang	1	126.593.000	1	365.300	30.763.000														1	365.300	100,00	0,29	DINAS SOSIAL	
		1.06.05.1.02	<b>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi</b>	<b>Terlindunginya Fakir Miskin dengan tersedianya data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi yang akurat dan fakir miskin memperoleh bimbingan keterampilan berusaha dan bantuan ekonomis produktif.</b>	undefined	1.600	68.141.352.888	1.600	2.002.488.324	19.184.067.040														1.600	2.002.488.324	100,00	2,94	DINAS SOSIAL	
		1.06.05.1.02.01	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial	Keluarga	1.990	6.007.933.500	2.197	1.329.268.200	1.201.586.700														2.197	1.329.268.200	110,40	22,13	DINAS SOSIAL	
Rata-rata capaian kinerja (%)							814.091.127.934		260.377.990.534	189.587.357.058															260.377.990.534	49,87	31,98		
Predikat Kinerja																													
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																													
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																													
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																													
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																													

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
												I	II	III	IV															
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
				Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi																										
		1.06.05.1.02.02	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Lintas Kabupaten/Kota	Orang	1.900	62.133.419.388	230	673.220.124	17.982.480.340															230	673.220.124	12,11	1,08	DINAS SOSIAL	
		2.22.08	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN</b>	<b>Persentase penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui pelestarian nilai-nilai budaya</b>	%	0	26.515.289.500	8,24	2.726.205.553	6.000.000.000															4,12	2.726.205.553		10,28	DINAS SOSIAL	
		2.22.08.5.01	<i>Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman</i>	<i>Terlaksananya penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam pelayanan pada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan pelestarian nilai-nilai budaya serta terpeliharanya Monumen, Tetenger, Makam Pahlawan Nasional.</i>	%	8,18	4.244.629.000																		nan				DINAS SOSIAL	
		2.22.08.5.01.01	Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan	Dokumen	0	4.244.629.000			0																			DINAS SOSIAL	
		2.22.08.5.09	<b>Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya</b>	<b>Terlaksananya pelestarian adat, seni, dan tradisi melalui penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam pelayanan pada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan peningkatan kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) serta penanaman nilai-nilai kesetiakawanan sosial dan kepahlawanan</b>	%	8,18	22.270.660.500	8,18	2.726.205.553	6.000.000.000																4,09	2.726.205.553	50,00	12,24	DINAS SOSIAL
		2.22.08.5.09.23	Penumbuhan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keberintisan, dan Kesetiakawanan Sosial	Jumlah Dokumen terkait Nilai-Nilai Kepahlawanan,Keperintisan, dan Kesetiakawanan Sosial	Dokumen	6	22.270.660.500	6	2.726.205.553	6.000.000.000															6	2.726.205.553	100,00	12,24	DINAS SOSIAL	
Rata-rata capaian kinerja (%)							814.091.127.934		260.377.990.534	189.587.357.058																260.377.990.534	49,87	31,98		
Predikat Kinerja																														
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																														
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																														
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																														
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																														

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I	II	III	IV	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp			
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17	
2	Terwujudnya perubahan perilaku dan tertanamnya nilai-nilai keberintisan, kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial kepada masyarakat	1.06.03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang memperoleh dukungan psikososial	%	0	238.239.700	0,84	1.242.650	56.870.000														0,42	1.242.650		0,52	DINAS SOSIAL	
		1.06.03.1.01	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	Tertanganinya warga negara migran Korban Tindak Kekerasan melalui dukungan psikososial	Orang	10	238.239.700	1	1.242.650	56.870.000														1	1.242.650	10,00	0,52	DINAS SOSIAL	
				Tertanganinya warga negara migran Korban Tindak Kekerasan melalui dukungan pemulangan	Orang	5																							DINAS SOSIAL
		1.06.03.1.01.01	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan	5	238.239.700	1	1.242.650	56.870.000														1	1.242.650	20,00	0,52	DINAS SOSIAL	
		1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase penguatan nilai-nilai keberintisan, kepahlawanan, kejuangan, kesetiakawanan sosial dalam masyarakat	%	0	3.942.664.000	35,68	125.758.000	804.620.000														17,84	125.758.000		3,19	DINAS SOSIAL	
		1.06.07.1.01	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Terlaksananya penguatan nilai-nilai keberintisan, kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial dalam masyarakat serta pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional.	Orang	7.099	3.942.664.000	34,6	125.758.000	804.620.000														34,6	125.758.000	0,49	3,19	DINAS SOSIAL	
Rata-rata capaian kinerja (%)							814.091.127.934		260.377.990.534	189.587.357.058															260.377.990.534	49,87	31,98		
Predikat Kinerja																													
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																													
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																													
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																													
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																													

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab										
						K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp						
1	2	3	4	5		6		7		8	9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17				
		1.06.07.1.01.02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Makam	23	3.942.664.000	23	125.758.000	804.620.000													23	125.758.000	100,00	3,19	DINAS SOSIAL				
3	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di perangkat daerah	0.00.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	(Dinas) Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	0	458.425.747.000	91,2	49.637.618.232	104.753.156.192	87												87				89,1	49.637.618.232		10,83	DINAS SOSIAL
				(BRTPD) Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	0		356,92			89													89			222,96			DINAS SOSIAL	
				(BPRSW) Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	0		354,48			88,65													88,65			221,565			DINAS SOSIAL	
				(BRSBKL) Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai	0					88,09													88,09			88,09			DINAS SOSIAL	
				(BPRSR) Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai	0		90,82			88,8													88,8			179,62			DINAS SOSIAL	
				(BRSPA) Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai	0		90,18			90,28													90,28			180,46			DINAS SOSIAL	
				(BPSTW) Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	0		91,21			88,43													88,43			89,82			DINAS SOSIAL	
		0.00.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terselenggaranya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bulan	12	501.645.500	12	20.334.450	110.896.500																	12	20.334.450	100,00	4,05	DINAS SOSIAL
		0.00.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	208.465.500	1	6.360.400	44.346.500																	1	6.360.400	50,00	3,05	DINAS SOSIAL
Rata-rata capaian kinerja (%)							814.091.127.934		260.377.990.534	189.587.357.058																	260.377.990.534	49,87	31,98		
Predikat Kinerja																															
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																															
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																															
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																															
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																															

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I	II	III	IV	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp			
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17	
		0.00.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	2	130.400.000	2	8.919.300		30.250.000													2	8.919.300	100,00	6,84	DINAS SOSIAL	
		0.00.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	2	162.780.000	2	5.054.750		36.300.000													2	5.054.750	100,00	3,11	DINAS SOSIAL	
		<b>0.00.01.1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Bulan</b>	<b>12</b>	<b>255.797.001.261</b>	<b>12</b>	<b>37.745.413.115</b>		<b>53.678.269.160</b>													<b>12</b>	<b>37.745.413.115</b>	<b>100,00</b>	<b>14,76</b>	<b>DINAS SOSIAL</b>	
		0.00.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Tahun	247	254.439.970.761	414	37.506.744.833		53.407.106.400													414	37.506.744.833	167,61	14,74	DINAS SOSIAL	
		0.00.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	1.031.760.000	12	200.035.254		207.780.000													12	200.035.254	100,00	19,39	DINAS SOSIAL	
		0.00.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	1	15.240.000	3	2.000.510		3.500.000													3	2.000.510	300,00	13,13	DINAS SOSIAL	
		0.00.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	58.827.040	1	4.397.700		11.700.700													1	4.397.700	100,00	7,48	DINAS SOSIAL	
		0.00.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tahun	12	237.885.260	12	29.733.518		45.182.060													12	29.733.518	100,00	12,50	DINAS SOSIAL	
		0.00.01.1.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan	1	13.318.200	1	2.501.300		3.000.000													1	2.501.300	100,00	18,78	DINAS SOSIAL	
		<b>0.00.01.1.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Terselenggaranya Administrasi Barang pada Perangkat Daerah</b>	<b>Bulan</b>	<b>12</b>	<b>437.760.000</b>	<b>12</b>	<b>93.378.978</b>		<b>87.840.000</b>													<b>12</b>	<b>93.378.978</b>	<b>100,00</b>	<b>21,33</b>	<b>DINAS SOSIAL</b>	
		0.00.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	6	437.760.000	6	93.378.978		87.840.000													6	93.378.978	100,00	21,33	DINAS SOSIAL	
Rata-rata capaian kinerja (%)							814.091.127.934		260.377.990.534		189.587.357.058														260.377.990.534	49,87	31,98		
Predikat Kinerja																													
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																													
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																													
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																													
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																													

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						K	Rp	K	Rp		K	Rp	I	II	III	IV	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K
1	2	3	4	5		6		7		8	9		10	11	12	13	14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		0.00.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bulan	12	671.454.000	12	1.647.950	150.000.000											12	1.647.950	100,00	0,25	DINAS SOSIAL	
		0.00.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Orang	1	671.454.000	2	1.647.950	150.000.000											2	1.647.950	200,00	0,25	DINAS SOSIAL	
		0.00.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	8.468.067.010	12	223.560.023	1.777.845.650											12	223.560.023	100,00	2,64	DINAS SOSIAL	
		0.00.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	7	1.304.641.070	1	22.438.551	305.376.000											1	22.438.551	14,29	1,72	DINAS SOSIAL	
		0.00.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	7	2.125.187.500	1	25.104.315	508.197.500											1	25.104.315	14,29	1,18	DINAS SOSIAL	
		0.00.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	7	1.159.347.800	1	20.968.528	125.000.000											1	20.968.528	14,29	1,81	DINAS SOSIAL	
		0.00.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	7	100.327.100			20.215.400															DINAS SOSIAL	
		0.00.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	7	874.618.520	1	21.428.240	193.140.000											1	21.428.240	14,29	2,45	DINAS SOSIAL	
		0.00.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	undefined	4	172.338.200	4	6.772.500	40.125.500											4	6.772.500	100,00	3,93	DINAS SOSIAL	
		0.00.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	undefined	12	2.494.585.800	12	101.450.889	532.127.750											12	101.450.889	100,00	4,07	DINAS SOSIAL	
		0.00.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	237.021.020	1	25.397.000	53.663.500											1	25.397.000	100,00	10,72	DINAS SOSIAL	
		0.00.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	undefined	12	46.598.474.583	12	36.967.799	11.669.221.421											12	36.967.799	100,00	0,08	DINAS SOSIAL	
		0.00.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	30	3.500.000.000			1.000.000.000															DINAS SOSIAL	
Rata-rata capaian kinerja (%)							814.091.127.934		260.377.990.534	189.587.357.058												260.377.990.534	49,87	31,98		
Predikat Kinerja																										
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																										
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																										
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																										
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																										

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
												I	II	III	IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9	10	11	12	13	14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Lapangan	yang Disediakan																					
		0.00.01.1.07.04	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	Unit	18	319.445.100				68.981.700													DINAS SOSIAL	
		0.00.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	7	875.462.972	1	10.000.000		144.332.672									1	10.000.000	14,29	1,14	DINAS SOSIAL	
		0.00.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	84	2.648.414.390	1	13.637.499		343.962.580									1	13.637.499	1,19	0,51	DINAS SOSIAL	
		0.00.01.1.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	8	17.504.760.620				4.515.720.000													DINAS SOSIAL	
		0.00.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	21.750.391.501	2	13.330.300		5.596.224.469									2	13.330.300		0,06	DINAS SOSIAL	
		<b>0.00.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Bulan</b>	<b>12</b>	<b>60.152.933.138</b>	<b>12</b>	<b>10.290.488.517</b>		<b>12.430.586.521</b>									<b>12</b>	<b>10.290.488.517</b>	<b>100,00</b>	<b>17,11</b>	<b>DINAS SOSIAL</b>	
		0.00.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	undefined	12	97.797.901	12	1.990.000		20.833.901									12	1.990.000	100,00	2,03	DINAS SOSIAL	
		0.00.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	undefined	12	8.414.559.834	12	974.211.653		1.806.457.448									12	974.211.653	100,00	11,58	DINAS SOSIAL	
		0.00.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	7	51.640.575.403	12	9.314.286.864		10.603.295.172									12	9.314.286.864	171,43	18,04	DINAS SOSIAL	
		<b>0.00.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Bulan</b>	<b>12</b>	<b>85.798.411.508</b>	<b>12</b>	<b>1.225.827.400</b>		<b>24.848.496.940</b>									<b>12</b>	<b>1.225.827.400</b>	<b>100,00</b>	<b>1,43</b>	<b>DINAS SOSIAL</b>	
		0.00.01.1.09.010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	undefined	362	5.117.158.084	32	125.634.000		1.318.937.026									32	125.634.000	8,84	2,46	DINAS SOSIAL	
		0.00.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	116	7.735.359.526	53	1.053.873.200		1.557.741.852									53	1.053.873.200	45,69	13,62	DINAS SOSIAL	
Rata-rata capaian kinerja (%)							814.091.127.934		260.377.990.534		189.587.357.058										260.377.990.534	49,87	31,98		
Predikat Kinerja																								SR	SR
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																									
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																									

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I	II	III	IV	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp			
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17	
			Dinas Operasional atau Lapangan																										
		0.00.01.1.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	33	24.680.800	12	450.000	4.973.000														12	450.000	36,36	1,82	DINAS SOSIAL	
		0.00.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	356	1.613.554.900	23	45.870.200	350.000.000														23	45.870.200	6,46	2,84	DINAS SOSIAL	
		0.00.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0	71.307.658.198			21.616.845.062																		DINAS SOSIAL	
		<b>4.01.10</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN</b>	<b>Persentase capaian implementasi inovasi layanan publik</b>	<b>%</b>	<b>0</b>	<b>450.000.000</b>	<b>75</b>	<b>364.469.770</b>	<b>100.000.000</b>														<b>37,5</b>	<b>364.469.770</b>		<b>80,99</b>	<b>DINAS SOSIAL</b>	
		<b>4.01.10.5.02</b>	<b>Peningkatan Budaya Pemerintahan</b>	<b>Tercapainya implementasi budaya pemerintahan</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>450.000.000</b>	<b>100</b>	<b>364.469.770</b>	<b>100.000.000</b>														<b>50</b>	<b>364.469.770</b>	<b>50,00</b>	<b>80,99</b>	<b>DINAS SOSIAL</b>	
		4.01.10.5.02.01	Implementasi Budaya Pemerintahan DIY	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan DIY	Dokumen	2	450.000.000	1	364.469.770	100.000.000														1	364.469.770	50,00	80,99	DINAS SOSIAL	
<b>4</b>	<b>Terwujudnya kesiapsiagaan Bencana (pra, pas, dan pasca)</b>	<b>1.06.06</b>	<b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>	<b>Persentase Korban Bencana Alam dan Korban Bencana Sosial yang memperoleh dukungan psikososial dan pemenuhan kebutuhan dasar</b>	<b>%</b>	<b>0</b>	<b>22.149.344.122</b>	<b>76,67</b>	<b>39.477.156.158</b>	<b>5.503.456.915</b>	<b>2,91</b>									<b>2,91</b>				<b>39,79</b>	<b>39.477.156.158</b>		<b>178,23</b>	<b>DINAS SOSIAL</b>	
		<b>1.06.06.1.01</b>	<b>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi</b>	<b>Terlaksananya kesiapsiagaan bencana dan terlindunginya korban bencana alam dan korban bencana sosial melalui dukungan psikososial dan pemenuhan kebutuhan dasar.</b>	<b>Orang</b>	<b>1.820</b>	<b>22.149.344.122</b>	<b>10.477</b>	<b>39.477.156.158</b>	<b>5.503.456.915</b>														<b>10.477</b>	<b>39.477.156.158</b>	<b>575,66</b>	<b>178,23</b>	<b>DINAS SOSIAL</b>	
		1.06.06.1.01.01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi	Orang	100.500	2.819.514.500	10.000	38.014.018.097	713.900.000														10.000	38.014.018.097	9,95	1.348,25	DINAS SOSIAL	
		1.06.06.1.01.02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan	Orang	150	438.885.000	50	1.236.161.061	145.200.000														50	1.236.161.061	33,33	281,66	DINAS SOSIAL	
Rata-rata capaian kinerja (%)							814.091.127.934		260.377.990.534	189.587.357.058														260.377.990.534	49,87	31,98			
Predikat Kinerja																					SR	SR					SR	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																													
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																													
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																													
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																													

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab									
					K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp					
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17	
				Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Provinsi																									
		1.06.06.1.01.03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Provinsi	Unit	10	2.054.389.100	5	1.000.000	605.000.000														5	1.000.000	50,00	0,05	DINAS SOSIAL	
		1.06.06.1.01.04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi	Orang	215	908.137.000	132	88.537.000	196.020.000														132	88.537.000	61,40	9,75	DINAS SOSIAL	
		1.06.06.1.01.05	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi	Orang	1.215	15.928.418.522	270	137.440.000	3.843.336.915														270	137.440.000	22,22	0,86	DINAS SOSIAL	
Rata-rata capaian kinerja (%)							814.091.127.934		260.377.990.534	189.587.357.058															260.377.990.534	49,87	31,98		
Predikat Kinerja																													
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																													
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																													
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																													
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																													

Disusun  
Yogyakarta, 2 Mei 2025  
Kepala Dinas Sosial

Dievaluasi  
Yogyakarta, 2 Mei 2025  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah

ENDANG PATMINTARSIH , S.H., M.Si.  
NIP. 196604041993032007

NI MADE DWIPANTI INDRAYANTI, S.T., M.T.  
NIP. 197010181998032007

**EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUNGAN PROVINSI  
RENJA PERANGKAT DAERAH DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERIODE PELAKSANAAN : 2025**

Indikator dan target kinerja SKPD yang mengacu pada sasaran RKPD:	Target	Realisasi
1 Angka Partisipasi Sekolah (APS) penduduk usia 16-18 tahun	90	90.36
2 Capaian Proporsi peserta didik dengan kategori kemampuan literasi minimal capak jenjang SMA	50.73	94.31
3 Capaian Proporsi peserta didik dengan kategori kemampuan numerasi minimal capak jenjang SMA	30.86	90.59
4 Capaian Proporsi peserta didik dengan kategori kemampuan literasi minimal capak jenjang SMK	51.96	82.73
5 Capaian Proporsi peserta didik dengan kategori kemampuan numerasi minimal capak jenjang SMK	30.39	77.21
6 Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	36.57	91.4
7 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Usia 4-18 tahun disabilitas	51.35	75.34
8 Persentase pemuda bekerja	64.84	72.17
9 Jumlah capaian medali pada kejuaraan multievent	24	
10 Kategori Reformasi Birokrasi OPD	2	2

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						K	Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	K		Rp		
1	2	3	4	5	6	7			8	9	10	11	12	13		14 = 13/8x100	15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17					
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
1	Meningkatnya pemerataan layanan, kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat (Bidang Pembinaan SMA)	%	100	4.117.865.882.970	110,88	499.270.096.042		809.956.231.306	110,88	163.167.450					110,88	163.167.450	0,02	110,88	499.433.263.492	110,88	12,13	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
				Jumlah penerima sertifikat keahlian teknik	Orang	0		38													38				DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
				Persentase guru jenjang pendidikan menengah dan khusus pengguna media pembelajaran JogjaBelajar	%	0		99,79				14,84						14,84			57,315				DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
				Angka Putus Sekolah SMA/SMK (Bidang Pembinaan SMA)	%	0		0,28				0,28						0,28			0,28				DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
				Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat (Sekretariat)	%	100		110,88				110,88						110,88			110,88				DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
				Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat (Bidang Perencanaan dan Pengembangan Mutu Pendidikan, Pemuda dan Olahraga)	%	100		110,88				110,88						110,88			110,88				DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
				Angka Partisipasi Murni (APM) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat (Bidang Pembinaan SMA)	%	0		94,82				94,82						94,82			94,82				DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
Rata-rata capaian kinerja (%)							10.867.084.739.601		1.493.331.545.686		2.122.002.659.598		222.611.138.868					222.611.138.868		10,49		1.715.942.684.554	202.720,34	15,79		
Predikat Kinerja																		SR						ST	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																										
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																										
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																										
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																										

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab								
						6		7		8		9		10		11				12		13			14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17	
						K	Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K			Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				Angka Putus Sekolah SMA/SMK (Bidang Pembinaan SMK)	%	0				0,28							0,28			0,14				DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA								
				Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat (Bidang Pembinaan SMK)	%	100				110,88							110,88			55,44			55,44	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA								
				Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik khusus PLB	%	0		87,79		87,79							87,79			87,79				DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA								
				Angka Partisipasi Murni (APM) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat (Bidang Pembinaan SMK)	%	0		94,82		94,82							94,82			94,82				DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA								
				Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK	%	0		76,17		82,35							82,35			79,26				DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA								
				Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya di Kota Yogyakarta	%	0		88,57		91,43							91,43			90				DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA								
				Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Bantul	%	0		90,24		78,31							78,31			84,275				DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA								
				Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Kulon Progo	%	0		84,78		82,61							82,61			83,695				DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA								
				Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Gunungkidul	%	0		82,61		82,61							82,61			82,61				DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA								
				Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Sleman	%	0		89,09		84,55							84,55			86,82				DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA								
		1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu)	Medali	44	1.533.001.667.005	38	145.311.399.501	304.192.977.324	54.389.150						54.389.150	0,02	38	145.365.788.651	86,36	9,48	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA									
				Jumlah penerima bantuan pembiayaan pendidikan yang tepat sasaran	Siswa	500		350											350			70,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA									
				Kemampuan Literasi SMA berdasarkan Asesmen	%	74,76		74,31											37,155			49,70	DINAS PENDIDIKAN,									
Rata-rata capaian kinerja (%)							10.867.084.739.601		1.493.331.545.686	2.122.002.659.598	222.611.138.868						222.611.138.868	10,49		1.715.942.684.554	202.720,34	15,79										
Predikat Kinerja																	SR	SR				ST	SR									
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																																
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																																
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																																
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																																

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											I		II		III		IV				13		14 = 13/8x100			15 = 7 + 13	
1	2	3	4	5	6		7			8	9		10	11	12	13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
				Nasional																					PEMUDA DAN OLAH RAGA		
				Kemampuan Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	%	61,79		61,34													30,67			49,64	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA		
				Persentase SMA yang melaksanakan UKS	%	36,1		30,1													15,05			41,69	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA		
				Persentase satuan pendidikan yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter	%	88,02		6,86													3,43			3,90	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA		
				Iklim keamanan SMA	%	85,03		84,58													42,29			49,74	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA		
				Iklim kebinekaan SMA	%	97,31		96,86													48,43			49,77	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA		
				Iklim Inklusivitas SMA	%	83,58		30,1													15,05			18,01	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA		
		1.01.02.1.01.01	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Unit	1	74.900.625.000			17.250.000.000															DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA		
		1.01.02.1.01.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang telah dibangun	Ruang	5	1.690.587.247	4	935.464.815	324.387.400											4	935.464.815	80,00	55,33	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA		
		1.01.02.1.01.04	Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi	Jumlah Ruang Laboratorium Biologi yang telah dibangun	Ruang	5	2.901.608.599			556.756.400															DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA		
		1.01.02.1.01.06	Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia	Jumlah Ruang Laboratorium Kimia yang telah dibangun	Ruang	5	2.901.608.599			556.756.400															DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA		
		1.01.02.1.01.07	Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer	Jumlah Ruang Laboratorium Komputer yang telah dibangun	Ruang	5	1.814.086.732			348.084.300															DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA		
		1.01.02.1.01.10	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang telah dibangun	Ruang	5	1.690.587.247	4	637.932.814	324.387.400											4	637.932.814	80,00	37,73	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA		
Rata-rata capaian kinerja (%)						10.867.084.739.601		1.493.331.545.686		2.122.002.659.598	222.611.138.868										SR	SR			202.720,34	15,79	
Predikat Kinerja																										SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																											
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																											

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
											I		II	III		IV		13								14 = 13/8x100	15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%	
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K										Rp	K	Rp	K
1	2	3	4	5	6		7			8	9		10	11	12	13	14 = 13/8x100	15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17								
		1.01.02.1.01.14	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang telah dibangun	Unit	5	20.776.335.905	17	3.337.117.665	3.986.532.845	0								17	3.337.117.665	340,00	16,06	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA							
		1.01.02.1.01.19	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang telah direhabilitasi sedang/berat	Ruang	90	21.627.007.383	41	10.525.516.960	4.149.758.440	0								41	10.525.516.960	45,56	48,67	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA							
		1.01.02.1.01.20	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang telah direhabilitasi sedang/berat	Ruang	25	10.058.813.716	3	526.763.357	1.930.070.415									3	526.763.357	12,00	5,24	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA							
		1.01.02.1.01.22	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika	Jumlah Ruang Laboratorium Fisika yang telah direhabilitasi sedang/berat	Ruang	5	2.835.585.580	1	327.217.822	544.088.000									1	327.217.822	20,00	11,54	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA							
		1.01.02.1.01.23	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia	Jumlah Ruang Laboratorium Kimia yang telah direhabilitasi sedang/berat	Ruang	5	1.883.088.459	4	1.238.744.087	361.324.250									4	1.238.744.087	80,00	65,78	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA							
		1.01.02.1.01.24	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer	Jumlah Ruang Laboratorium Komputer yang telah direhabilitasi sedang/berat	Ruang	5	1.050.728.539	4	747.323.744	201.612.250									4	747.323.744	80,00	71,12	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA							
		1.01.02.1.01.25	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa	Jumlah Ruang Laboratorium Bahasa yang telah direhabilitasi sedang/berat	Ruang	5	2.101.457.076	1	190.825.378	403.224.500									1	190.825.378	20,00	9,08	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA							
		1.01.02.1.01.27	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang telah direhabilitasi sedang/berat	Ruang	4	567.770.258	2	393.903.931	171.531.800									2	393.903.931	50,00	69,38	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA							
		1.01.02.1.01.28	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang telah direhabilitasi sedang/berat	Ruang	10	4.923.575.543	4	1.427.908.925	944.728.450									4	1.427.908.925	40,00	29,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA							
		1.01.02.1.01.31	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang telah direhabilitasi	Unit	25	7.703.977.475			1.575.991.178													DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA							
		1.01.02.1.01.36	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah mebel sekolah yang tersedia	Paket	45	1.929.866.750	42	2.315.660.500	370.300.000									42	2.315.660.500	93,33	119,99	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA							
		1.01.02.1.01.39	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah perlengkapan peserta didik yang tersedia	Paket	1.200	680.055.232	970	910.212.700	156.620.225	0								970	910.212.700	80,83	133,84	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA							
Rata-rata capaian kinerja (%)						10.867.084.739.601		1.493.331.545.686			2.122.002.659.598		222.611.138.868				222.611.138.868		10,49		1.715.942.684.554		202.720,34		15,79					
Predikat Kinerja													SR				SR				ST		SR							
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																														
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																														
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																														
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																														

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
												I		II	III	IV	13		14 = 13/8x100			15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%							
												K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7			8			9		10	11	12	13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17				
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
		1.01.02.1.01.45	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	200.394	75.407.871.601	25.114	8.367.032.000		11.640.876.170	0														25.114	8.367.032.000	12,53	11,10	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
		1.01.02.1.01.47	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	169	563.546.047.934				114.018.129.816																			DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
		1.01.02.1.01.48	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Atas yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	Satuan Pendidikan	75	3.712.116.919				854.919.660																			DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
		1.01.02.1.01.49	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta Didik	47.040	65.328.950.429	3.840	8.901.340.551		14.091.548.230	0														3.840	8.901.340.551	8,16	13,63	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
		1.01.02.1.01.50	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Orang	1.480	23.869.065.563	308	1.460.618.500		5.458.626.800	0														308	1.460.618.500	20,81	6,12	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
		1.01.02.1.01.51	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Naik Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	25.510	816.071.779	69	41.476.400		53.138.050	0														69	41.476.400	0,27	5,08	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
		1.01.02.1.01.52	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan	169	10.387.662.397	241	520.432.390		2.182.501.050	0														241	520.432.390	142,60	5,01	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
		1.01.02.1.01.53	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	170	594.911.752.165	170	97.868.100.944		114.150.794.000	0														170	97.868.100.944	100,00	16,45	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
		1.01.02.1.01.54	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Orang	170	361.679.313	170	1.100.000		73.025.000															170	1.100.000	100,00	0,30	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
		1.01.02.1.01.57	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang	400	16.642.313.179		369.202.100		3.832.810.505	65	54.389.150					65	54.389.150	1,42	65	423.591.250	16,25	2,55					DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA		
		1.01.02.1.01.60	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	44	9.889.603.390	17	3.428.010.333		2.277.626.635	0														17	3.428.010.333	38,64	34,66	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
		1.01.02.1.01.61	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Kegiatan	28	1.527.463.925	26	839.493.585		351.782.815	0														26	839.493.585	92,86	54,96	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
Rata-rata capaian kinerja (%)							10.867.084.739.601		1.493.331.545.686		2.122.002.659.598		222.611.138.868													222.611.138.868	10,49	1.715.942.684.554	202.720,34	15,79	
Predikat Kinerja																															SR
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																															
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																															
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																															
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																															

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
															I		II	III	IV	13	14 = 13/8x100													15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%	
															K	Rp	K	Rp	K		Rp	K												Rp	K	Rp	K
1	2	3	4	5		6		7			8				9		10	11	12	13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17									
		1.01.02.1.01.62	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah peserta bimbingan teknis peningkatan kapasitas bidang pendidikan yang dilaksanakan	Orang	400	4.563.703.071				1.051.044.340																						DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA				
		1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Persentase lulusan SMK dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha	%	62	2.168.677.932.405	56	250.670.292.241		424.551.722.880											54.389.150		0,01	28	250.724.681.391	45,16	11,56			DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA						
				Iklm kebinekaan SMK	%	93,32		92,87																	46,435		49,76				DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA						
				Iklm Inklusivitas SMK	%	77,95		77,5																	38,75		49,71				DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA						
				Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu)	Medali	24		16																	16		66,67				DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA						
				Persentase guru produktif yang memiliki sertifikat kompetensi dari BNSP	%	25,36		25,3																	12,65		49,88				DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA						
				Jumlah SMK yang memperoleh status BLUD	Sekolah	7		5																	5		71,43				DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA						
				Jumlah SMK yang menyelenggarakan Teaching Factory	Sekolah	46		38																	38		82,61				DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA						
				Kemampuan Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	%	66,35																									DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA						
				Kemampuan Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	%	55,31		54,86																	27,43		49,59				DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA						
				Persentase SMK yang melaksanakan UKS	%	36,1		30,1																	15,05		41,69				DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA						
				Iklm keamanan SMK	%	81,88		81,43																	40,715		49,73				DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA						
Rata-rata capaian kinerja (%)							10.867.084.739.601		1.493.331.545.686		2.122.002.659.598													222.611.138.868		10,49		1.715.942.684.554	202.720,34	15,79							
Predikat Kinerja																																					
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																																					
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																																					

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab								
												I		II		III		IV									13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%	
												9	10	11	12	13		14 = 13/8x100									15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17			
1	2	3	4	5		6		7			8			9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17				
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
		1.01.02.1.02.02	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Ruang	5	3.477.104.453				667.181.700																			DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA				
		1.01.02.1.02.04	Pembangunan Ruang Praktik Siswa	Jumlah Ruang Praktik Siswa yang telah dibangun	Ruang	60	105.749.409.956	3	4.233.503.792		20.291.041.600														3	4.233.503.792	5,00	4,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA					
		1.01.02.1.02.05	Pembangunan Ruang Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang telah dibangun	Ruang	55	31.139.430.872	9	5.919.782.448		5.974.988.300														9	5.919.782.448	16,36	19,01	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA					
		1.01.02.1.02.06	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang telah dibangun	Ruang	5	1.051.399.797		637.932.814		201.741.050															637.932.814		60,67	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA					
		1.01.02.1.02.07	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Ruang Perpustakaan Sekolah yang telah dibangun	Ruang	5	3.477.104.453	1	904.290.268		667.181.700														1	904.290.268	20,00	26,01	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA					
		1.01.02.1.02.10	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang telah dibangun	Unit	60	11.014.109.145		3.337.117.665		2.113.371.100															3.337.117.665		30,30	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA					
		1.01.02.1.02.15	Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang telah direhabilitasi	Ruang	25	6.880.879.964				1.320.293.150																		DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA					
		1.01.02.1.02.16	Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang telah direhabilitasi	Ruang	5	1.566.548.358	3	645.316.196		300.587.000														3	645.316.196	60,00	41,19	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA					
		1.01.02.1.02.17	Rehabilitasi Ruang Praktik Siswa	Jumlah Ruang Praktik Siswa yang telah direhabilitasi	Ruang	10	10.248.994.892				1.966.562.100																		DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA					
		1.01.02.1.02.18	Rehabilitasi Ruang Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang telah direhabilitasi	Ruang	5	1.897.706.300	2	420.858.100		364.129.100														2	420.858.100	40,00	22,18	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA					
		1.01.02.1.02.23	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang telah direhabilitasi	Unit	10	8.589.118.189				1.954.880.400																		DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA					
		1.01.02.1.02.28	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang tersedia	Paket	95	11.527.855.257		2.315.660.500		2.211.947.950															2.315.660.500		20,09	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA					
Rata-rata capaian kinerja (%)							10.867.084.739.601		1.493.331.545.686		2.122.002.659.598														222.611.138.868		10,49		1.715.942.684.554	202.720,34	15,79			
Predikat Kinerja																																		
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																																		
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																																		

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)				Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%) 14 = 13/8x100	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%) 16 = 15 / 6 x 100%				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						I		II			III		IV		13		15 = 7 + 13				16 = 15 / 6 x 100%								
						K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp					
		1.01.02.1.02.31	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah perlengkapan peserta didik yang tersedia	Paket	1.200	914.954.077		910.212.700		210.718.640											910.212.700		99,48	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA				
		1.01.02.1.02.33	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah alat praktek dan peraga peserta didik yang tersedia	Paket	115	185.423.456.541	43	48.364.431.100		33.505.445.500											43	48.364.431.100	37,39	26,08	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA			
		1.01.02.1.02.37	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	37.416	97.697.484.324	36.814	18.114.935.000		21.882.056.940	0										36.814	18.114.935.000	98,39	18,54	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA			
		1.01.02.1.02.39	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	219	737.042.722.114				146.390.841.715														DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA				
		1.01.02.1.02.40	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	Satuan Pendidikan	219	3.146.722.381				694.707.525														DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA				
		1.01.02.1.02.41	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta Didik	4.875	48.754.992.351	1.230	8.901.340.551		10.157.607.070											1.230	8.901.340.551	25,23	18,26	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA			
		1.01.02.1.02.42	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Orang	1.130	15.809.258.622	501	2.455.769.300		3.610.631.770	0										501	2.455.769.300	44,34	15,53	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA			
		1.01.02.1.02.43	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Naik Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	645	1.793.903.291	67	237.184.650		376.732.755	0										67	237.184.650	10,39	13,22	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA			
		1.01.02.1.02.45	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan	219	11.634.539.631	166	728.494.636		2.459.015.675	0										166	728.494.636	75,80	6,26	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA			
		1.01.02.1.02.46	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	210	860.998.723.034	204	147.905.656.503		165.207.171.500	0										204	147.905.656.503	97,14	17,18	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA			
		1.01.02.1.02.47	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Orang	210	449.979.938	204	1.100.000		90.275.000											204	1.100.000	97,14	0,24	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA			
		1.01.02.1.02.50	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang	400	2.111.348.751		369.202.100		486.254.500		54.389.150										54.389.150	11,19	20,06	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA			
Rata-rata capaian kinerja (%)							10.867.084.739.601		1.493.331.545.686		2.122.002.659.598		222.611.138.868								SR	SR		10,49	1.715.942.684.554	202.720,34	15,79		
Predikat Kinerja																										SR			
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																										SR			
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																										ST	SR		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																													
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																													

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab								
												I		II		III		IV									13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%	
												9		10		11		12									13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%	
1	2	3	4	5		6		7			8			9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17				
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
		1.01.02.1.02.53	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	20	1.010.442.388	3	3.428.010.333		232.710.090																					DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA		
		1.01.02.1.02.54	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Kegiatan	28	985.432.070	4	839.493.585		226.950.085																					DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA		
		1.01.02.1.02.55	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah peserta bimbingan teknis peningkatan kapasitas bidang pendidikan yang dilaksanakan	Orang	400	4.284.311.256				986.698.965																					DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA		
		<b>1.01.02.1.03</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Khusus</b>	<b>Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu)</b>	<b>Medali</b>	<b>16</b>	<b>416.186.283.560</b>	<b>13</b>	<b>103.288.404.300</b>		<b>81.211.531.102</b>															<b>54.389.150</b>	<b>0,07</b>	<b>13</b>	<b>103.342.793.450</b>	<b>81,25</b>	<b>24,83</b>	<b>DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA</b>		
				<b>Jumlah penerima bantuan pembiayaan pendidikan yang tepat sasaran</b>	<b>siswa</b>	<b>5.000</b>		<b>4.000</b>																								<b>DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA</b>		
				<b>Kemampuan Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional</b>	<b>%</b>	<b>59,52</b>		<b>59,07</b>																				<b>29,535</b>		<b>49,62</b>		<b>DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA</b>		
				<b>Kemampuan Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional</b>	<b>%</b>	<b>59,61</b>		<b>59,16</b>																				<b>29,58</b>		<b>49,62</b>		<b>DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA</b>		
				<b>Persentase SLB yang melaksanakan UKS</b>	<b>%</b>	<b>30,1</b>		<b>24,1</b>																				<b>12,05</b>		<b>40,03</b>		<b>DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA</b>		
				<b>Iklim keamanan SMALB</b>	<b>%</b>	<b>83,35</b>		<b>82,9</b>																				<b>41,45</b>		<b>49,73</b>		<b>DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA</b>		
				<b>Iklim kebinekaan SMALB</b>	<b>%</b>	<b>81,02</b>		<b>80,57</b>																				<b>40,285</b>		<b>49,72</b>		<b>DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA</b>		
				<b>Iklim inklusivitas SMALB</b>	<b>%</b>	<b>85,08</b>		<b>84,63</b>																				<b>42,315</b>		<b>49,74</b>		<b>DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA</b>		
		1.01.02.1.03.02	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Ruang	10	2.227.243.633				427.360.240																				DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA			
Rata-rata capaian kinerja (%)							10.867.084.739.601		1.493.331.545.686		2.122.002.659.598																							
Predikat Kinerja																																		
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																																		
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																																		

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%) 14 = 13/8x100	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%) 16 = 15 / 6 x 100%				Perangkat Daerah Penanggung Jawab								
											I		II		III		IV					9		10		11		12			13		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%			
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6		7			8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13				16 = 15 / 6 x 100%				17						
		1.01.02.1.03.08	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	18	11.480.751.524	1	3.337.117.665		2.202.909.755																											DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
		1.01.02.1.03.10	Pembangunan Kantin Sekolah	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	10	5.445.278.459	1	284.656.511		1.044.832.040																										DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
		1.01.02.1.03.13	Pembangunan Ruang Orientasi dan Mobilitas	Jumlah Ruang Orientasi dan Mobilitas yang Telah Dibangun	Ruang	5	1.490.744.151	1	176.180.086		286.041.800																										DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
		1.01.02.1.03.18	Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang telah direhabilitasi	Ruang	20	3.493.437.000				670.315.565																											DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
		1.01.02.1.03.20	Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang telah direhabilitasi	Ruang	5	890.932.574				170.950.835																											DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
		1.01.02.1.03.21	Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang telah direhabilitasi	Ruang	5	1.087.797.563				208.725.000																											DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
		1.01.02.1.03.24	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang telah direhabilitasi	Unit	5	800.990.595				153.692.900																											DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
		1.01.02.1.03.30	Rehabilitasi Ruang Orientasi dan Mobilitas	Jumlah Ruang Orientasi dan Mobilitas yang Telah Direhabilitasi	Ruang	20	4.688.746.719				899.669.840																											DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
		1.01.02.1.03.35	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang tersedia	Paket	70	1.947.846.875	10	2.315.660.500		373.750.000																											DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
		1.01.02.1.03.38	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah perlengkapan peserta didik yang tersedia	Paket	1.200	543.863.732	500	910.212.700		156.620.225																											DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
		1.01.02.1.03.40	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah alat praktek dan peraga peserta didik yang tersedia	Paket	30	2.851.914.530	4	48.364.431.100		547.221.175																											DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
		1.01.02.1.03.44	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	52.180	73.773.866.359	5.093	10.468.841.500		14.676.541.500	0																										DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
Rata-rata capaian kinerja (%)						10.867.084.739.601		1.493.331.545.686			2.122.002.659.598		222.611.138.868								222.611.138.868		10,49		1.715.942.684.554				202.720,34		15,79							
Predikat Kinerja																					SR		SR								ST		SR					
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																																						
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																																						
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																																						
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																																						

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab								
												I		II	III		IV		13								14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%			
												9	10	11	12	13		14 = 13/8x100									15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17			
K		Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp														
		1.01.02.1.03.46	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	9	80.046.981.344				16.287.932.077																							DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
		1.01.02.1.03.47	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Satuan Pendidikan Khusus yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	Satuan Pendidikan	79	1.326.460.109				305.490.600																							DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
		1.01.02.1.03.48	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta Didik	2.300	27.189.782.109	470	8.901.340.551		5.505.052.760													470	8.901.340.551	20,43	32,74						DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
		1.01.02.1.03.49	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Khusus	Orang	9.257	26.483.391.206	411	2.579.605.800		4.070.564.955	0												411	2.579.605.800	4,44	9,74						DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
		1.01.02.1.03.50	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	1.235	462.839.675	9	5.600.000		14.394.550	0												9	5.600.000	0,73	1,21						DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
		1.01.02.1.03.51	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan	79	21.425.012.780	9	1.586.597.066		4.313.328.000	0												9	1.586.597.066	11,39	7,41						DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
		1.01.02.1.03.52	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	79	138.096.290.129	81	23.148.365.136		26.497.713.500	0												81	23.148.365.136	102,53	16,76						DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
		1.01.02.1.03.53	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Orang	79	150.324.438	81	1.100.000		30.475.000													81	1.100.000	102,53	0,73						DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
		1.01.02.1.03.56	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang	400	1.458.794.533		369.202.100		335.967.900		54.389.150												54.389.150	16,19							DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
		1.01.02.1.03.60	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Kegiatan	16	2.743.477.070		839.493.585		631.836.910														839.493.585		30,60						DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
		1.01.02.1.03.61	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah peserta bimbingan teknis peningkatan kapasitas bidang pendidikan yang dilaksanakan	Orang	400	6.079.516.453				1.400.143.975																							DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
		<b>1.01.04</b>	<b>PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>	<b>Persentase guru dan tenaga kependidikan yang kompeten</b>	<b>%</b>	<b>0</b>	<b>2.552.808.591</b>	<b>96,62</b>	<b>453.351.894</b>		<b>530.581.250</b>	<b>96,62</b>												<b>96,62</b>	<b>453.351.894</b>		<b>17,76</b>						<b>DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA</b>	
Rata-rata capaian kinerja (%)							10.867.084.739.601		1.493.331.545.686		2.122.002.659.598		222.611.138.868											222.611.138.868	10,49	1.715.942.684.554	202.720,34	15,79						
Predikat Kinerja																																		
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																																		
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																																		

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
								I	II	III	IV			15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%								
								9	10	11	12			13	14 = 13/8x100	K	Rp		K	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13/8x100	15 = 7 + 13	16 = 15 / 6 x 100%	17								
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
		1.01.04.1.01	Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	Terlaksananya pendataan PTK satdikmen dan sakdikus	Tahun	1	2.552.808.591	1	453.351.894	530.581.250												DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA		
		1.01.04.1.01.01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Dokumen	5	2.552.808.591	1	453.351.894	530.581.250	0											DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA		
		1.01.05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Jumlah rekomendasi perizinan terhadap satuan pendidikan menengah yang dihasilkan	Dokumen	0	494.325.492	21	34.490.000	100.593.950	23				23			44	34.490.000		6,98	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA		
		1.01.05.1.01	Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	jumlah perizinan yg dikeluarkan dinas pendidikan DIY terhadap satuan pendidikan menengah di DIY	Dokumen	10	494.325.492	10	34.490.000	100.593.950								10	34.490.000	100,00	6,98	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA		
		1.01.05.1.01.01	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	50	494.325.492	1	34.490.000	100.593.950	0							1	34.490.000	2,00	6,98	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA		
		2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase implementasi pendidikan berbasis budaya dengan kategori Mandiri Budaya (Bidang Perencanaan dan Pengembangan Mutu Pendidikan, Pemuda dan Olahraga)	%	0	201.008.088.900	75,02	32.254.043.875	40.062.000.000	75,02	14.024.442			75,02	14.024.442	0,04	75,02	32.268.068.317		16,05	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA		
				Persentase implementasi pendidikan berbasis budaya dengan kategori Mandiri Budaya (Bidang Pembinaan SMA)	%	0		75,02			75,02				75,02			75,02				DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA		
				Persentase implementasi pendidikan berbasis budaya dengan kategori Mandiri Budaya (Bidang Pembinaan SMK)	%	0		75,02			75,02				75,02			75,02				DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA		
				Persentase implementasi pendidikan berbasis budaya dengan kategori Mandiri Budaya (Bidang Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus)	%	0		75,02			75,02				75,02			75,02				DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA		
				Persentase implementasi pendidikan berbasis budaya dengan kategori Mandiri Budaya (Sekretariat)	%	0		75,02			75,02				75,02			75,02				DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA		
Rata-rata capaian kinerja (%)							10.867.084.739.601		1.493.331.545.686	2.122.002.659.598		222.611.138.868					222.611.138.868	10,49		1.715.942.684.554	202.720,34	15,79		
Predikat Kinerja																	SR	SR				ST	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																								
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																								

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penganggung Jawab		
												I	II	III	IV										
												9	10	11	12									13	14 = 13/8x100
K		Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp					
		2.22.08.5.10	Pendidikan Berbasis Budaya	Persentase sekolah yang menerapkan pendidikan berbasis budaya dengan kategori minimal Kembang Budaya	%	53,69	201.008.088.900	50,17	32.254.043.875	40.062.000.000		14.024.442					14.024.442	0,04	25,085	32.268.068.317	46,72	16,05	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA		
		2.22.08.5.10.01	Pembinaan Muatan Lokal	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Muatan Lokal	Laporan	71	172.050.588.900	14	29.119.885.972	34.232.000.000	0								14	29.119.885.972	19,72	16,93	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA		
		2.22.08.5.10.02	Sarana dan Prasarana Pendidikan Urusan Keistimewaan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendidikan Urusan Keistimewaan	Unit	17	9.089.700.000	2	304.084.100	1.870.000.000									2	304.084.100	11,76	3,35	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA		
		2.22.08.5.10.04	Penyelenggaraan Akademi Komunitas Seni dan Budaya Yogyakarta	Jumlah Orang Mengikuti Akademi Komunitas Seni dan Budaya Yogyakarta	Orang	450	19.867.800.000	89	2.830.073.803	3.960.000.000	0	14.024.442					14.024.442	0,35	89	2.844.098.245	19,78	14,32	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA		
2	Tercapainya pemuda yang kreatif, inovatif, mandiri dan berdaya saing serta menumbuhkan semangat kewirausahaan	2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase kelompok usaha pemuda di kantong kemiskinan yang memiliki rintisan usaha	%	0	107.379.321.658	15	1.759.969.300	23.036.564.250									7,5	1.759.969.300		1,64	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA		
		2.19.02.1.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	jumlah kelompok pemuda pada kantong kemiskinan yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	Kelompok	30	106.779.652.908	20	1.759.969.300	22.979.064.250									20	1.759.969.300	66,67	1,65	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA		
		2.19.02.1.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor Provinsi	Jumlah Pemuda Pelopor Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Orang	52	4.968.119.008	25		1.144.183.415									25		48,08		DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA		
		2.19.02.1.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi	Jumlah Wirausaha Muda Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Orang	13.551	83.299.066.137			17.974.398.110													DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA		
		2.19.02.1.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi	Jumlah Pemuda Kader Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Orang	10.500	12.859.246.892	900	1.759.969.300	2.961.550.840	0								900	1.759.969.300	8,57	13,69	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA		
		2.19.02.1.01.04	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah Pemuda Kader Provinsi yang terseleksi dan Diberikan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Orang	160	1.750.000.000			0													DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA		
		2.19.02.1.01.08	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Strategis Lintas	Dokumen	4	931.039.736	0		214.423.250													DINAS PENDIDIKAN,		
Rata-rata capaian kinerja (%)						10.867.084.739.601		1.493.331.545.686		2.122.002.659.598		222.611.138.868				222.611.138.868		10,49		1.715.942.684.554		202.720,34		15,79	
Predikat Kinerja																SR		SR				ST		SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																									
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																									

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)				Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab									
												I		II		III		IV											13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
												9	10	11	12	13	14	15	16										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7				8				9		10	11	12	13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17								
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp										
			Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi	Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi																								PEMUDA DAN OLAH RAGA									
		2.19.02.1.01.09	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan dari Seluruh Kabupaten/Kota	Orang	2.420	2.972.181.135							684.508.635														DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA									
		2.19.02.1.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam penyelenggaraan organisasi kepemudaan	Lembaga	1	599.668.750	1	599.668.750					57.500.000											1		100,00		DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA								
		2.19.02.1.02.02	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Provinsi	Dokumen	6	599.668.750							57.500.000														DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA									
		2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase Fasilitasi Organisasi Kepramukaan	%	0	8.990.062.500	100	1.500.000.000					1.725.000.000	100						100				100	1.500.000.000		16,69	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA								
		2.19.04.1.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam penyelenggaraan Kepramukaan	Lembaga	1	8.990.062.500	1	1.500.000.000					1.725.000.000											1	1.500.000.000	100,00	16,69	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA								
		2.19.04.1.01.02	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi	Jumlah Organisasi Kepramukaan Provinsi yang Meningkat Kapasitasnya	Organisasi	1	8.990.062.500	1	1.500.000.000					1.725.000.000	0										1	1.500.000.000	100,00	16,69	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA								
3	Meningkatnya prestasi olahraga di tingkat regional dan nasional	2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Jumlah atlet yang mengikuti pembinaan intensif Pra POPNAS/POPNAS	Atlet	0	334.407.737.296	175	150.000					68.425.035.535											175	150.000		0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA								
		2.19.03.1.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	Jumlah Kejuaraan /event olahraga prestasi di tingkat nasional yang diikuti	Event	2	48.170.976.696	2	48.170.976.696					8.825.612.900											2		100,00		DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA								
		2.19.03.1.02.01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi event dan Single Event Tingkat Provinsi	Dokumen	15	14.465.199.379							2.796.387.150															DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA								
		2.19.03.1.02.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Pekan Paralimpik Provinsi dan Pekan Paralimpik Pelajar Provinsi	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Pekan Paralimpik Provinsi dan Pekan Paralimpik Pelajar Provinsi	Dokumen	4	1.088.040.933							250.581.435															DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA								
		2.19.03.1.02.03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam	Orang	1.215	32.617.736.384							5.778.644.315															DINAS PENDIDIKAN,								
Rata-rata capaian kinerja (%)						10.867.084.739.601		1.493.331.545.686		2.122.002.659.598		222.611.138.868		222.611.138.868		10,49	1.715.942.684.554		202.720,34		15,79																
Predikat Kinerja														SR		SR				ST		SR															
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																																					
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																																					

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
						K	Rp	K		Rp	K	Rp	I		II		III		IV		13			K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6				7				8	9	10	11	12	13	14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%					17	
			Penyelenggaraan Kejuaraan dalam Multi Event dan Single Event	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event																							PEMUDA DAN OLAH RAGA		
		2.19.03.1.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	Jumlah bibit olahragawan siswa yang difasilitasi dalam pemaudan bakat cabang olahraga	Atlet	400	16.836.539.485	350		3.438.216.180															350	87,50		DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
		2.19.03.1.03.03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Provinsi	Jumlah Atlet Berprestasi Provinsi yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	Orang	6.375	16.226.877.859			3.297.807.965																		DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
		2.19.03.1.03.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan	Dokumen	4	609.661.626			140.408.215																		DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
		2.19.03.1.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah Lembaga yang terfasilitasi penyelenggaraan dan keikutsertaan pada kejuaraan multi event olahraga prestasi di tingkat nasional	Lembaga	3	269.400.221.115	3	150.000	56.161.206.455															3	150.000	100,00	0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
		2.19.03.1.04.02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Dokumen	15	267.723.287.500			55.775.000.000																		DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
		2.19.03.1.04.03	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	Dokumen	4	1.676.933.615	1	150.000	386.206.455															1	150.000	25,00	0,01	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
4	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Perangkat Daerah	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Sekretariat)	nilai	0	6.093.986.512.194	88,05	957.772.410.127	1.178.066.653.307	84,18					84,18	222.433.946.976	18,88	172,23	1.180.206.357.103					19,37			DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
				Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (BLPT)	nilai	0		91			86,65					86,65				177,65								DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
				Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (BTKP)	nilai	0		90,65			88,29					88,29				178,94								DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
				Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Balai Dikmen Kota Yogyakarta)	nilai	0		92,48			88,4					88,4				180,88								DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
				Nilai PKKI Program Penunjang Urusan	nilai	0		90,69			85,48					85,48				176,17								DINAS PENDIDIKAN,	
Rata-rata capaian kinerja (%)							10.867.084.739.601		1.493.331.545.686	2.122.002.659.598		222.611.138.868								222.611.138.868	10,49			1.715.942.684.554	202.720,34	15,79			
Predikat Kinerja																				SR	SR					ST	SR		
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																													
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																													
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																													
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																													

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											I		II	III	IV	13		14 = 13/8x100			15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%				
											9	10	11	12	13		14 = 13/8x100				15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%			17	
K		Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								
				Pemerintah Daerah (Balai Dikmen Kab. Bantul)																				PEMUDA DAN OLAH RAGA			
				Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Balai Dikmen Kab. Gunungkidul)	nilai	0		92,43																DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA			
				Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Balai Dikmen Kab. Kulon Progo)	nilai	0		91,13																DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA			
				Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Balai Dikmen Kab. Sleman)	nilai	0		91,98																DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA			
				Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Bidang Perencanaan dan Pengembangan Mutu Pendidikan, Pemuda dan Olahraga)	nilai	0		88,05																DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA			
		0.00.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya proses, penyusunan dan penerapan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	%	100	3.945.816.300	100	83.857.600	621.000.000		11.160.816									11.160.816	1,80	50	95.018.416	50,00	2,41	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
		0.00.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	34	2.087.310.400	4	21.634.000	460.000.000		4.135.000									4.135.000	0,90	4	25.769.000	11,76	1,23	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
		0.00.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	20	468.255.400	9	32.223.600	92.000.000	0	7.025.816									0	7,64	9	39.249.416	45,00	8,38	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
		0.00.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	70	1.390.250.500	14	30.000.000	69.000.000	0												14	30.000.000	20,00	2,16	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
		0.00.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya capaian keterlaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah dalam 1 tahun anggaran	%	100	5.806.641.471.905	100	926.948.200.500	1.124.307.456.352		219.305.438.555									219.305.438.555	19,51	50	1.146.253.639.055	50,00	19,74	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
		0.00.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	6.733	5.797.938.909.570	8.124	926.778.787.000	1.122.601.886.407	0	219.247.885.555									219.247.885.555	19,53	8.124	1.146.026.672.555	120,66	19,77	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
		0.00.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	26	853.718.112			170.770.745																DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
Rata-rata capaian kinerja (%)						10.867.084.739.601		1.493.331.545.686			2.122.002.659.598		222.611.138.868				222.611.138.868		10,49		1.715.942.684.554		202.720,34		15,79		
Predikat Kinerja													SR				SR				ST		SR				
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																											
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																											

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)				Perangkat Daerah Penerima Jawaban
															I		II		III		IV						13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		
															9	10	11	12	13	14	15	16					17								
1	2	3	4	5		6		7			8				9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17				
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
		0.00.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	120	3.969.876.420	7	89.413.500		756.410.200	2	52.007.000					2	52.007.000		6,88	9	141.420.500	7,50	3,56	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA									
		0.00.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	10	1.001.152.304	2	50.000.000		196.618.950	0	633.000					0	633.000		0,32	2	50.633.000	20,00	5,06	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA									
		0.00.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	55	2.877.815.499	42	30.000.000		581.770.050	0	4.913.000					0	4.913.000		0,84	42	34.913.000	76,36	1,21	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA									
		<b>0.00.01.1.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase terpenuhinya capaian keterlaksanaan administrasi barang milik daerah perangkat daerah dalam 1 tahun anggaran</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>5.137.650.161</b>	<b>100</b>	<b>769.906.300</b>		<b>992.530.500</b>		<b>47.855.000</b>						<b>47.855.000</b>		<b>4,82</b>	<b>50</b>	<b>817.761.300</b>	<b>50,00</b>	<b>15,92</b>	<b>DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA</b>									
		0.00.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	150	5.137.650.161	1	769.906.300		992.530.500	2	47.855.000					2	47.855.000		4,82	3	817.761.300	2,00	15,92	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA									
		<b>0.00.01.1.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase terpenuhinya capaian keterlaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>854.529.232</b>	<b>100</b>	<b>7.835.000</b>		<b>164.431.600</b>		<b>2.550.000</b>						<b>2.550.000</b>		<b>1,55</b>	<b>50</b>	<b>10.385.000</b>	<b>50,00</b>	<b>1,22</b>	<b>DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA</b>									
		0.00.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	5	325.300.771				63.398.350															DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA									
		0.00.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	175	464.034.957	1	7.835.000		86.018.850	0	2.550.000						2.550.000		2,96	1	10.385.000	0,57	2,24	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA									
		0.00.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	200	65.193.504				15.014.400															DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA									
		<b>0.00.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase terpenuhinya capaian administrasi umum perangkat daerah</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>17.994.274.128</b>	<b>100</b>	<b>849.045.160</b>		<b>3.574.282.110</b>		<b>247.663.341</b>						<b>247.663.341</b>		<b>6,93</b>	<b>50</b>	<b>1.096.708.501</b>	<b>50,00</b>	<b>6,09</b>	<b>DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA</b>									
		0.00.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	45	1.303.377.861	1	22.225.000		266.242.595	1	41.596.117					1	41.596.117		15,62	2	63.821.117	4,44	4,90	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA									
		0.00.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	190	3.173.993.600	23	93.616.534		627.483.470	0	86.601.332						86.601.332		13,80	23	180.217.866	12,11	5,68	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA									
Rata-rata capaian kinerja (%)							10.867.084.739.601		1.493.331.545.686		2.122.002.659.598		222.611.138.868						222.611.138.868		10,49		1.715.942.684.554	202.720,34	15,79										
Predikat Kinerja																			SR						ST	SR									
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																																			
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																																			
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																																			
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																																			

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikasi elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
											I		II	III	IV	13		14 = 13/8x100								15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		
											9	10	11	12	13		14 = 13/8x100									15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
K		Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp										
		0.00.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	115	2.028.001.281	16	66.199.996	400.515.675	3	27.076.372					3	27.076.372	6,76	19	93.276.368	16,52	4,60	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA						
		0.00.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	45	2.623.179.833	7	49.255.136	511.792.090	1	8.238.900					1	8.238.900	1,61	8	57.494.036	17,78	2,19	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA						
		0.00.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	45	380.839.258	7	12.970.000	73.937.180	1	4.711.000					1	4.711.000	6,37	8	17.681.000	17,78	4,64	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA						
		0.00.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	110	8.110.379.170	16	604.778.494	1.608.061.100	0	79.439.620						79.439.620	4,94	16	684.218.114	14,55	8,44	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA						
		0.00.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	4	374.503.125			86.250.000														DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA						
		<b>0.00.01.1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah sehingga terpelihara dan terawat</b>	<b>%</b>	<b>50</b>	<b>58.113.812.390</b>		<b>3.000.000</b>	<b>9.502.509.500</b>		<b>40.670.000</b>						<b>40.670.000</b>	<b>0,43</b>		<b>43.670.000</b>		<b>0,08</b>	<b>DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA</b>						
		0.00.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	80	7.451.418.270			1.593.202.180														DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA						
		0.00.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	4.120	19.041.408.234	1	3.000.000	3.736.634.970	0	40.670.000						40.670.000	1,09	1	43.670.000	0,02	0,23	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA						
		0.00.01.1.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	15	153.140.005			36.296.920														DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA						
		0.00.01.1.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	15	29.231.662.263			3.744.389.190														DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA						
		0.00.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	385	2.236.183.618			391.986.240														DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA						
		<b>0.00.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah dalam 1 tahun anggaran</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>135.391.440.639</b>	<b>100</b>	<b>21.137.124.809</b>	<b>26.252.113.575</b>		<b>2.248.476.480</b>						<b>2.248.476.480</b>	<b>8,56</b>	<b>50</b>	<b>23.385.601.289</b>	<b>50,00</b>	<b>17,27</b>	<b>DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA</b>						
Rata-rata capaian kinerja (%)							10.867.084.739.601		1.493.331.545.686	2.122.002.659.598		222.611.138.868						222.611.138.868	10,49		1.715.942.684.554	202.720,34	15,79							
Predikat Kinerja																						ST	SR							
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																														
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																														
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																														
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																														

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penganggung Jawab						
											I		II		III		IV				13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13			16 = 15 / 6 x 100%					
											9		10		11		12				13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13			16 = 15 / 6 x 100%					
1	2	3	4	5	6		7			8			9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
		0.00.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	45	124.877.778	1	150.000		23.299.000	0	500.000																			DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
		0.00.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	160	62.825.177.316	28	8.335.514.428		12.268.023.705	3	1.559.700.814																			DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
		0.00.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	155	72.441.385.545	24	12.801.460.381		13.960.790.870	5	688.275.666																			DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
		<b>0.00.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah sehingga terpelihara dan terawat</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>42.611.329.465</b>	<b>100</b>	<b>2.523.873.855</b>		<b>8.238.481.136</b>		<b>44.845.100</b>																			<b>DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA</b>	
		0.00.01.1.09.010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2.105	3.631.828.054	106	108.478.800		669.583.935	0	15.488.600																			DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
		0.00.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	260	5.030.023.363	50	388.691.426		1.021.005.006	1	29.356.500																			DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
		0.00.01.1.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	1.880	391.122.612				71.376.130																				DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA		
		0.00.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	104	3.607.764.805	0			726.191.535	0																				DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
		0.00.01.1.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	195.516.400				41.400.000																					DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
		0.00.01.1.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	4	424.436.875				97.750.000																					DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
		0.00.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	140	29.330.637.356	15	2.026.703.629		5.611.174.530	0																				DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
		<b>0.00.01.1.10</b>	<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	<b>Jumlah siswa SMK yang terlayani peningkatan keahlian</b>	<b>siswa</b>	<b>5.925</b>	<b>23.296.187.974</b>	<b>5.675</b>	<b>5.449.566.903</b>		<b>4.413.848.534</b>		<b>485.287.684</b>																			<b>DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA</b>	
Rata-rata capaian kinerja (%)							10.867.084.739.601		1.493.331.545.686		2.122.002.659.598		222.611.138.868																				
Predikat Kinerja																																	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																																	
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																																	

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)				Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						K		Rp			K		Rp		K		Rp				K		Rp				K		Rp
1	2	3	4	5	6		7				8		9		10	11	12	13		14 = 13/8x100				15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		0.00.01.1.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	6	23.296.187.974	2.712.010	5.449.566.903		4.413.848.534	3	485.287.684						3	485.287.684		10,99	2.712.013	5.934.854.587	45.200.216,67	25,48	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA		
		2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (BPO)	nilai	0		91,22			86,11								86,11		nan	177,33					DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA		
		4.01.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase capaian implementasi inovasi layanan publik	%	0	400.000.000	25	287.034.448		100.000.000												12,5	287.034.448		71,76	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA		
		4.01.10.5.02	Peningkatan Budaya Pemerintahan	Tercapainya implementasi budaya pemerintahan	%	100	400.000.000	100	287.034.448		100.000.000												50	287.034.448	50,00	71,76	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA		
		4.01.10.5.02.01	Implementasi Budaya Pemerintahan DIY	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan DIY	Dokumen	4	400.000.000	1	287.034.448		100.000.000	0											1	287.034.448	25,00	71,76	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA		
Rata-rata capaian kinerja (%)							10.867.084.739.601		1.493.331.545.686		2.122.002.659.598		222.611.138.868							222.611.138.868		10,49		1.715.942.684.554	202.720,34	15,79			
Predikat Kinerja																				SR	SR				ST	SR			
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																													
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																													
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																													
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																													

Disusun  
Yogyakarta, 2 Mei 2025  
Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga

Dievaluasi  
Yogyakarta, 2 Mei 2025  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah

Drs. SUHIRMAN, M.Pd.  
NIP. 196603171994121003

NI MADE DWIPANTI INDRAYANTI, S.T., M.T.  
NIP. 197010181998032007

**EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUNGAN PROVINSI  
RENJA PERANGKAT DAERAH DINAS KEBUDAYAAN PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERIODE PELAKSANAAN : 2025**

Indikator dan target kinerja SKPD yang mengacu pada sasaran RKPD:

Target Realisasi

- |   |                                                                                           |      |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1 | Meningkatnya kinerja pengembangan nilai sejarah, warisan budaya dan museum                | 6.09 |
| 2 | Peningkatan jumlah penyelenggaraan event budaya tingkat provinsi, nasional, internasional | 16   |
| 3 | Peningkatan jumlah kegiatan pengembangan seni budaya dan tradisi di DIY                   | 395  |
| 4 | Kategori Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah                                             | 2    |

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%) 14 = 13/8x100	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%) 16 = 15 / 6 x 100%		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						0	Rp	10	Rp		K	Rp	I		II		III				IV		K	Rp		K	Rp	K	Rp	
													K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp								K
1	Meningkatnya Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan	2.22.02	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN</b>	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang dikelola	Objek	0	10.000.000.000	10	1.992.714.960	2.000.000.000																10	1.992.714.960	33,33	19,93	DINAS KEBUDAYAAN
		2.22.02.1.01	<i>Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</i>	<i>Jumlah laporan pengelolaan kebudayaan</i>	<i>Laporan</i>	3	10.000.000.000	1	1.992.714.960	2.000.000.000																1	1.992.714.960	33,33	19,93	DINAS KEBUDAYAAN
		2.22.02.1.01.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi, Dikembangkan dan Dimanfaatkan	Objek	1	4.189.268.000	1	745.429.500	837.853.600																1	745.429.500	100,00	17,79	DINAS KEBUDAYAAN
		2.22.02.1.01.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Orang	40	2.810.732.000	40	650.000.000	562.146.400																40	650.000.000	100,00	23,13	DINAS KEBUDAYAAN
		2.22.02.1.01.03	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Budaya	Jumlah Sarana dan Prasarana Taman Budaya yang Disediakan dan Dipelihara	Unit	1	3.000.000.000	1	597.285.460	600.000.000	0															1	597.285.460	100,00	19,91	DINAS KEBUDAYAAN
		2.22.06	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN</b>	Nilai akreditasi permuseuman untuk Museum Sonobudoyo	Nilai Akreditasi	4	10.000.000.000	4	1.962.144.145	2.000.000.000	4	52.353.668							4	52.353.668	2,62	8	2.014.497.813	200,00	20,14	DINAS KEBUDAYAAN				
		2.22.06.1.01	<i>Pengelolaan Museum Provinsi</i>	<i>Jumlah museum provinsi yang dikelola</i>	<i>Museum</i>	1	10.000.000.000	1	1.962.144.145	2.000.000.000									52.353.668	2,62	1	2.014.497.813	100,00	20,14	DINAS KEBUDAYAAN					
		2.22.06.1.01.01	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan	Unit	1	3.000.000.000	1	593.251.098	600.000.000												1	593.251.098	100,00	19,78	DINAS KEBUDAYAAN				
		2.22.06.1.01.03	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	Unit	1	5.000.000.000	1	970.059.500	1.000.000.000	0								0			1	970.059.500	100,00	19,40	DINAS KEBUDAYAAN				
Rata-rata capaian kinerja (%)							3.843.548.088.625		405.755.104.551	885.808.415.746									46.667.267.100		5,27	452.422.371.651	96,25	11,77						
Predikat Kinerja																			SR	SR				ST	SR					
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																														
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																														
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																														
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																														

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	K
1	2	3	4	5	6		7		8	9		10	11	12	13	14 = 13/8x100			15 = 7 + 13			16 = 15 / 6 x 100%		17	
		2.22.06.1.01.04	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia	Unit	1	2.000.000.000	1	398.833.547	400.000.000	0	52.353.668						52.353.668	13,09	1	451.187.215	100,00	22,56	DINAS KEBUDAYAAN	
		<b>2.22.08</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN</b>	<b>Jumlah aktivitas pelestarian sumber sejarah, karya bahasa/sastra, dan permuseuman</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>18</b>	<b>3.615.138.510.148</b>	<b>18</b>	<b>373.486.575.261</b>	<b>841.397.094.120</b>		<b>39.658.336.562</b>						<b>39.658.336.562</b>	<b>4,71</b>	<b>18</b>	<b>413.144.911.823</b>	<b>100,00</b>	<b>11,43</b>	<b>DINAS KEBUDAYAAN</b>	
				Persentase cagar budaya dan warisan budaya yang dilestarikan	%	10		13,21												6,605		66,05		DINAS KEBUDAYAAN	
				Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan	%	100		100												50		50,00		DINAS KEBUDAYAAN	
				Jumlah desa budaya yang sudah naik status menjadi desa mandiri budaya sampai dengan tahun n	Desa	45		40												40		88,89		DINAS KEBUDAYAAN	
				Persentase pemeliharaan dan pengembangan adat, tradisi, dan seni	%	9		7,5												3,75		41,67		DINAS KEBUDAYAAN	
				Pengelolaan atribut warisan budaya dunia di Kawasan Sumbu Filosofis	%	0,23		0																DINAS KEBUDAYAAN	
				Indeks Kepuasan Masyarakat Museum Sonobudoyo	Indeks	4		4			4							4		8		200,00		DINAS KEBUDAYAAN	
				Indeks Kepuasan Masyarakat Taman Budaya Yogyakarta	Index	0		3												3				DINAS KEBUDAYAAN	
		<b>2.22.08.5.01</b>	<b>Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman</b>	<b>Jumlah laporan pengelolaan sejarah, bahasa, sastra dan museum</b>	<b>Laporan</b>	<b>25</b>	<b>101.312.500.000</b>	<b>21</b>	<b>11.376.183.253</b>	<b>19.250.000.000</b>	<b>21</b>	<b>265.893.000</b>						<b>21</b>	<b>265.893.000</b>	<b>1,38</b>	<b>42</b>	<b>11.642.076.253</b>	<b>168,00</b>	<b>11,49</b>	<b>DINAS KEBUDAYAAN</b>
		2.22.08.5.01.01	Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan	Dokumen	10	29.875.500.000	6	2.625.401.004	6.050.000.000	6	210.693.000						6	210.693.000	3,48	12	2.836.094.004	120,00	9,49	DINAS KEBUDAYAAN
		2.22.08.5.01.02	Pembinaan, Pengembangan Bahasa dan Sastra	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dan Sastra	Laporan	14	38.487.000.000	9	4.587.345.582	7.700.000.000	9							9		18	4.587.345.582	128,57	11,92	DINAS KEBUDAYAAN	
		2.22.08.5.01.03	Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman	Jumlah Permuseuman yang Dibina dan Dikelola	Unit	40	32.950.000.000	40	4.163.436.667	5.500.000.000	40	55.200.000						40	55.200.000	1,00	80	4.218.636.667	200,00	12,80	DINAS KEBUDAYAAN
Rata-rata capaian kinerja (%)							3.843.548.088.625		405.755.104.551	885.808.415.746		46.667.267.100						46.667.267.100	5,27		452.422.371.651	96,25	11,77		
Predikat Kinerja																			SR	SR			ST	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																									
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																									

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						K	Rp	K	Rp		K	Rp	I				III	IV	13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12		13		K	Rp	K	Rp	17	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		2.22.08.5.03	Penguatan Museum Sonobudoyo	Jumlah laporan pengelolaan dan pengembangan Museum Sonobudoyo	Laporan	2	132.301.340.669	0	7.072.635.639	31.734.099.900		518.797.218						518.797.218	1,63			7.591.432.857		5,74	DINAS KEBUDAYAAN
				Jumlah Museum Sonobudoyo yang dikelola dan dikembangkan	Unit	1		0																	DINAS KEBUDAYAAN
		2.22.08.5.03.01	Pengelolaan Museum Sonobudoyo	Jumlah Museum Sonobudoyo yang Dikelola	Unit	1	34.789.870.669	1	4.641.273.647	6.734.099.900	0	466.917.890					0	466.917.890	6,93	1	5.108.191.537	100,00	14,68	DINAS KEBUDAYAAN	
		2.22.08.5.03.02	Pengembangan Museum Sonobudoyo	Jumlah Museum Sonobudoyo yang Dikembangkan	Unit	1	97.511.470.000	1	2.431.361.992	25.000.000.000	0	51.879.328					0	51.879.328	0,21	1	2.483.241.320	100,00	2,55	DINAS KEBUDAYAAN	
		2.22.08.5.04	Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya	Jumlah cagar budaya dan warisan budaya yang dilestarikan	Objek	288	164.155.360.122	246	16.140.783.959	33.592.929.040	246	403.989.840					246	403.989.840	1,20	492	16.544.773.799	170,83	10,08	DINAS KEBUDAYAAN	
		2.22.08.5.04.01	Tata Kelola Cagar Budaya dan Warisan Budaya	Jumlah objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang Dikelola	Objek	75	83.931.130.000	75	8.985.149.481	17.523.000.000	75	403.989.840					75	403.989.840	2,31	150	9.389.139.321	200,00	11,19	DINAS KEBUDAYAAN	
		2.22.08.5.04.02	Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya	Jumlah objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang Dikembangkan	Objek	8	39.196.000.000	6	3.676.301.087	7.700.000.000	6					6				12	3.676.301.087	150,00	9,38	DINAS KEBUDAYAAN	
		2.22.08.5.04.03	Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia	Jumlah Objek Warisan Budaya Nasional dan Dunia yang masuk Nominasi	Objek	205	41.028.230.122	11	3.479.333.391	8.369.929.040	11					11				22	3.479.333.391	10,73	8,48	DINAS KEBUDAYAAN	
		2.22.08.5.05	Pengelolaan Taman Budaya	Jumlah Event Budaya Tingkat Regional, Nasional dan Internasional yang diselenggarakan di Taman Budaya Yogyakarta selama satu tahun	Event	13	115.089.143.030	4	11.073.944.967	25.102.460.130		206.700.274						206.700.274	0,82	4	11.280.645.241	30,77	9,80	DINAS KEBUDAYAAN	
		2.22.08.5.05.01	Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya Yogyakarta	Jumlah Taman Budaya Yogyakarta yang Dikelola dan Dikembangkan	Objek	1	115.089.143.030	1	11.073.944.967	25.102.460.130		206.700.274						206.700.274	0,82	1	11.280.645.241	100,00	9,80	DINAS KEBUDAYAAN	
		2.22.08.5.06	Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Jumlah pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana budaya dan lembaga budaya	Unit	821	76.039.528.400	699	15.285.069.126	14.511.640.000	699					699				1.398	15.285.069.126	170,28	20,10	DINAS KEBUDAYAAN	
		2.22.08.5.06.01	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya	Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya	Unit	277	6.877.938.400	209	1.255.620.146	1.322.640.000	209					209				418	1.255.620.146	150,90	18,26	DINAS KEBUDAYAAN	
		2.22.08.5.06.04	Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya	Unit	544	69.161.590.000	527	14.029.448.980	13.189.000.000	527					527				1.054	14.029.448.980	193,75	20,29	DINAS KEBUDAYAAN	
		2.22.08.5.07	Perencanaan dan Pengendalian Urusan Kebudayaan	Jumlah dokumen perencanaan, monitoring evaluasi dan kemitraan	Dokumen	22	1.550.107.437.147	22	6.217.530.984	429.320.147.050	22					22				44	6.217.530.984	200,00	0,40	DINAS KEBUDAYAAN	
Rata-rata capaian kinerja (%)						3.843.548.088.625		405.755.104.551		885.808.415.746		46.667.267.100				46.667.267.100		5,27		452.422.371.651		96,25		11,77	
Predikat Kinerja																SR		SR				ST		SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																									
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																									

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						K	Rp	K	Rp		K	Rp	I		II	III	IV	13				14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%			
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13			16 = 15 / 6 x 100%		17
				<i>Jumlah Kab/Kota Penerima BKK keistimewaan Urusan Kebudayaan</i>	<i>undefined</i>	5		5			5								5						10		200,00		<i>DINAS KEBUDAYAAN</i>
		2.22.08.5.07.01	Perencanaan Program dan Kegiatan Urusan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Program dan Kegiatan yang Mengakomodir Urusan Kebudayaan	Dokumen	3	1.512.393.258.347	3	487.324.355	421.730.147.050	3								3						6	487.324.355	200,00	0,03	DINAS KEBUDAYAAN
		2.22.08.5.07.02	Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan Urusan Kebudayaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan Urusan Kebudayaan ****)	Laporan	4	2.256.400.000	4	318.331.879	440.000.000	4								4						8	318.331.879	200,00	14,11	DINAS KEBUDAYAAN
		2.22.08.5.07.03	Membangun Kemitraan dengan Lembaga Pelestari Budaya	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Lembaga Pelestari Budaya	Dokumen	77	35.457.778.800	13	5.411.874.750	7.150.000.000	13								13						26	5.411.874.750	33,77	15,26	DINAS KEBUDAYAAN
		<b>2.22.08.5.09</b>	<b>Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya</b>	<b>Fasilitas adat, seni, tradisi, dan lembaga budaya</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>13</b>	<b>1.476.133.200.780</b>	<b>13</b>	<b>306.320.427.333</b>	<b>287.885.818.000</b>	<b>13</b>	<b>38.262.956.230</b>							<b>13</b>	<b>38.262.956.230</b>		<b>13,29</b>	<b>26</b>	<b>344.583.383.563</b>		<b>200,00</b>	<b>23,34</b>	<b>DINAS KEBUDAYAAN</b>	
		2.22.08.5.09.01	Pembinaan dan Pengembangan Desa Budaya	Jumlah Desa Budaya yang Dibina dan Dikembangkan	Desa	96	199.377.097.280	76	14.454.883.300	38.004.318.000	100	364.221.270							100	364.221.270		0,96	176	14.819.104.570	183,33	7,43	DINAS KEBUDAYAAN		
		2.22.08.5.09.02	Pembinaan Lembaga Penggiat Seni	Jumlah lembaga penggiat seni yang dibina	Lembaga	11	38.387.000.000		4.667.452.919	7.700.000.000	9								9						9	4.667.452.919	81,82	12,16	DINAS KEBUDAYAAN
		2.22.08.5.09.03	Misi Kebudayaan ke Dalam dan Luar Negeri dalam rangka Diplomasi Budaya	Jumlah Laporan Pelaksanaan Misi Kebudayaan ke Dalam negeri dalam rangka Diplomasi Budaya	Laporan	2	20.831.682.000	1	2.298.483.633	4.400.000.000	2	378.944.046							2	378.944.046		8,61	3	2.677.427.679	150,00	12,85	DINAS KEBUDAYAAN		
		2.22.08.5.09.04	Penghargaan Seniman dan Budayawan	Jumlah Seniman dan Budayawan yang Mendapatkan Penghargaan	Orang	675	14.102.500.000	28	2.132.669.288	2.750.000.000	28								28						56	2.132.669.288	8,30	15,12	DINAS KEBUDAYAAN
		2.22.08.5.09.05	Festival Kebudayaan Yogyakarta	Jumlah Laporan Festival Kebudayaan Yogyakarta	Laporan	1	27.705.000.000	1	4.112.958.500	5.500.000.000	0								0						1	4.112.958.500	100,00	14,85	DINAS KEBUDAYAAN
		2.22.08.5.09.06	Gelar Budaya Yogyakarta	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	Laporan	10	49.261.481.600	10	5.830.035.334	9.900.000.000	10								10						20	5.830.035.334	200,00	11,83	DINAS KEBUDAYAAN
		2.22.08.5.09.07	Publikasi Seni dan Budaya Daerah	Jumlah Dokumen Publikasi Seni dan Budaya Daerah	Dokumen	8	31.856.361.800	8	2.663.105.600	6.451.500.000	8								8						16	2.663.105.600	200,00	8,36	DINAS KEBUDAYAAN
		2.22.08.5.09.08	Pembinaan Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi	Jumlah Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi yang Dibina	Orang	360	14.796.149.000	360	1.676.816.090	3.080.000.000	360								360						720	1.676.816.090	200,00	11,33	DINAS KEBUDAYAAN
		2.22.08.5.09.09	Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat	Jumlah Laporan Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat	Laporan	14	55.689.165.000	14	6.869.256.193	11.000.000.000	14								14						28	6.869.256.193	200,00	12,33	DINAS KEBUDAYAAN
		2.22.08.5.09.10	Selendang Sutera	Jumlah Laporan Selendang Sutera	Laporan	1	10.582.000.000	1	354.205.000	2.200.000.000	1								1						2	354.205.000	200,00	3,35	DINAS KEBUDAYAAN
Rata-rata capaian kinerja (%)						3.843.548.088.625		405.755.104.551		885.808.415.746		46.667.267.100						46.667.267.100		5,27		452.422.371.651			96,25		11,77		
Predikat Kinerja																		SR		SR					ST		SR		
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																													
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																													
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																													
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																													

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renstra Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV				13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		2.22.08.5.09.11	Penyelenggaraan Even Penggiat Seni	Jumlah Laporan Even Penggiat Seni	Laporan	2	42.488.475.000	2	8.803.951.500	8.250.000.000	2							2				4	8.803.951.500	200,00	20,72	DINAS KEBUDAYAAN
		2.22.08.5.09.14	Penguatan Lembaga Pelestari Budaya	Jumlah Laporan Penguatan Lembaga Pelestari Budaya	Laporan	2	955.158.500.000	2	250.808.122.576	185.350.000.000	2	37.300.000.914						2	37.300.000.914	20,12	4	288.108.123.490	200,00	30,16	DINAS KEBUDAYAAN	
		2.22.08.5.09.15	Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	Jumlah Laporan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	Laporan	6	15.897.789.100	6	1.648.487.400	3.300.000.000	6	219.790.000						6	219.790.000	6,66	12	1.868.277.400	200,00	11,75	DINAS KEBUDAYAAN	
2	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di perangkat daerah	0.00.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai	0	208.409.578.477	91,3	28.313.670.185	40.411.321.626		6.956.576.870							6.956.576.870	17,21	91,3	35.270.247.055		16,92	DINAS KEBUDAYAAN	
		0.00.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	6	162.007.998	8	900.000	30.709.122	1							1				9	900.000	150,00	0,56	DINAS KEBUDAYAAN
		0.00.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	6	22.211.980	2	300.000	4.019.184	0							0				2	300.000	33,33	1,35	DINAS KEBUDAYAAN
		0.00.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	10	81.065.959	2	300.000	16.066.864												2	300.000	20,00	0,37	DINAS KEBUDAYAAN
		0.00.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	5	58.730.059	1	300.000	10.623.074	0							0				1	300.000	20,00	0,51	DINAS KEBUDAYAAN
		0.00.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	144.006.347.722	250	21.401.819.705	28.517.693.769		5.558.712.144							5.558.712.144	19,49	125	26.960.531.849	125,00	18,72	DINAS KEBUDAYAAN	
		0.00.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	2.964	142.626.635.955	2.964	21.213.699.371	28.267.879.233	0	5.527.838.104						0	5.527.838.104	19,56	2.964	26.741.537.475	100,00	18,75	DINAS KEBUDAYAAN	
		0.00.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	6.000	1.141.883.800	36	156.384.091	206.543.000	0	28.981.115						0	28.981.115	14,03	36	185.365.206	0,60	16,23	DINAS KEBUDAYAAN	
		0.00.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	110.697.463	1	13.667.750	20.276.212	0	1.892.925						0	1.892.925	9,34	1	15.560.675	100,00	14,06	DINAS KEBUDAYAAN	
		0.00.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	Laporan	5	127.130.504	0,25	18.068.493	22.995.324												0,25	18.068.493	5,00	14,21	DINAS KEBUDAYAAN
Rata-rata capaian kinerja (%)							3.843.548.088.625		405.755.104.551	885.808.415.746		46.667.267.100							46.667.267.100	5,27		452.422.371.651	96,25	11,77		
Predikat Kinerja																			SR	SR				ST	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																										
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																										
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																										
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																										

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab								
					K	Rp	K	Rp		K	Rp	I	II			III	IV	12	13	14 = 13/8x100			15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%					
1	2	3	4	5		6		7		8		9				10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
				Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD																										
		0.00.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	%	100	513.755.400	25	77.687.188	92.928.000	17.791.624					17.791.624	19,15	12,5	95.478.812	12,50	18,58	DINAS KEBUDAYAAN								
		0.00.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	5	513.755.400	3	77.687.188	92.928.000	0,25	17.791.624				0,25	17.791.624	19,15	3,25	95.478.812	65,00	18,58	DINAS KEBUDAYAAN							
		0.00.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	6.362.209.139	25		1.200.916.423	62.106.301					62.106.301	5,17	12,5	62.106.301	12,50	0,98	DINAS KEBUDAYAAN								
		0.00.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	3	1.019.732.600	1		186.285.000	0,25	12.405.748				0,25	12.405.748	6,66	1,25	12.405.748	41,67	1,22	DINAS KEBUDAYAAN							
		0.00.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	8	1.438.041.400	0		261.626.000	1,25	23.449.831				1,25	23.449.831	8,96	1,25	23.449.831	15,63	1,63	DINAS KEBUDAYAAN							
		0.00.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	273.339.424	0		50.730.823	1	4.949.000				1	4.949.000	9,76	1	4.949.000	100,00	1,81	DINAS KEBUDAYAAN							
		0.00.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	168.793.804			33.454.080	0	5.760.000					5.760.000	17,22		5.760.000		3,41	DINAS KEBUDAYAAN							
		0.00.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	3	934.096.500	0		169.534.000	0	13.452.722				0	13.452.722	7,94		13.452.722		1,44	DINAS KEBUDAYAAN							
		0.00.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	5	95.249.800	0		17.087.000	0	514.000				0	514.000	3,01		514.000		0,54	DINAS KEBUDAYAAN							
		0.00.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	120	2.432.955.611			482.199.520	0,25	1.575.000				0,25	1.575.000	0,33	0,25	1.575.000	0,21	0,06	DINAS KEBUDAYAAN							
		0.00.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	51.272.786.499	100	6.342.489.664	9.455.521.702	1.237.295.601					1.237.295.601	13,09	50	7.579.785.265	50,00	14,78	DINAS KEBUDAYAAN								
		0.00.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	3	98.341.900			18.150.000	1	3.000.000				1	3.000.000	16,53	1	3.000.000	33,33	3,05	DINAS KEBUDAYAAN							
		0.00.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	3	15.999.598.399	5	2.170.784.862	3.049.974.702	0,25	253.731.008				0,25	253.731.008	8,32	5,25	2.424.515.870	175,00	15,15	DINAS KEBUDAYAAN							
		0.00.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	3	35.174.846.200	5	4.171.704.802	6.387.397.000	0,25	980.564.593				0,25	980.564.593	15,35	5,25	5.152.269.395	175,00	14,65	DINAS KEBUDAYAAN							
		0.00.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	6.092.471.719	100	490.773.628	1.113.552.610	80.671.200					80.671.200	7,24	50	571.444.828	50,00	9,38	DINAS KEBUDAYAAN								
Rata-rata capaian kinerja (%)						3.843.548.088.625		405.755.104.551		885.808.415.746		46.667.267.100				SR		SR		452.422.371.651		96,25		11,77						
Predikat Kinerja																SR						ST		SR						
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																														
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																														
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																														
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																														

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab										
						6			7		8				9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			<b>Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>																											
		0.00.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	1	269.530.500	1	40.358.350	48.920.000	0,25	4.937.600					0,25	4.937.600	10,09	1,25	45.295.950	125,00	16,81	DINAS KEBUDAYAAN						
		0.00.01.1.09.010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	69	354.156.600			64.560.000	4,08	10.030.000					4,08	10.030.000	15,54	4,08	10.030.000	5,91	2,83	DINAS KEBUDAYAAN						
		0.00.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	19	3.128.604.781	23	450.415.278	569.202.271	0	49.666.200					0	49.666.200	8,73	23	500.081.478	121,05	15,98	DINAS KEBUDAYAAN						
		0.00.01.1.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang dipelihara	Unit	25	213.678.500			42.350.000																				DINAS KEBUDAYAAN
		0.00.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	211	661.725.711			120.671.001	6,5	4.897.400					6,5	4.897.400	4,06	6,5	4.897.400	3,08	0,74	DINAS KEBUDAYAAN						
		0.00.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	20	1.464.775.627			267.849.338	0,25	11.140.000					0,25	11.140.000	4,16	0,25	11.140.000	1,25	0,76	DINAS KEBUDAYAAN						
		<b>0.00.01.2</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (TAMAN BUDAYA YOGYAKARTA)</b>	<b>Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Nilai</b>	<b>0</b>		<b>86,636</b>											<b>nan</b>	<b>86,636</b>									<b>DINAS KEBUDAYAAN</b>	
		<b>0.00.01.3</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (MUSEUM NEGERI SONOBUDOYO)</b>	<b>Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Nilai</b>	<b>90</b>		<b>88,62</b>			<b>93,6</b>						<b>93</b>		<b>nan</b>	<b>181,62</b>			<b>201,80</b>						<b>DINAS KEBUDAYAAN</b>	
Rata-rata capaian kinerja (%)							3.843.548.088.625		405.755.104.551	885.808.415.746		46.667.267.100						46.667.267.100	5,27		452.422.371.651	96,25	11,77							
Predikat Kinerja																		SR	SR				ST	SR						
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																														
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																														
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																														
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																														

Disusun  
Yogyakarta, 2 Mei 2025  
Kepala Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)

Dievaluasi  
Yogyakarta, 2 Mei 2025  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah



**EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUNGAN PROVINSI  
RENJA PERANGKAT DAERAH DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERIODE PELAKSANAAN : 2025**

Indikator dan target kinerja SKPD yang mengacu pada sasaran RKPD:

1	persentase ketermanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	51	59.23
2	Tingkat Ketersediaan Arsip	51.25	70.01
3	Kategori Reformasi Birokrasi OPD	2	2

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5		6		7		8	9	10	11	12	13	14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17							
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
1	Meningkatnya jumlah pemustaka ke perpustakaan	2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	%	16	5.489.057.484	24,6	9.021.176.363	1.325.028.100	24,6							24,6						24,6	9.021.176.363	153,75	164,35	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	
				Peningkatan Anggota Sepatu Jolifa (Sistem Perpustakaan Terpadu Jogja Library for All) (Balai Layanan Perpustakaan)	perpustakaan	0		48			48							48							96			DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	
		2.23.02.1.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah perpustakaan ber-SNP	perpustakaan	575	4.820.344.944	560	544.445.094	1.174.709.600															560	544.445.094	97,39	11,29	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
				Jumlah Perpustakaan yang Dibina Sesuai Kewenangan Provinsi dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	perpustakaan	50																						DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	
		2.23.02.1.01.01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah perpustakaan elektronik yang dipelihara dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service	perpustakaan	1	2.367.240.000	1	750.000	534.500.000															1	750.000	100,00	0,03	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
		2.23.02.1.01.02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah perpustakaan yang dikembangkan dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan di wilayah provinsi sesuai kewenangannya	perpustakaan	1	0	1	375.000	0															1	375.000	100,00		DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
				Jumlah perpustakaan yang dikembangkan dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan di wilayah provinsi sesuai kewenangannya	perpustakaan	2																						DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	
Rata-rata capaian kinerja (%)							119.997.666.159		33.816.141.730	25.884.253.680															33.816.141.730	348,65	28,18		
Predikat Kinerja																													
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																													
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																													
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																													
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																													

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
												I	II	III	IV															
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		2.23.02.1.01.04	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada satuan Pendidikan menengah atas dan Pendidikan khusus yang Dibina sesuai kewenangan Provinsi dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	perpustakaan	50	0	1	500.000	0																			DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	
				Jumlah Perpustakaan pada satuan Pendidikan menengah atas dan Pendidikan khusus yang Dibina sesuai kewenangan Provinsi dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	perpustakaan	50																							DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	
		2.23.02.1.01.05	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Provinsi	Jumlah Perpustakaan khusus yang Dibina sesuai kewenangan provinsi dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan	perpustakaan	37	0	1	375.000	0																			DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	
				Jumlah Perpustakaan khusus yang dibina sesuai kewenangan provinsi dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan	perpustakaan	37																							DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	
		2.23.02.1.01.06	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah tenaga perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	orang	50	1.189.106.572	25	500.000	292.957.300																			DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	
		2.23.02.1.01.07	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi yang Dikembangkan Melalui Peningkatan Koleksi	layanan	6	0	1	386.306.808	0																			DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	
				Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi yang Dikembangkan Melalui Peningkatan Koleksi	layanan	6		1																					DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	
		2.23.02.1.01.08	Pengembangan Perpustakaan Deposit	Jumlah Perpustakaan Deposit yang Dikembangkan	perpustakaan	1	0	1	500.000	0																			DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	
				Jumlah Perpustakaan Deposit yang Dikembangkan	perpustakaan	1																							DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	
Rata-rata capaian kinerja (%)							119.997.666.159		33.816.141.730	25.884.253.680																				
Predikat Kinerja																														
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																														
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																														
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																														
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																														

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
											I		II		III		IV													
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		2.23.02.1.01.09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dikelola dan Dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	eksemplar	10.000	0	1.446	155.138.286	0															1.446	155.138.286	14,46		DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	
				Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dikelola dan Dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	eksemplar	10.000																							DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	
		2.23.02.1.01.10	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	dokumen	1	1.263.998.372			347.252.300																			DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	
		<b>2.23.02.1.02</b>	<b>Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi</b>	<b>Jumlah masyarakat gemar membaca di masyarakat</b>	<b>kali</b>	<b>48</b>	<b>668.712.540</b>	<b>48</b>	<b>8.476.731.269</b>	<b>150.318.500</b>															<b>48</b>	<b>8.476.731.269</b>	<b>100,00</b>	<b>1.267,62</b>	<b>DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH</b>	
				<b>jumlah sosialisasi budaya baca</b>	<b>kali</b>	<b>48</b>																							<b>DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH</b>	
		2.23.02.1.02.01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus	lokus	538	0	222	8.330.560.279	0															222	8.330.560.279	41,26		DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	
				Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus	lokus	48																							DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	
		2.23.02.1.02.03	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	orang	50	668.712.540	3	1.892.996	150.318.500															3	1.892.996	6,00	0,28	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	
		2.23.02.1.02.04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Provinsi yang Dikembangkan	perpustakaan	5	0	8	144.277.994	0															8	144.277.994	160,00		DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	
Rata-rata capaian kinerja (%)							119.997.666.159		33.816.141.730	25.884.253.680															33.816.141.730	348,65	28,18			
Predikat Kinerja																													ST	SR
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																														
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																														
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																														
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																														

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
												I	II	III	IV													
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				Jumlah Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Provinsi yang Dikembangkan	layanan	5																						DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
		2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Jumlah Koleksi dan Naskah Kuno yang dirawat dan dilestarikan	eksemplar	2.535	2.702.828.160	7.756	11.589.499	515.744.000	3.163																	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
				Jumlah Koleksi dan Naskah Kuno yang dirawat dan dilestarikan (Balai Layanan Perpustakaan)	Eksemplar	0		2.562			518																	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
		2.23.03.1.01	Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi	Jumlah KCKR daerah yang dihimpun	eksemplar	2.500	2.344.188.160	2.500	375.000	441.744.000																		DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
				jumlah karya cetak dan karya rekam baru	eksemplar	2.500																						DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
		2.23.03.1.01.01	Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	Jumlah Koleksi KCKR yang Dihimpun dan Dikelola Serta Kepatuhan Serah Simpan KCKR	eksemplar	2.500	2.344.188.160	7.756	375.000	441.744.000																		DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
		2.23.03.1.02	Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah	jumlah judul yang tercantum dalam KID	entri	2.500	358.640.000	2.500	8.589.499	74.000.000																		DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
				jumlah katalog induk daerah dan bibliografi daerah	terbitan	6																						DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
		2.23.03.1.02.01	Penerbitan Katalog Induk Daerah	Jumlah Dokumen KID dan Literatur Sekunder Lainnya yang Diterbitkan	entri	2.500	358.640.000	16.841	6.530.499	74.000.000																		DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
		2.23.03.1.02.02	Penerbitan Bibliografi Daerah	Jumlah Bibliografi Daerah yang Diterbitkan	naskah	5	0	1	2.059.000	0																		DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
Rata-rata capaian kinerja (%)							119.997.666.159		33.816.141.730	25.884.253.680																		
Predikat Kinerja																												SR
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																												
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																												

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab								
												I	II	III	IV					14 = 13/8x100		15 = 7 + 13					16 = 15 / 6 x 100%							
												K	Rp	K	Rp					K	Rp	K	Rp				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
				Jumlah Bibliografi Daerah yang Diterbitkan	naskah	5																								DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH				
		2.23.03.1.03	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi	jumlah naskah kuno dan bahan pustaka yang dirawat dan dilestarikan	lembar	800		10	2.025.000																nan	10	2.025.000	1,25		DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH				
				jumlah Bahan pustaka yang dilestarikan	eksemplar	50																								DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH				
		2.23.03.1.03.01	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah Masyarakat yang Berperan dalam Pelestarian Naskah Kuno dan Pendaftaran Naskah Kuno	orang	250	0	25	1.275.000																		25	1.275.000	10,00		DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH			
				Jumlah Masyarakat yang Berperan dalam Pelestarian Naskah Kuno dan Pendaftaran Naskah Kuno	orang	250		0																							DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH			
		2.23.03.1.03.02	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Jumlah Naskah Kunah yang Dilakukan Pengembangan yang Dimiliki Oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	eksemplar	200	0	1	750.000																		1	750.000	0,50		DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH			
				Jumlah Naskah Kunah yang Dilakukan Pengembangan yang Dimiliki Oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	eksemplar	50																									DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH			
		2.23.03.1.04	Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan terdaftar	eksemplar	10		4	600.000																	nan	4	600.000	40,00		DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH			
Rata-rata capaian kinerja (%)									119.997.666.159																									
Predikat Kinerja																																		
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																																		
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																																		

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
											I	II	III	IV															
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				<i>jumlah lokasi penelusuran Koleksi Budaya Etnis Nusantara</i>	<i>lokasi</i>	15																						<i>DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH</i>	
		2.23.03.1.04.01	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Diseleksi dan Dilakukan Pengadaan Oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi	eksemplar	15	0	4	600.000		0														4	600.000	26,67	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	
				Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Diseleksi dan Dilakukan Pengadaan Oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi	eksemplar	15																						DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	
2	Pemanfaatan arsip sebagai sumber informasi	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Jumlah Arsip dan Bahan Pustaka Kraton dan Kadipaten yang dilindungi dan dikonservasi	dokumen	3.000	4.368.000.000	4.729	5.812.398.639	1.200.000.000	251														4.980	5.812.398.639	166,00	133,07	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
		2.22.08.5.02	Perlindungan dan Konservasi Arsip Kraton dan Kadipaten	Jumlah jenis layanan perlindungan dan konservasi	jenis	2		2	5.812.398.639																nan	2	5.812.398.639	100,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
		2.22.08.5.02.02	Pengelolaan Arsip Bernilai Sejarah Kasultanan dan Kadipaten	Jumlah Arsip Bernilai Sejarah Kasultanan dan Kadipaten	dokumen	12.000	0	35.142	2.913.573.318		0														35.142	2.913.573.318	292,85	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	
				Jumlah Arsip Bernilai Sejarah Kasultanan dan Kadipaten	dokumen	12.000																						DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	
		2.22.08.5.02.03	Pengelolaan Koleksi dan Pengembangan Literasi Budaya	Jumlah Koleksi dan Pengembangan Literasi Budaya	unit	72.510	0	116.457	2.898.825.321		0														116.457	2.898.825.321	160,61	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	
				Jumlah Koleksi dan Pengembangan Literasi Budaya	unit	72.510																						DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	
		2.22.08.5.06	Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan	Tersedianya sarana prasarana keistimewaan	unit	20	4.368.000.000			1.200.000.000																		DINAS PERPUSTAKAAN	
Rata-rata capaian kinerja (%)							119.997.666.159		33.816.141.730	25.884.253.680															33.816.141.730	348,65	28,18		
Predikat Kinerja																												ST	SR
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																													
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																													
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																													
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																													

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17								
			<i>Kebudayaan</i>	<i>urusan kebudayaan</i>																					<i>DAN ARSIP DAERAH</i>		
		2.22.08.5.06.01	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya	Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya	undefined	0	4.368.000.000			1.200.000.000															DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH		
		<b>2.24.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP</b>	<b>Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip</b>	nilai	<b>97,5</b>	<b>4.939.325.237</b>	<b>100</b>	<b>83.620.725</b>	<b>1.179.615.120</b>	<b>100</b>										<b>200</b>	<b>83.620.725</b>	<b>205,13</b>	<b>1,69</b>	<b>DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH</b>		
		<b>2.24.02.1.01</b>	<b>Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi</b>	<b>persentase arsip inaktif yang dibuatkan daftar arsip</b>	%	<b>43</b>	<b>2.227.358.200</b>	<b>41,5</b>	<b>82.622.729</b>	<b>531.600.000</b>											<b>20,75</b>	<b>82.622.729</b>	<b>48,26</b>	<b>3,71</b>	<b>DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH</b>		
				<b>Jumlah Institusi yang terbina dan dikelola kearsipannya</b>	<b>insitusi</b>	<b>100</b>																			<b>DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH</b>		
		2.24.02.1.01.02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	berkas	12.000	0			0															DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH		
				Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	berkas	12.000																			DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH		
		2.24.02.1.01.03	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi	laporan	2	2.227.358.200	1	82.622.729	531.600.000											1	82.622.729	50,00	3,71	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH		
		<b>2.24.02.1.02</b>	<b>Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi</b>	<b>persentase arsip statis yang telah dibuatkan daftar arsip</b>	%	<b>44</b>		<b>42,5</b>													<b>nan</b>	<b>21,25</b>			<b>48,30</b>	<b>DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH</b>	
				<b>Jumlah arsip statis yang dikelola</b>	<b>arsip</b>	<b>20.000</b>																			<b>DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH</b>		
		2.24.02.1.02.02	Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses	arsip	20.000	0			0															DINAS PERPUSTAKAAN		
Rata-rata capaian kinerja (%)						119.997.666.159		33.816.141.730		25.884.253.680												33.816.141.730	348,65	28,18			
Predikat Kinerja																									SR SR		
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																											
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																											

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
					K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp	
					1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100	
																												DAN ARSIP DAERAH
				Jumlah Arsip Statis yang dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses	arsip	20.000																						DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
		2.24.02.1.03	Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	Persentase arsip yang telah dimasukkan SIKN melalui JIKN	%	21	2.711.967.037	19,5	997.996	648.015.120												9,75	997.996	46,43	0,04		DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	
				Entri data Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	data	5.000																						DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
		2.24.02.1.03.01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	pengguna	750	1.532.845.704	272.054	499.998	360.333.600												272.054	499.998	36.273,87	0,03		DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	
		2.24.02.1.03.02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	laporan	3	1.179.121.333	1	497.998	287.681.520												1	497.998	33,33	0,04		DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	
3	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Perangkat Daerah	0.00.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	nilai	91,5	102.498.455.278	91,68	18.887.356.504	21.663.866.460	88,25											179,93	18.887.356.504	196,64	18,43		DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	
				Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Balai Layanan Perpustakaan)	Angka	0		91,65			87,47											179,12					DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	
		0.00.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	dokumen	10	96.293.300	10	1.125.000	18.355.000												10	1.125.000	100,00	1,17		DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	
				jumlah dokumen perencanaan,	dokumen	7																					DINAS PERPUSTAKAAN	
Rata-rata capaian kinerja (%)							119.997.666.159		33.816.141.730	25.884.253.680													33.816.141.730	348,65	28,18			
Predikat Kinerja																												
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																												
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																												

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab									
					K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp					
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17	
				<i>penganggaran dan evaluasi kinerja</i>																								<b>DAN ARSIP DAERAH</b>	
		0.00.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	3	0	4	375.000	0														4	375.000	133,33		DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	4		4																4		100,00		DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	
		0.00.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	dokumen	4	0	4	375.000	0														4	375.000	100,00		DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	
				Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	dokumen	5																						DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	
		0.00.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	layanan	2	96.293.300	2	375.000	18.355.000														2	375.000	100,00	0,39	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	
		<b>0.00.01.1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>jumlah laporan administrasi keuangan</b>	<b>layanan</b>	<b>14</b>	<b>95.989.030.823</b>	<b>14</b>	<b>14.743.161.904</b>	<b>19.930.817.860</b>														<b>14</b>	<b>14.743.161.904</b>	<b>100,00</b>	<b>15,36</b>	<b>DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH</b>	
		0.00.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	100	95.478.634.297	390	14.660.132.755	19.830.508.160														390	14.660.132.755	390,00	15,35	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	
		0.00.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	dokumen	1	0			0																		DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	
				Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	dokumen	1																						DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	
		0.00.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan	dokumen	13	388.444.950	59	74.549.961	75.540.000														59	74.549.961	453,85	19,19	DINAS PERPUSTAKAAN	
Rata-rata capaian kinerja (%)							119.997.666.159		33.816.141.730	25.884.253.680															33.816.141.730	348,65	28,18		
Predikat Kinerja																													
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																													
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																													
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																													
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																													

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp			
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
			Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																							DAN ARSIP DAERAH	
		0.00.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	laporan	1	53.362.324	1	4.446.994	11.500.400											1	4.446.994	100,00	8,33	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH			
		0.00.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	laporan	12	68.589.252	23	4.032.194	13.269.300											23	4.032.194	191,67	5,88	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH			
		<b>0.00.01.1.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah laporan pengelolaan pengelola barang sesuai peraturan perundangan yang berlaku</b>	<b>laporan</b>	<b>4</b>	<b>38.182.700</b>	<b>4</b>	<b>38.182.700</b>												<i>nan</i>	<b>4</b>	<b>38.182.700</b>	<b>100,00</b>		<b>DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH</b>		
		0.00.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	laporan	6	0	19	38.182.700	0											19	38.182.700	316,67		DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH			
				Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	laporan	5																				DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH		
		<b>0.00.01.1.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah dokumen terlaksananya penilaian angka kredit jabatan fungsional</b>	<b>dokumen</b>	<b>4</b>	<b>185.972.859</b>	<b>2</b>	<b>3.000.000</b>	<b>43.087.600</b>											<b>2</b>	<b>3.000.000</b>	<b>50,00</b>	<b>1,61</b>	<b>DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH</b>			
		0.00.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	dokumen	4	185.972.859	5	3.000.000	43.087.600											5	3.000.000	125,00	1,61	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH			
		<b>0.00.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah jenis administrasi umum perangkat daerah</b>	<b>jenis</b>	<b>6</b>	<b>6.227.158.296</b>	<b>6</b>	<b>35.787.589</b>	<b>1.671.606.000</b>											<b>6</b>	<b>35.787.589</b>	<b>100,00</b>	<b>0,57</b>	<b>DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH</b>			
		0.00.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	4	0	2	2.099.068	0											2	2.099.068	50,00		DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH			
Rata-rata capaian kinerja (%)							119.997.666.159		33.816.141.730	25.884.253.680												33.816.141.730	348,65	28,18				
Predikat Kinerja																										ST	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																												
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																												

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
												I	II	III	IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12	13	14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	4																			DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	
		0.00.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	8	388.501.143	6	9.756.637		84.557.000										6	9.756.637	75,00	2,51	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	
		0.00.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket	6	327.768.850	3	1.409.561		74.188.000										3	1.409.561	50,00	0,43	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	
		0.00.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	paket	4	0	2	3.521.669		0										2	3.521.669	50,00		DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	
				Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	paket	4		1													1		25,00		DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	
		0.00.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	dokumen	2	0	1	137.000		0										1	137.000	50,00		DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	dokumen	2																			DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	
		0.00.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	4	5.110.888.303	3	18.488.654		1.412.861.000										3	18.488.654	75,00	0,36	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	
		0.00.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	dokumen	1	400.000.000	1	375.000		100.000.000										1	375.000	100,00	0,09	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	
		<b>0.00.01.1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>unit</b>	<b>4</b>		<b>3</b>	<b>2.664.000</b>											<b>nan</b>	<b>3</b>	<b>2.664.000</b>	<b>75,00</b>		<b>DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH</b>	
Rata-rata capaian kinerja (%)							119.997.666.159		33.816.141.730		25.884.253.680											33.816.141.730	348,65	28,18		
Predikat Kinerja																									ST	SR
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																										
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																										
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																										
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																										

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
												I	II	III	IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12	13	14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		0.00.01.1.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	unit	2	0				0															DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
				Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	unit	0																				DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
		0.00.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	paket	1	0				0															DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
				Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	paket	1																				DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
		0.00.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	30	0	3	2.664.000		0											3	2.664.000	10,00		DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	39																				DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
		0.00.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	4	0				0															DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
				Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	4																				DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
		<b>0.00.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>jenis</b>	<b>3</b>		<b>3</b>	<b>3.648.179.862</b>												<b>nan</b>	<b>3</b>	<b>3.648.179.862</b>	<b>100,00</b>		<b>DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH</b>
		0.00.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	4	0	2	750.000		0											2	750.000	50,00		DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
Rata-rata capaian kinerja (%)							119.997.666.159		33.816.141.730		25.884.253.680												33.816.141.730	348,65	28,18	
Predikat Kinerja																										ST SR
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																										
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																										
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																										
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																										

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab								
					K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp				
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	4																						DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	
		0.00.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	6	0	7	2.256.594.577		0													7	2.256.594.577	116,67		DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	6																						DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	
		0.00.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	3	0	3	1.390.835.285		0													3	1.390.835.285	100,00		DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	3																						DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	
		<b>0.00.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>unit</b>	<b>16</b>		<b>16</b>	<b>415.255.449</b>														<b>nan</b>	<b>16</b>	<b>415.255.449</b>	<b>100,00</b>		<b>DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH</b>	
		0.00.01.1.09.010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	2	0	4	147.126.500		0													4	147.126.500	200,00		DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	
				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	30																						DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	
		0.00.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	27	0	27	91.278.200		0													27	91.278.200	100,00		DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	
Rata-rata capaian kinerja (%)							119.997.666.159		33.816.141.730		25.884.253.680														33.816.141.730	348,65	28,18		
Predikat Kinerja																													
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																													
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																													
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																													
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																													

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp			
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	26		0																			DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	
		0.00.01.1.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	unit	75	0	5	1.500.000	0											5	1.500.000	6,67			DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH		
				Jumlah Mebel yang Dipelihara	unit	4																				DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH		
		0.00.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	16	0	2	2.900.000	0											2	2.900.000	12,50			DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH		
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	15		1													1		6,67			DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH		
		0.00.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	2	0	3	172.450.749	0											3	172.450.749	150,00			DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH		
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	5		1													1		20,00			DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH		
Rata-rata capaian kinerja (%)							119.997.666.159		33.816.141.730	25.884.253.680												33.816.141.730	348,65	28,18				
Predikat Kinerja																					SR	SR			ST	SR		
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																												
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																												

Disusun  
Yogyakarta, 2 Mei 2025  
Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah

Dievaluasi  
Yogyakarta, 2 Mei 2025  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah

KURNIAWAN, S.Sos, SE.Akt, MEC.Dev.  
NIP. 197208261998031004

NI MADE DWIPANTI INDRAYANTI, S.T., M.T.  
NIP. 197010181998032007

**EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUNGAN PROVINSI  
RENJA PERANGKAT DAERAH DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERIODE PELAKSANAAN : 2025**

Indikator dan target kinerja SKPD yang mengacu pada sasaran RKPD:

	Target	Realisasi
1 Persentase Keterwakilan perempuan dalam politik (DPRD, Bupati/walikota dan Bamuskal)	19	19
2 Persentase korban kekerasan perempuan dan anak yang mendapatkan layanan komprehensif di UPTD dan P2TPA se-DIY	95,5	100
3 Kategori Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	2	2
4 Median Usia Kawin Pertama (MUKP) Perempuan	23	5,75
5 Jumlah Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)	5	6

No	Sasaran	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
					K		Rp			K		Rp		I		II			III		IV		K			Rp		K		Rp	
					K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase perempuan pengambilan keputusan di ranah publik	persen	0	17.065.226.861	25,1475	43.380.000	3.869.935.348	40,63	3.168.000					40	3.168.000	0,08	32,57375	46.548.000	0,27	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK								
		2.08.02.1.01	Pelebagaian Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	Jumlah OPD dengan anggaran responsif gender	OPD	37	787.662.950	0	500.000	186.237.000		500.000					500.000	0,27		1.000.000	0,13	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK									
				Jumlah OPD dengan anggaran responsif gender	OPD	37		0			37						37			37		100,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK								
		2.08.02.1.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Provinsi	Dokumen	25	721.490.000	0		170.730.000	5						5			5		20,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK								
		2.08.02.1.01.03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Provinsi	OPD	37	66.172.950	0	500.000	15.507.000	1	500.000					1	500.000	3,22	1	1.000.000	2,70	1,51	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK							
		2.08.02.1.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi	Prosentase perempuan KEP Desa Prima yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan di tingkat	Persen	17	14.743.641.411	0		3.320.698.348	14						14			7		41,18	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN								
Rata-rata capaian kinerja (%)							255.049.401.589		15.979.965.647	51.519.484.644		3.360.171.273					3.360.171.273	6,52		19.340.136.920	74,49	7,58									
Predikat Kinerja																	SR	SR				T	SR								
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																															
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																															
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																															
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																															

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13/8x100	15 = 7 + 13	16 = 15 / 6 x 100%	17									
			<i>pada Organisasi Masyarakatan Kewenangan Provinsi</i>	<i>Kalurahan/Kabupaten/ Propinsi</i>																			<b>ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK</b>		
		2.08.02.1.02.01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Dokumen	20	9.963.839.886	0		2.211.679.503													DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK		
		2.08.02.1.02.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mengikuti Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan Di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi Kepada Organisasi Masyarakat di Kabuptaen/Kota	Organisasi	40	4.779.801.525	0		1.109.018.845	7						7		7		17,50		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK		
		<b>2.08.02.1.03</b>	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi</b>	<b>Fasilitasi Organisasi Perempuan pendukung PPPA</b>	<i>organisasi</i>	<b>3</b>	<b>1.533.922.500</b>		<b>42.880.000</b>	<b>363.000.000</b>	<b>3</b>	<b>2.668.000</b>					<b>3</b>	<b>2.668.000</b>	<b>0,73</b>	<b>3</b>	<b>45.548.000</b>	<b>100,00</b>	<b>2,97</b>	<b>DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK</b>	
		2.08.02.1.03.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	Lembaga	3	1.149.922.500	0	42.380.000	272.250.000	3	2.168.000					3	2.168.000	0,80	3	44.548.000	100,00	3,87	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK	
		2.08.02.1.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Orang	300	384.000.000	0	500.000	90.750.000	60	500.000					60	500.000	0,55	60	1.000.000	20,00	0,26	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK	
		<b>2.08.05</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK</b>	<b>Persentase Sistem Data Gender dan Anak yang dikelola dengan baik</b>	<b>%</b>	<b>0</b>	<b>1.535.105.000</b>	<b>100</b>	<b>1.000.000</b>	<b>363.000.000</b>	<b>100</b>	<b>250.000</b>					<b>100</b>	<b>250.000</b>	<b>0,07</b>	<b>100</b>	<b>1.250.000</b>		<b>0,08</b>	<b>DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK</b>	
		<b>2.08.05.1.01</b>	<b>Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan</b>	<b>Update Data Gender dan Anak serta data Perlindungan perempuan dan Anak</b>	<b>Dokumen</b>	<b>10</b>	<b>1.535.105.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000.000</b>	<b>363.000.000</b>	<b>2</b>	<b>250.000</b>					<b>2</b>	<b>250.000</b>	<b>0,07</b>	<b>3</b>	<b>1.250.000</b>	<b>30,00</b>	<b>0,08</b>	<b>DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN</b>	
Rata-rata capaian kinerja (%)							255.049.401.589		15.979.965.647	51.519.484.644							3.360.171.273		6,52		19.340.136.920	74,49	7,58		
Predikat Kinerja																	SR		SR				T	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																									
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																									

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan			Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13/8x100	15 = 7 + 13	16 = 15 / 6 x 100%	17											
			<i>Data di Tingkat Daerah Provinsi</i>																							<b>PENGENDALIAN PENDUDUK</b>	
		2.08.05.1.01.01	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia	Dokumen	10	896.217.500	2	500.000		211.750.000	2	125.000							2	125.000	0,06	4	625.000	40,00	0,07	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
		2.08.05.1.01.02	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	Dokumen	15	638.887.500	3	500.000		151.250.000	3	125.000							3	125.000	0,08	6	625.000	40,00	0,10	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
		<b>2.22.08</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN</b>	<b>Cakupan perempuan dan anak yang mendapatkan fasilitasi pemberdayaan</b>	<b>persen</b>	<b>0</b>	<b>108.006.721.900</b>	<b>0,0766</b>	<b>4.481.239.527</b>		<b>20.150.000.000</b>	<b>0,00095</b>	<b>152.616.773</b>							<b>0,00095</b>	<b>152.616.773</b>	<b>0,76</b>	<b>0,038775</b>	<b>4.633.856.300</b>		<b>4,29</b>	<b>DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK</b>
		<b>2.22.08.5.06</b>	<b>Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan</b>	<b>Tersedianya Sarana dan Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan</b>	<b>Unit</b>	<b>27</b>	<b>1.378.000.000</b>				<b>250.000.000</b>															<b>DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK</b>	
		2.22.08.5.06.01	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya	Tersedianya Sarana Prasarana Budaya	Unit	27	1.378.000.000				250.000.000															DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK	
		<b>2.22.08.5.09</b>	<b>Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya</b>	<b>Jumlah fasilitasi kelompok ekonomi perempuan (KEP) desa prima</b>	<b>Kelompok</b>	<b>160</b>	<b>106.628.721.900</b>	<b>30</b>	<b>4.481.239.527</b>		<b>19.900.000.000</b>	<b>5</b>	<b>152.616.773</b>							<b>5</b>	<b>152.616.773</b>	<b>0,77</b>	<b>35</b>	<b>4.633.856.300</b>	<b>21,88</b>	<b>4,35</b>	<b>DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK</b>
		2.22.08.5.09.19	Pengembangan Ekonomi Perempuan	Jumlah Perempuan yang Dikembangkan perekonomiannya	Orang	1.250	68.766.721.900	370	4.017.439.677		11.700.000.000	50	124.001.129							50	124.001.129	1,06	420	4.141.440.806	33,60	6,02	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
Rata-rata capaian kinerja (%)							255.049.401.589		15.979.965.647		51.519.484.644		3.360.171.273								3.360.171.273	6,52		19.340.136.920	74,49	7,58	
Predikat Kinerja																					SR	SR				T	SR
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																											
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																											

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I	II	III	IV	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp			
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17	
		2.22.08.5.09.21	Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	Jumlah Dokumen Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	dokumen	2	37.862.000.000	2	463.799.850		8.200.000.000	2	28.615.644							2	28.615.644		0,35	4	492.415.494	200,00	1,30	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK	
2	Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak	2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase perempuan korban kekerasan yang dilayani	%	97	14.345.538.252	100	919.501.630		3.139.524.120	100	716.280.000							100	716.280.000		22,81	100	1.635.781.630	103,09	11,40	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK	
		2.08.03.1.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	jumlah kebijakan yang tersusun	Dokumen	5	1.936.153.000	1	50.710.000		437.268.000	1	640.000							1	640.000		0,15	2	51.350.000	40,00	2,65	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK	
		2.08.03.1.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	Dokumen	5	235.403.000	1	50.210.000		37.268.000	1	140.000							1	140.000		0,38	2	50.350.000	40,00	21,39	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK	
		2.08.03.1.01.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	OPD	20	1.700.750.000	5	500.000		400.000.000	5	500.000							5	500.000		0,13	10	1.000.000	50,00	0,06	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK	
		2.08.03.1.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penerima manfaat	Orang	650	10.390.942.252	145	833.584.330		2.237.256.120	26	715.000.000							26	715.000.000		31,96	171	1.548.584.330	26,31	14,90	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK	
		2.08.03.1.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan Masyarakat	Orang	1	8.194.721.500	1	715.000.000		1.772.650.000	1	715.000.000							1	715.000.000		40,34	2	1.430.000.000	200,00	17,45	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK	
Rata-rata capaian kinerja (%)							255.049.401.589		15.979.965.647		51.519.484.644		3.360.171.273								3.360.171.273		6,52		19.340.136.920	74,49	7,58		
Predikat Kinerja																					SR	SR					T	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																													
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																													
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																													
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																													

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan			Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%							
1	2	3	4	5			6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17		
		2.08.03.1.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Layanan	3	2.196.220.752	3	118.584.330		464.606.120	3									3				6	118.584.330	200,00	5,40	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK		
		<b>2.08.03.1.03</b>	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi</b>	<b>jumlah jejaring antar lembaga yang terfasilitasi</b>	<b>Organisasi</b>	<b>3</b>	<b>2.018.443.000</b>	<b>3</b>	<b>35.207.300</b>		<b>465.000.000</b>	<b>3</b>	<b>640.000</b>								<b>3</b>	<b>640.000</b>	<b>0,14</b>	<b>6</b>	<b>35.847.300</b>	<b>200,00</b>	<b>1,78</b>	<b>DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK</b>			
		2.08.03.1.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Orang	150	327.693.000	30	34.707.300		65.000.000	30	140.000								30	140.000	0,22	60	34.847.300	40,00	10,63	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK			
		2.08.03.1.03.04	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	17	1.690.750.000	4	500.000		400.000.000	4	500.000								4	500.000	0,13	8	1.000.000	47,06	0,06	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK			
		<b>2.08.06</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>	<b>Persentase lembaga layanan yang memenuhi standar</b>	<b>%</b>	<b>0</b>	<b>4.363.750.000</b>	<b>100</b>	<b>64.484.800</b>		<b>1.000.000.000</b>	<b>100</b>	<b>10.112.800</b>								<b>100</b>	<b>10.112.800</b>	<b>1,01</b>	<b>100</b>	<b>74.597.600</b>		<b>1,71</b>	<b>DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK</b>			
		<b>2.08.06.1.01</b>	<b>Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi</b>	<b>Jumlah Kab/Kota yang mendapatkan pembinaan</b>	<b>Kab/Kota</b>	<b>5</b>	<b>2.401.500.000</b>	<b>5</b>	<b>1.000.000</b>		<b>550.000.000</b>	<b>5</b>	<b>1.000.000</b>								<b>5</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0,18</b>	<b>10</b>	<b>2.000.000</b>	<b>200,00</b>	<b>0,08</b>	<b>DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK</b>			
		2.08.06.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Dokumen	5	1.100.750.000	1	500.000		250.000.000	1	500.000								1	500.000	0,20	2	1.000.000	40,00	0,09	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK			
		2.08.06.1.01.0003	Advokasi, Sosialisasi dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Usaha	Organisasi	80	1.300.750.000	2	500.000		300.000.000	16	500.000								16	500.000	0,17	18	1.000.000	22,50	0,08	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,			
Rata-rata capaian kinerja (%)																															
Predikat Kinerja																															
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																															
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																															
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																															
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																															

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan			Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
													I	II	III	IV																
1	2	3	4	5			6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
			Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Kewenangan Provinsi yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha																									PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK			
		2.08.06.1.02	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi</b>	<b>Jumlah lembaga layanan yang mendapat pembinaan ramah anak</b>	<b>Lembaga</b>	<b>210</b>	<b>1.962.250.000</b>	<b>42</b>	<b>63.484.800</b>	<b>450.000.000</b>	<b>42</b>	<b>9.112.800</b>					<b>42</b>	<b>9.112.800</b>	<b>2,03</b>	<b>84</b>	<b>72.597.600</b>	<b>40,00</b>	<b>3,70</b>					<b>DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK</b>				
		2.08.06.1.02.0001	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Orang	180	210.750.000	90	4.000.000	50.000.000	1	250.000					1	250.000	0,50	91	4.250.000	50,56	2,02					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK				
		2.08.06.1.02.0005	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	5	1.300.750.000	1	500.000	300.000.000	1	500.000					1	500.000	0,17	2	1.000.000	40,00	0,08					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK				
		2.08.06.1.02.0006	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Dokumen	30	450.750.000	1	58.984.800	100.000.000	1	8.362.800					1	8.362.800	8,36	2	67.347.600	6,67	14,94					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK				
		2.08.07	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>	<b>Persentase anak korban kekerasan yang dilayani</b>	<b>%</b>	<b>97</b>	<b>6.071.432.452</b>	<b>100</b>	<b>193.285.421</b>	<b>1.381.797.120</b>	<b>100</b>	<b>1.280.000</b>					<b>100</b>	<b>1.280.000</b>	<b>0,09</b>	<b>100</b>	<b>194.565.421</b>	<b>103,09</b>	<b>3,20</b>					<b>DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK</b>				
		2.08.07.1.01	<b>Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Terlaksananya Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Dokumen</b>	<b>5</b>	<b>332.845.000</b>	<b>1</b>	<b>51.090.000</b>	<b>60.000.000</b>	<b>1</b>	<b>140.000</b>					<b>1</b>	<b>140.000</b>	<b>0,23</b>	<b>2</b>	<b>51.230.000</b>	<b>40,00</b>	<b>15,39</b>					<b>DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK</b>				
		2.08.07.1.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan	Dokumen	5	332.845.000	1	51.090.000	60.000.000	1	140.000					1	140.000	0,23	2	51.230.000	40,00	15,39					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN				
Rata-rata capaian kinerja (%)																																
Predikat Kinerja																																
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																																
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																																
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																																
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																																

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13/8x100	15 = 7 + 13	16 = 15 / 6 x 100%	17									
				terhadap Anak Kewenangan Provinsi																					ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
		2.08.07.1.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah penerima manfaat	Orang	235	5.427.864.452	52	141.695.421	1.259.697.120	9	640.000					9	640.000	0,05	61	142.335.421	25,96	2,62	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK	
		2.08.07.1.02.05	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan Kewenangan Provinsi	Orang	200	3.829.575.000	39	500.000	907.500.000	40	500.000					40	500.000	0,06	79	1.000.000	160,50	0,03	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK	
		2.08.07.1.02.06	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK Kewenangan Provinsi	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan kewenangan Provinsi	Layanan	3	1.598.289.452	3	107.982.721	352.197.120	3						3			6	107.982.721	200,00	6,76	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK	
		2.08.07.1.03.0008	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK Kewenangan Provinsi	jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK kewenangan Provinsi	orang	0	0	56	33.212.700	0	56	140.000					56	140.000		112	33.352.700			DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK	
		2.08.07.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	5	310.723.000	1	500.000	62.100.000	1	500.000					1	500.000	0,81	2	1.000.000	40,00	0,32	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK	
		2.08.07.1.03.07	Penyediaan Bantuan kebutuhan khusus bagi AMPK Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Usaha Kewenangan Provinsi	Dokumen	5	310.723.000		500.000	62.100.000		500.000						500.000	0,81		1.000.000		0,32	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK	
3	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan	0.00.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	nilai	0	87.630.561.834	88,51	10.237.574.269	18.105.229.556	88,51	2.466.752.400					88,51	2.466.752.400	13,62	177,02	12.704.326.669		14,50	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,	
Rata-rata capaian kinerja (%)							255.049.401.589		15.979.965.647	51.519.484.644		3.360.171.273						3.360.171.273	6,52		19.340.136.920	74,49	7,58		
Predikat Kinerja																		SR	SR				T	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																									
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																									

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					K	Rp	K	Rp		K	Rp	I		II		III				IV		14 = 13/8x100			15 = 7 + 13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17									
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
	urusan pemerintahan di perangkat daerah		<b>PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>																				<b>PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK</b>		
		<b>0.00.01.1.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah</b>	<b>Dokumen</b>	<b>40</b>	<b>655.619.300</b>	<b>8</b>	<b>48.654.300</b>	<b>139.150.000</b>	<b>2</b>	<b>14.791.000</b>					<b>2</b>	<b>14.791.000</b>	<b>10,63</b>	<b>10</b>	<b>63.445.300</b>	<b>25,00</b>	<b>9,68</b>	<b>DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK</b>	
		0.00.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	11	267.996.100	2	19.151.100	54.450.000	1	6.169.000					1	6.169.000	11,33	3	25.320.100	27,27	9,45	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK	
		0.00.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	5	188.921.600	1	10.236.600	42.350.000	1	2.500.000					1	2.500.000	5,90	2	12.736.600	40,00	6,74	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK	
		0.00.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	20	198.701.600	5	19.266.600	42.350.000	2	6.122.000					2	6.122.000	14,46	7	25.388.600	35,00	12,78	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK	
		<b>0.00.01.1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Terpenuhinya tugas administrasi keuangan perangkat daerah dalam 1 tahun</b>	<b>Laporan</b>	<b>100</b>	<b>54.560.269.770</b>	<b>0</b>	<b>7.637.457.618</b>	<b>11.206.427.216</b>	<b>5</b>	<b>1.875.061.062</b>					<b>5</b>	<b>1.875.061.062</b>	<b>16,73</b>	<b>5</b>	<b>9.512.518.680</b>	<b>5,00</b>	<b>17,43</b>	<b>DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK</b>	
		0.00.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	79	54.029.596.044	55	7.566.107.468	11.100.000.000	79	1.861.131.862					79	1.861.131.862	16,77	134	9.427.239.330	169,62	17,45	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK	
		0.00.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	5	299.720.000	1	40.220.000	60.000.000	1	4.206.800					1	4.206.800	7,01	2	44.426.800	40,00	14,82	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN	
Rata-rata capaian kinerja (%)							255.049.401.589		15.979.965.647	51.519.484.644		3.360.171.273						3.360.171.273	6,52		19.340.136.920	74,49	7,58		
Predikat Kinerja																		SR	SR				T	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																									
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																									

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Tahun Laju (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
																												PENGENDALIAN PENDUDUK
		0.00.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	5	20.638.326	0		4.077.216																		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
		0.00.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	90	210.315.400	18	31.130.150	42.350.000	4	9.722.400						4	9.722.400	22,96	22	40.852.550	24,44	19,42			DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK	
		<b>0.00.01.1.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Tersusunnya laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD</b>	<b>Laporan</b>	<b>5</b>	<b>193.200.000</b>	<b>0</b>	<b>13.328.000</b>	<b>40.000.000</b>	<b>1</b>	<b>3.430.000</b>						<b>1</b>	<b>3.430.000</b>	<b>8,58</b>	<b>1</b>	<b>16.758.000</b>	<b>20,00</b>	<b>8,67</b>			<b>DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK</b>	
		0.00.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	5	193.200.000	1	13.328.000	40.000.000	1	3.430.000						1	3.430.000	8,58	2	16.758.000	40,00	8,67			DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK	
		<b>0.00.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Terpenuhinya kebutuhan adminitrasi umum perangkat daerah</b>	<b>Laporan</b>	<b>20</b>	<b>4.804.146.414</b>	<b>0</b>	<b>148.696.990</b>	<b>983.882.340</b>	<b>2</b>	<b>69.476.700</b>						<b>2</b>	<b>69.476.700</b>	<b>7,06</b>	<b>2</b>	<b>218.173.690</b>	<b>10,00</b>	<b>4,54</b>			<b>DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK</b>	
		0.00.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	490.607.500	3	61.214.800	100.000.000	2	38.431.300						2	38.431.300	38,43	5	99.646.100	500,00	20,31			DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK	
		0.00.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	444.968.400	4	11.552.800	90.000.000	2	14.998.900						2	14.998.900	16,67	6	26.551.700	600,00	5,97			DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK	
Rata-rata capaian kinerja (%)							255.049.401.589		15.979.965.647	51.519.484.644		3.360.171.273							3.360.171.273	6,52		19.340.136.920	74,49	7,58				
Predikat Kinerja																			SR	SR							T	SR
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																												
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																												

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp				
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17		
		0.00.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	10	352.596.314	5	19.830.000		69.882.340														5	19.830.000	50,00	5,62	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK	
		0.00.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	418.651.000	1	2.999.750		85.000.000	1	5.966.500								1	5.966.500	7,02		2	8.966.250	200,00	2,14	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK	
		0.00.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	4	152.370.200	2	1.068.000		30.000.000	4	1.655.000								4	1.655.000	5,52		6	2.723.000	150,00	1,79	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK	
		0.00.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	10	2.396.953.000	1,75	51.531.640		500.000.000	2	8.425.000								2	8.425.000	1,69		3,75	59.956.640	37,50	2,50	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK	
		0.00.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	5	548.000.000	1	500.000		109.000.000														1	500.000	20,00	0,09	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK	
		<b>0.00.01.1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana kantor</b>	<b>Laporan</b>	<b>5</b>	<b>6.998.349.200</b>		<b>61.909.000</b>		<b>1.567.000.000</b>															<b>61.909.000</b>		<b>0,88</b>	<b>DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK</b>	
		0.00.01.1.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	1	825.000.000	0			412.000.000																			DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
Rata-rata capaian kinerja (%)							255.049.401.589		15.979.965.647		51.519.484.644		3.360.171.273									3.360.171.273	6,52		19.340.136.920	74,49	7,58			
Predikat Kinerja																						SR	SR					T	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																														
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																														
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																														
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																														

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		0.00.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	3	2.216.000.000	0		370.000.000																			DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
		0.00.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	7	373.980.800	1	32.935.000	45.000.000															1	32.935.000	14,29	8,81	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
		0.00.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	20	3.013.368.400	39	21.024.000	650.000.000															39	21.024.000	195,00	0,70	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
		0.00.01.1.07.08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Unit	20	190.000.000	0		40.000.000																			DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
		0.00.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	107	380.000.000	3	7.950.000	50.000.000															3	7.950.000	2,80	2,09	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
		<b>0.00.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Terpenuhinya kebutuhan penunjang operasional kantor</b>	<b>Laporan</b>	<b>15</b>	<b>11.624.732.950</b>	<b>0</b>	<b>1.776.527.119</b>	<b>2.283.270.000</b>	<b>3</b>	<b>394.995.459</b>							<b>3</b>	<b>394.995.459</b>	<b>17,30</b>	<b>3</b>	<b>2.171.522.578</b>	<b>20,00</b>	<b>18,68</b>			<b>DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK</b>	
		0.00.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	5	116.672.000	4	1.100.000	26.620.000	2	900.000							2	900.000	3,38	6	2.000.000	120,00	1,71			DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK	
Rata-rata capaian kinerja (%)							255.049.401.589		15.979.965.647	51.519.484.644		3.360.171.273								3.360.171.273	6,52		19.340.136.920	74,49	7,58				
Predikat Kinerja																				SR	SR							T	SR
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																													
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																													
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																													
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																													

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												I	II	III	IV	13		14 = 13/8x100										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		0.00.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	15	4.047.005.550	4	324.620.879		786.500.000	4	84.322.216							4	84.322.216		10,72	8	408.943.095	53,33	10,10	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
		0.00.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	5	7.461.055.400	1	1.450.806.240		1.470.150.000	4	309.773.243							4	309.773.243		21,07	5	1.760.579.483	100,00	23,60	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
		<b>0.00.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>terpeliharannya barang milik daerah penunjang operasional kantor</b>	<b>Laporan</b>	<b>20</b>	<b>8.794.244.200</b>		<b>551.001.242</b>		<b>1.885.500.000</b>	<b>4</b>	<b>108.998.179</b>							<b>4</b>	<b>108.998.179</b>		<b>5,78</b>	<b>4</b>	<b>659.999.421</b>	<b>20,00</b>	<b>7,50</b>	<b>DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK</b>
		0.00.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1.858.117.900	0	36.469.000		425.500.000	1	9.335.779							1	9.335.779		2,19	1	45.804.779	100,00	2,47	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
		0.00.01.1.09.010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	107	524.100.000	104	91.366.400		110.000.000	13	14.042.000							13	14.042.000		12,77	117	105.408.400	109,35	20,11	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
		0.00.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	18	2.408.127.900		276.114.792		500.000.000	18	63.430.400							18	63.430.400		12,69	18	339.545.192	100,00	14,10	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
		0.00.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	75	973.898.400	59	73.078.850		200.000.000	18	22.190.000							18	22.190.000		11,10	77	95.268.850	102,67	9,78	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
Rata-rata capaian kinerja (%)							255.049.401.589		15.979.965.647		51.519.484.644		3.360.171.273								3.360.171.273		6,52		19.340.136.920	74,49	7,58	
Predikat Kinerja																					SR	SR				T	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																												
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																												

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab										
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I	II	III	IV	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17						
		0.00.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	3.030.000.000	3	73.972.200		650.000.000														3	73.972.200	150,00	2,44	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK					
4	Mempertahankan rata-rata usia kawin pertama ideal bagi perempuan	2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	PERSENTASE MASYARAKAT YANG TERPAPAR ISI PESAN PROGRAM KKBPK / BANGGA KENCANA (ADVOKASI dan KIE)	%	77,5	2.417.775.000	319,07	500.000		652.500.000	80,6	1.000.000												80,6	1.000.000	0,15	199,835	1.500.000	257,85	0,06	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK		
		2.14.02.1.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah Forum yang terfasilitasi	Forum	0	2.417.775.000	0	500.000		652.500.000		1.000.000														1.000.000	0,15	1.500.000		0,06	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK		
		2.14.02.1.01.01	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Dokumen	35	1.140.750.000	0			350.000.000	1	500.000													1	500.000	0,14	1	500.000	2,86	0,04	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK	
		2.14.02.1.01.07	Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA, Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA, Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat	Dokumen	10	1.277.025.000	2	500.000		302.500.000	1	500.000													1	500.000	0,17	3	1.000.000	30,00	0,08	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK	
		2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR)	%	56,6	5.704.732.290	63,1	34.500.000		972.875.000	63,1	500.000													63,1	500.000	0,05	63,1	35.000.000	111,48	0,61	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK	
		2.14.03.1.01	Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi	jumlah materi kampanye KB/Kespro yang tersusun	Paket	4	3.698.499.790	0	34.000.000		625.000.000	1														1			1	34.000.000	25,00	0,92	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK	
Rata-rata capaian kinerja (%)							255.049.401.589		15.979.965.647		51.519.484.644		3.360.171.273													SR	SR			19.340.136.920	74,49	7,58		
Predikat Kinerja																																		
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																																		
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																																		

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13/8x100	15 = 7 + 13	16 = 15 / 6 x 100%	17									
			(KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal																						
		2.14.03.1.01.04	Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja	Daerah	25	3.698.499.790	6	34.000.000	625.000.000	1					1					7	34.000.000	28,00	0,92	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
		2.14.03.1.02	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah kegiatan pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber KB	Kali	4	2.006.232.500	0	500.000	347.875.000	3	500.000				3	500.000	0,14		3	1.000.000	75,00	0,05	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK	
		2.14.03.1.02.02	Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi KeMasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi KeMasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Organisasi	25	2.006.232.500	0	500.000	347.875.000	5	500.000				5	500.000	0,14		5	1.000.000	20,00	0,05	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK	
5	Terwujudnya lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga	2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Jumlah kebijakan peningkatan kualitas keluarga di DIY yang di implementasikan dengan baik	Dokumen	0	5.240.554.000	2	2.500.000	1.253.000.000	2	2.500.000				2	2.500.000	0,20		4	5.000.000		0,10	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK	
		2.08.04.1.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Peningkatan legalitas keluarga dan pemenuhan hak sipil anak	%	97,8	2.012.539.000	0	1.000.000	491.500.000	97,8	1.000.000				97,8	1.000.000	0,20		48,9	2.000.000	50,00	0,10	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK	
		2.08.04.1.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	OPD	64	386.789.000	40	500.000	91.500.000	52	500.000				52	500.000	0,55		92	1.000.000	143,75	0,26	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK	
		2.08.04.1.01.02	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, Edukasi KG	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	Dokumen	10	1.625.750.000	2	500.000	400.000.000	2	500.000				2	500.000	0,13		4	1.000.000	40,00	0,06	DINAS PEMBERDAYAAN	
Rata-rata capaian kinerja (%)							255.049.401.589		15.979.965.647	51.519.484.644		3.360.171.273					3.360.171.273	6,52		19.340.136.920	74,49	7,58			
Predikat Kinerja																	SR	SR				T	SR		
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																									
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																									

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												I	II	III	IV	13		14 = 13/8x100										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Provinsi	Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi yang Tersedia																							PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK	
		2.08.04.1.02	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi</b>	<b>Fasilitasi lembaga pendukung peningkatan kualitas keluarga</b>	<b>Lembaga</b>	<b>4</b>	<b>2.067.265.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000.000</b>	<b>481.500.000</b>	<b>3</b>	<b>1.000.000</b>							<b>3</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0,21</b>	<b>4</b>	<b>2.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>0,10</b>	<b>DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK</b>		
		2.08.04.1.02.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	Lembaga	1	766.515.000	4	500.000	181.500.000	5	500.000							5	500.000	0,28	9	1.000.000	900,00	0,13	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK		
		2.08.04.1.02.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Orang	250	1.300.750.000	50	500.000	300.000.000	50	500.000							50	500.000	0,17	100	1.000.000	40,00	0,08	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK		
		2.08.04.1.03	<b>Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah lembaga layanan yang terfasilitasi</b>	<b>Lembaga</b>	<b>1</b>	<b>1.160.750.000</b>	<b>1</b>	<b>500.000</b>	<b>280.000.000</b>	<b>1</b>	<b>500.000</b>							<b>1</b>	<b>500.000</b>	<b>0,18</b>	<b>2</b>	<b>1.000.000</b>	<b>200,00</b>	<b>0,09</b>	<b>DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK</b>		
		2.08.04.1.03.01	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Komprehensif bagi keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Layanan	2	1.160.750.000	2	500.000	280.000.000	2	500.000							2	500.000	0,18	4	1.000.000	200,00	0,09	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK		
		2.14.04	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</b>	<b>Persentase kelompok kegiatan bagi keluarga yang aktif</b>	<b>%</b>	<b>0</b>	<b>2.668.004.000</b>	<b>0,4</b>	<b>2.000.000</b>	<b>631.623.500</b>	<b>0,4</b>	<b>5.711.300</b>							<b>0,4</b>	<b>5.711.300</b>	<b>0,90</b>	<b>0,4</b>	<b>7.711.300</b>		<b>0,29</b>	<b>DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK</b>		
		2.14.04.1.01	<b>Pengelolaan Pelaksanaan Desain</b>	<b>Jenis kelompok kegiatan bagi keluarga yang</b>	<b>Jenis</b>	<b>5</b>	<b>2.668.004.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>631.623.500</b>	<b>1</b>	<b>5.711.300</b>							<b>1</b>	<b>5.711.300</b>	<b>0,90</b>	<b>1</b>	<b>7.711.300</b>	<b>20,00</b>	<b>0,29</b>	<b>DINAS PEMBERDAYAAN</b>		
Rata-rata capaian kinerja (%)							255.049.401.589		15.979.965.647	51.519.484.644		3.360.171.273								3.360.171.273	6,52		19.340.136.920	74,49	7,58			
Predikat Kinerja																				SR	SR			T	SR			
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																												
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																												

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
					K	Rp	K	Rp		K	Rp	I	II	III	IV	K	Rp			K	Rp	K	Rp				
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
			<b>Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>	<b>mendapatkan pembinaan dan penguatan kelembagaan</b>																						<b>PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK</b>	
		2.14.04.1.01.03	Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Dokumen	5	1.532.280.000	1,3	500.000		363.000.000	1	4.211.300						1	4.211.300	1,16	2,3	4.711.300	46,00	0,31	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK	
		2.14.04.1.01.04	Sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana	Jumlah Orang Mengikuti Sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana	Kelompok	750	519.072.000	0	500.000		122.852.000	15	500.000						15	500.000	0,41	15	1.000.000	2,00	0,19	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK	
		2.14.04.1.01.06	Peningkatan Kapasitas Pengelola dan Pelaksana Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R)	Jumlah PIK-R yang Mengikuti peningkatan kapasitas Pengelola dan Pelaksana Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R)	Kelompok	75	307.091.000	0	500.000		72.566.000	15	500.000						15	500.000	0,69	15	1.000.000	20,00	0,33	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK	
		2.14.04.1.01.07	Pengembangan dan Perbanyak Materi Substansi Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R), Media Promosi, Alat Permainan Edukatif Remaja, dan Sarana Prasarana Lainnya yang Dibutuhkan	Jumlah dokumen Pengembangan dan Perbanyak Materi Substansi Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R), Media Promosi, Alat Permainan Edukatif Remaja, dan Sarana Prasarana Lainnya yang Dibutuhkan	Dokumen	75	309.561.000	0	500.000		73.205.500	3	500.000						3	500.000	0,68	3	1.000.000	4,00	0,32	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK	
Rata-rata capaian kinerja (%)						255.049.401.589		15.979.965.647		51.519.484.644		3.360.171.273								SR	SR				T	SR	
Predikat Kinerja																											
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																											
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																											

Disusun  
Yogyakarta, 2 Mei 2025  
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk

Dievaluasi  
Yogyakarta, 2 Mei 2025  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah

ERLINA HIDAYATI SUMARDI, S.I.P., M.M.  
NIP. 196712191998032002

NI MADE DWIPANTI INDRAYANTI, S.T., M.T.  
NIP. 197010181998032007

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

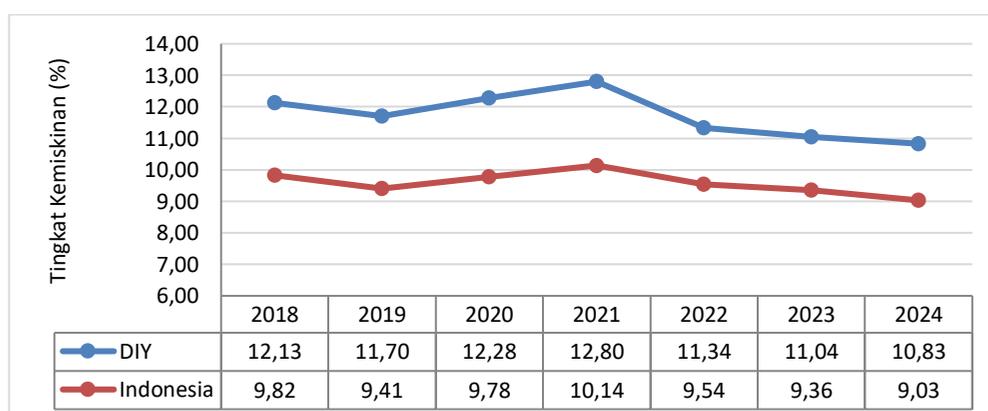
## II.7 Permasalahan Pembangunan Daerah Provinsi DIY

### II.7.1 Kemiskinan

Terkait Permasalahan kemiskinan telah menjadi permasalahan serius yang perlu diperhatikan, dan banyak negara lain masalah ini menjadi permasalahan yang belum terselesaikan. Oleh karena itu kemiskinan kemudian menjadi sebagai isu penting dalam prioritas pembangunan. Menurut UNDP, penghapusan kemiskinan dalam berbagai bentuk merupakan tantangan kemanusiaan terbesar yang harus dihadapi.

Penghapusan kemiskinan juga menjadi isu penting dalam program pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Asta Cita RPJMN yaitu Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Selanjutnya dalam program prioritas RPJMN juga ditekankan terkait pemberantasan kemiskinan dengan program hasil terbaik cepat (PHTC) berupa melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut.

Jumlah kemiskinan di DIY sempat mengalami peningkatan dengan adanya pandemi Covid-19. Pembatasan mobilitas penduduk dan kegiatan ekonomi masyarakat sebagai upaya menghambat penyebaran Covid-19 berdampak pada melemahnya kegiatan ekonomi. Kondisi tersebut juga berakibat pada bertambahnya kemiskinan di DIY di tahun 2020 sampai dengan 2021 dari 11,70 (2019) menjadi 12,80 (2021). Sejak tahun 2021, tingkat kemiskinan menunjukkan tren menurun. Persentase penduduk miskin DIY pada 2024 sebesar 10,83% dan turun 0,21 poin dibandingkan 2023.



Sumber : BPS Provinsi DIY, 2024

**Gambar 2- 1 Tingkat Kemiskinan DIY dan Indonesia 2018 - 2024 dalam Persen (Maret)**

Pada tingkat kabupaten/kota di DIY, tingkat kemiskinan di Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulon Progo, dan Kabupaten Bantul lebih tinggi daripada

rata-rata tingkat kemiskinan DIY. Tingkat kemiskinan Kabupaten/Kota ini juga mencerminkan adanya ketimpangan antara wilayah di DIY.

Tingkat kemiskinan tertinggi pada 2024 adalah Kabupaten Kulon Progo dengan tingkat kemiskinan 15,62%, diikuti Kabupaten Gunungkidul sebesar 15,18% dan Kabupaten Bantul 11,66%. Sementara itu, dua wilayah lain yaitu Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta memiliki tingkat kemiskinan di bawah rata-rata tingkat kemiskinan DIY (10,38%) yaitu 7,46% untuk Kabupaten Sleman dan 6,26% untuk Kota Yogyakarta.

**Tabel 2- 1 Tingkat Kemiskinan Kabupaten Kota di DIY Tahun 2018 - 2024 (%)**

Wilayah	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kulon Progo	18,3	17,39	18,01	18,38	16,39	15,64	15,62
Bantul	13,43	12,92	13,5	14,04	12,27	11,95	11,66
Gunungkidul	17,12	16,61	17,07	17,69	15,86	15,6	15,18
Sleman	7,65	7,41	8,12	8,64	7,74	7,52	7,46
Yogyakarta	6,98	6,84	7,27	7,69	6,62	6,49	6,26

Sumber : BPS Provinsi DIY, 2024

Pemberantasan kemiskinan tentu memerlukan dukungan data dan informasi yang akurat dan terpercaya. Tersedianya data kemiskinan dan informasi mengenai potensi sosial dan ekonomi di wilayah DIY sangat diperlukan sebagai instrumen penting bagi perumusan strategi, prioritas dan kebijakan pembangunan di kawasan ini. Fokus pemerintah terhadap penanggulangan kemiskinan diprioritaskan pada kemiskinan ekstrem.

Kemiskinan ekstrem adalah kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar yaitu kebutuhan makanan, air minum bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi yang tidak hanya terbatas pada pendapatan, tetapi juga akses pada layanan sosial (PBB, 1996). Kemiskinan ekstrem didefinisikan sebagai kondisi dimana kesejahteraan masyarakat berada di bawah garis kemiskinan ekstrem - setara dengan USD 1.9 PPP (*purchasing power parity*) atau setara dengan Rp10.739/orang/hari atau Rp351.957/orang/bulan (Bank Dunia, 2023). Secara sederhana apabila dalam 1 keluarga terdiri dari 4 orang (ayah, ibu, dan 2 anak), maka jika kemampuan untuk memenuhi pengeluarannya di bawah Rp1.288.680 per keluarga/bulan, maka keluarga tersebut termasuk kategori miskin ekstrem. Penduduk miskin di Indonesia tahun 2021 sebesar 10,14% atau sebanyak 27,54 juta jiwa, sementara di antara mereka yang merupakan penduduk miskin ekstrem sebesar 2,14% atau sebanyak 5,8 juta jiwa (BPS, 2021). Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PPKE) memerlukan upaya terpadu dan sinergi di tingkat pusat dan daerah, melalui tiga strategi utama PPKE: (i) pengurangan beban pengeluaran masyarakat;

(ii) peningkatan pendapatan masyarakat; dan (iii) penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan.

Keberhasilan pengentasan kemiskinan tidak hanya penurunan persentasi kemiskinan saja, Tetapi ukuran lain perlu diperhatikan yaitu kedalaman kemiskinan dan keparahan kemiskinan. Apabila dilihat pada persentase pengeluaran, maka proporsi pengeluaran terbesar penduduk miskin adalah makanan. Ketimpangan yang tinggi akan mereduksi kue pembangunan dan distorsi penurunan kemiskinan, sedangkan kecepatan penduduk golongan bawah dalam menikmati kue pembangunan masih kalah dengan penduduk golongan menengah apalagi golongan penduduk atas (indikasi ketimpangan tinggi terutama di Kota Yogyakarta). Inflasi menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan. Dalam upaya pengentasan kemiskinan harus *link and match* dengan katup perekonomian Yogyakarta yaitu pariwisata dan keberadaan kampus. Selain itu, Keistimewaan Yogyakarta menjadi modal besar bagi percepatan pengentasan kemiskinan dalam waktu yang cepat. Strategi pengentasan kemiskinan juga memerlukan pendekatan antropologi-Etnografi agar memberikan perbaikan penghidupan rumah tangga miskin.

Kemiskinan juga dipengaruhi dengan masih adanya Inclusion dan Exclusion Error pada data BNBA sasaran Program. Kondisi UHH yang tinggi membawa konsekuensi kepada pemenuhan layanan lansia terutama layanan dasar seperti kesehatan, jaminan sosial, dan kebutuhan lansia untuk mengaktualisasikan dirinya. Hasil identifikasi Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan, termasuk pengurangan kemiskinan ekstrem, yang tersebar di berbagai kementerian/lembaga dan pemerintah daerah pada tahun anggaran 2021 sudah cukup besar, yang terbagi dalam dua kelompok program, yaitu program/kegiatan dalam rangka mengurangi beban pengeluaran kelompok miskin ekstrem melalui bantuan sosial dan subsidi, dan program pemberdayaan untuk meningkatkan produktivitas dalam rangka meningkatkan kapasitas ekonominya. Dengan demikian, isu utama percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem adalah bagaimana memastikan program perlindungan sosial dan pemberdayaan dapat secara efektif mengurangi kemiskinan termasuk kemiskinan ekstrem agar arahan Presiden untuk kemiskinan ekstrem dapat mencapai 0% pada tahun 2024 dapat terwujud.

Permasalahan kemiskinan merupakan akibat dari beberapa kondisi di DIY. Hal ini didukung oleh beberapa kondisi seperti :

1. Meskipun TPT DIY pada Februari 2024 mengalami penurunan sebesar 0,34% poin dari semula 3,58% menjadi 3,24% dibandingkan periode

Februari 2023. Namun apabila di-breakdown berdasarkan Tingkat pendidikan yang ditamatkan, terjadi peningkatan TPT pada jenjang tamatan SMA, diikuti oleh peningkatan TPT pada jenjang SMK, dan Diploma I/II/III.

2. Prevalensi balita stunting berdasarkan data dari hasil survei menunjukkan tren penurunan dalam kurun waktu tahun 2018-2022, tetapi mengalami peningkatan pada tahun 2023.
3. Berbagai infrastruktur pendidikan yang mendukung proses pembelajaran dan penelitian telah tersedia dengan kualitas yang cukup baik, tetapi persebarannya belum merata, masih terdapat ketimpangan jumlah sarana dan prasarana pendidikan di wilayah DIY.
4. Capaian akses air minum dan sanitasi layak Tahun 2023 di 147 No Bidang / Urusan Faktor Pendorong Faktor Penghambat kegiatan lintas sektor dari nonpemerintah, seperti perusahaan melalui dana CSR, filantropi, dan sebagainya. DIY belum memenuhi target Nasional, selain itu penanganan rumah tidak layak huni Tahun 2023 belum dapat dituntaskan pada lokasi-lokasi yang menjadi prioritas karena beberapa keterbatasan anggaran, SDM, maupun sinkronisasi antar pelaku.
5. Aspek kapasitas aparatur dan tata kelola pemerintahan Kalurahan merupakan salah satu permasalahan yang perlu menjadi perhatian. Secara spesifik masih terdapat permasalahan di Kalurahan, diantaranya belum optimalnya kualitas perencanaan pembangunan Kalurahan,rendahnya rasio kemandirian Kalurahan, dan rendahnya rata-rata tingkat pendidikan aparatur Pemerintah Kalurahan.

Jaminan kesehatan merupakan upaya yang dilakukan untuk melindungi kesehatan masyarakat. Dengan adanya jaminan kesehatan, maka upaya intervensi untuk membantu pengobatan bagi masyarakat dapat terlaksana. Tanpa jaminan kesehatan maka masyarakat, khususnya yang berada pada ekonomi bawah bisa mengalami kondisi yang lebih parah akibat penyakit yang dideritanya. Misalnya, ketika ada masyarakat miskin yang akan berobat, tanpa jaminan kesehatan, akan ada dua kemungkinan yang terjadi : pertama, dia akan menghindari berobat karena tidak memiliki kemampuan untuk membayar fasilitas kesehatan dan yang Kedua, dia akan berobat dengan melakukan berbagai cara (seperti berhutang, menjual aset produktif, dan sebagainya). Dua kondisi ini bisa dihindari jika masyarakat diberikan jaminan kesehatan, baik oleh pemerintah maupun kepemilikan jaminan kesehatan secara mandiri. Berdasarkan Undang-Undang

Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pendanaan Layanan Kesehatan Perorangan akan bertumpu dari iuran wajib yang akan dikelola oleh BPJS Kesehatan, sementara pendanaan bersumber dari kantong perorangan/keluarga, pemberi kerja baik langsung atau melalui asuransi kesehatan swasta akan menjadi sumber dana tambahan (top up) layanan kesehatan perorangan, sedangkan sumber dana dari Pemerintah / Pemda tetap diperlukan untuk mendanai bantuan iuran bagi penduduk miskin dan tidak mampu serta pendanaan program kesehatan masyarakat yang tidak ditujukan untuk layanan orang per orang. Aspek yang terkait erat dengan layanan kesehatan adalah *universal health coverage* (UHC) atau dikenal juga dengan cakupan layanan kesehatan yang universal. UHC berarti semua individu dan masyarakat menerima layanan kesehatan yang mereka butuhkan tanpa mengalami kesulitan yang terkait dengan pendanaan. Secara teknis daerah dikatakan telah mencapai UHC manakala kepesertaan dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) - Kartu Indonesia Sehat (KIS) sebesar 95%. Terhitung sejak 1 Juli 2022, sebanyak 3.575.872 jiwa penduduk DIY telah terdaftar sebagai peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dari total jumlah penduduk 3.677.446 jiwa atau sebesar 97,24%. Pencapaian ini bahkan melebihi angka cakupan nasional. Artinya, hampir seluruh warga masyarakat di DIY telah memiliki payung perlindungan untuk mengakses layanan di fasilitas kesehatan. Permasalahan utama yang akan dirasakan oleh masyarakat miskin yang mendapatkan JKN melalui kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI) atau PBI JKN, ialah di mana seseorang tidak masuk dalam database Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang menjadi dasar penentuan penerima JKN KIS, padahal *updating* data kepesertaan JKN harus melalui proses yang prosedural.

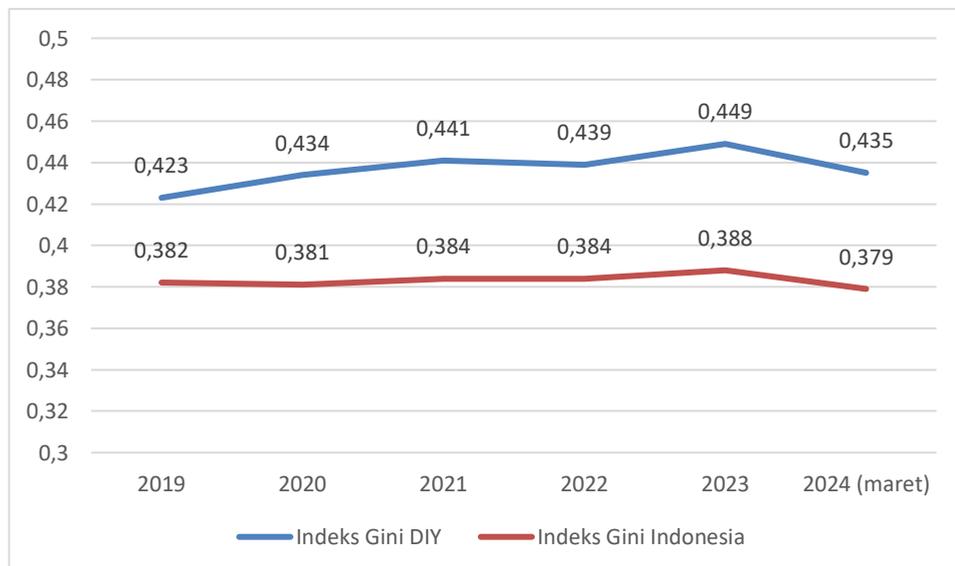
Selain itu beberapa hal secara kelembagaan juga masih menghadapi kendala dalam penanggulangan kemiskinan khususnya kemiskinan ekstrem diantaranya:

1. Ketepatan sasaran program dan data eksisting masih rendah
2. Keterbatasan kemampuan dan pemahaman SDM penyelenggara di OPD teknis maupun perencana
3. Penentuan waktu pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan yang tidak didasari dengan analisis waktu maupun kondisi sekitar
4. Standar layanan dan prosedur pelaksanaan yang belum optimal
5. Ketidakjujuran penerima manfaat dalam memberikan keterangan atau informasi ketika dilakukan pendataan
6. Pelaksanaan program belum sesuai dengan perencanaan yang dilakukan
7. Fragmentasi pelaksanaan program lintas OPD masih tinggi

Agar program pemberantasan kemiskinan dapat kembali berjalan pada jalurnya, tentu memerlukan dukungan data dan informasi yang akurat dan terpercaya. Tersedianya data kemiskinan dan informasi mengenai potensi sosial dan ekonomi di wilayah DIY sangat diperlukan sebagai instrumen penting bagi perumusan strategi, prioritas dan kebijakan pembangunan di kawasan ini.

### II.7.1.1 Ketimpangan Pendapatan

Indikator yang digunakan untuk mengukur ketimpangan pendapatan di suatu daerah adalah Indeks Gini (*Gini Ratio*). Nilai koefisien Gini berada antara 0 sampai dengan 1. Koefisien bernilai 0 artinya ada pemerataan pendapatan secara sempurna, atau dapat dikatakan bahwa setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Apabila koefisien bernilai 1 maka akan menunjukkan kondisi yang sebaliknya. Perkembangan Indeks Gini DIY dibandingkan dengan nasional sejak tahun 2019 hingga 2024 Maret digambarkan sebagai berikut:



Sumber: BPS Provinsi DIY, 2024

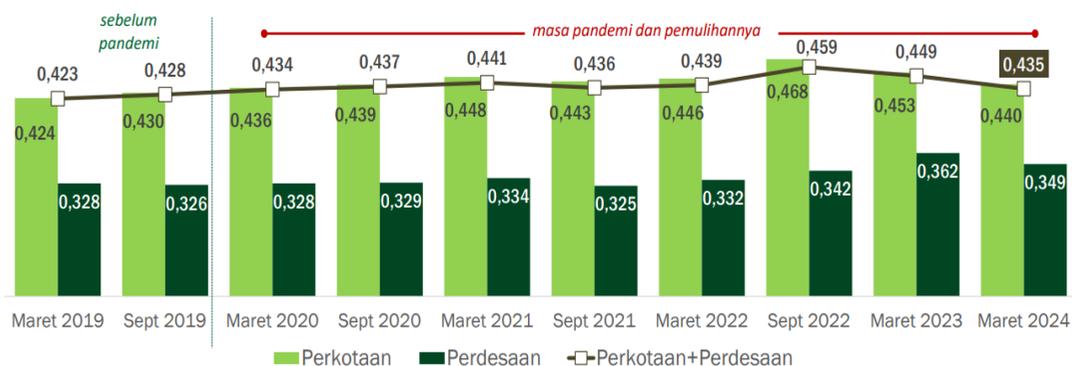
#### Gambar 2- 2 Indeks Gini DIY dan Nasional Tahun 2019-2024 Maret

Gambar di atas menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan pendapatan penduduk DIY cenderung meningkat dalam enam tahun terakhir. Hal ini berbanding terbalik dengan tingkat ketimpangan pendapatan penduduk nasional yang memiliki kecenderungan menurun. Angka Indeks Gini DIY pada tahun 2019 berada di angka 0,423. Periode berikutnya mengalami tren menaik karena terdampak dari pandemi Covid-19 yang mengakibatkan terhambatnya aktivitas perekonomian seiring dengan peningkatan jumlah pengangguran dan jumlah penduduk miskin. Data menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan DIY meningkat dari 11,44% pada tahun 2019 menjadi 12,8% pada tahun 2021. Sedangkan tingkat pengangguran terbuka DIY meningkat dari 3,14% pada tahun 2019 menjadi 4,56% pada tahun 2021. Pada tahun 2022, rasio gini DIY sebesar 0,439. Angka ini menurun 0,002

poin jika dibandingkan dengan rasio gini Maret 2021 yang besarnya 0,441. Rasio gini di daerah perkotaan pada 2022 tercatat sebesar 0,446 dan nilainya lebih rendah dibandingkan rasio gini 2021 yang sebesar 0,448. Rasio gini di daerah perdesaan pada 2022 mencapai 0,332. Rasio gini tersebut lebih rendah bila dibanding rasio gini 2021 sebesar 0,334.

Faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan adalah pertumbuhan ekonomi, produktivitas tenaga kerja, investasi, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Hal ini sesuai dengan pendapat Todaro (2000) bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan ketimpangan pendapatan pada jangka pendek, tetapi dalam jangka panjang akan menurunkan ketimpangan. Sementara itu, kenaikan produktivitas tenaga kerja yang tidak merata antar berbagai daerah akan menyebabkan adanya daerah yang relatif lebih maju akibat dari kegiatan produktivitas tenaga kerja dan adanya daerah yang relatif tidak maju akibat minimnya tenaga kerja yang produktif.

IMF menyatakan bahwa tingginya tingkat ketimpangan mempunyai implikasi terhadap pertumbuhan dan stabilitas makro ekonomi. Ketimpangan menyebabkan porsi hasil pembangunan yang diperoleh masyarakat bawah lebih sedikit sehingga mengurangi kemampuan kelompok ini untuk menjaga kesehatannya dan melakukan investasi fisik dan sumber daya manusia. Hal tersebut mengakibatkan rendahnya kualitas pendidikan dan rendahnya kemampuan untuk mencapai jenjang pendidikan tinggi bagi kelompok bawah. Pada akhirnya, tingkat pendidikan dan akses pelayanan kesehatan yang rendah mengakibatkan produktivitas tenaga kerja juga menjadi rendah. Secara kewilayahan, tingkat ketimpangan pendapatan di daerah perdesaan mengalami kecenderungan menurun, sedangkan kondisi sebaliknya terjadi di daerah perkotaan yang cenderung meningkat. Hal ini terkait dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan kegiatan ekonomi yang terkonsentrasi di wilayah perkotaan. Selain itu, perlu diperhatikan juga bahwa rendahnya tingkat ketimpangan pendapatan di perdesaan DIY juga disebabkan oleh tingkat pendapatan yang relatif merata, namun merupakan pendapatan yang rendah.



Sumber: BPS Provinsi DIY, 2024

## **Gambar 2- 3    Indeks Gini Perdesaan dan Perkotaan DIY Tahun 2019-2024**

### **II.7.1.2 Ketimpangan Antar Wilayah**

Indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kesenjangan antara wilayah adalah Indeks Williamson. Nilai Indeks Williamson kurang dari 0,35 menandakan bahwa wilayah tersebut memiliki ketimpangan yang rendah. Sedangkan, wilayah dengan nilai Indeks Williamson yang lebih besar dari 0,5 menunjukkan adanya ketimpangan pendapatan yang tinggi.

Nilai Indeks Williamson DIY Tahun 2022 adalah 0,464 dan pada tahun 2023 turun menjadi 0,456. Masih terjadinya ketimpangan pembangunan antar kabupaten/kota selain disebabkan oleh perbedaan distribusi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia, juga disebabkan oleh ketimpangan ketersediaan sarana dan prasarana dalam rangka meningkatkan akses masyarakat terhadap sumberdaya. Salah satu sarana prasarana yang dapat meningkatkan aksesibilitas adalah jaringan jalan. Nilai aksesibilitas jalan tertinggi terdapat di Kota Yogyakarta, diikuti oleh Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman dan Kabupaten Gunungkidul. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Kota Yogyakarta memiliki derajat aksesibilitas paling tinggi. Sementara itu, Kabupaten Gunungkidul merupakan wilayah terluas namun memiliki derajat aksesibilitas yang paling rendah, sehingga lebih sulit dijangkau dibandingkan dengan wilayah lainnya di DIY. Namun demikian secara keseluruhan, kinerja infrastruktur DIY, terutama dilihat dari aksesibilitas, sudah tercapai dengan sangat baik. Hal tersebut dapat dilihat bahwa DIY memiliki derajat aksesibilitas darat jauh di atas rata-rata Nasional.

Penyebab ketimpangan antar wilayah yang lain adalah persebaran investasi yang tidak merata di Kabupaten/Kota DIY. Proporsi realisasi investasi rata-rata terbesar pada tahun 2018 - 2022 berada di Kota Yogyakarta (36%). Kabupaten Gunungkidul merupakan kontributor investasi terkecil dengan sumbangan 7%. Pergeseran Kulon Progo menjadi salah satu penyumbang realisasi investasi terbesar dimulai sejak tahun 2017 seiring dengan dimulainya pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta, sedangkan kondisi distribusi investasi pada tahun-tahun sebelumnya masih terpusat di wilayah Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta, terutama pada sektor sekunder dan tersier.

Permasalahan ketimpangan antar wilayah juga tercermin dari kesenjangan distribusi IPM yang cukup lebar antar kabupaten/kota di DIY. Capaian IPM Kota Yogyakarta pada tahun 2023 sebesar 88,61 merupakan nilai tertinggi dibandingkan seluruh kabupaten/kota di Indonesia. Kota Yogyakarta bersama Kabupaten Sleman (84,86) dan Bantul (81,74) masuk dalam kategori "Sangat Tinggi". Di sisi lain, capaian IPM Kulon Progo yang tercatat sebesar 75,82 dan

Gunungkidul sebesar 71,46 termasuk dalam kategori “Tinggi”. Indikator penyusun IPM di kabupaten/kota DIY juga cukup bervariasi. Data IPM pada tahun 2023 menunjukkan bahwa pada dimensi kesehatan, indikator usia harapan hidup saat lahir tertinggi di Kulon Progo (75,29 tahun) dan terendah di Bantul (73,94 tahun). Pada dimensi pengetahuan, capaian Gunungkidul, Kulon Progo dan Bantul masih relatif tertinggal dibanding Sleman dan Kota Yogyakarta. Sementara itu, capaian komponen pengeluaran perkapita Kabupaten Kulon Progo dan Gunungkidul juga cukup jauh tertinggal dibandingkan Sleman dan Kota Yogyakarta. Pengeluaran perkapita Kota Yogyakarta yang tertinggi di DIY pada tahun 2023 hampir dua kali lipat dibandingkan pengeluaran perkapita Kabupaten Gunungkidul.

### **II.7.1.3 Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan serta Potensi Bencana semakin Meningkat**

Pembangunan ekonomi, pengelolaan sumber daya alam, dan kualitas lingkungan hidup saling berkaitan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Konsep pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan manusia dan kelestarian lingkungan tersebut tertuang dalam kesepakatan internasional yang dikenal sebagai *Sustainable Development Goals* (SDGs). Dalam pembangunan berkelanjutan, segala aktivitas didorong untuk memberikan dampak positif pada lingkungan, ekonomi, dan sosial. Berbagai permasalahan lingkungan yang muncul saat ini merupakan akibat dari aktivitas manusia yang melakukan eksploitasi terhadap sumberdaya alam tanpa memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Indikasi awal atau nilai yang menggambarkan kualitas atau kondisi lingkungan hidup dalam suatu wilayah pada lingkup dan periode tertentu disebut Indeks Kualitas Lingkungan hidup (IKLH). IKLH merupakan nilai komposit dari indeks kualitas air (IKA), indeks kualitas udara (IKU), indeks kualitas tutupan lahan (IKTL) dan indeks kualitas air laut (IKAL).

Berdasarkan indeks kualitas lingkungan hidup DIY tahun 2018 sampai dengan tahun 2022, tren nilai IKLH mengalami kondisi fluktuatif. Sedangkan tahun 2022 hingga 2024, cenderung mengalami peningkatan. Capaiannya IKLH tahun 2022 hingga 2024 berkisar antara 59,92 sampai dengan 68,44 angka indeks, dengan kategori berdasar PermenLHK Nomor 27 Tahun 2021 termasuk dalam kategori sedang.

Indeks penyusun IKLH yang masih berada pada kategori kurang dari tahun 2022 hingga 2024 yaitu IKA dengan kisaran capaian antara 32,14 sampai dengan 42,94 angka indeks, meskipun capaian di dua tahun terakhir tersebut telah melebihi target yang ditetapkan. Sedangkan untuk IKTL pada tahun 2022 dan tahun 2024 berada pada kategori sedang dan di tahun 2023 berada pada kategori kurang,

dengan capaian di dua tahun terakhir tidak mencapai target. Capaian IKTL tahun 2023 sebesar 48,68 dari target 51,36 dan tahun 2024 sebesar 51,13 dari target 51,44.

Bencana adalah permasalahan yang kompleks yang tidak dapat diatasi oleh satu pihak saja. Kajian Risiko Bencana DIY untuk tahun 2021-2026 menunjukkan bahwa terdapat 6 jenis ancaman yang memiliki risiko tinggi, yaitu banjir, kekeringan, cuaca ekstrem, tanah longsor, gempa bumi, dan tsunami dari total 12 ancaman yang diidentifikasi di DIY.

Berdasarkan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) tahun 2024 DIY memiliki indeks risiko bencana 102,83. Capaian tersebut meningkat dibanding tahun 2023, dengan indeks risiko bencana 108,15. Capaian 2023 dan 2024 tersebut mencerminkan konsistensi keberhasilan capaian penyelenggaraan penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana DIY, dengan kondisi awal pada tahun 2019 indeks risiko bencana DIY sebesar 148,00 (kategori tinggi). Penurunan indeks risiko ini merupakan hasil kolaborasi dari berbagai elemen, termasuk pemerintah daerah, masyarakat, akademisi, media, dan sektor usaha.

Salah satu tantangan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana DIY adalah masih tingginya risiko bencana di Kawasan Selatan DIY. Indeks risiko bencana tahun 2024 untuk Kabupaten Kulon Progo sebesar 152,65 yang justru meningkat (memburuk) dibanding capaian pada 2023 sebesar 140,98. Kabupaten Bantul meskipun skor indeksnya turun (membaik) pada 2024 sebesar 129,50 dibanding capaian tahun 2023 sebesar 149,27 namun masih relatif tinggi dibanding Kabupaten/Kota lainnya di DIY. Sementara itu, Kabupaten Gunungkidul mencapai perkembangan peningkatan yang signifikan dari capaian sebesar 106,55 di tahun 2023 menjadi 94,43 pada tahun 2024.

Indeks Risiko Bencana di 3 kabupaten pada kawasan selatan DIY yang masih relatif tinggi tersebut mengindikasikan tantangan pengelolaan pembangunan DIY yang diafirmasi prioritasnya di kawasan selatan harus mampu mengelola risiko bencana yang ada serta tidak menambah faktor risiko bencana.

## **BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH**

### **III.1 Kerangka Perubahan Ekonomi Daerah**

Pertumbuhan ekonomi DIY mengalami penurunan di tahun 2024 menjadi 5,03% dari 5,07% di tahun sebelumnya. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi triwulan I tahun 2025 adalah 5,11% (y-on-y) atau 0,97% (q-to-q). Tingkat pertumbuhan tersebut lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun 2024. Pertumbuhan ekonomi triwulan I 2024 adalah 5,04% (y-on-y) dan 0,93% (q-to-q). Hal itu menunjukkan kinerja yang lebih baik pada tahun 2025 dibandingkan tahun sebelumnya pada triwulan I.

Beberapa perkembangan indikator sektor ekonomi dan indikator ekonomi makro sampai dengan triwulan I 2025 juga menunjukkan dinamika, antara lain meliputi:

- a. Nilai ekspor DIY Februari 2025 mencapai US\$47,41 juta atau naik 9,21 persen dibanding Januari 2025. Dibanding Februari 2024, nilai ekspor naik sebesar 17,50 persen. Menurut sektor, ekspor hasil industri pengolahan Februari 2025 naik 10,00% dibanding Januari 2025. Sedangkan ekspor hasil pertanian turun 58,00%. Dibanding Februari 2024, ekspor hasil pertanian naik 100,20% dan ekspor hasil industri pengolahan juga naik 17,27%;
- b. Pada Maret 2025 terjadi inflasi *year on year (y-on-y)* Provinsi D.I. Yogyakarta sebesar 0,52% dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 106,65. Kabupaten Gunungkidul tercatat mengalami inflasi *y-on-y* sebesar 0,28% dengan IHK sebesar 105,86, sedangkan Kota Yogyakarta mengalami inflasi *y-on-y* sebesar 0,83% dengan IHK sebesar 107,63;
- c. Tingkat Penghunian Kamar (TPK) mengalami penurunan pada bulan Februari 2025, dimana TPK hotel bintang turun menjadi 52,34% dan hotel non bintang turun menjadi 21,46%. TPK hotel bintang bulan Januari 2025 sebesar 56,84% dan hotel non bintang sebesar 26,22%. Jika dibandingkan dengan Januari 2025, angka TPK Januari-Februari 2025 untuk hotel bintang naik 1,90 poin jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Untuk hotel non bintang, TPK Januari-Februari 2025 turun 0,20 poin dari periode yang sama tahun 2024. Rata-rata lama menginap tamu di bulan Januari 2025 untuk hotel bintang selama 1,47 malam dan hotel non bintang selama 1,19 malam. Sementara itu, di bulan Februari 2025, rata-rata lama tamu menginap di hotel

bintang naik menjadi 1,55 malam dan turun menjadi 1,16 malam di hotel non bintang jika dibandingkan dengan Januari 2025

Meskipun beberapa indikator ekonomi mengalami perbaikan, potensi pertumbuhan ekonomi tahun 2025 menghadapi tantangan untuk dapat meningkatkan pertumbuhan. Tantangan peningkatan pertumbuhan berasal dari dinamika dan disrupsi di tingkat nasional dan internasional. Salah satu kondisi yang berpotensi menghambat pertumbuhan adalah amanat efisiensi untuk mengurangi beberapa jenis belanja seperti belanja perjalanan dinas dan makan minum baik di tingkat kementerian dan lembaga Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pada tingkat internasional, perang dagang yang dipicu oleh kebijakan proteksionis Pemerintah Amerika Serikat (AS) dengan meningkatkan tarif impor. Kebijakan itu mendapatkan respon retaliasi dari beberapa negara. Sementara itu negara-negara pengimpor bagi AS melakukan langkah negosiasi untuk mengurangi dampak kebijakan tersebut.

**Tabel III-1 Perbandingan Proyeksi Indikator Ekonomi Makro dalam RKPDPD 2025 dan Perubahan RKPDPD 2025**

Indikator	RKPDPD 2025	Perubahan RKPDPD 2025
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,3 – 5,8	5,09 – 5,8
Inflasi (%)	3,1 – 3,8	2 – 3,8
Tingkat Pengangguran Terbuka/TPT (%)	3,12-3,51	3,12 – 4
Tingkat Kemiskinan (%)	10,00 -10,50	10,10 – 10,60
Indeks Williamson	0,443 – 0,447	0,443 – 0,458
Indeks Gini	0,419	0,427 – 0,450
Indeks Pembangunan Manusia	81,68	81,68 – 81,80

Sumber: Bappeda DIY ( 2024) dan olahan

Lebih lanjut proyeksi makro ekonomi dalam Perubahan RKPDPD Tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut.

### III.1.1 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi tahun 2025 diharapkan berkinerja baik meskipun menghadapi beberapa kendala baik dari dalam dan luar negeri. Potensi menurunnya pasar ekspor terutama ke Amerika Serikat akibat kenaikan tarif impor dan dampak perang dagang internasional akan menekan pertumbuhan ekonomi. Kinerja pertumbuhan ekonomi dunia juga akan diperkirakan menekan pertumbuhan permintaan barang impor dan kunjungan wisatawan dunia.

Kelanjutan efisiensi belanja pemerintah daerah dan pusat untuk perjalanan dan akomodasi makan minum juga berpotensi menekan pertumbuhan ekonomi DIY. Akumulasi perkembangan tersebut diproyeksikan menghasilkan pertumbuhan DIY tahun 2025 berkisar antara 5,09 – 5,8%. Pertumbuhan optimis sebesar 5,8% diperkirakan dapat dicapai dengan efektifnya upaya negosiasi penurunan tarif impor Amerika Serikat, diversifikasi Negara tujuan ekspor dan pengembangan pariwisata yang menasar ceruk pasar baru dan negara asal wisatawan yang baru juga.

### **III.1.2 Proyeksi Inflasi**

Kenaikan harga barang konsumsi yang tidak signifikan disebabkan oleh masih melemahnya daya beli kelas menengah sedangkan potensi masih berlanjutnya pemutusan hubungan kerja. Sementara itu Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) DIY diperkirakan tetap melanjutkan kinerja yang selama ini efektif dalam meminimalisir potensi kenaikan harga melalui proses pengawasan harga pasar dan upaya-upaya intervensi yang ditujukan untuk mengendalikan kenaikan harga. Prediksi pesimis tingkat inflasi di tahun 2025 diperkirakan mencapai 2 – 3,8%.

### **III.1.3 Proyeksi Tingkat Pengangguran Terbuka**

Tambahan lapangan pekerjaan yang mendorong penyerapan tenaga kerja diharapkan dapat terjadi di tahun 2025 seiring dengan tetap tercapainya pertumbuhan ekonomi yang positif mengikuti capaian di tahun 2021, 2022 dan 2023. Seiring dengan tetap membaiknya kondisi perekonomian, secara umum, tingkat pengangguran semakin menurun sampai mencapai tingkat sekitar 3,12% sampai 4% di tahun 2025.

### **III.1.4 Proyeksi Kemiskinan**

Proyeksi pesimis yang ditandai dengan potensi kenaikan pendapatan per kapita yang kurang signifikan serta diiringi dengan kenaikan tingkat pengangguran terbuka dan tingkat ketimpangan pendapatan akan menyebabkan penurunan kejadian kemiskinan tidak signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi tersebut akan menyebabkan proyeksi tingkat kemiskinan menjadi 10,10 – 10,60% di tahun 2025.

### **III.1.5 Proyeksi Ketimpangan Antar Wilayah (Indeks Williamson)**

Pada tahun 2025, seiring dengan perbaikan kinerja perekonomian DIY umumnya dan beberapa sektor yang terkait dengan entitas usaha di wilayah tertinggal maupun pelaksanaan berbagai proyek infrastruktur di wilayah tersebut

diharapkan dapat menurunkan tingkat ketimpangan. Proyeksi tingkat ketimpangan antar wilayah yang ditunjukkan dengan Indeks Williamson di tahun 2025 adalah 0,443 – 0,458.

### **III.1.6 Proyeksi Ketimpangan Pendapatan (Indeks Gini)**

Kondisi perekonomian yang berpotensi kurang kondusif mendorong meningkatnya pengangguran dan menurunnya pendapatan per kapita terutama pada kelompok masyarakat menengah ke bawah. Proyeksi pesimis tersebut menekan perbaikan pemerataan pengeluaran masyarakat. Kondisi tersebut diperkirakan menghasilkan Indeks Gini tahun 2025 berkisar 0,427 sampai 0,450.

### **III.1.7 Proyeksi Indeks Pembangunan Manusia**

Proyeksi pertumbuhan ekonomi yang tidak signifikan berubah dibandingkan proyeksi sebelumnya mendorong proyeksi kenaikan pendapatan per kapita tidak berubah signifikan juga. Hal tersebut diproyeksi tidak meningkatkan pengeluaran per kapita masyarakat secara signifikan sehingga proyeksi IPM tidak mengalami perubahan yaitu masih berkisar antara 81,68 sampai 81,80 di tahun 2025.

## **III.2 Kerangka Perubahan Keuangan Daerah**

Keuangan daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan kesadaran untuk secara efektif memberikan perhatian kepada isu dan permasalahan strategis secara tepat. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan menghasilkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah.

Keuangan daerah meliputi penerimaan atau pendapatan daerah, pengeluaran daerah atau belanja daerah dan pembiayaan daerah. Keuangan daerah dikelola dengan menganut azas tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

Arah kebijakan keuangan daerah pada tahun anggaran 2025 yaitu peningkatan transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah tidak mengalami perubahan akan tetapi dalam pelaksanaannya memerlukan perubahan perencanaan dan penganggaran. Perubahan perencanaan dan penganggaran didasari atas adanya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2025, perkembangan perekonomian nasional dan regional dan politik dalam negeri maupun luar negeri.

### **III.2.1 Proyeksi Perubahan Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang dimaksud dengan Pendapatan Daerah adalah semua hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan disebut dengan Belanja Daerah. Kebutuhan Belanja Daerah secara optimal diarahkan pada belanja untuk pemenuhan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

Sumber-sumber Pendapatan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Berdasarkan data realisasi APBD Tahun Anggaran 2024, Pendapatan Asli Daerah (PAD) mampu menyumbangkan sebesar 41,19% dari total realisasi Pendapatan Daerah. Sementara porsi terbesar berasal dari Pendapatan Transfer sebesar 58,68% dari total realisasi Pendapatan Daerah, dan kontribusi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan yang paling kecil, yaitu 0,13% dari total realisasi Pendapatan Daerah.

Sedangkan realisasi pendapatan daerah sampai dengan Triwulan I Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp1.042.421.951.858,63 atau sebesar 20,74% dari yang ditargetkan pada APBD Tahun Anggaran 2025 yaitu sebesar Rp5.025.509.838.565,00, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Realisasi Pendapatan Asli Daerah adalah sebesar Rp463.344.267.035,63 atau 27,12% dari yang ditargetkan pada APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1.708.240.975.934,00, dengan rincian sebagai berikut:
  - a) Realisasi Pajak Daerah sebesar Rp304.032.650.952,25 atau sebesar 20,79% dari target pada APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1.462.082.788.059,00;
  - b) Realisasi Retribusi Daerah sebesar Rp16.388.093.866,00 atau sebesar 24,11% dari target pada APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp67.968.998.020,00;

- c) Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp121.074.128.133,00 atau sebesar 97,65% dari target pada APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp123.993.797.426,00;
  - d) Realisasi Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp21.849.394.084,38 atau sebesar 40,32% dari target pada APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp54.195.392.429,00;
2. Realisasi Pendapatan Transfer adalah sebesar Rp578.441.579.823,00 atau 17,48% dari yang ditargetkan pada APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp3.309.663.362.631,00, dengan rincian sebagai berikut:
- a) Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp578.441.579.823,00 atau sebesar 17,48% dari target pada APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp3.308.682.436.000,00;
  - b) Pendapatan Transfer Antar Daerah belum terdapat realisasi dari yang ditargetkan pada APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp980.926.631,00;
3. Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah adalah sebesar Rp636.105.000,00 atau 8,36% dari yang ditargetkan pada APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp7.605.500.000,00, yang bersumber dari pendapatan hibah.

APBD Tahun Anggaran 2025 mengalami penyesuaian pada bulan Maret 2025 sebagai tindak lanjut atas adanya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perkembangan perekonomian nasional dan regional dan politik dalam negeri maupun luar negeri. Inpres tersebut berpengaruh terhadap penerimaan daerah dari pendapatan transfer, adapun perkembangan perekonomian nasional dan regional dan politik dalam negeri maupun luar negeri berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Perkembangan perekonomian nasional dan regional dan politik dalam negeri maupun luar negeri berpengaruh terhadap daya beli masyarakat akan kendaraan bermotor baru dan harga kendaraan bermotor baru. Kedua hal tersebut berpengaruh secara langsung pada Pendapatan Asli Daerah khususnya pajak daerah dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Pemerintah Daerah DIY pada APBD Tahun Anggaran 2025 mengalokasikan belanja daerah sebesar Rp5.237.363.379.173,00, dan sampai dengan Triwulan I telah terealisasi sebesar Rp699.499.476.586,13 atau sebesar 13,36%. Secara umum, deviasi disebabkan oleh keterlambatan pelaksanaan kegiatan, perubahan jadwal kegiatan, serta penyesuaian aktivitas terhadap Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Realisasi belanja tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Realisasi Belanja Operasi adalah sebesar Rp653.821.559.136,13 atau sebesar 18,07% dari yang dianggarkan pada APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp3.617.270.845.673,00, dengan rincian sebagai berikut:
  - a) Realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp346.320.019.336,00 atau sebesar 19,12% dari yang dianggarkan pada APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1.811.440.852.561,00;
  - b) Realisasi Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp178.439.324.193,13 atau sebesar 14,19% dari yang dianggarkan pada APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1.257.242.069.759,00;
  - c) Realisasi Belanja Subsidi sebesar Rp12.591.906.178,00 atau sebesar 13,11% dari yang dianggarkan pada APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp96.029.746.301,00;
  - d) Realisasi Belanja Hibah sebesar Rp109.235.613.029,00 atau sebesar 25,94% dari yang dianggarkan pada APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp421.062.271.052,00;
  - e) Realisasi Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp7.234.696.400,00 atau sebesar 22,97% dari yang dianggarkan pada APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp31.495.906.000,00;
2. Realisasi Belanja Modal adalah sebesar Rp7.642.605.586,00 atau 1,08% dari yang dianggarkan pada APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp708.569.177.994,00, dengan rincian sebagai berikut:
  - a) Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp6.100.527.220,00 atau sebesar 3,75% dari yang dianggarkan pada APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp162.795.056.675,00;
  - b) Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp114.784.859,00 atau sebesar 0,04% dari yang dianggarkan pada APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp301.061.894.630,00;
  - c) Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar Rp1.266.033.107,00 atau sebesar 0,53% dari yang dianggarkan pada APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp237.092.472.566,00;
  - d) Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp161.260.400,00 atau sebesar 2,14% dari yang dianggarkan pada APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp7.519.754.123,00;
  - e) Belanja Modal Aset Lainnya belum terdapat realisasi dari yang dianggarkan pada APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp100.000.000,00;

3. Belanja Tidak Terduga belum terdapat realisasi dari yang dianggarkan pada APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp31.760.589.370,00;
4. Realisasi Belanja Transfer adalah sebesar Rp38.035.311.864,00 atau 4,32% dari yang dianggarkan pada APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp879.762.766.136,00, dengan rincian sebagai berikut:
  - a) Belanja Bagi Hasil belum terdapat realisasi dari yang dianggarkan pada APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp437.204.710.166,00;
  - b) Realisasi Belanja Bantuan Keuangan sebesar Rp38.035.311.864,00 atau sebesar 8,59% dari yang dianggarkan pada APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp442.558.055.970,00;

Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun 2023-2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel III-2 Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun 2023-2025**

Kode Rekening	Uraian	Realisasi TA 2023	Realisasi TA 2024	APBD TA 2025	Pergeseran APBD TA 2025	Realisasi Triwulan I TA 2025	Proyeksi Perubahan RKPD Tahun 2025
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>5.840.561.001.091,65</b>	<b>6.025.070.171.261,08</b>	<b>5.025.509.838.565,00</b>	<b>4.759.729.055.565,00</b>	<b>1.042.421.951.858,63</b>	<b>4.759.778.855.694,00</b>
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>2.368.679.166.252,65</b>	<b>2.481.506.565.559,08</b>	<b>1.708.240.975.934,00</b>	<b>1.708.240.975.934,00</b>	<b>463.344.267.035,63</b>	<b>1.733.197.046.772,00</b>
4.1.01	Pajak Daerah	2.069.612.267.000,57	2.157.532.293.945,00	1.462.082.788.059,00	1.462.082.788.059,00	304.032.650.952,25	1.464.214.571.759,00
4.1.02	Retribusi Daerah	33.213.267.052,00	79.460.801.542,00	67.968.998.020,00	67.968.998.020,00	16.388.093.866,00	72.085.206.115,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	109.790.680.460,56	120.935.677.671,93	123.993.797.426,00	123.993.797.426,00	121.074.128.133,00	131.046.483.045,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	156.062.951.739,52	123.577.792.400,15	54.195.392.429,00	54.195.392.429,00	21.849.394.084,38	65.850.785.853,00
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>3.463.926.176.823,00</b>	<b>3.535.479.452.702,00</b>	<b>3.309.663.362.631,00</b>	<b>3.043.882.579.631,00</b>	<b>578.441.579.823,00</b>	<b>3.018.976.308.922,00</b>
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.463.090.270.403,00	3.534.495.647.472,00	3.308.682.436.000,00	3.042.901.653.000,00	578.441.579.823,00	3.017.995.382.291,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	835.906.420,00	983.805.230,00	980.926.631,00	980.926.631,00	-	980.926.631,00
<b>4.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>7.955.658.016,00</b>	<b>8.084.153.000,00</b>	<b>7.605.500.000,00</b>	<b>7.605.500.000,00</b>	<b>636.105.000,00</b>	<b>7.605.500.000,00</b>
4.3.01	Pendapatan Hibah	7.950.630.000,00	8.084.153.000,00	7.605.500.000,00	7.605.500.000,00	636.105.000,00	7.605.500.000,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	5.028.016,00	-	-	-	-	-

Kode Rekening	Uraian	Realisasi TA 2023	Realisasi TA 2024	APBD TA 2025	Pergeseran APBD TA 2025	Realisasi Triwulan I TA 2025	Proyeksi Perubahan RKPD Tahun 2025
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>5.840.561.001.091,65</b>	<b>6.025.070.171.261,08</b>	<b>5.025.509.838.565,00</b>	<b>4.759.729.055.565,00</b>	<b>1.042.421.951.858,63</b>	<b>4.759.778.855.694,00</b>
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>5.705.855.917.726,41</b>	<b>5.680.495.088.297,12</b>	<b>5.237.363.379.173,00</b>	<b>4.971.582.596.173,00</b>	<b>699.499.476.586,13</b>	<b>5.036.933.084.978,00</b>
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>3.504.788.744.020,20</b>	<b>3.589.908.402.394,35</b>	<b>3.617.270.845.673,00</b>	<b>3.500.556.190.616,00</b>	<b>653.821.559.136,13</b>	<b>3.435.075.721.745,00</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	1.572.322.039.241,00	1.651.782.965.460,00	1.811.440.852.561,00	1.811.440.852.561,00	346.320.019.336,00	1.742.571.757.961,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.245.945.486.879,20	1.155.896.100.440,35	1.257.242.069.759,00	1.155.138.396.702,00	178.439.324.193,13	1.156.952.546.431,00
5.1.04	Belanja Subsidi	74.269.644.598,00	75.368.890.530,00	96.029.746.301,00	96.029.746.301,00	12.591.906.178,00	96.029.746.301,00
5.1.05	Belanja Hibah	583.965.119.370,00	653.554.770.630,00	421.062.271.052,00	406.451.289.052,00	109.235.613.029,00	408.497.765.052,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	28.286.453.932,00	53.305.675.334,00	31.495.906.000,00	31.495.906.000,00	7.234.696.400,00	31.023.906.000,00
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>745.354.723.452,00</b>	<b>659.153.310.940,95</b>	<b>708.569.177.994,00</b>	<b>671.698.267.903,00</b>	<b>7.642.605.586,00</b>	<b>726.572.091.426,00</b>
5.2.01	Belanja Modal Tanah	169.306.929.192,00	35.792.256.125,00	-	-	-	-
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	186.110.825.035,00	204.099.193.397,00	162.795.056.675,00	158.896.485.542,00	6.100.527.220,00	178.668.040.869,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	150.886.570.710,00	220.538.449.546,95	301.061.894.630,00	294.078.595.430,00	114.784.859,00	306.700.681.626,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	225.450.247.009,00	182.299.322.051,00	237.092.472.566,00	211.103.432.808,00	1.266.033.107,00	233.403.614.808,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	13.437.651.506,00	11.562.606.421,00	7.519.754.123,00	7.519.754.123,00	161.260.400,00	7.519.754.123,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	162.500.000,00	4.861.483.400,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-	280.000.000,00
<b>5.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>198.487.268,00</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>31.760.589.370,00</b>	<b>23.845.015.170,00</b>	<b>-</b>	<b>23.134.539.170,00</b>
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	198.487.268,00	20.000.000,00	31.760.589.370,00	23.845.015.170,00	-	23.134.539.170,00
<b>5.4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>1.455.513.962.986,21</b>	<b>1.431.413.374.961,82</b>	<b>879.762.766.136,00</b>	<b>775.483.122.484,00</b>	<b>38.035.311.864,00</b>	<b>852.150.732.637,00</b>

Kode Rekening	Uraian	Realisasi TA 2023	Realisasi TA 2024	APBD TA 2025	Pergeseran APBD TA 2025	Realisasi Triwulan I TA 2025	Proyeksi Perubahan RKPD Tahun 2025
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	886.411.063.641,00	870.359.406.509,00	437.204.710.166,00	437.204.710.166,00	-	511.885.255.925,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	569.102.899.345,21	561.053.968.452,82	442.558.055.970,00	338.278.412.318,00	38.035.311.864,00	340.265.476.712,00
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>5.705.855.917.726,41</b>	<b>5.680.495.088.297,12</b>	<b>5.237.363.379.173,00</b>	<b>4.971.582.596.173,00</b>	<b>699.499.476.586,13</b>	<b>5.036.933.084.978,00</b>
	<b>Total Surplus/(Defisit)</b>	<b>134.705.083.365,24</b>	<b>344.575.082.963,96</b>	<b>(211.853.540.608,00)</b>	<b>(211.853.540.608,00)</b>	<b>342.922.475.272,50</b>	<b>(277.154.229.284,00)</b>
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>160.555.386.955,24</b>	<b>93.121.146.320,48</b>	<b>211.853.540.608,00</b>	<b>211.853.540.608,00</b>	<b>(107.500.000.000,00)</b>	<b>277.154.229.284,00</b>
<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>465.555.386.955,24</b>	<b>295.621.146.320,48</b>	<b>319.895.540.608,00</b>	<b>319.895.540.608,00</b>	<b>-</b>	<b>437.696.229.284,00</b>
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	462.271.562.955,24	295.260.470.320,48	314.895.540.608,00	314.895.540.608,00	-	437.696.229.284,00
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	3.283.824.000,00	360.676.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	-	-
	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>465.555.386.955,24</b>	<b>295.621.146.320,48</b>	<b>319.895.540.608,00</b>	<b>319.895.540.608,00</b>	<b>-</b>	<b>437.696.229.284,00</b>
<b>6.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>305.000.000.000,00</b>	<b>202.500.000.000,00</b>	<b>108.042.000.000,00</b>	<b>108.042.000.000,00</b>	<b>107.500.000.000,00</b>	<b>160.542.000.000,00</b>
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	300.000.000.000,00	200.000.000.000,00	105.542.000.000,00	105.542.000.000,00	105.000.000.000,00	155.542.000.000,00
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	5.000.000.000,00	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	5.000.000.000,00
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>305.000.000.000,00</b>	<b>202.500.000.000,00</b>	<b>108.042.000.000,00</b>	<b>108.042.000.000,00</b>	<b>107.500.000.000,00</b>	<b>160.542.000.000,00</b>
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>160.555.386.955,24</b>	<b>93.121.146.320,48</b>	<b>211.853.540.608,00</b>	<b>211.853.540.608,00</b>	<b>(107.500.000.000,00)</b>	<b>277.154.229.284,00</b>
	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan</b>	<b>295.260.470.320,48</b>	<b>437.696.229.284,44</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>235.422.475.272,50</b>	<b>-</b>

## **III.2.2 Kebijakan Perubahan Pendapatan Daerah**

Transparansi pengelolaan pendapatan daerah harus dilaksanakan sejak dari proses perencanaan, penyusunan, hingga pelaksanaan anggaran. Selain itu, diperlukan pula akuntabilitas dalam pertanggungjawaban publik dalam arti bahwa proses perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan anggaran dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Dengan demikian, pengelolaan pendapatan daerah yang benar-benar efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab diharapkan dapat dihasilkan.

### **III.2.2.1 Kebijakan Umum Pendapatan Daerah**

Pendapatan daerah mengalami perubahan dengan adanya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perkembangan perekonomian nasional dan regional dan politik dalam negeri maupun luar negeri. Inpres tersebut berpengaruh terhadap penerimaan daerah dari pendapatan transfer, adapun perkembangan perekonomian nasional dan regional dan politik dalam negeri maupun luar negeri berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Perkembangan perekonomian nasional dan regional dan politik dalam negeri maupun luar negeri berpengaruh terhadap daya beli masyarakat akan kendaraan bermotor baru dan harga kendaraan bermotor baru. Kedua hal tersebut berpengaruh secara langsung pada Pendapatan Asli Daerah khususnya pajak daerah dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Adanya Surat Edaran dari Kementerian Dalam Negeri Nomor 900.1.13.1/6764/SJ tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Keringanan dan atau Pengurangan Terkait Penerapan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan bermotor, berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Pendapatan yang bersumber dari pendapatan transfer Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah DIY mengacu Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang berdampak pada sebagian pendapatan transfer yaitu Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya, Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Struktur Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sebagai berikut:

1. Dana Bagi Hasil

Dana Bagi Hasil (DBH) didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum. DBH merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah penghasil berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Tujuan disalurkan DBH adalah untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara Pemerintah dan Daerah, serta kepada Daerah lain non penghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah. DBH disalurkan berdasarkan realisasi penerimaan negara pajak dan bukan pajak tahun berjalan. DBH dialokasikan kepada daerah penghasil, pengolah, dan nonpenghasil yang berbatasan langsung dengan daerah penghasil.

DBH yang ditentukan penggunaannya yaitu Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) yang diatur dengan peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau.

Pendanaan dari DBHCHT meliputi program peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai dan/atau pemberantasan barang kena cukai palsu (cukai ilegal) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai cukai, dengan prioritas pada bidang kesehatan untuk mendukung program jaminan kesehatan nasional terutama peningkatan kuantitas dan kualitas layanan kesehatan dan pemulihan perekonomian di daerah.

DBH dapat disalurkan ke daerah dalam bentuk tunai dan non tunai. Berdasarkan PMK No. 19 Tahun 2023 tentang Pengelolaan DBH/DAU yang Disalurkan secara NonTunai melalui Fasilitas TDF, DBH dapat disalurkan secara nontunai dengan mekanisme diantaranya Surat Berharga Negara (SBN), *Treasury Deposit Facility* (TDF), rekening yang dikelola pemerintah, dan lainnya. TDF merupakan fasilitas yang disediakan oleh Bendahara Umum Negara bagi Pemda untuk menyimpan uang di BUN sebagai bentuk penyaluran TKD nontunai berupa penyimpanan dana overnight pada rekening lain BI TDF – TKD Pemda di Bank Indonesia.

Penyaluran DBH melalui mekanisme TDF berdasarkan perkiraan saldo kas daerah. Apabila saldo kas diperkirakan rendah maka DBH disalurkan tunai, namun apabila saldo kas diperkirakan tinggi maka DBH disalurkan dalam bentuk TDF. Batas tinggi ataupun rendahnya saldo kas ditetapkan dalam keputusan menteri keuangan.

## 2. Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum (DAU) didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum. DAU merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Pengaturan DAU berdasarkan UU No. 1 Tahun 2022 diantaranya berupa penetapan pagu yang memperhatikan pemenuhan kebutuhan layanan publik, redesign formula DAU dengan menggunakan kebutuhan fiskal dan potensi pendapatan, penggunaannya ditetapkan sebagai DAU yang ditentukan penggunaannya dan DAU yang tidak ditentukan penggunaannya sesuai dengan penilaian kinerja di daerah serta mempertimbangkan kebutuhan dasar penyelenggaraan pemerintahan.

DAU yang tidak ditentukan penggunaannya, digunakan sesuai dengan prioritas dan kewenangan masing-masing Pemerintah Daerah, DAU yang ditentukan penggunaannya terdiri dari DAU Dukungan Penggajian Formasi PPPK, DAU Dukungan Bidang Pendidikan, DAU Dukungan Bidang Kesehatan, dan DAU Dukungan Bidang Pekerjaan Umum. Adapun jenis DAU Dukungan Bidang yang dialokasikan ke pemerintah daerah ditentukan oleh kebijakan pemerintah pusat.

Alokasi anggaran DAU yang ditentukan penggunaannya mengalami perubahan yang mengacu pada Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

### 3. Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus (DAK) dibagi menjadi DAK Fisik dan DAK Nonfisik.

Fokus DAK berdasarkan UU No 1 Tahun 2022 adalah untuk:

- a) mencapai prioritas nasional;
- b) mempercepat pembangunan Daerah;
- c) mengurangi kesenjangan layanan publik;
- d) mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah; dan/atau
- e) mendukung operasionalisasi layanan publik.

#### 1) DAK Fisik

DAK Fisik bertujuan membantu daerah dalam penyediaan sarana dan prasarana dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal,

pencapaian prioritas nasional, dan percepatan pembangunan daerah sesuai dengan kewenangan daerah. Dasar kebijakan DAK Fisik adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik.

Alokasi anggaran DAK Fisik mengalami perubahan yang mengacu pada Surat KMK Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

## 2) DAK Nonfisik

DAK Nonfisik merupakan bagian dari Dana Transfer Khusus yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang bersifat operasional, dalam rangka meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan publik yang merupakan urusan daerah sesuai kebutuhan dan prioritas daerah, serta selaras dengan prioritas nasional. Dasar kebijakan DAK Nonfisik adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.07/ 2022 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik. Alokasi DAK Nonfisik juga dilakukan penyesuaian terhadap sisa DAK Nonfisik pada Rekening Kas Umum Daerah pada akhir tahun 2024 yang diperhitungkan ke dalam penyaluran pada Tahun Anggaran 2025.

Prinsip DAK Nonfisik yaitu:

- (a) Membantu dan melengkapi kekurangan pendanaan bagi kegiatan khusus operasional dalam rangka pelaksanaan pelayanan dasar publik berdasarkan standar pelayanan minimal (SPM) yang selaras dengan program prioritas nasional dan menjadi kewenangan urusan pemerintah daerah.
- (b) Dialokasikan kepada Daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah, sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan dalam APBN.

## 4. Dana Keistimewaan

Dalam rangka mendukung implementasi urusan keistimewaan, Pemerintah Daerah DIY mendapatkan alokasi dana keistimewaan dari Pemerintah pusat. Alokasi Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Alokasi anggaran Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami perubahan yang mengacu pada Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan penyesuaian terhadap sisa Dana Keistimewaan DIY pada Rekening Kas Umum Daerah pada akhir tahun 2024 yang diperhitungkan ke dalam penyaluran pada Tahun Anggaran 2025.

### **III.2.2.2 Strategi Peningkatan Pendapatan**

#### **1. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah**

Berdasarkan kebijakan perencanaan pendapatan daerah maka dalam merealisasikan perkiraan rencana penerimaan target pendapatan daerah diuraikan strategi pencapaiannya sebagai berikut:

- a. Penyempurnaan dasar hukum pemungutan dan regulasi penyesuaian tarif pungutan serta penyederhanaan sistem prosedur pelayanan;
- b. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pemungut dengan melakukan pelatihan dan bimbingan teknis kepada petugas pajak dan retribusi daerah;
- c. Koordinasi dan kolaborasi dengan pemerintah kabupaten/kota terkait dengan pemungutan Opsen Pajak Daerah;
- d. Pelaksanaan pemungutan atas obyek pajak/retribusi baru dan pengembangan sistem operasi penagihan atas potensi pajak dan retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya;
- e. Penerapan sistem informasi berbasis teknologi dalam penatausahaan pendapatan daerah;
- f. Optimalisasi pembayaran pajak dan retribusi melalui kanal-kanal digital (QRIS, EDC, *Mobile Banking*);
- g. Meningkatkan pembayaran pajak dan retribusi daerah melalui *e-commerce*, *e-wallet*, *website* dan jaringan minimarket;
- h. Melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah penghasil dalam rangka pengembangan sinergitas pelaksanaan tugas pemungutan Pendapatan Asli Daerah;
- i. Peningkatan pengelolaan dan pengawasan pajak daerah dengan cara meningkatkan intensitas dan efektivitas penagihan tunggakan pajak, meningkatkan pengawasan penerimaan pajak melalui pendataan wajib

- pajak, Operasi Bersama, dan pembentukan PPNS pajak daerah dan juru sita pajak daerah;
- j. Melaksanakan pelayanan dan pemberian kemudahan kepada masyarakat dalam membayar pajak melalui *drive thru*, Gerai Samsat, Bus Samsat Keliling (Satling), Samsat Mobile Lima Tahunan (Samoli), pengembangan *Samsat Payment Point* (Samsat Desa, Temaran, Gojak, Bajak sawah, SiJebol, dsb) dan E-Posti serta penyederhanaan sistem dan prosedur pembayaran pajak daerah;
  - k. Pemberian kemudahan kepada masyarakat dalam mengakses layanan retribusi daerah melalui *e-Ticketing* Museum Sonobudoyo;
  - l. Memanfaatkan sistem informasi dan komunikasi perpajakan daerah berbasis teknologi android melalui pesan *Whatsapp*;
  - m. Melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan pada tataran kebijakan, dengan Polda dan kabupaten/kota termasuk dengan daerah perbatasan, dalam operasional pemungutan dan pelayanan Pendapatan Asli Daerah;
  - n. Penyebarluasan informasi pendapatan daerah melalui berbagai media, baik media sosial, media cetak dan media elektronik;
  - o. Peningkatan fasilitas dan sarana pelayanan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran;
  - p. Optimalisasi pemberdayaan dan pendayagunaan aset yang diarahkan pada peningkatan pendapatan asli daerah;
  - q. Optimalisasi BUMD melalui berbagai upaya: pengelolaan BUMD secara profesional, peningkatan sarana, prasarana, kemudahan pelayanan terhadap konsumen/nasabah, serta mengoptimalkan pembinaan agar dapat mendukung peningkatan kinerja BUMD; serta
  - r. Optimalisasi BUKP melalui pengelolaan BUKP yang lebih baik.
2. Peningkatan Dana Transfer serta Lain-lain Pendapatan yang Sah
- Strategi dalam upaya mengoptimalkan pendapatan transfer adalah sebagai berikut:
- a. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat terkait dengan dana transfer pusat ke daerah. Agar Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), maupun Dana Keistimewaan DIY bisa optimal berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. Peningkatan validasi data yang menjadi komponen dalam perhitungan pembagian Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK);

- c. Mengusulkan kegiatan yang akan dibiayai APBN melalui DAK sesuai dengan kriteria kegiatan yang dapat diusulkan dan dilaksanakan secara tepat waktu;
- d. Pelaporan penggunaan DTU dan DAK secara tepat waktu; dan
- e. Peningkatan kinerja Pemerintah Daerah agar dapat memperoleh Insentif Fiskal.

### **III.2.3 Kebijakan Perubahan Belanja Daerah**

Arah kebijakan belanja daerah pada rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025 disesuaikan dengan kebijakan pemerintah pusat, di antaranya pemenuhan *mandatory spending*, penggunaan DAU dan DBH diarahkan untuk penggalan formasi PPPK, bidang pendidikan serta peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan publik, penggunaan DAK sesuai petunjuk teknis masing-masing kementerian/lembaga teknis, penggunaan DBH CHT diprioritaskan pada bidang kesehatan untuk mendukung program jaminan kesehatan nasional terutama peningkatan kuantitas dan kualitas layanan kesehatan dan pemulihan perekonomian di Daerah, serta memenuhi kebutuhan belanja wajib dan mengikat. Penyesuaian dilakukan melalui perubahan alokasi dan penggunaan belanja.

Beberapa penyesuaian alokasi dan penggunaan belanja yang dilakukan Pemerintah Daerah DIY, yaitu:

1. Adanya penyesuaian belanja pada program, kegiatan, subkegiatan yang bersumber dari alokasi Transfer Ke Daerah (TKD) sebagai tindak lanjut kebijakan dari Pusat, yaitu:
  - a. Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
  - b. Instruksi Presiden RI Nomor 2 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, Serta Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi untuk Mendukung Swasembada Pangan;
  - c. Instruksi Presiden RI Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pendayagunaan Penyuluh Pertanian dalam Rangka Percepatan Swasembada Pangan;
  - d. Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2025 tentang Percepatan Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan Primer dan Pelayanan Kesehatan Lanjutan untuk Mendukung Implementasi Transformasi Kesehatan;
  - e. Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 03 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun Anggaran 2025;
  - f. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 453 Tahun 2024 tentang Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional

Kesehatan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan dan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas dan Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Subjenis Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian Tahun Anggaran 2025;

- g. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam Rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
  - h. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ tanggal 23 Februari 2025 tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
  - i. Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI Nomor S-24/PK/PK.2/2025 tanggal 24 Februari 2025 tentang Pelaksanaan Kegiatan DBH TA 2025 yang Telah Ditentukan Penggunaannya; dan
  - j. Surat Paniradya Pati Paniradya Kaistimewan Nomor B/100.1.5.1/1491/PANI tanggal 27 Februari 2025 tentang Pemberitahuan Hasil Efisiensi.
2. Penyesuaian belanja gaji dan tunjangan pegawai.
  3. Adanya pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan dan antar jenis belanja.
  4. Adanya penyesuaian belanja bagi hasil kepada kabupaten dan kota terhadap target penerimaan pajak daerah dan memperhitungkan kelebihan penerimaan pajak daerah pada Tahun Anggaran 2024.
  5. Adanya penyesuaian SiLPA berdasarkan hasil audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Jumlah belanja daerah berdasarkan APBD DIY Tahun Anggaran 2025 (Murni) sebesar Rp5.237 Triliun, sedangkan pada Perubahan RKPD Tahun 2025 direncanakan sebesar Rp5,036 Triliun atau turun sebesar 200,43 Miliar. Penurunan ini dibandingkan APBD Murni Tahun Anggaran 2025 dikarenakan adanya penyesuaian belanja sebagaimana disampaikan diatas.

Belanja daerah terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer.

### **III.2.3.1 Belanja Operasi**

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi dirinci sebagai berikut:

1. Belanja Pegawai berupa penyediaan gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
2. Belanja barang dan jasa berupa pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Daerah
3. Belanja subsidi berupa alokasi anggaran yang digunakan agar harga jual produksi atau jasa yang digunakan oleh BUMN, BUMD dan/atau BUMS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga terjangkau oleh masyarakat
4. Belanja Hibah digunakan untuk mendukung fungsi pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah, maka pemerintah daerah dapat melakukan pemberian hibah kepada Pemerintah Pusat, instansi vertikal (seperti untuk kegiatan TMMD), dan instansi semi pemerintah (seperti PMI, KONI, Pramuka, KORPRI dan PKK), pemberian hibah kepada pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, serta masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak terus menerus setiap tahun anggaran kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan sepanjang dianggarkan dalam APBD. Pemberian hibah harus dilakukan secara selektif sesuai dengan urgensi dan kepentingan daerah serta kemampuan keuangan daerah, sehingga tidak mengganggu penyelenggaraan urusan wajib dan tugas-tugas pemerintahan daerah lainnya dalam meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan umum kepada masyarakat.
5. Belanja Bantuan Sosial digunakan dalam rangka melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Bantuan sosial diberikan kepada individu, keluarga, kelompok masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan dan selektif sesuai kemampuan keuangan daerah dan tidak mengganggu pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.

Jumlah belanja operasional berdasarkan APBD DIY Tahun Anggaran 2025 (Murni) sebesar Rp3,617 Triliun, sedangkan pada Perubahan RKPD Tahun 2025 direncanakan sebesar Rp3,435 Triliun atau turun sebesar Rp182,19 Miliar. Penurunan ini dibandingkan APBD Murni Tahun Anggaran 2025 dikarenakan adanya penyesuaian belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial.

### **III.2.3.2 Belanja Modal**

Belanja modal merupakan belanja yang dianggarkan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya sesuai dengan kriteria yang telah diatur. Belanja tetap meliputi:

1. Belanja tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
2. Belanja peralatan dan mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, investasi kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaat lebih dari 12 bulan dan dalam kondisi siap pakai.
3. Belanja bangunan dan gedung, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap pakai.
4. Belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah saat dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah daerah dalam kondisi siap pakai.
5. Belanja aset tetap lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan d, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
6. Belanja aset lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Jumlah belanja modal berdasarkan APBD DIY Tahun Anggaran 2025 (Murni) sebesar Rp708,56 Miliar, sedangkan pada Perubahan RKPD Tahun 2025 direncanakan sebesar Rp726,57 Miliar atau turun sebesar Rp18 Miliar. Peningkatan ini dibandingkan APBD Murni Tahun Anggaran 2025 dikarenakan adanya peningkatan pada belanja modal peralatan dan mesin, peningkatan pada belanja modal gedung dan bangunan, peningkatan pada belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi serta penurunan pada belanja modal aset lainnya.

### **III.2.3.3 Belanja Tidak Terduga**

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

### **III.2.3.4 Belanja Transfer**

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah ke Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa. Belanja transfer meliputi:

#### **1. Belanja Bagi hasil**

Belanja bagi hasil adalah pengeluaran yang digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota yang penganggarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **2. Belanja Bantuan Keuangan**

Belanja bantuan keuangan merupakan belanja yang dianggarkan untuk diberikan kepada daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan dan/atau tujuan tertentu sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan tidak mengganggu terlaksananya urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.

Selanjutnya alokasi anggaran perlu dilaksanakan secara terbuka berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan. Selain itu pengelolaan belanja harus diadministrasikan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Arah pengelolaan belanja daerah adalah sebagai berikut:

#### **1. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran**

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat dan harapan selanjutnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dapat diwujudkan dengan meningkatkan kompetensi SDM aparatur daerah, terutama yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat.

#### **2. Prioritas**

Belanja daerah diarahkan pada program, kegiatan dan subkegiatan yang benar-benar merupakan prioritas pembangunan daerah sesuai dengan yang ditetapkan dalam Perubahan RKPD Tahun 2025. Prioritas pembangunan daerah tersebut adalah penurunan tingkat kemiskinan, pengembangan kehidupan ekonomi yang layak, peningkatan kualitas SDM Yogyakarta, penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah), penguatan Good-

governance pada berbagai tingkatan, dan menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram.

3. Tolok ukur dan target kinerja

Belanja daerah pada setiap kegiatan disertai tolok ukur dan target pada setiap indikator kinerja yang meliputi masukan, keluaran dan hasil sesuai dengan tugas dan fungsi.

4. Optimalisasi belanja

Belanja diupayakan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif. Belanja disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat, sesuai strategi pembangunan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Optimalisasi belanja untuk pembangunan infrastruktur publik dilakukan melalui kerja sama dengan pihak swasta/pihak ketiga, sesuai ketentuan yang berlaku.

5. Transparansi dan Akuntabel

Setiap pengeluaran belanja dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dipublikasikan berarti pula masyarakat mudah dan tidak mendapatkan hambatan dalam mengakses informasi belanja. Pelaporan dan pertanggungjawaban belanja tidak hanya dari aspek administrasi keuangan, tetapi menyangkut pula proses, keluaran dan hasil.

6. Tepat Waktu

Menetapkan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 secara tepat waktu, serta memastikan pelaksanaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 berjalan dengan baik dan tepat waktu sesuai dengan rencana kegiatan yang telah ditetapkan.

### **III.2.4 Kebijakan Perubahan Pembiayaan Daerah**

Dengan diberlakukannya anggaran kinerja, maka dalam penyusunan APBD dimungkinkan adanya defisit maupun surplus. Defisit terjadi ketika pendapatan lebih kecil dibandingkan dengan belanja, sedangkan surplus terjadi ketika pendapatan lebih besar dibandingkan beban. Untuk menutup defisit dan surplus diperlukan pembiayaan daerah.

Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah. dalam hal terjadi defisit anggaran. Sumber pembiayaan dapat berasal Dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun lalu, penerimaan pinjaman obligasi, transfer dari dana cadangan, maupun hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan. Sedangkan pengeluaran

dalam pembiayaan itu sendiri adalah angsuran hutang, bantuan modal dan transfer ke dana cadangan.

Arah kebijakan pembiayaan pembangunan diarahkan pada upaya membangun investasi di daerah khususnya pengeluaran pembiayaan. Aspek investasi tersebut digunakan untuk membiayai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam peningkatan usaha, serta berorientasi pada profit. Lebih lanjut BUMD yang didukung oleh pemerintah tentunya harus memberikan nilai manfaat kepada masyarakat, serta memberikan kontribusi terhadap pendapatan pembangunan daerah.

Penerimaan pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibanding dengan pendapatan yang diperoleh. Kebijakan penerimaan pembiayaan melalui, penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA).

Pengeluaran pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap pengeluaran yang akan diterima, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

#### **III.2.4.1 Penerimaan Pembiayaan**

Penerimaan pembiayaan merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya. Penerimaan Pembiayaan terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA), Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman, Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sumber penerimaan pembiayaan DIY berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) dan Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah. Besaran penerimaan dari SiLPA tersebut disesuaikan dengan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2024.

Dalam APBD DIY Tahun Anggaran 2025, penerimaan pembiayaan direncanakan sebesar Rp319,89 Miliar, sedangkan dalam Perubahan RKPD Tahun 2025 direncanakan sebesar 437,696 Miliar. Kenaikan pembiayaan tersebut berasal dari dari SiLPA yang realisasinya lebih tinggi daripada yang direncanakan di tahun APBD Murni Tahun Anggaran 2025.

#### **III.2.4.2 Pengeluaran Pembiayaan**

Pada tahun 2025 pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal, dan pemberian pinjaman. Penyertaan modal diberikan kepada BUMD dengan prioritas untuk memperkuat struktur permodalan, sehingga BUMD dapat lebih berkompetisi, bertumbuh dan berkembang.

Penyertaan modal daerah pada tahun 2025 diberikan kepada PT. Bank BPD DIY dan PT. Asuransi Bangun Askrida. Penambahan setoran modal pada PT. Bank BPD DIY didasarkan atas Peraturan Daerah DIY Nomor 5 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Daerah DIY Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah Dan Perseroan Terbatas Asuransi Bangun ASKRIDA .

Pengeluaran pembiayaan untuk pemberian pinjaman diberikan kepada BUKP dengan bentuk dana bergulir kepada masyarakat. BUKP merupakan lembaga perkreditan milik Pemerintah Daerah yang menyediakan dana pembangunan dengan prosedur sederhana, cepat, dan mudah guna mengembangkan dan meningkatkan taraf hidup perekonomian masyarakat.

## **BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH**

Dalam konteks perencanaan pembangunan, tema pembangunan merupakan bagian integral dari pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Tema pembangunan disusun dengan memperhatikan tahapan pelaksanaan RPJMD, isu-isu strategis yang aktual dan tema pembangunan nasional. Memperhatikan hal-hal tersebut dan selaras dengan tema RKP tahun 2025 yang tidak mengalami perubahan sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 206 dan hasil evaluasi capaian pembangunan s.d Triwulan I tahun 2025 dengan hasil yang diproyeksikan tercapai di Tahun 2025, maka tema Perubahan RKPD DIY Tahun 2025 masih tetap sama dengan tema RKPD Tahun 2025 yaitu;

### **“Pengembangan Sektor Unggulan yang Kreatif dan Inovatif menuju Pertumbuhan Ekonomi Inklusif”**

Tema tersebut mengandung pernyataan kunci sebagai berikut:

#### 1. Sektor Unggulan

Sektor unggulan dimaksudkan bahwa pengembangan aktivitas ekonomi pada sektor pariwisata, pertanian, dan koperasi UMKM didorong untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi utamanya pada kawasan selatan.

#### 2. Kreatif dan inovatif

Kemampuan berpikir didorong untuk mencetuskan ide, gagasan, cara, atau produk sebagai solusi atas permasalahan yang ada serta mampu memberikan nilai tambah dengan cara yang baru ataupun berbeda.

#### 3. Ekonomi Inklusif

Peningkatan kesejahteraan dari pembangunan diharapkan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat sehingga pertumbuhan ekonomi juga diikuti dengan penurunan ketimpangan dan pengangguran.

### **IV.1 Penyesuaian Sasaran Pembangunan Daerah**

Sasaran pembangunan merupakan rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya indikator kinerja utama (IKU) Gubernur, berupa hasil pembangunan

daerah yang diperoleh dari pencapaian sasaran Perangkat Daerah melalui program pembangunan yang dilaksanakan. Sasaran pembangunan daerah tahun 2025 merupakan suatu kesatuan dalam upaya pencapaian visi dan misi pembangunan yang tercantum dalam RPJMD Tahun 2022-2027 dan menyesuaikan terhadap target indikator nasional sebagaimana yang tercantum dalam RKP Tahun 2025. Memperhatikan capaian sasaran pembangunan hingga Triwulan I tahun 2025, target sasaran pembangunan dalam Perubahan RKPD DIY Tahun 2025 sesuai dengan yang tercantum dalam RKPD DIY Tahun 2025. Selengkapnya sebagai berikut:

**Tabel IV-1 Sasaran Pembangunan Tahun 2025**

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Tahun 2025	Perubahan Target Tahun 2025
1.	1.1.1) Semakin kecilnya tingkat kemiskinan	Angka Kemiskinan	10,00-10,50	10,00-10,50
2.	1.1.2) Penghidupan ekonomi yang layak	Angka Pertumbuhan Ekonomi/ PDRB	5,3-5,8	5,3-5,8
		Pendapatan Perkapita (Rp juta)	31,51	31,51
		TPT	3,12-3,51	3,12-3,51
		Inflasi	3,1-3,8	3,1-3,8
3.	1.1.3) Kualitas SDM Yogyakarta yang dapat diandalkan	IPM	81,68	81,68
		Indeks Pembangunan Kebudayaan	74,98	74,98
4.	2.1.1) Meningkatkan kapasitas ekonomi pada kawasan belum maju	Kontribusi PDRB kawasan belum maju terhadap keseluruhan PDRB DIY	40,13	40,13
5.	3.1.1) Meningkatkan <i>Good Governance</i>	Opini BPK	WTP	WTP
		SAKIP	AA (92,80)	AA (92,80)
		Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	Tinggi (87,31-90,57)	Tinggi (87,31-90,57)
6.	4.1.1) Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	83,74	83,74
	4.1.2) Menurunnya risiko bencana	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) DIY	108,7	108,7

Sumber: RKPD DIY 2025

## IV.2 Prioritas Pembangunan Daerah

Berdasarkan tema RKPD DIY Tahun 2025 “*Pengembangan Sektor Unggulan yang Kreatif dan Inovatif menuju Pertumbuhan Ekonomi Inklusif*” dapat dirumuskan Prioritas Daerah DIY sebagai berikut.

1. Penurunan tingkat kemiskinan
2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak
3. Peningkatan Kualitas SDM Yogyakarta
4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)
5. Penguatan *Good-governance* pada berbagai tingkatan
6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tentram

Keenam (6) rumusan Prioritas Pembangunan DIY tahun 2025 tersebut juga telah selaras dengan Sasaran Pembangunan DIY tahun 2025 yang tercantum dalam RPJMD DIY Tahun 2022-2027 sebagai berikut

**Tabel IV-2 Penyelarasan Prioritas Daerah dengan Tema dan Sasaran Pembangunan Daerah**

No	Tema Pembangunan	Prioritas Daerah	Sasaran
1.	<i>"Pengembangan Sektor Unggulan yang Kreatif dan Inovatif menuju Pertumbuhan Ekonomi Inklusif"</i>	Penurunan tingkat kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem	1.1.1) Semakin kecilnya tingkat kemiskinan
2.		Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	1.1.2) Penghidupan ekonomi yang layak
3.		Peningkatan Kualitas SDM Yogyakarta	1.1.3) Kualitas SDM Yogyakarta yang dapat diandalkan
4.		Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	2.1.1) Meningkatnya kapasitas ekonomi pada kawasan belum maju
5.		Penguatan <i>Good-governance</i> pada berbagai tingkatan	3.1.1) Meningkatnya <i>Good Governance</i>
6.		Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tentram	4.1.1) Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang 4.1.2) Menurunnya risiko bencana

### **IV.3 Penyelarasan Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Nasional**

Prioritas pembangunan daerah DIY Tahun 2025 diselaraskan dengan program Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden. Asta Cita ini tertuang dalam Prioritas Nasional yang tertuang di dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025 maupun dalam Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 sesuai Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 206.

**Tabel IV-3 Interkoneksi Prioritas Daerah dengan Asta Cita / Prioritas Nasional Tahun 2025**

PN Nasional	Prioritas DIY	Indikator Sasaran Pemda
PN 1 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)	PD 5 Penguatan good governance pada berbagai tingkatan	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)
PN 2 Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Digital, dan Ekonomi Biru	PD 6 Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenang	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang
PN 3 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi	PD 2 Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Pendapatan Perkapita (Rp juta)
PN 4 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	PD 3 Peningkatan Kualitas SDM Yogyakarta	IPM
PN 5 Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di dalam Negeri	PD 2 Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	TPT
PN 6 Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	PD 1 Penurunan tingkat kemiskinan	Angka Kemiskinan
	PD 4 Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	Kontribusi PDRB kawasan belum maju terhadap keseluruhan PDRB DIY
PN 7 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	PD 5 Penguatan <i>Good-governance</i> pada berbagai tingkatan	Opini BPK SAKIP
	PD 2 Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Inflasi
PN 8 Memperkuat Penyeragaman Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antar Umat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	PD 3 Peningkatan Kualitas SDM Yogyakarta	Indeks Pembangunan Kebudayaan
	PD 6 Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenang	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) DIY

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2025 mengamanatkan agar Perubahan RKPD dan Perubahan Renja disusun dengan memperhatikan arah kebijakan pembangunan daerah dengan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, serta program Asta Cita ke dalam Perubahan RKPD Tahun 2025 dan Perubahan APBD TA 2025. Sebagaimana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta terkait Tata Cara Pengisian Jabatan, Pelantikan, Kedudukan, Tugas Dan Wewenang Gubernur Dan Wakil Gubernur maka Daerah Istimewa Yogyakarta tidak mengikuti pemilihan kepala daerah serentak pada tahun 2024 sehingga Visi Misi Gubernur dan Wakil Gubernur masih menggunakan RPJMD DIY Tahun 2022-2027.

Menindaklanjuti amanat Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tersebut, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta menyinkronkan program Asta Cita ke dalam Perubahan RKPD Tahun 2025. Berikut merupakan dukungan dari Program Perangkat Daerah terhadap Asta Cita/Prioritas Nasional, sebagaimana dalam tabel berikut.

**Tabel IV-4 Dukungan Program Perangkat Daerah terhadap Asta Cita / Prioritas Nasional Tahun 2025**

<b>Asta Cita / Prioritas Nasional</b>	<b>Program PD</b>
<b>PN 1 Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)</b>	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan
<b>PN 2 Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru</b>	Program Pelayanan Penanaman Modal
	Program Pengelolaan Aspek Kegeologian
	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan
	Program Pengelolaan Mineral Dan Batubara
	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
	Program Pengembangan Perumahan
	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan
	Program Perekonomian Dan Pembangunan
Program Promosi Penanaman Modal	
<b>PN 3 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas,</b>	Program Hubungan Industrial
	Program Kebijakan Administrasi Pembangunan
	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam
	Program Pemasaran Pariwisata

Asta Cita / Prioritas Nasional	Program PD
<b>Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi</b>	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)
	Program Penempatan Tenaga Kerja
	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi
	Program Pengawasan Ketenagakerjaan
	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang
	Program Perekonomian Dan Pembangunan
	Program Perencanaan Tenaga Kerja
	<b>PN 4 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas</b>
Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	
Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	
Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	
Program Pembinaan Perpustakaan	
Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	
Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	
Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	
Program Pengelolaan Pendidikan	
Program Pengelolaan Permuseuman	
Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	
Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	
Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	
Program Pengembangan Kebudayaan	
Program Pengendalian Penduduk	
Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	
Program Peningkatan Kualitas Keluarga	
Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan	
Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	
Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang	

Asta Cita / Prioritas Nasional	Program PD
	Program Perlindungan Khusus Anak Program Perlindungan Perempuan Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman
<b>PN 5 Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri</b>	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional Program Pengembangan Ekspor Program Pengendalian Izin Usaha Industri Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen
<b>PN 6 Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan</b>	Program Kesejahteraan Rakyat Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi Program Pemberdayaan Sosial Program Penanganan Bencana Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Program Penataan Bangunan Gedung Program Pengelolaan Ketenagalistrikan Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Program Pengembangan Jasa Konstruksi Program Penyelenggaraan Jalan Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial Program Rehabilitasi Sosial
<b>PN 7 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan</b>	Program Administrasi Pemerintahan Desa Program Kebijakan Dan Pelayanan Pengadaan Barang Dan Jasa Program Kepegawaian Daerah Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya Program Pemerintahan Dan Otonomi Daerah Program Pencatatan Sipil Program Pendaftaran Penduduk Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah Program Pengelolaan Aplikasi Informatika Program Pengelolaan Arsip Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Asta Cita / Prioritas Nasional	Program PD
	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
	Program Pengelolaan Profil Kependudukan
	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan
	Program Penyelenggaraan Pengawasan
	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
	Program Perencanaan Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah
	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi
	Program Pemerintahan Dan Otonomi Daerah
	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	
<b>PN 8 Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur</b>	Program Penanggulangan Bencana
	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran
	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional
	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan

Kemudian sebagai bentuk dukungan terhadap Program Strategis Nasional (PSN) yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2025-2029, Pemerintah Daerah DIY berupaya mendukung pelaksanaan PSN tersebut yang ada di DIY sebagaimana tercantum di tabel berikut.

**Tabel IV-5 Dukungan Program Daerah terhadap Program Strategis Nasional dalam Perubahan RKPd Tahun 2025**

Program Strategis Nasional	No	Program	Anggaran Tahun 2025	Perangkat Daerah
<b>1 Program Makan Bergizi Gratis</b>			<b>35.127.889.138</b>	
	1	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Kegiatan Pengembangan	1.687.954.200	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY

Program Strategis Nasional		No	Program	Anggaran Tahun 2025	Perangkat Daerah
			Kearifan Lokal dan Potensi Budaya Sub Kegiatan Pengembangan Lumbung Mataraman		
		2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Khusus Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	33.316.694.638	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY
		3	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Kegiatan Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya Sub Kegiatan Pengembangan Budaya Bahari	64.429.900	Dinas Kelautan dan Perikanan DIY
		4	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN Kegiatan PEMBINAAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BAGI USAHA PENGOLAHAN DAN PEMASARAN SKALA MENENGAH DAN BESAR Sub Kegiatan Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitas, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	58.810.400	Dinas Kelautan dan Perikanan DIY
<b>2</b>	<b>Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah dan Madrasah yang Berkualitas</b>			<b>28.041.678.941</b>	
		1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	453.600.000	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY
		2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	796.102.000	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY
		3	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	317.132.000	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY

Program Strategis Nasional		No	Program	Anggaran Tahun 2025	Perangkat Daerah
		4	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Sub Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	749.888.000	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY
		5	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium	512.563.000	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY
		6	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Sub Kegiatan Rehabilitasi Ruang Laboratorium	142.073.000	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY
		7	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Sub Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	967.248.000	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY
		8	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Sub Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah	946.958.000	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY
		9	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	9.894.380.141	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY
		10	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	11.298.705.450	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY
		11	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Pengelolaan Pendidikan Khusus Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	1.963.029.350	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY
3	<b>Pembangunan dan Penyelenggaraan Sekolah Unggul</b>	-	-	-	-
4				<b>219.845.100</b>	

Program Strategis Nasional	No	Program	Anggaran Tahun 2025	Perangkat Daerah
<b>Pembangunan Rumah Sakit Lengkap Berkualitas di Kabupaten /Kota</b>	1	Program: PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Kegiatan: Penyediaan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Subkegiatan: Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	155.066.000	Dinas Kesehatan DIY
	2	Program: PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Kegiatan: Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Subkegiatan: Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	14.654.500	Dinas Kesehatan DIY
	3	Program: PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Kegiatan: Penyediaan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Subkegiatan: Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	50.124.600	Dinas Kesehatan DIY
<b>5</b>	<b>Program Penuntasan TBC</b>		<b>33.603.883.967</b>	
	1	Program: PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Kegiatan: Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Subkegiatan: Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	3.881.504.150	Dinas Kesehatan DIY
	2	Program: PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Kegiatan: Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Subkegiatan: Pengembangan Rumah Sakit [RS Paru Respira]	3.505.514.000	Dinas Kesehatan DIY

Program Strategis Nasional		No	Program	Anggaran Tahun 2025	Perangkat Daerah
		3	Program: PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Kegiatan: Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Subkegiatan: Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan [RS Paru Respira]	1.500.000.000	Dinas Kesehatan DIY
		4	Program: PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Kegiatan: Peningkatan Pelayanan BLUD Subkegiatan: Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD [RS Paru Respira]	24.716.865.817	Dinas Kesehatan DIY
<b>6</b>	<b>Ketahanan Pangan Melalui Perhutanan Berbasis Masyarakat</b>			<b>958.953.200</b>	
		1	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan Sub Kegiatan Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	108.735.000	Dinas LHK DIY
		2	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	48.363.000	Dinas LHK DIY
		3	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA Kegiatan Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA Provinsi	92.862.800	Dinas LHK DIY

Program Strategis Nasional		No	Program	Anggaran Tahun 2025	Perangkat Daerah
		4	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN Kegiatan Perbenihan Tanaman Hutan Sub Kegiatan Pembangunan Sumber Benih	219.418.200	Dinas LHK DIY
		5	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN Kegiatan Perbenihan Tanaman Hutan Sub Kegiatan Pengelolaan Sumber Benih	219.418.200	Dinas LHK DIY
		6	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	270.156.000	Dinas LHK DIY
<b>7</b>	<b>Layanan Irigasi Pendukung Lumbung Pangan Nasional</b>			<b>21.044.418.350</b>	
		1	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	2.685.566.500	Dinas PUPESDM DIY
		2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	1.839.700.000	Dinas PUPESDM DIY
		3	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	8.784.195.850	Dinas PUPESDM DIY
		4	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	1.520.700.000	Dinas PUPESDM DIY

Program Strategis Nasional		No	Program	Anggaran Tahun 2025	Perangkat Daerah
		5	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	193.000.000	Dinas PUPESDM DIY
		6	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air di Daerah Irigasi	24.856.000	Dinas PUPESDM DIY
		7	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Kegiatan Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya Sub Kegiatan Pengembangan Lumbung Mataraman	5.996.400.000	Dinas PUPESDM DIY
<b>8</b>	<b>Peningkatan Produksi Daging Sapi dan Susu Sapi</b>			<b>504.824.000</b>	
		1	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Kegiatan Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya Sub Kegiatan Pengembangan Lumbung Mataraman	504.824.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY
<b>9</b>	<b>Bioethanol (Berbasis Tebu)</b>	-	-	-	-
<b>10</b>	<b>Program Pengembangan Industri Dirgantara: Pengembangan N219 Amfibi</b>	-	-	-	
<b>11</b>	<b>Pengembangan Layanan Digital Pemerintah Terpadu</b>			<b>23.706.165.900</b>	
		1	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Kegiatan Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan Sub Kegiatan Pembangunan	23.706.165.900	Dinas Komunikasi dan Informatika DIY

Program Strategis Nasional		No	Program	Anggaran Tahun 2025	Perangkat Daerah
			Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital		
<b>12</b>	<b>Penyediaan Peta Dasar Skala Besar (1:5.000) seluruh Wilayah Indonesia</b>			<b>7.115.351.800</b>	
		1	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN Kegiatan Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten Subkegiatan Pengembangan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Pertanahan	7.115.351.800	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
<b>13</b>	<b>Pembangunan 3 Juta Rumah</b>			<b>4.748.200.000</b>	
		1	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Kegiatan Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya	4.748.200.000	Dinas PUPESDM DIY

Sejalan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, pada diktum Kedelapan mengamanatkan kepada Daerah Istimewa Yogyakarta untuk melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD DIY Tahun 2022-2027 untuk memastikan keselarasan dengan muatan RPJPD DIY Tahun 2025-2045 dan RPJMN Tahun 2025-2029. Untuk itu, telah dilakukan penyelarasan terhadap indikator-indikator yang tercantum dalam RPJPD DIY Tahun 2025-2045 dan RPJMN Tahun 2025-2029. Penyelarasan indikator-indikator tersebut di tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel IV-6 Penyelarasan Kinerja Tahun 2025 (Indikator Sasaran Pembangunan) Terhadap RPJPD DIY Tahun 2025-2045 dan RPJMN Tahun 2025-2029**

No	Indikator Sasaran Pembangunan	Penyelarasan Target Tahun 2025
<b>1</b>	<b>Peningkatan pendapatan per kapita</b>	
	a. PDRB per kapita (Rp Juta)	52,88-55,1
	b. Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI)	10,11
	c. Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)	11,89-12,00
<b>2</b>	<b>Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan</b>	
	a. Tingkat Kemiskinan (%)	10,00 - 10,50
	b. Rasio gini (Indeks)	0,443 - 0,447
	c. Kontribusi PDRB Provinsi (%)	0,88-0,9
	d. Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,3 - 5,8

No	Indikator Sasaran Pembangunan	Penyelarasan Target Tahun 2025
3	<b>Kepercayaan Dunia Internasional</b>	
	Indeks Daya Saing Daerah	3,89-3,95
4	<b>Peningkatan daya saing Sumber daya manusia</b>	
	Indeks Modal Manusia	0,71-0,75
5	<b>Penurunan emisi GRK menuju net zero emission</b>	
	a. Penurunan intensitas emisi GRK (%)	62,14
	b. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	70,49

**Tabel IV-7 Penyelarasan Kinerja Tahun 2025 (Indikator Utama Pembangunan) Terhadap RPJPD DIY Tahun 2025-2045 dan RPJMN Tahun 2025-2029**

No.	Indikator Utama Pembangunan	Penyelarasan Tahun 2025
<b>Misi 1</b>	<b>Meningkatkan Kualitas Hidup, Kehidupan dan Penghidupan Masyarakat melalui Transformasi Sosial untuk Mewujudkan Pendidikan Berkualitas, Kesehatan untuk Semua, termasuk di Dalamnya Lingkungan Hidup dan Permukiman yang Berkualitas dan Kesejahteraan Sosial</b>	
<b>IE1</b>	<b>Terwujudnya Kesehatan untuk Masyarakat</b>	
1	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	75,59
2	Kesehatan Ibu dan Anak:	
	a. Angka kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	30,00
	b. Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	16,10
3	Penanganan Tuberkulosis:	
	a. Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) (%)	71,00-95,00
	b. Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) (%)	88,40
4	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (%)	98,00-98,60
<b>IE2</b>	<b>Meningkatnya Pendidikan yang Berkualitas dan Merata</b>	
5	Hasil pembelajaran	
	a) Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:	
	i) Literasi Membaca	80,00-100,00
	ii) Numerasi	40,00-80,00
	b) Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:	
	i) Literasi Membaca	79,35-87,03
	ii) Numerasi	62,86-79,85
	c) Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	10,49-10,51

No.	Indikator Utama Pembangunan	Penyelarasan Tahun 2025
	d) Harapan Lama Sekolah (tahun)	15,97 – 15,99
6	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	16,50
7	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)	68,24
<b>IE3</b>	<b>Terwujudnya Perlindungan Sosial yang Adaptif</b>	
8	Tingkat Kemiskinan (%)	10,00 - 10,50
9	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi (%)	37,50
10	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)	26,00
<b>Misi 2</b>	<b>Meningkatkan Produktivitas Ekonomi yang Menitikberatkan pada Peningkatan Inovasi dan Kreativitas, Pemanfaatan IPTEK, Pengembangan Ekonomi Budaya dan Peningkatan Kualitas Produk melalui Transformasi Ekonomi dengan Menempatkan Kawasan Selatan sebagai Kawasan Prioritas Pertumbuhan</b>	
<b>IE4</b>	<b>Meningkatnya Penggunaan Iptek, Penerapan Inovasi dan Produktivitas Ekonomi</b>	
11	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	11,89-12,00
12	Pengembangan Pariwisata	
	a. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)*	10,37
	b. Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang) (Ribu Orang)*	237,59
13	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif (%)	0,94
14	Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD	
	a. (ii) Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Provinsi (%)	4,50
	b. Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	3,77
	c. Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	2,63
	d. Return on Aset (ROA) BUMD (%)*	1,90
15	Penciptaan Lapangan Pekerjaan yang Baik	
	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,12 – 3,51
16	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	67,00 - 69,60
17	Tingkat penguasaan IPTEK	
	Skor Indeks Inovasi Daerah Disesuaikan dengan karakteristik daerah, dalam rumpun Arah Pembangunan (IE) yang sama	50,34
<b>IE5</b>	<b>Meningkatnya Penerapan Ekonomi Hijau</b>	
18	Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau	
	a. Indeks Ekonomi Hijau Daerah	58,33
	b. Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)	8,94
<b>IE6</b>	<b>Meningkatnya Peran Transformasi Digital</b>	
19	Indeks Pembangunan Teknologi informasi dan Komunikasi	7,40
<b>IE7</b>	<b>Menurunnya Ketimpangan melalui Integrasi Ekonomi Domestik dan Global</b>	

No.	Indikator Utama Pembangunan	Penyelarasan Tahun 2025
20	Koefisien Variasi Harga Antarwilayah Tingkat Provinsi	5,20-5,65
21	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	33,4
22	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	7,00
<b>IE8</b>	<b>Meningkatnya Peran Perkotaan dan Pedesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi</b>	
23	Kota dan Desa Maju, Inklusif, dan Berkelanjutan	
	a. Kontribusi PDRB Kabupaten Gunungkidul, Kulon Progo dan Bantul terhadap PDRB DIY	40,13
	b. Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)	90,10
	c. Persentase Desa Mandiri (%)	45,92-65,56
<b>Misi 3</b>	<b>Mewujudkan Lingkungan Kelembagaan yang Memungkinkan Tercapainya Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif Melalui Transformasi Tata Kelola untuk Memastikan Ketaatan Azas, Kelembagaan yang Efektif, Proses Bisnis yang Adaptif, Aparatur yang Berintegritas, Pelayanan Publik yang Berkualitas dan Inklusif, Transformasi Digital, Integritas Partai Politik Serta Relasi yang Baik Antara Pemerintah dan Masyarakat Sipil</b>	
<b>IE9</b>	<b>Terwujudnya Regulasi dan Tata Kelola yang berintegritas dan adaptif</b>	
24	Indeks Reformasi Hukum	84,00-96,64
25	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	4,30-4,35
26	Indeks Pelayanan Publik	4,64
27	Indeks Integritas Nasional	81,37
<b>Misi 4</b>	<b>Menciptakan Kondisi Stabilitas Keamanan, Demokrasi Substansial, dan Ekonomi Makro yang Tangguh melalui Penguatan Penegakan Hukum dan Kehidupan yang Dilandasi Moral serta Etika Luhur</b>	
<b>IE10</b>	<b>Terwujudnya Supremasi Hukum yang Berkeadilan, Keamanan Daerah yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial (nomenklatur dapat disesuaikan dengan karakteristik daerah)</b>	
28	Persentase Capaian Pelaksanaan Aksi HAM	70,00
29	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%)	74,87-79,50
30	Indeks Demokrasi Indonesia	83,88-87,31
<b>IE11</b>	<b>Meningkatnya Stabilitas Ekonomi Makro Daerah (nomenklatur dapat disesuaikan dengan karakteristik daerah)</b>	
31	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	2,77
32	Tingkat Inflasi (%)	3,10-3,70
33	Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan	
	a. Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%) *	44,41-46,09
	b. Aset Dana Pensiun/PDRB (%)	0,67
	c. Total Kredit/PDRB (%)	28,80
34	Inklusi Keuangan (%)	88,46

No.	Indikator Utama Pembangunan	Penyelarasan Tahun 2025
<b>IE12</b>	<b>Terciptanya Ketangguhan Diplomasi dan Berdaya Gentar Kawasan (nomenklatur dapat diganti/disesuaikan dengan karakteristik daerah dengan tetap serumpun dengan IE)</b>	
35	Jumlah Kerja Sama Provinsi dengan daerah lain di luar negeri (sister province)	6
36	<i>Crime Rate</i>	120,50
<b>Misi 5</b>	<b>Meningkatkan Kualitas Tata Ruang dan Pemukiman, Ketahanan Ekologi dan Pembangunan Kebudayaan yang Merespon Dinamika Perubahan dan Tekanan</b>	
<b>IE13</b>	<b>Terciptanya Keragaman Agama yang ber-Maslahat dan Pemajuan Budaya</b>	
37	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	69,40-69,63
38	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	79,03-80,37
<b>IE14</b>	<b>Terwujudnya Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif</b>	
39	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	76,17-82,52
40	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,126-0,140
<b>IE15</b>	<b>Terciptanya Kondisi Lingkungan Hidup yang Berkualitas</b>	
41	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	0,62
42	Kualitas Lingkungan Hidup	
	a. Indeks kualitas lingkungan hidup	70,49
	b. Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%)	16,23-20,00
	c. Pengelolaan Sampah	
	- Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	19,00
	- Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)	40,00
<b>IE16</b>	<b>Terwujudnya Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan</b>	
43	Ketahanan energi, air, dan pangan	
	a. Ketahanan Energi	
	- Konsumsi Listrik per Kapita (kWh)*	1,045
	- Intensitas energi primer (SBM/Rp milyar)	
	b. Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) (%)	9,06
	c. Ketahanan Air	
	- Kapasitas Air Baku (m3/detik)*	2,40
	- Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	17,88 - 33,99
<b>IE17</b>	<b>Terciptanya Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim</b>	
44	Indeks Risiko Bencana (IRB)	91,89
45	Persentase Penurunan Emisi GRK (%)	
	a. Kumulatif	4,06

No.	Indikator Utama Pembangunan	Penyelarasan Tahun 2025
	b. Tahunan	12,49

**Tabel IV-8 Penyelarasan Arah Kebijakan RPJMN Tahun 2025-2029 dalam RPJMD DIY Tahun 2022-2027**

RPJMN Tahun 2025-2029		RPJMD DIY Tahun 2022-2027		
No	Arah Pembangunan Kewilayahan	No	Strategi	Arah Kebijakan
1	Pengembangan dan penataan kawasan perkotaan Yogyakarta, antara lain melalui: - Penyusunan masterplan penataan kawasan perkotaan dan rencana tata ruang yang mengintegrasikan potensi dan masalah perkotaan secara terpadu. - Pemenuhan layanan dasar air minum, penanganan limbah, dan penyediaan ruang terbuka hijau. - Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan/pelatihan tenaga kerja yang terintegrasi dengan sektor ketenagakerjaan. - Penataan permukiman kumuh terpadu perkotaan.	1	Mengembangkan pusat-pusat kegiatan ekonomi baru berbasis sumber daya lokal dengan pemanfaatan teknologi	Pemanfaatan sumber daya lokal dengan optimalisasi penggunaan teknologi. Peningkatan pemasaran produk-produk unggulan lokal Penumbuhan semangat kewirausahaan dan pengembangan <i>start up business</i> . Pemanfaatan tanah kas desa untuk meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat.
		2	Meningkatkan pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang	1. Mempercepat penyusunan dan penetapan rencana tata ruang, 2. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang untuk memitigasi perubahan tata ruang yang tidak sesuai dengan peruntukannya; 3. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan pemanfaatan tanah kasultanan, tanah kadipaten dan tanah kas desa
		3	Meningkatkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat serta ramah lingkungan	1. Meningkatkan akses Air bersih dan sanitasi Layak dan Aman 2. Menyediakan Rumah Layak Huni dan Aman dengan prioritas Masyarakat Berpenghasilan Rendah
2	Pembangunan rumah murah bersanitasi baik bagi pekerja, MBR, Gen Z, dan milenial.	1	Meningkatkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat serta ramah lingkungan	1. Meningkatkan akses Air bersih dan sanitasi Layak dan Aman 2. Menyediakan Rumah Layak Huni dan Aman dengan prioritas Masyarakat Berpenghasilan Rendah
3	Pembangunan TPST Regional Yogyakarta.	1	Pembangunan yang memperhatikan kelestarian lingkungan	1. Mengembangkan teknologi yang ramah lingkungan 2. Meningkatkan konservasi sumber daya alam dan rehabilitasi lahan kritis 3. Mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan

RPJMN Tahun 2025-2029		RPJMD DIY Tahun 2022-2027		
No	Arah Pembangunan Kewilayahan	No	Strategi	Arah Kebijakan
		2	Meningkatkan perilaku dan budaya ramah lingkungan untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan	Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat berperilaku dan berbudaya ramah lingkungan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan
4	Pengembangan SPAM Regional Kawasan Perkotaan Yogyakarta	1	Meningkatkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat serta ramah lingkungan	Meningkatkan akses Air bersih dan sanitasi Layak dan Aman
5	Pengembangan SPAL Regional Kawasan Perkotaan Yogyakarta	1	Meningkatkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat serta ramah lingkungan	Meningkatkan akses Air bersih dan sanitasi Layak dan Aman
6	Pengembangan sekolah menengah unggulan terintegrasi di kawasan perkotaan Yogyakarta (PHTC)	1	Mengembangkan pusat-pusat kegiatan ekonomi baru berbasis sumber daya lokal dengan pemanfaatan teknologi	Pemanfaatan sumber daya lokal dengan optimalisasi penggunaan teknologi
7	Pembangunan Jalan Tol Yogyakarta-Klaten-Kartasura	1	Mengembangkan pusat-pusat ekonomi baru dan komoditas ekonomi berbasis sumber daya lokal yang berdaya saing dengan didukung penyediaan Infrastruktur di wilayah selatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengembangkan pusat-pusat kegiatan ekonomi baru pada wilayah selatan secara terpadu dan lintas sektor</li> <li>2. Mengembangkan transportasi dan infrastruktur untuk meningkatkan aksesibilitas di wilayah selatan</li> <li>3. Menyediakan ruang dan infrastruktur pada kawasan perbatasan dan kawasan tertinggal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi</li> </ol>
8	Pembangunan Jalan Tol Yogyakarta-Magelang-Bawen	1	Mengembangkan pusat-pusat ekonomi baru dan komoditas ekonomi berbasis sumber daya lokal yang berdaya saing dengan didukung penyediaan Infrastruktur di wilayah selatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyediakan ruang dan infrastruktur pada kawasan perbatasan dan kawasan tertinggal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi</li> </ol>
9	Pembangunan Jalan Tol Yogyakarta-Kulon Progo (YIA)	1	Mengembangkan pusat-pusat ekonomi baru dan komoditas ekonomi berbasis sumber daya lokal yang berdaya saing dengan didukung penyediaan Infrastruktur di wilayah selatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengembangkan pusat-pusat kegiatan ekonomi baru pada wilayah selatan secara terpadu dan lintas sektor</li> <li>2. Mengembangkan transportasi dan infrastruktur untuk meningkatkan aksesibilitas di wilayah selatan</li> <li>3. Menyediakan ruang dan infrastruktur pada kawasan perbatasan dan kawasan tertinggal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi</li> </ol>

RPJMN Tahun 2025-2029		RPJMD DIY Tahun 2022-2027		
No	Arah Pembangunan Kewilayahan	No	Strategi	Arah Kebijakan
10	Urban Renewal Kota Tua Yogyakarta, Kotagede dan Revitalisasi Keraton Yogyakarta, Pura Pakualaman, dan Kawasan Sumbu Filosofi Yogyakarta	1	Meningkatkan pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mempercepat penyusunan dan penetapan rencana tata ruang,</li> <li>Meningkatkan pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang untuk memitigasi perubahan tata ruang yang tidak sesuai dengan peruntukannya;</li> <li>Meningkatkan pengendalian dan pengawasan pemanfaatan tanah kasultanan, tanah kadipaten dan tanah kas desa</li> </ol>
11	Pengembangan World Class Research University Berbasis Potensi Wilayah pada Universitas Gadjah Mada dan Insitut Seni Indonesia Yogyakarta	1	Meningkatkan kemitraan multisektor dan multi stakeholder dalam rangka pengembangan pengetahuan, perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan penyediaan pelayanan publik (infrastruktur, kesehatan, pendidikan) yang mendukung pembangunan kawasan selatan	Meningkatkan kemitraan multisektor dan multi stakeholder untuk pengembangan pengetahuan, perlindungan sosial, kesetaraan gender, dan pemberdayaan masyarakat, dan penyediaan pelayanan publik (infrastruktur, kesehatan, pendidikan) terutama bagi kelompok sasaran penanggulangan kemiskinan, kelompok rentan dan kelompok marjinal lainnya
12	Peningkatan/ preservasi jalan ruas Yogyakarta-Bantul-Parangtritis, Yogyakarta-Kaliurang, Yogyakarta-Wonosari-Semanu-Pracimantoro	1	Mengembangkan pusat pusat ekonomi baru dan komoditas ekonomi berbasis sumber daya lokal yang berdaya saing dengan didukung penyediaan Infrastruktur di wilayah selatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mengembangkan pusat-pusat kegiatan ekonomi baru pada wilayah selatan secara terpadu dan lintas sektor</li> <li>Mengembangkan transportasi dan infrastruktur untuk meningkatkan aksesibilitas di wilayah selatan</li> <li>Menyediakan ruang dan infrastruktur pada kawasan perbatasan dan kawasan tertinggal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi</li> </ol>
13	Pengembangan Kawasan Aerotropolis YIA (Yogyakarta International Airport)	1	Mengembangkan pusat pusat ekonomi baru dan komoditas ekonomi berbasis sumber daya lokal yang berdaya saing dengan didukung penyediaan Infrastruktur di wilayah selatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mengembangkan pusat-pusat kegiatan ekonomi baru pada wilayah selatan secara terpadu dan lintas sektor</li> <li>Mengembangkan transportasi dan infrastruktur untuk meningkatkan aksesibilitas di wilayah selatan</li> <li>Menyediakan ruang dan infrastruktur pada kawasan perbatasan dan kawasan tertinggal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi</li> </ol>

RPJMN Tahun 2025-2029		RPJMD DIY Tahun 2022-2027		
No	Arah Pembangunan Kewilayahan	No	Strategi	Arah Kebijakan
14	Peningkatan 6A Pariwisata, terutama pada hotspot pariwisata, antara lain: - Percandian Prambanan-Sewu - Keraton Ratu Boko - Kaliurang-Merapi - Pantai Selatan Bantul-Kulon Progo - Perbukitan Menoreh - Geopark Gunung Sewu, termasuk pantai-pantai dan sistem geomorfologi karst Gunungkidul - Kasongan-Selarong - Imogiri	1	Mengembangkan pusat-pusat kegiatan ekonomi baru berbasis sumber daya lokal dengan pemanfaatan teknologi	1. Pemanfaatan sumber daya lokal dengan optimalisasi penggunaan teknologi 2. Peningkatan pemasaran produk-produk unggulan lokal 3. Penumbuhan semangat kewirausahaan dan pengembangan start up business 4. Pemanfaatan tanah kas desa untuk meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat
15	Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah pusat, anatara lain pada D.I. Karangtalun, D.I. Kalibawang, dan D.I. Progo Manggis-Kalibening.	1	Mengembangkan pusat pusat ekonomi baru dan komoditas ekonomi berbasis sumber daya lokal yang berdaya saing dengan didukung penyediaan Infrastruktur di wilayah selatan	1. Mengembangkan pusat-pusat kegiatan ekonomi baru pada wilayah selatan secara terpadu dan lintas sektor 2. Menyediakan ruang dan infrastruktur pada kawasan perbatasan dan kawasan tertinggal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi
16	Rehabilitasi dan Peningkatan jaringan irigasi kewenangan Pemerintah Daerah	1	Mengembangkan pusat pusat ekonomi baru dan komoditas ekonomi berbasis sumber daya lokal yang berdaya saing dengan didukung penyediaan Infrastruktur di wilayah selatan	1. Mengembangkan pusat-pusat kegiatan ekonomi baru pada wilayah selatan secara terpadu dan lintas sektor 2. Menyediakan ruang dan infrastruktur pada kawasan perbatasan dan kawasan tertinggal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi
17	Peningkatan daya guna lahan pertanian (intensifikasi)	1	Mengembangkan pusat-pusat kegiatan ekonomi baru berbasis sumber daya lokal dengan pemanfaatan teknologi	1. Pemanfaatan sumber daya lokal dengan optimalisasi penggunaan teknologi 2. Pemanfaatan tanah kas desa untuk meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat
		2	Mengembangkan pusat pusat ekonomi baru dan komoditas ekonomi berbasis sumber daya lokal yang berdaya saing dengan didukung penyediaan Infrastruktur di wilayah selatan	1. Mengembangkan pusat-pusat kegiatan ekonomi baru pada wilayah selatan secara terpadu dan lintas sektor 2. Meningkatkan produktifitas penggunaan sumber daya alam lokal
		3	Pembangunan yang memperhatikan kelestarian lingkungan	1. Mengembangkan teknologi yang ramah lingkungan 2. Mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan
18	Peningkatan produktivitas peternakan/pangan hewani (termasuk pengembangan kawasan peternakan)	1	Mengembangkan pusat-pusat kegiatan ekonomi baru berbasis sumber daya lokal dengan pemanfaatan teknologi	1. Pemanfaatan sumber daya lokal dengan optimalisasi penggunaan teknologi 2. Pemanfaatan tanah kas desa untuk meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat
		2	Mengembangkan pusat pusat ekonomi baru dan komoditas ekonomi	1. Mengembangkan pusat-pusat kegiatan ekonomi baru pada wilayah selatan secara terpadu dan lintas sektor

RPJMN Tahun 2025-2029		RPJMD DIY Tahun 2022-2027		
No	Arah Pembangunan Kewilayahan	No	Strategi	Arah Kebijakan
			berbasis sumber daya lokal yang berdaya saing dengan didukung penyediaan Infrastruktur di wilayah selatan	2. Meningkatkan produktifitas penggunaan sumber daya alam lokal
19	Pengembangan dan peningkatan produktivitas holtikultura	1	Mengembangkan pusat-pusat kegiatan ekonomi baru berbasis sumber daya lokal dengan pemanfaatan teknologi	1. Pemanfaatan sumber daya lokal dengan optimalisasi penggunaan teknologi 2. Pemanfaatan tanah kas desa untuk meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat
		2	Mengembangkan pusat-pusat ekonomi baru dan komoditas ekonomi berbasis sumber daya lokal yang berdaya saing dengan didukung penyediaan Infrastruktur di wilayah selatan	1. Mengembangkan pusat-pusat kegiatan ekonomi baru pada wilayah selatan secara terpadu dan lintas sektor 2. Meningkatkan produktifitas penggunaan sumber daya alam lokal
		3	Pembangunan yang memperhatikan kelestarian lingkungan	1. Mengembangkan teknologi yang ramah lingkungan 2. Mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan
20	Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian tanaman pangan, peternakan, dan holtikultura	1	Mengembangkan pusat-pusat kegiatan ekonomi baru berbasis sumber daya lokal dengan pemanfaatan teknologi	1. Pemanfaatan sumber daya lokal dengan optimalisasi penggunaan teknologi 2. Pemanfaatan tanah kas desa untuk meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat
		2	Mengembangkan pusat-pusat ekonomi baru dan komoditas ekonomi berbasis sumber daya lokal yang berdaya saing dengan didukung penyediaan Infrastruktur di wilayah selatan	1. Mengembangkan pusat-pusat kegiatan ekonomi baru pada wilayah selatan secara terpadu dan lintas sektor 2. Meningkatkan produktifitas penggunaan sumber daya alam lokal
		3	Pembangunan yang memperhatikan kelestarian lingkungan	1. Mengembangkan teknologi yang ramah lingkungan 2. Mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan
21	Konservasi sumber daya air melalui rehabilitasi hutan dan lahan pada catchment area, terutama pada DAS Serang, DAS Progo Tengah-Hilir, DAS Opak dan DAS Bribin	1	Pembangunan yang memperhatikan kelestarian lingkungan	Meningkatkan konservasi sumber daya alam dan rehabilitasi lahan kritis
22	Pembangunan Bendungan Karangtalun	1	Mengembangkan pusat-pusat ekonomi baru dan komoditas ekonomi berbasis sumber daya lokal yang berdaya saing dengan didukung penyediaan Infrastruktur di wilayah selatan	1. Mengembangkan pusat-pusat kegiatan ekonomi baru pada wilayah selatan secara terpadu dan lintas sektor 2. Menyediakan ruang dan infrastruktur pada kawasan perbatasan dan kawasan tertinggal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi

RPJMN Tahun 2025-2029		RPJMD DIY Tahun 2022-2027		
No	Arah Pembangunan Kewilayahan	No	Strategi	Arah Kebijakan
23	Pengelolaan dan pengembangan lahan pertanian berkelanjutan antara lain melalui kebijakan tata ruang untuk perlindungan lahan pertanian, reforma agraria, redistribusi, dan konsolidasi lahan pertanian, optimalisasi dan revitalisasi lahan pertanian, dan peningkatan penggunaan pupuk/pestisida/pakan organik.	1	Mengembangkan pusat-pusat kegiatan ekonomi baru berbasis sumber daya lokal dengan pemanfaatan teknologi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemanfaatan sumber daya lokal dengan optimalisasi penggunaan teknologi</li> <li>2. Pemanfaatan tanah kas desa untuk meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat</li> </ol>
		2	Mengembangkan pusat-pusat ekonomi baru dan komoditas ekonomi berbasis sumber daya lokal yang berdaya saing dengan didukung penyediaan Infrastruktur di wilayah selatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengembangkan pusat-pusat kegiatan ekonomi baru pada wilayah selatan secara terpadu dan lintas sektor</li> <li>2. Meningkatkan produktifitas penggunaan sumber daya alam lokal</li> </ol>
		3	Pembangunan yang memperhatikan kelestarian lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengembangkan teknologi yang ramah lingkungan</li> <li>2. Mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan</li> </ol>
24	Peningkatan produktivitas melalui intensifikasi dan peningkatan prasarana produksi, antara lain melalui: penyediaan dan perluasan akses alsintan modern/ benih dan bibit berkualitas/ pupuk dan pestisida berkualitas; mitigasi OPT dan kesehatan hewan; peningkatan infrastruktur konektivitas transportasi dan digital bagi petani; peningkatan kualitas pascapanen melalui peningkatan prasarana pascapanen.	1	Mengembangkan pusat-pusat kegiatan ekonomi baru berbasis sumber daya lokal dengan pemanfaatan teknologi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemanfaatan sumber daya lokal dengan optimalisasi penggunaan teknologi</li> <li>2. Peningkatan pemasaran produk-produk unggulan lokal</li> <li>3. Pemanfaatan tanah kas desa untuk meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat</li> </ol>
		2	Mengembangkan pusat-pusat ekonomi baru dan komoditas ekonomi berbasis sumber daya lokal yang berdaya saing dengan didukung penyediaan Infrastruktur di wilayah selatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengembangkan pusat-pusat kegiatan ekonomi baru pada wilayah selatan secara terpadu dan lintas sektor</li> <li>2. Meningkatkan produktifitas penggunaan sumber daya alam lokal</li> </ol>
		3	Pembangunan yang memperhatikan kelestarian lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengembangkan teknologi yang ramah lingkungan</li> <li>2. Mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan</li> </ol>
25	Peningkatan manajemen usaha tani, perluasan akses pasar dan pembiayaan usaha tani, perluasan akses asuransi usaha tani, serta pengendalian kepastian pasar, anatar lain melalui: peningkatan literasi keuangan petani dan penguatan manajemen poktan/gapoktan; penguatan kelembagaan koperasi dan koperasi petani;	1	Mengembangkan pusat-pusat kegiatan ekonomi baru berbasis sumber daya lokal dengan pemanfaatan teknologi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemanfaatan sumber daya lokal dengan optimalisasi penggunaan teknologi</li> <li>2. Peningkatan pemasaran produk-produk unggulan lokal</li> <li>3. Penumbuhan semangat kewirausahaan dan pengembangan start up business</li> <li>4. Pemanfaatan tanah kas desa untuk meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat</li> </ol>

RPJMN Tahun 2025-2029		RPJMD DIY Tahun 2022-2027		
No	Arah Pembangunan Kewilayahan	No	Strategi	Arah Kebijakan
	pembiayaan dana bergulir dan kredit lunak petani; perluasan akses asuransi usaha tani; peningkatan infrastruktur logistik dan perluasan akses layanan sistem resi gudang; pengelolaan dan pengendalian penyerapan hasil panen komoditas pangan utama.			
		2	Mengembangkan pusat-pusat ekonomi baru dan komoditas ekonomi berbasis sumber daya lokal yang berdaya saing dengan didukung penyediaan Infrastruktur di wilayah selatan	1. Mengembangkan pusat-pusat kegiatan ekonomi baru pada wilayah selatan secara terpadu dan lintas sektor 2. Meningkatkan produktifitas penggunaan sumber daya alam lokal
		3	Pembangunan yang memperhatikan kelestarian lingkungan	1. Mengembangkan teknologi yang ramah lingkungan 2. Mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan
26	Pengembangan pusat/laboratorium riset pertanian skala lokal dalam rangka pengembangan varietas unggul dan budidaya lokal, peningkatan produktivitas petani, serta penguatan implementasi hasil riset pertanian.	1	1. Mengembangkan pusat-pusat kegiatan ekonomi baru berbasis sumber daya lokal dengan pemanfaatan teknologi	Pemanfaatan sumber daya lokal dengan optimalisasi penggunaan teknologi
		2	Pembangunan yang memperhatikan kelestarian lingkungan	Mengembangkan teknologi yang ramah lingkungan
27	Penyediaan infrastuktur layanan dasar (air baku, air minum, dan sanitasi, listrik, serta rumah layak huni), serta peningkatan ketahanan air, energi dan pangan	1	Meningkatkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat serta ramah lingkungan	1. Meningkatkan akses Air bersih dan sanitasi Layak dan Aman 2. Menyediakan Rumah Layak Huni dan Aman dengan prioritas Masyarakat Berpenghasilan Rendah
		2	Pembangunan yang memperhatikan kelestarian lingkungan	1. Mengembangkan teknologi yang ramah lingkungan 2. Meningkatkan konservasi sumber daya alam dan rehabilitasi lahan kritis 3. Mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan
28	Pembangunan rumah murah bersanitasi baik bagi pekerja, MBR, GenZ dan milenial di kawasan perkotaan Wonosari (PHTC)	1	Meningkatkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat serta ramah lingkungan	1. Meningkatkan akses Air bersih dan sanitasi Layak dan Aman 2. Menyediakan Rumah Layak Huni dan Aman dengan prioritas Masyarakat Berpenghasilan Rendah
29	Pengembangan SPAM Kawasan Perkotaan Wonosari	1	Meningkatkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat serta ramah lingkungan	1. Meningkatkan akses Air bersih dan sanitasi Layak dan Aman

RPJMN Tahun 2025-2029		RPJMD DIY Tahun 2022-2027		
No	Arah Pembangunan Kewilayahan	No	Strategi	Arah Kebijakan
30	Pemberdayaan aktivitas ekonomi high value unggulan; pertanian hortikultura dan peternakan	1	Mengembangkan pusat-pusat kegiatan ekonomi baru berbasis sumber daya lokal dengan pemanfaatan teknologi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemanfaatan sumber daya lokal dengan optimalisasi penggunaan teknologi</li> <li>2. Peningkatan pemasaran produk-produk unggulan lokal</li> <li>3. Penumbuhan semangat kewirausahaan dan pengembangan start up business</li> </ol>
		2	Mengembangkan pusat-pusat ekonomi baru dan komoditas ekonomi berbasis sumber daya lokal yang berdaya saing dengan didukung penyediaan Infrastruktur di wilayah selatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengembangkan pusat-pusat kegiatan ekonomi baru pada wilayah selatan secara terpadu dan lintas sektor</li> <li>2. Mengembangkan transportasi dan infrastruktur untuk meningkatkan aksesibilitas di wilayah selatan</li> <li>3. Menyediakan ruang dan infrastruktur pada kawasan perbatasan dan kawasan tertinggal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi</li> <li>4. Meningkatkan kapasitas dan daya saing sumber daya manusia</li> </ol>
		3	Pembangunan yang memperhatikan kelestarian lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengembangkan teknologi yang ramah lingkungan</li> <li>2. Mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan</li> </ol>
31	Peningkatan 6A pariwisata di Geopark Gunung Sewu, termasuk pantai-pantai dan sistem geomorfologi karst Gunungkidul	1	Mengembangkan pusat-pusat kegiatan ekonomi baru berbasis sumber daya lokal dengan pemanfaatan teknologi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemanfaatan sumber daya lokal dengan optimalisasi penggunaan teknologi</li> <li>2. Peningkatan pemasaran produk-produk unggulan lokal</li> <li>3. Penumbuhan semangat kewirausahaan dan pengembangan start up business</li> </ol>
		2	Mengembangkan pusat-pusat ekonomi baru dan komoditas ekonomi berbasis sumber daya lokal yang berdaya saing dengan didukung penyediaan Infrastruktur di wilayah selatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengembangkan pusat-pusat kegiatan ekonomi baru pada wilayah selatan secara terpadu dan lintas sektor</li> <li>2. Mengembangkan transportasi dan infrastruktur untuk meningkatkan aksesibilitas di wilayah selatan</li> <li>3. Menyediakan ruang dan infrastruktur pada kawasan perbatasan dan kawasan tertinggal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi</li> <li>4. Meningkatkan kapasitas dan daya saing sumber daya manusia</li> </ol>
		3	Pembangunan yang memperhatikan kelestarian lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengembangkan teknologi yang ramah lingkungan</li> <li>2. Mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan</li> </ol>
32	Pembangunan Jalan Lintas Selatan Bantul-Gunungkidul-Wonogiri	1	Mengembangkan pusat-pusat ekonomi baru dan komoditas ekonomi berbasis sumber daya lokal yang berdaya saing dengan didukung penyediaan Infrastruktur di wilayah selatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengembangkan pusat-pusat kegiatan ekonomi baru pada wilayah selatan secara terpadu dan lintas sektor</li> <li>2. Mengembangkan transportasi dan infrastruktur untuk meningkatkan aksesibilitas di wilayah selatan</li> <li>3. Menyediakan ruang dan infrastruktur pada kawasan perbatasan dan kawasan tertinggal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi</li> </ol>

RPJMN Tahun 2025-2029		RPJMD DIY Tahun 2022-2027		
No	Arah Pembangunan Kewilayahan	No	Strategi	Arah Kebijakan
33	Peningkatan/preservasi jalan ruas Yogyakarta-Wonosari-Semanu-Pracimantoro	1	Mengembangkan pusat pusat ekonomi baru dan komoditas ekonomi berbasis sumber daya lokal yang berdaya saing dengan didukung penyediaan Infrastruktur di wilayah selatan	1. Mengembangkan pusat-pusat kegiatan ekonomi baru pada wilayah selatan secara terpadu dan lintas sektor 2. Mengembangkan transportasi dan infrastruktur untuk meningkatkan aksesibilitas di wilayah selatan 3. Menyediakan ruang dan infrastruktur pada kawasan perbatasan dan kawasan tertinggal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi
34	Perlindungan, pemulihan, pengelolaan ekosistem dan area bernilai keanekaragaman hayati tinggi	1	Pembangunan yang memperhatikan kelestarian lingkungan	Meningkatkan konservasi sumber daya alam dan rehabilitasi lahan kritis
35	Pengurangan status keterancaman spesies tumbuhan dan satwa	1	Pembangunan yang memperhatikan kelestarian lingkungan	Meningkatkan konservasi sumber daya alam dan rehabilitasi lahan kritis
36	Pemanfaatan sumber daya hayati dan jasa ekosistem berkelanjutan mendukung bioekonomi	1	Pembangunan yang memperhatikan kelestarian lingkungan	Mengembangkan teknologi yang ramah lingkungan
37	Peningkatan bioprospeksi, bioteknologi, keamanan hayati, serta akses dan pembagian keuntungan sumber daya genetik	1	Pembangunan yang memperhatikan kelestarian lingkungan	Mengembangkan teknologi yang ramah lingkungan
38	Pengembangan produk bioekonomi hutan melalui agroforestri	1	Pembangunan yang memperhatikan kelestarian lingkungan	Mengembangkan teknologi yang ramah lingkungan
39	Penguatan pengelolaan hutan lestari	1	Pembangunan yang memperhatikan kelestarian lingkungan	Meningkatkan konservasi sumber daya alam dan rehabilitasi lahan kritis
40	Perlindungan dan pengamanan hutan	1	Pembangunan yang memperhatikan kelestarian lingkungan	Meningkatkan konservasi sumber daya alam dan rehabilitasi lahan kritis
41	Peningkatan upaya pencegahan dan mitigasi	1	Meningkatkan kapasitas ketangguhan ( <i>resiliency</i> ) dalam menghadapi bencana	1. Meningkatkan ketangguhan ( <i>resiliency</i> ) dalam menghadapi bencana melalui peningkatan kapasitas mitigasi dan adaptasi bencana 2. Menyediakan layanan perlindungan sosial dalam menghadapi bencana terutama bagi kelompok rentan 3. Memanfaatkan teknologi untuk penanganan bencana
42	Peningkatan layanan peringatan dini dan penanganan kedaruratan bencana	1	Peningkatan kolaborasi dalam pengurangan risiko bencana	Pembangunan EWS ( <i>Early Warning System</i> ) pada kawasan rawan bencana berisiko tinggi yang efektif, terpadu, dan terintegrasi.
43	Peningkatan resiliensi masyarakat terhadap bencana	1	Meningkatkan kemitraan rangka dalam pelestarian lingkungan hidup dan pengurangan risiko bencana	Kemitraan multipihak dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana berbasis komunitas

RPJMN Tahun 2025-2029		RPJMD DIY Tahun 2022-2027		
No	Arah Pembangunan Kewilayahan	No	Strategi	Arah Kebijakan
44	Retrofit atau penguatan infrastruktur publik berketahanan seismik di Kota Yogyakarta dan Kab Bantul	1	Meningkatkan kapasitas ketangguhan (resiliency) dalam menghadapi bencana	1. Meningkatkan ketangguhan (resiliency) dalam menghadapi bencana melalui peningkatan kapasitas mitigasi dan adaptasi bencana 2. Menyediakan layanan perlindungan sosial dalam menghadapi bencana terutama bagi kelompok rentan 3. Memanfaatkan teknologi untuk penanganan bencana
45	Indikasi Daerah Prioritas Intervensi Program Makan Bergizi Gratis, Bantuan Pangan, dan Penanganan Rawan Pangan (PHTC)	1	Meningkatkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat serta ramah lingkungan	1. Meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat melalui promosi, edukasi, kompetisi dan pengembangan sarana prasarana pendukung 2. Meningkatkan ketercukupan pangan beragam, bergizi, seimbang, dan aman (B2SA) bagi masyarakat
46	Pemberikan makan bergizi di sekolah, madrasah, dan dayah/pesantren, serta pemberian makan bergizi untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita	1	Meningkatkan kualitas dan jangkauan layanan publik	Meningkatkan kemitraan multisektor dan multi stakeholder dalam penyediaan layanan publik dan perlindungan sosial terutama bagi kelompok rentan
		2	Meningkatkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat serta ramah lingkungan	1. Meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat melalui promosi, edukasi, kompetisi dan pengembangan sarana prasarana pendukung 2. Meningkatkan ketercukupan pangan beragam, bergizi, seimbang, dan aman (B2SA) bagi masyarakat 3. Meningkatkan akses Air bersih dan sanitasi Layak dan Aman
47	Percepatan Wajib Belajar 13 Tahun (1 tahun pendidikan prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah), antara lain melalui: - Perluasan layanan Pendidikan Anak Usia Dini - Revitalisasi sarana dan prasarana sekolah dan madrasah yang berkualitas - Penyaluran bantuan pendidikan yang tepat sasaran - Pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah - Revitalisasi pendidikan nonformal - Penguatan pengelolaan dan akselerasi penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan berkualitas	1	Meningkatkan kualitas dan jangkauan layanan publik	Meningkatkan kemitraan multisektor dan multi stakeholder dalam penyediaan layanan publik dan perlindungan sosial terutama bagi kelompok rentan
		2	Meningkatkan kesadaran demokrasi, literasi TIK, hak warga dan solidaritas sosial	- 1. Meningkatkan kualitas tata kelola TIK 2. Meningkatkan pemenuhan standar pelayanan 3. Menerapkan inovasi dalam seluruh aktifitas pemerintah

RPJMN Tahun 2025-2029		RPJMD DIY Tahun 2022-2027		
No	Arah Pembangunan Kewilayahan	No	Strategi	Arah Kebijakan
48	Peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat, antara lain melalui: - Penurunan kematian ibu dan anak - Pencegahan dan penurunan stunting - Peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi bagi usia sekolah, usia produktif dan lasia serta KB dan kespro - Penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan gratis	1	Meningkatkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat serta ramah lingkungan	1. Meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat melalui promosi, edukasi, kompetisi dan pengembangan sarana prasarana pendukung 2. Meningkatkan ketercukupan pangan beragam, bergizi, seimbang, dan aman (B2SA) bagi masyarakat 3. Meningkatkan akses Air bersih dan sanitasi Layak dan Aman 4. Menyediakan Rumah Layak Huni dan Aman dengan prioritas Masyarakat
49	Pengendalian penyakit dan pembudayaan hidup sehat, antara lain melalui: - Penuntasan TBC - Pengendalian penyakit tidak menular dan peningkatan upaya kesehatan jiwa - Pembudayaan hidup sehat dan pengendalian risiko PTM	1	Meningkatkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat serta ramah lingkungan	1. Meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat melalui promosi, edukasi, kompetisi dan pengembangan sarana prasarana pendukung 2. Meningkatkan ketercukupan pangan beragam, bergizi, seimbang, dan aman (B2SA) bagi masyarakat 3. Meningkatkan akses Air bersih dan sanitasi Layak dan Aman 4. Menyediakan Rumah Layak Huni dan Aman dengan prioritas Masyarakat
50	Penguatan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan dari kekerasan, antara lain melalui: - Penguatan kapasitas dan kemandirian, serta peningkatan kepemimpinan perempuan dalam pengambilan keputusan - Pemenuhan dan perlindungan hak perempuan bebas dari kekerasan	1	Meningkatkan kemitraan multisektor dan multi stakeholder dalam rangka pengembangan pengetahuan, perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan penyediaan pelayanan publik (infrastruktur, kesehatan, pendidikan) yang mendukung pembangunan wilayah selatan	1. Meningkatkan kemitraan multisektor dan multi stakeholder untuk pengembangan pengetahuan, perlindungan sosial, kesetaraan gender, dan pemberdayaan masyarakat, dan penyediaan pelayanan publik (infrastruktur, kesehatan, pendidikan) terutama bagi kelompok sasaran penanggulangan kemiskinan, kelompok rentan dan kelompok marjinal lainnya 2. Mengembangkan manajemen data sasaran program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat 3. Memperkuat ketahanan keluarga

RPJMN Tahun 2025-2029		RPJMD DIY Tahun 2022-2027		
No	Arah Pembangunan Kewilayahan	No	Strategi	Arah Kebijakan
51	Peningkatan kesetaraan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dan lanjut usia, antara lain melalui: - Penghormatan, perlindungan dan pemenuhan terhadap hak penyandang disabilitas dan lanjut usia - Penguatan prinsip dan pendekatan inklusi sosial bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia dalam proses pembangunan	1	Meningkatkan kemitraan multisektor dan multi stakeholder dalam rangka pengembangan pengetahuan, perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan penyediaan pelayanan publik (infrastruktur, kesehatan, pendidikan) yang mendukung pembangunan wilayah selatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan kemitraan multisektor dan multi stakeholder untuk pengembangan pengetahuan, perlindungan sosial, kesetaraan gender, dan pemberdayaan masyarakat, dan penyediaan pelayanan publik (infrastruktur, kesehatan, pendidikan) terutama bagi kelompok sasaran penanggulangan kemiskinan, kelompok rentan dan kelompok marjinal lainnya</li> <li>2. Mengembangkan manajemen data sasaran program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat</li> <li>3. Memperkuat ketahanan keluarga</li> </ol>
52	Reformasi Pengelolaan Sampah Terintegrasi dari Hulu ke Hilir, antara lain melalui: - Perubahan perilaku dan penguatan tata kelola persampahan - Peningkatan pengumpulan dan pengolahan sampah serta pemrosesan residu di TPA/LUR	1	Pembangunan yang memperhatikan kelestarian lingkungan	Mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan
53	Percepatan transisi energi menuju emisi karbon yang lebih rendah, antara lain melalui: - Pengembangan pembangkit listrik energi terbarukan - Penerapan jaringan cerdas (smart grid) untuk memaksimalkan efisiensi dan pemantauan konsumsi energi - Adopsi teknologi penyimpanan energi untuk menjaga stabilitas pasokan listrik - Penerapan Internet of Things (IoT) di sektor energi guna meningkatkan keterhubungan dan analitik data secara real-time - Perluasan penggunaan kendaraan listrik	1	Pembangunan yang memperhatikan kelestarian lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengembangkan teknologi yang ramah lingkungan</li> <li>2. Mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan</li> </ol>
54	Percepatan transformasi digital, antara lain melalui: - Perluasan infrastruktur digital - Peningkatan kapasitas SDM digital dan literasi digital - Pembangunan jaringan broadband hingga ke pelosok	1	Meningkatkan pemanfaatan TIK dan penerapan inovasi untuk peningkatan pelayanan publik	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan kualitas tata kelola TIK</li> <li>2. Meningkatkan pemenuhan standar pelayanan</li> <li>3. Menerapkan inovasi dalam seluruh aktifitas pemerintah</li> </ol>

RPJMN Tahun 2025-2029		RPJMD DIY Tahun 2022-2027		
No	Arah Pembangunan Kewilayahan	No	Strategi	Arah Kebijakan
55	Pengembangan dan transformasi pemerintahan digital, antara lain melalui: - Penguatan tata kelola dan infrastruktur pemerintahan digital - Pengembangan kompetensi dan budaya digital ASN - Digitalisasi layanan publik prioritas - Pengembangan ekosistem layanan publik digital	1	Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme SDM Aparatur	1. Meningkatkan profesionalitas dan integritas ASN serta pengembangan jalur karir 2. Meningkatkan kapasitas ASN dalam pemanfaatan dan pengelolaan TIK 3. Revolusi mental ASN dalam tata kelola pemerintahan dan sistem sosial
56	Memperkuat reformasi hukum, terutama di DIY antara lain melalui: - Pencegahan dan pemberantasan korupsi serta Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) - Penanggulangan judi dan penyelundupan - Pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba (P4GN)	1	Meningkatkan kesadaran demokrasi, literasi TIK, hak warga dan solidaritas sosial	1. Meningkatkan rasa toleransi 2. Meningkatkan literasi masyarakat
57	Pendalaman sektor keuangan, antara lain melalui: - Penguatan peran perbankan - Penguatan peran sektor keuangan non bank - Peningkatan inklusi dan literasi keuangan	1	Meningkatkan kemitraan multisektor dan multi stakeholder dalam rangka pengembangan pengetahuan, perlindungan sosial pemberdayaan masyarakat, penyediaan pelayanan publik (infrastruktur, kesehatan, pendidikan) yang mendukung pembangunan wilayah selatan	Meningkatkan kemitraan multisektor dan multi stakeholder untuk pengembangan pengetahuan, perlindungan sosial, kesetaraan gender, dan pemberdayaan masyarakat, dan penyediaan pelayanan publik (infrastruktur, kesehatan, pendidikan) terutama bagi kelompok sasaran penanggulangan kemiskinan, kelompok rentan dan kelompok marjinal lainnya
		2	Meningkatkan kesadaran demokrasi, literasi TIK, hak warga dan solidaritas sosial	2. Meningkatkan pendidikan politik masyarakat
58	Pelestarian dan pemajuan kebudayaan di DIY, antara lain melalui: - Perlindungan dan pelestarian warisan budaya - Pemanfaatan khazanah budaya dan pengembangan kawasan pemajuan kebudayaan - Jaminan hak kebudayaan, ekspresi budaya, dan pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat	1	Penguatan nilai-nilai budaya lokal dalam kehidupan sehari-hari	Meningkatkan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, pembinaan, dan penyelamatan objek pemajuan kebudayaan

## BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

### V.1 Target Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD)

**Tabel V-1 Target Indikator Kinerja Utama (IKU)**

Indikator Kinerja Utama	RKPD 2025	Perubahan RKPD 2025
IGI (Inclusive Growth Index)	6,52	6,52
Indeks Kebahagiaan	73,98	73,98
Angka Kemiskinan	10,00-10,50	10,00-10,50
Angka Pertumbuhan Ekonomi/PDRB	5,3-5,8	5,3-5,8
Pendapatan Perkapita (Rp juta)	31,51	31,51
TPT	3,12-3,51	3,12-3,51
Inflasi	3,1-3,8	3,1-3,8
IPM	81,68	81,68
Indeks Pembangunan Kebudayaan	74,98	74,98
Indeks Williamson	0,438	0,438
Kontribusi PDRB kawasan belum maju terhadap keseluruhan PDRB DIY	40,13	40,13
Indeks Reformasi Birokrasi	A (83,78)	A (83,78)
Opini BPK	WTP	WTP
SAKIP	AA (92,8)	AA (92,8)
Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	Tinggi (87,31-90,57)	Tinggi (87,31-90,57)
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Sedang (64,19)	Sedang (64,19)
Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	83,74	83,74
Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) DIY	108,7	108,7

**Tabel V-2 Target Indikator Kinerja Daerah (IKD)**

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	RKPD 2025	Perubahan RKPD 2025
<b>ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT</b>			
<b>Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi</b>			
1	Angka Pertumbuhan Ekonomi/PDRB	5,3-5,8	5,3-5,8
2	Inflasi (%)	3,1-3,8	3,1-3,8

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	RKPD 2025	Perubahan RKPD 2025
3	Pendapatan Per Kapita (Rp juta)	31,51	31,51
4	Indeks Williamson	0,438	0,438
5	Angka Kemiskinan	10,00 - 10,50	10,00 - 10,50
6	Kontribusi PDRB kawasan belum maju terhadap keseluruhan PDRB DIY	40,13	40,13
7	Indeks Gini	0,443 - 0,447	0,443 - 0,447
8	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Industri Pengolahan dan Akomodasi Makan Minum (%)	3,4	3,4
9	Rata-rata Pertumbuhan Ekonomi pada Kabupaten/Kota yang belum maju (Bantul, Gunungkidul, Kulon Progo)	5,76	5,76
<b>Fokus Kesejahteraan Sosial</b>			
1	Tingkat Pengangguran Terbuka	3,12-3,51	3,12-3,51
2	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	81,68	81,68
3	Opini BPK	WTP	WTP
4	Indeks Pertumbuhan Inklusif/IGI ( <i>Inclusive Growth Index</i> )	6,52	6,52
5	Indeks Kebahagiaan	73,98	73,98
6	Indeks Pembangunan Kebudayaan	74,98	74,98
7	Indeks Reformasi Birokrasi	A (83,78)	A (83,78)
8	SAKIP	AA (92,8)	AA (92,8)
9	Harapan Lama Sekolah	15,76	15,76
10	Angka Harapan Hidup	75,21	75,21
11	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,77	88,77
12	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	77,67	77,67
13	Indeks Kebebasan	74,91	74,91
14	Indeks Kesetaraan	87,89	87,89
15	<i>Total Fertility Rate</i>	1,8-2,2	1,8-2,2
16	Persentase sekolah jenjang pendidikan menengah dengan nilai asesmen literasi memenuhi kompetensi minimum	77,38	77,38
17	Persentase sekolah jenjang pendidikan menengah dengan nilai asesmen numerasi memenuhi kompetensi minimum	60,52	60,52
18	Prevalensi <i>Stunting</i>	12,9	12,9
<b>ASPEK DAYA SAING DAERAH</b>			
1	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	Tinggi (87,31 - 90,57)	Tinggi (87,31 - 90,57)
2	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Sedang (64,19)	Sedang (64,19)
3	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	83,74	83,74
4	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) DIY	108,7	108,7
5	Crime rate (Risiko Penduduk Terkena Kejahatan)	120,5	120,5

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	RKPD 2025	Perubahan RKPD 2025
6	Indeks Kematangan SPBE	4,3	4,3
7	Persentase Desa Mandiri	69,9	69,9
8	Rasio Kewirausahaan (%)	3,8	3,8
9	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	0,75	0,75
10	Persentase Penduduk yang mendapatkan layanan dasar layak	98,802	98,802
11	Budaya benda dan tak benda yang diapresiasi oleh pihak luar Pemda DIY (regional, nasional, internasional)	355	355
12	Persentase Penyediaan infrastruktur pendukung pengembangan ekonomi	76,7	76,7
13	Penurunan emisi GRK (ribu CO2eq)	2.641	2.641
14	Perwujudan pola ruang (%)	94,48	94,48
15	Capaian Fasilitasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Bidang Tanah Kasultanan, Kadipaten, dan Tanah Desa (%)	27,51	27,51
<b>ASPEK PELAYANAN UMUM</b>			
<b>Urusan Pendidikan</b>			
1	Rata-rata Lama Sekolah	9,68	9,68
2	Capaian Proporsi peserta didik dengan kategori kemampuan literasi minimal cakap jenjang SMA	50,73%	50,73%
3	Capaian Proporsi peserta didik dengan kategori kemampuan numerasi minimal cakap jenjang SMA	30,86%	30,86%
4	Capaian Proporsi peserta didik dengan kategori kemampuan literasi minimal cakap jenjang SMK	51,96%	51,96%
5	Capaian Proporsi peserta didik dengan kategori kemampuan numerasi minimal cakap jenjang SMK	30,39%	30,39%
6	Angka Partisipasi Sekolah (APS) penduduk usia 16-18 tahun	90,00%	90,00%
7	Capaian Proporsi peserta didik dengan kemampuan literasi Mahir jenjang SMA	21,96%	21,96%
8	Capaian Proporsi peserta didik dengan kemampuan numerasi Mahir jenjang SMA	18,98%	18,98%
9	Capaian Proporsi peserta didik dengan kemampuan literasi Mahir jenjang SMK	14,07%	14,07%
10	Capaian Proporsi peserta didik dengan kemampuan numerasi Mahir jenjang SMK	11,09%	11,09%
11	Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	36,57%	36,57%
12	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Usia 4-18 tahun disabilitas	51,35%	51,35%
<b>Urusan Kesehatan</b>			
1	Indeks Keluarga Sehat	0,39	0,39
2	Prevalensi Berat Badan Kurang (Berat Badan Kurang dan Sangat Kurang) Pada Balita	11,5	11,5
<b>Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>			
1	Persentase warga negara yang menempati hunian dengan akses air minum layak	96,32%	96,32%

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	RKPD 2025	Perubahan RKPD 2025
2	Persentase Warga Negara yang menempati hunian dengan akses sanitasi layak	97,41%	97,41%
3	Persentase penyediaan infrastruktur sumber daya air	90,63%	90,63%
4	Persentase Pembangunan Jaringan Jalan	98,77%	98,77%
5	Peningkatan persentase pembinaan kinerja jasa konstruksi	90,72%	90,72%
6	Prosentase pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman serta urusan bidang energi dan sumber daya mineral di DIY	100%	100%
7	Persentase kinerja penyelenggaraan penataan ruang	81,92%	81,92%
<b>Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman</b>			
1	Persentase rumah tangga yang menempati tempat tinggal layak huni	95,98%	95,98%
<b>Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, Serta Perlindungan Masyarakat</b>			
1	Persentase kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas	75%	75%
2	Persentase terwujudnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta	80%	80%
3	Kontribusi capaian 5 prioritas dalam IKD terhadap Ketahanan Daerah DIY	101,3	101,3
4	Rerata capaian skor 5 Prioritas dalam Indeks Ketahanan Daerah (IKD) DIY	0,76	0,76
<b>Urusan Sosial</b>			
1	Prosentase Rata-Rata Hasil Ketercapaian Pelaksanaan Program Dukungan OPD	100	100
2	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, jaminan sosial, serta Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dan masyarakat sasaran yang meningkat kemampuan dan partisipasinya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial serta mampu mewujudkan nilai-nilai keperintisan kejuangan dan kesetiakawanan sosial	28,32%	28,32%
3	Persentase PPKS yang memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, jaminan sosial, dan meningkat keberfungsian sosialnya serta PSKS yang meningkat kemampuan dan partisipasinya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	21,51%	21,51%
4	Persentase masyarakat sasaran yang mampu mewujudkan nilai-nilai keperintisan kejuangan dan kesetiakawanan sosial	26,26%	26,26%

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	RKPD 2025	Perubahan RKPD 2025
5	Persentase daerah rawan bencana yang siap menghadapi kejadian bencana bersama dengan Taruna Siaga Bencana (Tagana) dan Tenaga Pelopor Perdamaian (TPP)	61,03%	61,03%
<b>Urusan Tenaga Kerja</b>			
1	Persentase lulusan pelatihan yang ditempatkan	75%	75%
2	Persentase penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja	70%	70%
3	Jumlah Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, Struktur Skala Upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	2.639 Perusahaan	2.639 Perusahaan
4	Jumlah Perusahaan yang menerapkan Norma Kerja dan Norma K3	2.768 Perusahaan	2.768 Perusahaan
5	Persentase perusahaan dengan kategori produktivitas baik	70%	70%
6	Tingkat produktivitas DIY	Rp56,37 juta/tenaga kerja	Rp56,37 juta/tenaga kerja
<b>Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>			
1	Rasio kekerasan terhadap perempuan dan anak di Masyarakat	0,63	0,63
2	Persentase Keterwakilan perempuan dalam politik (DPRD, Bupati/walikota dan Bamuskal)	19%	19%
3	Persentase korban kekerasan perempuan dan anak yang mendapatkan layanan komprehensif di UPTD dan P2TPA se-DIY	95.50%	95.50%
4	MUKP (Median Usia Kawin Pertama Perempuan)	23 tahun	23 tahun
<b>Urusan Pangan</b>			
1	Skor Pola Pangan Harapan (PPH), berdasarkan standar Angka Kecukupan Gizi (AKG) 2.100 kkal/kapita/hari (skor)	96,4	96,4
2	Persentase daerah rentan rawan pangan (%)	3,85%	3,85%
3	Indeks Ketahanan Pangan (skor)	82.41	82.41
4	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (%)	9,06	9,06
<b>Urusan Pertanahan</b>			
1	Persentase kinerja penyelenggaraan penataan ruang dan penataan agraria di daerah	68,33%	68,33%
2	Persentase Penyelenggaraan Penataan Agraria di daerah sesuai ketentuan	54,74%	54,74%
<b>Urusan Lingkungan Hidup</b>			
1	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Provinsi	25,34%	25,34%
2	Nilai indeks pencemaran sungai lintas kab/kota	6,03	6,03

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	RKPD 2025	Perubahan RKPD 2025
<b>Urusan Administrasi Kependudukan dan catatan Sipil</b>			
1	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan	94,00%	94,00%
<b>Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>			
1	Lembaga kemasyarakatan dan lembaga ekonomi yang mampu mendorong pelaksanaan pembangunan desa/kelurahan	4 Lembaga	4 Lembaga
2	Persentase rumusan bahan kebijakan kapasitas sumber daya masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	100%
3	Terpenuhinya kebijakan dan keberdayaan masyarakat desa yang berkualitas	100%	100%
<b>Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</b>			
1	Rata-rata jumlah anak per-keluarga	1,14	1,14
2	Jumlah Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)	5 lembaga	5 lembaga
<b>Urusan Perhubungan</b>			
1	Persentase Capaian Mobilitas Berkelanjutan di Wilayah DIY	60,24%	60,24%
2	Persentase Capaian Jalan Berkeselamatan Berbasis Angkutan Umum	59,19%	59,19%
3	Persentase Capaian Pengelolaan Sektor Transportasi di Kawasan Strategis Dalam Mendukung Pelestarian Lingkungan	61,29%	61,29%
<b>Urusan Komunikasi dan Informatika</b>			
1	Persentase Jumlah Badan Publik Pemda DIY Kategori Informatif	35.14%	35.14%
2	Indeks Kematangan Manajemen SPBE	1,97	1,97
3	Predikat pelaksanaan pemerintahan berbasis elektronik di DIY	Baik	Baik
<b>Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah</b>			
1	Jumlah koperasi modern	9	9
2	Jumlah UMKM yang berkembang usahanya (pada tahun n)	1.550	1.550
3	Jumlah wirausaha Baru / Pemula	8.365	8.365
4	Jumlah UMKM yang berkembang usahanya (aspek SDM dan produksi)	130	130
5	Jumlah omset Koperasi dan UMKM (Triliun rupiah)	18,175	18,175
6	Rasio Wirausaha baru terhadap Total Angkatan Kerja (%)	4,15	4,15
<b>Urusan Penanaman Modal</b>			
1	Nilai Realisasi Investasi di DIY	Rp 3,22 Triliun	Rp 3,22 Triliun
2	Nilai Predikat Pelayanan Prima	A	A

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	RKPD 2025	Perubahan RKPD 2025
<b>Urusan Kepemudaan dan Olahraga</b>			
1	Jumlah capaian medali pada kejuaraan <i>multievent</i>	24 medali	24 medali
2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Pemuda	65,63	65,63
3	Persentase pemuda bekerja	64,84%	64,84%
4	Peringkat yang diraih dalam Pra-POPNAS dan POPNAS	peringkat 8 besar (Popnas)	peringkat 8 besar (Popnas)
5	Peringkat yang diraih dalam PEPARPENAS	Peringkat 6 besar	Peringkat 6 besar
<b>Urusan Statistik</b>			
1	Persentase data statistik sektoral menuju prinsip satu data pembangunan daerah	75%	75%
<b>Urusan Persandian</b>			
1	Skor Kematangan Keamanan Informasi (Indeks KAMI) Pemda DIY	631	631
<b>Urusan Kebudayaan</b>			
1	Jumlah sumber daya kebudayaan pendukung keistimewaan yang terkelola	434	434
2	Jumlah sarana prasarana pendukung keistimewaan yang terkelola	282	282
3	Jumlah agenda budaya pendukung keistimewaan yang terkelola	250	250
4	Meningkatnya kinerja pengembangan nilai sejarah, warisan budaya dan museum	6,09%	6,09%
5	Peningkatan jumlah penyelenggaraan <i>event</i> budaya tingkat provinsi, nasional, internasional	16 <i>event</i>	16 <i>event</i>
6	Peningkatan jumlah kegiatan pengembangan seni budaya dan tradisi di DIY	395 lembaga	395 lembaga
<b>Urusan Perpustakaan</b>			
1	Persentase pemanfaatan koleksi pustaka dan arsip	23%	23%
2	Persentase ketermanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	51%	51%
<b>Urusan Kearsipan</b>			
1	Tingkat Ketersediaan Arsip	51,25%	51,25%
<b>Urusan Kelautan dan Perikanan</b>			
1	Nilai Subsektor Perikanan dalam PDRB DIY (ADHK) (juta rupiah)	371350 juta rupiah	371350 juta rupiah
2	Nilai produksi perikanan budidaya dan tangkap (juta rupiah)	2305813 juta rupiah	2305813 juta rupiah
3	Peningkatan pendapatan pembudidaya ikan kelompok miskin (juta rupiah/tahun)	36 juta rupiah/tahun	36 juta rupiah/tahun

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	RKPD 2025	Perubahan RKPD 2025
4	Nilai produksi perikanan budidaya kelompok miskin (dalam juta rupiah/tahun)	180 juta rupiah /tahun	180 juta rupiah /tahun
5	Nilai Akhir Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi (skor)	46,39	46,39
6	Luas kawasan konservasi yang ditetapkan (Ha)	5822,92	5822,92
<b>Urusan Pariwisata</b>			
1	Lama Tinggal Wisatawan wisman / 12 bulan)	2.52 hari	2.52 hari
2	Lama Tinggal Wisatawan wisnus / 12 bulan	1.57 hari	1.57 hari
4	Rata-rata Spending money wisatawan mancanegara (\$)	(\$) 600	(\$) 600
5	Rata-rata spending money wisatawan nusantara (rupiah)	Rp2.500.0 00	Rp2.500.0 00
7	Total Yield (Jumlah wisatawan x Belanja/per hari) - Satuan (Rp.)	20 T	20 T
<b>Urusan Pertanian</b>			
1	Rata-rata persentase peningkatan produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan (%)	0,21%	0,21%
2	Nilai sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan dalam PDRB (ADHK) (juta rupiah)	8.242.042 juta rupiah	8.242.042 juta rupiah
3	Persentase kontribusi sektor pertanian terhadap kesesuaian tata ruang (%)	3,99%	3,99%
4	Peningkatan persentase kontribusi sektor pertanian terhadap kesesuaian tata ruang (%)	1,98%	1,98%
<b>Urusan Kehutanan</b>			
1	Persentase luas lahan kritis yang direhabilitasi di DIY	4,61%	4,61%
2	Peningkatan jumlah produksi sektor kehutanan	5%	5%
3	Ketercapaian kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta keterwujudan pengelolaan hutan lestari	92,76%	92,76%
<b>Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral</b>			
1	Persentase rumah tangga berakses listrik	99,99%	99,99%
2	Persentase pengusaha kawasan peruntukan pertambangan sesuai dengan pola ruang	9,28%	9,28%
3	Pengendalian Rerata Penurunan Air Muka Tanah	< 20%	< 20%
<b>Urusan Perdagangan</b>			
1	Kontribusi Perdagangan Terhadap PDRB DIY	8,44%	8,44%
2	Laju pertumbuhan Perdagangan dalam PDRB	5,38%	5,38%
<b>Urusan Perindustrian</b>			
1	Kontribusi Industri Pengolahan Terhadap PDRB DIY	12,20%	12,20%

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	RKPD 2025	Perubahan RKPD 2025
2	Laju pertumbuhan Industri Pengolahan dalam PDRB	3,00%	3,00%
<b>Urusan Transmigrasi</b>			
1	Persentase transmigrasi yang bertahan pada masa adaptasi	90%	90%
<b>Sekretariat Dewan</b>			
1	Persentase Agenda DPRD yang terselesaikan tepat waktu	96%	96%
2	Kepuasan pelayanan kepada DPRD	84%	84%
<b>Sekretariat Daerah</b>			
1	Persentase rumusan kebijakan menjadi kebijakan yang ditindaklanjuti dalam mendukung Program Pemda Pengembangan Sektor Unggulan	100%	100%
2	Persentase rumusan kebijakan menjadi kebijakan yang ditindaklanjuti dalam mendukung pencapaian sasaran Pemda Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan	100%	100%
3	Persentase bahan kebijakan yang mendukung program pemda	60%	60%
4	Persentase hasil kajian, koordinasi, monitoring dan evaluasi bidang bina mental, kesehatan dan sumber daya manusia yang menjadi naskah bahan kebijakan	80%	80%
5	Persentase rumusan bahan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah dan kerja sama dalam negeri, pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren, serta penataan administrasi batas daerah dan toponimi	100%	100%
6	Persentase Responsivitas Dinamika Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	100%	100%
7	Persentase layanan hukum yang berkualitas	100%	100%
8	Rerata Capaian Produk Hukum serta Bantuan dan Layanan Hukum yang Berkualitas	100%	100%
9	Persentase perangkat daerah yang telah melaksanakan Reformasi Birokrasi kategori "sangat baik" (A)	94,60%	94,60%
10	Persentase perangkat daerah dengan tingkat kematangan tinggi	86,67%	86,67%
11	Persentase capaian pelaksanaan urusan keistimewaan	89,2	89,2
12	Persentase lembaga pengampu keistimewaan dengan capaian kinerja yang berkualitas baik	90,2	90,2
13	Persentase rumusan kebijakan menjadi kebijakan dalam mendukung program Pemda (bidang infrastruktur)	60%	60%

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	RKPD 2025	Perubahan RKPD 2025
14	Persentase rumusan kebijakan yang mendukung program Pemda (bidang infrastruktur) dan Persentase kualitas Pengadaan Barang Jasa	62,37%	62,37%
15	Persentase kualitas pengadaan barang dan jasa dan persentase IKM	69,49%	69,49%
16	Nilai rerata kuesioner layanan keprotokolan, kerumahtanggan, kepuasan masyarakat terhadap Informasi Pemerintah Daerah, dan nilai reformasi birokrasi	86,88	86,88
17	Nilai rerata kuesioner layanan keprotokolan, kerumahtanggan, kepuasan masyarakat terhadap Informasi Pemerintah Daerah, dan nilai reformasi birokrasi	86,88	86,88
<b>Perencanaan Pembangunan</b>			
1	Persentase ketercapaian tujuan perangkat daerah DIY dengan kriteria tinggi dan sangat tinggi	87,50%	87,50%
2	Persentase ketercapaian sasaran perangkat daerah DIY dengan kriteria tinggi dan sangat tinggi	88,89%	88,89%
<b>Keuangan</b>			
1	Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan	100%	100%
2	Optimalisasi Barang Milik Daerah	Rp 9.703.109.475	Rp 9.703.109.475
3	Pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel	100%	100%
<b>Kepegawaian</b>			
1	Indeks Profesionalitas ASN (Skor)	63,09	63,09
2	Persentase kualitas pengelolaan manajemen ASN	70,73%	70,73%
<b>Pendidikan dan Pelatihan</b>			
1	Persentase Aparatur Sipil Negara yang mengikuti pelatihan dengan predikat minimal memuaskan	91,50%	91,50%
2	Persentase ASN yang telah mendapatkan pelatihan minimal 20 JPL dalam 1 tahun	16%	16%
<b>Penelitian dan Pengembangan</b>			
1	Persentase hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah	75%	75%
<b>Penghubung Daerah</b>			
1	Persentase layanan penghubung yang berkualitas dalam menunjang koordinasi Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat dan pemangku kepentingan lain	88%	88%

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	RKPD 2025	Perubahan RKPD 2025
2	Nilai rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Kualitas Layanan Penghubung	88 angka indeks	88 angka indeks
1	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan	92%	92%
2	Indeks Penilaian integritas	73	73
3	Nilai Kapabilitas APIP	level 3	level 3
1	Capaian Aspek Kebebasan dalam IDI (Indeks Demokrasi Indonesia) DIY	74,34	74,34
2	Rerata capaian skor 5 indikator dalam Aspek Kebebasan IDI	73,57	73,57

## V.2 Rencana Program, Kegiatan, Dan Sub Kegiatan Dalam Perubahan RKPD Tahun 2025

Tema pembangunan tahun 2025 tidak mengalami perubahan yaitu **“Pengembangan Sektor Unggulan yang Kreatif dan Inovatif menuju Pertumbuhan Ekonomi Inklusif.”** Pada perubahan RKPD DIY Tahun 2025 terdapat penyesuaian-penyesuaian terhadap target kinerja dan anggaran program/kegiatan/subkegiatan dikarenakan adanya efisiensi belanja sebagaimana amanat Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Dengan adanya efisiensi tersebut Pemerintah Daerah DIY tetap berusaha untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2025 diantaranya melalui penambahan alokasi belanja terutama untuk pemeliharaan gedung, perbaikan jalan, irigasi, dan pemeliharaan peralatan.

Berdasarkan tema tersebut, disusun 6 prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Penurunan tingkat kemiskinan
2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak
3. Peningkatan kualitas SDM Yogyakarta
4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)
5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan
6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tentram.

Prioritas pembangunan di atas didukung ketercapaiannya melalui program prioritas daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. Dukungan program tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel V-3 Dukungan Prioritas Daerah terhadap Program**

Prioritas Daerah	Program
PD1 Penurunan tingkat kemiskinan	Program Kesejahteraan Rakyat
	Program Pemberdayaan Sosial
	Program Penanganan Bencana
	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan
	Program Pengelolaan Pendidikan
	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan
	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial
	Program Rehabilitasi Sosial
PD2 Pengembangan Kehidupan Ekonomi Yang Layak	Program Hubungan Industrial
	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam
	Program Pelayanan Penanaman Modal
	Program Pemasaran Pariwisata
	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi
	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi
	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)
	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian
	Program Penempatan Tenaga Kerja
	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi
	Program Pengawasan Ketenagakerjaan
	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal
	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
	Program Pengembangan Ekspor
	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
	Program Pengembangan Umkm
	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian
	Program Pengendalian Izin Usaha Industri
	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan

Prioritas Daerah	Program
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang
	Program Penyuluhan Pertanian
	Program Perekonomian Dan Pembangunan
	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan
	Program Promosi Penanaman Modal
	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting
	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen
PD3 Peningkatan Kualitas SDM	Program Kesejahteraan Rakyat
	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja
	Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno
	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
	Program Pembinaan Perpustakaan
	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
	Program Pengelolaan Permuseuman
	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak
	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan
	Program Pengembangan Jasa Konstruksi
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
	Program Pengembangan Kebudayaan
	Program Pengendalian Penduduk
	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
	Program Peningkatan Kualitas Keluarga
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang
	Program Perlindungan Khusus Anak
	Program Perlindungan Perempuan
	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman
	Program Kebijakan Administrasi Pembangunan

Prioritas Daerah	Program
PD4 Penurunan Ketimpangan (Antar Kelas Sosial, Antar Wilayah)	Program Penanganan Kerawanan Pangan
	Program Penataan Bangunan Gedung
	Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum
	Program Pengawasan Keamanan Pangan
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)
	Program Penyelenggaraan Jalan
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)
	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
	Program Redistribusi Tanah Dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee
PD5 Penguatan <i>Good-Governance</i> Pada Berbagai Tingkatan	Program Administrasi Pemerintahan Desa
	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD
	Program Fasilitasi Dan Koordinasi Hukum
	Program Kebijakan Dan Pelayanan Pengadaan Barang Dan Jasa
	Program Kepegawaian Daerah
	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
	Program Pelayanan Penghubung
	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya
	Program Pemerintahan Dan Otonomi Daerah
	Program Penataan Organisasi
	Program Pencatatan Sipil
	Program Pendaftaran Penduduk
	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah
	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
	Program Pengelolaan Arsip
	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
	Program Pengelolaan Profil Kependudukan
	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	

Prioritas Daerah	Program
	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang
	Program Penyelenggaraan Pengawasan
	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
	Program Perencanaan Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah
	Program Perencanaan Tenaga Kerja
	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi
PD6 Menciptakan Lingkungan Hidup Yang Lebih Baik, Aman Dan Tenteram	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
	Program Penanggulangan Bencana
	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran
	Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan
	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan
	Program Pengelolaan Aspek Kegeologian
	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan
	Program Pengelolaan Hutan
	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil
	Program Pengelolaan Mineral Dan Batubara
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
	Program Pengelolaan Persampahan
	Program Pengembangan Perumahan
	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional
	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)
	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan
	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan

<b>Prioritas Daerah</b>	<b>Program</b>
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan
	Program Perencanaan Lingkungan Hidup

**Tabel V-4 Tabel Rekapitulasi Jumlah Program, Kegiatan, dan Subkegiatan serta Pagu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025**

No.	Urusan	Program			Kegiatan			SubKegiatan			Jumlah Pagu		
		RKPD Tahun 2025	Pergeseran II APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	RKPD Tahun 2025	Pergeseran II APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	RKPD Tahun 2025	Pergeseran II APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	RKPD Tahun 2025	Pergeseran II APBD 2025	Perubahan RKPD 2025
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	4	4	4	14	14	14	55	63	63	Rp1.561.153.918.976	Rp1.648.286.449.932	Rp1.587.340.304.470
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	5	5	5	18	18	18	62	62	62	Rp219.375.301.704	Rp236.378.975.167	Rp263.283.585.442
3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	10	10	11	22	22	23	70	68	69	Rp437.538.670.892	Rp417.619.092.845	Rp444.138.198.959
4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1	1	2	1	1	2	2	2	4	Rp130.000.000	Rp130.000.000	Rp3.177.040.000
5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	4	4	4	14	14	14	37	37	37	Rp36.326.454.401	Rp37.190.262.350	Rp35.554.715.611

No.	Urusan	Program			Kegiatan			SubKegiatan			Jumlah Pagu		
		RKPD Tahun 2025	Pergeseran II APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	RKPD Tahun 2025	Pergeseran II APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	RKPD Tahun 2025	Pergeseran II APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	RKPD Tahun 2025	Pergeseran II APBD 2025	Perubahan RKPD 2025
6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	7	7	7	19	19	19	71	71	71	Rp109.760.872.333	Rp112.431.571.524	Rp111.434.937.940
7	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	6	6	6	18	18	18	51	51	51	Rp38.496.376.843	Rp38.265.617.898	Rp39.099.540.302
8	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	7	7	7	22	22	22	55	55	55	Rp14.101.300.728	Rp17.137.644.418	Rp17.164.596.903
9	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	3	3	3	4	4	4	10	10	10	Rp469.904.300	Rp675.166.300	Rp672.946.300
10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	3	3	3	4	5	5	10	11	11	Rp16.578.599.200	Rp12.630.095.300	Rp12.630.095.300
11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	8	8	8	15	15	15	37	37	37	Rp68.386.740.650	Rp69.069.081.973	Rp65.991.738.420
12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	4	4	4	6	6	6	8	8	8	Rp232.331.300	Rp232.331.300	Rp278.701.300

No.	Urusan	Program			Kegiatan			SubKegiatan			Jumlah Pagu		
		RKPD Tahun 2025	Pergeseran II APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	RKPD Tahun 2025	Pergeseran II APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	RKPD Tahun 2025	Pergeseran II APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	RKPD Tahun 2025	Pergeseran II APBD 2025	Perubahan RKPD 2025
13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2	2	2	8	8	8	21	21	21	Rp9.646.382.062	Rp10.677.750.780	Rp9.784.215.993
14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	3	3	3	4	4	4	9	10	10	Rp109.936.326	Rp262.947.600	Rp262.947.600
15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2	2	2	13	13	13	36	36	36	Rp115.965.546.896	Rp116.369.446.189	Rp117.607.220.687
16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	3	3	3	8	8	8	26	26	26	Rp14.329.781.543	Rp16.670.034.949	Rp15.939.364.457
17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	8	8	8	14	14	14	34	34	34	Rp10.390.876.513	Rp10.950.954.289	Rp10.785.491.109

No.	Urusan	Program			Kegiatan			SubKegiatan			Jumlah Pagu		
		RKPD Tahun 2025	Pergeseran II APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	RKPD Tahun 2025	Pergeseran II APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	RKPD Tahun 2025	Pergeseran II APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	RKPD Tahun 2025	Pergeseran II APBD 2025	Perubahan RKPD 2025
18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	6	6	6	12	12	12	35	35	35	Rp11.592.269.842	Rp12.081.659.615	Rp11.675.623.007
19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	4	4	4	12	12	12	25	26	26	Rp65.828.995.500	Rp79.726.626.500	Rp79.682.131.500
20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	2	2	2	7	7	7	19	19	19	Rp478.434.950	Rp222.096.250	Rp222.096.250
21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	1	1	1	1	1	1	2	2	2	Rp837.465.500	Rp782.565.900	Rp779.405.900
22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2	4	4	16	18	18	71	77	77	Rp776.878.855.370	Rp482.138.937.459	Rp479.180.947.702
23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	3	3	3	14	14	14	40	42	42	Rp21.349.632.968	Rp22.243.033.843	Rp22.071.530.542
24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	1	1	1	3	3	3	6	6	6	Rp371.399.500	Rp478.877.250	Rp503.097.250

No.	Urusan	Program			Kegiatan			SubKegiatan			Jumlah Pagu		
		RKPD Tahun 2025	Pergeseran II APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	RKPD Tahun 2025	Pergeseran II APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	RKPD Tahun 2025	Pergeseran II APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	RKPD Tahun 2025	Pergeseran II APBD 2025	Perubahan RKPD 2025
25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	6	6	6	18	19	19	43	45	45	Rp29.421.589.638	Rp34.275.367.270	Rp33.827.102.080
26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	5	5	5	14	14	14	37	37	37	Rp14.222.565.298	Rp15.317.222.569	Rp14.959.255.419
27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	6	6	6	19	19	19	44	47	47	Rp62.273.013.892	Rp63.631.651.626	Rp64.251.220.605
28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	3	3	3	9	9	9	26	26	26	Rp6.916.098.727	Rp6.236.987.232	Rp6.210.910.732
29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	4	4	4	8	8	8	12	12	12	Rp271.723.000	Rp977.126.125	Rp972.746.000
30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	5	5	5	6	6	6	7	7	7	Rp614.000.500	Rp1.876.011.600	Rp1.876.011.600
31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	4	4	4	10	10	10	32	32	32	Rp20.302.315.034	Rp24.190.249.281	Rp24.572.615.667

No.	Urusan	Program			Kegiatan			SubKegiatan			Jumlah Pagu		
		RKPD Tahun 2025	Pergeseran II APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	RKPD Tahun 2025	Pergeseran II APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	RKPD Tahun 2025	Pergeseran II APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	RKPD Tahun 2025	Pergeseran II APBD 2025	Perubahan RKPD 2025
32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	1	1	1	1	1	1	2	2	2	Rp240.000.000	Rp215.311.000	Rp215.311.000
33	SEKRETARIAT DAERAH	9	9	9	38	38	38	97	97	97	Rp131.696.631.493	Rp128.271.084.660	Rp129.471.103.055
34	SEKRETARIAT DPRD	2	2	2	17	17	17	56	56	56	Rp328.851.987.629	Rp318.891.122.699	Rp324.991.634.994
35	PERENCANAAN	3	3	3	13	13	13	38	38	38	Rp22.036.172.946	Rp21.659.935.924	Rp20.939.542.142
36	KEUANGAN	4	4	4	15	15	15	65	65	66	Rp1.149.134.838.528	Rp901.408.546.936	Rp974.336.290.687
37	KEPEGAWAIAN	2	2	2	11	11	11	43	43	43	Rp25.250.045.001	Rp24.825.261.750	Rp24.711.820.590
38	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	2	2	2	10	10	10	31	31	31	Rp23.239.700.145	Rp24.481.848.100	Rp24.291.258.305
39	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	1	1	1	2	2	2	2	2	2	Rp198.982.900	Rp202.462.900	Rp202.462.900
40	PENGELOLAAN PENGHUBUNG	2	2	2	8	8	8	22	22	23	Rp7.655.776.395	Rp8.126.405.502	Rp8.082.817.414
41	INSPEKTORAT DAERAH	3	3	3	12	12	12	41	41	41	Rp27.251.720.750	Rp28.284.119.874	Rp27.675.275.356
42	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	6	6	6	12	12	12	38	38	38	Rp27.372.714.723	Rp26.060.661.494	Rp26.085.233.488

No.	Urusan	Program			Kegiatan			SubKegiatan			Jumlah Pagu		
		RKPD Tahun 2025	Pergeseran II APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	RKPD Tahun 2025	Pergeseran II APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	RKPD Tahun 2025	Pergeseran II APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	RKPD Tahun 2025	Pergeseran II APBD 2025	Perubahan RKPD 2025
<b>Grand Total</b>		139	141	142	282	285	287	738	760	763	Rp5.407.279.924.896,00	Rp4.971.582.596.173	Rp5.036.933.084.978

Rencana program, kegiatan dan subkegiatan pembangunan di Daerah Istimewa Yogyakarta baik keistimewaan maupun non keistimewaan pada penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel V-5 Rencana Program dan Kegiatan pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2025**

**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
PROVINSI DI YOGYAKARTA  
TAHUN 2025**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		<b>DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA</b>																		<b>1.889.602.946.892,00</b>	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							1.561.153.918.976,00	1.659.455.561.594,00	1.587.340.304.470,00	26.186.385.494,00							1.764.400.335.642,00		
1.01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							1.561.153.918.976,00	1.659.455.561.594,00	1.587.340.304.470,00	26.186.385.494,00							1.764.400.335.642,00		
1.	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				86,71 Nilai	86,71 Nilai	1.058.042.007.807,00	1.059.632.444.125,00	1.011.942.522.303,00	128.627.665.564,00							1.186.669.673.371,00		
	1.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya proses, penyusunan dan penerapan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah				100 %	100 %	141.125.000,00	141.125.000,00	141.125.000,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY		155.237.500,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
	1.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	4 Dokumen	31.909.000,00	31.909.000,00	31.909.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			35.099.900,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
	1.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																			
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	79.216.000,00	79.216.000,00	79.216.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			87.137.600,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
	1.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																			
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				14 Laporan	14 Laporan	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			33.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
	1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya capaian keterlaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah dalam 1 tahun anggaran				100 %	100 %	1.021.332.239.634,00	1.022.928.869.952,00	971.603.584.893,00	-49.728.654.741,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY		1.149.115.761.410,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
	1.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				13630 Orang/ Bulan	8238 Orang/ Bulan	1.021.108.419.634,00	1.022.705.049.952,00	971.379.764.893,00	-49.728.654.741,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBYAKTIAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN DAK NON FISIK-TUNJANGAN GURU ASN DAERAH-TAMBAHAN PENGHASILAN GURU DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-TUNJANGAN GURU ASN DAERAH-TUNJANGAN PROFESI GURU	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			1.148.819.300.410,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
	1.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	76.530.000,00	76.530.000,00	76.530.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			140.151.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
	1.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																			
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				3 Laporan	3 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			55.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
	1.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD				14 Laporan	14 Laporan	33.300.000,00	33.300.000,00	33.300.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			36.630.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1.01.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya capaian keterlaksanaan administrasi barang milik daerah perangkat daerah dalam 1 tahun anggaran				100 %	100 %	801.000.000,00	801.000.000,00	771.900.000,00	-29.100.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY		869.385.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1.01.01.1.03.0006		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	93.630.000,00	93.630.000,00	93.630.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			102.993.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1.01.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya capaian keterlaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah				100 %	100 %	73.652.850,00	73.652.850,00	73.352.850,00	-300.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY		141.083.855,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1.01.01.1.05.0004		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	58.522.850,00	58.522.850,00	58.522.850,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			64.375.135,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1.01.01.1.05.0005		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				2 Dokumen	2 Dokumen	15.130.000,00	15.130.000,00	14.830.000,00	-300.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			76.708.720,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1.01.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya capaian administrasi umum perangkat daerah				100 %	100 %	1.248.978.950,00	1.245.870.950,00	1.151.420.950,00	-97.558.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY		1.327.050.670,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1.01.01.1.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	10.001.000,00	10.001.000,00	10.001.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			11.001.100,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1.01.01.1.06.0003		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	6.306.000,00	6.306.000,00	6.306.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			6.941.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1.01.01.1.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	4.519.450,00	4.519.450,00	4.519.450,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			4.971.395,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1.01.01.1.06.0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	2.116.000,00	2.116.000,00	2.116.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			2.356.200,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1.01.01.1.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				1 Laporan	2 Laporan	238.885.000,00	236.020.000,00	197.268.000,00	-41.617.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			220.814.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1.01.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Persentase kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah sehingga terpelihara dan terawat</i>				50 %	50 %	407.819.000,00	406.229.000,00	398.749.000,00	-9.070.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY		199.194.600,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1.01.01.1.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				3 Unit	8 Unit	45.420.000,00	45.420.000,00	43.340.000,00	-2.080.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1.01.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah dalam 1 tahun anggaran</i>				100 %	100 %	23.329.030.560,00	23.328.434.560,00	23.279.096.260,00	-49.934.300,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY		25.958.974.857,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1.01.01.1.08.0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				1 Laporan	1 Laporan	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			550.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1.01.01.1.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				4 Laporan	4 Laporan	1.295.436.160,00	1.295.436.160,00	1.295.436.160,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			1.424.664.736,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1.01.01.1.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				4 Laporan	4 Laporan	1.441.944.000,00	1.441.944.000,00	1.441.944.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			1.582.524.900,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1.01.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah sehingga terpelihara dan terawat</i>				100 %	100 %	4.385.990.300,00	4.385.090.300,00	4.619.160.300,00	233.170.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY		3.224.374.890,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1.01.01.1.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				23 Unit	23 Unit	221.887.200,00	221.887.200,00	221.887.200,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			244.075.920,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1.01.01.1.09.0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1 Unit	1 Unit	74.928.000,00	74.928.000,00	74.928.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			82.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1.01.01.1.09.0010		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				25 Unit	25 Unit	10.092.000,00	10.092.000,00	10.092.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			11.209.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Putus Sekolah SMA/SMK Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat Jumlah penerima sertifikat keahlian teknik Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Gunungkidul Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Sleman Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Kulon Progo Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Bantul Persentase guru jenjang pendidikan menengah dan khusus pengguna media pembelajaran JogjaBelajar Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya di Kota Yogyakarta Angka Partisipasi Murni (APM) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik khusus PLB				0,19 100 40 41.47 46.83 46.98 49.46 55 58.62 77.52 80.5 86.15 % % Orang % % % % % % % %	0,19 100 40 41.47 46.83 46.98 49.46 55 58.62 77.52 80.5 86.15 % % Orang % % % % % % % %	512.963.552.469,00	609.674.758.769,00	585.494.362.467,00	75.103.560.432,00							588.067.112.901,00	
	1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Iklim Inklusivitas SMA Iklim keamanan SMA Iklim kebinekaan SMA Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu) Jumlah penerima bantuan pembiayaan pendidikan yang tepat sasaran Kemampuan Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Kemampuan Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Persentase satuan pendidikan yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter Persentase SMA yang melaksanakan UKS				32,10 % 400 siswa 40 medali 61,49 % 74,46 % 83,28 Angka 84,73 Indeks 97,01 Indeks	32,10 % 400 siswa 40 medali 61,49 % 74,46 % 83,28 Angka 84,73 Indeks 97,01 Indeks n/a %	183.149.527.179,00	194.283.954.479,00	192.397.699.927,00	9.248.172.748,00			-	Peningkatan kualitas SDM	SMA, Siswa SMA, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA		215.018.692.955,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.02.1.01.0041	Pengadaan Alat Praktikum dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktikum dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia				-	4 Paket	0,00	445.976.000,00	445.976.000,00	445.976.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-SMA	-	Peningkatan kualitas SDM			0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				28743 Peserta didik	28741 Peserta didik	10.015.066.200,00	8.856.760.000,00	8.856.760.000,00	-1.158.306.200,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penurunan tingkat kemiskinan		11.872.064.820,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
	1.01.02.1.01.0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				995 Peserta Didik	1905 Peserta Didik	2.391.128.300,00	9.458.390.000,00	7.794.246.000,00	5.403.117.700,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM		10.404.229.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
	1.01.02.1.01.0050	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas				326 Orang	326 Orang	1.392.212.900,00	1.392.212.900,00	1.384.892.900,00	-7.320.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM		1.734.837.390,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
	1.01.02.1.01.0051	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaiakan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				69 Orang	0 Orang	45.762.000,00	45.762.000,00	0,00	-45.762.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM			53.502.955,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1.01.02.1.01.0052		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas																		
			Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				69 Satuan Pendidikan	69 Satuan Pendidikan	480.000.000,00	480.000.000,00	480.000.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM			528.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1.01.02.1.01.0053		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas																		
			Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS				170 Satuan Pendidikan	170 Satuan Pendidikan	98.526.100.000,00	101.490.790.000,00	101.700.533.448,00	3.174.433.448,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS KINERJA DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penurunan tingkat kemiskinan			108.378.710.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1.01.02.1.01.0060		Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				5 Dokumen	3 Dokumen	1.585.808.000,00	1.585.808.000,00	1.267.518.000,00	-318.290.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM			1.833.991.390,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1.01.02.1.01.0061		Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan																		
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	1.100.200,00	1.100.200,00	1.100.200,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM			1.210.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1.01.02.1.01.0063		Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan																		
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi				45 Komunitas	45 Komunitas	10.752.550,00	10.752.550,00	10.752.550,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM			64.127.305,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1.01.02.1.01.0075		Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan																		
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				140 Orang	129 Orang	335.814.400,00	335.814.400,00	142.584.400,00	-193.230.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM			495.586.575,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1.01.02.1.01.0078		Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				118 Satuan Pendidikan	118 Satuan Pendidikan	638.198.300,00	638.198.300,00	486.448.300,00	-151.750.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penurunan tingkat kemiskinan		633.460.300,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
1.01.02.1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Iklim Inklusivitas SMK Iklim keamanan SMK Iklim ketertarikan SMK Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu) Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik Jumlah SMK yang memperoleh status BLUD Jumlah SMK yang menyelenggarakan Teaching Factory Kemampuan Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Kemampuan Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Persentase guru produktif yang memiliki sertifikat kompetensi dari BNSP Persentase lulusan SMK dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha Persentase SMK yang melaksanakan UKS				22 medali 32,10 %	22 medali 25,32 % 32,10 % 41 sekolah 55,01 Angka 58 % 66,05 Angka 6 sekolah 77,65 Angka 81,58 Angka 93,02 Angka 975 peserta didik	276.838.158.540,00	319.528.715.740,00	320.862.664.915,00	44.024.506.375,00		-	Peningkatan kualitas SDM	SMK, Siswa SMK, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMK		308.892.870.055,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
1.01.02.1.02.0033		Pengadaan Alat Praktikum dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktikum dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia				-	25 Paket	0,00	41.282.546.000,00	41.282.546.000,00	41.282.546.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-SMK	Peningkatan kualitas SDM			0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
1.01.02.1.02.0037		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				37845 Peserta didik	37220 Peserta didik	17.626.876.000,00	15.426.704.200,00	15.418.478.200,00	-2.208.397.800,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Penurunan tingkat kemiskinan			20.637.408.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
1.01.02.1.02.0041		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				1050 Peserta Didik	975 Peserta Didik	3.540.000.000,00	4.576.180.000,00	3.664.180.000,00	124.180.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Peningkatan kualitas SDM			5.033.798.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
1.01.02.1.02.0042		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan				518 Orang	518 Orang	2.513.401.500,00	2.513.401.500,00	2.503.181.500,00	-10.220.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Peningkatan kualitas SDM			2.982.731.840,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
1.01.02.1.02.0043		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				49 Orang	0 Orang	25.600.000,00	25.600.000,00	0,00	-25.600.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Peningkatan kualitas SDM			42.208.045,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
1.01.02.1.02.0045		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				49 Satuan Pendidikan	49 Satuan Pendidikan	312.812.000,00	306.512.000,00	228.416.000,00	-84.396.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Peningkatan kualitas SDM			503.181.800,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
1.01.02.1.02.0046		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS				204 Satuan Pendidikan	204 Satuan Pendidikan	148.571.360.000,00	151.054.240.000,00	151.079.186.875,00	2.507.826.875,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS KINERJA	Penurunan tingkat kemiskinan			163.428.496.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
1.01.02.1.02.0053		Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				2 Dokumen	2 Dokumen	359.385.000,00	359.385.000,00	282.885.000,00	-76.500.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Peningkatan kualitas SDM			395.323.500,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
1.01.02.1.02.0054		Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	1.100.500,00	1.100.500,00	1.100.500,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Peningkatan kualitas SDM			1.210.550,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
1.01.02.1.02.0057		Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang terfasilitasi				55 Komunitas	55 Komunitas	10.752.550,00	10.752.550,00	10.752.550,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Peningkatan kualitas SDM			64.127.305,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
1.01.02.1.02.0073		Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				103 Orang	40 Orang	94.642.200,00	94.642.200,00	22.822.200,00	-71.820.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas SDM			163.835.375,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus		Iklim inklusivitas SMALB Iklim keamanan SMALB Iklim ketahanan SMALB Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu) Jumlah penerima bantuan pembiayaan pendidikan yang tepat sasaran Kemampuan Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional Kemampuan Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional Persentase SLB yang melaksanakan UKS				14 medali 26,10 % 4500 siswa 59,22 Angka 59,31 Angka 80,72 Angka 83,05 Angka 84,78 Angka	14 medali 26,10 % 4500 siswa 59,22 Angka 59,31 Angka 80,72 Angka 83,05 Angka 84,78 Angka	52.975.866.750,00	95.862.088.550,00	72.233.997.625,00	19.258.130.875,00			-	Penurunan tingkat kemiskinan	SLB, Siswa SLB, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SLB		64.155.549.891,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1.01.02.1.03.0038	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik		Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				-	1000 Paket	0,00	900.000.000,00	892.100.000,00	892.100.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Penurunan tingkat kemiskinan			990.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1.01.02.1.03.0040	Pengadaan Alat Praktikum dan Peraga Peserta Didik		Jumlah Alat Praktikum dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia				-	3 Paket	0,00	250.200.000,00	250.200.000,00	250.200.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-SLB	-	Peningkatan kualitas SDM			0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1.01.02.1.03.0044	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus		Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				10223 Peserta Didik	4944 Peserta Didik	11.295.077.600,00	50.808.390.100,00	29.377.124.203,00	18.082.046.603,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penurunan tingkat kemiskinan			12.465.205.500,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1.01.02.1.03.0048	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa		Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				466 Peserta Didik	720 Peserta Didik	2.215.838.300,00	4.602.737.600,00	2.108.817.600,00	-107.020.700,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM			5.063.011.360,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1.01.02.1.03.0049	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Khusus				586 Orang	586 Orang	2.665.528.900,00	2.665.528.900,00	2.650.728.900,00	-14.800.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM			4.454.355.290,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1.01.02.1.03.0050	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				47 Orang	0 Orang	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	-5.600.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM			16.825.490,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1.01.02.1.03.0051	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus		Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				225 Satuan Pendidikan	225 Satuan Pendidikan	2.070.109.450,00	2.070.109.450,00	2.004.109.450,00	-66.000.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM			2.277.132.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1.01.02.1.03.0052	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS				81 Satuan Pendidikan	81 Satuan Pendidikan	23.260.540.000,00	23.096.350.000,00	23.096.350.140,00	-164.189.860,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS KINERJA DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penurunan tingkat kemiskinan			25.586.594.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.02.1.03.0059	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				1 Dokumen	1 Dokumen	127.855.000,00	127.855.000,00	9.343.000,00	-118.512.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM			291.341.600,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.02.1.03.0060	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan																		
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				3 Dokumen	3 Dokumen	120.557.550,00	120.557.550,00	120.557.550,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM			502.428.850,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.02.1.03.0066	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi																		
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				1 Kegiatan	1 Kegiatan	15.285.000,00	15.285.000,00	15.285.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM			16.813.500,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.02.1.03.0069	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				-	4 Unit	0,00	0,00	261.350.300,00	261.350.300,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	DAU YANG DITENTUKAN P ENGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan kualitas SDM			0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.02.1.03.0071	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik																		
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				9 Satuan Pendidikan	9 Satuan Pendidikan	10.631.841.950,00	10.631.841.950,00	10.541.419.550,00	-90.422.400,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM			11.801.879.071,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.02.1.03.0073	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan																		
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				246 Orang	246 Orang	555.905.000,00	555.905.000,00	458.205.000,00	-97.700.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM			677.062.430,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
3.	1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase guru dan tenaga kependidikan yang kompeten				96.21 %	96.21 %	45.133.900,00	45.133.900,00	37.053.900,00	102.880.890,00							148.014.790,00	
	1.01.04.1.01	Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	Terlaksananya pendataan PTK satdikmen dan sakdiksus				1 tahun	1 tahun	45.133.900,00	45.133.900,00	37.053.900,00	-8.080.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM	Pendidik dan Tenaga Kependidikan		148.014.790,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.04.1.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus				1 Dokumen	1 Dokumen	44.008.900,00	44.008.900,00	35.928.900,00	-8.080.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM			146.777.290,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.04.1.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus				2 Laporan	2 Laporan	1.125.000,00	1.125.000,00	1.125.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM			1.237.500,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
4.	1.01.05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Jumlah rekomendasi perizinan terhadap satuan pendidikan menengah yang dihasilkan				10 dokumen Jumlah	10 dokumen Jumlah	50.000.000,00	50.000.000,00	49.980.000,00	5.000.000,00							55.000.000,00	
	1.01.05.1.01	Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah perizinan yg dikeluarkan dinas pendidikan DIY terhadap satuan pendidikan menengah di DIY				10 dokumen	10 dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	49.980.000,00	-20.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM	calon SMA dan SMK		55.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.05.1.01.0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	49.980.000,00	-20.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM			55.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							105.631.463.200,00	118.269.002.600,00	115.640.670.700,00	10.009.207.500,00							125.002.611.250,00	
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							39.802.467.700,00	36.916.931.100,00	35.958.539.200,00	-3.843.928.500,00							43.782.714.470,00	
1.	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase implementasi pendidikan berbasis budaya dengan kategori Mandiri Budaya				56,33 %	56,33 %	39.802.467.700,00	36.916.931.100,00	35.958.539.200,00	3.980.246.770,00							43.782.714.470,00	
	2.22.08.5.10	Pendidikan Berbasis Budaya	Persentase sekolah yang menerapkan pendidikan berbasis budaya dengan kategori minimal Kembang Budaya				51,92 %	51,92 %	39.802.467.700,00	36.916.931.100,00	35.958.539.200,00	-3.843.928.500,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM	Sekolah jenjang PAUD, TK, SD, SMP, SMA, SMK, SLB; AKSENIBUDYO		43.782.714.470,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.22.08.5.10.0001	Pembinaan Muatan Lokal																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Muatan Lokal				16 Laporan	17 Laporan	34.240.592.700,00	34.116.931.100,00	33.425.884.200,00	-814.708.500,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM			37.664.651.970,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.22.08.5.10.0002	Sarana dan Prasarana Pendidikan Urusan Keistimewaan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendidikan Urusan Keistimewaan				7 Unit	0 Unit	1.878.875.000,00	0,00	0,00	-1.878.875.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM			2.066.762.500,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.22.08.5.10.0004	Penyelenggaraan Akademi Komunitas Seni dan Budaya Yogyakarta																		
			Jumlah Orang Mengikuti Akademi Komunitas Seni dan Budaya Yogyakarta				100 Orang	100 Orang	3.683.000.000,00	2.800.000.000,00	2.532.655.000,00	-1.150.345.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM		4.051.300.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							200.000.000,00	109.899.000,00	109.899.000,00	-90.101.000,00						200.000.000,00		
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							200.000.000,00	109.899.000,00	109.899.000,00	-90.101.000,00						200.000.000,00		
1.	4.01.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase capaian implementasi inovasi layanan publik				50 %	50 %	200.000.000,00	109.899.000,00	109.899.000,00	0,00						200.000.000,00		
	4.01.10.5.02	Peningkatan Budaya Pemerintahan	Tercapainya implementasi budaya pemerintahan				100 %	100 %	200.000.000,00	109.899.000,00	109.899.000,00	-90.101.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM	Siswa SLBN Pembina dan Masyarakat	200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
	4.01.10.5.02.0001	Implementasi Budaya Pemerintahan DIY																		
			Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan DIY				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	109.899.000,00	109.899.000,00	-90.101.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM		200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
		BALAI LATIHAN PENDIDIKAN TEKNIK																		
									1.666.985.382.176,00	1.777.834.463.194,00	1.703.090.874.170,00	36.105.491.994,00						1.889.602.946.892,00		
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							1.561.153.918.976,00	1.659.455.561.594,00	1.587.340.304.470,00	26.186.385.494,00						1.764.400.335.642,00		
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							1.561.153.918.976,00	1.659.455.561.594,00	1.587.340.304.470,00	26.186.385.494,00						1.764.400.335.642,00		
1.	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				86,71 Nilai	86,71 Nilai	1.058.042.007.807,00	1.059.632.444.125,00	1.011.942.522.303,00	128.627.665.564,00						1.186.669.673.371,00		
	1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya capaian keterlaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah dalam 1 tahun anggaran				100 %	100 %	1.021.332.239.634,00	1.022.928.869.952,00	971.603.584.893,00	-49.728.654.741,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Balai Latihan Pendidikan Teknik	1.149.115.761.410,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
	1.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	8.970.000,00	8.970.000,00	8.970.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan		9.867.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
	1.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya capaian keterlaksanaan administrasi barang milik daerah perangkat daerah dalam 1 tahun anggaran				100 %	100 %	801.000.000,00	801.000.000,00	771.900.000,00	-29.100.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Balai Latihan Pendidikan Teknik	869.385.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
	1.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	15.900.000,00	15.900.000,00	15.900.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan		17.490.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya capaian administrasi umum perangkat daerah				100 %	100 %	1.248.978.950,00	1.245.870.950,00	1.151.420.950,00	-97.558.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Balai Latihan Pendidikan Teknik	1.327.050.670,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
	1.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	7.842.500,00	7.842.500,00	7.842.500,00	0,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			8.626.750,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
1.01.01.1.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	11.545.300,00	11.545.300,00	11.545.300,00	0,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			12.700.490,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
1.01.01.1.06.0003		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																			
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	6.859.000,00	6.859.000,00	6.859.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			7.549.300,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
1.01.01.1.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	5.011.850,00	5.011.850,00	5.011.850,00	0,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			5.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
1.01.01.1.06.0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	1.500.000,00	1.470.000,00	441.000,00	-1.059.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			1.650.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
1.01.01.1.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	2 Laporan	125.954.000,00	125.801.000,00	108.563.000,00	-17.391.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			138.941.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
1.01.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah sehingga terpelihara dan terawat				50 %	50 %	407.819.000,00	406.229.000,00	398.749.000,00	-9.070.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Balai Latihan Pendidikan Teknik		199.194.600,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
1.01.01.1.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				7 Unit	7 Unit	45.442.000,00	45.442.000,00	45.442.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			49.988.400,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
1.01.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah dalam 1 tahun anggaran				100 %	100 %	23.329.030.560,00	23.328.434.560,00	23.279.096.260,00	-49.934.300,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Balai Latihan Pendidikan Teknik		25.958.874.857,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
1.01.01.1.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	287.546.600,00	287.546.600,00	287.546.600,00	0,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Karangwaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			316.963.011,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
1.01.01.1.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	1.334.083.700,00	1.333.487.700,00	1.327.951.700,00	-6.132.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			1.529.437.250,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
1.01.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah sehingga terpelihara dan terawat				100 %	100 %	4.385.990.300,00	4.385.090.300,00	4.619.160.300,00	233.170.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Balai Latihan Pendidikan Teknik		3.224.374.890,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	1.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				9 Unit	9 Unit	29.233.400,00	28.333.400,00	28.333.400,00	-900.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			26.191.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
	1.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	1.820.643.000,00	1.820.643.000,00	1.820.643.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			881.144.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
	1.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				50 Unit	50 Unit	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			11.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
	1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah siswa SMK yang terlayani peningkatan keahlian				5.775 siswa	5.775 siswa	6.322.171.513,00	6.322.171.513,00	9.904.133.050,00	3.581.961.537,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas SDM	Balai Latihan Pendidikan Teknik			5.678.610.589,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																			
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.351.930.000,00	2.351.930.000,00	5.038.208.895,00	2.686.278.895,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	PENDAPATAN DARI BLUD PENARIKAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN BLUD	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas SDM			2.587.123.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
2.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Putus Sekolah SMA/SMK Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat Jumlah penerima sertifikat keahlian teknik Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Gunungkidul Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Sleman Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Kulon Progo Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Bantul Persentase guru jenjang pendidikan menengah dan khusus pengguna media pembelajaran JogjaBelajar Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya di Kota Yogyakarta Angka Partisipasi Murni (APM) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik khusus PLB				0,19 100 40 41,47 46,83 46,98 49,46 55 58,62 77,52 80,5 86,15 % % Orang % % % % % % % % % % %	0,19 100 40 41,47 46,83 46,98 49,46 55 58,62 77,52 80,5 86,15 % % Orang % % % % % % % % % % %	512.963.552.469,00	609.674.758.769,00	585.494.362.467,00	75.103.560.432,00						588.067.112.901,00			
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Iklim Inklusivitas SMK Iklim keamanan SMK Iklim kebinekaan SMK Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu) Jumlah SMK yang memperoleh status BLUD Jumlah SMK yang menyelenggarakan Teaching Factory Kemampuan Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Kemampuan Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Persentase guru produktif yang memiliki sertifikat kompetensi dari BNSP Persentase lulusan SMK dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha Persentase SMK yang melaksanakan UKS				22 medali 25,32 % 32,10 % 41 sekolah 55,01 Angka 58 % 66,05 Angka 6 sekolah 77,65 Angka 81,58 Angka 93,02 Angka	22 medali 25,32 % 32,10 % 41 sekolah 55,01 Angka 58 % 66,05 Angka 6 sekolah 77,65 Angka 81,58 Angka 93,02 Angka	276.838.158.540,00	319.528.715.740,00	320.862.664.915,00	44.024.506.375,00			-	Peningkatan kualitas SDM	SMK, Siswa SMK, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMK			308.892.870.055,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.02.1.02.0033	Pengadaan Alat Praktikum dan Peraga Peserta Didik																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia				-	24 Paket	0,00	0,00	1.963.115.500,00	1.963.115.500,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan kualitas SDM			0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1.01.02.1.02.0073		Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan																		
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				120 Orang	130 Orang	394.821.140,00	394.821.140,00	381.531.140,00	-13.290.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM			1.064.591.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
		<b>BALAI PEMUDA DAN OLAH RAGA</b>							<b>1.666.985.382.176,00</b>	<b>1.777.834.463.194,00</b>	<b>1.703.090.874.170,00</b>	<b>36.105.491.994,00</b>							<b>1.889.602.946.892,00</b>	
2		<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>							<b>105.631.463.200,00</b>	<b>118.269.002.600,00</b>	<b>115.640.670.700,00</b>	<b>10.009.207.500,00</b>							<b>125.002.611.250,00</b>	
2.19		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA</b>							<b>65.828.995.500,00</b>	<b>81.352.071.500,00</b>	<b>79.682.131.500,00</b>	<b>13.853.136.000,00</b>							<b>81.219.896.780,00</b>	
1.	1.01.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				86,71 Nilai	86,71 Nilai	<b>1.058.042.007.807,00</b>	<b>1.059.632.444.125,00</b>	<b>1.011.942.522.303,00</b>	<b>128.627.665.564,00</b>							<b>1.186.669.673.371,00</b>	
	1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya capaian keterlaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah dalam 1 tahun anggaran				100 %	100 %	1.021.332.239.634,00	1.022.928.869.952,00	971.603.584.893,00	-49.728.654.741,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Balai Pemuda dan Olahraga		1.149.115.761.410,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	13.680.000,00	13.680.000,00	13.680.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			15.048.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya capaian keterlaksanaan administrasi barang milik daerah perangkat daerah dalam 1 tahun anggaran				100 %	100 %	801.000.000,00	801.000.000,00	771.900.000,00	-29.100.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Balai Pemuda dan Olahraga		869.385.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	18.750.000,00	18.750.000,00	18.750.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			20.625.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya capaian administrasi umum perangkat daerah				100 %	100 %	1.248.978.950,00	1.245.870.950,00	1.151.420.950,00	-97.558.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Balai Pemuda dan Olahraga		1.327.050.670,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	44.519.200,00	44.519.200,00	67.894.200,00	23.375.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			48.971.120,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	10.155.000,00	10.155.000,00	10.155.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			11.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	3 Paket	33.020.000,00	33.020.000,00	40.620.000,00	7.600.000,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			36.322.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	4.825.000,00	4.825.000,00	4.825.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			5.307.500,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1.01.01.1.06.0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	2.760.000,00	2.760.000,00	2.760.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			3.036.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1.01.01.1.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	2 Laporan	69.075.000,00	69.075.000,00	40.869.000,00	-28.206.000,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			75.801.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1.01.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah sehingga terpelihara dan terawat				50 %	50 %	407.819.000,00	406.229.000,00	398.749.000,00	-9.070.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Balai Pemuda dan Olahraga		199.194.600,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1.01.01.1.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				7 Unit	7 Unit	45.278.000,00	45.278.000,00	45.278.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1.01.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah dalam 1 tahun anggaran				100 %	100 %	23.329.030.560,00	23.328.434.560,00	23.279.096.260,00	-49.934.300,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Balai Pemuda dan Olahraga		25.958.974.857,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1.01.01.1.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	715.066.700,00	715.066.700,00	715.066.700,00	0,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			786.573.370,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1.01.01.1.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				3 Laporan	4 Laporan	7.542.116.000,00	7.542.116.000,00	7.542.116.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			8.296.498.100,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1.01.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah sehingga terpelihara dan terawat				100 %	100 %	4.385.990.300,00	4.385.090.300,00	4.619.160.300,00	233.170.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Balai Pemuda dan Olahraga		3.224.374.890,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1.01.01.1.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				9 Unit	9 Unit	121.600.300,00	121.600.300,00	121.600.300,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			133.760.330,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1.01.01.1.09.0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				8 Unit	8 Unit	1.291.330.000,00	1.291.330.000,00	1.525.400.000,00	234.070.000,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			1.068.463.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1.01.01.1.09.0010		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				9 Unit	9 Unit	34.600.000,00	34.600.000,00	34.600.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			38.060.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	persentase kelompok usaha pemuda di kantong kemiskinan yang memiliki rintisan usaha				9.09% %	9.09% %	2.671.029.300,00	2.725.477.300,00	2.528.342.300,00	4.726.799.160,00							7.397.828.460,00	
	2.19.02.1.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	Jumlah kelompok pemuda pada kantong kemiskinan yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan				13 kelompok	13 kelompok	2.421.029.300,00	2.475.477.300,00	2.278.342.300,00	-142.687.000,00			-	Peningkatan kualitas SDM	pemuda		7.122.828.460,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.02.1.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi																		
			Jumlah Pemuda Kader Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya				150 Orang	150 Orang	1.548.562.600,00	1.548.562.600,00	1.539.062.600,00	-9.500.000,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas SDM			2.254.730.060,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.02.1.01.0011	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi provinsi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi																		
			Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di provinsi				1 Dokumen	2 Dokumen	261.573.200,00	316.021.200,00	129.726.200,00	-131.847.000,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas SDM			0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.02.1.01.0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi																		
			Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi Dari Seluruh Kabupaten/Kota Yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda				25 Orang	25 Orang	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas SDM			351.883.400,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.02.1.01.0015	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi																		
			Jumlah Wirausaha Muda Tingkat Provinsi Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda				39 Orang	39 Orang	310.893.500,00	310.893.500,00	309.553.500,00	-1.340.000,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas SDM			4.516.215.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.02.1.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam penyelenggaraan organisasi kepemudaan				1 lembaga	1 lembaga	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM	lembaga kepemudaan		275.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.02.1.02.0004	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi																		
			Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi				1 Organisasi	1 Organisasi	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM			275.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
3.	2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Jumlah atlet yang mengikuti pembinaan intensif Pra POPNAS/POPNAS				365 Atlet	365 Atlet	51.711.191.000,00	67.179.819.000,00	65.470.175.000,00	10.071.411.900,00							61.782.602.900,00	
	2.19.03.1.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	Jumlah Kejuaraan /event olahraga prestasi di tingkat nasional yang diikuti				2 Event	2 Event	10.816.191.000,00	10.544.351.000,00	8.307.837.000,00	-2.508.354.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM	pelajar		11.897.810.100,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.03.1.02.0004	Keikutsertaan anggota kontingen provinsi dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga																		
			Jumlah anggota kontingen provinsi yang ikut serta dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga				347 Orang	230 Orang	8.349.253.000,00	8.077.413.000,00	5.840.899.000,00	-2.508.354.000,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM			9.184.178.300,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.03.1.02.0005	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi																		
			Jumlah Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi				1 Kegiatan	1 Kegiatan	264.162.000,00	264.162.000,00	264.162.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM			290.578.200,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.03.1.02.0006	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi yang terselenggara				1 Kegiatan	1 Kegiatan	2.202.776.000,00	2.202.776.000,00	2.202.776.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM			2.423.053.600,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.03.1.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	Jumlah bibit olahragawan siswa yang difasilitasi dalam pemantuan bakat cabang olahraga				400 Atlet	400 Atlet	20.100.000.000,00	35.779.214.000,00	36.306.084.000,00	16.206.084.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM	Atlet		24.340.192.800,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.03.1.03.0006	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga																		
			Jumlah penerima Penghargaan olahraga				250 Orang	325 Orang	20.100.000.000,00	33.651.766.000,00	34.178.636.000,00	14.078.636.000,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM			22.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.03.1.03.0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi Provinsi																		
			Jumlah Olahragawan Atlet Berprestasi Provinsi yang Dibina dan Diberikan Pengembangan				-	275 Orang	0,00	2.127.448.000,00	2.127.448.000,00	2.127.448.000,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan kualitas SDM			2.340.192.800,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.03.1.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah Lembaga yang terfasilitasi penyelenggaraan dan keikutsertaan pada kejuaraan multi event olahraga prestasi di tingkat nasional				3 Lembaga	3 Lembaga	20.795.000.000,00	20.856.254.000,00	20.856.254.000,00	61.254.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM	lembaga olahraga		25.544.600.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.03.1.04.0005	Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di provinsi																		
			Jumlah dokumen pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di provinsi				3 Dokumen	4 Dokumen	20.795.000.000,00	20.856.254.000,00	20.856.254.000,00	61.254.000,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM			25.544.600.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
4.	2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase Fasilitasi Organisasi Kepramukaan				100% Persentase	100% Persentase	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00							1.500.000.000,00	
	2.19.04.1.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam penyelenggaraan Kepramukaan				1 lembaga	1 lembaga	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM	Organisasi Pramuka		1.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.04.1.01.0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi																		
			Jumlah Organisasi Kepramukaan Provinsi yang Meningkatkan Kapasitasnya				1 Organisasi	1 Organisasi	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM			1.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
		<b>BALAI TEKNOLOGI KOMUNIKASI PENDIDIKAN</b>																		
									1.666.985.382.176,00	1.777.834.463.194,00	1.703.090.874.170,00	36.105.491.994,00							1.889.602.946.892,00	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							1.561.153.918.976,00	1.659.455.561.594,00	1.587.340.304.470,00	26.186.385.494,00							1.764.400.335.642,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							1.561.153.918.976,00	1.659.455.561.594,00	1.587.340.304.470,00	26.186.385.494,00							1.764.400.335.642,00	
1.	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				86,71 Nilai	86,71 Nilai	1.058.042.007.807,00	1.059.632.444.125,00	1.011.942.522.303,00	128.627.665.564,00							1.186.669.673.371,00	
	1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya capaian keterlaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah dalam 1 tahun anggaran				100 %	100 %	1.021.332.239.634,00	1.022.928.869.952,00	971.603.584.893,00	-49.728.654.741,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan		1.149.115.761.410,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.190.000,00	5.190.000,00	5.190.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya capaian keterlaksanaan administrasi barang milik daerah perangkat daerah dalam 1 tahun anggaran				100 %	100 %	801.000.000,00	801.000.000,00	771.900.000,00	-29.100.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan		869.385.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	10.650.000,00	10.650.000,00	10.650.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semai Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya capaian administrasi umum perangkat daerah				100 %	100 %	1.248.978.950,00	1.245.870.950,00	1.151.420.950,00	-97.558.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan		1.327.050.670,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	7.908.000,00	7.908.000,00	7.908.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			8.698.800,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			11.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	3 Paket	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semai Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			6.600.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	8.562.600,00	8.562.600,00	8.562.600,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semai Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			9.223.060,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	1.956.000,00	1.956.000,00	1.956.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			2.151.600,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				2 Laporan	2 Laporan	59.854.000,00	59.854.000,00	35.854.000,00	-24.000.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			65.839.400,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1.01.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Persentase kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah sehingga terpelihara dan terawat</i>				50 %	50 %	407.819.000,00	406.229.000,00	398.749.000,00	-9.070.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan		199.194.600,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1.01.01.1.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				8 Unit	8 Unit	45.266.000,00	45.266.000,00	45.266.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			49.792.600,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1.01.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah dalam 1 tahun anggaran</i>				100 %	100 %	23.329.030.560,00	23.328.434.560,00	23.279.096.260,00	-49.934.300,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan		25.958.974.857,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1.01.01.1.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				3 Laporan	4 Laporan	5.943.801.000,00	5.943.801.000,00	5.930.751.000,00	-13.050.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			6.780.181.100,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1.01.01.1.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				3 Laporan	3 Laporan	595.968.000,00	595.968.000,00	595.968.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			653.001.800,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1.01.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah sehingga terpelihara dan terawat</i>				100 %	100 %	4.385.990.300,00	4.385.090.300,00	4.619.160.300,00	233.170.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan		3.224.374.890,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1.01.01.1.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				3 Unit	3 Unit	57.960.400,00	57.960.400,00	57.960.400,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			63.756.440,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1.01.01.1.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				2 Unit	2 Unit	45.400.000,00	45.400.000,00	45.400.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			49.940.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1.01.01.1.09.0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1 Unit	1 Unit	152.960.000,00	152.960.000,00	152.960.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			58.300.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1.01.01.1.09.0010		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				20 Unit	21 Unit	47.420.000,00	47.420.000,00	47.420.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			52.162.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Putus Sekolah SMA/SMK Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat Jumlah penerima sertifikat keahlian teknik Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Gunungkidul Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Sleman Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Kulon Progo Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Bantul Persentase guru jenjang pendidikan menengah dan khusus pengguna media pembelajaran JogjaBelajar Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya di Kota Yogyakarta Angka Partisipasi Murni (APM) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik khusus PLB				46.98 %	0.19 100 40 41.47 46.83 46.98 49.46 55 58.62 77.52 80.5 86.15 % % Orang % % % % % % %	512.963.552.469,00	609.674.758.769,00	585.494.362.467,00	75.103.560.432,00							588.067.112.901,00	
	1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	<i>Iklim Inklusivitas SMA</i> <i>Iklim keamanan SMA</i> <i>Iklim kebinekaan SMA</i> <i>Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu)</i> <i>Kemampuan Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional</i> <i>Kemampuan Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional</i> <i>Persentase satuan pendidikan yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter</i> <i>Persentase SMA yang melaksanakan UKS</i>				32.10 % 84,73 Indeks	32.10 % 40 medali 61,49 % 74,46 % 83,28 Angka 84,73 Indeks 97,01 Indeks n/a %	183.149.527.179,00	194.283.954.479,00	192.397.699.927,00	9.248.172.748,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM	Siswa, Pendidik dan Tenaga Kependidikan		215.018.692.955,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.02.1.01.0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	<i>Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik</i>				45 Peserta Didik	45 Peserta Didik	675.000,00	675.000,00	675.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM			742.500,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.02.1.01.0057	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan</i>				418 Orang	719 Orang	324.193.200,00	324.193.200,00	324.193.200,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM			439.999.230,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.02.1.01.0058	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	<i>Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan</i>				13 Konten Digital	13 Konten Digital	102.220.000,00	102.220.000,00	102.220.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	DAU YANG DITENTUKAN P ENGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM			143.462.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.02.1.01.0059	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	<i>Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan</i>				180 Orang	180 Orang	108.230.900,00	108.230.900,00	108.230.900,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM			122.111.990,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	<i>Iklim Inklusivitas SMK Iklim keamanan SMK Iklim kebinekaan SMK Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu) Jumlah SMK yang memperoleh status BLUD Jumlah SMK yang menyelenggarakan Teaching Factory Kemampuan Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Kemampuan Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Persentase guru produktif yang memiliki sertifikat kompetensi dari BNSP Persentase lulusan SMK dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha Persentase SMK yang melaksanakan UKS</i>				58 %	22 medali 25,32 % 32,10 % 41 sekolah 55,01 Angka 58 % 66,05 Angka 6 sekolah 77,65 Angka 81,58 Angka 93,02 Angka	276.838.158.540,00	319.528.715.740,00	320.862.664.915,00	44.024.506.375,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM	Siswa, Pendidik dan Tenaga Kependidikan		308.892.870.055,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.02.1.02.0051	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	<i>Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan</i>				10 Konten Digital	10 Konten Digital	53.300.000,00	53.300.000,00	53.300.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM		58.630.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
	1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	<i>Iklim inklusivitas SMALB Iklim keamanan SMALB Iklim kebinekaan SMALB Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu) Jumlah penerima bantuan pembiayaan pendidikan yang tepat sasaran Kemampuan Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional Kemampuan Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional Persentase SLB yang melaksanakan UKS</i>				14 medali 26,10 % 4500 siswa 59,22 Angka 59,31 Angka 80,72 Angka 83,05 Angka 84,78 Angka	14 medali 26,10 % 4500 siswa 59,22 Angka 59,31 Angka 80,72 Angka 83,05 Angka 84,78 Angka	52.975.866.750,00	95.862.088.550,00	72.233.997.625,00	19.258.130.875,00		-		Peningkatan kualitas SDM	Siswa, Pendidik dan Tenaga Kependidikan	64.155.549.891,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
	1.01.02.1.03.0040	Pengadaan Alat Praktikum dan Peraga Peserta Didik	<i>Jumlah Alat Praktikum dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia</i>				-	52 Paket	0,00	0,00	436.678.932,00	436.678.932,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan kualitas SDM		0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
	1.01.02.1.03.0058	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	<i>Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan</i>				20 Orang	20 Orang	11.728.000,00	11.728.000,00	11.728.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM		12.900.800,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
	<b>BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KOTA YOGYAKARTA</b>								<b>1.666.985.382.176,00</b>	<b>1.777.834.463.194,00</b>	<b>1.703.090.874.170,00</b>	<b>36.105.491.994,00</b>						<b>1.889.602.946.892,00</b>		
1		<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>							<b>1.561.153.918.976,00</b>	<b>1.659.455.561.594,00</b>	<b>1.587.340.304.470,00</b>	<b>26.186.385.494,00</b>						<b>1.764.400.335.642,00</b>		
	<b>1.01</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>							<b>1.561.153.918.976,00</b>	<b>1.659.455.561.594,00</b>	<b>1.587.340.304.470,00</b>	<b>26.186.385.494,00</b>						<b>1.764.400.335.642,00</b>		
1.	<b>1.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>				<b>86,71 Nilai</b>	<b>86,71 Nilai</b>	<b>1.058.042.007.807,00</b>	<b>1.059.632.444.125,00</b>	<b>1.011.942.522.303,00</b>	<b>128.627.665.564,00</b>						<b>1.186.669.673.371,00</b>		
	1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Persentase terpenuhinya capaian keterlaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah dalam 1 tahun anggaran</i>				100 %	100 %	1.021.332.239.634,00	1.022.928.869.952,00	971.603.584.893,00	-49.728.654.741,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Balai Pendidikan Menengah Kota Yogyakarta		1.149.115.761.410,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	7.230.000,00	7.230.000,00	7.230.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Tegalarjo, Tegalarjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan		7.953.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
	1.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	<i>Persentase terpenuhinya capaian keterlaksanaan administrasi barang milik daerah perangkat daerah dalam 1 tahun anggaran</i>				100 %	100 %	801.000.000,00	801.000.000,00	771.900.000,00	-29.100.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Balai Pendidikan Menengah Kota Yogyakarta	869.385.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					1 Laporan	1 Laporan	115.950.000,00	115.950.000,00	115.950.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			127.545.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya capaian administrasi umum perangkat daerah				100 %	100 %	1.248.978.950,00	1.245.870.950,00	1.151.420.950,00	-97.558.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Balai Pendidikan Menengah Kota Yogyakarta		1.327.050.670,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	8.932.600,00	8.932.600,00	8.932.600,00	0,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			9.825.860,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	48.723.200,00	48.723.200,00	48.723.200,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			53.063.120,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	11.662.000,00	11.662.000,00	11.662.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			12.828.200,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.848.350,00	3.848.350,00	3.848.350,00	0,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			4.233.185,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	2.596.000,00	2.596.000,00	2.596.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			2.855.600,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	1 Laporan	49.500.000,00	49.500.000,00	45.000.000,00	-4.500.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			54.450.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah sehingga terpelihara dan terawat				50 %	50 %	407.819.000,00	406.229.000,00	398.749.000,00	-9.070.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Balai Pendidikan Menengah Kota Yogyakarta		199.194.600,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	44.960.000,00	44.960.000,00	44.960.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			49.456.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah dalam 1 tahun anggaran				100 %	100 %	23.329.030.560,00	23.328.434.560,00	23.279.096.260,00	-49.934.300,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Balai Pendidikan Menengah Kota Yogyakarta		25.958.974.857,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	194.346.400,00	194.346.400,00	194.346.400,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Tegalrejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			213.781.040,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	643.332.000,00	643.332.000,00	643.332.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			705.950.300,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah sehingga terpelihara dan terawat				100 %	100 %	4.385.990.300,00	4.385.090.300,00	4.619.160.300,00	233.170.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Balai Pendidikan Menengah Kota Yogyakarta		3.224.374.890,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Periznannya				1 Unit	1 Unit	28.301.000,00	28.301.000,00	28.301.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			31.131.100,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	67.120.000,00	67.120.000,00	67.120.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			73.832.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				11 Unit	11 Unit	12.116.000,00	12.116.000,00	12.116.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			13.411.200,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
2.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Putus Sekolah SMA/SMK Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat Jumlah penerima sertifikat keahlian teknik Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Gunungkidul Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Sleman Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Kulon Progo Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Bantul Persentase guru jenjang pendidikan menengah dan khusus pengguna media pembelajaran JogjaBelajar Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya di Kota Yogyakarta Angka Partisipasi Murni (APM) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik khusus PLB				0,19 100 40 41,47 46,83 46,98 49,46 55 58,62 77,52 80,5 86,15 % % % % % % % % % % % % % % % % % %	0,19 100 40 41,47 46,83 46,98 49,46 55 58,62 77,52 80,5 86,15 % % % % % % % % % % % % % % % % % % %	512.963.552.469,00	609.674.758.769,00	585.494.362.467,00	75.103.560.432,00							588.067.112.901,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Iklim Inklusivitas SMA Iklim keamanan SMA Iklim kebinekaan SMA Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu) Jumlah penerima bantuan pembiayaan pendidikan yang tepat sasaran Kemampuan Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Kemampuan Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Persentase satuan pendidikan yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter Persentase SMA yang melaksanakan UKS				32,10 % 400 siswa 40 medali 61,49 % 74,46 % 83,28 Angka 84,73 Indeks 97,01 Indeks	32,10 % 400 siswa 40 medali 61,49 % 74,46 % 83,28 Angka 84,73 Indeks 97,01 Indeks n/a %	183.149.527.179,00	194.283.954.479,00	192.397.699.927,00	9.248.172.748,00			-	Penurunan tingkat kemiskinan	Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA, Siswa SMA		215.018.692.955,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.02.1.01.0014	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				-	1 Unit	0,00	453.600.000,00	453.600.000,00	453.600.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Penurunan tingkat kemiskinan			498.960.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1.01.02.1.01.0019		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah																		
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				-	1 Ruang	0,00	0,00	312.212.000,00	312.212.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Penurunan tingkat kemiskinan			0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1.01.02.1.01.0049		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa																		
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				400 Peserta Didik	300 Peserta Didik	233.892.800,00	233.892.800,00	207.139.800,00	-26.753.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas SDM			258.516.060,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1.01.02.1.01.0052		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas																		
			Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				42 Satuan Pendidikan	42 Satuan Pendidikan	4.110.000,00	4.110.000,00	4.110.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas SDM			7.821.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1.01.02.1.01.0060		Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				1 Dokumen	1 Dokumen	42.098.500,00	42.098.500,00	18.098.500,00	-24.000.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas SDM			85.014.600,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1.01.02.1.01.0061		Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan																		
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				2 Dokumen	3 Dokumen	14.220.000,00	27.832.000,00	27.832.000,00	13.612.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas SDM			15.642.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1.01.02.1.01.0063		Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan																		
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi				1 Komunitas	1 Komunitas	12.515.000,00	12.515.000,00	12.515.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas SDM			13.766.500,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1.01.02.1.01.0065		Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi																		
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				1 Kegiatan	1 Kegiatan	9.150.000,00	9.150.000,00	9.150.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas SDM			10.065.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1.01.02.1.01.0071		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium																		
			Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				-	1 Ruang	0,00	209.800.000,00	209.800.000,00	209.800.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan kualitas SDM			230.780.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1.01.02.1.01.0078		Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik																		
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				11 Satuan Pendidikan	11 Satuan Pendidikan	14.062.428.859,00	14.062.428.859,00	14.025.995.859,00	-36.433.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penurunan tingkat kemiskinan			15.768.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1.01.02.1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan																		
			Iklim Inklusivitas SMK Iklim Keamanan SMK Iklim Ketahanan SMK Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu) Jumlah SMK yang memperoleh status BLUD Jumlah SMK yang menyelenggarakan Teaching Factory Kemampuan Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Kemampuan Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Persentase guru produktif yang memiliki sertifikat kompetensi dari BNSP Persentase lulusan SMK dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha Persentase SMK yang melaksanakan UKS				22 medali 25,32 % 32,10 % 41 sekolah 55,01 Angka 58 % 66,05 Angka 6 sekolah 77,65 Angka 81,58 Angka 93,02 Angka	22 medali 25,32 % 32,10 % 41 sekolah 55,01 Angka 58 % 66,05 Angka 6 sekolah 77,65 Angka 81,58 Angka 93,02 Angka	276.838.158.540,00	319.528.715.740,00	320.862.664.915,00	44.024.506.375,00		Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM	Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMK, Siswa SMK		308.892.870.055,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
1.01.02.1.02.0041		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa																		
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				100 Peserta Didik	100 Peserta Didik	135.067.100,00	134.812.100,00	128.080.100,00	-6.987.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM			148.573.810,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1.01.02.1.02.0045		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan																		
			Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				28 Satuan Pendidikan	28 Satuan Pendidikan	3.090.000,00	3.090.000,00	3.090.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM			6.979.500,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1.01.02.1.02.0053		Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				1 Dokumen	1 Dokumen	12.900.000,00	12.900.000,00	12.900.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM			52.432.600,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.02.1.02.0054	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan																		
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				2 Dokumen	3 Dokumen	12.690.000,00	33.108.000,00	33.108.000,00	20.418.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM			13.959.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.02.1.02.0057	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan																		
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi				1 Komunitas	1 Komunitas	10.935.000,00	10.935.000,00	10.935.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM			12.028.500,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.02.1.02.0059	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi																		
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				1 Kegiatan	1 Kegiatan	7.722.000,00	7.722.000,00	7.722.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM			8.494.200,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.02.1.02.0062	Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat				-	1 Unit	0,00	0,00	967.248.000,00	967.248.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Penurunan tingkat kemiskinan			0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.02.1.02.0072	Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik																		
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				2 Satuan Pendidikan	2 Satuan Pendidikan	3.366.600.000,00	3.392.100.000,00	3.391.108.000,00	24.508.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM			12.454.860.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
		<b>BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN BANTUL</b>							<b>1.666.985.382.176,00</b>	<b>1.777.834.463.194,00</b>	<b>1.703.090.874.170,00</b>	<b>36.105.491.994,00</b>							<b>1.889.602.946.892,00</b>	
	1	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>							<b>1.561.153.918.976,00</b>	<b>1.659.455.561.594,00</b>	<b>1.587.340.304.470,00</b>	<b>26.186.385.494,00</b>							<b>1.764.400.335.642,00</b>	
	1.01	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>							<b>1.561.153.918.976,00</b>	<b>1.659.455.561.594,00</b>	<b>1.587.340.304.470,00</b>	<b>26.186.385.494,00</b>							<b>1.764.400.335.642,00</b>	
	1.01.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>					86,71 Nilai	86,71 Nilai	<b>1.058.042.007.807,00</b>	<b>1.059.632.444.125,00</b>	<b>1.011.942.522.303,00</b>	<b>128.627.665.564,00</b>							<b>1.186.669.673.371,00</b>	
	1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya capaian keterlaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah dalam 1 tahun anggaran				100 %	100 %	1.021.332.239.634,00	1.022.928.869.952,00	971.603.584.893,00	-49.728.654.741,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Bantul		1.149.115.761.410,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	7.230.000,00	7.230.000,00	7.230.000,00	0,00	Kab. Bantul, Sewon, Timbulharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			7.953.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.01.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya capaian keterlaksanaan administrasi barang milik daerah perangkat daerah dalam 1 tahun anggaran				100 %	100 %	801.000.000,00	801.000.000,00	771.900.000,00	-29.100.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Bantul		869.385.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1.01.01.1.03.0006		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	146.850.000,00	146.850.000,00	146.850.000,00	0,00	Kab. Bantul, Sewon, Timbulharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			161.535.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1.01.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya capaian administrasi umum perangkat daerah				100 %	100 %	1.248.978.950,00	1.245.870.950,00	1.151.420.950,00	-97.558.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Bantul		1.327.050.670,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1.01.01.1.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	9.100.000,00	9.100.000,00	9.100.000,00	0,00	Kab. Bantul, Sewon, Timbulharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			10.010.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1.01.01.1.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	16.650.000,00	16.650.000,00	16.650.000,00	0,00	Kab. Bantul, Sewon, Timbulharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			18.315.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1.01.01.1.06.0003		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	6.900.000,00	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	Kab. Bantul, Sewon, Timbulharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			7.601.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1.01.01.1.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	9.005.000,00	9.005.000,00	9.005.000,00	0,00	Kab. Bantul, Sewon, Timbulharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			9.905.500,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1.01.01.1.06.0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	1.764.000,00	1.764.000,00	1.764.000,00	0,00	Kab. Bantul, Sewon, Timbulharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			1.940.400,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1.01.01.1.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	2 Laporan	55.000.000,00	55.000.000,00	53.980.000,00	-1.020.000,00	Kab. Bantul, Sewon, Timbulharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			60.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1.01.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah sehingga terpelihara dan terawat				50 %	50 %	407.819.000,00	406.229.000,00	398.749.000,00	-9.070.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Bantul		199.194.600,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1.01.01.1.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	4 Unit	45.440.000,00	45.440.000,00	45.440.000,00	0,00	Kab. Bantul, Sewon, Timbulharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah dalam 1 tahun anggaran				100 %	100 %	23.329.030.560,00	23.328.434.560,00	23.279.096.260,00	-49.934.300,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Bantul		25.958.974.857,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					3 Laporan	3 Laporan	122.185.000,00	122.185.000,00	122.185.000,00	0,00	Kab. Bantul, Sewon, Timbulharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan		134.468.950,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
	1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					4 Laporan	4 Laporan	859.536.000,00	859.536.000,00	859.536.000,00	0,00	Kab. Bantul, Sewon, Timbulharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan		944.493.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
	1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah sehingga terpelihara dan terawat				100 %	100 %	4.385.990.300,00	4.385.090.300,00	4.619.160.300,00	233.170.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Bantul		3.224.374.890,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					1 Unit	1 Unit	21.277.000,00	21.277.000,00	21.277.000,00	0,00	Kab. Bantul, Sewon, Timbulharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan		23.404.700,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
	1.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					1 Unit	1 Unit	29.904.000,00	29.904.000,00	29.904.000,00	0,00	Kab. Bantul, Sewon, Timbulharjo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan		32.894.400,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
	1.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					15 Unit	15 Unit	11.570.000,00	11.570.000,00	11.570.000,00	0,00	Kab. Bantul, Sewon, Timbulharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas SDM		12.727.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
2.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Putus Sekolah SMA/SMK Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat Jumlah penerima sertifikat keahlian teknik Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Gunungkidul Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Sleman Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Kulon Progo Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Bantul Persentase guru jenjang pendidikan menengah dan khusus pengguna media pembelajaran JogjaBelajar Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya di Kota Yogyakarta Angka Partisipasi Murni (APM) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik khusus PLB				0,19 100 40 41,47 46,83 46,98 49,46 55 58,62 77,52 80,5 86,15 % % % % % % % % % % % % %	0,19 100 40 41,47 46,83 46,98 49,46 55 58,62 77,52 80,5 86,15 % % Orang % % % % % % % % % % % %	512.963.552.469,00	609.674.758.769,00	585.494.362.467,00	75.103.560.432,00						588.067.112.901,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.01.02.1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	<i>Iklim Inklusivitas SMA Iklim keamanan SMA Iklim kebinekaan SMA Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu) Jumlah penerima bantuan pembiayaan pendidikan yang tepat sasaran Kemampuan Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Kemampuan Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Persentase satuan pendidikan yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter Persentase SMA yang melaksanakan UKS</i>				32.10 % 400 siswa 40 medali 61,49 % 74,46 % 83,28 Angka 84,73 Indeks 97,01 Indeks	32.10 % 400 siswa 40 medali 61,49 % 74,46 % 83,28 Angka 84,73 Indeks 97,01 Indeks n/a %	183.149.527.179,00	194.283.954.479,00	192.397.699.927,00	9.248.172.748,00			-	Penurunan tingkat kemiskinan	Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA, Siswa SMA		215.018.692.955,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1.01.02.1.01.0019		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	<i>Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat</i>				-	2 Ruang	0,00	111.787.000,00	195.728.000,00	195.728.000,00	Kab. Bantul, Dlingo, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Sewon, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Penurunan tingkat kemiskinan		122.965.700,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
1.01.02.1.01.0049		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	<i>Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik</i>				450 Peserta Didik	450 Peserta Didik	190.200.000,00	190.200.000,00	155.040.000,00	-35.160.000,00	Kab. Bantul, Sewon, Timbulharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas SDM		186.010.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
1.01.02.1.01.0052		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	<i>Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen</i>				37 Satuan Pendidikan	37 Satuan Pendidikan	2.585.000,00	2.585.000,00	2.585.000,00	0,00	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas SDM		4.671.150,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
1.01.02.1.01.0060		Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	41.370.000,00	41.370.000,00	41.370.000,00	0,00	Kab. Bantul, Sewon, Timbulharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas SDM		119.972.600,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
1.01.02.1.01.0061		Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	<i>Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan</i>				2 Dokumen	3 Dokumen	11.554.000,00	25.166.000,00	25.166.000,00	13.612.000,00	Kab. Bantul, Sewon, Timbulharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas SDM		29.847.400,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
1.01.02.1.01.0063		Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	<i>Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi</i>				130 Komunitas	45 Komunitas	6.031.000,00	6.031.000,00	6.031.000,00	0,00	Kab. Bantul, Sewon, Timbulharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas SDM		10.853.700,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
1.01.02.1.01.0065		Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	<i>Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi</i>				1 Kegiatan	1 Kegiatan	7.857.000,00	7.857.000,00	7.857.000,00	0,00	Kab. Bantul, Sewon, Timbulharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas SDM		19.322.600,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
1.01.02.1.01.0068		Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	<i>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat</i>				-	3 Unit	0,00	75.601.000,00	211.877.300,00	211.877.300,00	Kab. Bantul, Sewon, Timbulharjo	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Penurunan tingkat kemiskinan		83.161.100,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
1.01.02.1.01.0078		Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	<i>Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar</i>				19 Satuan Pendidikan	19 Satuan Pendidikan	19.769.190.920,00	19.769.190.720,00	19.417.234.720,00	-351.956.200,00	Kab. Bantul, Sewon, Timbulharjo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penurunan tingkat kemiskinan		22.291.610.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
1.01.02.1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	<i>Iklim Inklusivitas SMK Iklim keamanan SMK Iklim kebinekaan SMK Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu) Jumlah SMK yang memperoleh status BLUD Jumlah SMK yang menyelenggarakan Teaching Factory Kemampuan Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Kemampuan Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Persentase guru produktif yang memiliki sertifikat kompetensi dari BNSP Persentase lulusan SMK dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha Persentase SMK yang melaksanakan UKS</i>				22 medali 25,32 % 32,10 % 41 sekolah 55,01 Angka 58 % 66,05 Angka 6 sekolah 77,65 Angka 81,58 Angka 93,02 Angka	22 medali 25,32 % 32,10 % 41 sekolah 55,01 Angka 58 % 66,05 Angka 6 sekolah 77,65 Angka 81,58 Angka 93,02 Angka	276.838.158.540,00	319.528.715.740,00	320.862.664.915,00	44.024.506.375,00		Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM	Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMK, Siswa SMK		308.892.870.055,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
1.01.02.1.02.0041		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	<i>Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik</i>				300 Peserta Didik	125 Peserta Didik	85.326.500,00	85.326.500,00	79.326.500,00	-6.000.000,00	Kab. Bantul, Sewon, Timbulharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM		91.990.250,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
1.01.02.1.02.0045		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Sekolah Menengah Kujuran yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				47 Satuan Pendidikan	47 Satuan Pendidikan	2.792.500,00	2.792.500,00	2.792.500,00	0,00	Kab. Bantul, Bantul, Trienggo Kab. Bantul, Sewon, Timbulharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM			5.880.600,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
	1.01.02.1.02.0053	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				1 Dokumen	1 Dokumen	12.650.000,00	12.650.000,00	12.650.000,00	0,00	Kab. Bantul, Sewon, Timbulharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM			92.391.200,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
	1.01.02.1.02.0054	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan																			
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				2 Dokumen	3 Dokumen	12.600.000,00	33.018.000,00	33.018.000,00	20.418.000,00	Kab. Bantul, Sewon, Timbulharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM			32.536.900,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
	1.01.02.1.02.0057	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan																			
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi				200 Komunitas	50 Komunitas	6.102.000,00	6.102.000,00	6.102.000,00	0,00	Kab. Bantul, Sewon, Timbulharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM			10.771.200,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
	1.01.02.1.02.0059	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi																			
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				1 Kegiatan	1 Kegiatan	8.622.000,00	8.622.000,00	8.622.000,00	0,00	Kab. Bantul, Sewon, Timbulharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM			16.473.600,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
	1.01.02.1.02.0072	Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik																			
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				9 Satuan Pendidikan	9 Satuan Pendidikan	16.033.600.000,00	16.048.069.000,00	15.663.294.900,00	-370.305.100,00	Kab. Bantul, Sewon, Timbulharjo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM			22.645.700.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
		<b>BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN KULON PROGO</b>																			
									1.666.985.382.176,00	1.777.834.463.194,00	1.703.090.874.170,00	36.105.491.994,00							1.889.602.946.892,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							1.561.153.918.976,00	1.659.455.561.594,00	1.587.340.304.470,00	26.186.385.494,00							1.764.400.335.642,00		
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							1.561.153.918.976,00	1.659.455.561.594,00	1.587.340.304.470,00	26.186.385.494,00							1.764.400.335.642,00		
	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				86,71 Nilai	86,71 Nilai	1.058.042.007.807,00	1.059.632.444.125,00	1.011.942.522.303,00	128.627.665.564,00							1.186.669.673.371,00		
	1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya capaian keterlaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah dalam 1 tahun anggaran				100 %	100 %	1.021.332.239.634,00	1.022.928.869.952,00	971.603.584.893,00	-49.728.654.741,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Kulon Progo			1.149.115.761.410,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	7.230.000,00	7.230.000,00	7.230.000,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Wates, Wates	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			7.953.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1.01.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya capaian keterlaksanaan administrasi barang milik daerah perangkat daerah dalam 1 tahun anggaran				100 %	100 %	801.000.000,00	801.000.000,00	771.900.000,00	-29.100.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Kulon Progo		869.385.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1.01.01.1.03.0006		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	126.210.000,00	126.210.000,00	119.610.000,00	-6.600.000,00	Kab. Kulon Progo, Wates, Wates	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			138.831.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1.01.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya capaian administrasi umum perangkat daerah				100 %	100 %	1.248.978.950,00	1.245.870.950,00	1.151.420.950,00	-97.558.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Kulon Progo		1.327.050.670,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1.01.01.1.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	35.718.000,00	35.718.000,00	35.718.000,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Wates, Wates	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			39.029.100,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1.01.01.1.06.0003		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.631.000,00	10.631.000,00	10.631.000,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Wates, Wates	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			11.694.100,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1.01.01.1.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	8.500.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Wates, Wates	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			9.350.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1.01.01.1.06.0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	1.500.000,00	1.470.000,00	1.470.000,00	-30.000,00	Kab. Kulon Progo, Wates, Wates	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			1.650.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1.01.01.1.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	2 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	47.700.000,00	-2.300.000,00	Kab. Kulon Progo, Wates, Wates	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			55.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1.01.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah sehingga terpelihara dan terawat				50 %	50 %	407.819.000,00	406.229.000,00	398.749.000,00	-9.070.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Kulon Progo		199.194.600,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1.01.01.1.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				6 Unit	5 Unit	45.207.000,00	45.207.000,00	39.807.000,00	-5.400.000,00	Kab. Kulon Progo, Wates, Wates	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1.01.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah dalam 1 tahun anggaran				100 %	100 %	23.329.030.560,00	23.328.434.560,00	23.279.096.260,00	-49.934.300,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Kulon Progo		25.958.974.857,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	93.660.000,00	93.660.000,00	93.660.000,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Wates, Wates	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			103.026.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	704.368.000,00	704.368.000,00	704.368.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kulon Progo, Wates, Wates	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			772.312.200,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah sehingga terpelihara dan terawat				100 %	100 %	4.385.990.300,00	4.385.090.300,00	4.619.160.300,00	233.170.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Kulon Progo		3.224.374.890,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinan				1 Unit	1 Unit	35.352.000,00	35.352.000,00	35.352.000,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Wates, Wates	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			38.887.200,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	29.400.000,00	29.400.000,00	29.400.000,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Wates, Wates	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			32.340.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				10 Unit	10 Unit	4.868.000,00	4.868.000,00	4.868.000,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Wates, Wates	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			5.354.800,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
2.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Putus Sekolah SMA/SMK Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat Jumlah penerima sertifikat keahlian teknik Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Gunungkidul Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Sleman Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Kulon Progo Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Bantul Persentase guru jenjang pendidikan menengah dan khusus pengguna media pembelajaran JogjaBelajar Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya di Kota Yogyakarta Angka Partisipasi Murni (APM) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik khusus PLB				0,19 100 40 41,47 46,83 46,98 49,46 55 58,62 77,52 80,5 86,15 % % Orang % % % % % % % % % % % % %	0,19 100 40 41,47 46,83 46,98 49,46 55 58,62 77,52 80,5 86,15 % % Orang % % % % % % % % % % % % %	512.963.552.469,00	609.674.758.769,00	585.494.362.467,00	75.103.560.432,00						588.067.112.901,00		
	1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Iklim Inklusivitas SMA Iklim keamanan SMA Iklim kebinekaan SMA Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu) Jumlah penerima bantuan pembiayaan pendidikan yang tepat sasaran Kemampuan Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Kemampuan Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Persentase satuan pendidikan yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter Persentase SMA yang melaksanakan UKS				32,10 % 400 siswa 40 medali 61,49 % 74,46 % 83,28 84,73 97,01 Indeks	32,10 % 400 siswa 40 medali 61,49 % 74,46 % 83,28 84,73 97,01 Indeks n/a %	183.149.527.179,00	194.283.954.479,00	192.397.699.927,00	9.248.172.748,00			-	Penurunan tingkat kemiskinan	Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA, Siswa SMA		215.018.692.955,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.01.02.1.01.0019		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				-	1 Ruang	0,00	0,00	288.162.000,00	288.162.000,00	Kab. Kulon Progo, Wates, Wates	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Penurunan tingkat kemiskinan			0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1.01.02.1.01.0049		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				400 Peserta Didik	150 Peserta Didik	201.825.600,00	201.825.600,00	129.900.600,00	-71.925.000,00	Kab. Kulon Progo, Wates, Wates	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM		222.008.160,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
1.01.02.1.01.0052		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				16 Satuan Pendidikan	16 Satuan Pendidikan	1.244.800,00	1.244.800,00	1.244.800,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Wates, Wates	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM		1.369.280,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
1.01.02.1.01.0060		Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				1 Dokumen	1 Dokumen	34.568.700,00	34.568.700,00	9.668.700,00	-24.900.000,00	Kab. Kulon Progo, Wates, Wates	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM		68.916.540,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
1.01.02.1.01.0061		Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				1 Dokumen	3 Dokumen	14.550.000,00	28.162.000,00	28.162.000,00	13.612.000,00	Kab. Kulon Progo, Wates, Wates	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM		8.429.300,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
1.01.02.1.01.0063		Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi				1 Komunitas	1 Komunitas	10.956.000,00	10.956.000,00	10.956.000,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Wates, Wates	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM		12.051.600,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
1.01.02.1.01.0065		Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				1 Kegiatan	1 Kegiatan	6.530.000,00	6.530.000,00	6.530.000,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Wates, Wates	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM		19.784.600,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
1.01.02.1.01.0068		Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat				-	1 Unit	0,00	130.390.000,00	130.390.000,00	130.390.000,00	Kab. Kulon Progo, Wates, Wates	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penurunan tingkat kemiskinan		143.429.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
1.01.02.1.01.0071		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				-	1 Ruang	0,00	302.763.000,00	302.763.000,00	302.763.000,00	Kab. Kulon Progo, Wates, Wates	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM		333.039.300,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
1.01.02.1.01.0078		Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik																	8.907.250.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				11 Satuan Pendidikan	11 Satuan Pendidikan	7.731.600.000,00	7.731.600.000,00	7.634.660.000,00	-96.940.000,00	Kab. Kulon Progo, Wates, Wates	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penurunan tingkat kemiskinan			8.907.250.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1.01.02.1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Iklim Inklusivitas SMK Iklim keamanan SMK Iklim kebinekaan SMK Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu) Jumlah SMK yang memperoleh status BLUD Jumlah SMK yang menyelenggarakan Teaching Factory Kemampuan Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Kemampuan Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Persentase guru produktif yang memiliki sertifikat kompetensi dari BNSP Persentase lulusan SMK dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha Persentase SMK yang melaksanakan UKS				22 medali 25,32 % 32,10 % 41 sekolah 55,01 Angka 58 % 66,05 Angka 6 sekolah 77,65 Angka 81,58 Angka 93,02 Angka	22 medali 25,32 % 32,10 % 41 sekolah 55,01 Angka 58 % 66,05 Angka 6 sekolah 77,65 Angka 81,58 Angka 93,02 Angka	276.838.158.540,00	319.528.715.740,00	320.862.664.915,00	44.024.506.375,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM	Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMK, Siswa SMK		308.892.870.055,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1.01.02.1.02.0041		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				200 Peserta Didik	115 Peserta Didik	93.527.800,00	93.527.800,00	93.527.800,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Wates, Wates	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM			102.880.580,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1.01.02.1.02.0045		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				32 Satuan Pendidikan	32 Satuan Pendidikan	1.244.800,00	1.244.800,00	1.244.800,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Wates, Wates	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM			1.369.280,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1.01.02.1.02.0053		Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				1 Dokumen	1 Dokumen	5.763.400,00	5.763.400,00	5.763.400,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Wates, Wates	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM			37.230.710,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1.01.02.1.02.0054		Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				2 Dokumen	3 Dokumen	15.326.000,00	35.744.000,00	35.744.000,00	20.418.000,00	Kab. Kulon Progo, Wates, Wates	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM			8.429.300,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1.01.02.1.02.0057		Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi				1 Komunitas	1 Komunitas	10.956.000,00	10.956.000,00	10.956.000,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Wates, Wates	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM			12.051.600,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.02.1.02.0059	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi																		
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				1 Kegiatan	1 Kegiatan	7.973.000,00	7.973.000,00	7.973.000,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Wates, Wates	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM			19.784.600,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.02.1.02.0072	Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik																		
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				6 Satuan Pendidikan	6 Satuan Pendidikan	7.301.200.000,00	7.311.400.000,00	7.215.247.200,00	-85.952.800,00	Kab. Kulon Progo, Wates, Wates	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM			10.116.480.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
		<b>BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL</b>							<b>1.666.985.382.176,00</b>	<b>1.777.834.463.194,00</b>	<b>1.703.090.874.170,00</b>	<b>36.105.491.994,00</b>							<b>1.889.602.946.892,00</b>	
	<b>1</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>							<b>1.561.153.918.976,00</b>	<b>1.659.455.561.594,00</b>	<b>1.587.340.304.470,00</b>	<b>26.186.385.494,00</b>							<b>1.764.400.335.642,00</b>	
	<b>1.01</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>							<b>1.561.153.918.976,00</b>	<b>1.659.455.561.594,00</b>	<b>1.587.340.304.470,00</b>	<b>26.186.385.494,00</b>							<b>1.764.400.335.642,00</b>	
	1.	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			86,71 Nilai	86,71 Nilai	1.058.042.007.807,00	1.059.632.444.125,00	1.011.942.522.303,00	128.627.665.564,00							1.186.669.673.371,00	
	1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya capaian keterlaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah dalam 1 tahun anggaran				100 %	100 %	1.021.332.239.634,00	1.022.928.869.952,00	971.603.584.893,00	-49.728.654.741,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Gunungkidul		1.149.115.761.410,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	7.230.000,00	7.230.000,00	7.230.000,00	0,00	Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			7.953.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya capaian keterlaksanaan administrasi barang milik daerah perangkat daerah dalam 1 tahun anggaran				100 %	100 %	801.000.000,00	801.000.000,00	771.900.000,00	-29.100.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Gunungkidul		869.385.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	136.290.000,00	136.290.000,00	136.290.000,00	0,00	Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			149.919.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya capaian administrasi umum perangkat daerah				100 %	100 %	1.248.978.950,00	1.245.870.950,00	1.151.420.950,00	-97.558.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Gunungkidul		1.327.050.670,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	7.955.600,00	7.955.600,00	7.955.600,00	0,00	Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			8.751.160,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	18.594.000,00	18.594.000,00	18.594.000,00	0,00	Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			19.800.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1.01.01.1.06.0003		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	10.029.000,00	10.029.000,00	10.029.000,00	0,00	Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			11.031.900,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1.01.01.1.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	6.707.700,00	6.707.700,00	6.707.700,00	0,00	Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			7.378.470,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1.01.01.1.06.0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	1.500.000,00	1.470.000,00	1.470.000,00	-30.000,00	Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			1.650.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1.01.01.1.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	2 Laporan	65.500.000,00	65.500.000,00	61.420.000,00	-4.080.000,00	Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			68.750.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1.01.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah sehingga terpelihara dan terawat				50 %	50 %	407.819.000,00	406.229.000,00	398.749.000,00	-9.070.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Gunungkidul		199.194.600,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1.01.01.1.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	45.390.000,00	43.800.000,00	43.800.000,00	-1.590.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1.01.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah dalam 1 tahun anggaran				100 %	100 %	23.329.030.560,00	23.328.434.560,00	23.279.096.260,00	-49.934.300,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Gunungkidul		25.958.974.857,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1.01.01.1.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	149.128.700,00	149.128.700,00	145.840.400,00	-3.288.300,00	Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			164.041.570,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1.01.01.1.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	701.685.000,00	701.685.000,00	664.221.000,00	-37.464.000,00	Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			775.747.500,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1.01.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah sehingga terpelihara dan terawat				100 %	100 %	4.385.990.300,00	4.385.090.300,00	4.619.160.300,00	233.170.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Gunungkidul		3.224.374.890,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1.01.01.1.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	1 Unit	39.962.000,00	39.962.000,00	39.962.000,00	0,00	Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			43.958.200,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	1.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			88.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
	1.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				17 Unit	17 Unit	42.126.000,00	42.126.000,00	42.126.000,00	0,00	Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			46.338.600,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
2.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Putus Sekolah SMA/SMK Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat Jumlah penerima sertifikat keahlian teknik Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Gunungkidul Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Sleman Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Kulon Progo Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Bantul Persentase guru jenjang pendidikan menengah dan khusus pengguna media pembelajaran JajajaBelajar Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya di Kota Yogyakarta Angka Partisipasi Murni (APM) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik khusus PLB				0,19 100 40 41,47 46,83 46,98 49,46 55 58,62 77,52 80,5 86,15 % % Orang % % % % % % % % %	0,19 100 40 41,47 46,83 46,98 49,46 55 58,62 77,52 80,5 86,15 % % Orang % % % % % % % % %	512.963.552.469,00	609.674.758.769,00	585.494.362.467,00	75.103.560.432,00							588.067.112.901,00		
	1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Iklim Inklusivitas SMA Iklim Keamanan SMA Iklim Kebinekaan SMA Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu) Jumlah penerima bantuan pembiayaan pendidikan yang tepat sasaran Kemampuan Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Kemampuan Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Persentase satuan pendidikan yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter Persentase SMA yang melaksanakan UKS				32,10 % 400 siswa 40 medali 61,49 % 74,46 % 83,28 84,73 Indeks 97,01 Indeks	32,10 % 400 siswa 40 medali 61,49 % 74,46 % 83,28 84,73 Indeks 97,01 Indeks n/a %	183.149.527.179,00	194.283.954.479,00	192.397.699.927,00	9.248.172.748,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM	Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA, Siswa SMA			215.018.692.955,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.02.1.01.0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa																			
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				200 Peserta Didik	200 Peserta Didik	300.641.200,00	300.641.200,00	219.164.400,00	-81.476.800,00	Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM			342.237.500,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
	1.01.02.1.01.0052	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas																			
			Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				11 Satuan Pendidikan	11 Satuan Pendidikan	11.959.800,00	11.959.800,00	11.559.800,00	-400.000,00	Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM			21.061.700,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
	1.01.02.1.01.0060	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				1 Dokumen	1 Dokumen	70.063.200,00	70.063.200,00	55.663.200,00	-14.400.000,00	Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM			153.799.800,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1.01.02.1.01.0061		Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan																		
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				2 Dokumen	3 Dokumen	19.172.500,00	32.784.500,00	27.294.500,00	8.122.000,00	Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM			21.090.190,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1.01.02.1.01.0063		Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan																		
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi				50 Komunitas	24 Komunitas	19.144.700,00	19.144.700,00	13.744.700,00	-5.400.000,00	Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM			39.215.660,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1.01.02.1.01.0065		Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi																		
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				1 Kegiatan	1 Kegiatan	7.100.750,00	7.100.750,00	5.315.750,00	-1.785.000,00	Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM			13.685.320,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1.01.02.1.01.0068		Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat				-	3 Unit	0,00	0,00	312.645.400,00	312.645.400,00	Kab. Gunungkidul, Patuk, Semua Kel/Desa Kab. Gunungkidul, Semin, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Penurunan tingkat kemiskinan			0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1.01.02.1.01.0078		Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik																		
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				11 Satuan Pendidikan	11 Satuan Pendidikan	9.279.300.000,00	9.279.300.000,00	9.145.824.100,00	-133.475.900,00	Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penurunan tingkat kemiskinan			10.561.980.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1.01.02.1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan																		
			Iklim Inklusivitas SMK Iklim keamanan SMK Iklim kebinekaan SMK Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu) Jumlah SMK yang memperoleh status BLUD Jumlah SMK yang menyelenggarakan Teaching Factory Kemampuan Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Kemampuan Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Persentase guru produktif yang memiliki sertifikasi kompetensi dari BNSP Persentase lulusan SMK dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha Persentase SMK yang melaksanakan UKS				22 medali 25,32 % 32,10 % 41 sekolah 55,01 Angka 58 % 66,05 Angka 6 sekolah 77,65 Angka 81,58 Angka 93,02 Angka	22 medali 25,32 % 32,10 % 41 sekolah 55,01 Angka 58 % 66,05 Angka 6 sekolah 77,65 Angka 81,58 Angka 93,02 Angka	276.838.158.540,00	319.528.715.740,00	320.862.664.915,00	44.024.506.375,00		-	Penurunan tingkat kemiskinan	Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMK, Siswa SMK			308.892.870.055,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1.01.02.1.02.0018		Rehabilitasi Ruang Laboratorium																		
			Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi				-	1 Ruang	0,00	0,00	142.073.000,00	142.073.000,00	Kab. Gunungkidul, Girisubo, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Penurunan tingkat kemiskinan			0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1.01.02.1.02.0041		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				200 Peserta Didik	150 Peserta Didik	128.256.000,00	128.256.000,00	125.456.000,00	-2.800.000,00	Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM			181.701.300,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1.01.02.1.02.0045		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan																		
			Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				13 Satuan Pendidikan	13 Satuan Pendidikan	18.002.000,00	18.002.000,00	17.747.000,00	-255.000,00	Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM			20.404.560,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1.01.02.1.02.0053		Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				1 Dokumen	1 Dokumen	20.450.000,00	20.450.000,00	17.950.000,00	-2.500.000,00	Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM			95.135.700,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1.01.02.1.02.0054		Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan																		
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				2 Dokumen	3 Dokumen	14.563.600,00	34.981.600,00	33.706.600,00	19.143.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM			27.522.440,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1.01.02.1.02.0057		Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan																		
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi				70 Komunitas	45 Komunitas	22.569.950,00	22.569.950,00	18.169.950,00	-4.400.000,00	Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM			49.665.880,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1.01.02.1.02.0059		Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi																		
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				1 Kegiatan	1 Kegiatan	8.040.350,00	8.040.350,00	6.135.350,00	-1.905.000,00	Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM			8.845.320,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1.01.02.1.02.0062		Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat				-	1 Unit	0,00	0,00	136.500.000,00	136.500.000,00	Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Penurunan tingkat kemiskinan			0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1.01.02.1.02.0069		Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah																		
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat				-	1 Ruang	0,00	0,00	946.958.000,00	946.958.000,00	Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Penurunan tingkat kemiskinan			0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1.01.02.1.02.0072		Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik																		
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Penyelenggaraan Proses Belajar				8 Satuan Pendidikan	8 Satuan Pendidikan	9.988.200.000,00	10.013.700.000,00	9.849.917.000,00	-138.283.000,00	Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM			15.201.340.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN SLEMAN									1.666.985.382.176,00	1.777.834.463.194,00	1.703.090.874.170,00	36.105.491.994,00								1.889.602.946.892,00	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							1.561.153.918.976,00	1.659.455.561.594,00	1.587.340.304.470,00	26.186.385.494,00							1.764.400.335.642,00		
1.01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							1.561.153.918.976,00	1.659.455.561.594,00	1.587.340.304.470,00	26.186.385.494,00							1.764.400.335.642,00		
1.	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				86,71 Nilai	86,71 Nilai	1.058.042.007.807,00	1.059.632.444.125,00	1.011.942.522.303,00	128.627.665.564,00							1.186.669.673.371,00		
	1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya capaian keterlaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah dalam 1 tahun anggaran				100 %	100 %	1.021.332.239.634,00	1.022.928.869.952,00	971.603.584.893,00	-49.728.654.741,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Sleman		1.149.115.761.410,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
	1.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	7.230.000,00	7.230.000,00	7.230.000,00	0,00	Kab. Sleman, Mlati, Tiogoadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			7.953.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
	1.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya capaian keterlaksanaan administrasi barang milik daerah perangkat daerah dalam 1 tahun anggaran				100 %	100 %	801.000.000,00	801.000.000,00	771.900.000,00	-29.100.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Sleman		869.385.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
	1.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																			
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	136.770.000,00	136.770.000,00	114.270.000,00	-22.500.000,00	Kab. Sleman, Mlati, Tiogoadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			150.447.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya capaian administrasi umum perangkat daerah				100 %	100 %	1.248.978.950,00	1.245.870.950,00	1.151.420.950,00	-97.558.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Sleman		1.327.050.670,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
	1.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.178.800,00	2.178.800,00	2.178.800,00	0,00	Kab. Sleman, Mlati, Tiogoadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			2.396.680,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
	1.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	35.253.400,00	35.253.400,00	35.253.400,00	0,00	Kab. Sleman, Mlati, Tiogoadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			38.778.740,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
	1.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																			
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	2 Paket	11.071.400,00	11.071.400,00	11.071.400,00	0,00	Kab. Sleman, Mlati, Tiogoadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			12.178.540,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
	1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	16.720.000,00	16.720.000,00	16.720.000,00	0,00	Kab. Sleman, Mlati, Tiogoadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			18.392.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
	1.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	1.764.000,00	1.764.000,00	1.764.000,00	0,00	Kab. Sleman, Mlati, Tiogoadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			1.940.400,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	2 Laporan	62.500.000,00	62.500.000,00	58.200.000,00	-4.300.000,00	Kab. Sleman, Mali, Tiogoadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			68.750.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1.01.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah sehingga terpelihara dan terawat				50 %	50 %	407.819.000,00	406.229.000,00	398.749.000,00	-9.070.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Sleman		199.194.600,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1.01.01.1.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				13 Unit	13 Unit	45.416.000,00	45.416.000,00	45.416.000,00	0,00	Kab. Sleman, Mali, Tiogoadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			49.957.600,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1.01.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah dalam 1 tahun anggaran				100 %	100 %	23.329.030.560,00	23.328.434.560,00	23.279.096.260,00	-49.934.300,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Sleman		25.958.974.857,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1.01.01.1.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	145.063.300,00	145.063.300,00	145.063.300,00	0,00	Kab. Sleman, Mali, Tiogoadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			159.921.630,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1.01.01.1.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	559.264.000,00	559.264.000,00	569.264.000,00	10.000.000,00	Kab. Sleman, Mali, Tiogoadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			614.838.400,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1.01.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah sehingga terpelihara dan terawat				100 %	100 %	4.385.990.300,00	4.385.090.300,00	4.619.160.300,00	233.170.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Sleman		3.224.374.890,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1.01.01.1.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	1 Unit	35.884.000,00	35.884.000,00	35.884.000,00	0,00	Kab. Sleman, Mali, Tiogoadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			39.472.400,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1.01.01.1.09.0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	14.952.000,00	14.952.000,00	14.952.000,00	0,00	Kab. Sleman, Mali, Tiogoadi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			16.447.200,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1.01.01.1.09.0010		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				8 Unit	8 Unit	5.104.000,00	5.104.000,00	5.104.000,00	0,00	Kab. Sleman, Mali, Tiogoadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			5.614.400,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Putus Sekolah SMA/SMK Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat Jumlah penerima sertifikat keahlian teknik Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Gunungkidul Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Sleman Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Kulon Progo Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Bantul Persentase guru jenjang pendidikan menengah dan khusus pengguna media pembelajaran JogjaBelajar Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya di Kota Yogyakarta Angka Partisipasi Murni (APM) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik khusus PLB				0,19 100 40 41.47 46.83 46.98 49.46 55 58.62 77.52 80.5 86.15 % % Orang % % % % % % % % %	0,19 100 40 41.47 46.83 46.98 49.46 55 58.62 77.52 80.5 86.15 % % Orang % % % % % % % % %	512.963.552.469,00	609.674.758.769,00	585.494.362.467,00	75.103.560.432,00							588.067.112.901,00	
	1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Iklim Inklusivitas SMA Iklim keamanan SMA Iklim kebinekaan SMA Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu) Jumlah penerima bantuan pembiayaan pendidikan yang tepat sasaran Kemampuan Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Kemampuan Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Persentase satuan pendidikan yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter Persentase SMA yang melaksanakan UKS				32,10 % 400 siswa 40 medali 61,49 % 74,46 % 83,28 Angka 84,73 Indeks 97,01 Indeks n/a %	32,10 % 400 siswa 40 medali 61,49 % 74,46 % 83,28 Angka 84,73 Indeks 97,01 Indeks n/a %	183.149.527.179,00	194.283.954.479,00	192.397.699.927,00	9.248.172.748,00			-	Peningkatan kualitas SDM	Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA, Siswa SMA		215.018.692.955,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.02.1.01.0028	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				-	1 Ruang	0,00	317.132.000,00	317.132.000,00	317.132.000,00		Kab. Sleman, Mali, Tiogoadi	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan kualitas SDM		348.845.200,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.02.1.01.0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				520 Peserta Didik	120 Peserta Didik	192.744.000,00	192.744.000,00	164.681.000,00	-28.063.000,00		Kab. Sleman, Mali, Tiogoadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM		257.235.550,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.02.1.01.0052	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				53 Satuan Pendidikan	53 Satuan Pendidikan	18.949.300,00	18.949.300,00	18.949.300,00	0,00		Kab. Sleman, Mali, Tiogoadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM		20.844.230,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.02.1.01.0060	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				1 Dokumen	1 Dokumen	94.823.000,00	94.823.000,00	77.623.000,00	-17.200.000,00		Kab. Sleman, Mali, Tiogoadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM		167.697.200,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.02.1.01.0061	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				2 Dokumen	3 Dokumen	17.248.500,00	30.860.500,00	30.860.500,00	13.612.000,00	Kab. Sleman, Mali, Tlagoadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM			22.239.690,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1.01.02.1.01.0063		Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan																		
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi				53 Komunitas	53 Komunitas	18.934.600,00	18.934.600,00	16.034.600,00	-2.900.000,00	Kab. Sleman, Mali, Tlagoadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM			24.245.430,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1.01.02.1.01.0065		Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi																		
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				1 Kegiatan	1 Kegiatan	8.505.500,00	8.505.500,00	8.505.500,00	0,00	Kab. Sleman, Mali, Tlagoadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM			11.012.540,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1.01.02.1.01.0068		Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat				-	3 Unit	0,00	145.673.000,00	393.125.000,00	393.125.000,00	Kab. Sleman, Mali, Semua Kel/Desa Kab. Sleman, Tempel, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Penurunan tingkat kemiskinan			160.240.300,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1.01.02.1.01.0078		Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik																		
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				17 Satuan Pendidikan	17 Satuan Pendidikan	14.725.200.000,00	14.725.200.000,00	14.587.667.000,00	-137.533.000,00	Kab. Sleman, Mali, Tlagoadi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penurunan tingkat kemiskinan			16.673.470.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1.01.02.1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Iklim Inklusivitas SMK Iklim keamanan SMK Iklim kebinekaan SMK Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu) Jumlah SMK yang memperoleh status BLUD Jumlah SMK yang menyelenggarakan Teaching Factory Kemampuan Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Kemampuan Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Persentase guru produktif yang memiliki sertifikat kompetensi dari BNSP Persentase lulusan SMK dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha Persentase SMK yang melaksanakan UKS				22 medali 25,32 % 32,10 % 41 sekolah 55,01 Angka 58 % 66,05 Angka 6 sekolah 77,65 Angka 81,58 Angka 93,02 Angka	22 medali 25,32 % 32,10 % 41 sekolah 55,01 Angka 58 % 66,05 Angka 6 sekolah 77,65 Angka 81,58 Angka 93,02 Angka	276.838.158.540,00	319.528.715.740,00	320.862.664.915,00	44.024.506.375,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM	Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMK, Siswa SMK		308.892.870.055,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1.01.02.1.02.0041		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa																		
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				360 Peserta Didik	75 Peserta Didik	104.683.000,00	104.428.000,00	98.428.000,00	-6.255.000,00	Kab. Sleman, Mali, Tlagoadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM			136.419.800,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1.01.02.1.02.0045		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				57 Satuan Pendidikan	57 Satuan Pendidikan	19.451.000,00	19.451.000,00	19.451.000,00	0,00	Kab. Sleman, Mali, Tlagoadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM			21.384.550,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.02.1.02.0053	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				1 Dokumen	1 Dokumen	23.073.000,00	23.073.000,00	23.073.000,00	0,00	Kab. Sleman, Mali, Tlagoadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM			0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.02.1.02.0054	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan																		
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				2 Dokumen	3 Dokumen	18.269.000,00	38.687.000,00	38.687.000,00	20.418.000,00	Kab. Sleman, Mali, Tlagoadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM			23.124.200,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.02.1.02.0057	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan																		
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi				57 Komunitas	57 Komunitas	19.431.000,00	19.431.000,00	17.331.000,00	-2.100.000,00	Kab. Sleman, Mali, Tlagoadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM			22.848.100,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.02.1.02.0059	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi																		
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				1 Kegiatan	1 Kegiatan	9.430.800,00	9.430.800,00	9.430.800,00	0,00	Kab. Sleman, Mali, Tlagoadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM			11.459.360,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.02.1.02.0072	Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik																		
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				2 Satuan Pendidikan	2 Satuan Pendidikan	4.064.000.000,00	4.094.600.000,00	4.061.300.000,00	-2.700.000,00	Kab. Sleman, Mali, Tlagoadi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM			12.364.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
		<b>SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 6 YOGYAKARTA</b>																		
									1.666.985.382.176,00	1.777.834.463.194,00	1.703.090.874.170,00	36.105.491.994,00							1.889.602.946.892,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							1.561.153.918.976,00	1.659.455.561.594,00	1.587.340.304.470,00	26.186.385.494,00							1.764.400.335.642,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							1.561.153.918.976,00	1.659.455.561.594,00	1.587.340.304.470,00	26.186.385.494,00							1.764.400.335.642,00	
	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				86,71 Nilai	86,71 Nilai	1.058.042.007.807,00	1.059.632.444.125,00	1.011.942.522.303,00	128.627.665.564,00							1.186.669.673.371,00	
	1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah siswa SMK yang terlayani peningkatan keahlian				5.775 siswa	5.775 siswa	6.322.171.513,00	6.322.171.513,00	9.904.133.050,00	3.581.961.537,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas SDM	SMKN 6 Yogyakarta, siswa dan masyarakat		5.678.610.589,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	937.200.000,00	937.200.000,00	1.446.214.673,00	509.014.673,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN DARI BLUD PENARIKAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN BLUD	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas SDM			1.030.920.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
2.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Putus Sekolah SMA/SMK Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat Jumlah penerima sertifikat keahlian teknik Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Gunungkidul Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Sleman Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Kulon Progo Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Bantul Persentase guru jenjang pendidikan menengah dan khusus pengguna media pembelajaran JogjaBelajar Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya di Kota Yogyakarta Angka Partisipasi Murni (APM) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik khusus PLB				0,19 100 40 41,47 46,83 46,98 49,46 55 58,62 77,52 80,5 86,15 % % Orang % % % % % % %	0,19 100 40 41,47 46,83 46,98 49,46 55 58,62 77,52 80,5 86,15 % % Orang % % % % % % %	512.963.552.469,00	609.674.758.769,00	585.494.362.467,00	75.103.560.432,00							588.067.112.901,00	
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Iklim Inklusivitas SMK Iklim keamanan SMK Iklim kebinekaan SMK Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu) Jumlah SMK yang memperoleh status BLUD Jumlah SMK yang menyelenggarakan Teaching Factory Kemampuan Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Kemampuan Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Persentase guru produktif yang memiliki sertifikat kompetensi dari BNSP Persentase lulusan SMK dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha Persentase SMK yang melaksanakan UKS				22 medali 25,32 % 32,10 % 41 sekolah 55,01 Angka 58 % 66,05 Angka 6 sekolah 77,65 Angka 81,58 Angka 93,02 Angka	22 medali 25,32 % 32,10 % 41 sekolah 55,01 Angka 58 % 66,05 Angka 6 sekolah 77,65 Angka 81,58 Angka 93,02 Angka	276.838.158.540,00	319.528.715.740,00	320.862.664.915,00	44.024.506.375,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM	Siswa, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMKN 6 Yogyakarta		308.892.870.055,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.02.1.02.0072	Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	2.974.600.000,00	2.969.500.000,00	2.969.500.000,00	-5.100.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM			3.301.760.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
		SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 3 WONOSARI							1.666.985.382.176,00	1.777.834.463.194,00	1.703.090.874.170,00	36.105.491.994,00							1.889.602.946.892,00	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							1.561.153.918.976,00	1.659.455.561.594,00	1.587.340.304.470,00	26.186.385.494,00							1.764.400.335.642,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							1.561.153.918.976,00	1.659.455.561.594,00	1.587.340.304.470,00	26.186.385.494,00							1.764.400.335.642,00	
1.	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				86,71 Nilai	86,71 Nilai	1.058.042.007.807,00	1.059.632.444.125,00	1.011.942.522.303,00	128.627.665.564,00							1.186.669.673.371,00	
	1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah siswa SMK yang terlayani peningkatan keahlian				5.775 siswa	5.775 siswa	6.322.171.513,00	6.322.171.513,00	9.904.133.050,00	3.581.961.537,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas SDM	SMKN 3 Wonosari, siswa dan masyarakat		5.678.610.589,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	244.765.000,00	244.765.000,00	443.964.488,00	199.199.488,00	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	PENDAPATAN DARI BLUD PENARIKAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN BLUD	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas SDM			269.241.500,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Putus Sekolah SMA/SMK Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat Jumlah penerima sertifikat keahlian teknik Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Gunungkidul Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Sleman Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Kulon Progo Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Bantul Persentase guru jenjang pendidikan menengah dan khusus pengguna media pembelajaran JogjaBelajar Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya di Kota Yogyakarta Angka Partisipasi Murni (APM) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik khusus PLB				0,19 100 40 41.47 46.83 46.98 49.46 55 58.62 77.52 80.5 86.15 % % Orang % % % % % % % % %	0,19 100 40 41.47 46.83 46.98 49.46 55 58.62 77.52 80.5 86.15 % % Orang % % % % % % % % %	512.963.552.469,00	609.674.758.769,00	585.494.362.467,00	75.103.560.432,00							588.067.112.901,00	
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Iklim Inklusivitas SMK Iklim keamanan SMK Iklim kebinekaan SMK Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu) Jumlah SMK yang memperoleh status BLUD Jumlah SMK yang menyelenggarakan Teaching Factory Kemampuan Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Kemampuan Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Persentase guru produktif yang memiliki sertifikat kompetensi dari BNSP Persentase lulusan SMK dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha Persentase SMK yang melaksanakan UKS				22 medali 25,32 % 32,10 % 41 sekolah 55,01 Angka 58 % 66,05 Angka 6 sekolah 77,65 Angka 81,58 Angka 93,02 Angka	22 medali 25,32 % 32,10 % 41 sekolah 55,01 Angka 58 % 66,05 Angka 6 sekolah 77,65 Angka 81,58 Angka 93,02 Angka	276.838.158.540,00	319.528.715.740,00	320.862.664.915,00	44.024.506.375,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM	Siswa, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMKN 3 Wonosari		308.892.870.055,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.02.1.02.0072	Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	2.370.000.000,00	2.364.900.000,00	2.364.556.800,00	-5.443.200,00	Kab. Gunungkidul, Wonosari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM			2.607.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
		SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 SEWON							1.666.985.382.176,00	1.777.834.463.194,00	1.703.090.874.170,00	36.105.491.994,00							1.889.602.946.892,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							1.561.153.918.976,00	1.659.455.561.594,00	1.587.340.304.470,00	26.186.385.494,00							1.764.400.335.642,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							1.561.153.918.976,00	1.659.455.561.594,00	1.587.340.304.470,00	26.186.385.494,00							1.764.400.335.642,00	
1.	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				86,71 Nilai	86,71 Nilai	1.058.042.007.807,00	1.059.632.444.125,00	1.011.942.522.303,00	128.627.665.564,00							1.186.669.673.371,00	
	1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah siswa SMK yang terlayani peningkatan keahlian				5.775 siswa	5.775 siswa	6.322.171.513,00	6.322.171.513,00	9.904.133.050,00	3.581.961.537,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas SDM	SMKN 1 Sewon, siswa dan masyarakat		5.678.610.589,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	590.250.000,00	590.250.000,00	723.289.838,00	133.039.838,00	Kab. Bantul, Sewon, Pendowoharjo	PENARIKAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN BLUD PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas SDM			680.955.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
2.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Putus Sekolah SMA/SMK Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat Jumlah penerima sertifikat keahlian teknik Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Gunungkidul Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Sleman Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Kulon Progo Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Bantul Persentase guru jenjang pendidikan menengah dan khusus pengguna media pembelajaran JogjaBelajar Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya di Kota Yogyakarta Angka Partisipasi Murni (APM) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik khusus PLB				0,19 100 40 41.47 46.83 46.98 49.46 55 58.62 77.52 80.5 86.15 % % Orang % % % % % % % % %	0,19 100 40 41.47 46.83 46.98 49.46 55 58.62 77.52 80.5 86.15 % % Orang % % % % % % % % %	512.963.552.469,00	609.674.758.769,00	585.494.362.467,00	75.103.560.432,00							588.067.112.901,00			
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Iklim Inklusivitas SMK Iklim keamanan SMK Iklim kebinekaan SMK Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu) Jumlah SMK yang memperoleh status BLUD Jumlah SMK yang menyelenggarakan Teaching Factory Kemampuan Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Kemampuan Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Persentase guru produktif yang memiliki sertifikat kompetensi dari BNSP Persentase lulusan SMK dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha Persentase SMK yang melaksanakan UKS				22 medali 25,32 % 32,10 % 41 sekolah 55,01 Angka 58 % 66,05 Angka 6 sekolah 77,65 Angka 81,58 Angka 93,02 Angka	22 medali 25,32 % 32,10 % 41 sekolah 55,01 Angka 58 % 66,05 Angka 6 sekolah 77,65 Angka 81,58 Angka 93,02 Angka	276.838.158.540,00	319.528.715.740,00	320.862.664.915,00	44.024.506.375,00						Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM	Siswa, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMKN 1 Sewon	308.892.870.055,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.02.1.02.0072	Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	4.534.000.000,00	4.528.900.000,00	3.937.998.800,00	-596.001.200,00	Kab. Bantul, Sewon, Pendowoharjo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM		5.014.900.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA			
		<b>SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 5 YOGYAKARTA</b>								1.666.985.382.176,00	1.777.834.463.194,00	1.703.090.874.170,00	36.105.491.994,00					1.889.602.946.892,00				
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							1.561.153.918.976,00	1.659.455.561.594,00	1.587.340.304.470,00	26.186.385.494,00						1.764.400.335.642,00				
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							1.561.153.918.976,00	1.659.455.561.594,00	1.587.340.304.470,00	26.186.385.494,00						1.764.400.335.642,00				
1.	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				86,71 Nilai	86,71 Nilai	1.058.042.007.807,00	1.059.632.444.125,00	1.011.942.522.303,00	128.627.665.564,00						1.186.669.673.371,00				
	1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah siswa SMK yang terlayani peningkatan keahlian				5.775 siswa	5.775 siswa	6.322.171.513,00	6.322.171.513,00	9.904.133.050,00	3.581.961.537,00						SMKN 5 Yogyakarta, siswa dan masyarakat	5.678.610.589,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA		
	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	93.649.263,00	93.649.263,00	98.532.761,00	4.883.498,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN DARI BLUD PENARIKAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN BLUD	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas SDM		103.014.189,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
2.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Putus Sekolah SMA/SMK Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat Jumlah penerima sertifikat keahlian teknik Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Gunungkidul Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Sleman Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Kulon Progo Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Bantul Persentase guru jenjang pendidikan menengah dan khusus pengguna media pembelajaran JogjaBelajar Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya di Kota Yogyakarta Angka Partisipasi Murni (APM) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik khusus PLB				0,19 100 40 41.47 46.83 46.98 49.46 55 58.62 77.52 80.5 86.15 % % Orang % % % % % % % % %	0,19 100 40 41.47 46.83 46.98 49.46 55 58.62 77.52 80.5 86.15 % % Orang % % % % % % % % %	512.963.552.469,00	609.674.758.769,00	585.494.362.467,00	75.103.560.432,00							588.067.112.901,00			
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Iklim Inklusivitas SMK Iklim keamanan SMK Iklim kebinekaan SMK Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu) Jumlah SMK yang memperoleh status BLUD Jumlah SMK yang menyelenggarakan Teaching Factory Kemampuan Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Kemampuan Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Persentase guru produktif yang memiliki sertifikat kompetensi dari BNSP Persentase lulusan SMK dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha Persentase SMK yang melaksanakan UKS				22 medali 25,32 % 32,10 % 41 sekolah 55,01 Angka 58 % 66,05 Angka 6 sekolah 77,65 Angka 81,58 Angka 93,02 Angka	22 medali 25,32 % 32,10 % 41 sekolah 55,01 Angka 58 % 66,05 Angka 6 sekolah 77,65 Angka 81,58 Angka 93,02 Angka	276.838.158.540,00	319.528.715.740,00	320.862.664.915,00	44.024.506.375,00						Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM	Siswa, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMKN 5 Yogyakarta	308.892.870.055,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.02.1.02.0072	Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	2.752.000.000,00	2.746.900.000,00	2.746.900.000,00	-5.100.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM			3.027.200.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA		
		SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 PENGASIH							1.666.985.382.176,00	1.777.834.463.194,00	1.703.090.874.170,00	36.105.491.994,00							1.889.602.946.892,00			
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							1.561.153.918.976,00	1.659.455.561.594,00	1.587.340.304.470,00	26.186.385.494,00							1.764.400.335.642,00			
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							1.561.153.918.976,00	1.659.455.561.594,00	1.587.340.304.470,00	26.186.385.494,00							1.764.400.335.642,00			
1.	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				86,71 Nilai	86,71 Nilai	1.058.042.007.807,00	1.059.632.444.125,00	1.011.942.522.303,00	128.627.665.564,00							1.186.669.673.371,00			
	1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah siswa SMK yang terlayani peningkatan keahlian				5.775 siswa	5.775 siswa	6.322.171.513,00	6.322.171.513,00	9.904.133.050,00	3.581.961.537,00							5.678.610.589,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA		
	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	117.175.000,00	117.175.000,00	132.848.733,00	15.673.733,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kulon Progo, Pengasih, Margosari	PENDAPATAN DARI BLUD PENARIKAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN BLUD	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas SDM			128.892.500,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Sleman Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Kulon Progo Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Bantul				46.83 46.98 49.46 % %	46.83 46.98 49.46 % %	512.963.552.469,00	609.674.758.769,00	585.494.362.467,00	75.103.560.432,00							588.067.112.901,00	
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	<i>Iklim Inklusivitas SMK</i> <i>Iklim keamanan SMK</i> <i>Iklim ketidakeadilan SMK</i> Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu) Jumlah SMK yang memperoleh status BLUD Jumlah SMK yang menyelenggarakan Teaching Factory Kemampuan Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Kemampuan Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Persentase guru produktif yang memiliki sertifikat kompetensi dari BNSP Persentase lulusan SMK dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha Persentase SMK yang melaksanakan UKS				11 Ruang 12 Ruang 12 unit 19 paket 1 Ruang 219 satuan pendidikan 22 medali 23 paket 25,32 % 2 Ruang 2 unit 300 paket 32,10 % 37316 peserta didik 41 sekolah 55,01 Angka 58 % 5 Ruang 66,05 Angka 6 sekolah 77,65 Angka 81,58 Angka 93,02 Angka 975 peserta didik	22 medali 25,32 % 32,10 % 41 sekolah 55,01 Angka 58 % 66,05 Angka 6 sekolah 77,65 Angka 81,58 Angka 93,02 Angka	276.838.158.540,00	319.528.715.740,00	320.862.664.915,00	44.024.506.375,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM	Siswa, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMKN 2 Pengasih		308.892.870.055,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.02.1.02.0072	Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	3.864.600.000,00	3.859.500.000,00	3.842.699.400,00	-21.900.600,00	Kab. Kulon Progo, Pengasih, Margosari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM			4.251.060.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
		SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 WONOSARI								1.666.985.382.176,00	1.777.834.463.194,00	1.703.090.874.170,00	36.105.491.994,00						1.889.602.946.892,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							1.561.153.918.976,00	1.659.455.561.594,00	1.587.340.304.470,00	26.186.385.494,00							1.764.400.335.642,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							1.561.153.918.976,00	1.659.455.561.594,00	1.587.340.304.470,00	26.186.385.494,00							1.764.400.335.642,00	
1.	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				86,71 Nilai	86,71 Nilai	1.058.042.007.807,00	1.059.632.444.125,00	1.011.942.522.303,00	128.627.665.564,00							1.186.669.673.371,00	
	1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah siswa SMK yang terlayani peningkatan keahlian				5.775 siswa	5.775 siswa	6.322.171.513,00	6.322.171.513,00	9.904.133.050,00	3.581.961.537,00			-	Peningkatan kualitas SDM	SMKN 2 Wonosari, siswa dan masyarakat		5.678.610.589,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	127.284.000,00	127.284.000,00	226.501.190,00	99.217.190,00	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	PENARIKAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN BLUD PENDAPATAN DARI BLUD	-	Peningkatan kualitas SDM			330.462.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Putus Sekolah SMA/SMK Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat Jumlah penerima sertifikat keahlian teknik Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Gunungkidul Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Sleman Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Kulon Progo Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Bantul Persentase guru jenjang pendidikan menengah dan khusus pengguna media pembelajaran JogjaBelajar Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya di Kota Yogyakarta Angka Partisipasi Murni (APM) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik khusus PLB				0,19 100 40 41.47 46.83 46.98 49.46 55 58.62 77.52 80.5 86.15 % % Orang % % % % % % % % %	0,19 100 40 41.47 46.83 46.98 49.46 55 58.62 77.52 80.5 86.15 % % Orang % % % % % % % % %	512.963.552.469,00	609.674.758.769,00	585.494.362.467,00	75.103.560.432,00							588.067.112.901,00	
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Iklim Inklusivitas SMK Iklim keamanan SMK Iklim kebinekaan SMK Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu) Jumlah SMK yang memperoleh status BLUD Jumlah SMK yang menyelenggarakan Teaching Factory Kemampuan Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Kemampuan Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Persentase guru produktif yang memiliki sertifikat kompetensi dari BNSP Persentase lulusan SMK dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha Persentase SMK yang melaksanakan UKS				22 medali 25,32 % 32,10 % 41 sekolah 55,01 Angka 59 % 66,05 Angka 6 sekolah 77,65 Angka 81,58 Angka 93,02 Angka	22 medali 25,32 % 32,10 % 41 sekolah 55,01 Angka 59 % 66,05 Angka 6 sekolah 77,65 Angka 81,58 Angka 93,02 Angka	276.838.158.540,00	319.528.715.740,00	320.862.664.915,00	44.024.506.375,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM	Siswa, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMKN 2 Wonosari	308.892.870.055,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
	1.01.02.1.02.0072	Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	3.188.000.000,00	3.182.900.000,00	3.135.892.300,00	-52.107.700,00	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM		3.506.800.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
		SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 DEPOK							1.666.985.382.176,00	1.777.834.463.194,00	1.703.090.874.170,00	36.105.491.994,00						1.889.602.946.892,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							1.561.153.918.976,00	1.659.455.561.594,00	1.587.340.304.470,00	26.186.385.494,00						1.764.400.335.642,00		
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							1.561.153.918.976,00	1.659.455.561.594,00	1.587.340.304.470,00	26.186.385.494,00						1.764.400.335.642,00		
1.	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				86,71 Nilai	86,71 Nilai	1.058.042.007.807,00	1.059.632.444.125,00	1.011.942.522.303,00	128.627.665.564,00						1.186.669.673.371,00		
	1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah siswa SMK yang terlayani peningkatan keahlian				5.775 siswa	5.775 siswa	6.322.171.513,00	6.322.171.513,00	9.904.133.050,00	3.581.961.537,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas SDM	SMKN 2 Depok, siswa dan masyarakat	5.678.610.589,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	104.500.000,00	104.500.000,00	148.966.103,00	44.466.103,00	Kab. Sleman, Depok, Caturtunggal	PENARIKAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN BLUD PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas SDM		156.546.500,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Putus Sekolah SMA/SMK Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat Jumlah penerima sertifikat keahlian teknik Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Gunungkidul Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Sleman Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Kulon Progo Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Bantul Persentase guru jenjang pendidikan menengah dan khusus pengguna media pembelajaran JogjaBelajar Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya di Kota Yogyakarta Angka Partisipasi Murni (APM) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik khusus PLB				0,19 100 40 41.47 46.83 46.98 49.46 55 58.62 77.52 80.5 86.15 % % % % % % % % % % %	0,19 100 40 41.47 46.83 46.98 49.46 55 58.62 77.52 80.5 86.15 % % % % % % % % % % %	512.963.552.469,00	609.674.758.769,00	585.494.362.467,00	75.103.560.432,00							588.067.112.901,00	
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Iklim Inklusivitas SMK Iklim keamanan SMK Iklim kebinekaan SMK Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu) Jumlah SMK yang memperoleh status BLUD Jumlah SMK yang menyelenggarakan Teaching Factory Kemampuan Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Kemampuan Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Persentase guru produktif yang memiliki sertifikat kompetensi dari BNSP Persentase lulusan SMK dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha Persentase SMK yang melaksanakan UKS				22 medali 25,32 % 32,10 % 41 sekolah 55,01 Angka 59 % 66,05 Angka 6 sekolah 77,65 Angka 81,58 Angka 93,02 Angka	22 medali 25,32 % 32,10 % 41 sekolah 55,01 Angka 59 % 66,05 Angka 6 sekolah 77,65 Angka 81,58 Angka 93,02 Angka	276.838.158.540,00	319.528.715.740,00	320.862.664.915,00	44.024.506.375,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM	Siswa, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMKN 2 Depok		308.892.870.055,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.02.1.02.0072	Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	5.214.000.000,00	5.203.862.000,00	5.112.833.500,00	-101.166.500,00	Kab. Sleman, Depok, Caturtunggal	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM			5.735.400.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
		SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 SAPTOSARI							1.666.985.382.176,00	1.777.834.463.194,00	1.703.090.874.170,00	36.105.491.994,00							1.889.602.946.892,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							1.561.153.918.976,00	1.659.455.561.594,00	1.587.340.304.470,00	26.186.385.494,00							1.764.400.335.642,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							1.561.153.918.976,00	1.659.455.561.594,00	1.587.340.304.470,00	26.186.385.494,00							1.764.400.335.642,00	
1.	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				86,71 Nilai	86,71 Nilai	1.058.042.007.807,00	1.059.632.444.125,00	1.011.942.522.303,00	128.627.665.564,00							1.186.669.673.371,00	
	1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah siswa SMK yang terlayani peningkatan keahlian				5.775 siswa	5.775 siswa	6.322.171.513,00	6.322.171.513,00	9.904.133.050,00	3.581.961.537,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas SDM	SMKN 1 Saptosari, siswa dan masyarakat		5.678.610.589,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	48.059.000,00	48.059.000,00	77.394.156,00	29.335.156,00	Kab. Gunungkidul, Saptosari, Kepek	PENARIKAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN BLUD PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas SDM			52.864.900,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Putus Sekolah SMA/SMK Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat Jumlah penerima sertifikat keahlian teknik Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Gunungkidul Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Sleman Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Kulon Progo Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Bantul Persentase guru jenjang pendidikan menengah dan khusus pengguna media pembelajaran JogjaBelajar Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya di Kota Yogyakarta Angka Partisipasi Murni (APM) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik khusus PLB				0,19 100 40 41.47 46.83 46.98 49.46 55 58.62 77.52 80.5 86.15 % % Orang % % % % % % % % %	0,19 100 40 41.47 46.83 46.98 49.46 55 58.62 77.52 80.5 86.15 % % Orang % % % % % % % % %	512.963.552.469,00	609.674.758.769,00	585.494.362.467,00	75.103.560.432,00							588.067.112.901,00	
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Iklim Inklusivitas SMK Iklim keamanan SMK Iklim kebinekaan SMK Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu) Jumlah SMK yang memperoleh status BLUD Jumlah SMK yang menyelenggarakan Teaching Factory Kemampuan Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Kemampuan Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Persentase guru produktif yang memiliki sertifikat kompetensi dari BNSP Persentase lulusan SMK dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha Persentase SMK yang melaksanakan UKS				22 medali 25,32 % 32,10 % 41 sekolah 55,01 Angka 58 % 66,05 Angka 6 sekolah 77,65 Angka 81,58 Angka 93,02 Angka	22 medali 25,32 % 32,10 % 41 sekolah 55,01 Angka 58 % 66,05 Angka 6 sekolah 77,65 Angka 81,58 Angka 93,02 Angka	276.838.158.540,00	319.528.715.740,00	320.862.664.915,00	44.024.506.375,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM	Siswa, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMKN 1 Saptosari		308.892.870.055,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.02.1.02.0072	Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	2.314.600.000,00	2.309.500.000,00	2.303.240.000,00	-11.360.000,00	Kab. Gunungkidul, Saptosari, Kepek	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM			2.546.060.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
		SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 YOGYAKARTA								1.666.985.382.176,00	1.777.834.463.194,00	1.703.090.874.170,00	36.105.491.994,00						1.889.602.946.892,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							1.561.153.918.976,00	1.659.455.561.594,00	1.587.340.304.470,00	26.186.385.494,00							1.764.400.335.642,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							1.561.153.918.976,00	1.659.455.561.594,00	1.587.340.304.470,00	26.186.385.494,00							1.764.400.335.642,00	
1.	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				86,71 Nilai	86,71 Nilai	1.058.042.007.807,00	1.059.632.444.125,00	1.011.942.522.303,00	128.627.665.564,00							1.186.669.673.371,00	
	1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah siswa SMK yang terlayani peningkatan keahlian				5.775 siswa	5.775 siswa	6.322.171.513,00	6.322.171.513,00	9.904.133.050,00	3.581.961.537,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas SDM	SMKN 2 Yogyakarta, siswa dan masyarakat		5.678.610.589,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	109.289.000,00	109.289.000,00	137.702.427,00	28.413.427,00	Kota Yogyakarta, Jatis, Cokrodingratan	PENARIKAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN BLUD PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas SDM			120.217.900,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
2.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Putus Sekolah SMA/SMK Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat Jumlah penerima sertifikat keahlian teknik Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Gunungkidul Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Sleman Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Kulon Progo Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Bantul Persentase guru jenjang pendidikan menengah dan khusus pengguna media pembelajaran JogjaBelajar Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya di Kota Yogyakarta Angka Partisipasi Murni (APM) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik khusus PLB				0,19 100 40 41.47 46.83 46.98 49.46 55 58.62 77.52 80.5 86.15 % % Orang % % % % % % % % % %	0,19 100 40 41.47 46.83 46.98 49.46 55 58.62 77.52 80.5 86.15 % % Orang % % % % % % % % % %	512.963.552.469,00	609.674.758.769,00	585.494.362.467,00	75.103.560.432,00							588.067.112.901,00		
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Iklim Inklusivitas SMK Iklim keamanan SMK Iklim kebinekaan SMK Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu) Jumlah SMK yang memperoleh status BLUD Jumlah SMK yang menyelenggarakan Teaching Factory Kemampuan Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Kemampuan Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Persentase guru produktif yang memiliki sertifikat kompetensi dari BNSP Persentase lulusan SMK dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha Persentase SMK yang melaksanakan UKS				22 medali 25,32 % 32,10 % 41 sekolah 55,01 Angka 58 % 66,05 Angka 6 sekolah 77,65 Angka 81,58 Angka 93,02 Angka	22 medali 25,32 % 32,10 % 41 sekolah 55,01 Angka 58 % 66,05 Angka 6 sekolah 77,65 Angka 81,58 Angka 93,02 Angka	276.838.158.540,00	319.528.715.740,00	320.862.664.915,00	44.024.506.375,00					Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM	Siswa, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMKN 2 Yogyakarta	308.892.870.055,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.02.1.02.0072	Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	4.922.000.000,00	4.916.900.000,00	4.909.230.000,00	-12.770.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningratan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM		5.414.200.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA		
		SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 KALASAN							1.666.985.382.176,00	1.777.834.463.194,00	1.703.090.874.170,00	36.105.491.994,00						1.889.602.946.892,00			
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							1.561.153.918.976,00	1.659.455.561.594,00	1.587.340.304.470,00	26.186.385.494,00							1.764.400.335.642,00		
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							1.561.153.918.976,00	1.659.455.561.594,00	1.587.340.304.470,00	26.186.385.494,00							1.764.400.335.642,00		
1.	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				86,71 Nilai	86,71 Nilai	1.058.042.007.807,00	1.059.632.444.125,00	1.011.942.522.303,00	128.627.665.564,00							1.186.669.673.371,00		
	1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah siswa SMK yang terlayani peningkatan keahlian				5.775 siswa	5.775 siswa	6.322.171.513,00	6.322.171.513,00	9.904.133.050,00	3.581.961.537,00							5.678.610.589,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	59.799.000,00	59.799.000,00	68.433.523,00	8.634.523,00	Kab. Sleman, Kalasan, Tamanmartani	PENARIKAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN BLUD PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas SDM			65.778.900,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
2.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Putus Sekolah SMA/SMK Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat Jumlah penerima sertifikat keahlian teknik Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Gunungkidul Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Sleman Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Kulon Progo Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Bantul Persentase guru jenjang pendidikan menengah dan khusus pengguna media pembelajaran JogjaBelajar Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya di Kota Yogyakarta Angka Partisipasi Murni (APM) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik khusus PLB				0,19 100 40 41.47 46.83 46.98 49.46 55 58.62 77.52 80.5 86.15 % % Orang % % % % % % % % %	0,19 100 40 41.47 46.83 46.98 49.46 55 58.62 77.52 80.5 86.15 % % Orang % % % % % % % % %	512.963.552.469,00	609.674.758.769,00	585.494.362.467,00	75.103.560.432,00							588.067.112.901,00			
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Iklim Inklusivitas SMK Iklim keamanan SMK Iklim kebinekaan SMK Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu) Jumlah SMK yang memperoleh status BLUD Jumlah SMK yang menyelenggarakan Teaching Factory Kemampuan Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Kemampuan Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Persentase guru produktif yang memiliki sertifikat kompetensi dari BNSP Persentase lulusan SMK dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha Persentase SMK yang melaksanakan UKS				22 medali 25,32 % 32,10 % 41 sekolah 55,01 Angka 58 % 66,05 Angka 6 sekolah 77,65 Angka 81,58 Angka 93,02 Angka	22 medali 25,32 % 32,10 % 41 sekolah 55,01 Angka 58 % 66,05 Angka 6 sekolah 77,65 Angka 81,58 Angka 93,02 Angka	276.838.158.540,00	319.528.715.740,00	320.862.664.915,00	44.024.506.375,00						Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM	Siswa, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMKN 1 Kalasan	308.892.870.055,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.02.1.02.0072	Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	2.414.000.000,00	2.408.900.000,00	2.357.798.100,00	-56.201.900,00	Kab. Sleman, Kalasan, Tamanmartani	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM			2.765.400.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA		
		SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 CANGKRINGAN							1.666.985.382.176,00	1.777.834.463.194,00	1.703.090.874.170,00	36.105.491.994,00							1.889.602.946.892,00			
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							1.561.153.918.976,00	1.659.455.561.594,00	1.587.340.304.470,00	26.186.385.494,00							1.764.400.335.642,00			
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							1.561.153.918.976,00	1.659.455.561.594,00	1.587.340.304.470,00	26.186.385.494,00							1.764.400.335.642,00			
	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				86,71 Nilai	86,71 Nilai	1.058.042.007.807,00	1.059.632.444.125,00	1.011.942.522.303,00	128.627.665.564,00							1.186.669.673.371,00			
	1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah siswa SMK yang terlayani peningkatan keahlian				5.775 siswa	5.775 siswa	6.322.171.513,00	6.322.171.513,00	9.904.133.050,00	3.581.961.537,00							5.678.610.589,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA		
	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	138.722.000,00	138.722.000,00	124.776.201,00	-13.945.799,00	Kab. Sleman, Cangkringan, Wukirsari	PENDAPATAN DARI BLUD PENARIKAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN BLUD	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas SDM			152.594.200,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Putus Sekolah SMA/SMK Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat Jumlah penerima sertifikat keahlian teknik Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik khusus PLB Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Gunungkidul Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Sleman Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Kulon Progo Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Bantul Persentase guru jenjang pendidikan menengah dan khusus pengguna media pembelajaran Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya di Kota Yogyakarta Angka Partisipasi Murni (APM) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK				0,19 100 40 41.47 46.83 46.98 49.46 55 58.62 77.52 80.5 86.15 % % Orang % % % % % % % % % % %	0,19 100 40 41.47 46.83 46.83 49.46 55 58.62 77.52 80.5 86.15 % % Orang % % % % % % % % % % %	512.963.552.469,00	609.674.758.769,00	585.494.362.467,00	75.103.560.432,00						588.067.112.901,00		
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	<i>Iklim Inklusivitas SMK Iklim keamanan SMK Iklim kebinekaan SMK Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu) Jumlah SMK yang memperoleh status BLUD Jumlah SMK yang menyelenggarakan Teaching Factory Kemampuan Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Kemampuan Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Persentase guru produktif yang memiliki sertifikat kompetensi dari BNSP Persentase lulusan SMK dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha Persentase SMK yang melaksanakan UKS</i>				22 medali 25,32 % 32,10 % 41 sekolah 55,01 Angka 58 % 66,05 Angka 6 sekolah 77,65 Angka 81,58 Angka 93,02 Angka	22 medali 25,32 % 32,10 % 41 sekolah 55,01 Angka 58 % 66,05 Angka 6 sekolah 77,65 Angka 81,58 Angka 93,02 Angka	276.838.158.540,00	319.528.715.740,00	320.862.664.915,00	44.024.506.375,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM	Siswa, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMKN 1 Cangkringan	308.892.870.055,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
	1.01.02.1.02.0072	Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik	<i>Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar</i>				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	2.084.000.000,00	2.078.900.000,00	2.066.694.000,00	-17.306.000,00	Kab. Sleman, Cangkringan, Wukirsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM		2.292.400.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 4 YOGYAKARTA									1.666.985.382.176,00	1.777.834.463.194,00	1.703.090.874.170,00	36.105.491.994,00					1.889.602.946.892,00			
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							1.561.153.918.976,00	1.659.455.561.594,00	1.587.340.304.470,00	26.186.385.494,00						1.764.400.335.642,00		
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							1.561.153.918.976,00	1.659.455.561.594,00	1.587.340.304.470,00	26.186.385.494,00						1.764.400.335.642,00		
1.	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				86,71 Nilai	86,71 Nilai	1.058.042.007.807,00	1.059.632.444.125,00	1.011.942.522.303,00	128.627.665.564,00						1.186.669.673.371,00		
	1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	<i>Jumlah siswa SMK yang terlayani peningkatan keahlian</i>				5.775 siswa	5.775 siswa	6.322.171.513,00	6.322.171.513,00	9.904.133.050,00	3.581.961.537,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas SDM	SMKN 4 Yogyakarta, siswa dan masyarakat	5.678.610.589,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	<i>Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan</i>				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	169.835.000,00	169.835.000,00	202.335.000,00	32.500.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas SDM		0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Putus Sekolah SMA/SMK Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat Jumlah penerima sertifikat keahlian teknik Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Gunungkidul Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Sleman Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Kulon Progo Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Bantul Persentase guru jenjang pendidikan menengah dan khusus pengguna media pembelajaran JogjaBelajar Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya di Kota Yogyakarta Angka Partisipasi Murni (APM) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik khusus PLB				0,19 100 40 41.47 46.83 46.98 49.46 55 58.62 77.52 80.5 86.15 % % % % % % % % % %	0,19 100 40 41.47 46.83 46.98 49.46 55 58.62 77.52 80.5 86.15 % % % % % % % % % %	512.963.552.469,00	609.674.758.769,00	585.494.362.467,00	75.103.560.432,00							588.067.112.901,00	
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Iklim Inklusivitas SMK Iklim keamanan SMK Iklim kebinekaan SMK Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu) Jumlah SMK yang memperoleh status BLUD Jumlah SMK yang menyelenggarakan Teaching Factory Kemampuan Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Kemampuan Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Persentase guru produktif yang memiliki sertifikat kompetensi dari BNSP Persentase lulusan SMK dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha Persentase SMK yang melaksanakan UKS				11 Ruang 12 Ruang 12 unit 19 paket 1 Ruang 219 satuan pendidikan 22 medali 23 paket 25,32 % 2 Ruang 2 unit 300 paket 32,10 % 37316 peserta didik 41 sekolah 55,01 Angka 58 % 5 Ruang 66,05 Angka 6 sekolah 77,65 Angka 81,58 Angka 93,02 Angka 975 peserta didik	22 medali 25,32 % 32,10 % 41 sekolah 55,01 Angka 58 % 66,05 Angka 6 sekolah 77,65 Angka 81,58 Angka 93,02 Angka	276.838.158.540,00	319.528.715.740,00	320.862.664.915,00	44.024.506.375,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM	Siswa, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMKN 4 Yogyakarta		308.892.870.055,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.02.1.02.0072	Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	3.886.000.000,00	3.880.900.000,00	3.872.855.800,00	-13.144.200,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM			0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
		SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 3 YOGYAKARTA								1.666.985.382.176,00	1.777.834.463.194,00	1.703.090.874.170,00	36.105.491.994,00						1.889.602.946.892,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							1.561.153.918.976,00	1.659.455.561.594,00	1.587.340.304.470,00	26.186.385.494,00							1.764.400.335.642,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							1.561.153.918.976,00	1.659.455.561.594,00	1.587.340.304.470,00	26.186.385.494,00							1.764.400.335.642,00	
1.	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				86,71 Nilai	86,71 Nilai	1.058.042.007.807,00	1.059.632.444.125,00	1.011.942.522.303,00	128.627.665.564,00							1.186.669.673.371,00	
	1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah siswa SMK yang terlayani peningkatan keahlian				5.775 siswa	5.775 siswa	6.322.171.513,00	6.322.171.513,00	9.904.133.050,00	3.581.961.537,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas SDM	SMKN 3 Yogyakarta, siswa dan masyarakat		5.678.610.589,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	65.041.000,00	65.041.000,00	89.181.000,00	24.140.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodingratan	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas SDM			0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Putus Sekolah SMA/SMK Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat Jumlah penerima sertifikat keahlian teknik Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Gunungkidul Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Sleman Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Kulon Progo Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Bantul Persentase guru jenjang pendidikan menengah dan khusus pengguna media pembelajaran JogjaBelajar Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya di Kota Yogyakarta Angka Partisipasi Murni (APM) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik khusus PLB				0,19 100 40 41.47 46.83 46.98 49.46 55 58.62 77.52 80.5 86.15 % % % % % % % % % %	0,19 100 40 41.47 46.83 46.98 49.46 55 58.62 77.52 80.5 86.15 % % % % % % % % % %	512.963.552.469,00	609.674.758.769,00	585.494.362.467,00	75.103.560.432,00							588.067.112.901,00	
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	<i>Iklim Inklusivitas SMK</i> <i>Iklim keamanan SMK</i> <i>Iklim kebinekaan SMK</i> <i>Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu)</i> <i>Jumlah SMK yang memperoleh status BLUD</i> <i>Jumlah SMK yang menyelenggarakan Teaching Factory</i> <i>Kemampuan Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional</i> <i>Kemampuan Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional</i> <i>Persentase guru produktif yang memiliki sertifikat kompetensi dari BNSP</i> <i>Persentase lulusan SMK dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha</i> <i>Persentase SMK yang melaksanakan UKS</i>				11 Ruang 12 Ruang 12 unit 19 paket 1 Ruang 219 satuan pendidikan 22 medali 23 paket 25,32 % 2 Ruang 2 unit 300 paket 32,10 % 37316 peserta didik 41 sekolah 55,01 Angka 58 % 5 Ruang 66,05 Angka 6 sekolah 77,65 Angka 81,58 Angka 93,02 Angka 975 peserta didik	22 medali 25,32 % 32,10 % 41 sekolah 55,01 Angka 58 % 66,05 Angka 6 sekolah 77,65 Angka 81,58 Angka 93,02 Angka	276.838.158.540,00	319.528.715.740,00	320.862.664.915,00	44.024.506.375,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM	SMKN 3 Yogyakarta, siswa dan masyarakat		308.892.870.055,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.02.1.02.0072	Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik	<i>Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar</i>				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	4.030.000.000,00	4.024.900.000,00	4.023.990.000,00	-6.010.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningratan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM		0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
		SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 PANDAK								1.666.985.382.176,00	1.777.834.463.194,00	1.703.090.874.170,00	36.105.491.994,00						1.889.602.946.892,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							1.561.153.918.976,00	1.659.455.561.594,00	1.587.340.304.470,00	26.186.385.494,00							1.764.400.335.642,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							1.561.153.918.976,00	1.659.455.561.594,00	1.587.340.304.470,00	26.186.385.494,00							1.764.400.335.642,00	
1.	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				86,71 Nilai	86,71 Nilai	1.058.042.007.807,00	1.059.632.444.125,00	1.011.942.522.303,00	128.627.665.564,00							1.186.669.673.371,00	
	1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	<i>Jumlah siswa SMK yang terlayani peningkatan keahlian</i>				5.775 siswa	5.775 siswa	6.322.171.513,00	6.322.171.513,00	9.904.133.050,00	3.581.961.537,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas SDM	SMKN 1 Pandak, siswa dan masyarakat		5.678.610.589,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	<i>Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan</i>				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	466.475.000,00	466.475.000,00	313.660.000,00	-152.815.000,00	Kab. Bantul, Pandak, Gilangharjo	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas SDM		0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Putus Sekolah SMA/SMK Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat Jumlah penerima sertifikat keahlian teknik Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Gunungkidul Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Sleman Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Kulon Progo Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Bantul Persentase guru jenjang pendidikan menengah dan khusus pengguna media pembelajaran JogjaBelajar Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya di Kota Yogyakarta Angka Partisipasi Murni (APM) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik khusus PLB				0,19 100 40 41.47 46.83 46.98 49.46 55 58.62 77.52 80.5 86.15 % % Orang % % % % % % % %	0,19 100 40 41.47 46.83 46.98 49.46 55 58.62 77.52 80.5 86.15 % % Orang % % % % % % % %	512.963.552.469,00	609.674.758.769,00	585.494.362.467,00	75.103.560.432,00							588.067.112.901,00	
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Iklim Inklusivitas SMK Iklim keamanan SMK Iklim kebinekaan SMK Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu) Jumlah SMK yang memperoleh status BLUD Jumlah SMK yang menyelenggarakan Teaching Factory Kemampuan Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Kemampuan Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Persentase guru produktif yang memiliki sertifikat kompetensi dari BNSP Persentase lulusan SMK dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha Persentase SMK yang melaksanakan UKS				11 Ruang 12 Ruang 12 unit 19 paket 1 Ruang 219 satuan pendidikan 22 medali 23 paket 25,32 % 2 Ruang 2 unit 300 paket 32,10 % Angka 37316 peserta didik 41 sekolah 55,01 Angka 58 % 5 Ruang 66,05 Angka 6 sekolah 77,65 Angka 81,58 Angka 93,02 Angka 975 peserta didik	22 medali 25,32 % 32,10 % 41 sekolah 55,01 Angka 58 % 66,05 Angka 6 sekolah 77,65 Angka 81,58 Angka 93,02 Angka 975 peserta didik	276.838.158.540,00	319.528.715.740,00	320.862.664.915,00	44.024.506.375,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM	Siswa, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMKN 1 Pandak		308.892.870.055,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.02.1.02.0072	Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1.971.999.900,00	1.966.899.900,00	1.962.039.900,00	-9.960.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM		0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
		SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 PUNDONG								1.666.985.382.176,00	1.777.834.463.194,00	1.703.090.874.170,00	36.105.491.994,00						1.889.602.946.892,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							1.561.153.918.976,00	1.659.455.561.594,00	1.587.340.304.470,00	26.186.385.494,00							1.764.400.335.642,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							1.561.153.918.976,00	1.659.455.561.594,00	1.587.340.304.470,00	26.186.385.494,00							1.764.400.335.642,00	
1.	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				86,71 Nilai	86,71 Nilai	1.058.042.007.807,00	1.059.632.444.125,00	1.011.942.522.303,00	128.627.665.564,00							1.186.669.673.371,00	
	1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah siswa SMK yang terlayani peningkatan keahlian				5.775 siswa	5.775 siswa	6.322.171.513,00	6.322.171.513,00	9.904.133.050,00	3.581.961.537,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas SDM	SMKN 1 Pundong, siswa dan masyarakat		5.678.610.589,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	73.385.000,00	73.385.000,00	73.391.250,00	6.250,00	Kab. Bantul, Pundong, Snihardono	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas SDM			0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Putus Sekolah SMA/SMK Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat Jumlah penerima sertifikat keahlian teknik Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Gunungkidul Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Sleman Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Kulon Progo Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Bantul Persentase guru jenjang pendidikan menengah dan khusus pengguna media pembelajaran JogjaBelajar Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya di Kota Yogyakarta Angka Partisipasi Murni (APM) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik khusus PLB				0,19 100 40 41.47 46.83 46.98 49.46 55 58.62 77.52 80.5 86.15 % % % % % % % % % % %	0,19 100 40 41.47 46.83 46.98 49.46 55 58.62 77.52 80.5 86.15 % % % % % % % % % % %	512.963.552.469,00	609.674.758.769,00	585.494.362.467,00	75.103.560.432,00							588.067.112.901,00	
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	<i>Iklim Inklusivitas SMK</i> <i>Iklim keamanan SMK</i> <i>Iklim kebinekaan SMK</i> <i>Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu)</i> <i>Jumlah SMK yang memperoleh status BLUD</i> <i>Jumlah SMK yang menyelenggarakan Teaching Factory</i> <i>Kemampuan Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional</i> <i>Kemampuan Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional</i> <i>Persentase guru produktif yang memiliki sertifikat kompetensi dari BNSP</i> <i>Persentase lulusan SMK dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha</i> <i>Persentase SMK yang melaksanakan UKS</i>				11 Ruang 12 Ruang 12 unit 19 paket 1 Ruang 219 satuan pendidikan 22 medali 23 paket 25,32 % 2 Ruang 2 unit 300 paket 32,10 % 37316 peserta didik 41 sekolah 55,01 Angka 58 % 5 Ruang 66,05 Angka 6 sekolah 77,65 Angka 81,58 Angka 93,02 Angka 975 peserta didik	22 medali 25,32 % 32,10 % 41 sekolah 55,01 Angka 58 % 66,05 Angka 6 sekolah 77,65 Angka 81,58 Angka 93,02 Angka 975 peserta didik	276.838.158.540,00	319.528.715.740,00	320.862.664.915,00	44.024.506.375,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM	Siswa, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMKN 1 Pundong		308.892.870.055,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.02.1.02.0072	Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik	<i>Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar</i>				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1.680.000.000,00	1.674.900.000,00	1.666.930.000,00	-13.070.000,00	Kab. Bantul, Pundong, Srihardono	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM		0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
		SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 KASIHAN								1.666.985.382.176,00	1.777.834.463.194,00	1.703.090.874.170,00	36.105.491.994,00						1.889.602.946.892,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							1.561.153.918.976,00	1.659.455.561.594,00	1.587.340.304.470,00	26.186.385.494,00							1.764.400.335.642,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							1.561.153.918.976,00	1.659.455.561.594,00	1.587.340.304.470,00	26.186.385.494,00							1.764.400.335.642,00	
1.	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				86,71 Nilai	86,71 Nilai	1.058.042.007.807,00	1.059.632.444.125,00	1.011.942.522.303,00	128.627.665.564,00							1.186.669.673.371,00	
	1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	<i>Jumlah siswa SMK yang terlayani peningkatan keahlian</i>				5.775 siswa	5.775 siswa	6.322.171.513,00	6.322.171.513,00	9.904.133.050,00	3.581.961.537,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas SDM	SMKN 2 Kasihan, siswa dan masyarakat		5.678.610.589,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	<i>Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan</i>				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	75.350.000,00	75.350.000,00	75.353.000,00	3.000,00	Kab. Bantul, Kasihan, Ngestiharjo	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas SDM			0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Putus Sekolah SMA/SMK Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat Jumlah penerima sertifikat keahlian teknik Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Gunungkidul Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Sleman Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Kulon Progo Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Bantul Persentase guru jenjang pendidikan menengah dan khusus pengguna media pembelajaran JogjaBelajar Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya di Kota Yogyakarta Angka Partisipasi Murni (APM) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik khusus PLB				0,19 100 40 41.47 46.83 46.98 49.46 55 58.62 77.52 80.5 86.15 % % % % % % % % % %	0,19 100 40 41.47 46.83 46.98 49.46 55 58.62 77.52 80.5 86.15 % % % % % % % % % %	512.963.552.469,00	609.674.758.769,00	585.494.362.467,00	75.103.560.432,00							588.067.112.901,00	
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Iklim Inklusivitas SMK Iklim keamanan SMK Iklim kebinekaan SMK Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu) Jumlah SMK yang memperoleh status BLUD Jumlah SMK yang menyelenggarakan Teaching Factory Kemampuan Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Kemampuan Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Persentase guru produktif yang memiliki sertifikat kompetensi dari BNSP Persentase lulusan SMK dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha Persentase SMK yang melaksanakan UKS				11 Ruang 12 Ruang 12 unit 19 paket 1 Ruang 219 satuan pendidikan 22 medali 23 paket 25,32 % 2 Ruang 2 unit 300 paket 32,10 % 37316 peserta didik 41 sekolah 55,01 Angka 58 % 5 Ruang 66,05 Angka 6 sekolah 77,65 Angka 81,58 Angka 93,02 Angka 975 peserta didik	22 medali 25,32 % 32,10 % 41 sekolah 55,01 Angka 58 % 66,05 Angka 6 sekolah 77,65 Angka 81,58 Angka 93,02 Angka 975 peserta didik	276.838.158.540,00	319.528.715.740,00	320.862.664.915,00	44.024.506.375,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM	Siswa, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMKN 2 Kasihan		308.892.870.055,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.02.1.02.0072	Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	907.999.950,00	907.711.950,00	899.485.950,00	-8.514.000,00	Kab. Bantul, Kasihan, Ngestiharjo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM			0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
		SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 SEYEGAN								1.666.985.382.176,00	1.777.834.463.194,00	1.703.090.874.170,00	36.105.491.994,00						1.889.602.946.892,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							1.561.153.918.976,00	1.659.455.561.594,00	1.587.340.304.470,00	26.186.385.494,00							1.764.400.335.642,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							1.561.153.918.976,00	1.659.455.561.594,00	1.587.340.304.470,00	26.186.385.494,00							1.764.400.335.642,00	
1.	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				86,71 Nilai	86,71 Nilai	1.058.042.007.807,00	1.059.632.444.125,00	1.011.942.522.303,00	128.627.665.564,00							1.186.669.673.371,00	
	1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah siswa SMK yang terlayani peningkatan keahlian				5.775 siswa	5.775 siswa	6.322.171.513,00	6.322.171.513,00	9.904.133.050,00	3.581.961.537,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas SDM	SMKN 1 Seyegan, siswa dan masyarakat		5.678.610.589,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	116.200.000,00	116.200.000,00	108.200.431,00	-7.999.569,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sleman, Seyegan, Margomulyo	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas SDM			0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Putus Sekolah SMA/SMK Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat Jumlah penerima sertifikat keahlian teknik Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Gunungkidul Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Sleman Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Kulon Progo Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Bantul Persentase guru jenjang pendidikan menengah dan khusus pengguna media pembelajaran JogjaBelajar Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya di Kota Yogyakarta Angka Partisipasi Murni (APM) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik khusus PLB				0,19 100 40 41.47 46.83 46.98 49.46 55 58.62 77.52 80.5 86.15 % % % % % % % % % %	0,19 100 40 41.47 46.83 46.98 49.46 55 58.62 77.52 80.5 86.15 % % % % % % % % % %	512.963.552.469,00	609.674.758.769,00	585.494.362.467,00	75.103.560.432,00							588.067.112.901,00	
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Iklim Inklusivitas SMK Iklim keamanan SMK Iklim kebinekaan SMK Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu) Jumlah SMK yang memperoleh status BLUD Jumlah SMK yang menyelenggarakan Teaching Factory Kemampuan Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Kemampuan Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Persentase guru produktif yang memiliki sertifikat kompetensi dari BNSP Persentase lulusan SMK dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha Persentase SMK yang melaksanakan UKS				11 Ruang 12 Ruang 12 unit 19 paket 1 Ruang 219 satuan pendidikan 22 medali 23 paket 25,32 % 2 Ruang 2 unit 300 paket 32,10 % 37316 peserta didik 41 sekolah 55,01 Angka 58 % 5 Ruang 66,05 Angka 6 sekolah 77,65 Angka 81,58 Angka 93,02 Angka 975 peserta didik	22 medali 25,32 % 32,10 % 41 sekolah 55,01 Angka 58 % 66,05 Angka 6 sekolah 77,65 Angka 81,58 Angka 93,02 Angka	276.838.158.540,00	319.528.715.740,00	320.862.664.915,00	44.024.506.375,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM	Siswa, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMKN 1 Seyegan		308.892.870.055,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.02.1.02.0072	Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	3.318.000.000,00	3.312.900.000,00	3.305.100.000,00	-12.900.000,00	Kab. Sleman, Seyegan, Margomulyo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM		0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
		SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 NANGGULAN								1.666.985.382.176,00	1.777.834.463.194,00	1.703.090.874.170,00	36.105.491.994,00						1.889.602.946.892,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							1.561.153.918.976,00	1.659.455.561.594,00	1.587.340.304.470,00	26.186.385.494,00							1.764.400.335.642,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							1.561.153.918.976,00	1.659.455.561.594,00	1.587.340.304.470,00	26.186.385.494,00							1.764.400.335.642,00	
1.	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				86,71 Nilai	86,71 Nilai	1.058.042.007.807,00	1.059.632.444.125,00	1.011.942.522.303,00	128.627.665.564,00							1.186.669.673.371,00	
	1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah siswa SMK yang terlayani peningkatan keahlian				5.775 siswa	5.775 siswa	6.322.171.513,00	6.322.171.513,00	9.904.133.050,00	3.581.961.537,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas SDM	SMKN 1 Nanggulan, siswa dan masyarakat		5.678.610.589,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	95.860.000,00	95.860.000,00	95.860.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa Kab. Kulon Progo, Nanggulan, Wijimulyo	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas SDM			0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Putus Sekolah SMA/SMK Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat Jumlah penerima sertifikat keahlian teknik Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Gunungkidul Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Sleman Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Kulon Progo Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Bantul Persentase guru jenjang pendidikan menengah dan khusus pengguna media pembelajaran JogjaBelajar Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya di Kota Yogyakarta Angka Partisipasi Murni (APM) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik khusus PLB				0,19 100 40 41.47 46.83 46.98 49.46 55 58.62 77.52 80.5 86.15 % % Orang % % % % % % % %	0,19 100 40 41.47 46.83 46.98 49.46 55 58.62 77.52 80.5 86.15 % % Orang % % % % % % % %	512.963.552.469,00	609.674.758.769,00	585.494.362.467,00	75.103.560.432,00							588.067.112.901,00	
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Iklim Inklusivitas SMK Iklim keamanan SMK Iklim kebinekaan SMK Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu) Jumlah SMK yang memperoleh status BLUD Jumlah SMK yang menyelenggarakan Teaching Factory Kemampuan Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Kemampuan Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Persentase guru produktif yang memiliki sertifikat kompetensi dari BNSP Persentase lulusan SMK dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha Persentase SMK yang melaksanakan UKS				11 Ruang 12 Ruang 12 unit 19 paket 1 Ruang 219 satuan pendidikan 22 medali 23 paket 25,32 % 2 Ruang 2 unit 300 paket 32,10 % Angka 37316 peserta didik 41 sekolah 55,01 Angka 58 % 5 Ruang 66,05 Angka 6 sekolah 77,65 Angka 81,58 Angka 93,02 Angka 975 peserta didik	22 medali 25,32 % 32,10 % 41 sekolah 55,01 Angka 58 % 66,05 Angka 6 sekolah 77,65 Angka 81,58 Angka 93,02 Angka 975 peserta didik	276.838.158.540,00	319.528.715.740,00	320.862.664.915,00	44.024.506.375,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM	Siswa, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMKN 1 Nanggulan		308.892.870.055,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.02.1.02.0072	Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1.720.600.000,00	1.715.500.000,00	1.701.200.000,00	-19.400.000,00	Kab. Kulon Progo, Nanggulan, Wijimulyo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM		0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
		SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 GEDANGSARI							1.666.985.382.176,00	1.777.834.463.194,00	1.703.090.874.170,00	36.105.491.994,00						1.889.602.946.892,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							1.561.153.918.976,00	1.659.455.561.594,00	1.587.340.304.470,00	26.186.385.494,00						1.764.400.335.642,00		
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							1.561.153.918.976,00	1.659.455.561.594,00	1.587.340.304.470,00	26.186.385.494,00						1.764.400.335.642,00		
1.	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				86,71 Nilai	86,71 Nilai	1.058.042.007.807,00	1.059.632.444.125,00	1.011.942.522.303,00	128.627.665.564,00						1.186.669.673.371,00		
	1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah siswa SMK yang terlayani peningkatan keahlian				5.775 siswa	5.775 siswa	6.322.171.513,00	6.322.171.513,00	9.904.133.050,00	3.581.961.537,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas SDM	SMKN 1 Gedangsari, siswa dan masyarakat	5.678.610.589,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	16.590.000,00	16.590.000,00	21.131.000,00	4.541.000,00	Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Hargomulyo	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas SDM		0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Putus Sekolah SMA/SMK Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat Jumlah penerima sertifikat keahlian teknik Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Gunungkidul Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Sleman Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Kulon Progo Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Bantul Persentase guru jenjang pendidikan menengah dan khusus pengguna media pembelajaran JogjaBelajar Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya di Kota Yogyakarta Angka Partisipasi Murni (APM) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik khusus PLB				0,19 100 40 41.47 46.83 46.98 49.46 55 58.62 77.52 80.5 86.15 % % % % % % % % % %	0,19 100 40 41.47 46.83 46.98 49.46 55 58.62 77.52 80.5 86.15 % % % % % % % % % %	512.963.552.469,00	609.674.758.769,00	585.494.362.467,00	75.103.560.432,00							588.067.112.901,00	
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Iklim Inklusivitas SMK Iklim keamanan SMK Iklim kebinekaan SMK Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu) Jumlah SMK yang memperoleh status BLUD Jumlah SMK yang menyelenggarakan Teaching Factory Kemampuan Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Kemampuan Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Persentase guru produktif yang memiliki sertifikat kompetensi dari BNSP Persentase lulusan SMK dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha Persentase SMK yang melaksanakan UKS				11 Ruang 12 Ruang 12 unit 19 paket 1 Ruang 219 satuan pendidikan 22 medali 23 paket 25,32 % 2 Ruang 2 unit 300 paket 32,10 % 37316 peserta didik 41 sekolah 55,01 Angka 58 % 5 Ruang 66,05 Angka 6 sekolah 77,65 Angka 81,58 Angka 93,02 Angka 975 peserta didik	22 medali 25,32 % 32,10 % 41 sekolah 55,01 Angka 58 % 66,05 Angka 6 sekolah 77,65 Angka 81,58 Angka 93,02 Angka	276.838.158.540,00	319.528.715.740,00	320.862.664.915,00	44.024.506.375,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM	Siswa, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMKN 1 Gedangsari		308.892.870.055,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.02.1.02.0072	Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	930.600.000,00	925.500.000,00	912.860.000,00	-17.740.000,00	Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Hargomulyo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM			0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
		SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 GODEAN								1.666.985.382.176,00	1.777.834.463.194,00	1.703.090.874.170,00	36.105.491.994,00						1.889.602.946.892,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							1.561.153.918.976,00	1.659.455.561.594,00	1.587.340.304.470,00	26.186.385.494,00							1.764.400.335.642,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							1.561.153.918.976,00	1.659.455.561.594,00	1.587.340.304.470,00	26.186.385.494,00							1.764.400.335.642,00	
1.	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				86,71 Nilai	86,71 Nilai	1.058.042.007.807,00	1.059.632.444.125,00	1.011.942.522.303,00	128.627.665.564,00							1.186.669.673.371,00	
	1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah siswa SMK yang terlayani peningkatan keahlian				5.775 siswa	5.775 siswa	6.322.171.513,00	6.322.171.513,00	9.904.133.050,00	3.581.961.537,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas SDM	SMKN 2 Godean, siswa dan masyarakat		5.678.610.589,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	175.064.000,00	175.064.000,00	112.439.131,00	-62.624.869,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sleman, Godean, Sidoagung	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas SDM			0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Putus Sekolah SMA/SMK Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat Jumlah penerima sertifikat keahlian teknik Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Gunungkidul Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Sleman Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Kulon Progo Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Bantul Persentase guru jenjang pendidikan menengah dan khusus pengguna media pembelajaran JogjaBelajar Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya di Kota Yogyakarta Angka Partisipasi Murni (APM) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik khusus PLB				0,19 100 40 41.47 46.83 46.98 49.46 55 58.62 77.52 80.5 86.15 % % % % % % % % % % %	0,19 100 40 41.47 46.83 46.98 49.46 55 58.62 77.52 80.5 86.15 % % % % % % % % % % %	512.963.552.469,00	609.674.758.769,00	585.494.362.467,00	75.103.560.432,00							588.067.112.901,00	
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Iklim Inklusivitas SMK Iklim keamanan SMK Iklim kebinekaan SMK Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu) Jumlah SMK yang memperoleh status BLUD Jumlah SMK yang menyelenggarakan Teaching Factory Kemampuan Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Kemampuan Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Persentase guru produktif yang memiliki sertifikat kompetensi dari BNSP Persentase lulusan SMK dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha Persentase SMK yang melaksanakan UKS				11 Ruang 12 Ruang 12 unit 19 paket 1 Ruang 219 satuan pendidikan 22 medali 23 paket 25,32 % 2 Ruang 2 unit 300 paket 32,10 % 37316 peserta didik 41 sekolah 55,01 Angka 58 % 5 Ruang 66,05 Angka 6 sekolah 77,65 Angka 81,58 Angka 93,02 Angka 975 peserta didik	22 medali 25,32 % 32,10 % 41 sekolah 55,01 Angka 58 % 66,05 Angka 6 sekolah 77,65 Angka 81,58 Angka 93,02 Angka 975 peserta didik	276.838.158.540,00	319.528.715.740,00	320.862.664.915,00	44.024.506.375,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM	Siswa, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMKN 2 Godean		308.892.870.055,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.02.1.02.0072	Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1.720.000.000,00	1.714.900.000,00	1.703.910.000,00	-16.090.000,00	Kab. Sleman, Godean, Sidoagung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM		0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
		SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 WONOSARI								1.666.985.382.176,00	1.777.834.463.194,00	1.703.090.874.170,00	36.105.491.994,00						1.889.602.946.892,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							1.561.153.918.976,00	1.659.455.561.594,00	1.587.340.304.470,00	26.186.385.494,00							1.764.400.335.642,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							1.561.153.918.976,00	1.659.455.561.594,00	1.587.340.304.470,00	26.186.385.494,00							1.764.400.335.642,00	
1.	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				86,71 Nilai	86,71 Nilai	1.058.042.007.807,00	1.059.632.444.125,00	1.011.942.522.303,00	128.627.665.564,00							1.186.669.673.371,00	
	1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah siswa SMK yang terlayani peningkatan keahlian				5.775 siswa	5.775 siswa	6.322.171.513,00	6.322.171.513,00	9.904.133.050,00	3.581.961.537,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas SDM	SMKN 1 Wonosari, siswa dan masyarakat		5.678.610.589,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	44.039.250,00	44.039.250,00	44.039.250,00	0,00	Kab. Gunungkidul, Wonosari	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas SDM			0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Putus Sekolah SMA/SMK Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat Jumlah penerima sertifikat keahlian teknik Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Gunungkidul Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Sleman Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Kulon Progo Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Bantul Persentase guru jenjang pendidikan menengah dan khusus pengguna media pembelajaran JogjaBelajar Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya di Kota Yogyakarta Angka Partisipasi Murni (APM) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik khusus PLB				0,19 100 40 41.47 46.83 46.98 49.46 55 58.62 77.52 80.5 86.15 % % Orang % % % % % % % %	0,19 100 40 41.47 46.83 46.98 49.46 55 58.62 77.52 80.5 86.15 % % Orang % % % % % % % %	512.963.552.469,00	609.674.758.769,00	585.494.362.467,00	75.103.560.432,00							588.067.112.901,00	
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Iklim Inklusivitas SMK Iklim keamanan SMK Iklim kebinekaan SMK Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu) Jumlah SMK yang memperoleh status BLUD Jumlah SMK yang menyelenggarakan Teaching Factory Kemampuan Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Kemampuan Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Persentase guru produktif yang memiliki sertifikat kompetensi dari BNSP Persentase lulusan SMK dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha Persentase SMK yang melaksanakan UKS				11 Ruang 12 Ruang 12 unit 19 paket 1 Ruang 219 satuan pendidikan 22 medali 23 paket 25,32 % 2 Ruang 2 unit 300 paket 32,10 % 37316 peserta didik 41 sekolah 55,01 Angka 58 % 5 Ruang 66,05 Angka 6 sekolah 77,65 Angka 81,58 Angka 93,02 Angka 975 peserta didik	22 medali 25,32 % 32,10 % 41 sekolah 55,01 Angka 58 % 66,05 Angka 6 sekolah 77,65 Angka 81,58 Angka 93,02 Angka 975 peserta didik	276.838.158.540,00	319.528.715.740,00	320.862.664.915,00	44.024.506.375,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM	Siswa, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMKN 1 Wonosari		308.892.870.055,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.02.1.02.0072	Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	2.794.000.000,00	2.788.900.000,00	2.761.808.000,00	-32.192.000,00	Kab. Gunungkidul, Wonosari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM		0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
		SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 GODEAN								1.666.985.382.176,00	1.777.834.463.194,00	1.703.090.874.170,00	36.105.491.994,00						1.889.602.946.892,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							1.561.153.918.976,00	1.659.455.561.594,00	1.587.340.304.470,00	26.186.385.494,00							1.764.400.335.642,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							1.561.153.918.976,00	1.659.455.561.594,00	1.587.340.304.470,00	26.186.385.494,00							1.764.400.335.642,00	
1.	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				86,71 Nilai	86,71 Nilai	1.058.042.007.807,00	1.059.632.444.125,00	1.011.942.522.303,00	128.627.665.564,00							1.186.669.673.371,00	
	1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah siswa SMK yang terlayani peningkatan keahlian				5.775 siswa	5.775 siswa	6.322.171.513,00	6.322.171.513,00	9.904.133.050,00	3.581.961.537,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas SDM	SMKN 1 Godean, siswa dan masyarakat		5.678.610.589,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	101.710.000,00	101.710.000,00	101.710.000,00	0,00	Kab. Sleman, Godean, Sidoagung	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas SDM			0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
2.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Putus Sekolah SMA/SMK Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat Jumlah penerima sertifikat keahlian teknik Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Gunungkidul Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Sleman Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Kulon Progo Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Bantul Persentase guru jenjang pendidikan menengah dan khusus pengguna media pembelajaran JogjaBelajar Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya di Kota Yogyakarta Angka Partisipasi Murni (APM) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik khusus PLB				0,19 100 40 41.47 46.83 46.98 49.46 55 58.62 77.52 80.5 86.15 % % Orang % % % % % % % % %	0,19 100 40 41.47 46.83 46.98 49.46 55 58.62 77.52 80.5 86.15 % % Orang % % % % % % % % %	512.963.552.469,00	609.674.758.769,00	585.494.362.467,00	75.103.560.432,00							588.067.112.901,00			
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Iklim Inklusivitas SMK Iklim keamanan SMK Iklim kebinekaan SMK Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu) Jumlah SMK yang memperoleh status BLUD Jumlah SMK yang menyelenggarakan Teaching Factory Kemampuan Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Kemampuan Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Persentase guru produktif yang memiliki sertifikat kompetensi dari BNSP Persentase lulusan SMK dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha Persentase SMK yang melaksanakan UKS				11 Ruang 12 Ruang 12 unit 19 paket 1 Ruang 219 satuan pendidikan 22 medali 23 paket 25,32 % 2 Ruang 2 unit 300 paket 32,10 % 37316 peserta didik 41 sekolah 55,01 Angka 58 % 5 Ruang 66,05 Angka 6 sekolah 77,65 Angka 81,58 Angka 93,02 Angka 975 peserta didik	22 medali 25,32 % 32,10 % 41 sekolah 55,01 Angka 58 % 66,05 Angka 6 sekolah 77,65 Angka 81,58 Angka 93,02 Angka 975 peserta didik	276.838.158.540,00	319.528.715.740,00	320.862.664.915,00	44.024.506.375,00					Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM	Siswa, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMKN 1 Godean		308.892.870.055,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.02.1.02.0072	Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	2.138.000.000,00	2.132.900.000,00	2.120.880.000,00	-17.120.000,00	Kab. Sleman, Godean, Sidoagung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM			0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA		
		DINAS KESEHATAN							107.607.282.731,00	119.681.741.722,00	128.683.709.678,00	21.076.426.947,00							62.679.077.166,00			
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							107.142.832.731,00	119.353.145.122,00	128.534.133.078,00	21.391.300.347,00							62.168.182.166,00			
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							107.142.832.731,00	119.353.145.122,00	128.534.133.078,00	21.391.300.347,00							62.168.182.166,00			
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				-	89,21 Nilai	53.500.562.660,00	53.348.709.151,00	62.140.536.616,00	-4.969.452.494,00							48.531.110.166,00			
	1.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Dinkes DIY				-	100 %	19.093.550,00	19.093.550,00	16.199.550,00	-2.894.000,00			-	-	Dinas Kesehatan DIY		44.103.000,00	DINAS KESEHATAN		
	1.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	16.093.550,00	16.093.550,00	13.208.550,00	-2.885.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			40.803.000,00	DINAS KESEHATAN		
	1.02.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.650.000,00	DINAS KESEHATAN		
	1.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	2 Laporan	1.500.000,00	1.500.000,00	1.491.000,00	-9.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.650.000,00	DINAS KESEHATAN		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.02.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah				-	100 %	34.562.570.960,00	34.428.151.451,00	31.106.156.764,00	-3.456.414.196,00			-	-	Dinas Kesehatan DIY		29.899.148.623,00	DINAS KESEHATAN
1.02.01.1.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				224 Orang/ Bulan	219 Orang/ Bulan	34.515.573.360,00	34.381.153.851,00	31.059.159.164,00	-3.456.414.196,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBUJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			29.771.690.623,00	DINAS KESEHATAN
1.02.01.1.02.0003		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	11.305.000,00	11.305.000,00	11.305.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			61.644.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.01.1.02.0005		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.887.600,00	1.887.600,00	1.887.600,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			2.076.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.01.1.02.0007		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Trivulanan/Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Trivulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Trivulanan/Semesteran SKPD				25 Laporan	25 Laporan	5.740.000,00	5.740.000,00	5.740.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			6.314.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pengamanan dan penatausahaan barang milik daerah				-	100 %	56.315.000,00	61.715.000,00	61.715.000,00	5.400.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Dinas Kesehatan DIY		45.976.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.01.1.03.0002		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			4.400.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.01.1.03.0006		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	14.720.000,00	20.120.000,00	20.120.000,00	5.400.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			16.192.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	SDM Dikes meningkat pengetahuannya tentang peraturan perundang-undangan terbaru				-	30 Orang	2.838.000,00	2.838.000,00	2.838.000,00	0,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Dinas Kesehatan DIY		3.168.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.01.1.05.0009		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				87 Orang	36 Orang	2.838.000,00	2.838.000,00	2.838.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			3.168.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan administrasi umum perangkat daerah				-	100 %	527.654.550,00	504.820.550,00	429.916.400,00	-97.738.150,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Dinas Kesehatan DIY		480.788.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.01.1.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	6.050.000,00	6.050.000,00	5.065.000,00	-985.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			6.655.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.01.1.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	40.000.000,00	40.000.000,00	39.980.000,00	-20.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			44.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.01.1.06.0003		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	18.314.000,00	18.314.000,00	19.299.000,00	985.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			20.240.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.01.1.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			165.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.01.1.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	1 Paket	18.749.550,00	13.349.550,00	13.349.400,00	-5.400.150,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			20.625.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.01.1.06.0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	2.556.000,00	2.556.000,00	2.556.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			6.600.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.01.1.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					4 Laporan	1 Laporan	194.991.000,00	177.557.000,00	111.073.000,00	-83.918.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			214.500.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.01.1.06.0011		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD					1 Dokumen	1 Dokumen	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			3.168.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang diadakan				-	100 %	704.530.000,00	704.530.000,00	704.530.000,00	0,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Dinas Kesehatan DIY		100.364.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.01.1.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					7 Unit	9 Unit	50.070.000,00	50.070.000,00	50.070.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			69.564.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.01.1.07.0009		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					1 Unit	1 Unit	575.000.000,00	575.000.000,00	575.000.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.01.1.07.0010		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					5 Unit	3 Unit	17.760.000,00	17.760.000,00	17.760.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			30.800.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang perkantoran Dinkes DIY				-	100 %	5.932.357.600,00	5.932.357.600,00	5.926.410.100,00	-5.947.500,00			-	-	Dinas Kesehatan DIY		5.834.792.543,00	DINAS KESEHATAN
1.02.01.1.08.0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat					1 Laporan	1 Laporan	1.990.000,00	1.990.000,00	1.990.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			3.080.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.01.1.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					5 Laporan	1 Laporan	828.112.000,00	828.112.000,00	827.512.000,00	-600.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			910.924.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.01.1.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					3 Laporan	1 Laporan	1.246.880.800,00	1.246.880.800,00	1.243.880.800,00	-3.000.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			1.413.110.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang perkantoran Dinkes DIY				-	100 %	498.963.200,00	498.963.200,00	498.622.100,00	-341.100,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Dinas Kesehatan DIY		580.470.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.01.1.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					2 Unit	2 Unit	30.143.000,00	30.143.000,00	30.143.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			38.500.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.01.1.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					47 Unit	41 Unit	178.327.200,00	178.327.200,00	178.007.100,00	-320.100,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			330.330.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.01.1.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					86 Unit	57 Unit	76.693.000,00	76.693.000,00	76.672.000,00	-21.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			151.140.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.01.1.09.0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					2 Unit	1 Unit	56.335.000,00	56.335.000,00	56.335.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			60.500.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Kab/Kota yang mempertahankan eliminasi malaria Persentase Wanita Usia Subur (WUS) yang melakukan deteksi dini iva test dan sadanis untuk pencegahan kanker servik dan kanker payudara Presentase remaja putri anemia Persentase skrining/deteksi dini kesehatan jiwa pada usia 15 tahun ke atas Persentase fasyankes terakreditasi Persentase BBLR (Bayi Berat Lahir Rendah) Persentase ODHA minum ARV ( ODHA on ARV) Persentase penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan secara standar Persentase penderita DM mendapatkan pengobatan secara teratur Persentase keberhasilan pengobatan TBC				63 100 16 20.8 35 57.04 6.3 73 78 86 % % % % % % % %	100 16 20.8 35 57.04 6.3 73 78 86 % % % % % % % %	53.156.113.971,00	65.006.324.871,00	65.456.007.362,00	-40.285.866.971,00							12.870.247.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.02.02.1.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase penyediaan fasilitas pelayanan, sarana, prasarana, dan alat kesehatan UKP Rujukan, UKM, dan UKM Rujukan				100 %	100 %	407.954.000,00	5.509.807.900,00	6.120.978.520,00	5.713.024.520,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM	Masyarakat DIY, Dinkes Kab/Kota, SDMK		8.918.808.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.1.01.0025		Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah dokumen distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan				4 Dokumen	5 Dokumen	61.959.000,00	350.068.300,00	345.868.300,00	283.909.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK PROVINSI	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM		117.158.000,00	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.1.01.0027		Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				1 Paket	2 Paket	527.000,00	4.333.183.700,00	4.606.606.700,00	4.606.079.700,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK PROVINSI	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM		1.650.000,00	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.1.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah kalurahan/kelurahan yang dilaksanakan pendampingan verifikasi STBM Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dalam Pemenuhan SPM Bidang Kesehatan Persentase bayi 18 - 24 bulan mendapatkan imunisasi booster Campak dan Rubella Persentase bayi usia 0-11 bulan mendapat IDL (Imunisasi Dasar Lengkap) Persentase disabilitas yang memanfaatkan secara optimal hasil layanan jaminan kesehatan khusus Persentase fasyankes mendapatkan pembinaan pelayanan kesehatan Persentase KB Persentase Kab/kota yang melakukan deteksi dini kesehatan jiwa Persentase Kab/ Kota yang melakukan pelayanan DM mendapatkan sesuai standar minimal 50 persen Persentase Kab/ Kota yang melakukan pelayanan hipertensi sesuai standar minimal 50 persen Persentase Kab/kota yang melakukan pelayanan sesuai standar pada penderita ODGJ Persentase Kab/kota yang melakukan skrining iya tes dan sadanis minimal 10 persen dari total WUS diwilayahnya Persentase Kabupaten/Kota yang melakukan rekonsiliasi data akses layanan jaminan kesehatan Persentase Kabupaten Kota yang tidak terjadi KLB Malaria Persentase KN Lengkap Persentase lansia mendapat layanan kesehatan Persentase mitra yang melayani jaminan kesehatan semesta Persentase Orang dengan HIV (ODHIV) baru ditemukan mendapatkan pengobatan ART Persentase Pelayanan Kesehatan Balita Persentase pembayaran klaim jaminan kesehatan penyangga dan disabilitas sesuai ketentuan Persentase penemuan dan pengobatan kasus TBC Persentase PSC dan jejaringnya mendapatkan pembinaan penyediaan dan pengelolaan SPGDT Persentase remaja putri konsumsi tablet tambah darah Persentase respon time SKDR PD3I kurang dari 24 jam Persentase RS memenuhi standar kredensialing Persentase WUS yang mempunyai status imunisasi T2+ (Tetanus yang ke-2 atau lebih)				100 % 14 Angka 250 Angka 49 % 56 % 60 % 70 % 78 % 80 % 86 % 86,08 % 90 % 93 % 95 % 97,56 %	100 % 14 Angka 250 Angka 49 % 56 % 60 % 70 % 78 % 80 % 86 % 86,08 % 90 % 93 % 95 % 97,56 %	52.674.520.871,00	58.935.727.871,00	59.142.754.742,00	6.468.233.871,00		Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM	Masyarakat DIY, Dinkes Kab/Kota, SDMK		3.865.506.000,00	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.1.02.0001		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar				876 Orang	1000 Orang	513.513.750,00	643.210.450,00	643.210.450,00	129.696.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM			675.832.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.1.02.0002		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)																		
			Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				28315 Orang	28315 Orang	389.320.000,00	619.755.000,00	637.245.000,00	247.925.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM			545.468.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.1.02.0003		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak				9 Dokumen	6 Dokumen	175.237.500,00	444.359.500,00	611.996.500,00	436.759.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK PROVINSI	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM			272.571.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.1.02.0004		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif				1 Dokumen	1 Dokumen	55.708.000,00	133.708.000,00	133.108.000,00	77.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM			63.038.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.1.02.0005		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut				3 Dokumen	1 Dokumen	8.655.000,00	98.655.000,00	98.655.000,00	90.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM			13.965.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.1.02.0006		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				3 Dokumen	3 Dokumen	22.176.000,00	198.576.000,00	394.471.292,00	372.295.292,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM			45.321.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.1.02.0007		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	1 Dokumen	28.552.000,00	47.300.000,00	47.300.000,00	18.748.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM			35.609.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.1.02.0008		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				4 Dokumen	4 Dokumen	28.000.000,00	549.508.700,00	575.951.700,00	547.951.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM			368.604.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.1.02.0009		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				2 Dokumen	2 Dokumen	40.712.000,00	1.295.015.100,00	1.186.009.100,00	1.145.297.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM			46.332.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.1.02.0011		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				8 Dokumen	8 Dokumen	1.081.308.700,00	4.174.493.200,00	4.202.727.100,00	3.121.418.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM			1.338.525.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.1.02.0013		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)				1 Dokumen	1 Dokumen	13.161.000,00	45.530.000,00	45.530.000,00	32.369.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK PROVINSI	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM			14.477.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.1.02.0016		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	7.190.000,00	7.190.000,00	10.129.900,00	2.939.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM			20.956.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.1.02.0017		Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	46.090.000,00	275.893.000,00	257.207.000,00	211.117.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK PROVINSI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM			50.699.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.1.02.0019		Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan				3 Dokumen	4 Dokumen	17.429.000,00	155.066.000,00	155.066.000,00	137.637.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK PROVINSI PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM			60.465.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.1.02.0023		Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)				3 Unit	3 Unit	257.142.150,00	257.142.150,00	257.142.150,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM		294.752.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.1.02.0030	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga																		
			Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas				832000 Keluarga	832000 Keluarga	4.416.771,00	4.416.771,00	4.416.550,00	-221,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM		18.892.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.1.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase pengelolaan data, informasi, dan sistem informasi kesehatan				100 %	100 %	6.500.000,00	477.750.000,00	127.555.000,00	121.055.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM	Dinas Kesehatan DIY	7.150.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.1.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				3 Dokumen	3 Dokumen	6.500.000,00	477.750.000,00	127.555.000,00	121.055.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM		7.150.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.1.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Mendapatkan Pembinaan Mutu dan Pemenuhan Perijinan				100 %	100 %	67.139.100,00	83.039.100,00	64.719.100,00	-2.420.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM	Fasilitas pelayanan kesehatan	78.783.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.1.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan																		
			Jumlah Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya				32 Unit	32 Unit	20.554.500,00	20.554.500,00	14.614.500,00	-5.940.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM		27.500.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.1.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan																		
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan				310 Unit	310 Unit	46.584.600,00	62.484.600,00	50.104.600,00	3.520.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM		51.283.000,00	DINAS KESEHATAN	
3.	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) Persentase SDM yang meningkat kompetensinya pasca pelatihan				59.54 %	59.54 %	420.997.600,00	932.952.600,00	879.110.600,00	257.462.400,00						678.460.000,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1.02.03.1.01		Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				87.86 %	87.86 %	22.613.100,00	22.613.100,00	20.113.100,00	-2.500.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM	Sumber daya manusia kesehatan		32.070.000,00	DINAS KESEHATAN	
1.02.03.1.01.0001		Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan																			
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				28328 Orang	28328 Orang	16.973.100,00	16.973.100,00	14.473.100,00	-2.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM			25.437.000,00	DINAS KESEHATAN	
1.02.03.1.01.0002		Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan																			
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Terdistribusi				5 Orang	5 Orang	5.640.000,00	5.640.000,00	5.640.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM			6.633.000,00	DINAS KESEHATAN	
1.02.03.1.02		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase kualitas penyelenggaraan pelatihan Persentase SDM yang meningkat kompetensinya				88 % 99.57 %	88 % 99.57 %	398.384.500,00	910.339.500,00	858.997.500,00	460.613.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM	Sumber daya manusia kesehatan		646.390.000,00	DINAS KESEHATAN	
1.02.03.1.02.0001		Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan																			
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat				60 Orang	138 Orang	13.590.000,00	525.545.000,00	519.143.000,00	505.553.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK PROVINSI DAU YANG DITENTUKAN P ENGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM			16.852.000,00	DINAS KESEHATAN	
1.02.03.1.02.0002		Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan				2 Dokumen	2 Dokumen	175.594.500,00	175.594.500,00	160.194.500,00	-15.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM			171.961.000,00	DINAS KESEHATAN	
4.	1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase peningkatan keamanan pelayanan PBF Cabang dan Cabang PAK yang dikendalikan dan diawasi Persentase peningkatan penerapan standar Usaha Kecil Obat Tradisional yang dikendalikan dan diawasi				86,1 % 92 %	86,1 % 92 %	17.192.500,00	17.192.500,00	10.552.500,00	15.605.500,00								32.798.000,00	
1.02.04.1.01		Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	Terwujudnya peningkatan kepatuhan PBF Cabang dan Cabang PAK yang dikendalikan dan diawasi terhadap ketentuan perizinan				100 %	100 %	13.471.000,00	13.471.000,00	8.431.000,00	-5.040.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM	Dinas Kesehatan DIY		28.677.000,00	DINAS KESEHATAN	
1.02.04.1.01.0001		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjut Penerbitan Perizinan				44 Sarana	44 Sarana	13.471.000,00	13.471.000,00	8.431.000,00	-5.040.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM		28.677.000,00	DINAS KESEHATAN	
1.02.04.1.02		Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	Meningkatnya kepatuhan Usaha Kecil Obat Tradisional yang dikendalikan dan diawasi terhadap ketentuan perizinan				100 %	100 %	3.721.500,00	3.721.500,00	2.121.500,00	-1.600.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM	Dinas Kesehatan DIY	4.121.000,00	DINAS KESEHATAN	
1.02.04.1.02.0001		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional																		
			Jumlah Usaha Kecil Obat Tradisional yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional				8 Sarana	8 Sarana	3.721.500,00	3.721.500,00	2.121.500,00	-1.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM		4.121.000,00	DINAS KESEHATAN	
5.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan				100 %	100 %	47.966.000,00	47.966.000,00	47.926.000,00	7.601.000,00							55.567.000,00	
1.02.05.1.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Persentase kegiatan advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah provinsi				100 %	100 %	47.966.000,00	47.966.000,00	47.926.000,00	-40.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM	Dinas Kesehatan DIY	55.567.000,00	DINAS KESEHATAN	
1.02.05.1.01.0001		Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi				3 Dokumen	3 Dokumen	47.966.000,00	47.966.000,00	47.926.000,00	-40.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM		55.567.000,00	DINAS KESEHATAN	
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							464.450.000,00	328.596.600,00	149.576.600,00	-314.873.400,00							510.895.000,00	
2.22		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							464.450.000,00	328.596.600,00	149.576.600,00	-314.873.400,00							510.895.000,00	
1.	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase kab/kota memiliki kegiatan pembinaan pelayanan kesehatan tradisional				-	40 %	464.450.000,00	328.596.600,00	149.576.600,00	46.445.000,00							510.895.000,00	
	2.22.08.5.08	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	Pengembangan kesehatan tradisional di fasilitas pelayanan kesehatan dan komunitas				-	100 %	464.450.000,00	328.596.600,00	149.576.600,00	-314.873.400,00			-	Peningkatan kualitas SDM	-		510.895.000,00	DINAS KESEHATAN
2.22.08.5.08.0004		Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional																		
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Tradisional				1 Unit	1 Unit	464.450.000,00	328.596.600,00	149.576.600,00	-314.873.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	Peningkatan kualitas SDM			510.895.000,00	DINAS KESEHATAN
		BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DAN KALIBRASI																		
									107.607.282.731,00	119.681.741.722,00	128.683.709.678,00	21.076.426.947,00							62.679.077.166,00	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							107.142.832.731,00	119.353.145.122,00	128.534.133.078,00	21.391.300.347,00							62.168.182.166,00	
1.02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							107.142.832.731,00	119.353.145.122,00	128.534.133.078,00	21.391.300.347,00							62.168.182.166,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				-	89,21 Nilai	53.500.562.660,00	53.348.709.151,00	62.140.536.616,00	-4.969.452.494,00							48.531.110.166,00	
1.02.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah				-	100 %	34.562.570.960,00	34.428.151.451,00	31.106.156.764,00	-3.456.414.196,00			-	-	Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi DIY		29.899.148.623,00	DINAS KESEHATAN
1.02.01.1.02.0003		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	10.145.000,00	10.145.000,00	10.145.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Mantrijeron	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			32.824.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pengamanan dan penatausahaan barang milik daerah				-	100 %	56.315.000,00	61.715.000,00	61.715.000,00	5.400.000,00			-	-	Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi DIY		45.976.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	14.165.000,00	14.165.000,00	14.165.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Mantrijeron	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			15.064.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang perkantoran Dinkes DIY				-	100 %	5.932.357.600,00	5.932.357.600,00	5.926.410.100,00	-5.947.500,00			-	-	Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi DIY		5.834.792.543,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	718.760.300,00	718.760.300,00	718.760.300,00	0,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Mantrijeron	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			723.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	1.004.772.000,00	1.004.772.000,00	1.004.772.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Mantrijeron	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.053.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase upaya peningkatan pelayanan BLUD				-	100 %	11.196.239.800,00	11.196.239.800,00	23.394.148.702,00	12.197.908.902,00			-	Peningkatan kualitas SDM	Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi DIY		11.542.300.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	7.150.000.000,00	7.150.000.000,00	15.878.188.355,00	8.728.188.355,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Mantrijeron	PENDAPATAN DARI BLUD PENARIKAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN BLUD	-	Peningkatan kualitas SDM			7.150.000.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase fasyankes terakreditasi				-	57,04 %	53.156.113.971,00	65.006.324.871,00	65.456.007.362,00	-40.285.866.971,00							12.870.247.000,00	
	1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase penyediaan fasilitas pelayanan, sarana, prasarana, dan alat kesehatan UKP Rujukan, UKM, dan UKM Rujukan				-	100 %	407.954.000,00	5.509.807.900,00	6.120.978.520,00	5.713.024.520,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM	Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi DIY		8.918.808.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan																		
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan				3 Unit	13 Unit	42.000.000,00	357.687.900,00	600.457.900,00	558.457.900,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Mantrijeron	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM			3.300.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.01.0013	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi																		
			Jumlah Alat Uji dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center yang Disediakan dan Dipelihara				5 Unit	8 Unit	5.050.000,00	170.450.000,00	269.627.620,00	264.577.620,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Mantrijeron	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM			1.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.01.0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan																		
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				1 Paket	1 Paket	298.418.000,00	298.418.000,00	298.418.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Mantrijeron	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM			4.500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		<b>BALAI PENYELENGGARA JAMINAN KESEHATAN SOSIAL</b>							<b>107.607.282.731,00</b>	<b>119.681.741.722,00</b>	<b>128.683.709.678,00</b>	<b>21.076.426.947,00</b>							<b>62.679.077.166,00</b>	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							107.142.832.731,00	119.353.145.122,00	128.534.133.078,00	21.391.300.347,00							62.168.182.166,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							107.142.832.731,00	119.353.145.122,00	128.534.133.078,00	21.391.300.347,00							62.168.182.166,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				89,21 Nilai	89,21 Nilai	53.500.562.660,00	53.348.709.151,00	62.140.536.616,00	-4.969.452.494,00							48.531.110.166,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah				100 %	100 %	34.562.570.960,00	34.428.151.451,00	31.106.156.764,00	-3.456.414.196,00			-	-	Balai Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial Dinas Kesehatan DIY		29.899.148.623,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	7.470.000,00	7.470.000,00	7.470.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningratan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pengamanan dan penatausahaan barang milik daerah				-	100 %	56.315.000,00	61.715.000,00	61.715.000,00	5.400.000,00			-	-			45.976.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	11.660.000,00	11.660.000,00	11.660.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningratan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan administrasi umum perangkat daerah				100 %	100 %	527.654.550,00	504.820.550,00	429.916.400,00	-97.738.150,00			-	-	Balai Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial Dinas Kesehatan DIY		480.788.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	7.896.400,00	7.896.400,00	7.896.400,00	0,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningratan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	42.074.600,00	42.074.600,00	42.074.600,00	0,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningratan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	9.435.000,00	9.435.000,00	9.435.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningratan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	7.963.000,00	7.963.000,00	7.963.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningratan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	2 Laporan	29.325.000,00	29.325.000,00	20.925.000,00	-8.400.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningratan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang diadakan				100 %	100 %	704.530.000,00	704.530.000,00	704.530.000,00	0,00			-	-			100.364.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				8 Unit	8 Unit	61.700.000,00	61.700.000,00	61.700.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningratan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang perkantoran Dinkes DIY				-	100 %	5.932.357.600,00	5.932.357.600,00	5.926.410.100,00	-5.947.500,00			-	-			5.834.792.543,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	116.240.000,00	116.240.000,00	116.240.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningratan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	594.276.000,00	594.276.000,00	594.276.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningratan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang perkantoran Dinkes DIY				100 %	100 %	498.963.200,00	498.963.200,00	498.622.100,00	-341.100,00			-	-			580.470.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				6 Unit	6 Unit	61.404.000,00	61.404.000,00	61.404.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningratan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				47 Unit	47 Unit	43.520.000,00	43.520.000,00	43.520.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningratan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	4 Unit	12.047.000,00	12.047.000,00	12.047.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningratan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				22 Unit	22 Unit	40.494.000,00	40.494.000,00	40.494.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningratan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase masyarakat miskin mendapat layanan jaminan kesehatan semesta				100 16 20 35 57,04 6,3 63 73 78 86 n/a % Angka % Angka % % % % %	100 %	53.156.113.971,00	65.006.324.871,00	65.456.007.362,00	-40.285.866.971,00							12.870.247.000,00	
	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah kalurahan/kelurahan yang dilaksanakan pendampingan verifikasi STBM Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dalam Pemenuhan SPM Bidang Kesehatan Persentase bayi 18 - 24 bulan mendapatkan imunisasi booster Campak dan Rubella Persentase bayi usia 0-11 bulan mendapat IDL (Imunisasi Dasar Lengkap) Persentase disabilitas yang memanfaatkan secara optimal hasil layanan jaminan kesehatan khusus Persentase fasyankes mendapatkan pembinaan pelayanan kesehatan Persentase KB Persentase Kab/kota yang melakukan deteksi dini kesehatan jiwa Persentase Kab/ Kota yang melakukan pelayanan DM mendapatkan sesuai standar minimal 50 persen Persentase Kab/ Kota yang melakukan pelayanan hipertensi sesuai standar minimal 50 persen Persentase Kab/kota yang melakukan pelayanan sesuai standar pada penderita ODGJ Persentase Kab/kota yang melakukan skrining tva tes dan sadanis minimal 10 persen dari total WUS diwilayahnya Persentase Kabupaten/Kota yang melakukan rekonsiliasi data akses layanan jaminan kesehatan Persentase Kabupaten Kota yang tidak terjadi KLB Malaria Persentase KN Lengkap Persentase lansia mendapat layanan kesehatan Persentase mitra yang melayani jaminan kesehatan semesta Persentase Orang dengan HIV (ODHIV) baru ditemukan mendapatkan pengobatan ART Persentase Pelayanan Kesehatan Balita Persentase pembayaran klaim jaminan kesehatan penyangga dan disabilitas sesuai ketentuan Persentase penemuan dan pengobatan kasus TBC Persentase PSC dan jejaringnya mendapatkan pembinaan penyediaan dan pengelolaan SPGDT Persentase remaja putri konsumsi tablet tambah darah Persentase respon time SKDR PD31 kurang dari 24 jam Persentase RS memenuhi standar kredensialing Persentase WUS yang mempunyai status imunisasi T2+ (Tetanus yang ke-2 atau lebih)	100 % 14 Angka 250 Angka 49 % 56 % 60 % 70 % 78 % 80 % 86 % 86,08 % 90 % 93 % 95 % 97,56 %	100 % 14 Angka 250 Angka 49 % 56 % 60 % 70 % 78 % 80 % 86 % 86,08 % 90 % 93 % 95 % 97,56 %	52.674.520.871,00	58.935.727.871,00	59.142.754.742,00	6.468.233.871,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM	Masyarakat D.I. Yogyakarta		3.865.506.000,00	DINAS KESEHATAN			
	1.02.02.1.02.0016	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				6 Dokumen	6 Dokumen	49.985.909.000,00	49.985.909.000,00	49.882.589.000,00	-103.320.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM		0,00	DINAS KESEHATAN	
		<b>BALAI PELATIHAN KESEHATAN</b>							<b>107.607.282.731,00</b>	<b>119.681.741.722,00</b>	<b>128.683.709.678,00</b>	<b>21.076.426.947,00</b>						<b>62.679.077.166,00</b>		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							107.142.832.731,00	119.353.145.122,00	128.534.133.078,00	21.391.300.347,00						62.168.182.166,00		
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							107.142.832.731,00	119.353.145.122,00	128.534.133.078,00	21.391.300.347,00						62.168.182.166,00		
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				-	89,21 Nilai	53.500.562.660,00	53.348.709.151,00	62.140.536.616,00	-4.969.452.494,00						48.531.110.166,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah				-	100 %	34.562.570.960,00	34.428.151.451,00	31.106.156.764,00	-3.456.414.196,00			-	-			29.899.148.623,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	10.450.000,00	10.450.000,00	10.450.000,00	0,00	Kab. Sleman, Kalasan, Tirtomartani	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			24.600.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pengamanan dan penatausahaan barang milik daerah				-	100 %	56.315.000,00	61.715.000,00	61.715.000,00	5.400.000,00			-	-			45.976.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	11.770.000,00	11.770.000,00	11.770.000,00	0,00	Kab. Sleman, Kalasan, Tirtomartani	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			10.320.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang perkantoran Dinkes DIY				-	100 %	5.932.357.600,00	5.932.357.600,00	5.926.410.100,00	-5.947.500,00			-	-			5.834.792.543,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	211.486.500,00	211.486.500,00	209.139.000,00	-2.347.500,00	Kab. Sleman, Kalasan, Tirtomartani	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			437.092.414,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	1.209.840.000,00	1.209.840.000,00	1.209.840.000,00	0,00	Kab. Sleman, Kalasan, Tirtomartani	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.294.586.129,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase upaya peningkatan pelayanan BLUD				-	100 %	11.196.239.800,00	11.196.239.800,00	23.394.148.702,00	12.197.908.902,00			-	Peningkatan kualitas SDM			11.542.300.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	4.046.239.800,00	4.046.239.800,00	7.515.960.347,00	3.469.720.547,00	Kab. Sleman, Kalasan, Tirtomartani	PENARIKAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN BLUD, PENDAPATAN DARI BLUD	-	Peningkatan kualitas SDM			4.392.300.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) Persentase SDM yang meningkat kompetensinya pasca pelatihan Terwujudnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan				-	59,54 88 n/a % % %	420.997.600,00	932.952.600,00	879.110.600,00	257.462.400,00							678.460.000,00	
	1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase kualitas penyelenggaraan pelatihan Persentase SDM yang meningkat kompetensinya				-	88 % 99,57 %	398.384.500,00	910.339.500,00	858.997.500,00	460.613.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM	Sumber Daya Manusia Kesehatan		646.390.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.1.02.0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat				1414 Orang	880 Orang	209.200.000,00	209.200.000,00	179.660.000,00	-29.540.000,00	Kab. Sleman, Kalasan, Tirtomartani	PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM			457.577.000,00	DINAS KESEHATAN
		RUMAH SAKIT JIWA GRHASIA																		
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							86.948.318.052,00	118.425.970.841,00	126.948.336.652,00	40.000.018.600,00							94.075.753.831,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							67.864.509.052,00	73.048.479.391,00	81.570.845.202,00	13.706.336.150,00							74.382.023.831,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				-	89,21 Persen	67.822.929.052,00	67.488.404.391,00	76.010.770.202,00	3.559.094.779,00							71.382.023.831,00	
	1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir/bulanan/triwulanan/semesteran SKPD Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD Penyediaan gaji dan tunjangan ASN				-	26 Laporan 28 Dokumen 780 Orang/ Bulan	47.208.329.052,00	46.873.804.391,00	46.252.327.456,00	-956.001.596,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	RS Jiwa Grhasia		50.278.123.831,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				353 Orang/ Bulan	353 Orang/ Bulan	47.208.329.052,00	46.873.804.391,00	46.252.327.456,00	-956.001.596,00	Kab. Sleman, Pakem, Pakembinangun	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			50.278.123.831,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	BLUD yang meningkat pelayanannya				-	4 Unit	20.614.600.000,00	20.614.600.000,00	29.758.442.746,00	9.143.842.746,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	RS Jiwa Ghasia		21.103.900.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																			
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	20.614.600.000,00	20.614.600.000,00	29.758.442.746,00	9.143.842.746,00	Kab. Sleman, Pakem, Pakembinangun	PENDAPATAN DARI BLUD PENARIKAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN BLUD	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			21.103.900.000,00	DINAS KESEHATAN	
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Presentase remaja putri anemia Presentase Kabupaten/Kota yang mempertahankan eliminasi malaria Presentase wanita usia subr (WUS) yang melakukan deteksi dini iva test dan sadanis untuk pencegahan kanker servik dan kanker payudara Presentase skrining/ deteksi dini kesehatan jiwa pada usia 15 tahun keatas Presentase fasyankes terakreditasi Presentase BBLR (bayi berat lahir rendah) Presentase ODHA minum ARV (ODHA on ARV) Presentase penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan secara standar Presentase penderita hipertensi mendapatkan pengobatan secara teratur Presentase keberhasilan pengobatan TBC				-	20.8 100 16 35 57,04 63 63 73 78 86 % % % % % % % % %	41.580.000,00	5.560.075.000,00	5.560.075.000,00	2.958.420.000,00								3.000.000.000,00	
	1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya Pembangunan fasilitas kesehatan, pengembangan rumah sakit, pengadaan dan pemeliharaan prasarana dan alat kesehatan/alat laboratorium/penunjang medik. Penyediaan obat, vaksin, makanan dan minuman serta fasilitas kesehatan lainnya				-	3 Dokumen 547 Unit 5 Paket	0,00	5.518.495.000,00	5.518.495.000,00	5.518.495.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM	RS Jiwa Ghasia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan																			
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan				-	15 Unit	0,00	5.421.363.000,00	5.421.363.000,00	5.421.363.000,00	Kab. Sleman, Pakem, Pakembinangun	DAK FISIK-BIDANG K ESEHATAN-PEN GUATAN SISTEM KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM				0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.01.0026	Pembangunan Rumah Sakit																			
			Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit				-	1 Unit	0,00	97.132.000,00	97.132.000,00	97.132.000,00	Kab. Sleman, Pakem, Pakembinangun	DAK FISIK-BIDANG K ESEHATAN-PEN GUATAN SISTEM KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM				0,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.02.02.1.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit Jumlah kalurahan/kelurahan yang dilaksanakan pendampingan verifikasi STBM Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dalam Pemenuhan SPM Bidang Kesehatan Persentase bayi 18 - 24 bulan mendapatkan imunisasi booster Campak dan Rubella Persentase bayi usia 0-11 bulan mendapat IDL (Imunisasi Dasar Lengkap) Persentase disabilitas yang memanfaatkan secara optimal hasil layanan jaminan kesehatan khusus Persentase fasyankes mendapatkan pembinaan pelayanan kesehatan Persentase K6 Persentase Kab/kota yang melakukan deteksi dini kesehatan jiwa Persentase Kab/ Kota yang melakukan pelayanan DM mendapatkan sesuai standar minimal 50 persen Persentase Kab/ Kota yang melakukan pelayanan hipertensi sesuai standar minimal 50 persen Persentase Kab/kota yang melakukan pelayanan sesuai standar pada penderita ODGJ Persentase Kab/kota yang melakukan skrining rva tes dan sadanis minimal 10 persen dari total WUS diwilayahnya Persentase Kabupaten/Kota yang melakukan rekonsiliasi data akses layanan jaminan kesehatan Persentase Kabupaten Kota yang tidak terjadi KLB Malaria Persentase KN Lengkap Persentase lansia mendapat layanan kesehatan Persentase mitra yang melayani jaminan kesehatan semesta Persentase Orang dengan HIV (ODHIV) baru ditemukan mendapatkan pengobatan ART Persentase Pelayanan Kesehatan Balita Persentase pembayaran klaim jaminan kesehatan penyangga dan disabilitas sesuai ketentuan Persentase penemuan dan pengobatan kasus TBC Persentase PSC dan jejaringnya mendapatkan pembinaan penyediaan dan pengelolaan SPGDT Persentase remaja putri konsumsi tablet tambah darah Persentase respon time SKDR PD31 kurang dari 24 jam Persentase RS memenuhi standar kredensialing Persentase WUS yang mempunyai status imunisasi T2+ (Tetanus yang ke-2 atau lebih)				-	100 % 14 Angka 1 Dokumen 250 Angka 49 % 56 % 60 % 70 % 78 % 80 % 86 % 86.08 % 90 % 93 % 95 % 97.56 %	41.580.000,00	41.580.000,00	41.580.000,00	0,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM	RS Jiwa Grhasia		3.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.1.02.0022		Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit				1 Dokumen	1 Dokumen	41.580.000,00	41.580.000,00	41.580.000,00	0,00	Kab. Sleman, Pakem, Pakembinangun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM		3.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
1.03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							19.083.809.000,00	45.377.491.450,00	45.377.491.450,00	26.293.682.450,00							19.693.730.000,00	
1.	1.03.13	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	Peningkatan Layanan RS Jiwa Grhasia dalam Mendukung Kesesuaian Tata Ruang				-	0,95 Persen	19.083.809.000,00	45.377.491.450,00	45.377.491.450,00	609.921.000,00							19.693.730.000,00	
	1.03.13.5.02	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis				-	2 Dokumen	16.339.123.000,00	40.215.477.500,00	40.215.477.500,00	23.876.354.500,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM	RS Jiwa Grhasia		18.635.830.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.03.13.5.02.0008	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Merapi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis				2 Dokumen	2 Dokumen	16.339.123.000,00	40.215.477.500,00	40.215.477.500,00	23.876.354.500,00	Kab. Sleman, Pakem, Pakembinangun	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM			18.635.830.000,00	DINAS KESEHATAN
1.03.13.5.04		Sarana dan Prasarana Keistimewaan Urusan Tata Ruang	Jumlah Dokumen Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang				-	1 Dokumen	2.744.686.000,00	5.162.013.950,00	5.162.013.950,00	2.417.327.950,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM	RS Jiwa Ghasia		1.057.900.000,00	DINAS KESEHATAN
1.03.13.5.04.0001		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang																		
			Jumlah Dokumen Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang				1 Dokumen	1 Dokumen	2.744.686.000,00	5.162.013.950,00	5.162.013.950,00	2.417.327.950,00	Kab. Sleman, Pakem, Pakembinangun	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM			1.057.900.000,00	DINAS KESEHATAN
		<b>RUMAH SAKIT PARU RESPIRA</b>																		
									<b>44.367.959.921,00</b>	<b>45.546.304.584,00</b>	<b>53.178.607.162,00</b>	<b>8.810.647.241,00</b>							<b>0,00</b>	
1		<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>							<b>44.367.959.921,00</b>	<b>45.546.304.584,00</b>	<b>53.178.607.162,00</b>	<b>8.810.647.241,00</b>							<b>0,00</b>	
1.02		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>							<b>44.367.959.921,00</b>	<b>45.546.304.584,00</b>	<b>53.178.607.162,00</b>	<b>8.810.647.241,00</b>							<b>0,00</b>	
1.	1.02.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				-	89,21 Nilai	39.508.615.921,00	39.186.960.584,00	48.169.413.162,00	-39.508.615.921,00							<b>0,00</b>	
	1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah				-	100 %	23.556.390.921,00	23.234.735.584,00	23.430.047.345,00	-126.343.576,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	RS Paru Respira DIY		0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.01.1.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				178 Orang/ Bulan	178 Orang/ Bulan	23.536.505.921,00	23.214.850.584,00	23.416.907.345,00	-119.598.576,00	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.01.1.02.0003		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0 Dokumen	4 Dokumen	19.885.000,00	19.885.000,00	13.140.000,00	-6.745.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Presentase pengamanan dan penatausahaan barang milik daerah				-	100 %	22.825.000,00	22.825.000,00	22.500.000,00	-325.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	RS Paru Respira DIY		0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.01.1.03.0006		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				0 Laporan	1 Laporan	22.825.000,00	22.825.000,00	22.500.000,00	-325.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.01.1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Presentase upaya peningkatan pelayanan BLUD				-	100 %	15.929.400.000,00	15.929.400.000,00	24.716.865.817,00	8.787.465.817,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	RS Paru Respira DIY		0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.01.1.10.0001		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	15.929.400.000,00	15.929.400.000,00	24.716.865.817,00	8.787.465.817,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	PENARIKAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN BLUD PENDAPATAN DARI BLUD	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			0,00	DINAS KESEHATAN
2.	1.02.02	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	Persentase keberhasilan pengobatan TBC				-	86 %	<b>4.859.344.000,00</b>	<b>6.359.344.000,00</b>	<b>5.009.194.000,00</b>	<b>-4.859.344.000,00</b>							<b>0,00</b>	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.02.02.1.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase penyediaan fasilitas pelayanan, sarana, prasarana, dan alat kesehatan UKP Rujukan, UKM, dan UKM Rujukan				-	100 %	4.859.344.000,00	6.359.344.000,00	5.009.194.000,00	149.850.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM	RS Paru Respira DIY		0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.1.01.0010		Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	3.680.000,00	3.680.000,00	3.680.000,00	0,00	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.1.01.0026		Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit				0 Unit	1 Unit	4.855.514.000,00	4.855.514.000,00	3.505.514.000,00	-1.350.000.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.1.01.0027		Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				1 Paket	1 Paket	150.000,00	1.500.150.000,00	1.500.000.000,00	1.499.850.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM			0,00	DINAS KESEHATAN
<b>DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL</b>									<b>347.113.509.623,00</b>	<b>372.572.337.954,00</b>	<b>374.865.492.080,00</b>	<b>27.751.982.457,00</b>							<b>436.163.278.526,00</b>	
<b>1</b>		<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>							<b>317.491.786.623,00</b>	<b>357.652.166.829,00</b>	<b>363.148.146.080,00</b>	<b>45.656.359.457,00</b>							<b>381.268.778.887,00</b>	
<b>1.03</b>		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>							<b>317.361.786.623,00</b>	<b>357.522.166.829,00</b>	<b>359.971.106.080,00</b>	<b>42.609.319.457,00</b>							<b>319.353.778.887,00</b>	
1.	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				90 Nilai	90 Nilai	58.697.197.237,00	59.395.474.457,00	59.033.882.797,00	12.905.656.443,00							71.602.853.680,00	
1.03.01.1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terwujudnya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100 %	100 %	348.948.000,00	348.948.000,00	304.417.100,00	-44.530.900,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Dinas PUPESDM DIY		610.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
1.03.01.1.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	3 Dokumen	34.560.400,00	34.560.400,00	28.595.400,00	-5.965.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			133.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
1.03.01.1.01.0004		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	55.679.100,00	55.679.100,00	37.073.200,00	-18.605.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			92.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
1.03.01.1.01.0007		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	258.708.500,00	258.708.500,00	238.748.500,00	-19.960.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			385.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terwujudnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100 %	100 %	45.138.357.737,00	45.761.596.957,00	46.033.363.697,00	895.005.960,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Dinas PUPESDM DIY		44.843.963.790,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1.03.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				413 Orang/ Bulan	382 Orang/ Bulan	45.005.526.637,00	45.628.765.857,00	45.900.532.597,00	895.005.960,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			44.480.289.595,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1.03.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	22.376.600,00	22.376.600,00	22.376.600,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			196.854.900,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1.03.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				3 Laporan	3 Laporan	21.304.500,00	21.304.500,00	21.304.500,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			56.427.745,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1.03.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				5 Laporan	5 Laporan	78.650.000,00	78.650.000,00	78.650.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			99.891.550,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1.03.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terpenuhiya Administrasi BMD pada Perangkat Daerah				100 %	100 %	110.633.000,00	110.633.000,00	110.633.000,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Dinas PUPESDM DIY		174.476.240,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1.03.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			931.700,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1.03.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	91.437.000,00	91.437.000,00	91.437.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			154.848.540,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya Administrasi Umum Perangkat Daerah				100 %	100 %	904.676.250,00	879.714.250,00	492.512.250,00	-412.164.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Dinas PUPESDM DIY		1.784.275.099,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	44.827.000,00	44.827.000,00	44.827.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			141.720.754,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	68.426.000,00	68.426.000,00	53.426.000,00	-15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			228.514.998,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.03.01.1.06.0003		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	18.700.000,00	18.700.000,00	17.398.000,00	-1.302.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			73.881.680,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
1.03.01.1.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	50.000.000,00	50.000.000,00	47.000.000,00	-3.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			142.196.054,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
1.03.01.1.06.0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			30.140.894,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
1.03.01.1.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				286 Laporan	261 Laporan	509.550.000,00	486.236.000,00	151.792.000,00	-357.758.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			935.092.719,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
1.03.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																		
			Tersedianya BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100 %	100 %	10.140.000,00	10.140.000,00	8.090.000,00	-2.050.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Dinas PUPESDM DIY		279.567.076,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
1.03.01.1.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	10.140.000,00	10.140.000,00	8.090.000,00	-2.050.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			279.567.076,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
1.03.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																		
			Terwujudnya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100 %	100 %	9.553.325.800,00	9.553.325.800,00	9.480.825.300,00	-72.500.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Dinas PUPESDM DIY		19.332.615.577,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
1.03.01.1.08.0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			13.310.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
1.03.01.1.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	973.001.100,00	973.001.100,00	988.301.100,00	15.300.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			7.830.727.936,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
1.03.01.1.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				8 Laporan	8 Laporan	3.470.516.000,00	3.470.516.000,00	3.459.116.000,00	-11.400.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			5.872.225.641,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
1.03.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																		
			Terpeliharanya BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	100 %	2.631.116.450,00	2.731.116.450,00	2.604.041.450,00	-27.075.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Dinas PUPESDM DIY		4.577.955.898,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
1.03.01.1.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				87 Unit	87 Unit	1.228.109.600,00	1.228.109.600,00	1.207.939.600,00	-20.170.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			1.400.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				147 Unit	147 Unit	258.027.000,00	258.027.000,00	252.122.000,00	-5.905.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			458.492.898,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	400.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			1.929.950.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
2.	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur sumber daya air untuk kebutuhan pokok sehari-hari Meningkatnya persentase Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Kewenangan DIY				25395,58 40,19 liter/detik %	25395,58 40,19 liter/detik %	15.245.360.750,00	17.081.360.750,00	16.450.878.350,00	12.757.159.250,00							28.002.520.000,00	
	1.03.02.1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Kumulatif penambahan sarana prasarana air baku yg dibangun dan atau dikelola (satuans /s)				25395,58 liter/detik	25395,58 liter/detik	4.117.726.500,00	4.103.726.500,00	4.088.426.500,00	-29.300.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	Masyarakat DIY		9.580.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1.03.02.1.01.0087	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi																		
			Jumlah Dokumen Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi				1 Dokumen	1 Dokumen	28.541.800,00	28.541.800,00	28.541.800,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)			40.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1.03.02.1.01.0090	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi																		
			Jumlah Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi yang Dibina dan Diberdayakan				2 Lembaga	2 Lembaga	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)			1.900.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1.03.02.1.01.0103	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi																		
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi				2 Dokumen	2 Dokumen	1.124.558.200,00	1.124.558.200,00	1.124.318.200,00	-240.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)			2.100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1.03.02.1.01.0105	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya																		
			Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara				26 Unit	25 Unit	2.714.626.500,00	2.700.626.500,00	2.685.566.500,00	-29.060.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)			5.540.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1.03.02.1.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase luas daerah irigasi dengan indeks kinerja optimum (77,5%) dibandingkan dengan luas total daerah irigasi kewenangan DIY				40,19 %	40,19 %	11.127.634.250,00	12.977.634.250,00	12.362.451.850,00	1.234.817.600,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	Masyarakat DIY		18.422.520.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1.03.02.1.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan																		
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi				-	1 KM	0,00	1.850.000.000,00	1.839.700.000,00	1.839.700.000,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Semua Kel/Desa Kab. Sleman, Depok, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG I RIGASI-TEMATI K PENGUATAN KAWASAN SENTRA PRODUKSI PANGAN (PERTANIAN, PERIKANAN, DAN HEWANI)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1.03.02.1.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan																		
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara				511.77 KM	511.77 KM	9.330.634.250,00	9.330.634.250,00	8.784.195.850,00	-546.438.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)			15.435.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1.03.02.1.02.0022	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Bendung Irigasi yang Beroperasi dan Dipelihara				41 Bendung	41 Bendung	1.524.000.000,00	1.524.000.000,00	1.520.700.000,00	-3.300.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)			1.188.920.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1.03.02.1.02.0032	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa																		
			Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun				3 Dokumen	1 Dokumen	193.000.000,00	193.000.000,00	193.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)			1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1.03.02.1.02.0037	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air di Daerah Irigasi																		
			Jumlah Daerah Irigasi yang terkelola dan terawasi alokasi airnya				41 DI	41 DI	80.000.000,00	80.000.000,00	24.856.000,00	-55.144.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)			798.600.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
3.	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Presentase jumlah warga negara yang terlayani air curah regional				22.90 n/a %	22.90 %	9.073.352.000,00	11.540.352.000,00	11.274.302.000,00	24.441.697.408,00							33.515.049.408,00	
	1.03.03.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Presentase jumlah rumah tangga yang terlayani air curah regional				22.90 %	22.90 %	9.073.352.000,00	11.540.352.000,00	11.274.302.000,00	2.200.950.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM	Masyarakat DIY		33.515.049.408,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1.03.03.1.01.0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)																		
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	300.000.000,00	33.950.000,00	-166.050.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1.03.03.1.01.0019	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)																		
			Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang dioperasikan dan dipelihara				1 Unit	1 Unit	8.852.807.000,00	8.852.807.000,00	8.852.807.000,00	0,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM		27.515.049.408,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	
	1.03.03.1.01.0020	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang dioptimalisasi				1 Unit	1 Unit	20.545.000,00	2.387.545.000,00	2.387.545.000,00	2.367.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM			6.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
4.	1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Presentase terbangunnya sarana prasarana pendukung pengelolaan sampah di TPA Piyungan				-	85.81 %	0,00	0,00	400.000.000,00	450.000.000,00							450.000.000,00	
	1.03.04.1.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional				-	100 %	0,00	0,00	400.000.000,00	400.000.000,00			Memperkuat penyelaras kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Masyarakat DIY		450.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1.03.04.1.01.0017	Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah sarana pendukung TPA/TPST/SPA yang disediakan				-	1 Unit	0,00	0,00	400.000.000,00	400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat penyelaras kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram			450.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
5.	1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Presentase jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik regional				36.71 %	36.71 %	7.288.733.000,00	15.152.963.631,00	13.896.384.000,00	70.574.854.624,00							77.863.587.624,00	
	1.03.05.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Presentase jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik regional				36.71 %	36.71 %	7.288.733.000,00	15.152.963.631,00	13.896.384.000,00	6.607.651.000,00		Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penurunan tingkat kemiskinan	Masyarakat DIY			77.863.587.624,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1.03.05.1.01.0012	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat																		
			Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat yang dioptimalisasi				1 Unit	1 Unit	250.000.000,00	968.000.000,00	267.300.000,00	17.300.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penurunan tingkat kemiskinan			68.292.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
6.	1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pengurangan luasan genangan				6,29 Ha	6,29 Ha	235.600.000,00	235.600.000,00	235.600.000,00	264.400.000,00							500.000.000,00	
	1.03.06.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	Akumulasi Jumlah Luasan genangan yang tertangani				6,29 Ha	6,29 Ha	235.600.000,00	235.600.000,00	235.600.000,00	0,00		Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM	Masyarakat DIY			500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1.03.06.1.01.0010	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan																		
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara				2 Sistem Drainase Perkotaan	2 Sistem Drainase Perkotaan	235.600.000,00	235.600.000,00	235.600.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM			500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
7.	1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase terlayannya rekomendasi analisis perkiraan biaya bangunan dan pendampingan penyelenggaraan bangunan gedung negara				100 %	100 %	8.600.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00	23.875.000.000,00							32.475.000.000,00	
	1.03.08.1.01	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	"Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Provinsi Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemeliharaan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi"				-	2 dokumen	8.600.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00	-8.000.000.000,00		Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	Masyarakat DIY			32.475.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1.03.08.1.01.0018	Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung Negara kepada Pemerintah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung Negara				5 Kabupaten/Kota	5 Kabupaten/Kota	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)			475.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1.03.08.1.01.0019	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi				2 Dokumen	2 Dokumen	8.500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	-8.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)			32.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
8.	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase kemapatan jalan				62.20 %	62.20 %	81.256.551.191,00	108.962.568.191,00	136.099.065.391,00	-12.692.064.016,00							68.564.487.175,00	
	1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Penambahan, peningkatan dan mempertahankan kondisi jalan				62.20 %	62.20 %	81.256.551.191,00	108.962.568.191,00	136.099.065.391,00	54.842.514.200,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	Masyarakat DIY		68.564.487.175,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1.03.10.1.01.0026	Pemeliharaan Rutin Jembatan																		
			Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin				264 Jembatan	264 Jembatan	4.461.813.905,00	4.461.813.905,00	4.461.633.905,00	-180.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)			2.857.794.825,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1.03.10.1.01.0030	Rehabilitasi Jalan																		
			Panjang Jalan yang Direhabilitasi				3 KM	5.675 KM	14.009.702.286,00	23.809.702.286,00	45.764.096.486,00	31.754.394.200,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) PAJAK ROKOK	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1.03.10.1.01.0031	Rekonstruksi Jalan																		
			Panjang Jalan yang Direkonstruksi				-	2.7 KM	0,00	17.906.017.000,00	23.000.000.000,00	23.000.000.000,00	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK FISIK-BIDANG JALAN-TEMATIK PENGUATAN KAWASAN SENTRA PRODUKSI PANGAN (PERTANIAN, PERIKANAN, DAN HEWANI)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1.03.10.1.01.0033	Pemeliharaan Rutin Jalan																		
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin				674.585 KM	674.585 KM	26.985.035.000,00	26.985.035.000,00	26.984.795.000,00	-240.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)			32.651.892.350,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1.03.10.1.01.0040	Pelebaran Jalan Menuju Standar																		
			Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar				4,5 KM	4,5 KM	34.880.000.000,00	34.880.000.000,00	34.880.000.000,00	0,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)			31.762.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1.03.10.1.01.0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan																		
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun				50 Dokumen	51 Dokumen	20.000.000,00	20.000.000,00	108.640.000,00	88.640.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1.03.10.1.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan																		
			Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya				674.585 KM	674.585 KM	900.000.000,00	900.000.000,00	899.900.000,00	-100.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)			1.292.300.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
9.	1.03.13	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	Penanganan rumah terdampak bencana dan/atau relokasi Meningkatnya ketersediaan air baku Persentase Aksesibilitas Pengembangan Kawasan SRS				-	100 27.01 56 % Liter/Detik %	136.390.000.000,00	143.979.819.800,00	121.446.742.842,00	-136.390.000.000,00							0,00	
	1.03.13.5.02	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Terwujudnya Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten				-	11 dokumen	136.390.000.000,00	143.979.819.800,00	121.446.742.842,00	-14.943.257.158,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	Masyarakat DIY		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1.03.13.5.02.0001	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis																		
			Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu				2 Dokumen	2 Dokumen	1.690.000.000,00	1.250.000.000,00	1.250.000.000,00	-440.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1.03.13.5.02.0003	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
			Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu				5 Dokumen	2 Dokumen	29.700.000.000,00	8.946.769.800,00	8.945.769.800,00	-20.754.230.200,00	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL		
1.03.13.5.02.0004		Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh																				
			Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh				1 Dokumen	2 Dokumen	1.200.000.000,00	49.291.405.000,00	36.762.328.042,00	35.562.328.042,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL		
1.03.13.5.02.0005		Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri																				
			Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri				1 Dokumen	1 Dokumen	1.200.000.000,00	0,00	0,00	-1.200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL		
1.03.13.5.02.0006		Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Candi Prambanan-Candi Ijo																				
			Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Candi Prambanan-Candi Ijo				1 Dokumen	1 Dokumen	101.100.000.000,00	84.491.645.000,00	74.488.645.000,00	-26.611.355.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL		
1.03.13.5.02.0018		Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Gunungkidul																				
			Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Gunungkidul				1 Dokumen	1 Dokumen	1.500.000.000,00	0,00	0,00	-1.500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL		
<b>1.04</b>		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>							<b>130.000.000,00</b>	<b>130.000.000,00</b>	<b>3.177.040.000,00</b>	<b>3.047.040.000,00</b>							<b>61.915.000.000,00</b>			
1.	1.04.02	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</b>	<b>"Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana"</b>				<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>130.000.000,00</b>	<b>130.000.000,00</b>	<b>129.940.000,00</b>	<b>620.000.000,00</b>							<b>750.000.000,00</b>			
	1.04.02.1.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Persentase rumah korban bencana yang memperoleh rumah layak huni				100 %	100 %	130.000.000,00	130.000.000,00	129.940.000,00	-60.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Masyarakat DIY		750.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL		
	1.04.02.1.01.0010	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi																				
			Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi yang Terverifikasi				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram			150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL		
	1.04.02.1.01.0011	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Provinsi																				
			Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Provinsi				1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	30.000.000,00	29.940.000,00	-60.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram			600.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL		
2.	1.04.05	<b>PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)</b>	<b>Penanganan PSU layak di permukiman</b>				<b>178 n/a lokasi lokasi</b>	<b>178 lokasi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.047.100.000,00</b>	<b>61.165.000.000,00</b>							<b>61.165.000.000,00</b>			
	1.04.05.1.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Penyediaan PSU layak di permukiman				178 lokasi n/a laporan	178 lokasi	0,00	0,00	3.047.100.000,00	3.047.100.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromartim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	Masyarakat DIY		61.165.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL		
	1.04.05.1.01.0001	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman																				
			Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman				-	1 Dokumen	0,00	0,00	647.100.000,00	647.100.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromartim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)			665.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL		
	1.04.05.1.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman																				

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Permukiman				-	12 Lokasi	0,00	0,00	2.400.000.000,00	2.400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)			60.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							29.350.000.000,00	13.915.000.000,00	10.744.600.000,00	-18.605.400.000,00							47.614.163.300,00		
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							29.350.000.000,00	13.915.000.000,00	10.744.600.000,00	-18.605.400.000,00							47.614.163.300,00		
1.	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Penanganan RTLH dengan gaya arsitektur tradisional Jawa dan sarana prasarana pendukung PKP				300 unit	300 unit	29.350.000.000,00	13.915.000.000,00	10.744.600.000,00	18.264.163.300,00							47.614.163.300,00		
	2.22.08.5.06	Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Terlaksananya Penanganan RTLH dengan gaya arsitektur tradisional Jawa				300 unit	300 unit	16.800.000.000,00	4.915.000.000,00	4.748.200.000,00	-12.051.800.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	Masyarakat DIY		34.727.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	
	2.22.08.5.06.0001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya				403 Unit	282 Unit	16.800.000.000,00	4.915.000.000,00	4.748.200.000,00	-12.051.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)			34.727.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	
	2.22.08.5.08	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	Persentase panjang saluran irigasi tersier dalam kondisi baik dibandingkan dengan panjang total saluran irigasi tersier kewenangan DIY				88.69 %	88.69 %	12.550.000.000,00	9.000.000.000,00	5.996.400.000,00	-6.553.600.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	Masyarakat DIY		12.887.163.300,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	
	2.22.08.5.08.0001	Pengembangan Lumbung Mataraman																			
			Jumlah Laporan Hasil Pengembangan Lumbung Mataraman				3 Laporan	1 Laporan	12.550.000.000,00	9.000.000.000,00	5.996.400.000,00	-6.553.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)			12.887.163.300,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	
3		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							271.723.000,00	1.005.171.125,00	972.746.000,00	701.023.000,00							7.280.336.339,00		
	3.29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL							271.723.000,00	1.005.171.125,00	972.746.000,00	701.023.000,00							7.280.336.339,00		
1.	3.29.02	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	Pengendalian Pengusahaan Air Tanah				-	Kurang Dari atau Sama dengan 10% %	70.000.000,00	70.000.000,00	69.940.000,00	1.314.808.442,00							1.384.808.442,00		
	3.29.02.1.01	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Jumlah laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi Jumlah Zona Konservasi Air Tanah yang ditetapkan Dalam Provinsi				-	3 dokumen 4 laporan	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Masyarakat dan Pelaku Pemakaian Air Tanah		60.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	
	3.29.02.1.01.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah																			
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi				3 Laporan	3 Laporan	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram			60.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	
	3.29.02.1.03	Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi Jumlah Laporan Hasil Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi				1 Laporan	1 Laporan	30.000.000,00	30.000.000,00	29.940.000,00	-60.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Pelaku usaha pengguna air tanah di DIY		1.324.808.442,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	
	3.29.02.1.03.0002	Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah																			
			Jumlah Laporan Hasil Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram			225.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	
	3.29.02.1.03.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah																			
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi				1 Laporan	1 Laporan	25.000.000,00	25.000.000,00	24.940.000,00	-60.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram			1.099.808.442,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	3.29.03	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	Peningkatan luas Wilayah Pertambangan yang Diusahakan				3988 Ha	3988 Ha	70.000.000,00	803.448.125,00	771.683.000,00	2.589.891.802,00							2.659.891.802,00	
	3.29.03.1.01	Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Terlaksananya Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil				1 laporan	1 laporan	10.000.000,00	35.000.000,00	34.520.000,00	24.520.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Masyarakat DIY		1.002.562.440,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.01.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil				1 Laporan	2 Laporan	10.000.000,00	35.000.000,00	34.520.000,00	24.520.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) OPSEN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN (MLB)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram			1.002.562.440,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.03	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut				2 Dokumen	5 Dokumen	25.000.000,00	158.115.125,00	139.326.400,00	114.326.400,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Masyarakat, Pelaku Usaha Pertambangan dan Aparat Pemerintah DIY		1.147.504.362,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.03.0003	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut																		
			Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut				1 Dokumen	3 Dokumen	10.000.000,00	59.115.125,00	40.566.400,00	30.566.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) OPSEN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN (MLB)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram			400.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.03.0004	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut				1 Laporan	2 Laporan	15.000.000,00	99.000.000,00	98.760.000,00	83.760.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN (MLB) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram			747.504.362,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.04	Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	Terlaksananya Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat				-	5 dokumen	30.000.000,00	605.333.000,00	593.016.600,00	563.016.600,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Masyarakat, Pelaku Usaha Pertambangan dan Aparat Pemerintah DIY		410.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.04.0003	Penyusunan dan Perumusan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat																		
			Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat				1 Dokumen	5 Dokumen	30.000.000,00	605.333.000,00	593.016.600,00	563.016.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN (MLB) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram			410.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.07	Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Terlaksananya Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan				1 laporan	1 laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	4.820.000,00	-180.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Masyarakat DIY		99.825.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.07.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	4.820.000,00	-180.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram			99.825.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
3.	3.29.05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	Capaian Pengembangan Potensi Energi Baru Terbarukan				56030 TOE	56030 TOE	86.723.000,00	86.723.000,00	86.423.000,00	2.266.727.000,00							2.353.450.000,00	
	3.29.05.1.07	Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi	Penambahan Capaian Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan Terlaksananya Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi				1 laporan 1 unit	1 laporan 1 unit	86.723.000,00	86.723.000,00	86.423.000,00	-300.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Masyarakat DIY		2.353.450.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.05.1.07.0002	Pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah				1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	9.700.000,00	-300.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram			199.650.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.05.1.07.0007	Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT																		
			Jumlah hasil kegiatan pemanfaatan aneka EBT				1 unit	1 unit	76.723.000,00	76.723.000,00	76.723.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram			2.153.800.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
4.	3.29.06	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Peningkatan jumlah izin sesuai keselamatan ketenagalistrikan Peningkatan jumlah rumah tangga miskin yang menikmati listrik sesuai keselamatan ketenagalistrikan				120 15223 Izin Rumah Tangga	120 15223 Izin Rumah Tangga	45.000.000,00	45.000.000,00	44.700.000,00	837.186.095,00							882.186.095,00	
	3.29.06.1.02	Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Dokumen rekomendasi teknis izin ketenagalistrikan yang diterbitkan Terlaksananya Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi				120 izin 2 dokumen	120 izin 2 dokumen	45.000.000,00	45.000.000,00	44.700.000,00	-300.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penurunan tingkat kemiskinan	Masyarakat DIY		882.186.095,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.06.1.02.0001	Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi																		
			Jumlah Prosedur dan Persyaratan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi yang Ditetapkan				1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penurunan tingkat kemiskinan			68.250.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.06.1.02.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi				1 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00	15.000.000,00	14.700.000,00	-300.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penurunan tingkat kemiskinan			813.936.095,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
		<b>BALAI PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAN PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI</b>								347.113.509.623,00	372.572.337.954,00	374.865.492.080,00	27.751.982.457,00						436.163.278.526,00	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							317.491.786.623,00	357.652.166.829,00	363.148.146.080,00	45.656.359.457,00							381.268.778.887,00	
1.03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							317.361.786.623,00	357.522.166.829,00	359.971.106.080,00	42.609.319.457,00							319.353.778.887,00	
1.	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				-	90 Nilai	58.697.197.237,00	59.395.474.457,00	59.033.882.797,00	12.905.656.443,00							71.602.853.680,00	
	1.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terwujudnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100 %	100 %	45.138.357.737,00	45.761.596.957,00	46.033.363.697,00	895.005.960,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Balai Pengelolaan Air Limbah dan Pengembangan Jasa Konstruksi		44.843.963.790,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1.03.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	10.500.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	Kab. Bantul, Sewon, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			10.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1.03.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terpenuhiya Administrasi BMD pada Perangkat Daerah				100 %	100 %	110.633.000,00	110.633.000,00	110.633.000,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Balai Pengelolaan Air Limbah dan Pengembangan Jasa Konstruksi		174.476.240,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1.03.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	18.696.000,00	18.696.000,00	18.696.000,00	0,00	Kab. Bantul, Sewon, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			18.696.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya Administrasi Umum Perangkat Daerah				100 %	100 %	904.676.250,00	879.714.250,00	492.512.250,00	-412.164.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Balai Pengelolaan Air Limbah dan Pengembangan Jasa Konstruksi		1.784.275.099,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	38.168.400,00	38.168.400,00	38.168.400,00	0,00	Kab. Bantul, Sewon, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			41.985.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
1.03.01.1.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					3 Paket	3 Paket	44.996.900,00	44.996.900,00	44.996.900,00	0,00	Kab. Bantul, Sewon, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			49.496.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
1.03.01.1.06.0003		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					2 Paket	2 Paket	14.690.000,00	14.690.000,00	14.690.000,00	0,00	Kab. Bantul, Sewon, Pendowoharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			16.159.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
1.03.01.1.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					2 Paket	2 Paket	34.999.950,00	34.999.950,00	34.999.950,00	0,00	Kab. Bantul, Sewon, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			38.499.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
1.03.01.1.06.0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan					24 Dokumen	24 Dokumen	3.528.000,00	3.528.000,00	3.528.000,00	0,00	Kab. Bantul, Sewon, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			3.880.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
1.03.01.1.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					115 Laporan	88 Laporan	75.190.000,00	73.542.000,00	40.086.000,00	-35.104.000,00	Kab. Bantul, Sewon, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			82.709.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
1.03.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100 %	100 %	9.553.325.800,00	9.553.325.800,00	9.480.825.300,00	-72.500.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Balai Pengelolaan Air Limbah dan Pengembangan Jasa Konstruksi		19.332.615.577,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
1.03.01.1.08.0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat					1 Laporan	1 Laporan	4.998.000,00	4.998.000,00	4.998.000,00	0,00	Kab. Bantul, Sewon, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			5.497.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
1.03.01.1.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					1 Laporan	1 Laporan	3.050.974.200,00	3.050.974.200,00	3.050.974.200,00	0,00	Kab. Bantul, Sewon, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			3.371.875.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
1.03.01.1.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					1 Laporan	1 Laporan	2.049.836.500,00	2.049.836.500,00	1.973.436.000,00	-76.400.500,00	Kab. Bantul, Sewon, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			2.238.980.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
1.03.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	100 %	2.631.116.450,00	2.731.116.450,00	2.604.041.450,00	-27.075.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Balai Pengelolaan Air Limbah dan Pengembangan Jasa Konstruksi		4.577.955.898,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
1.03.01.1.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				16 Unit	16 Unit	370.455.850,00	370.455.850,00	369.455.850,00	-1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Sewon, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			407.537.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					92 Unit	92 Unit	74.524.000,00	74.524.000,00	74.524.000,00	0,00	Kab. Bantul, Sewon, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			81.976.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					2 Unit	2 Unit	300.000.000,00	300.000.000,00	200.000.000,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	300.000.000,00	300.000.000,00	200.000.000,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
2.	1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Presentase jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik regional				36,71 %	36,71 %	7.288.733.000,00	15.152.963.631,00	13.896.384.000,00	70.574.854.624,00							77.863.587.624,00	
	1.03.05.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Terlayannya Rumah Tangga melalui optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat/ Terpeliharanya Unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang beroperasi				27535 Rumah Tangga 2 unit	27535 Rumah Tangga 2 unit	7.288.733.000,00	15.152.963.631,00	13.896.384.000,00	6.607.651.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penurunan tingkat kemiskinan	Masyarakat DIY		77.863.587.624,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1.03.05.1.01.0018	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)					2 Unit	2 Unit	7.038.733.000,00	14.184.963.631,00	13.629.084.000,00	6.590.351.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PATENKOTA PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penurunan tingkat kemiskinan			9.571.587.624,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
			Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang dioperasikan dan dipelihara				2 Unit	2 Unit	7.038.733.000,00	14.184.963.631,00	13.629.084.000,00	6.590.351.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PATENKOTA PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penurunan tingkat kemiskinan			9.571.587.624,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
3.	1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Laporan hasil uji (LHU) yang diterbitkan Peningkatan kinerja tenaga konstruksi dan masyarakat jasa konstruksi				84,59 88,34 %	84,59 88,34 %	574.992.445,00	574.028.000,00	534.250.700,00	5.805.288.555,00							6.380.281.000,00	
	1.03.11.1.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Terpenuhnya layanan pengujian laboratorium konstruksi				800 LHU	800 LHU	517.929.945,00	516.965.500,00	504.655.200,00	-13.274.745,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan kualitas SDM	Masyarakat Jasa Konstruksi		5.205.281.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1.03.11.1.01.0012	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi					800 Lembaga	800 Lembaga	435.579.945,00	434.615.500,00	434.575.200,00	-1.004.745,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sleman, Depok, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan kualitas SDM			4.805.281.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1.03.11.1.01.0014	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli					50 Orang	50 Orang	82.350.000,00	82.350.000,00	70.080.000,00	-12.270.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan kualitas SDM			400.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1.03.11.1.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	1) Terselenggaranya Dukungan Manajemen Sistem Informasi Jasa Konstruksi; dan 2) Jumlah orang terlayani melalui sistem informasi jasa konstruksi.				1) 1 laporan; dan 2) 36.000 orang 1) laporan; dan 2) orang	1) 1 laporan; dan 2) 36.000 orang 1) laporan; dan 2) orang	57.062.500,00	57.062.500,00	29.595.500,00	-27.467.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	Masyarakat Jasa Konstruksi		1.175.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1.03.11.1.02.0008	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi					1 Dokumen	1 Dokumen	57.062.500,00	57.062.500,00	29.595.500,00	-27.467.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)			1.175.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
		DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG							29.729.884.869,00	28.326.785.874,00	26.400.993.429,00	-3.328.891.440,00							81.390.358.204,00	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							14.804.355.669,00	15.393.342.174,00	14.595.552.029,00	-208.803.640,00							26.702.047.000,00	
1.03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							14.804.355.669,00	15.393.342.174,00	14.595.552.029,00	-208.803.640,00							26.702.047.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				95,89 Nilai	95,89 Nilai	10.965.974.669,00	11.038.281.024,00	11.001.158.729,00	848.366.331,00							11.814.341.000,00	
	1.03.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				9 Dokumen n/a Dokumen	9 Dokumen n/a Dokumen	15.747.600,00	15.747.600,00	13.822.200,00	-1.925.400,00			-	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)			47.557.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					3 Dokumen	3 Dokumen	6.200.000,00	6.200.000,00	5.910.000,00	-290.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)			26.554.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD					4 Dokumen	4 Dokumen	2.977.600,00	2.977.600,00	2.301.450,00	-676.150,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)			1.464.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					2 Laporan	2 Laporan	6.570.000,00	6.570.000,00	5.610.750,00	-959.250,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)			19.539.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya pelaksanaan penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan daerah, Penyediaan gaji dan tunjangan ASN dan Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SPKD				21 Dokumen n/a Laporan	21 Dokumen n/a Laporan	9.805.002.219,00	9.852.580.574,00	9.881.678.879,00	76.676.660,00			-	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)			9.943.867.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					71 Orang/ Bulan	71 Orang/ Bulan	9.777.142.419,00	9.824.720.774,00	9.856.097.479,00	78.955.060,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)			9.865.772.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					1 Dokumen	1 Dokumen	17.959.800,00	17.959.800,00	16.676.400,00	-1.283.400,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)			60.890.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					1 Laporan	1 Laporan	3.042.000,00	3.042.000,00	2.667.000,00	-375.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)			3.678.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semester SKPD					18 Laporan	18 Laporan	6.858.000,00	6.858.000,00	6.238.000,00	-620.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)			13.527.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya penatausahaan barang milik daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	20.646.000,00	20.646.000,00	20.640.000,00	-6.000,00			-	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)			27.152.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					2 Laporan	2 Laporan	20.646.000,00	20.646.000,00	20.640.000,00	-6.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)			27.152.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi penatausahaan kepegawaian daerah				1 Laporan	1 Laporan	3.791.850,00	3.791.850,00	3.595.000,00	-196.850,00			-	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)			7.345.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai					1 Dokumen	1 Dokumen	3.791.850,00	3.791.850,00	3.595.000,00	-196.850,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)			7.345.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya penyediaan peralatan perlengkapan perkantoran, penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD Terlaksananya penyediaan peralatan perlengkapan perkantoran, penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD				20 Laporan n/a Laporan	20 Laporan n/a Laporan	107.689.600,00	132.417.600,00	87.011.250,00	-20.678.350,00			-	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)			247.932.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					1 Paket	1 Paket	9.987.800,00	9.987.800,00	9.979.000,00	-8.800,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)			20.995.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	9.765.350,00	9.765.350,00	9.765.350,00	0,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)			57.051.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.081.000,00	3.081.000,00	3.078.000,00	-3.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)			12.024.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	11.816.450,00	11.816.450,00	11.686.900,00	-129.550,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)			45.747.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				3 Dokumen	3 Dokumen	1.819.000,00	1.819.000,00	1.764.000,00	-55.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)			12.520.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	71.220.000,00	95.948.000,00	50.738.000,00	-20.482.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)			99.595.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat, penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor, dan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				3 Laporan	3 Laporan	718.151.000,00	718.151.000,00	699.971.000,00	-18.180.000,00			-	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)			816.921.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	2.900.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)			16.238.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	233.241.000,00	233.241.000,00	215.061.000,00	-18.180.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)			286.600.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	482.010.000,00	482.010.000,00	482.010.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)			514.083.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan, pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya, dan pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya				3 Laporan	3 Laporan	294.946.400,00	294.946.400,00	294.440.400,00	-506.000,00			-	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)			723.567.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Periznannya				14 Unit	14 Unit	205.284.600,00	205.284.600,00	204.778.600,00	-506.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)			352.811.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	72.960.800,00	72.960.800,00	72.960.800,00	0,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)			141.361.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	16.701.000,00	16.701.000,00	16.701.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)			229.395.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
2.	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase kinerja penyelenggaraan penataan ruang aspek pengaturan dan pembinaan				80,36 %	80,36 %	30.671.000,00	30.671.000,00	30.671.000,00	695.329.000,00							726.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.03.12.1.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang daerah provinsi Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang daerah provinsi				4 Dokumen n/a Dokumen	4 Dokumen n/a Dokumen	30.671.000,00	30.671.000,00	30.671.000,00	0,00			-	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)			726.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
	1.03.12.1.03.0007	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang																		
			Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang				3 Dokumen	3 Dokumen	30.671.000,00	30.671.000,00	30.671.000,00	0,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)			726.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
3.	1.03.13	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pada satuan ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten Persentase peningkatan kesesuaian pemanfaatan ruang pada satuan ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten				74,07 84,31 %	74,07 84,31 %	3.807.710.000,00	4.324.390.150,00	3.563.722.300,00	10.353.996.000,00							14.161.706.000,00	
	1.03.13.5.01	Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Terlaksananya BKK Keistimewaan Urusan Tata Ruang di 5 Kabupaten/ Kota Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan tata ruang Kasultanan dan Kadipaten				14 Dokumen 5 Dokumen n/a Dokumen	14 Dokumen 5 Dokumen n/a Dokumen	2.942.710.000,00	3.462.732.350,00	2.865.176.300,00	-77.533.700,00			-	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)			8.117.739.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
	1.03.13.5.01.0003	Penyusunan Rencana Induk Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten																		
			Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten				6 Dokumen	4 Dokumen	545.000.000,00	540.867.500,00	433.303.200,00	-111.696.800,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)			743.597.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
	1.03.13.5.01.0005	Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Tata Ruang																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Tata Ruang				7 Dokumen	16 Dokumen	1.755.320.000,00	1.764.900.850,00	1.481.832.100,00	-273.487.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)			5.135.642.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
	1.03.13.5.01.0006	Penyebarluasan Informasi Rencana Tata Ruang																		
			Jumlah Laporan Penyebarluasan Informasi Rencana Tata Ruang				1 Laporan	7 Laporan	642.390.000,00	1.156.964.000,00	950.041.000,00	307.651.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)			2.238.500.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
	1.03.13.5.03	Pengendalian Pemanfaatan Penataan Ruang Satuan Ruang Strategis	Terlaksananya Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang Terlaksananya Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang				13 Dokumen n/a Dokumen	13 Dokumen n/a Dokumen	865.000.000,00	861.657.800,00	698.546.000,00	-166.454.000,00			-	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)			6.043.967.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
	1.03.13.5.03.0001	Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang				18 Dokumen	18 Dokumen	865.000.000,00	861.657.800,00	698.546.000,00	-166.454.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)			6.043.967.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							14.925.529.200,00	12.933.443.700,00	11.805.441.400,00	-3.120.087.800,00							54.688.311.204,00	
	2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN							14.925.529.200,00	12.933.443.700,00	11.805.441.400,00	-3.120.087.800,00							54.688.311.204,00	
1.	2.10.03	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	Layanan administrasi pertanahan sesuai peraturan perundangan Jumlah dokumen penyelenggaraan administrasi pertanahan sesuai regulasi				100 n/a % Dokumen	100 n/a % Dokumen	10.312.700,00	10.312.700,00	10.312.700,00	89.687.300,00							100.000.000,00	
	2.10.03.1.01	Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi	Terlaksananya pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai dengan regulasi				1 Dokumen	1 Dokumen	10.312.700,00	10.312.700,00	10.312.700,00	0,00			-	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)			100.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
	2.10.03.1.01.0002	Pemberitahuan Rencana Pembangunan dalam rangka Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum																		
			Jumlah Dokumen Pemberitahuan Rencana Pembangunan dalam rangka Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum				1 Dokumen	1 Dokumen	10.312.700,00	10.312.700,00	10.312.700,00	0,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)			100.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
2.	2.10.06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Jumlah objek penanganan reforma agraria yang ditindaklanjuti Jumlah dokumen kinerja reforma agraria				2 n/a Angka Dokumen	2 n/a Angka Dokumen	21.031.500,00	491.031.500,00	307.690.500,00	78.968.500,00							100.000.000,00	
	2.10.06.1.01	Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terselenggarakannya fasilitasi redistribusi tanah lintas daerah yang ditindaklanjuti				1 Dokumen	1 Dokumen	21.031.500,00	491.031.500,00	307.690.500,00	286.659.000,00			-	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)			100.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
	2.10.06.1.01.0002	Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	21.031.500,00	491.031.500,00	307.690.500,00	286.659.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)			100.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
3.	2.10.11	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN	Persentase kinerja fasilitasi pengelolaan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipatan, dan Tanah Desa				54,26 %	54,26 %	14.894.185.000,00	12.432.099.500,00	11.487.438.200,00	39.594.126.204,00							54.488.311.204,00	
	2.10.11.5.01	Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipatan	Terlaksananya BKK Kalurahan Keistimewaan Urusan Pertanahan di 4 Kabupaten Terlaksananya BKK Keistimewaan Urusan Pertanahan di 5 Kabupaten/Kota Terlaksananya pengelolaan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipatan yang meliputi Aspek Penatausahaan, Aspek Pemeliharaan Dokumen, Aspek Pengawasan				20 Dokumen Kabupaten 4 Kabupaten n/kota n/a Dokumen	20 Dokumen Kabupaten 4 Kabupaten n/kota n/a Dokumen	13.068.894.000,00	10.236.543.200,00	9.597.444.300,00	-3.471.449.700,00			-	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)			46.062.469.204,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
	2.10.11.5.01.0001	Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten Dalam Rangka Pengembangan Kebudayaan, Kepentingan Sosial, Dan Kesejahteraan Masyarakat				11 Dokumen	10 Dokumen	1.249.180.000,00	1.092.044.900,00	926.216.900,00	-322.963.100,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)			1.863.400.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
	2.10.11.5.01.0002	Pemeliharaan Dokumen Pertanahan																		
			Jumlah Dokumen Pemeliharaan Dokumen Pertanahan				1 Dokumen	1 Dokumen	1.001.567.000,00	797.500.000,00	737.110.000,00	-264.457.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)			1.089.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
	2.10.11.5.01.0004	Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa																		
			Jumlah Dokumen Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa				2 Dokumen	3 Dokumen	302.240.000,00	618.776.000,00	538.741.000,00	236.501.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)			13.411.740.904,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
	2.10.11.5.01.0005	Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Pertanahan																		
			Jumlah Dokumen Rencana Program/Kegiatan Urusan Pertanahan				4 Dokumen	4 Dokumen	179.577.000,00	235.904.100,00	144.527.100,00	-35.049.900,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)			23.391.808.300,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
	2.10.11.5.01.0006	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Urusan Pertanahan																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Urusan Pertanahan				3 Laporan	4 Laporan	271.110.000,00	252.341.650,00	135.497.500,00	-135.612.500,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)			181.500.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
	2.10.11.5.01.0007	Pengembangan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Pertanahan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Kegiatan Pengembangan dan pemanfaatan Sistem Informasi Pertanahan				2 Dokumen	4 Dokumen	10.065.220.000,00	7.239.976.550,00	7.115.351.800,00	-2.949.868.200,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)			6.125.020.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
2.10.11.5.02		Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Terlaksananya BKK Kalurahan Keistimewaan Urusan Pertanahan di 4 Kabupaten Terlaksananya Pemanfaatan Tanah SG dan Tanah PAC yang sesuai dengan regulasi Terlaksananya Pemanfaatan Tanah SG dan Tanah PAG yang sesuai dengan regulasi				4 Kabupaten 9 Angka n/a Angka	4 Kabupaten 9 Angka n/a Angka	1.825.291.000,00	2.165.106.300,00	1.859.543.900,00	34.252.900,00			-	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)			2.598.492.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
2.10.11.5.02.0001		Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Ijin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten																		
			Jumlah Dokumen Pertimbangan Teknis Ijin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten				4 Dokumen	5 Dokumen	1.461.583.000,00	1.700.149.300,00	1.442.457.800,00	-19.125.200,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)			1.618.392.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
2.10.11.5.02.0002		Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa																		
			Jumlah Berita Acara Penyelesaian Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa				3 Berita Acara	3 Berita Acara	363.708.000,00	464.957.000,00	417.086.100,00	53.378.100,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)			980.100.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
2.10.11.5.03		Sarana dan Prasarana Keistimewaan	Jumlah Unit Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan				-	3 Unit	0,00	30.450.000,00	30.450.000,00	30.450.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	ASN Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY		5.827.350.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
2.10.11.5.03.0001		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan (Pertanahan)				-	3 Unit	0,00	30.450.000,00	30.450.000,00	30.450.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			5.827.350.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA									43.601.496.671,00	30.665.888.036,00	27.662.668.075,00	-15.938.828.596,00							45.658.939.092,00	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							17.412.285.811,00	17.987.245.036,00	17.080.398.075,00	-331.887.736,00							25.528.939.092,00	
1.05		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							17.412.285.811,00	17.987.245.036,00	17.080.398.075,00	-331.887.736,00							25.528.939.092,00	
1.	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				87,27 Nilai	87,27 Nilai	16.741.820.061,00	16.728.243.186,00	16.247.074.995,00	-202.285.969,00							16.539.534.092,00	
	1.05.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100 %	100 %	11.200.000,00	11.200.000,00	11.200.000,00	0,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Satpol PP DIY dan Pemda DIY		199.650.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			72.600.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.1.01.0004		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			96.800.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.1.01.0007		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	3 Laporan	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			30.250.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100 %	100 %	13.143.541.361,00	13.141.282.486,00	12.721.118.295,00	-422.423.066,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Satpol PP DIY dan Pemda DIY		14.164.514.092,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.1.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				73 Orang/ Bulan	73 Orang/ Bulan	13.114.701.361,00	13.112.442.486,00	12.692.278.295,00	-422.423.066,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBUJUKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			14.082.055.092,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.1.02.0003		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	13.340.000,00	13.340.000,00	13.340.000,00	0,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			45.360.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.1.02.0005		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	11.500.000,00	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			16.335.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.1.02.0007		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD				14 Laporan	14 Laporan	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			20.764.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				100 %	100 %	13.535.000,00	13.535.000,00	13.535.000,00	0,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Satpol PP DIY dan Pemda DIY		13.200.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.1.03.0006		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	13.535.000,00	13.535.000,00	13.535.000,00	0,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			13.200.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah				100 %	100 %	177.498.200,00	166.180.200,00	97.176.200,00	-80.322.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Satpol PP DIY dan Pemda DIY		359.370.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.1.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			32.670.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.1.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	5.496.200,00	5.496.200,00	5.496.200,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			18.150.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.1.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	160.002.000,00	148.684.000,00	79.680.000,00	-80.322.000,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			308.550.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100 %	100 %	4.520.000,00	4.520.000,00	4.520.000,00	0,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Satpol PP DIY dan Pemda DIY		125.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.1.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	4.520.000,00	4.520.000,00	4.520.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			125.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	100 %	2.743.925.000,00	2.743.925.000,00	2.743.925.000,00	0,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Satpol PP DIY dan Pemda DIY		617.100.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.1.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	167.225.000,00	167.225.000,00	167.225.000,00	0,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			187.550.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.1.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	2.576.700.000,00	2.576.700.000,00	2.576.700.000,00	0,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			429.550.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	100 %	647.600.500,00	647.600.500,00	655.600.500,00	8.000.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Satpol PP DIY dan Pemda DIY		1.060.700.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.1.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	65.156.800,00	47.379.800,00	47.379.800,00	-17.777.000,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			60.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.1.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinan				57 Unit	57 Unit	376.525.050,00	376.525.050,00	384.525.050,00	8.000.000,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			726.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.1.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15 Unit	44 Unit	7.212.650,00	24.989.650,00	24.989.650,00	17.777.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			24.200.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.1.09.0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	198.706.000,00	198.706.000,00	198.706.000,00	0,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			250.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
2.	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pelanggaran Perda/Perkada yang tertangani				100 %	100 %	670.465.750,00	1.259.001.850,00	833.323.080,00	8.318.939.250,00							8.989.405.000,00	
1.05.02.1.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				-	100 %	590.796.750,00	590.796.750,00	438.044.750,00	-152.752.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Masyarakat di Wilayah DIY dan Pemda DIY		8.202.905.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.02.1.01.0006		Keja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan				5 Dokumen	5 Dokumen	20.000.000,00	20.000.000,00	16.880.000,00	-3.120.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram			137.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.02.1.01.0015		Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah																		
			Jumlah Laporan Pemberian Pelayanan Dasar Kepada Warga Yang Terdampak Penegakan Perda dan Perkada				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	3.360.000,00	-1.640.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram			11.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.02.1.01.0017		Pencegahan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawasan																		
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawasan				166 laporan	99 laporan	299.253.400,00	299.253.400,00	247.403.400,00	-51.850.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram			6.420.405.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.02.1.01.0018		Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja melalui pelatihan Teknis termasuk dalam pelaksanaan tugas yang benuansa Hak Asasi Manusia																		
			Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti pelatihan teknis Satuan Polisi Pamong Praja				450 Orang	300 Orang	266.543.350,00	266.543.350,00	170.401.350,00	-96.142.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram			1.634.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.02.1.02		Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Terlaksananya Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur				-	100 %	79.669.000,00	668.205.100,00	395.278.330,00	315.609.330,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Masyarakat di Wilayah DIY dan Pemda DIY		786.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.02.1.02.0001		Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur				4 Laporan	12 Laporan	40.509.000,00	252.148.920,00	165.702.150,00	125.193.150,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram			302.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.02.1.02.0003		Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sesuai SOP				36 Laporan	110 Laporan	39.160.000,00	416.056.180,00	229.576.180,00	190.416.180,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram			484.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							26.189.210.860,00	12.678.643.000,00	10.582.270.000,00	-15.606.940.860,00							20.130.000.000,00	
	2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN							957.552.000,00	517.497.000,00	284.997.000,00	-672.555.000,00							130.000.000,00	
1.	2.10.11	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN	Persentase pelanggaran Perdais dan Perda Pemanfaatan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa yang tertangani				100 %	100 %	957.552.000,00	517.497.000,00	284.997.000,00	-827.552.000,00							130.000.000,00	
	2.10.11.5.01	Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Terlaksananya Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten				100 %	100 %	957.552.000,00	517.497.000,00	284.997.000,00	-672.555.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Masyarakat di Wilayah DIY dan Perda DIY		130.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	2.10.11.5.01.0004	Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa																		
			Jumlah Dokumen Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	957.552.000,00	517.497.000,00	284.997.000,00	-672.555.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram			130.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							25.231.658.860,00	12.161.146.000,00	10.297.273.000,00	-14.934.385.860,00							20.000.000.000,00	
1.	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase cakupan petugas Satlinmas Rescue Istimewa Persentase Omah Jaga Warga yang aktif				100 %	80 %	25.231.658.860,00	12.161.146.000,00	10.297.273.000,00	-5.231.658.860,00							20.000.000.000,00	
	2.22.08.5.06	Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan				100 %	100 %	3.626.128.500,00	1.452.844.000,00	0,00	-3.626.128.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Masyarakat di Wilayah DIY dan Perda DIY		4.500.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	2.22.08.5.06.0001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya				10 Unit	0 Unit	3.626.128.500,00	1.452.844.000,00	0,00	-3.626.128.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram			4.500.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	2.22.08.5.09	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Terlaksananya Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya				100 %	100 %	21.605.530.360,00	10.708.302.000,00	10.297.273.000,00	-11.308.257.360,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Masyarakat di Wilayah DIY dan Perda DIY		15.500.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	2.22.08.5.09.0016	Pembinaan Jagawarga																		
			Jumlah Orang Mengikuti Pembinaan Jagawarga yang Dibina				17280 Orang	1900 Orang	11.882.193.800,00	3.110.967.000,00	2.735.958.000,00	-9.146.235.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram			5.500.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	2.22.08.5.09.0021	Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya																		
			Jumlah Dokumen Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya				12 Dokumen	12 Dokumen	9.723.336.560,00	7.597.335.000,00	7.561.315.000,00	-2.162.021.560,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram			10.000.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		<b>BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH</b>								20.174.358.590,00	20.622.803.924,00	19.024.601.936,00	-1.149.756.654,00						30.499.763.012,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							18.914.168.590,00	19.922.803.924,00	18.474.317.536,00	-439.851.054,00							30.499.763.012,00	
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							18.914.168.590,00	19.922.803.924,00	18.474.317.536,00	-439.851.054,00							30.499.763.012,00	
1.	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				87,02 Angka	87,02 Angka	16.616.256.340,00	17.223.543.674,00	15.918.091.126,00	2.532.174.001,00							19.148.430.341,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.05.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah				100 %	100 %	14.300.000,00	20.451.100,00	18.051.100,00	3.751.100,00			Memperkuat penyelaras kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	BPBD DIY		57.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelaras kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram			25.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	7.100.000,00	7.100.000,00	7.100.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelaras kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram			20.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	4 Laporan	1.700.000,00	7.851.100,00	5.451.100,00	3.751.100,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelaras kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram			12.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan BPBD DIY				12 Bulan	12 Bulan	14.343.337.290,00	14.862.434.624,00	13.639.542.076,00	-703.795.214,00			Memperkuat penyelaras kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	BPBD		15.029.527.471,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				110 Orang/ Bulan	110 Orang/ Bulan	14.318.891.290,00	14.837.988.624,00	13.615.096.076,00	-703.795.214,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelaras kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram			14.968.266.893,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	8.578.000,00	8.578.000,00	8.578.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelaras kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram			34.520.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	4.050.000,00	4.050.000,00	4.050.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelaras kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram			13.740.578,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Trwulanan/Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Trwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Trwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	18 Laporan	11.818.000,00	11.818.000,00	11.818.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelaras kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram			13.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi BMD di BPBD DIY				1 Tahun Tahun	1 Tahun	17.400.000,00	17.400.000,00	17.400.000,00	0,00			Memperkuat penyelaras kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	BMD yang dikelola BPBD DIY		27.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.05.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	17.400.000,00	17.400.000,00	17.400.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelaras kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram			27.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum BPBD DIY				1 Tahun Tahun	1 Tahun	184.294.200,00	204.244.200,00	124.084.200,00	-60.210.000,00			Memperkuat penyelaras kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	BPBD DIY		484.339.840,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.490.200,00	2.490.200,00	2.490.200,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelaras kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram			123.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	19.872.000,00	19.872.000,00	19.872.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelaras kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram			116.139.840,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	17.871.000,00	17.871.000,00	17.871.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelaras kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram			0,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelaras kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram			19.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	144.061.000,00	164.011.000,00	83.851.000,00	-60.210.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kell/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelaras kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram			226.200.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di BPBD DIY				1 Tahun Tahun	1 Tahun	1.746.064.600,00	1.800.064.500,00	1.800.064.500,00	53.999.900,00			Memperkuat penyelaras kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	BPBD DIY		2.029.058.080,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	699.496.600,00	753.496.500,00	753.496.500,00	53.999.900,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelaras kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram			931.194.460,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1.046.568.000,00	1.046.568.000,00	1.046.568.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram			1.097.863.620,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan BMD di BPBD DIY				1 Tahun Tahun	1 Tahun	310.860.250,00	318.949.250,00	318.949.250,00	8.089.000,00			Memperkuat penyelarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	BPBD DIY		1.521.504.950,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.1.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	27.497.000,00	27.497.000,00	27.497.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram			30.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.1.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				14 Unit	14 Unit	184.553.450,00	184.553.450,00	184.553.450,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram			450.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.1.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				8 Unit	70 Unit	77.401.800,00	85.490.800,00	85.490.800,00	8.089.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram			545.493.200,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.1.09.0011		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	4 Unit	21.408.000,00	21.408.000,00	21.408.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram			496.011.750,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
2.	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Skor Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana dalam IKD DIY Skor Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana dalam IKD DIY Skor Sistem Informasi, Diklat dan Logistik dalam IKD DIY				0,70 0,75 0,77 Skor Skor	0,70 0,75 0,77 Skor Skor	2.245.669.250,00	2.647.017.250,00	2.518.483.410,00	8.440.163.421,00							10.685.832.671,00	
1.05.03.1.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	Terlaksananya pelayanan informasi rawan bencana Provinsi				100 %	100 %	247.968.890,00	247.968.890,00	220.855.050,00	-27.113.840,00			Memperkuat penyelarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Masyarakat di Dearah Rawan Bencana		2.368.770.828,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.1.01.0003		Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi																		
			Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalikan				2 Dokumen	2 Dokumen	247.968.890,00	247.968.890,00	220.855.050,00	-27.113.840,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram			325.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.1.01.0004		Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Ancaman)																		
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparatur di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang menerima sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana (per jenis ancaman) lintas Kabupaten/Kota				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram			2.043.770.828,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.05.03.1.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Terlaksananya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana				100 %	100 %	1.315.239.950,00	1.588.490.950,00	1.541.490.950,00	226.251.000,00			Memperkuat penyesuaian kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Petugas Responder dan Masyarakat di Daerah Rawan Bencana		4.659.055.546,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.1.02.0013		Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana																	14.999.900,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
			Jumlah laporan yang memuat kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana				00 Kawasan	00 Kawasan	0,00	0,00	0,00	0,00		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyesuaian kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram			
1.05.03.1.02.0027		Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana					31 Orang	31 Orang	154.403.750,00	497.654.750,00	458.654.750,00	304.251.000,00		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyesuaian kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram		1.448.405.646,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
			Jumlah personil TRC tingkat Provinsi yang memiliki sertifikasi kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana																	
1.05.03.1.02.0028		Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana					25 Keluarga	25 Keluarga	800.135.000,00	800.135.000,00	796.935.000,00	-3.200.000,00		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyesuaian kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram		2.795.650.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
			Jumlah keluarga yang berada di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang memperoleh peralatan perlindungan diri dan kesiapsiagaan terhadap bencana																	
1.05.03.1.02.0029		Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana					1 Dokumen	1 Dokumen	360.701.200,00	290.701.200,00	285.901.200,00	-74.800.000,00		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyesuaian kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram		400.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
			Dokumen Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) dengan proses bisnis dan prosedur tetap yang dilegalkan dan mendapatkan dukungan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana																	
1.05.03.1.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Terlaksananya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				100 %	100 %	578.137.450,00	706.234.450,00	655.814.450,00	77.677.000,00			Memperkuat penyesuaian kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Masyarakat di Daerah Rawan Bencana		2.661.506.297,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.1.03.0028		Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana					400 Orang	746 Orang	511.837.000,00	513.794.000,00	503.374.000,00	-8.463.000,00		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyesuaian kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram		2.390.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana																	
1.05.03.1.03.0030		Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana					12 Laporan	12 Laporan	66.300.450,00	192.440.450,00	152.440.450,00	86.140.000,00		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyesuaian kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram		271.506.297,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana																	
1.05.03.1.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Terlaksananya Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana				100 %	100 %	104.322.960,00	104.322.960,00	100.322.960,00	-4.000.000,00			Memperkuat penyesuaian kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Masyarakat di kawasan rawan bencana		996.500.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.1.04.0007		Penanganan Pasca Bencana Provinsi					2 Dokumen	2 Dokumen	104.322.960,00	104.322.960,00	100.322.960,00	-4.000.000,00		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyesuaian kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram		996.500.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
			Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun																	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
3.	1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase capaian SPM Bidang Pemadam Kebakaran Kabupaten/Kota				97,6 %	97,6 %	52.243.000,00	52.243.000,00	37.743.000,00	613.257.000,00							665.500.000,00	
	1.05.04.1.02	Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran				100 %	100 %	52.243.000,00	52.243.000,00	37.743.000,00	-14.500.000,00			Memperkuat penyelaras kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Daerah Istimewa Yogyakarta		665.500.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.04.1.02.0004	Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran				1 Laporan	1 Laporan	52.243.000,00	52.243.000,00	37.743.000,00	-14.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelaras kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram			665.500.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							1.260.190.000,00	700.000.000,00	550.284.400,00	-709.905.600,00							0,00	
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							1.260.190.000,00	700.000.000,00	550.284.400,00	-709.905.600,00							0,00	
1.	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Skor Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana dalam IKD DIY				0,82 Skor	0,82 Skor	1.260.190.000,00	700.000.000,00	550.284.400,00	-1.260.190.000,00							0,00	
	2.22.08.5.06	Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	-				-	-	1.260.190.000,00	0,00	0,00	-1.260.190.000,00			Memperkuat penyelaras kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	pemenuhan peralatan dalam rangka mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana di DIY		0,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	2.22.08.5.06.0001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya				95 Unit	0 Unit	1.260.190.000,00	0,00	0,00	-1.260.190.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat penyelaras kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram			0,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	2.22.08.5.09	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Terlaksananya Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya di BPBD DIY				-	100 %	0,00	700.000.000,00	550.284.400,00	550.284.400,00			Memperkuat penyelaras kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Karaton dan Masyarakat		0,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	2.22.08.5.09.0021	Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya																		
			Jumlah Dokumen Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya				-	2 Dokumen	0,00	700.000.000,00	550.284.400,00	550.284.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat penyelaras kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram			0,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
		DINAS SOSIAL																		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							109.760.872.333,00	112.812.150.442,00	111.434.937.940,00	1.674.065.607,00							147.075.861.253,00	
	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL							109.760.872.333,00	112.812.150.442,00	111.434.937.940,00	1.674.065.607,00							147.075.861.253,00	
1.	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				-	90,28 Angka	59.758.729.283,00	60.762.459.092,00	59.957.798.440,00	10.049.539.037,00							69.808.268.320,00	
	1.06.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terseleenggaranya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Bulan	12 Bulan	67.781.350,00	67.781.350,00	56.361.350,00	-11.420.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Aparatur		204.024.300,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	27.996.400,00	27.996.400,00	25.996.400,00	-2.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			121.968.150,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.1.01.0004		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	22.835.000,00	22.835.000,00	17.435.000,00	-5.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			48.781.150,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.1.01.0007		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	2 Laporan	16.949.950,00	16.949.950,00	12.929.950,00	-4.020.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			33.275.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				12 Bulan	12 Bulan	45.570.757.441,00	46.285.910.432,00	44.133.989.048,00	-1.436.768.393,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Aparatur		42.026.975.615,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.1.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				414 Orang/ Bulan	414 Orang/ Bulan	45.458.221.291,00	46.173.374.282,00	44.025.652.898,00	-1.432.568.393,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			41.712.913.445,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.1.02.0003		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	14.551.200,00	14.551.200,00	14.551.200,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			52.681.200,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.1.02.0004		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.224.900,00	3.224.900,00	3.224.900,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			4.000.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.1.02.0005		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	9.372.450,00	9.372.450,00	8.172.450,00	-1.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			12.870.770,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.1.02.0007		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	1 Laporan	34.598.600,00	34.598.600,00	31.598.600,00	-3.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			49.700.200,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.1.02.0008		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	3.309.200,00	3.309.200,00	3.309.200,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			3.500.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Barang pada Perangkat Daerah				12 Bulan	12 Bulan	94.949.200,00	94.949.200,00	94.949.200,00	0,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Aparatur		119.786.200,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.1.03.0006		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				6 Laporan	6 Laporan	26.390.600,00	26.390.600,00	26.390.600,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			35.288.600,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				12 Bulan	12 Bulan	19.974.200,00	19.974.200,00	10.374.200,00	-9.600.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Aparatur		160.000.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.1.05.0005		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	1 Dokumen	19.974.200,00	19.974.200,00	10.374.200,00	-9.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			160.000.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah				12 Bulan	12 Bulan	521.144.642,00	516.806.418,00	441.427.650,00	-79.716.992,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Aparatur		1.421.369.700,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.1.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	28.293.000,00	28.293.000,00	28.293.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			51.243.500,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.1.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	48.253.900,00	48.253.900,00	48.253.900,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			82.129.500,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.1.06.0003		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	6.770.000,00	6.770.000,00	6.770.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			47.788.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.1.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	21.301.668,00	21.301.668,00	21.301.500,00	-168,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			39.264.500,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.1.06.0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				3 Dokumen	3 Dokumen	7.488.000,00	7.488.000,00	7.488.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			10.781.100,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.1.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	162.506.224,00	158.168.000,00	90.008.000,00	-72.498.224,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			323.391.700,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.1.06.0011		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	33.170.000,00	33.170.000,00	33.170.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			59.029.850,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				12 Bulan	12 Bulan	57.170.000,00	184.107.454,00	167.753.454,00	110.583.454,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Aparatur		5.178.964.949,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.1.07.0002		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				3 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			0,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.1.07.0005		Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	3.416.000,00	3.416.000,00	3.416.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			71.240.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.1.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			378.358.845,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.1.07.0009		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	53.754.000,00	53.754.000,00	25.620.000,00	-28.134.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			0,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.1.07.0010		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			550.098.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				12 Bulan	12 Bulan	11.315.847.000,00	11.315.847.000,00	11.306.392.600,00	-9.454.400,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Aparatur		11.925.536.500,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.1.08.0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	490.000,00	490.000,00	490.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			5.457.100,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.1.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	466.800.500,00	466.800.500,00	466.800.500,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			753.479.100,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.1.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	2.746.476.000,00	2.746.476.000,00	2.746.472.000,00	-4.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			2.898.904.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				12 Bulan	12 Bulan	2.111.105.450,00	2.277.083.038,00	3.746.550.938,00	1.635.445.488,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Aparatur		8.771.611.056,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.1.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Periznannya				53 Unit	53 Unit	462.956.450,00	462.956.450,00	442.955.050,00	-20.001.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			768.531.300,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.1.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				116 Unit	116 Unit	217.911.000,00	217.911.000,00	217.909.000,00	-2.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			259.425.200,00	DINAS SOSIAL	
1.06.01.1.09.0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	5 Unit	165.120.400,00	165.120.400,00	493.826.400,00	328.706.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.000.000.000,00	DINAS SOSIAL	
1.06.01.1.09.0010		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				55 Unit	55 Unit	65.918.000,00	65.918.000,00	65.243.000,00	-675.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			135.762.000,00	DINAS SOSIAL	
2.	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) baik perorangan, kelompok, maupun kelembagaan yang memperoleh komunikasi, informasi edukasi dan sosialisasi dalam melakukan pelayanan kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan penerbitan rekomendasi izin undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang/barang				-	22,02 %	1.833.503.550,00	2.119.355.550,00	2.043.855.500,00	7.133.184.478,00							8.966.688.028,00		
1.06.02.1.02		Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	Terperuhnya dukungan penyelenggaraan kesejahteraan sosial kepada PSKS perorangan, kelompok, maupun kelembagaan yang memperoleh komunikasi, informasi edukasi dan sosialisasi dalam melakukan pelayanan kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)				-	1768 Orang	1.833.503.550,00	2.119.355.550,00	2.043.855.500,00	210.351.950,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penurunan tingkat kemiskinan	Masyarakat		8.966.688.028,00	DINAS SOSIAL	
1.06.02.1.02.0001		Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi																			
			Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi				190 Orang	1450 Orang	184.811.650,00	470.663.650,00	428.083.600,00	243.271.950,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penurunan tingkat kemiskinan			1.698.386.600,00	DINAS SOSIAL	
1.06.02.1.02.0002		Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi																			
			Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi yang Meningkatkan Kapasitasnya				78 Orang	78 Orang	1.360.411.350,00	1.360.411.350,00	1.329.111.350,00	-31.300.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penurunan tingkat kemiskinan			2.258.281.000,00	DINAS SOSIAL	
1.06.02.1.02.0004		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi																			
			Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi				4 Lembaga	4 Lembaga	288.280.550,00	288.280.550,00	286.660.550,00	-1.620.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penurunan tingkat kemiskinan			5.010.020.428,00	DINAS SOSIAL	
3.	1.06.03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang memperoleh dukungan psikososial				1,07% %	1,07% %	8.000.000,00	8.000.000,00	5.440.000,00	54.557.000,00							62.557.000,00		
1.06.03.1.01		Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	Terperuhnya warga negara migran korban tindak kekerasan melalui dukungan psikososial				1 Orang	1 Orang	8.000.000,00	8.000.000,00	5.440.000,00	-2.560.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penurunan tingkat kemiskinan	Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan		62.557.000,00	DINAS SOSIAL	
1.06.03.1.01.0001		Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal																			
			Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota				1 Orang	1 Orang	8.000.000,00	8.000.000,00	5.440.000,00	-2.560.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penurunan tingkat kemiskinan			62.557.000,00	DINAS SOSIAL	
4.	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Anak bermasalah sosial, Penyandang Disabilitas, Gelandangan, Pengemis, Lanjut Usia Terantar, Wanita Bermasalah Sosial dan PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan meningkat/ dapat berfungsi sosial				22,58% Orang	22,58% Orang	46.391.172.500,00	46.389.533.500,00	46.375.364.500,00	12.302.368.098,00							58.693.540.598,00		
1.06.04.1.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terantar di dalam Panti	Terperuhnya kebutuhan dasar bagi Penyandang Disabilitas terantar melalui lembaga kesejahteraan sosial dan Pengasramaan SLB				70 Orang	70 Orang	5.080.107.650,00	5.080.107.650,00	5.063.047.650,00	-17.060.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penurunan tingkat kemiskinan	Penyandang Disabilitas Terantar di SLB dan LKS		7.367.154.709,00	DINAS SOSIAL	
1.06.04.1.01.0001		Penyediaan Permakanan																			
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi				70 Orang	70 Orang	523.397.000,00	523.397.000,00	523.397.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penurunan tingkat kemiskinan			741.466.800,00	DINAS SOSIAL	
1.06.04.1.01.0002		Penyediaan Sandang																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi				70 Orang	70 Orang	84.430.000,00	84.430.000,00	84.430.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penurunan tingkat kemiskinan			141.100.641,00	DINAS SOSIAL
1.06.04.1.01.0003		Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses																		
			Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi				50 Orang	50 Orang	19.364.000,00	19.364.000,00	19.364.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penurunan tingkat kemiskinan			94.113.147,00	DINAS SOSIAL
1.06.04.1.01.0005		Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi				70 Orang	70 Orang	29.148.000,00	29.148.000,00	29.148.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penurunan tingkat kemiskinan			134.505.536,00	DINAS SOSIAL
1.06.04.1.01.0006		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial																		
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi				50 Orang	50 Orang	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penurunan tingkat kemiskinan			282.122.088,00	DINAS SOSIAL
1.06.04.1.01.0007		Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari																		
			Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi				50 Orang	50 Orang	24.860.000,00	24.860.000,00	24.860.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penurunan tingkat kemiskinan			49.770.749,00	DINAS SOSIAL
1.06.04.1.01.0009		Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi				50 Orang	50 Orang	6.680.000,00	6.680.000,00	6.680.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penurunan tingkat kemiskinan			39.120.752,00	DINAS SOSIAL
1.06.04.1.01.0012		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerAntar																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerAntar				8 Dokumen	8 Dokumen	119.551.000,00	119.551.000,00	102.891.000,00	-16.660.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penurunan tingkat kemiskinan			59.621.346,00	DINAS SOSIAL
1.06.04.1.02	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerAntar di dalam Panti	Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi anak terantar dan anak bermasalah sosial lainnya melalui lembaga kesejahteraan sosial					28 Orang	28 Orang	1.692.600.900,00	1.692.600.900,00	1.689.200.900,00	-3.400.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penurunan tingkat kemiskinan	Anak Terantar di dalam panti	3.835.175.100,00	DINAS SOSIAL	
1.06.04.1.02.0002		Penyediaan Makanan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanaan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi				28 Orang	28 Orang	147.480.000,00	147.480.000,00	147.480.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penurunan tingkat kemiskinan			279.053.600,00	DINAS SOSIAL
1.06.04.1.02.0003		Penyediaan Sandang																		
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi				28 Orang	28 Orang	38.732.000,00	38.732.000,00	38.732.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penurunan tingkat kemiskinan			133.849.353,00	DINAS SOSIAL
1.06.04.1.02.0004		Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses																		
			Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi				13 Orang	13 Orang	10.056.000,00	10.056.000,00	10.056.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penurunan tingkat kemiskinan			44.974.889,00	DINAS SOSIAL
1.06.04.1.02.0005		Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi				28 Orang	28 Orang	21.977.400,00	21.977.400,00	21.977.400,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penurunan tingkat kemiskinan			129.537.179,00	DINAS SOSIAL
1.06.04.1.02.0006		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial																		
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi				13 Orang	13 Orang	31.200.000,00	31.200.000,00	31.200.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penurunan tingkat kemiskinan			209.423.400,00	DINAS SOSIAL
1.06.04.1.02.0007		Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari																		
			Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi				13 Orang	13 Orang	10.985.500,00	10.985.500,00	10.985.500,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penurunan tingkat kemiskinan			13.453.083,00	DINAS SOSIAL
1.06.04.1.02.0009		Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi				13 Orang	13 Orang	1.173.000,00	1.173.000,00	1.173.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penurunan tingkat kemiskinan			83.534.625,00	DINAS SOSIAL
1.06.04.1.02.0010		Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi				5 Orang	7 Orang	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penurunan tingkat kemiskinan			2.662.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.04.1.02.0011		Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi				6 Orang	3 Orang	600.000,00	600.000,00	580.000,00	-20.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penurunan tingkat kemiskinan			51.808.376,00	DINAS SOSIAL
1.06.04.1.02.0013		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti				10 Dokumen	10 Dokumen	11.848.000,00	11.848.000,00	9.748.000,00	-2.100.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penurunan tingkat kemiskinan			96.671.595,00	DINAS SOSIAL
1.06.04.1.03		Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Terpenuhiya kebutuhan dasar bagi lanjut usia terlantar melalui Panti Sosial dan lembaga kesejahteraan sosial				8000 Orang	8000 Orang	33.947.090.650,00	33.947.090.650,00	34.017.426.650,00	70.336.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penurunan tingkat kemiskinan	Lanjut Usia Terlantar		36.308.502.790,00	DINAS SOSIAL
1.06.04.1.03.0001		Penyediaan Permakanan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi				8000 Orang	8000 Orang	31.000.000.000,00	31.000.000.000,00	30.973.216.000,00	-26.784.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) PAJAK ROKOK	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penurunan tingkat kemiskinan			31.000.000.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.04.1.03.0002		Penyediaan Sandang																		
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi				4 Orang	4 Orang	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penurunan tingkat kemiskinan			39.930.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.04.1.03.0005		Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi				2 Orang	2 Orang	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penurunan tingkat kemiskinan			505.780.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.04.1.03.0006		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial																		
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial Kewenangan Provinsi				10 Orang	10 Orang	571.650,00	571.650,00	571.650,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penurunan tingkat kemiskinan			1.707.792.790,00	DINAS SOSIAL
1.06.04.1.05		Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PKKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	Terpenuhiya kebutuhan dasar bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial atau Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya melalui Panti Sosial dan Lembaga Kesejahteraan Sosial.				110 Orang	110 Orang	5.118.667.600,00	5.117.028.600,00	5.054.553.600,00	-64.114.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penurunan tingkat kemiskinan	Gelandangan Pengemis		9.544.056.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.04.1.05.0001		Penyediaan Permakanan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi				110 Orang	110 Orang	1.253.754.000,00	1.253.754.000,00	1.253.754.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penurunan tingkat kemiskinan			1.830.369.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.04.1.05.0002		Penyediaan Sandang																		
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi				110 Orang	110 Orang	281.000.000,00	281.000.000,00	281.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penurunan tingkat kemiskinan			280.646.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.04.1.05.0003		Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses																		
			Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi				110 Orang	110 Orang	141.034.000,00	141.034.000,00	132.054.000,00	-8.980.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penurunan tingkat kemiskinan			452.353.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.04.1.05.0004		Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi				110 Orang	110 Orang	242.212.000,00	240.573.000,00	237.393.000,00	-4.819.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penurunan tingkat kemiskinan			569.017.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.04.1.05.0005		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi				110 Orang	110 Orang	232.985.000,00	232.985.000,00	232.985.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penurunan tingkat kemiskinan			566.690.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.05.0006	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari																		
			Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi				110 Orang	110 Orang	74.900.000,00	74.900.000,00	74.900.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penurunan tingkat kemiskinan			291.801.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.05.0010	Pemulangan ke Daerah Asal																		
			Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi yang Dipulangkan ke Daerah Asal				110 Orang	110 Orang	107.890.000,00	107.890.000,00	107.850.000,00	-40.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penurunan tingkat kemiskinan			289.246.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.05.0011	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA				2 Dokumen	2 Dokumen	26.808.100,00	26.808.100,00	26.808.100,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penurunan tingkat kemiskinan			92.235.000,00	DINAS SOSIAL
5.	1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase anak balita terlanjar dan Fakir Miskin yang memperoleh perlindungan sosial dan atau jaminan sosial				3,67% %	3,67% %	110.157.000,00	1.873.492.300,00	1.394.512.300,00	2.495.765.700,00							2.605.922.700,00	
	1.06.05.1.01	Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	Terlindungnya anak balita terlanjar dan anak terlanjar dengan memperoleh calon orang tua angkat.				21 Orang	21 Orang	43.765.000,00	41.492.000,00	41.452.000,00	-2.313.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penurunan tingkat kemiskinan	Masyarakat		977.654.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.1.01.0001	Pengangkatan Anak antar WNI																		
			Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Asuh/Orang Tua Angkat Sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi				20 Orang	20 Orang	43.387.000,00	41.114.000,00	41.114.000,00	-2.273.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penurunan tingkat kemiskinan			943.815.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.1.01.0002	Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal																		
			Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Tunggal sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi				1 Orang	1 Orang	378.000,00	378.000,00	338.000,00	-40.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penurunan tingkat kemiskinan			33.839.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.1.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Terlindungnya Fakir Miskin dengan tersedianya data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi yang akurat dan fakir miskin memperoleh bimbingan keterampilan berusaha dan bantuan ekonomis produktif.				100 KPM	50 KPM	66.392.000,00	1.832.000.300,00	1.353.060.300,00	1.286.668.300,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penurunan tingkat kemiskinan	Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang Anggotanya masuk dalam DTKS		1.628.268.700,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.1.02.0001	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga																		
			Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi				0 Keluarga	1832 Keluarga	0,00	1.765.608.300,00	1.293.548.300,00	1.293.548.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penurunan tingkat kemiskinan			1.201.586.700,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.1.02.0002	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Lintas Kabupaten/Kota				50 Keluarga	20 Keluarga	66.392.000,00	66.392.000,00	59.512.000,00	-6.880.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penurunan tingkat kemiskinan			426.682.000,00	DINAS SOSIAL
6.	1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana Alam dan Korban Bencana Sosial yang memperoleh dukungan psikososial dan pemenuhan kebutuhan dasar				61,03% %	61,03% %	1.287.524.000,00	1.287.524.000,00	1.287.356.000,00	4.766.278.607,00							6.053.802.607,00	
	1.06.06.1.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Terlaksananya kesiapsiagaan bencana dan terlindungnya korban bencana alam dan korban bencana sosial melalui dukungan psikososial dan pemenuhan kebutuhan dasar.				10937 Orang	10937 Orang	1.287.524.000,00	1.287.524.000,00	1.287.356.000,00	-168.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penurunan tingkat kemiskinan	Korban Bencana Alam dan Korban Bencana Sosial		6.053.802.607,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.1.01.0001	Penyediaan Permakanan																		
			Jumlah Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi				10250 Orang	10250 Orang	132.212.000,00	132.212.000,00	132.044.000,00	-168.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penurunan tingkat kemiskinan			785.290.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.1.01.0002	Penyediaan Sandang																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Provinsi				50 Orang	50 Orang	523.250.000,00	523.250.000,00	523.250.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penurunan tingkat kemiskinan			159.720.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.1.01.0003	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Provinsi				50 Unit	50 Unit	750.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penurunan tingkat kemiskinan			665.500.000,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.06.1.01.0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan																			
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi				287 Orang	287 Orang	154.712.000,00	154.712.000,00	154.712.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penurunan tingkat kemiskinan			215.622.000,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.06.1.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial																			
			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi				300 Orang	300 Orang	476.600.000,00	476.600.000,00	476.600.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penurunan tingkat kemiskinan			4.227.670.607,00	DINAS SOSIAL	
7.	1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase penguatan nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan, kejujuran, kesetiakawanan sosial dalam masyarakat				34,66%	34,66%	371.786.000,00	371.786.000,00	370.611.200,00	513.296.000,00							885.082.000,00		
	1.06.07.1.01	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Persentase penguatan nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan, kejujuran, kesetiakawanan sosial dalam masyarakat				34,66%	34,66%	371.786.000,00	371.786.000,00	370.611.200,00	-1.174.800,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penurunan tingkat kemiskinan	Masyarakat		885.082.000,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.07.1.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi																			
			Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi				23 Makam	23 Makam	371.786.000,00	371.786.000,00	370.611.200,00	-1.174.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penurunan tingkat kemiskinan			885.082.000,00	DINAS SOSIAL	
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							4.485.001.700,00	3.067.167.900,00	2.450.748.150,00	-2.034.253.550,00							37.893.240.650,00		
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							4.485.001.700,00	3.067.167.900,00	2.450.748.150,00	-2.034.253.550,00							37.893.240.650,00		
1.	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui pelestarian nilai-nilai budaya				-	8,18%	4.485.001.700,00	3.067.167.900,00	2.450.748.150,00	33.408.238.950,00							37.893.240.650,00		
	2.22.08.5.09	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Terlaksananya pelestarian adat, seni, dan tradisi melalui penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam pelayanan pada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan peningkatan kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) serta penanaman nilai-nilai kesetiakawanan sosial dan kepahlawanan				-	8,18%	4.485.001.700,00	3.067.167.900,00	2.450.748.150,00	-2.034.253.550,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penurunan tingkat kemiskinan	Masyarakat		37.893.240.650,00	DINAS SOSIAL	
	2.22.08.5.09.0023	Penumbuhan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, dan Kesetiakawanan Sosial																			
			Jumlah Dokumen terkait Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, dan Kesetiakawanan Sosial				9 Dokumen	6 Dokumen	4.485.001.700,00	3.067.167.900,00	2.450.748.150,00	-2.034.253.550,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penurunan tingkat kemiskinan			37.893.240.650,00	DINAS SOSIAL	
4		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							100.000.000,00	1.132.328.000,00	1.117.934.000,00	1.017.934.000,00							1.792.277.800,00		
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							100.000.000,00	1.132.328.000,00	1.117.934.000,00	1.017.934.000,00							1.792.277.800,00		
1.	4.01.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase capaian implementasi inovasi layanan publik				100%	100%	100.000.000,00	1.132.328.000,00	1.117.934.000,00	1.692.277.800,00							1.792.277.800,00		
	4.01.10.5.02	Peningkatan Budaya Pemerintahan	Tercapainya implementasi budaya pemerintahan				100%	100%	100.000.000,00	1.132.328.000,00	1.117.934.000,00	1.017.934.000,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Taman Makam Pahlawan		1.792.277.800,00	DINAS SOSIAL	
	4.01.10.5.02.0001	Implementasi Budaya Pemerintahan DIY																			
			Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan DIY				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	1.132.328.000,00	1.117.934.000,00	1.017.934.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			1.792.277.800,00	DINAS SOSIAL	
		BALAI REHABILITASI TERPADU PENYANDANG DISABILITAS																			
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							109.760.872.333,00	112.812.150.442,00	111.434.937.940,00	1.674.065.607,00							147.075.861.253,00		
	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL							109.760.872.333,00	112.812.150.442,00	111.434.937.940,00	1.674.065.607,00							147.075.861.253,00		
1.	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				90,28 Angka	90,28 Angka	59.758.729.283,00	60.762.459.092,00	59.957.798.440,00	10.049.539.037,00							69.808.268.320,00		
	1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				12 Bulan	12 Bulan	45.570.757.441,00	46.285.910.432,00	44.133.989.048,00	-1.436.768.393,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Aparatur		42.026.975.615,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	6.860.000,00	6.860.000,00	6.860.000,00	0,00	Kab. Bantul, Pundong, Srihardono	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			26.125.400,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Barang pada Perangkat Daerah				-	12 bulan Bulan	94.949.200,00	94.949.200,00	94.949.200,00	0,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Aparatur		119.786.200,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.1.03.0006		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	4 Laporan	10.183.000,00	10.183.000,00	10.183.000,00	0,00	Kab. Bantul, Pundong, Srihardono	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			15.985.400,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah				12 Bulan	12 Bulan	521.144.642,00	516.806.418,00	441.427.650,00	-79.716.992,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Aparatur		1.421.369.700,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.1.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	14.526.000,00	14.526.000,00	14.526.000,00	0,00	Kab. Bantul, Pundong, Srihardono	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			37.530.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.1.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	8.690.000,00	8.690.000,00	8.690.000,00	0,00	Kab. Bantul, Pundong, Srihardono	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			52.740.600,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.1.06.0003		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	8.976.000,00	8.976.000,00	8.976.000,00	0,00	Kab. Bantul, Pundong, Srihardono	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			40.565.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.1.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	518.550,00	518.550,00	518.550,00	0,00	Kab. Bantul, Pundong, Srihardono	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			23.483.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.1.06.0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	294.000,00	294.000,00	294.000,00	0,00	Kab. Bantul, Pundong, Srihardono	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			2.304.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.1.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	2 Laporan	615.000,00	615.000,00	615.000,00	0,00	Kab. Bantul, Pundong, Srihardono	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			12.450.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				12 Bulan	12 Bulan	57.170.000,00	184.107.454,00	167.753.454,00	110.583.454,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Aparatur		5.178.964.949,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.1.07.0002		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			950.000.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				12 Bulan	12 Bulan	11.315.847.000,00	11.315.847.000,00	11.306.392.600,00	-9.454.400,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Aparatur		11.925.536.500,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.1.08.0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	Kab. Bantul, Pundong, Srihardono	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			3.300.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.1.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	177.252.900,00	177.252.900,00	175.873.900,00	-1.379.000,00	Kab. Bantul, Pundong, Srihardono	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			207.860.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.1.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	1.588.704.000,00	1.588.704.000,00	1.588.704.000,00	0,00	Kab. Bantul, Pundong, Srihardono	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			1.496.000.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				12 Bulan	12 Bulan	2.111.105.450,00	2.277.083.038,00	3.746.550.938,00	1.635.445.488,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Aparatur		8.771.611.056,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.1.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				6 Unit	6 Unit	71.689.400,00	71.689.400,00	71.689.400,00	0,00	Kab. Bantul, Pundong, Srihardono	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			135.055.600,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.1.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				42 Unit	43 Unit	11.892.000,00	11.892.000,00	223.892.000,00	212.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			148.772.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.1.09.0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	41.472.000,00	41.472.000,00	41.472.000,00	0,00	Kab. Bantul, Pundong, Srihardono	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			1.772.601.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.1.09.0010		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				9 Unit	9 Unit	11.200.000,00	11.200.000,00	11.200.000,00	0,00	Kab. Bantul, Pundong, Sihadono	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			52.640.000,00	DINAS SOSIAL
2.	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Anak bermasalah sosial, Penyandang Disabilitas, Gelandangan, Pengemis, Lanjut Usia Terantar, Wanita Bermasalah Sosial dan PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan meningkat/ dapat berfungsi sosial				22,58% Orang	22,58% Orang	46.391.172.500,00	46.389.533.500,00	46.375.364.500,00	12.302.368.098,00							58.693.540.598,00	
	1.06.04.1.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerAntar di dalam Panti	Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi Penyandang Disabilitas terantar melalui Panti Sosial (BRTPD)				115 Orang	115 Orang	5.080.107.650,00	5.080.107.650,00	5.063.047.650,00	-17.060.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penurunan tingkat kemiskinan	Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi Penyandang Disabilitas terantar melalui Panti Sosial (BRTPD)		7.367.154.709,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.01.0001	Penyediaan Permakanan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi				115 Orang	115 Orang	1.110.259.000,00	1.110.259.000,00	1.110.259.000,00	0,00	Kab. Bantul, Pundong, Sihadono	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penurunan tingkat kemiskinan			1.190.384.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.01.0002	Penyediaan Sandang																		
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi				115 Orang	115 Orang	216.528.000,00	216.528.000,00	216.528.000,00	0,00	Kab. Bantul, Pundong, Sihadono	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penurunan tingkat kemiskinan			213.059.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.01.0003	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses																		
			Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi				115 Orang	115 Orang	3.439.000,00	3.439.000,00	3.439.000,00	0,00	Kab. Bantul, Pundong, Sihadono	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penurunan tingkat kemiskinan			98.847.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.01.0004	Penyediaan Alat Bantu																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi				4 Orang	4 Orang	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	Kab. Bantul, Pundong, Sihadono	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penurunan tingkat kemiskinan			1.020.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.01.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi				115 Orang	115 Orang	194.796.600,00	194.796.600,00	194.796.600,00	0,00	Kab. Bantul, Pundong, Sihadono	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penurunan tingkat kemiskinan			378.936.500,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.01.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial																		
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi				115 Orang	115 Orang	94.843.000,00	94.843.000,00	94.843.000,00	0,00	Kab. Bantul, Pundong, Sihadono	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penurunan tingkat kemiskinan			707.545.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.01.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari																		
			Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi				50 Orang	50 Orang	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	Kab. Bantul, Pundong, Sihadono	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penurunan tingkat kemiskinan			74.633.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.01.0008	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas																		
			Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi				1 Orang	1 Orang	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	Kab. Bantul, Pundong, Sihadono	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penurunan tingkat kemiskinan			150.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.01.0009	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi				14 Orang	14 Orang	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	Kab. Bantul, Pundong, Sihadono	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penurunan tingkat kemiskinan			10.800.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.01.0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi				1 Orang	1 Orang	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	Kab. Bantul, Pundong, Sihadono	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penurunan tingkat kemiskinan			150.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.01.0011	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi				1 Orang	1 Orang	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	Kab. Bantul, Pundong, Sihadono	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penurunan tingkat kemiskinan			150.000,00	DINAS SOSIAL
			<b>BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL WANITA</b>						<b>114.345.874.033,00</b>	<b>117.011.646.342,00</b>	<b>115.003.620.090,00</b>	<b>657.746.057,00</b>							<b>186.761.379.703,00</b>	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							109.760.872.333,00	112.812.150.442,00	111.434.937.940,00	1.674.065.607,00							147.075.861.253,00	
1.06		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL							109.760.872.333,00	112.812.150.442,00	111.434.937.940,00	1.674.065.607,00							147.075.861.253,00	
1.	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				90,28 Angka	90,28 Angka	59.758.729.283,00	60.762.459.092,00	59.957.798.440,00	10.049.539.037,00							69.808.268.320,00	
	1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				12 Bulan	12 Bulan	45.570.757.441,00	46.285.910.432,00	44.133.989.048,00	-1.436.768.393,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Aparatur		42.026.975.615,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	4.734.000,00	4.734.000,00	4.734.000,00	0,00	Kab. Sleman, Godean, Sidoarum	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			65.820.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Barang pada Perangkat Daerah				12 Bulan	12 Bulan	94.949.200,00	94.949.200,00	94.949.200,00	0,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Aparatur		119.786.200,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	10.134.000,00	10.134.000,00	10.134.000,00	0,00	Kab. Sleman, Godean, Sidoarum	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			10.860.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah				12 Bulan	12 Bulan	521.144.642,00	516.806.418,00	441.427.650,00	-79.716.992,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Aparatur		1.421.369.700,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.595.000,00	3.595.000,00	3.595.000,00	0,00	Kab. Sleman, Godean, Sidoarum	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			26.087.400,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.718.000,00	3.718.000,00	3.718.000,00	0,00	Kab. Sleman, Godean, Sidoarum	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			32.843.700,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.002.000,00	3.002.000,00	3.002.000,00	0,00	Kab. Sleman, Godean, Sidoarum	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			20.184.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.899.000,00	2.899.000,00	2.899.000,00	0,00	Kab. Sleman, Godean, Sidoarum	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			8.096.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	1.764.000,00	1.764.000,00	1.764.000,00	0,00	Kab. Sleman, Godean, Sidoarum	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			4.548.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	Kab. Sleman, Godean, Sidoarum	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			21.540.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	57.170.000,00	184.107.454,00	167.753.454,00	110.583.454,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		5.178.964.949,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sleman, Godean, Sidoarum	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			1.975.064.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				12 Bulan	12 Bulan	11.315.847.000,00	11.315.847.000,00	11.306.392.600,00	-9.454.400,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Aparatur		11.925.536.500,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	Kab. Sleman, Godean, Sidoarum	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	95.250.000,00	95.250.000,00	95.250.000,00	0,00	Kab. Sleman, Godean, Sidoarum	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			100.380.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	656.328.000,00	656.328.000,00	656.328.000,00	0,00	Kab. Sleman, Godean, Sidoarum	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			721.113.800,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				12 Bulan	12 Bulan	2.111.105.450,00	2.277.083.038,00	3.746.550.938,00	1.635.445.488,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Aparatur		8.771.611.056,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				4 Unit	4 Unit	71.855.000,00	71.855.000,00	62.735.000,00	-9.120.000,00	Kab. Sleman, Godean, Sidoarum	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			80.805.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				6 Unit	6 Unit	2.126.000,00	2.126.000,00	2.126.000,00	0,00	Kab. Sleman, Godean, Sidoarum	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			6.950.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	12 Unit	12.161.000,00	12.161.000,00	12.161.000,00	0,00	Kab. Sleman, Godean, Sidoarum	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			57.105.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				-	1 Unit	0,00	0,00	199.906.000,00	199.906.000,00	Kab. Sleman, Godean, Sidoarum	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			1.034.881.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				20 Unit	20 Unit	5.570.000,00	5.570.000,00	5.570.000,00	0,00	Kab. Sleman, Godean, Sidoarum	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			14.236.000,00	DINAS SOSIAL
2.	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Anak bermasalah sosial, Penyandang Disabilitas, Gelandangan, Pengemis, Lanjut Usia Terlantar, Wanita Bermasalah Sosial dan PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan meningkat/ dapat berfungsi sosial				22,58% Orang	22,58% Orang	46.391.172.500,00	46.389.533.500,00	46.375.364.500,00	12.302.368.098,00							58.693.540.598,00	
	1.06.04.1.05	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial atau Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya melalui Panti Sosial (BPRSW)				50 Orang	50 Orang	5.118.667.600,00	5.117.028.600,00	5.054.553.600,00	-64.114.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penurunan tingkat kemiskinan	Wanita Bermasalah Sosial		9.544.056.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.05.0001	Penyediaan Permakanan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi				50 Orang	50 Orang	482.290.000,00	482.290.000,00	482.290.000,00	0,00	Kab. Sleman, Godean, Sidoarum	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penurunan tingkat kemiskinan			805.560.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.05.0002	Penyediaan Sandang																		
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi				50 Orang	50 Orang	169.423.000,00	169.423.000,00	169.423.000,00	0,00	Kab. Sleman, Godean, Sidoarum	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penurunan tingkat kemiskinan			352.324.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.05.0003	Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses																		
			Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi				50 Orang	50 Orang	711.000,00	711.000,00	711.000,00	0,00	Kab. Sleman, Godean, Sidoarum	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penurunan tingkat kemiskinan			120.574.800,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.05.0004	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi				50 Orang	50 Orang	28.470.600,00	28.470.600,00	28.470.600,00	0,00	Kab. Sleman, Godean, Sidoarum	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penurunan tingkat kemiskinan			50.597.400,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.05.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial																		
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi				50 Orang	50 Orang	77.813.800,00	77.813.800,00	77.813.800,00	0,00	Kab. Sleman, Godean, Sidoarum	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penurunan tingkat kemiskinan			775.465.500,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.05.0006	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari																		
			Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi				50 Orang	50 Orang	70.246.000,00	70.246.000,00	70.246.000,00	0,00	Kab. Sleman, Godean, Sidoarum	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penurunan tingkat kemiskinan			269.035.200,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.05.0007	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar																		
			Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi				50 Orang	50 Orang	13.162.100,00	13.162.100,00	13.162.100,00	0,00	Kab. Sleman, Godean, Sidoarum	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penurunan tingkat kemiskinan			838.560.500,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.05.0008	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak																		
			Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi				2 Orang	2 Orang	200.000,00	200.000,00	100.000,00	-100.000,00	Kab. Sleman, Godean, Sidoarum	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penurunan tingkat kemiskinan			4.800.000,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	1.06.04.1.05.0009	Akses Kelayakan Pendidikan dan Kesehatan Dasar																			
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi				3 Orang	3 Orang	210.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00	Kab. Sleman, Godean, Sidoarum	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penurunan tingkat kemiskinan			8.944.800,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.04.1.05.0010	Pemulangan ke Daerah Asal																			
			Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi yang Dipulangkan ke Daerah Asal				2 Orang	2 Orang	200.000,00	200.000,00	100.000,00	-100.000,00	Kab. Sleman, Godean, Sidoarum	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penurunan tingkat kemiskinan			7.200.000,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.04.1.05.0011	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA																			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA				2 Dokumen	2 Dokumen	200.000,00	200.000,00	100.000,00	-100.000,00	Kab. Sleman, Godean, Sidoarum	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penurunan tingkat kemiskinan			4.800.000,00	DINAS SOSIAL	
		<b>BALAI REHABILITASI SOSIAL BINA KARYA DAN LARAS</b>								<b>114.345.874.033,00</b>	<b>117.011.646.342,00</b>	<b>115.003.620.090,00</b>	<b>657.746.057,00</b>						<b>186.761.379.703,00</b>		
	<b>1</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>							<b>109.760.872.333,00</b>	<b>112.812.150.442,00</b>	<b>111.434.937.940,00</b>	<b>1.674.065.607,00</b>							<b>147.075.861.253,00</b>		
	<b>1.06</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL</b>							<b>109.760.872.333,00</b>	<b>112.812.150.442,00</b>	<b>111.434.937.940,00</b>	<b>1.674.065.607,00</b>							<b>147.075.861.253,00</b>		
	1.	<b>1.06.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>						<b>59.758.729.283,00</b>	<b>60.762.459.092,00</b>	<b>59.957.798.440,00</b>	<b>10.049.539.037,00</b>							<b>69.808.268.320,00</b>		
	1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	45.570.757.441,00	46.285.910.432,00	44.133.989.048,00	-1.436.768.393,00				Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			42.026.975.615,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	12.068.000,00	12.068.000,00	12.068.000,00	0,00	Kab. Sleman, Kalasan, Purwomartani Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			34.595.000,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	94.949.200,00	94.949.200,00	94.949.200,00	0,00				Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			119.786.200,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																			
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	14.350.000,00	14.350.000,00	14.350.000,00	0,00	Kab. Sleman, Kalasan, Purwomartani Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			21.082.000,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah				12 Bulan	12 Bulan	521.144.642,00	516.806.418,00	441.427.650,00	-79.716.992,00				Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Aparatur		1.421.369.700,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	13.349.000,00	13.349.000,00	13.349.000,00	0,00	Kab. Sleman, Kalasan, Purwomartani Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			18.029.000,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	1.755.000,00	1.755.000,00	1.755.000,00	0,00	Kab. Sleman, Kalasan, Purwomartani Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			15.203.500,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																			
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.247.000,00	2.247.000,00	2.247.000,00	0,00	Kab. Sleman, Kalasan, Purwomartani Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			4.815.000,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	7.895.000,00	7.895.000,00	7.895.000,00	0,00	Kab. Sleman, Kalasan, Purwomartani Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			10.516.000,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	1.764.000,00	1.764.000,00	1.764.000,00	0,00	Kab. Sleman, Kalasan, Purwomartani Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			5.976.000,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	2 Laporan	6.300.000,00	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	Kab. Sleman, Kalasan, Purwomartani Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			11.850.000,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				12 Bulan	12 Bulan	57.170.000,00	184.107.454,00	167.753.454,00	110.583.454,00				Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Aparatur		5.178.964.949,00	DINAS SOSIAL	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	1.06.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sleman, Kalasan, Purwomartani Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			0,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				-	1 Unit	0,00	126.937.454,00	126.937.454,00	126.937.454,00	Kab. Sleman, Kalasan, Purwomartani Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			126.937.454,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	-	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			0,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																			
			-				-	-	11.315.847.000,00	11.315.847.000,00	11.306.392.600,00	-9.454.400,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			11.925.536.500,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	Kab. Sleman, Kalasan, Purwomartani Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			2.200.000,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	170.334.600,00	170.334.600,00	160.334.600,00	-10.000.000,00	Kab. Sleman, Kalasan, Purwomartani Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			171.000.000,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	1.994.832.000,00	1.994.832.000,00	1.994.832.000,00	0,00	Kab. Sleman, Kalasan, Purwomartani Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			2.004.374.000,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																			
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-	12 Bulan	2.111.105.450,00	2.277.083.038,00	3.746.550.938,00	1.635.445.488,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Aparatur		8.771.611.056,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Periznannya				10 Unit	10 Unit	133.711.400,00	133.711.400,00	133.711.400,00	0,00	Kab. Sleman, Kalasan, Purwomartani Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			151.588.600,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	10.332.000,00	10.332.000,00	10.332.000,00	0,00	Kab. Sleman, Kalasan, Purwomartani Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			47.706.800,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	2 Unit	0,00	165.977.588,00	363.712.588,00	363.712.588,00	Kab. Sleman, Kalasan, Purwomartani Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			363.712.588,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	47.553.900,00	47.553.900,00	47.553.000,00	-900,00	Kab. Sleman, Kalasan, Purwomartani Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			116.200.000,00	DINAS SOSIAL	
2.	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Anak bermasalah sosial, Penyandang Disabilitas, Gelandangan, Pengemis, Lanjut Usia Terlantar, Wanita Bermasalah Sosial dan PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan meningkat/ dapat berfungsi sosial				22,58% Orang	22,58% Orang	46.391.172.500,00	46.389.533.500,00	46.375.364.500,00	12.302.368.098,00							58.693.540.598,00		
	1.06.04.1.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Pant	Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi Penyandang Disabilitas terlantar melalui Pant Sosial (BRSBKL)				180 Orang	180 Orang	5.080.107.650,00	5.080.107.650,00	5.063.047.650,00	-17.060.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penurunan tingkat kemiskinan	Penyandang Disabilitas Terlantar di BRSBKL Unit Laras		7.367.154.709,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.04.1.01.0001	Penyediaan Perumahan																			
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perumahan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi				180 Orang	180 Orang	1.867.776.000,00	1.867.776.000,00	1.867.776.000,00	0,00	Kab. Sleman, Kalasan, Purwomartani	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penurunan tingkat kemiskinan			1.867.776.000,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.04.1.01.0002	Penyediaan Sandang																			
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi				180 Orang	180 Orang	173.648.000,00	173.648.000,00	173.648.000,00	0,00	Kab. Sleman, Kalasan, Purwomartani	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penurunan tingkat kemiskinan			173.648.000,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.04.1.01.0003	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses																			
			Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi				180 Orang	180 Orang	13.749.000,00	13.749.000,00	13.749.000,00	0,00	Kab. Sleman, Kalasan, Purwomartani	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penurunan tingkat kemiskinan			8.878.000,00	DINAS SOSIAL	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.06.04.1.01.0004	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi				1 Orang	1 Orang	2.290.000,00	2.290.000,00	2.290.000,00	0,00	Kab. Sleman, Kalasan, Purwomartani	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemerantasan kemiskinan.	Penurunan tingkat kemiskinan			2.290.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.01.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi				180 Orang	180 Orang	14.977.000,00	14.977.000,00	14.977.000,00	0,00	Kab. Sleman, Kalasan, Purwomartani	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemerantasan kemiskinan.	Penurunan tingkat kemiskinan			29.744.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.01.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi				180 Orang	180 Orang	57.925.000,00	57.925.000,00	57.925.000,00	0,00	Kab. Sleman, Kalasan, Purwomartani	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemerantasan kemiskinan.	Penurunan tingkat kemiskinan			57.925.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.01.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi				180 Orang	180 Orang	455.520.000,00	455.520.000,00	455.520.000,00	0,00	Kab. Sleman, Kalasan, Purwomartani	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemerantasan kemiskinan.	Penurunan tingkat kemiskinan			962.977.100,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.01.0008	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi				12 Orang	12 Orang	300.000,00	300.000,00	100.000,00	-200.000,00	Kab. Sleman, Kalasan, Purwomartani	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemerantasan kemiskinan.	Penurunan tingkat kemiskinan			3.600.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.01.0009	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi				180 Orang	180 Orang	4.777.050,00	4.777.050,00	4.777.050,00	0,00	Kab. Sleman, Kalasan, Purwomartani	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemerantasan kemiskinan.	Penurunan tingkat kemiskinan			1.121.050,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.01.0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi				25 Orang	25 Orang	300.000,00	300.000,00	100.000,00	-200.000,00	Kab. Sleman, Kalasan, Purwomartani	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemerantasan kemiskinan.	Penurunan tingkat kemiskinan			7.200.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.01.0011	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi				25 Orang	25 Orang	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	Kab. Sleman, Kalasan, Purwomartani	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemerantasan kemiskinan.	Penurunan tingkat kemiskinan			7.200.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.01.0012	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerAntar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerAntar				6 Dokumen	6 Dokumen	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	Kab. Sleman, Kalasan, Purwomartani	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemerantasan kemiskinan.	Penurunan tingkat kemiskinan			27.300.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.04	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi gelandangan dan pengemis melalui Panti Sosial (BRSBKL)				30 Orang	30 Orang	552.705.700,00	552.705.700,00	551.135.700,00	-1.570.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemerantasan kemiskinan.	Penurunan tingkat kemiskinan	Gelandangan dan Pengemis di dalam Balai RSBKL	1.638.651.999,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.04.1.04.0001	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi				30 Orang	30 Orang	342.018.000,00	342.018.000,00	342.018.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemerantasan kemiskinan.	Penurunan tingkat kemiskinan			665.406.830,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.04.0002	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan pemenuhan Kebutuhan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi				30 Orang	30 Orang	58.983.000,00	58.983.000,00	58.983.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemerantasan kemiskinan.	Penurunan tingkat kemiskinan			184.170.470,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.04.0003	Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi				30 Orang	30 Orang	17.895.600,00	17.895.600,00	17.895.600,00	0,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemerantasan kemiskinan.	Penurunan tingkat kemiskinan			52.919.895,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.04.0004	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan pemenuhan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi				30 Orang	30 Orang	1.881.000,00	1.881.000,00	1.881.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemerantasan kemiskinan.	Penurunan tingkat kemiskinan			15.972.000,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.06.04.1.04.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial																		
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi				30 Orang	30 Orang	75.667.000,00	75.667.000,00	75.667.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penurunan tingkat kemiskinan			226.405.762,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.04.0006	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari																		
			Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi				30 Orang	30 Orang	31.200.000,00	31.200.000,00	31.200.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penurunan tingkat kemiskinan			39.930.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.04.0007	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar																		
			Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi				30 Orang	30 Orang	16.441.100,00	16.441.100,00	16.441.100,00	0,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penurunan tingkat kemiskinan			390.624.542,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.04.0008	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak																		
			Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Gelandangan bagi Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Provinsi				3 Orang	2 Orang	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penurunan tingkat kemiskinan			2.662.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.04.0009	Akses Kelayakan Pendidikan dan Kesehatan Dasar																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi				30 Orang	30 Orang	4.700.000,00	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penurunan tingkat kemiskinan			13.043.800,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.04.0010	Pemulangan ke Daerah Asal																		
			Jumlah Gelandangan dan Pengemis/Keluarga yang Dipulangkan ke Daerah asal Kewenangan Provinsi				8 Orang	4 Orang	2.000.000,00	2.000.000,00	760.000,00	-1.240.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penurunan tingkat kemiskinan			24.756.600,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.04.0011	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Tertantar di dalam Panti																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti				2 Dokumen	2 Dokumen	1.320.000,00	1.320.000,00	990.000,00	-330.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penurunan tingkat kemiskinan			22.760.100,00	DINAS SOSIAL
		<b>BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL REMAJA</b>							<b>114.345.874.033,00</b>	<b>117.011.646.342,00</b>	<b>115.003.620.090,00</b>	<b>657.746.057,00</b>							<b>186.761.379.703,00</b>	
	<b>1</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>							<b>109.760.872.333,00</b>	<b>112.812.150.442,00</b>	<b>111.434.937.940,00</b>	<b>1.674.065.607,00</b>							<b>147.075.861.253,00</b>	
	<b>1.06</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL</b>							<b>109.760.872.333,00</b>	<b>112.812.150.442,00</b>	<b>111.434.937.940,00</b>	<b>1.674.065.607,00</b>							<b>147.075.861.253,00</b>	
	<b>1.</b>	<b>1.06.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			<b>90,28 Angka</b>	<b>90,28 Angka</b>	<b>59.758.729.283,00</b>	<b>60.762.459.092,00</b>	<b>59.957.798.440,00</b>	<b>10.049.539.037,00</b>							<b>69.808.268.320,00</b>	
	1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				12 Bulan	12 Bulan	45.570.757.441,00	46.285.910.432,00	44.133.989.048,00	-1.436.768.393,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Aparatur		42.026.975.615,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	4.776.000,00	4.776.000,00	4.776.000,00	0,00	Kab. Sleman, Sleman, Tridadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			4.735.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Barang pada Perangkat Daerah				12 Bulan	12 Bulan	94.949.200,00	94.949.200,00	94.949.200,00	0,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Aparatur		119.786.200,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	10.385.000,00	10.385.000,00	10.385.000,00	0,00	Kab. Sleman, Sleman, Tridadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			10.377.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah				12 Bulan	12 Bulan	521.144.642,00	516.806.418,00	441.427.650,00	-79.716.992,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Aparatur		1.421.369.700,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.306.000,00	3.306.000,00	3.306.000,00	0,00	Kab. Sleman, Sleman, Tridadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			21.442.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	14.416.000,00	14.416.000,00	14.416.000,00	0,00	Kab. Sleman, Sleman, Tridadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			33.533.650,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	8.595.000,00	8.595.000,00	8.595.000,00	0,00	Kab. Sleman, Sleman, Tridadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			74.440.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.1.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					1 Paket	1 Paket	3.920.000,00	3.920.000,00	3.920.000,00	0,00	Kab. Sleman, Sleman, Tridadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			4.872.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.1.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					12 Laporan	12 Laporan	6.600.000,00	6.600.000,00	3.000.000,00	-3.600.000,00	Kab. Sleman, Sleman, Tridadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			30.600.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				-	12 bulan Bulan	57.170.000,00	184.107.454,00	167.753.454,00	110.583.454,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Aparatur		5.178.964.949,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.1.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sleman, Sleman, Tridadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			229.706.650,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				12 Bulan	12 Bulan	11.315.847.000,00	11.315.847.000,00	11.306.392.600,00	-9.454.400,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Aparatur		11.925.536.500,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.1.08.0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat					1 Laporan	1 Laporan	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	Kab. Sleman, Sleman, Tridadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			1.200.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.1.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					12 Laporan	12 Laporan	72.000.000,00	72.000.000,00	73.200.000,00	1.200.000,00	Kab. Sleman, Sleman, Tridadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			72.000.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.1.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					12 Laporan	12 Laporan	1.007.256.000,00	1.007.256.000,00	1.007.256.000,00	0,00	Kab. Sleman, Sleman, Tridadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			1.090.944.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				12 Bulan	12 Bulan	2.111.105.450,00	2.277.083.038,00	3.746.550.938,00	1.635.445.488,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Aparatur		8.771.611.056,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.1.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					5 Unit	5 Unit	70.314.500,00	70.314.500,00	70.314.500,00	0,00	Kab. Sleman, Sleman, Tridadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			74.464.500,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.1.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					8 Unit	8 Unit	3.417.000,00	3.417.000,00	3.417.000,00	0,00	Kab. Sleman, Sleman, Tridadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			35.488.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.1.09.0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					1 Unit	2 Unit	160.000.000,00	160.000.000,00	354.000.000,00	194.000.000,00	Kab. Sleman, Sleman, Tridadi	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			1.033.750.000,00	DINAS SOSIAL
2.	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Anak bermasalah sosial, Penyandang Disabilitas, Gelandangan, Pengemis, Lanjut Usia Terlantar, Wanita Bermasalah Sosial dan PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan meningkat/ dapat berfungsi sosial				22,58% Orang	22,58% Orang	46.391.172.500,00	46.389.533.500,00	46.375.364.500,00	12.302.368.098,00							58.693.540.598,00	
1.06.04.1.05		Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Pantii	Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial atau Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya melalui Pantii Sosial (BPRSR)				80 Orang	60 Orang	5.118.667.600,00	5.117.028.600,00	5.054.553.600,00	-64.114.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penurunan tingkat kemiskinan	Anak Berhadapan dengan Hukum & Anak Jalanan (Remaja Bermasalah Sosial)		9.544.056.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.04.1.05.0001		Penyediaan Permakanan					60 Orang	60 Orang	675.636.000,00	675.636.000,00	675.636.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sleman, Sleman, Tridadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penurunan tingkat kemiskinan			779.049.500,00	DINAS SOSIAL
1.06.04.1.05.0002		Penyediaan Sandang					60 Orang	60 Orang	194.936.000,00	194.936.000,00	194.936.000,00	0,00	Kab. Sleman, Sleman, Tridadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penurunan tingkat kemiskinan			176.644.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.04.1.05.0003		Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses					60 Orang	60 Orang	191.536.000,00	191.536.000,00	191.536.000,00	0,00	Kab. Sleman, Sleman, Tridadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penurunan tingkat kemiskinan			21.573.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.04.1.05.0004		Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Pantii					60 Orang	60 Orang	191.536.000,00	191.536.000,00	191.536.000,00	0,00	Kab. Sleman, Sleman, Tridadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penurunan tingkat kemiskinan			21.573.000,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi				60 Orang	60 Orang	55.039.000,00	55.039.000,00	55.039.000,00	0,00	Kab. Sleman, Sleman, Tridadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penurunan tingkat kemiskinan			43.764.200,00	DINAS SOSIAL	
1.06.04.1.05.0005		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial																			
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi				60 Orang	60 Orang	633.471.000,00	633.471.000,00	583.496.000,00	-49.975.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sleman, Sleman, Tridadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penurunan tingkat kemiskinan			600.894.100,00	DINAS SOSIAL	
1.06.04.1.05.0006		Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari																			
			Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi				60 Orang	60 Orang	116.920.000,00	116.920.000,00	116.920.000,00	0,00	Kab. Sleman, Sleman, Tridadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penurunan tingkat kemiskinan			51.600.000,00	DINAS SOSIAL	
1.06.04.1.05.0007		Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar																			
			Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi				60 Orang	60 Orang	39.170.000,00	39.170.000,00	39.170.000,00	0,00	Kab. Sleman, Sleman, Tridadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penurunan tingkat kemiskinan			196.270.000,00	DINAS SOSIAL	
1.06.04.1.05.0009		Akses Kelayakan Pendidikan dan Kesehatan Dasar																			
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi				80 Orang	60 Orang	8.450.000,00	8.450.000,00	8.450.000,00	0,00	Kab. Sleman, Sleman, Tridadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penurunan tingkat kemiskinan			64.042.000,00	DINAS SOSIAL	
<b>BALAI REHABILITASI SOSIAL DAN PENGASUHAN ANAK</b>									<b>114.345.874.033,00</b>	<b>117.011.646.342,00</b>	<b>115.003.620.090,00</b>	<b>657.746.057,00</b>						<b>186.761.379.703,00</b>			
1		<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>								<b>109.760.872.333,00</b>	<b>112.812.150.442,00</b>	<b>111.434.937.940,00</b>	<b>1.674.065.607,00</b>							<b>147.075.861.253,00</b>	
1.06		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL</b>								<b>109.760.872.333,00</b>	<b>112.812.150.442,00</b>	<b>111.434.937.940,00</b>	<b>1.674.065.607,00</b>							<b>147.075.861.253,00</b>	
1.	1.06.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>								<b>59.758.729.283,00</b>	<b>60.762.459.092,00</b>	<b>59.957.798.440,00</b>	<b>10.049.539.037,00</b>							<b>69.808.268.320,00</b>	
	1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				12 bulan	12 bulan	45.570.757.441,00	46.285.910.432,00	44.133.989.048,00	-1.436.768.393,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Aparatur		42.026.975.615,00	DINAS SOSIAL	
1.06.01.1.02.0003		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				3 Dokumen	3 Dokumen	7.626.800,00	7.626.800,00	7.626.800,00	0,00	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek Kab. Sleman, Ngemplak, Bimomartani	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			30.034.600,00	DINAS SOSIAL	
1.06.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Barang pada Perangkat Daerah				12 bulan	12 bulan	94.949.200,00	94.949.200,00	94.949.200,00	0,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Aparatur		119.786.200,00	DINAS SOSIAL	
1.06.01.1.03.0006		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																			
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				3 Laporan	3 Laporan	12.546.600,00	12.546.600,00	12.546.600,00	0,00	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek Kab. Sleman, Ngemplak, Bimomartani	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			13.193.200,00	DINAS SOSIAL	
1.06.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah				12 Bulan	12 Bulan	521.144.642,00	516.806.418,00	441.427.650,00	-79.716.992,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Aparatur		1.421.369.700,00	DINAS SOSIAL	
1.06.01.1.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	6.260.000,00	6.260.000,00	6.260.000,00	0,00	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek Kab. Sleman, Ngemplak, Bimomartani	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			38.085.000,00	DINAS SOSIAL	
1.06.01.1.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	7.048.200,00	7.048.200,00	7.044.600,00	-3.600,00	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek Kab. Sleman, Ngemplak, Bimomartani	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			74.607.200,00	DINAS SOSIAL	
1.06.01.1.06.0003		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																			
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	7.676.800,00	7.676.800,00	7.676.800,00	0,00	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek Kab. Sleman, Ngemplak, Bimomartani	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			58.994.000,00	DINAS SOSIAL	
1.06.01.1.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	13.619.900,00	13.619.900,00	13.619.900,00	0,00	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek Kab. Sleman, Ngemplak, Bimomartani	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			46.272.500,00	DINAS SOSIAL	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.06.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan					1 Dokumen	1 Dokumen	528.000,00	528.000,00	528.000,00	0,00	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek Kab. Sleman, Ngemplak, Bimomartani	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			4.584.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					2 Laporan	2 Laporan	6.200.000,00	6.200.000,00	5.600.000,00	-600.000,00	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek Kab. Sleman, Ngemplak, Bimomartani	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			23.550.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				12 Bulan	12 Bulan	57.170.000,00	184.107.454,00	167.753.454,00	110.583.454,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Aparatur		5.178.964.949,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					1 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			420.300.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa Kab. Sleman, Ngemplak, Bimomartani	-	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			396.110.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					1 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sleman, Ngemplak, Bimomartani	-	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			26.150.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				12 Bulan	12 Bulan	11.315.847.000,00	11.315.847.000,00	11.306.392.600,00	-9.454.400,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Aparatur		11.925.536.500,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					3 Laporan	3 Laporan	86.520.000,00	86.520.000,00	87.248.600,00	728.600,00	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek Kab. Sleman, Ngemplak, Bimomartani	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			141.818.500,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					3 Laporan	3 Laporan	884.172.000,00	884.172.000,00	884.172.000,00	0,00	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek Kab. Sleman, Ngemplak, Bimomartani	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			903.006.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				12 Bulan	12 Bulan	2.111.105.450,00	2.277.083.038,00	3.746.550.938,00	1.635.445.488,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Aparatur		8.771.611.056,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					11 Unit	11 Unit	201.253.800,00	201.253.800,00	201.253.800,00	0,00	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek Kab. Sleman, Ngemplak, Bimomartani	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			250.067.800,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					14 Unit	13 Unit	34.136.000,00	34.136.000,00	26.946.000,00	-7.190.000,00	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek Kab. Sleman, Ngemplak, Bimomartani	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			67.518.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					2 Unit	2 Unit	171.017.000,00	171.017.000,00	370.144.000,00	199.127.000,00	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek Kab. Sleman, Ngemplak, Bimomartani	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			915.402.668,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					2 Unit	3 Unit	2.160.000,00	2.160.000,00	177.160.000,00	175.000.000,00	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek Kab. Sleman, Ngemplak, Bimomartani	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			118.948.000,00	DINAS SOSIAL
2.	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Anak bermasalah sosial, Penyandang Disabilitas, Gelandangan, Pengemis, Lanjut Usia Terlantar, Wanita Bermasalah Sosial dan PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan meningkat/ dapat berfungsi sosial				22,58% Orang	22,58% Orang	46.391.172.500,00	46.389.533.500,00	46.375.364.500,00	12.302.368.098,00							58.693.540.598,00	
	1.06.04.1.02	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi anak terlantar dan anak bermasalah sosial lainnya melalui Panti Sosial (BRSPA)				70 Orang	70 Orang	1.692.600.900,00	1.692.600.900,00	1.689.200.900,00	-3.400.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penurunan tingkat kemiskinan	Anak Bermasalah Sosial di BRSPA		3.835.175.100,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.02.0001	Pengasuhan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Pengasuhan Kewenangan Provinsi				70 Orang	70 Orang	225.000,00	225.000,00	225.000,00	0,00	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek Kab. Sleman, Ngemplak, Bimartani	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penurunan tingkat kemiskinan			9.075.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.04.1.02.0002		Penyediaan Makanan					70 Orang	70 Orang	690.830.000,00	690.830.000,00	690.830.000,00	0,00	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek Kab. Sleman, Ngemplak, Bimartani	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penurunan tingkat kemiskinan			1.132.703.000,00	DINAS SOSIAL
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perumahan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi				70 Orang	70 Orang	235.918.000,00	235.918.000,00	235.918.000,00	0,00	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek Kab. Sleman, Ngemplak, Bimartani	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penurunan tingkat kemiskinan			560.748.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.04.1.02.0003		Penyediaan Sandang					70 Orang	70 Orang	32.321.000,00	32.321.000,00	32.321.000,00	0,00	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek Kab. Sleman, Ngemplak, Bimartani	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penurunan tingkat kemiskinan			149.590.000,00	DINAS SOSIAL
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi				70 Orang	70 Orang	71.800.000,00	71.800.000,00	71.800.000,00	0,00	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek Kab. Sleman, Ngemplak, Bimartani	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penurunan tingkat kemiskinan			85.626.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.04.1.02.0004		Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses					65 Orang	65 Orang	87.200.000,00	87.200.000,00	87.200.000,00	0,00	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek Kab. Sleman, Ngemplak, Bimartani	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penurunan tingkat kemiskinan			135.200.000,00	DINAS SOSIAL
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi				65 Orang	65 Orang	374.000,00	374.000,00	374.000,00	0,00	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek Kab. Sleman, Ngemplak, Bimartani	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penurunan tingkat kemiskinan			61.715.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.04.1.02.0005		Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti					4 Orang	4 Orang	815.000,00	815.000,00	795.000,00	-20.000,00	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek Kab. Sleman, Ngemplak, Bimartani	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penurunan tingkat kemiskinan			2.000.000,00	DINAS SOSIAL
			Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi				12 Orang	6 Orang	2.437.500,00	2.437.500,00	1.637.500,00	-800.000,00	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek Kab. Sleman, Ngemplak, Bimartani	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penurunan tingkat kemiskinan			4.800.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.04.1.02.0006		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial					70 Orang	70 Orang	294.051.000,00	294.051.000,00	294.051.000,00	0,00	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek Kab. Sleman, Ngemplak, Bimartani	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penurunan tingkat kemiskinan			632.050.000,00	DINAS SOSIAL
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi				6 Orang	3 Orang	1.215.000,00	1.215.000,00	1.175.000,00	-40.000,00	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek Kab. Sleman, Ngemplak, Bimartani	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penurunan tingkat kemiskinan			4.000.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.04.1.02.0007		Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari					3 Orang	3 Orang	637.500,00	637.500,00	217.500,00	-420.000,00	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek Kab. Sleman, Ngemplak, Bimartani	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penurunan tingkat kemiskinan			1.600.000,00	DINAS SOSIAL
			Jumlah Orang Mendapatkan Pengasuhan Keluarga Pengganti Kewenangan Provinsi				1 Dokumen	1 Dokumen	225.000,00	225.000,00	225.000,00	0,00	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek Kab. Sleman, Ngemplak, Bimartani	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penurunan tingkat kemiskinan			11.100.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.04.1.02.0008		Fasilitasi Pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak					12 Orang	6 Orang	2.437.500,00	2.437.500,00	1.637.500,00	-800.000,00	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek Kab. Sleman, Ngemplak, Bimartani	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penurunan tingkat kemiskinan			4.800.000,00	DINAS SOSIAL
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti				3 Orang	3 Orang	637.500,00	637.500,00	217.500,00	-420.000,00	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek Kab. Sleman, Ngemplak, Bimartani	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penurunan tingkat kemiskinan			1.600.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.04.1.02.0009		Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar					70 Orang	70 Orang	294.051.000,00	294.051.000,00	294.051.000,00	0,00	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek Kab. Sleman, Ngemplak, Bimartani	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penurunan tingkat kemiskinan			632.050.000,00	DINAS SOSIAL
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi				6 Orang	3 Orang	1.215.000,00	1.215.000,00	1.175.000,00	-40.000,00	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek Kab. Sleman, Ngemplak, Bimartani	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penurunan tingkat kemiskinan			4.000.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.04.1.02.0010		Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga					12 Orang	6 Orang	2.437.500,00	2.437.500,00	1.637.500,00	-800.000,00	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek Kab. Sleman, Ngemplak, Bimartani	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penurunan tingkat kemiskinan			4.800.000,00	DINAS SOSIAL
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi				12 Orang	6 Orang	2.437.500,00	2.437.500,00	1.637.500,00	-800.000,00	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek Kab. Sleman, Ngemplak, Bimartani	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penurunan tingkat kemiskinan			4.800.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.04.1.02.0011		Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga					12 Orang	6 Orang	2.437.500,00	2.437.500,00	1.637.500,00	-800.000,00	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek Kab. Sleman, Ngemplak, Bimartani	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penurunan tingkat kemiskinan			4.800.000,00	DINAS SOSIAL
			Jumlah Orang Mendapatkan Pengasuhan Keluarga Pengganti Kewenangan Provinsi				3 Orang	3 Orang	637.500,00	637.500,00	217.500,00	-420.000,00	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek Kab. Sleman, Ngemplak, Bimartani	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penurunan tingkat kemiskinan			1.600.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.04.1.02.0012		Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Penganti					3 Orang	3 Orang	637.500,00	637.500,00	217.500,00	-420.000,00	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek Kab. Sleman, Ngemplak, Bimartani	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penurunan tingkat kemiskinan			1.600.000,00	DINAS SOSIAL
			Jumlah Orang Mendapatkan Pengasuhan Keluarga Pengganti Kewenangan Provinsi				3 Orang	3 Orang	637.500,00	637.500,00	217.500,00	-420.000,00	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek Kab. Sleman, Ngemplak, Bimartani	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penurunan tingkat kemiskinan			1.600.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.04.1.02.0013		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti					1 Dokumen	1 Dokumen	225.000,00	225.000,00	225.000,00	0,00	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek Kab. Sleman, Ngemplak, Bimartani	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penurunan tingkat kemiskinan			11.100.000,00	DINAS SOSIAL
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti				1 Dokumen	1 Dokumen	225.000,00	225.000,00	225.000,00	0,00	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek Kab. Sleman, Ngemplak, Bimartani	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penurunan tingkat kemiskinan			11.100.000,00	DINAS SOSIAL
		<b>BALAI PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA</b>							<b>114.345.874.033,00</b>	<b>117.011.646.342,00</b>	<b>115.003.620.090,00</b>	<b>657.746.057,00</b>						<b>186.761.379.703,00</b>		
<b>1</b>		<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>							<b>109.760.872.333,00</b>	<b>112.812.150.442,00</b>	<b>111.434.937.940,00</b>	<b>1.674.065.607,00</b>						<b>147.075.861.253,00</b>		
<b>1.06</b>		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL</b>							<b>109.760.872.333,00</b>	<b>112.812.150.442,00</b>	<b>111.434.937.940,00</b>	<b>1.674.065.607,00</b>						<b>147.075.861.253,00</b>		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				90,28 Angka	90,28 Angka	59.758.729.283,00	60.762.459.092,00	59.957.798.440,00	10.049.539.037,00							69.808.268.320,00	
	1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				12 Bulan	12 Bulan	45.570.757.441,00	46.285.910.432,00	44.133.989.048,00	-1.436.768.393,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			42.026.975.615,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	11.415.000,00	11.415.000,00	11.415.000,00	0,00	Kab. Bantul, Kasihan, Bangunjiwo Kab. Sleman, Pakem, Pakembinangun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			30.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Barang pada Perangkat Daerah				12 Bulan	12 Bulan	94.949.200,00	94.949.200,00	94.949.200,00	0,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Aparatur		119.786.200,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	10.960.000,00	10.960.000,00	10.960.000,00	0,00	Kab. Bantul, Kasihan, Bangunjiwo Kab. Sleman, Pakem, Pakembinangun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			13.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah				12 Bulan	12 Bulan	521.144.642,00	516.806.418,00	441.427.650,00	-79.716.992,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Aparatur		1.421.369.700,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	15.850.000,00	15.850.000,00	15.850.000,00	0,00	Kab. Bantul, Kasihan, Bangunjiwo Kab. Sleman, Pakem, Pakembinangun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			20.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.624.400,00	10.624.400,00	10.624.400,00	0,00	Kab. Bantul, Kasihan, Bangunjiwo Kab. Sleman, Pakem, Pakembinangun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			10.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.960.000,00	3.960.000,00	3.960.000,00	0,00	Kab. Bantul, Kasihan, Bangunjiwo Kab. Sleman, Pakem, Pakembinangun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			5.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	11.600.000,00	11.600.000,00	11.600.000,00	0,00	Kab. Bantul, Kasihan, Bangunjiwo Kab. Sleman, Pakem, Pakembinangun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			8.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	750.000,00	750.000,00	735.000,00	-15.000,00	Kab. Bantul, Kasihan, Bangunjiwo Kab. Sleman, Pakem, Pakembinangun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			2.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	2 Laporan	6.000.000,00	6.000.000,00	3.000.000,00	-3.000.000,00	Kab. Bantul, Kasihan, Bangunjiwo Kab. Sleman, Pakem, Pakembinangun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			3.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				12 Bulan	12 Bulan	57.170.000,00	184.107.454,00	167.753.454,00	110.583.454,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Aparatur		5.178.964.949,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bantul, Kasihan, Bangunjiwo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			25.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	2 Unit	0,00	0,00	11.780.000,00	11.780.000,00	Kab. Bantul, Kasihan, Bangunjiwo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			25.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bantul, Kasihan, Bangunjiwo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			5.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				12 Bulan	12 Bulan	11.315.847.000,00	11.315.847.000,00	11.306.392.600,00	-9.454.400,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Aparatur		11.925.536.500,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	Kab. Bantul, Kasihan, Bangunjiwo Kab. Sleman, Pakem, Pakembinangun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			2.000.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.1.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	133.879.000,00	133.879.000,00	133.879.000,00	0,00	Kab. Bantul, Kasihan, Bangunjiwo Kab. Sleman, Pakem, Pakembinangun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			150.000.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.1.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	1.233.352.000,00	1.233.352.000,00	1.233.352.000,00	0,00	Kab. Bantul, Kasihan, Bangunjiwo Kab. Sleman, Pakem, Pakembinangun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			1.200.000.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				12 Bulan	12 Bulan	2.111.105.450,00	2.277.083.038,00	3.746.550.938,00	1.635.445.488,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Aparatur		8.771.611.056,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.1.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				12 Unit	12 Unit	103.381.600,00	103.381.600,00	103.381.600,00	-16.800,00	Kab. Bantul, Kasihan, Bangunjiwo Kab. Sleman, Pakem, Pakembinangun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			100.000.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.1.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	1 Unit	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	Kab. Bantul, Kasihan, Bangunjiwo Kab. Sleman, Pakem, Pakembinangun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan tingkat kemiskinan			20.000.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.1.09.0010		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	27.957.000,00	27.957.000,00	27.957.000,00	0,00	Kab. Bantul, Kasihan, Bangunjiwo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			10.000.000,00	DINAS SOSIAL
2.	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Anak bermasalah sosial, Penyandang Disabilitas, Gelandangan, Pengemis, Lanjut Usia Terlantar, Wanita Bermasalah Sosial dan PKKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan meningkat/ dapat berfungsi sosial				22,58% Orang	22,58% Orang	46.391.172.500,00	46.389.533.500,00	46.375.364.500,00	12.302.368.098,00							58.693.540.598,00	
1.06.04.1.03		Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi lanjut usia terlantar melalui Panti Sosial (BPSTW)				200 Orang	200 Orang	33.947.090.650,00	33.947.090.650,00	34.017.426.650,00	70.336.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemerantasan kemiskinan.	Penurunan tingkat kemiskinan	Lanjut Usia Terlantar di BPSTW		36.308.502.790,00	DINAS SOSIAL
1.06.04.1.03.0001		Penyediaan Permakanan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi				200 Orang	200 Orang	2.133.744.000,00	2.133.744.000,00	2.133.744.000,00	0,00	Kab. Bantul, Kasihan, Bangunjiwo Kab. Sleman, Pakem, Pakembinangun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemerantasan kemiskinan.	Penurunan tingkat kemiskinan			2.300.000.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.04.1.03.0002		Penyediaan Sandang																		
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi				200 Orang	200 Orang	324.680.000,00	324.680.000,00	418.680.000,00	94.000.000,00	Kab. Bantul, Kasihan, Bangunjiwo Kab. Sleman, Pakem, Pakembinangun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemerantasan kemiskinan.	Penurunan tingkat kemiskinan			250.000.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.04.1.03.0003		Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses																		
			Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi				180 Orang	180 Orang	52.460.000,00	52.460.000,00	52.460.000,00	0,00	Kab. Bantul, Kasihan, Bangunjiwo Kab. Sleman, Pakem, Pakembinangun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemerantasan kemiskinan.	Penurunan tingkat kemiskinan			10.000.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.04.1.03.0005		Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi				180 Orang	180 Orang	86.280.000,00	86.280.000,00	84.280.000,00	-2.000.000,00	Kab. Bantul, Kasihan, Bangunjiwo Kab. Sleman, Pakem, Pakembinangun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemerantasan kemiskinan.	Penurunan tingkat kemiskinan			80.000.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.04.1.03.0006		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial																		
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi				180 Orang	180 Orang	82.575.000,00	82.575.000,00	82.575.000,00	0,00	Kab. Bantul, Kasihan, Bangunjiwo Kab. Sleman, Pakem, Pakembinangun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemerantasan kemiskinan.	Penurunan tingkat kemiskinan			30.000.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.04.1.03.0007		Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari																		
			Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi				180 Orang	180 Orang	224.640.000,00	224.640.000,00	224.640.000,00	0,00	Kab. Bantul, Kasihan, Bangunjiwo Kab. Sleman, Pakem, Pakembinangun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemerantasan kemiskinan.	Penurunan tingkat kemiskinan			250.000.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.04.1.03.0010		Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB			
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)				
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi				180 Orang	180 Orang	7.000.000,00	7.000.000,00	2.120.000,00	-4.880.000,00	Kab. Bantul, Kasihan, Bangunjiwo Kab. Sleman, Pakem, Pakembinangun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penurunan tingkat kemiskinan			25.000.000,00	DINAS SOSIAL			
1.06.04.1.03.0011		Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga																					
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi				6 Orang	6 Orang	4.140.000,00	4.140.000,00	4.140.000,00	0,00	Kab. Bantul, Kasihan, Bangunjiwo Kab. Sleman, Pakem, Pakembinangun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penurunan tingkat kemiskinan			10.000.000,00	DINAS SOSIAL			
1.06.04.1.03.0012		Pemulasaraan																					
			Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi				12 Orang	16 Orang	30.000.000,00	30.000.000,00	40.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Bantul, Kasihan, Bangunjiwo Kab. Sleman, Pakem, Pakembinangun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penurunan tingkat kemiskinan			100.000.000,00	DINAS SOSIAL			
<b>DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI</b>									<b>51.899.703.943,00</b>	<b>46.697.088.398,00</b>	<b>44.136.438.302,00</b>	<b>-7.763.265.641,00</b>							<b>119.596.243.341,00</b>				
2		<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>								<b>51.544.805.843,00</b>	<b>46.301.880.398,00</b>	<b>43.806.229.302,00</b>	<b>-7.738.576.541,00</b>							<b>118.996.243.341,00</b>			
2.07		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA</b>								<b>38.496.376.843,00</b>	<b>39.380.242.598,00</b>	<b>39.099.540.302,00</b>	<b>603.163.459,00</b>							<b>60.796.243.341,00</b>			
1.	2.07.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>								<b>89,00 Angka</b>	<b>89,00 Angka</b>	<b>35.056.827.243,00</b>	<b>34.917.323.598,00</b>	<b>35.464.400.578,00</b>	<b>5.662.189.098,00</b>							<b>40.719.016.341,00</b>	
	2.07.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	34.140.000,00	34.140.000,00	28.340.000,00	-5.800.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromartim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	OPD		125.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI			
2.07.01.1.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																					
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	14.145.000,00	14.145.000,00	11.445.000,00	-2.700.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromartim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			50.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI			
2.07.01.1.01.0004		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																					
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	9.990.000,00	9.990.000,00	8.490.000,00	-1.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromartim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			50.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI			
2.07.01.1.01.0007		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																					
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	2 Laporan	10.005.000,00	10.005.000,00	8.405.000,00	-1.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromartim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			25.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI			
2.07.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	terlaksananya kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah				-	1 Dokumen	27.844.241.847,00	27.719.319.202,00	28.366.253.282,00	522.011.435,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromartim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	OPD		29.221.381.480,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI			
2.07.01.1.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				178 Orang/ Bulan	169 Orang/ Bulan	27.746.902.247,00	27.621.979.602,00	28.276.913.682,00	530.011.435,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			29.000.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			75.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	2 Laporan	14.999.600,00	14.999.600,00	13.199.600,00	-1.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			20.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				14 Laporan	14 Laporan	20.000.000,00	20.000.000,00	18.000.000,00	-2.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			50.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	terlaksananya kegiatan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	60.893.400,00	60.893.400,00	59.993.400,00	-900.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	OPD		64.777.600,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			10.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	20.497.400,00	20.497.400,00	20.497.400,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			25.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai				1 Dokumen	1 Dokumen	16.499.000,00	16.499.000,00	9.899.000,00	-6.600.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	OPD		20.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				6 Dokumen	6 Dokumen	16.499.000,00	16.499.000,00	9.899.000,00	-6.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			20.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	terlaksananya kegiatan administrasi umum perangkat daerah				1 Tahun	1 Tahun	594.053.300,00	579.472.300,00	491.353.300,00	-102.700.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	OPD		1.583.829.055,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	29.996.000,00	29.996.000,00	29.996.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			50.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	42.232.000,00	42.232.000,00	42.232.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			75.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			30.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.07.01.1.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	25.339.050,00	25.339.050,00	25.339.050,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			50.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.07.01.1.06.0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	5.340.000,00	5.340.000,00	5.340.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			6.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.07.01.1.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	2 Laporan	199.992.000,00	194.697.000,00	132.547.000,00	-67.445.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			550.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.07.01.1.06.0011		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				6 Dokumen	2 Dokumen	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			300.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.07.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																		
			Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah				12 Bulan	12 Bulan	50.150.000,00	50.150.000,00	48.940.000,00	-1.210.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	OPD		870.950.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.07.01.1.07.0005		Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			50.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.07.01.1.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				11 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			50.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.07.01.1.07.0010		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				10 Unit	5 Unit	26.150.000,00	26.150.000,00	26.150.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			75.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.07.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																		
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				12 Bulan	12 Bulan	4.683.597.950,00	4.683.597.950,00	4.658.343.850,00	-25.254.100,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	OPD		5.174.535.690,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.07.01.1.08.0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	2 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			20.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.07.01.1.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	492.795.750,00	492.795.750,00	492.795.750,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			650.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.07.01.1.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	1.721.054.000,00	1.721.054.000,00	1.721.054.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			1.600.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.07.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																		
			Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				12 Bulan	12 Bulan	1.773.251.746,00	1.773.251.746,00	1.801.277.746,00	28.026.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	OPD		3.658.542.516,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.07.01.1.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	37.338.000,00	37.338.000,00	37.338.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			50.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.07.01.1.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizannya				37 Unit	37 Unit	581.417.400,00	581.417.400,00	581.417.400,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			600.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.07.01.1.09.0005		Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				11 Unit	11 Unit	5.426.000,00	5.426.000,00	5.426.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			15.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.07.01.1.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				58 Unit	28 Unit	39.997.000,00	39.997.000,00	39.997.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			75.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.07.01.1.09.0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	5 Unit	372.407.746,00	372.407.746,00	403.791.746,00	31.384.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			500.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
	2.07.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				46 Unit	46 Unit	27.646.000,00	27.646.000,00	27.646.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			50.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
2.	2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Jumlah kabupaten kota yang dibina dalam penyusunan RTK				5 kab/kota Kabupaten /Kota	5 kab/kota Kabupaten /Kota	77.118.500,00	77.118.500,00	63.318.500,00	-57.118.500,00							20.000.000,00		
	2.07.02.1.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro				1 Dokumen	1 Dokumen	77.118.500,00	77.118.500,00	63.318.500,00	-13.800.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	OPD		20.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
	2.07.02.1.01.0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro																			
			Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro				1 Dokumen	1 Dokumen	77.118.500,00	77.118.500,00	63.318.500,00	-13.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			20.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
3.	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase SDM K3 yang dilatih yang tersertifikasi Persentase peserta magang yang ditempatkan Persentase jumlah angkatan kerja yang kompeten Persentase tenaga kerja yang produktivitasnya diatas standar Persentase peserta pelatihan yang yang terampil Jumlah tenaga kerja yang kompeten				-	100% 60% 80% 90% 96% na % % % % % Orang	1.467.622.600,00	2.215.524.000,00	1.683.711.724,00	15.600.104.400,00							17.067.727.000,00		
	2.07.03.1.01	Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah peserta yang mendapatkan pelatihan SDM K3 Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi pada Tahun -n				20 Orang	255 Orang 412 Orang	1.312.225.600,00	2.048.321.000,00	1.592.219.724,00	279.994.124,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM	Masyarakat		16.897.727.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
	2.07.03.1.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi																			
			Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n				20 Orang	256 Orang	28.202.000,00	364.628.000,00	344.189.000,00	315.987.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM			30.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
	2.07.03.1.02	Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang Terakreditasi sampai dengan tahun n				-	2 Lembaga	55.404.000,00	55.404.000,00	20.004.000,00	-35.400.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM	Masyarakat		70.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
	2.07.03.1.02.0001	Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja																			
			Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang Terakreditasi				8 LPK	2 LPK	55.404.000,00	55.404.000,00	20.004.000,00	-35.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM			70.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
4.	2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase perluasan kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat yang terfasilitasi				90 %	90 %	487.673.000,00	625.125.000,00	494.721.000,00	463.827.000,00							951.500.000,00	
	2.07.04.1.01	Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan Melalui layanan AKAD, AKL dan ULD sampai dengan tahun - n				7000 Orang	7198 Orang	259.133.000,00	266.413.000,00	159.284.000,00	-99.849.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Masyarakat		441.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.1.01.0002	Pelayanan Antar Kerja																		
			Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan Melalui layanan AKAD, AKL dan ULD				50 Orang	25 Orang	34.080.000,00	34.080.000,00	25.050.000,00	-9.030.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			50.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja																		
			Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan				150 Orang	90 Orang	31.468.000,00	31.468.000,00	19.548.000,00	-11.920.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			35.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.1.01.0004	Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) dan AKL (Antar Kerja Lokal)																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD dan AKL				100 Orang	73 Orang	68.585.000,00	69.585.000,00	38.370.000,00	-30.215.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			100.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.1.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja																		
			Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja				20 Orang	10 Orang	125.000.000,00	131.280.000,00	76.316.000,00	-48.684.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			256.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.1.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online				1 Dokumen	1 Dokumen	174.990.000,00	281.270.000,00	290.170.000,00	115.180.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Masyarakat		185.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.1.03.0001	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online																		
			Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online				1 Dokumen	1 Dokumen	37.740.000,00	137.740.000,00	135.940.000,00	98.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			40.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.1.03.0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja Yang Terdaftar Dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (KarirHub)				540 Orang	540 Orang	18.050.000,00	18.050.000,00	16.550.000,00	-1.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			20.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.1.03.0003	Job Fair/Bursa Kerja																		
			Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja				50 Orang	100 Orang	119.200.000,00	125.480.000,00	137.680.000,00	18.480.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			125.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.1.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi	Jumlah CPMI/PMI yang dilindungi dan ditingkatkan kompetensinya				0 Orang	120 Orang	53.550.000,00	77.442.000,00	45.267.000,00	-8.283.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	OPD		325.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.1.04.0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)																		
			Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya				125 Orang	120 Orang	53.550.000,00	77.442.000,00	45.267.000,00	-8.283.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			75.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.1.04.0004	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan																		
			Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			250.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
5.	2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase jumlah layanan yang terselesaikan				98 %	98 %	402.628.800,00	498.860.800,00	429.347.800,00	169.371.200,00							572.000.000,00	
	2.07.05.1.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Perselisihan yang Dicegah sampai dengan tahun - n				210 Perkara	231 Perkara	163.373.000,00	183.265.000,00	149.875.000,00	-13.498.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Masyarakat, Pekerja dan Pengusaha		272.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.1.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi																		
			Jumlah Perselisihan yang Dicegah				240 Perkara	191 Perkara	74.853.000,00	94.745.000,00	76.355.000,00	1.502.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			100.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.1.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Perkara Perselisihan yang Terealisasi				10 Perkara	10 Perkara	11.520.000,00	11.520.000,00	10.520.000,00	-1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN PAD	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pengembangan ekonomi yang layak			50.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.1.02.0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Provinsi																		
			Jumlah LKS Tripartit yang Dibina				1 Lembaga	1 Lembaga	57.000.000,00	57.000.000,00	53.000.000,00	-4.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN PAD	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pengembangan ekonomi yang layak			100.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.1.02.0005	Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi																		
			Jumlah Perusahaan yang Mendapatkan Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi				40 Perusahaan	40 Perusahaan	20.000.000,00	20.000.000,00	10.000.000,00	-10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN PAD	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			22.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.1.03	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)	Jumlah Penetapan UMP				-	1 SK Angka	239.255.800,00	315.595.800,00	279.472.800,00	40.217.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Masyarakat, Pekerja dan Pengusaha		300.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.1.03.0001	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)																		
			Jumlah Penetapan UMP				1 Surat Keputusan	1 Surat Keputusan	120.207.200,00	120.207.200,00	103.567.200,00	-16.640.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN PAD	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			150.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.1.03.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja																		
			Jumlah Tenaga Kerja yang Terdapat dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan				300 Orang	200 Orang	119.048.600,00	195.388.600,00	175.905.600,00	56.857.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN PAD	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			150.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
6.	2.07.06	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	Persentase jumlah pengawasan norma kerja yang terselesaikan Persentase jumlah pemohon yang terlayani pengujian lingkungan kerja dan pemeriksaan kesehatan kerja Persentase jumlah pengawasan norma K3 yang terselesaikan Jumlah perusahaan yang menerapkan norma kerja dan norma k3				-	70% 89,00% 95% n/a % % % Perusahaan	1.004.506.700,00	1.046.290.700,00	964.040.700,00	461.493.300,00							1.466.000.000,00	
	2.07.06.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3 Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma K3 sampai dengan tahun - n Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Kerja sampai dengan tahun - n				-	15 Perusahaan 350 Perusahaan 70 Perusahaan	1.004.506.700,00	1.046.290.700,00	964.040.700,00	-40.466.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Masyarakat, Pekerja dan Pengusaha		1.466.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.06.1.01.0001	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA)				450 Perusa haan	420 Perusa haan	300.000.000,00	334.978.000,00	307.123.000,00	7.123.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromartim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			400.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							13.048.429.000,00	6.921.637.800,00	4.706.689.000,00	-8.341.740.000,00							58.200.000.000,00	
1.	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase jumlah angkatan kerja yang terfasilitasi pemahaman budaya kerja Persentase peningkatan kesejahteraan pekerja melalui sistem pengupahan Persentase jumlah angkatan kerja yang kompeten				100% 32% 80% %	100% 32% 80% %	13.048.429.000,00	6.921.637.800,00	4.706.689.000,00	45.151.571.000,00							58.200.000.000,00	
	2.22.08.5.09	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Jumlah Dokumen Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya				8 Dokumen	7 Dokumen	13.048.429.000,00	6.921.637.800,00	4.706.689.000,00	-8.341.740.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggandisabilitas.	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Masyarakat, Pekerja dan Pengusaha		58.200.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.22.08.5.09.0021	Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya																		
			Jumlah Dokumen Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya				8 Dokumen	7 Dokumen	6.164.563.000,00	3.455.250.000,00	2.544.021.600,00	-3.620.541.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggandisabilitas.	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			7.000.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.22.08.5.09.0022	Revitalisasi Budaya Gotong Royong Untuk Pemberdayaan Ekonomi Desa																		
			Jumlah Laporan Revitalisasi Budaya Gotong Royong Untuk Pemberdayaan Ekonomi Desa				2 Laporan	2 Laporan	5.922.751.000,00	2.744.150.000,00	1.469.905.000,00	-4.452.846.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggandisabilitas.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			50.000.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							240.000.000,00	280.310.000,00	215.311.000,00	-24.689.000,00							450.000.000,00	
	3.32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI							240.000.000,00	280.310.000,00	215.311.000,00	-24.689.000,00							450.000.000,00	
1.	3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase calon transmigrasi yang ditempatkan				78% %	78% %	240.000.000,00	280.310.000,00	215.311.000,00	210.000.000,00							450.000.000,00	
	3.32.03.1.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah transmigran yang ditempatkan				20 KK	20 KK	240.000.000,00	280.310.000,00	215.311.000,00	-24.689.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Masyarakat		450.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.03.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				1 Laporan	2 Laporan	70.000.000,00	76.280.000,00	55.395.000,00	-14.605.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			200.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.03.1.01.0004	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi																		
			Jumlah Transmigran yang Ditempatkan				20 Kepala Keluarga	20 Kepala Keluarga	170.000.000,00	204.030.000,00	159.916.000,00	-10.084.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			250.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		BALAI LATIHAN KERJA DAN PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS																		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							51.899.703.943,00	46.697.088.398,00	44.136.438.302,00	-7.763.265.641,00							119.596.243.341,00	
	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA							38.496.376.843,00	39.380.242.598,00	39.099.540.302,00	603.163.459,00							60.796.243.341,00	
1.	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				-	89,00 Angka	35.056.827.243,00	34.917.323.598,00	35.464.400.578,00	5.662.189.098,00							40.719.016.341,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.07.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	terlaksananya kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah				-	12 Dokumen	27.844.241.847,00	27.719.319.202,00	28.366.253.282,00	522.011.435,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	OPD		29.221.381.480,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	17.340.000,00	17.340.000,00	17.340.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			43.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah				-	4 Laporan	60.893.400,00	60.893.400,00	59.993.400,00	-900.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	OPD		64.777.600,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	4 Laporan	19.176.000,00	19.176.000,00	19.176.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			17.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah				-	1 Tahun	594.053.300,00	579.472.300,00	491.353.300,00	-102.700.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	OPD		1.583.829.055,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	19.945.400,00	19.945.400,00	19.945.400,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			65.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	12.592.200,00	12.592.200,00	12.592.200,00	0,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			14.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	19.985.000,00	19.985.000,00	19.985.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			36.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	14.999.950,00	14.999.950,00	14.999.950,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			28.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	7.512.000,00	7.512.000,00	6.612.000,00	-900.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			8.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	49.924.000,00	40.638.000,00	25.494.000,00	-24.430.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			120.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				-		50.150.000,00	50.150.000,00	48.940.000,00	-1.210.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	OPD		870.950.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				22 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			350.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-	12 Bulan	4.683.597.950,00	4.683.597.950,00	4.658.343.850,00	-25.254.100,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	OPD		5.174.535.690,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			5.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				0 Laporan	3 Laporan	202.264.200,00	202.264.200,00	175.410.100,00	-26.854.100,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			235.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	1.590.691.000,00	1.590.691.000,00	1.590.691.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			1.600.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.07.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-	12 Bulan	1.773.251.746,00	1.773.251.746,00	1.801.277.746,00	28.026.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	OPD		3.658.542.516,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Periznannya				12 Unit	12 Unit	136.438.600,00	136.438.600,00	133.080.600,00	-3.358.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			165.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				83 Unit	83 Unit	19.680.000,00	19.680.000,00	19.680.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			38.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				32 Unit	32 Unit	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			137.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				18 Unit	18 Unit	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			1.500.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				16 Unit	16 Unit	19.348.000,00	19.348.000,00	19.348.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			160.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase SDM K3 yang dilatih yang tersertifikasi Persentase peserta magang yang ditempatkan Persentase jumlah angkatan kerja yang kompeten Persentase tenaga kerja yang produktivitasnya diatas standar Persentase peserta pelatihan yang terampil Jumlah tenaga kerja yang kompeten				-	100% 60% 80% 90% 96% n/a % % % % % Orang	1.467.622.600,00	2.215.524.000,00	1.683.711.724,00	15.600.104.400,00							17.067.727.000,00	
	2.07.03.1.01	Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Kluster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi pada Tahun -n				-	156 Orang	1.312.225.600,00	2.048.321.000,00	1.592.219.724,00	279.994.124,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM	Masyarakat		16.897.727.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.03.1.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Kluster Kompetensi																		
			Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n				64 Orang	156 Orang	1.000.038.200,00	1.266.078.600,00	836.096.324,00	-163.941.876,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM			15.000.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.03.1.01.0003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja																		
			Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan kerja				870 Unit	6 Unit	30.000.400,00	30.000.400,00	30.000.400,00	0,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			1.500.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.03.1.04	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah				-	5 Dokumen	99.993.000,00	111.799.000,00	71.488.000,00	-28.505.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM	Pekerja dan Perusahaan		100.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.03.1.04.0001	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan daya saing Tenaga Kerja di Tingkat daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	99.993.000,00	111.799.000,00	71.488.000,00	-28.505.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM			100.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							13.048.429.000,00	6.921.637.800,00	4.706.689.000,00	-8.341.740.000,00							58.200.000.000,00	
1.	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase jumlah angkatan kerja yang terfasilitasi pemahaman budaya kerja Persentase peningkatan kesejahteraan pekerja melalui sistem pengupahan Persentase jumlah angkatan kerja yang kompeten Jumlah angkatan kerja yang diintervensi melalui pemberdayaan dan pengembangan budaya kerja istimewa				-	100% 32% 80% n/a % % % Orang	13.048.429.000,00	6.921.637.800,00	4.706.689.000,00	45.151.571.000,00							58.200.000.000,00	
	2.22.08.5.09	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Jumlah Dokumen Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya				-	7 Dokumen	13.048.429.000,00	6.921.637.800,00	4.706.689.000,00	-8.341.740.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Masyarakat, Pekerja dan Pengusaha		58.200.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.22.08.5.09.0017	Pengembangan Kewirausahaan Desa																		
			Jumlah Laporan Pengembangan Kewirausahaan Desa				1 Laporan	1 Laporan	961.115.000,00	722.237.800,00	692.762.400,00	-268.352.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			1.200.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							114.898.100,00	114.898.000,00	114.898.000,00	-100,00							150.000.000,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							114.898.100,00	114.898.000,00	114.898.000,00	-100,00							150.000.000,00	
1.	4.01.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase capaian implementasi inovasi layanan publik				-	80 %	114.898.100,00	114.898.000,00	114.898.000,00	35.101.900,00							150.000.000,00	
	4.01.10.5.02	Peningkatan Budaya Pemerintahan	Tercapainya peningkatan implementasi budaya pemerintahan				-	100 %	114.898.100,00	114.898.000,00	114.898.000,00	-100,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Masyarakat, Pekerja dan Pengusaha		150.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	4.01.10.5.02.0001	Implementasi Budaya Pemerintahan DIY																		
			Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan DIY				1 Dokumen	1 Dokumen	114.898.100,00	114.898.000,00	114.898.000,00	-100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			150.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		BALAI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA							51.899.703.943,00	46.697.088.398,00	44.136.438.302,00	-7.763.265.641,00							119.596.243.341,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							51.544.805.843,00	46.301.880.398,00	43.806.229.302,00	-7.738.576.541,00							118.996.243.341,00	
	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA							38.496.376.843,00	39.380.242.598,00	39.099.540.302,00	603.163.459,00							60.796.243.341,00	
1.	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				89,00 Angka	89,00 Angka	35.056.827.243,00	34.917.323.598,00	35.464.400.578,00	5.662.189.098,00							40.719.016.341,00	
	2.07.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	terlaksananya kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	27.844.241.847,00	27.719.319.202,00	28.366.253.282,00	522.011.435,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	OPD		29.221.381.480,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				6 Dokumen	6 Dokumen	15.000.000,00	15.000.000,00	10.800.000,00	-4.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			33.381.480,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	terlaksananya kegiatan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	60.893.400,00	60.893.400,00	59.993.400,00	-900.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	OPD		64.777.600,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	11.220.000,00	11.220.000,00	10.320.000,00	-900.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			12.777.600,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	terlaksananya kegiatan administrasi umum perangkat daerah				1 Tahun	1 Tahun	594.053.300,00	579.472.300,00	491.353.300,00	-102.700.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	OPD		1.583.829.055,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	12.072.000,00	12.072.000,00	12.072.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			13.310.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.845.700,00	10.845.700,00	10.845.700,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			120.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	11.324.000,00	11.324.000,00	11.324.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			12.708.920,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.890.000,00	10.890.000,00	9.290.000,00	-1.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			11.979.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			3.231.135,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	16.064.000,00	16.064.000,00	7.739.000,00	-8.325.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			90.100.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah				12 Bulan	12 Bulan	50.150.000,00	50.150.000,00	48.940.000,00	-1.210.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	OPD		870.950.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	3.230.000,00	3.230.000,00	3.230.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	20.770.000,00	20.770.000,00	19.560.000,00	-1.210.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			345.950.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				12 Bulan	12 Bulan	4.683.597.950,00	4.683.597.950,00	4.658.343.850,00	-25.254.100,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	OPD		5.174.535.690,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	2.135.000,00	2.135.000,00	2.135.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			2.349.215,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	121.146.000,00	121.146.000,00	121.146.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			188.640.527,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	545.512.000,00	545.512.000,00	547.112.000,00	1.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			873.545.948,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	2.07.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				12 Bulan	12 Bulan	1.773.251.746,00	1.773.251.746,00	1.801.277.746,00	28.026.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	OPD		3.658.542.516,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
	2.07.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinan				15 Unit	15 Unit	201.079.000,00	201.079.000,00	192.579.000,00	-8.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			231.666.805,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
	2.07.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15 Unit	15 Unit	62.170.000,00	62.170.000,00	62.170.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			73.537.750,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
	2.07.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				-	1 Unit	0,00	0,00	8.500.000,00	8.500.000,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Keparakan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			10.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
	2.07.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	5 Unit	20.304.000,00	20.304.000,00	20.304.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			53.337.961,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
2.	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase SDM K3 yang dilatih yang tersertifikasi				100 %	100 %	1.467.622.600,00	2.215.524.000,00	1.683.711.724,00	15.600.104.400,00							17.067.727.000,00		
	2.07.03.1.01	Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Kluster Kompetensi	Jumlah peserta yang mendapatkan pelatihan SDM K3				150 Orang	255 Orang	1.312.225.600,00	2.048.321.000,00	1.592.219.724,00	279.994.124,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM	Masyarakat		16.897.727.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
	2.07.03.1.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Kluster Kompetensi																			
			Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n				150 Orang	255 Orang	253.985.000,00	387.614.000,00	381.934.000,00	127.949.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM			367.727.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
3.	2.07.06	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	Persentase jumlah pemohon yang terlayani pengujian lingkungan kerja dan pemeriksaan kesehatan kerja				89,00 %	89,00 %	1.004.506.700,00	1.046.290.700,00	964.040.700,00	461.493.300,00							1.466.000.000,00		
	2.07.06.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3				15 Perusahaan	15 Perusahaan	1.004.506.700,00	1.046.290.700,00	964.040.700,00	-40.466.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Masyarakat		1.466.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
	2.07.06.1.01.0003	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan																			
			Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3				15 Perusahaan	15 Perusahaan	704.506.700,00	711.312.700,00	656.917.700,00	-47.589.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			1.066.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK																			
									21.224.956.555,00	21.675.976.304,00	19.756.749.003,00	-1.468.207.552,00							48.922.269.141,00		
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							21.224.956.555,00	21.675.976.304,00	19.756.749.003,00	-1.468.207.552,00							48.922.269.141,00		
	2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							14.101.300.728,00	18.043.703.778,00	17.164.596.903,00	3.063.296.175,00							26.164.056.641,00		
1.	2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				87,82-90,01 Nilai	87,82-90,01 Nilai	13.021.571.928,00	12.980.249.978,00	12.335.743.103,00	3.761.657.628,00							16.783.229.556,00		
	2.08.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah				8 Dokumen	8 Dokumen	68.441.810,00	68.441.810,00	44.256.600,00	-24.185.210,00			-	-		Provinsi DI Yogyakarta		139.150.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	2.08.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	28.249.810,00	28.249.810,00	15.364.700,00	-12.885.110,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			54.450.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK	
	2.08.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																			
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	15.205.000,00	15.205.000,00	9.955.000,00	-5.250.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			42.350.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK	
	2.08.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																			
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	5 Laporan	24.987.000,00	24.987.000,00	18.936.900,00	-6.050.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			42.350.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK	
	2.08.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya tugas administrasi keuangan perangkat daerah dalam 1 tahun				20 Laporan	20 Laporan	8.536.739.168,00	8.512.058.218,00	8.542.625.653,00	5.886.485,00			-	-	Provinsi DI Yogyakarta		11.206.427.216,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK	
	2.08.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				79 Orang/ Bulan	79 Orang/ Bulan	8.485.018.568,00	8.460.337.618,00	8.490.905.053,00	5.886.485,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			11.100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK	
	2.08.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	16.096.200,00	16.096.200,00	16.096.200,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			60.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK	
	2.08.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																			
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	3.426.000,00	3.426.000,00	3.426.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			4.077.216,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK	
	2.08.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																			
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	18 Laporan	32.198.400,00	32.198.400,00	32.198.400,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			42.350.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK	
	2.08.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terpenuhinya laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	13.330.000,00	13.330.000,00	13.330.000,00	0,00			-	-	Provinsi DI Yogyakarta		40.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK	
	2.08.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																			
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	13.330.000,00	13.330.000,00	13.330.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			40.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK	
	2.08.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya kebutuhan administrasi umum perangkat daerah				5 Laporan	5 Laporan	385.198.250,00	368.557.250,00	139.028.150,00	-246.170.100,00			-	-	Provinsi DI Yogyakarta		983.882.340,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK	
	2.08.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	54.353.300,00	54.353.300,00	38.431.300,00	-15.922.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK	
	2.08.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	15.000.000,00	15.000.000,00	14.998.900,00	-1.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			90.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.08.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	37.573.000,00	37.573.000,00	15.773.000,00	-21.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			69.882.340,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.08.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	8.865.000,00	8.865.000,00	8.865.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			85.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.08.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				6 Dokumen	5 Dokumen	11.124.000,00	11.124.000,00	6.890.000,00	-4.234.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			30.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.08.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	2 Laporan	257.283.000,00	240.642.000,00	53.070.000,00	-204.213.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			500.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.08.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	999.950,00	999.950,00	999.950,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			109.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.08.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																		
			Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana kantor				1 Laporan	1 Laporan	545.853.000,00	545.853.000,00	241.615.000,00	-304.238.000,00					Provinsi DI Yogyakarta		745.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.08.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Paket	1 Paket	147.298.000,00	147.298.000,00	13.410.000,00	-133.888.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			45.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.08.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				23 Unit	17 Unit	228.305.000,00	228.305.000,00	193.945.000,00	-34.360.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			650.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.08.01.1.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud																		
			Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.08.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				14 Unit	3 Unit	170.250.000,00	170.250.000,00	34.260.000,00	-135.990.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.08.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																		
			Terpenuhinya kebutuhan penunjang operasional kantor				3 Laporan	3 Laporan	2.077.365.700,00	2.077.365.700,00	1.983.228.700,00	-94.137.000,00					Provinsi DI Yogyakarta		2.283.270.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.08.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	2 Laporan	6.118.000,00	6.118.000,00	1.900.000,00	-4.218.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			26.620.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.08.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	481.532.700,00	481.532.700,00	391.622.700,00	-89.910.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			786.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.08.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	1.589.715.000,00	1.589.715.000,00	1.589.706.000,00	-9.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.470.150.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.08.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	terpeliharannya barang milik daerah penunjang operasional kantor				4 Laporan	4 Laporan	1.394.644.000,00	1.394.644.000,00	1.371.659.000,00	-22.985.000,00			-	-	Provinsi DI Yogyakarta		1.385.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.08.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	38.296.000,00	38.296.000,00	38.296.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			425.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.08.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				18 Unit	18 Unit	313.906.300,00	313.906.300,00	291.686.300,00	-22.220.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.08.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				79 Unit	79 Unit	95.700.000,00	95.700.000,00	95.700.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.08.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	1 Unit	859.227.700,00	859.227.700,00	859.212.700,00	-15.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			650.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.08.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				104 Unit	103 Unit	87.514.000,00	87.514.000,00	86.764.000,00	-750.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			110.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
2.	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase perempuan pengambilan keputusan di ranah publik				38,9 %	38,9 %	291.000.000,00	461.550.000,00	345.258.000,00	1.095.005.845,00							1.386.005.845,00	
	2.08.02.1.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	Jumlah OPD dengan anggaran responsif gender				37 OPD	37 OPD	40.500.000,00	40.500.000,00	31.650.000,00	-8.850.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM	Provinsi DI Yogyakarta		186.237.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.08.02.1.01.0006	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi																		
			Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG tingkat provinsi				5 Laporan	5 Laporan	40.000.000,00	40.000.000,00	31.150.000,00	-8.850.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM			170.730.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.08.02.1.01.0007	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi																		
			Jumlah SDM tingkat Provinsi yang memperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG				1 Dokumen	1 Dokumen	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM			15.507.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.08.02.1.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Provinsi	Persentase perempuan KEP Desa Prima yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan di tingkat Kalurahan/Kabupaten/Propinsi				14 %	14 %	200.000.000,00	370.550.000,00	299.540.000,00	99.540.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM	Provinsi DI Yogyakarta		1.109.018.845,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.08.02.1.02.0004	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi																		
			Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media tingkat provinsi yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi				10 Lembaga	10 Lembaga	200.000.000,00	370.550.000,00	299.540.000,00	99.540.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM			1.109.018.845,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.08.02.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Fasilitasi Organisasi Perempuan pendukung PPPA				3 Organisasi	3 Organisasi	50.500.000,00	50.500.000,00	14.068.000,00	-36.432.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM	Provinsi DI Yogyakarta		90.750.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.08.02.1.03.0004	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi																		
			Jumlah LPLPP (Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan) dalam bentuk & Pusat Pembelajaran Perempuan & (PUTARAN) yang terstandarisasi tingkat Provinsi				3 Lembaga	3 Lembaga	50.000.000,00	50.000.000,00	13.568.000,00	-36.432.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.08.02.1.03.0005	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi																		
			Jumlah perempuan SIAP (Suara dan Aksi Perempuan Pelopor) di bidang Ekonomi/Estaria/Selaku/Pintar/Kapemim pinaan/Hukum pd LPLPP Tingkat Provinsi				60 Orang	60 Orang	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM			90.750.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
3.	2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Kebijakan dan Dokumen Koordinasi Perlindungan Perempuan yang di Implementasikan dengan baik				100 %	100 %	717.500.000,00	3.997.918.100,00	3.997.918.100,00	2.422.024.120,00							3.139.524.120,00	
	2.08.03.1.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kebijakan yang tersusun				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	45.461.100,00	45.461.100,00	44.461.100,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM	Provinsi DI Yogyakarta		437.268.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.08.03.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi				1 Dokumen	1 Dokumen	500.000,00	44.961.100,00	44.961.100,00	44.461.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM			37.268.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.08.03.1.01.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi				5 Perangkat Daerah	5 Perangkat Daerah	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM			400.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.08.03.1.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penerima manfaat				130 Orang	130 Orang	715.500.000,00	3.891.867.000,00	3.891.867.000,00	3.176.367.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM	Provinsi DI Yogyakarta		2.237.256.120,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.08.03.1.02.0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan Masyarakat				1 Orang	1 Orang	715.000.000,00	715.000.000,00	715.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM			1.772.650.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.08.03.1.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi																		
			Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi				3 Layanan	3 Layanan	500.000,00	3.176.867.000,00	3.176.867.000,00	3.176.367.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK-PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM			464.606.120,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.08.03.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	jumlah jejaring antar lembaga yang terfasilitasi				3 Organisasi	3 Organisasi	1.000.000,00	60.590.000,00	60.590.000,00	59.590.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM	Provinsi DI Yogyakarta		465.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.08.03.1.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi																		
			Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas				30 Orang	30 Orang	500.000,00	60.090.000,00	60.090.000,00	59.590.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM			65.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.08.03.1.03.0004	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				4 Dokumen	4 Dokumen	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM			400.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
4.	2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Jumlah kebijakan peningkatan kualitas keluarga di DIY yang di implementasikan dengan baik				2 Dokumen	2 Dokumen	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	1.250.500.000,00							1.253.000.000,00	
	2.08.04.1.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Peningkatan legalitas keluarga dan pemenuhan hak sipi anak				97,8 %	97,8 %	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM	Provinsi DI Yogyakarta		491.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.08.04.1.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota				52 Perangkat Daerah	52 Perangkat Daerah	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM			91.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.08.04.1.01.0002	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Provinsi																		
			Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi yang Tersedia				2 Dokumen	2 Dokumen	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM			400.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.08.04.1.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Fasilitasi lembaga pendukung peningkatan kualitas keluarga				3 Lembaga	3 Lembaga	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM	Provinsi DI Yogyakarta		481.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.08.04.1.02.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi																		
			Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan				5 Lembaga	5 Lembaga	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM			181.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.08.04.1.02.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi																		
			Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas				50 Orang	50 Orang	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM			300.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.08.04.1.03	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga layanan yang terfasilitasi				1 Lembaga	1 Lembaga	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM	Provinsi DI Yogyakarta		280.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.08.04.1.03.0001	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Layanan Komprehensif bagi keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				2 Layanan	2 Layanan	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM			280.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
5.	2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase Sistem Data Gender dan Anak yang dikelola dengan baik				100 %	100 %	1.000.000,00	1.000.000,00	250.000,00	362.000.000,00							363.000.000,00	
	2.08.05.1.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	Update Data Gender dan Anak serta data Perlindungan perempuan dan Anak				2 Dokumen	2 Dokumen	1.000.000,00	1.000.000,00	250.000,00	-750.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM	Provinsi DI Yogyakarta		363.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	2.08.05.1.01.0001	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi																			
			Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia				2 Dokumen	2 Dokumen	500.000,00	500.000,00	125.000,00	-375.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM			211.750.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK	
	2.08.05.1.01.0002	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi																			
			Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi				3 Dokumen	3 Dokumen	500.000,00	500.000,00	125.000,00	-375.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM			151.250.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK	
6.	2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase lembaga layanan yang memenuhi standar				100 %	100 %	65.228.800,00	351.080.800,00	233.522.800,00	884.771.200,00							950.000.000,00		
	2.08.06.1.01	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Jumlah Kab/Kota yang mendapatkan pembinaan				5 Kab/Kota	5 Kab/Kota	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM	Provinsi DI Yogyakarta		550.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK	
	2.08.06.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi																			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi				1 Dokumen	1 Dokumen	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM			250.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK	
	2.08.06.1.01.0003	Advokasi, Sosialisasi dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi																			
			jumlah perangkat daerah yang mempunyai dokumen pembangunan daerah yang responsif hak anak dan berperan aktif dalam Gugus Tugas KLA tingkat Provinsi yang berfungsi				16 perangkat daerah	16 perangkat daerah	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM			300.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK	
	2.08.06.1.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah lembaga layanan yang mendapat pembinaan ramah anak				42 Lembaga	42 Lembaga	64.228.800,00	350.080.800,00	232.522.800,00	168.294.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM	Provinsi DI Yogyakarta		400.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK	
	2.08.06.1.02.0001	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi																			
			Jumlah anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi				120 Orang	120 Orang	4.000.000,00	289.852.000,00	216.805.000,00	212.805.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM			50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK	
	2.08.06.1.02.0005	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kegiatan kerjasama antar Lembaga penyedia layanan pemenuhan hak anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota				1 Kegiatan	1 Kegiatan	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM			250.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.08.06.1.02.0006	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak																		
			Jumlah kegiatan KIE Pemenuhan Hak Anak				6 Kegiatan	6 Kegiatan	59.728.800,00	59.728.800,00	15.217.800,00	-44.511.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM			100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
7.	2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak korban kekerasan yang dilayani				100 %	100 %	2.500.000,00	249.404.900,00	249.404.900,00	2.286.797.120,00							2.289.297.120,00	
	2.08.07.1.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	500.000,00	86.038.900,00	86.038.900,00	85.538.900,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM	Provinsi DI Yogyakarta		60.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.08.07.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi				1 Dokumen	1 Dokumen	500.000,00	86.038.900,00	86.038.900,00	85.538.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM			60.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.08.07.1.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah penerima manfaat				47 Orang	47 Orang	1.000.000,00	133.556.000,00	133.556.000,00	132.556.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM	Provinsi DI Yogyakarta		1.259.697.120,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.08.07.1.02.0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi																		
			Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan Kewenangan Provinsi				40 Orang	40 Orang	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM			907.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.08.07.1.02.0007	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK Kewenangan Provinsi																		
			Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan Kewenangan Provinsi				3 Layanan	3 Layanan	500.000,00	133.056.000,00	133.056.000,00	132.556.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM			352.197.120,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.08.07.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	29.810.000,00	29.810.000,00	28.810.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM	Provinsi DI Yogyakarta		969.600.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	2.08.07.1.03.0007	Penyediaan Bantuan kebutuhan khusus bagi AMPK Kewenangan Provinsi																			
			Jumlah AMPK yang memperoleh Bantuan Kebutuhan Khusus Kewenangan Provinsi				1 Orang	1 Orang	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM			62.100.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK	
	2.08.07.1.03.0008	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK Kewenangan																			
			Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK Kewenangan Provinsi				56 Orang	56 Orang	500.000,00	29.310.000,00	29.310.000,00	28.810.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM			907.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK	
	2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA							109.936.326,00	309.936.326,00	262.947.600,00	153.011.274,00							2.858.212.500,00		
1.	2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	PERSENTASE MASYARAKAT YANG TERPAPAR ISI PESAN PROGRAM KKBPK / BANGGA KENCANA (ADVOKASI dan KIE)				76,5 %	76,5 %	63.436.326,00	63.436.326,00	55.536.300,00	1.241.563.674,00							1.305.000.000,00		
	2.14.02.1.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah Forum yang terfasilitasi				1 Forum	1 Forum	63.436.326,00	63.436.326,00	55.536.300,00	-7.900.026,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM	Provinsi DI Yogyakarta		1.305.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK	
	2.14.02.1.01.0003	Advokasi dan Sosialisasi GDPK																			
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Advokasi dan Sosialisasi GDPK				1 Laporan	1 Laporan	62.436.326,00	62.436.326,00	54.536.300,00	-7.900.026,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM			652.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK	
	2.14.02.1.01.0007	Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA, Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat																			
			Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA, Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM			302.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK	
	2.14.02.1.01.0017	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)																			
			Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)				1 Dokumen	1 Dokumen	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM			350.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK	
2.	2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR)				56,2 %	56,2 %	4.500.000,00	204.500.000,00	201.700.000,00	968.375.000,00							972.875.000,00		
	2.14.03.1.01	Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah materi kampanye KB/Kespro yang tersusun				3 Paket	3 Paket	4.000.000,00	204.000.000,00	201.200.000,00	197.200.000,00			-	Peningkatan kualitas SDM	Provinsi DI Yogyakarta		625.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK	
	2.14.03.1.01.0010	Fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangga Kencana																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)				-	1 Daerah	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	-	Peningkatan kualitas SDM			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.14.03.1.01.0012	Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja																		
			Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja				5 Daerah	5 Daerah	4.000.000,00	4.000.000,00	1.200.000,00	-2.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM			625.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.14.03.1.02	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesetaraan Ber-KB	Jumlah kegiatan pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan pelayanan dan pembinaan kesetaraan ber KB				3 Kali	3 Kali	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM	Provinsi DI Yogyakarta		347.875.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.14.03.1.02.0002	Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi KeMasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesetaraan Ber-KB																		
			Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi KeMasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesetaraan Ber-KB				5 Organisasi	5 Organisasi	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM			347.875.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
3.	2.14.04	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</b>	<b>Persentase kelompok kegiatan bagi keluarga yang aktif</b>				<b>0,40 %</b>	<b>0,40 %</b>	<b>42.000.000,00</b>	<b>42.000.000,00</b>	<b>5.711.300,00</b>	<b>538.337.500,00</b>							<b>580.337.500,00</b>	
	2.14.04.1.01	Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jenis kelompok kegiatan bagi keluarga yang mendapatkan pembinaan dan penguatan kelembagaan				5 Jenis	5 Jenis	42.000.000,00	42.000.000,00	5.711.300,00	-36.288.700,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM	Provinsi DI Yogyakarta		580.337.500,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.14.04.1.01.0003	Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga				1 Dokumen	1 Dokumen	40.500.000,00	40.500.000,00	4.211.300,00	-36.288.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM			363.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.14.04.1.01.0018	Pengembangan dan Perbanyak Materi Substansi Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R), Media Promosi, Alat Permainan Edukatif Remaja, dan Sarana Prasarana Lainnya yang Dibutuhkan																		
			Jumlah dokumen Pengembangan dan Perbanyak Materi Substansi Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R), Media Promosi, Alat Permainan Edukatif Remaja, dan Sarana Prasarana Lainnya yang Dibutuhkan				3 Dokumen	3 Dokumen	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM			72.205.500,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.14.04.1.01.0019	Sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana																		
			Jumlah kelompok Genre yang mendapat sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana				15 Kelompok	15 Kelompok	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM			72.566.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.14.04.1.01.0021	Peningkatan Kapasitas Pengelola dan Pelaksana Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah kelompok PIK-R yang mengikuti peningkatan kapasitas Pengelola dan Pelaksana Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R)				15 Kelompok	15 Kelompok	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM			72.566.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							7.013.719.501,00	3.322.336.200,00	2.329.204.500,00	-4.684.515.001,00							19.900.000.000,00	
1.	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Cakupan perempuan dan anak yang mendapatkan fasilitas pemberdayaan				"Cak Per = 0,056, Cakupan Anak = 0,047" Angka	"Cak Per = 0,056, Cakupan Anak = 0,047" Angka	7.013.719.501,00	3.322.336.200,00	2.329.204.500,00	12.886.280.499,00							19.900.000.000,00	
	2.22.08.5.09	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Jumlah fasilitas kelompok ekonomi perempuan (KEP) desa prima				35 kelompok	35 kelompok	7.013.719.501,00	3.322.336.200,00	2.329.204.500,00	-4.684.515.001,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM	Provinsi DI Yogyakarta		19.900.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.22.08.5.09.0019	Pembangunan Ekonomi Perempuan																		
			Jumlah Perempuan yang Dikembangkan perekonomiannya				250 Orang	250 Orang	5.607.791.151,00	2.922.336.200,00	1.929.207.400,00	-3.678.583.751,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM			11.700.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.22.08.5.09.0021	Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya																		
			Jumlah Dokumen Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya				2 Dokumen	2 Dokumen	1.405.928.350,00	400.000.000,00	399.997.100,00	-1.005.931.250,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM			8.200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
		DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN																		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							69.940.712.750,00	69.826.880.880,00	66.146.962.470,00	-3.793.750.280,00							86.177.835.000,00	
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP							68.386.740.650,00	69.486.880.880,00	65.991.738.420,00	-2.395.002.230,00							81.177.835.000,00	
1.	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				95,69 n/a Angka Angka	95,69 n/a Angka Angka	53.346.503.252,00	54.336.146.442,00	50.992.418.370,00	1.041.096.748,00							54.387.600.000,00	
	2.11.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100 %	100 %	68.000.000,00	68.000.000,00	59.300.000,00	-8.700.000,00			-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Pegawai DLHK		137.600.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	17.950.000,00	17.950.000,00	16.750.000,00	-1.200.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Bairo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram			56.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	8.955.000,00	8.955.000,00	8.955.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram			6.600.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				18 Laporan	18 Laporan	41.095.000,00	41.095.000,00	33.595.000,00	-7.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram			75.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah				100 %	100 %	47.297.960.238,00	47.584.587.543,00	44.524.258.790,00	-2.773.701.448,00			-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Pegawai		47.158.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				390 Orang/ Bulan	390 Orang/ Bulan	47.217.971.988,00	47.504.599.293,00	44.447.631.040,00	-2.770.340.948,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram			47.000.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	26.508.700,00	26.508.700,00	26.508.700,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram			70.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	3.999.750,00	3.999.750,00	3.999.750,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram			5.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				14 Laporan	14 Laporan	31.999.800,00	31.999.800,00	31.399.800,00	-600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram			35.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				100 %	100 %	105.000.000,00	105.000.000,00	105.000.000,00	0,00			-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Pegawai		112.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	90.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram			95.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah				100 %	100 %	534.521.500,00	521.517.500,00	368.160.500,00	-166.361.000,00			-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Pegawai		513.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	21.209.000,00	21.209.000,00	21.209.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram			25.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	73.502.000,00	73.502.000,00	73.502.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram			75.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	31.871.000,00	31.871.000,00	31.871.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram			35.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	41.792.500,00	41.792.500,00	41.792.500,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram			43.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	7.548.000,00	7.548.000,00	7.548.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram			7.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	240.863.000,00	229.349.000,00	95.740.000,00	-145.123.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram			200.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100% %	100% %	19.780.000,00	141.910.000,00	201.980.000,00	182.200.000,00			-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Pegawai		590.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				19 Unit	12 Unit	19.780.000,00	19.780.000,00	79.850.000,00	60.070.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram			150.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				14 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram			80.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100% %	100% %	3.381.013.214,00	3.381.013.214,00	3.382.760.600,00	1.747.386,00			-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Pegawai		3.983.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	1.470.000,00	1.470.000,00	1.470.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram			2.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	821.574.214,00	821.574.214,00	821.572.500,00	-1.714,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram			1.300.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	1.893.516.000,00	1.893.516.000,00	1.893.516.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram			2.000.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	100 %	1.940.228.300,00	2.534.118.185,00	2.350.958.480,00	410.730.180,00			-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Pegawai		1.893.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	35.114.000,00	35.114.000,00	35.105.000,00	-9.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram			40.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				96 Unit	96 Unit	626.401.800,00	626.401.800,00	626.386.500,00	-15.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram			700.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				189 Unit	184 Unit	188.240.000,00	206.569.405,00	206.558.000,00	18.318.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram			200.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	6 Unit	464.171.500,00	464.171.500,00	264.541.500,00	-199.630.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram			300.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2.	2.11.02	PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP	Persentase penyusunan dokumen perencanaan lingkungan hidup				n/a %	80 %	90.100.000,00	90.100.000,00	90.100.000,00	40.135.000,00							130.235.000,00	
	2.11.02.1.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	Terlaksananya penyusunan muatan RPPLH Provinsi				0 Dokumen	1 Dokumen	90.100.000,00	90.100.000,00	90.100.000,00	0,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Provinsi dan Kabupaten/ Kota		130.235.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.02.1.01.0004	Penyusunan RPPLH Provinsi																		
			jumlah dokumen RPPLH di Provinsi yang berisi arahan/muatan RPPLH Provinsi dan Kabupaten/Kota yang lintas administrasi				1 Dokumen	1 Dokumen	90.100.000,00	90.100.000,00	90.100.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram			130.235.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
3.	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Peningkatan kemampuan pelayanan pengujian kualitas lingkungan Persentase Jumlah sumber pencemar yang ditangani Persentase pemenuhan data kualitas lingkungan hidup dan sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dihentikan				1780 parameter uji 2,8% n/a Parameter %	1780 parameter uji 2,8% n/a Parameter %	1.287.919.400,00	1.287.919.400,00	1.180.981.400,00	2.607.080.600,00							3.895.000.000,00	
	2.11.03.1.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Tersedianya data kualitas lingkungan hidup dan pengendalian iklim				8 dokumen Dokumen	8 dokumen Dokumen	1.180.838.400,00	1.180.838.400,00	1.103.530.400,00	-77.308.000,00			Memperkuat penyesuaian kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Kabupaten/ kota dan Pelaku Usaha		3.685.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.03.1.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut																		
			Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut				3 Dokumen	3 Dokumen	220.869.000,00	220.869.000,00	202.689.000,00	-18.180.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyesuaian kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram			250.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	2.11.03.1.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim																			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang Dilaksanakan				2 Dokumen	2 Dokumen	130.340.000,00	130.340.000,00	122.150.000,00	-8.190.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat lingkungan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram			135.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
	2.11.03.1.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi																			
			Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan				17800 Dokumen	17800 Dokumen	829.629.400,00	829.629.400,00	778.691.400,00	-50.938.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyesuaian kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram			3.300.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
	2.11.03.1.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup																			
			Sumber Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dipantau				50 titik titik	50 titik titik	107.081.000,00	107.081.000,00	77.451.000,00	-29.630.000,00		-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Kabupaten/ Kota, Pelaku Usaha dan Masyarakat			210.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
	2.11.03.1.02.0003	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup																			
			Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan				50 Titik	50 Titik	107.081.000,00	107.081.000,00	77.451.000,00	-29.630.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram			210.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
4.	2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)																			
			Persentase fasilitasi rincian teknis penyimpanan limbah B3 dan persetujuan teknis pengumpulan limbah B3 lintas kab/kota dalam satu provinsi				100% n/a % %	100% n/a % %	9.190.000,00	9.190.000,00	8.290.000,00	15.810.000,00							25.000.000,00		
	2.11.05.1.01	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi																			
			Terlaksananya fasilitasi pemenuhan komitmen izin pengumpulan limbah B3				3 dokumen Dokumen	3 dokumen Dokumen	9.190.000,00	9.190.000,00	8.290.000,00	-900.000,00		-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Kabupaten/ Kota			25.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
	2.11.05.1.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik																			
			Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				10 Dokumen	10 Dokumen	9.190.000,00	9.190.000,00	8.290.000,00	-900.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram			25.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
5.	2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)																			
			Persentase terawasinya usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Provinsi				78,92% n/a % %	78,92% n/a % %	188.133.000,00	188.133.000,00	161.833.000,00	151.867.000,00							340.000.000,00		
	2.11.06.1.01	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi																			
			Terlaksananya pengawasan izin lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi				146 usaha/ kegiatan Us aha/Kegiatan an	146 usaha/ kegiatan Us aha/Kegiatan an	188.133.000,00	188.133.000,00	161.833.000,00	-26.300.000,00		-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Pelaku Usaha dan Pegawai			340.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
	2.11.06.1.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH																			
			Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan operasi yang diberikan				20 Dokumen	20 Dokumen	84.098.000,00	84.098.000,00	82.598.000,00	-1.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram			170.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
	2.11.06.1.01.0005	Pembinaan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup																			
			Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya				25 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram			35.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
	2.11.06.1.01.0006	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup																			
			Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi				146 Badan Usaha	146 Badan Usaha	104.035.000,00	104.035.000,00	79.235.000,00	-24.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram			135.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
6.	2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT																			
			Persentase Jumlah Lembaga/Kelompok Masyarakat/Institusi terkait PPLH yang Meningkatkan Kapasitasnya				54% n/a % %	54% n/a % %	81.390.000,00	163.888.500,00	109.183.500,00	53.610.000,00							135.000.000,00		
	2.11.08.1.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Masyarakatan Tingkat Daerah Provinsi																			
			Terlaksananya pembinaan kelompok masyarakat				135 entitas Entitias	135 entitas Entitias	81.390.000,00	163.888.500,00	109.183.500,00	27.793.500,00		-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Kabupaten/ Kota, Pelaku Usaha dan Masyarakat			135.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
	2.11.08.1.01.0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat																			
			Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/k omunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH				30 Lembaga	30 Lembaga	81.390.000,00	163.888.500,00	109.183.500,00	27.793.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram			135.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
7.	2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase entitas yang diusulkan mendapatkan penghargaan tingkat nasional Persentase capaian kinerja penghargaan lingkungan hidup				55% n/a % %	55% n/a % %	110.000.050,00	177.998.550,00	163.898.550,00	4.999.950,00							115.000.000,00	
	2.11.09.1.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Terlaksananya Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup				69 Entitas	69 Entitas	110.000.050,00	177.998.550,00	163.898.550,00	53.898.500,00			-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Kabupaten/ Kota, Sekolah dan Masyarakat		115.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.09.1.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup																		
			Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH				34 Entitas	30 Entitas	110.000.050,00	177.998.550,00	163.898.550,00	53.898.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram			115.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
8.	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Terlaksananya penanganan sampah di TPA Regional Persentase sampah yang terkelola dan ketersediaan alat berat pengelola sampah yang beroperasi (%)				100 N/A % %	100 N/A % %	13.273.504.948,00	13.233.504.988,00	13.285.033.600,00	8.876.495.052,00							22.150.000.000,00	
	2.11.11.1.01	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Terlaksananya penanganan sampah di TPA Regional				100 %	100 %	13.273.504.948,00	13.233.504.988,00	13.285.033.600,00	11.528.652,00			-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	TPA Piyungan dan Masyarakat		22.150.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.11.1.01.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional																		
			Jumlah Fasilitas TPA/TPST Regional yang Beroperasi dan Terpelihara dengan baik				1 Unit	9 Unit	12.956.679.568,00	12.916.679.608,00	12.758.208.220,00	-198.471.348,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram			22.000.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.11.1.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan sampah di TPA/TPST Regional yang Tersedia				1 Unit	1 Unit	316.825.380,00	316.825.380,00	526.825.380,00	210.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram			150.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							1.553.972.100,00	340.000.000,00	155.224.050,00	-1.398.748.050,00							5.000.000.000,00	
1.	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Rata-rata persentase penerapan jogja hijau di tingkat kabupaten/kota dan persentase pengelolaan hutan khusus Yogyakarta Jumlah budaya benda dan tidak benda yang dikelola dan dilestarikan				1,37% n/a % Entitas	1,37% n/a % Entitas	1.553.972.100,00	340.000.000,00	155.224.050,00	3.446.027.900,00							5.000.000.000,00	
	2.22.08.5.08	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	Terlaksananya Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya				100% %	100% %	1.363.008.100,00	300.000.000,00	126.880.250,00	-1.236.127.850,00			-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Tahura dan Masyarakat		1.500.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.22.08.5.08.0006	Pengembangan Wana Wisata Budaya Mataram																		
			Jumlah Objek Wana Wisata Budaya Mataram yang Dikembangkan				2 Objek	1 Objek	1.363.008.100,00	300.000.000,00	126.880.250,00	-1.236.127.850,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram			1.500.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.22.08.5.09	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Jumlahaturahan/keleluasaan yang menerapkan Jogja Hijau				6 Desa/Kelurahan	6 Desa/Kelurahan	190.964.000,00	40.000.000,00	28.343.800,00	-162.620.200,00			-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Kabupaten/ Kota dan Masyarakat		3.500.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.22.08.5.09.0009	Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat				1 Laporan	1 Laporan	190.964.000,00	40.000.000,00	28.343.800,00	-162.620.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram			3.500.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							6.916.098.727,00	6.848.408.247,00	6.210.910.732,00	-705.187.995,00							13.132.600.000,00	
	3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN							6.916.098.727,00	6.848.408.247,00	6.210.910.732,00	-705.187.995,00							13.132.600.000,00	
1.	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase lahan kritis yang direhabilitasi Peningkatan nilai produksi pemanfaatan hutan di luar kawasan Persentase usaha perbenihan terdaftar yang telah memiliki izin usaha Nilai Efektivitas Pengelolaan Kawasan Hutan Persentase kesesuaian pengelolaan hutan				45,11 5 89,47 91,175 N/A % % Angka %	45,11 5 89,47 91,175 N/A % % Angka %	6.160.722.927,00	5.832.032.447,00	5.331.663.082,00	5.919.877.073,00							12.080.600.000,00	
	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Terlaksananya Rehabilitasi Hutan dan Lahan				276 Ha	276 Ha	546.857.102,00	645.857.102,00	600.388.102,00	53.531.000,00			-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Kabupaten/ Kota dan Kelompok Masyarakat		957.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.04.0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)																		
			Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)				2 Dokumen	2 Dokumen	33.183.500,00	33.183.500,00	24.483.500,00	-8.700.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram			42.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.04.0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara																		
			Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara				200 Ha	200 Ha	271.150.000,00	370.150.000,00	334.881.000,00	63.731.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram			375.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara				9 Ha	9 Ha	144.568.750,00	144.568.750,00	143.068.750,00	-1.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram			150.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.04.0009	Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan																		
			Luas Area Mangrove Di Luar Kawasan Hutan yang Direhabilitasi				1 Ha	0 Ha	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram			275.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.04.0012	Pembangunan gully plug																		
			Jumlah Gully Plug yang Terbangun				7 Unit	7 Unit	97.954.852,00	97.954.852,00	97.954.852,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram			115.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Terlaksananya perlindungan hutan di hutan lindung dan hutan produksi				94,62 %	94,62 %	1.185.073.800,00	1.136.417.865,00	897.904.600,00	-287.169.200,00			-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	BDH dan Masyarakat		3.255.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penganggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan																		
			Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun				1 Laporan	1 Laporan	20.549.250,00	20.549.250,00	13.088.850,00	-7.460.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram			55.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan																		
			Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan				15581 Ha	15581 Ha	396.200.550,00	450.200.550,00	396.021.750,00	-178.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram			450.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.07	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Terlaksananya Pendampingan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun				28 Unit Manajemen	28 Unit Manajemen	134.252.200,00	179.252.200,00	99.756.200,00	-34.496.000,00			-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Pelaku Usaha		213.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.07.0004	Pembinaan dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi																		
			Laporan Kegiatan pelaksanaan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi				1 Laporan	1 Laporan	92.150.600,00	137.150.600,00	67.734.600,00	-24.416.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram			165.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.07.0006	Pemantauan Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH) untuk PBPHH (Kayu dan HHBK) skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi																		
			Terbit pelaporan RKOPHH untuk Pemegang PBPHH (Kayu dan HHBK) skala usaha kecil dan menengah				18 Unit Manajemen	18 Unit Manajemen	42.101.600,00	42.101.600,00	32.021.600,00	-10.080.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram			48.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.09	Perbenihan Tanaman Hutan	Terlaksananya fasilitasi sertifikasi Peredaran Benih dan/atau Bibit				100 %	100 %	282.397.100,00	309.397.100,00	274.094.500,00	-8.302.600,00			-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Pengada dan Pengedar		800.100.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.09.0002	Sertifikasi Sumber Benih																		
			Jumlah Sertifikat Sumber Benih yang Diterbitkan				1 Sertifikat	1 Sertifikat	23.017.300,00	23.017.300,00	16.317.300,00	-6.700.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram			80.100.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.09.0003	Sertifikasi Mutu Benih																		
			Jumlah Sertifikat Mutu Benih yang Diterbitkan				1 Sertifikat	1 Sertifikat	17.884.000,00	17.884.000,00	15.279.000,00	-2.605.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram			40.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.09.0004	Sertifikasi Mutu Bibit																		
			Jumlah Sertifikat Mutu Bibit yang Diterbitkan				1 Sertifikat	1 Sertifikat	14.732.000,00	14.732.000,00	11.887.000,00	-2.845.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram			55.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.09.0005	Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit																		
			Jumlah Data (Asal Usul, Jenis Mutu) Benih Atau Bibit yang Beredar				1 Laporan	1 Laporan	17.413.000,00	17.413.000,00	11.193.000,00	-6.220.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram			55.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.09.0009	Pengelolaan Sumber Benih																		
			Luas sumber benih yang dikelola				5 Ha	5 Ha	209.350.800,00	236.350.800,00	219.418.200,00	10.067.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram			570.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2.	3.28.04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Nilai efektivitas pengelolaan kawasan konservasi Nilai efektivitas pengelolaan kawasan konservasi				67 N/A Indeks Angka	67 N/A Indeks Angka	613.165.800,00	784.165.800,00	722.149.650,00	288.834.200,00							902.000.000,00	
	3.28.04.1.01	Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi	Luas hutan konservasi yang dikelola				634,10 Ha	634,10 Ha	189.899.200,00	270.899.200,00	257.797.400,00	67.898.200,00			-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Pegawai dan Masyarakat		242.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.04.1.01.0008	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA Provinsi																		
			Jumlah Desa yang Diberdayakan Melalui Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif				5 Desa	5 Desa	20.751.600,00	101.751.600,00	92.862.800,00	72.111.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram			50.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.04.1.01.0013	Pengelolaan jenis tumbuhan dan satwa beserta habitatnya di Tahura Provinsi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Luas kawasan TAHURA yang diinventarisasi dan Diverifikasi dengan nilai Kehati tinggi				6 Ha	6 Ha	99.447.700,00	99.447.700,00	98.234.700,00	-1.213.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram			120.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.04.1.01.0015	Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi																		
			Luas Kawasan TAHURA Provinsi yang diamankan				634 Ha	634 Ha	69.699.900,00	69.699.900,00	66.699.900,00	-3.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram			72.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.04.1.03	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	Terlaksananya Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam yang dikelola				3 Kawasan	3 Kawasan	423.266.600,00	513.266.600,00	464.352.250,00	41.085.650,00			-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Kabupaten		660.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.04.1.03.0006	Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi																		
			Luas Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting yang Dikelola				5 Ha	5 Ha	345.344.850,00	435.344.850,00	400.408.500,00	55.063.650,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram			580.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.04.1.03.0009	Perencanaan Pengelolaan Ekosistem Lahan Basah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pemanfaatan Lahan Basah				3 Dokumen	3 Dokumen	77.921.750,00	77.921.750,00	63.943.750,00	-13.978.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram			80.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
3.	3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Persentase kelompok tani hutan yang meningkat kapasitasnya (%) Persentase kelompok tani hutan yang meningkat kapasitasnya				20,82 N/A %	20,82 N/A %	142.210.000,00	232.210.000,00	157.098.000,00	7.790.000,00							150.000.000,00	
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Terlaksananya peningkatan kapasitas kelompok tani hutan dan masyarakat				15 Kelompok	15 Kelompok	142.210.000,00	232.210.000,00	157.098.000,00	14.888.000,00			-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	KTH, Penyuluh Kehutanan dan Masyarakat		150.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan																		
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan				5 Kelompok	5 Kelompok	93.847.000,00	183.847.000,00	108.735.000,00	14.888.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram			100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.05.1.01.0004	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan																		
			Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas				40 Orang	40 Orang	48.363.000,00	48.363.000,00	48.363.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram			50.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
		<b>BALAI KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN YOGYAKARTA</b>							<b>76.856.811.477,00</b>	<b>76.675.289.127,00</b>	<b>72.357.873.202,00</b>	<b>-4.498.938.275,00</b>							<b>99.310.435.000,00</b>	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							69.940.712.750,00	69.826.880.880,00	66.146.962.470,00	-3.793.750.280,00							86.177.835.000,00	
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP							68.386.740.650,00	69.486.880.880,00	65.991.738.420,00	-2.395.002.230,00							81.177.835.000,00	
1.	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				95,69 n/a Angka Angka	95,69 n/a Angka Angka	53.346.503.252,00	54.336.146.442,00	50.992.418.370,00	1.041.096.748,00							54.387.600.000,00	
	2.11.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah				100 %	100 %	47.297.960.238,00	47.584.587.543,00	44.524.258.790,00	-2.773.701.448,00			-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Pegawai		47.158.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	17.480.000,00	17.480.000,00	14.719.500,00	-2.760.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram			48.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				100 %	100 %	105.000.000,00	105.000.000,00	105.000.000,00	0,00			-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Pegawai		112.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram			17.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah				100 %	100 %	534.521.500,00	521.517.500,00	368.160.500,00	-166.361.000,00			-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Pegawai		513.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	8.776.000,00	8.776.000,00	8.776.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram			10.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	20.115.300,00	20.115.300,00	20.115.300,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram			22.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	32.614.000,00	32.614.000,00	32.614.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram			35.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	12.977.700,00	12.977.700,00	12.977.700,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram			14.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	1.617.000,00	1.617.000,00	1.617.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram			2.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	41.636.000,00	40.146.000,00	20.398.000,00	-21.238.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram			45.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100% %	100% %	19.780.000,00	141.910.000,00	201.980.000,00	182.200.000,00			-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Pegawai		590.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				14 Unit	0 Unit	0,00	122.130.000,00	122.130.000,00	122.130.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram			250.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				58 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram			110.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100% %	100% %	3.381.013.214,00	3.381.013.214,00	3.382.760.600,00	1.747.386,00			-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Pegawai		3.983.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	1.299.000,00	1.299.000,00	1.299.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram			1.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	178.015.000,00	178.015.000,00	177.264.100,00	-750.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram			180.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	485.139.000,00	485.139.000,00	487.639.000,00	2.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram			500.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	100 %	1.940.228.300,00	2.534.118.185,00	2.350.958.480,00	410.730.180,00			-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Pegawai		1.893.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinan				78 Unit	78 Unit	482.138.000,00	482.138.000,00	481.958.000,00	-180.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram			500.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				14 Unit	14 Unit	15.909.000,00	15.909.000,00	15.909.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram			18.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				21 Unit	19 Unit	14.361.000,00	14.361.000,00	14.361.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram			15.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	113.893.000,00	689.453.480,00	706.139.480,00	592.246.480,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram			120.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							6.916.098.727,00	6.848.408.247,00	6.210.910.732,00	-705.187.995,00							13.132.600.000,00	
	3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN							6.916.098.727,00	6.848.408.247,00	6.210.910.732,00	-705.187.995,00							13.132.600.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase lahan kritis yang direhabilitasi Peningkatan nilai produksi pemanfaatan hutan di luar kawasan Persentase usaha perbenihan terdaftar yang telah memiliki izin usaha Nilai Efektivitas Pengelolaan Kawasan Hutan Persentase kesesuaian pengelolaan hutan				45,11 5 89,47 91,175 N/A % % Angka %	45,11 5 89,47 91,175 N/A % % Angka %	6.160.722.927,00	5.832.032.447,00	5.331.663.082,00	5.919.877.073,00							12.080.600.000,00	
	3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Terlaksananya perencanaan pengelolaan KPH				4 Dokumen	4 Dokumen	254.726.000,00	254.726.000,00	235.286.000,00	-19.440.000,00			-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	BKPH		320.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan					1 Dokumen	1 Dokumen	254.726.000,00	254.726.000,00	235.286.000,00	-19.440.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram			320.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Pemanfaatan hutan produksi dan hutan lindung yang menjadi kewenangan				15,581 Ha	15,581 Ha	3.757.416.725,00	3.306.382.180,00	3.224.233.680,00	-533.183.045,00			-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	BKPH		6.535.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.03.0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi					1 Dokumen	1 Dokumen	423.811.000,00	567.811.000,00	535.359.000,00	111.548.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram			425.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.03.0010	Penilaian Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Produksi					36 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram			85.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.03.0012	Penilaian Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Lindung					9 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram			25.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.03.0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi					1 Dokumen	1 Dokumen	3.333.605.725,00	2.738.571.180,00	2.688.874.680,00	-644.731.045,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram			6.000.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Terlaksananya perlindungan hutan di hutan lindung dan hutan produksi				94,62 %	94,62 %	1.185.073.800,00	1.136.417.865,00	897.904.600,00	-287.169.200,00			-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	BKPH		3.255.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan					15581 Ha	15581 Ha	768.324.000,00	665.668.065,00	488.794.000,00	-279.530.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram			2.750.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
		<b>DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>							<b>20.161.950.062,00</b>	<b>17.752.217.310,00</b>	<b>16.149.535.113,00</b>	<b>-4.012.414.949,00</b>							<b>30.334.485.800,00</b>	
2		<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>							<b>14.346.925.362,00</b>	<b>11.173.420.080,00</b>	<b>10.062.917.293,00</b>	<b>-4.284.008.069,00</b>							<b>18.790.538.000,00</b>	
	2.12	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>							<b>232.331.300,00</b>	<b>232.331.300,00</b>	<b>278.701.300,00</b>	<b>46.370.000,00</b>							<b>447.500.000,00</b>	
1.	2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase tercapainya fasilitasi dokumen peristiwa kependudukan (KTPel dan KIA) bagi masyarakat di DIY				88,8 %	88,8 %	56.535.200,00	56.535.200,00	79.915.200,00	58.464.800,00							115.000.000,00	
	2.12.02.1.01	Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	Persentase terlaksananya kegiatan pelayanan pendaftaran kependudukan				100 %	100 %	24.800.800,00	24.800.800,00	24.800.800,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Masyarakat di DIY, Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota di DIY, Stakeholder terkait		30.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.1.01.0002	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi					80 Dokumen	80 Dokumen	24.800.800,00	24.800.800,00	24.800.800,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			30.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.1.02	Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	Terlaksananya kegiatan penyelenggaraan pendaftaran kependudukan				100 %	100 %	31.734.400,00	31.734.400,00	55.114.400,00	23.380.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Masyarakat di DIY, Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota di DIY, Stakeholder terkait		85.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.1.02.0001	Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendaftaran Penduduk				1 Laporan	1 Laporan	11.520.400,00	11.520.400,00	34.900.400,00	23.380.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			20.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.1.02.0002	Sosialisasi Terkait Pendaftaran Penduduk																		
			Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pendaftaran Penduduk				1 Laporan	1 Laporan	20.214.000,00	20.214.000,00	20.214.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			65.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.	2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase tercapainya fasilitasi dokumen peristiwa penting (Akta kelahiran bagi anak dan Akta kematian) bagi masyarakat di DIY				99.20 %	99.20 %	61.315.700,00	61.315.700,00	61.315.700,00	18.684.300,00							80.000.000,00	
	2.12.03.1.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	Terlaksananya kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil				100 %	100 %	36.455.700,00	36.455.700,00	36.455.700,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Masyarakat di DIY, Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota di DIY, Stakeholder terkait		50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.1.01.0004	Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota				4 Laporan	4 Laporan	36.455.700,00	36.455.700,00	36.455.700,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.1.03	Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Terlaksananya pemberian konsultasi penyelenggaraan pencatatan sipil				100 %	100 %	24.860.000,00	24.860.000,00	24.860.000,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Masyarakat di DIY, Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota di DIY, Stakeholder terkait		30.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.1.03.0001	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil																		
			Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil				1 Laporan	1 Laporan	24.860.000,00	24.860.000,00	24.860.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			30.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
3.	2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase akumulasi instansi/lembaga yang memanfaatkan data kependudukan				84 %	84 %	64.385.900,00	64.385.900,00	87.375.900,00	118.114.100,00							182.500.000,00	
	2.12.04.1.02	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi				100 %	100 %	64.385.900,00	64.385.900,00	87.375.900,00	22.990.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Masyarakat di DIY, Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota di DIY, Stakeholder terkait		182.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.1.02.0001	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan				1 Laporan	1 Laporan	60.025.500,00	60.025.500,00	83.015.500,00	22.990.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			175.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.1.02.0005	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan																		
			Jumlah Dokumen Hasil pemanfaatan data kependudukan				2 Dokumen	2 Dokumen	4.360.400,00	4.360.400,00	4.360.400,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			7.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
4.	2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase tersusunnya profil kependudukan sesuai standar				100 %	100 %	50.094.500,00	50.094.500,00	50.094.500,00	19.905.500,00							70.000.000,00	
	2.12.05.1.01	Penyediaan Profil Kependudukan	Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Profil Kependudukan				100 %	100 %	50.094.500,00	50.094.500,00	50.094.500,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Masyarakat di DIY, Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota di DIY, Stakeholder terkait		70.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.05.1.01.0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta Kebutuhan yang lain																		
			Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan Serta Kebutuhan Lain yang tersusun				1 Dokumen	1 Dokumen	50.094.500,00	50.094.500,00	50.094.500,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			70.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							9.646.382.062,00	10.941.088.780,00	9.784.215.993,00	137.833.931,00							11.843.038.000,00	
1.	2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				-	86 nilai	9.604.604.312,00	10.899.311.030,00	9.742.438.243,00	2.188.433.688,00							11.793.038.000,00	
	2.13.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				-	100 %	26.468.000,00	26.468.000,00	26.468.000,00	0,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Kalurahan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil		35.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.13.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	18.040.000,00	18.040.000,00	18.040.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			25.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.13.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				-	2 Dokumen	8.428.000,00	0,00	0,00	-8.428.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.13.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
	2.13.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				-	100 %	8.238.844.412,00	8.251.821.541,00	7.411.427.754,00	-827.416.658,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Kalurahan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil		10.072.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.13.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				60 Orang/ Bulan	60 Orang/ Bulan	8.220.753.012,00	8.231.795.141,00	7.391.401.354,00	-829.351.658,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			10.000.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.13.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	8.530.000,00	10.465.000,00	10.465.000,00	1.935.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			52.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.13.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD				14 Laporan	14 Laporan	9.561.400,00	9.561.400,00	9.561.400,00	0,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			20.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.13.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				-	100 %	13.154.600,00	15.354.600,00	15.354.600,00	2.200.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Kalurahan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil		25.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.13.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				6 Laporan	6 Laporan	13.154.600,00	15.354.600,00	15.354.600,00	2.200.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			25.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.13.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah				-	100 %	609.816.400,00	595.944.400,00	342.075.400,00	-267.741.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Kalurahan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil		731.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.13.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	7.404.200,00	7.404.200,00	7.404.200,00	0,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			25.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.13.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Paket	9 Paket	58.994.200,00	58.994.200,00	68.463.200,00	9.469.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			98.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.13.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	4 Paket	4.356.000,00	23.531.000,00	23.531.000,00	19.175.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			22.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.13.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	5.424.000,00	5.424.000,00	5.424.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			6.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.13.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	533.638.000,00	500.591.000,00	237.253.000,00	-296.385.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			580.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.13.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				-	100 %	79.170.000,00	712.835.889,00	685.495.889,00	606.325.889,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Kalurahan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil		230.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.13.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				7 Unit	27 Unit	55.340.000,00	615.505.889,00	620.795.889,00	565.455.889,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			180.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.13.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	13 Unit	23.830.000,00	97.330.000,00	64.700.000,00	40.870.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.13.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-	100 %	325.716.000,00	832.689.400,00	797.419.400,00	471.703.400,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Kalurahan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil		208.288.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.13.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	307.800.000,00	352.785.400,00	317.515.400,00	9.715.400,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.13.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	17.916.000,00	479.904.000,00	479.904.000,00	461.988.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			198.288.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.13.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-	100 %	311.434.900,00	464.197.200,00	464.197.200,00	152.762.300,00			-	-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Kalurahan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil		491.250.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.13.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	36.232.000,00	36.232.000,00	36.232.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.13.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	8 Unit	99.596.900,00	211.548.400,00	211.548.400,00	111.951.500,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.13.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				21 Unit	15 Unit	16.750.000,00	16.750.000,00	16.750.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			30.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.13.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				-	1 Unit	151.200.000,00	88.570.800,00	88.570.800,00	-62.629.200,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			250.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.13.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				-	12 Unit	7.656.000,00	111.096.000,00	111.096.000,00	103.440.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			11.250.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.	2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase rumusan bahan kebijakan pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren				100 %	100 %	41.777.750,00	41.777.750,00	41.777.750,00	8.222.250,00							50.000.000,00	
	2.13.04.1.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa				100 %	100 %	41.777.750,00	41.777.750,00	41.777.750,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Kalurahan/Kelurahan Kapanewon/Kemantren di DIY, OPD terkait Kabupaten/Kota di DIY, Stakeholder terkait		50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.13.04.1.01.0002	Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	41.777.750,00	41.777.750,00	41.777.750,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							4.468.212.000,00	0,00	0,00	-4.468.212.000,00							6.500.000.000,00	
1.	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Pemberdayaan ekonomi masyarakat				-	4 Kalurahan	4.468.212.000,00	0,00	0,00	2.031.788.000,00							6.500.000.000,00	
	2.22.08.5.09	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Terlaksananya Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya				-	100 %	4.468.212.000,00	0,00	0,00	-4.468.212.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penurunan tingkat kemiskinan	Pemerintah Kalurahan, BUM Kalurahan, Karang Taruna, Gapoktan,		6.500.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.22.08.5.09.0017	Pengembangan Kewirausahaan Desa																		
			Jumlah Laporan Pengembangan Kewirausahaan Desa				0 0	0 0	400.000.000,00	0,00	0,00	-400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penurunan tingkat kemiskinan			500.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.22.08.5.09.0020	Peningkatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan Desa																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan Desa				2 Laporan	0 Laporan	4.068.212.000,00	0,00	0,00	-4.068.212.000,00	-	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penurunan tingkat kemiskinan			6.000.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							5.815.024.700,00	6.578.797.230,00	6.086.617.820,00	271.593.120,00							11.543.947.800,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							5.815.024.700,00	6.578.797.230,00	6.086.617.820,00	271.593.120,00							11.543.947.800,00	
1.	4.01.04	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	Implementasi kelurahan model Gotong Royong Segoro Amarto				-	6 Kalurahan	4.086.828.700,00	3.808.460.550,00	3.662.632.550,00	3.221.332.100,00							7.308.160.800,00	
	4.01.04.1.02	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar				-	100 %	246.003.950,00	162.864.000,00	162.864.000,00	-83.139.950,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penurunan tingkat kemiskinan	Kelompok masyarakat prasejahtera perkotaan		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	4.01.04.1.02.0003	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial				4 Dokumen	1 Dokumen	246.003.950,00	162.864.000,00	162.864.000,00	-83.139.950,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penurunan tingkat kemiskinan			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	4.01.04.1.03	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar				-	100 %	3.840.824.750,00	3.645.596.550,00	3.499.768.550,00	-341.056.200,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penurunan tingkat kemiskinan	Kalurahan, Kelurahan, LPMK, PKK, Posyandu, Bumdes, DPD LPM		7.308.160.800,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	4.01.04.1.03.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja				15 Dokumen	6 Dokumen	3.840.824.750,00	3.645.596.550,00	3.499.768.550,00	-341.056.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penurunan tingkat kemiskinan			7.308.160.800,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.	4.01.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Pemerintahan Kalurahan yang melaksanakan Reformasi Birokrasi dengan kategori baik				7.65 %	7.65 %	1.728.196.000,00	2.770.336.680,00	2.423.985.270,00	2.507.591.000,00							4.235.787.000,00	
	4.01.10.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Urusan Keistimewaan	Terlaksananya penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan urusan keistimewaan				100 %	100 %	1.728.196.000,00	2.770.336.680,00	2.423.985.270,00	695.789.270,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Kalurahan/Kelurahan Kapanewon/Kemantren, Pemerintah Daerah, OPD dan stakeholder terkait di DIY		4.235.787.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.10.5.01.0010	Pembinaan Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan																		
			Jumlah Dokumen Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Dibina				4 Dokumen	12 Dokumen	1.728.196.000,00	2.770.336.680,00	2.423.985.270,00	695.789.270,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			4.235.787.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		DINAS PERHUBUNGAN																		
									147.778.487.496,00	139.950.864.239,00	137.060.582.937,00	-10.717.904.559,00							242.915.127.357,00	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							31.812.940.600,00	22.948.061.550,00	19.453.362.250,00	-12.359.578.350,00							61.180.755.280,00	
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							31.812.940.600,00	22.948.061.550,00	19.453.362.250,00	-12.359.578.350,00							61.180.755.280,00	
1.	1.03.13	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	4. Persentase Penyediaan Satuan Ruang Parkir di Tempat Khusus Parkir Pada Kawasan Strategis 2. Persentase Penyediaan Prasarana LLAJ di Kawasan Strategis 1. Persentase Terwujudnya Angkutan Umum Ramah Lingkungan di Kawasan Strategis [deleted] 3. Persentase Penyediaan Moda Angkutan Tradisional di Kawasan Strategis 5. Persentase Pengendalian dan Pengawasan Lalu Lintas Pada Kawasan Strategis [deleted]				100,00 28,70 41,00 68,13 68,64 N/A % % % %	100,00 28,70 41,00 68,13 68,64 % % % %	31.812.940.600,00	22.948.061.550,00	19.453.362.250,00	29.367.814.680,00							61.180.755.280,00	
	1.03.13.5.02	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Persentase Jumlah Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten				100 %	100 %	31.812.940.600,00	22.948.061.550,00	19.453.362.250,00	-12.359.578.350,00			Memperkuat penyesuaian kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	Masyarakat di Sekitar Kawasan Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten		61.180.755.280,00	DINAS PERHUBUNGAN
	1.03.13.5.02.0001	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filososis																		
			Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filososis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu				14 Dokumen	9 Dokumen	19.684.805.600,00	19.433.070.800,00	16.437.679.800,00	-3.247.125.800,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat penyesuaian kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)			40.495.750.280,00	DINAS PERHUBUNGAN
	1.03.13.5.02.0003	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu																		
			Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu				1 Dokumen	1 Dokumen	1.544.700.000,00	771.612.500,00	753.016.600,00	-791.683.400,00	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat penyesuaian kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)			5.183.540.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	1.03.13.5.02.0004	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh																		
			Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh				1 Dokumen	1 Dokumen	1.544.700.000,00	464.400.000,00	452.903.500,00	-1.091.796.500,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat penyesuaian kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)			3.730.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	1.03.13.5.02.0006	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Candi Prambanan-Candi Ijo																		
			Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Candi Prambanan-Candi Ijo				1 Dokumen	1 Dokumen	1.544.700.000,00	309.526.000,00	302.431.050,00	-1.242.268.950,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat penyesuaian kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)			2.850.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	1.03.13.5.02.0007	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kotabaru																		
			Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kotabaru				1 Dokumen	0 Dokumen	250.000.000,00	212.795.375,00	0,00	-250.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat penyesuaian kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)			140.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	1.03.13.5.02.0008	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Merapi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis				1 Dokumen	1 Dokumen	1.544.700.000,00	309.526.000,00	302.431.100,00	-1.242.268.900,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat penyesuaian kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)			3.861.265.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
1.03.13.5.02.0009		Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kotagede																			
			Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kotagede				1 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat penyesuaian kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)			0,00	DINAS PERHUBUNGAN	
1.03.13.5.02.0010		Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas-Parangtritis																			
			Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas-Parangtritis				1 Dokumen	1 Dokumen	929.965.000,00	309.526.000,00	302.431.150,00	-627.533.850,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat penyesuaian kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)			1.250.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
1.03.13.5.02.0012		Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kerto-Pleret																			
			Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kerto-Pleret				1 Dokumen	1 Dokumen	1.544.700.000,00	309.809.500,00	302.431.200,00	-1.242.268.800,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat penyesuaian kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)			1.720.200.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
1.03.13.5.02.0014		Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karaton																			
			Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karaton				1 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat penyesuaian kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)			0,00	DINAS PERHUBUNGAN	
1.03.13.5.02.0015		Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sokoliman																			
			Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sokoliman				1 Dokumen	1 Dokumen	929.970.000,00	464.400.000,00	452.903.450,00	-477.066.550,00	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat penyesuaian kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)			1.250.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
1.03.13.5.02.0017		Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Makam Girindo																			
			Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Makam Girindo				1 Dokumen	1 Dokumen	1.544.700.000,00	150.600.000,00	147.134.400,00	-1.397.565.600,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat penyesuaian kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)			0,00	DINAS PERHUBUNGAN	
1.03.13.5.02.0019		Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Masjid Pathok Nagoro																			
			Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Masjid Pathok Nagoro				1 Dokumen	0 Dokumen	250.000.000,00	212.795.375,00	0,00	-250.000.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat penyesuaian kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)			700.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								115.965.546.896,00	117.002.802.689,00	117.607.220.687,00	1.641.673.791,00							181.734.372.077,00	
2.15		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN								115.965.546.896,00	117.002.802.689,00	117.607.220.687,00	1.641.673.791,00							181.734.372.077,00	
1.	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								21.433.166.023,00	21.549.017.816,00	20.845.998.314,00	9.490.538.879,00							30.923.704.902,00	
	2.15.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								37.472.100,00	37.472.100,00	34.472.100,00	-3.000.000,00			-				144.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	17.848.500,00	17.848.500,00	16.048.500,00	-1.800.000,00	Kab. Sleman, Depok, Caturtunggal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-					67.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	9.623.900,00	9.623.900,00	9.623.900,00	0,00	Kab. Sleman, Depok, Caturtunggal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			21.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	3 Laporan	9.999.700,00	9.999.700,00	8.799.700,00	-1.200.000,00	Kab. Sleman, Depok, Caturtunggal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			56.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100 %	100 %	14.980.435.745,00	15.106.795.538,00	14.481.077.036,00	-499.358.709,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Dinas Perhubungan DIY		16.135.547.342,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				111 Orang/ Bulan	111 Orang/ Bulan	14.886.283.345,00	15.012.643.138,00	14.386.924.636,00	-499.358.709,00	Kab. Sleman, Depok, Caturtunggal	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBYAKTIAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			15.864.433.992,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	37.690.000,00	37.690.000,00	37.690.000,00	0,00	Kab. Sleman, Depok, Caturtunggal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			163.052.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	2 Laporan	9.010.000,00	9.010.000,00	9.010.000,00	0,00	Kab. Sleman, Depok, Caturtunggal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			18.593.825,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				17 Laporan	17 Laporan	17.500.000,00	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	Kab. Sleman, Depok, Caturtunggal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			42.175.025,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100 %	100 %	4.925.350,00	4.925.350,00	4.925.350,00	0,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Dinas Perhubungan DIY		10.559.500,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				5 Laporan	5 Laporan	2.954.600,00	2.954.600,00	2.954.600,00	0,00	Kab. Sleman, Depok, Caturtunggal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			8.587.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan peralatan rumah tangga dan penunjang pelayanan administrasi perkantoran				100 %	100 %	381.509.300,00	371.001.300,00	296.700.300,00	-84.809.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Dinas Perhubungan DIY		1.162.662.140,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	Kab. Sleman, Depok, Caturtunggal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			46.595.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	42.000.900,00	42.000.900,00	42.000.900,00	0,00	Kab. Sleman, Depok, Caturtunggal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			266.630.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	6.330.000,00	6.330.000,00	6.330.000,00	0,00	Kab. Sleman, Depok, Caturtunggal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			39.162.400,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	15.999.400,00	15.999.400,00	15.999.400,00	0,00	Kab. Sleman, Depok, Caturtunggal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			154.382.800,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	1.617.000,00	1.617.000,00	1.617.000,00	0,00	Kab. Sleman, Depok, Caturtunggal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			9.240.440,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	2 Laporan	207.945.000,00	198.033.000,00	128.118.000,00	-79.827.000,00	Kab. Sleman, Depok, Caturtunggal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			536.937.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah				100 %	100 %	22.300.000,00	22.300.000,00	22.300.000,00	0,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Dinas Perhubungan DIY		20.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	22.300.000,00	22.300.000,00	22.300.000,00	0,00	Kab. Sleman, Depok, Caturtunggal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			20.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dan Penunjang Pelayanan Administrasi Perkantoran				100 %	100 %	4.418.740.000,00	4.418.740.000,00	4.418.740.000,00	0,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Dinas Perhubungan DIY		9.587.635.307,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Sleman, Depok, Caturtunggal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			9.791.600,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	491.400.000,00	491.400.000,00	491.400.000,00	0,00	Kab. Sleman, Depok, Caturtunggal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			1.007.345.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	804.624.000,00	804.624.000,00	804.624.000,00	0,00	Kab. Sleman, Depok, Caturtunggal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			5.309.568.707,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	100 %	1.587.783.528,00	1.587.783.528,00	1.587.783.528,00	0,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Dinas Perhubungan DIY		3.862.800.613,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				26 Unit	26 Unit	558.968.300,00	558.968.300,00	558.968.300,00	0,00	Kab. Sleman, Depok, Caturtunggal	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			927.835.213,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				7 Unit	7 Unit	179.807.828,00	179.807.828,00	179.807.828,00	0,00	Kab. Sleman, Depok, Caturtunggal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			721.950.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	345.600.000,00	345.600.000,00	345.600.000,00	0,00	Kab. Sleman, Depok, Caturtunggal	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			792.620.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	5 Unit	40.875.000,00	40.875.000,00	40.875.000,00	0,00	Kab. Sleman, Depok, Caturtunggal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			935.805.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Penanganan Daerah Rawan Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Fasilitas Perlengkapan Jalan Pada Jalan Provinsi Persentase Penerapan Teknologi Berbasis ITS Persentase Penanganan Lalu Lintas Pada 6 Kawasan Persentase Penyediaan Layanan Angkutan Umum di DIY Persentase Pemenuhan SPM Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Tipe B Persentase Ketertiban LLAJ Persentase Pemenuhan SPM Layanan Tempat Khusus Parkir (TKP)				30,00 44,24 46,77 49,00 61,27 78,38 81,40 82,46 N/A % % % % % % % % %	30,00 44,24 46,77 49,00 61,27 78,38 81,40 82,46 % % % % % % % % %	94.532.380.873,00	95.453.784.873,00	96.761.222.373,00	56.278.286.302,00							150.810.667.175,00	
	2.15.02.1.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Persentase Dokumen Acuan Dalam Perencanaan Jaringan Jalan di DIY				100 %	100 %	293.133.000,00	1.215.133.000,00	662.869.500,00	369.736.500,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	Masyarakat yang Bermobilitas di Wilayah DIY		1.200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.01.0002	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi																		
			Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi				2 Dokumen	11 Dokumen	293.133.000,00	1.215.133.000,00	662.869.500,00	369.736.500,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	Masyarakat yang Bermobilitas di Wilayah DIY		1.200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Penyediaan Perlengkapan Jalan Serta Dipertahankannya Fungsi Prasarana dan Perlengkapan Jalan yang Telah Tersedia				100 %	100 %	2.233.132.100,00	2.233.132.100,00	4.099.825.100,00	1.866.693.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	Masyarakat yang Bermobilitas di Wilayah DIY		6.302.337.700,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.02.0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara				113 Unit	113 Unit	585.493.100,00	585.493.100,00	585.493.100,00	0,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)			592.399.700,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.1.02.0004		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan																		
			Jumlah Perengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara				561 Unit	571 Unit	1.647.639.000,00	1.647.639.000,00	3.514.332.000,00	1.866.693.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)			5.709.938.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.1.05		Pelaksanaan Manajemen dan Reayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Persentase Penerapan Manajemen dan Reayasa Lalu Lintas di DIY				100 %	100 %	2.628.589.500,00	2.627.993.500,00	2.622.801.500,00	-5.788.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	Masyarakat yang Bermobilitas di Wilayah DIY		10.874.191.500,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.1.05.0003		Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Reayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi																		
			Jumlah Dokumen Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Reayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi				1 Dokumen	1 Dokumen	49.712.000,00	49.116.000,00	30.549.000,00	-19.163.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)			1.428.965.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.1.05.0004		Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi				5 Laporan	5 Laporan	301.820.000,00	301.820.000,00	284.495.000,00	-17.325.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)			1.147.471.300,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.1.05.0005		Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi				12 Laporan	12 Laporan	28.100.000,00	28.100.000,00	26.300.000,00	-1.800.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)			154.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.1.05.0007		Pengadaan dan Pemasangan Perengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Reayasa Lalu Lintas																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Perencanaan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang Dilaksanakan Pengadaan dan Pemasangan				54 Unit	67 Unit	2.248.957.500,00	2.248.957.500,00	2.281.457.500,00	32.500.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)			8.143.755.200,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.06	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi	Persentase Pelaksanaan Penilaian Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas di Jalan Provinsi				100 %	100 %	10.000.000,00	10.000.000,00	8.200.000,00	-1.800.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	Masyarakat yang Bermobilitas di Wilayah DIY		35.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.06.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin																		
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin				1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	8.200.000,00	-1.800.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)			35.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.08	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Ketersediaan Dokumen Operasional Angkutan Umum Dalam Trayek				100 %	100 %	88.858.504.273,00	88.858.504.273,00	88.858.504.273,00	0,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	Masyarakat Pengguna Layanan Angkutan Umum di Wilayah DIY		131.787.167.975,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.08.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi																		
			Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan Ke Tersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi				5 Laporan	5 Laporan	1.346.627.400,00	1.346.627.400,00	1.346.627.400,00	0,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)			1.800.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.08.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi																		
			Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				95 Unit	95 Unit	87.511.876.873,00	87.511.876.873,00	87.511.876.873,00	0,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PKB	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)			129.987.167.975,00	DINAS PERHUBUNGAN
		<b>BALAI PENGELOLAAN TERMINAL DAN PERPARKIRAN</b>																		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							147.778.487.496,00	139.950.864.239,00	137.060.582.937,00	-10.717.904.559,00							242.915.127.357,00	
	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN							115.965.546.896,00	117.002.802.689,00	117.607.220.687,00	1.641.673.791,00							181.734.372.077,00	
	1.	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			94,49 N/A angka angka	94,49 angka	21.433.166.023,00	21.549.017.816,00	20.845.998.314,00	9.490.538.879,00							30.923.704.902,00	
	2.15.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100 %	100 %	14.980.435.745,00	15.106.795.538,00	14.481.077.036,00	-499.358.709,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Balai Pengelolaan Terminal dan Perpajakan		16.135.547.342,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	24.370.000,00	24.370.000,00	24.370.000,00	0,00	Kab. Sleman, Depok, Caturtunggal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			41.708.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	Kab. Sleman, Depok, Caturtunggal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			1.100.500,00	DINAS PERHUBUNGAN	
2.15.01.1.02.0007		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																			
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	18 Laporan	4.482.400,00	4.482.400,00	4.482.400,00	0,00	Kab. Sleman, Depok, Caturtunggal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			4.484.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
2.15.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah pada Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100 %	100 %	4.925.350,00	4.925.350,00	4.925.350,00	0,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Balai Pengelolaan Terminal dan Perparkiran		10.559.500,00	DINAS PERHUBUNGAN	
2.15.01.1.03.0006		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																			
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				3 Laporan	3 Laporan	1.970.750,00	1.970.750,00	1.970.750,00	0,00	Kab. Sleman, Depok, Caturtunggal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			1.972.500,00	DINAS PERHUBUNGAN	
2.15.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan peralatan rumah tangga dan penunjang pelayanan administrasi perkantoran				100 %	100 %	381.509.300,00	371.001.300,00	296.700.300,00	-84.809.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Balai Pengelolaan Terminal dan Perparkiran		1.162.662.140,00	DINAS PERHUBUNGAN	
2.15.01.1.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	11.762.000,00	11.762.000,00	11.762.000,00	0,00	Kab. Sleman, Depok, Caturtunggal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			11.768.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
2.15.01.1.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	42.878.000,00	42.878.000,00	42.405.000,00	-473.000,00	Kab. Sleman, Depok, Caturtunggal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			42.906.500,00	DINAS PERHUBUNGAN	
2.15.01.1.06.0003		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																			
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	15.012.000,00	15.012.000,00	13.205.000,00	-1.807.000,00	Kab. Sleman, Depok, Caturtunggal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			15.012.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
2.15.01.1.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	3.895.000,00	3.895.000,00	3.895.000,00	0,00	Kab. Sleman, Depok, Caturtunggal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			3.925.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
2.15.01.1.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				3 Laporan	3 Laporan	23.070.000,00	22.474.000,00	20.368.000,00	-2.702.000,00	Kab. Sleman, Depok, Caturtunggal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			36.103.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
2.15.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dan Penunjang Pelayanan Administrasi Perkantoran				100 %	100 %	4.418.740.000,00	4.418.740.000,00	4.418.740.000,00	0,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Balai Pengelolaan Terminal dan Perparkiran		9.587.635.307,00	DINAS PERHUBUNGAN	
2.15.01.1.08.0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Sleman, Depok, Caturtunggal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			5.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
2.15.01.1.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			250.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
2.15.01.1.08.0003		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	51.196.000,00	51.196.000,00	51.196.000,00	0,00	Kab. Sleman, Depok, Caturtunggal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			149.440.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
2.15.01.1.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	2.861.520.000,00	2.861.520.000,00	2.861.520.000,00	0,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			2.856.490.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
2.15.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100 %	100 %	1.587.783.528,00	1.587.783.528,00	1.587.783.528,00	0,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Balai Pengelolaan Terminal dan Perparkiran		3.862.800.613,00	DINAS PERHUBUNGAN	
2.15.01.1.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				6 Unit	6 Unit	122.828.400,00	122.828.400,00	122.828.400,00	0,00	Kab. Sleman, Depok, Caturtunggal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			123.152.400,00	DINAS PERHUBUNGAN	
2.15.01.1.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				8 Unit	8 Unit	57.084.000,00	57.084.000,00	57.084.000,00	0,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			78.818.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				6 Unit	6 Unit	282.620.000,00	282.620.000,00	282.620.000,00	0,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			282.620.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
2.	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Penanganan Daerah Rawan Kecelakaan Persentase Penyediaan Fasilitas Perengkapan Jalan Pada Jalan Provinsi Persentase Penerapan Teknologi Berbasis ITS Persentase Penanganan Lalu Lintas Pada 6 Kawasan Persentase Penyediaan Layanan Angkutan Umum di DIY Persentase Pemenuhan SPM Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Tipe B Persentase Ketertiban LLAJ Persentase Pemenuhan SPM Layanan Tempat Khusus Parkir (TKP)				30,00 44,24 46,77 49,00 61,27 78,38 81,40 82,46 N/A % % % % % % % %	30,00 44,24 46,77 49,00 61,27 78,38 81,40 82,46 % % % % % % % %	94.532.380.873,00	95.453.784.873,00	96.761.222.373,00	56.278.286.302,00							150.810.667.175,00		
	2.15.02.1.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	Ketersediaan Fasilitas Penyelenggaraan Terminal Tipe B				100 %	100 %	509.022.000,00	509.022.000,00	509.022.000,00	0,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	Masyarakat Pengguna Layanan Terminal Penumpang Tipe B dan Perparkiran di Wilayah DIY		611.970.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.02.1.03.0007	Revitalisasi Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)																			
			Jumlah Terminal yang direvitalisasi (Fasilitas Utama dan Penunjang)				6 Unit	6 Unit	140.000.000,00	140.000.000,00	140.000.000,00	0,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)			240.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.02.1.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)																			
			Jumlah Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang direhabilitasi dan terpelihara				6 Unit	6 Unit	369.022.000,00	369.022.000,00	369.022.000,00	0,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)			371.970.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							48.783.727.743,00	46.964.769.549,00	40.919.335.257,00	-7.864.392.486,00							91.464.752.020,00		
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							48.783.727.743,00	46.964.769.549,00	40.919.335.257,00	-7.864.392.486,00							91.464.752.020,00		
	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							14.329.781.543,00	17.255.979.949,00	15.939.364.457,00	1.609.582.914,00							28.370.884.020,00		
1.	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				83.5 angka	83.5 angka	12.390.415.243,00	13.803.550.449,00	12.829.915.957,00	7.188.768.777,00							19.579.184.020,00		
	2.16.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksanakannya penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah, koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD, dan evaluasi kinerja perangkat daerah				100 %	100 %	15.200.000,00	15.200.000,00	15.200.000,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Dinas Komunikasi dan Informatika DIY		85.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.16.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Mergangsan, Keparakan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			28.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.16.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Mergangsan, Keparakan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			34.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.16.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																			
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	3 Laporan	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Mergangsan, Keparakan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			23.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.16.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya penyediaan gaji dan tunjangan ASN, pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD, koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD serta koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD				100 %	100 %	10.798.227.443,00	11.964.495.149,00	11.139.664.657,00	341.437.214,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Dinas Komunikasi dan Informatika DIY		16.689.602.821,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.16.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				75 Orang/ Bulan	76 Orang/ Bulan	10.764.950.493,00	11.931.218.199,00	11.106.387.707,00	341.437.214,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Keparakan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			16.575.655.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.16.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				14 Dokumen	14 Dokumen	24.277.000,00	24.277.000,00	24.277.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Mergangsan, Keparakan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			66.497.821,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.16.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																			
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Keparakan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			16.100.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.16.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																			
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				14 Laporan	14 Laporan	3.999.950,00	3.999.950,00	3.999.950,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Mergangsan, Keparakan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			31.350.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.16.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, penyediaan peralatan rumah tangga, penyediaan barang cetakan dan penggandaan serta penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD				100 %	100 %	213.446.800,00	403.548.800,00	254.744.800,00	41.298.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Dinas Komunikasi dan Informatika DIY		529.029.999,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.16.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	8.957.000,00	8.957.000,00	8.957.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Mergangsan, Keparakan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			43.718.999,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.16.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	24.963.000,00	24.963.000,00	24.963.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Keparakan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			43.718.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.16.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	13.701.000,00	13.701.000,00	13.701.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Mergangsan, Keparakan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			26.583.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan					1 Paket	1 Paket	20.199.000,00	20.199.000,00	20.199.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Mergangsan, Keparakan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			37.138.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					12 Laporan	12 Laporan	145.626.800,00	335.728.800,00	186.924.800,00	41.298.000,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Keparakan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			377.872.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				100 %	100 %	0,00	0,00	0,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Dinas Komunikasi dan Informatika DIY		410.763.503,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					1 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Keparakan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			270.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Mergangsan, Keparakan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			140.763.503,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik serta penyediaan jasa pelayanan umum kantor				100 %	100 %	996.164.000,00	996.164.000,00	996.164.000,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Dinas Komunikasi dan Informatika DIY		1.322.403.697,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					12 Laporan	12 Laporan	289.200.000,00	289.200.000,00	289.200.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Keparakan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			610.383.400,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					12 Laporan	12 Laporan	706.964.000,00	706.964.000,00	706.964.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Mergangsan, Keparakan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			712.020.297,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan, dan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan Lainnya serta pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya				100 %	100 %	367.377.000,00	424.142.500,00	424.142.500,00	56.765.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Dinas Komunikasi dan Informatika DIY		542.384.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					1 Unit	1 Unit	23.686.000,00	23.686.000,00	23.686.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Keparakan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			27.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				16 Unit	16 Unit	142.679.000,00	195.054.500,00	195.054.500,00	52.375.500,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Keparakon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			157.035.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.16.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	170.796.000,00	170.796.000,00	170.796.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Keparakon	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			201.314.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.16.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	30.216.000,00	34.606.000,00	34.606.000,00	4.390.000,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Keparakon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			157.035.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
2.	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Keluhan Masyarakat Atas Pelayanan Pemda yang Terespon Tepat Waktu				86 %	86 %	1.605.289.200,00	3.139.292.400,00	2.858.871.400,00	3.251.710.800,00							4.857.000.000,00		
	2.16.02.1.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Terlaksananya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah daerah Provinsi				100 %	100 %	1.605.289.200,00	3.139.292.400,00	2.858.871.400,00	1.253.582.200,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Masyarakat, OPD Pemda DIY		4.857.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.16.02.1.01.0017	Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik																			
			Persentase khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik				70 Persentase	70 Persentase	813.208.000,00	813.208.000,00	813.208.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			1.760.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.16.02.1.01.0020	Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik																			
			Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika				1 Laporan	1 Laporan	710.863.200,00	963.735.200,00	796.265.200,00	85.402.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			1.520.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.16.02.1.01.0023	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik																			
			Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah				1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	43.526.000,00	43.526.000,00	36.188.000,00	-7.338.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			765.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.16.02.1.01.0024	Pengelolaan Media Komunikasi Publik																			
			Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/uknis				1 Media	1 Media	37.692.000,00	1.318.823.200,00	1.213.210.200,00	1.175.518.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			812.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
3.	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Indeks Penerapan Audit TIK Indeks Penerapan Manajemen SPBE				1,36 indeks	1,36 indeks	334.077.100,00	313.137.100,00	250.577.100,00	3.600.622.900,00							3.934.700.000,00		
	2.16.03.1.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Terlaksananya Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi				100 %	100 %	334.077.100,00	313.137.100,00	250.577.100,00	-83.500.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Masyarakat, OPD Pemda DIY		3.934.700.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.16.03.1.02.0016	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda																			
			Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda				1 Laporan	1 Laporan	270.883.900,00	249.943.900,00	187.383.900,00	-83.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			484.700.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.16.03.1.02.0030	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi																			
			Jumlah Perangkat Daerah di pemerintah provinsi yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi				37 perangkat daerah	38 perangkat daerah	63.193.200,00	63.193.200,00	63.193.200,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			3.450.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN							837.465.500,00	837.465.500,00	779.405.900,00	-58.059.600,00							9.343.868.000,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1.	2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Skor Kematangan Keamanan Informasi (Indeks KAMI) Pemda DIY				631 skor	631 skor	837.465.500,00	837.465.500,00	779.405.900,00	8.506.402.500,00						9.343.868.000,00		
	2.21.02.1.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Terselenggaranya Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi				100 %	100 %	837.465.500,00	837.465.500,00	779.405.900,00	-58.059.600,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	OPD Pemda DIY		9.343.868.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21.02.1.01.0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik				1 Laporan	1 Laporan	173.574.300,00	173.574.300,00	128.654.700,00	-44.919.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan		5.769.668.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.21.02.1.01.0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi				37 Perangkat Daerah	38 Perangkat Daerah	663.891.200,00	663.891.200,00	650.751.200,00	-13.140.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan		3.574.200.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							33.616.480.700,00	28.871.324.100,00	24.200.564.900,00	-9.415.915.800,00						53.750.000.000,00		
1.	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Indeks Teknologi Informasi dan Komunikasi				2.53 skor	2.53 skor	33.616.480.700,00	28.871.324.100,00	24.200.564.900,00	20.133.519.300,00						53.750.000.000,00		
	2.22.08.5.06	Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Terlaksananya Sarana dan Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan				100 %	100 %	33.616.480.700,00	28.121.324.100,00	23.706.165.900,00	-9.910.314.800,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Masyarakat, OPD Pemda DIY		53.000.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.22.08.5.06.0002	Pembangunan Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital																		
			Jumlah Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital yang Dibangun				1 Objek	1 Objek	33.616.480.700,00	28.121.324.100,00	23.706.165.900,00	-9.910.314.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan		53.000.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.22.08.5.09	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Terlaksananya Publikasi Seni dan Budaya Daerah				-	100 %	0,00	750.000.000,00	494.399.000,00	494.399.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Masyarakat, OPD Pemda DIY		750.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.22.08.5.09.0007	Publikasi Seni dan Budaya Daerah																		
			Jumlah Dokumen Publikasi Seni dan Budaya Daerah				-	4 Dokumen	0,00	750.000.000,00	494.399.000,00	494.399.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan		750.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		<b>DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH</b>																		
									103.342.701.356,00	48.363.098.139,00	45.693.212.915,00	-57.649.488.441,00						114.646.266.000,00		
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							18.923.630.000,00	388.128.000,00	388.128.000,00	-18.535.502.000,00						14.500.000.000,00		
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							18.923.630.000,00	388.128.000,00	388.128.000,00	-18.535.502.000,00						14.500.000.000,00		
1.	1.03.13	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	Jumlah Sentra UKM yang maju di Satuan Ruang Strategis				1 sentra	1 sentra	18.923.630.000,00	388.128.000,00	388.128.000,00	-4.423.630.000,00						14.500.000.000,00		
	1.03.13.5.02	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis				6 dokumen	6 dokumen	18.923.630.000,00	388.128.000,00	388.128.000,00	-18.535.502.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	UMKM		14.500.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	1.03.13.5.02.0002	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan																		
			Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan				1 Dokumen	0 Dokumen	4.750.000.000,00	0,00	0,00	-4.750.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak		0,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	
	1.03.13.5.02.0008	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Merapi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis				6 Dokumen	1 Dokumen	14.173.630.000,00	388.128.000,00	388.128.000,00	-13.785.502.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromartim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			14.500.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							84.419.071.356,00	47.974.970.139,00	45.305.084.915,00	-39.113.986.441,00							100.146.266.000,00	
	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH							10.390.876.513,00	11.297.050.789,00	10.785.491.109,00	394.614.596,00							11.146.266.000,00	
1.	2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				85 angka	85 angka	10.161.992.513,00	10.143.266.789,00	9.926.183.609,00	-151.092.513,00							10.010.900.000,00	
	2.17.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100 %	100 %	21.638.000,00	21.638.000,00	21.638.000,00	0,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Dinas Koperasi dan UKM		25.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	7.250.000,00	7.250.000,00	7.250.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			13.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	7.908.000,00	7.908.000,00	7.908.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			7.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	6.480.000,00	6.480.000,00	6.480.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			5.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100 %	100 %	8.323.011.963,00	8.304.286.239,00	8.121.740.059,00	-201.271.904,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Dinas Koperasi dan UKM		7.830.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				56 Orang/ Bulan	55 Orang/ Bulan	8.292.506.063,00	8.273.780.339,00	8.091.234.159,00	-201.271.904,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBUJUKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			7.750.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	18.540.000,00	18.540.000,00	18.540.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			70.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	3.276.250,00	3.276.250,00	3.276.250,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			3.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Trivulanan/Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Trivulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Trivulanan/Semesteran SKPD				13 Laporan	13 Laporan	8.689.650,00	8.689.650,00	8.689.650,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			7.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				100 %	100 %	13.200.000,00	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Dinas Koperasi dan UKM		14.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	4 Laporan	13.200.000,00	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			14.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah				100 %	100 %	182.111.700,00	182.111.700,00	121.617.700,00	-60.494.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			219.200.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.290.000,00	3.290.000,00	3.290.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			3.500.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			21.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			1.200.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			6.500.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	1.799.700,00	1.799.700,00	1.799.700,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			2.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	149.822.000,00	149.822.000,00	89.328.000,00	-60.494.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			185.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100 %	100 %	20.830.000,00	20.830.000,00	20.830.000,00	0,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Dinas Koperasi dan UKM		265.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	4.520.000,00	4.520.000,00	4.520.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			155.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	16.310.000,00	16.310.000,00	16.310.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			110.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	100 %	1.283.958.450,00	1.283.958.450,00	1.262.088.450,00	-21.870.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Dinas Koperasi dan UKM		1.310.700.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	2 Laporan	683.750,00	683.750,00	683.750,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			700.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	452.159.500,00	452.159.500,00	452.159.500,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			460.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	831.115.200,00	831.115.200,00	809.245.200,00	-21.870.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			850.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	100 %	317.242.400,00	317.242.400,00	365.069.400,00	47.827.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Dinas Koperasi dan UKM		347.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	42.347.900,00	42.347.900,00	42.347.900,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			45.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				17 Unit	15 Unit	138.161.500,00	138.161.500,00	136.328.500,00	-1.833.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			140.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				79 Unit	80 Unit	56.616.000,00	56.616.000,00	56.616.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			75.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	59.633.000,00	59.633.000,00	109.293.000,00	49.660.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			65.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				40 Unit	40 Unit	20.484.000,00	20.484.000,00	20.484.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			22.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	2.17.02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Jumlah Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam pada koperasi yang Memiliki Ijin Usaha Simpan Pinjam terhadap jumlah Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam pada Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1(Satu) Daerah Provinsi Kontribusi koperasi simpan pinjam dan unit usaha simpan pinjam yang memiliki ijin simpan pinjam terhadap koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi (%)				19 n/a unit %	19 n/a unit %	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	1.000.000,00							9.000.000,00	
	2.17.02.1.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				20 izin	20 izin	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromartim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Koperasi		9.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.02.1.01.0002	Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi																		
			Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam				1 Unit Usaha	1 Unit Usaha	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromartim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			9.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
3.	2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	"Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya (tata kelola, manajemen resiko, kinerja keuangan, permodalan) " Presentase koperasi yang meningkat kualitasnya (%)				28 n/a koperasi %	28 n/a koperasi %	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	1.000.000,00							11.000.000,00	
	2.17.03.1.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi dengan Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang Diperiksa dan Diawasi				10 koperasi	10 koperasi	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromartim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Koperasi		11.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.03.1.01.0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi																		
			Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi				3 Unit Usaha	3 Unit Usaha	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromartim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			11.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
4.	2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Jumlah KSP/USP yang meningkat hasil pemeriksaan kesehatannya				37 koperasi	37 koperasi	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	500.000,00							3.000.000,00	
	2.17.04.1.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-				-	-	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00			-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Koperasi		3.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.04.1.01.0003	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan																		
			Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan				35 Unit Usaha	35 Unit Usaha	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			3.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
5.	2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase peningkatan pemahaman peserta diklat koperasi dan UMKM Jumlah koperasi dan UMKM yang meningkat kapasitas SDMnya				96 n/a % unit usaha	96 n/a % unit usaha	33.300.000,00	33.300.000,00	33.300.000,00	21.700.000,00							55.000.000,00	
	2.17.05.1.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah peserta pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yg wilayah lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 daerah provinsi				725 orang	725 orang	33.300.000,00	33.300.000,00	33.300.000,00	0,00			-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Koperasi		55.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.05.1.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian				80 Orang	80 Orang	33.300.000,00	33.300.000,00	33.300.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			55.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
6.	2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Jumlah koperasi yang memenuhi standar amalgamasi (keinginan untuk bergabung), memiliki off taker, memiliki akses pembiayaan, koperasi multi pihak, digitalisasi dalam pelayanan dan usaha koperasi dan jumlah koperasi modern				90 n/a koperasi koperasi	90 n/a koperasi koperasi	22.100.000,00	190.100.000,00	131.600.000,00	107.900.000,00							130.000.000,00	
	2.17.06.1.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang diberdayakan melalui Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha				60 koperasi	60 koperasi	22.100.000,00	190.100.000,00	131.600.000,00	109.500.000,00			-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Koperasi		130.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.06.1.01.0002	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha																		
			Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha				3 Unit Usaha	3 Unit Usaha	22.100.000,00	190.100.000,00	131.600.000,00	109.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			130.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
7.	2.17.07	PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Jumlah Usaha Mikro Kecil Binaan yang Diberikan Pendampingan aspek SDM dan produksi "Jumlah Wirasaha Pemula (tahun n) " Jumlah Wirasaha Pemula (kumulatif)				24754 550 n/a UMKM orang orang	24754 550 n/a UMKM orang orang	85.985.000,00	664.085.000,00	515.932.000,00	510.381.000,00							596.366.000,00	
	2.17.07.1.01	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kamitiran, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah wirasaha yang meningkat kapasitas usaha, SDM, dan produk sehingga memiliki kontribusi dalam pertumbuhan ekonomi				785 orang	785 orang	85.985.000,00	664.085.000,00	515.932.000,00	429.947.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromartim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	UMKM		596.366.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.07.1.01.0001	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan																		
			Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan				5 Unit Usaha	5 Unit Usaha	51.591.000,00	629.691.000,00	481.538.000,00	429.947.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromartim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			560.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.07.1.01.0002	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan																		
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan				60 Orang	60 Orang	34.394.000,00	34.394.000,00	34.394.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromartim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			36.366.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
8.	2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Usaha Mikro Kecil Binaan yang Diberikan Pendampingan SDM, Kelembagaan, Produksi, Keuangan, Pasar dan Digital Marketing Jumlah UMKM dibina yang berkembang usahanya				0,45 n/a % UMKM	0,45 n/a % UMKM	66.999.000,00	245.799.000,00	157.975.500,00	264.001.000,00							331.000.000,00	
	2.17.08.1.01	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Jumlah UKM yang berkembang usahanya (aspek SDM, kelembagaan, produksi, keuangan, pasar dan digital marketing)				970 unit usaha	970 unit usaha	66.999.000,00	245.799.000,00	157.975.500,00	90.976.500,00			-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	UMKM		331.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.08.1.01.0001	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi																		
			Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi				970 Unit Usaha	390 Unit Usaha	44.000.000,00	222.800.000,00	137.275.500,00	93.275.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			325.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.08.1.01.0002	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM																		
			Jumlah Pelaku UMKM yang Memahami Literasi Hukum				30 Orang	30 Orang	22.000.000,00	22.000.000,00	20.700.000,00	-1.300.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			5.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.08.1.01.0006	Fasilitasi Inkubator Usaha Kecil																		
			Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi				30 Unit Usaha	0 Unit Usaha	999.000,00	999.000,00	0,00	-999.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			1.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							74.028.194.843,00	36.677.919.350,00	34.519.593.806,00	-39.508.601.037,00						89.000.000.000,00		
1.	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Jumlah Pelaku Usaha KUMKM Binaan yang Naik Kelas. Jumlah desa preneur Indeks Kepuasan Masyarakat				2378 KUMKM 81 85,26 angka indeks	2378 KUMKM 81 85,26 angka indeks	74.028.194.843,00	36.677.919.350,00	34.519.593.806,00	14.971.805.157,00						89.000.000.000,00		
	2.22.08.5.04	Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya	Terlaksananya tata kelola, pengembangan dan nominasi cagar budaya dan warisan budaya				100 angka	100 angka	22.163.088.843,00	14.419.904.950,00	14.103.428.362,00	-8.059.660.481,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	UMKM		23.000.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.22.08.5.04.0003	Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia																		
			Jumlah Objek Warisan Budaya Nasional dan Dunia yang masuk Nominasi				1 Objek	1 Objek	22.163.088.843,00	14.419.904.950,00	14.103.428.362,00	-8.059.660.481,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			23.000.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.22.08.5.06	Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Tersedianya sarana dan prasarana budaya				100 angka	100 angka	11.662.000.000,00	1.550.000.000,00	1.550.000.000,00	-10.112.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	UMKM		12.000.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.22.08.5.06.0001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya				1 Unit	2 Unit	11.662.000.000,00	1.550.000.000,00	1.550.000.000,00	-10.112.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			12.000.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.22.08.5.08	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	Jumlah industri kreatif yang berkembang usahanya (dari 6 aspek)				100 angka	100 angka	21.040.500.000,00	12.903.100.000,00	11.681.319.638,00	-9.359.180.362,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	KUMKM		24.000.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.22.08.5.08.0003	Pengembangan Industri Kreatif																		
			Jumlah Industri Kreatif yang Dikembangkan				3500 Unit	3500 Unit	21.040.500.000,00	12.903.100.000,00	11.681.319.638,00	-9.359.180.362,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			24.000.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.22.08.5.09	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Jumlah desa preneur yang meningkat statusnya				30 desa	30 desa	19.162.606.000,00	7.804.914.400,00	7.184.845.806,00	-11.977.760.194,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Desa preneur		30.000.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.22.08.5.09.0017	Pengembangan Kewirausahaan Desa																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Pengembangan Kewirausahaan Desa				18 Laporan	15 Laporan	19.162.606.000,00	7.804.914.400,00	7.184.845.806,00	-11.977.760.194,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			30.000.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU							12.792.269.842,00	13.165.059.615,00	12.093.569.081,00	-698.700.761,00							13.174.391.959,00	
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							12.792.269.842,00	13.165.059.615,00	12.093.569.081,00	-698.700.761,00							13.174.391.959,00	
2.18		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL							11.592.269.842,00	12.296.459.615,00	11.675.623.007,00	83.353.165,00							11.674.391.959,00	
1.	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				88,35 skor	88,35 skor	11.188.137.942,00	11.346.927.715,00	10.945.769.107,00	-117.745.983,00							11.070.391.959,00	
	2.18.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi				8 dokumen	8 dokumen	16.819.000,00	16.819.000,00	16.819.000,00	0,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Internal OPD, Instansi Mitra		24.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	9.869.000,00	9.869.000,00	9.869.000,00	0,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			12.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				3 Dokumen	3 Dokumen	3.270.000,00	3.270.000,00	3.270.000,00	0,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			5.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	3 Laporan	3.680.000,00	3.680.000,00	3.680.000,00	0,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			7.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Keuangan				3 Dokumen	3 Dokumen	9.562.996.892,00	9.724.336.665,00	9.126.375.177,00	-436.621.715,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Internal OPD dan Lintas OPD		9.057.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				50 Orang/ Bulan	71 Orang/ Bulan	9.545.142.892,00	9.706.482.665,00	9.108.521.177,00	-436.621.715,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			9.000.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	10.345.000,00	10.345.000,00	10.345.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			40.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	7.509.000,00	7.509.000,00	7.509.000,00	0,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			17.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	10.515.000,00	10.515.000,00	10.515.000,00	0,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Internal OPD		12.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	10.515.000,00	10.515.000,00	10.515.000,00	0,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			12.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi umum Perangkat Daerah				511 paket/d okumen/lap ora	507 paket/d okumen/lap ora	422.267.300,00	426.267.300,00	358.721.300,00	-63.546.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Internal OPD dan Lintas OPD		494.286.400,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	20.337.300,00	20.337.300,00	20.337.300,00	0,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			21.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	64.248.400,00	64.248.400,00	64.248.400,00	0,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			67.210.400,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	42.143.600,00	42.143.600,00	37.209.600,00	-4.934.000,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			45.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	7.344.000,00	11.344.000,00	11.342.000,00	3.998.000,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			12.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	82.760.000,00	82.760.000,00	55.120.000,00	-27.640.000,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			82.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	1.764.000,00	1.764.000,00	1.764.000,00	0,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			12.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	142.554.000,00	142.554.000,00	109.404.000,00	-33.150.000,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			200.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				500 Dokumen	500 Dokumen	61.116.000,00	61.116.000,00	59.296.000,00	-1.820.000,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			55.076.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang				4 Unit	12 Unit	23.800.000,00	23.800.000,00	73.540.000,00	49.740.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Internal OPD		102.760.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	7 Unit	3.600.000,00	3.600.000,00	48.840.000,00	45.240.000,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			20.360.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	5 Unit	20.200.000,00	20.200.000,00	24.700.000,00	4.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			82.400.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan				3 laporan	3 laporan	785.380.000,00	785.380.000,00	762.683.600,00	-22.696.400,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Internal OPD dan Lintas OPD		769.922.400,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			8.600.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	152.320.000,00	152.320.000,00	129.623.600,00	-22.696.400,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			152.070.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	628.560.000,00	628.560.000,00	628.560.000,00	0,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			609.252.400,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.18.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang terpelihara				193 Unit	173 Unit	366.359.750,00	359.809.750,00	597.115.030,00	230.755.280,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Internal OPD		610.423.159,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	36.039.000,00	36.039.000,00	36.039.000,00	0,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			37.056.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				7 Unit	7 Unit	157.641.750,00	163.641.750,00	163.641.750,00	6.000.000,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			157.243.400,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				23 Unit	1 Unit	8.026.000,00	8.026.000,00	1.750.000,00	-6.276.000,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			13.816.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				94 Unit	94 Unit	69.625.000,00	59.625.000,00	60.645.000,00	-8.980.000,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			71.588.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	3 Unit	57.498.000,00	57.498.000,00	300.059.280,00	242.561.280,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			294.739.759,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				67 Unit	67 Unit	37.530.000,00	34.980.000,00	34.980.000,00	-2.550.000,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			35.980.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.	2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah Proyek Siap Jual (PRO)				1 Lokus	1 Lokus	14.425.000,00	14.425.000,00	4.425.000,00	85.575.000,00							100.000.000,00	
	2.18.02.1.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Provinsi				1 Dokumen	1 Dokumen	14.425.000,00	14.425.000,00	4.425.000,00	-10.000.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Masyarakat & Pelaku Usaha		100.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.1.02.0005	Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi																		
			Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Provinsi				1 Dokumen	1 Dokumen	14.425.000,00	14.425.000,00	4.425.000,00	-10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			100.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
3.	2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Kepeminatan Investasi				14 buah	14 buah	29.310.000,00	29.310.000,00	29.310.000,00	70.690.000,00							100.000.000,00	
	2.18.03.1.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Promosi Penanaman Modal				1 dokumen	1 dokumen	29.310.000,00	29.310.000,00	29.310.000,00	0,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Masyarakat & Pelaku Usaha		100.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.03.1.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi				1 Dokumen	1 Dokumen	29.310.000,00	29.310.000,00	29.310.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			100.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
4.	2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				86,75 Skor	86,75 Skor	245.235.000,00	608.835.000,00	490.057.000,00	34.765.000,00							280.000.000,00	
	2.18.04.1.02	Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Pelaku usaha/Kegiatan usaha yang terlayani				910 Pelaku Usaha	910 Pelaku Usaha	245.235.000,00	608.835.000,00	490.057.000,00	244.822.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Masyarakat & Pelaku Usaha		280.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.1.02.0006	Penyediaan dan pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				300 Pelaku Usaha	300 Pelaku Usaha	32.819.000,00	396.419.000,00	296.441.000,00	263.622.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			50.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.1.02.0007	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik																		
			Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				600 Pelaku Usaha	600 Pelaku Usaha	203.758.000,00	203.758.000,00	184.958.000,00	-18.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			208.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.1.02.0008	Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko																		
			Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dan Pelaku Usaha				10 Kegiatan Usaha	10 Kegiatan Usaha	8.658.000,00	8.658.000,00	8.658.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			22.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
5.	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Jumlah Proyek Dilaporkan dalam LKPM				1036 kegiatan usaha	1036 kegiatan usaha	48.550.000,00	230.350.000,00	139.450.000,00	5.450.000,00							54.000.000,00	
	2.18.05.1.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Terlaksananya Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penanaman Modal				35 Pelaku Usaha	35 Pelaku Usaha	48.550.000,00	230.350.000,00	139.450.000,00	90.900.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Masyarakat & Pelaku Usaha		54.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.1.01.0004	Pengawasan Penanaman Modal																		
			Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha				50 Kegiatan usaha	43 Kegiatan usaha	36.546.000,00	36.546.000,00	36.546.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			40.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.1.01.0005	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya																		
			Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya				10 Kegiatan usaha	8 Kegiatan usaha	7.804.000,00	7.804.000,00	7.804.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			8.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.1.01.0006	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha																		
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko				20 Pelaku Usaha	20 Pelaku Usaha	4.200.000,00	186.000.000,00	95.100.000,00	90.900.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			6.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
6.	2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Data dan Informasi Perizinan dan Penanaman Modal yang Diolah, Disajikan, dan Dimanfaatkan Sebagai Bahan Informasi Publik dan Perumusan Kebijakan				90 Persen	90 Persen	66.611.900,00	66.611.900,00	66.611.900,00	3.388.100,00							70.000.000,00	
	2.18.06.1.01	Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	Jenis Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan				5 Jenis	5 Jenis	66.611.900,00	66.611.900,00	66.611.900,00	0,00			-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Masyarakat & Pelaku Usaha		70.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.06.1.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik																		
			Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan				5 Dokumen	5 Dokumen	66.611.900,00	66.611.900,00	66.611.900,00	0,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			70.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							1.200.000.000,00	868.600.000,00	417.946.074,00	-782.053.926,00							1.500.000.000,00	
1.	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Jumlah Diplomas Kerjasama Luar Negeri yang aktif				3 Mitra KSLN	3 Mitra KSLN	1.200.000.000,00	868.600.000,00	417.946.074,00	300.000.000,00							1.500.000.000,00	
	2.22.08.5.09	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Jumlah kerja sama				1 Kerja sama	1 Kerja sama	1.200.000.000,00	868.600.000,00	417.946.074,00	-782.053.926,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan kualitas SDM	Masyarakat, Pelaku Usaha, Mitra Luar Negeri, dan Lintas OPD		1.500.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.22.08.5.09.0003	Misi Kebudayaan ke Dalam dan Luar Negeri dalam rangka Diplomas Budaya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Misi Kebudayaan ke Dalam negeri dalam rangka Diplomasi Budaya				1 Laporan	5 Laporan	1.200.000.000,00	868.600.000,00	417.946.074,00	-782.053.926,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan kualitas SDM			1.500.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		DINAS KEBUDAYAAN							440.821.935.810,00	355.758.127.989,00	319.139.849.072,00	-121.682.086.738,00							507.139.848.087,00	
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							440.821.935.810,00	355.758.127.989,00	319.139.849.072,00	-121.682.086.738,00							507.139.848.087,00	
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							440.821.935.810,00	355.758.127.989,00	319.139.849.072,00	-121.682.086.738,00							507.139.848.087,00	
1.	2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				90 angka	90 angka	36.056.965.616,00	36.512.018.789,00	33.512.337.032,00	10.260.500.294,00							46.317.465.910,00	
	2.22.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 dokumen	6 dokumen	2.831.800,00	2.831.800,00	2.831.800,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	masyarakat DIY		37.146.693,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	3 Dokumen	975.000,00	975.000,00	975.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			5.344.455,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	1.040.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			17.673.550,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	816.800,00	816.800,00	816.800,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			14.128.688,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100 %	100 %	27.423.042.316,00	27.880.777.489,00	26.236.427.132,00	-1.186.615.184,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	masyarakat DIY		31.429.668.329,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				2964 Orang/ Bulan	2964 Orang/ Bulan	27.272.909.716,00	27.730.644.889,00	26.089.534.532,00	-1.183.375.184,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			31.094.667.156,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	79.002.000,00	79.002.000,00	79.002.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			153.833.680,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	21.245.900,00	21.245.900,00	19.305.900,00	-1.940.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			26.967.362,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	27.978.100,00	27.978.100,00	26.678.100,00	-1.300.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			30.583.781,00	DINAS KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.22.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				100 %	100 %	77.101.600,00	77.101.600,00	77.101.600,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	masyarakat DIY		124.829.940,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	36.145.800,00	36.145.800,00	36.145.800,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			58.089.180,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah				100 %	100 %	370.350.100,00	367.668.100,00	329.156.100,00	-41.194.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	masyarakat DIY		1.478.749.498,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.432.000,00	10.432.000,00	10.432.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			76.805.600,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	37.395.200,00	37.395.200,00	37.395.200,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			80.031.260,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	4.958.000,00	4.958.000,00	4.958.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			10.363.300,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	34.343.000,00	34.343.000,00	34.343.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			114.995.310,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	29.045.000,00	29.045.000,00	26.825.000,00	-2.220.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			127.300.673,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	100 %	7.481.004.800,00	7.481.004.800,00	6.163.065.400,00	-1.317.939.400,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	masyarakat DIY		11.840.799.450,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			7.965.870,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	618.000.000,00	618.000.000,00	572.360.000,00	-45.640.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			670.994.434,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	1.176.156.000,00	1.176.156.000,00	1.176.156.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			2.548.571.400,00	DINAS KEBUDAYAAN
2.22.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	100 %	702.635.000,00	702.635.000,00	703.755.000,00	1.120.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	masyarakat DIY		1.406.272.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
2.22.01.1.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	42.419.000,00	42.419.000,00	42.419.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			65.064.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
2.22.01.1.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Periznannya				19 Unit	19 Unit	360.256.000,00	360.256.000,00	360.256.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			568.744.480,00	DINAS KEBUDAYAAN
2.22.01.1.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				35 Unit	30 Unit	26.255.000,00	26.255.000,00	26.255.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			53.691.780,00	DINAS KEBUDAYAAN
2.22.01.1.09.0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	39.480.000,00	39.480.000,00	39.480.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			94.251.060,00	DINAS KEBUDAYAAN
2.22.01.1.09.0010		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				55 Unit	49 Unit	36.192.000,00	36.192.000,00	36.192.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			85.865.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
2.	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase cagar budaya dan warisan budaya yang dilestarikan Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan Pengelolaan atribut warisan budaya dunia di Kawasan Sumbu Filosofis Jumlah aktivitas pelestarian sumber sejarah, karya bahasa/sastra, dan permuseuman Jumlah desa budaya yang sudah naik status menjadi desa mandiri budaya sampai dengan tahun n Persentase pemeliharaan dan pengembangan adat, tradisi, dan seni Indeks Kepuasan Masyarakat Taman Budaya Yogyakarta Indeks Kepuasan Masyarakat Museum Sonobudoyo				18 kegiatan	10 100 17 18 40 8 baik sangat baik % % % kegiatan desa % % indeks indeks	404.764.970.194,00	315.446.109.200,00	281.827.512.040,00	51.957.411.983,00							456.722.382.177,00	
2.22.08.5.01		Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman	Jumlah laporan pengelolaan sejarah, bahasa, sastra dan museum				23 laporan	23 laporan	14.650.200.000,00	9.598.898.200,00	5.203.820.200,00	-9.446.379.800,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan kualitas SDM	kelompok seni budaya, museum, organisasi penggiat budaya, pelajar, masyarakat umum		21.042.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
2.22.08.5.01.0001		Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan				6 Dokumen	2 Dokumen	3.500.000.000,00	1.637.155.000,00	853.890.000,00	-2.646.110.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan kualitas SDM			6.655.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
2.22.08.5.01.0002		Pembinaan, Pengembangan Bahasa dan Sastra																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dan Sastra				8 Laporan	7 Laporan	6.100.000.000,00	5.672.068.000,00	3.107.506.000,00	-2.992.494.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat penyesuaian kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan kualitas SDM			8.337.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN	
	2.22.08.5.01.0003	Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman																			
			Jumlah Permuseuman yang Dibina dan Dikelola				40 Unit	3 Unit	5.050.200.000,00	2.289.675.200,00	1.242.424.200,00	-3.807.775.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat penyesuaian kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan kualitas SDM			6.050.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN	
	2.22.08.5.04	Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya	Jumlah cagar budaya dan warisan budaya yang dilestarikan				266 Objek	256 Objek	25.403.102.444,00	19.497.845.400,00	14.549.567.800,00	-10.853.534.644,00			Memperkuat penyesuaian kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan kualitas SDM	penggiat budaya & komunitas, pelajar, akademisi, dan peneliti, masyarakat		36.729.622.644,00	DINAS KEBUDAYAAN	
	2.22.08.5.04.0001	Tata Kelola Cagar Budaya dan Warisan Budaya																			
			Jumlah objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang Dikelola				15 Objek	35 Objek	14.430.000.000,00	9.891.198.900,00	7.604.698.200,00	-6.825.301.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat penyesuaian kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan kualitas SDM			19.275.300.000,00	DINAS KEBUDAYAAN	
	2.22.08.5.04.0002	Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya																			
			Jumlah objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang Dikembangkan				6 Objek	11 Objek	5.000.000.000,00	7.497.637.000,00	5.257.662.000,00	257.662.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat penyesuaian kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan kualitas SDM			8.247.400.700,00	DINAS KEBUDAYAAN	
	2.22.08.5.04.0003	Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia																			
			Jumlah Objek Warisan Budaya Nasional dan Dunia yang masuk Nominasi				10 Objek	1 Objek	5.973.102.444,00	2.109.009.500,00	1.687.207.600,00	-4.285.894.844,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat penyesuaian kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan kualitas SDM			9.206.921.944,00	DINAS KEBUDAYAAN	
	2.22.08.5.06	Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Jumlah pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana budaya dan lembaga budaya				202 unit	30 unit	13.231.642.550,00	3.079.337.700,00	2.435.290.900,00	-10.796.351.650,00			Memperkuat penyesuaian kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan kualitas SDM	komunitas budaya, pelaku usaha kreatif & pariwisata, pelajar, akademisi, & peneliti, masyarakat		12.590.464.000,00	DINAS KEBUDAYAAN	
	2.22.08.5.06.0001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya				12 Unit	7 Unit	958.422.550,00	668.867.700,00	648.867.700,00	-309.554.850,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat penyesuaian kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan kualitas SDM			1.454.904.000,00	DINAS KEBUDAYAAN	
	2.22.08.5.06.0004	Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya				190 Unit	18 Unit	12.273.220.000,00	2.410.470.000,00	1.786.423.200,00	-10.486.796.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat penyesuaian kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan kualitas SDM			11.135.560.000,00	DINAS KEBUDAYAAN	
	2.22.08.5.07	Perencanaan dan Pengendalian Urusan Kebudayaan	Jumlah dokumen perencanaan, monitoring evaluasi dan kemitraan Jumlah Kab/Kota Penerima BKK keistimewaan Urusan Kebudayaan				21 dokumen 5 kab/kota	12 dokumen 5 kab/kota	5.891.442.000,00	2.956.433.700,00	2.037.444.400,00	-3.853.997.600,00			Memperkuat penyesuaian kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan kualitas SDM	masyarakat DIY		9.125.714.000,00	DINAS KEBUDAYAAN	
	2.22.08.5.07.0001	Perencanaan Program dan Kegiatan Urusan Kebudayaan																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Perencanaan Program dan Kegiatan yang Mengakomodir Urusan Kebudayaan				3 Dokumen	4 Dokumen	714.442.000,00	402.202.000,00	234.139.500,00	-480.302.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat penyesuaian kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan kualitas SDM			776.714.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
2.22.08.5.07.0002		Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan Urusan Kebudayaan																		
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan Urusan Kebudayaan *****)				4 Laporan	4 Laporan	450.000.000,00	272.478.300,00	201.387.100,00	-248.612.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat penyesuaian kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan kualitas SDM			484.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
2.22.08.5.07.0003		Membangun Kemitraan dengan Lembaga Pelestari Budaya																		
			Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Lembaga Pelestari Budaya				14 Dokumen	3 Dokumen	4.727.000.000,00	2.281.753.400,00	1.601.917.800,00	-3.125.082.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat penyesuaian kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan kualitas SDM			7.865.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
2.22.08.5.09		Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Fasilitasi adat, seni, tradisi, dan lembaga budaya				13 kegiatan	13 kegiatan	305.410.479.200,00	255.451.364.000,00	235.925.978.200,00	-69.484.501.000,00			Memperkuat penyesuaian kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan kualitas SDM	masyarakat DIY		317.214.365.500,00	DINAS KEBUDAYAAN
2.22.08.5.09.0001		Pembinaan dan Pengembangan Desa Budaya																		
			Jumlah Desa Budaya yang Dibina dan Dikembangkan				100 Desa	100 Desa	19.000.000.000,00	10.536.550.800,00	9.462.120.000,00	-9.537.880.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat penyesuaian kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan kualitas SDM			41.804.749.800,00	DINAS KEBUDAYAAN
2.22.08.5.09.0002		Pembinaan Lembaga Penggiat Seni																		
			Jumlah Lembaga Penggiat Seni yang Dibina				11 Lembaga	7 Lembaga	5.625.000.000,00	3.451.468.000,00	2.783.839.000,00	-2.841.161.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat penyesuaian kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan kualitas SDM			8.470.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
2.22.08.5.09.0003		Misi Kebudayaan ke Dalam dan Luar Negeri dalam rangka Diplomasi Budaya																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Misi Kebudayaan ke Dalam negeri dalam rangka Diplomasi Budaya				1 Laporan	1 Laporan	1.982.091.200,00	2.307.388.100,00	583.179.700,00	-1.398.911.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat penyesuaian kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan kualitas SDM			5.299.965.700,00	DINAS KEBUDAYAAN
2.22.08.5.09.0004		Penghargaan Seniman dan Budayawan																		
			Jumlah Seniman dan Budayawan yang Mendapatkan Penghargaan				38 Orang	41 Orang	2.200.000.000,00	1.636.546.000,00	1.577.164.000,00	-622.836.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat penyesuaian kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan kualitas SDM			3.025.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
2.22.08.5.09.0005		Festival Kebudayaan Yogyakarta																		
			Jumlah Laporan Festival Kebudayaan Yogyakarta				1 Laporan	1 Laporan	4.500.000.000,00	3.949.487.000,00	3.681.936.500,00	-818.063.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat penyesuaian kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan kualitas SDM			6.050.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
2.22.08.5.09.0006		Gelar Budaya Yogyakarta																		
			Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta				10 Laporan	9 Laporan	7.550.000.000,00	4.535.949.100,00	3.643.210.600,00	-3.906.789.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat penyesuaian kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan kualitas SDM			10.890.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
2.22.08.5.09.0007		Publikasi Seni dan Budaya Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Dokumen Publikasi Seni dan Budaya Daerah				7 Dokumen	5 Dokumen	5.823.388.000,00	1.509.468.000,00	1.009.785.000,00	-4.813.603.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat penyesuaian kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan kualitas SDM			7.096.650.000,00	DINAS KEBUDAYAAN	
	2.22.08.5.09.0008	Pembinaan Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi																			
			Jumlah Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi yang Dibina				340 Orang	272 Orang	2.800.000.000,00	571.000.000,00	318.057.000,00	-2.481.943.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat penyesuaian kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan kualitas SDM			3.388.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN	
	2.22.08.5.09.0009	Pembinaan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat																			
			Jumlah Laporan Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat				14 Laporan	4 Laporan	6.600.000.000,00	885.225.000,00	680.889.200,00	-5.919.110.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat penyesuaian kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan kualitas SDM			12.100.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN	
	2.22.08.5.09.0010	Selendang Sutera																			
			Jumlah Laporan Selendang Sutera				1 Laporan	1 Laporan	2.200.000.000,00	601.480.000,00	136.625.000,00	-2.063.375.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat penyesuaian kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan kualitas SDM			2.500.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN	
	2.22.08.5.09.0011	Penyelenggaraan Even Penggiat Seni																			
			Jumlah Laporan Even Penggiat Seni				2 Laporan	2 Laporan	7.530.000.000,00	11.927.578.000,00	7.668.639.200,00	138.639.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat penyesuaian kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan kualitas SDM			9.075.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN	
	2.22.08.5.09.0014	Penguatan Lembaga Pelestari Budaya																			
			Jumlah Laporan Penguatan Lembaga Pelestari Budaya				2 Laporan	2 Laporan	237.000.000.000,00	212.000.000.000,00	203.179.000.000,00	-33.821.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat penyesuaian kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan kualitas SDM			203.885.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN	
	2.22.08.5.09.0015	Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi																			
			Jumlah Laporan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi				7 Laporan	4 Laporan	2.600.000.000,00	1.539.224.000,00	1.201.533.000,00	-1.398.467.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat penyesuaian kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan kualitas SDM			3.630.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN	
		<b>MUSEUM NEGERI SONOBUDOYO</b>									<b>440.821.935.810,00</b>	<b>355.758.127.989,00</b>	<b>319.139.849.072,00</b>	<b>-121.682.086.738,00</b>					<b>507.139.848.087,00</b>		
	<b>2</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>							<b>440.821.935.810,00</b>	<b>355.758.127.989,00</b>	<b>319.139.849.072,00</b>	<b>-121.682.086.738,00</b>							<b>507.139.848.087,00</b>		
	<b>2.22</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN</b>							<b>440.821.935.810,00</b>	<b>355.758.127.989,00</b>	<b>319.139.849.072,00</b>	<b>-121.682.086.738,00</b>							<b>507.139.848.087,00</b>		
1.	2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				90 angka	90 angka	36.056.965.616,00	36.512.018.789,00	33.512.337.032,00	10.260.500.294,00							46.317.465.910,00		
	2.22.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terperuhnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100 %	100 %	27.423.042.316,00	27.880.777.489,00	26.236.427.132,00	-1.186.615.184,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	masyarakat DIY		31.429.668.329,00	DINAS KEBUDAYAAN	
	2.22.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	12.040.800,00	12.040.800,00	12.040.800,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			65.928.720,00	DINAS KEBUDAYAAN	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.22.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				100 %	100 %	77.101.600,00	77.101.600,00	77.101.600,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	masyarakat DIY		124.829.940,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	20.490.800,00	20.490.800,00	20.490.800,00	0,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			33.370.380,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah				100 %	100 %	370.350.100,00	367.668.100,00	329.156.100,00	-41.194.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	masyarakat DIY		1.478.749.498,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	8.382.000,00	8.382.000,00	8.382.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			69.372.800,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	87.442.000,00	87.442.000,00	87.442.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			226.175.300,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	22.568.000,00	22.568.000,00	22.568.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			46.634.849,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	23.040.000,00	23.040.000,00	23.040.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			36.799.488,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	7.090.000,00	7.090.000,00	7.090.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			65.389.490,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	1.764.000,00	1.764.000,00	1.764.000,00	0,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			11.817.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				7 Laporan	7 Laporan	51.000.000,00	48.914.000,00	23.792.000,00	-27.208.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			254.601.347,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	100 %	7.481.004.800,00	7.481.004.800,00	6.163.065.400,00	-1.317.939.400,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	masyarakat DIY		11.840.799.450,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			9.655.600,00	DINAS KEBUDAYAAN	
	2.22.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	1.629.661.200,00	1.629.661.200,00	357.361.800,00	-1.272.299.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			1.811.684.973,00	DINAS KEBUDAYAAN	
	2.22.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	2.347.797.600,00	2.347.797.600,00	2.347.797.600,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			3.652.952.340,00	DINAS KEBUDAYAAN	
	2.22.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	100 %	702.635.000,00	702.635.000,00	703.755.000,00	1.120.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	masyarakat DIY		1.406.272.000,00	DINAS KEBUDAYAAN	
	2.22.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	4 Unit	33.521.000,00	33.521.000,00	34.641.000,00	1.120.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			67.351.320,00	DINAS KEBUDAYAAN	
	2.22.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				26 Unit	14 Unit	11.837.000,00	11.837.000,00	11.837.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			63.166.800,00	DINAS KEBUDAYAAN	
	2.22.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	53.200.000,00	53.200.000,00	53.200.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			122.177.300,00	DINAS KEBUDAYAAN	
2.	2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan Nilai akreditasi permuseuman untuk Museum Sonobudoyo				-	100 A% nilai	0,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00							2.000.000.000,00		
	2.22.06.1.01	Pengelolaan Museum Provinsi	Jumlah museum provinsi yang dikelola				-	1 museum	0,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM	Pelaku seni, budayawan dan masyarakat		2.000.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN	
	2.22.06.1.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu																			
			Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan				-	1 Unit	0,00	600.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	DAK NON FISIK-BOP MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA -MUSEUM	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM			600.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN	
	2.22.06.1.01.0003	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum																			
			Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum				-	1 Unit	0,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	DAK NON FISIK-BOP MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA -MUSEUM	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM			1.000.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	2.22.06.1.01.0004	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia				-	1 Unit	0,00	400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	DAK NON FISIK-BOP MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA -MUSEUM	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM			400.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN	
3.	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase cagar budaya dan warisan budaya yang dilestarikan Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan Pengelolaan atribut warisan budaya dunia di Kawasan Sumbu Filosofis Jumlah aktivitas pelestarian sumber sejarah, karya bahasa/sastra, dan permuseuman Jumlah desa budaya yang sudah naik status menjadi desa mandiri budaya sampai dengan tahun n Persentase pemeliharaan dan pengembangan adat, tradisi, dan seni Indeks Kepuasan Masyarakat Taman Budaya Yogyakarta Indeks Kepuasan Masyarakat Museum Sonobudoyo				10 100 17 17 18 18 40 40 8 8 baik sangat baik % % % % kegiatan desa % indeks indeks	10 100 17 17 18 18 40 40 8 8 baik sangat baik % % % % kegiatan desa % indeks indeks	404.764.970.194,00	315.446.109.200,00	281.827.512.040,00	51.957.411.983,00							456.722.382.177,00		
	2.22.08.5.03	Penguatan Museum Sonobudoyo	Jumlah laporan pengelolaan dan pengembangan Museum Sonobudoyo				2 laporan	2 laporan	20.893.771.000,00	7.848.363.100,00	5.394.627.840,00	-15.499.143.160,00			Memperkuat penyaluran kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan kualitas SDM	pelajar, seniman, akademisi, masyarakat DIY	32.407.509.890,00	DINAS KEBUDAYAAN		
	2.22.08.5.03.0001	Pengelolaan Museum Sonobudoyo																			
			Jumlah Museum Sonobudoyo yang Dikelola				1 Unit	1 Unit	5.693.771.000,00	3.283.765.300,00	2.570.324.240,00	-3.123.446.760,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat penyaluran kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan kualitas SDM			7.407.509.890,00	DINAS KEBUDAYAAN	
	2.22.08.5.03.0002	Pengembangan Museum Sonobudoyo																			
			Jumlah Museum Sonobudoyo yang Dikembangkan				1 Unit	1 Unit	15.200.000.000,00	4.564.597.800,00	2.824.303.600,00	-12.375.696.400,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat penyaluran kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan kualitas SDM			25.000.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN	
		<b>TAMAN BUDAYA YOGYAKARTA</b>																			
									<b>440.821.935.810,00</b>	<b>355.758.127.989,00</b>	<b>319.139.849.072,00</b>	<b>-121.682.086.738,00</b>							<b>507.139.848.087,00</b>		
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							<b>440.821.935.810,00</b>	<b>355.758.127.989,00</b>	<b>319.139.849.072,00</b>	<b>-121.682.086.738,00</b>							<b>507.139.848.087,00</b>		
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							<b>440.821.935.810,00</b>	<b>355.758.127.989,00</b>	<b>319.139.849.072,00</b>	<b>-121.682.086.738,00</b>							<b>507.139.848.087,00</b>		
1.	2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				90 angka	90 angka	36.056.965.616,00	36.512.018.789,00	33.512.337.032,00	10.260.500.294,00							46.317.465.910,00		
	2.22.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100 %	100 %	27.423.042.316,00	27.880.777.489,00	26.236.427.132,00	-1.186.615.184,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	masyarakat DIY	31.429.668.329,00	DINAS KEBUDAYAAN		
	2.22.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	9.865.800,00	9.865.800,00	9.865.800,00	0,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			57.687.630,00	DINAS KEBUDAYAAN	
	2.22.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				100 %	100 %	77.101.600,00	77.101.600,00	77.101.600,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	masyarakat DIY	124.829.940,00	DINAS KEBUDAYAAN		
	2.22.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	20.465.000,00	20.465.000,00	20.465.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			33.370.380,00	DINAS KEBUDAYAAN
2.22.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah				100 %	100 %	370.350.100,00	367.668.100,00	329.156.100,00	-41.194.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	masyarakat DIY		1.478.749.498,00	DINAS KEBUDAYAAN
2.22.01.1.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	9.862.000,00	9.862.000,00	9.862.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			101.581.600,00	DINAS KEBUDAYAAN
2.22.01.1.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	9.537.900,00	9.537.900,00	9.537.900,00	0,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			45.235.060,00	DINAS KEBUDAYAAN
2.22.01.1.06.0003		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.424.000,00	3.424.000,00	3.424.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			7.124.769,00	DINAS KEBUDAYAAN
2.22.01.1.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.769.000,00	5.769.000,00	5.769.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			45.096.200,00	DINAS KEBUDAYAAN
2.22.01.1.06.0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	1.764.000,00	1.764.000,00	1.764.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			10.908.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
2.22.01.1.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	2 Laporan	22.534.000,00	21.938.000,00	10.768.000,00	-11.766.000,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			148.517.452,00	DINAS KEBUDAYAAN
2.22.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	100 %	7.481.004.800,00	7.481.004.800,00	6.163.065.400,00	-1.317.939.400,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	masyarakat DIY		11.840.799.450,00	DINAS KEBUDAYAAN
2.22.01.1.08.0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			6.517.530,00	DINAS KEBUDAYAAN
2.22.01.1.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	311.030.000,00	311.030.000,00	311.030.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			838.743.043,00	DINAS KEBUDAYAAN
2.22.01.1.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	1.393.860.000,00	1.393.860.000,00	1.393.860.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			2.293.714.260,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	100 %	702.635.000,00	702.635.000,00	703.755.000,00	1.120.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	masyarakat DIY		1.406.272.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	4 Unit	71.322.000,00	71.322.000,00	71.322.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			112.252.200,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				14 Unit	6 Unit	4.598.000,00	4.598.000,00	4.598.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			41.058.420,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	5 Unit	23.555.000,00	23.555.000,00	23.555.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			132.649.640,00	DINAS KEBUDAYAAN
2.	2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang dikelola				-	3 objek	0,00	1.800.000.000,00	1.800.000.000,00	2.100.000.000,00							2.100.000.000,00	
	2.22.02.1.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah laporan pengelolaan kebudayaan				-	3 laporan	0,00	1.800.000.000,00	1.800.000.000,00	1.800.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM	Pelaku seni, budayawan dan masyarakat		2.100.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.02.1.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan																		
			Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi, Dikembangkan dan Dimanfaatkan				-	1 Objek	0,00	631.400.000,00	631.400.000,00	631.400.000,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	DAK NON FISIK-BOP MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA-TAMAN BUDAYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM			750.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.02.1.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan																		
			Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan				-	40 Orang	0,00	718.300.000,00	718.300.000,00	718.300.000,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	DAK NON FISIK-BOP MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA-TAMAN BUDAYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM			750.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.02.1.01.0003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Budaya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Taman Budaya yang Disediakan dan Dipelihara				-	1 Unit	0,00	450.300.000,00	450.300.000,00	450.300.000,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	DAK NON FISIK-BOP MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA-TAMAN BUDAYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM			600.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
3.	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase cagar budaya dan warisan budaya yang dilestarikan Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan Pengelolaan atribut warisan budaya dunia di Kawas Sumbu Filosofis Jumlah aktivitas pelestarian sumber sejarah, karya bahasa/sastra, dan permuseuman Jumlah desa budaya yang sudah naik status menjadi desa mandiri budaya sampai dengan tahun n Persentase pemeliharaan dan pengembangan adat, tradisi, dan seni Indeks Kepuasan Masyarakat Taman Budaya Yogyakarta Indeks Kepuasan Masyarakat Museum Sonobudoyo				10 100 17 18 40 8 baik sangat baik % % % % % % % % % % % % % % %	100 100 17 18 40 8 baik sangat baik % % % % % % % % % % % % % % %	404.764.970.194,00	315.446.109.200,00	281.827.512.040,00	51.957.411.983,00							456.722.382.177,00	
	2.22.08.5.05	Pengelolaan Taman Budaya	Jumlah Event Budaya Tingkat Regional, Nasional dan Internasional yang diselenggarakan di Taman Budaya Yogyakarta selama satu tahun				13 event	13 event	19.284.333.000,00	17.013.867.100,00	16.280.782.700,00	-3.003.550.300,00			Memperkuat penyelarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan kualitas SDM	Pelaku seni, budayawan, dan masyarakat		27.612.706.143,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.08.5.05.0001	Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya Yogyakarta																		
			Jumlah Taman Budaya Yogyakarta yang Dikelola dan Dikembangkan				1 Objek	1 Objek	19.284.333.000,00	17.013.867.100,00	16.280.782.700,00	-3.003.550.300,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat penyelarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan kualitas SDM		27.612.706.143,00	DINAS KEBUDAYAAN	
		DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH							34.999.032.868,00	26.574.822.143,00	25.775.097.492,00	-9.223.935.376,00						63.190.339.904,00		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							34.999.032.868,00	26.574.822.143,00	25.775.097.492,00	-9.223.935.376,00							63.190.339.904,00	
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							13.278.000.400,00	3.581.361.000,00	3.200.469.700,00	-10.077.530.700,00							27.850.005.425,00	
1.	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Jumlah Arsip dan Bahan Pustaka Kraton dan Kadipaten yang dilindungi dan dikonservasi				3000 dokumen	3000 dokumen	13.278.000.400,00	3.581.361.000,00	3.200.469.700,00	14.572.005.025,00							27.850.005.425,00	
	2.22.08.5.02	Perlindungan dan Konservasi Arsip Kraton dan Kadipaten	Jumlah jenis layanan perlindungan dan konservasi				2 jenis	2 jenis	13.278.000.400,00	3.581.361.000,00	3.200.469.700,00	-10.077.530.700,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	DPAD DIY		27.850.005.425,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.22.08.5.02.0002	Pengelolaan Arsip Bernilai Sejarah Kasultanan dan Kadipaten																		
			Jumlah Arsip Bernilai Sejarah Kasultanan dan Kadipaten				60000 Dokumen	17000 Dokumen	7.864.000.400,00	1.922.604.000,00	1.677.488.000,00	-6.186.512.400,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan		18.722.224.100,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	
	2.22.08.5.02.0003	Pengelolaan Koleksi dan Pengembangan Literasi Budaya																		
			Jumlah Koleksi dan Pengembangan Literasi Budaya				65350 Unit	18500 Unit	5.414.000.000,00	1.658.757.000,00	1.522.981.700,00	-3.891.018.300,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM		9.127.781.325,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	
	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN							21.349.632.968,00	22.432.811.643,00	22.071.530.542,00	721.897.574,00							34.720.334.479,00	
1.	2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				91 angka	91 angka	20.040.389.118,00	19.949.001.793,00	19.750.024.492,00	3.807.310.561,00							23.847.699.679,00	
	2.23.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja				10 Dokumen N/A Dokumen	10 Dokumen N/A Dokumen	8.270.000,00	8.215.000,00	5.815.000,00	-2.455.000,00			-	-		DPAD DIY	14.768.800,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	2.035.000,00	1.985.000,00	695.000,00	-1.340.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			4.768.800,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD					4 Dokumen	4 Dokumen	2.955.000,00	2.955.000,00	1.845.000,00	-1.110.000,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			5.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					2 Laporan	2 Laporan	3.280.000,00	3.275.000,00	3.275.000,00	-5.000,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			5.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan				14 laporan	14 laporan	15.386.509.968,00	15.299.853.643,00	15.083.627.392,00	-302.882.576,00			-	-	DPAD DIY		16.170.465.879,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					100 Orang/ Bulan	96 Orang/ Bulan	15.355.702.068,00	15.269.045.743,00	15.052.079.492,00	-303.622.576,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			16.078.049.879,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					12 Dokumen	12 Dokumen	12.174.000,00	12.174.000,00	12.174.000,00	0,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			41.416.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					1 Laporan	1 Laporan	2.360.700,00	2.360.700,00	2.360.700,00	0,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			5.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Trwulanan/Semesteran SKPD					12 Laporan	12 Laporan	4.882.200,00	4.882.200,00	4.882.200,00	0,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			6.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan pengelolaan pengelola barang sesuai peraturan perundangan yang berlaku				4 laporan	4 laporan	37.624.500,00	37.624.500,00	37.624.500,00	0,00			-	-	DPAD DIY		42.775.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					4 Laporan	4 Laporan	22.606.000,00	22.606.000,00	22.606.000,00	0,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			22.775.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen terlaksananya penilaian angka kredit jabatan fungsional				4 Dokumen	1 Dokumen	900.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00			-	-	DPAD DIY		5.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai					2 Dokumen	1 Dokumen	900.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			5.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis administrasi umum perangkat daerah				5 jenis	5 jenis	94.015.100,00	86.654.100,00	95.597.700,00	1.582.600,00			-	-	DPAD DIY		304.500.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					1 Paket	1 Paket	2.100.400,00	2.100.400,00	2.100.400,00	0,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			5.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					3 Paket	3 Paket	6.747.200,00	6.747.200,00	9.947.200,00	3.200.000,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			15.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					2 Paket	2 Paket	922.000,00	922.000,00	922.000,00	0,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			5.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					1 Paket	1 Paket	3.391.000,00	3.391.000,00	12.001.000,00	8.610.000,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			5.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	2 Laporan	57.788.000,00	50.427.000,00	24.963.000,00	-32.825.000,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			100.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah				4 unit	4 unit	8.260.000,00	8.260.000,00	8.260.000,00	0,00			-	-	DPAD DIY		5.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	4 Unit	8.260.000,00	8.260.000,00	8.260.000,00	0,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			5.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah				3 jenis	3 jenis	4.009.795.000,00	4.012.480.000,00	3.899.682.400,00	-110.112.600,00			-	-	DPAD DIY		6.017.950.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.500.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	1.277.100.000,00	1.277.100.000,00	1.277.100.000,00	0,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.500.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	1.517.295.000,00	1.519.980.000,00	1.519.980.000,00	2.685.000,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			4.500.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah				16 unit	101 unit	495.014.550,00	495.014.550,00	618.517.500,00	123.502.950,00			-	-	DPAD DIY		1.287.240.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Periznannya				16 Unit	15 Unit	75.718.000,00	75.718.000,00	75.713.000,00	-5.000,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			100.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				2 Unit	6 Unit	4.465.000,00	4.465.000,00	4.465.000,00	0,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			100.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			100.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	8 Unit	48.630.000,00	48.630.000,00	76.274.950,00	27.644.950,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			100.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
2.	2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan Peningkatan Anggota Sepatu Jolifa (Sistem Perpustakaan Terpadu Jogja Library for All) Jumlah Perpustakaan yang memenuhi Standar Nasional Perpustakaan				15 51 N/A % perpustakaan	15 51 N/A % perpustakaan	1.269.154.150,00	2.395.980.150,00	2.246.292.350,00	9.278.480.650,00							10.547.634.800,00	
	2.23.02.1.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah perpustakaan ber-SNP Jumlah Perpustakaan yang Dibina Sesuai Kewenangan Provinsi dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan				565 perpustakaan	565 perpustakaan	986.589.450,00	1.590.977.450,00	1.531.565.450,00	544.976.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM	DPAD DIY		1.965.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.02.1.01.0002	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi																		
			Jumlah perpustakaan yang Dikembangkan dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan di wilayah provinsi sesuai kewenangannya				1 Perpustakaan	1 Perpustakaan	92.273.000,00	198.313.000,00	166.411.000,00	74.138.000,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM		120.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	
	2.23.02.1.01.0003	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi																		
			Jumlah koleksi perpustakaan khas daerah tingkat provinsi yang Dikembangkan				-	100 Eksemplar	0,00	482.508.000,00	482.508.000,00	482.508.000,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	DAK NON FISIK-DANA BANTUAN PEN GEMBANGAN PROGRAM PER PUSTAKAAN DAERAH	-	Peningkatan kualitas SDM		500.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	
	2.23.02.1.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Perpustakaan pada satuan Pendidikan menengah atas dan Pendidikan khusus yang Dibina sesuai kewenangan Provinsi dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan				8 Perpustakaan	8 Perpustakaan	24.000.000,00	24.000.000,00	11.640.000,00	-12.360.000,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM			25.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.02.1.01.0006	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi																		
			Jumlah tenaga perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi				50 Orang	50 Orang	43.855.000,00	49.135.000,00	35.845.000,00	-8.010.000,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM			35.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.02.1.01.0008	Pengembangan Perpustakaan Deposit																		
			Jumlah Perpustakaan Deposit yang Dikembangkan				1 Perpustakaan	1 Perpustakaan	1.225.000,00	1.225.000,00	1.225.000,00	0,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM			5.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.02.1.01.0009	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka																		
			Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dikelola dan Dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan				400 Eksemplar	400 Eksemplar	156.895.000,00	156.895.000,00	156.895.000,00	0,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM			160.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.02.1.01.0017	Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Provinsi																		
			Jumlah Perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan provinsi dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan				5 Perpustakaan	5 Perpustakaan	3.000.000,00	3.000.000,00	1.140.000,00	-1.860.000,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM			5.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.02.1.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah masyarakat gemar membaca di masyarakat jumlah sosialisasi budaya baca				48 kali N/A kali	5 kali N/A kali	282.564.700,00	805.002.700,00	714.726.900,00	432.162.200,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM	DPAD DIY		8.582.634.800,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.02.1.02.0001	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat																		
			Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus				5 Lokus	6 Lokus	180.595.400,00	216.081.400,00	196.681.400,00	16.086.000,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-DANA BANTUAN PEN GEMBANGAN PROGRAM PER PUSTAKAAN DAERAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM			8.377.634.800,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.02.1.02.0003	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca																		
			Jumlah orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca				3 Orang	9 Orang	1.575.000,00	433.550.000,00	433.550.000,00	431.975.000,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-DANA BANTUAN PEN GEMBANGAN PROGRAM PER PUSTAKAAN DAERAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM			5.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	2.23.02.1.02.0004	Pembangunan Literasi Berbasis Inklusi Sosial																			
			Jumlah Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Provinsi yang Dikembangkan				8 Perpustakaan	8 Perpustakaan	100.394.300,00	105.376.300,00	34.500.500,00	-65.893.800,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM			150.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	
3.	2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Jumlah Koleksi dan Naskah Kuno yang dirawat dan dilestarikan				2525 N/A eksemplar	2525 N/A eksemplar	40.089.700,00	87.829.700,00	75.213.700,00	284.910.300,00							325.000.000,00		
	2.23.03.1.01	Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi	Jumlah karya cetak dan karya rekam baru				2.500 eksemplar	500 eksemplar	19.687.000,00	19.687.000,00	15.027.000,00	-4.660.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM	DPAD DIY		5.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	
	2.23.03.1.01.0001	Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam																			
			Jumlah Koleksi KCKR yang Dihimpun dan Dikelola Serta Kepatuhan Serah Simpan KCKR				500 Eksemplar	500 Eksemplar	19.687.000,00	19.687.000,00	15.027.000,00	-4.660.000,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM			5.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	
	2.23.03.1.02	Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah	Jumlah judul yang tercantum dalam KID				2500 entri	2500 entri	9.144.700,00	9.144.700,00	9.144.700,00	0,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM	DPAD DIY		15.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	
	2.23.03.1.02.0001	Penerbitan Katalog Induk Daerah																			
			Jumlah Dokumen KID dan Literatur Sekunder Lainnya yang Diterbitkan				500 Entry	500 Entry	6.891.000,00	6.891.000,00	6.891.000,00	0,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM			10.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	
	2.23.03.1.02.0002	Penerbitan Bibliografi Daerah																			
			Jumlah Bibliografi Daerah yang Diterbitkan				1 Naskah	1 Naskah	2.253.700,00	2.253.700,00	2.253.700,00	0,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM			5.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	
	2.23.03.1.04	Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan terdaftar				10 eksemplar	4 eksemplar	1.330.000,00	1.330.000,00	430.000,00	-900.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM	DPAD DIY		5.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	
	2.23.03.1.04.0001	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Diseleksi dan Dilakukan Pengadaan Oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi				4 Eksemplar	4 Eksemplar	1.330.000,00	1.330.000,00	430.000,00	-900.000,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM			5.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN							371.399.500,00	560.649.500,00	503.097.250,00	131.697.750,00							620.000.000,00	
1.	2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Jumlah Pemanfaatan Arsip sebagai sumber informasi Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip				n/a N/A nilai : 97,5 Arsip arsip angka	n/a N/A nilai : 97,5 Arsip arsip angka	371.399.500,00	560.649.500,00	503.097.250,00	248.600.500,00							620.000.000,00	
	2.24.02.1.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	persentase arsip inaktif yang dibuatkan daftar arsip				42 %	42 %	230.789.950,00	389.253.950,00	330.128.950,00	99.339.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	DPAD DIY		295.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.24.02.1.01.0004	Penyusutan Arsip Dinamis																		
			Jumlah arsip dinamis yang telah disusutkan				4000 Arsip	4000 Arsip	42.030.000,00	42.030.000,00	37.290.000,00	-4.740.000,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			65.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.24.02.1.01.0006	Penciptaan dan Pemeliharaan Arsip Dinamis																		
			Jumlah Daftar Arsip Dinamis				1000 Arsip	1000 Arsip	13.000.050,00	13.000.050,00	13.000.050,00	0,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			20.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.24.02.1.01.0012	Penyelenggaraan pengawasan kearsipan yang menjadi kewenangan provinsi																		
			Jumlah OPD dan BUMD yang telah mendapatkan pengawasan kearsipan				37 Lembaga	37 Lembaga	175.759.900,00	334.223.900,00	279.838.900,00	104.079.000,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			210.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.24.02.1.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi	persentase arsip statis yang telah dibuatkan daftar arsip				43 %	43 %	65.219.750,00	65.219.750,00	86.978.500,00	21.758.750,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	DPAD DIY		100.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.24.02.1.02.0006	Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis																		
			Jumlah arsip yang di akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis di Provinsi				20000 Arsip	20000 Arsip	65.219.750,00	65.219.750,00	86.978.500,00	21.758.750,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			100.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.24.02.1.03	Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	Persentase arsip yang telah dimasukkan SIKN melalui JIKN				20 %	20 %	75.389.800,00	106.175.800,00	85.989.800,00	10.600.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	DPAD DIY		225.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.24.02.1.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN																		
			Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN				750 Pengguna	750 Pengguna	31.910.800,00	31.016.800,00	22.750.800,00	-9.160.000,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			150.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.24.02.1.03.0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi																		
			Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi				2 Laporan	2 Laporan	43.479.000,00	75.159.000,00	63.239.000,00	19.760.000,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			75.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
		BALAI LAYANAN PERPUSTAKAAN							34.999.032.868,00	26.574.822.143,00	25.775.097.492,00	-9.223.935.376,00							63.190.339.904,00	
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							34.999.032.868,00	26.574.822.143,00	25.775.097.492,00	-9.223.935.376,00							63.190.339.904,00	
	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN							21.349.632.968,00	22.432.811.643,00	22.071.530.542,00	721.897.574,00							34.720.334.479,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				91 angka	91 angka	20.040.389.118,00	19.949.001.793,00	19.750.024.492,00	3.807.310.561,00							23.847.699.679,00	
	2.23.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan				14 laporan	14 laporan	15.386.509.968,00	15.299.853.643,00	15.083.627.392,00	-302.882.576,00			-	-	Balai Layanan Perpustakaan		16.170.465.879,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	11.391.000,00	11.391.000,00	12.131.000,00	740.000,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			40.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan pengelolaan barang sesuai peraturan perundangan yang berlaku				4 laporan	4 laporan	37.624.500,00	37.624.500,00	37.624.500,00	0,00			-	-	Balai Layanan Perpustakaan		42.775.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	4 Laporan	15.018.500,00	15.018.500,00	15.018.500,00	0,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			20.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis administrasi umum perangkat daerah				6 jenis	6 jenis	94.015.100,00	86.654.100,00	95.597.700,00	1.582.600,00			-	-	Balai Layanan Perpustakaan		304.500.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	12.983.000,00	12.983.000,00	35.580.600,00	22.597.600,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			20.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	2.815.500,00	2.815.500,00	2.815.500,00	0,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			19.500.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.853.000,00	2.853.000,00	2.853.000,00	0,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			20.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	815.000,00	815.000,00	815.000,00	0,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			10.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			105.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah				3 jenis	3 jenis	4.009.795.000,00	4.012.480.000,00	3.899.682.400,00	-110.112.600,00			-	-	Balai Layanan Perpustakaan		6.017.950.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			500.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	1.087.202.400,00	-112.797.600,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan Kab. Bantul, Sewan, Bangunharjo Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Sosromenduran	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.550.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	14.400.000,00	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			14.400.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah				16 unit	101 unit	495.014.550,00	495.014.550,00	618.517.500,00	123.502.950,00			-	-	Balai Layanan Perpustakaan		1.287.240.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				11 Unit	11 Unit	63.071.550,00	63.071.550,00	67.321.550,00	4.250.000,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			250.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				13 Unit	13 Unit	4.678.000,00	4.678.000,00	4.678.000,00	0,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			25.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	16 Unit	85.478.000,00	85.478.000,00	95.678.000,00	10.200.000,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			250.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	137.840.000,00	137.840.000,00	139.253.000,00	1.413.000,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan Kab. Bantul, Sewon, Bangunharjo Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Sosromenduran	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			162.240.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	
	2.23.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				6 Unit	38 Unit	55.134.000,00	55.134.000,00	135.134.000,00	80.000.000,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			200.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	
2.	2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan Peningkatan Anggota Sepatu Jolifa (Sistem Perpustakaan Terpadu Jogja Library for All) Jumlah Perpustakaan yang memenuhi Standar Nasional Perpustakaan				15 51 N/A % perpustakaan	15 51 N/A % perpustakaan	1.269.154.150,00	2.395.980.150,00	2.246.292.350,00	9.278.480.650,00							10.547.634.800,00		
	2.23.02.1.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah perpustakaan ber-SVP Jumlah Perpustakaan yang Dibina Sesuai Kewenangan Provinsi dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan				565 perpustakaan	565 perpustakaan	986.589.450,00	1.590.977.450,00	1.531.565.450,00	544.976.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM	Balai Layanan Perpustakaan		1.965.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	
	2.23.02.1.01.0007	Pembangunan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi																			
			Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi yang Dikembangkan Melalui Peningkatan Koleksi				1 Layanan	1 Layanan	537.289.800,00	542.569.800,00	542.569.800,00	5.280.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM			955.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	
	2.23.02.1.01.0015	Pembangunan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik																			
			Jumlah perpustakaan elektronik yang dikembangkan dan dipelihara dengan Manajemen Layanan TIK				1 Perpustakaan	1 Perpustakaan	128.051.650,00	133.331.650,00	133.331.650,00	5.280.000,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM			160.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	
	2.23.02.1.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	-				-	-	282.564.700,00	805.002.700,00	714.726.900,00	432.162.200,00			-	Peningkatan kualitas SDM	-		8.582.634.800,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	
	2.23.02.1.02.0002	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi																			
			Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi				-	1 Perpustakaan	0,00	49.995.000,00	49.995.000,00	49.995.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	DAK NON FISIK-DANA BANTUAN PEN GEMBANGAN PROGRAM PER PUSTAKAAN DAERAH	-	Peningkatan kualitas SDM			50.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	
3.	2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Jumlah Koleksi dan Naskah Kuno yang dirawat dan dilestarikan Jumlah Koleksi dan Naskah Kuno yang dilestarikan				2525 N/A eksemplar	2525 N/A eksemplar	40.089.700,00	87.829.700,00	75.213.700,00	284.910.300,00							325.000.000,00		
	2.23.03.1.03	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi	Jumlah Bahan pustaka yang dilestarikan Jumlah naskah kuno dan bahan pustaka yang dirawat dan dilestarikan				700 lembar N/A eksemplar	100 lembar N/A eksemplar	9.928.000,00	57.668.000,00	50.612.000,00	40.684.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM	Balai Layanan Perpustakaan		300.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	
	2.23.03.1.03.0003	Pembangunan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan																			
			Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan				10 Eksemplar	10 Eksemplar	4.520.000,00	4.520.000,00	4.520.000,00	0,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM			10.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	
	2.23.03.1.03.0004	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno				50 Orang	50 Orang	5.408.000,00	53.148.000,00	46.092.000,00	40.684.000,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas SDM			290.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN									50.308.661.538,00	48.623.409.870,00	36.383.545.780,00	-13.925.115.758,00							48.798.113.715,00	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							726.024.000,00	400.000.000,00	330.727.000,00	-395.297.000,00							0,00	
1.03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							726.024.000,00	400.000.000,00	330.727.000,00	-395.297.000,00							0,00	
1.	1.03.13	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	Persentase Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Urusan Kelautan dan Perikanan (%) Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pada satuan ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten (persen)				70,0 N/A %	70,0 N/A %	726.024.000,00	400.000.000,00	330.727.000,00	-726.024.000,00							0,00	
	1.03.13.5.02	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Terlaksananya kegiatan pemanfaatan ruang satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten (100%)				100 %	100 %	726.024.000,00	400.000.000,00	330.727.000,00	-395.297.000,00				Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	1.03.13.5.02.0002	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan																		
			Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan				2 Dokumen	3 Dokumen	726.024.000,00	400.000.000,00	330.727.000,00	-395.297.000,00	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY		Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							20.161.047.900,00	3.212.689.100,00	2.225.716.700,00	-17.935.331.200,00							0,00	
2.22		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							20.161.047.900,00	3.212.689.100,00	2.225.716.700,00	-17.935.331.200,00							0,00	
1.	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase prasarana pelabuhan dibangun yang berfungsi dengan baik Persentase desa maritim dalam tahap mandiri Persentase rata-rata peningkatan kapasitas pelaku usaha perikanan yang terfasilitasi Persentase peserta yang meningkat pemahaman budaya baharinya Persentase peningkatan Budaya Tak Benda yang dilestarikan (%)				100 35 43 60 n/a % % % % %	100 35 43 60 n/a % % % % %	20.161.047.900,00	3.212.689.100,00	2.225.716.700,00	-20.161.047.900,00							0,00	
	2.22.08.5.06	Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan (%)				100 %	100 %	10.500.000.000,00	422.000.000,00	155.750.000,00	-10.344.250.000,00				Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	2.22.08.5.06.0001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya				228 Unit	228 Unit	10.500.000.000,00	0,00	0,00	-10.500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY		Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	2.22.08.5.06.0001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya				-	3 Unit	0,00	422.000.000,00	155.750.000,00	155.750.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY		Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	2.22.08.5.08	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	Terlaksananya Kegiatan Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya (tahun)				1 Tahun	1 Tahun	9.661.047.900,00	2.790.689.100,00	2.069.966.700,00	-7.591.081.200,00				Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	2.22.08.5.08.0005	Pengembangan Budaya Bahari																		
			Jumlah Objek Budaya Bahari yang Dikembangkan				4 Objek	4 Objek	9.661.047.900,00	2.790.689.100,00	2.069.966.700,00	-7.591.081.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY		Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							29.421.589.638,00	45.010.720.770,00	33.827.102.080,00	4.405.512.442,00							48.798.113.715,00	
3.25		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN							29.421.589.638,00	45.010.720.770,00	33.827.102.080,00	4.405.512.442,00							48.798.113.715,00	
1.	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (skor)				89,00 skor	89,00 skor	26.070.940.238,00	25.736.571.370,00	25.213.662.180,00	254.494.727,00							26.325.434.965,00	
	3.25.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%)				100 %	100 %	39.621.200,00	39.621.200,00	36.621.200,00	-3.000.000,00				Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			76.500.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	19.060.000,00	19.060.000,00	17.860.000,00	-1.200.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			40.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.578.000,00	4.578.000,00	4.578.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			5.500.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.01.1.01.0004		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.578.000,00	4.578.000,00	4.578.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			5.500.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.01.1.01.0006		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	3.305.200,00	3.305.200,00	3.305.200,00	0,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			5.500.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.01.1.01.0007		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	8.100.000,00	8.100.000,00	6.300.000,00	-1.800.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			20.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)				100 %	100 %	18.643.834.638,00	18.309.465.770,00	17.838.241.580,00	-805.593.058,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			18.022.090.865,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.01.1.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				152 Orang/ Bulan	152 Orang/ Bulan	18.575.817.138,00	18.241.448.270,00	17.772.264.080,00	-803.553.058,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			17.928.828.315,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.01.1.02.0003		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	14.400.000,00	14.400.000,00	12.360.000,00	-2.040.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			14.400.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.01.1.02.0005		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	2 Laporan	5.854.000,00	5.854.000,00	5.854.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			7.700.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.01.1.02.0007		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				2 Laporan	2 Laporan	17.688.000,00	17.688.000,00	17.688.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			38.500.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Barang Perangkat Daerah (%)				100 %	100 %	41.730.000,00	41.730.000,00	41.730.000,00	0,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			53.330.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.01.1.03.0006		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	13.200.000,00	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			24.800.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)				100 %	100 %	465.791.400,00	465.791.400,00	416.226.400,00	-49.565.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			705.181.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.01.1.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	26.996.000,00	26.996.000,00	26.996.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			43.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.01.1.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				47 Paket	47 Paket	52.539.000,00	52.539.000,00	52.539.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			76.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.01.1.06.0003		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				22 Paket	22 Paket	40.857.000,00	40.857.000,00	40.857.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			77.619.500,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.01.1.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	4.541.000,00	4.541.000,00	4.541.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			9.500.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.01.1.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				15 Paket	15 Paket	34.831.400,00	34.831.400,00	34.831.400,00	0,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			66.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.25.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	4.320.000,00	4.320.000,00	4.320.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			23.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	157.169.000,00	157.169.000,00	120.970.000,00	-36.199.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			230.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	"Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)"				100 %	100 %	5.621.598.600,00	5.621.598.600,00	5.622.598.600,00	1.000.000,00		-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			5.976.040.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3.25.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	2 Laporan	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			9.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36 Laporan	36 Laporan	793.347.700,00	793.347.700,00	793.347.700,00	0,00	Kab. Gunungkidul, Panggang, Girikarto Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			850.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				36 Laporan	36 Laporan	1.324.164.000,00	1.324.164.000,00	1.324.164.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			1.400.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	"Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)"				100 %	100 %	1.258.364.400,00	1.258.364.400,00	1.258.244.400,00	-120.000,00		-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			1.492.293.100,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3.25.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				2 Unit	2 Unit	74.004.300,00	74.004.300,00	74.004.300,00	0,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			78.986.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				46 Unit	46 Unit	647.265.500,00	647.265.500,00	647.265.500,00	0,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			700.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				61 Unit	61 Unit	41.617.000,00	41.617.000,00	41.617.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			55.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			200.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				59 Unit	59 Unit	54.975.000,00	54.975.000,00	54.975.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			75.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
2.	3.25.02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	"Persentase kawasan konservasi yang ditetapkan dan dikelola (%)" "Persentase target kawasan konservasi yang ditetapkan (%)"				92 N/A %	92 N/A %	19.880.000,00	1.132.140.000,00	18.980.000,00	425.120.000,00							445.000.000,00	
	3.25.02.1.01	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Terkelolanya ruang laut sampai dengan 12 mil diluar minyak dan gas bumi (lokasi)				3 lokasi	3 lokasi	19.880.000,00	582.140.000,00	18.980.000,00	-900.000,00		-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram			345.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3.25.02.1.01.0002	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola				5822,92 Ha	5822,92 Ha	15.000.000,00	577.260.000,00	14.100.000,00	-900.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK FISIK-BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN-TE MATIK PENGUATAN KAWASAN SENTRA PRODUKSI PANGAN (PERTANIAN, PERIKANAN, DAN HEWANI)	-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram			345.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.02.1.01.0004	Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Memperoleh Informasi Terkait Mitigasi Bencana Melalui Program Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil				90 Orang	30 Orang	4.880.000,00	4.880.000,00	4.880.000,00	0,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.25.02.1.03	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	-				-	-	0,00	550.000.000,00	0,00	0,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Masyarakat Pesisir DIY		100.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.02.1.03.0001	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil																		
			Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya				-	0 Orang	0,00	550.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Bantul, Sanden, Gadingdari	DAK FISIK-BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN-TE MATIK PENGUATAN KAWASAN SENTRA PRODUKSI PANGAN (PERTANIAN, PERIKANAN, DAN HEWANI)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram		100.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
3.	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi perikanan tangkap (ton) Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Penggunaan Jasa Fasilitas Pelabuhan (skor)				7341 82,00 ton skor	7341 82,00 ton skor	98.471.000,00	6.732.920.600,00	480.429.600,00	167.207.750,00							265.678.750,00	
	3.25.03.1.03	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Terfasilitasinya rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT (rekomendasi)				10 angka	10 angka	26.866.000,00	282.466.000,00	198.540.000,00	171.674.000,00			-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	-		100.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.03.0004	Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil																		
			Tingkat Penyelesaian Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil				100 Persentase	100 Persentase	26.866.000,00	282.466.000,00	198.540.000,00	171.674.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			100.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.06	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan (lokasi)				-	3 angka	47.540.000,00	6.426.389.600,00	264.619.600,00	217.079.600,00			-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	-		90.678.750,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.06.0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia				-	9 Unit	0,00	5.875.000.000,00	20.205.000,00	20.205.000,00	Kab. Gunungkidul, Panggang, Girikarto	DAK FISIK-BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN-TE MATIK PENGUATAN KAWASAN SENTRA PRODUKSI PANGAN (PERTANIAN, PERIKANAN, DAN HEWANI) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.09	Pendaftaran Kapal Perikanan di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Terfasilitasinya kegiatan Pendaftaran Kapal Perikanan di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT (kapal) *				2 angka	2 angka	24.065.000,00	24.065.000,00	17.270.000,00	-6.795.000,00			-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	-		75.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.09.0003	Penerbitan surat rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP)																		
			Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan				1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	24.065.000,00	24.065.000,00	17.270.000,00	-6.795.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			75.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
4.	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase benih perikanan budidaya bersertifikat yang terdistribusi (%) Produksi perikanan budidaya (ton) produksi perikanan budidaya di kelompok miskin (ton)				35,02 97813 9% ton	35,02 97813 9% ton	2.892.000.000,00	10.245.364.400,00	7.320.831.500,00	6.031.000.000,00							8.923.000.000,00	
	3.25.04.1.01	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Terkelolanya kawasan perikanan budidaya (kabupaten/kota)				5 angka	5 angka	10.000.000,00	294.400.000,00	225.760.000,00	215.760.000,00			-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	-		200.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.1.01.0002	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan																		
			Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan				2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	10.000.000,00	294.400.000,00	225.760.000,00	215.760.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			200.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.1.06	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	Terkelolanya kawasan perikanan budidaya (kabupaten/kota)				5 angka	5 angka	2.835.600.000,00	9.904.564.400,00	7.053.471.500,00	4.217.871.500,00			-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	-		8.523.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.1.06.0003	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota				1 Unit	1 Unit	85.600.000,00	85.600.000,00	75.100.000,00	-10.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			5.223.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
5.	3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase kepatuhan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan (%)				76 %	76 %	113.968.000,00	203.894.000,00	111.268.000,00	296.032.000,00							410.000.000,00	
	3.25.05.1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Terawasinya sumberdaya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 Mil				1 tahun	1 tahun	103.803.000,00	193.729.000,00	101.103.000,00	-2.700.000,00			-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			300.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.05.1.01.0014	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi																		
			Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi				3 Pelaku Usaha	3 Pelaku Usaha	98.288.000,00	98.288.000,00	96.488.000,00	-1.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			200.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.05.1.01.0017	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)																		
			Jumlah POKMASWAS yang ditumbuhkan, dan dikembangkan				5 Kelompok Masyarakat	3 Kelompok Masyarakat	5.515.000,00	95.441.000,00	4.615.000,00	-900.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN-TE MATIK PENGUATAN KAWASAN SENTRA PRODUKSI PANGAN (PERTANJIAN, PERIKANAN, DAN HEWANI) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			100.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.05.1.02	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Terawasinya sumberdaya perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya				1 tahun	1 tahun	10.165.000,00	10.165.000,00	10.165.000,00	0,00			-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			110.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.05.1.02.0004	Pengawasan Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi																		
			Jumlah pelaku Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi				3 Pelaku Usaha	3 Pelaku Usaha	4.995.000,00	4.995.000,00	4.995.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			60.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.05.1.02.0005	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi																		
			Jumlah pelaku usaha Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi				1 Pelaku Usaha	1 Pelaku Usaha	5.170.000,00	5.170.000,00	5.170.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			50.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
6.	3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Tingkat konsumsi ikan masyarakat (kg/Kapita/tahun) *				34,87 Kg/ KAP/TH	34,87 Kg/ KAP/TH	226.330.400,00	959.830.400,00	681.930.800,00	12.202.669.600,00							12.429.000.000,00	
	3.25.06.1.01	Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya kegiatan pembinaan standarisasi tata cara usaha, penerbitan rekomendasi perizinan dan pelaksanaan pendataan pada Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				1 tahun	1 tahun	15.532.000,00	15.532.000,00	5.080.000,00	-10.452.000,00			-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			120.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.1.01.0007	Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Subsektor Pengolahan Ikan dan Subsektor Pemasaran Ikan Skala Usaha Menengah dan Besar																		
			Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Subsektor Pengolahan Ikan dan Subsektor Pemasaran Ikan Skala Usaha Menengah dan Besar				5 Rekomendasi	2 Rekomendasi	15.532.000,00	15.532.000,00	5.080.000,00	-10.452.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			120.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.1.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Terlaksananya pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan (dokumen) *				3 dokumen	3 dokumen	202.945.400,00	865.345.400,00	598.797.800,00	395.852.400,00			-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			12.159.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.1.02.0003	Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing																		
			Jumlah Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing				3 Kegiatan	3 Kegiatan	99.900.000,00	449.100.000,00	278.394.000,00	178.494.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			7.259.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.1.02.0004	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar																		
			Kegiatan yang diberikan kepada unit usaha berupa pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan yang berdaya saing serta pemberdayaan usaha dalam rangka menghasilkan produk yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan berdaya saing berdasarkan skala usaha dan risiko				2 Kegiatan	2 Kegiatan	103.045.400,00	416.245.400,00	320.403.800,00	217.358.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			4.900.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.1.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Terfasilitasinya pelaku usaha kelautan dan perikanan *				1 tahun	1 tahun	7.853.000,00	78.953.000,00	78.053.000,00	70.200.000,00			-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			150.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.1.03.0002	Pemberian Insentif dan Fasilitasi bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Unit Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Diberikan Insentif dan Fasilitasi				1 Unit Usaha	1 Unit Usaha	7.853.000,00	78.953.000,00	78.053.000,00	70.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			150.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
		<b>BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERIKANAN BUDIDAYA</b>								<b>50.308.661.538,00</b>	<b>48.623.409.870,00</b>	<b>36.383.545.780,00</b>	<b>-13.925.115.758,00</b>						<b>48.798.113.715,00</b>		
	<b>3</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>							<b>29.421.589.638,00</b>	<b>45.010.720.770,00</b>	<b>33.827.102.080,00</b>	<b>4.405.512.442,00</b>							<b>48.798.113.715,00</b>		
	<b>3.25</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>							<b>29.421.589.638,00</b>	<b>45.010.720.770,00</b>	<b>33.827.102.080,00</b>	<b>4.405.512.442,00</b>							<b>48.798.113.715,00</b>		
1.	<b>3.25.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (skor)				<b>89,00 skor</b>	<b>89,00 skor</b>	<b>26.070.940.238,00</b>	<b>25.736.571.370,00</b>	<b>25.213.662.180,00</b>	<b>254.494.727,00</b>							<b>26.325.434.965,00</b>		
	3.25.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)				100 %	100 %	18.643.834.638,00	18.309.465.770,00	17.838.241.580,00	-805.593.058,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			18.022.090.865,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3.25.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	8.820.000,00	8.820.000,00	8.820.000,00	0,00	Kab. Sleman, Cangkringan, Argomulyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			8.820.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3.25.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																			
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	2 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Kab. Sleman, Cangkringan, Argomulyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			1.999.800,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3.25.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																			
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				2 Laporan	2 Laporan	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	Kab. Sleman, Cangkringan, Argomulyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			6.499.750,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3.25.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Barang Perangkat Daerah (%)				100 %	100 %	41.730.000,00	41.730.000,00	41.730.000,00	0,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			53.330.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3.25.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																			
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	330.000,00	330.000,00	330.000,00	0,00	Kab. Sleman, Cangkringan, Argomulyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			330.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3.25.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																			
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	13.200.000,00	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	Kab. Sleman, Cangkringan, Argomulyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			13.200.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)				100 %	100 %	465.791.400,00	465.791.400,00	416.226.400,00	-49.565.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			705.181.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3.25.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	8.294.600,00	8.294.600,00	8.294.600,00	0,00	Kab. Sleman, Cangkringan, Argomulyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			12.999.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3.25.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				20 Paket	20 Paket	9.771.000,00	9.771.000,00	9.771.000,00	0,00	Kab. Sleman, Cangkringan, Argomulyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			10.990.250,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3.25.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																			
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				21 Paket	21 Paket	6.383.000,00	6.383.000,00	6.383.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sleman, Cangkringan, Argomulyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			9.002.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	Kab. Sleman, Cangkringan, Argomulyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			1.176.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3.25.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	14.900.000,00	14.900.000,00	14.900.000,00	0,00	Kab. Sleman, Cangkringan, Argomulyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			19.999.750,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3.25.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	1.029.000,00	1.029.000,00	1.029.000,00	0,00	Kab. Sleman, Cangkringan, Argomulyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			2.550.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	28.500.000,00	28.500.000,00	22.500.000,00	-6.000.000,00	Kab. Sleman, Cangkringan, Argomulyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			39.600.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	"Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)"				100 %	100 %	5.621.598.600,00	5.621.598.600,00	5.622.598.600,00	1.000.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			5.976.040.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Kab. Sleman, Cangkringan, Argomulyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			996.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36 Laporan	36 Laporan	604.960.900,00	604.960.900,00	605.960.900,00	1.000.000,00	Kab. Sleman, Cangkringan, Argomulyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			621.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				36 Laporan	36 Laporan	1.044.564.000,00	1.044.564.000,00	1.044.564.000,00	0,00	Kab. Sleman, Cangkringan, Argomulyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			1.044.576.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	"Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)"				100 %	100 %	1.258.364.400,00	1.258.364.400,00	1.258.244.400,00	-120.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			1.492.293.100,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				19 Unit	19 Unit	156.738.000,00	156.738.000,00	156.738.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			160.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	20 Unit	16.979.000,00	16.979.000,00	16.979.000,00	0,00	Kab. Sleman, Cangkringan, Argomulyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			20.013.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				14 Unit	14 Unit	6.440.000,00	6.440.000,00	6.440.000,00	0,00	Kab. Sleman, Cangkringan, Argomulyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			10.174.500,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
2.	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase benih perikanan budidaya bersertifikat yang terdistribusi (%) Produksi perikanan budidaya (ton) produksi perikanan budidaya di kelompok miskin (ton)				35,02 97813 9 % ton	35,02 97813 9 % ton	2.892.000.000,00	10.245.364.400,00	7.320.831.500,00	6.031.000.000,00							8.923.000.000,00	
	3.25.04.1.05	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Terkololanya benih perikanan budidaya (kabupaten/kota)				5 angka	5 angka	46.400.000,00	46.400.000,00	41.600.000,00	-4.800.000,00			-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			200.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.1.05.0011	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Sarana Prasarana Unit Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan yang Tersedia				1 Unit	1 Unit	46.400.000,00	46.400.000,00	41.600.000,00	-4.800.000,00	Kab. Sleman, Cangkringan, Argomulyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			200.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.1.06	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	Terkololanya kawasan perikanan budidaya (kabupaten/kota)				5 angka	5 angka	2.835.600.000,00	9.904.564.400,00	7.053.471.500,00	4.217.871.500,00			-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			8.523.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.1.06.0003	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota				-	0 Unit	0,00	1.216.473.500,00	0,00	0,00	Kab. Bantul, Sanden, Srigading Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Bejiharjo Kab. Sleman, Cangkringan, Argomulyo	DAK FISIK-BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN-TE MATIK Penguatan KAWASAN SENTRA PRODUKSI PANGAN (PERTANIAN, PERIKANAN, DAN HEWANI) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.1.06.0004	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota				7 Unit	7 Unit	2.750.000.000,00	8.602.490.900,00	6.978.371.500,00	4.228.371.500,00	Kab. Bantul, Sanden, Srigading Kab. Gunungkidul, Tepus, Semua Keli/Desa Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Bejiharjo Kab. Kulon Progo, Temon, Jangkaran Kab. Kulon Progo, Pengasih, Sendangsari Kab. Sleman, Cangkringan, Argomulyo	DAK FISIK-BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN-TE MATIK Penguatan KAWASAN SENTRA PRODUKSI PANGAN (PERTANIAN, PERIKANAN, DAN HEWANI) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			3.300.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		<b>PELABUHAN PERIKANAN PANTAI</b>							<b>50.308.661.538,00</b>	<b>48.623.409.870,00</b>	<b>36.383.545.780,00</b>	<b>-13.925.115.758,00</b>							<b>48.798.113.715,00</b>	
3		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							<b>29.421.589.638,00</b>	<b>45.010.720.770,00</b>	<b>33.827.102.080,00</b>	<b>4.405.512.442,00</b>							<b>48.798.113.715,00</b>	
	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN							<b>29.421.589.638,00</b>	<b>45.010.720.770,00</b>	<b>33.827.102.080,00</b>	<b>4.405.512.442,00</b>							<b>48.798.113.715,00</b>	
1.	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (skor)				89,00 skor	89,00 skor	26.070.940.238,00	25.736.571.370,00	25.213.662.180,00	254.494.727,00							26.325.434.965,00	
	3.25.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)				100 %	100 %	18.643.834.638,00	18.309.465.770,00	17.838.241.580,00	-805.593.058,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			18.022.090.865,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	7.260.000,00	7.260.000,00	7.260.000,00	0,00	Kab. Gunungkidul, Girisubo, Songbanyu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			7.260.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.01.1.02.0005		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					2 Laporan	2 Laporan	1.000.500,00	1.000.500,00	1.000.500,00	0,00	Kab. Gunungkidul, Girisubo, Songbanyu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			1.499.500,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.01.1.02.0007		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD					2 Laporan	2 Laporan	4.995.000,00	4.995.000,00	4.995.000,00	0,00	Kab. Gunungkidul, Girisubo, Songbanyu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			6.583.500,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Barang Perangkat Daerah (%)				100 %	100 %	41.730.000,00	41.730.000,00	41.730.000,00	0,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		53.330.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.01.1.03.0006		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					12 Laporan	12 Laporan	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Kab. Gunungkidul, Girisubo, Songbanyu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			15.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (%) "				100 %	100 %	465.791.400,00	465.791.400,00	416.226.400,00	-49.565.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		705.181.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.01.1.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					12 Paket	12 Paket	11.561.000,00	11.561.000,00	11.561.000,00	0,00	Kab. Gunungkidul, Girisubo, Songbanyu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			13.352.500,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.01.1.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					22 Paket	22 Paket	12.678.000,00	12.678.000,00	12.678.000,00	0,00	Kab. Gunungkidul, Girisubo, Songbanyu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			14.946.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.01.1.06.0003		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					14 Paket	14 Paket	8.072.000,00	8.072.000,00	8.072.000,00	0,00	Kab. Gunungkidul, Girisubo, Songbanyu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			8.292.500,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.01.1.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor					1 Paket	1 Paket	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	Kab. Gunungkidul, Girisubo, Songbanyu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			431.500,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.01.1.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					14 Paket	14 Paket	11.993.400,00	11.993.400,00	11.993.400,00	0,00	Kab. Gunungkidul, Girisubo, Songbanyu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			6.480.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.01.1.06.0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan					1 Dokumen	1 Dokumen	2.556.000,00	2.556.000,00	2.390.000,00	-166.000,00	Kab. Gunungkidul, Girisubo, Songbanyu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			1.842.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.01.1.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					12 Laporan	12 Laporan	27.600.000,00	27.600.000,00	20.400.000,00	-7.200.000,00	Kab. Gunungkidul, Girisubo, Songbanyu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			38.400.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%) "				100 %	100 %	5.621.598.600,00	5.621.598.600,00	5.622.598.600,00	1.000.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		5.976.040.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.01.1.08.0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat					1 Laporan	1 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Kab. Gunungkidul, Girisubo, Songbanyu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			360.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.01.1.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					13 Laporan	13 Laporan	536.050.000,00	536.050.000,00	536.050.000,00	0,00	Kab. Gunungkidul, Girisubo, Songbanyu Kab. Kulon Progo, Wates, Karangwuni	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			550.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.01.1.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					36 Laporan	36 Laporan	1.309.512.000,00	1.309.512.000,00	1.309.512.000,00	0,00	Kab. Gunungkidul, Girisubo, Songbanyu Kab. Kulon Progo, Wates, Karangwuni	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			1.500.108.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%) "				100 %	100 %	1.258.364.400,00	1.258.364.400,00	1.258.244.400,00	-120.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		1.492.293.100,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.01.1.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				9 Unit	9 Unit	99.053.600,00	99.053.600,00	98.933.600,00	-120.000,00	Kab. Gunungkidul, Girisubo, Songbanyu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			99.991.600,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				28 Unit	28 Unit	21.436.000,00	21.436.000,00	21.436.000,00	0,00	Kab. Gunungkidul, Girisubo, Songbanyu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			24.486.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kab. Gunungkidul, Girisubo, Songbanyu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			60.884.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				22 Unit	22 Unit	9.856.000,00	9.856.000,00	9.856.000,00	0,00	Kab. Gunungkidul, Girisubo, Songbanyu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			7.758.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
2.	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi perikanan tangkap (ton) Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Penggunaan Jasa/ Fasilitas Pelabuhan (skor)				7341 82,00 ton skor	7341 82,00 ton skor	98.471.000,00	6.732.920.600,00	480.429.600,00	167.207.750,00							265.678.750,00	
	3.25.03.1.06	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan (lokasi)				3 angka	3 angka	47.540.000,00	6.426.389.600,00	264.619.600,00	217.079.600,00			-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			90.678.750,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.06.0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan						1 Unit	0,00	503.849.600,00	205.049.600,00	205.049.600,00	Kab. Gunungkidul, Girisubo, Songbanyu	DAK FISIK-BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN-TE MATIK PENGUATAN KAWASAN SENTRA PRODUKSI PANGAN (PERTANIAN, PERIKANAN, DAN HEWANI) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			15.678.750,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.06.0003	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan					12 Layanan	11 Layanan	47.540.000,00	47.540.000,00	39.365.000,00	-8.175.000,00	Kab. Gunungkidul, Girisubo, Songbanyu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			75.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		DINAS PARIWISATA							69.321.125.798,00	30.202.481.669,00	25.598.134.969,00	-43.722.990.829,00							40.726.087.943,00	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							30.000.000.000,00	1.399.094.000,00	599.546.950,00	-29.400.453.050,00							0,00	
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							30.000.000.000,00	1.399.094.000,00	599.546.950,00	-29.400.453.050,00							0,00	
1.	1.03.13	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	Jumlah Kawasan Ruang Strategis yang dikembangkan dan dimanfaatkan Jumlah Kawasan Ruang Strategis yang dikembangkan dan dimanfaatkan				7 7 kawasan kawasan	7 7 kawasan kawasan	30.000.000.000,00	1.399.094.000,00	599.546.950,00	-30.000.000.000,00							0,00	
	1.03.13.5.02	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	-				-	-	30.000.000.000,00	1.399.094.000,00	599.546.950,00	-29.400.453.050,00			-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			0,00	DINAS PARIWISATA
	1.03.13.5.02.0003	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu						1 Dokumen	0,00	799.547.000,00	0,00	0,00	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			0,00	DINAS PARIWISATA
	1.03.13.5.02.0004	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh						1 Dokumen	0,00	599.547.000,00	599.546.950,00	599.546.950,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			0,00	DINAS PARIWISATA
	1.03.13.5.02.0008	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Merapi						1 Dokumen	0,00	30.000.000.000,00	0,00	-30.000.000.000,00	Kab. Sleman, Tempel, Lumbungrejo	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)			0,00	DINAS PARIWISATA
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							25.098.560.500,00	12.946.957.100,00	10.039.332.600,00	-15.059.227.900,00							25.000.000.000,00	
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							25.098.560.500,00	12.946.957.100,00	10.039.332.600,00	-15.059.227.900,00							25.000.000.000,00	
1.	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Jumlah pengunjung di daya tarik wisata budaya dan sejarah (orang)				9.607.130 orang	9.607.130 orang	25.098.560.500,00	12.946.957.100,00	10.039.332.600,00	-98.560.500,00							25.000.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.22.08.5.04	Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya	-				-	-	1.600.000.000,00	801.814.500,00	801.813.850,00	-798.186.150,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Masyarakat, SDM Pariwisata, Pelaku Usaha Pariwisata, Wisatawan, Dinas Pariwisata		0,00	DINAS PARIWISATA
	2.22.08.5.04.0003	Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia																		
			Jumlah Objek Warisan Budaya Nasional dan Dunia yang masuk Nominasi				1 Objek	1 Objek	1.600.000.000,00	801.814.500,00	801.813.850,00	-798.186.150,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			0,00	DINAS PARIWISATA
	2.22.08.5.06	Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya				1 Unit	1 Unit	762.560.500,00	500.000.000,00	400.300.000,00	-362.260.500,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Masyarakat, SDM Pariwisata, Pelaku Usaha Pariwisata, Wisatawan, Dinas Pariwisata		0,00	DINAS PARIWISATA
	2.22.08.5.06.0001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya				1 Unit	1 Unit	762.560.500,00	500.000.000,00	400.300.000,00	-362.260.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			0,00	DINAS PARIWISATA
	2.22.08.5.08	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	Jumlah pengunjung event/ atraksi wisata dan budaya unggulan DIY dan difasilitasi oleh Pemda DIY Jumlah usaha bidang pariwisata dan ekonomi kreatif yang diberikan pelayanan mengenai kekayaan intelektual				517 Angka 850.000 Orang	517 Angka 850.000 Orang	18.184.000.000,00	10.270.249.600,00	7.634.750.600,00	-10.549.249.400,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Masyarakat, SDM Pariwisata, Pelaku Usaha Pariwisata, Wisatawan, Dinas Pariwisata		20.000.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	2.22.08.5.08.0002	Pengembangan Atraksi Wisata Budaya																		
			Jumlah Objek Atraksi Wisata Budaya yang Dikembangkan				147 Objek	225 Objek	18.184.000.000,00	10.111.579.000,00	7.556.444.150,00	-10.627.555.850,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			20.000.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	2.22.08.5.08.0003	Pengembangan Industri Kreatif																		
			Jumlah Industri Kreatif yang Dikembangkan				-	60 Unit	0,00	158.670.600,00	78.306.450,00	78.306.450,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			0,00	DINAS PARIWISATA
	2.22.08.5.09	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Jumlah Desa /Kampung Wisata yang naik kelas dari klasifikasi berkembang ke maju dan dari klasifikasi maju ke mandiri				7 Lokasi	7 Lokasi	4.552.000.000,00	1.374.893.000,00	1.202.468.150,00	-3.349.531.850,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Masyarakat, SDM Pariwisata, Pelaku Usaha Pariwisata, Wisatawan, Dinas Pariwisata		5.000.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	2.22.08.5.09.0018	Peningkatan Lembaga Wisata Budaya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Lembaga Wisata Budaya yang Ditingkatkan				255 Lembaga	10 Lembaga	4.552.000.000,00	1.374.893.000,00	1.202.468.150,00	-3.349.531.850,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			5.000.000.000,00	DINAS PARIWISATA
3		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							14.222.565.298,00	15.856.430.569,00	14.959.255.419,00	736.690.121,00							15.726.087.943,00	
	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA							14.222.565.298,00	15.856.430.569,00	14.959.255.419,00	736.690.121,00							15.726.087.943,00	
1.	3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				91,04 skor	91,04 skor	13.115.601.948,00	13.204.903.219,00	12.902.168.119,00	754.942.995,00							13.870.544.943,00	
	3.26.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100 %	100 %	36.599.850,00	36.599.850,00	31.369.850,00	-5.230.000,00			-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Dinas Pariwisata		50.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	14.000.000,00	14.000.000,00	11.530.000,00	-2.470.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			20.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	15.000.000,00	15.000.000,00	13.200.000,00	-1.800.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			20.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	7.599.850,00	7.599.850,00	6.639.850,00	-960.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			10.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100 %	100 %	10.749.033.255,00	10.822.498.526,00	10.397.009.426,00	-352.023.829,00			-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Dinas Pariwisata		11.038.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				79 Orang/ Bulan	74 Orang/ Bulan	10.715.268.405,00	10.788.733.676,00	10.363.244.576,00	-352.023.829,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			11.000.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	12.840.000,00	12.840.000,00	12.840.000,00	0,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			15.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2.999.850,00	2.999.850,00	2.999.850,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			3.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Trivulanan/Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Trivulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Trivulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	18 Laporan	17.925.000,00	17.925.000,00	17.925.000,00	0,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			20.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah				100 %	100 %	42.144.943,00	42.144.943,00	42.144.943,00	0,00			-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Dinas Pariwisata		48.544.943,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	8.544.943,00	8.544.943,00	8.544.943,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			8.544.943,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	33.600.000,00	33.600.000,00	33.600.000,00	0,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			40.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah				100 %	100 %	200.981.100,00	216.817.100,00	154.801.100,00	-46.180.000,00			-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Dinas Pariwisata		269.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	18.098.000,00	18.098.000,00	18.098.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			20.000.000,00	DINAS PARIWISATA
3.26.01.1.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			20.000.000,00	DINAS PARIWISATA
3.26.01.1.06.0003		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	17.993.000,00	17.993.000,00	17.993.000,00	0,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			20.000.000,00	DINAS PARIWISATA
3.26.01.1.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	10.000.100,00	10.000.100,00	10.000.100,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			15.000.000,00	DINAS PARIWISATA
3.26.01.1.06.0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	3.528.000,00	3.528.000,00	3.528.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			4.000.000,00	DINAS PARIWISATA
3.26.01.1.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	2 Laporan	125.875.000,00	141.711.000,00	79.695.000,00	-46.180.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			180.000.000,00	DINAS PARIWISATA
3.26.01.1.06.0010		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	7.487.000,00	7.487.000,00	7.487.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			10.000.000,00	DINAS PARIWISATA
3.26.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah				100 %	100 %	13.100.000,00	13.100.000,00	13.100.000,00	0,00			-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Dinas Pariwisata		110.000.000,00	DINAS PARIWISATA
3.26.01.1.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	4.140.000,00	4.140.000,00	4.140.000,00	0,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			50.000.000,00	DINAS PARIWISATA
3.26.01.1.07.0010		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	8.960.000,00	8.960.000,00	8.960.000,00	0,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			60.000.000,00	DINAS PARIWISATA
3.26.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	100 %	1.511.880.000,00	1.511.880.000,00	1.511.880.000,00	0,00			-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Dinas Pariwisata		1.705.000.000,00	DINAS PARIWISATA
3.26.01.1.08.0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	2 Laporan	3.400.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			5.000.000,00	DINAS PARIWISATA
3.26.01.1.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				5 Laporan	5 Laporan	403.700.000,00	403.700.000,00	403.700.000,00	0,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			500.000.000,00	DINAS PARIWISATA
3.26.01.1.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	1.104.780.000,00	1.104.780.000,00	1.104.780.000,00	0,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			1.200.000.000,00	DINAS PARIWISATA
3.26.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	100 %	561.862.800,00	561.862.800,00	751.862.800,00	190.000.000,00			-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Dinas Pariwisata		650.000.000,00	DINAS PARIWISATA
3.26.01.1.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	38.996.000,00	38.996.000,00	38.996.000,00	0,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			40.000.000,00	DINAS PARIWISATA
3.26.01.1.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				12 Unit	12 Unit	231.942.800,00	231.942.800,00	231.942.800,00	0,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			250.000.000,00	DINAS PARIWISATA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	3.26.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel																			
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				42 Unit	42 Unit	18.080.000,00	18.080.000,00	18.080.000,00	0,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			30.000.000,00	DINAS PARIWISATA	
	3.26.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				22 Unit	22 Unit	16.774.000,00	16.774.000,00	16.774.000,00	0,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			30.000.000,00	DINAS PARIWISATA	
	3.26.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	2 Unit	158.760.000,00	158.760.000,00	348.760.000,00	190.000.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			200.000.000,00	DINAS PARIWISATA	
	3.26.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				58 Unit	58 Unit	97.310.000,00	97.310.000,00	97.310.000,00	0,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			100.000.000,00	DINAS PARIWISATA	
2.	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Jumlah wisatawan yang mengunjungi DTW tahun n (orang) Jumlah usaha jasa pariwisata yang tersertifikasi (UJP)				22.342.000 UJP	22.342.000 UJP	456.468.100,00	456.468.100,00	432.631.050,00	193.531.900,00								650.000.000,00	
	3.26.02.1.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Dokumen perencanaan pengembangan Daya tarik Wisata Provinsi				2 Dokumen	2 Dokumen	350.000.000,00	350.000.000,00	326.162.950,00	-23.837.050,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Masyarakat, SDM Pariwisata, Pelaku Usaha Pariwisata, Wisatawan, Dinas Pariwisata			400.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.1.03.0002	Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	200.000.000,00	176.162.950,00	-23.837.050,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			0,00	DINAS PARIWISATA	
	3.26.02.1.03.0012	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi																			
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi				1 Laporan	1 Laporan	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			400.000.000,00	DINAS PARIWISATA	
	3.26.02.1.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah UJP yang dipantau dan dibina Jumlah usaha dari UJP yang terfasilitasi sertifikasi standar usaha				100 Usaha	100 Usaha	106.468.100,00	106.468.100,00	106.468.100,00	0,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Masyarakat, SDM Pariwisata, Pelaku Usaha Pariwisata, Wisatawan, Dinas Pariwisata			250.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.1.04.0009	Fasilitasi Pendampingan Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Tingkat Risiko Menengah Tinggi)																			
			Jumlah Industri/Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Memperoleh Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Tingkat Menengah Tinggi)				50 Unit Usaha	50 Unit Usaha	84.072.400,00	84.072.400,00	84.072.400,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			200.000.000,00	DINAS PARIWISATA	
	3.26.02.1.04.0013	Ketersediaan pelaku usaha memenuhi standar usaha pariwisata																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			<i>Jumlah usaha yang bersedia memenuhi standar usaha</i>				1 Laporan	1 Laporan	22.395.700,00	22.395.700,00	22.395.700,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			50.000.000,00	DINAS PARIWISATA	
3.	3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah Wisatawan nusantara tahun ke n Jumlah Wisatawan mancanegara tahun ke n				7.700.000 Orang	7.700.000 Orang	273.999.750,00	523.999.750,00	391.869.700,00	26.000.250,00							300.000.000,00		
3.26.03.1.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	<i>Jumlah follower dan subscriber media sosial Dinas Pariwisata DIY dan visitingslogia Jumlah Kemitraan Promosi pariwisata Jumlah pengunjung pameran yang diikuti dispa Jumlah pengunjung TIC Jumlah transaksi B2B</i>				25 Milyar Rp 3 Dokumen 600 Orang 7000 Orang	25 Milyar Rp 3 Dokumen 600 Orang 7000 Orang	273.999.750,00	523.999.750,00	391.869.700,00	117.869.950,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Masyarakat, SDM Pariwisata, Pelaku Usaha Pariwisata, Wisatawan, Dinas Pariwisata			300.000.000,00	DINAS PARIWISATA
3.26.03.1.01.0001		Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri																			
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri</i>				3 Dokumen	5 Dokumen	273.999.750,00	523.999.750,00	391.869.700,00	117.869.950,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			300.000.000,00	DINAS PARIWISATA	
4.	3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang tersertifikasi profesi (orang)				80 Orang	80 Orang	226.495.800,00	210.659.800,00	194.273.550,00	173.504.200,00							400.000.000,00		
3.26.04.1.01		Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	<i>Penyediaan sarana dan Prasarana Ekonomi Kreatif</i>				100 Orang	1 unit	51.495.950,00	51.495.950,00	35.109.700,00	-16.386.250,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Masyarakat, SDM Pariwisata, Pelaku Usaha Pariwisata, Wisatawan, Dinas Pariwisata			100.000.000,00	DINAS PARIWISATA
3.26.04.1.01.0004		Koordinasi dan Sinkronisasi Usaha Kreatif Sepanjang Rantai Produksi dengan Menyediakan Akses ke Sumber Permodalan atau Pasokan SDM Produksi dan Pasar																			
			<i>Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Usaha Kreatif Sepanjang Rantai Produksi dengan Menyediakan Akses ke Sumber Permodalan atau Pasokan SDM Produksi dan Pasar</i>				1 Laporan	1 Laporan	51.495.950,00	51.495.950,00	35.109.700,00	-16.386.250,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			100.000.000,00	DINAS PARIWISATA	
3.26.04.1.02		Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	<i>Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat BPPK</i>				89,89 Nilai	89,89 Nilai	174.999.850,00	159.163.850,00	159.163.850,00	-15.836.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Masyarakat, SDM Pariwisata, Pelaku Usaha Pariwisata, Wisatawan, Dinas Pariwisata			300.000.000,00	DINAS PARIWISATA
3.26.04.1.02.0010		Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif																			
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			100.000.000,00	DINAS PARIWISATA	
3.26.04.1.02.0016		Formulasi Kebijakan Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Formulasi Kebijakan untuk mendukung pengembangan ekonomi kreatif daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	134.999.850,00	119.163.850,00	119.163.850,00	-15.836.000,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			200.000.000,00	DINAS PARIWISATA
5.	3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Jumlah SDM Pariwisata yang tersertifikasi (orang)				4.856 Orang	4.856 Orang	149.999.700,00	1.460.399.700,00	1.038.313.000,00	355.543.300,00							505.543.000,00	
	3.26.05.1.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Jumlah SDM Pariwisata yang terfasilitasi sertifikasi kompetensi bidang pariwisata Jumlah SDM Pariwisata yang terlatih kompetensi bidang pariwisata				350 Orang 500 Orang	350 Orang 500 Orang	50.000.000,00	50.000.000,00	30.000.000,00	-20.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Masyarakat, SDM Pariwisata, Pelaku Usaha Pariwisata, Wisatawan, Dinas Pariwisata		50.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.05.1.01.0018	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif																		
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	30.000.000,00	-20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			50.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.05.1.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah Pelaku Ekraf yang mendapatkan fasilitasi pengembangan kompetensi				100 orang 90 Orang	2433 Orang	99.999.700,00	1.410.399.700,00	1.008.313.000,00	908.313.300,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Masyarakat, SDM Pariwisata, Pelaku Usaha Pariwisata, Wisatawan, Dinas Pariwisata		455.543.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.05.1.02.0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif																		
			Jumlah Orang yang mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif				104 Orang	2433 Orang	99.999.700,00	1.410.399.700,00	1.008.313.000,00	908.313.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			455.543.000,00	DINAS PARIWISATA
		<b>DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN</b>							<b>71.283.717.992,00</b>	<b>75.398.658.526,00</b>	<b>68.106.319.605,00</b>	<b>-3.177.398.387,00</b>							<b>66.817.635.439,00</b>	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							696.736.000,00	1.408.150.000,00	1.209.174.000,00	512.438.000,00							0,00	
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							696.736.000,00	1.408.150.000,00	1.209.174.000,00	512.438.000,00							0,00	
1.	1.03.13	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	Luas areal pertanian di satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten				329 Ha	329 Ha	696.736.000,00	1.408.150.000,00	1.209.174.000,00	-696.736.000,00							0,00	
	1.03.13.5.02	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Jumlah pemanfaatan ruang satuan ruang strategis untuk usaha pertanian				4 Satuan Ruang Strategis	4 Satuan Ruang Strategis	696.736.000,00	1.408.150.000,00	1.209.174.000,00	512.438.000,00			-	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	Kelompok tani kakao, pelaku usaha kakao/cokelat, pelajar, masyarakat, kelompok tani kopi		0,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	1.03.13.5.02.0003	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu																		
			Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu				1 Dokumen	1 Dokumen	522.000.000,00	522.000.000,00	450.614.000,00	-71.386.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)			0,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	1.03.13.5.02.0008	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Merapi																		
			Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis				1 Dokumen	1 Dokumen	174.736.000,00	170.000.000,00	160.101.000,00	-14.635.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)			0,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							8.313.968.100,00	4.048.537.650,00	2.645.925.000,00	-5.668.043.100,00							567.840.000,00	
	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN							469.904.300,00	848.894.300,00	672.946.300,00	203.042.000,00							567.840.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Tingkat konsumsi energi, berdasarkan Angka Kecukupan Gizi (AKG) 2,100 kkal/kap/hari (kkal/kap/hari) Tingkat ketersediaan energi, berdasarkan Angka Kecukupan Gizi (AKG) 2,400 kkal/kap/hari (kkal/kap/hari)				2.141 3.734 Kkal/Hari	2.141 3.734 Kkal/Hari	358.280.000,00	544.220.000,00	422.450.000,00	60.160.000,00							418.440.000,00	
	2.09.03.1.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Penyediaan dan penyaluran pangan pokok dan pangan lainnya				1 Tahun	1 Tahun	272.177.000,00	272.177.000,00	248.512.000,00	-23.665.000,00			-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Kios Pangan, LDPM/PUPM, tim penyusun NBM, masyarakat		285.780.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.1.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya					1 Laporan	1 Laporan	146.177.000,00	146.177.000,00	142.237.000,00	-3.940.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak		153.500.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	2.09.03.1.01.0012	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Provinsi					2 Laporan	2 Laporan	100.972.000,00	100.972.000,00	89.607.000,00	-11.365.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak		106.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	2.09.03.1.01.0013	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)					1 Dokumen	1 Dokumen	25.028.000,00	25.028.000,00	16.668.000,00	-8.360.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak		26.280.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	2.09.03.1.04	Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi	Pencapaian target konsumsi golongan pangan umbi-umbian				-	10,5 kg/kap ita/tahun	86.103.000,00	272.043.000,00	173.938.000,00	87.835.000,00			-	Peningkatan kualitas SDM	KWT, ibu-ibu PKK/Dasawisma, pelajar, Analis Ketahanan Pangan	132.660.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	2.09.03.1.04.0001	Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal					1 Dokumen	2 Dokumen	55.000.000,00	240.940.000,00	153.085.000,00	98.085.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas SDM		100.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	2.09.03.1.04.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun					1 Laporan	1 Laporan	31.103.000,00	31.103.000,00	20.853.000,00	-10.250.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas SDM		32.660.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
2.	2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Desa Mandiri Pangan dalam tahap Kemandirian (%)				95,45 %	95,45 %	20.000.000,00	27.110.000,00	22.630.000,00	1.000.000,00							21.000.000,00	
	2.09.04.1.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	Penanganan Kerawanan Pangan				5 Kabupaten/Kota	5 Kabupaten/Kota	20.000.000,00	27.110.000,00	22.630.000,00	2.630.000,00			-	Penurunan tingkat kemiskinan	Masyarakat, Kapanewon, para pihak terkait pengentasan kerawanan pangan	21.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	2.09.04.1.02.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi					1 Laporan	2 Laporan	20.000.000,00	27.110.000,00	22.630.000,00	2.630.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan tingkat kemiskinan		21.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
3.	2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase hasil pengujian Pangan Segar Asal Tumbuhan yang memenuhi syarat keamanan pangan (%)				80,24 %	80,24 %	91.624.300,00	277.564.300,00	227.866.300,00	36.775.700,00							128.400.000,00	
	2.09.05.1.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Pengawasan dan penjaminan mutu keamanan pangan segar				5 Kabupaten/Kota	5 Kabupaten/Kota	91.624.300,00	277.564.300,00	227.866.300,00	136.242.000,00			-	Peningkatan kualitas SDM	OKKPD DIY, pelaku usaha Pangan Segar Asal Tumbuhan, pedagang, masyarakat	128.400.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	2.09.05.1.01.0006	Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan					4 Sertifikat	4 Sertifikat	28.441.700,00	28.441.700,00	28.261.700,00	-180.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas SDM		29.860.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	2.09.05.1.01.0008	Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota					1 Dokumen	3 Dokumen	16.958.300,00	202.898.300,00	159.590.300,00	142.632.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas SDM		50.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	2.09.05.1.01.0009	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan					1 Dokumen	1 Dokumen	36.624.300,00	36.624.300,00	30.414.300,00	-6.210.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas SDM		38.460.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	2.09.05.1.01.0010	Penyediaan sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan					1 Dokumen	1 Dokumen	9.600.000,00	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas SDM		10.080.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN							79.000.000,00	247.861.000,00	124.345.000,00	45.345.000,00							0,00	
1.	2.10.11	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN	-				-	-	79.000.000,00	247.861.000,00	124.345.000,00	-79.000.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.10.11.5.02	Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Terlaksananya pemanfaatan tanah Kasultanan dan Kadipaten untuk budidaya pertanian				-	4 Kabupaten	79.000.000,00	247.861.000,00	124.345.000,00	45.345.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	Kalurahan penerima BKK Dana Keistimewaan Urusan Pertanahan		0,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.10.11.5.02.0001	Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Ijin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten																		
			Jumlah Dokumen Pertimbangan Teknis Ijin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten				1 Dokumen	1 Dokumen	79.000.000,00	247.861.000,00	124.345.000,00	45.345.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)			0,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	<b>2.22</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN</b>							<b>7.765.063.800,00</b>	<b>2.951.782.350,00</b>	<b>1.848.633.700,00</b>	<b>-5.916.430.100,00</b>							<b>0,00</b>	
1.	<b>2.22.08</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN</b>	-				-	-	<b>7.765.063.800,00</b>	<b>2.951.782.350,00</b>	<b>1.848.633.700,00</b>	<b>-7.765.063.800,00</b>							<b>0,00</b>	
	2.22.08.5.06	Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	-				-	-	3.500.000.000,00	0,00	0,00	-3.500.000.000,00			-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	-		0,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.22.08.5.06.0001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya				2 Unit	0 Unit	3.500.000.000,00	0,00	0,00	-3.500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			0,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.22.08.5.08	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	Jumlah pengetahuan dan teknologi tradisional pertanian yang dilestarikan				5 Jenis	5 Jenis	4.265.063.800,00	2.951.782.350,00	1.848.633.700,00	-2.416.430.100,00			-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Kelompok tani, KWT, kelompok lumbung, gapoktan, pelaku usaha pangan lokal, masyarakat		0,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.22.08.5.08.0001	Pengembangan Lumbung Mataraman																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengembangan Lumbung Mataraman				15 Laporan	11 Laporan	4.265.063.800,00	2.951.782.350,00	1.848.633.700,00	-2.416.430.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			0,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	<b>3</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>							<b>62.273.013.892,00</b>	<b>69.941.970.876,00</b>	<b>64.251.220.605,00</b>	<b>1.978.206.713,00</b>							<b>66.249.795.439,00</b>	
	<b>3.27</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN</b>							<b>62.273.013.892,00</b>	<b>69.941.970.876,00</b>	<b>64.251.220.605,00</b>	<b>1.978.206.713,00</b>							<b>66.249.795.439,00</b>	
1.	<b>3.27.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				<b>90,1 Angka</b>	<b>90,1 Angka</b>	<b>53.135.424.578,00</b>	<b>53.334.939.562,00</b>	<b>53.910.163.541,00</b>	<b>2.658.914.861,00</b>							<b>55.794.339.439,00</b>	
	3.27.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tercapainya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100 %	100 %	55.039.500,00	55.039.500,00	48.439.500,00	-6.600.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	DPKP DIY		57.785.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	17.843.500,00	17.843.500,00	15.083.500,00	-2.760.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			18.730.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	16.201.000,00	16.201.000,00	16.201.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			17.011.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	3 Laporan	20.995.000,00	20.995.000,00	17.155.000,00	-3.840.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			22.044.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tercapainya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100 %	100 %	46.198.924.228,00	46.398.439.212,00	46.789.624.191,00	590.699.963,00			-	-	DPKP DIY		48.511.013.439,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				321 Orang/Bulan	300 Orang/Bulan	46.151.784.228,00	46.351.299.212,00	46.742.484.191,00	590.699.963,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			48.459.373.439,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	14.340.000,00	14.340.000,00	14.340.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			17.200.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD				1 Laporan	1 Laporan	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			16.800.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3.27.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tercapainya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				100 %	100 %	87.120.000,00	87.120.000,00	87.120.000,00	0,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	DPKP DIY		91.476.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3.27.01.1.03.0006		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	63.600.000,00	63.600.000,00	63.600.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			66.780.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3.27.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tercapainya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				100 %	100 %	10.316.600,00	10.316.600,00	9.416.600,00	-900.000,00			-	-	DPKP DIY		10.832.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3.27.01.1.05.0005		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	1 Dokumen	10.316.600,00	10.316.600,00	9.416.600,00	-900.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			10.832.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3.27.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tercapainya Administrasi Umum Perangkat Daerah				100 %	100 %	278.413.350,00	278.413.350,00	249.632.350,00	-28.781.000,00			-	-	DPKP DIY		292.317.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3.27.01.1.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	21.885.800,00	21.885.800,00	21.885.800,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			22.980.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3.27.01.1.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	26.141.400,00	26.141.400,00	26.141.400,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			27.448.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3.27.01.1.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	15.229.150,00	15.229.150,00	15.229.150,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			15.990.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3.27.01.1.06.0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	8.916.000,00	8.916.000,00	8.604.000,00	-312.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			9.360.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3.27.01.1.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	36.964.000,00	36.964.000,00	29.004.000,00	-7.960.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			38.812.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3.27.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tercapainya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah				100 %	100 %	27.420.000,00	27.420.000,00	27.420.000,00	0,00			-	-	DPKP DIY		28.797.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3.27.01.1.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	22.950.000,00	22.950.000,00	22.950.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			24.097.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3.27.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tercapainya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	100 %	5.021.783.400,00	5.021.783.400,00	5.021.783.400,00	0,00			-	-	DPKP DIY		5.272.890.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3.27.01.1.08.0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			630.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3.27.01.1.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	969.207.000,00	969.207.000,00	969.207.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.017.668.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3.27.01.1.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	2.813.748.000,00	2.813.748.000,00	2.813.748.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			2.954.450.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3.27.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah				100 %	100 %	1.456.407.500,00	1.456.407.500,00	1.676.727.500,00	220.320.000,00			-	-	DPKP DIY		1.529.229.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3.27.01.1.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				2 Unit	2 Unit	72.082.000,00	72.082.000,00	72.082.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			75.686.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3.27.01.1.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizannya				136 Unit	136 Unit	594.830.900,00	594.830.900,00	594.830.900,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			624.572.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3.27.01.1.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				28 Unit	28 Unit	68.978.000,00	68.978.000,00	68.978.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			72.427.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.27.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						1 Unit	3 Unit	5.064.000,00	78.064.000,00	178.064.000,00	173.000.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-		5.317.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						119 Unit	121 Unit	85.512.000,00	85.512.000,00	205.832.000,00	120.320.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		89.788.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2.	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase sarana pertanian yang digunakan dan kondisinya baik				-	98,5 %	5.254.425.814,00	6.206.900.814,00	5.864.049.564,00	629.561.186,00						5.883.987.000,00		
	3.27.02.1.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Terlaksananya pengawasan peredaran sarana pertanian				-	2 Kabupaten	138.088.000,00	1.081.678.000,00	796.807.000,00	658.719.000,00		Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Kelompok tani, KWT, gapoktan, pelaku usaha, masyarakat		511.800.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	3.27.02.1.01.0001	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian						1 Laporan	9 Laporan	300.000,00	569.310.000,00	472.331.000,00	472.031.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak		211.800.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.02.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian						5 Dokumen	8 Dokumen	137.788.000,00	512.368.000,00	324.476.000,00	186.688.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak		300.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.02.1.04	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Terlaksananya pembinaan dan fasilitas pengembangan peternakan					186 Kelompok	2 Kelompok	3.400.000.000,00	3.407.110.000,00	3.391.190.000,00	-8.810.000,00		-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Kelompok ternak, kelompok tani, KWT, gapoktan		3.570.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.02.1.04.0001	Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi						3 Dokumen	3 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	84.080.000,00	-15.920.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak		105.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3.	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase peningkatan prasarana pertanian yang dibangun dan digunakan				10 %	10 %	16.708.000,00	6.016.205.000,00	200.048.000,00	322.776.000,00						339.484.000,00		
	3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	Terlaksananya Penataan Prasarana Pertanian					4 Kabupaten	4 Kabupaten	16.708.000,00	6.016.205.000,00	200.048.000,00	183.340.000,00		Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Kelompok tani, KWT, gapoktan		339.484.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.03.1.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani						-	1 Dokumen	0,00	191.520.000,00	191.120.000,00	191.120.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak		201.095.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.03.1.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani						1 Dokumen	1 Dokumen	16.408.000,00	16.408.000,00	8.928.000,00	-7.480.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak		17.250.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.03.1.01.0013	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian						0,01 Ha	0 Ha	300.000,00	300.000,00	0,00	-300.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak		121.139.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
4.	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular (%)				6,22 %	6,22 %	1.242.456.500,00	1.399.566.500,00	1.390.646.500,00	55.928.500,00						1.298.385.000,00		
	3.27.04.1.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular					5 Kabupaten/Kota	5 Kabupaten/Kota	60.611.400,00	67.721.400,00	66.981.400,00	6.370.000,00		-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	-		63.650.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.04.1.01.0003	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali				1 Laporan	2 Laporan	60.611.400,00	67.721.400,00	66.981.400,00	6.370.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			63.650.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.04.1.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah				5 Kabupaten/Kota	5 Kabupaten/Kota	627.600.500,00	627.600.500,00	625.520.500,00	-2.080.000,00			-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Peternak, pelaku usaha Pangan Asal Hewan (PAH), jagal/petugas penyembelih hewan kurban, Pos Lalu Lintas Ternak (PLLT), masyarakat,		658.965.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.04.1.02.0004	Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriks HPM					1 Laporan	1 Laporan	621.490.000,00	621.490.000,00	621.490.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			652.565.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.04.1.02.0006	Pengawasan Peredaran Produk Hewan					1 Laporan	1 Laporan	6.110.500,00	6.110.500,00	4.030.500,00	-2.080.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			6.400.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.04.1.05	Kesejahteraan Hewan	Penjaminan Mutu dan Kesejahteraan Hewan				5 Kabupaten/Kota	5 Kabupaten/Kota	5.890.000,00	5.890.000,00	4.390.000,00	-1.500.000,00			-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Pelaku usaha Pangan Asal Hewan (PAH)		0,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.04.1.05.0003	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV)					2 Sertifikat	2 Sertifikat	5.890.000,00	5.890.000,00	4.390.000,00	-1.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			0,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
5.	3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Rata-rata persentase rasio serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) yang dapat ditangani terhadap luas serangan OPT dan persentase rasio luas terkena Dampak Perubahan Iklim (DPI) yang dapat ditangani terhadap luas terkena DPI (%)				58,40% %	58,40% %	100.000.000,00	267.310.000,00	206.142.000,00	50.000.000,00							150.000.000,00	
	3.27.05.1.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Terwujudnya pertanian aman dari serangan OPT dan DPI untuk komoditas tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan				3 Sub sektor	3 Sub sektor	100.000.000,00	267.310.000,00	206.142.000,00	106.142.000,00			-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			150.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.05.1.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan					300 Ha	50 Ha	100.000.000,00	267.310.000,00	206.142.000,00	106.142.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			150.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
6.	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase SDM pertanian yg meningkat kapasitasnya (%)				64 % %	64 % %	2.523.999.000,00	2.717.049.000,00	2.680.171.000,00	259.601.000,00							2.783.600.000,00	
	3.27.07.1.01	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	Terlaksananya Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian				64 %	64 %	36.000.000,00	36.000.000,00	78.160.000,00	42.160.000,00			-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Penyuluh pertanian dan penyuluh pertanian swadaya		37.800.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.07.1.01.0004	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian					30 Orang	40 Orang	36.000.000,00	36.000.000,00	78.160.000,00	42.160.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL PENYULUH PERTANIAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			37.800.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.07.1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Terlaksananya Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian				5 Kabupaten/Kota	5 Kabupaten/Kota	2.487.999.000,00	2.681.049.000,00	2.602.011.000,00	114.012.000,00			-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Penyuluh ASN, penyuluh swadaya, Jogja Agro Park (JAP)		2.745.800.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.07.1.02.0001	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian					1 Dokumen	1 Dokumen	2.472.159.000,00	2.472.159.000,00	2.465.979.000,00	-6.180.000,00	Kab. Kulon Progo, Nanggulan, Wijimulyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			2.595.800.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.07.1.02.0002	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani					45 Kelompok	45 Kelompok	15.840.000,00	208.890.000,00	136.032.000,00	120.192.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Sewon, Panggungharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			150.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
		<b>BALAI PENGEMBANGAN PERBENIHAN DAN PENGAWASAN MUTU BENIH TANAMAN PERTANIAN</b>							<b>71.283.717.992,00</b>	<b>75.398.658.526,00</b>	<b>68.106.319.605,00</b>	<b>-3.177.398.387,00</b>							<b>66.817.635.439,00</b>	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							696.736.000,00	1.408.150.000,00	1.209.174.000,00	512.438.000,00							0,00	
1.03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							696.736.000,00	1.408.150.000,00	1.209.174.000,00	512.438.000,00							0,00	
1.	1.03.13	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG					-	329 Ha	696.736.000,00	1.408.150.000,00	1.209.174.000,00	-696.736.000,00							0,00	
	1.03.13.5.02	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Jumlah pemanfaatan ruang satuan ruang strategis untuk usaha pertanian				-	4 Satuan Ruang Strategis	696.736.000,00	1.408.150.000,00	1.209.174.000,00	512.438.000,00			-	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	Kelompok tani kakao, pelaku usaha kakao/cokelat, pelajar, masyarakat, kelompok tani kopi		0,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	1.03.13.5.02.0001	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofi Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu				-	1 Dokumen	0,00	385.350.000,00	292.937.000,00	292.937.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)			0,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	1.03.13.5.02.0004	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh																		
			Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh				-	2 Dokumen	0,00	330.800.000,00	305.522.000,00	305.522.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)			0,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							62.273.013.892,00	69.941.970.876,00	64.251.220.605,00	1.978.206.713,00							66.249.795.439,00	
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN							62.273.013.892,00	69.941.970.876,00	64.251.220.605,00	1.978.206.713,00							66.249.795.439,00	
1.	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				90,1 Angka	90,1 Angka	53.135.424.578,00	53.334.939.562,00	53.910.163.541,00	2.658.914.861,00							55.794.339.439,00	
	3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tercapainya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100 %	100 %	46.198.924.228,00	46.398.439.212,00	46.789.624.191,00	590.699.963,00		-	-		UPTD BP3MBTP		48.511.013.439,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	8.400.000,00	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			8.820.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya pengadministrasian barang milik daerah				100 %	100 %	87.120.000,00	87.120.000,00	87.120.000,00	0,00		-	-		UPTD BP3MBTP		91.476.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	10.320.000,00	10.320.000,00	10.320.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			10.836.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tercapainya Administrasi Umum Perangkat Daerah				-	100 %	278.413.350,00	278.413.350,00	249.632.350,00	-28.781.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		UPTD BP3MBTP	292.317.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	8.073.400,00	8.073.400,00	8.073.400,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			8.477.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	22.594.200,00	22.594.200,00	22.594.200,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			23.725.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	6.818.000,00	6.818.000,00	6.818.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			7.150.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	20.385.000,00	20.385.000,00	20.385.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			21.400.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	2.400.000,00	2.400.000,00	1.764.000,00	-636.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			2.520.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	32.667.000,00	32.667.000,00	23.625.000,00	-9.042.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			34.300.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tercapainya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	100 %	5.021.783.400,00	5.021.783.400,00	5.021.783.400,00	0,00			-	-			5.272.890.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			840.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	235.485.500,00	235.485.500,00	235.485.500,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			247.260.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	695.688.000,00	695.688.000,00	695.688.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			730.472.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tercapainya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	100 %	1.456.407.500,00	1.456.407.500,00	1.676.727.500,00	220.320.000,00			-	-	UPTD BP3MBTP		1.529.229.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizannya				43 Unit	43 Unit	250.105.100,00	250.105.100,00	250.105.100,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			262.610.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				23 Unit	23 Unit	30.633.000,00	30.633.000,00	30.633.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			32.165.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-49.000.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			52.500.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				19 Unit	19 Unit	11.112.000,00	11.112.000,00	11.112.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			11.668.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2.	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase benih tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan bersertifikat yang terdistribusi (%)				2,36 %	2,36 %	5.254.425.814,00	6.206.900.814,00	5.864.049.564,00	629.561.186,00							5.883.987.000,00	
	3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Terlaksananya Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman				5 Kabupaten/Kota	5 Kabupaten/Kota	1.716.337.814,00	1.718.112.814,00	1.676.052.564,00	-40.285.250,00			-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Produsen, penangkar, dan penjual benih tanaman		1.802.187.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.02.1.02.0001	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih																		
			Jumlah Sertifikat Benih				141 Sertifikat	141 Sertifikat	85.837.950,00	85.837.950,00	66.277.950,00	-19.560.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			90.130.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.02.1.02.0005	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan																		
			Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan, hortikultura dan Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran & tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga				3 laporan	4 laporan	50.023.000,00	57.133.000,00	43.753.000,00	-6.270.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			52.525.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.02.1.02.0007	Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang																		
			Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak				35000 Batang	35000 Batang	451.458.924,00	446.123.924,00	446.123.924,00	-5.335.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			474.032.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.02.1.02.0012	Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang																		
			Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang				10800 Batang	10800 Batang	129.007.500,00	129.007.500,00	129.007.250,00	-250,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			135.500.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.02.1.02.0013	Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih																		
			Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak				82,9 Ton	75,5 Ton	1.000.010.440,00	1.000.010.440,00	990.890.440,00	-9.120.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			1.050.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3.	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	-				-	-	16.708.000,00	6.016.205.000,00	200.048.000,00	322.776.000,00							339.484.000,00	
	3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	-				-	-	16.708.000,00	6.016.205.000,00	200.048.000,00	183.340.000,00			-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			339.484.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.27.03.1.01.0010	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya																		
			Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi				-	0 Unit	0,00	3.025.977.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PERTANIAN-TEM ATIK PENGUATAN KAWASAN SENTRA PRODUKSI PANGAN (PERTANIAN, PERIKANAN, DAN HEWANI)	-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			0,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
		<b>BALAI PENGEMBANGAN PERBIBITAN TERNAK DAN DIAGNOSTIK KEHEWANAN</b>																	<b>66.817.635.439,00</b>	
	<b>3</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>							<b>62.273.013.892,00</b>	<b>69.941.970.876,00</b>	<b>64.251.220.605,00</b>	<b>1.978.206.713,00</b>							<b>66.249.795.439,00</b>	
	<b>3.27</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN</b>							<b>62.273.013.892,00</b>	<b>69.941.970.876,00</b>	<b>64.251.220.605,00</b>	<b>1.978.206.713,00</b>							<b>66.249.795.439,00</b>	
1.	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				90,1 Angka	90,1 Angka	53.135.424.578,00	53.334.939.562,00	53.910.163.541,00	2.658.914.861,00							55.794.339.439,00	
	3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tercapainya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100 %	100 %	46.198.924.228,00	46.398.439.212,00	46.789.624.191,00	590.699.963,00			-	-		UPTD BPPTDK	48.511.013.439,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	8.400.000,00	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			8.820.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tercapainya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				100 %	100 %	87.120.000,00	87.120.000,00	87.120.000,00	0,00			-	-		UPTD BPPTDK	91.476.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	13.200.000,00	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			13.860.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tercapainya Administrasi Umum Perangkat Daerah				100 %	100 %	278.413.350,00	278.413.350,00	249.632.350,00	-28.781.000,00			-	-		UPTD BPPTDK	292.317.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	4.757.400,00	4.757.400,00	4.757.400,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			4.995.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			15.750.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.854.000,00	2.854.000,00	2.854.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			2.995.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	26.592.000,00	26.592.000,00	26.592.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			27.922.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	2.136.000,00	2.136.000,00	1.632.000,00	-504.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			2.243.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	25.000.000,00	25.000.000,00	14.673.000,00	-10.327.000,00	Kab. Bantul, Jatis, Sumberagung Kab. Sleman, Pakem, Purwobinangun Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			26.250.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tercapainya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah				100 %	100 %	27.420.000,00	27.420.000,00	27.420.000,00	0,00			-	-			28.797.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	1 Unit	4.470.000,00	4.470.000,00	4.470.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			4.700.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tercapainya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-	100 %	5.021.783.400,00	5.021.783.400,00	5.021.783.400,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		UPTD BPPTDK	5.272.890.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			1.050.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	158.638.900,00	158.638.900,00	158.638.900,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			166.570.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	146.616.000,00	146.616.000,00	146.616.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			153.950.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah				-	100 %	1.456.407.500,00	1.456.407.500,00	1.676.727.500,00	220.320.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	UPTD BPPTDK		1.529.229.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				40 Unit	40 Unit	229.251.500,00	229.251.500,00	229.251.500,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			240.715.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				19 Unit	19 Unit	27.525.000,00	27.525.000,00	27.525.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			28.901.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	3.27.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	25.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-24.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			26.250.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	3.27.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				25 Unit	25 Unit	6.314.000,00	6.314.000,00	6.314.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			6.630.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
2.	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase benih dan bibit ternak bersertifikat yang terdistribusi (%)				93,50 %	93,50 %	5.254.425.814,00	6.206.900.814,00	5.864.049.564,00	629.561.186,00							5.883.987.000,00		
	3.27.02.1.04	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Terlaksananya sertifikasi dan terdistribusinya bibit ternak yang memiliki Surat Keterangan Layak Bibit/SKLB ke masyarakat				72 Ekor	72 Ekor	3.400.000.000,00	3.407.110.000,00	3.391.190.000,00	-8.810.000,00			-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	UPTD BPPTDK, peternak, pelaku usaha, masyarakat		3.570.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	3.27.02.1.04.0004	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi																			
			Jumlah pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi				3 laporan	4 laporan	3.300.000.000,00	3.307.110.000,00	3.307.110.000,00	7.110.000,00	Kab. Bantul, Jetis, Sumberagung Kab. Sleman, Pakem, Purwobinangun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			3.465.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
3.	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	-				-	-	16.708.000,00	6.016.205.000,00	200.048.000,00	322.776.000,00							339.484.000,00		
	3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	-				-	-	16.708.000,00	6.016.205.000,00	200.048.000,00	183.340.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	UPTD BPPTDK		339.484.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	3.27.03.1.01.0012	Pembangunan, rehabilitasi, Pemeliharaan dan Penyelenggaraan Laboratorium Keswan dan Kesmavet																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pembangunan, rehabilitasi, Pemeliharaan, dan Penyelenggaraan Laboratorium Keswan dan Kesmavet				-	0 Unit	0,00	2.782.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Bantul, Jatis, Sumberagung	DAK FISIK-BIDANG PERTANIAN-TEMATIK PENGUATAN KAWASAN SENTRA PRODUKSI PANGAN (PERTANIAN, PERIKANAN, DAN HEWANI)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			0,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
4.	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular (-%)				6,22 %	6,22 %	1.242.456.500,00	1.399.566.500,00	1.390.646.500,00	55.928.500,00							1.298.385.000,00	
	3.27.04.1.03	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner				19265 Sampel	19265 Sampel	548.354.600,00	698.354.600,00	693.754.600,00	145.400.000,00			-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	UPTD BPPTDK, peternak, pelaku usaha, masyarakat		575.770.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.04.1.03.0003	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner																		
			Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner				3 Dokumen	4 Dokumen	548.354.600,00	698.354.600,00	693.754.600,00	145.400.000,00	Kab. Bantul, Jatis, Sumberagung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			575.770.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN							43.171.135.790,00	37.721.028.531,00	35.088.838.617,00	-8.082.297.173,00							60.474.500.000,00	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							1.538.397.000,00	1.511.140.100,00	1.236.140.200,00	-302.256.800,00							1.700.000.000,00	
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							1.538.397.000,00	1.511.140.100,00	1.236.140.200,00	-302.256.800,00							1.700.000.000,00	
1.	1.03.13	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	Jumlah Sentra IKM di Satuan Ruang Strategis yang dibina				2 Sentra	2 Sentra	1.538.397.000,00	1.511.140.100,00	1.236.140.200,00	161.603.000,00							1.700.000.000,00	
	1.03.13.5.02	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis				2 Dokumen	2 Dokumen	1.538.397.000,00	1.511.140.100,00	1.236.140.200,00	-302.256.800,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	IKM DIY		1.700.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	1.03.13.5.02.0003	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu																		
			Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu				1 Dokumen	1 Dokumen	327.629.000,00	320.294.000,00	230.349.000,00	-97.280.000,00	Kab. Gunungkidul, Patuk, Nglanggeran	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			400.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	1.03.13.5.02.0004	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh																		
			Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh				1 Dokumen	1 Dokumen	1.210.768.000,00	1.190.846.100,00	1.005.791.200,00	-204.976.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			1.300.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							20.515.998.256,00	9.456.166.700,00	7.299.183.150,00	-13.216.815.106,00							30.000.000.000,00	
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							20.515.998.256,00	9.456.166.700,00	7.299.183.150,00	-13.216.815.106,00							30.000.000.000,00	
1.	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Nilai PDRB Sektor Industri Pengolahan Nilai Produksi IKM Industri Kreatif				13,78 Triliun N/A Rp	13,78 Triliun N/A Rp	20.515.998.256,00	9.456.166.700,00	7.299.183.150,00	9.484.001.744,00							30.000.000.000,00	
	2.22.08.5.06	Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Taraksananya Penyediaan Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan				100 %	100 %	1.000.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000.000,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Disperindag DIY		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.22.08.5.06.0001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya				1 Unit	0 Unit	1.000.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000.000,00	-	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.22.08.5.08	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	Jumlah IKM yang mendapatkan pembinaan				6400 IKM	6400 IKM	19.515.998.256,00	9.456.166.700,00	7.299.183.150,00	-12.216.815.106,00			-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	IKM Produk Khas DIY		30.000.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.22.08.5.08.0003	Pengembangan Industri Kreatif																		
			Jumlah Industri Kreatif yang Dikembangkan				6300 Unit	6300 Unit	19.515.998.256,00	9.456.166.700,00	7.299.183.150,00	-12.216.815.106,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			30.000.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							20.916.315.534,00	26.592.811.231,00	26.448.627.267,00	5.532.311.733,00							28.224.500.000,00	
	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN							614.000.500,00	2.136.393.500,00	1.876.011.600,00	1.262.011.100,00							2.551.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1.	3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Jumlah Perusahaan Ekspor				575 Perusahaan	575 Perusahaan	30.000.000,00	30.000.000,00	26.100.000,00	10.000.000,00					40.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
	3.30.02.1.04	Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	Persentase penerbitan SKA yang tepat waktu				96 %	96 %	30.000.000,00	30.000.000,00	26.100.000,00	-3.900.000,00		Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pengembangan ekonomi yang layak	Eksportir DIY	40.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
	3.30.02.1.04.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA																		
			Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal				27500 Dokumen	27500 Dokumen	30.000.000,00	30.000.000,00	26.100.000,00	-3.900.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pengembangan ekonomi yang layak		40.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
2.	3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase ketersediaan data harga barang kebutuhan pokok dan barang penting Inflasi Pangan Bergejolak				90 N/A %	90 N/A %	114.000.000,00	1.212.393.000,00	1.201.793.000,00	1.286.000.000,00					1.400.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
	3.30.04.1.02	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah jenis barang yang dipantau				25 jenis	25 jenis	114.000.000,00	1.212.393.000,00	1.201.793.000,00	1.087.793.000,00		Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Masyarakat DIY	1.400.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
	3.30.04.1.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	3.400.000,00	-1.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pengembangan ekonomi yang layak		700.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3.30.04.1.02.0002	Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				1 Laporan	1 Laporan	109.000.000,00	1.207.393.000,00	1.198.393.000,00	1.089.393.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA SEBELUMNYA PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pengembangan ekonomi yang layak		700.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3.	3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase pelaku usaha peserta pembinaan yang menjadi eksportir baru				20 %	20 %	50.000.000,00	154.000.000,00	106.982.600,00	200.000.000,00					250.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
	3.30.05.1.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	Jumlah Pelaku usaha perdagangan yang dibina				50 pelaku	50 pelaku	50.000.000,00	154.000.000,00	106.982.600,00	56.982.600,00		Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Eksportir DIY	250.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
	3.30.05.1.01.0004	Peningkatan Citra Produk Ekspor																		
			Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun menjadi Materi Promosi				20 Produk	20 Produk	50.000.000,00	154.000.000,00	106.982.600,00	56.982.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak		250.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
4.	3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Jumlah Barang Jasa yang Tidak Sesuai dengan Standard Persentase penanganan sengketa konsumen				96,5 97 %	96,5 97 %	210.000.500,00	302.000.500,00	235.346.500,00	350.999.500,00					561.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
	3.30.06.1.01	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan Konsumen yang Ditangani				25 Pengaduan	25 Pengaduan	200.000.500,00	292.000.500,00	227.746.500,00	27.746.000,00		Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Masyarakat/Konsumen DIY	550.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
	3.30.06.1.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen																		
			Jumlah Pengaduan Konsumen yang Ditangani				25 Pengaduan	25 Pengaduan	200.000.500,00	292.000.500,00	227.746.500,00	27.746.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pengembangan ekonomi yang layak		550.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3.30.06.1.03	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jenis barang yang dipantau				25 Pengaduan	25 Pengaduan	10.000.000,00	10.000.000,00	7.600.000,00	-2.400.000,00		Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Masyarakat/Konsumen DIY	11.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
	3.30.06.1.03.0003	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi				1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	7.600.000,00	-2.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak		11.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
5.	3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Jumlah Omzet Usaha Pelaku Perdagangan yang Dibina				2,65 Milyar Rp	2,65 Milyar Rp	210.000.000,00	438.000.000,00	305.789.500,00	90.000.000,00					300.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.30.07.1.02	Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah UMKM yang difasilitasi pemasaran P3DN Negeri				55 IKM	55 IKM	210.000.000,00	438.000.000,00	305.789.500,00	95.789.500,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Pelaku Usaha Industri dan Perdagangan DIY		300.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.07.1.02.0002	Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi																		
			Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi				400 UMKM	560 UMKM	210.000.000,00	438.000.000,00	305.789.500,00	95.789.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			300.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN							20.302.315.034,00	24.456.417.731,00	24.572.615.667,00	4.270.300.633,00							25.673.500.000,00	
1.	3.31.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				85 Angka	85 Angka	19.971.182.834,00	20.383.637.731,00	20.711.099.117,00	3.065.317.166,00							23.036.500.000,00	
	3.31.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.				100 %	100 %	30.500.000,00	308.600.000,00	274.787.000,00	244.287.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Disperindag DIY		33.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			11.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			6.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	3 Laporan	15.000.000,00	293.100.000,00	259.287.000,00	244.287.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			16.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100 %	100 %	16.143.533.534,00	16.277.888.431,00	15.943.980.817,00	-199.552.717,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Disperindag DIY		19.097.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				137 Orang/ Bulan	137 Orang/ Bulan	16.062.237.534,00	16.196.592.431,00	15.862.684.817,00	-199.552.717,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			19.000.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	32.056.000,00	32.056.000,00	32.056.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			50.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			15.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	18 Laporan	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			7.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.31.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				100 %	100 %	68.372.900,00	68.372.900,00	68.372.900,00	0,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Disperindag DIY		70.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	58.052.900,00	58.052.900,00	58.052.900,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			65.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah				100 %	100 %	159.982.400,00	159.982.400,00	139.130.400,00	-20.852.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Disperindag DIY		277.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			1.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10	1 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			20.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			5.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			5.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	13.500.000,00	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			15.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	1.764.000,00	1.764.000,00	1.764.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			1.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	105.988.000,00	105.988.000,00	89.336.000,00	-16.652.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			200.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			5.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100 %	100 %	88.236.000,00	88.236.000,00	591.246.000,00	503.010.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Disperindag DIY		10.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				6 Unit	2 Unit	80.636.000,00	80.636.000,00	583.646.000,00	503.010.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			5.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3.31.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	7.600.000,00	7.600.000,00	7.600.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			5.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3.31.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	100 %	3.062.259.400,00	3.062.259.400,00	3.062.259.400,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Disperindag DIY		3.097.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3.31.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	345.599.400,00	345.599.400,00	345.599.400,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			356.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3.31.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	1.132.104.000,00	1.132.104.000,00	1.132.104.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			891.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3.31.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	100 %	418.298.600,00	418.298.600,00	631.322.600,00	213.024.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Disperindag DIY		451.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3.31.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	33.096.000,00	33.096.000,00	33.096.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			35.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3.31.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				14 Unit	14 Unit	242.395.300,00	242.395.300,00	242.395.300,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			225.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3.31.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel																			
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				6 Unit	6 Unit	2.712.000,00	2.712.000,00	2.712.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			5.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3.31.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				14 Unit	14 Unit	9.888.000,00	9.888.000,00	9.888.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			5.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3.31.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	3 Unit	59.000.000,00	59.000.000,00	175.000.000,00	116.000.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			5.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3.31.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				8 Unit	14 Unit	19.922.000,00	19.922.000,00	23.750.000,00	3.828.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			15.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
2.	3.31.02	PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Jumlah tenaga kerja di sektor Industri Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) BPTTG				414000 86,50 Orang %	414000 86,50 Orang %	309.674.950,00	3.982.322.750,00	3.801.220.050,00	2.315.325.050,00							2.625.000.000,00		
	3.31.02.1.01	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi				3 Dokumen	3 Dokumen	309.674.950,00	3.982.322.750,00	3.801.220.050,00	3.491.545.100,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Disperindag DIY		2.625.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3.31.02.1.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri																			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri				1 Dokumen	1 Dokumen	39.999.950,00	221.999.950,00	131.067.650,00	91.067.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			600.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3.31.02.1.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	70.000.000,00	3.422.647.800,00	3.401.317.800,00	3.331.317.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) DAK NON FISIK-DANA PENGUATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN SENTRA IKM	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			1.500.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.	3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Jumlah Perusahaan Industri yang Berizin				17,043 Perusahaan	17,043 Perusahaan	10.000.000,00	10.000.000,00	6.000.000,00	1.000.000,00							11.000.000,00	
	3.31.03.1.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	Persentase jumlah hasil pemantauan dan Pengawasan dengan Jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait				38 %	38 %	10.000.000,00	10.000.000,00	6.000.000,00	-4.000.000,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Pelaku Usaha Industri		11.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.03.1.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Provinsi																		
			Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang lokasinya lintas Kab./Kota, dan Industri Besar sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	6.000.000,00	-4.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			11.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
4.	3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Jumlah pelaku usaha industri yang terdaftar di SIINAS				700 Perusahaan	700 Perusahaan	11.457.250,00	80.457.250,00	54.296.500,00	-10.457.250,00							1.000.000,00	
	3.31.04.1.01	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Perusahaan Industri yang mendapatkan pendampingan pengumpulan data SIINAS				200 Orang	200 Orang	11.457.250,00	80.457.250,00	54.296.500,00	42.839.250,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Disperindag DIY		1.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.04.1.01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)				1 Dokumen	1 Dokumen	11.457.250,00	80.457.250,00	54.296.500,00	42.839.250,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			1.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		<b>BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA</b>																		
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							20.916.315.534,00	26.592.811.231,00	26.448.627.267,00	5.532.311.733,00							28.224.500.000,00	
	3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN							20.302.315.034,00	24.456.417.731,00	24.572.615.667,00	4.270.300.633,00							25.673.500.000,00	
1.	3.31.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				85 Angka	85 Angka	19.971.182.834,00	20.383.637.731,00	20.711.099.117,00	3.065.317.166,00							23.036.500.000,00	
	3.31.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100 %	100 %	16.143.533.534,00	16.277.888.431,00	15.943.980.817,00	-199.552.717,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	BPTTG DIY		19.097.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	9.240.000,00	9.240.000,00	9.240.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			25.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				100 %	100 %	68.372.900,00	68.372.900,00	68.372.900,00	0,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	BPTTG DIY		70.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	10.320.000,00	10.320.000,00	10.320.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			5.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah				100 %	100 %	159.982.400,00	159.982.400,00	139.130.400,00	-20.852.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	BPTTG DIY		277.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.920.400,00	3.920.400,00	3.920.400,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			1.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	325.000,00	325.000,00	325.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			5.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.281.000,00	1.281.000,00	1.281.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			5.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	4.325.000,00	4.325.000,00	4.325.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			1.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	4.115.000,00	4.115.000,00	4.115.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			5.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	1.764.000,00	1.764.000,00	1.764.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			1.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	9.000.000,00	9.000.000,00	4.800.000,00	-4.200.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			5.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	100 %	3.062.259.400,00	3.062.259.400,00	3.062.259.400,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	BPTTG DIY		3.097.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	658.900.000,00	658.900.000,00	658.900.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			1.000.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	925.656.000,00	925.656.000,00	925.656.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			850.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	100 %	418.298.600,00	418.298.600,00	631.322.600,00	213.024.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	BPTTG DIY		451.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	6 Unit	37.327.300,00	37.327.300,00	39.923.300,00	2.596.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			5.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	7.578.000,00	7.578.000,00	7.578.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			5.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				-	2 Unit	0,00	0,00	90.600.000,00	90.600.000,00	Kab. Sleman, Depok, Maguwoharjo Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			150.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				10 Unit	10 Unit	6.380.000,00	6.380.000,00	6.380.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			1.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2.	3.31.02	PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Jumlah tenaga kerja di sektor Industri Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) BPTTG				414000 86,50 Orang %	414000 86,50 Orang %	309.674.950,00	3.982.322.750,00	3.801.220.050,00	2.315.325.050,00							2.625.000.000,00	



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					435 Orang/ Bulan	380 Orang/ Bulan	58.853.271.998,00	58.005.012.608,00	58.320.394.046,00	-532.877.952,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					12 Dokumen	12 Dokumen	14.415.500,00	14.415.500,00	13.920.000,00	-495.500,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; Penyediaan Peralatan Rumah Tangga; Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan; Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan; Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; Penyediaan Peralatan Rumah Tangga; Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan; Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan; Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD; Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; Penyediaan Peralatan Rumah Tangga; Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan; Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan; Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Terwujudnya Administrasi Umum Perangkat Daerah				100 % 20 Dokumen	100 % 20 Dokumen	4.461.083.070,00	4.171.105.070,00	2.700.993.950,00	-1.760.089.120,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Biro UHP, Setda DIY, Pemda DIY		4.655.817.454,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					12 Laporan	12 Laporan	1.494.675.000,00	1.301.599.000,00	650.788.000,00	-843.887.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Terlaksananya penyediaan dana penunjang operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah				100 %	100 %	3.795.153.916,00	3.016.515.379,00	3.059.774.771,00	-735.379.145,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Biro UHP, Setda DIY, Pemda DIY		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah					2 Orang/ Bulan	2 Orang/ Bulan	236.653.916,00	236.653.916,00	242.589.771,00	5.935.855,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah					2 Paket	2 Paket	157.500.000,00	157.500.000,00	157.500.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah					40 Orang	40 Orang	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah					2 Orang/ Bulan	2 Orang/ Bulan	3.341.000.000,00	2.562.361.463,00	2.599.685.000,00	-741.315.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.12	Fasilitasi Kerumahaan Sekretariat Daerah	-				-	-	972.851.000,00	972.851.000,00	972.851.000,00	0,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Biro UHP, Setda DIY, Pemda DIY		0,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.01.1.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah					6 Paket	6 Paket	774.967.000,00	774.967.000,00	774.967.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah					4 Paket	4 Paket	134.000.000,00	134.000.000,00	134.000.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah					2 Paket	2 Paket	63.884.000,00	63.884.000,00	63.884.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
		<b>BIRO TATA PEMERINTAHAN</b>							<b>102.076.370.746,00</b>	<b>103.771.250.419,00</b>	<b>99.387.188.327,00</b>	<b>-2.689.182.419,00</b>							<b>84.891.829.161,00</b>	
	<b>2</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>							<b>4.748.276.500,00</b>	<b>6.248.003.400,00</b>	<b>4.109.082.300,00</b>	<b>-639.194.200,00</b>							<b>3.436.232.796,00</b>	
	<b>2.10</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN</b>							<b>616.518.000,00</b>	<b>691.860.900,00</b>	<b>415.311.900,00</b>	<b>-201.206.100,00</b>							<b>906.002.796,00</b>	
1.	2.10.11	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN	Persentase garis batas daerah provinsi dan kabupaten/kota yang tersinkronisasi	71 %	71 %				616.518.000,00	691.860.900,00	415.311.900,00	289.484.796,00							906.002.796,00	
	2.10.11.5.01	Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Terlaksananya pengelolaan tanah kasultanan, tanah kadipaten yang meliputi aspek penatausahaan, aspek pemeliharaan dokumen, aspek pengawasan				2 Dokumen	2 Dokumen	295.000.000,00	382.477.600,00	312.124.600,00	17.124.600,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Instansi pemerintah di DIY; Masyarakat DIY baik yang bermukim di DIY maupun di luar DIY		325.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	2.10.11.5.01.0001	Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten					2 Dokumen	3 Dokumen	295.000.000,00	382.477.600,00	312.124.600,00	17.124.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			325.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten Dalam Rangka Pengembangan Kebudayaan, Kepentingan Sosial, Dan Kesejahteraan Masyarakat																	
	<b>2.22</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN</b>							<b>4.131.758.500,00</b>	<b>5.556.142.500,00</b>	<b>3.693.770.400,00</b>	<b>-437.988.100,00</b>							<b>2.530.230.000,00</b>	
1.	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Presentase rumusan bahan kebijakan urusan kebudayaan	-	100 %				4.131.758.500,00	5.556.142.500,00	3.693.770.400,00	-1.601.528.500,00							2.530.230.000,00	
	2.22.08.5.01	Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengembangan Kesenjajaran				-	1 Dokumen	0,00	500.000.000,00	497.386.000,00	497.386.000,00			Memperkuat penyelaras kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	DIY		500.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	2.22.08.5.01.0001	Pembinaan dan Pengembangan Kesenjajaran																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengembangan Kesenjajaran				-	1 Dokumen	0,00	500.000.000,00	497.386.000,00	497.386.000,00							500.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	<b>4</b>	<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>							<b>94.737.102.246,00</b>	<b>96.425.169.019,00</b>	<b>94.301.135.027,00</b>	<b>-435.967.219,00</b>							<b>78.907.596.365,00</b>	
	<b>4.01</b>	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>							<b>94.737.102.246,00</b>	<b>96.425.169.019,00</b>	<b>94.301.135.027,00</b>	<b>-435.967.219,00</b>							<b>78.907.596.365,00</b>	
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	87,70 Nilai	87,70 Nilai				85.212.973.874,00	83.149.352.547,00	82.473.612.157,00	-52.752.767.195,00							32.460.206.679,00	
	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %				79.524.700,00	80.862.700,00	77.433.700,00	-2.091.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, TAPD, Pemda DIY		173.231.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	5.396.000,00	5.396.000,00	5.396.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			10.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	4.960.900,00	4.960.900,00	4.960.900,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			6.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	3 Laporan	1.694.800,00	1.694.800,00	1.694.800,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			12.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	100 %				58.954.615.598,00	58.106.356.208,00	58.419.007.146,00	-535.608.452,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, TAPD, Pemda DIY		381.284.100,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	6.619.900,00	6.619.900,00	6.619.900,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			34.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.1.02.0005		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	3.538.000,00	3.538.000,00	3.538.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			5.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.1.02.0007		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				14 Laporan	14 Laporan	3.996.950,00	3.996.950,00	3.996.950,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			7.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				100 %	100 %	143.627.000,00	143.627.000,00	148.530.000,00	4.903.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, TAPD, Pemda DIY		168.526.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.1.03.0006		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	10.845.000,00	10.845.000,00	10.845.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			12.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah				100 %	100 %	4.461.083.070,00	4.171.105.070,00	2.700.993.950,00	-1.760.089.120,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, TAPD, Pemda DIY		4.655.817.454,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.1.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	14.918.000,00	14.918.000,00	14.918.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			16.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.1.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	25.297.000,00	25.297.000,00	25.297.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			28.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.1.06.0003		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	4.987.000,00	4.987.000,00	4.987.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			7.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.1.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	17.952.000,00	17.952.000,00	17.952.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			22.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.1.06.0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			13.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.1.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	148.226.000,00	163.060.000,00	90.513.000,00	-57.713.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			300.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	100 %	6.025.812.000,00	6.138.325.000,00	6.134.932.000,00	109.120.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, TAPD, Pemda DIY		6.785.118.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.1.08.0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			6.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	100 %	4.417.061.540,00	4.546.039.340,00	4.454.152.540,00	37.091.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, TAPD, Pemda DIY		8.396.896.800,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.1.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	20.228.000,00	20.228.000,00	28.728.000,00	8.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			22.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.1.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				11 Unit	10 Unit	115.735.000,00	115.735.000,00	104.903.500,00	-10.831.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			125.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.1.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				42 Unit	42 Unit	31.166.000,00	31.166.000,00	31.166.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			33.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
2.	4.01.03	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	Persentase naskah kerjasama dalam negeri yang terealisasi				100 %	100 %	403.421.600,00	1.015.097.550,00	734.405.350,00	171.578.400,00							575.000.000,00	
	4.01.03.1.01	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	Terlaksananya tugas pemerintahan				100 %	100 %	120.024.000,00	590.823.950,00	365.801.750,00	245.777.750,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	DPRD Kabupaten/Kota/DIY, Pemerintah Daerah, OPD dan stakeholder terkait di DIY Provinsi DI Yogyakarta		200.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.1.01.0002	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum				3 Dokumen	3 Dokumen	94.482.000,00	94.482.000,00	55.750.000,00	-38.732.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			125.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.1.01.0003	Fasilitasi Penataan Wilayah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah				1 Dokumen	2 Dokumen	25.542.000,00	496.341.950,00	310.051.750,00	284.509.750,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			75.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.1.02	Pelaksanaan Otonomi Daerah	Terlaksananya Pelaksanaan Otonomi Daerah				100 %	100 %	78.820.600,00	219.696.600,00	182.126.600,00	103.306.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	OPD dan stakeholder terkait di kabupaten/kota DIY		125.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.1.02.0003	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan				2 Laporan	3 Laporan	78.820.600,00	219.696.600,00	182.126.600,00	103.306.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			125.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.1.03	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Terlaksananya fasilitasi kerjasama daerah				100 %	100 %	204.577.000,00	204.577.000,00	186.477.000,00	-18.100.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	OPD dan stakeholder terkait di kabupaten/kota, DIY, Indonesia		250.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.1.03.0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah																		
			Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi				2 Dokumen	2 Dokumen	204.577.000,00	204.577.000,00	186.477.000,00	-18.100.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			250.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
		<b>BIRO HUKUM</b>							<b>102.076.370.746,00</b>	<b>103.771.250.419,00</b>	<b>99.387.188.327,00</b>	<b>-2.689.182.419,00</b>							<b>84.891.829.161,00</b>	
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							4.748.276.500,00	6.248.003.400,00	4.109.082.300,00	-639.194.200,00							3.436.232.796,00	
	2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN							616.518.000,00	691.860.900,00	415.311.900,00	-201.206.100,00							906.002.796,00	
1.	2.10.11	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN	Persentase capaian bantuan hukum terkait penyelenggaraan keistimewaan urusan pertanahan				100 %	100 %	616.518.000,00	691.860.900,00	415.311.900,00	289.484.796,00							906.002.796,00	
	2.10.11.5.02	Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Terlaksananya Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten				100 %	100 %	321.518.000,00	309.383.300,00	103.187.300,00	-218.330.700,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemangku kepentingan terkait dan masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta		581.002.796,00	SEKRETARIAT DAERAH
	2.10.11.5.02.0001	Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Ijin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten																		
			Jumlah Dokumen Pertimbangan Teknis Ijin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten				1 Dokumen	1 Dokumen	53.440.000,00	47.388.300,00	30.526.300,00	-22.913.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			147.730.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	2.10.11.5.02.0002	Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa																		
			Jumlah Berita Acara Penyelesaian Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa				1 Berita Acara	1 Berita Acara	268.078.000,00	261.995.000,00	72.661.000,00	-195.417.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			433.272.796,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							94.737.102.246,00	96.425.169.019,00	94.301.135.027,00	-435.967.219,00							78.907.596.365,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							94.737.102.246,00	96.425.169.019,00	94.301.135.027,00	-435.967.219,00							78.907.596.365,00	
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				88,70 Nilai	88,70 Nilai	85.212.973.874,00	83.149.352.547,00	82.473.612.157,00	-52.752.767.195,00							32.460.206.679,00	
	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100 %	100 %	79.524.700,00	80.862.700,00	77.433.700,00	-2.091.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemangku kepentingan terkait dan masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta		173.231.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	3.169.000,00	3.169.000,00	3.169.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			5.040.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	900.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			9.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	3 Laporan	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			6.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD; Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD; dan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Trivulanan/ Semesteran SKPD				100 %	100 %	58.954.615.598,00	58.106.356.208,00	58.419.007.146,00	-535.608.452,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Biro Hukum Sekretariat DIY		381.284.100,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	5.245.800,00	5.245.800,00	5.245.800,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			45.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	689.000,00	689.000,00	689.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			3.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Trivulanan/Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Trivulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Trivulanan/Semesteran SKPD				14 Laporan	14 Laporan	1.831.000,00	1.831.000,00	1.831.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			8.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				100 %	100 %	143.627.000,00	143.627.000,00	148.530.000,00	4.903.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemangku kepentingan terkait dan masyarakat di		168.526.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	4 Laporan	10.737.000,00	10.737.000,00	10.737.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			14.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai, serta Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				100 %	100 %	91.866.000,00	91.866.000,00	52.366.000,00	-39.500.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemangku kepentingan terkait dan masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta		59.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	1 Dokumen	2.941.000,00	2.941.000,00	2.941.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			9.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				1 Orang	0 Orang	39.500.000,00	39.500.000,00	0,00	-39.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			50.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100 %	100 %	4.461.083.070,00	4.171.105.070,00	2.700.993.950,00	-1.760.089.120,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemangku kepentingan terkait dan masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta		4.655.817.454,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.230.000,00	2.230.000,00	2.230.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			7.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	50.232.200,00	50.232.200,00	40.008.200,00	-10.224.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			80.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.793.000,00	5.793.000,00	5.793.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			9.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
4.01.01.1.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	53.925.000,00	53.925.000,00	50.605.000,00	-3.320.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			55.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.1.06.0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	5.976.000,00	5.976.000,00	5.976.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			5.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.1.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	271.290.100,00	328.090.100,00	103.328.100,00	-167.962.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			350.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Mebel, Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				100 %	100 %	239.600.000,00	813.671.000,00	845.981.000,00	606.381.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemangku kepentingan terkait dan masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta		1.064.484.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.1.07.0005		Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	12.700.000,00	12.700.000,00	12.700.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			10.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.1.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				19 Unit	19 Unit	49.120.000,00	49.120.000,00	49.120.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			120.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.1.07.0010		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	7.550.000,00	7.550.000,00	7.550.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			18.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				100 %	100 %	6.025.812.000,00	6.138.325.000,00	6.134.932.000,00	109.120.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemangku kepentingan terkait dan masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta		6.785.118.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.1.08.0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	919.000,00	919.000,00	910.000,00	-9.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			6.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.1.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	3.900.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			6.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pemeliharaan Mebel, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dn Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				100 %	100 %	4.417.061.540,00	4.546.039.340,00	4.454.152.540,00	37.091.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemangku kepentingan terkait dan masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta		8.396.896.800,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.1.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	33.978.000,00	33.978.000,00	28.746.000,00	-5.232.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			45.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.1.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizannya				6 Unit	6 Unit	139.180.800,00	139.180.800,00	107.924.800,00	-31.256.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			100.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.1.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				38 Unit	39 Unit	25.326.000,00	25.326.000,00	25.108.000,00	-218.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			50.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.1.09.0010		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	56.120.000,00	56.120.000,00	56.120.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			200.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	4.01.05	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Persentase capaian produk hukum daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta bantuan dan layanan hukum				100 %	100 %	2.443.780.872,00	2.776.893.872,00	2.424.664.020,00	2.671.219.128,00							5.115.000.000,00	
	4.01.05.1.01	Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	Terlaksananya fasilitasi penyusunan produk hukum pengaturan, fasilitasi penyusunan produk hukum penetapan, pendokumentasian produk hukum dan naskah hukum lainnya, dan Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/ Kota				100 %	100 %	469.816.800,00	842.929.800,00	724.737.800,00	254.921.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemangku kepentingan terkait dan masyarakat di		1.515.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.05.1.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan																		
			Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun				28 Dokumen	28 Dokumen	185.201.000,00	185.201.000,00	81.961.000,00	-103.240.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			95.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.05.1.01.0002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan																		
			Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun				50 Dokumen	50 Dokumen	25.745.000,00	25.745.000,00	23.870.000,00	-1.875.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			35.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.05.1.01.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya																		
			Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasinya				78 Dokumen	79 Dokumen	147.480.000,00	520.593.000,00	520.456.000,00	372.976.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			1.085.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.05.1.01.0004	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi				62 Dokumen	62 Dokumen	111.390.800,00	111.390.800,00	98.450.800,00	-12.940.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			300.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.05.1.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Terlaksananya Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum dan Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM				100 %	100 %	1.973.964.072,00	1.933.964.072,00	1.699.926.220,00	-274.037.852,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemangku kepentingan terkait dan masyarakat di		3.600.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.05.1.02.0001	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum																		
			Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan				1 Kasus	1 Kasus	554.064.000,00	514.064.000,00	350.164.000,00	-203.900.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			1.800.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.05.1.02.0002	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM																		
			Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan				100 Kasus	100 Kasus	1.419.900.072,00	1.419.900.072,00	1.349.762.220,00	-70.137.852,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			1.800.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
3.	4.01.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase capaian produk hukum daerah tindak lanjut urusan keistimewaan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan				95 %	95 %	2.164.248.000,00	1.927.209.800,00	1.354.358.800,00	908.426.000,00							3.072.674.000,00	
	4.01.10.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Urusan Keistimewaan	Terlaksananya Pengawasan Rancangan Produk Hukum dan Produk Hukum Kabupaten/Kota Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan dan Penyusunan Rancangan Produk Hukum Daerah Tindak Lanjut Pelaksanaan Keistimewaan dan Penyusunan Rancangan Produk Hukum Daerah Tindak Lanjut Pelaksanaan Keistimewaan				100 %	100 %	1.177.916.000,00	1.153.209.800,00	726.083.800,00	-451.832.200,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemangku Kepentingan dan Masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta		2.036.342.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.10.5.01.0007	Pengawasan Rancangan Produk Hukum dan Produk Hukum Kabupaten/Kota Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan																		
			Jumlah Dokumen Rancangan Produk Hukum dan Produk Hukum Kabupaten/Kota Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan yang Diawasi				20 Dokumen	30 Dokumen	205.184.000,00	271.110.000,00	159.910.000,00	-45.274.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			650.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.10.5.01.0009	Penyusunan Rancangan Produk Hukum Daerah Tindak Lanjut Pelaksanaan Keistimewaan																		
			Jumlah Dokumen Rancangan Produk Hukum Daerah Tindak Lanjut Pelaksanaan Keistimewaan yang Disusun				15 Dokumen	10 Dokumen	257.890.000,00	256.398.000,00	129.544.000,00	-128.346.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			450.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
		<b>BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>							<b>102.076.370.746,00</b>	<b>103.771.250.419,00</b>	<b>99.387.188.327,00</b>	<b>-2.689.182.419,00</b>							<b>84.891.829.161,00</b>	
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							4.748.276.500,00	6.248.003.400,00	4.109.082.300,00	-639.194.200,00							3.436.232.796,00	
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							4.131.758.500,00	5.556.142.500,00	3.693.770.400,00	-437.988.100,00							2.530.230.000,00	
1.	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Jumlah Laporan Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat				1 Laporan	1 Laporan	4.131.758.500,00	5.556.142.500,00	3.693.770.400,00	-1.601.528.500,00							2.530.230.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.22.08.5.09	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Jumlah Laporan Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat				1 Laporan	1 Laporan	1.506.758.500,00	4.856.142.500,00	3.097.494.400,00	1.590.735.900,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penurunan tingkat kemiskinan	Jumlah Laporan Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat		1.520.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	2.22.08.5.09.0009	Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat				1 Laporan	13 Laporan	50.000.000,00	4.100.749.000,00	2.383.198.000,00	2.333.198.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penurunan tingkat kemiskinan			70.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							94.737.102.246,00	96.425.169.019,00	94.301.135.027,00	-435.967.219,00							78.907.596.365,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							94.737.102.246,00	96.425.169.019,00	94.301.135.027,00	-435.967.219,00							78.907.596.365,00	
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PPKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				90,58 Angka	90,58 Angka	85.212.973.874,00	83.149.352.547,00	82.473.612.157,00	-52.752.767.195,00							32.460.206.679,00	
	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100 %	100 %	79.524.700,00	80.862.700,00	77.433.700,00	-2.091.000,00			-	-	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		173.231.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	7.459.000,00	7.459.000,00	4.459.000,00	-3.000.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			28.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	1.385.600,00	1.385.600,00	1.385.600,00	0,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			7.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	1.822.000,00	1.822.000,00	1.822.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			7.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terwujudnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100 %	100 %	58.954.615.598,00	58.106.356.208,00	58.419.007.146,00	-535.608.452,00			-	-	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		381.284.100,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	8.663.000,00	8.663.000,00	6.623.000,00	-2.040.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			50.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2.713.000,00	2.713.000,00	2.713.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			8.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semester SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semester SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semester SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2.402.000,00	2.402.000,00	2.402.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			8.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				100 %	100 %	143.627.000,00	143.627.000,00	148.530.000,00	4.903.000,00			-	-	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		168.526.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	12.425.000,00	12.425.000,00	12.425.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			15.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah				100 %	100 %	4.461.083.070,00	4.171.105.070,00	2.700.993.950,00	-1.760.089.120,00			-	-	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah		4.655.817.454,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.872.000,00	2.872.000,00	2.872.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			7.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	12.788.900,00	12.788.900,00	11.636.900,00	-1.152.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			17.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.316.000,00	2.316.000,00	2.316.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			3.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	15.090.000,00	15.090.000,00	15.090.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			20.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	1.764.000,00	1.764.000,00	1.764.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			3.750.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.1.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	173.173.050,00	165.723.050,00	101.376.000,00	-71.797.050,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			300.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	100 %	6.025.812.000,00	6.138.325.000,00	6.134.932.000,00	109.120.000,00			-	-	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		6.785.118.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.1.08.0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			6.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.1.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	3.900.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			5.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	100 %	4.417.061.540,00	4.546.039.340,00	4.454.152.540,00	37.091.000,00			-	-	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		8.396.896.800,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.1.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	34.592.000,00	34.592.000,00	34.592.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			35.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.1.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	5 Unit	96.054.000,00	96.054.000,00	96.054.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			93.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.1.09.0005		Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				6 Unit	6 Unit	2.340.000,00	2.340.000,00	2.340.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			7.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.1.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				32 Unit	32 Unit	19.448.000,00	19.448.000,00	19.448.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			35.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.1.09.0010		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				12 Unit	12 Unit	12.760.000,00	12.760.000,00	12.760.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			18.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
2.	4.01.04	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase 4 jenis Fasilitas keagamaan				100 %	100 %	3.511.656.400,00	4.145.272.750,00	4.076.862.700,00	28.643.343.600,00							32.155.000.000,00	
4.01.04.1.01		Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	Terlaksananya fasilitasi kehidupan beragama yang dilaksanakan				2 Dokumen	2 Dokumen	3.102.429.000,00	3.408.106.000,00	3.387.567.000,00	285.138.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan kualitas SDM	Terlaksananya fasilitasi kehidupan beragama yang dilaksanakan		31.500.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.04.1.01.0001		Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola				1 Unit	1 Unit	225.000,00	225.000,00	225.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan kualitas SDM			20.000.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.04.1.01.0002		Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual																		
			Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi				8 Lembaga	9 Lembaga	3.102.204.000,00	3.407.881.000,00	3.387.342.000,00	285.138.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan kualitas SDM			11.500.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.04.1.02		Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar				100 %	100 %	352.584.900,00	352.252.900,00	318.586.850,00	-33.998.050,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan kualitas SDM	Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar		570.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.04.1.02.0001		Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan				2 Dokumen	2 Dokumen	163.263.500,00	161.931.500,00	134.545.450,00	-28.718.050,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan kualitas SDM			320.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.04.1.02.0002		Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan				7 Dokumen	7 Dokumen	189.321.400,00	190.321.400,00	184.041.400,00	-5.280.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan kualitas SDM			250.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	4.01.04.1.03	Facilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar				3 Dokumen	3 Dokumen	56.642.500,00	384.913.850,00	370.708.850,00	314.066.350,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan kualitas SDM	Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar		85.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.04.1.03.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata						3 Dokumen	15 Dokumen	56.642.500,00	384.913.850,00	370.708.850,00	314.066.350,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan kualitas SDM		85.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
<b>BIRO PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM</b>									<b>102.076.370.746,00</b>	<b>103.771.250.419,00</b>	<b>99.387.188.327,00</b>	<b>-2.689.182.419,00</b>							<b>84.891.829.161,00</b>		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							4.748.276.500,00	6.248.003.400,00	4.109.082.300,00	-639.194.200,00							3.436.232.796,00		
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							4.131.758.500,00	5.556.142.500,00	3.693.770.400,00	-437.988.100,00							2.530.230.000,00		
1.	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase rumusan kebijakan yang menjadi kebijakan pengembangan desa mandiri budaya				100 %	100 %	4.131.758.500,00	5.556.142.500,00	3.693.770.400,00	-1.601.528.500,00							2.530.230.000,00		
	2.22.08.5.09	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Desa Budaya				100 %	100 %	1.506.758.500,00	4.856.142.500,00	3.097.494.400,00	1.590.735.900,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Masyarakat dan Pemda DIY		1.520.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	2.22.08.5.09.0001	Pembinaan dan Pengembangan Desa Budaya																			
			Jumlah Desa Budaya yang Dibina dan Dikembangkan				35 Desa	35 Desa	262.893.500,00	755.393.500,00	714.296.400,00	451.402.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			350.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							94.737.102.246,00	96.425.169.019,00	94.301.135.027,00	-435.967.219,00							78.907.596.365,00		
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							94.737.102.246,00	96.425.169.019,00	94.301.135.027,00	-435.967.219,00							78.907.596.365,00		
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				90,70 Nilai	90,70 Nilai	85.212.973.874,00	83.149.352.547,00	82.473.612.157,00	-52.752.767.195,00							32.460.206.679,00		
	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100 %	100 %	79.524.700,00	80.862.700,00	77.433.700,00	-2.091.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Biro Administrasi Perencanaan dan SDA Setda DIY, Pemda DIY		173.231.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	5.940.000,00	5.940.000,00	5.940.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			7.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																			
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	2.570.000,00	2.570.000,00	2.570.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			3.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																			
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	3 Laporan	3.920.800,00	3.920.800,00	3.920.800,00	0,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			5.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD				100 %	100 %	58.954.615.598,00	58.106.356.208,00	58.419.007.146,00	-535.608.452,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Biro Administrasi Perencanaan dan SDA Setda DIY, Pemda DIY		381.284.100,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.780.000,00	3.780.000,00	3.780.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			35.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																			
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.853.000,00	1.853.000,00	1.853.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			3.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan, Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD				3 Laporan	3 Laporan	3.422.000,00	3.422.000,00	3.422.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			5.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				100 %	100 %	143.627.000,00	143.627.000,00	148.530.000,00	4.903.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Setda DIY, Pemda DIY		168.526.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.1.03.0006		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	7.800.000,00	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			11.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perengkapan Kantor, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100 %	100 %	4.461.083.070,00	4.171.105.070,00	2.700.993.950,00	-1.760.089.120,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Setda DIY, Pemda DIY		4.655.817.454,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.1.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	4.220.000,00	4.220.000,00	4.220.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			5.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.1.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				26 Paket	26 Paket	14.329.200,00	14.329.200,00	14.329.200,00	0,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			16.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.1.06.0003		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				23 Paket	23 Paket	6.617.200,00	6.617.200,00	6.617.200,00	0,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			10.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.1.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	11.720.000,00	11.720.000,00	11.720.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			13.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.1.06.0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	2.868.000,00	2.868.000,00	2.868.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			4.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.1.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	56.060.000,00	56.060.000,00	21.482.000,00	-34.578.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			84.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	100 %	6.025.812.000,00	6.138.325.000,00	6.134.932.000,00	109.120.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Setda DIY, Pemda DIY		6.785.118.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.1.08.0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			900.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.1.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	3.900.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			5.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	100 %	4.417.061.540,00	4.546.039.340,00	4.454.152.540,00	37.091.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Setda DIY, Pemda DIY		8.396.896.800,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.1.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	29.139.200,00	29.139.200,00	29.139.200,00	0,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			30.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.1.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinnannya				5 Unit	5 Unit	74.386.350,00	74.386.350,00	74.386.350,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			76.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.1.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				24 Unit	24 Unit	17.418.000,00	17.418.000,00	17.418.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			19.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	4.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				-	1 Unit	0,00	0,00	44.400.000,00	44.400.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			50.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				8 Unit	8 Unit	5.104.000,00	5.104.000,00	5.104.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			6.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
2.	4.01.06	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase rumusan kebijakan yang menjadi kebijakan yang ditindaklanjuti dalam perencanaan bidang perekonomian dan sumberdaya alam tahun n-1 dan n-2				100 %	100 %	243.350.500,00	639.350.500,00	546.628.000,00	356.649.500,00							600.000.000,00		
	4.01.06.1.01	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Tertindaklanjuti fasilitasi pengelolaan kebijakan ekonomi makro dan fasilitasi pengelolaan kebijakan ekonomi mikro				100 %	100 %	221.585.100,00	485.585.100,00	403.960.100,00	182.375.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Masyarakat dan Pemda DIY		450.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.06.1.01.0001	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro				4 Dokumen	4 Dokumen	155.980.100,00	353.980.100,00	292.450.100,00	136.470.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			300.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.06.1.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro				2 Dokumen	2 Dokumen	65.605.000,00	131.605.000,00	111.510.000,00	45.905.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			150.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.06.1.02	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	Tertindaklanjuti Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan				100 %	100 %	19.507.900,00	151.507.900,00	142.667.900,00	123.160.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Masyarakat dan Pemda DIY		150.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.06.1.02.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan				2 Dokumen	2 Dokumen	19.507.900,00	151.507.900,00	142.667.900,00	123.160.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			150.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.06.1.03	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	Tertindaklanjuti Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha dan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah				100 %	0 %	2.257.500,00	2.257.500,00	0,00	-2.257.500,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Masyarakat dan Pemda DIY		0,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.06.1.03.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha																			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha				1 Dokumen	0 Dokumen	2.257.500,00	2.257.500,00	0,00	-2.257.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			0,00	SEKRETARIAT DAERAH	
		<b>BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN</b>								<b>102.076.370.746,00</b>	<b>103.771.250.419,00</b>	<b>99.387.188.327,00</b>	<b>-2.689.182.419,00</b>						<b>84.891.829.161,00</b>		
1		<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>								<b>2.590.992.000,00</b>	<b>1.098.078.000,00</b>	<b>976.971.000,00</b>	<b>-1.614.021.000,00</b>						<b>2.548.000.000,00</b>		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							2.590.992.000,00	1.098.078.000,00	976.971.000,00	-1.614.021.000,00						2.548.000.000,00		
1.	1.03.13	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	Persentase penyediaan rumusan kebijakan pendukung Program Pemda				-	50 %	2.590.992.000,00	1.098.078.000,00	976.971.000,00	-42.992.000,00						2.548.000.000,00		
	1.03.13.5.01	Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	-				-	-	0,00	798.078.000,00	679.371.000,00	679.371.000,00						2.100.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	1.03.13.5.01.0005	Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Tata Ruang																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Tata Ruang				-	4 Dokumen	0,00	798.078.000,00	679.371.000,00	679.371.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-			2.100.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	1.03.13.5.03	Pengendalian Pemanfaatan Penataan Ruang Satuan Ruang Strategis	Persentase kebijakan pendukung Program Pemda urusan tata ruang				-	50 %	100.000.000,00	100.000.000,00	97.600.000,00	-2.400.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.			100.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	1.03.13.5.03.0001	Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang																		
			Jumlah Dokumen Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	97.600.000,00	-2.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY				100.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
2	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							4.748.276.500,00	6.248.003.400,00	4.109.082.300,00	-639.194.200,00						3.436.232.796,00		
1.	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase penyediaan rumusan kebijakan pendukung Program Pemda				-	50 %	4.131.758.500,00	5.556.142.500,00	3.693.770.400,00	-1.601.528.500,00						2.530.230.000,00		
	2.22.08.5.04	Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya	Persentase penyediaan rumusan kebijakan pendukung Program Pemda urusan Kebudayaan				-	100 %	2.000.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.			0,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	2.22.08.5.04.0003	Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia																		
			Jumlah Objek Warisan Budaya Nasional dan Dunia yang masuk Nominasi				2 Objek	2 Objek	2.000.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY				0,00	SEKRETARIAT DAERAH	
4	4.01	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							94.737.102.246,00	96.425.169.019,00	94.301.135.027,00	-435.967.219,00						78.907.596.365,00		
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				-	95,8 Nilai	85.212.973.874,00	83.149.352.547,00	82.473.612.157,00	-52.752.767.195,00						32.460.206.679,00		
	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terwujudnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				-	100 %	79.524.700,00	80.862.700,00	77.433.700,00	-2.091.000,00						173.231.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	4.221.400,00	4.221.400,00	4.221.400,00	0,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-			10.889.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	2.878.600,00	2.878.600,00	2.878.600,00	0,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-			6.044.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	3 Laporan	3.702.700,00	3.702.700,00	3.702.700,00	0,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			6.668.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terwujudnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				-	100 %	58.954.615.598,00	58.106.356.208,00	58.419.007.146,00	-535.608.452,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		381.284.100,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.1.02.0003		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	4.799.000,00	4.799.000,00	4.799.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			61.313.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.1.02.0005		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	2 Laporan	1.542.200,00	1.542.200,00	1.542.200,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			3.863.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.1.02.0007		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Trivulanan/Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Trivulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Trivulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	18 Laporan	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			4.277.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terwujudnya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				-	100 %	143.627.000,00	143.627.000,00	148.530.000,00	4.903.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		168.526.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.1.03.0006		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	10.951.000,00	10.951.000,00	10.951.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			21.862.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya Administrasi Umum Perangkat Daerah				-	100 %	4.461.083.070,00	4.171.105.070,00	2.700.993.950,00	-1.760.089.120,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		4.655.817.454,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.1.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.391.000,00	2.391.000,00	2.391.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			6.408.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.1.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	9.515.400,00	9.515.400,00	9.515.400,00	0,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			66.283.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.1.06.0003		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.550.000,00	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			10.448.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.1.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	7.482.600,00	7.482.600,00	7.482.600,00	0,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			21.936.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.1.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	4 Laporan	109.230.000,00	104.508.000,00	63.608.000,00	-45.622.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			304.628.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terwujudnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				-	100 %	239.600.000,00	813.671.000,00	845.981.000,00	606.381.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		1.064.484.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.1.07.0010		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	2 Unit	6.000.000,00	6.000.000,00	9.140.000,00	3.140.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			42.757.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-	100 %	6.025.812.000,00	6.138.325.000,00	6.134.932.000,00	109.120.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		6.785.118.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.1.08.0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			1.200.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-	100 %	4.417.061.540,00	4.546.039.340,00	4.454.152.540,00	37.091.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		8.396.896.800,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.1.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	26.385.000,00	90.163.000,00	74.913.000,00	48.528.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			57.412.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.1.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				6 Unit	6 Unit	62.318.000,00	62.318.000,00	62.318.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN PAD	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			99.337.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	6.514.000,00	6.514.000,00	6.514.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN PAD	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			13.862.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				6 Unit	6 Unit	6.460.000,00	6.460.000,00	6.460.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN PAD	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			13.145.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
2.	4.01.08	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Persentase penyediaan rumusan kebijakan pendukung Program Pemda				50 N/A %	50 %	606.920.000,00	1.625.711.000,00	1.612.451.000,00	2.496.791.906,00							3.103.711.906,00	
	4.01.08.1.01	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	persentase kebijakan pendukung Program Pemda yang dievaluasi				57,89 %	57,89 %	50.000.000,00	643.791.000,00	632.691.000,00	582.691.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	-		1.653.711.906,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.08.1.01.0003	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah				4 Laporan	7 Laporan	50.000.000,00	643.791.000,00	632.691.000,00	582.691.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK PENDAPATAN PAD	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)			1.653.711.906,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.08.1.02	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase bahan rumusan kebijakan pendukung Program Pemda				-	63,64 %	556.920.000,00	981.920.000,00	979.760.000,00	422.840.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	-		1.450.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.08.1.02.0003	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	556.920.000,00	981.920.000,00	979.760.000,00	422.840.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN PAD	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)			1.450.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
		<b>BIRO ORGANISASI</b>							<b>102.076.370.746,00</b>	<b>103.771.250.419,00</b>	<b>99.387.188.327,00</b>	<b>-2.689.182.419,00</b>							<b>84.891.829.161,00</b>	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							<b>94.737.102.246,00</b>	<b>96.425.169.019,00</b>	<b>94.301.135.027,00</b>	<b>-435.967.219,00</b>							<b>78.907.596.365,00</b>	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							<b>94.737.102.246,00</b>	<b>96.425.169.019,00</b>	<b>94.301.135.027,00</b>	<b>-435.967.219,00</b>							<b>78.907.596.365,00</b>	
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				88,73 nilai	88,73 nilai	85.212.973.874,00	83.149.352.547,00	82.473.612.157,00	-52.752.767.195,00							32.460.206.679,00	
	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100 %	100 %	79.524.700,00	80.862.700,00	77.433.700,00	-2.091.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Perangkat Daerah Pemda DIY		173.231.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	6 Dokumen	1.165.000,00	2.503.000,00	2.503.000,00	1.338.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN PAD PAJAK ROKOK	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			5.715.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	2.468.000,00	2.468.000,00	2.468.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN PAD	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			2.468.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	3 Laporan	1.699.900,00	1.699.900,00	1.699.900,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN PAD	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			3.529.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah				100 %	100 %	58.954.615.598,00	58.106.356.208,00	58.419.007.146,00	-535.608.452,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Perangkat Daerah Pemda DIY		381.284.100,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	7.493.800,00	7.493.800,00	7.493.800,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			34.020.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																			
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			3.887.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																			
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	18 Laporan	2.999.950,00	2.999.950,00	2.999.950,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			2.898.100,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				100 %	100 %	143.627.000,00	143.627.000,00	148.530.000,00	4.903.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Perangkat Daerah Pemda DIY		168.526.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																			
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	11.348.000,00	11.348.000,00	11.348.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			11.348.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				100 %	100 %	91.866.000,00	91.866.000,00	52.366.000,00	-39.500.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Perangkat Daerah Pemda DIY		59.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																			
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				45 Orang	45 Orang	49.425.000,00	49.425.000,00	49.425.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			0,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya Administrasi Umum Perangkat Daerah				100 %	100 %	4.461.083.070,00	4.171.105.070,00	2.700.993.950,00	-1.760.089.120,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Perangkat Daerah Pemda DIY		4.655.817.454,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	4.727.400,00	4.727.400,00	4.727.400,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			666.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	6.487.600,00	6.487.600,00	6.487.600,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			6.479.300,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																			
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	8.916.000,00	8.916.000,00	8.916.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			3.865.900,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.952.600,00	2.952.600,00	2.952.600,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			5.376.600,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				7 Laporan	7 Laporan	138.812.000,00	126.480.000,00	79.990.000,00	-58.822.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			243.878.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																			
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			1.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	100 %	6.025.812.000,00	6.138.325.000,00	6.134.932.000,00	109.120.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Perangkat Daerah Pemda DIY		6.785.118.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	11.700.000,00	11.700.000,00	11.700.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			13.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	100 %	4.417.061.540,00	4.546.039.340,00	4.454.152.540,00	37.091.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Perangkat Daerah Pemda DIY		8.396.896.800,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	29.205.300,00	29.205.300,00	29.205.300,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			31.600.800,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				7 Unit	7 Unit	87.966.000,00	87.966.000,00	87.966.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			84.100.400,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				36 Unit	36 Unit	22.598.000,00	22.598.000,00	22.598.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			18.417.600,00	SEKRETARIAT DAERAH	
2.	4.01.02	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Persentase Jumlah Unit Pelayanan Publik minimal Kategori B Nilai rerata Reformasi Birokrasi Organisasi Perangkat Daerah				66,67 83,02 % Nilai	66,67 83,02 % Nilai	0,00	0,00	0,00	323.658.100,00							323.658.100,00		
	4.01.02.1.02	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Terlaksananya Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja				100 %	100 %	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Perangkat Daerah Pemda DIY		323.658.100,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.02.1.02.0001	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			84.405.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.02.1.02.0002	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja																			
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			14.378.700,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.02.1.02.0004	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			82.213.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.02.1.02.0005	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik																			
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik				4 Dokumen	4 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			142.661.400,00	SEKRETARIAT DAERAH	
3.	4.01.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN KELEMBAGAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Kematangan Perangkat Daerah				42 angka	42 angka	2.164.248.000,00	1.927.209.800,00	1.354.358.800,00	908.426.000,00							3.072.674.000,00		
	4.01.10.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Urusan Keistimewaan	Terlaksananya penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan urusan keistimewaan				100 %	100 %	1.177.916.000,00	1.153.209.800,00	726.083.800,00	-451.832.200,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Perangkat Daerah Pemda DIY		2.036.342.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.10.5.01.0001	Perumusan Kebijakan Kelembagaan Perangkat Daerah																			
			Jumlah Kebijakan Kelembagaan Perangkat Daerah yang Dirumuskan				14 Dokumen	13 Dokumen	220.688.000,00	290.328.800,00	193.186.800,00	-27.501.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			270.688.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.10.5.01.0004	Pembinaan Kelembagaan Pemerintah Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Kelembagaan Pemerintah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	34.404.000,00	33.641.000,00	27.625.000,00	-6.779.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			84.404.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.10.5.01.0006	Perumusan Kebijakan Analisis Jabatan dan Pengembangan Kinerja Jabatan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Analisis Jabatan dan Pengembangan Kinerja Jabatan				4 Dokumen	5 Dokumen	281.250.000,00	134.982.000,00	106.752.000,00	-174.498.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			331.250.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.10.5.01.0008	Perencanaan dan Pengendalian Urusan Kelembagaan																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Urusan Kelembagaan				5 Dokumen	5 Dokumen	178.500.000,00	166.750.000,00	109.066.000,00	-69.434.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			250.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.10.5.02	Peningkatan Budaya Pemerintahan	Tercapainya peningkatan implementasi budaya pemerintahan				100 %	100 %	986.332.000,00	774.000.000,00	628.275.000,00	-358.057.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			1.036.332.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.10.5.02.0001	Implementasi Budaya Pemerintahan DIY																			
			Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan DIY				7 Dokumen	11 Dokumen	986.332.000,00	774.000.000,00	628.275.000,00	-358.057.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			1.036.332.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
		<b>BIRO UMUM DAN PROTOKOL</b>																			
									<b>102.076.370.746,00</b>	<b>103.771.250.419,00</b>	<b>99.387.188.327,00</b>	<b>-2.689.182.419,00</b>							<b>84.891.829.161,00</b>		
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							<b>2.590.992.000,00</b>	<b>1.098.078.000,00</b>	<b>976.971.000,00</b>	<b>-1.614.021.000,00</b>							<b>2.548.000.000,00</b>		
1.03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							<b>2.590.992.000,00</b>	<b>1.098.078.000,00</b>	<b>976.971.000,00</b>	<b>-1.614.021.000,00</b>							<b>2.548.000.000,00</b>		



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
4.01.01.1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah; Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD; Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksananya perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terwujudnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100 % 10 Dokumen	100 % 10 Dokumen	79.524.700,00	80.862.700,00	77.433.700,00	-2.091.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Biro UHP, Pemda DIY		173.231.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.1.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	4.993.000,00	4.993.000,00	4.993.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			7.160.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.1.01.0004		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	5.549.000,00	5.549.000,00	5.495.000,00	-54.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			8.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.1.01.0007		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	1.575.000,00	1.575.000,00	1.200.000,00	-375.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			4.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi keuangan daerah Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terlaksananya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD; Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD; dan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD Terlaksananya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD; Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD; dan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD Terlaksananya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD; Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD; dan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD				100 % 14 Dokumen	100 % 14 Dokumen	58.954.615.598,00	58.106.356.208,00	58.419.007.146,00	-535.608.452,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Biro UHP, Pemda DIY		381.284.100,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.1.02.0003		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	9.015.000,00	9.015.000,00	8.820.000,00	-195.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			47.300.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.1.02.0005		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	555.500,00	555.500,00	555.500,00	0,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			600.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.1.02.0007		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD				13 Laporan	13 Laporan	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			1.425.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Terlaksananya penatausahaan barang milik daerah Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD dan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Terwujudnya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				100 % 12 Bulan 5 Dokumen	100 % 12 Bulan 5 Dokumen	143.627.000,00	143.627.000,00	148.530.000,00	4.903.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Biro UHP, Pemda DIY		168.526.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	10.500.000,00	10.500.000,00	15.500.000,00	5.000.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			11.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	4 Laporan	60.097.000,00	60.097.000,00	60.000.000,00	-97.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Bausasran	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			61.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD; Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD; Terwujudnya Administrasi Umum Perangkat Daerah				100 % 20 Dokumen	100 % 20 Dokumen	4.461.083.070,00	4.171.105.070,00	2.700.993.950,00	-1.760.089.120,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Biro UHP, Pemda DIY		4.655.817.454,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	120.222.000,00	120.222.000,00	120.222.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Bausasran	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			156.608.788,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	189.388.900,00	189.388.900,00	187.256.900,00	-2.132.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Bausasran	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			350.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	181.891.270,00	181.891.270,00	174.435.200,00	-7.456.070,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Bausasran	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			374.429.866,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	144.591.250,00	144.591.250,00	143.641.250,00	-950.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			275.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	47.004.000,00	47.004.000,00	40.128.000,00	-6.876.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			58.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	768.659.000,00	573.786.000,00	310.299.000,00	-458.360.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			950.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	157.732.000,00	169.289.000,00	169.289.000,00	11.557.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			276.340.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pengadaan Mebel dan Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya Terlaksananya Pengadaan Mebel, Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Terwujudnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100 % 4 Dokumen	100 % 4 Dokumen	239.600.000,00	813.671.000,00	845.981.000,00	606.381.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Biro UHP, Pemda DIY		1.064.484.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				11 Unit	13 Unit	112.830.000,00	112.830.000,00	142.030.000,00	29.200.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			800.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				12 Unit	21 Unit	35.800.000,00	56.380.000,00	56.350.000,00	20.550.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			56.567.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat dan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik; Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor; Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Terwujudnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 % 3 Dokumen	100 % 3 Dokumen	6.025.812.000,00	6.138.325.000,00	6.134.932.000,00	109.120.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Biro UHP, Pemda DIY		6.785.118.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	7.950.000,00	7.950.000,00	7.200.000,00	-750.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			9.200.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	3.103.828.000,00	3.253.828.000,00	3.253.828.000,00	150.000.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Bausasaran	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			3.277.440.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	128.759.000,00	124.369.000,00	121.735.000,00	-7.024.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			266.173.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	2.749.656.000,00	2.716.559.000,00	2.716.559.000,00	-33.097.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			3.181.505.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
4.01.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya pemeliharaan barang penunjang urusan pemerintah daerah Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pemeliharaan Mebel, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pemeliharaan Mebel, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pemeliharaan Mebel, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Terwujudnya Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 % 4 Dokumen	100 % 4 Dokumen	4.417.061.540,00	4.546.039.340,00	4.454.152.540,00	37.091.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Biro UHP, Pemda DIY		8.396.896.800,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.1.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					14 Unit	14 Unit	554.866.000,00	554.866.000,00	551.810.000,00	-3.056.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan		750.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
4.01.01.1.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				59 Unit	57 Unit	1.367.218.590,00	1.314.843.090,00	1.300.128.090,00	-67.090.500,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan		1.450.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
4.01.01.1.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				7 Unit	7 Unit	260.880.000,00	260.880.000,00	260.868.000,00	-12.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan		400.109.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
4.01.01.1.09.0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	4 Unit	1.085.800.000,00	1.085.800.000,00	1.085.800.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan		4.304.513.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
4.01.01.1.09.0010		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				7 Unit	7 Unit	128.500.000,00	128.500.000,00	128.500.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan		156.989.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
4.01.01.1.13		Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	Terlaksananya Fasilitasi komunikasi pimpinan, dan Pengelolaan dokumentasi pimpinan				100 %	100 %	997.691.200,00	33.086.000,00	29.726.000,00	-967.965.200,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Biro UHP, Pemda DIY	1.873.100.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
4.01.01.1.13.0002		Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				1 Laporan	1 Laporan	33.086.000,00	33.086.000,00	29.726.000,00	-3.360.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan		140.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
4.01.01.1.13.0003		Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	Jumlah Laporan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan				6 Laporan	0 Laporan	964.605.200,00	0,00	0,00	-964.605.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan		1.733.100.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
4.01.01.1.14		Fasilitasi Keprotokolan	Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara, Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan				100 %	100 %	5.034.087.850,00	5.035.047.850,00	5.577.864.050,00	543.776.200,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Biro UHP, Pemda DIY	8.902.749.325,00	SEKRETARIAT DAERAH	
4.01.01.1.14.0001		Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara				17 Laporan	25 Laporan	2.836.211.300,00	2.836.211.300,00	3.349.208.500,00	512.997.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			3.981.426.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.14.0002	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																			
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				12 Laporan	12 Laporan	1.484.558.000,00	1.484.558.000,00	1.473.558.000,00	-11.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			2.627.273.325,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.14.0003	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan																			
			Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan				12 Laporan	12 Laporan	713.318.550,00	714.278.550,00	755.097.550,00	41.779.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			2.294.050.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
		<b>BIRO PENGADAAN BARANG/JASA</b>							<b>102.076.370.746,00</b>	<b>103.771.250.419,00</b>	<b>99.387.188.327,00</b>	<b>-2.689.182.419,00</b>						<b>84.891.829.161,00</b>			
	<b>2</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>							<b>4.748.276.500,00</b>	<b>6.248.003.400,00</b>	<b>4.109.082.300,00</b>	<b>-639.194.200,00</b>							<b>3.436.232.796,00</b>		
	<b>2.22</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN</b>							<b>4.131.758.500,00</b>	<b>5.556.142.500,00</b>	<b>3.693.770.400,00</b>	<b>-437.988.100,00</b>							<b>2.530.230.000,00</b>		
	1. 2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				-	80,70 %	4.131.758.500,00	5.556.142.500,00	3.693.770.400,00	-1.601.528.500,00							2.530.230.000,00		
	2.22.08.5.06	Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Kepuasan masyarakat terhadap layanan Pengadaan Barang/Jasa				-	Baik Kategori	625.000.000,00	200.000.000,00	98.890.000,00	-526.110.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		510.230.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	2.22.08.5.06.0001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya				-	1 Unit	0,00	200.000.000,00	98.890.000,00	98.890.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			220.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	<b>4</b>	<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>							<b>94.737.102.246,00</b>	<b>96.425.169.019,00</b>	<b>94.301.135.027,00</b>	<b>-435.967.219,00</b>							<b>78.907.596.365,00</b>		
	<b>4.01</b>	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>							<b>94.737.102.246,00</b>	<b>96.425.169.019,00</b>	<b>94.301.135.027,00</b>	<b>-435.967.219,00</b>							<b>78.907.596.365,00</b>		
	1. 4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				-	95,8 Nilai	85.212.973.874,00	83.149.352.547,00	82.473.612.157,00	-52.752.767.195,00							32.460.206.679,00		
	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				-	100 %	79.524.700,00	80.862.700,00	77.433.700,00	-2.091.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		173.231.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	5.678.000,00	5.678.000,00	5.678.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			6.245.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																			
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	2.616.000,00	2.616.000,00	2.616.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			2.877.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																			
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	3 Laporan	2.360.000,00	2.360.000,00	2.360.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			2.596.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				-	100 %	58.954.615.598,00	58.106.356.208,00	58.419.007.146,00	-535.608.452,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		381.284.100,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	4.560.000,00	4.560.000,00	4.560.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			5.016.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																			
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	2 Laporan	1.970.000,00	1.970.000,00	1.970.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			2.167.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Trivulanan/Semesteran SKPD																			
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Trivulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Trivulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	18 Laporan	2.289.000,00	2.289.000,00	2.289.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			2.518.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				-	100 %	143.627.000,00	143.627.000,00	148.530.000,00	4.903.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		168.526.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																			
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	8.924.000,00	8.924.000,00	8.924.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			9.816.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>				-	100 %	4.461.083.070,00	4.171.105.070,00	2.700.993.950,00	-1.760.089.120,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			4.655.817.454,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	1 Paket	3.434.000,00	3.434.000,00	3.434.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			3.777.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	1 Paket	31.465.400,00	31.465.400,00	31.465.400,00	0,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			34.611.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																			
			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>				1 Paket	1 Paket	5.040.000,00	5.040.000,00	5.040.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			5.544.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																			
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				-	1 Paket	12.460.000,00	12.460.000,00	12.460.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			13.706.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				4 Laporan	4 Laporan	98.711.000,00	137.995.000,00	97.916.000,00	-795.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			108.582.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>				-	100 %	239.600.000,00	813.671.000,00	845.981.000,00	606.381.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			1.064.484.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				1 Unit	31 Unit	15.600.000,00	569.091.000,00	569.091.000,00	553.491.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			17.160.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>				-	100 %	6.025.812.000,00	6.138.325.000,00	6.134.932.000,00	109.120.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			6.785.118.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				1 Laporan	1 Laporan	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			700.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>				-	100 %	4.417.061.540,00	4.546.039.340,00	4.454.152.540,00	37.091.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			8.396.896.800,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>				1 Unit	1 Unit	25.808.500,00	115.395.000,00	76.692.500,00	50.884.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			28.389.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				1 Unit	1 Unit	27.988.800,00	55.977.600,00	30.463.800,00	2.475.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			30.787.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				8 Unit	8 Unit	6.088.000,00	6.088.000,00	6.088.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			6.696.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				16 Unit	16 Unit	5.490.000,00	5.490.000,00	5.490.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			6.039.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
2.	4.01.07	<b>PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA</b>	<b>Persentase pelayanan Pengadaan Barang Jasa Peningkatan Skor Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Pengadaan Barang dan Jasa</b>				<b>68,24</b>	<b>88,45 %</b>	<b>150.751.000,00</b>	<b>1.146.281.000,00</b>	<b>1.078.153.000,00</b>	<b>1.351.594.680,00</b>							<b>1.502.345.680,00</b>		
	4.01.07.1.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	<i>Peningkatan Skor Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Pengadaan Barang dan Jasa Persentase Pengadaan Barang dan Jasa yang berkualitas</i>				-	80,70 %	93.177.000,00	908.707.000,00	840.579.000,00	747.402.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			1.131.471.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.07.1.01.0002	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa																			
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa</i>				0 Laporan	2 Laporan	93.177.000,00	908.707.000,00	840.579.000,00	747.402.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			1.131.471.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGAB JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.07.1.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Presentase penyelenggaraan pengadaan Barang dan Jasa yang dilakukan secara elektronik				64,94 %	64,94 %	27.587.000,00	117.587.000,00	117.587.000,00	90.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			146.410.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.07.1.02.0001	Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik																		
			Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik				3 Laporan	3 Laporan	27.587.000,00	117.587.000,00	117.587.000,00	90.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			146.410.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.07.1.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Pemenuhan level kematangan strategis				-	37,50 %	29.987.000,00	119.987.000,00	119.987.000,00	90.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			224.464.680,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.07.1.03.0003	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa				3 Dokumen	3 Dokumen	29.987.000,00	119.987.000,00	119.987.000,00	90.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			224.464.680,00	SEKRETARIAT DAERAH
									<b>27.491.567.847,00</b>	<b>28.410.114.093,00</b>	<b>26.176.075.358,00</b>	<b>-1.315.492.489,00</b>					<b>33.455.666.013,00</b>			
<b>4</b>	<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>								<b>27.491.567.847,00</b>	<b>28.410.114.093,00</b>	<b>26.176.075.358,00</b>	<b>-1.315.492.489,00</b>					<b>33.455.666.013,00</b>			
<b>4.01</b>	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>								<b>27.491.567.847,00</b>	<b>28.410.114.093,00</b>	<b>26.176.075.358,00</b>	<b>-1.315.492.489,00</b>					<b>33.455.666.013,00</b>			
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				89,59 Angka	89,59 Angka	9.058.990.347,00	9.201.177.793,00	9.352.815.358,00	-1.080.913.334,00					7.978.077.013,00			
	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, dan Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100 %	100 %	12.442.000,00	12.442.000,00	12.442.000,00	0,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Paniradya Kaistimewan		17.651.000,00	PANIRADYA KAISTIMEWAN
	4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	5.750.000,00	5.750.000,00	5.750.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			7.700.000,00	PANIRADYA KAISTIMEWAN
	4.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	3.499.000,00	3.499.000,00	3.499.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			6.351.000,00	PANIRADYA KAISTIMEWAN
	4.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				19 Laporan	19 Laporan	3.193.000,00	3.193.000,00	3.193.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			3.600.000,00	PANIRADYA KAISTIMEWAN
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, dan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				-	100 %	8.213.865.547,00	8.361.921.993,00	8.575.936.558,00	362.071.011,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Paniradya Kaistimewan		7.105.266.013,00	PANIRADYA KAISTIMEWAN
	4.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				50 Orang/ Bulan	50 Orang/ Bulan	8.198.166.097,00	8.346.222.543,00	8.560.237.108,00	362.071.011,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBYAKTIAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			7.063.196.013,00	PANIRADYA KAISTIMEWAN
	4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	7.908.000,00	7.908.000,00	7.908.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			36.420.000,00	PANIRADYA KAISTIMEWAN
	4.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.015.000,00	1.015.000,00	1.015.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			1.450.000,00	PANIRADYA KAISTIMEWAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	4.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																			
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				14 Laporan	14 Laporan	6.776.450,00	6.776.450,00	6.776.450,00	0,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			4.200.000,00	PANIRADYA KAISTIMEWAN	
	4.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya penatausahaan barang milik daerah pada SKPD				100 %	100 %	11.543.500,00	11.543.500,00	11.543.500,00	0,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Paniradya Kaistimewan		11.400.000,00	PANIRADYA KAISTIMEWAN	
	4.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																			
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	11.543.500,00	11.543.500,00	11.543.500,00	0,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			11.400.000,00	PANIRADYA KAISTIMEWAN	
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi, dan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				100 %	100 %	125.022.000,00	119.153.000,00	80.180.000,00	-44.842.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Paniradya Kaistimewan		240.310.000,00	PANIRADYA KAISTIMEWAN	
	4.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.412.000,00	1.412.000,00	1.412.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			3.610.000,00	PANIRADYA KAISTIMEWAN	
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	11.065.900,00	11.065.900,00	11.065.900,00	0,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			14.800.000,00	PANIRADYA KAISTIMEWAN	
	4.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																			
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	29.950.000,00	29.950.000,00	17.244.000,00	-12.706.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			12.200.000,00	PANIRADYA KAISTIMEWAN	
	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	15.462.100,00	15.462.100,00	15.462.100,00	0,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			19.400.000,00	PANIRADYA KAISTIMEWAN	
	4.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	2.532.000,00	2.532.000,00	2.532.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			12.600.000,00	PANIRADYA KAISTIMEWAN	
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	64.600.000,00	58.731.000,00	32.464.000,00	-32.136.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			177.700.000,00	PANIRADYA KAISTIMEWAN	
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				100 %	100 %	333.720.000,00	333.720.000,00	333.720.000,00	0,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Paniradya Kaistimewan		353.300.000,00	PANIRADYA KAISTIMEWAN	
	4.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	23.400.000,00	23.400.000,00	23.400.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			23.200.000,00	PANIRADYA KAISTIMEWAN	
	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	310.320.000,00	310.320.000,00	310.320.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			330.100.000,00	PANIRADYA KAISTIMEWAN	
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Kendaran Dinas Operasional atau Lapangan, Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				100 %	100 %	362.397.300,00	362.397.300,00	338.993.300,00	-23.404.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Paniradya Kaistimewan		250.150.000,00	PANIRADYA KAISTIMEWAN	
	4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	35.286.000,00	35.286.000,00	35.274.000,00	-12.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			32.100.000,00	PANIRADYA KAISTIMEWAN	
	4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				16 Unit	16 Unit	289.497.300,00	289.497.300,00	266.105.300,00	-23.392.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			209.100.000,00	PANIRADYA KAISTIMEWAN
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				23 Unit	55 Unit	37.614.000,00	37.614.000,00	37.614.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			8.950.000,00	PANIRADYA KAISTIMEWAN
2.	4.01.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi				87,00 %	87,00 %	18.432.577.500,00	19.208.936.300,00	16.823.260.000,00	7.045.011.500,00							25.477.589.000,00	
	4.01.10.5.03	Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara	Terlaksananya Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara dan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara				100 %	100 %	985.702.000,00	946.219.000,00	715.539.000,00	-270.163.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Perangkat Daerah Pengampu Dana Keistimewaan DIY		1.434.818.000,00	PANIRADYA KAISTIMEWAN
	4.01.10.5.03.0001	Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara																		
			Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara yang Disusun				6 Dokumen	6 Dokumen	529.568.000,00	515.921.000,00	391.269.000,00	-138.299.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			902.418.000,00	PANIRADYA KAISTIMEWAN
	4.01.10.5.03.0002	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara																		
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara				5 Laporan	4 Laporan	456.134.000,00	430.298.000,00	324.270.000,00	-131.864.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			532.400.000,00	PANIRADYA KAISTIMEWAN
	4.01.10.5.04	Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kebudayaan dan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Keistimewaan Urusan Kebudayaan				100 %	100 %	1.632.353.000,00	1.315.451.000,00	1.061.416.000,00	-570.937.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	OPD Pengampu Dana Keistimewaan dan Masyarakat		1.808.550.000,00	PANIRADYA KAISTIMEWAN
	4.01.10.5.04.0001	Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kebudayaan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kebudayaan				6 Dokumen	10 Dokumen	1.008.353.000,00	704.450.000,00	585.280.000,00	-423.073.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			998.250.000,00	PANIRADYA KAISTIMEWAN
	4.01.10.5.04.0002	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Kebudayaan																		
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Kebudayaan				5 Laporan	5 Laporan	624.000.000,00	611.001.000,00	476.136.000,00	-147.864.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			810.300.000,00	PANIRADYA KAISTIMEWAN
	4.01.10.5.05	Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Pertanahan dan Tata Ruang	Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan dan Tata Ruang dan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Pertanahan dan Tata Ruang				100 %	100 %	3.308.620.000,00	4.707.879.000,00	3.976.518.000,00	667.898.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	PD Pengampu Dana Keistimewaan DIY		2.728.550.000,00	PANIRADYA KAISTIMEWAN
	4.01.10.5.05.0001	Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan				9 Dokumen	10 Dokumen	740.190.000,00	1.193.676.100,00	1.044.703.100,00	304.513.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			798.600.000,00	PANIRADYA KAISTIMEWAN
	4.01.10.5.05.0002	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Pertanahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Pertanahan				7 Laporan	9 Laporan	586.430.000,00	860.965.100,00	712.305.100,00	125.875.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			532.400.000,00	PANIRADYA KAISTIMEWAN
	4.01.10.5.05.0003	Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang				10 Dokumen	13 Dokumen	822.000.000,00	1.770.319.200,00	1.519.533.200,00	697.533.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			865.150.000,00	PANIRADYA KAISTIMEWAN
	4.01.10.5.05.0004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Tata Ruang																		
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Tata Ruang				10 Laporan	8 Laporan	1.160.000.000,00	882.918.600,00	699.976.600,00	-460.023.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			532.400.000,00	PANIRADYA KAISTIMEWAN
	4.01.10.5.06	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Terlaksananya Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan dan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan se-DIY				100 %	100 %	2.373.902.500,00	2.779.114.000,00	2.294.371.000,00	-79.531.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Paniradya Kaistimewan dan OPD Pengampu Dana Keistimewaan		5.985.507.000,00	PANIRADYA KAISTIMEWAN
	4.01.10.5.06.0001	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan																		
			Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun				17 Dokumen	21 Dokumen	1.191.902.500,00	1.602.147.000,00	1.314.988.000,00	123.085.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			2.857.657.000,00	PANIRADYA KAISTIMEWAN
	4.01.10.5.06.0002	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan se-DIY																		
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan se-DIY				21 Laporan	21 Laporan	1.182.000.000,00	1.176.967.000,00	979.383.000,00	-202.617.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			3.127.850.000,00	PANIRADYA KAISTIMEWAN
	4.01.10.5.07	Sarana dan Prasarana Keistimewaan	Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Pelaksana Urusan Keistimewaan				100 %	100 %	1.500.000.000,00	358.999.000,00	310.175.000,00	-1.189.825.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Paniradya Kaistimewan		3.472.445.000,00	PANIRADYA KAISTIMEWAN
	4.01.10.5.07.0001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Pelaksana Urusan Kelembagaan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Pelaksana Urusan Keistimewaan yang Disediakan				4 Unit	2 Unit	1.500.000.000,00	358.999.000,00	310.175.000,00	-1.189.825.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			3.472.445.000,00	PANIRADYA KAISTIMEWAN
	4.01.10.5.08	Peningkatan Pelayanan Parampara Praja	Terlaksananya Penyusunan Rekomendasi Urusan Keistimewaan				100 %	100 %	1.000.000.000,00	899.546.000,00	740.946.000,00	-259.054.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Parampara Praja, OPD dan Masyarakat		1.422.839.000,00	PANIRADYA KAISTIMEWAN
	4.01.10.5.08.0001	Penyusunan Rekomendasi Urusan Keistimewaan																		
			Jumlah Rekomendasi Urusan Keistimewaan yang Diterbitkan				3 Rekomendasi	3 Rekomendasi	1.000.000.000,00	899.546.000,00	740.946.000,00	-259.054.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			1.422.839.000,00	PANIRADYA KAISTIMEWAN
	4.01.10.5.09	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Keistimewaan	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan Pelaksana Keistimewaan				100 %	100 %	7.632.000.000,00	8.201.728.300,00	7.724.295.000,00	92.295.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	OPD Pengampu Dana Keistimewaan dan Masyarakat		8.624.880.000,00	PANIRADYA KAISTIMEWAN
	4.01.10.5.09.0001	Pembinaan Kelembagaan Pelaksana Keistimewaan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Kelembagaan Pelaksana Keistimewaan				4 Dokumen	4 Dokumen	7.632.000.000,00	8.201.728.300,00	7.724.295.000,00	92.295.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			8.624.880.000,00	PANIRADYA KAISTIMEWAN
		<b>SEKRETARIAT DPRD</b>																		
	<b>4</b>	<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>							<b>328.851.987.629,00</b>	<b>326.833.476.699,00</b>	<b>324.991.634.994,00</b>	<b>-3.860.352.635,00</b>							<b>230.302.555.466,00</b>	
	<b>4.02</b>	<b>SEKRETARIAT DPRD</b>							<b>328.851.987.629,00</b>	<b>326.833.476.699,00</b>	<b>324.991.634.994,00</b>	<b>-3.860.352.635,00</b>							<b>230.302.555.466,00</b>	
1.	<b>4.02.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				<b>89 angka</b>	<b>89 angka</b>	<b>263.929.689.877,00</b>	<b>265.013.050.147,00</b>	<b>265.693.719.642,00</b>	<b>-129.402.746.811,00</b>							<b>134.526.943.066,00</b>	
	4.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100 %	100 %	38.131.200,00	56.476.200,00	56.476.200,00	18.345.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Sekretariat DPRD DIY		142.588.000,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					5 Dokumen	5 Dokumen	15.125.000,00	18.095.000,00	18.095.000,00	2.970.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			64.959.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD					4 Dokumen	4 Dokumen	12.619.000,00	17.194.000,00	17.194.000,00	4.575.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			36.199.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					5 Laporan	5 Laporan	10.387.200,00	21.187.200,00	21.187.200,00	10.800.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			41.430.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				100 %	100 %	10.515.078.400,00	10.641.530.470,00	10.294.712.614,00	-220.365.786,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Sekretariat DPRD DIY		12.183.527.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					80 Orang/ Bulan	80 Orang/ Bulan	10.427.403.100,00	10.553.855.170,00	10.207.037.314,00	-220.365.786,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBUJUKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			12.035.465.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					12 Dokumen	12 Dokumen	16.518.000,00	16.518.000,00	16.518.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			66.276.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					1 Laporan	1 Laporan	10.607.500,00	10.607.500,00	10.607.500,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			14.510.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD					13 Laporan	13 Laporan	60.549.800,00	60.549.800,00	60.549.800,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			67.276.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD dan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				100 %	100 %	20.890.000,00	20.890.000,00	17.740.000,00	-3.150.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Sekretariat DPRD DIY		30.579.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					14 Laporan	14 Laporan	20.890.000,00	20.890.000,00	17.740.000,00	-3.150.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			30.579.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai serta Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				100 %	100 %	17.869.000,00	16.371.000,00	16.371.000,00	-1.498.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Sekretariat DPRD DIY		416.711.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai					16 Dokumen	16 Dokumen	11.505.000,00	10.305.000,00	10.305.000,00	-1.200.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			20.148.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					1 Orang	1 Orang	6.364.000,00	6.066.000,00	6.066.000,00	-298.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			396.563.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Fasilitas Kunjungan Tamu, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				100 %	100 %	1.221.077.600,00	1.214.340.600,00	805.511.600,00	-415.566.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Sekretariat DPRD DIY		1.656.267.000,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
4.02.01.1.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					1 Paket	1 Paket	40.668.000,00	40.668.000,00	40.668.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			37.874.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.1.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					4 Paket	4 Paket	185.901.600,00	185.901.600,00	132.405.600,00	-53.496.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			235.747.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.1.06.0003		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					5 Paket	5 Paket	221.831.000,00	221.821.000,00	221.821.000,00	-10.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			11.047.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.1.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					5 Paket	5 Paket	109.940.000,00	109.940.000,00	109.940.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			159.765.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.1.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					24 Laporan	24 Laporan	662.737.000,00	656.010.000,00	300.677.000,00	-362.060.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			1.211.834.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan; Pengadaan Mebel; Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya; Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya; Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya; dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				100 %	100 %	198.479.253.000,00	198.961.590.000,00	198.940.090.000,00	460.837.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	DPRD DIY		57.986.374.066,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.1.07.0001		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					4 Unit	0 Unit	878.913.000,00	0,00	0,00	-878.913.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			0,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.1.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					31 Unit	84 Unit	600.340.000,00	1.961.590.000,00	1.940.090.000,00	1.339.750.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			1.137.736.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.1.07.0009		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					1 Unit	1 Unit	197.000.000.000,00	197.000.000.000,00	197.000.000.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			56.848.638.066,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				100 %	100 %	4.576.353.264,00	4.576.353.264,00	4.567.953.264,00	-8.400.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Sekretariat DPRD DIY		3.578.283.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.1.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					60 Laporan	46 Laporan	1.182.563.500,00	1.182.563.500,00	1.174.163.500,00	-8.400.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			1.298.092.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.1.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					84 Laporan	84 Laporan	3.393.789.764,00	3.393.789.764,00	3.393.789.764,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			2.280.191.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Pemeliharaan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, pemeliharaan mebel, Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				100 %	100 %	1.790.273.700,00	1.410.738.900,00	1.410.738.900,00	-379.534.800,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Sekretariat DPRD DIY, Pemda DIY, DPRD DIY		2.244.446.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.1.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					5 Unit	1 Unit	541.002.100,00	48.591.000,00	48.591.000,00	-492.411.100,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			455.331.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.1.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				29 Unit	26 Unit	813.017.600,00	850.078.900,00	850.078.900,00	37.061.300,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			697.682.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				278 Unit	278 Unit	307.380.000,00	307.380.000,00	307.380.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			284.477.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	128.874.000,00	204.689.000,00	204.689.000,00	75.815.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			806.956.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD, Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD, dan Pelaksanaan Medical Check Up DPRD				100 %	100 %	43.584.943.509,00	44.560.504.509,00	46.062.330.860,00	2.477.387.351,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	DPRD DIY		51.357.320.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD																		
			Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD				55 Orang/ Bulan	55 Orang/ Bulan	42.752.741.509,00	43.727.873.509,00	45.285.399.860,00	2.532.658.351,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			50.500.353.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan				330 Paket	330 Paket	532.978.000,00	532.978.000,00	477.978.000,00	-55.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			547.134.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD				55 Orang	55 Orang	299.224.000,00	299.653.000,00	298.953.000,00	-271.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			309.833.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.16	Layanan Administrasi DPRD	Terlaksananya Fasilitas Fraksi DPRD dan Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD				100 %	100 %	3.685.820.204,00	3.554.255.204,00	3.521.795.204,00	-164.025.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Sekretariat DPRD DIY, DPRD DIY, Pemda DIY		4.930.848.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.16.0002	Fasilitasi Fraksi DPRD																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD				266 Laporan	266 Laporan	2.769.567.204,00	2.769.567.204,00	2.775.867.204,00	6.300.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			2.913.110.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD				40 Laporan	40 Laporan	916.253.000,00	784.688.000,00	745.928.000,00	-170.325.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			2.017.738.000,00	SEKRETARIAT DPRD
2.	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Bahan Acara yang selesai sesuai dengan program kerja DPRD DIY				96 %	96 %	64.922.297.752,00	61.820.426.552,00	59.297.915.352,00	30.853.314.648,00							95.775.612.400,00	
	4.02.02.1.01	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Terlaksananya Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah, Pembahasan Rancangan Perda, Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan dan Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik, Penyusunan Tata Tertib DPRD				96 %	96 %	13.995.301.356,00	11.689.965.356,00	14.295.335.356,00	300.034.000,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	DPRD DIY, Pemda DIY, masyarakat		19.923.502.400,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah				9 Dokumen	9 Dokumen	1.617.247.000,00	1.366.099.000,00	1.173.697.000,00	-443.550.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			3.232.074.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.01.0002	Pembahasan Rancangan Perda																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda				7 Dokumen	12 Dokumen	4.450.715.000,00	4.251.551.000,00	7.226.635.000,00	2.775.920.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			8.425.704.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.01.0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan				4 Dokumen	4 Dokumen	964.167.856,00	964.167.856,00	964.167.856,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			1.124.856.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi				158 Dokumen	135 Dokumen	3.413.647.500,00	1.496.223.500,00	1.491.223.500,00	-1.922.424.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			3.428.942.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.01.0006	Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah				22000 Orang	22000 Orang	3.549.524.000,00	3.611.924.000,00	3.439.612.000,00	-109.912.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			3.711.926.400,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
4.02.02.1.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran	"Terlaksananya Pembahasan KUA dan PPAS, Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS, Pembahasan APBD, Pembahasan Perubahan APBD, Pembahasan Laporan Semester, Pembahasan Pertanggung jawaban APBD"				96 %	96 %	2.272.578.000,00	904.009.000,00	897.419.000,00	-1.375.159.000,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	DPRD DIY, Pemda DIY, masyarakat		2.609.358.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.1.02.0001		Pembahasan KUA dan PPAS																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS				2 Dokumen	2 Dokumen	474.728.000,00	432.010.000,00	425.420.000,00	-49.308.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan		542.589.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
4.02.02.1.02.0002		Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS				2 Dokumen	2 Dokumen	83.351.000,00	83.351.000,00	83.351.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan		130.137.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
4.02.02.1.02.0003		Pembahasan APBD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD				1 Dokumen	1 Dokumen	528.227.000,00	141.647.000,00	141.647.000,00	-386.580.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan		702.321.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
4.02.02.1.02.0004		Pembahasan Perubahan APBD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD				1 Dokumen	1 Dokumen	475.557.000,00	100.814.000,00	100.814.000,00	-374.743.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan		523.866.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
4.02.02.1.02.0005		Pembahasan Laporan Semester																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester				1 Dokumen	1 Dokumen	37.460.000,00	37.460.000,00	37.460.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan		54.067.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
4.02.02.1.02.0006		Pembahasan Pertanggungjawaban APBD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD				1 Dokumen	1 Dokumen	673.255.000,00	108.727.000,00	108.727.000,00	-564.528.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan		656.378.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
4.02.02.1.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Terlaksananya pengawasan urusan pemerintahan bidang pemerintahan dan hukum, pengawasan urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur, Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat, dan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian				96 %	96 %	4.605.027.000,00	4.490.592.000,00	4.384.027.000,00	-221.000.000,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	DPRD DIY, Pemda DIY, masyarakat	1.357.936.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
4.02.02.1.03.0001		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum				6 Laporan	6 Laporan	1.608.252.000,00	1.543.008.000,00	1.499.262.000,00	-108.990.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan		468.148.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
4.02.02.1.03.0002		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur				5 Laporan	5 Laporan	998.925.000,00	982.528.000,00	962.055.000,00	-36.870.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan		296.596.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
4.02.02.1.03.0003		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat																		
			Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat				5 Laporan	5 Laporan	998.925.000,00	982.528.000,00	962.055.000,00	-36.870.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan		296.596.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
4.02.02.1.03.0004		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian				5 Laporan	5 Laporan	998.925.000,00	982.528.000,00	960.655.000,00	-38.270.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan		296.596.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
4.02.02.1.04		Peningkatan Kapasitas DPRD	Terlaksananya Orientasi DPRD, Pendalaman Tugas DPRD, Publikasi dan Dokumentasi Dewan, Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli, Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi, Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat				96 %	96 %	10.926.621.196,00	12.161.414.196,00	12.697.034.996,00	1.770.413.800,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	DPRD DIY, Pemda DIY, masyarakat	27.760.154.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
4.02.02.1.04.0002		Pendalaman Tugas DPRD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD				6 Dokumen	6 Dokumen	4.067.636.200,00	4.044.342.200,00	4.852.034.200,00	784.398.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan		4.016.981.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
4.02.02.1.04.0004		Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli																		
			Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli				18 Orang	36 Orang	1.420.617.000,00	2.554.617.000,00	2.496.867.000,00	1.076.250.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan		1.797.898.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
4.02.02.1.04.0005		Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi																		
			Jumlah Tenaga Ahli Fraksi				7 Orang	7 Orang	781.420.000,00	728.647.000,00	728.647.000,00	-52.773.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan		889.949.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
4.02.02.1.04.0006		Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat				36 Dokumen	36 Dokumen	4.357.693.796,00	4.526.333.796,00	4.395.947.796,00	38.254.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			6.453.833.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.1.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD																			
			Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD				2 Dokumen	2 Dokumen	299.254.200,00	307.474.200,00	223.539.000,00	-75.715.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			14.601.493.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.1.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Terlaksananya Kunjungan Kerja Dalam Daerah, Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD dan Pelaksanaan Reses				96 %	96 %	7.471.945.400,00	5.070.413.400,00	7.059.015.400,00	-412.930.000,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	DPRD DIY, Pemda DIY, masyarakat		11.733.400.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.1.05.0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD																			
			Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	281.192.400,00	271.642.400,00	239.227.400,00	-41.965.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			244.253.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.1.05.0003	Pelaksanaan Reses																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses				3 Dokumen	3 Dokumen	7.190.753.000,00	4.798.771.000,00	6.819.788.000,00	-370.965.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			11.489.147.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.1.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Terlaksananya pengawasan kode etik DPRD, Penyusunan Kode Etik DPRD: 100%				96 %	96 %	409.532.400,00	128.657.400,00	114.887.400,00	-294.645.000,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	DPRD DIY		473.919.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.1.06.0002	Pengawasan Kode Etik DPRD																			
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD				3 Laporan	3 Laporan	409.532.400,00	128.657.400,00	114.887.400,00	-294.645.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			473.919.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.1.08	Fasilitasi Tugas DPRD	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi pelaksanaan Tugas DPRD, Penyusunan Laporan Kinerja DPRD, Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD, Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah				96 %	96 %	25.241.292.400,00	27.375.375.200,00	19.850.196.200,00	-5.391.096.200,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	DPRD DIY, Pemda DIY, masyarakat		31.917.343.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.1.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD																			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD				48 Dokumen	23 Dokumen	14.347.067.500,00	17.713.432.500,00	10.354.113.500,00	-3.992.954.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			24.252.081.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.1.08.0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD																			
			Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun				1 Laporan	1 Laporan	15.265.400,00	15.265.400,00	15.265.400,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			34.097.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.1.08.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah																			
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah				14 Dokumen	14 Dokumen	1.845.593.700,00	606.177.300,00	599.587.300,00	-1.246.006.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			2.106.798.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.1.08.0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD																			
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD				13 Dokumen	13 Dokumen	9.033.365.800,00	9.040.500.000,00	8.881.230.000,00	-152.135.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			5.524.367.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
<b>BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH</b>									<b>22.713.590.796,00</b>	<b>22.566.502.674,00</b>	<b>21.364.101.292,00</b>	<b>-1.349.489.504,00</b>						<b>29.592.193.358,00</b>			
2		<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>							<b>478.434.950,00</b>	<b>231.096.250,00</b>	<b>222.096.250,00</b>	<b>-256.338.700,00</b>							<b>424.831.000,00</b>		
	2.20	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK</b>							<b>478.434.950,00</b>	<b>231.096.250,00</b>	<b>222.096.250,00</b>	<b>-256.338.700,00</b>							<b>424.831.000,00</b>		
1.	2.20.02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>					-	75 %	<b>231.096.250,00</b>	<b>231.096.250,00</b>	<b>222.096.250,00</b>	<b>193.734.750,00</b>							<b>424.831.000,00</b>		
	2.20.02.1.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral dan Terbangunnya Metadata Statistik Sektoral				-	8 dokumen	231.096.250,00	231.096.250,00	222.096.250,00	-9.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Perangkat Daerah Pemda DIY, Kabupaten/Kota, Instansi Vertikal di DIY Provinsi DI Yogyakarta		424.831.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH	
	2.20.02.1.01.0011	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia																			
			Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata				-	8 Dokumen	0,00	231.096.250,00	222.096.250,00	222.096.250,00		Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			424.831.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>							<b>22.235.155.846,00</b>	<b>22.335.406.424,00</b>	<b>21.142.005.042,00</b>	<b>-1.093.150.804,00</b>							<b>29.167.362.358,00</b>		
	5.01	<b>PERENCANAAN</b>							<b>22.036.172.946,00</b>	<b>22.121.423.524,00</b>	<b>20.939.542.142,00</b>	<b>-1.096.630.804,00</b>							<b>28.711.326.358,00</b>		
1.	5.01.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				95,44 angka	95,44 angka	19.395.223.511,00	19.339.206.389,00	18.440.719.507,00	4.134.254.847,00							23.529.478.358,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD, Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				29 Dokumen	29 Dokumen	38.654.500,00	38.654.500,00	38.654.500,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Bappeda DIY		102.283.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	10.892.000,00	10.892.000,00	10.892.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			34.316.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	11.990.000,00	11.990.000,00	11.990.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			26.202.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				22 Laporan	22 Laporan	15.772.500,00	15.772.500,00	15.772.500,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			41.765.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya penerimaan gaji dan Tunjangan ASN, Penyusunan Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				131 Dokumen/lap/oran g/bulan	131 Dokumen/lap/oran g/bulan	16.575.699.586,00	16.571.038.464,00	15.850.828.682,00	-724.870.904,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Bappeda DIY		19.262.849.358,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				115 Orang/ Bulan	115 Orang/ Bulan	16.530.196.986,00	16.529.315.864,00	15.809.106.082,00	-721.090.904,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			19.115.652.358,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	11.914.600,00	11.914.600,00	11.914.600,00	0,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			103.406.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	2 Laporan	8.435.500,00	8.435.500,00	8.435.500,00	0,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			11.948.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				13 Laporan	13 Laporan	21.372.500,00	21.372.500,00	21.372.500,00	0,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			31.843.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya penyusunan Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				6 laporan	6 laporan	20.080.950,00	12.539.950,00	12.539.950,00	-7.541.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Bappeda DIY		26.674.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				6 Laporan	6 Laporan	12.539.950,00	12.539.950,00	12.539.950,00	0,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			26.674.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya penyusunan Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				13 dokumen	13 dokumen	65.583.950,00	65.285.950,00	44.164.950,00	-21.419.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Bappeda DIY		203.192.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				13 Dokumen	13 Dokumen	65.583.950,00	65.285.950,00	44.164.950,00	-21.419.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			203.192.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Peralatan Rumah Tangga, Barang Cetak dan Penggandaan, Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan dan Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD dan Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				16 paket/dokumen/laporan	16 paket/dokumen/laporan	890.954.325,00	829.078.425,00	567.225.325,00	-323.729.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Bappeda DIY		1.499.638.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	14.863.800,00	16.457.800,00	16.457.800,00	1.594.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			23.946.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	46.998.000,00	64.000.700,00	64.000.700,00	17.002.700,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			103.632.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	36.535.000,00	41.632.000,00	41.629.000,00	5.094.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			67.197.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	32.684.600,00	38.824.750,00	38.824.650,00	6.140.050,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			70.481.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				3 Dokumen	3 Dokumen	7.188.000,00	11.508.000,00	11.508.000,00	4.320.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			19.803.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	4 Laporan	573.057.900,00	606.155.850,00	344.305.850,00	-228.752.050,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			1.033.079.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	50.499.325,00	50.499.325,00	50.499.325,00	0,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			181.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Mebel, dan Peralatan dan Mesin Lainnya, dan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				62 unit	31 unit	678.951.000,00	678.951.000,00	694.700.885,00	15.749.885,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Bappeda DIY		830.982.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	151.820.000,00	151.820.000,00	14.360.000,00	-137.460.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			162.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				31 Unit	7 Unit	90.551.000,00	90.551.000,00	90.551.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			562.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				30 Unit	27 Unit	436.580.000,00	436.580.000,00	589.789.885,00	153.209.885,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			106.982.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dan Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.				5 laporan	6 laporan	527.272.000,00	575.890.900,00	575.890.900,00	48.618.900,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Bappeda DIY		683.772.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	7.495.000,00	8.425.000,00	8.425.000,00	930.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			15.342.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	40.908.000,00	45.897.900,00	45.897.900,00	4.989.900,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			90.077.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	46.380.000,00	52.968.000,00	52.968.000,00	6.588.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			71.245.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	3 Laporan	368.628.000,00	468.600.000,00	468.600.000,00	99.972.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			507.108.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan dan pembayaran pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, pemeliharaan dan pembayaran pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, pemeliharaan dan pembayaran perizinan Alat Besar, pemeliharaan mebel, pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dan pemeliharaan/rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.				147 unit	168 unit	598.027.200,00	567.767.200,00	656.714.315,00	58.687.115,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Bappeda DIY		920.088.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	35.568.000,00	35.568.000,00	35.568.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			45.808.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN Riset dan INOVASI DAERAH	
	5.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				9 Unit	10 Unit	225.950.400,00	226.370.400,00	226.086.400,00	136.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			353.533.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN Riset dan INOVASI DAERAH	
	5.01.01.1.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar																			
			Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya				1 Unit	1 Unit	10.150.000,00	10.150.000,00	10.150.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			13.510.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN Riset dan INOVASI DAERAH	
	5.01.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel																			
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				22 Unit	24 Unit	10.530.000,00	11.168.000,00	11.168.000,00	638.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			17.244.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN Riset dan INOVASI DAERAH	
	5.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				72 Unit	84 Unit	50.286.000,00	58.927.000,00	58.927.000,00	8.641.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			86.016.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN Riset dan INOVASI DAERAH	
	5.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	197.219.800,00	197.219.800,00	286.450.915,00	89.231.115,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			362.140.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN Riset dan INOVASI DAERAH	
	5.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				41 Unit	47 Unit	25.294.000,00	28.364.000,00	28.364.000,00	3.070.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			41.837.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN Riset dan INOVASI DAERAH	
2.	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian pembangunan dengan peraturan perundang-undangan				100 %	100 %	2.163.976.535,00	1.997.905.535,00	1.789.272.035,00	2.083.840.465,00							4.247.817.000,00		
	5.01.02.1.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Terlaksananya Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)				7 dokumen	7 dokumen	938.891.400,00	934.123.400,00	735.665.900,00	-203.225.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Seluruh stakeholder Pemda DIY		1.840.537.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN Riset dan INOVASI DAERAH	
	5.01.02.1.01.0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya																			
			Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	88.239.800,00	88.239.800,00	73.175.300,00	-15.064.500,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			122.852.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN Riset dan INOVASI DAERAH	
	5.01.02.1.01.0006	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)				5 Dokumen	4 Dokumen	850.651.600,00	845.883.600,00	662.490.600,00	-188.161.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			1.717.685.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN Riset dan INOVASI DAERAH	
	5.01.02.1.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	"Terlaksananya, Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah, dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi"				28 dokumen	22 dokumen	1.225.085.135,00	1.063.782.135,00	1.053.606.135,00	-171.479.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Seluruh stakeholder Pemda DIY		2.407.280.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN Riset dan INOVASI DAERAH	
	5.01.02.1.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah				25 Laporan	19 Laporan	1.196.187.135,00	1.034.884.135,00	1.026.908.135,00	-169.279.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PAJAK ROKOK	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			2.321.984.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.1.03.0004	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi				3 Dokumen	3 Dokumen	28.898.000,00	28.898.000,00	26.698.000,00	-2.200.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			85.296.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
3.	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Program Perangkat Daerah yang mendukung Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam dokumen perencanaan Persentase keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan (RPJMD, RENSTRA, RKPD) Persentase keselarasan antara dokumen Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) dengan dokumen perencanaan pembangunan (RKPD) Persentase keselarasan antara dokumen RAD GRK dengan dokumen perencanaan				28,97 92 93 93,75 % % % %	28,97 92 93 93,75 % % % %	724.311.600,00	784.311.600,00	709.550.600,00	209.719.400,00							934.031.000,00	
	5.01.03.1.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)*				7 dokumen	7 dokumen	555.935.000,00	585.935.000,00	550.174.000,00	-5.761.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	OPD Mitra		616.116.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.1.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				2 Dokumen	2 Dokumen	83.986.000,00	98.986.000,00	74.925.000,00	-9.061.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			133.100.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.1.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				5 Dokumen	5 Dokumen	471.949.000,00	486.949.000,00	475.249.000,00	3.300.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			483.016.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.1.02	Koordinasi Perencanaan Bidang SDA (Sumber Daya Alam)	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				4 dokumen	4 dokumen	84.545.000,00	99.545.000,00	80.345.000,00	-4.200.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	OPD Mitra		133.100.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.1.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				4 Dokumen	3 Dokumen	84.545.000,00	99.545.000,00	80.345.000,00	-4.200.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			133.100.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.1.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				3 dokumen	3 dokumen	83.831.600,00	98.831.600,00	79.031.600,00	-4.800.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	OPD Mitra		184.815.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.1.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				3 Dokumen	3 Dokumen	83.831.600,00	98.831.600,00	79.031.600,00	-4.800.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			184.815.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN							198.982.900,00	213.982.900,00	202.462.900,00	3.480.000,00							456.036.000,00	
1.	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase inovasi daerah yang memenuhi kriteria kompetensi inovasi tingkat nasional Persentase hasil kelibangan yang ditindaklanjuti untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah				-	60 75 % %	198.982.900,00	213.982.900,00	202.462.900,00	257.053.100,00							456.036.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB										
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)											
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21										
	5.05.02.1.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Terlaksananya penyusunan Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial				-	1 dokumen	42.909.100,00	42.909.100,00	34.989.100,00	-7.920.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Perangkat Daerah Pemda DIY, Kabupaten/Kota, Instansi Vertikal di DIY Provinsi DI Yogyakarta		197.115.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH										
	5.05.02.1.02.0001	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial																												
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial				-	1 Dokumen	0,00	42.909.100,00	34.989.100,00	34.989.100,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan		197.115.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH											
	5.05.02.1.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Terlaksananya Penyusunan Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan				-	5 laporan	156.073.800,00	171.073.800,00	167.473.800,00	11.400.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Perangkat Daerah Pemda DIY, Kabupaten/Kota, Instansi Vertikal di DIY Provinsi DI Yogyakarta		258.921.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH										
	5.05.02.1.04.0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi																												
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi				-	5 Dokumen	0,00	171.073.800,00	167.473.800,00	167.473.800,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan		258.921.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH											
<b>BALAI PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN STATISTIK DAERAH</b>									<b>22.713.590.796,00</b>	<b>22.566.502.674,00</b>	<b>21.364.101.292,00</b>	<b>-1.349.489.504,00</b>						<b>29.592.193.358,00</b>												
<b>2</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>																			<b>478.434.950,00</b>	<b>231.096.250,00</b>	<b>222.096.250,00</b>	<b>-256.338.700,00</b>						<b>424.831.000,00</b>	
<b>2.20</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK</b>																			<b>478.434.950,00</b>	<b>231.096.250,00</b>	<b>222.096.250,00</b>	<b>-256.338.700,00</b>						<b>424.831.000,00</b>	
1.	2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase data statistik sektoral menuju prinsip satu data pembangunan daerah				75 %	0 %	231.096.250,00	231.096.250,00	222.096.250,00	193.734.750,00						424.831.000,00												
	2.20.02.1.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral dan Terbangunnya Metadata Statistik Sektoral				8 dokumen	0 dokumen	231.096.250,00	231.096.250,00	222.096.250,00	-9.000.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Perangkat Daerah Pemda DIY, kabupaten/kota, instansi vertikal di DIY		424.831.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH										
	2.20.02.1.01.0011	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia																												
			Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata				8 Dokumen	0 Dokumen	231.096.250,00	0,00	0,00	-231.096.250,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH											
2.	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				95,44 angka	0 angka	19.395.223.511,00	19.339.206.389,00	18.440.719.507,00	4.134.254.847,00						23.529.478.358,00												
	5.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya penerimaan gaji dan Tunjangan ASN; Penyusunan Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD; Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Trivulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Trivulanan/Semesteran SKPD				1 Dokumen /lap/orang/b ulan	0 Dokumen /lap/orang/b ulan	16.575.699.586,00	16.571.038.464,00	15.850.828.682,00	-724.870.904,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	BPPSD DIY		19.262.849.358,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH										
	5.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																												
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	0 Dokumen	3.780.000,00	0,00	0,00	-3.780.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH											
	5.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya penyusunan Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				6 laporan	0 laporan	20.080.950,00	12.539.950,00	12.539.950,00	-7.541.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	BPPSD DIY		26.674.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH										
	5.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																												
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				6 Laporan	0 Laporan	7.541.000,00	0,00	0,00	-7.541.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Peralatan Rumah Tangga, Barang Cetak dan Penggandaan, Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan dan Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD dan Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				10 paket/dokumen/laporan	0 paket/dokumen/laporan	890.954.325,00	829.078.425,00	567.225.325,00	-323.729.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	BPPSD DIY		1.499.638.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					1 Paket	0 Paket	1.594.000,00	0,00	0,00	-1.594.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					1 Paket	0 Paket	17.002.700,00	0,00	0,00	-17.002.700,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					1 Paket	0 Paket	5.097.000,00	0,00	0,00	-5.097.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					2 Paket	0 Paket	6.125.000,00	0,00	0,00	-6.125.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan					2 Dokumen	0 Dokumen	4.173.000,00	0,00	0,00	-4.173.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					3 Laporan	0 Laporan	95.136.000,00	0,00	0,00	-95.136.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Mebel, dan Peralatan dan Mesin Lainnya, dan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				1 unit	0 unit	678.951.000,00	678.951.000,00	694.700.885,00	15.749.885,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	BPPSD DIY		830.982.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					1 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dan Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.				4 laporan	0 laporan	527.272.000,00	575.890.900,00	575.890.900,00	48.618.900,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	BPPSD DIY		683.772.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					1 Laporan	0 Laporan	930.000,00	0,00	0,00	-930.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					1 Laporan	0 Laporan	5.290.000,00	0,00	0,00	-5.290.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					1 Laporan	0 Laporan	5.719.000,00	0,00	0,00	-5.719.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					1 Laporan	0 Laporan	51.922.000,00	0,00	0,00	-51.922.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGAB JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan dan pembayaran pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, pemeliharaan dan pembayaran pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, pemeliharaan dan pembayaran perizinan Alat Besar, pemeliharaan mebel, pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dan pemeliharaan/rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.				23 unit	0 unit	598.027.200,00	567.767.200,00	656.714.315,00	58.687.115,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	BPPSD DIY		920.088.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	0 Unit	22.680.000,00	0,00	0,00	-22.680.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				2 Unit	0 Unit	638.000,00	0,00	0,00	-638.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	0 Unit	8.641.000,00	0,00	0,00	-8.641.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0 Unit	8.000.000,00	0,00	0,00	-8.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				6 Unit	0 Unit	3.070.000,00	0,00	0,00	-3.070.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	<b>5</b>	<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>							<b>22.235.155.846,00</b>	<b>22.335.406.424,00</b>	<b>21.142.005.042,00</b>	<b>-1.093.150.804,00</b>							<b>29.167.362.358,00</b>	
	<b>5.05</b>	<b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>							<b>198.982.900,00</b>	<b>213.982.900,00</b>	<b>202.462.900,00</b>	<b>3.480.000,00</b>							<b>456.036.000,00</b>	
1.	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	"Persentase hasil kelibngan yang ditindaklanjuti untuk mendukung pembangunan daerah " Persentase hasil kelibngan yang ditindaklanjuti untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah Persentase inovasi daerah yang memenuhi kriteria kompetisi inovasi tingkat nasional				60 % 75 % N/A % %	N/A 0 % 60 % %	198.982.900,00	213.982.900,00	202.462.900,00	257.053.100,00							456.036.000,00	
	5.05.02.1.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Terlaksananya penyusunan Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial				1 dokumen	0 dokumen	42.909.100,00	42.909.100,00	34.989.100,00	-7.920.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Perangkat Daerah Pemda DIY, kabupaten/kota, instansi vertikal di DIY		197.115.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.1.02.0001	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial				1 Dokumen	0 Dokumen	42.909.100,00	0,00	0,00	-42.909.100,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.1.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Terlaksananya Penyusunan Laporan Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi				5 Laporan	0 Laporan	156.073.800,00	171.073.800,00	167.473.800,00	11.400.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Perangkat Daerah Pemda DIY, kabupaten/kota, instansi vertikal di DIY		258.921.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.1.04.0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi				5 Dokumen	0 Dokumen	156.073.800,00	0,00	0,00	-156.073.800,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
		<b>BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET</b>							<b>1.149.134.838.528,00</b>	<b>1.016.082.490.288,00</b>	<b>974.336.290.687,00</b>	<b>-174.798.547.841,00</b>							<b>114.249.062.774,00</b>	
	<b>5</b>	<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>							<b>1.149.134.838.528,00</b>	<b>1.016.082.490.288,00</b>	<b>974.336.290.687,00</b>	<b>-174.798.547.841,00</b>							<b>114.249.062.774,00</b>	
	<b>5.02</b>	<b>KEUANGAN</b>							<b>1.149.134.838.528,00</b>	<b>1.016.082.490.288,00</b>	<b>974.336.290.687,00</b>	<b>-174.798.547.841,00</b>							<b>114.249.062.774,00</b>	
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				85,95 angka	85,95 angka	108.091.495.522,00	92.291.616.882,00	87.435.579.930,00	-6.975.905.498,00							101.115.590.024,00	
	5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD, serta Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100 %	100 %	9.593.500,00	9.593.500,00	7.638.500,00	-1.955.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	BPKA DIY dan KPPD di Kabupaten/Kota se DIY		9.598.900,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	3.994.400,00	3.994.400,00	2.620.000,00	-1.374.400,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			3.998.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.02.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD					2 Dokumen	2 Dokumen	3.998.600,00	3.998.600,00	3.450.500,00	-548.100,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			3.999.900,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					7 Laporan	7 Laporan	1.600.500,00	1.600.500,00	1.568.000,00	-32.500,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			1.601.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN; Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD; Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD serta Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				100 %	100 %	91.979.040.122,00	76.208.561.482,00	71.458.083.257,00	-20.520.956.865,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	BPKA DIY dan KPPD di Kabupaten/Kota se DIY		84.368.914.154,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					240 Orang/ Bulan	240 Orang/ Bulan	91.903.020.622,00	76.132.541.982,00	71.382.063.757,00	-20.520.956.865,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBYAKTIAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			84.182.746.394,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					12 Dokumen	12 Dokumen	19.320.000,00	19.320.000,00	19.320.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			1.520.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					1 Laporan	1 Laporan	4.999.800,00	4.999.800,00	4.999.800,00	0,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			4.999.800,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD					1 Laporan	1 Laporan	2.999.700,00	2.999.700,00	2.999.700,00	0,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			2.999.700,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				100 %	100 %	88.200.000,00	88.200.000,00	88.200.000,00	0,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	BPKA DIY dan KPPD di Kabupaten/Kota se DIY		62.348.300,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					12 Laporan	12 Laporan	34.100.000,00	34.100.000,00	34.100.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			1.400.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi, dan Pelaksanaan Kinerja SKPD				100 %	100 %	6.233.000,00	6.233.000,00	5.483.000,00	-750.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	BPKA DIY dan KPPD di Kabupaten/Kota se DIY		6.233.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai					12 Dokumen	12 Dokumen	6.233.000,00	6.233.000,00	5.483.000,00	-750.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			6.233.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; Penyediaan Peralatan Rumah Tangga; Penyediaan Bahan Logistik Kantor; Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan; Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD; Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				100 %	100 %	990.620.400,00	990.620.400,00	917.185.350,00	-73.435.050,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	BPKA DIY dan KPPD di Kabupaten/Kota se DIY		1.058.431.200,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					1 Paket	1 Paket	9.558.600,00	9.558.600,00	9.558.600,00	0,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			9.558.600,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					4 Paket	4 Paket	128.478.600,00	128.478.600,00	128.473.600,00	-5.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			130.338.600,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					4 Paket	4 Paket	128.478.600,00	128.478.600,00	128.473.600,00	-5.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			130.338.600,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	13.769.000,00	13.769.000,00	13.769.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN PAD	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			15.769.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET	
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	34.365.000,00	34.365.000,00	34.364.850,00	-150,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			36.215.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET	
	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				3 Dokumen	3 Dokumen	10.380.000,00	10.380.000,00	10.356.000,00	-24.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			12.144.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET	
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	333.958.000,00	333.958.000,00	203.860.000,00	-130.098.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			333.958.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET	
	5.02.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				12000 Dokumen	12000 Dokumen	101.006.000,00	101.006.000,00	172.746.000,00	71.740.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			101.606.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET	
	5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				-	100 %	399.815.000,00	399.815.000,00	677.343.523,00	277.528.523,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	BPKA DIY dan KPPD di Kabupaten/Kota se DIY		457.781.800,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET	
	5.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				6 Unit	39 Unit	148.690.000,00	148.690.000,00	189.320.000,00	40.630.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			111.470.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET	
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik, Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor serta Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				-	100 %	11.112.233.600,00	11.082.833.600,00	10.594.405.100,00	-517.828.500,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	BPKA DIY dan KPPD di Kabupaten/Kota se DIY		11.293.809.820,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET	
	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	16.250.000,00	16.250.000,00	16.250.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			16.250.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET	
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	918.880.000,00	918.880.000,00	918.880.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			918.880.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET	
	5.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	82.760.000,00	82.760.000,00	82.760.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			82.760.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET	
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	626.587.000,00	597.187.000,00	578.388.000,00	-48.199.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			578.903.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET	
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan; Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Operasional Dinas atau Lapangan; Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya; Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				100 %	100 %	3.505.759.900,00	3.505.759.900,00	3.687.241.200,00	181.481.300,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	BPKA DIY dan KPPD di Kabupaten/Kota se DIY		3.858.472.850,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET	
	5.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	18.726.000,00	18.726.000,00	18.726.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			18.726.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET	
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				17 Unit	17 Unit	221.007.200,00	221.007.200,00	221.007.200,00	0,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			221.007.200,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET	
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				85 Unit	85 Unit	55.834.000,00	55.834.000,00	55.834.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			55.834.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET	
	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	4 Unit	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			100.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
2.	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan				100 %	100 %	1.032.728.487.406,00	915.041.617.806,00	877.794.599.107,00	-1.029.210.076.006,00							3.518.411.400,00	
	5.02.02.1.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS; Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS; Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA SKPD; Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD; Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD serta Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran				100 %	100 %	2.339.205.500,00	2.339.205.500,00	1.091.794.500,00	-1.247.411.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemangku kepentingan terkait dan masyarakat di DIY		2.020.045.500,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.02.1.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun				4 Dokumen	4 Dokumen	39.231.000,00	39.231.000,00	34.456.000,00	-4.775.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			288.631.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.02.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun				4 Dokumen	4 Dokumen	33.626.000,00	33.626.000,00	29.716.000,00	-3.910.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			282.526.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.02.1.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi				30 Dokumen	31 Dokumen	728.866.000,00	728.866.000,00	306.766.000,00	-422.100.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PAJAK ROKOK	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			256.566.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.02.1.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD				2 Dokumen	2 Dokumen	1.432.875.750,00	1.432.875.750,00	630.528.500,00	-802.347.250,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PAJAK ROKOK	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			522.365.750,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.02.1.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD				6 Dokumen	6 Dokumen	94.981.750,00	94.981.750,00	80.703.000,00	-14.278.750,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			658.981.750,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.02.1.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran				3 Dokumen	3 Dokumen	9.625.000,00	9.625.000,00	9.625.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			10.975.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.02.1.02	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota; Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota; Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan				100 %	100 %	17.723.300,00	17.723.300,00	16.823.300,00	-900.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemangku kepentingan terkait dan masyarakat di DIY		238.224.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.02.1.02.0002	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota				5 Laporan	5 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			78.500.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.02.1.02.0003	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota				5 Laporan	5 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			78.500.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.02.1.02.0004	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota				5 Laporan	5 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			78.500.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.02.1.02.0012	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	2.723.300,00	2.723.300,00	1.823.300,00	-900.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			2.724.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.02.1.03	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) serta Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait				100 %	100 %	74.766.000,00	74.766.000,00	70.654.000,00	-4.112.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemangku kepentingan terkait dan masyarakat di DIY		130.286.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.02.1.03.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)																		
			Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)				2 Laporan	2 Laporan	15.990.000,00	15.990.000,00	15.990.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			69.410.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.02.1.03.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait																		
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait				8000 Dokumen	8000 Dokumen	58.776.000,00	58.776.000,00	54.664.000,00	-4.112.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			60.876.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.02.1.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Laporan, Penyusunan Raperda dan RaPerkada Pertanggungjawaban APBD; Konsolidasi LK SKPD, BLUD dan LK Pemda; Penyusunan Tradakanjuit terhadap LHP BPK; Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelesaian TPTKR; Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintahan Daerah; Penyusunan Sisdur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemda; Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD				100 %	100 %	259.144.500,00	259.144.500,00	205.912.500,00	-53.232.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemangku kepentingan terkait dan masyarakat di DIY		265.532.900,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.02.1.04.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran																		
			Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran				12 Laporan	12 Laporan	8.422.600,00	8.422.600,00	7.972.600,00	-450.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			8.423.700,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.02.1.04.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi				3 Laporan	3 Laporan	17.326.100,00	17.326.100,00	17.326.100,00	0,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			19.726.500,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
5.02.02.1.04.0005		Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi																		
			Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi				2 Dokumen	2 Dokumen	51.502.000,00	51.502.000,00	50.432.000,00	-1.070.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			54.202.800,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
5.02.02.1.04.0006		Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD																		
			Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.524.600,00	3.524.600,00	3.524.600,00	0,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			3.694.900,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
5.02.02.1.04.0007		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	4.639.000,00	4.639.000,00	3.489.000,00	-1.150.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			4.753.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
5.02.02.1.04.0010		Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	53.305.300,00	53.305.300,00	2.743.300,00	-50.562.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			53.306.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
5.02.02.1.04.0011		Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi				120 Orang	120 Orang	8.974.900,00	8.974.900,00	8.974.900,00	0,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			9.426.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
5.02.02.1.04.0012		Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi																		
			Jumlah BLUD Provinsi yang Dibina				16 Lembaga	27 Lembaga	111.450.000,00	111.450.000,00	111.450.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			112.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
5.02.02.1.05		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Terlaksananya Analisis Investasi Pemerintah Daerah, Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan, Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak dan Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi				-	100 %	1.030.037.648.106,00	912.350.778.506,00	876.409.414.807,00	-153.628.233.299,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemangku kepentingan terkait dan masyarakat di DIY		864.323.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
5.02.02.1.05.0002		Analisis Investasi Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah				6 Laporan	9 Laporan	827.423.000,00	827.423.000,00	1.124.143.000,00	296.720.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PAJAK ROKOK	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			864.323.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
5.02.02.1.05.0008		Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan																		
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan				5 Laporan	5 Laporan	593.814.094.446,00	442.558.055.970,00	340.265.476.712,00	-253.548.617.734,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	DANA KEISTIMEWAAN DIY PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
5.02.02.1.05.0009		Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak				1 Laporan	1 Laporan	15.000.000.000,00	31.760.589.370,00	23.134.539.170,00	8.134.539.170,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
5.02.02.1.05.0010		Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi				1 Laporan	1 Laporan	420.396.130.660,00	437.204.710.166,00	511.885.255.925,00	91.489.125.265,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
3.	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Pengelolaan barang milik daerah yang sesuai prosedur				100 %	100 %	2.805.994.900,00	2.835.394.900,00	3.709.841.900,00	142.488.000,00							2.948.482.900,00	
	5.02.03.1.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Penyusunan Standar Harga, Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah, Penatausahaan Barang Milik Daerah, Pengamanan Barang Milik Daerah, Penilaian Barang Milik Daerah serta Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah				100 %	100 %	2.805.994.900,00	2.835.394.900,00	3.709.841.900,00	903.847.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemangku kepentingan terkait dan masyarakat di DIY		2.948.482.900,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.03.1.01.0001	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	331.813.000,00	331.813.000,00	317.064.000,00	-14.749.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PAJAK ROKOK PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan		552.851.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET	
	5.02.03.1.01.0003	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	82.581.600,00	82.581.600,00	82.221.600,00	-360.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan		82.581.600,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET	
	5.02.03.1.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah				1 Laporan	1 Laporan	246.917.000,00	246.917.000,00	239.897.000,00	-7.020.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan		261.917.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET	
	5.02.03.1.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah				2 Laporan	3 Laporan	1.456.990.800,00	1.456.990.800,00	2.386.066.800,00	929.076.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PAJAK ROKOK PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan		1.468.390.800,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET	
	5.02.03.1.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah				3 Laporan	3 Laporan	207.079.500,00	207.079.500,00	205.879.500,00	-1.200.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan		210.799.500,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET	
	5.02.03.1.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	480.613.000,00	510.013.000,00	478.713.000,00	-1.900.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan		371.943.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET	
4.	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase kontribusi Pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah				51.94 %	51.94 %	5.508.860.700,00	5.913.860.700,00	5.396.269.750,00	1.157.717.750,00							6.666.578.450,00	
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Terlaksananya Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah, Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah, Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah, Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah				100 %	100 %	5.508.860.700,00	5.913.860.700,00	5.396.269.750,00	-112.590.950,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemangku kepentingan terkait dan masyarakat di DIY		6.666.578.450,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.04.1.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	2.716.454.400,00	2.716.454.400,00	2.708.364.400,00	-8.090.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN HIBAH DARI LE MBAGA/ORGANISASI SWASTA DALAM NEGERI	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan		2.867.207.400,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET	
	5.02.04.1.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pengembangan Pajak daerah dan Kebijakan Pajak Daerah				5 Laporan	5 Laporan	37.171.000,00	37.171.000,00	19.467.100,00	-17.703.900,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan		51.186.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET	
	5.02.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				1 Laporan	1 Laporan	336.282.000,00	336.282.000,00	157.402.000,00	-178.880.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			336.282.050,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET	
	5.02.04.1.01.0013	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah																			
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				12 Laporan	12 Laporan	57.670.000,00	57.670.000,00	32.710.000,00	-24.960.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			57.670.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET	
	5.02.04.1.01.0014	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah																			
			Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah				2 Laporan	2 Laporan	37.149.950,00	37.149.950,00	26.620.000,00	-10.529.950,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			37.149.950,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET	
		<b>KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KOTA YOGYAKARTA</b>																			
									1.149.134.838.528,00	1.016.082.490.288,00	974.336.290.687,00	-174.798.547.841,00							114.249.062.774,00		
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							1.149.134.838.528,00	1.016.082.490.288,00	974.336.290.687,00	-174.798.547.841,00							114.249.062.774,00		
	5.02	KEUANGAN							1.149.134.838.528,00	1.016.082.490.288,00	974.336.290.687,00	-174.798.547.841,00							114.249.062.774,00		
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				85,95 Nilai	85,95 angka	108.091.495.522,00	92.291.616.882,00	87.435.579.930,00	-6.975.905.498,00							101.115.590.024,00		
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				100 %	100 %	91.979.040.122,00	76.208.561.482,00	71.458.083.257,00	-20.520.956.865,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	BPKA DIY dan KPPD di Kabupaten/kota se-DIY		84.368.914.154,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET	
	5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	9.740.000,00	9.740.000,00	9.740.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			31.595.300,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET	
	5.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				100 %	100 %	88.200.000,00	88.200.000,00	88.200.000,00	0,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	BPKA DIY dan KPPD di Kabupaten/kota se-DIY		62.348.300,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET	
	5.02.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																			
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	10.820.000,00	10.820.000,00	10.820.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			10.607.300,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET	
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; Penyediaan Peralatan Rumah Tangga; Penyediaan Bahan Logistik Kantor; Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan; Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD; Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD; serta Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				100 %	100 %	990.620.400,00	990.620.400,00	917.185.350,00	-73.435.050,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	BPKA DIY, KPPD di Kabupaten/kota se-DIY, serta pemangku kepentingan terkait.		1.058.431.200,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET	
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.643.000,00	5.643.000,00	5.642.800,00	-200,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			8.957.300,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET	
	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	12.699.500,00	12.699.500,00	12.699.500,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			13.973.630,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET	
	5.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																			
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	3.799.000,00	3.799.000,00	3.799.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			4.178.900,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET	
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	4.788.000,00	4.788.000,00	4.788.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			5.266.800,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET	
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	25.781.700,00	25.781.700,00	20.006.500,00	-5.775.200,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			28.359.870,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET	
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			1.980.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
5.02.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				100 %	100 %	399.815.000,00	399.815.000,00	677.343.523,00	277.528.523,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	BPKA DIY, KPPD di Kabupaten/kota se-DIY, serta pemangku kepentingan terkait.		457.781.800,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
5.02.01.1.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				8 Unit	8 Unit	58.970.000,00	58.970.000,00	58.970.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			64.867.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
5.02.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat; Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik; Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor serta Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				100 %	100 %	11.112.233.600,00	11.082.833.600,00	10.594.405.100,00	-517.828.500,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	BPKA DIY, KPPD di Kabupaten/kota se-DIY, serta pemangku kepentingan terkait.		11.293.809.820,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
5.02.01.1.08.0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			550.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
5.02.01.1.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	445.501.000,00	445.501.000,00	445.500.500,00	-500,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			490.051.100,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
5.02.01.1.08.0003		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	32.051.000,00	32.051.000,00	32.051.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			38.612.200,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
5.02.01.1.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	925.632.000,00	925.632.000,00	854.568.000,00	-71.064.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			938.572.800,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
5.02.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan; Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya; Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya serta Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan Lainnya				100 %	100 %	3.505.759.900,00	3.505.759.900,00	3.687.241.200,00	181.481.300,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	BPKA DIY, KPPD di Kabupaten/kota se-DIY, serta pemangku kepentingan terkait.		3.858.472.850,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
5.02.01.1.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Periznannya				7 Unit	7 Unit	98.994.500,00	98.994.500,00	98.994.500,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			109.091.950,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
5.02.01.1.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				21 Unit	21 Unit	164.880.000,00	164.880.000,00	164.880.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			181.368.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
5.02.01.1.09.0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			49.500.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
5.02.01.1.09.0010		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				47 Unit	47 Unit	173.233.000,00	173.233.000,00	173.233.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			190.556.300,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
2.	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah				-	51,94 %	5.508.860.700,00	5.913.860.700,00	5.396.269.750,00	1.157.717.750,00							6.666.578.450,00	
5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Terlaksananya Pendataan dan Pendaftaran Obyek Pajak Daerah dan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				-	100 %	5.508.860.700,00	5.913.860.700,00	5.396.269.750,00	-112.590.950,00				Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemangku kepentingan terkait dan masyarakat di DIY		6.666.578.450,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
5.02.04.1.01.0005		Pendataan dan Pendaftaran Obyek Pajak Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Obyek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				12 Laporan	12 Laporan	42.214.500,00	42.214.500,00	26.374.400,00	-15.840.100,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			204.835.950,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
5.02.04.1.01.0008		Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah																		
			Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.				12 Laporan	12 Laporan	164.456.500,00	254.456.500,00	254.456.500,00	90.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN HIBAH DARI LE MBAGA/ORGAN ISASI SWASTA DALAM NEGERI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			209.557.150,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
			<b>KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DI DI KABUPATEN BANTUL</b>								1.149.134.838.528,00	1.016.082.490.288,00	974.336.290.687,00	-174.798.547.841,00					114.249.062.774,00	
5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							1.149.134.838.528,00	1.016.082.490.288,00	974.336.290.687,00	-174.798.547.841,00							114.249.062.774,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.02	KEUANGAN							1.149.134.838.528,00	1.016.082.490.288,00	974.336.290.687,00	-174.798.547.841,00							114.249.062.774,00	
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				-	85,95 angka	108.091.495.522,00	92.291.616.882,00	87.435.579.930,00	-6.975.905.498,00							101.115.590.024,00	
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				-	100 %	91.979.040.122,00	76.208.561.482,00	71.458.083.257,00	-20.520.956.865,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	BPKA DIY dan KPPD di Kabupaten/kota se-DIY		84.368.914.154,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	9.740.000,00	9.740.000,00	9.740.000,00	0,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			37.808.760,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				100 %	100 %	88.200.000,00	88.200.000,00	88.200.000,00	0,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	BPKA DIY dan KPPD di Kabupaten/kota se-DIY		62.348.300,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	10.820.000,00	10.820.000,00	10.820.000,00	0,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			12.596.800,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; Penyediaan Peralatan Rumah Tangga; Penyediaan Bahan Logistik Kantor; Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan; Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100 %	100 %	990.620.400,00	990.620.400,00	917.185.350,00	-73.435.050,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	BPKA DIY, KPPD di Kabupaten/kota se-DIY, serta pemangku kepentingan terkait.		1.058.431.200,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	11.060.000,00	11.060.000,00	21.268.000,00	10.208.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			12.166.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	41.816.000,00	41.816.000,00	41.816.000,00	0,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			46.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	28.512.000,00	28.512.000,00	28.512.000,00	0,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			31.364.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	18.715.000,00	18.715.000,00	13.700.000,00	-5.015.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			20.586.500,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	12.641.500,00	12.641.500,00	11.370.000,00	-1.271.500,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			14.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	3.528.000,00	3.528.000,00	3.528.000,00	0,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			5.822.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	7.500.000,00	7.500.000,00	3.500.000,00	-4.000.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			10.890.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				100 %	100 %	399.815.000,00	399.815.000,00	677.343.523,00	277.528.523,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	BPKA DIY, KPPD di Kabupaten/kota se-DIY, serta pemangku kepentingan terkait.		457.781.800,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	20 Unit	48.900.000,00	48.900.000,00	82.414.860,00	33.514.860,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			58.512.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				-	1 Unit	0,00	0,00	145.803.663,00	145.803.663,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Bantul, Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik; Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor serta Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				100 %	100 %	11.112.233.600,00	11.082.833.600,00	10.594.405.100,00	-517.828.500,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	BPKA DIY, KPPD di Kabupaten/kota se-DIY, serta pemangku kepentingan terkait.		11.293.809.820,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	776.176.600,00	776.176.600,00	776.175.600,00	-1.000,00	Kab. Bantul, Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			826.798.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	125.258.000,00	125.258.000,00	113.306.000,00	-11.952.000,00	Kab. Bantul, Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			137.783.800,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1.793.169.000,00	1.793.169.000,00	1.656.156.000,00	-137.013.000,00	Kab. Bantul, Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			1.736.185.500,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan /Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Operasional Dinas atau Lapangan; Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya; Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya serta Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan Lainnya				100 %	100 %	3.505.759.900,00	3.505.759.900,00	3.687.241.200,00	181.481.300,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	BPKA DIY, KPPD di Kabupaten/kota se-DIY, serta pemangku kepentingan terkait.		3.858.472.850,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Periznannya				9 Unit	9 Unit	165.729.300,00	165.729.300,00	135.329.300,00	-30.400.000,00	Kab. Bantul, Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			174.341.300,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				237 Unit	237 Unit	321.230.000,00	321.230.000,00	321.230.000,00	0,00	Kab. Bantul, Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			355.120.500,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	5 Unit	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	Kab. Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			150.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				32 Unit	32 Unit	152.095.000,00	152.095.000,00	152.095.000,00	0,00	Kab. Bantul, Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			159.700.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
2.	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah				51,94 %	51,94 %	5.508.860.700,00	5.913.860.700,00	5.396.269.750,00	1.157.717.750,00							6.666.578.450,00	
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Terlaksananya Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, dan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				100 %	100 %	5.508.860.700,00	5.913.860.700,00	5.396.269.750,00	-112.590.950,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemangku kepentingan terkait dan masyarakat di DIY		6.666.578.450,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				12 Laporan	12 Laporan	75.840.000,00	75.840.000,00	18.780.000,00	-57.060.000,00	Kab. Bantul, Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			283.756.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.				12 Laporan	12 Laporan	520.731.000,00	655.731.000,00	609.104.000,00	88.373.000,00	Kab. Bantul, Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) HIBAH DARI LE MBACA/ORGANISASI SWASTA DALAM NEGERI	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			564.050.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
		<b>KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN GUNUNG KIDUL</b>							<b>1.149.134.838.528,00</b>	<b>1.016.082.490.288,00</b>	<b>974.336.290.687,00</b>	<b>-174.798.547.841,00</b>							<b>114.249.062.774,00</b>	
	5	<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>							<b>1.149.134.838.528,00</b>	<b>1.016.082.490.288,00</b>	<b>974.336.290.687,00</b>	<b>-174.798.547.841,00</b>							<b>114.249.062.774,00</b>	
	5.02	<b>KEUANGAN</b>							<b>1.149.134.838.528,00</b>	<b>1.016.082.490.288,00</b>	<b>974.336.290.687,00</b>	<b>-174.798.547.841,00</b>							<b>114.249.062.774,00</b>	
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100 Persen	85,95 angka	108.091.495.522,00	92.291.616.882,00	87.435.579.930,00	-6.975.905.498,00							101.115.590.024,00	
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				100 %	100 %	91.979.040.122,00	76.208.561.482,00	71.458.083.257,00	-20.520.956.865,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	BPKA DIY dan KPPD di Kabupaten/Kota se DIY		84.368.914.154,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	9.740.000,00	9.740.000,00	9.740.000,00	0,00	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			33.198.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				100 %	100 %	88.200.000,00	88.200.000,00	88.200.000,00	0,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	BPKA DIY dan KPPD di Kabupaten/Kota se DIY		62.348.300,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.02.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					12 Laporan	12 Laporan	10.820.000,00	10.820.000,00	10.820.000,00	0,00	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan		11.352.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET	
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; Penyediaan Peralatan Rumah Tangga; Penyediaan Bahan Logistik Kantor; Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan; Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100 %	100 %	990.620.400,00	990.620.400,00	917.185.350,00	-73.435.050,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	BPKA DIY, KPPD di Kabupaten/kota se-DIY, serta pemangku kepentingan terkait.	1.058.431.200,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET	
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.885.000,00	5.885.000,00	5.885.000,00	0,00	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan		6.473.500,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET	
	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	10.898.000,00	10.898.000,00	10.898.000,00	0,00	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan		12.079.100,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET	
	5.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.950.000,00	3.950.000,00	3.950.000,00	0,00	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan		4.345.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET	
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	11.100.000,00	11.100.000,00	6.060.000,00	-5.040.000,00	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan		12.210.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET	
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	3.793.000,00	3.793.000,00	3.793.000,00	0,00	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan		4.887.300,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET	
	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	1.764.000,00	1.764.000,00	1.764.000,00	0,00	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan		1.940.400,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET	
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	7.920.000,00	7.920.000,00	4.320.000,00	-3.600.000,00	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan		8.712.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET	
	5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				100 Persen	100 Persen	399.815.000,00	399.815.000,00	677.343.523,00	277.528.523,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	BPKA DIY dan KPPD di Kabupaten/Kota se DIY	457.781.800,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET	
	5.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				6 Unit	6 Unit	65.400.000,00	65.400.000,00	65.400.000,00	0,00	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan		71.940.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET	
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat; Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik; Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor serta Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				100 Persen	100 Persen	11.112.233.600,00	11.082.833.600,00	10.594.405.100,00	-517.828.500,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	BPKA DIY, KPPD di Kabupaten/kota se-DIY, serta pemangku kepentingan terkait.	11.293.809.820,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET	
	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	1.638.000,00	1.638.000,00	1.319.000,00	-319.000,00	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan		1.801.800,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET	
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	442.441.200,00	442.441.200,00	442.441.200,00	0,00	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan		486.685.320,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET	
	5.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	39.650.000,00	39.650.000,00	39.650.000,00	0,00	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan		43.615.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET	
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	679.455.000,00	679.455.000,00	627.420.000,00	-52.035.000,00	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			694.976.700,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan, Kendaraan Operasional Dinas atau Lapangan; Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya; Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya serta Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan Lainnya				100 Persen	100 Persen	3.505.759.900,00	3.505.759.900,00	3.687.241.200,00	181.481.300,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	BPKA DIY, KPPD di Kabupaten/kota se-DIY, serta pemangku kepentingan terkait.		3.858.472.850,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				7 Unit	7 Unit	246.393.000,00	246.393.000,00	246.393.000,00	0,00	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			271.208.300,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				45 Unit	45 Unit	225.096.000,00	225.096.000,00	225.096.000,00	0,00	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			247.605.600,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	70.500.000,00	70.500.000,00	185.386.300,00	114.886.300,00	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			77.550.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				66 Unit	66 Unit	37.100.000,00	37.100.000,00	37.100.000,00	0,00	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			40.810.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
2.	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase kontribusi Pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah				51.94 %	51.94 %	5.508.860.700,00	5.913.860.700,00	5.396.269.750,00	1.157.717.750,00							6.666.578.450,00	
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Terlaksananya Pendaftaran Obyek Pajak Daerah dan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				100 %	100 %	5.508.860.700,00	5.913.860.700,00	5.396.269.750,00	-112.590.950,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemangku kepentingan terkait dan masyarakat di DIY		6.666.578.450,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				12 Laporan	12 Laporan	55.261.000,00	55.261.000,00	23.536.000,00	-31.725.000,00	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			227.987.100,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah																		
			Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.				12 Laporan	12 Laporan	338.584.500,00	361.084.500,00	257.544.500,00	-81.040.000,00	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			364.451.450,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
		<b>KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN KULONPROGO</b>							<b>1.149.134.838.528,00</b>	<b>1.016.082.490.288,00</b>	<b>974.336.290.687,00</b>	<b>-174.798.547.841,00</b>							<b>114.249.062.774,00</b>	
5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							1.149.134.838.528,00	1.016.082.490.288,00	974.336.290.687,00	-174.798.547.841,00							114.249.062.774,00	
	5.02	KEUANGAN							1.149.134.838.528,00	1.016.082.490.288,00	974.336.290.687,00	-174.798.547.841,00							114.249.062.774,00	
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				-	85,95 angka	108.091.495.522,00	92.291.616.882,00	87.435.579.930,00	-6.975.905.498,00							101.115.590.024,00	
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				100 %	100 %	91.979.040.122,00	76.208.561.482,00	71.458.083.257,00	-20.520.956.865,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	BPKA DIY dan KPPD di Kabupaten/Kota se DIY		84.368.914.154,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	9.740.000,00	9.740.000,00	9.740.000,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			35.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				-	100 %	88.200.000,00	88.200.000,00	88.200.000,00	0,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	BPKA DIY dan KPPD di Kabupaten/Kota se DIY		62.348.300,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	10.820.000,00	10.820.000,00	10.820.000,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			15.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; Penyediaan Peralatan Rumah Tangga; Penyediaan Bahan Logistik Kantor; Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan; Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100 Persen	100 Persen	990.620.400,00	990.620.400,00	917.185.350,00	-73.435.050,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	BPKA DIY, KPPD di Kabupaten/kota se-DIY, serta pemangku kepentingan terkait.		1.058.431.200,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	15.842.000,00	15.842.000,00	15.842.000,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan		20.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET	
	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	12.211.000,00	12.211.000,00	11.657.000,00	-554.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan		15.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET	
	5.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	12.611.600,00	12.611.600,00	12.611.600,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan		15.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET	
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	6.804.000,00	6.804.000,00	6.804.000,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan		15.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET	
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.982.000,00	10.982.000,00	10.982.000,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan		15.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET	
	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	3.528.000,00	3.528.000,00	3.528.000,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan		5.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET	
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	7.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan		10.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET	
	5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dan Pengadaan Sarana Prasarana Gedung kantor atau Bangunan Lainnya				-	100 %	399.815.000,00	399.815.000,00	677.343.523,00	277.528.523,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	BPKA DIY, KPPD di Kabupaten/kota se-DIY, serta pemangku kepentingan terkait.		457.781.800,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	5 Unit	38.000.000,00	38.000.000,00	44.380.000,00	6.380.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan		100.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET	
	5.02.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	15.100.000,00	15.100.000,00	15.100.000,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan		25.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET	
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat; Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik; Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor serta Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				100 Persen	100 Persen	11.112.233.600,00	11.082.833.600,00	10.594.405.100,00	-517.828.500,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	BPKA DIY, KPPD di Kabupaten/kota se-DIY, serta pemangku kepentingan terkait.		11.293.809.820,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	960.000,00	960.000,00	960.000,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan		2.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET	
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	626.951.400,00	626.951.400,00	626.951.400,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan		700.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET	
	5.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	53.270.000,00	53.270.000,00	45.590.000,00	-7.680.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan		100.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET	
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	836.029.000,00	836.029.000,00	771.996.000,00	-64.033.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan		800.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Operasional Dinas atau Lapangan; Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya; Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya serta Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan Lainnya				100 Persen	100 Persen	3.505.759.900,00	3.505.759.900,00	3.687.241.200,00	181.481.300,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	BPKA DIY, KPPD di Kabupaten/kota se-DIY, serta pemangku kepentingan terkait.		3.858.472.850,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET	
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				8 Unit	8 Unit	162.252.300,00	162.252.300,00	162.247.300,00	-5.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			200.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET	
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	12 Unit	153.493.000,00	153.493.000,00	153.493.000,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			200.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET	
	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	42.861.700,00	42.861.700,00	67.861.700,00	25.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			60.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET	
	5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				17 Unit	17 Unit	120.256.000,00	120.256.000,00	120.256.000,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			150.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET	
2.	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase kontribusi Pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah				100 Persen	51,94 Persen	5.508.860.700,00	5.913.860.700,00	5.396.269.750,00	1.157.717.750,00							6.666.578.450,00		
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Terlaksananya Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah dan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				100 Persen	100 Persen	5.508.860.700,00	5.913.860.700,00	5.396.269.750,00	-112.590.950,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemangku kepentingan terkait dan masyarakat di DIY		6.666.578.450,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET	
	5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah																			
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				12 Laporan	12 Laporan	68.502.650,00	68.502.650,00	56.757.650,00	-11.745.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			200.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET	
	5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah																			
			Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.				12 Laporan	12 Laporan	295.391.600,00	340.391.600,00	340.391.600,00	45.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			300.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET	
		<b>KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN SLEMAN</b>																			
									<b>1.149.134.838.528,00</b>	<b>1.016.082.490.288,00</b>	<b>974.336.290.687,00</b>	<b>-174.798.547.841,00</b>							<b>114.249.062.774,00</b>		
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							<b>1.149.134.838.528,00</b>	<b>1.016.082.490.288,00</b>	<b>974.336.290.687,00</b>	<b>-174.798.547.841,00</b>							<b>114.249.062.774,00</b>		
	5.02	KEUANGAN							<b>1.149.134.838.528,00</b>	<b>1.016.082.490.288,00</b>	<b>974.336.290.687,00</b>	<b>-174.798.547.841,00</b>							<b>114.249.062.774,00</b>		
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100 Persen	85,95 angka	108.091.495.522,00	92.291.616.882,00	87.435.579.930,00	-6.975.905.498,00							101.115.590.024,00		
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				-	100 %	91.979.040.122,00	76.208.561.482,00	71.458.083.257,00	-20.520.956.865,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	BPKA DIY dan KPPD di Kabupaten/Kota se DIY		84.368.914.154,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET	
	5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	9.740.000,00	9.740.000,00	9.740.000,00	0,00	Kab. Sleman, Sleman, Triharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			39.046.200,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET	
	5.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				100 Persen	100 Persen	88.200.000,00	88.200.000,00	88.200.000,00	0,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	BPKA DIY dan KPPD di Kabupaten/Kota se DIY		62.348.300,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET	
	5.02.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																			
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	10.820.000,00	10.820.000,00	10.820.000,00	0,00	Kab. Sleman, Sleman, Triharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			11.392.200,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya PPenyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				-	100 %	990.620.400,00	990.620.400,00	917.185.350,00	-73.435.050,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	BPKA DIY, KPPD di Kabupaten/kota se-DIY, serta pemangku kepentingan terkait.		1.058.431.200,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	25.612.000,00	25.612.000,00	25.612.000,00	0,00	Kab. Sleman, Sleman, Triharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			26.892.600,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	26.712.900,00	26.712.900,00	26.712.900,00	0,00	Kab. Sleman, Sleman, Triharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			28.048.600,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.185.000,00	2.185.000,00	2.185.000,00	0,00	Kab. Sleman, Sleman, Triharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			2.294.300,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	5.079.000,00	5.079.000,00	5.079.000,00	0,00	Kab. Sleman, Sleman, Triharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			5.333.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	4.404.000,00	4.404.000,00	4.404.000,00	0,00	Kab. Sleman, Sleman, Triharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			4.624.200,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	2.340.000,00	2.340.000,00	2.340.000,00	0,00	Kab. Sleman, Sleman, Triharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			2.457.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				100 Persen	100 Persen	399.815.000,00	399.815.000,00	677.343.523,00	277.528.523,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	BPKA DIY, KPPD di Kabupaten/kota se-DIY, serta pemangku kepentingan terkait.		457.781.800,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				11 Unit	15 Unit	24.755.000,00	24.755.000,00	75.955.000,00	51.200.000,00	Kab. Sleman, Sleman, Triharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			25.992.800,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat menyurat, Penyediaan jasa komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik, Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				100 Persen	100 Persen	11.112.233.600,00	11.082.833.600,00	10.594.405.100,00	-517.828.500,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	BPKA DIY, KPPD di Kabupaten/kota se-DIY, serta pemangku kepentingan terkait.		11.293.809.820,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	Kab. Sleman, Sleman, Triharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			735.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	980.608.400,00	980.608.400,00	980.608.400,00	0,00	Kab. Sleman, Sleman, Triharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			1.040.138.900,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	69.850.000,00	69.850.000,00	69.850.000,00	0,00	Kab. Sleman, Sleman, Triharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			73.342.500,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1.637.916.000,00	1.637.916.000,00	1.512.384.000,00	-125.532.000,00	Kab. Sleman, Sleman, Triharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			1.585.168.200,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan Lainnya				-	100 %	3.505.759.900,00	3.505.759.900,00	3.687.241.200,00	181.481.300,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	BPKA DIY, KPPD di Kabupaten/kota se-DIY, serta pemangku kepentingan terkait.		3.858.472.850,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				10 Unit	10 Unit	138.835.900,00	138.835.900,00	138.835.900,00	0,00	Kab. Sleman, Sleman, Triharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			146.113.700,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				78 Unit	78 Unit	381.906.000,00	381.906.000,00	381.906.000,00	0,00	Kab. Sleman, Sleman, Triharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			401.001.300,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	71.824.000,00	71.824.000,00	143.824.000,00	72.000.000,00	Kab. Sleman, Sleman, Triharjo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			80.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				7 Unit	7 Unit	208.513.000,00	208.513.000,00	208.513.000,00	0,00	Kab. Sleman, Sleman, Triharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			218.938.700,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
2.	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase kontribusi Pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah				51,94 Persen	51,94 Persen	5.508.860.700,00	5.913.860.700,00	5.396.269.750,00	1.157.717.750,00							6.666.578.450,00	
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Terlaksananya Pendaftaran Obyek Pajak Daerah dan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah Terlaksananya Pendataan dan Pendaftaran Obyek Pajak Daerah dan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				100 %	100 %	5.508.860.700,00	5.913.860.700,00	5.396.269.750,00	-112.590.950,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemangku kepentingan terkait dan masyarakat di DIY		6.666.578.450,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				12 Laporan	12 Laporan	37.379.900,00	37.379.900,00	26.489.900,00	-10.890.000,00	Kab. Sleman, Sleman, Triharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			208.340.900,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah																		
			Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.				12 Laporan	12 Laporan	725.771.700,00	838.271.700,00	838.271.700,00	112.500.000,00	Kab. Sleman, Sleman, Triharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			754.104.500,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
		<b>BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH</b>																		
									<b>26.247.873.601,00</b>	<b>26.345.086.750,00</b>	<b>25.335.236.790,00</b>	<b>-912.636.811,00</b>							<b>40.067.179.472,00</b>	
4		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							997.828.600,00	754.987.000,00	623.416.200,00	-374.412.400,00							1.133.785.000,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							997.828.600,00	754.987.000,00	623.416.200,00	-374.412.400,00							1.133.785.000,00	
1.	4.01.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase pegawai yang meningkat pemahamannya tentang keistimewaan DIY				80 %	80 %	997.828.600,00	754.987.000,00	623.416.200,00	135.956.400,00							1.133.785.000,00	
	4.01.10.5.02	Peningkatan Budaya Pemerintahan	Tercapainya peningkatan implementasi budaya pemerintahan				100 %	100 %	997.828.600,00	754.987.000,00	623.416.200,00	-374.412.400,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	ASN Pemda DIY		1.133.785.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	4.01.10.5.02.0001	Implementasi Budaya Pemerintahan DIY																		
			Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan DIY				2 Dokumen	1 Dokumen	187.411.000,00	138.611.000,00	108.665.000,00	-78.746.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener Kota Yogyakarta, Jetis, Gowongan	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			340.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	4.01.10.5.02.0003	Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan																		
			Jumlah PNS yang Ikut Diklat Keistimewaan				630 Orang	630 Orang	810.417.600,00	616.376.000,00	514.751.200,00	-295.666.400,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			793.785.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							25.250.045.001,00	25.590.099.750,00	24.711.820.590,00	-538.224.411,00							38.933.394.472,00	
	5.03	KEPEGAWAIAN							25.250.045.001,00	25.590.099.750,00	24.711.820.590,00	-538.224.411,00							38.933.394.472,00	
1.	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				86,5 Angka	86,5 Angka	22.272.601.301,00	22.169.820.050,00	21.947.819.990,00	-1.718.027.290,00							20.554.574.011,00	
	5.03.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100 %	100 %	9.085.000,00	9.085.000,00	9.085.000,00	0,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemda DIY, BKD DIY, dan ASN di BKD DIY		188.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Gowongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			140.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	2.385.000,00	2.385.000,00	2.385.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Gowongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			8.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	3 Laporan	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Gowongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			40.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5.03.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				-	100 %	15.675.308.701,00	15.572.794.450,00	15.533.020.390,00	-142.288.311,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemda DIY, BKD DIY, dan ASN di BKD DIY	15.738.574.011,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
5.03.01.1.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				97 Orang/ Bulan	97 Orang/ Bulan	15.651.346.951,00	15.548.832.700,00	15.509.058.640,00	-142.288.311,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener Kota Yogyakarta, Jetis, Gowongan	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBYAKTIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			15.659.574.011,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5.03.01.1.02.0003		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	17.766.200,00	17.766.200,00	17.766.200,00	0,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener Kota Yogyakarta, Jetis, Gowongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			55.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5.03.01.1.02.0005		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2.195.550,00	2.195.550,00	2.195.550,00	0,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener Kota Yogyakarta, Jetis, Gowongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			5.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5.03.01.1.02.0007		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	18 Laporan	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener Kota Yogyakarta, Jetis, Gowongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			19.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5.03.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				100 %	100 %	20.681.000,00	20.681.000,00	20.356.000,00	-325.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemda DIY, BKD DIY, dan ASN di BKD DIY	25.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
5.03.01.1.03.0006		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	20.681.000,00	20.681.000,00	20.356.000,00	-325.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener Kota Yogyakarta, Jetis, Gowongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			25.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5.03.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah				100 %	100 %	355.072.650,00	354.805.650,00	207.452.650,00	-147.620.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemda DIY, BKD DIY, dan ASN di BKD DIY	1.632.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
5.03.01.1.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	19.367.000,00	19.367.000,00	19.367.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener Kota Yogyakarta, Jetis, Gowongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			36.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5.03.01.1.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	20.899.800,00	20.899.800,00	20.899.800,00	0,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener Kota Yogyakarta, Jetis, Gowongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			130.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5.03.01.1.06.0003		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	14.490.000,00	14.490.000,00	12.402.000,00	-2.088.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener Kota Yogyakarta, Jetis, Gowongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			58.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5.03.01.1.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	23.468.850,00	23.468.850,00	23.468.850,00	0,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Kota Yogyakarta, Jetis, Gowongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			88.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5.03.01.1.06.0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				4 Dokumen	4 Dokumen	2.352.000,00	2.352.000,00	2.352.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener Kota Yogyakarta, Jetis, Gowongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			7.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5.03.01.1.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	2 Laporan	274.495.000,00	274.228.000,00	128.963.000,00	-145.532.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			1.313.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5.03.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100 %	100 %	3.722.026.000,00	3.722.026.000,00	3.700.186.000,00	-21.840.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemda DIY, BKD DIY, dan ASN di BKD DIY		650.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5.03.01.1.07.0005		Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.532.680.000,00	2.532.680.000,00	2.532.680.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener Kota Yogyakarta, Jetis, Gowongan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			550.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5.03.01.1.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				74 Unit	74 Unit	979.346.000,00	979.346.000,00	957.506.000,00	-21.840.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener Kota Yogyakarta, Jetis, Gowongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5.03.01.1.07.0011		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	210.000.000,00	210.000.000,00	210.000.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			100.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5.03.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	100 %	2.088.507.150,00	2.088.507.150,00	2.087.922.150,00	-585.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemda DIY, BKD DIY, dan ASN di BKD DIY		1.717.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5.03.01.1.08.0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	17.032.650,00	17.032.650,00	16.447.650,00	-585.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Gowongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			27.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5.03.01.1.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	841.210.500,00	841.210.500,00	841.210.500,00	0,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener Kota Yogyakarta, Jetis, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			490.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5.03.01.1.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	1.230.264.000,00	1.230.264.000,00	1.230.264.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener Kota Yogyakarta, Jetis, Gowongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			1.200.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
5.03.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	100 %	401.920.800,00	401.920.800,00	389.797.800,00	-12.123.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemda DIY, BKD DIY, dan ASN di BKD DIY		604.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
5.03.01.1.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	14.894.000,00	14.894.000,00	14.894.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener Kota Yogyakarta, Jetis, Gowongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			14.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
5.03.01.1.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				11 Unit	11 Unit	194.343.800,00	194.343.800,00	194.343.800,00	0,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener Kota Yogyakarta, Jetis, Gowongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			190.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
5.03.01.1.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				179 Unit	179 Unit	110.283.000,00	110.283.000,00	98.160.000,00	-12.123.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener Kota Yogyakarta, Jetis, Gowongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			300.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
5.03.01.1.09.0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	82.400.000,00	82.400.000,00	82.400.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener Kota Yogyakarta, Jetis, Gowongan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			100.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
2.	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Kompetensi ASN yang Terpetaan Persentase Pemenuhan Kompetensi ASN Persentase Pemenuhan ASN sesuai Formasi Persentase Keterisian Jabatan Nilai Survei Kepuasan dari Pelayanan Kepegawaian Persentase Penyelesaian SK Kenaikan Pangkat dan Pemberhentian PNS Persentase Penilaian Capaian Kinerja ASN Persentase Pemenuhan Pemutakhiran Data ASN				26,18 50 63,61 83,33 84,9 86 91 94,99 % % % % % % % %	26,18 50 63,61 83,33 84,9 86 91 94,99 % % % % % % % %	2.977.443.700,00	3.420.279.700,00	2.764.000.600,00	15.401.376.761,00								18.378.820.461,00	
5.03.02.1.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Terlaksananya Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN				100 %	100 %	522.484.900,00	522.484.900,00	332.532.800,00	-189.952.100,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemda DIY, ASN Pemda DIY dan Masyarakat		5.597.773.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
5.03.02.1.01.0002		Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN																			
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN				2 Dokumen	2 Dokumen	7.432.200,00	7.432.200,00	4.342.200,00	-3.090.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener Kota Yogyakarta, Jetis, Gowongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			145.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
5.03.02.1.01.0003		Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK																			
			Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK				2 Dokumen	2 Dokumen	240.833.000,00	240.833.000,00	90.251.900,00	-150.581.100,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener Kota Yogyakarta, Jetis, Gowongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			3.900.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
5.03.02.1.01.0006		Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian																			
			Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian				618 Dokumen	618 Dokumen	117.932.800,00	117.932.800,00	96.637.800,00	-21.295.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener Kota Yogyakarta, Jetis, Gowongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			509.773.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
5.03.02.1.01.0010		Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian				4 Dokumen	4 Dokumen	122.513.500,00	122.513.500,00	117.858.500,00	-4.655.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener Kota Yogyakarta, Jetis, Gowongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			618.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian				2 Dokumen	2 Dokumen	33.773.400,00	33.773.400,00	23.442.400,00	-10.331.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener Kota Yogyakarta, Jetis, Gowongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			425.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.02	Mutasi dan Promosi ASN	Terlaksananya Mutasi dan Promosi ASN				100 %	100 %	979.609.200,00	956.541.200,00	647.540.700,00	-332.068.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemda DIY, ASN Pemda DIY dan ASN Luar Pemda DIY		1.558.409.790,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah				200 Dokumen	200 Dokumen	47.168.200,00	47.168.200,00	43.938.200,00	-3.230.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener Kota Yogyakarta, Jetis, Gowongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			265.302.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN																		
			Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				2 Laporan	2 Laporan	71.155.000,00	71.155.000,00	66.215.000,00	-4.940.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener Kota Yogyakarta, Jetis, Gowongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			444.141.390,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	861.286.000,00	838.218.000,00	537.387.500,00	-323.898.500,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener Kota Yogyakarta, Jetis, Gowongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			848.966.400,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Terlaksananya Pengembangan Kompetensi ASN				100 %	100 %	1.207.266.900,00	1.673.170.900,00	1.549.993.400,00	342.726.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemda DIY, ASN Pemda DIY dan ASN Luar Pemda DIY		9.980.478.309,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.03.0002	Pengelolaan Assessment Center																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Assessment Center				6 Dokumen	6 Dokumen	349.064.800,00	349.064.800,00	327.748.700,00	-21.316.100,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener Kota Yogyakarta, Jetis, Gowongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			1.282.767.500,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.03.0003	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	29.662.400,00	29.662.400,00	27.842.000,00	-1.820.400,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener Kota Yogyakarta, Jetis, Gowongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			262.696.500,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola				1 Dokumen	2 Dokumen	205.898.200,00	672.398.200,00	634.179.200,00	428.281.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener Kota Yogyakarta, Jetis, Gowongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			5.203.855.022,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.03.0005	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat				1 Dokumen	1 Dokumen	594.129.400,00	593.533.400,00	534.361.400,00	-59.768.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener Kota Yogyakarta, Jetis, Gowongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			2.924.176.287,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.03.0010	Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN																		
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN				5 Orang	5 Orang	5.576.450,00	5.576.450,00	5.576.450,00	0,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener Kota Yogyakarta, Jetis, Gowongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			174.332.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.03.0013	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB						
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)							
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21						
			Jumlah Fungsional ASN yang Dibina				115 Orang	115 Orang	22.935.650,00	22.935.650,00	20.285.650,00	-2.650.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener Kota Yogyakarta, Jetis, Gowongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			132.651.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH						
	5.03.02.1.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Terlaksananya Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				100 %	100 %	268.082.700,00	268.082.700,00	233.933.700,00	-34.149.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemda DIY, ASN Pemda DIY dan ASN Luar Pemda DIY		1.242.159.362,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH						
	5.03.02.1.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur																								
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				4 Dokumen	4 Dokumen	24.022.000,00	24.022.000,00	18.580.000,00	-5.442.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener Kota Yogyakarta, Jetis, Gowongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			63.353.803,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH						
	5.03.02.1.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai																								
			Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan				12 Orang	12 Orang	165.994.000,00	165.994.000,00	139.087.000,00	-26.907.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			977.205.559,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH						
	5.03.02.1.04.0005	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai																								
			Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa				460 Orang	460 Orang	20.368.000,00	20.368.000,00	20.368.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Gowongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			27.600.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH						
	5.03.02.1.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN																								
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan				545 Orang	545 Orang	45.107.350,00	45.107.350,00	43.307.350,00	-1.800.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Gowongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			160.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH						
	5.03.02.1.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN																								
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN				1 Laporan	1 Laporan	12.591.350,00	12.591.350,00	12.591.350,00	0,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener Kota Yogyakarta, Jetis, Gowongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			14.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH						
		<b>BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>																	<b>25.279.485.145,00</b>	<b>26.429.477.000,00</b>	<b>25.127.497.955,00</b>	<b>-151.987.190,00</b>			<b>30.091.355.157,00</b>	
	<b>4</b>	<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>							<b>2.039.785.000,00</b>	<b>1.052.297.800,00</b>	<b>836.239.650,00</b>	<b>-1.203.545.350,00</b>							<b>2.058.123.000,00</b>							
	<b>4.01</b>	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>							<b>2.039.785.000,00</b>	<b>1.052.297.800,00</b>	<b>836.239.650,00</b>	<b>-1.203.545.350,00</b>							<b>2.058.123.000,00</b>							
1.	<b>4.01.10</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN</b>	<b>Persentase kepuasan peserta atas layanan kediklatan minimal tinggi</b>				<b>87 %</b>	<b>87 %</b>	<b>2.039.785.000,00</b>	<b>1.052.297.800,00</b>	<b>836.239.650,00</b>	<b>18.338.000,00</b>							<b>2.058.123.000,00</b>							
	4.01.10.5.02	Peningkatan Budaya Pemerintahan	Tercapainya peningkatan implementasi budaya pemerintahan				100 %	100 %	2.039.785.000,00	1.052.297.800,00	836.239.650,00	-1.203.545.350,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Provinsi DI Yogyakarta		2.058.123.000,00	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN						
	4.01.10.5.02.0003	Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan																								
			Jumlah PNS yang Ikut Diklat Keistimewaan				240 Orang	190 Orang	2.039.785.000,00	1.052.297.800,00	836.239.650,00	-1.203.545.350,00	Kab. Bantul, Kasihan, Tamantirto	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			2.058.123.000,00	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN						
	<b>5</b>	<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>							<b>23.239.700.145,00</b>	<b>25.377.179.200,00</b>	<b>24.291.258.305,00</b>	<b>1.051.558.160,00</b>							<b>28.033.232.157,00</b>							
	<b>5.04</b>	<b>PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>							<b>23.239.700.145,00</b>	<b>25.377.179.200,00</b>	<b>24.291.258.305,00</b>	<b>1.051.558.160,00</b>							<b>28.033.232.157,00</b>							
1.	<b>5.04.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>				<b>90 Angka</b>	<b>90 Angka</b>	<b>14.518.982.395,00</b>	<b>14.599.858.450,00</b>	<b>15.181.642.405,00</b>	<b>3.056.340.105,00</b>							<b>17.575.322.500,00</b>							
	5.04.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah; Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD; Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100 %	100 %	15.024.000,00	15.024.000,00	15.024.000,00	0,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Provinsi DI Yogyakarta		122.122.500,00	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN						
	5.04.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																								
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	5.385.800,00	5.385.800,00	5.385.800,00	0,00	Kab. Bantul, Kasihan, Tamantirto	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			51.122.500,00	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN						

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
5.04.01.1.01.0004		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD					4 Dokumen	4 Dokumen	7.958.000,00	7.958.000,00	7.958.000,00	0,00	Kab. Bantul, Kasihan, Tamantirto	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			30.000.000,00	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5.04.01.1.01.0007		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					3 Laporan	3 Laporan	1.680.200,00	1.680.200,00	1.680.200,00	0,00	Kab. Bantul, Kasihan, Tamantirto	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			41.000.000,00	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5.04.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN; Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD; Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD; Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					100 %	100 %	10.701.523.855,00	10.734.359.910,00	11.192.365.865,00	490.842.010,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Provinsi DI Yogyakarta		11.656.500.000,00	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5.04.01.1.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					76 Orang/ Bulan	76 Orang/ Bulan	10.678.393.855,00	10.711.229.910,00	11.169.235.865,00	490.842.010,00	Kab. Bantul, Kasihan, Tamantirto	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			11.600.000.000,00	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5.04.01.1.02.0003		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					12 Dokumen	12 Dokumen	14.330.000,00	14.330.000,00	14.330.000,00	0,00	Kab. Bantul, Kasihan, Tamantirto	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			31.000.000,00	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5.04.01.1.02.0005		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					1 Laporan	1 Laporan	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	Kab. Bantul, Kasihan, Tamantirto	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			7.500.000,00	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5.04.01.1.02.0007		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD					14 Laporan	14 Laporan	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	Kab. Bantul, Kasihan, Tamantirto	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			18.000.000,00	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5.04.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					100 %	100 %	13.293.000,00	13.293.000,00	13.287.000,00	-6.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Provinsi DI Yogyakarta		19.200.000,00	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5.04.01.1.03.0006		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					2 Laporan	2 Laporan	13.293.000,00	13.293.000,00	13.287.000,00	-6.000,00	Kab. Bantul, Kasihan, Tamantirto	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			19.200.000,00	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5.04.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi; Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai					100 %	100 %	12.360.000,00	11.764.000,00	1.628.000,00	-10.732.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Provinsi DI Yogyakarta		275.000.000,00	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5.04.01.1.05.0005		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai					2 Dokumen	2 Dokumen	10.860.000,00	10.264.000,00	128.000,00	-10.732.000,00	Kab. Bantul, Kasihan, Tamantirto	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			95.000.000,00	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5.04.01.1.05.0009		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					20 Orang	20 Orang	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	Kab. Bantul, Kasihan, Tamantirto	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			180.000.000,00	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5.04.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; Penyediaan Peralatan Rumah Tangga; Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan; Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					100 %	100 %	181.660.500,00	177.832.500,00	150.074.500,00	-31.586.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Provinsi DI Yogyakarta		1.330.500.000,00	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5.04.01.1.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					1 Paket	1 Paket	11.980.000,00	11.980.000,00	11.980.000,00	0,00	Kab. Bantul, Kasihan, Tamantirto	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			50.000.000,00	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5.04.01.1.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					3 Paket	3 Paket	13.579.700,00	13.579.700,00	13.447.700,00	-132.000,00	Kab. Bantul, Kasihan, Tamantirto	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			44.000.000,00	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.04.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				7 Paket	7 Paket	16.760.800,00	16.760.800,00	16.760.800,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Kasihan, Tamantirto	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			22.000.000,00	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.04.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	14.231.000,00	14.231.000,00	11.159.000,00	-3.072.000,00	Kab. Bantul, Kasihan, Tamantirto	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			42.000.000,00	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.04.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	64.725.000,00	60.897.000,00	36.343.000,00	-28.382.000,00	Kab. Bantul, Kasihan, Tamantirto	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			1.100.000.000,00	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.04.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	60.384.000,00	60.384.000,00	60.384.000,00	0,00	Kab. Bantul, Kasihan, Tamantirto	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			72.500.000,00	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.04.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan; Pengadaan Mebel; Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				100 %	100 %	77.730.000,00	77.730.000,00	226.710.000,00	148.980.000,00		-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Provinsi DI Yogyakarta			100.000.000,00	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.04.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				9 Unit	14 Unit	77.730.000,00	77.730.000,00	226.710.000,00	148.980.000,00	Kab. Bantul, Kasihan, Tamantirto	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			100.000.000,00	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.04.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat; Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik; Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				100 %	100 %	2.789.998.440,00	2.828.998.440,00	2.649.847.440,00	-140.151.000,00		-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Provinsi DI Yogyakarta			2.226.000.000,00	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.04.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	2.820.000,00	2.820.000,00	2.820.000,00	0,00	Kab. Bantul, Kasihan, Tamantirto	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			6.000.000,00	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.04.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	449.215.440,00	488.215.440,00	488.215.440,00	39.000.000,00	Kab. Bantul, Kasihan, Tamantirto	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			720.000.000,00	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.04.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	2.337.963.000,00	2.337.963.000,00	2.158.812.000,00	-179.151.000,00	Kab. Bantul, Kasihan, Tamantirto	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			1.500.000.000,00	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.04.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan, Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan; Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya; Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya; Pemeliharaan Mebel				100 %	100 %	727.392.600,00	740.856.600,00	932.705.600,00	205.313.000,00		-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Provinsi DI Yogyakarta			1.846.000.000,00	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.04.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	24.358.000,00	24.358.000,00	24.358.000,00	0,00	Kab. Bantul, Kasihan, Tamantirto	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			24.000.000,00	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.04.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				12 Unit	12 Unit	185.835.600,00	185.835.600,00	185.835.600,00	0,00	Kab. Bantul, Kasihan, Tamantirto	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			156.000.000,00	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.04.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				33 Unit	33 Unit	11.428.000,00	11.428.000,00	11.428.000,00	0,00	Kab. Bantul, Kasihan, Tamantirto	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			12.000.000,00	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.04.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	303.550.000,00	303.550.000,00	495.399.000,00	191.849.000,00	Kab. Bantul, Kasihan, Tamantirto	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			1.474.000.000,00	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.04.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				333 Unit	333 Unit	202.221.000,00	215.685.000,00	215.685.000,00	13.464.000,00	Kab. Bantul, Kasihan, Tamantirto	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			180.000.000,00	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
2.	5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase capaian pengembangan sumber daya manusia melalui pelatihan				99,99 %	99,99 %	8.720.717.750,00	10.777.320.750,00	9.109.615.900,00	1.737.191.907,00							10.457.909.657,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	5.04.02.1.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	Terlaksananya Pengembangan Kompetensi Teknis				100 %	100 %	116.073.500,00	115.775.500,00	101.435.500,00	-14.638.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Provinsi DI Yogyakarta		2.909.000.000,00	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
	5.04.02.1.01.0002	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum																			
			Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun				5 Dokumen	5 Dokumen	42.773.000,00	42.773.000,00	35.633.000,00	-7.140.000,00	Kab. Bantul, Kasihan, Tamantirto	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			335.000.000,00	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
	5.04.02.1.01.0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum																			
			Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi				30 Orang	30 Orang	73.300.500,00	73.002.500,00	65.802.500,00	-7.498.000,00	Kab. Bantul, Kasihan, Tamantirto	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			2.574.000.000,00	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
	5.04.02.1.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Terlaksananya Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional				100 %	100 %	8.604.644.250,00	10.661.545.250,00	9.008.180.400,00	403.536.150,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Provinsi DI Yogyakarta		7.548.909.657,00	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
	5.04.02.1.02.0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional																			
			Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, dan Pengembangan Kompetensi,				4 Dokumen	4 Dokumen	282.351.800,00	303.861.800,00	283.824.800,00	1.473.000,00	Kab. Bantul, Kasihan, Tamantirto	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			684.000.000,00	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
	5.04.02.1.02.0004	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar																			
			Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar				1 Laporan	1 Laporan	71.104.500,00	71.104.500,00	56.224.500,00	-14.880.000,00	Kab. Bantul, Kasihan, Tamantirto	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			167.483.110,00	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
	5.04.02.1.02.0005	Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga																			
			Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga				7 Dokumen	12 Dokumen	38.852.400,00	1.102.809.400,00	833.369.400,00	794.517.000,00	Kab. Bantul, Kasihan, Tamantirto	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			339.426.547,00	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
	5.04.02.1.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan																			
			Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan				3482 Orang	3435 Orang	8.212.335.550,00	9.183.769.550,00	7.834.761.700,00	-377.573.850,00	Kab. Bantul, Kasihan, Tamantirto	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			6.358.000.000,00	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
		<b>BADAN PENGHUBUNG DAERAH</b>								<b>13.309.490.195,00</b>	<b>12.412.792.702,00</b>	<b>11.644.852.414,00</b>	<b>-1.664.637.781,00</b>						<b>16.646.892.799,00</b>		
	<b>2</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>							<b>5.653.713.800,00</b>	<b>4.170.013.000,00</b>	<b>3.562.035.000,00</b>	<b>-2.091.678.800,00</b>							<b>5.773.392.799,00</b>		
	<b>2.22</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN</b>							<b>5.653.713.800,00</b>	<b>4.170.013.000,00</b>	<b>3.562.035.000,00</b>	<b>-2.091.678.800,00</b>							<b>5.773.392.799,00</b>		
	<b>1.</b>	<b>2.22.08</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN</b>				<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>5.653.713.800,00</b>	<b>4.170.013.000,00</b>	<b>3.562.035.000,00</b>	<b>119.678.999,00</b>							<b>5.773.392.799,00</b>		
		2.22.08.5.06	Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan			100 %	100 %	311.200.000,00	233.200.000,00	233.200.000,00	-78.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Anjungan Daerah Istimewa Yogyakarta, Wisma Jogja dan Griya Jogja		250.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH	
		2.22.08.5.06.0001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya				12 Unit	4 Unit	311.200.000,00	233.200.000,00	233.200.000,00	-78.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			250.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.22.08.5.08	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	Terlaksananya Dukungan Pengembangan Industri Kreatif				100 %	100 %	1.318.385.000,00	950.000.000,00	846.236.000,00	-472.149.000,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	UMKM DIY dan Masyarakat		1.200.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	2.22.08.5.08.0003	Pengembangan Industri Kreatif																		
			Jumlah Industri Kreatif yang Dikembangkan				40 Unit	2 Unit	1.318.385.000,00	950.000.000,00	846.236.000,00	-472.149.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			1.200.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	2.22.08.5.09	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Terlaksananya dukungan penyelenggaraan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya				100 %	100 %	4.024.128.800,00	2.986.813.000,00	2.482.599.000,00	-1.541.529.800,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	UMKM DIY, Seniman, OPD Terkait dan Masyarakat		4.323.392.799,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	2.22.08.5.09.0012	Gelar Seni Budaya Daerah																		
			Jumlah Laporan Gelar Seni Budaya Daerah				3 Laporan	3 Laporan	4.024.128.800,00	2.986.813.000,00	2.482.599.000,00	-1.541.529.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			4.323.392.799,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																		
	5.07	PENGELOLAAN PENGHUBUNG																		
	1. 5.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI																		
	5.07.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100 %	100 %	12.150.000,00	12.150.000,00	6.054.000,00	-6.096.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Badan Penghubung Daerah DIY		58.500.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.07.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	7.250.000,00	7.250.000,00	1.484.000,00	-5.766.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			40.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.07.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	1.120.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			4.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.07.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	1.470.000,00	1.470.000,00	1.470.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			4.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.07.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	2.310.000,00	2.310.000,00	1.980.000,00	-330.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			10.500.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.07.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Trivulanan/Semesteran SKPD				100 %	100 %	5.480.594.519,00	6.068.261.826,00	5.965.699.738,00	485.105.219,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Badan Penghubung Daerah DIY		7.007.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.07.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				40 Orang/ Bulan	40 Orang/ Bulan	5.466.653.519,00	6.054.320.826,00	5.951.782.738,00	485.129.219,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			6.900.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.07.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	10.596.000,00	10.596.000,00	10.572.000,00	-24.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			75.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.07.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	705.000,00	705.000,00	705.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			2.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH	
5.07.01.1.02.0007		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Trivulanan/Semesteran SKPD																			
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Trivulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Trivulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	2.640.000,00	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			30.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH	
5.07.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				100 %	100 %	13.236.000,00	13.236.000,00	13.212.000,00	-24.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Badan Penghubung Daerah DIY		22.500.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH	
5.07.01.1.03.0006		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																			
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	13.236.000,00	13.236.000,00	13.212.000,00	-24.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			22.500.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH	
5.07.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100 %	100 %	128.621.600,00	127.957.600,00	72.334.600,00	-56.287.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Badan Penghubung Daerah DIY		600.500.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH	
5.07.01.1.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	11.190.800,00	11.190.800,00	13.270.800,00	2.080.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			30.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH	
5.07.01.1.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				7 Paket	7 Paket	27.615.000,00	27.615.000,00	13.540.000,00	-14.075.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			82.500.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH	
5.07.01.1.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	5 Paket	14.616.800,00	14.616.800,00	15.530.800,00	914.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			30.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH	
5.07.01.1.06.0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	2.343.000,00	2.343.000,00	2.343.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			8.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH	
5.07.01.1.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	2 Laporan	72.856.000,00	72.192.000,00	27.650.000,00	-45.206.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			450.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH	
5.07.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dan Pengadaan Meubeler				100 %	100 %	40.840.000,00	40.840.000,00	12.000.000,00	-28.840.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Badan Penghubung Daerah DIY		0,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH	
5.07.01.1.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				7 Unit	7 Unit	40.840.000,00	40.840.000,00	12.000.000,00	-28.840.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			0,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH	
5.07.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				100 %	100 %	1.438.565.676,00	1.438.565.676,00	1.438.565.676,00	0,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Badan Penghubung Daerah DIY		1.435.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH	
5.07.01.1.08.0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	11.600.000,00	11.600.000,00	11.600.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			35.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH	
5.07.01.1.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	308.531.500,00	308.531.500,00	308.531.500,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			500.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH	
5.07.01.1.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	1.118.434.176,00	1.118.434.176,00	1.118.434.176,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			900.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH	
5.07.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				100 %	100 %	356.460.000,00	356.460.000,00	392.894.000,00	36.434.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Badan Penghubung Daerah DIY		1.150.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH	
5.07.01.1.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				12 Unit	12 Unit	350.860.000,00	350.860.000,00	337.894.000,00	-12.966.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			550.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH	
5.07.01.1.09.0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				-	1 Unit	0,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			550.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH	
5.07.01.1.09.0010		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				28 Unit	28 Unit	5.600.000,00	5.600.000,00	5.000.000,00	-600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			50.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH	
2.	5.07.02	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	Persentase layanan yang diberikan Banhubda DIY				100 %	100 %	185.308.600,00	185.308.600,00	182.057.400,00	414.691.400,00							600.000.000,00		
5.07.02.1.01		Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Terlaksananya peningkatan kualitas pelayanan publik bagi aparatur dan masyarakat, dan fasilitasi pameran produk unggulan dan pelestarian seni budaya				100 %	100 %	185.308.600,00	185.308.600,00	182.057.400,00	-3.251.200,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan DPRD DIY, Tamu Penginapan, Kementrian/lembaga Pemerintah, Badan Penghubung Daerah se Indonesia, UMKM DIY, Seniman dan Masyarakat		600.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH	
5.07.02.1.01.0001		Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat																			
			Jumlah Laporan Hasil Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat yang Ditingkatkan				5 Laporan	5 Laporan	113.985.600,00	113.985.600,00	110.734.400,00	-3.251.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			300.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH	
5.07.02.1.01.0004		Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya																			
			Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya				2 Laporan	2 Laporan	71.323.000,00	71.323.000,00	71.323.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			300.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH	
			<b>INSPEKTORAT</b>							27.251.720.750,00	28.284.119.874,00	27.675.275.356,00	423.554.606,00						25.549.792.095,00		
6		UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN							27.251.720.750,00	28.284.119.874,00	27.675.275.356,00	423.554.606,00							25.549.792.095,00		
6.01		INSPEKTORAT DAERAH							27.251.720.750,00	28.284.119.874,00	27.675.275.356,00	423.554.606,00							25.549.792.095,00		
1.	6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				87 Angka	87 Angka	20.960.685.100,00	21.156.924.224,00	20.554.079.706,00	-1.817.084.805,00							19.143.600.295,00		
6.01.01.1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah, Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, serta Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100 %	100 %	6.949.400,00	6.949.400,00	6.949.400,00	0,00			-	-	Inspektorat DIY		6.945.500,00	INSPEKTORAT	
6.01.01.1.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	3.697.000,00	3.697.000,00	3.697.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			5.393.500,00	INSPEKTORAT	
6.01.01.1.01.0004		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																			
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	1.960.000,00	1.960.000,00	1.960.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			256.000,00	INSPEKTORAT	
6.01.01.1.01.0007		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																			
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	5 Laporan	1.292.400,00	1.292.400,00	1.292.400,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan		1.296.000,00	INSPEKTORAT	
6.01.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyediaan gaji dan tunjangan, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Trivulanan/ Semesteran SKPD, Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				-	100 %	17.525.857.870,00	17.601.120.994,00	16.996.956.476,00	-528.901.394,00			-	-	Inspektorat DIY		15.412.989.945,00	INSPEKTORAT	
6.01.01.1.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				98 Orang/ Bulan	106 Orang/ Bulan	17.514.904.470,00	17.588.787.594,00	16.984.623.076,00	-530.281.394,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			15.369.591.645,00	INSPEKTORAT
6.01.01.1.02.0003		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	7.936.000,00	9.316.000,00	9.316.000,00	1.380.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			40.320.800,00	INSPEKTORAT
6.01.01.1.02.0007		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	18 Laporan	3.017.400,00	3.017.400,00	3.017.400,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			3.077.500,00	INSPEKTORAT
6.01.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya penatausahaan barang milik daerah pada SKPD				100 %	100 %	14.299.400,00	14.299.400,00	14.299.400,00	0,00			-	-	Inspektorat DIY		14.299.500,00	INSPEKTORAT
6.01.01.1.03.0006		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				6 Laporan	6 Laporan	14.299.400,00	14.299.400,00	14.299.400,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			14.299.500,00	INSPEKTORAT
6.01.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai; Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				100 %	100 %	287.858.200,00	427.859.200,00	443.375.200,00	155.517.000,00			-	-	Inspektorat DIY		283.645.800,00	INSPEKTORAT
6.01.01.1.05.0005		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				2 Dokumen	2 Dokumen	650.000,00	650.000,00	650.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			640.000,00	INSPEKTORAT
6.01.01.1.05.0009		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				95 Orang	223 Orang	287.208.200,00	427.209.200,00	442.725.200,00	155.517.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			283.005.800,00	INSPEKTORAT
6.01.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan peralatan rumah tangga, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD serta Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				100 %	100 %	385.728.000,00	366.703.000,00	249.865.000,00	-135.863.000,00			-	-	Inspektorat DIY		501.739.500,00	INSPEKTORAT
6.01.01.1.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.260.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.155.000,00	INSPEKTORAT
6.01.01.1.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	13.676.000,00	13.676.000,00	13.676.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			13.631.000,00	INSPEKTORAT
6.01.01.1.06.0003		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	38.241.000,00	38.241.000,00	38.241.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			29.379.500,00	INSPEKTORAT
6.01.01.1.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	7.548.000,00	7.548.000,00	7.548.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			4.005.000,00	INSPEKTORAT
6.01.01.1.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	235.003.000,00	215.978.000,00	99.140.000,00	-135.863.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			363.569.000,00	INSPEKTORAT
6.01.01.1.06.0011		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	90.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			90.000.000,00	INSPEKTORAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	6.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Pengadaan Mebel, Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				100 %	100 %	14.800.000,00	14.800.000,00	252.240.000,00	237.440.000,00			-	-	Inspektorat DIY		206.350.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	24 Unit	14.800.000,00	14.800.000,00	252.240.000,00	237.440.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			206.350.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				100 %	100 %	1.748.817.600,00	1.748.817.600,00	1.645.131.600,00	-103.686.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Inspektorat DIY		1.516.130.600,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	2.440.000,00	2.440.000,00	3.760.000,00	1.320.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			2.440.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	344.339.600,00	344.339.600,00	344.339.600,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			344.339.600,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	29.160.000,00	29.160.000,00	29.160.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1.372.878.000,00	1.372.878.000,00	1.267.872.000,00	-105.006.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.169.351.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan; Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan; Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya; Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya; dan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				100 %	100 %	976.374.630,00	976.374.630,00	945.262.630,00	-31.112.000,00			-	-	Inspektorat DIY		1.201.499.450,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	37.376.000,00	37.376.000,00	37.376.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			35.576.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinan				16 Unit	16 Unit	355.779.600,00	355.779.600,00	330.167.600,00	-25.612.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			398.207.600,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				86 Unit	86 Unit	254.534.850,00	254.534.850,00	249.034.850,00	-5.500.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			326.865.850,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	142.350.000,00	142.350.000,00	142.350.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			196.350.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	186.334.180,00	186.334.180,00	186.334.180,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			244.500.000,00	INSPEKTORAT
2.	6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase pengawasan yang sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) bidang Pemerintahan, Sosial Budaya, Perekonomian serta Sarana dan Prasarana Aparatur				100 %	100 %	5.964.975.500,00	6.801.135.500,00	6.795.135.500,00	-652.063.700,00							5.312.911.800,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
6.01.02.1.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah, Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah, Reviu Laporan Kinerja, Reviu Laporan Keuangan, Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota, Kerjasama Pengawasan Internal, Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP				100 %	100 %	5.196.282.900,00	5.882.442.900,00	5.876.442.900,00	680.160.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	UPTD, OPD se-DIY dan Kabupaten/Kota se-DIY		4.696.648.200,00	INSPEKTORAT
6.01.02.1.01.0001		Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				16 Laporan	16 Laporan	424.767.000,00	424.767.000,00	424.767.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan		318.307.000,00	INSPEKTORAT	
6.01.02.1.01.0002		Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				190 Laporan	190 Laporan	3.195.695.900,00	3.735.695.900,00	3.735.695.900,00	540.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan		2.910.008.900,00	INSPEKTORAT	
6.01.02.1.01.0003		Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja				113 Laporan	113 Laporan	861.578.750,00	935.018.750,00	935.018.750,00	73.440.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan		856.745.700,00	INSPEKTORAT	
6.01.02.1.01.0004		Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan				38 Laporan	38 Laporan	216.164.600,00	216.164.600,00	216.164.600,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan		215.200.000,00	INSPEKTORAT	
6.01.02.1.01.0005		Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota				21 Laporan	21 Laporan	471.971.150,00	544.691.150,00	544.691.150,00	72.720.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan		370.221.000,00	INSPEKTORAT	
6.01.02.1.01.0006		Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk				1 Kesepakatan	1 Kesepakatan	17.730.000,00	17.730.000,00	11.730.000,00	-6.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan		17.730.000,00	INSPEKTORAT	
6.01.02.1.01.0007		Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP				2 Dokumen	2 Dokumen	8.375.500,00	8.375.500,00	8.375.500,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan		8.435.600,00	INSPEKTORAT	
6.01.02.1.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Terlaksananya Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah, Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu				100 %	100 %	768.692.600,00	918.692.600,00	918.692.600,00	150.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	UPTD, OPD se-DIY dan Kabupaten/Kota se-DIY		616.263.600,00	INSPEKTORAT
6.01.02.1.02.0001		Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani				2 Laporan	2 Laporan	16.818.600,00	16.818.600,00	16.818.600,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan		16.822.500,00	INSPEKTORAT	
6.01.02.1.02.0002		Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu				90 Laporan	90 Laporan	751.874.000,00	901.874.000,00	901.874.000,00	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan		599.441.100,00	INSPEKTORAT	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
3.	6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase kepatuhan pelaporan gratifikasi, whistle blowing system, dan benturan kepentingan				100 %	100 %	326.060.150,00	326.060.150,00	326.060.150,00	767.219.850,00							1.093.280.000,00	
	6.01.03.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan, Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan				100 %	100 %	27.272.900,00	27.272.900,00	27.272.900,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	UPTD, OPD se-DIY dan Kabupaten/Kota se-DIY		320.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.1.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan																		
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun				1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	325.000,00	325.000,00	325.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan		320.000,00	INSPEKTORAT	
	6.01.03.1.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan																		
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan yang Disusun				2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	26.947.900,00	26.947.900,00	26.947.900,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan		0,00	INSPEKTORAT	
	6.01.03.1.02	Pendampingan dan Asistensi	Terlaksananya Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah, Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas				100 %	100 %	298.787.250,00	298.787.250,00	298.787.250,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	UPTD, OPD se-DIY dan Kabupaten/Kota se-DIY	1.092.960.000,00	INSPEKTORAT	
	6.01.03.1.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah				37 Perangkat Daerah	37 Perangkat Daerah	1.505.000,00	1.505.000,00	1.505.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan		1.632.000,00	INSPEKTORAT	
	6.01.03.1.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi				37 Perangkat Daerah	37 Perangkat Daerah	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan		2.528.000,00	INSPEKTORAT	
	6.01.03.1.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi																		
			Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				4 Kegiatan	4 Kegiatan	292.182.250,00	292.182.250,00	292.182.250,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan		926.100.000,00	INSPEKTORAT	
	6.01.03.1.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas				37 Perangkat Daerah	37 Perangkat Daerah	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan		162.700.000,00	INSPEKTORAT	
		<b>BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>							<b>31.302.714.723,00</b>	<b>30.017.234.794,00</b>	<b>27.776.947.188,00</b>	<b>-3.525.767.535,00</b>							<b>37.820.413.600,00</b>	
2		<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>							<b>3.930.000.000,00</b>	<b>2.624.589.500,00</b>	<b>1.691.713.700,00</b>	<b>-2.238.286.300,00</b>							<b>3.993.000.000,00</b>	
	2.22	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN</b>							<b>3.930.000.000,00</b>	<b>2.624.589.500,00</b>	<b>1.691.713.700,00</b>	<b>-2.238.286.300,00</b>							<b>3.993.000.000,00</b>	
1.	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Jumlah Lembaga yang Terbina Sadar Kerukunan				3 Lembaga	3 Lembaga	3.930.000.000,00	2.624.589.500,00	1.691.713.700,00	63.000.000,00							3.993.000.000,00	
	2.22.08.5.09	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Jumlah Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya				5 Dokumen	3 Dokumen	3.930.000.000,00	2.624.589.500,00	1.691.713.700,00	-2.238.286.300,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Masyarakat, Mahasiswa, Ormas, Orpol, Ormas Kepemudanaan	3.993.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	2.22.08.5.09.0021	Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya				5 Dokumen	3 Dokumen	3.930.000.000,00	2.624.589.500,00	1.691.713.700,00	-2.238.286.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			3.993.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM							27.372.714.723,00	27.392.645.294,00	26.085.233.488,00	-1.287.481.235,00							33.827.413.600,00	
	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							27.372.714.723,00	27.392.645.294,00	26.085.233.488,00	-1.287.481.235,00							33.827.413.600,00	
1.	8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				-	96,96 Angka	10.133.020.623,00	10.203.037.444,00	10.128.734.238,00	2.927.668.977,00							13.060.689.600,00	
	8.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan penyusunan DPA SKPD, Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100 %	100 %	15.200.000,00	15.200.000,00	15.200.000,00	0,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY		111.108.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			31.922.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			44.153.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	3 Laporan	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			35.033.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				100 %	100 %	6.933.098.115,00	7.003.759.686,00	7.055.331.680,00	122.233.565,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY		9.831.353.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				47 Orang/ Bulan	47 Orang/ Bulan	6.909.003.115,00	6.979.664.686,00	7.031.236.680,00	122.233.565,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			9.704.721.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	8.095.000,00	8.095.000,00	8.095.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			53.427.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			26.620.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				14 Laporan	14 Laporan	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			46.585.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				-	2 Laporan	12.050.000,00	12.050.000,00	12.050.000,00	0,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY		12.150.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	12.050.000,00	12.050.000,00	12.050.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			12.150.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, penyediaan peralatan rumah tangga, penyediaan barang cetakan dan penggandaan, penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor dan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100 %	100 %	387.839.400,00	356.286.400,00	230.411.200,00	-157.428.200,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY		793.333.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	8.492.000,00	8.492.000,00	8.492.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			33.940.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	43.665.400,00	43.665.400,00	39.309.200,00	-4.356.200,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			70.526.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																			
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	21.860.000,00	6.260.000,00	6.260.000,00	-15.600.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			60.802.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	32.396.000,00	32.396.000,00	30.262.000,00	-2.134.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			46.155.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	281.426.000,00	265.473.000,00	146.088.000,00	-135.338.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			581.910.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				100 %	100 %	40.200.000,00	40.200.000,00	40.200.000,00	0,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY		177.449.600,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	40.200.000,00	40.200.000,00	40.200.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			177.449.600,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksanakannya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				100 %	100 %	1.214.348.000,00	1.233.332.000,00	1.233.332.000,00	18.984.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY		1.411.956.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	229.640.000,00	242.624.000,00	242.624.000,00	12.984.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			316.993.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	67.464.000,00	67.464.000,00	67.464.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			52.348.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	917.244.000,00	923.244.000,00	923.244.000,00	6.000.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			1.042.615.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya; Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				100 %	100 %	1.530.285.108,00	1.542.209.358,00	1.542.209.358,00	11.924.250,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY		723.340.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	46.561.000,00	46.561.000,00	46.561.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			39.676.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				10 Unit	10 Unit	192.327.000,00	192.327.000,00	192.327.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			338.640.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				67 Unit	67 Unit	99.601.000,00	99.601.000,00	99.601.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			146.024.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	1.191.796.108,00	1.203.720.358,00	1.203.720.358,00	11.924.250,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			199.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
2.	8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Skor Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat dan berpendapat antar masyarakat dalam Aspek Kebebasan IDI				30,03 Angka	30,03 Angka	2.867.486.800,00	2.860.200.550,00	2.444.785.100,00	709.395.200,00							3.576.882.000,00		
	8.01.02.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan				100 %	100 %	2.867.486.800,00	2.860.200.550,00	2.444.785.100,00	-422.701.700,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Masyarakat dan Pelajar		3.576.882.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.02.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Bumi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			207.705.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan																		
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				2 Laporan	2 Laporan	100.755.000,00	100.755.000,00	67.554.000,00	-33.201.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			89.177.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.1.01.0007	Penggangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila																		
			Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila				38 Orang	38 Orang	55.895.000,00	55.895.000,00	51.959.000,00	-3.936.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			65.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.1.01.0008	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakan dan Purnapaskibraka																		
			Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka				2 Dokumen	2 Dokumen	337.208.100,00	353.190.550,00	85.452.100,00	-251.756.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Bumi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			375.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.1.01.0009	Pelaksanaan tugas Paskibraka																		
			Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas Paskibraka				1 Dokumen	1 Dokumen	395.511.000,00	392.727.000,00	329.785.000,00	-65.726.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			440.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.1.01.0012	Pembentukan Paskibraka																		
			Jumlah Paskibraka				38 Orang	38 Orang	1.978.117.700,00	1.957.633.000,00	1.910.035.000,00	-68.082.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Bumi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			2.400.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
3.	8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Skor Terjeminnya hak memilih dan dipilih dalam pemilu untuk seluruh kelompok masyarakat dalam aspek Kebebasan IDI				70,42 Angka	70,42 Angka	11.230.614.500,00	11.214.322.500,00	11.091.739.500,00	1.548.863.500,00							12.779.478.000,00	
	8.01.03.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik				100 %	100 %	11.230.614.500,00	11.214.322.500,00	11.091.739.500,00	-138.875.000,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Masyarakat, Mahasiswa, Pelajar, Orpol		12.779.478.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				700 Orang	400 Orang	11.061.766.500,00	11.061.170.500,00	10.958.327.500,00	-103.439.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			12.209.573.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				2 Laporan	2 Laporan	168.848.000,00	153.152.000,00	133.412.000,00	-35.436.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			569.905.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
4.	8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Skor Terjeminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, berpendapat dan berkeyakinan dalam setiap kebijakan dalam Aspek Kebebasan IDI				100 Angka	100 Angka	198.812.400,00	198.812.400,00	124.152.400,00	345.042.600,00							543.855.000,00	
	8.01.04.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan				100 %	100 %	198.812.400,00	198.812.400,00	124.152.400,00	-74.660.000,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Organisasi Kemasyarakatan		543.855.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.1.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah																		
			Jumlah Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	33.219.000,00	33.219.000,00	25.879.000,00	-7.340.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			125.750.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				150 Orang	90 Orang	90.909.000,00	90.909.000,00	45.209.000,00	-45.700.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			249.695.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				1 Laporan	1 Laporan	74.684.400,00	74.684.400,00	53.064.400,00	-21.620.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			168.410.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
5.	8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Skor Terjeminnya kebebasan berkeyakinan dalam Aspek Kebebasan IDI				88,36 Angka	88,36 Angka	626.589.800,00	625.521.800,00	481.560.900,00	908.251.200,00							1.534.841.000,00	
	8.01.05.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya				100 %	100 %	626.589.800,00	625.521.800,00	481.560.900,00	-145.028.900,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Masyarakat, Mahasiswa, Pelajar		1.534.841.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.1.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah																		
			Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	51.297.000,00	51.297.000,00	49.593.000,00	-1.704.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			95.711.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				180 Orang	150 Orang	198.639.900,00	198.639.900,00	60.303.000,00	-138.336.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			927.630.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				4 Laporan	4 Laporan	376.652.900,00	375.584.900,00	371.664.900,00	-4.988.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			511.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
6.	8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Skor Terjeminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat dan berpendapat oleh aparat negara dalam Aspek Kebebasan IDI				79,03 Angka	79,03 Angka	2.316.190.600,00	2.290.750.600,00	1.814.261.350,00	15.477.400,00							2.331.668.000,00	
	8.01.06.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial				100 %	100 %	2.316.190.600,00	2.290.750.600,00	1.814.261.350,00	-501.929.250,00			Memperkuat penyelarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Masyarakat DIY		2.331.668.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.1.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																		
			Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	5.058.800,00	5.058.800,00	2.653.800,00	-2.405.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			54.375.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				9 Laporan	9 Laporan	618.159.000,00	618.159.000,00	364.712.750,00	-253.446.250,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.1.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi				2 Dokumen	2 Dokumen	1.692.972.800,00	1.667.532.800,00	1.446.894.800,00	-246.078.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyesuaian kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			2.277.293.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

## **BAB VI PENUTUP**

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 disusun untuk menjamin tercapainya sasaran dan prioritas pembangunan daerah yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025, sebagaimana hasil pengendalian dan evaluasi hasil rencana kerja pembangunan daerah.

Dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Tahun 2025 telah dilakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap rencana program kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilakukan pada tahun 2025 sebagai adanya perubahan asumsi yang digunakan, hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan, dan juga terhadap perubahan regulasi/kebijakan dari Pemerintah Pusat.

Dokumen ini juga menjadi acuan utama dalam perumusan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (P-KUA) serta Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Dengan demikian, Perubahan RKPD Tahun 2025 diharapkan dapat mengakomodasi berbagai dinamika yang terjadi serta tetap selaras dengan tujuan pembangunan daerah.

Yogyakarta, 28 Mei 2025

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. Kepala Biro Hukum,



Hary Setiawan, S.H., M.H.

